SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan, serta peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa pembangunan daerah Kabupaten Purworejo memerlukan arah kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan sebagaimana tercermin dalam permasalahan dan isu strategis daerah, sehingga menjadi pedoman penting untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta guna memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
c. bab III : tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
d. bab IV : program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
e. bab V : penutup.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

TOLKHA AMARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025 NOMOR 27 SERI E NOMOR 23

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan dan kebudayaan memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah karena keduanya merupakan fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter. Pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sedangkan kebudayaan memperkuat identitas dan kohesi sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Keduanya saling berkaitan dan mendukung kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, pendidikan juga membantu individu mengembangkan potensi diri, meningkatkan taraf hidup, dan berkontribusi pada pembangunan. Selain itu pendidikan juga memfasilitasi pengembangan ide-ide baru dan inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan akses yang lebih luas terhadap kesempatan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

Penyelenggaraan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, selain itu pembangunan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.

Di era otonomi daerah saat ini, tuntutan dalam bidang pendidikan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menjamin ketersediaan layanan pendidikan, memperluas akses keterjangkauan layanan Pendidikan dan Kebudayaan, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, mewujudkan kesetaraan bagi semua warga negara dalam layanan pendidikan dan menjamin kepastian layanan pendidikan. Kondisi ini menuntut suatu perencanaan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang akurat, transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan kebijakan, strategi, program maupun kegiatan pembangunan dapat mengakomodir kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan di daerah.

Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang transparan dan akuntabel mengharuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berorientasi pada pemecahan masalah. Oleh karena itu kecermatan dan ketelitian mengidentifikasi permasalahan/isu-isu strategis di daerah menjadi faktor penting dalam proses tahapan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 119 Tahun 2022 Seri D Nomor 4 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dinyatakan bahwa bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo sebagai Lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dalam pengelolaan bidang pendidikan dan kebudayaan. Agar tugas tersebut dapat berjalan dengan baik maka diperlukan *perencanaan strategis*, yaitu *perencanaan yang disusun berdasarkan data yang akurat dan terkini yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025 sampai tahun 2029.*

Rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Rencana strategis yang didalamnya yang mencakup visi, misi, tujuan sasaran maupun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran menjadi pedoman bagi semua stakeholders di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, untuk merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi hasil pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo telah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan;
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. perumusan rancangan akhir;
6. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap rancangan akhir Renstra PD; dan
7. penetapan.

Renstra disusun dan dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan.

Hubungan renstra dengan dokumen perencanaan lainnya Sesuai dengan amanah Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, dokumen perencanaan pembangunan di daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Renstra SKPD yang merupakan salah satu dokumen yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Indikatif yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. Renstra yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kemudian menjadi acuan penyusunan RKPD Tahunan. Renstra Perangkat Daerah tersebut kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Dinas Badan dan selanjutnya dituangkan dalam RAPBD. Untuk lebih jelasnya hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

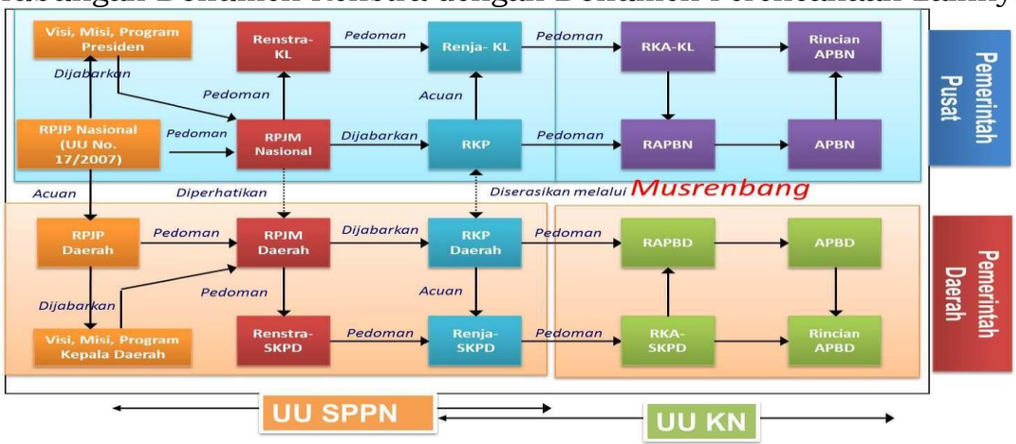

Sumber : Undang-Undang No 25 Tahun 2004

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 merupakan turunan rinci dan komprehensif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo 2025-2045, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029, Renstra Kementerian Kebudayaan Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2025-2045. Di dalam renstra ini telah dijabarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo untuk mencapai target yang ditentukan dalam RPJPD Kabupaten Purworejo 2005-2025 yang nantinya akan dirumuskan secara periodik dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo disusun berdasarkan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 Seri D Nomor 30 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 83 Seri D Nomor 30).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Renstra ini sebagai penjabaran visi, misi, strategi Bupati secara kelembagaan, serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi Kabupaten Purworejo. Misi sebagaimana diuraikan di atas adalah untuk menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan dan merumuskan kegiatan pembangunan bidang pendidikan selama 5 (lima) tahun ke depan (2025–2029), sehingga tercipta keselarasan perencanaan peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Dasar Rancangan Renja
2. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi bagi semua pihak pelaku pelaksana pendidikan (*stakeholders*)
3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi pada hasil.
4. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan strategi dan arah kebijakan di Kabupaten Purworejo dengan kewenangan dinas sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.
5. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja dinas dan jajarannya secara proporsional.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Dasar hukum penyusunan;
- 1.3 Maksud dan tujuan;
- 1.4 Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat daerah
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan
4.2 Dukungan Terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah
4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan Substansial
5.2 Kaidah Pelaksanaan
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan fungsi utamanya yaitu merumuskan kebijakan teknis pendidikan dan kebudayaan, menyelenggarakan urusan pelayanan dasar pendidikan (PAUD, SD, SMP, pendidikan nonformal), melakukan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan kualitas serta akses pendidikan masyarakat, melestarikan mengembangkan, dan memberdayakan kebudayaan daerah.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, selama kurun waktu lima tahun terakhir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan berbagai berbagai program dan kegiatan berdapak terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Purworejo. Hak tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan rapor pendidikan daerah, Kabupaten Purworejo meraih kategori “Tuntas Madya” pada rapor pendidikan tahun 2024 dengan skor 80,19, meningkat dari kategori “Tuntas Pratama” dengan skor 72,76 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencakup beberapa aspek, diantaranya meningkatnya APS usia 5-6 tahun, APS usia 7-12 tahun, APS 13-15 tahun dan APS usia 7-18 tahun yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Selain itu skor literasi, numerasi, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan dan inklisivitas juga meningkat. Secara keseluruhan, kualitas pendidikan di Purworejo menunjukkan tren positif yang signifikan lewat peningkatan indikator pendidikan, pelaksanaan program inovatif, dukungan infrastruktur dan SDM, serta sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Meskipun kualitas dan akses pendidikan mengalami kenaikan, namun ada beberapa hal yang masih kurang optimal dan masih bisa untuk ditingkatkan. Misalnya terkait penanganan ATS, pemerataan kualitas, serta peningkatan sarana-prasarana pendidikan di berbagai jenjang, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu dalam kurun waktu lma tahun ke depan telah dirumuskan upaya-upaya dalam rangka Meningkatkan kualitas pendidikan, pembangunan kebudayaan daerah, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

Mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Nomor 119 tahun 2022 seri D Nomor 4 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo sebagai salah satu lembaga teknis daerah, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DINDIKBUD menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan pendidikan dan kebudayaan;
d. pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINDIKBUD; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo adalah terdiri dari:

a. Kepala Dinas DINDIKBUD;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan;
d. Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra;
b. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
c. Bidang Kebudayaan;
d. Satuan Pendidikan; dan
e. Jabatan Fungsional.

Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kewenangan Daerah, dan dalam pelaksanaannya membawahkan:

a. Sekretariat;
b. Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan;
c. Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra;
f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
g. Bidang Kebudayaan;
h. Satuan Pendidikan; dan
i. Jabatan Fungsional.

a. Sekretariat

Sekretariat bertugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas Bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekretariat dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
2. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
3. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
5. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi sekretariat terdiri atas:

a) Subbagian Perencanaan;
b) Subbagian Keuangan; dan
c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional; dan Pelaksana.

a) Subbagian perencanaan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang perencanaan yang

1) merencanakan, menganggarkan dan mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2) menyusun perjanjian kinerja; dan
3) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

b) Subbagian keuangan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang keuangan, yang meliputi:
1) melaksanakan administrasi keuangan;
2) melaksanakan administrasi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
3) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

c) Subbagian umum dan kepegawaian bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:
1) menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
2) menyelenggarakan administrasi umum;
3) menyelenggarakan pengadaan barang milik Daerah;
4) menyediakan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
5) menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
6) menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
7) menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

b. Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan

Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang Pengelolaan Perizinan Pendidikan bertugas mengelola pendidikan dan mengendalikan perizinan pendidikan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
1) pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
2) pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
3) pengelolaan pendidikan anak usia dini;
4) pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan;
5) penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6) penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional Pelaksana.

c. Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra

Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan dipimpin oleh Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra bertugas mengembangkan kurikulum muatan lokal, bahasa dan sastra. Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:
1) penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;

2) penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
3) pembinaan, pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam Daerah; dan
4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pejabat fungsional; dan pelaksana.

d. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertugas mengoordinasikan, membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga pendidik. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1) pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; dan
2) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas Pejabat Fungsional; dan Pelaksana.

e. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang Kebudayaan bertugas mengembangkan kebudayaan dan kesenian tradisional, melaksanakan pembinaan sejarah, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya serta permuseuman. Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1) pengelola kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
2) pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
3) pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah;
4) pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
5) pembinaan sejarah lokal dalam Daerah;
6) penetapan cagar budaya peringkat Daerah;
7) penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah;
8) pengelolaan museum Daerah; dan
9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional Pelaksana.

f. Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

g. Pejabat Fungsional

Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keberkaitanan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan/ atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan. Penugasan secara individu dan/ atau dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1

Susunan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

No	Jabatan		Jumlah	
A.	KABUPATEN			
	1	Kepala Dinas	1	Orang
	2	Sekretaris	1	Orang
	3	Kepala Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan	1	Orang
	4	Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra	1	Orang
	5	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Orang
	6	Kepala Kebudayaan	1	Orang
	7	Kasubag Perencanaan	1	Orang
	8	Kasubag Keuangan	1	Orang
	9	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	Orang
	10	Pejabat Fungsional Arsiparis	2	Orang
	11	Pejabat Fungsional Pranata Komputer	2	Orang
	12	Pejabat Fungsional Widyaprada	2	Orang
	13	Pejabat Fungsional Analis SDMA	2	Orang
	14	Pejabat Fungsional Pamong Budaya	2	Orang
	21	Staf ASN	71	Orang
	22	Staf Non ASN	27	Orang
	23	Pengawas SMP	6	Orang
		Jumlah	111	Orang
B	PPK			
	1	KPPK	16	Orang
	2	Tenaga Fungsional /Pengawas/Penilik	27	Orang
	3	Staf PNS PPK	16	Orang
		Jumlah	169	Orang
C	UPT SPNF			
	1	Kepala	1	Orang
	2	Pamong Belajar	7	Orang
	3	Kaur TU	1	Orang
	4	Tenaga Administrasi PNS	4	Orang
		Jumlah	13	Orang

b. Sumber Daya Asset

Tabel 2.2
Rekapitulasi Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purworejo

	Jenis	Volume	Satuan
A	Bangunan		
1	Gedung Kantor	883.769,00	m^2
B	Kendaraan Dinas		
1	Mobil	7	unit
2	Sepeda Motor	83	unit
C	Alat Elektronik		
1	Laptop	75	unit
3	Tablet	21	unit
4	Camera vidio Conference	8	unit
5	CCTV	8	unit
6	LCD Projector	5	unit
7	Printer	10	unit
8	Loudspeaker	7	unit
9	Air Central	8	Unit
10	AC Split	15	Unit
D	Mebeler		
1	Meja Kerja	95	unit
2	Kursi Kayu	95	unit
3	Sofa /Meja Kursi Tamu	10	Unit
5	Kursi Lipat Besi	176	Unit

Tabel 2.3
Rekapitulasi Nilai Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purworejo

NO	URAIAN	VOLUME	TOTAL
A	TANAH		37.583.801.109,00
	Tanah	883.769,00 m^2	37.583.801.109,00
B	PERALATAN DAN MESIN		159.510.274.712,79
1	Alat-alat Besar		462.778.593,00
2	Alat-alat Angkutan		2.054.388.866,34
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur		823.228.040,78
4	Alat Pertanian		2.194.008.701,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga		61.212.840.799,44
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi		16.199.003.975,47
7	Alat-alat Kedokteran		364.560.859,57
8	Alat Laboratorium		22.293.884.664,89
9	Alat-alat Perenjataan/Keamanan		451.766.240,00
10	KOMPUTER		49.614.581.488,04
11	Alat Pengeboran		439.000,00
12	Alat Keselamatan kerja		173.327.300,00
13	Rambu-rambu		5.000.000,00
14	Peralatan Olahraga		3.660.466.184,26
C	GEDUNG DAN BANGUNAN		602.827.324.043,17
1	Gedung dan Monumen:		
`2	- Gedung	644.542,89m^2	588.874.856.859,15

NO	URAIAN	VOLUME	TOTAL
3	- Monumen		4.798.961.561,82
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti		9.153.505.622,19
D	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		5.058.032.036,73
1	JALAN DAN JEMBATAN		3.766.049.565,49
2	BANGUNAN AIR		582.192.751,24
3	INSTALASI		330.970.970,00
4	JARINGAN		378.818.750,00
E	ASSET TETAP LAINNYA		85.496.534.197,67
1	Buku dan Perpustakaan		72.629.168.602,52
2	Barang Bercorak Kebudayaan		12.867.317.595,15
3	Tanaman		48.000,00
F	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN		90.404.900,00
1	Konstruksi dalam Pengerjaan		90.404.900,00
G	ASSET LAINNYA		2.954.396.040,00
1	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA		744.300.000,00
	Kemitraan dengan pihak ketiga		744.300.000,00
2	ASET TIDAK BERWUJUD		1.572.086.268,00
	Aste Tidak Berwujud		1.572.086.268,00
3	ASSET LAIN-LAIN		638.009.772,00
	Asset lain-lain		638.009.772,00
	TOTAL		890.566.370.999,36

c. Satuan Pendidikan

Berdasarkan data dapodik sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo membawahi sebanyak 489 Sekolah Dasar Negeri dan Swasta, 90 SMP Neger dan Swasta 803 lembaga PAUD Negri dan Swasta serta 12 lembaga pendidikan Nonformal Kesetaraan.

1) Kondisi Sarana Prasarana Sekolah

Berdasarkan data akhir tahun 2024, kondisi Sarana Prasarana di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Purworejo di setiap jenjang adalah sebagai berikut:

a) Jenjang sekolah dasar

Sekolah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Purworejo seluruhnya ada 489 Satuan Pendidikan yang terdiri dari 462 SD Negeri dan 27 SD Swasta yang kondisi sarana prasaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kondisi Sarana Prasarana SD di Kabupaten Purworejo

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Kondisi baik	Kondisi rusak sedang/berat	Keterangan
1	Ruang Kelas	3013	2233	780	
2	Ruang Guru	485	363	139	
3	Jamban	2181	1480	701	
4	Ruang Laboratorium	60	48	12	
5	Ruang Perpustakaan	394	290	104	
6	Ruang Kepala	462	313	149	
7	Ruang TU	462	268	194	
8	Pagar (Unit)	436	281	144	

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Kondisi baik	Kondisi rusak sedang/berat	Keterangan
9	Talud (Unit)	225	154	21	
10	Meja Kursi Siswa (	3013	2742	271	
11	Peralatan TIK	4569	3595	974	
12	Peralatan Kesenian	205	100	105	257 sekolah Belum punya alat kesenian

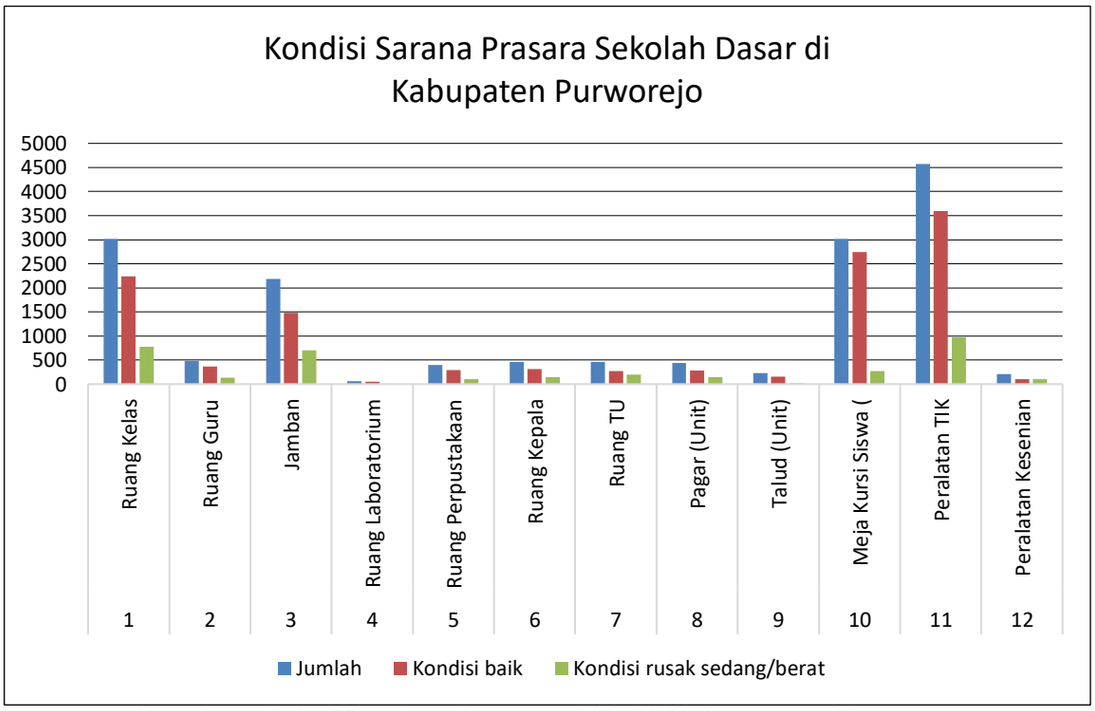

Gambar 2.1: *Kondisi Sarpras SD di Kabupaten Purworejo*

Berdasarkan data kondisi sarana dan prasarana pendidikan, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar sarpras masih dalam kondisi baik, namun terdapat sejumlah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat, bahkan ada yang belum tersedia.

Ruang kelas yang tersedia berjumlah 3.013 ruang, dengan 2.233 ruang dalam kondisi baik dan 780 ruang mengalami kerusakan. Untuk ruang guru tercatat 485 ruang, terdiri atas 363 kondisi baik dan 139 rusak. Sarana jamban sebanyak 2.181 unit, dengan 1.480 kondisi baik dan 701 dalam kondisi rusak. Ruang laboratorium masih sangat terbatas, hanya terdapat 60 ruang, dengan 48 kondisi baik dan 12 mengalami kerusakan. Sementara itu, ruang perpustakaan berjumlah 394 ruang, dengan 290 baik dan 104 rusak. Ruang kepala sekolah tercatat 462 ruang (313 baik, 149 rusak), sedangkan ruang tata usaha jumlahnya sama yaitu 462 ruang, dengan 268 baik dan 194 rusak. Fasilitas pendukung berupa pagar sekolah sebanyak 436 unit (281 baik dan 144 rusak), serta talud sebanyak 225 unit, dengan 154 kondisi baik dan 21 rusak. Untuk sarana pembelajaran, meja dan kursi siswa tersedia sesuai dengan jumlah ruang kelas yaitu 3.013 set, dengan 2.742 dalam kondisi baik dan 271 rusak. Peralatan TIK relatif memadai, berjumlah 4.569 unit, dengan 3.595 unit baik dan 974 unit rusak. Namun demikian, sarana peralatan kesenian masih sangat terbatas. Dari total 205 unit peralatan kesenian (100 baik dan 105 rusak), terdapat 257 sekolah yang sama sekali belum memiliki peralatan kesenian.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar sarana prasarana pendidikan masih dapat difungsikan dengan baik, terdapat proporsi yang cukup besar dalam kondisi rusak sedang/berat, serta masih ada kebutuhan penyediaan sarana, khususnya di bidang kesenian.

b) Jenjang SMP

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Purworejo seluruhnya ada 93 Satuan Pendidikan yang terdiri dari 43 SMP Negeri dan 50 SMP Swasta yang kondisi sarana prasaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kondisi Sarpras SMP di Kabupaten Purworejo

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Kondisi baik	Kondisi rusak sedang/berat	Keterangan
1	Ruang Kelas	749	630	119	
2	Ruang Guru	48	39	9	
3	Jamban	801	692	109	
4	Ruang Laboratorium	127	91	36	IPA/ Komputer
5	Ruang Perpustakaan	43	40	3	
6	Ruang Kepala	43	35	8	
7	Ruang TU	43	35	8	
8	Pagar (Unit)	43	34	9	
9	Talud (Unit)	27	13	24	
10	Meja Kursi Siswa (paket)	749	685	64	
11	Peralatan TIK	2757	2178	579	Laptop atau PC
12	Peralatan Kesenian	31	15	16	Drumband dan Rebana

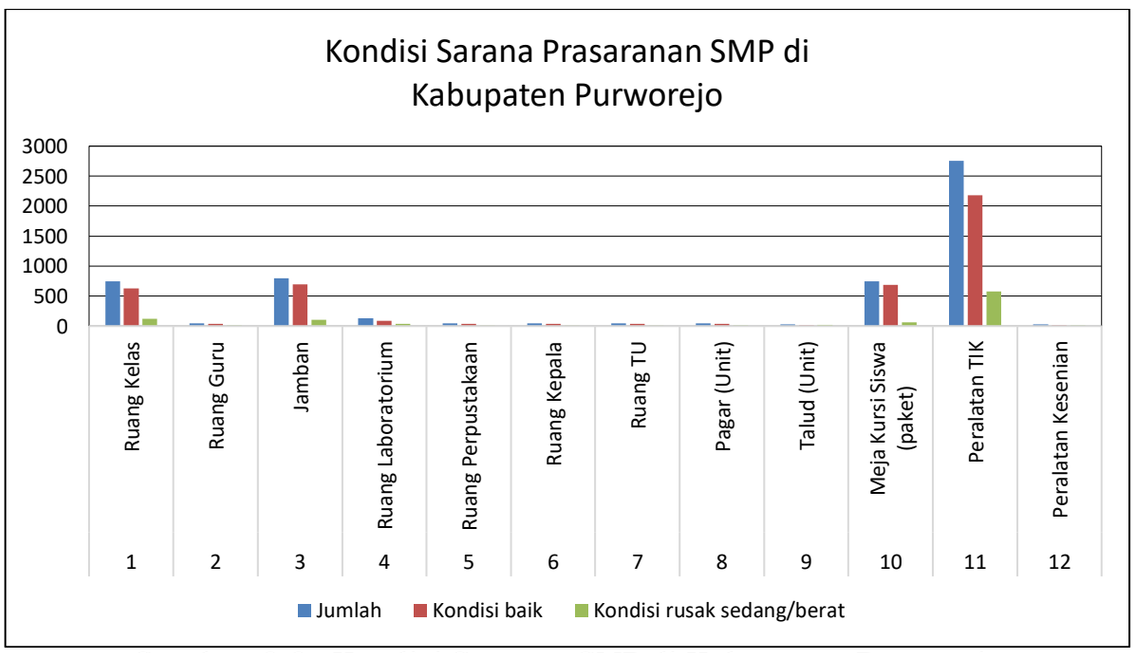

Gambar 2.2: *Kondisi Sarpras SMP di Kabupaten Purworejo*

Berdasarkan data inventarisasi sarana dan prasarana sekolah SMP di atas, dapat disampaikan bahwa secara umum ketersediaan dan kondisi sarpras cukup memadai, meskipun masih terdapat beberapa unit yang memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas.

Jumlah ruang kelas yang tersedia sebanyak 749 ruang**,** dengan kondisi 630 ruang dalam keadaan baik dan 119 ruang mengalami kerusakan sedang hingga berat**.** Ruang guru tercatat ada 48 unit**,** di mana 39 ruang dalam kondisi baik dan 9 ruang membutuhkan perbaikan**.** Fasilitas jamban yang ada berjumlah 801 unit, dengan 692 unit berfungsi baik dan 109 unit mengalami

kerusakan. Untuk ruang laboratorium, tersedia 127 unit yang meliputi laboratorium IPA dan komputer, dengan 91 unit baik dan 36 unit rusak. Sementara itu, ruang perpustakaan terdapat 43 unit, sebagian besar (40 unit) dalam kondisi baik, dan hanya 3 unit yang rusak. Ruang kepala sekolah serta ruang tata usaha masing-masing sebanyak 43 unit, dengan 35 unit baik dan 8 unit rusak.

Dari sisi sarana penunjang, pagar sekolah sebanyak 43 unit, di mana 34 unit dalam kondisi baik dan 9 unit perlu perbaikan. Talud sekolah tercatat 27 unit, namun hanya 13 unit yang baik, sementara 24 unit mengalami kerusakan sedang hingga berat. Sarana pembelajaran berupa meja kursi siswa tersedia sebanyak 749 paket, dengan 685 paket dalam kondisi baik dan 64 paket rusak. Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencapai 2.757 unit (laptop atau PC), dengan 2.178 unit baik dan 579 unit mengalami kerusakan.

Sedangkan untuk pengembangan bakat seni, peralatan kesenian seperti drumband dan rebana tersedia 31 set, namun hanya 15 set dalam kondisi baik, sementara 16 set mengalami kerusakan.

Secara keseluruhan, meskipun mayoritas sarana prasarana pendidikan masih dalam kondisi baik, terdapat beberapa komponen yang membutuhkan perhatian serius terutama pada ruang kelas, talud, peralatan TIK, dan peralatan kesenian yang tingkat kerusakannya cukup signifikan.

c) Jenjang PAUD

Jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Purworejo seluruhnya ada 804 Satuan PAUD yang terdiri dari 3 TK Negeri dan 801 KB, TK dan SPS Swasta kondisi sarana prasaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kondisi Sraspras lembaga PAUD di Kabupaten Purworejo

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Kondisi baik	Kondisi rusak sedang/berat	Keterangan
1	Ruang Kelas	884	755	129	
2	Ruang Guru	469	414	55	
3	Ruang kepala	498	419	79	
4	Jamban	748	648	100	
5	Alat Permainan Edukatif (APE)	493	367	126	309 PAUD belum mempunyai APE
6	Pagar	361	342	19	
7	Talud	498	178	320	
8	Meja Kursi Siswa (set)	884	678	206	
9	Peralatan TIK	625	143	482	

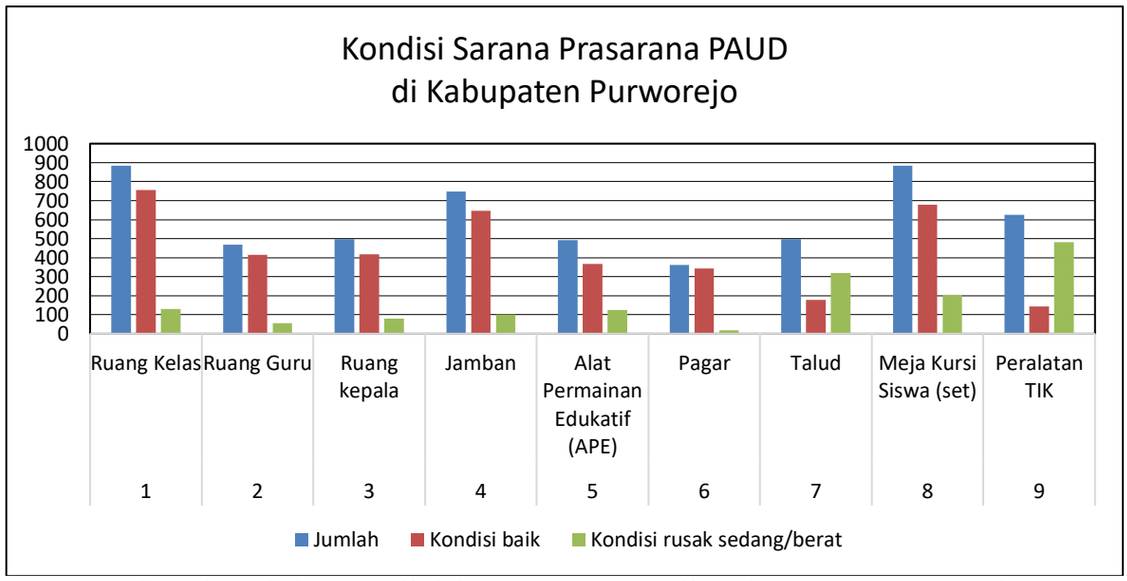

Gambar 2.3: *Kondisi Sarpras PAUD di Kabupaten Purworejo*

2) Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah guru SD Negeri dan Swasta se Kabupaten Purworejo pada akhir tahun 2024 adalah 4.981 yang terdiri dari guru kelas, guru pendidikan agama, guru pendidikan jasmani termasuk juga kepala sekolah.

Tabel 2.7
Data Guru SD Negeri

No	Kecamatan	jumlah sekolah	jumlah rombel	Guru Kelas				Guru Agama				Guru PJOK			
				ASN	Non ASN	Kebutuhan	cukup (Kurang)	ASN	Non ASN	Kebutuhan	cukup (Kurang)	ASN	Non ASN	Kebutuhan	cukup (Kurang)
1	Bagelen	21	126	112	9	126	-5	17	4	21	0	15		21	-6
2	Banyu Urip	25	150	141	9	150	0	23	2	25	0	21		25	-4
3	Bayan	25	171	163	7	171	-1	27		25	2	19	1	25	-5
4	Bener	30	193	177	14	193	-2	29	1	30	0	18	3	30	-9
5	Bruno	28	194	160	26	194	-8	27	1	28	0	26	2	28	0
6	Butuh	29	174	166	4	174	-4	25	2	29	-2	25		29	-4
7	Gebang	29	180	166	12	180	-2	30		29	1	20		29	-9
8	Grabag	35	213	190	16	213	-7	28	5	35	-2	28	2	35	-5
9	Kaligesing	22	141	137	5	141	1	18	3	22	-1	18		22	-4
10	Kemiri	36	222	195	24	222	-3	24	1	36	-11	25	3	36	-8
11	Kutoarjo	38	230	200	21	230	-9	36	2	38	0	30		38	-8
12	Loano	22	144	137	2	144	-5	20		22	-2	17		22	-5
13	Ngombol	23	138	128	4	138	-6	23		23	0	19	3	23	-1
14	Pituruh	36	216	215	10	216	9	33		36	-3	31	3	36	-2
15	Purwodadi	25	150	137	10	150	-3	23		25	-2	22		25	-3
16	Purworejo	38	251	234	12	251	-5	39	2	38	3	29	2	38	-7
	Grand Total	462	2893	2658	185	2893	-50	422	23	462	-17	363	19	462	-80

Dari jumlah tersebut, jika dilihat dari rasio atau perbandingan guru terhadap murid dimana jumlah seluruh murid SD di Kabupaten Purworejo adalah 55.751, maka rasio guru terhadap murid adalah 1: 11 yang artinya satu orang guru mengajar 11 siswa. Kondisi tersebut tentu sangat tidak ideal karena jumlah guru terlalu banyak. Berdasarkan ketentuan bahwa 1 kelas SD terdiri dari 28 murid yang artinya 1 orang guru idealnya mengajar 28

murid. Namun demikian karena melihat jumlah SD serta sebarannya yang berada di banyak desa, maka kondisi tersebut bisa diabaikan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu ketersediaan sekolah demi memudahkan akses bagi masyarakat untuk bersekolah.

Dari jumlah guru tersebut yang sudah berkualifikasi S-1 dan bersertifikat pendidik adalah 3143 orang atau 84,39%. Kondisi tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah untuk 5 tahun ke Depan, karena sarat guru profesional salah satunya adalah sudah bersertifikat pendidik.

Adapun kondisi guru pada jenjang SMP Negeri adalah sebagaimana tebel berikut:

Tabel 2.8
Kondisi Guru SMP di Kabupaten Purworejo

NO	MATA PELAJARAN	JML SEKOLAH	JML ROMBEL	JLH JAM/MINGGU	KEBUTUHAN ASN	ASN	KETERCUKUPAN +/-	JML GTT
1	Pend. Agama Islam dan Budi Pekerti	43	724	2,172	91	84	-2	4
2	Pend. Agama Kristen dan Budi Pekerti	43	1	18	1	1	0	6
3	Pend. Agama Katholik dan Budi Pekerti	43		-	0	1	0	2
4	Pend. Agama Budha dan Budi Pekerti	43		-	0		0	
5	Pend. Agama Hindu dan Budi Pekerti	43		-	0		0	
6	Pend. Agama Konghuchu dan Budi Pekerti	43		-	0		0	
7	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan	43	724	2,172	91	84	-7	6
8	Bahasa Indonesia	43	724	4,344	181	168	-13	11
9	Matematika	43	724	3,620	151	145	-6	15
10	IPA	43	724	3,620	151	135	-16	15
11	IPS	43	724	2,896	121	99	-22	17
12	Bahasa Inggris	43	724	2,896	121	124	3	8
13	Seni Budaya	43	724	1,383	58	56	-2	4
14	Penjasorkes	43	724	2,157	90	85	-5	4
15	Mulok (Bhs.Jawa)	43	724	1,448	60	43	-17	7
16	Prakarya dan/Informatika	43	724	2,138	89	28	-61	8
17	TIK	43	724	929	38	38	0	2
18	BP/BK	43	724	116	134	97	-37	3
JUMLAH							-183	

Kondisi Guru PAUD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Tabel Kondisi Guru PAUD di Kabupaten Purworejo

NO	KECAMATAN	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH SISWA	JUMLAH GURU.
1	BAGELEN	34	670	85
2	BANYUURIP	50	1036	125
3	BAYAN	57	1430	139
4	BENER	40	1151	111
5	BUTUH	42	824	96
6	BRUNO	30	877	81
7	GEBANG	42	1010	112

NO	KECAMATAN	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH SISWA	JUMLAH GURU.
8	GRABANG	42	983	136
9	KALIGESING	46	566	109
10	KEMIRI	59	1383	144
11	KUTOARJO	58	1757	150
12	LOANO	39	859	93
13	NGOMBOL	49	1021	116
14	PITURUH	54	1171	156
15	PURWODADI	50	970	121
16	PURWOREJO	93	2763	278
	JUMLAH	785	18471	2052

Untuk satuan pendidikan nonformal/Kesetaraan berdasarkan data dapodik pada saat dokumen ini disusun (2025) terdapat 12 lembaga dengan jumlah guru seluruhnya sebanyak 64 orang guru.

Dari data jumlah guru SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan sebagaimaa telah disebutkan di atas, tren pertumbuhan guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D IV dan bersertifikat pendidik selama kurun waktu empa tahun terakhir (tahun 2020 sapai dengan tahun 2024) adalah sebagai berikut :

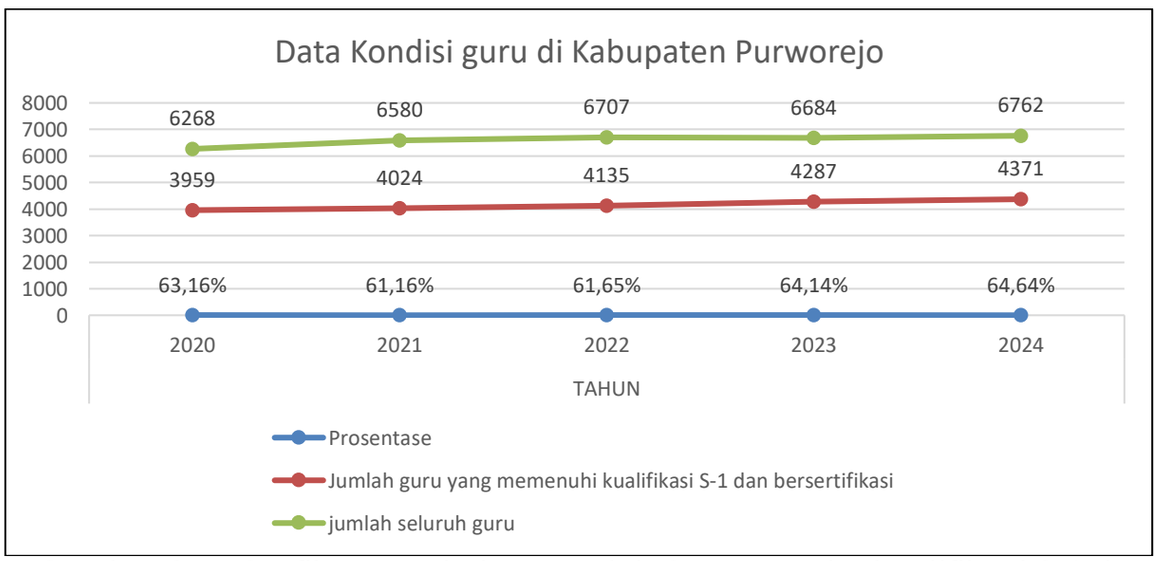

Gambar 2.4: *Grafik pertumbuhan Jumlah Guru yang berkualifikasi S.1 dan Bersertifikat Pendidik di Kabupaten Purworejo*

Berdasarkan data kualifikasi guru pada tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan bersertifikasi. Pada tahun 2020 jumlahnya mencapai 3.959 orang dari total 6.268 guru, atau sekitar 63,16%. Tahun 2021 jumlah guru yang berkualifikasi naik menjadi 4.024 orang dari total 6.580 guru, namun persentasenya sedikit menurun menjadi 61,16%.

Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah guru berkualifikasi meningkat menjadi 4.135 orang dari total 6.707 guru, dengan persentase 61,65%. Tahun 2023 kembali terjadi peningkatan menjadi 4.287 orang dari total 6.684 guru, sehingga persentase guru berkualifikasi naik menjadi 64,14%. Pada tahun 2024, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan bersertifikasi bertambah menjadi 4.371 orang dari total 6.762 guru, dengan persentase 64,64%.

Secara umum, meskipun jumlah total guru cenderung berfluktuasi setiap tahunnya, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan sertifikasi terus meningkat. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas

tenaga pendidik yang diharapkan berdampak positif terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Purworejo.

Selanjutnya seluruh satuan pendidikan di seluruh jenjang mulai SD, SMP, PAU dan Kesetaraan, yang mempunyai guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan pada akhir tahun 2024 sejumlah 336 orang atau 24,13%.

Adapun untuk data terkait dengan kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10

Data Jumlah Group Kesenian di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Jumlah Group	Keterangan
1	Purworejo	119	Terdaftar dan Perpanjangan
2	Kaligesing	96	
3	Banyuurip	69	
4	Bayan	67	
5	Purwodadi	71	
6	Ngombol	42	
7	Bagelen	133	
8	Kutoarjo	75	
9	Grabag	57	
10	Butuh	42	
11	Kemiri	132	
12	Pituruh	132	
13	Bruno	73	
14	Loano	105	
15	Gebang	118	
16	Bener	168	Terdaftar dan Perpanjangan
	JUMLAH	1499	

Dari jumlah tersebut, group kesenian yang selama lima tahun terakhir aktif mengadakan pertunjukan adalah sebagaimana diagram berikut:

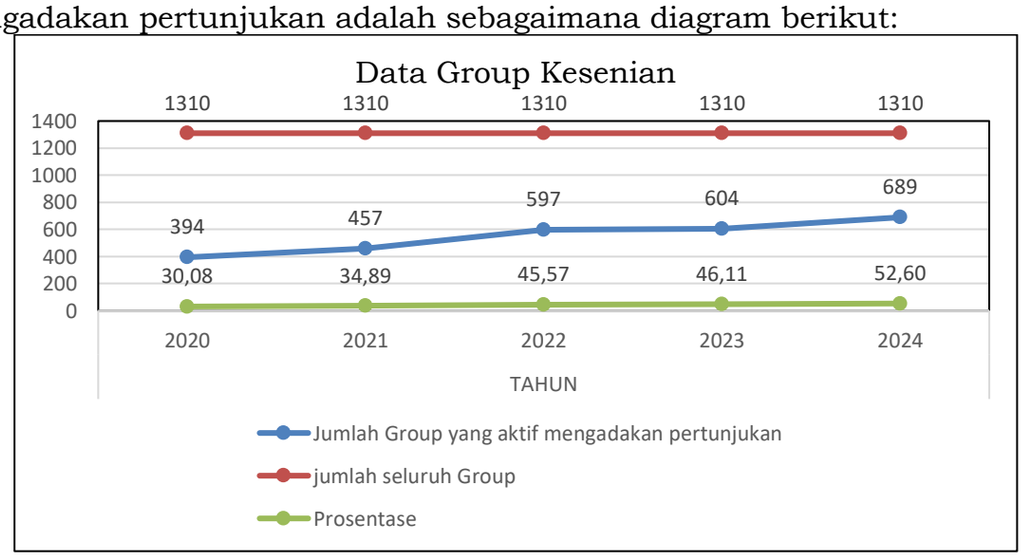

Gambar 2.5: *Grafik Pertumbuhan Jumlah Group Kesenian yang aktif mengadakn pentas*

Berdasarkan data jumlah group kesenian di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020–2024, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah group yang aktif mengadakan pertunjukan. Dari total 1.310 group kesenian yang terdaftar, pada tahun 2020 hanya 394 group (sekitar 30,08%)

yang aktif. Jumlah ini terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 457 group (34,89%), dan melonjak pada tahun 2022 menjadi 597 group (45,57%).

Pada tahun 2023, jumlah group yang aktif kembali mengalami kenaikan meskipun relatif kecil, yaitu menjadi 604 group (46,11%). Peningkatan yang cukup menonjol terlihat pada tahun 2024, di mana jumlah group aktif mencapai 689 group, atau setara dengan 52,60% dari keseluruhan group kesenian yang ada.

Secara umum, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase group kesenian yang aktif mengadakan pertunjukan menunjukkan tren positif, yaitu naik lebih dari 22% dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dan keberlangsungan aktivitas kesenian di Kabupaten Purworejo.

Selanjutnya untuk data warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan ada 3 yaitu :

No	WBTB	Alamat	Jenis	Bentuk Pelestarian
1	Jolenan Somongari	Somongari	Tradisi Budaya	Pembinaan
2	Tarian Dolalal	Purworejo	Tarian Tradisional	Pembinaan
3	Tarian Cing Polling	Kesawen Pituruh Purworejo	Tarian Tradisional	Pembinaan

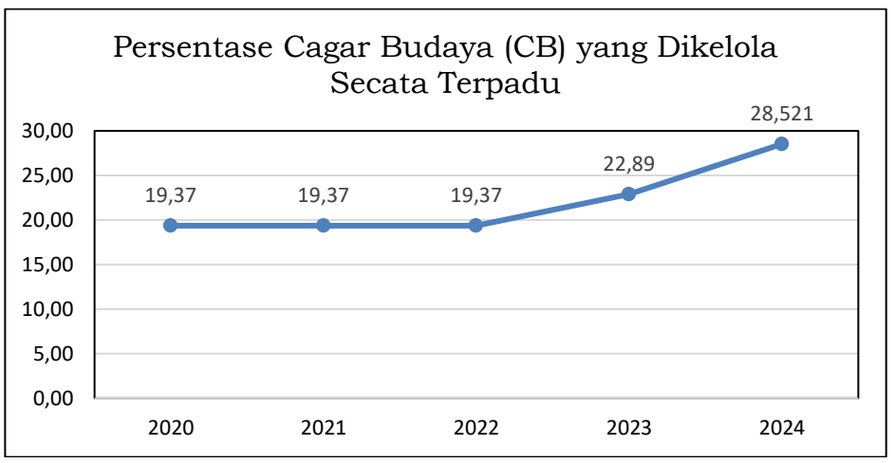

Berdasarkan data pada tabel, persentase Cagar Budaya (CB) yang dikelola secara terpadu pada tahun 2020 hingga 2022 masih berada pada angka yang sama, yaitu 19,37%. Hal ini menunjukkan bahwa selama tiga tahun berturut-turut belum terjadi peningkatan dalam pengelolaan terpadu Cagar Budaya. Namun, pada tahun 2023 terjadi kenaikan signifikan menjadi 22,89%, yang menunjukkan adanya langkah nyata dalam peningkatan kualitas pengelolaan Cagar Budaya. Selanjutnya, pada tahun 2024 capaian ini terus meningkat cukup tajam hingga mencapai 28,521%.

Secara keseluruhan, tren pengelolaan Cagar Budaya secara terpadu menunjukkan perkembangan positif, khususnya sejak tahun 2023, yang menandakan adanya program atau kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong peningkatan pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya.

2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Pada sub bab ini, disajikan hasil analisis gambaran umum kondisi perangkat daerah terhadap capaian kinerja indikator tujuan, sasaran serta capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK). yang

tercantum dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

Pengukuran kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berikut ini menggambarkan mengenai target, realisasi capaian, rasio capain, anggaran serta realisasi pendanaan dari rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode sebelumnya yaitu periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.

Tujuan ditampilkannya pengukuran kinerja Perangkat Daerah Selain menggambarkan capaian kinerja perangkat daerah selama lima tahun terakhir sebagaimana yang telah disebutkan di atas, data pengukuran kinerja tersebut juga digunakan sebagai acuan atau dasar dalam menentukan target capaian maupun pagu anggaran yang dibutuhkan untuk setiap program atau kegiatan yang akan disusun untuk rencana lima tahun yang akan datang.

Adapun pencapaian kinerja baik dari indikator tujuan, sasaran, program maupun kegiatan serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara rinci dapat dilihat pada table 2.1, 2.2 dan 2.3 berikut:

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tatget NSPK	Target IKK	Target SPM	Target Renstra Perangkat Darrah						Realisasi Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	Tujuan																					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				83	83	84	86	86	87		85	83.19	84.7	84.78		0.00	102.41	99.04	98.49	98.58	
2	Persentase Peningkatan Partisipasi Sekolah				94.07	94.30	94.54	94.77	95	95.24	84.55	86.20	89.91	91.14	91.14		89.88	91.41	95.11	96.17	95.94	
	a. Persentase warga usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi di PAUD	V			70.6	92.11	92.23	92.35	92.49	92.6	80.89	84.56	88.45	90.20	90.20		114.57	91.80	95.90	97.67	97.52	
	b. Persentase warga usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di SD/MI	V			95,46	95.52	95.76	96.01	96.26	96.5	90.51	90.98	91.38	92.08	92.08		94.81	95.25	95.42	95.91	95.66	
	c. Persentase warga usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi di SMP/MTs	V			95,02	95.28	95.61	95.94	96.27	96.6	82.25	83.05	96.64	97.70	97.70		86.56	87.16	101.08	101.83	101.49	
3	Persentase warisan budaya yang dilestarikan					23.16	26.27	29.38	32.49	35.59				23.96	23.96			0.00	0.00	81.55	73.75	
B	Sasaran																					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				86	87	88	89	90	91			83.19	84.7	84.7		0.00	0.00	94.53	95.17	94.11	
2	Persentase ketercapaia SPM Bidang Pendidikan				100	100	100.00	100.00	100.00	100.00			92.88				0.00	0.00	92.88	0.00	0.00	
	a. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)			V	70.6	100	100.00	100.00	100.00	100.00	80.89	84.56	88.45	90.20	90.20		114.57	84.56	88.45	90.20	90.20	

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tatget NSPK	Target IKK	Target SPM	Target Renstra Perangkat Darrah						Realisasi Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	b. Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)			V	98.99	100	100.00	100.00	100.00	100.00			98.89	100.00	100.00		0.00	0.00	98.89	100.00	100.00	
	c. Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)			V	23.6	100	100.00	100.00	100.00	100.00	-	3.72	10.86	16.65	16.65			3.72	10.86	16.65	16.65	
	d. Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional			V	57.33	60.07	62.43	64.37	66.3	68.29	1.92	59.46	65.62	69.49	69.49		3.35	98.98	105.11	107.95	104.81	
	e. Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional			V	39.37	42.85	45.34	46.42	47.35	48.3	1.74	47.84	49.14	57.57	57.57		4.42	111.65	108.38	124.02	121.58	
	f. Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional			V	66.00	70.86	76.67	77.16	79.47	81.86	1.96	68.39	79.18	81.51	81.51		2.97	96.51	103.27	105.64	102.57	
	g. Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional			V	55.54	69.46	75.94	78.86	64.29	66.22	1.7	57.67	68.76	69.91	69.91		3.06	83.03	90.55	88.65	108.74	
	h. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B			V	88.62	88.65	83.49	83.52	83.94	84.36		89.04	83.46	83.52	83.52		0.00	100.44	99.96	100.00	99.50	
	i. Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1			V	69.91	71.58	71.32	72.32	72.68	73.05		44.21	70.52	72.32 %	72.32 %		0.00	61.76	98.88	1.00	1.00	
	j. Indeks Iklim Keamanan SD			V	76.66	74.06	75.09	92.83	95.61	96.09	2.37	70.52	71.55	77.73	77.73		3.09	95.22	95.29	83.73	81.30	

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tatget NSPK	Target IKK	Target SPM	Target Renstra Perangkat Darrah						Realisasi Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	k. Indeks Iklim Kebinekaan SD			V	65.24	63.27	74.14	98.59	98.59	99.08	2.28	60.78	71.67	73.83	73.83		3.49	96.06	96.67	74.89	74.89	
	l. Indeks Inklusivitas SD			V	73.06	78.84	81.94	85.04	87.59	88.03	2.09	55.29	57.62	60.22	60.22		2.86	70.13	70.32	70.81	68.75	
	m. Indeks Iklim Keamanan SMP			V	79.61	82.27	85.61	88.95	91.62	92.08	2.42	69.66	67.09	73.31	73.31		3.04	84.67	78.37	82.42	80.02	
	n. Indeks Iklim Kebinekaan SMP			V	64.4	88.99	91.2	93.41	96.21	96.69	2.32	60.45	67.98	71.58	71.58		3.60	67.93	74.54	76.63	74.40	
	o. Indeks Inklusivitas SMP			V	70.89	80.27	83.37	86.47	89.06	89.51	2.05	54.28	58.11	60.69	60.69		2.89	67.62	69.70	70.19	68.15	
3	Persentase Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal				100.00	100.00	100.000	100.00	100.00	100.00	100	100	100	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
4	Persentase warisan budaya bendawi dan non bendawi yang dilestarikan					36,27	43,97	51.66	59.36	67.05		36,27	56	51.66	51.66			100	127.36	100.00	87.03	
C	Program																					
1	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100.00	100.00	100.00	100.00		
2	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi minimal B				99.61	99.61	99.610	99.61	100.00	100.00	98.28	98.16	97.74	97.52	97.52		98.66	98.54	98.12	97.90		
3	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi Minimal B				87.64	87.64	89.890	91.01	91.01	91.01	88.89	86.36	83.70	96.30	96.30		101.43	98.54	93.11	105.81		
4	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi Minimal B				19.72	19.72	21.490	23.26	25.03	26.80	19.72	40.00	50.49	95.35	95.35		100.00	202.84	234.95	409.93		

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tatget NSPK	Target IKK	Target SPM	Target Renstra Perangkat Darrah						Realisasi Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi Minimal B				90.00	100.00	100.000	100.00	100.00	100.00	70.00	80.00	70.00	70.00	70.00		77.78	80.00	70.00	70.00		
6	Persentase ketersediaan muatan lokal pada setiap jenjang pendidikan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100.00	100.00	100.00	100.00		
7	Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar, PAUD Dan Kesetaraan				80.01	88.96	88.98	89.02	89.05	89.10	88.01	67.27	44.77	58.07	58.07		110.00	75.62	50.31	65.23		
8	Persentase Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Dilaksanakan Persentase Penyelenggaraan Pendidikan oleh Masyarakat yang Berizin Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Dilaksanakan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100.00	100.00	100.00	100.00		
9	Persentase Ketersediaan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra pada Setiap Jenjang Pendidikan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100.00	100.00	100.00	100.00		
10	Persentase Kebudayaan Yang Dikembangkan				70	70	80	80	90	100	70	70	80	100	100		100.00	100.00	100.00	125.00		
11	Persentase kelembagaan pelaku kesenian tradisional yang aktif				60	60	60	60	61.58	63.16	60	66	66	76	76		100.00	110.00	110.00	126.67		

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tatget NSPK	Target IKK	Target SPM	Target Renstra Perangkat Darrah						Realisasi Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal				44.44	55.56	66.67	77.78	88.89	100	44.44	60	60	100	100		100.00	107.99	90.00	128.57		
13	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola				11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	23	23		100.00	100.00	100.00	194.09		
14	Persentase benda museum yang memenuhi syarat koleksi				33.3	46.67	60	73.33	86.67	100	33.33	100	100	100	100		100.09	214.27	166.67	136.37		

Berdasarkan tabel indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, dapat digambarkan perkembangan capaian program dan kegiatan dalam periode 2021–2026 sebagai berikut:

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

IKM menunjukkan tren positif meskipun tidak selalu konsisten dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 nilai capaian IKM sebesar 84,7, sedikit lebih rendah dari target 86. Namun, capaian di tahun 2024 dan 2025 relatif stabil di angka 84,78, meskipun rasio capaian masih di bawah 100%. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas layanan publik agar target yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat terpenuhi secara penuh.

2. **Partisipasi Pendidikan**

Persentase partisipasi sekolah secara umum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

a. Pada tingkat PAUD (usia 5–6 tahun), capaian meningkat dari 80,89% (2021) menjadi 90,20% (2024), bahkan melampaui target dengan rasio di atas 95%.
b. Untuk SD/MI (usia 7–12 tahun), capaian berada pada kisaran 90–92%, mendekati target Renstra sekitar 96%.
c. Sementara pada SMP/MTs (usia 13–15 tahun), capaian meningkat pesat dari 82,25% (2021) menjadi 97,70% (2024), bahkan melebihi target dengan rasio capaian di atas 100%.

Secara keseluruhan, indikator partisipasi menunjukkan tren yang cukup baik dan konsisten mendukung pencapaian SPM bidang pendidikan.

3. **Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan**

Capaian SPM di bidang pendidikan belum sepenuhnya konsisten dengan target yang ditetapkan (100%). Misalnya:

a. APS PAUD meningkat hingga 90,20% (2024), meskipun target ditetapkan 100%.
b. APS pendidikan dasar (usia 7–15 tahun) sudah sangat tinggi, mencapai 100% (2023–2024).
c. APS kesetaraan (Paket A/B/C) masih rendah dengan capaian sekitar 16,65% (2024), jauh dari target 100%.
d. Literasi dan numerasi SD maupun SMP menunjukkan tren peningkatan dengan beberapa capaian melampaui target, seperti numerasi SD yang mencapai 57,57 (2024) dibanding target 46,42.

4. **Kurikulum Muatan Lokal**

Indikator ini menunjukkan capaian 100% pada semua jenjang dari tahun 2021 hingga 2026, baik target maupun realisasi. Hal ini mengindikasikan keberhasilan penuh dalam penyediaan muatan lokal pendidikan sesuai karakter daerah.

5. **Akreditasi Satuan Pendidikan**

a. SD: capaian akreditasi minimal B relatif stabil sekitar 97–98%, sedikit di bawah target 99–100%.
b. SMP: mengalami fluktuasi, sempat menurun hingga 83,70% (2023) namun meningkat tajam menjadi 96,30% (2024), bahkan melampaui target.
c. PAUD: menunjukkan perkembangan signifikan, dari 19,72% (2021) menjadi 95,35% (2024), jauh melampaui target dengan rasio capaian di atas 400%.
d. Nonformal/kesetaraan: masih stagnan pada angka 70–80%, belum mencapai target 100%.

6. **Pelestarian Warisan Budaya**

Capaian pelestarian budaya menunjukkan perkembangan signifikan. Target yang ditetapkan sebesar 23,16% di tahun 2023 meningkat menjadi 35,59% di tahun 2026. Realisasi capaian pada tahun 2024 tercatat 23,96%, dengan rasio capaian mencapai 81,55% di tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya

perbaikan, meskipun masih terdapat gap antara target dan realisasi yang harus dikejar.

7. **Kebudayaan dan Sejarah Lokal**

Indikator kebudayaan secara umum mengalami peningkatan positif:

a. Pengembangan kebudayaan mencapai 100% pada 2024, melampaui target.
b. Kelembagaan kesenian tradisional meningkat dari 60% (2021) menjadi 76% (2024).
c. Pembinaan sejarah lokal melonjak dari 44,44% (2021) menjadi 100% (2024).
d. Cagar budaya yang dikelola naik hampir dua kali lipat dari target (194% pada 2024).
e. Benda museum yang memenuhi syarat koleksi meningkat signifikan hingga mencapai 100% pada 2024.

Secara umum, capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo periode 2021–2026 menunjukkan tren positif dan progresif, terutama pada partisipasi pendidikan, akreditasi PAUD, serta pengembangan kebudayaan. Namun, terdapat beberapa indikator yang masih belum optimal, seperti APS kesetaraan, kualitas literasi-numerasi di beberapa jenjang, serta capaian IKM yang sedikit di bawah target. Hal ini menjadi catatan penting untuk penguatan strategi di tahun-tahun berikutnya.

Tabel.2.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Urusan Wajib pelayanan Dasar		550,733,616,470	525,463,696,911	577,443,008,816	593,086,673,652	595,264,345,480	123,331,710,906	596,037,867,664	652,536,153,202	691,085,536,974	721,351,065,115	-						
Pendidikan		550,733,616,470	525,463,696,911	577,443,008,816	593,086,673,652	595,264,345,480	123,331,710,906	596,037,867,664	652,536,153,202	691,085,536,974	721,351,065,115	-						
ADUM		400,157,616,470	416,920,696,911	458,210,008,816	470,635,673,652	473,098,345,480	1,963,532,710	458,773,713,845	473,874,747,016									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		400,157,616,470	416,920,696,911	458,210,008,816	470,635,673,652	473,098,345,480	1,963,532,710	458,773,713,845	473,874,747,016	544,317,132,912	585,425,810,726							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		491,250,300	540,375,330	768,866,078	845,752,686	930,327,955	278,642,971	566,291,918	218,534,944	162,535,966	159,778,300	-						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	147,120,000	163,446,900	179,791,590				132,322,171	147,502,000	38,925,300				90	90	22			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				218,900,000	240,790,000	264,869,000				29,867,250	46,224,500					14	19	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		14,270,200	15,697,220					12,578,200	11,348,200					88	72			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				24,200,000	26,620,000	29,282,000				4,332,600	3,866,500					18	15	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		18,160,300	19,976,330					13,325,000	9,266,200					73	46			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				24,200,000	26,620,000	29,282,000				5,655,300	4,790,700					23	18	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		24,520,400	26,972,440					12,097,400	11,255,300					49	42			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				30,250,000	33,275,000	36,602,500				5,859,500	5,728,400					19	17	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		24,640,300	27,104,330					10,217,800	13,323,800					41	49			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				30,250,000	33,275,000	36,602,500				6,341,800	6,040,600					21	18	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		40,109,800	44,120,780					33,140,500	23,627,500					83	54			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				60,500,000	66,550,000	73,205,000				8,794,300	9,355,300					15	14	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151,794,000	206,102,400	226,712,640				146,320,800	337,431,018	110,788,644				96	164	49			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				380,566,078	418,622,686	460,484,955				101,685,216	83,772,300					27	20	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		398,412,353,324	413,569,168,890	455,432,116,383	465,151,833,878	466,540,875,121	611,708,852.7	456,293,266,634	472,127,318,715	542,517,211,473	583,833,007,602	-				119	126	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	445,156,234,409	398,353,024,624	413,499,707,320				381,964,352.7	456,240,554,934	472,084,017,115				0	115	114			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				455,326,806,383	465,035,992,878	466,413,450,021				542,472,914,273	583,779,037,602					119	126	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		3,830,400	4,213,440					3,785,400	3,863,600					99	92			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12,000,000	13,200,000	14,520,000				9,645,500						80	-	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		14,883,200	16,371,520					8,941,200	8,227,300					60	50			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20,000,000	22,000,000	24,200,000				7,345,700	17,629,800					37	80	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		10,000,000	11,000,000					9,820,000	5,168,100					98	47			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12,000,000	13,200,000	14,520,000				4,399,900	18,255,000					37	138	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5,000,000	5,500,000					4,946,000	3,106,400					99	56			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				11,000,000	12,100,000	13,310,000				2,209,500						20	-	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		5,000,000	5,500,000					4,955,000	4,933,000					99	90			
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				12,000,000	13,200,000	14,520,000				4,913,100						41	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	235,000,000	17,615,100	19,376,610				229,744,500	17,309,100	15,262,100				98	98	79			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				25,000,000	27,500,000	30,250,000				13,979,600	18,085,200					56	66	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		3,000,000	7,500,000					2,955,000	2,741,100					99	37			
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				13,310,000	14,641,000	16,105,100				1,803,900						14	-	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		219,129,600	241,042,560	265,146,816	291,661,498	320,827,647	-	152,117,832	130,386,557	129,091,288	88,161,900	-				49	30	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		7,768,000	8,544,800					2,771,800	2,770,400					36	32			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				9,399,280	10,339,208	11,373,129				22,352,500	12,607,300					238	122	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		8,428,000	9,270,800					2,211,400	2,070,400					26	22			
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10,197,880	11,217,668	12,339,435										-	-	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		25,990,000	28,589,000					13,490,000	10,975,200					52	38			
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				31,447,900	34,592,690	38,051,959										-	-	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		17,887,600	19,676,360					17,887,600	7,299,400					100	37			
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				21,643,996	23,808,396	26,189,235										-	-	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		124,270,800	136,697,880					91,126,832	100,188,557					73	73			
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				150,367,668	165,404,435	181,944,878				97,237,988	70,732,600					65	43	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		14,955,200	16,450,720					9,813,200	4,972,200					66	30			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				18,095,792	19,905,371	21,895,908				9,500,800	4,822,000					53	24	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		19,830,000	21,813,000					14,817,000	2,110,400					75	10			
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				23,994,300	26,393,730	29,033,103										-	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		19,135,200	21,048,720	22,367,112	24,703,823	26,174,206	-	12,171,000	457,426,900	400,379,800	3,170,800	-				1,790	13	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1,322,000*	1,465,200*															
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1,611,200*	1,772,800*	1,950,000*												
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		2,664,000*	2,930,400*															
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3,223,400*	3,545,000*	5,000,000*												
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		8,088,000	8,896,800					1,326,800						16	-			
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				9,000,000	10,000,000	10,000,000				2,094,800	992,400					23	10	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		8,088,000*	7,079,200*															
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				8,007,120*	8,807,832*	9,688,600*												
Pemulangan Pegawai yang Pensiun		4,400,000*	4,884,000*															
Pemulangan Pegawai yang Pensiun				5,372,400*	5,909,640*	6,500,600*												
Pemindahan Tugas ASN		4,400,000*	4,884,000*															
Pemindahan Tugas ASN				5,372,400*	5,909,640*	6,500,600*												
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		156,301,000*	171,931,100*															
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				189,124,200*	208,036,200*	-												
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		6,120,200	6,732,220					6,017,200	452,284,500	394,720,000				98	6,718			
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				7,405,442	8,145,986	8,960,585										-	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		4,927,000	5,419,700											-	-			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5,961,670	6,557,837	7,213,621		4,827,000	5,142,400	3,565,000	2,178,400					60	33	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		534,589,200	588,048,120	646,852,932	948,075,582	1,013,140,102	454,463,869	507,898,143	397,211,784	334,592,908	253,161,600	-				52	27	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		29,620,000	32,582,000					29,620,000	3,258,000					100	10			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35,840,200	50,000,000	50,000,000				12,722,200	12,562,200					35	25	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		274,663,700*	302,130,000*															
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				332,343,000*	365,577,000*	402,135,000*												
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		10,992,300	12,091,530					10,992,300	13,140,900					100	109			

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13,300,683	59,895,000	59,895,000				11,810,100	11,801,400					89	20	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		210,625,800	231,688,380					184,010,400	140,941,200					87	61			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				254,857,218	280,342,940	308,377,234				134,887,200	134,844,200					53	48	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		73,975,400	81,372,940					73,974,600	67,506,700					100	83			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				89,510,234	98,461,257	108,307,383				42,852,800	22,092,400					48	22	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					4,000,000	4,000,000												
Penyediaan Bahan/Material		33,965,300	37,361,830					33,965,300	32,623,300					100	87			
Penyediaan Bahan/Material				41,098,013	72,600,000	72,600,000				28,840,600	14,452,000					70	20	
Fasilitasi Kunjungan Tamu		2,940,400	3,234,440					2,934,400	1,942,400					100	60			
Fasilitasi Kunjungan Tamu				3,557,884	4,058,485	4,058,485				1,569,800	1,177,400					44	29	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	463,411,600	133,395,000	146,734,500				454,463,869	133,361,143	104,311,084				98	100	71			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				161,407,950	322,815,900	350,000,000				83,430,008	44,872,600					52	14	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		39,075,000	42,982,500					39,040,000	33,488,200					100	78			
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				47,280,750	55,902,000	55,902,000				18,480,200	11,359,400					39	20	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		-	-															
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					12,000,000*	12,000,000*												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	1,431,738,560	400,000,000	2,228,000,000	3,031,000,000	-	798,075,200	164,198,946	188,035,000	21,799,200	-				47	1	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1,200,000,000*	1,200,000,000*															
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1,350,000,000*	-	1,320,000,000*												
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1,081,738,560					798,075,200							-			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	518,000,000	1,400,000,000												
Pengadaan Mebel		-	200,000,000												-			
Pengadaan Mebel				200,000,000	300,000,000	200,000,000				140,795,000						70	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	150,000,000						53,250,000						36			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200,000,000	200,000,000	100,000,000				47,240,000	21,799,200					24	11	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-						110,948,946									

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	-	605,000,000	665,500,000											-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-															
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	605,000,000	665,500,000											-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		201,097,300	221,207,030	335,785,024	583,865,931	614,752,524	335,508,371	182,362,302	301,528,379	317,916,758	513,514,524	-				95	88	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86,832,500	-	-				83,790,500						96					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	149,092,963	164,002,260												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	221,312,986	171,522,900	188,675,190				212,613,871	155,270,508	271,654,619				96	91	144			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300,000,000	325,000,000	330,000,000				293,411,750	374,725,024					98	115	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-															
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-	60,500,000	66,550,000												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40,954,100	29,574,400	32,531,840				39,104,000	27,091,794	29,873,760				95	92	92			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				35,785,024	49,272,968	54,200,264				24,505,008	138,789,500					68	282	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		280,061,546	308,067,701	338,874,471	561,780,253	621,247,925	283,208,646	261,530,816	78,140,791	267,369,719	553,216,800	-		93	25	79	98	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111,000,000	122,006,000	134,206,600				111,000,000	140,255,000	33,778,591				100	115	25			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				147,627,260	233,530,000	256,883,000				219,613,219	236,209,200					149	101	
Pemeliharaan Mebel		5,088,000	5,596,800					5,088,000	3,450,000					100	62			
Pemeliharaan Mebel				6,156,480	9,075,000	9,982,500				5,507,000	5,500,000					89	61	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		53,806,000	59,186,600					53,623,016	18,371,000									
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65,105,260	88,074,932	96,882,425					168,032,600					-	191	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-	-												
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				-	-	-												
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		-	-															
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				-	115,550,161	127,500,000												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106,737,546	86,814,546	95,496,001				106,737,546											
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105,045,601	115,550,161	130,000,000		58,324,800	22,541,200	42,249,500	143,475,000					40	124	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66,172,000	12,347,000	13,581,700				65,471,100	4,240,000					99	34	-			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14,939,870	-	-												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-															
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	40,000,000*	40,000,000*												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		150,576,000,000	108,543,000,000	119,233,000,000	122,451,000,000	122,166,000,000										-	-	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							121,368,178,196	137,144,621,019	178,634,565,186	146,622,576,522	135,876,012,489	-				#DIV/0!	#DIV/0!	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		85,417,454,700	58,359,991,700	62,889,968,700	65,772,968,700	66,462,176,200	65,873,570,568	76,493,032,108	103,572,187,160	79,257,339,127	74,863,450,539	-				126	114	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		-	14,197,875,000												-			
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				-	-	-					89,319,000							
Penambahan Ruang Kelas Baru		2,250,000,000*	1,500,000,000*															
Penambahan Ruang Kelas Baru				1,650,000,000*	1,800,000,000*	1,960,000,000*					980,000,000							
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		3,600,000,000*	4,000,000,000*															
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				4,400,000,000*	4,800,000,000*	5,280,000,000*												
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		224,436,000	4,000,000,000*					215,612,700	220,986,500					96				
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				4,400,000,000*	4,800,000,000*	5,280,000,000*				269,965,270								
Pembangunan Perpustakaan Sekolah		195,591,000	1,160,000,000*					182,879,300	242,910,900					94				
Pembangunan Perpustakaan Sekolah				1,276,000,000*	195,591,000	1,518,460,000*					245,072,300						125	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								-	1,785,827,000									
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				*1,500,000,000*	*1,650,000,000*	*1,650,000,000*				159,199,460	2,002,534,300							
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6,321,315,350	11,175,100,000	5,647,100,000				6,248,348,300	4,532,468,100	22,361,979,300				99	41	396			
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas				7,175,100,000	7,175,100,000	7,175,100,000				2,817,110,340	10,223,701,900					39	142	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		718,700,000	350,000,000					537,406,800	698,718,800					75	200			
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				350,000,000	703,598,150	716,831,650				694,170,740	420,164,360					198	60	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		-	-															
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				250,000,000*	250,000,000*	250,000,000*												
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	492,859,000	117,355,000	-				475,117,800		1,413,187,225				96	-				
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				117,355,000	117,355,000	117,355,000				225,667,020	276,634,000					192	236	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	434,682,250	2,311,565,000	200,000,000				419,487,450	1,562,882,800	4,042,397,575	891,179,680			97	68	2,021			
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				500,000,000	1,000,000,000	1,400,000,000				891,179,680	1,034,104,000					178	103	
Pengadaan Mebel Sekolah	448,145,000	345,000,000	200,000,000				440,339,400	461,243,700	825,316,200				98	134	413			
Pengadaan Mebel Sekolah				200,000,000	200,000,000	300,000,000				497,105,210	3,332,275,200					249	1,666	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah		-	-					199,678,800	1,353,873,200									
Pengadaan Perlengkapan Sekolah				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000				1,752,290,790						175	-	
Pengadaan Perlengkapan Siswa		-	7,832,582,000*															
Pengadaan Perlengkapan Siswa				7,832,582,000*	7,832,582,000*	7,832,582,000*												
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	13,941,800	21,000,000	71,000,000				12,409,500	18,264,200	1,681,497,806				89	87	2,368			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				71,000,000	71,000,000	171,000,000				7,077,820,183						9,969	-	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2,991,868,000	2,175,000,000	1,127,000,000*				2,813,817,719	2,177,524,500	3,162,016,400		2,294,383,400		94	100				
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				1,127,000,000*	2,175,000,000	2,175,000,000				5,803,074,670								
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	19,005,245,990	16,898,319,300	9,686,150,950				18,334,361,632	13,184,557,509	8,983,198,698				96	78	93			
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				10,515,286,150	10,515,286,150	10,515,286,150				1,975,382,300	395,674,200					19	4	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	105,000,000	163,000,000	113,000,000				101,522,800	155,785,100	7,250,000				97	96	6			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				163,000,000	163,000,000	163,000,000										-	-	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	22,958,400	1,990,836,800	100,000,000				19,358,904	1,133,368,860	38,950,000		532,147,700		84	57	39			
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100,000,000	100,000,000	171,565,000				541,771,177						542	-	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		10,994,000	10,994,000					8,539,000	10,957,400					78	100			

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				10,994,000	10,994,000	10,994,000				6,290,800	5,340,000					57	49	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	135,000,000	973,435,900	884,625,050				134,103,500	608,178,200	1,111,907,200				99	62	126			
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1,114,625,050	773,435,900	973,435,900				584,271,900	307,870,000					52	40	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	15,000,000	117,825,900	117,825,900				14,919,800	128,135,400	3,801,500				99	109	3			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				117,825,900	117,825,900	117,825,900				23,284,800	18,205,000					20	15	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	54,463,524,749	47,678,040,000	26,480,165,000				36,859,783,763	51,118,051,139	54,375,545,806				68	107	205			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				40,678,040,000	40,678,040,000	40,678,040,000				54,051,438,227	52,613,130,079					133	129	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		86,422,800	86,422,800					77,445,900	187,654,300					90	217			
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				86,422,800	86,422,800	86,422,800				23,291,000	55,408,000					27	64	
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		214,833,000	214,833,000					191,010,100	1,064,211,350					89	495			
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				214,833,000	214,833,000	214,833,000				738,035,980						344	-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar			47,000,000*															
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar				110,000,000*														
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				243,000,000*	243,000,000*	243,000,000*												
Pengembangan konten digital untuk pendidikan				30,000,000*	30,000,000*	30,000,000*												
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				243,000,000*	243,000,000*	243,000,000*					18,623,200							
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				10,000,000*	10,000,000*	10,000,000*				24,777,700	14,122,800							
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				200,000,000*	200,000,000*	200,000,000*					4,741,100							
Penyediaan infrastruktur TIK				1,000,000,000*	1,000,000,000*	1,000,000,000*												
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				10,000,000*	10,000,000*	10,000,000*												
Bimbingan Teknik Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				475,486,800	475,486,800	475,486,800				210,032,200						44	-	
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				475,486,800*	475,486,800*	475,486,800*												

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		45,714,361,900	31,322,710,500	37,420,847,900	37,381,199,900	36,486,640,400	40,657,131,239	44,790,247,737	56,013,372,043	43,837,000,385	38,750,851,350	-		98	179	117	104	
Penambahan Ruang Kelas Baru		405,800,000	446,380,000*					405,800,000										
Pembangunan Ruang Kelas Baru				491,018,000*	540,119,800*	594,131,000*				676,845,100	750,000,000							
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		700,000,000*	-															
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				1,000,000,000*	-	-												
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		300.000.000*	330,000,000*															
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				350,000,000*	380,000,000*	400,000,000*												
Pembangunan Perpustakaan Sekolah		350.000.000*	680,000,000*															
Pembangunan Perpustakaan Sekolah				700,000,000*	720,000,000*	740,000,000*												
Pembangunan Laboratorium		-	-															
Pembangunan Laboratorium				-	680,000,000*	700,000,000*												
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		-	-															
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula				700,000,000*	770,000,000*	-												
Pembangunan Fasilitas Parkir		-	-															
Pembangunan Fasilitas Parkir				90,000,000*	-	-												
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800,000,000	-	880,000,000*				788,141,000						99					
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				880,000,000*	880,000,000*	880,000,000*					486,923,500							
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah		-	1,997,905,900	-	-	-			6,438,961,100						322			
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3,885,256,000	7,418,335,000	3,523,335,000				3,719,449,750	3,396,850,600	5,760,458,950				96	46	163			
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				3,923,335,000	3,923,335,000	3,923,335,000				1,885,337,400						48	-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1,330,914,000	278,765,000	278,765,000				1,308,867,660	332,369,000	804,956,700				98	119	289			
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				278,765,000	278,765,000	278,765,000					825,193,100					-	296	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		39,824,000	39,824,000											-	-			
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				39,824,000	39,824,000	39,824,000										-	-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	238,408,000	278,765,000	276.765.000*					246,827,400					-	89				
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				278,765,000	278,765,000	278,765,000	201,023,800				175,000,000					-	63	
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1,090,929,000	2,608,880,000	475,000,000				856,329,000	1,395,140,150	1,503,660,550				78	53	317			
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				600,000,000	600,000,000	700,000,000*				632,990,600	340,000,000					105	57	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		-	-															

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula				500,000,000	500,000,000	-												
Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir		-	-															
Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir				30,000,000*	45,000,000*	60,000,000*												
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,258,377,000	1,967,199,000	522,751,000				3,141,681,984	1,334,574,750	2,536,509,800				96	68	485			
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				522,751,000	522,751,000	522,751,000				353,698,900	1,036,033,800					68	198	
Pengadaan Mebel Sekolah	775,538,000	900,000,000	400,000,000				747,256,999	1,404,297,100	314,233,950				96	156	79			
Pengadaan Mebel Sekolah				60,000,000	500,000,000	600,000,000				897,210,700	450,758,400					1,495	90	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah		-	2,000,000,000*															
Pengadaan Perlengkapan Sekolah				1,600,000,000	1,200,000,000	1,400,000,000				509,183,600						32	-	
Pengadaan Perlengkapan Siswa		-	6,718,200,000*															
Pengadaan Perlengkapan Siswa				6,718,200,000*	6,718,200,000*	6,718,200,000*												
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	10,000,000	16,000,000	66,000,000				9,992,000	13,165,000	2,102,162,800				100	82	3,185			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				66,000,000	66,000,000	66,000,000				4,287,284,530	3,515,754,000					6,496	5,327	
Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik		-	3,359,400,000*															
Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik				3,359,400,000*	3,359,400,000*	3,359,400,000*												
Perlengkapan Belajar Peserta Didik		-	3,359,400,000*															
Perlengkapan Belajar Peserta Didik				3,359,400,000*	3,359,400,000*	3,359,400,000*												
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1,338,914,000	1,360,000,000	125,000,000				1,319,348,400	126,000,000	993,770,200				99	9	795			
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				400,000,000	400.000.000*	400.000.000*				2,687,814,000	137,500,000					672		
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	6,637,542,700	6,158,727,600	4,144,512,700				1,626,809,008	5,995,938,865	3,309,215,614				25	97	80			
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				5,923,885,100	6,323,885,100	6,149,677,600				293,345,250	305,001,000					5	5	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4,172,000	39,140,000	39,140,000				4,092,000	34,618,000	13,914,300				98	88	36			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				39,140,000	39,140,000	39,140,000				2,935,200	10,065,000					7	26	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	40,000,000	98,920,000	100,000,000				38,878,800	88,530,000	210,739,300				97	89	211			
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100,000,000	100,000,000	100,000,000				157,639,408	210,242,000					158	210	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		15,000,000	15,000,000					12,370,200	14,993,300					82	100			

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				15,000,000	15,000,000	15,000,000				12,878,600	8,864,500					86	59	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	107,085,000	304,334,800	304,334,800				106,960,700	270,627,700	281,668,900				100	89	93	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				304,334,800	304,334,800	304,334,800				232,070,400	137,272,800					76	45	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	32,325,400	71,275,500	75,000,000				30,656,400	61,073,600	28,087,000				95	86	37			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				75,000,000	75,000,000	75,000,000				52,700,400	7,190,000					70	10	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	23,879,105,970	22,494,400,000	18,506,494,100				26,757,643,738	29,068,057,872	30,731,354,479				112	129	166			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				22,504,400,000	22,504,400,000	22,504,400,000				30,744,045,997	30,275,645,000					137	135	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		30,000,000	30,000,000					26,072,500	19,928,300					87	66			
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				30,000,000	30,000,000	30,000,000				13,734,000	32,981,200					46	110	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU		79,648,000	600,000,000					539,270,300	842,321,000	144,244,100				677	140			
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah		1,149,348,000	79,648,000					38,664,700	106,435,800	58,525,200				3	134			
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				79,648,000	79,648,000*	79,648,000				168,641,000						212		
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				44,000,000*	44,000,000*	44,000,000*												
Pengembangan konten digital untuk pendidikan				11,000,000*	11,000,000*	11,000,000*					13,811,400							
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				44,000,000*	44,000,000*	44,000,000*					13,811,400							
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				5.000.000*	5.000.000*	5.000.000*												
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				40,000,000	40,000,000	40,000,000				25,876,000	18,804,250					65	47	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				12.000.000*	12.000.000*	12.000.000*												
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				50.000.000*	50.000.000*	50.000.000*												
Bimbingan Teknik Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				40,000,000	40,000,000	40,000,000										-	-	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		17,254,647,300	16,910,761,700	16,932,647,300	17,227,647,300	17,227,647,300	14,837,476,389	14,820,140,375	17,663,611,488	21,513,871,173	20,077,238,000	-		86	104	127	117	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		-	500,000,000*															
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				250.000.000*	250.000.000*													
Pembangunan Ruang Kelas Baru				250.000.000*	250.000.000*					186,299,100								
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	237,769,100	-	550,000,000*				235,277,400		572,536,000				99					
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				550,000,000*	550,000,000*	550,000,000*				80,323,600								
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		-	320,000,000						639,139,100						200			
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				266,200,000*	292,820,000*	300,000,000*				1,650,938,900	1,430,000,000							
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				266,200,000*	292,820,000*	300,000,000*												
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				266,200,000*	292,820,000*	300,000,000*			170,368,400	78,574,600								
Pengadaan Mebel PAUD		-	15,000,000*															
Pengadaan Mebel PAUD				16,500,000*	21,000,000*	24,000,000*				8,116,300								
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		3,224,160,000*	3,545,575,000*															
Pengadaan Perlengkapan PAUD				45.000.000*	45.000.000*	45.000.000*												
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				62.000.000*	62.000.000*	62.000.000*				979,036,130								
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	287,480,900	295,000,000	206,000,000				223,090,000	219,744,500	292,132,600				78	74	142			
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				250.000.000*	295,000,000	295,000,000				385,291,000	611,900,000						207	
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1,018,082,400	1,026,822,400	999,822,400				860,764,189	872,292,792					85	85	-			
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				999,822,400	999,822,400	999,822,400										-	-	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD		27,000,000	27,000,000					24,300,000	25,125,900					90	93			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				27,000,000	27,000,000	27,000,000										-	-	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				10.000.000*	10.000.000*	10.000.000*												
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	3,098,839,600	3,308,351,300	3,308,351,300				3,068,842,800	3,058,994,883	3,351,878,042				99	92	101			
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				3,308,351,300	3,308,351,300	3,308,351,300				5,380,388,640	5,545,353,600					163	168	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		30,000,000	30,000,000					26,909,200	1,008,715,302					90	3,362			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				30,000,000	30,000,000	30,000,000				979,036,130	1,001,678,400					3,263	3,339	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	12,682,625,000	12,567,473,600	12,019,588,000				10,449,502,000	10,617,899,000	11,603,716,144				82	84	97			
Pengelolaan Dana BOP PAUD				12,567,473,600	12,567,473,600	12,567,473,600				11,679,872,473	11,419,200,000					93	91	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		-	178,000,000*															
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				178,000,000*	178,000,000*	178,000,000*					60,579,500							
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				27,000,000	27,000,000	27,000,000				105,994,300	8,526,500					393	32	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		2,216,536,100	1,949,536,100	1,989,536,100	2,388,836,100	1,989,536,100	-	1,041,200,799	1,385,394,495	2,014,365,837	2,184,472,600	-		47	71	101	91	
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																		
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				127.000.000*	127.000.000*	127.000.000*												
Pembangunan Ruang Kelas Baru				127.000.000*	127.000.000*	127.000.000*												
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan		300,000,000*	330,000,000*						176,365,700									
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				127.000.000*	127.000.000*	127.000.000*					59,691,000							
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					127.000.000*	127.000.000*												
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan		125,000,000*	125,000,000*						17,000,000									
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan				125,000,000*	125,000,000*	125,000,000*				46,391,300	156,072,800							
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan		227,000,000	206,000,000*					229,865,140						101				
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan				206,000,000*	206,000,000*	206,000,000*				129,140,000								
Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan		40,000,000	40,000,000*					19,802,000						50				
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				40,000,000	40,000,000	40,000,000				40,000,000	16,339,000					100	41	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		8,000,000*	8,000,000*															
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5,000,000	5,000,000	5,000,000										-	-	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				18.000.000*	18.000.000*	18.000.000*												
Pengembangan konten digital untuk pendidikan				5.000.000*	5.000.000*	5.000.000*												
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				18.000.000*	18.000.000*	18.000.000*												
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5,000,000	5,000,000	5,000,000				3,200,800	2,019,200					64	40	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan		150,936,100	150,936,100					122,633,659	73,373,768					81	49			

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan				145,936,100	145,936,100	145,936,100				107,858,680	95,227,100					74	65	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan		1,798,600,000	1,798,600,000					668,900,000	1,118,655,027					37	62			
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan				1,588,003,920	1,588,003,920	1,588,003,920				1,687,775,057	1,855,123,500					106	117	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					5.000.000*	5.000.000*												
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					6.000.000*	6.000.000*												
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					5.000.000*	5.000.000*												
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan		20,000,000*	20,000,000*															
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan			s	20,000,000*	20,000,000*	20,000,000*												
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		133,000,000	96,000,000	105,000,000	108,000,000	108,000,000	-	97,457,500	3,466,000	76,130,600	20,944,500	-		73	4	73	19	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		133,000,000	96,000,000	105,000,000	108,000,000	108,000,000	-	97,457,500	3,466,000	76,130,600	20,944,500	-		73	4	73	19	
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar		50,320,000	31,320,000					46,266,500.00	3,466,000.00					92	11			
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				34,320,000.00	35,320,000.00	35,320,000.00										-	-	
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		29,500,000.00	24,500,000					28,180,000						96	-			
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar				26,500,000.00	26,500,000.00	26,500,000.00										-	-	
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		23,015,000.00	20,015,000					23,011,000						100	-			
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				22,015,000.00	23,015,000.00	23,015,000.00				58,990,400						268	-	
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		30,165,000.00	20,165,000											-	-			
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				22,165,000.00	23,165,000.00	23,165,000.00				17,140,200	20,944,500.00					77	90	
Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar				10.000.000*	10.000.000*	10.000.000*												
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal		80,000,000*	80,000,000*															
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				80,000,000*	88,000,000*	106,480,000*												

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal		80,000,000*	80,000,000*															
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal				80,000,000*	88,000,000*	106,480,000*												
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal		80,000,000*	80,000,000*															
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal				80,000,000*	88,000,000*	106,480,000*												
Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				10.000.000*	10.000.000*	10.000.000*												
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		58,000,000	42,000,000	46,000,000	47,000,000	47,000,000								-	-	-	-	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		58,000,000	42,000,000	46,000,000	47,000,000	47,000,000							#DIV/0!	-	-	-	-	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		42,000,000	30,000,000					19,988,800	22,396,300					48	75			
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				34,000,000	33,000,000	33,000,000				22,348,000	372,000					66	1	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		16,000,000	12,000,000					15,932,000.00						100	-			
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				12,000,000	14,000,000	14,000,000			8,951,200	8,520,700	290,000					71	2	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		58,000,000	42,000,000	46,000,000	47,000,000	47,000,000								-	-	-	-	
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		43,000,000	27,000,000	31,000,000	32,000,000	32,000,000								-	-	-	-	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		22,000,000	15,000,000											-	-			
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				18,000,000	17,500,000	17,500,000				1,375,000						8	-	
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		21,000,000	12,000,000											-	-			

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				13,000,000	14,500,000	14,500,000					2,369,200,000					-	16,339	
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	1,831,600	14,561,700	10,096,600	4,778,100	-		12	97	67	32	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		5,000,000	5,000,000						4,853,900					-	97			
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5,000,000	5,000,000	5,000,000				3,452,600						69	-	
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		5,000,000	5,000,000						4,853,900					-	97			
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5,000,000	5,000,000	5,000,000				3,412,600	2,307,800					68	46	
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		5,000,000	5,000,000					1,831,600	4,853,900					37	97			
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5,000,000	5,000,000	5,000,000				3,231,400	2,470,300					65	49	
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		164,000,000	118,000,000	130,000,000	133,000,000	133,000,000	-	22,075,300	23,375,000	69,696,940	28,297,400	-				54	21	
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		164,000,000	118,000,000	130,000,000	133,000,000	133,000,000										-	-	
Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota		201,000,000*	221,100,000*															
Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota				243,210,000*	267,531,000*	294,284,100*												
Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota		87,500,000*	96,250,000*															
Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota				105,875,000*	116,462,500*	128,108,750*												
Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota		5.000.000*	5,500,000*															
Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota				6,050,000*	6,655,000*	7,320,500*												
Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota		110,000,000	64,470,000					13,805,800.00						13	-			
Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota				76,470,000	79,470,000	79,470,000.00				36,155,240						47	-	
Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		54,000,000	53,530,000					8,269,500.00	23,375,000.00					15	44			

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				53,530,000	53,530,000	53,530,000.00				33,541,700	28,297,400.00					63	53	
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		100,000,000*	100,000,000*															
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				100,000,000*	100,000,000*	100,000,000*												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		4,633,000,000	3,340,000,000	3,669,000,000	3,768,000,000	3,758,000,000	-	4,096,526,341	10,664,841,613	7,410,202,517	5,680,210,133	-		88	319	202	151	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		2,715,000,000	1,857,000,000	2,040,000,000	2,088,000,000	2,053,000,000	-	2,581,214,445	6,598,365,813	4,931,860,429	3,471,705,885	-		95	355	242	166	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		630,000,000	500,000,000	500,000,000	550,000,000	600,000,000	-	537,416,200	922,626,800	339,012,700	274,311,000	-		85	185	68	50	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		250,000,000*	250,000,000*															
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				250,000,000*	275,000,000*	275,000,000*												
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		630,000,000	500,000,000					537,416,200	922,626,800					85	185			
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				500,000,000	550,000,000	600,000,000				339,012,700	274,311,000					68	50	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		2,085,000,000	1,357,000,000	1,540,000,000	1,538,000,000	1,453,000,000	-	2,043,798,245	5,675,739,013	4,592,847,729	3,197,394,885	-		98	418	298	208	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		2,050,000,000	1,320,250,000					2,021,072,245	5,096,736,013					99	386			
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				1,501,412,500	1,497,483,125	1,410,457,281				4,569,117,729	3,177,376,155					304	212	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		35,000,000	36,750,000					22,726,000	579,003,000					65	1,576			
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				38,587,500	40,516,875	42,542,719				23,730,000	20,018,730					61	49	
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				50,000,000*	50,000,000*	50,000,000*												
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				30,000,000*	30,000,000*	30,000,000*												

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		-	100,000,000	110,000,000	120,000,000	150,000,000	-	11,800,000	72,059,700	52,758,800	80,007,500	-			72	48	67	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	100,000,000	110,000,000	120,000,000	150,000,000	-	11,800,000	72,059,700	52,758,800	80,007,500	-			72	48	67	
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		-	100,000,000					11,800,000	72,059,700						72	#DIV/0!	#DIV/0!	
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				110,000,000	120,000,000	150,000,000				52,758,800	80,007,500					48	67	
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																		
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				100,000,000*	100,000,000*	100,000,000*												
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				200,000,000*	200,000,000*	200,000,000*												
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		539,000,000	389,000,000	427,000,000	438,000,000	437,000,000	-	481,028,800	1,945,675,400	604,502,500	700,709,088	-		89	500	142	160	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		539,000,000	389,000,000	427,000,000	438,000,000	437,000,000	-	481,028,800	1,945,675,400	604,502,500	700,709,088	-		89	500	142	160	
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		539,000,000	389,000,000					481,028,800	1,945,675,400					89	500	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota				427,000,000	438,000,000	437,000,000				604,502,500	700,709,088					142	160	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				87,000,000*	87,000,000*	87,000,000*												
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah				30,000,000*	30,000,000*	30,000,000*												
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		777,000,000	560,000,000	615,000,000	632,000,000	630,000,000	-	723,546,596	641,791,600	402,060,188	223,156,960	-		93	115	65	35	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		156,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	-	154,390,400	128,012,588	107,946,700	57,282,300	-		99	171	144	76	
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		20,000,000*	20,000,000*															
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				20,000,000*	20,000,000*	20,000,000*												
Penetapan Cagar Budaya		156,000,000	75,000,000					154,390,400	128,012,588					99	171			
Penetapan Cagar Budaya				75,000,000	75,000,000	75,000,000				107,946,700	57,282,300					144	76	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		621,000,000	485,000,000	540,000,000	557,000,000	555,000,000	-	569,156,196	513,779,012	294,113,488	165,874,660	-		92	106	54	30	
Pelindungan Cagar Budaya		321,000,000	250,000,000					314,409,696	410,013,012					98	164			
Pelindungan Cagar Budaya				270,000,000	280,000,000	280,000,000				188,797,088	126,389,200					70	45	
Pengembangan Cagar Budaya		200,000,000*	220,000,000*															

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pengembangan Cagar Budaya				220,000,000*	220,000,000*	220,000,000*												
Pemanfaatan Cagar Budaya		300,000,000	235,000,000					254,746,500	103,766,000					85	44			
Pemanfaatan Cagar Budaya				270,000,000	277,000,000	275,000,000				105,316,400	39,485,460					39	14	
Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		15,000,000*	15,000,000*															
Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				15,000,000*	15,000,000*	15,000,000*												
Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		25,000,000*	25,000,000*															
Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				25,000,000*	25,000,000*	25,000,000*												
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		602,000,000	434,000,000	477,000,000	490,000,000	488,000,000	-	298,936,500	1,406,949,100	1,419,020,600	1,204,630,700	-		50	324	297	246	
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		602,000,000	434,000,000	477,000,000	490,000,000	488,000,000	-	298,936,500	1,406,949,100	1,419,020,600	1,204,630,700	-		50	324	297	246	
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu		190,000,000	134,000,000					149,034,500	29,246,500					78	22			
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				150,000,000	150,000,000	150,000,000				45,955,200	26,236,000					31	17	
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		40,000,000*	44,000,000*															
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman				44,000,000*	44,000,000*	44,000,000*												
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		412,000,000	300,000,000					149,902,000	1,377,702,600					36	459			
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				327,000,000	340,000,000	338,000,000				1,157,839,955	986,221,400					354	290	
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		45,000,000*	45,000,000*															
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				45,000,000*	45,000,000*	45,000,000*				215,225,445	192,173,300							
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		50,000,000*	50,000,000*															
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum				50,000,000*	50,000,000*	50,000,000*												

Keterangan :

- realisasi dan rasio capaian untuk tahun 2025 pada tabel di atas baik Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (pada tabel 2.11) maupun pada Anggaran dan Realisasi Pendanaan (Tabel 2.12), untuk saat ini masih bersifat sementara dan masih mungkin berubah, karena untuk tahun anggaran 2025 masih menyisakan waktu 5 (lima) bulan, yaitu Agustus sampai dengan Desember.

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Ket.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Tujuan						
1	Harapan Lama Sekolah	13.50	13.51	13.52	13.53	13.55	
2	Rata-Rata Lama Sekolah	8.12	8.21	8.32	8.46	8.65	
3	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	-	-	-	8.46	8.98	
4	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	7.68	8.83	6.39	7.27	9.17	
5	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	19.51	19.51	20.21	23.69	29.27	
6	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	
B	Sasaran						
1	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	79.35	80.89	82.23	82.41	85.5	
2	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	90.38	90.51	90.98	91.38	92.08	
3	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	81.78	82.25	83.05	96.64	97.70	
4	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun (Kesetaraan)	-	-	3.72	10.86	16.65	
	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B	53.14	53.32	50.59	51.98	80.33	
	Literasi Membaca SD/ Sederajat		1,92	59,46	65,62	69.49	
	Literasi Membaca SMP/ Sederajat		1,96	68,39	79,18	81.51	
	Numerasi SD/ Sederajat		1,78	47,84	49,14	57.57	
	Numerasi SMP/ Sederajat		1,7	57,67	68,76	69.91	
5	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	19.51	19.51	20.21	23.69	29.27	
6	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	
C	Indikator-indikator IKK sesuai Permendagri No 18 Tahun 2020						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	79.35	80.89	82.23	82.41	85.5	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Ket.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	90.38	90.51	90.98	91.38	92.08	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	81.78	82.25	83.05	96.64	97.7	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-	-	3.72	10.86	16.65	
D	Program						
1	Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik	73.29	73.55	73.55	73.47	74.23	
2	Persentase Satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik				49.76	44.13	
3	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Terakhir S-1/ D-IV dan Bersertifikat Pendidik di Seluruh Jenjang	63.16	61.16	61.65	64.14	64.64	
4	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	23.57	23.57	24.22	24.05	24.13	
5	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal yang Telah Ditetapkan	14.59	14.59	14.59	15.54	15.54	
6	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan oleh Masyarakat yang Berizin	99.55	99.55	99.55	99.77	100.00	
7	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan dan Menerapkan Pembiasaan Penggunaan Bahasa Jawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	70	70	70	80	70	
9	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	30.08	34.89	45.57	46.11	52.6	
10	Persentase Keterlibatan Masyarakat Pelaku Sejarah Lokal	1.2	1.08	1.82	7.16	3.53	
11	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu	19.37	19.37	19.37	22.89	28.52	
12	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	-42	-57	1153	310	-63	

Perkembangan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan capaian dalam berbagai aspek pendidikan dan kebudayaan.

Pada aspek tujuan, indikator *Harapan Lama Sekolah* mengalami peningkatan meskipun relatif kecil, dari 13,50 tahun pada 2020 menjadi 13,55 tahun di tahun 2024. Sementara itu, *Rata-rata Lama Sekolah* meningkat cukup signifikan, dari 8,12 tahun (2020) menjadi 8,65 tahun (2024). Capaian yang lebih detail terlihat pada *Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun*, yang mulai tercatat pada tahun 2023 sebesar 8,46 tahun, kemudian naik menjadi 8,98 tahun di tahun 2024. Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan kualifikasi pendidikan tinggi sempat mengalami fluktuasi, turun pada 2022 (6,39%) setelah sebelumnya mencapai 8,83% (2021), namun kembali meningkat hingga 9,17% di tahun 2024. Dari sisi pelestarian budaya, terdapat perkembangan yang sangat baik, di mana *Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan* meningkat dari 19,51% (2020) menjadi 29,27% (2024).

Pada aspek sasaran, capaian *Angka Partisipasi Sekolah* menunjukkan tren positif di semua jenjang. APS usia 5–6 tahun naik dari 79,35% (2020) menjadi 85,50% (2024). APS usia 7–12 tahun meningkat stabil dari 90,38% menjadi 92,08% pada periode yang sama. APS usia 13–15 tahun bahkan melonjak sangat tinggi dari 83,05% (2022) menjadi 96,64% (2023) dan 97,70% (2024). Sementara itu, APS usia 7–18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari 3,72% (2022) menjadi 16,65% (2024).

Selain itu, terdapat kemajuan yang sangat berarti pada aspek mutu pendidikan. *Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B* meningkat drastis dari 53,14% (2020) menjadi 80,33% (2024). Indikator literasi dan numerasi siswa juga mengalami peningkatan pesat. Literasi membaca pada jenjang SD melonjak dari 1,92% (2021) menjadi 69,49% (2024), sementara pada SMP naik dari 1,96% (2021) menjadi 81,51% (2024). Kemajuan serupa juga terlihat pada kemampuan numerasi, di mana capaian SD naik dari 1,78% (2021) menjadi 57,57% (2024), dan pada SMP meningkat dari 1,70% (2021) menjadi 69,91% (2024).

Selanjutnya, indikator IKK sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020 memperkuat gambaran pencapaian kinerja di atas. Tingkat partisipasi anak usia 5–6 tahun dalam PAUD meningkat dari 79,35% (2020) menjadi 85,50% (2024). Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun di pendidikan dasar juga meningkat dari 90,38% (2020) menjadi 92,08% (2024). Demikian pula, partisipasi warga negara usia 13–15 tahun pada pendidikan menengah pertama meningkat signifikan, terutama pada tahun 2023 (96,64%) hingga mencapai 97,70% di tahun 2024. Sementara itu, partisipasi pendidikan kesetaraan bagi warga usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar-menengah tumbuh dari 3,72% (2022) menjadi 16,65% (2024).

Adapun dari sisi program, berdasarkan data capaian indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah pada kurun waktu tahun 2020–2024, dapat disampaikan beberapa perkembangan penting. Pertama, dari sisi sarana dan prasarana satuan pendidikan, persentase sekolah yang memiliki kondisi baik relatif stabil dengan kecenderungan meningkat dari 73,29% pada tahun 2020 menjadi 74,23% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam pemenuhan fasilitas pendidikan. Kedua, kualifikasi guru yang sudah berpendidikan minimal S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 tercatat 63,16%, sempat menurun menjadi 61,16% di tahun berikutnya, lalu berangsur

meningkat hingga 64,64% pada tahun 2024. Pergerakan ini menandakan bahwa upaya peningkatan kualifikasi dan profesionalisme guru masih terus berjalan.Ketiga, penguatan kebudayaan melalui guru muatan lokal (mulok) bahasa daerah dan seni budaya relatif stabil dengan capaian sekitar 23–24% dari satuan pendidikan. Begitu pula dengan penerapan kurikulum muatan lokal**,** yang pada awalnya 14,59% dan meningkat sedikit menjadi 15,54% sejak 2023.

Indikator penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat yang berizin menunjukkan pencapaian yang hampir sempurna. Sejak 2020 angka sudah sangat tinggi yaitu 99,55%, dan berhasil mencapai 100% pada tahun 2024.
Sebaliknya, indikator pembiasaan penggunaan bahasa Jawa di satuan pendidikan belum menunjukkan perkembangan sama sekali, dengan capaian 0% sepanjang periode. Hal ini menjadi catatan penting bagi upaya pelestarian bahasa daerah.

Pada sektor kebudayaan, capaian cukup beragam. Pengembangan objek pemajuan kebudayaan tercatat stabil di angka 70% hingga 2022, meningkat menjadi 80% pada 2023, namun turun kembali ke 70% pada 2024. Sementara itu**,** aktivitas kelompok kesenian menunjukkan tren positif, dari 30,08% pada 2020 meningkat signifikan menjadi 52,60% di tahun 2024.
Partisipasi masyarakat dalam pelestarian sejarah lokal masih rendah meskipun sempat meningkat pesat pada 2023 hingga 7,16%, lalu menurun kembali ke 3,53% pada 2024. Sementara itu, pengelolaan cagar budaya secara terpadu menunjukkan tren yang konsisten meningkat, dari 19,37% pada 2020 hingga 28,52% pada 2024.

Terakhir, indikator kunjungan museum memperlihatkan data yang sangat fluktuatif. Tahun 2020 dan 2021 justru menunjukkan angka minus akibat dampak pandemi, kemudian melonjak drastis pada 2022 (1.153%), namun kembali menurun hingga -63% pada 2024.

Secara keseluruhan, data capaian ini menunjukkan adanya tren positif dalam peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan, sekaligus kemajuan yang berarti dalam upaya pelestarian kebudayaan di Kabupaten Purworejo.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Renstra kementerian Pendidikaan dasar dan Menengah tahun 2025-2029 fokus pada program prioritas seperti pemerataan wajib belajar 13 tahun, revitalisasi satuan pendidikan, transformasi sistem penerimaan murid baru, penguatan tata kelola guru, serta pendidikan karakter dan literasi dengan beberapa isu strategis antara lain :

1. Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Pendidikan untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan berkualitas selama 13 tahun.
2. Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan yaitu dalam rangka mengembangkan dan memperbaiki fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.
3. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang bertujuan Mereformasi dan meningkatkan keadilan dalam sistem pendaftaran murid baru.
4. Rapor Pendidikan dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang bertujuan memperkenalkan sistem evaluasi baru untuk mengukur capaian akademik siswa.
5. Tata Kelola Guru dan Status Kepegawaian dengan fokus untuk memperbaiki manajemen kinerja dan status kepegawaian guru.
6. Layanan Pendidikan di Wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) dalam rangka memastikan akses pendidikan di daerah-daerah sulit.

7. Pendidikan Inklusif dalam rangka menyediakan layanan pendidikan yang dapat diakses oleh semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.
8. Pendidikan Karakter yang berfokus membangun karakter yang kuat pada siswa.
9. Kedaulatan Bahasa Indonesia dan Revitalisasi Bahasa Daerah dalam rangka memperkuat penggunaan bahasa Indonesia dan menghidupkan kembali bahasa daerah.

Selaras dengan itu, di dalam Dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dijelaskan bahwa tujuan bidang Pendidikan yaitu meningkatkan perluasan akses serta peningkatan mutu layanan. Selanjutnya di bidang kebudayaan yaitu pentingnya penguatan karakter. Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja. Sasaran Kebudayaan: Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya. Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, melalui pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra, serta registrasi, apresiasi dan konservasi produk budaya.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, arah kebijakannya antara lain mengembangkan kurikulum berbasis *Skill, Knowledge, Attitude* Pengembangan *Learning Culture* Penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik Meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan Pendidikan Mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dukung pengembangan Pendidikan

b. Telaah RTRW dan Kajian KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2041. Pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Purworejo meliputi sistem perdesaan, sistem perkotaan, sistem perwilayahan, sistem jaringan prasarana wilayah, serta perwujudan kawasan strategis. Dalam perencanaannya, beberapa aspek menjadi pertimbangan penting, antara lain: struktur ruang yang sudah terbentuk, ketersediaan dan rencana pengembangan sarana prasarana wilayah, serta potensi wilayah yang dimiliki.

Perwujudan sistem perkotaan dan kawasan strategis mencakup pengembangan pusat kegiatan sosial, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Upaya tersebut diarahkan pada: Pengembangan dan pengelolaan kawasan yang berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, Percepatan pengembangan serta peningkatan fungsi PKL menjadi PKW serta Pengembangan sekaligus pemantapan PPL.

Sementara itu, dalam konteks kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis yang mendapat perhatian antara lain adalah kawasan di sekitar Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB). Berdasarkan rencana tata ruang tersebut, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, arah kebijakan, rencana, maupun program pembangunan perlu disinergikan dengan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Purworejo. Hal ini terutama berlaku pada:

a. Bidang pendidikan, seperti pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, serta penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan.
b. Bidang kebudayaan, seperti pengelolaan situs bersejarah, pemeliharaan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Dengan demikian, setiap langkah pembangunan di Kabupaten Purworejo diharapkan sejalan dengan rencana tata ruang, sehingga mampu mendukung pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan, terarah, dan berdaya saing

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo teridentifikasi:

a. Kesenjangan Akses dan Mutu Pendidikan
    1) Masih terdapat anggapan dan mekat kuat di masyarakat terkait perbedaan kualitas antara sekolah di wilayah perkotaan dan perdesaan.
    2) Akses pendidikan di beberapa daerah masih menghadapi kendala sarana prasarana, transportasi.
b. Tuntutan Inovasi dan Digitalisasi Layanan
    1) Perkembangan teknologi menuntut transformasi digital dalam layanan pendidikan maupun administrasi.
    2) Kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur digital masih beragam sehingga implementasi belum optimal.
c. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal
    1) Arus globalisasi dan modernisasi menggeser minat generasi muda terhadap kebudayaan lokal.
    2) Perlu strategi kreatif agar pelestarian seni dan budaya Purworejo dapat menarik minat generasi milenial tanpa kehilangan nilai otentiknya.
d. Keterbatasan Anggaran
    1) Anggaran yang tersedia seringkali harus dibagi untuk berbagai prioritas sehingga pengembangan pelayanan tidak bisa maksimal.
    2) Diperlukan efisiensi serta upaya menggali sumber pendanaan alternatif, termasuk kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat.
e. Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder
    1) Masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung layanan pendidikan dan kebudayaan.
    2) Sinergi antar lembaga, baik pemerintah, sekolah, dunia usaha, maupun komunitas budaya perlu lebih diperkuat.
f. Dinamika Regulasi dan Kebijakan
    1) Perubahan kebijakan dari pemerintah pusat seringkali menuntut penyesuaian cepat di tingkat daerah.
    2) Hal ini menimbulkan tantangan dalam perencanaan jangka panjang dan konsistensi program pelayanan.
g. Tergerusnya minat generasi muda pada seni dan budaya tradisional Purworejo serta terbatasnya dokumentasi dan pengarsipan warisan budaya daerah menjaadi tantangan yang nyata dalam upaya pelestarian kebudayaan local.
h. Adanya globalisasi membuka peluang tenaga kerja luar yang lebih kompeten untuk bekerja (memanfaatkan peluang) di wilayah Purworejo.
    Tidak dipungkiri bahwa di era globalisasi membuka peluang bagi siapa saja dan dimana saja untuk bisa bersaing secara terbuka dalam berbagai hal. Termasuk dalam hal lapangan pekerjaan. Di purworejo pun demikian, jika suatu saat ada pembangunan industri baik skala besar maupun kecil di purworejo, jika tenaga kerja lokal tidak mempunyai kompetensi, maka bersiap-siaplah untuk kedatangan tenaga kerja dari luar bahkan tenaga

kerja asing dengan kompetensi yang dimiliki. Oleh karena itu ini menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan di purworejo agar ke depan pendidikan bisa semakin berkontribusi dalam membentuk generasi yang berkompeten dan terampil, sehingga pada saatnya bisa bersaing dengan dengan tenaga kerja dari luar daerah, bahkan tenaga kerja asing.

i. Globalisasi membuka peluang penyelenggara pendidikan luar masuk
   Sejak beberapa tahun yang lalu di kota-kota besar sudah hadir lembaga-lembaga pendidikan yang nota benenya dioperasikan oleh lembaga-lembaga internasional (asing), yang kurikulumnya tentu juga menetrapkan standar yang berbeda. Di purworejo pun suatu saat nanti kemungkinan juga akan bermunculan. Hal tersebut di satu sisi menjadi pilihan bagi masyarakat, namun di sisi lain tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, karena dioperasikan oleh lembaga-lembaga asing tentu kontrolnya pun tidak mudah. Jangan samapai ke depan keberadaan sekolah-sekolah tersebut nantinya mendisrupsi sekolah-sekolah yang saat ini ada, dan yang paling berbahaya adalah jika sekolah sekolah asing menerapkan kurikukulum yang menumbuhkan bibit-bibit radikalisme dan anti NKRI.
j. Di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, generasi muda dihadapkan pada kemudahan dalam mengakses berbagai informasi dan hiburan. Namun, di balik manfaat besar yang diberikan, tidak sedikit dampak negatif yang muncul. Salah satunya adalah menurunnya karakter dan moralitas generasi muda. Banyak anak muda yang semakin larut dalam dunia digital, menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk bermain media sosial. Kondisi ini menjadikan mereka cenderung bersikap malas, kurang produktif, dan kehilangan kepekaan terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Fenomena kecanduan media sosial juga menimbulkan perubahan pola pikir serta perilaku. Generasi muda lebih mudah terpengaruh oleh budaya instan, menurun semangat belajarnya, dan berkurang rasa tanggung jawabnya. Lebih dari itu, nilai-nilai luhur seperti sopan santun, tenggang rasa, dan sikap hormat terhadap orang tua maupun guru mulai tergerus oleh arus globalisasi yang tidak terbendung.

Peluang pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan yang masih dapat dikembangkan:

a. Ketersediaan Peraturan-peraturan pendukung pendidikan pusat dan daerah yang telah tersedia
   Saat ini sudah tersedian begitu banyak regulasi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal terkait upaya tentang peningkatan kualitas pelayanan pendidikan baik pusat maupun daerah. Dengan banyaknya regulasi tersebut tentu Pemerintah Daerah mempunyai payung hukum yang cukup untuk mengelola bahkan mengalokasikan anggaran sebanyak mungkin untuk pembangunan bidang pendidikan. Karena sebagaimana amanah Undang-undang, bahwa pendidikan mendapatkan porsi anggaran yang paling besar, yaitu 20%. Besarnya alokasi anggaran tersebut tentu menjadi peluang besar agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun dunia pendidikan agar menjadi semakin berkualitas dan semakin terjangkau oleh masyarakat.
b. Ketersediaan berbagai sumber Dana Pendidikan dari pusat dan Propinsi maupun dari lembaga-lembaga non pemerintah yang memberikan bantuan beasiswa
   Peluang bantuan dana pendidikan baik dari pusat provinsi, baik yang berupa bantuan keuangan, maupun hibah untuk saat ini terbuka begitu

luas. Selain itu lembaga-lembaga non pemerintah melalui program CSRnya juga semakin banyak.

c. Otonomi Daerah membuka peluang untuk mengembangkan seluas-luasnya potensi pendidikan di daerah

   Dengan otonomi daerah, membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Potensi daerah daerah tersebut diformulasikan ke dalam sebuah konsep kurikulum lokal untuk kemudian dilakukan kajian dan selanjutkan diterapkan oleh sekolah-sekolah.

d. Keterbukaan Informasi dunia sebagai dampak dari perkembangan dunia Teknologi informasi

   Kemajuan teknologi memberikan dampak positif pada pendidikan dengan mempermudah akses informasi dan sumber belajar melalui platform digital, meningkatkan efisiensi dan inovasi proses belajar-mengajar dengan metode seperti e-learning dan multimedia, serta mendorong kolaborasi global antar siswa dan guru. Teknologi juga menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dengan membuka akses bagi siswa di daerah terpencil dan memberdayakan guru melalui pelatihan dan materi relevan.

2.1.5 Kelompok Sasaran

a. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi dalam merumuskan sekaligus melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan, khususnya terkait pelayanan dasar. Salah satu isu strategis yang hingga kini menjadi perhatian bersama adalah tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS).

Berdasarkan data Pusdatin, jumlah ATS di Kabupaten Purworejo masih tergolong cukup tinggi. Kondisi ini menuntut adanya langkah nyata, terarah, dan berkesinambungan agar permasalahan dapat segera diatasi. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo ditetapkan sebagai Sekretariat Tim Penanganan ATS, dengan peran utama mengoordinasikan berbagai upaya penanganan. Melalui peran tersebut, diharapkan anak-anak yang belum atau tidak bersekolah dapat kembali memperoleh akses pendidikan secara layak, merata, dan berkelanjutan.

b. Siswa (Peserta didik)

Kebijakan pembangunan di bidang pendidikan dalam lima tahun ke depan difokuskan pada satu sasaran utama, yaitu peserta didik. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang diarahkan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Upaya tersebut mencakup peningkatan kualitas serta pengadaan sarana dan prasarana sekolah, penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta perbaikan tata kelola pendidikan. Semua langkah ini bertujuan agar siswa dapat belajar dalam suasana yang nyaman, menyenangkan, dan bermakna. Dengan demikian, diharapkan kompetensi sekaligus karakter peserta didik semakin berkembang, yang salah satunya tercermin dari peningkatan hasil Asesmen Nasional setiap tahunnya.

c. Kelompok kesenian

Program pembangunan di bidang kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah. Salah satu wujud nyata dari pelestarian tersebut adalah meningkatnya jumlah kelompok kesenian yang aktif. Kelompok-kelompok kesenian ini mendapat dukungan berupa bantuan dan pembinaan agar kreativitasnya terus berkembang. Dengan demikian, mereka semakin sering menyelenggarakan pertunjukan atau pementasan. Melalui kegiatan tersebut,

para pegiat kesenian diharapkan dapat memperoleh penghasilan dari bidang seni yang digelutinya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dalam pembangunan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan isu penting karena menunjukkan ketidakselarasan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi nyata selama pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perumusan permasalahan harus dilakukan dengan cermat, karena menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam perencanaan pembangunan. adapun permasalahan terkait pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

a. Kualitas pendidikan yang belum merata
b. Keterbatasan Aksesibilitas, gedung dan ruang kelas yang tidak standar serta Fasilitas sekolah yang terbatas atau tidak memadai
c. Sarana prasarana dan utilitas fisik sekolah dalam kondisi buruk atau tidak terawat
d. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi dan kurangnya fasilitas pembelajaran yang memadai
e. Tidak adanya fasilitas penunjang untuk kenyamanan dan Fasilitas yang tidak mendukung pembelajaran inklusif
f. Fasilitas kesehatan dan keamanan di sekolah yang kurang memadai
g. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas sekolah non formal
h. Sebagian wasyarakat masih ada kesulitan mengakses pendidikan yang layak
i. Rendahnya Kualitas dan Kompetensi sebagian pendidik dan tenaga kependidikan
   Masih banyaknya guru yang belum bersertifikat pendidik, bimtek peningkatan dan upgrading kompetesi guru yang belum bisa menjangkau seluruh guru
j. Kurang optimalnya peran kepengawasan di sekolah
k. Minimnya pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa
l. Minimnya akses terhadap program-program pengembangan minta bakat dan kretivitas siswa
m. Banyak sekolah yang tidak mempunyai kepala sekolah definitive.
   Berdasarkan data terbaru, bahwa pada tahun 2026 terdapat 216 SD yang tidak mempunyai kepala sekolah, selain itu ada juga 75 SD lainnya kepala sekolahnya berakhir untuk masa/ periode pertama. Dan untuk SMP ada 14 Sekolah yang tidak mempunyai Kepala Sekolah. Hal tersebut tentu bisa mengganggu pelayanan kepada para siswa di sekolah-sekolah tersebut.
n. Pemanfaatan Teknologi yang untuk pembelajaran belum optimal
   Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belum memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan pendidikan, terutama pemanfaatannya untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Banyak fitur fitur teknologi terkini yang sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk kegiatan pembelajaran, seperti AI, coding dan fitur lainnya, apalagi mayoritas siswa saat ini sudah sangat akrab bahkan banyak kecanduan bermain HP. Kondisi tersebut tentu harus diupayakan agar keberadaan piranti teknologi seperti HP bisa memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pembelajaran yang bermuara kepada peningkatan kualitas pendidikan.

o. Rendahnya frekuensi penyelenggaraan event budaya daerah yang berdampak pada minimnya pengembangan objek pemajuan kebudayaan;
p. Belum optimalnya pembinaan kesenian tradisional, sehingga banyak group atau kelompok kesenian yang telah diberikan bantuan tidak aktif melakukan pentas atau pertunjukan;
q. Masih rendahnya angka pengunjung tempat-tempat bersejarah;
r. Kurang optimalnya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, sebagai akibat minimnya tenaga juru pelihara cagar budaya yang bersertifikat;
   Belum optimalnya sumber daya permuseuman sehingga berdampak pada rendahnya jumlah kunjungan ke museum
s. kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang optimal, khususnya dalam perumusan kebijakan di bidang pendidikan.
   Hal ini berdampak pada belum maksimalnya penyusunan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, keterbatasan inovasi dalam merancang strategi peningkatan mutu pendidikan, serta lambatnya adaptasi terhadap dinamika kebijakan nasional maupun tantangan global di sektor pendidikan. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas, profesionalisme, dan pemahaman mendalam dari aparatur agar pelayanan publik di bidang pendidikan dapat lebih efektif, terarah, dan berdaya guna.

2.2.1 Isu Strategis

berdasarkan data yang telah diuraikan Uraikan secara lengkap pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan bahwa Permasalahan Penyelenggaraan Bidang urusan wajib yang berkaitan dengan Pendidikan dan kebudayaan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Bonus Demografi	1. Kualitas pendidikan yang belum merata 2. Keterbatasan Aksesibilitas, gedung dan ruang kelas yang tidak standar serta Fasilitas sekolah yang terbatas atau tidak memadai 3. Sarana prasarana dan utilitas fisik sekolah dalam kondisi buruk atau tidak terawat 4. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi dan kurangnya fasilitas pembelajaran yang memadai 5. Tidak adanya fasilitas penunjang untuk kenyamanan dan Fasilitas yang tidak mendukung pembelajaran inklusif 6. Fasilitas kesehatan dan keamanan yang tidak memadai 7. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas sekolah non formal 8. Sebagian wasyarakat masih ada kesulitan mengakses pendidikan yang layak	1. Keterkaitan pembangunan berkelanjutan pada sektor pendidikan (akses, mutu, relevansi) 2. Pemerataan kualitas pendidikan sebagai faktor kunci pengelolaan bonus demografi 3. Peningkatan literasi lingkungan, budaya, dan teknologi 4. Keterkaitan pendidikan dengan pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan	1. Disrupsi teknologi dan digitalisasi pendidikan 2. Kompetisi kualitas SDM antar negara 3. Perubahan iklim yang berdampak pada infrastruktur pendidikan	1. Implementasi Kurikulum Nasional dan kurikulum lokal 2. Agenda transformasi digital pendidikan 3. Target peningkatan IPM dan SDM unggul 4. Kebijakan penguatan pendidikan vokasi dan literasi budaya	1. Tingginya angka ATS di Jawa Tengah 2. Persaingan antar daerah dalam penciptaan tenaga kerja berkualitas 3. Tuntutan revitalisasi budaya daerah sebagai identitas lokal	1. Pemerataan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Sekolah yang kurang memadai 2. Masih Tingginya Anak Tidak Sekolah (ATS) baik yang *Drop out* (DO), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dan Belum Pernak Bersekolah (BPB) 3. Masih Rendahnya Kualifikasi, Kompetensi serta Integritas Sebagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Masih Rendahnya Kualifikasi, Kompetensi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	9. Rendahnya Kualitas dan Kompetensi sebagian pendidik dan tenaga kependidikan 10. Kurang optimalnya peran kepengawasan di sekolah 11. Minimnya pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa 12. Minimnya akses terhadap program-program pengembangan minta bakat dan kretivitas siswa 13. Banyak sekolah yang tidak mempunyai kepala sekolah definitive 14. Pemanfaatan Teknologi yang untuk pembelajaran belum optimal 15. Rendahnya frekuensi penyelenggaraan event budaya daerah 16. Belum optimalnya pembinaan kesenian tradidional 17. Kurang optimalnya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dan museum					serta Integritas Sebagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Belum optimalnya Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 6. Rendanya motivasi dan prestasi siswa dalam bidang oleh raga dan seni 7. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan 8. Masih minimnya minat masyarakat untuk mengunjungi tempat tempat bersejarah

1. Pemerataan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Sekolah yang kurang memadai
   Isu ini mencerminkan adanya ketimpangan kualitas fasilitas pendidikan antar wilayah, baik antara perkotaan dan pedesaan maupun antar satuan pendidikan. Kondisi ini berdampak pada kualitas pembelajaran, keterbatasan akses terhadap teknologi, serta kenyamanan belajar siswa. Akibatnya, standar pelayanan minimal pendidikan sulit tercapai secara merata.
2. Masih Tingginya Anak Tidak Sekolah (ATS) baik yang *Drop out* (DO), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dan Belum Pernak Bersekolah (BPB)
   Tingginya ATS menunjukkan adanya masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang belum terselesaikan. Faktor kemiskinan, perkawinan usia dini, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta keterbatasan akses transportasi menjadi penyebab utama. Jika tidak segera diatasi, hal ini akan menurunkan angka partisipasi sekolah dan menghambat peningkatan kualitas SDM
3. Masih Rendahnya Kualifikasi, Kompetensi serta Integritas Sebagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
   Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan. Rendahnya kualifikasi (belum S1/D4), kurangnya kompetensi pedagogik dan profesional, serta permasalahan integritas (disiplin, tanggung jawab, etos kerja) akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pembelajaran. Kondisi ini juga berimplikasi pada lambannya adaptasi terhadap kurikulum baru dan pemanfaatan teknologi digital.
4. Masih Rendahnya Kualifikasi, Kompetensi serta Integritas Sebagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   Masih adanya pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dengan kualifikasi di bawah standar, kompetensi yang belum optimal, serta integritas yang kurang kuat menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam peningkatan mutu pendidikan. Fenomena ini tampak pada beberapa aspek, antara lain: kualifikasi akademik yang tidak liner bahkan belum S-1, kompetensi pedagogik dan profesional, integritas dan etos kerja.
5. Belum optimalnya Pelaksanaan Akreditasi Sekolah
   Akreditasi sekolah masih sering dianggap sebagai formalitas, bukan sebagai upaya nyata untuk meningkatkan mutu pendidikan. Belum semua sekolah memahami pentingnya akreditasi sebagai instrumen evaluasi mutu. Selain itu, keterbatasan asesor, lemahnya pendampingan, serta rendahnya komitmen sekolah dalam memenuhi standar akreditasi menjadi tantangan tersendiri.
6. Rendanya motivasi dan prestasi siswa dalam bidang oleh raga dan seni
   Minimnya pembinaan dan sarana pendukung olahraga maupun seni membuat prestasi siswa belum optimal. Selain itu, orientasi pendidikan yang lebih fokus pada akademik menyebabkan bidang olahraga dan seni kurang mendapat perhatian. Padahal, pengembangan bakat di kedua bidang tersebut sangat penting untuk membangun karakter, kreativitas, serta kesehatan fisik dan mental siswa.
7. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan
   Budaya lokal menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan budaya menyebabkan tergerusnya nilai-nilai tradisi. Peran serta masyarakat yang belum maksimal juga berpengaruh terhadap keberlangsungan seni, tradisi, dan kearifan lokal sebagai identitas daerah.
8. Masih minimnya minat masyarakat untuk mengunjungi tempat tempat bersejarah

Kurangnya promosi, keterbatasan fasilitas, rendahnya edukasi sejarah, serta kurang menariknya kemasan wisata sejarah membuat masyarakat, terutama generasi muda, kurang tertarik untuk berkunjung ke situs bersejarah. Hal ini mengakibatkan potensi wisata sejarah dan edukasi budaya tidak tergarap optimal, padahal bisa menjadi sumber penguatan identitas serta perekonomian daerah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Tepilih

Visi : Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)

Misi :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera.Terciptanya masyarakat adil dan makmur yang ditandai dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik.
2. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
4. Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

Bahwa sesuai dengan Cascading visi misi Bupati Purworejo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas untuk mewujudkan: misi 1 (satu) yaitu “Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan perangkat daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan melayani masyarakat untuk mencapai visi dan misi daerah, serta menjalankan tugas yang diberikan kepala daerah dan DPRD. Secara umum, tujuan tersebut adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang terstuktur, sistematis, transparan, dan akuntabel. Tujuan perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

“Meningkatkan kualitas pendidikan, pembangunan kebudayaan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah”

Sementara itu Sasaran perangkat daerah adalah tujuan jangka menengah atau jangka panjang yang ingin dicapai oleh sebuah perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yang dijabarkan melalui dokumen perencanaan. Adapun sasaran perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin dicapai berdasarkan berdasarkan tujuan perangkat daerah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah
2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Mutu Pendidikan
3. Meningkatnya peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat Meningkatnya peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat

Adapun indikator dan target tujuan dan sasaran untuk periode lima tahun ke depan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kualitas manusia	Meningkatkan kualitas pendidikan, pembangunan kebudayaan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daera h		Nilai Sakip Perangkat Daerah	68.02	70.45	72.89	75.33	77.76	80.2	
			Harapan Lama Sekolah	14.02	14.15	14.27	14.4	14.52	14.65	
			Rata-Rata Lama Sekolah	9.29	9.45	9.62	9.78	9.94	10.10	
			Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	9.62	9.78	9.95	10.11	10.27	10.43	
			Proporsi Penduduk Berusia di atas 15 Tahunke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	9.18	9.19	9.2	9.21	9.22	9.23	
			Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	31.25 %	32.99 %	34.95 %	36.68 %	38.28%	40.00 %	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	68.02	70.45	72.89	75.33	77.76	80.2	
		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	87.06	87.62	88.18	88.73	89.29	89.85	
			Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	92.63	92.63	96.37	96.98	97.60	98.23	
			Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	99.09	99.15	99.25	99.35	99.45	99.55	
			Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun (Kesetaraan)	20.76	24.86	28.96	33.05	37.15	41.25	
			Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B	80.33	80.40	80.55	80.69	80.76	80.83	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):							
			Literasi Membaca SD/ Sederajat	71.99	74.49	76.99	79.49	81.99	84.49	
			Literasi Membaca SMP/ Sederajat	82.61	83.71	84.81	85.91	87.01	88.11	
			Numerasi SD/ Sederajat	60.47	63.37	66.27	69.17	72.07	74.97	
			Numerasi SMP/ Sederajat	71.41	72.91	74.41	75.91	77.41	78.91	
		Meningkatnya peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	31.25 %	32.99 %	34.95 %	36.68 %	38.28%	40.00 %	

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya pada peningkatan kualitas manusia, sasaran pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan kebudayaan daerah, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
   Kinerja perangkat daerah diukur melalui nilai SAKIP, yang secara konsisten ditargetkan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025, nilai SAKIP ditargetkan sebesar 68,02 dan terus meningkat hingga mencapai 80,20 pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi.
2. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan
   Peningkatan kualitas pendidikan ditunjukkan melalui beberapa indikator.
   a. Harapan Lama Sekolah (HLS) diproyeksikan naik dari 14,02 tahun pada 2025 menjadi 14,65 tahun pada 2030.
   b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk juga ditargetkan naik dari 9,62 tahun di tahun 2025 menjadi 10,43 tahun di tahun 2030. Angka ini konsisten baik untuk seluruh penduduk maupun penduduk usia di atas 15 tahun.
   c. Proporsi penduduk usia di atas 15 tahun dengan pendidikan tinggi sedikit meningkat, dari 9,18% pada 2025 menjadi 9,23% pada 2030.

   Dari sisi aksesibilitas:
   a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk berbagai kelompok umur mengalami peningkatan. APS usia 5–6 tahun meningkat dari 87,06% menjadi 89,85%, sedangkan APS usia 7–12 tahun naik dari 92,63% menjadi 98,23% pada 2030.
   b. APS usia 13–15 tahun hampir merata dengan target di atas 99%, sedangkan APS usia 7–18 tahun (kesetaraan) menunjukkan lonjakan signifikan, dari 20,76% pada 2025 menjadi 41,25% pada 2030.
   c. Persentase satuan pendidikan terakreditasi minimal B relatif stabil, sedikit meningkat dari 80,33% pada 2025 menjadi 80,83% pada 2030.

   Dari segi capaian kompetensi siswa, target literasi membaca dan numerasi pada Asesmen Nasional masing-masing ditargetkan meningkat:
   a. Literasi membaca SD dari baseline 71,99 di tahun 2025 ditargetkan menjadi 84,49 pada tahun 2030, sedangkan SMP dari 82,61 di tahun 2025 ditargetkan menjadi 88,11 di tahun 2030.
   b. Numerasi SD juga ditargetkan tumbuh dari baseline 60,47 di tahun 2025 menjadi 74,97 di akhir periode renstra, sedangkan SMP dari 71,41 menjadi 78,91 pada 2030.
3. Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat
   Pelestarian kebudayaan juga menjadi prioritas penting. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan ditargetkan meningkat secara bertahap dari 31,25% pada tahun 2025 menjadi 40,00% pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga identitas budaya daerah di tengah perkembangan zaman

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan. Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini menjadi panduan dalam menentukan program prioritas serta fokus pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, telah dirumuskan pentahapan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Menguatkan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal	Meningkatkan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal	Memantapkan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal	Mewujudkan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal	Meneguhkan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal
Menguatkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat	Memantapkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat	Mewujudkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat	Meneguhkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat
Menguatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Kemudian untuk arah kebijakan untuk masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	S1, Meningkatnya kualitas manusia	Menguatkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata	Arah Kebijakan 2026 yaitu penguatan layanan pendidikan formal maupun nonformal dengan akses menguatkan dan pemerataan akses dan mutu, pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, , sarana prasarana, penerataan dan distribusi pendidik serta meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta tata kelola perizinan satuan pendidikan, peningkatan karakter dengan pembiasaan berbahasa daerah pada hari hari tertentu .	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Menguatkan kebudayaan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif melalui penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat	Arah Kebijakan 2026 yaitu menguatkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional, Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfatan cagar budaya dalam kegiatan masyarakat, serta meperbaiki tata kelola museum demi meningkatkan daya tarik dan minat masyarakat agar berkunjung ke museum.	
		Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Arah Kebijakan tahun 2026 yaitu Penguatan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan program dan kegiatan, disertai peningkatan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan integritas aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor.	
		Meningkatkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata	Arah Kebijakan 2027 yaitu meningkatkan layanan pendidikan formal maupun nonformal dengan akses menguatkan dan pemerataan akses dan mutu, pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, , sarana prasarana, penerataan dan distribusi pendidik serta meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta tata kelola perizinan satuan pendidikan, peningkatan karakter dengan pembiasaan berbahasa daerah pada hari hari tertentu	
		Meningkatkan kebudayaan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif melalui penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat	Arah Kebijakan 2027 meningkatkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfatan cagar budaya dalam kegiatan masyarakat, serta meperbaiki tata kelola museum demi meningkatkan daya tarik dan minat masyarakat agar berkunjung ke museum.	
		Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Arah Kebijakan 2027 yaitu Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang transparan dan terintegrasi, disertai peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, penyusunan dokumen dan walidata perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, laporan, gaji dan tunjangan ASN, barang milik daerah, serta kepegawaian; penyediaan barang, jasa, logistik, peralatan, sarana prasarana, serta dukungan pelayanan umum kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi kunjungan tamu; penatausahaan arsip, komunikasi, dan utilitas; serta pengadaan dan pemeliharaan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			kendaraan, peralatan, mebel, gedung kantor, dan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah.	
		Memantapkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata	Arah Kebijakan 2028 yaitu memantapkan layanan pendidikan formal maupun nonformal dengan akses menguatkan dan pemerataan akses dan mutu, pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, , sarana prasarana, penerataan dan distribusi pendidik serta meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta tata kelola perizinan satuan pendidikan, peningkatan karakter dengan pembiasaan berbahasa daerah pada hari hari tertentu	
		Memantapkan kebudayaan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif melalui penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat	Arah Kebijakan 2028 yaitu memantapkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfatan cagar budaya dalam kegiatan masyarakat, serta meperbaiki tata kelola museum demi meningkatkan daya tarik dan minat masyarakat agar berkunjung ke museum.	
		Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Arah Kebijakan 2028 yaitu Pemantapan akuntabilitas kinerja melalui konsistensi pelaksanaan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang terukur dan terintegrasi, serta pemantapan kapasitas aparatur untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor.	
		Mewujudkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata	Arah Kebijakan 2029 yaitu mewujudkan layanan pendidikan formal maupun nonformal dengan akses menguatkan dan pemerataan akses dan mutu, pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, , sarana prasarana, penerataan dan distribusi pendidik serta meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta tata kelola perizinan satuan pendidikan, peningkatan karakter dengan pembiasaan berbahasa daerah pada hari hari tertentu.	
		Mewujudkan kebudayaan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif melalui penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat	Arah Kebijakan 2029 yaitu mewujudkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfatan cagar budaya dalam kegiatan masyarakat, serta meperbaiki tata kelola museum demi meningkatkan daya tarik dan minat masyarakat agar berkunjung ke museum.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Perwujudan akuntabilitas kinerja melalui penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang terintegrasi dan berbasis kinerja, serta perwujudan kapasitas aparatur yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor.	
		Meneguhkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata	Arah Kebijakan 2030 yaitu meneguhkan layanan pendidikan formal maupun nonformal dengan akses menguatkan dan pemerataan akses dan mutu, pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, , sarana prasarana, penerataan dan distribusi pendidik serta meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta tata kelola perizinan satuan pendidikan, peningkatan karakter dengan pembiasaan berbahasa daerah pada hari hari tertentu.	
		Meneguhkan kebudayaan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif melalui penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat	Arah Kebijakan 2030 yaitu meneguhkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfatan cagar budaya dalam kegiatan masyarakat, serta meperbaiki tata kelola museum demi meningkatkan daya tarik dan minat masyarakat agar berkunjung ke museum.	
		Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peneguhan akuntabilitas kinerja melalui penguatan penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang akuntabel dan berkelanjutan, serta peneguhan kapasitas aparatur yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran demi tercapainya visi-misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu:

1. Pemberian beasiswa pendidikan bagi peserta didik berprestasi.
2. Fasilitasi teknologi informasi yang mendukung pendidikan dan pembelajaran yang inovatif;
3. Pemberian pendidikan dan pelatihan lanjutan untuk peningkatan kualitas guru;
4. Pembaruan sarana prasarana sekolah untuk menjamin mutu pendidikan; dan
5. Pelestarian warisan budaya, kepurbakalaan, permuseuman, tata nilai budaya, seni tradisional, tradisi, adat, dan tradisi.

Program Bupati dan Wakil Bupati tersebut tertuang dalam beberapa Beberapa program yang telah dirumuskan masing-masing terdapat indikator serta sasaran (*outcome*), dan masing indikator dan sasaran tersebut didukung kegiatan dan subkegiatan yang mempunyai daya ungkit demi tercapainya indikator dan sasaran (*outcome*) program yang dimaksud. Berikut adalah program yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam lima tahun ke depan, yaitu:

Tabel 4.1

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
S1, Meningkatnya kualitas manusia	1, Meningkatkan kualitas pendidikan, pembangunan kebudayaan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai Sakip Perangkat Daerah		
					Harapan Lama Sekolah		
					Rata-Rata Lama Sekolah		
					Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun		
					Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi		
					Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Sakip Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Aset Tak Berwujud	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pendidikan			Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun		
					Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun		
					Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun		
					Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun (Kesetaraan)		
					Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):		
					Literasi Membaca SD/ Sederajat		
					Literasi Membaca SMP/ Sederajat		
					Numerasi SD/ Sederajat		
					Numerasi SMP/ Sederajat		
			Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana sesuai standar		Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
						Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
						Pengadaan Mebel Sekolah	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Pengadaan Mebel Sekolah	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik			
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
						Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
				Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	Jumlah Sarana/Prasarana Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Kondisinya Baik	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			Meningkatnya kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan seluruh jenjang		Persentase satuan pendidikan yang memiliki kualitas pembelajaran dengan kategori baik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki indeks kualitas pembelajaran	jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				dengan label capaian baik			
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
						Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
				Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik	jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
						pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
						Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
				Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan kualitas proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini	jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan kualitas proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
						Pengelolaan Dana BOP PAUD	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
						Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
						Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
			Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh jenjang		Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Terakhir S-1/ D-IV dan Bersertifikat Pendidik di Seluruh Jenjang	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan		
				Meningkatnya jumlah guru Sekolah Dasar yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik	Jumlah guru Sekolah Dasar yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
						Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
						Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				Meningkatnya jumlah guru Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik	Jumlah guru Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
						Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
						Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				Meningkatnya jumlah guru PAUD yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik	Jumlah guru PAUD yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
				Meningkatnya jumlah guru Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik	Jumlah guru Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal pendidikan		Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal yang Telah Ditetapkan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
				Ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
						Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
						Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
						Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			Meningkatnya kualitas dan		Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Masyarakat yang Berizin	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			distribusi institusi pendidikan				
				Meningkatnya jumlah satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berizin	Jumlah satuan pendidikan dasar yang berizin	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
						Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
						Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
				Meningkatnya jumlah Satuan pendidikan PAUD dan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berizin	Jumlah Satuan pendidikan PAUD dan Nonformal yang berizin	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
						Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
						Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
						Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Terlaksananya Pengembangan bahasa dan sastra daerah		Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan menerapkan pembiasaan penggunaan bahasa jawa	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Diterapkannya pembiasaan penggunaan dan pengembangan bahasa Jawa di satuan pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pembiasaan penggunaan Bahasa Jawa dan mengembangkannya	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota	
		Meningkatnya peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat			Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				Terkelolanya objek kebudayaan masyarakat	Jumlah Obyek Kebudayaan Masyarakat Yang Dikelola	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
				Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional masyarakat	Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
			Meningkatnya peran serta		Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional		Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir		
				Meningkatnya jumlah Kesenian Tradisonal Masyarakat Yang Dibina	Jumlah Kesenian Tradisonal Masyarakat Yang Dibina	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah		Persentase Keterlibatan Masyarakat Pelaku Sejarah lokal	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
				Meningkatnya jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		Persentase Cagar Budaya (CB) yang Dikelola Secata Terpadu	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Ditetapkannya objek yang diduga Cagar Budaya menjadi cagar budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah usulan Penetapan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
						Penetapan Cagar Budaya	
				Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
						Pelindungan Cagar Budaya	
						Pemanfaatan Cagar Budaya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya tata kelola museum		Prosentasi peningkatan kunjungan museum	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
				Meningkatnya jumlah kunjungan museum	Jumlah kunjungan museum	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
						Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	
						Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	
						Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	
						Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas pendidikan, peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,55	14,15		14,27		14,4		14,52		14,65		14,65			
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,65	9,29		9,45		9,62		9,78		9,94		10,10			
			Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	8,98	9,78		9,95		10,11		10,27		10,43		10,43			
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,17	9,19		9,2		9,21		9,22		9,23		9,23			
			Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	%	29,27	32,99		34,95		36,68		38,28		40		40			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						590.718.189.636		579.128.274.692		580.718.180.337		578.430.366.760		578.430.353.352				
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	0	100	590.718.189.636	100	579.128.274.692	100	580.718.180.337	100	578.430.366.760	100	578.430.353.352	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	24	129.121.800	24	140.285.150	24	146.899.000	24	153.843.300	24	161.136.065	120			
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	45.883.000	22	48.177.150	22	50.586.000	22	53.115.300	22	55.771.065	110			
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	24	80.103.300	24	84.108.000	24	88.313.000	24	92.728.000	24	97.365.000	120			
1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	1	3.135.500	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	5			
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	26	44	589.301.797.408	44	576.592.395.952	44	578.910.474.137	44	576.635.747.460	44	576.563.408.037	220			
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	5.488	5.488	589.279.189.808	5.488	576.568.658.952	5.488	578.885.551.137	5.488	576.609.578.460	5.488	576.535.931.037	5.488			
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	44	22.607.600	44	23.737.000	44	24.923.000	44	26.169.000	44	27.477.000	220			
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	11	65.789.900	11	69.000.000	11	70.000.000	11	72.000.000	11	75.000.000	55			
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	11	65.789.900	11	69.000.000	11	70.000.000	11	72.000.000	11	75.000.000	55			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	0	16	10.611.600	16	10.000.000	16	10.500.000	16	11.025.000	16	11.576.250	80			
1.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	0	16	10.611.600	16	10.000.000	16	10.500.000	16	11.025.000	16	11.576.250	80			
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	100	19	1.840.900	18	3.405.000	18	3.574.000	18	3.752.000	18	3.938.000	91			
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	17	2.011.000	17	2.111.000	17	2.216.000	17	2.326.000	68			
1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	512.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	0	0	200	1.394.000	200	1.463.000	200	1.536.000	200	1.612.000	800			
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	100	1.328.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	100	8	191.918.200	8	201.509.690	8	210.578.000	8	211.113.000	8	221.665.000	40			
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	12.520.900	5	13.146.000	5	13.800.000	5	14.500.000	5	15.225.000	24			
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5	11.739.600	5	12.326.000	5	12.942.000	5	13.589.000	5	14.268.000	25			
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	84.949.800	12	89.197.000	12	92.656.000	12	87.288.000	12	91.652.000	12			
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7	14.731.300	7	15.467.000	7	16.240.000	7	17.052.000	7	17.904.000	7			
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	2	6.367.000	2	6.685.000	2	7.020.000	2	7.370.000	2	7.738.000	2			
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	720.600	12	756.000	12	790.000	12	829.000	12	870.000	12			
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	56.177.800	12	58.986.690	12	61.936.000	12	65.032.000	12	68.283.000	12			
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	4	4.711.200	4	4.946.000	4	5.194.000	4	5.453.000	4	5.725.000	4			
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	6	0		29	1.057.812.900	14	201.771.100	13	65.000.000	0		56			
1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	2	624.235.800	0	0	0	0	0	0	2			
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	10	56.000.000	0	0	13	65.000.000	0	0	23			
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	0	0	14	201.771.100	14	201.771.100	0	0	0	0	28			
1.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	81.872.000	0	0	0	0	0	0	1			
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	3	93.934.000	0	0	0	0	0	0	3			
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	24	519.333.378	24	541.095.000	24	567.146.000	24	595.504.000	24	625.278.000	24			
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	374.690.000	12	389.220.000	12	408.678.000	12	429.113.000	12	450.568.000	12			
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	144.643.378	12	151.875.000	12	158.468.000	12	166.391.000	12	174.710.000	12			
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	5	497.776.450	5	512.771.000	5	597.238.100	5	682.382.000	5	768.352.000	25			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	94	1	40.234.200	1	40.667.000	1	40.667.000	1	40.667.000	1	40.667.000	1			
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	94	93	172.460.000	93	172.460.000	93	225.159.050	93	286.980.000	93	356.740.000	93			
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	95	20	4.944.250	20	5.500.000	20	5.500.000	20	5.500.000	20	5.500.000	20			
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	86	86	151.221.000	86	151.221.000	86	158.782.050	86	175.000.000	86	183.750.000	86			
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	17	17	128.917.000	17	128.917.000	17	142.130.000	17	149.235.000	17	156.695.000	17			
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	1	14.006.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2			
2	Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pendidikan		Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	85,5	87,62		88,18		88,73		89,29		89,85		89,85			
			Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	%	92,08	92,63		96,37		96,98		97,6		98,23		98,23			
			Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	%	97,7	99,15		99,25		99,35		99,45		99,55		99,55			
			Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun (Kesetaraan)	%	16,65	24,86		28,96		33,05		37,15		41,25		41,25			
			Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B	%	80,33	80,4		80,55		80,69		80,76		80,83		80,83			
			Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang): a. Literasi Membaca SD/ Sederajat	%	71,99	76,99		79,49		81,99		84,49		84,49		84,49			
			Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang): b. Literasi Membaca SMP/ Sederajat	%	82,61	84,81		85,91		87,01		88,11		88,11		88,11			
			Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang): c. Numerasi SD/ Sederajat	%	60,47	66,27		69,17		72,07		74,97		74,97		74,97			
			Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang): d. Numerasi SMP/ Sederajat	%	71,41	74,41		75,91		77,41		78,91		78,91		78,91			
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						125.127.931.679		130.083.653.000		124.967.255.000		126.940.951.000		128.945.907.000				
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana sesuai standar	Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik	%	74,23	76,6	124.903.887.379	78,39	130.000.000.000	80,19	124.903.887.000	82,7	126.877.369.000	85,21	128.882.031.000	85,21	Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan seluruh jenjang	Persentase satuan pendidikan yang memiliki kualitas pembelajaran dengan kategori baik	%	44,13	53,6		53,63		53,84		54,06		54,27		54,27	Bidang Pengembangan, Kurikulum, Bahasa Dan Sastra	Kabupaten Purworejo	
		Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh jenjang	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Terakhir S-1/ D-IV dan Bersertifikat Pendidik di Seluruh Jenjang	%	64,64	64,54		68,08		73,18		78,2		81,91		81,91	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kabupaten Purworejo	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
			Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	%	24,13	52,51		56,72		62,15		72,55		85,73		85,73	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kabupaten Purworejo	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	Satuan Pendidikan	398	406	67.391.843.479	416	72.199.344.140	426	66.812.197.265	446	68.420.012.560	446	70.631.765.760	446			
		Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik	jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik	Satuan Pendidikan	284	366		369		367		369		371		371			
		Meningkatnya jumlah guru Sekolah Dasar yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik	Jumlah guru Sekolah Dasar yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik	Orang	3.143	3.343		3.543		3.743		3.943		4.243		4.243			
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	1	4.000.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	2	0	0	2	200.000.000	0	0	2	200.000.000	2	200.000.000	6			
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	2	200.000.000	0	0	2	200.000.000	2	200.000.000	6			
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	2	8	1.244.015.000	14	1.050.000.000	9	750.000.000	9	750.000.000	9	750.000.000	49			
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	2	270.000.000	5			
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	1	100.000.000	2	210.000.000	1	100.000.000	2	210.000.000	2	210.000.000	8			
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	9	100	935.922.000	13	550.000.000	13	550.000.000	13	550.000.000	13	550.000.000	152			
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	3.780	3.780	455.706.200	1.601	1.326.546.800	801	455.706.200	801	455.706.200	801	594.066.800	7.784			
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.529	520	4.596.519.600	520	4.578.209.281	520	4.596.519.600	520	4.596.519.600	520	4.596.519.600	520			
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	4.760	4.863	131.206.000	4.863	131.206.000	4.863	131.206.000	4.863	131.206.000	4.863	131.206.000	4.863			
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	489	489	10.543.500	489	10.543.500	489	10.543.500	489	10.543.500	489	10.543.500	489			
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	489	489	52.613.130.079	489	52.613.130.079	489	52.613.130.079	489	52.613.130.079	489	52.613.130.079	489			
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	486	489	41.296.600	489	45.426.260	489	41.296.600	489	41.296.600	489	74.646.867	489			
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	3	0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	3	750.000.000	4			
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	50	50	11.489.400	50	12.063.870	50	12.667.064	50	13.300.417	50	13.965.438	250			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	4.147.300	1	4.354.665	1	4.147.300	1	4.147.300	1	4.147.300	5			
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	16	16	3.827.100	16	3.827.100	16	7.748.500	16	8.135.900	16	8.542.500	16			
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	2	755.626.500	0	0	1	350.000.000	0	0	0	0	3			
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	8	780.000.000	8	780.000.000	10	928.413.583	9	879.904.560	8	780.000.000	43			
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	2.670	180	33.947.700	180	35.645.085	180	37.427.339	200	117.730.904	180	101.606.176	920			
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	489	489	3.403.637.900	489	3.403.637.900	489	3.403.637.900	489	3.403.637.900	489	3.403.637.900	489			
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	16	8	1.182.845.500	18	1.925.000.000	20	2.025.000.000	24	3.440.000.000	35	4.725.000.000	105			
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	30.887	20.376	161.825.600	20.376	161.825.600	20.376	161.825.600	20.376	161.825.600	20.376	161.825.600	101.880			
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	61	20	926.157.500	10	482.928.000	10	482.928.000	10	482.928.000	10	482.928.000	60			
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	Satuan Pendidikan	43	43	36.346.273.400	45	37.491.314.200	50	37.919.270.735	55	38.256.810.780	70	38.049.719.580	70			
		Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik	jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik	Satuan Pendidikan	31	41		43		44		44		44		44			
		Meningkatnya jumlah guru Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik	Jumlah guru Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik	Orang	789	900		950		1.000		1.100		1.100		1.100			
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	150.000.000	1	150.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	14			
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	14	1	150.000.000	4	820.000.000	4	820.000.000	4	820.000.000	4	820.000.000	17			
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	2	460.000.000	2	460.000.000	2	460.000.000	2	460.000.000	8			
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5			
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	4	1	100.000.000	2	225.000.000	3	360.000.000	3	360.000.000	3	360.000.000	12			
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	7	10	1.550.000.000	10	680.000.000	10	680.000.000	10	680.000.000	10	680.000.000	50			
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1.100	1.100	112.935.800	1.100	112.935.800	1.100	122.602.400	1.100	122.602.400	1.100	122.602.400	5.500			
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	823	731	210.242.000	731	210.242.000	731	250.000.000	731	250.000.000	731	250.000.000	3.655			
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.524	150	1.240.701.800	150	1.240.701.800	120	1.000.000.000	120	1.000.000.000	120	1.000.000.000	120			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1.200	960	78.178.000	960	78.178.000	960	78.178.000	0	78.178.000	960	78.178.000	960			
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	581	577	40.669.900	577	50.000.000	577	40.669.900	577	40.669.900	577	40.669.900	577			
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	88	89	30.275.645.000	89	30.275.645.000	89	30.275.645.000	89	30.275.645.000	89	30.275.645.000	89			
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	227	227	29.340.200	227	29.340.200	227	29.340.200	227	29.340.200	227	65.800.000	227			
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	0	11	13.811.200	11	13.811.200	11	30.000.000	11	30.000.000	11	30.000.000	55			
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	50	50	8.371.200	50	8.371.200	89	30.000.000	89	30.000.000	89	30.000.000	89			
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	1	10.065.000	1	10.065.000	1	10.065.000	1	16.000.000	1	17.200.000	5			
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0	1	62.099.300	0	0	0	0	0	0	1			
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	89	89	2.062.099.300	89	2.000.000.000	89	2.062.099.300	89	2.059.762.780	89	2.059.761.780	89			
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	2	0	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	0	0	3			
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	90	14.214.000	90	14.924.700	90	15.670.935	90	49.612.500	90	49.612.500	90			
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	110.250.000	5			
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	17	0	0	5	500.000.000	5	500.000.000	5	800.000.000	5	800.000.000	20			
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	Satuan Pendidikan	608	618	18.801.200.100	628	18.048.378.760	638	17.911.456.100	648	17.939.582.760	668	17.939.582.760	668			
		Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan kualitas proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini	jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan kualitas proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini	Satuan Pendidikan	237	334		334		335		336		337		337			
		Meningkatnya jumlah guru PAUD yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik	Jumlah guru PAUD yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik	Orang	552	602		702		802		902		1.002		1.002			
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5			
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	0	250	1.261.600	250	8.937.600	250	8.937.600	250	8.937.600	250	8.937.600	250			
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1.356	1.854	4.922.746.400	1.854	4.960.594.900	1.854	4.960.594.900	1.854	4.960.594.900	1.854	4.960.594.900	1.854			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	100	424	979.516.600	425	1.001.700.260	425	1.001.700.260	425	1.001.700.260	425	1.001.700.260	425			
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	795	802	11.500.532.000	802	11.419.200.000	802	11.419.200.000	802	11.419.200.000	802	11.419.200.000	802			
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	0	50	28.316.600	50	28.316.600	100	53.431.000	125	68.500.000	125	68.500.000	450			
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	4.629.400	1	4.629.400	1	5.092.340	1	18.150.000	1	18.150.000	5			
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	4			
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	20	23	645.000.000	5	100.000.000	7	137.500.000	7	137.500.000	7	137.500.000	49			
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	10	6	619.197.500	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	10			
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	Satuan Pendidikan	3	3	2.364.570.400	3	2.260.962.900	3	2.260.962.900	3	2.260.962.900	4	2.260.962.900	4			
		Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik	jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik	Satuan Pendidikan	4	4		4		4		4		4		4			
		Meningkatnya jumlah guru Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik	Jumlah guru Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik	Orang	23	25		27		29		31		35		35			
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	88	139	95.460.100	150	162.596.500	150	162.596.500	150	162.596.500	150	162.596.500	739			
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	50	1.526.600	50	8.937.600	50	8.937.600	50	8.937.600	50	8.937.600	50			
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	9	10	77.692.300	10	90.612.600	10	90.612.600	10	90.612.600	10	90.612.600	10			
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	10	10	1.793.548.500	10	1.852.599.000	10	1.852.599.000	10	1.852.599.000	10	1.852.599.000	10			
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	2.019.200	1	5.217.200	1	5.217.200	1	5.217.200	1	5.217.200	5			
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	246	12	9.323.700	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	60			
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	1	0	0	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	4			
1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	4	385.000.000	1	66.000.000	1	66.000.000	1	66.000.000	1	66.000.000	8			
01.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal yang Telah Ditetapkan	%	15,54	15,54	13.560.000	15,54	23.165.000	95,35	13.560.000	100	13.774.000	100	13.992.000	100	Bidang Pengembangan, Kurikulum,	Kabupaten Purworejo	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
																	Bahasa Dan Sastra		
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	Dokumen	0	1	13.560.000	1	23.165.000	1	13.560.000	1	13.774.000	1	13.992.000	5			
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	0	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0	1			
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku	3	0	0	0	0	1	13.560.000	0	0	0	0	1			
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang	114	43	13.560.000	43	18.165.000	0	0	43	13.774.000	43	13.992.000	43			
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	0	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0	1			
01:01:05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan oleh Masyarakat yang Berizin	%	100	100	4.808.100	100	15.488.000	100	4.808.000	100	4.808.000	100	4.884.000	100	Pengelolaan Dan Perizinan Pendidikan	Kabupaten Purworejo	
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berizin	Jumlah satuan pendidikan dasar yang berizin	Satuan Pendidikan	78	78	780.000	78	10.000.000	78	2.308.000	78	2.308.000	78	2.308.000	78			
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	1	780.000	1	10.000.000	1	2.308.000	1	2.308.000	1	2.308.000	5			
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatnya jumlah Satuan pendidikan PAUD dan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berizin	Jumlah Satuan pendidikan PAUD dan Nonformal yang berizin	Satuan Pendidikan	800	800	4.028.100	800	5.488.000	800	2.500.000	800	2.500.000	800	2.576.000	800			
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	1	1.932.800	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.576.000	5			
1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	1	2.095.300	1	2.988.000	0	0	0	0	0	0	2			
01.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Meningkatnya penggunaan bahasa daerah	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan dan Menerapkan Pembiasaan Penggunaan Bahasa Jawa	%	0	87,22	205.676.200	87,22	45.000.000	95,35	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	Bidang Pengembangan, Kurikulum, Bahasa Dan Sastra	Kabupaten Purworejo	
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Diterapkannya pembiasaan penggunaan dan pengembangan bahasa Jawa di satuan pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pembiasaan penggunaan Bahasa Jawa dan mengembangkannya	Satuan Pendidikan	0	505	205.676.200	505	45.000.000	552	45.000.000	579	45.000.000	579	45.000.000	579			
1.01.06.2.01.0010	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota	Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di kab/kota	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota	Orang	0	489	205.676.200	489	45.000.000	489	45.000.000	489	45.000.000	489	45.000.000	489			
3	Meningkatnya peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat		Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	%	29,27	32,99		34,95		36,68		38,28		40		40			
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						5.712.912.950		3.102.332.000		2.948.371.000		2.976.491.000		3.005.057.000				
02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	%	70	70	3.933.101.750	80	1.168.559.000	80	1.168.559.000	80	1.168.559.000	80	1.168.559.000	80	Bidang Kebudayaan	Kabupaten Purworejo	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya objek kebudayaan masyarakat	Jumlah Obyek Kebudayaan Masyarakat Yang Dikelola	Jenis	3	3	267.514.900	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	1.050	1.000	267.514.900	1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	5.000			
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional masyarakat	Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat	Laporan	2	2	3.665.586.850	2	968.559.000	2	968.559.000	2	968.559.000	2	968.559.000	2			
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	1	1	3.652.498.950	1	955.471.100	1	955.471.100	1	955.471.100	1	955.471.100	1			
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	2	2	13.087.900	2	13.087.900	2	13.087.900	2	13.087.900	2	13.087.900	10			
02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	%	52,6	54,61	58.796.500	58,02	68.535.000	61,43	58.797.000	64,85	59.725.000	68,26	60.669.000	68,26	Bidang Kebudayaan	Kabupaten Purworejo	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah Kesenian Tradisonal Masyarakat Yang Dibina	Jumlah Kesenian Tradisonal Masyarakat Yang Dibina	Kesenian	3	3	58.796.500	3	68.535.000	3	58.797.000	3	59.725.000	3	60.669.000	3			
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	300	60	58.796.500	60	68.535.000	60	58.797.000	60	59.725.000	60	60.669.000	300			
02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase Keterlibatan Masyarakat Pelaku Sejarah Lokal	%	3,53	7,23	520.222.000	7,23	528.442.000	7,28	520.222.000	7,3	528.442.000	7,32	536.791.000	7,32	Bidang Kebudayaan	Kabupaten Purworejo	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	19.130	29.713	520.222.000	30.307	528.442.000	31.531	520.222.000	32.162	528.442.000	32.162	536.791.000	155.875			
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	468	500	520.222.000	500	528.442.000	500	520.222.000	500	528.442.000	500	536.791.000	2.500			
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu	%	28,52	32,04	200.424.200	33,8	320.622.000	35,56	200.424.000	36,97	203.591.000	38,73	206.808.000	38,73	Bidang Kebudayaan	Kabupaten Purworejo	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Ditetapkannya objek yang diduga Cagar Budaya menjadi cagar budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah usulan Penetapan Cagar Budaya	Cagar Budaya	16	10	49.444.400	10	49.444.400	10	49.444.400	10	49.444.400	10	49.444.400	50			
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	16	10	49.444.400	10	49.444.400	10	49.444.400	10	49.444.400	10	49.444.400	50			
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola	Cagar Budaya	81	101	150.979.800	111	271.177.600	121	150.979.600	131	154.146.600	141	157.363.600	141			
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	81	101	125.128.300	111	131.384.715	121	125.128.300	131	125.128.300	141	125.128.300	141			
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Obyek	5	5	25.851.500	5	139.792.885	5	25.851.300	5	29.018.300	5	32.235.300	5			
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	%	63	2	1.000.368.500	2	1.016.174.000	2	1.000.369.000	2	1.016.174.000	2	1.032.230.000	2	Bidang Kebudayaan	Kabupaten Purworejo	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah kunjungan museum	Jumlah kunjungan museum	Orang	18.000	18.360	1.000.368.500	18.727	1.016.174.000	19.101	1.000.369.000	19.483	1.016.174.000	19.872	1.032.230.000	19.872			
2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Unit	1	1	26.236.000	1	27.547.800	1	25.742.800	1	25.742.800	1	35.742.800	1			
2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	0	0	0	14	20.000.000	7	6.000.000	0	0	0	0	21			
2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit	1	1	883.523.600	1	883.523.600	1	883.523.600	1	905.328.600	1	901.384.600	1			
2.22.06.201.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Museum	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Museum	Unit	1	1	90.608.900	1	85.102.600	1	85.102.600	1	85.102.600	1	95.102.600	1			
Jumlah							**721.559.034.265**		**712.314.259.692**		**708.633.806.337**		**708.347.808.760**		**710.381.317.352**				

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan disusun sebagai upaya komprehensif dalam peningkatan mutu dan akses layanan pendidikan di semua jenjang mulai SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); penyediaan/ rehabilitasi sarana-prasarana, dan penguatan utilitas sekolah; pengadaan sarana-prasarana pendukung pembelajaran berbasis TIK; serta pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh satuan Pendidikan. Program ini mencakup peningkatan kualitas pembelajaran; Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru PAI; peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan bimtek peningkatan kapasitas dan kompetensi; operasional satuan Pendidikan; pemberian hibah bantuan sekolah (Bansek); pelatihan dan pengembangan pembelajaran digital; pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah inklusi; pelaksanaan penerimaan murid baru; fasilitasi asasmen nasional; fasilitasi dewan Pendidikan; fasilitasi PIP; pembinaan dan pemberian hibah kepada sekolah swata dan pendidik PAUD; pemberian beasiswa ATS dan peserta didik berprestasi; pembinaan anak beriman dan berkepribadian; pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa; fasilitasi akreditasi sekolah; pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi; dan fasilitasi, identifikasi/ pemetaan, dan pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase santuan pendidikan yang sarana/prasarananya dalam kondisi baik sebesar 85,21%;. Program ini juga ditargetkan mencapai persentase guru yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik di seluruh jenjang sebesar 81,91% dan mencapai persentase satuan Pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan sebesar 85,73% di tahun 2030.

2. Program Pengembangan Kurikulum

Program Pengembangan Kurikulum bertujuan untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pembelajaran melalui penyediaan kurikulum muatan lokal sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan implementasi kurikulum muatan lokal dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Salah satu fokus utama program ini adalah pengembangan Muatan Lokal di jenjang Pendidikan Dasar guna menanamkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, potensi wilayah, serta keterampilan hidup yang relevan dengan lingkungan peserta didik. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase satuan pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal yang telah ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2029 hingga 2030.

3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan merupakan upaya strategis untuk menjamin bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memenuhi standar minimal kelayakan, legalitas, dan kualitas layanan pendidikan. Program ini mencakup penilaian, pengendalian, pengawasan, serta pembinaan terhadap lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh mayarakat pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penyelenggaraan pendidikan oleh

masyarakat yang berizin sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD sebagaimana kondisi kinerja di awal Renstra yang telah mencapai 100%.

4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program Pengembangan Bahasa dan Sastra bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kekayaan bahasa daerah serta meningkatkan apresiasi terhadap sastra lokal di kalangan peserta didik. Salah satu bentuk kegiatan dalam program ini adalah fasilitasi lomba Festival Bahasa Ibu, yang diselenggarakan sebagai wadah ekspresi, pelestarian, dan pembinaan bahasa ibu di lingkungan pendidikan Program ini juga menjadi bagian dari upaya strategis pelestarian bahasa daerah yang terancam punah dengan penerapan pembiasaan pengguaan Bahasa jawa pada hari tertentu. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan menerapkan pembiasaan penggunaan bahasa jawa sebesar 100% pada tahun 2030.

5. Program Pengembangan Kebudayaan

Program Pengembangan Kebudayaan bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kesenian dan budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah serta sarana pembentukan karakter masyarakat. Program ini mencakup pembinaan lembaga kebudayaan dan kesenian; peningkatan kapasitas pelaku budaya; penyediaan alat kesenian kepada kelompok kesenian; dan penyelenggaraan pentas kesenian. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan sebesar 80% di tahun 2030.

6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas pelaku seni. Salah satu kegiatan strategis dalam program ini adalah pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi SDM kesenian tradisi di Kabupaten Purworejo. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir sebesar 68,26% di tahun 2030. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dapat meningkat.

7. Program Pembinaan Sejarah

Program Pembinaan Sejarah bertujuan untuk memperkuat identitas dan jati diri daerah melalui melalui pelestarian nilai-nilai sejarah dan tradisi lokal. Kegiatan dalam program ini menjadi sarana edukasi, refleksi, dan perwujudan penghargaan terhadap sejarah serta warisan budaya daerah. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase keterlibatan masyarakat pelaku sejarah lokal sebesar 7,32% hingga akhir periode Renstra. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi sejarah.

8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini bertujuan menjaga keberlanjutan keberadaan cagar budaya sebagai identitas lokal sekaligus sumber pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata melalui melalui kajian dan penetapan objek yang diduga cagar budaya (ODCB); perawatan, pemeliharaan, dan perlindungan cagar budaya, serta pemanfaatan cagar budaya. Program ini ditargetkan untuk pencapaian

persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu sebesar 38,73% di akhir periode Renstra.

9. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini bertujuan untuk menjadikan museum sebagai pusat edukasi, pelestarian, serta ruang interaksi budaya yang aktif, dinamis, dan inklusif dalam rangka pelestarian warisan budaya dan peningkatan literasi sejarah masyarakat. Berbagai kegiatan dalam program ini dilaksanakan untuk memperkuat fungsi museum sebagai institusi publik yang mengelola, merawat, dan memamerkan benda-benda bersejarah dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Program ini diarahkan melalui kegiatan operasional museum; pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatan koleksi museum; pameran museum; peningkatan kapasitas sumber daya manusia permuseuman; serta penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola museum dengan target persentase peningkatan kunjungan museum sebesar 2% di setiap tahun hingga akhir periode Renstra.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra	
				Penyusunan Renja	
				Penyusunan RKA-SKPD	
				Penyusunan Perubahan Renja	
				Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	
				Penyusunan DPA-SKPD	
				Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko	
				Forum Konsultasi Publik	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Penyusunan Data Dasar Pembangunan	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan kinerja bulanan	
				Penyusunan Laporan Renstra Triwulanan	
				Penyusunan LKJIP	
				Penyusunan LKPJ	
				Penyusunan LPPD	
				Penyusunan laporan SPIP	
				Penyusunan laporan SKM	
				Penyusunan laporan SPM	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan RKBDM	
				Penatausahaan BMD	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Mobil Operasional	
				Pengadaan Motor Operasional untuk Pengawas Sekolah	
			Pengadaan Mebel	Pengadaan Meubelair	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Laptop	
				Pengadaan Printer	
				Pengadaan Scanner	
				Pengadaan Panel Layar Sentuh	
				Pengadaan LCD Proyektor	
				Pengadaan Screen Motorize	
				Pengadaan Kursi ruang tunggu lobi	
				Adminidtrasi Pengadaan	
				Pengadaan alat Penghancur Kertas	
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Pengadaan Aplikasi untuk pelayanan Publik	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Listrik (termasuk 16 Wilcambidik)	
				Langganan Telepon (termasuk 16 Wilcambidik)	
				Langganan Air (termasuk 16 Wilcambidik)	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Keamanan	
				Penyediaan Jasa Pengemudi	
				Penyediaan Jasa Kebersihan	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Mobil Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Mobil Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Sepeda Motor Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Meubelair	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pemeliharaan Lift	
				Pemeliharaan AC Central 5-10PK	
				Pemeliharaan AC Split	
				Pemeliharaan Komputer, Laptop	
				Pemeliharaan Printer dan Scanner	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor Dindikbud	
				Pemeliharaan Gedung Wilcambidik	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana sesuai standar	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		
		Meningkatnya kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan seluruh jenjang			
		Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh jenjang			
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Relokasi SD Negeri Sebomenggalan	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Pagar	
				Pembangunan Jamban	
				Pembangunan Talud	
				Pembangunan Gapura	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
				Pembangunan Aula	
				Pembangunan Musholla	
				Pavingisasi Halaman Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
			Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Meubelair Sekolah	
				Pengadaan meja kursi siswa	
				Pengadaan mebeler sekolah	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan peralatan kebersihan sekolah pendukung sekolah adiwiyata	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Lomba-lomba tingkat Kabupaten (OSN. OOSN, FLS3N, MAPSI)	
				Lomba lomba tingkat provinsi (OSN. OOSN, FLS3N, MAPSI)	
				Lomba lomba tingkat nasional	
				Tuan Rumah Lomba MAPSI Tingkat Provinsi	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	PDPS (Honor GTT dan PTT)	
				Honor PPPK Paruh Waktu	
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				Pendampingan CPNS/PPPK	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi PAK Pendidiak SD dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	
				Pemberkasan dan Verifikasi Sertifikasi Pendidik SD	
				Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah	
				Diklat Calon Kepala Sekolah	
				Seleksi Substansi Calon Kepala Sekolah	
				PPG Guru PAI	
				Fasilitasi Guru Prestasi	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Belanja Barang dan Jasa BOS	
				Belanja Modal BOS	
				Belanja Hobah BOS	
				BOS Kinerja	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Evaluasi BOS	
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BOSP	
				Rekonsiliasi BOS	
				Bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan BOS	
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Bimtek penggunaan aplikasi bidang pendidikan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
				Pelatihan Pemanfaatan Interactive Flat Panel (IFP)/ Papan Tulis Digital untuk pembelajaran	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Fasilitasi Dewan Pendidikan	
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Fasilitasi KKG	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehab Jamban	
				Rehab pagar	
				Rehab Ruang AULA	
				Rehab Gapura	
				Rehab Talud	
				Pavingisasi Halaman Sekolah	
				Rehab Mushalla	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bimtek peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Operasional penyelenggaraan SD Inklusi dan ULD	
				Ujian SD/ANBK	
				Hibah Bansek	
				Pemberian BOSDA	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Fasilitasi PIP	
				Pemberian Beasiswa bagi siswa berprestasi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
				Pemberian beasiswa bagi ATS dan siswa Berisiko putus sekolah	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan peralatan TIK	
				Pengadaan peralatan drumband	
				pengadaan peralatan laboratorium	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Jamban	
				Pembangunan Talud	
				Pembangunan Pagar	
				Pembangunan Aula	
				Pembangunan musholla	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Komputer	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium IPA	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehab Jamban	
				Rehab pagar	
				Rehab Gapura	
				Pavingisasi Halaman Sekolah	
				Rehab Mushalla	
				Rehab Aula	
			Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Meubelair Sekolah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
				Pengadaan meja kursi siswa	
				Pengadaan Seluruh Mebel	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan peralatan kebersihan sekolah pendukung sekolah adiwiyata	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi PIP	
				Pemberian Beasiswa bagi siswa berprestasi	
				Pemberian beasiswa bagi ATS dan siswa berisiko putus sekolah	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Lomba-lomba tingkat Kabupaten (OSN. OOSN, FLS3N, MAPSI)	
				Lomba lomba tingkat provinsi (OSN. OOSN, FLS3N, MAPSI)	
				Lomba lomba tingkat nasional	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	PDPS (Honor GTT dan PTT)	
				Honor PPPK Paruh Waktu	
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadministrasi Kepegawaian	
				Diklat guru/ Kepala Sekolah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
				Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	
				Rakor TU	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan mutu	
				Penyusunan RAPBS	
				Akreditasi Sekolah	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Belanja Barang dan Jasa BOS	
				Belanja Modal BOS	
				Belanja Hibah BOS	
				BOS Kinerja	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Evaluasi BOS	
				Rekonsiliasi BOS	
				Bintek peningkatan kapasitas pengelolaan BOS	
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
				Penyediaan Aplikasi Data dan Informasi Pendidikan	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Bimtek penggunaan aplikasi bidang pendidikan	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Ujian SMP/ANBK	
				Penyelenggaraan SPMB	
				Hibah Bansek	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
				Pemberian BOSDA	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bimtek peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan peralatan TIK	
				Pengadaan peralatan drumband	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Jamban	
				Pembangunan Pagar	
				Pembangunan Talud	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				Pengelolan PTK PAUD	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Bimbingan Teknis Bagi PNS Pendidik PAUD	
				Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Bagi Guru Bersertifikasi	
				Kinerja Pendidik PAUD	
				Sertifikasi Pendidik PAUD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
				Bantuan Pendidikan S1	
				Hibah Kinerja Pendidik PAUD	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
				Pengelolaan Hibah Bansek dan Bansek TK Negeri	
				Pendampingan Bansek TK /RA	
				Bansek 3 TK Negeri Pembina	
				Hibah Bansek TK/RA	
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan BOP	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	PAUD HI	
				Transisi PAUD ke SD dan Wajar 13 Tahun	
				Penyusunan KSP PAUD	
				Posyandu 6 SPM	
				Gebyar PAUD	
				Fasilitasi Pokja Bunda PAUD	
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan Unit PAUD baru	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rehabilitasi pagar	
				Rehabilitasi Jamban	
				Rehabilitasi Talud	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD	
				Pengadaan peralatan TIK PAUD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan ATS	
				Beasiswa ATS	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				Pengelolaan Data PTK Nnformaal/Kesetaraan	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Operasional UPT SPNF	
				Pendampingan PKBM	
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal pendidikan	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**		
			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**		
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Terlaksananya bahasa dan sastra daerah	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
			Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota	Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI)	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Fasilitasi Dewan Kesenian Purworejo	
				Fasilitasi Pepadi	
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Operasional Gedung Kesenian	
				Pendaftaran WBTb	
				Pemutakhiran PPKD	
				Pengiriman Duta Seni Budaya di TMII	
				Pentas Seni (4 Even)	
				Pentas Apresiasi	
				Purworejo karnival	
				Hibah Alat Kesenian	
				Parade Budaya Jawa Tengah	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembinaan Seni Budaya	
				Rintisan Sekolah Budaya	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
				Pelatihan SDM Kesenian Tradisional	
				Pagelaran hasil Pelatihan Kesenian Tradisional	
8	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
			Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Grebeg Budaya	
				Jumenengan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
				Penyusunan Buku Sejarah Kab. Purworejo (Pahlawan dari Purworejo dan Purboatmodjo)	
				Penyusunan Dokumen Usulan Wr. Supratman Sebagai Memori Kolektif Bangsa	
9	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**		
			Penetapan Cagar Budaya	Penetapan Objek Diduga Cagar Budaya	
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
			Pelindungan Cagar Budaya	Penyusunan Perda Cagar Budaya	
				Pemeliharaan Objek Cagar Budaya	
				Honor PPPK Paruh Waktu	
			Pemanfaatan Cagar Budaya	Pemanfaatan Cagar Budaya	
				Pentas Seni dan Pameran Kuliner Tradisional di Lokasi Cagar Budaya	
				Virtual tour (Pengadaan Aplikasi)	
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya tata kelola museum	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**		
			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Konservasi Koleksi Museum	
				Operasional Museum	
				Pengembangan koleksi Museum Kebangkitan Pendidikan Indonesia (Kajian dan Pengadaan koleksi)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Sertifikasi Tenaga Teknis Museum	
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Belajar Bersama di Museum (DAK)	
				Jamasan Tosan Aji (DAU)	
				Lomba Cerdas Cermat Museum (DAK)	
				Pameran Temporer di Museum (DAK)	
				Pemutakhiran data Inventarisasi dan Pendokumentasian Koleksi (DAK)	
				Lomba Cultural Edukatif Museum (DAK)	
				Museum Keliling Pameran di Luar Daerah (DAK)	
				Pembuatan Katalog Museum Tosan Aji (DAK)	
				Media tata Pamer dan Ruang Simpan Koleksi Museum (DAK)	
				Promosi Museum (DAK)	
				Kajian Koleksi Museum (DAK)	
				Seminar Hasil Kajian Koleksi (DAK)	
				Sosialisasi Museum dan Penyebarluasan Informasi Koleksi Museum (Museum Masuk Sekolah)	
				Pemeliharaan Sarana Prasarana	
				Kajian Master Plane Pengembangan Museum Kebangkitan Pendidikan Indonesia (Kajian) (DAU)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
				Vidio Animasi Sejarah Cokronegoro (DAU)	
				Museum Keliling (DAU)	
				Kajian Museum	
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	
				Pembuatan Megic Wall Museum	
				Pembuatan Vitrin Touch Interactive	
				Pembuatan Foto Figure	
				Pembangunan Toilet Museum Tosan Aji (4 Unit)	
				Pembuatan Ruang Konservasi Museum Beserta Kelengkapannya	
				Pembuatan Ruang Storage Museum dan Kelengkapannya (Alih Fungsi)	
				Pembuatan Ruang Pamer Baru Beserta Kelengkapannya (Alih Fungsi)	
				Pembuatan Mini Stage dan Penataan Out door	
				Adaptasi bangunan Museum Kebangkitan Pendidikan di Kompleks Eks HKS	
				Tata Pamer Museum Kebangkitan Pendidikan di Kompleks Eks HKS	
				Penggantian Tata Pamer Museum	

1.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Program dan kegiatan yang disusun dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025-2029 juga mendukung Asta Cita, Program Strategis Nasional maupun program delegasi provinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4
Dukungan terhadap Asta Cita Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Asta Cita 4: Memperperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Operasional penyelenggaraan SD Inklusi dan unit layanan disabilitas	Operasional penyelenggaraan SD Inklusi dan unit layanan disabilitas	Pendidikan	Dindikbud
2	Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan kebudayaan	Pengembangan kebudayaan	Kebudayaan	Dindikbud

Tabel 4.5
Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Terkait
1	Penanggulangan kemiskinan				
	a. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan	Dindikbud
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidikan	Dindikbud

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Terkait
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan	Dindikbud
			Operasional Penyelenggaraan SD Inklusi/ ULD	Pendidikan	Dindikbud
			Program Indonesia Pintar	Pendidikan	Dindikbud
			Fasilitasi dan pemberian beasiswa (untuk transport dan peralatan sekolah)	Pendidikan	Dindikbud
			Fasilitasi dan pemberian beasiswa ATS	Pendidikan	Dindikbud
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan SDM kesenian	Kebudayaan	Dindikbud
2	Perluasan akses pendidikan				
	a. Pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan	Dindikbud
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidikan	Dindikbud
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan	Dindikbud

Tabel 4.6
Dukungan Terhadap Prioritas Nasional

No	Prioritas Utama Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Prioritas Nasional 4	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	Program: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan: (semua)	Pendidikan	Dindikbud
		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas	Program: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pendidikan	Dindikbud
		Pencegahan dan penanganan	Program: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan	Dindikbud

No	Prioritas Utama Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
		anak tidak sekolah	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		
		Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul	Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Pendidikan	Dindikbud
		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Program: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan 1: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan 1: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Kegiatan 2: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan 2: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Kegiatan 3: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan 3: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Pendidikan	Dindikbud

No	Prioritas Utama Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
			Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Kegiatan 4: Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan 4: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		

Tabel 4.7
Dukungan Terhadap Program Delegasi Provinsi

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	Fasilitasi, identifikasi/ pemetaan, dan pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan pada semua jenjang	Pendidikan	Dindikbud

Tabel 4.8
Dukungan Terhadap Pitulungan

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Pinter Bocahe	Pemberian beasiswa pendidikan bagi peserta didik berprestasi	Fasilitasi pemberian beasiswa pendidikan bagi peserta didik berprestasi	Pendidikan	Dindikbud
		Fasilitasi teknologi informasi yang mendukung pendidikan dan pembelajaran yang inovatif	Pemberian prasarana TIK untuk PAUD, SD, dan SMP untuk pembelajaran	Pendidikan	Dindikbud
			Pelatihan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pendidikan	Dindikbud
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pendidikan	Dindikbud
		Pemberian pendidikan dan pelatihan lanjutan untuk peningkatan kualitas guru	Bimtek Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dindikbud

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
		Pemberian pendidikan dan pelatihan lanjutan untuk peningkatan kualitas guru	Bimtek Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dindikbud
		Pengembangan pusat pembelajaran masyarakat	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan	Dindikbud
2	Religius Masyarakate	Memperluas kesempatan menjalankan ibadah bagi masyarakat sesuai dengan agama yang diakui negara	Pendidikan anak beriman dan berkepribadian	Pendidikan	Dindikbud
4	Sejahtera Wargane	Pelestarian warisan budaya, kepurbakalaan, permuseuman, tata nilai budaya, seni tradisional, tradisi, adat, dan tradisi.	peningkatan kapasitas pelaku budaya	Kebudayaan	Dindikbud
			Hibah Alat Kesenian	Kebudayaan	Dindikbud
			fasilitasi kegiatan kesenian yang mendorong partisipasi masyarakat	Kebudayaan	Dindikbud
			penguatan kapasitas pelaku seni dan regenerasi sumber daya manusia	Kebudayaan	Dindikbud
			pelestarian nilai-nilai sejarah dan tradisi lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi	Kebudayaan	Dindikbud
			kajian dan penetapan objek yang diduga cagar budaya (ODCB), perawatan dan perlindungan cagar budaya, pemanfaatan cagar budaya, Pengembangan Cagar Budaya, Pembinaan SDM Cagar Budaya	Kebudayaan	Dindikbud
			Operasional museum, pengembangan koleksi, pameran museum,peningkatan	Kebudayaan	Dindikbud

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
			kapasitas SDM Permuseuman, Digitalisasi Museum,Belajar di Museum, Kajian benda museum dan Pengembangan Museum		

1.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja PD dengan pemerintah. PD akan mempertanggung-jawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP tahunan dan LKjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah. Indikator Kinerja Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9
Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	68,02	70,45	72.89	75.33	77.76	80.20	Tujuan PD
2	Harapan Lama Sekolah	tahun	14.02	14.15	14.27	14.4	14.52	14.65	Tujuan PD/IUP
3	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9.29	9.45	9.62	9.78	9.94	10.10	Tujuan PD
4	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun		9.62	9.78	9.95	10.11	10.27	10.43	Tujuan PD/IUP
5	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9.18	9.19	9.2	9.21	9.22	9.23	Tujuan PD/IUP
6	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	%	31.25	32.99	34.95	36.68	38.28	40.00	Tujuan PD/IUP
7	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	70.45	72.89	75.33	77.76	80.20	80.20	Sasaran PD
8	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	87.06	87.62	88.18	88.73	89.29	89.85	Sasaran PD/IUP
9	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	%	92.63	92.63	96.37	96.98	97.60	98.23	Sasaran PD
10	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	%	99.09	99.15	99.25	99.35	99.45	99.55	Sasaran PD
11	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun (Kesetaraan)	%	20.76	24.86	28.96	33.05	37.15	41.25	Sasaran PD
12	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B	%	80.33	80.40	80.55	80.69	80.76	80.83	Sasaran PD
	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):								

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
13	Literasi Membaca SD/ Sederajat	%	71.99	74.49	76.99	79.49	81.99	84.49	Sasaran PD/IUP
14	Literasi Membaca SMP/ Sederajat	%	82.61	83.71	84.81	85.91	87.01	88.11	Sasaran PD/IUP
15	Numerasi SD/ Sederajat	%	60.47	63.37	66.27	69.17	72.07	74.97	Sasaran PD/IUP
16	Numerasi SMP/ Sederajat	%	71.41	72.91	74.41	75.91	77.41	78.91	Sasaran PD/IUP
17	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	%	31.25	32.99	34.95	36.68	38.28	40.00	Sasaran PD/IUP

Tabel 4.10
Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						BIDANG PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):								Bidang Pengembangan Kurikulum Bahasa dan Sastra	
2	a. Literasi Membaca SD/ Sederajat	%	71.99	74.49	76.99	79.49	81.99	84.49	Bidang Pengembangan Kurikulum Bahasa dan Sastra	SPM/IUP
3	b. Literasi Membaca SMP/ Sederajat	%	82.61	83.71	84.81	85.91	87.01	88.11	Bidang Pengembangan Kurikulum Bahasa dan Sastra	SPM/IUP
4	c. Numerasi SD/ Sederajat	%	60.47	63.37	66.27	69.17	72.07	74.97	Bidang Pengembangan Kurikulum Bahasa dan Sastra	SPM/IUP
5	d. Numerasi SMP/ Sederajat	%	71.41	72.91	74.41	75.91	77.41	78.91	Bidang Pengembangan Kurikulum Bahasa dan Sastra	SPM/IUP
6	B.10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	%	87.06	87.62	88.18	88.73	89.29	89.85	Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	SPM
7	B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	%	95.86	95.89	97.81	98.17	98.53	98.89	Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan	SPM

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						BIDANG PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
									Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
8	B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	%	20.76	24.86	28.96	33.05	37.15	41.25	Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	SPM
9	B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	81.29	81.70	82.12	82.53	82.94	83.35	Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	SPM
10	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kuali kasi S1/D4	%	81.34	81.84	82.34	82.84	83.34	83.84	Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	SPM
11	D.4 Iklim Keamanan SD	Nilai	78.63	79.53	80.43	81.33	82.23	83.13	Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	SPM
12	D.8 Iklim Kebinekaan SD	Nilai	74.83	75.83	76.83	77.83	78.83	79.83	Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan	SPM

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						BIDANG PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
									Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
13	D.l0 Indeks Inklusivitas SD	Nilai	62.72	65.22	67.72	70.22	72.72	75.22	Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	SPM
14	D.4 Iklim Keamanan SMP	Nilai	72.81	74.31	75.81	77.31	78.81	80.31	Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	SPM
15	D.8 Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	72.58	73.58	74.58	75.58	76.58	77.58	Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	SPM
16	D.10. Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	63.09	65.49	67.89	70.29	72.69	75.09	Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	SPM

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						BIDANG PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
17	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan engarusutamakan Kebudayaan	%	49.35	52.51	56.72	62.15	72.55	85.73	Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	IUP
18	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	19131	29713	30307	31531	32162	32162	Bidang Kebudayaan	IUP
19	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	%	53.61	54.61	58.02	61.43	64.85	68.26	Bidang Kebudayaan	IUP
20	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	87.06	87.62	88.18	88.73	89.29	89.85	Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Permendagri No. 18 Tahun 2020
21	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	92.63	92.63	96.37	96.98	97.60	98.23	Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Permendagri No. 18 Tahun 2020

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						BIDANG PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
22	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	99.09	99.15	99.25	99.35	99.45	99.55	Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Permendagri No. 18 Tahun 2020
23	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	20.76	24.86	28.96	33.05	37.15	41.25	Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Permendagri No. 18 Tahun 2020

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun.
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan setiap tahun selama periode renstra.

b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
d. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN DAERAH (DINKESDA) KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Hal ini merupakan impelementasi dari Pasal 28 H ayat (1) dalam perubahan kedua UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, berhak bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak atas pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara spesifik mengatur penyelenggaraan pembangunan kesehatan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, dan sistem informasi kesehatan. Setiap kegiatan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang yang setinggi tingginya bagi masyarakat diselenggarakan dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta *top down* dan *bottom up* yang berarti bahwa harus menggunakan metode kerangka berpikir yang ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melaksanakan dan menerjemahkan visi dan misi bupati terpilih, serta penyelarasan dalam musyawarah pembangunan mulai dari tingkat bawah.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, diamanatkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, sehingga perlu penyelarasan antara RPJMD tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 yang mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. RPJMN Tahun 2025-2029 menjabarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sekaligus mendukung dan seiring sejalan dengan 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (delapan) *Quick Wins* yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029 serta Delegasi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2029.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) yang merupakan penjabaran atas Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hal ini selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah juga diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah proses perencanaan strategis yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah (SKPD) untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dalam jangka menengah (5 tahun). Renstra PD berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk mengarahkan kegiatan dan program PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahunan. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 ini dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja sebagai salah satu perjanjian kinerja yang harus dilaporkan sebagai pertanggung jawaban Kepala Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo kepada Bupati Purworejo dan masyarakat. Renstra Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo juga merupakan acuan bagi seluruh upaya yang dilakukan pelaku pembangunan kesehatan yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkron satu dengan lainnya serta menjadi acuan Rumah Sakit sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dan dan Puskesmas sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo dalam penyusunan dokumen Renstra BLUD dan RBA tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 didasarkan pada:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
25. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 71 Seri D Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah

a. memberikan arah dan dasar bagi Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo dalam pengambilan keputusan dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
b. sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo dalam menentukan sasaran, arah kebijakan program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan kesehatan selama lima tahun kedepan.
c. menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang transparan dan akuntabel.

Tujuannya disusunnya Renstra Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo adalah:

a. menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi program kegiatan pembangunan kesehatan.
b. menyediakan pedoman bagi Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) dalam melaksanakan program kerja agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
c. digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan tolak ukur penyusunan rencana kerja (Renja).
d. Sebagai upaya sinergitas dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) dan UPT-nya

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Dasar hukum penyusunan;
- 1.3 Maksud dan tujuan;
- 1.4 Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
  - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;
  - 2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.5 Kelompok sasaran layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengelola urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkedudukan di bawah Bupati dan memiliki tugas pokok untuk merumuskan, melaksanakan, membina, dan mengevaluasi kebijakan kesehatan di wilayahnya. Struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal yang menunjukkan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hubungan kerja antar individu dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas memiliki sekretariat dan 3 (tiga) bidang serta terdapat 2 (dua) Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dan 27 (duapuluh tujuh) Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF).

2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo, merupakan unsur pelaksana dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Derah. bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah yang menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
5. pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINKESDA; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Berdasarkan jenis dan tipologi perangkat daerah, Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo merupakan dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang sebagaimana berikut:

1. Kepala DINKESDA;
2. Sekretariat terdiri atas:
   a. Subbagian perencanaan dan keuangan; dan
   b. Subbagian umum dan kepegawaian.
3. bidang kesehatan masyarakat;
4. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
5. bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
6. UOBK;
7. UOBF;
8. UPT; dan
9. kelompok Jabatan Fungsional.

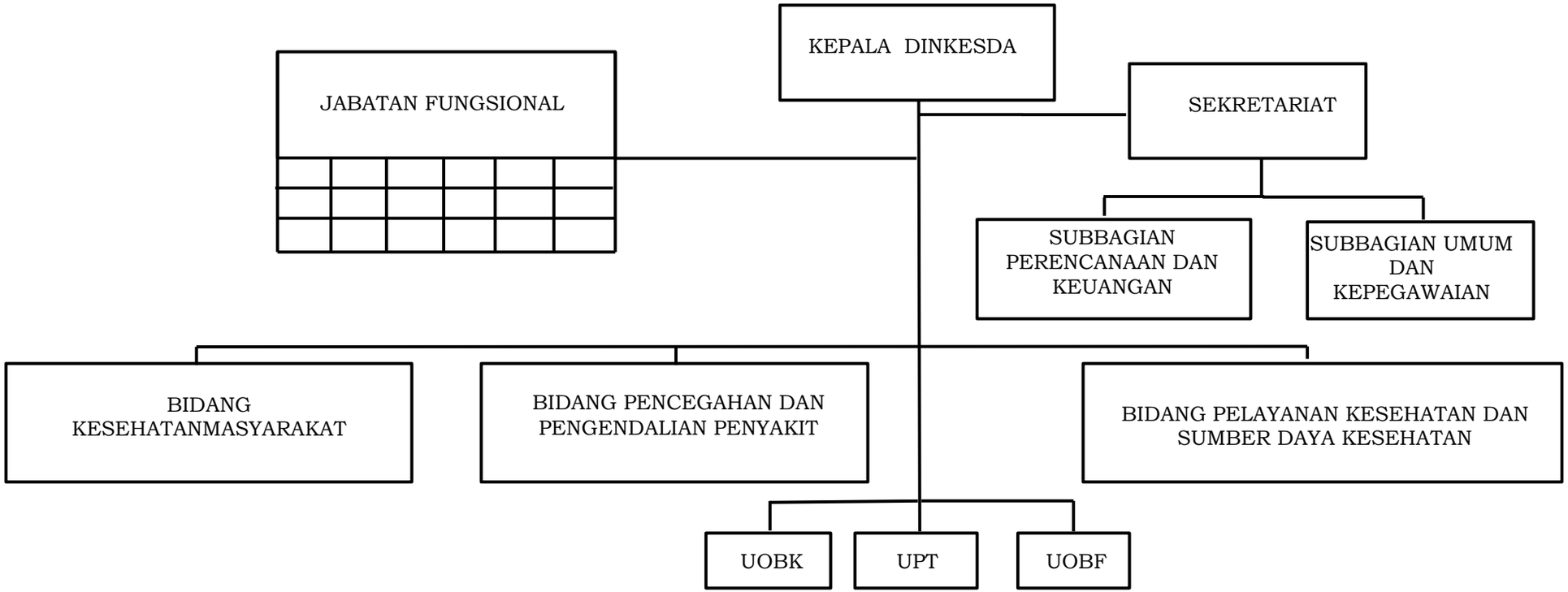

Gambar 1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN DAERAH (DINKESDA) KABUPATEN PURWOREJO
Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2024

2.2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat Daerah sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Kesehatan meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan meliputi anggaran, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.

1. Sumber Daya Manusia:

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah semua profesional yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya yang merupakan salah satu komponen dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo. SDM menjadi hal yang penting dalam pelayanan kesehatan karena kualitas, kuantitas, dan distribusinya sangat memengaruhi efektivitas layanan. SDM yang mendukung pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah tenaga medis di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

a. Dokter spesialis: 109 orang (rasio 13,49 per 100.000 penduduk)
b. Dokter umum: 172 orang (rasio 21,29 per 100.000 penduduk)
c. Dokter gigi : 52 orang (rasio 6,44 per 100.000 penduduk)
d. Dokter gigi spesialis: 5 orang (rasio 0,62 per 100.000 penduduk)

Total tenaga medis: 338 orang, dengan rasio keseluruhan 41,84 per 100.000 penduduk.

Distribusi Tenaga Medis

a. Puskesmas
   27 Puskesmas di Kabupaten Purworejo sudah memiliki dokter dan dokter gigi.
b. Rumah Sakit
   Rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, menjadi pusat konsentrasi tenaga medis. Rumah Sakit dr. Tjitrowardojo sebagai rumah sakit rujukan regional memiliki tenaga medis terbanyak dengan 43 dokter umum, 17 dokter spesialis, dan 1 dokter gigi, serta 5 dokter gigi spesialis. Disusul oleh RSUD RAA Tjokronegoro dan rumah sakit swasta lainnya (RS Islam, RS Palang Biru, RS Panti Waluyo, dan RS Amanah Umat) yang juga memiliki tenaga medis relatif lengkap.
c. Praktik Mandiri dan Fasilitas Kesehatan Lain
   Selain di Puskesmas dan Rumah Sakit, tenaga medis juga tersebar pada sarana pelayanan kesehatan lain seperti klinik utama, klinik pratama, serta praktik mandiri. Hal ini semakin memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Analisis Ketersediaan

a. Kecukupan: rasio tenaga medis di Kabupaten Purworejo secara umum sudah mendekati standar WHO (dokter 1 per 1.000 penduduk), meskipun masih ada kekurangan tenaga dokter spesialis tertentu seperti spesialis anak, penyakit dalam, bedah, dan kandungan di beberapa rumah sakit.
b. Pemerataan: distribusi tenaga medis sudah merata, hanya ada 2 Kecamatan yang masih ada kekurangan tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Kecamatan Loano di Puskesmas Banyuasin dan Kecamatan Pituruh di Puskesmas Pituruh.

Di Kabupaten Purworejo SDM Kesehatan tersebar dibeberapa fasilitas pelayanan kesehatan dan unit kerja kesehatan lainnya sesuai dengan Surat Izin Praktik (SIP) diantaranya Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Laboratorium Klinik, Dokter/Dokter Gigi Praktek Mandiri, Bidan/Perawat Praktek Mandiri, Apotek, Toko Obat, dan sebagainya. Rekapitulasi SDM Kesehatan di Kabupaten Purworejo sebanyak 4.762 orang dengan 3 jenis SDM terbanyak yaitu dukungan manajemen (1.322 orang), perawat (1.289 orang) dan Bidan (791 orang). SDM Kesehatan berdasarkan jenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 3.397 orang (71.36%) dibandingkan laki-laki yaitu 1.365 orang (26.66%). Jumlah SDM Kesehatan menurut jenis SDM Kesehatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Jumlah SDM Kesehatan menurut jenis SDM Kesehatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	JENIS SDM KESEHATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Dokter Umum	66	116	182
2	Dokter Gigi	12	37	49
3	Dokter Spesialis			
	- Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD)	11	4	15
	- Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG)	7	4	11
	- Spesialis Anak (Sp.A)	6	5	11
	- Spesialis Bedah (Sp.B)	11	0	11
	- Spesialis Radiologi (Sp.Rad)	1	4	5
	- Spesialis Anastesiologi (Sp.An)	10	0	10
	- Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK)	0	5	5
	- Spesialis Patologi Anatomi	0	1	1
	- Spesialis Urologi (Sp.U)	1	0	1
	- Spesialis Kulit & Kelamin (Sp.KK)	1	2	3
	- Spesialis Bedah Syaraf (Sp.BS)	1	0	1
	- Spesialis Saraf (Sp.S)	2	2	4
	- Spesialis Orthopedi (Sp.OT)	6	0	6
	- Spesialis Pulmonologi (Sp.P)	0	1	1
	- Spesialis Bedah Anak (Sp.BA)	1	1	2
	- Spesialis Jiwa (Sp.Kj)	3	2	5
	- Spesialis Rehabilitasi Medik (Sp.KFR)	0	2	2
	- Spesialis THT-KL (Sp.THT)	3	0	3
	- Spesialis Mata (Sp.M)	3	3	6
	- Spesialis Jantung (Sp.JP)	1	2	3
	- Spesialis Onkologi Radiasi (Sp. Onk.Rad)	1	0	1
	- Spesialis lainnya	1	0	1
	Subtotal Dokter Spesialis	**70**	**38**	**108**
4	Dokter Gigi Spesialis	2	4	6
	- Spesialis Ortodonti (Sp.Ort)	0	0	0
	- Spesialis Bedah Mulut (Sp.BM)	1	1	2
	- Spesialis Konservasi Gigi (Sp.KG)	0	3	3
5	Psikologi Klinis	0	3	3
6	Perawat	335	954	1289
7	Bidan	0	791	791
8	Kefarmasian			0
	- Apoteker	27	104	131
	- Tenaga Teknis Kefarmasian	19	94	113
9	Tenaga Kesehatan Masyarakat			0
	- Kesehatan Masyarakat Lainnya	0	3	3
	- Epidemiologi	4	18	22
	- Penyuluh Kesehatan Masyarakat	10	31	41
	- Kesehatan Kerja	0	1	1
	- Administrasi & Kebijakan Kesehatan	5	13	18
	- Informatika Kesehatan	0	1	1

NO	JENIS SDM KESEHATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
10	Tenaga Kesehatan Lingkungan	16	37	53
11	Tenaga Gizi	11	67	78
12	Tenaga Keterapian Fisik			0
	- Fisioterapi	23	41	64
	- Okupasi Terapis	0	1	1
	- Terapis Wicara	1	2	3
	- Akupuntur	0	2	2
13	Tenaga Keteknisian Medis			
	- Perekam Medis & Informasi Kesehatan	12	65	77
	- Teknisi Pelayanan Darah	2	5	7
	- Refraksionis Optisien	1	0	1
	- Penata Anestesi	8	8	16
	- Terapis Gigi & Mulut	6	27	33
	- Teknisi Kardiovaskular	0	2	2
14	Teknik Biomedika			
	- Radiografer	19	19	38
	- Elektromedis	8	4	12
	- Ahli Teknologi Lab. Medik	22	99	121
	- Fisikawan Medik	2	0	2
15	Asisten Tenaga Kesehatan			0
	- Keperawatan	7	10	17
	- Kebidanan	0	4	4
	- Kefarmasian	3	66	69
	- Teknik Biomedika	2	3	5
	- Kesehatan Lingkungan	3	2	5
	- Gizi	3	15	18
	- Keteknisian Medis	1	2	3
16	Nakes Lainnya	11	8	19
17	Tenaga Penunjang			
	- Struktural	20	23	43
	- Dukungan Manajemen	633	689	1322
	- Pendidikan & Pelatihan	0	0	0
TOTAL SDM KESEHATAN		**1.365**	**3.397**	**4762**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan, terdapat sembilan jenis tenaga kesehatan strategis yang wajib tersedia di setiap Puskesmas, yaitu Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, dan Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM). Distribusi ketersediaan 9 tenaga strategis di 27 Puskesmas Kabupaten Purworejo Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Distribusi Tenaga Kesehatan Strategis di Puskesmas Kabupaten Purworejo Tahun 2024

NO	PUSKESMAS	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Kefarmasian	Kesmas	Kesling	Gizi	ATLM	Total Nakes Strategis
1	Grabag	2	1	17	23	2	2	0	2	2	51
2	Ngombol	2	1	16	26	2	2	1	2	2	54
3	Bragolan	2	1	20	21	2	3	1	1	2	53
4	Bubutan	2	1	14	20	1	3	2	2	1	46
5	Bagelen	1	1	7	12	1	3	1	1	1	28
6	Dadirejo	2	1	14	15	2	1	1	2	2	40
7	Kaligesing	2	1	6	16	2	0	1	2	1	31
8	Cangkrep	1	1	9	14	2	3	1	1	1	33
9	Mranti	2	1	5	15	2	3	1	1	2	32
10	Purworejo	2	1	9	15	2	3	2	2	2	38
11	Banyuurip	2	1	8	21	2	2	1	2	2	41
12	Seborokrapyak	2	1	10	14	2	1	1	2	2	35
13	Bayan	2	1	7	25	2	1	2	1	1	42
14	Kutoarjo	2	1	9	14	1	3	1	1	2	34
15	Semawung Daleman	2	1	14	18	2	3	1	1	1	43
16	Wirun	2	1	6	12	2	2	1	1	2	29
17	Butuh	2	1	15	22	2	2	2	4	1	51
18	Sruwohrejo	2	1	9	21	2	1	2	2	1	41
19	Kemiri	2	1	20	21	2	2	2	2	2	54
20	Winong	2	1	6	17	1	1	1	1	1	31
21	Pituruh	2	0	14	27	2	2	1	2	2	52
22	Karanggetas	1	1	4	21	2	2	1	1	1	34
23	Bruno	2	1	9	24	1	2	1	1	2	43
24	Gebang	2	1	10	27	1	1	1	2	1	46
25	Loano	2	1	14	18	2	1	1	2	2	43
26	Banyuasin	1	1	12	14	2	1	1	2	2	36
27	Bener	2	1	6	30	1	3	2	2	2	49
27 Puskesmas		50	26	290	523	47	53	33	45	43	1110

Dasar perhitungan perencanaan tenaga kesehatan dengan menggunakan metode rasio tenaga kesehatan terhadap 100.000 penduduk membutuhkan dua komponen data yaitu jumlah penduduk dan jumlah tenaga kesehatan. Tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Purworejo (sumber: Dinas Dukcapil Kab. Purworejo) sebanyak 807.790 jiwa. Capaian rasio tenaga kesehatan tahun 2024 dibandingkan dengan target Kepmenko Kesra Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan (RPTK) Tahun 2011–2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan	Rasio per 100.000 Penduduk	Target Tahun 2025 (Kepmenko Kesra 54/2013)
1	Medis (Dokter Umum, Gigi, Spesialis)	338	41,84	76
2	Perawat	1289	159,57	200
3	Bidan	791	97,92	130
4	Apoteker	131	16,22	15
5	Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK)	113	14	30
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	85	10,5	18
7	Tenaga Kesehatan Lingkungan	53	6,6	20
8	Tenaga Gizi	78	9,7	18
9	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	121	15	Belum ditetapkan

10	Teknik Biomedika	52	5,8	Belum ditetapkan
11	Tenaga Keterapian Fisik	70	8,7	6
12	Tenaga Keteknisian Medis	136	16,8	18

Catatan : Data diambil dari Aplikasi SISDMK cut off per 30 November 2024

2. Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan

Sarana, prasarana, dan alat kesehatan (alkes) adalah komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan meliputi peralatan medis, obat-obatan, gedung, instalasi, dan sistem pendukung lainnya termasuk Sistem Informasi. Berikut adalah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang mendukung pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) kabupaten Purworejo.

Tabel 2.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Purworejo

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
Rumah Sakit		
1	Rumah Sakit Umum	11
2	Rumah Sakit Khusus	1
Puskesmas Dan Jaringannya		
1	Puskesmas Rawat Inap	12
2	Puskesmas Non Rawat Inap	15
4	Puskesmas Pembantu	65
Sarana Pelayanan Lain		
1	Klinik Pratama	26
2	Klinik Utama	4
3	Unit Transfusi Darah	1
4	Laboratorium Kesehatan	3
Sarana Produksi Dan Distribusi Kefarmasian		
1	Apotek	103
2	Toko Obat	11

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Kabupaten Purworejo memiliki 12 rumah sakit yang terdiri dari 11 Rumah Sakit Umum dan 1 Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSIA). Ketersediaan Rumah Sakit ini menjadi penopang pelayanan rujukan kesehatan tingkat lanjut di Kabupaten Purworejo dan wilayah sekitarnya. Dari 12 Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Purworejo 1 Rumah Sakit merupakan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan yaitu Rumah Sakit dr. Tjitrowardojo, 3 Rumah Sakit Kelas C, 1 Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kelas C dan 7 Rumah Sakit Kelas D. Berdasarkan hasil penilaian akreditasi Rumah Sakit di Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 dari 12 rumah sakit yang ada 11 Rumah Sakit telah terakreditasi Paripurna dan 1 Rumah Sakit terakreditasi Utama.

Sedangkan untuk Fasilitas fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama Kabupaten Purworejo memiliki 27 Puskesmas yang terdiri dari 12 Puskesmas Rawat Inap dan 15 Puskesmas Non Rawat Inap tersebar di 16 kecamatan, hal ini sesuasi amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 bahwa setiap kecamatan harus memiliki minimal satu Puskesmas. Jumlah ini menunjukkan bahwa distribusi pelayanan kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Purworejo sudah merata. Puskesmas di Kabupaten Purworejo memiliki jejaring yang terdiri atas 65 Puskesmas Pembantu (Pustu), 26 Klinik Pratama, dan 4 Klinik Utama. Keberadaan jaringan ini memperluas akses masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan dasar, khususnya di daerah pedesaan dan wilayah dengan mobilitas tinggi. Pada tahun 2023, seluruh 27 Puskesmas di Kabupaten Purworejo telah mengikuti survei akreditasi. Hasilnya 24 Puskesmas terakreditasi Paripurna dan 3 Puskesmas terakreditasi Utama.

Tabel 2.5 Data Prosentase Kepemilikan Sarana Prasarana dan Alkes Pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purworejo

No	FASILTAS KESEHATAN	Kelengkapan			Kumulasi (50S+20P+30A)
		Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
A	RUMAH SAKIT				
1	RS Umum Panti Waluyo Yakkum Purworejo	89,18	67,44	96,24	86,95
2	RS Umum Budi Sehat Purworejo	90,72	85,71	86,7	88,51
3	RS Umum Aisyiyah	90,21	65,12	84,58	83,5
4	RS Umum Ananda Purworejo	92,78	60,47	81,47	82,93
5	RS Umum Purwa Husada	78,35	61,54	74,09	73,71
6	RS Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo	89,53	75	70,87	81,03
7	RS Ibu dan Anak Permata	65,99	58,14	70,82	65,87
8	RS Umum Palang Biru Kutoarjo	71,22	73,81	70,08	71,4
9	RS Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro	62,79	67,44	69,35	65,69
10	RS Amanah Umat Purworejo	81,98	100	69,02	81,69
11	RS Umum Islam Purworejo	92,78	100	64,44	85,72
12	RS Umum Kasih Ibu Purworejo	73,56	68,29	63,41	69,46
B	PUSKESMAS				
1	Cangkrep Purworejo	66,67	37,04	74,48	66,83
2	Winong Kemiri	69,05	40,74	50,09	58,63
3	Kutoarjo	95,24	33,33	45,82	69,28
4	Bener	78,57	41,18	43,36	60,75
5	Mranti Purworejo	69,05	33,33	37,16	52,72
6	Kaligesing	69,77	37,04	35,25	52,69
7	Gebang	32,5	35,19	34,07	33,39
8	Loano	74,42	37,04	33,88	54,47
9	Purworejo	64,29	42,59	33,85	49,94
10	Seborokrapyak Banyuurip	42,86	38,89	32,8	38,44
11	Bagelen	67,5	40,74	32,72	50,91
12	Bayan	30,95	28,85	31,31	30,89
13	Grabag	83,72	40,74	30,77	58,24
14	Pituruh	79,07	38,89	29,87	55,37
15	Karanggetas Pituruh	57,14	44,44	28,22	44,31
16	Banyuasin Loano	51,16	29,63	27,83	39,68
17	Dadirejo Bagelen	60,98	33,96	27,45	44,87
18	Ngombol	81,4	36	27,28	55,21
19	Sruwohrejo Butuh	71,43	34	26,97	49,9
20	Butuh	81,4	38,89	26,34	55,12
21	Banyuurip	76,19	43,14	25,85	52,75
22	Kemiri	74,42	35,85	21,4	49,36
23	Bragolan Purwodadi	82,93	38,89	20,76	53,66

No	FASILTAS KESEHATAN	Kelengkapan			Kumulasi (50S+20P+30A)
		Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
24	Semawung Daleman Kutoarjo	66,67	48,08	19,92	46,11
25	Wirun Kutoarjo	67,5	38,89	19,08	45,27
26	Bruno	74,42	51,85	18,34	49,73
27	Bubutan Purwodadi	34,88	39,62	16,18	27,87
	Laboratorium				
1	Laboratorium Klinik Indolab	72,58	72,41	47,62	65,06
2	Laboratorium Klinik Pratama Prodia	66,13	100	33,33	63,06
3	Laboratorium Dinkes Kab. Purworejo	76	85,71	6,15	56,99

Sumberdata: Aspak tahun 2024

Untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mengurangi angka rujukan, dibutuhkan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang aman dan siap pakai di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis dan tingkatannya. Persentase kumulatif ASPAK mengacu pada tingkat kelengkapan dan pembaruan data sarana, prasarana, dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium) dalam sistem informasi ASPAK. Ini adalah ukuran seberapa baik fasilitas kesehatan telah memasukkan dan memperbarui informasi yang diperlukan, seperti data sarana, prasarana, dan alat kesehatan, untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dari data tersebut diatas terdapat beberapa puskesmas dengan persentase sarana, prasarana, dan alat kesehatan dibawah 60 %, hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan fasilitas Kesehatan tersebut belum baik (belum memenuhi standar).

2.2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang Kesehatan. Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo dianalisis untuk dapat menunjukkan seberapa besar perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan kesehatan, seberapa kuat daya dukung sumber daya perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, tingkat ketercapaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024, serta hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	AKI		V		70	75	80	85	76,66	76,49	255,64	80,76	66,60	107,41	239,15		-165,2	92,32	116,75	73,63	-111,96	
2	AKB		V		11	7,94	7,92	7,79	7,78	7,65	10,23	8,35	11,32	13,20	10,25		107	94,84	57,07	30,60	68,25	
3	AKABA		V		10	7,94	7,92	7,79	7,8	7,6	11,74	9,83	12,65	14,73	2,66		82,6	76,19	40,27	10,9	165,89	
4	Prevalensi Gizi buruk		V		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,12	0,08	0,12	0,14	0,19		-40	40	-40	-86,95	-180	
5	Prevalensi Stunting		V		8	8	7,9	7,80	7,7	7,6	15,7	10,97	13,3	15,93	16,27		3,75	62,87	31,64	-4,2	-13,89	
6	Eliminasi malaria:		V																			
7	- API		V		<1	<1	<1	<1	< 1	< 1	0,69	0,7	0,05	0,012	0		100	100	100	100	100	
8	- Kasus Indogenius		V		0	0	0	0	0	0	99,82	89,48	100	0,00	0		-99,8	-89,48	-100	100	100	
9	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk		V			217	215	214			105	106	108				48,39	49,30	50,47			
10	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk		V			0,01	0,01	0,06			0,07	0,01	0,13				-500	100	-166,00			
11	Cakupan Penemuan Tuberkulosis (Treatment Coverage)		V					90	90	90				59,00	65					65,56	72,22	
12	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)		V					95	95	95				82,00	85					86,32	89,47	
13	Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar		V					100	100	100				80,12	46,13					80,12	46,13	
14	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		V		100	100	100	100	100	100	97,25	97.15	100	86,92	42,60		97,25	97.15	100	86,92	42,60	
15	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		V		100	100	100	100	100	100	99,55	99.54	100	90,90	46,40		99,55	99.54	100	90,90	46,40	
16	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		V		100	100	100	100	100	100	99,51	99.72	100	100,84	46,70		99,51	99.72	100	100,84	46,70	
17	Pelayanan Kesehatan Balita		V		100	100	100	100	100	100	87,95	93.56	100	107,89	39,57		87,95	93.56	100	107,89	39,57	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
18	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		V		100	100	100	100	100	100	78,36	98,53	100	104,79	60,00		78,36	98,53	100	104,79	60,00	
19	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		V		100	100	100	100	100	100	21,38	35.31	100	59,33	32,25		21,38	35.31	100	59,33	32,25	
20	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		V		100	100	100	100	100	100	43,13	65.12	100	93,32	63,66		43,13	65.12	100	93,32	63,66	
21	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		V		100	100	100	100	100	100	10,85	48.39	100	37,51	20,93		10,85	48.39	100	37,51	20,93	
22	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		V		100	100	100	100	100	100	102,28	97.44	100	186,41	117,51		102,28	97.44	100	186,41	117,51	
23	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		V		100	100	100	100	100	100	91,38	100	100	74,71	62,83		91,38	100	100	74,71	62,83	
24	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		V		100	100	100	100	100	100	33,54	67.93	100	108,29	43,51		33,54	67.93	100	108,29	43,51	
25	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		V		100	100	100	100	100	100	92,98	84.81	100	85,87	46,13		92,98	84.81	100	85,87	46,13	
26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		V		80	80	82	83	84	85		89,89	84,11	91,06	92,04			112,36	102,57	109,71	109,57	
27	Persentase Ketercapaian Faskes yang Menyelenggarakan Pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan		V			100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100,00	100,00	100,00	100,00	
28	Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki Kapasitas Kompetensi Sesuai Standar		V			74,00	75	96	78	80	72,5	81,15	95,83	96,15	100			109,66	127,77	100,16	128,21	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, serta Makanan yang Aman dan Bermutu		V			91,00	93	100	96	98	88	93,14	100	100	100			102,35	107,53	100,00	104,17	
30	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri		V			25,00	30	35	40	45	27,33	28,74	35,02	39,07	39,07			114,98	116,73	111,63	97,68	
31	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		V			100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100,00	100,00	100,00	100,00	

Tabel 2.7 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,72	74,67	75,03	75,37	75,64	
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita		15,70	21,30	20,60	14,90	
3	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	0	0	0	40,7	40,0	
5	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	-	-	-	73,54	73,65	
6	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna	0	0	0	69,00	79,00	
7	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	10,7	10,7	10,7	10,7	12,50	
8	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	77,98	83,18	87,27	95,85	98,31	
9	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)	83,00	83,00	84,00	82,00	79,00	
10	*Neglected Tropical Diseases* (NTDs)	77,70	77,70	48,10	62,90	70,40	
11	Angka Kematian Dengue	0,00	0,00	0,12	0,35	0,38	
12	*Annual Parasite Incidence* (API)	0,01	0,69	0,70	0,05	0,01	
13	Persentase Diabetes Melitus Terkendali	-	-	-	-	0,00	
14	Insiden HIV	0,09	0,07	0,01	0,13	0,14	
15	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	94,00	72,00	87,08	108,81	87,91	
16	Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	10,00	30,45	45,23	57,79	58,00	
17	Persentase Hipertensi terkendali	-	-	-	0,10	0,66	
18	Jumlah Kasus Kematian Ibu	19,00	22,00	6,00	5,00	7,00	
19	Jumlah Kematian Balita	114,00	101,00	74,00	98,00	96,00	
20	Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	-	-	-	-	65,00	
22	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	-	-	-	-	0,00	
23	Prevalensi Obesitas	0,37	0,37	1,08	3,31	21,80	
24	Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	-	-	-	-	0,00	
25	Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	-	-	-	-	0,00	
26	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	
27	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi	3,00	3,00	3,05	3,10	3,22	
28	Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, serta Makanan yang Aman dan Bermutu	86,50	89,20	93,14	94,00	94,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
29	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	-	-	-	-	0,00	
30	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	23,48	27,33	28,74	35,02	39,07	
31	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	100	100	100	100	

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan berapa lama seseorang dapat hidup sejak lahir. UHH memberikan gambaran tentang kualitas hidup dan kesehatan masyarakat serta menunjukkan kemajuan dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. UHH yang tinggi menunjukkan masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan lingkungan yang sehat. UHH di kabupaten Purworejo cenderung mengalami peningkatan selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Menggambarkan juga efektivitas pelaksanaan program pembangunan, program sosial, kesehatan, kecukupan gizi serta program penanggulangan kemiskinan.

2. Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu menunjukkan banyaknya kematian ibu selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera kematian. Jumlah Kematian Ibu di Purworejo mengalami penurunan secara signifikan dari tahun 2020-2023 akan tetapi terjadi kenaikan lagi di tahun 2024. Kematian ibu paling banyak disebabkan karena penyakit dan kondisi lain yang mempersulit kehamilan seperti pentakit jantung, perdarahan, eklampsia, dan infeksi. Kenaikan kasus kematian ibu di tahun 2024 disebabkan meningkatnya ibu hamil berisiko tinggi (33,5%) lebih tinggi dari target (20%). Pemantauan yang kurang maksimal dan kurangnya kerjasama jejaring dalam pelayanan ibu hamil, bersalin, dan nifas menyebabkan ibu hamil berisiko tidak tertangani dengan baik sehingga berakibat terhadap kematian ibu. Meningkatkan skrining layak hamil pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin hamil, memaksimalkan pemantauan ibu hamil, bersalin, nifas, dan meningkatkan kerjasama jejaring dan jaringan, melaksanakan audit semua kematian ibu, melatih tim puskesmas mampu persalinan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, meningkatkan kualitas kelas ibu hamil dengan bedah buku KIA serta peningkatan kesadaran bagi ibu dan keluarga yang memiliki risiko tinggi agar lebih peduli dengan kesehatannya diharapkan dapat meminimalkan terjadinya komplikasi selama kehamilan yang diharapkan bisa menekan kasus kematian ibu.

3. Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan signifikan dari tahun 2020 sampai tahun 2022, yaitu dari 10,93 per 1000 Kelahiran Hidup (KH) menjadi 8,35 per 1000 KH. Angka Kematian Bayi kemudian meningkat kembali di tahun 2023 yaitu 11,32 per 1000 KH dan tahun 2024 yaitu 13,20 per 1000 KH, dimana pada tahun 2024 kematian bayi terbanyak di usia 0-1 bulan yaitu 64 anak, dengan penyebab terbanyak kematian bayi masih didominasi BBLR, kelainan kongenital, infeksi dan asfiksia. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk terus menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Purworejo dimana angka kelahiran dilaporkan menurun setiap tahunnya. Penyebab utama angka kematian bayi yang tinggi adalah ibu yang mengandung dengan kehamilan risiko tinggi dan perawatan bayi yang kurang optimal. Kehamilan risiko tinggi ini menimbulkan bahaya dan komplikasi baik bagi ibu maupun janin yang dikandung. Beberapa faktor yang menyebabkan kehamilan risiko tinggi antara lain adanya riwayat penyakit pada ibu, seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung, serta adanya penyulit dalam persalinan seperti posisi janin yang tidak normal, kehamilan ganda, dan perdarahan.

Kehamilan risiko tinggi memerlukan perhatian khusus dan penanganan medis yang lebih intensif. Ibu hamil dengan kondisi seperti ini harus rutin memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemantauan dan intervensi yang tepat. Pemantuan bayi baru lahir terutama bayi risiko oleh tenaga kesehatan serta edukasi ibu dan keluarga tentang perawatan bayi baru lahir, tanda dan gejala bahaya pada bayi baru lahir.

4. Kematian Balita

Angka Kematian Balita di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan signifikan dari tahun 2020 sampai tahun 2022, yaitu dari 12,71 per 1000 Kelahiran Hidup (KH) menjadi 9,83 per 1000 KH. Angka Kematian Balita kemudian meningkat kembali di tahun 2023 yaitu 12,65 per 1000 KH dan tahun 2024 yaitu 14,73 per 1000 KH, dimana Pada tahun 2024 kematian balita terbanyak di usia 0-1 tahunan yaitu 86 Anak, dengan penyebab terbanyak kematian balita infeksi (diare, pneumonia, DBD), kelainan kongenital, dan penyebab lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk terus menurunkan angka kematian balita di Kabupaten Purworejo. Salah satu penyebab utama kematian balita yang tinggi adalah infeksi, dimana penyakit infeksi tersebut dapat dicegah dengan imunisasi, dibutuhkan upaya kesehatan anak yang terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Peningkatan kesehatan anak memerlukan perhatian khusus pada beberapa aspek penting. Dengan mengimplementasikan upaya-upaya ini secara konsisten, diharapkan kematian balita di Kabupaten Purworejo dapat terus menurun. Upaya ini akan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat.

5. Stunting

Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Prevalensi stunting mengacu pada persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya. Prevalensi balita stunting digunakan sebagai

indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara. Semakin tinggi nilainya, semakin serius dan mendesak perluasan upaya untuk mengatasi masalah ini.

Stunting dan gizi buruk adalah dua kondisi kesehatan yang berbeda meskipun keduanya berhubungan dengan masalah gizi pada anak-anak. Stunting mengacu pada bentuk kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Akibatnya, tinggi dan berat badan mereka lebih rendah dari anak sebayanya. Sementara itu, gizi buruk merupakan kondisi di mana anak mengalami kekurangan nutrisi esensial seperti protein, energi, vitamin, dan mineral. Gizi buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk berat badan yang sangat rendah, kulit kering dan keriput, rambut kusam, kelemahan fisik, dan gangguan pada sistem kekebalan tubuh.

6. Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Berat

Target SPM Kesehatan ODGJ Berat yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah sebesar 100%. Capaian tahun 2020 sebesar 15%, tahun 2021 sebesar 91,38% meningkat menjadi 100% di tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan upaya layanan kesehatan terhadap ODGJ Berat dilakukan secara optimal. Sementara hasil capaian layanan kesehatan terhadap ODGJ Berat tahun 2024 mengalami penurunan, tercatat sebesar 4.221 orang dari sasaran 5535 orang (74,71%).

Penyebab utama menurunnya layanan kesehatan terhadap ODGJ Berat sesuai standar antara lain: 1) terbatasnya ketersediaan obat-obatan untuk ODGJ Berat di Puskesmas; 2) kurangnya pengetahuan dan dukungan keluarga pada perawatan pasien ODGJ Berat; dan 3) masih adanya stigma negatif terhadap gangguan jiwa di masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program layanan kesehatan jiwa untuk ODGJ Berat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dalam melakukan peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program kesehatan jiwa dengan: 1) koordinasi yang lebih baik untuk manajemen pengadaan obat; 2) pendekatan komunikasi personal dengan lintas sektor; 3) peningkatan kapasitas penanggung jawab program.

7. Jaminan Kesenatan Nasional

Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Purworejo dari tahun 2020 sampai sekarang mengalami peningkatan secara signifikan. Tahu 2020 cakupan kepesertaan 77,98%, dan tahun 2024 kepesertaan mencapai 98,31%. Dengan capaian kepesertaan lebih dari 95% dan kepesertaan aktif 75% Kabupaten Purworejo telah mencapai *Universal Health coverage Non Cut Off* atau “UHC Prioritas“ yaitu UHC dengan keistimewaan.

Selain cakupan kepesertaan, cakupan keaktifan juga menjadi persyaratan untuk untuk mempertahankan UHC Prioritas, dimana target minimal cakupan keaktifan adalah 75%. Cakupan kepesertaan dan cakupan keaktifan JKN kabupaten Purworejo Tahun 2024 adalah sebesar 98,31 % dan 75,1%. Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk mempertahankan UHC Prioritas diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk peningkatan keaktifan peserta, kerja sama dengan BPJS, dan dukungan anggaran.

8. TBC (Tuberkulosis)

TBC (Tuberkulosis) masih menjadi masalah kesehatan global, Indonesia menempati posisi kedua dunia setelah India dengan estimasi kasus sebanyak 1.090.000. Meskipun terjadi peningkatan dalam penemuan dan pengobatan kasus TBC melalui kegiatan skrining/deteksi dini dan pencatatan pelaporan, namun demikian belum diikuti oleh capaian keberhasilan pengobatan sesuai target. Tantangan yang perlu diwaspadai masih adanya kasus putus obat atau *default,* pasien yang tidak terdiagnosis sejak awal menyebabkan pengobatan terlambat, munculnya kasus TBC Resistan Obat yang mempersulit pengobatan standar. Hal ini disebabkan karena pasien merasa sudah sehat sehingga tidak mau melanjutkan pengobatan, pasien tidak kuat dengan efek samping obat, pasien bosan minum obat dan pasien menolak pengobatan.

Angka keberhasilan pengobatan TBC ditarget dari tahun 2025–2030 meningkat dari 90% menjadi 91,56%. Angka keberhasilan pengobatan TBC ditarget meningkat secara konsisten, dengan kenaikan rata-rata sekitar 0,31% per tahun. Capaian *Treatment Success Rate* (TSR) Kabupaten Purworejo tahun 2024 adalah 82% sedangkan tahun 2025 TSR 80% dari target 90%. Standar global WHO menetapkan target keberhasilan pengobatan TB minimal 90%. Indonesia berkomitmen untuk mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030 dengan menurunkan insiden dan angka kematian secara signifikan sesuai dengan target *Global End TB Strategy*. Rekomendasi strategis berupa perkuatan pendampingan pasien oleh petugas atau kader pendamping untuk memantau kepatuhan pengobatan setiap hari, meningkatkan penemuan kasus aktif dengan perluasan skrining terutama di daerah padat penduduk, penjara, dan populasi rentan, integrasi dengan program kesehatan lain terutama HIV, DM, gizi buruk, pelacakan penderita mangkir, penguatan jejaring internal dan eksternal, kegiatan Investigasi Kontak TBC, optimalisasi kegiatan skrining TBC dan penemuan kasus TBC dengan kegiatan *Active Case Finding* (ACF) merupakan upaya eliminasi TBC di Indonesia.

9. *Neglected Tropical Diseases* (NTDs)

NTDs yang umum di Indonesia yaitu Filariasis, Kusta, Schistosomiasis, Frambusia, dan Cacingan. Target penanggulangan NTDs menunjukkan tren meningkat tajam dari 85% (2025) menjadi 100% pada 2028, dan dipertahankan untuk mencapai Eliminasi pada tahun 2030. Dengan target ini perlu adanya penguatan intervensi dan koordinasi pada pengobatan massal, surveilans, WASH (*Water, Sanitation, and Hygiene*), dan edukasi masyarakat. Tantangan utama ke depan adalah menjaga keberhasilan agar tidak terjadi *rebound* atau *re-emergence*. Agar target tercapai perlu skalabilitas program eliminasi, peningkatan cakupan pengobatan massal (*Mass Drug Administration* / MDA), deteksi dini dan intervensi cepat, pemberian profilaksis untuk pencegahan, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi (WASH). Tantangan dan risiko pencapaian target yaitu sustainabilitas setelah target 100% berupa risiko kekambuhan atau reinfeksi jika sistem pengawasan melemah. Masih adanya kantong-kantong kasus di wilayah tertentu dengan faktor sosial dan budaya dimana stigma terhadap penyakit seperti kusta bisa memperlambat deteksi kasus. Adaptasi iklim dan mobilitas penduduk juga dapat memengaruhi NTDs. Strategi kunci untuk mencapai dan menjaga target 100% yaitu perluasan pengobatan massal dengan capaian cakupan minimal 75%–80% dari populasi sasaran dalam satu siklus, pemantauan pasca

eliminasi dengan membangun sistem surveilans aktif untuk mendeteksi kemunculan kembali kasus, intervensi berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh lokal dan kader kesehatan dalam edukasi dan pengawasan, kolaborasi lintas sektor. Integrasi program WASH sangat penting untuk memutus rantai penularan, digitalisasi data dan pelaporan dengan *real-time* monitoring membantu mengambil keputusan. Kabupaten Purworejo merupakan daerah *lowendemic* untuk kasus kusta namun demikian setiap tahun ditemukan kasus kusta meskipun prevalensinya tahun 2024 sebesar 0,09/10.000 sedangkan tahun 2025 sebesar 0,05/10.000 dan kasus anak dalam 5 tahun terakhir. Namun demikian kasus cacat masih tinggi (sekitar 25%) sehingga perlu penguatan surveilans terintegrasi dengan kegiatan skrining frambusia, investigasi kontak dan pemberian profilaksis pada kontak serumah dan kontak lingkungan.

10. Prevalensi Obesitas

Prevalensi obesitas diproyeksikan menurun perlahan dari 21,70% (2025) ke 21,20% (2030). Meskipun arah trennya positif, penurunan sangat lambat dan masih menunjukkan angka obesitas yang tinggi secara nasional. Diperlukan intervensi lebih intensif dan terintegrasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan dan mencegah dampak jangka panjang terhadap penyakit tidak menular dan produktivitas nasional. Prevalensi obesitas menurun secara perlahan dari tahun ke tahun dengan penurunan tahunan rata-rata 0,10%.

Aspek positif terdapat tren penurunan obesitas yang diharapkan menunjukkan bahwa program intervensi terkait gizi, aktivitas fisik dan edukasi kesehatan mulai berdampak. Upaya pemerintah atau lembaga kesehatan seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), kampanye diet seimbang dan aktivitas fisik, labelisasi pangan kemasan dan pembatasan iklan makanan tidak sehat ke anak-anak berkontribusi terhadap penurunan ini.

Angka prevalensi sebesar 21% artinya lebih dari 1 dari 5 orang mengalami obesitas. Obesitas adalah faktor risiko utama untuk berbagai penyakit tidak menular (PTM) seperti Diabetes tipe 2, Hipertensi, Penyakit Jantung, Stroke, Kanker tertentu. Urbanisasi, pola makan tinggi kalori, dan gaya hidup sedentari masih mendominasi di banyak populasi.

Rekomendasi strategis intervensi berbasis komunitas dengan program aktivitas fisik di sekolah, kantor, dan komunitas harus ditingkatkan, pengendalian konsumsi makanan ultra-proses, regulasi pada minuman manis, *junk food*, dan iklan makanan tidak sehat terutama bagi anak-anak, label gizi yang lebih jelas dan edukatif dengan menggunakan sistem *traffic light label* (merah-kuning-hijau) untuk memudahkan pemilihan makanan sehat. Peningkatan akses terhadap makanan sehat dan terjangkau dengan subsidi atau promosi untuk buah, sayur, dan makanan segar lokal. Melibatan lintas sektor pendidikan, sektor swasta dan media massa dalam promosi hidup sehat.

11. Angka Kematian Dengue

Target penurunan angka kematian akibat dengue dari 0,36% (2025) menjadi 0,10% (2030). Tren ini sangat positif dan menandakan komitmen untuk menurunkan beban kematian akibat DBD secara drastis. Dibutuhkan penguatan dari hulu ke hilir mulai dari pencegahan lingkungan, edukasi masyarakat, hingga peningkatan sistem layanan kesehatan darurat dan rujukan.

Angka Kematian akibat Dengue berdasarkan target dari tahun 2025 hingga 2030 menunjukkan target penurunan signifikan selama 5 tahun. Penurunan dari 0,36% menjadi 0,10% dengan penurunan total 0,26%. Angka kematian Dengue diukur dari jumlah kematian per 1000 kasus. Target 0,10% artinya dari setiap 1.000 kasus dengue, hanya 1 orang yang meninggal.

Penurunan target ini diharapkan dicapai dengan upaya peningkatan kapasitas deteksi dini dan diagnosis, perbaikan manajemen klinis pasien Dengue, peningkatan akses layanan kesehatan rujukan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan kasus dan respon cepat.

Strategi utama untuk mencapai target deteksi dan penanganan dini dengan edukasi masyarakat tentang gejala awal dan fase kritis, penguatan kapasitas puskesmas dan klinik untuk diagnosis cepat (NS1 antigen, IgM/IgG rapid test), pemantauan epidemiologi dan respon cepat dengan sistem EWARS (*Early Warning and Response System*), pengendalian vektor terpadu (PSN 3M Plus) sementara *fogging* bukan solusi jangka panjang.

12. Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Capaian desa/kelurahan dengan STBM menunjukkan tren yang meningkat secara bertahap dari 60% (2025) menjadi 75% (2030). Ini mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas sanitasi dan perubahan perilaku masyarakat. Meskipun tantangannya kompleks, terutama terkait perubahan budaya dan akses infrastruktur, tren ini cukup optimis jika didukung dengan intervensi lintas sektor dan partisipasi masyarakat yang kuat.

Target 75% desa/kelurahan dengan STBM pada tahun 2030 mencerminkan komitmen kuat terhadap sanitasi dan perilaku hidup bersih serta peningkatan upaya mengurangi penyakit berbasis lingkungan seperti diare, cacingan, stunting, dan penyakit tropis lainnya. STBM mencakup 5 Pilar: Stop buang air besar sembarangan (BABS), Cuci tangan pakai sabun, Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, Pengelolaan sampah rumah tangga, Pengelolaan limbah cair rumah tangga

Capaian tinggi hanya bisa diraih jika semua pilar diterapkan secara berkelanjutan di tingkat masyarakat. Tantangan dalam pencapaian STBM antara lain ada wilayah tertinggal dan terpencil dengan infrastruktur dasar, air bersih, dan edukasi perilaku masih minim. Perubahan perilaku masyarakat karena STBM sangat bergantung pada perubahan kebiasaan dan budaya yang tidak bisa dicapai hanya dengan infrastruktur. Keterbatasan pendanaan dan SDM seperti kader kesehatan lingkungan atau sanitarian di banyak wilayah masih kurang. Perlu dukungan lintas sektor dan pembiayaan berkelanjutan.

13. Annual Parasite Incidence (API)

API adalah indikator epidemiologi yang mengukur jumlah kasus malaria baru yang dikonfirmasi dalam satu tahun per 1.000 penduduk berisiko. Target API Kabupaen Purworejo tahun 2025 sampai tahun 2030 0,01. Nilai 0,01 per 1.000 berarti hanya 1 kasus malaria per 100.000 penduduk per tahun. Rencana eliminasi malaria untuk Kabupaten Purworejo pada tahun 2026.

Diperlukan usaha-usaha untuk menjaga konsistensi strategi pengendalian, surveilans, dan akses pelayanan kesehatan untuk mendukung Indonesia bebas malaria 2030. Fokus strategi untuk

mempertahankan kondisi eliminasi dan mencegah *resurgence* (kembalinya kasus). Jika upaya kontrol (pengobatan, surveilans, distribusi kelambu, dll.) terus dilakukan maka API bisa mencapai 0 atau mendekati nol menjelang 2030 dengan asumsi tidak ada lonjakan transmisi.

Strategi yang harus dilakukan yaitu surveilans aktif dan pasif, deteksi dini, isolasi, dan pengobatan cepat dan tepat. Fokus surveilans pada populasi di daerah reseptif, ibu hamil, atau wilayah perbatasan. Perlu memastikan pelaporan dan diagnosis tetap kuat agar tidak ada kasus "tersembunyi" dan jika memungkinkan menggunakan pendekatan lokalitastik (kelompok kecil) hingga benar-benar "*malaria-free*".

14. Persentase Diabetes Melitus (DM) Terkendali

DM terkendali jika penyandang DM yang gula darah puasa < 126mg/dl atau gula darah 2 jam PP nya < 200 mg/dl sebanyak minimal 3 kali (bulan) atau HbA1 c < 7% minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Data global menunjukkan persentase pasien yang mencapai kontrol glikemik (HbA1c < 8 %) berada di kisaran sekitar 60–68 %. Namun, dalam beberapa penelitian lokal, pengendalian yang optimal (HbA1c < 7 %) hanya berhasil dicapai oleh 35–42 % pasien.

Proyeksi peningkatan persentase pengendalian DM 33 % ke 45 % (2025–2030) adalah optimistis namun masih realistis, dengan catatan bahwa diperlukan keberlanjutan strategi, dukungan kebijakan, serta kapasitas sistem kesehatan yang memadai. Target tersebut dapat diwujudkan jika intervensi tetap terarah dan adaptif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Tren peningkatan proyeksi target menunjukkan peningkatan teratur sebesar +2 poin persentase per tahun hingga 2029, lalu lonjakan +4 poin dari 2029 (41 %) ke 2030 (45 %). Tren target ini diharapkan konsisten dengan upaya peningkatan kualitas pengelolaan diabetes dan program intervensi jangka menengah. Peningkatan target menandakan adanya konsistensi dalam program manajemen diabetes seperti edukasi, akses obat, dan pemantauan berkala. Lonjakan target ke 45 % tahun 2030 menunjukkan kemungkinan adanya investasi atau upaya intensif pada tahun terakhir.

Tantangan yang perlu diperhatikan yaitu beban sistem kesehatan seperti memastikan suplai insulin, edukasi pasien, dan kemampuan monitoring tetap diperkuat. Kepatuhan pasien terhadap pengobatan, diet, olahraga, dan pengukuran rutin harus didorong secara sistematis. Variasi populasi seperti faktor sosial-ekonomi, pendidikan, dan akses medis dapat memengaruhi tingkat kontrol. Pandemi atau gangguan eksternal harus diantisipasi agar tidak menurunkan capaian target program. Rekomendasi strategi melalui edukasi dan pelatihan dengan mingkatkan literasi pasien di komunitas, fasilitasi kelas-kelas manajemen diabetes. Akses medis dan obat perlu dipastikan ketersediaan HbA1c test bagi pasien rutin atau pemeriksaan kadar gula darah menggunakan fotometri. Pendekatan holistic dengan fokus pada kontrol tekanan darah, lipid, dan berat badan untuk meningkatkan pengendalian keseluruhan. Pemantauan dan evaluasi menggunakan data tahun-ke-tahun untuk menilai efektivitas dan adaptasi intervensi. Pendekatan individual disesuaikan target kontrol (HbA1c < 7 % atau GDN/GDPP) berdasarkan umur, komorbiditas, dan risiko hipoglikemia

15. Persentase Hipertensi terkendali

Kriteria Hipertensi terkendali apabila penyandang Hipertensi yang tekanan sistolik dan diastolik turun menjadi kurang dari 140/90 mmHg dalam kurun waktu minimal 3 bulan atau 3 kali pemeriksaan. Target Persentase Hipertensi terkendali dari 2025 4,67% hingga 2030 7,17%. Secara global, hanya sekitar 21% orang dengan hipertensi yang berhasil mengendalikan tekanan darahnya <140/90 mmHg. Berdasarkan survei nasional, proporsi Hipertensi yang berhasil terkontrol di Indonesia adalah sekitar 14,3%. Data lain menyatakan seluruh penderita Hipertensi hanya 25% yang menjalani pengobatan dan banyak yang belum menyadari kondisi mereka. Proyeksi target Hipertensi terkontrol yang ditargetkan dari Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) yang sangat rendah, dimulai dari 4,67% (2025) hingga 7,17% (2030), jauh di bawah angka nasional 14% dan target WHO 21% global. Strategi untuk mencapai terget mendekati target nasional dengan meningkatkan kesadaran dan diagnosis dini karena banyak penderita Hipertensi tidak menyadari kondisinya. Memperluas akses pengobatan karena hanya 25% penderita mendapatkan obat dan memperbaikan sistem layanan primer. Pendekatan holistik melalui edukasi gaya hidup, digital monitoring, dan dukungan komunitas bisa mempercepat kontrol tekanan darah. Teknologi dan terapi baru dengan terobosan terbukti berhasil mengontrol tekanan darah (40% tercapai target) bisa menjadi *gamechanger*. Pendekatan digital dan *remote* monitoring dimana studi menunjukkan bahwa pemantauan kesehatan berbasis digital (*wearables,* perangkat terhubung) menurunkan tekanan darah dengan signifikan dalam hitungan bulan.

16. Insiden HIV (ODHIV)

Kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia, dengan jumlah orang dengan HIV (ODHIV) terus meningkat dan ditemukan pada berbagai kelompok usia, terutama usia produktif 25-49 tahun. Penyebaran HIV terjadi melalui beberapa cara, termasuk hubungan seksual tidak aman, penggunaan jarum suntik bersama (pada pengguna narkoba suntik), dan penularan dari ibu ke anak selama kehamilan.

Kasus HIV di Kabupaten Purworejo tahun 2024 sebanyak 93 kasus dengan Insiden sebanyak 0,11/1000 penduduk. Sedangkan tahun 2025 sampai dengan bulan September sebanyak 52 kasus dengan insiden HIV 0,06/1000 penduduk. Target 2025 0,15/1000 peduduk sampai dengan tahun 2030 dengan target 0,25/1000 penduduk

Penemuan kasus di Kabupaten Purworejo setiap tahun meningkat seiring fenomena populasi kunci Laki-laki Seks Laki-laki (LSL) mulai meningkat sedangkan penjangkau untuk masuk ke populasi LSL tidak ada. Kegiatan skrining HIV sudah dapat dilakukan di semua Fasilitas Kesehatan namun baru 2 RS dan 19 puskesmas yang sudah bisa melaksanakan kegiatan skrining sampai dengan diagnosa. Stigma dan diskriminasi HIV masih sangat tinggi sehingga ODHIV lebih memilih untuk melakukan pengobatan di luar Kabupaten Purworejo.

Kegiatan yang sudah dilakukan adalah dengan penguatan pencatatan dan pelaporan program HIV melalui apliaksi SIHA sebagai bahan analisis dan evaluasi, penguatan faskes layanan PDP dalam memberikan pengobatan kepada ODHIV sampai dengan melakukan evaluasi dengan pemeriksaan Viral Load HIV, bekerjasama dengan penjangkau untuk melakukan pendekatan pada populasi LSL, pengadaan rapid HIV.

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Daerah

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	3	*4*	5	*6*	7	*8*	9	*10*	11	*12*	13	*14*	15	*16*	17	*18*	19	*20*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		102.003.127.289	112.203.440.018	123.423.784.020	135.766.162.422	149.342.778.663	78.053.767.280	96.487.837.303	62.175.481.583	129.157.985.041	141.621.458.301	144.312.948.936		94,59	55,41	95,13	104,31	96,63
i	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		114.586.600	126.045.260	138.649.786	152.514.765	167.766.241	395.656.034	144.480.600	131.255.300	81.319.600	47.685.000	32.680.200		126,09	104,13	53,32	31,27	19,48
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		61.684.600	67.853.460	74.638.686	82.102.465	90.312.541	357.156.254	91.578.600	62.630.300	40.033.600	21.466.800	29.568.600		148,46	92,30	48,76	26,15	32,74
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		7.030.400	7.733.400	8.506.700	9.357.400	10.293.200		7.030.400	10.051.100	4.066.000	4.220.000	-		100,00	129,97	43,45	45,10	0,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		7.030.400	7.733.400	8.506.700	9.357.400	10.293.200		7.030.400	10.051.100	6.630.800	4.530.400	-		100,00	129,97	70,86	48,42	0,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		7.007.400	7.708.000	8.478.900	9.326.800	10.259.500		7.007.400	11.527.000	7.955.000	5.289.600	-		100,00	149,55	85,29	56,71	0,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		7.007.400	7.708.000	8.478.900	9.326.800	10.259.500		7.007.400	12.027.000	8.530.800	5.529.000			100,00	156,03	91,47	59,28	0,00
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		24.826.400	27.309.000	30.039.900	33.043.900	36.348.300	38.499.780	24.826.400	24.968.800	14.103.400	6.649.200	3.111.600		100,00	91,43	42,68	20,12	8,56
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		101.115.582.967	111.227.141.264	122.349.855.390	134.584.840.929	148.043.325.022	76.693.732.477	95.303.296.445	61.208.408.549	128.281.590.183	140.757.557.385	144.088.758.606		94,25	55,03	95,32	104,59	97,33
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100.959.153.867	111.055.069.364	122.160.576.590	134.376.633.929	147.814.297.422	76.516.651.677	95.161.896.305	60.823.773.669	128.067.561.038	140.577.013.485	144.011.885.406		94,26	54,77	95,30	104,61	97,43
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000		10.000.000	10.000.000	6.404.310	2.180.400	-		100,00	90,91	48,12	16,38	0,00
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		8.550.000	9.405.000	10.345.500	11.380.000	12.518.000		8.550.000	8.550.000	18.637.460	7.922.400	-		100,00	90,91	163,77	69,62	0,00
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.310.000	5.841.000	6.425.000	7.067.600	7.774.300		5.310.000	5.310.000	3.183.880	1.794.400	-		100,00	90,91	45,05	25,39	0,00

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		4.311.000	4.742.000	5.216.000	5.737.900	6.311.700		4.311.000	4.311.000	2.401.900	1.335.600	-		100,00	90,91	41,86	23,28	0,00
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		128.258.100	141.083.900	155.192.300	170.711.500	187.782.600	177.080.800	113.229.140	356.463.880	183.401.595	167.311.100	76.873.200		88,28	252,66	107,43	98,01	40,94
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		28.336.700	31.170.370	34.287.407	37.716.148	41.487.762	-	28.336.700	28.350.000	10.515.800	8.037.950	5.637.000		100,00	90,95	27,88	21,31	13,59
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		4.138.000	4.551.800	5.006.900	5.507.600	6.058.400		4.138.000	4.151.300	630.000	1.173.000	-		100,00	91,20	11,44	21,30	0,00
14	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		3.229.000	3.551.900	3.907.507	4.297.800	4.727.500		3.229.000	3.229.000	645.000	950	-		100,00	90,91	15,01	0,02	0,00
15	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		8.235.700	9.059.270	9.965.000	10.961.848	12.057.000		8.235.700	8.235.700	4.848.600	5.178.000	-		100,00	90,91	44,23	47,24	0,00
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		6.307.000	6.937.700	7.631.400	8.394.600	9.235.162		6.307.000	6.307.000	3.338.800		-		100,00	90,91	39,77	0,00	0,00
17	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		6.427.000	7.069.700	7.776.600	8.554.300	9.409.700		6.427.000	6.427.000	1.053.400	1.686.000	5.637.000		100,00	90,91	12,31	19,71	59,91
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		38.243.200	42.067.520	46.274.272	50.901.699	55.991.869	105.176.600	38.243.200	38.243.200	10.469.200	4.878.800	1.944.000		100,00	90,91	20,57	9,58	3,47
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							105.176.600				-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		15.783.200	17.361.520	19.097.672	21.007.499	23.108.179		15.783.200	15.783.200	3.469.200	2.690.000	1.944.000		100,00	90,91	16,51	12,80	8,41
19	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		22.460.000	24.706.000	27.176.600	29.894.200	32.883.690		22.460.000	22.460.000	7.000.000	2.188.800	-		100,00	90,91	23,42	7,32	0,00
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah		76.486.400	84.135.040	92.548.544	101.803.398	111.983.738	210.353.200	76.486.400	76.486.400	20.938.400	9.757.600	3.888.000		100,00	90,91	20,57	9,58	3,47
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor							36.206.000				5.868.300	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000		10.000.000	7.061.000	5.875.900	-	5.273.800		100,00	64,19	44,15	0,00	36,02

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		15.887.000	17.475.700	19.223.258	21.145.600	23.260.153		15.887.000	12.000.200	8.658.900	5.678.000	5.672.700		100,00	68,67	40,95	26,85	24,39
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		106.722.000	117.394.200	129.133.620	142.046.971	156.251.680		106.722.000	106.722.000	106.722.000	25.578.000	25.578.000		100,00	90,91	75,13	18,01	16,37
23	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		17.505.600	19.256.160	21.181.780	23.299.950	25.629.950		13.425.600	15.020.100	8.629.400	4.314.500	4.326.000		76,69	78,00	37,04	18,52	16,88
24	Penyediaan Bahan/Material		19.972.100	21.969.310	24.166.240	26.582.870	29.241.150		19.972.100	14.990.800	8.529.000	5.345.000	76.609.720		100,00	68,24	32,08	20,11	261,99
25	Fasilitasi Kunjungan Tamu		9.945.000	10.939.500	12.033.450	13.236.800	14.560.480		9.944.000	9.945.000	7.905.000	4.731.000	4.300.000		99,99	90,91	59,72	35,74	29,53
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		301.951.500	332.146.650	365.361.320	401.897.450	442.087.190	348.273.400	361.951.500	227.572.500	136.443.000	182.177.400	62.882.000		119,87	68,52	33,95	45,33	14,22
27	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		5.693.600	6.262.960	6.889.260	7.578.180	8.336.000		5.693.600	5.693.600	3.903.600	2.049.200	-		100,00	90,91	51,51	27,04	0,00
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-	-	-	50.748.000	21.406.500	21.406.500	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Pengadaan Mebel									25.000.000		21.406.500	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									25.748.000	21.406.500	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		298.257.622	328.083.384	360.891.723	396.980.895	436.678.984	391.370.700	305.504.558	300.339.934	342.023.658	346.276.066	-		102,43	91,54	86,16	87,23	0,00
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		312.500	343.750	378.130	415.940	457.530	35.276.000	312.500	312.500	312.500	3.125	-		100,00	90,91	75,13	0,75	0,00
31	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		275.409.122	302.950.034	333.245.033	366.569.535	403.226.494	318.604.700	282.409.122	275.409.122	316.793.158	320.916.941	-		102,54	90,91	86,42	87,55	0,00
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		22.536.000	24.789.600	27.268.560	29.995.420	32.994.960	37.490.000	22.782.936	24.618.312	24.918.000	25.356.000	-		101,10	99,31	83,07	84,53	0,00
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		331.633.800	364.797.180	401.276.898	441.404.588	485.545.047	257.478.269	591.489.400	341.650.200	389.721.700	425.859.000	180.041.130		178,36	93,65	88,29	96,48	37,08
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		111.065.000	122.171.500	134.388.650	147.827.520	162.610.270	92.500.000	111.065.000	111.065.000	39.950.000	39.945.000	3.995		100,00	90,91	27,02	27,02	0,00
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan		10.429.000	11.471.900	12.619.090	13.881.000	15.269.100		10.429.000	10.429.000	151.370.000	195.040.000	13.135		100,00	90,91	1090,48	1405,09	0,09

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
35	Pemeliharaan Mebel		5.246.000	5.770.600	6.347.660	6.982.430	7.680.670		5.246.000	5.246.000	5.000.000	2.400.000	2.400.000		100,00	90,91	71,61	34,37	31,25
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		39.855.000	43.840.500	48.224.550	53.047.010	58.351.710		39.855.000	39.855.000	39.855.000	39.290.000	34.990.000		100,00	90,91	75,13	74,07	59,96
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		62.371.200	68.608.320	75.469.150	83.016.070	91.317.670	139.388.269	323.726.800	62.371.200	62.280.000	62.280.000	55.843.000		519,03	90,91	75,02	75,02	61,15
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3.481.000	3.829.100	4.212.010	4.633.210	5.096.530	25.590.000	1.981.000	3.579.000	3.275.700	3.473.000	3.360.000		56,91	93,47	70,70	74,96	65,93
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		99.186.600	109.105.260	120.015.788	132.017.348	145.219.097		99.186.600	109.105.000	87.991.000	83.431.000	83.431.000		100,00	100,00	66,65	63,20	57,45
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		152.728.002.623	113.147.101.000	190.582.442.150	135.104.000.000	134.502.300.000	93.519.476.180	57.758.001.158	72.866.049.538	79.559.324.686	84.776.892.414	85.293.869.931		37,82	64,40	58,89	62,75	63,41
i	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		79.629.665.845	26.196.181.985	115.490.876.000	45.998.281.000	44.736.737.000	21.136.833.225	22.737.741.737	18.037.604.208	19.929.697.017	26.660.008.354	26.224.823.681		28,55	68,86	43,33	57,96	58,62
	Pembangunan Puskesmas							7.528.874.400				5.272.058.360	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pengembangan Puskesmas								4.005.109.200		649.492.000	5.618.745.203	5.266.622.060		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		120.000.000	120.000.000	56.500.000	56.500.000	56.500.000	56.500.000	120.000.000	1.135.000.000	10.330.871.040	796.500.300	6.030.732.770		100,00	945,83	18284,73	1409,74	10673,86
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan Daerah)							698.535.000				-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD RAA Tjokronegoro)							2.136.575.900				-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan							1.213.057.000				-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		9.000.000.000	5.000.000.000	5.839.201.000	17.788.271.000	16.886.801.000		190.000.000	750.000.000		-	-		2,11	15,00	0,00	0,00	0,00
42	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya									450.000.000		-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		61.980.326.000	13.897.008.461	17.880.333.000	19.786.173.000	19.054.023.000	3.311.347.510	8.906.278.385	6.004.568.251	3.021.736.054	701.926.240	689.853.500		14,37	43,21	15,27	3,55	3,62
44	Pengadaan Obat Vaksin							4.143.733.528	3.619.513.187	3.305.680.000		-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
45	Pengadaan Bahan Habis Pakai							2.048.209.887	4.725.976.865	5.910.087.957		14.163.693.751	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
46	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan									-		-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
47	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								300.000.000	425.000.000	354.875.000	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		8.294.892.845	6.931.971.524	7.760.609.000	8.075.730.000	7.921.102.000				5.520.355.963	107.084.500	14.151.475.351		0,00	0,00	68,36	1,33	178,66
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		75.000.000	75.000.000	83.871.733.000	90.750.000	99.825.000		74.897.100		34.686.040	-	-		99,86	0,00	38,22	0,00	0,00
48	Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		159.447.000	172.202.000	82.500.000	200.857.000	718.486.000		795.967.000	57.268.000	17.680.920	-	86.140.000		499,20	33,26	8,80	0,00	11,99
ii	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		72.830.144.878	86.462.192.599	74.738.370.150	87.990.257.700	88.523.556.800	71.350.702.755	34.724.975.637	54.307.614.346	59.405.117.566	57.643.650.161	58.836.211.151		47,68	62,81	67,51	65,51	66,46
49	Pengelolaan Pelayanan		1.605.157.800	2.633.321.868	1.886.759.000	1.350.117.000	2.035.084.000	1.253.367.900	565.000.368	265.000.368	218.306.700	190.460.900	120.615.000		35,20	10,06	16,17	14,11	5,93

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kesehatan Ibu Hamil																		
50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		2.353.481.600	1.886.739.000	1.526.207.000	532.484.000	3.445.732.000	1.670.549.600	504.375.000	181.058.600	105.555.400	2.262.400	48.584.600		21,43	9,60	19,82	0,42	1,41
51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		934.882.000	536.519.100	1.117.681.000	578.828.000	636.710.000	170.872.200	148.769.900	113.704.400	150.665.800	62.347.550	6.529.800		15,91	21,19	26,03	10,77	1,03
52	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		1.520.855.000	2.260.310.000	540.204.000	1.225.658.000	1.348.223.000	687.495.200	117.841.200	95.010.800	34.383.600	8.203.500	37.263.600		7,75	4,20	2,81	0,67	2,76
53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		1.446.450.200	1.221.194.000	722.714.000	594.225.000	653.647.000	398.109.200	49.949.100	46.542.900	52.909.040	18.862.800	20.571.000		3,45	3,81	8,90	3,17	3,15
54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		1.460.524.400	1.579.757.600	1.291.870.000	758.850.000	796.792.000	450.671.200	321.357.900	503.621.200	22.548.500	12.616.500	19.351.200		22,00	31,88	2,97	1,66	2,43
55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		1.370.750.300	1.439.956.800	58.892.000	1.356.464.000	1.424.287.000	653.573.800	127.885.300	46.436.700	28.912.300	36.515.700	44.485.400		9,33	3,22	2,13	2,69	3,12
56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		1.883.358.900	424.821.800	51.576.600	61.837.000	64.929.000	129.941.400	22.035.500	22.035.500	16.290.570	6.536.800	12.907.000		1,17	5,19	26,34	10,57	19,88
57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		1.105.870.700	311.068.200	70.946.000	54.155.400	56.863.000	59.089.200	17.199.500	726.839.500	1.460.323.900	3.100.000	17.396.200		1,56	233,66	2696,54	5,72	30,59
58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		984.902.600	201.020.900	236.835.300	74.493.600	78.218.000	58.249.200	21.475.400	16.999.200	12.184.500	3.157.000	10.764.200		2,18	8,46	16,36	4,24	13,76
59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		882.599.600	427.535.500	100.535.000	248.677.000	261.110.900	70.086.000	183.622.800	264.391.200	1.179.042.000	106.728.600	28.675.600		20,80	61,84	474,13	42,92	10,98
60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		610.461.600	203.936.900	1.809.086.000	110.588.600	121.647.000	23.418.200	85.643.200	216.659.890	39.165.150	18.308.400	56.185.200		14,03	106,24	35,42	16,56	46,19
61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		6.686.021.800	7.354.623.900	50.748.600	8.899.095.000	9.789.004.000	5.939.798.300	315.931.000	23.394.000	22.795.313	10.418.000	-		4,73	0,32	0,26	0,12	0,00

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		941.941.000	46.135.100	1.760.000.000	55.823.400	61.405.800	6.969.679.303	41.941.000	39.720.700	22.947.000	6.869.800	-		4,45	86,10	41,11	12,31	0,00
63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1.858.753.700	2.734.116.900	480.000.000	1.765.000.000	1.770.000.000	1.322.382.400	1.052.402.100	3.069.204.100	2.794.854.000	134.855.400	199.027.200		56,62	112,26	158,35	7,64	11,24
64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1.261.230.700	464.038.200	758.000.000	490.000.000	500.000.000	436.436.200	45.972.600	68.980.500	36.758.400	37.527.800	32.120.800		3,65	14,87	7,50	7,66	6,42
65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1.255.226.400	1.438.164.968	110.000.000	760.000.000	775.000.000	699.606.200	260.091.312	282.579.668	498.644.100	79.861.400	53.737.400		20,72	19,65	65,61	10,51	6,93
66	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1.229.740.800	2.720.214.800	40.000.000	121.000.000	133.100.000	1.485.690.600		324.143.400	315.484.350	396.729.400	394.940.000		0,00	11,92	260,73	327,88	296,72
67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		22.956.400	32.414.400	501.000.000	50.000.000	60.000.000	66.359.900	5.524.800	12.956.400	7.450.000	3.856.000	3.410.800		24,07	39,97	14,90	7,71	5,68
68	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		442.623.100	847.695.772	*400.000.000	541.000.000	570.000.000	492.263.200	128.125.900	272.302.972	244.101.588	122.440.000	96.026.700		28,95	32,12	45,12	22,63	16,85
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		53.437.800	199.550.000		63.000.000	67.000.000	53.437.800			41.996.800	-	21.346.600		0,00	0,00	66,66	0,00	31,86
69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		*400.000.000	*400.000.000	580.000.000	*400.000.000	*400.000.000	-		142.485.000	-	-	-		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
70	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus				50.000.000			-	54.119.500	54.119.500	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
71	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		52.389.700	27.464.400	848.238.100	50.000.000	50.000.000	7.588.000	52.389.700	27.464.400	13.732.200	8.750.800	-		100,00	100,00	27,46	17,50	0,00
72	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		2.235.707.300	2.428.773.960	52.750.000.000	11.410.960	81.130.500	2.792.833.300	1.081.581.360	846.268.847	1.787.993.920	75.018.800	35.498.800		48,38	34,84	15669,09	657,43	43,76
73	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		21.648.822.128	46.806.228.213	75.000.000	53.000.000.000	53.250.000.000	20.681.838.953	27.007.920.879	44.041.362.433	48.370.470.433	54.478.220.000	56.081.156.751		124,75	94,09	91,27	102,79	105,32

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
74	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		23.814.300	23.814.300	139.505.400	100.000.000	125.000.000	-	23.814.300	17.983.300	9.197.500	2.708.800	-		100,00	75,51	9,20	2,71	0,00
75	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		115.293.800	110.417.800	61.159.900	153.456.000	168.801.600	15.176.000	108.517.800	100.117.800	66.462.937	458.677.700	458.609.200		94,12	90,67	43,31	298,90	271,69
76	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		50.545.400	122.598.200	433.417.550	67.275.900	74.003.500	-	50.545.400	25.150.600	404.190.200	26.373.800	-		100,00	20,51	600,79	39,20	0,00
77	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		383.417.550	36.920.000		86.920.000	483.417.550	-	387.251.550	16.354.900	8.300.000	-	-		101,00	44,30	9,55	#VALUE!	0,00
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		14.174.115.000	2.710.613.550	2.443.111.400	8.485.234.000	2.778.154.750	9.831.972.499				-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operasional Pelayanan Puskesmas		2.019.100.400	1.841.135.000	179.408.400	2.687.422.600	2.956.164.800	13.456.576.900				-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		*200.000.000	*200.000.000	1.674.285.400	197.349.000	217.084.000				14.577.000	85.124.000	127.766.400		#VALUE!	#VALUE!	7,39	43,13	58,86
79	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		1.383.707.000	1.402.488.000	184.025.200	1.841.714.000	2.025.885.400	1.026.648.000	1.263.654.000	825.000.000	25.170.000	3.210.700	-		91,32	58,82	1,37	0,17	0,00
80	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		184.025.200	259.881.368	100.000.000	184.025.200	184.025.200	184.794.400	157.254.268	89.354.268	73.515.641	59.879.520	36.805.300		85,45	34,38	39,95	32,54	20,00
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		262.197.700	198.350.800	466.797.400	125.000.000	150.000.000	262.197.700				-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		385.783.000	424.361.300	16.731.000	513.477.000	564.824.800		522.783.000	424.361.300	432.744.924	330.664.891	221.895.000		135,51	100,00	84,28	64,40	39,29
82	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis			13.036.000	11.097.000	14.935.000	14.935.000			13.036.000	6.845.500	3.467.200	16.866.600		#DIV/0!	100,00	45,84	23,22	112,93

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
83	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)			13.036.000	892.588.900	14.430.000	14.430.000			13.036.000	5.548.500	2.207.000	10.899.800		#DIV/0!	100,00	38,45	15,29	75,54
84	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria			1.079.938.000	*100.000.000	766.312.040	736.947.000			1.079.938.000	842.794.800	754.723.000	529.809.000		#DIV/0!	100,00	109,98	98,49	71,89
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				719.950.000	*100.000.000	*100.000.000				38.255.000	92.966.000	92.966.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
iii	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		100.260.100	269.500.000	278.196.000	791.945.000	871.139.500	142.640.200	171.500.368	308.848.568	161.415.238	383.918.399	168.482.099		171,06	114,60	20,38	48,48	19,34
85	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan							142.640.200	34.826.300	21.413.200		-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
86	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		100.260.100	269.500.000	278.196.000	791.945.000	871.139.500		36.413.968	130.961.868	161.415.238	285.060.599	168.482.099		36,32	48,59	20,38	35,99	19,34
87	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet								100.260.100	156.473.500		98.857.800	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
iv	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		167.931.800	219.226.416	75.000.000	323.516.300	370.866.700	889.300.000	123.783.416	211.982.416	63.094.865	89.315.500	64.353.000		73,71	96,70	19,50	27,61	17,35
88	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		59.856.000	65.841.000	*200.000.000	79.667.500	87.633.700		34.226.000	47.041.000	21.022.215	-	4.335.000		57,18	71,45	26,39	0,00	4,95
89	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		108.075.800	153.385.416	75.000.000	143.848.800	158.233.000	889.300.000	89.557.416	89.557.416	42.072.650	89.315.500	60.018.000		82,87	58,39	29,25	62,09	37,93
90	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		*200.000.000	*200.000.000	*60.000.000	100.000.000	125.000.000			75.384.000		-	-		#VALUE!	#VALUE!	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		233.700.000	729.000.000	974.260.000	754.250.000	912.000.000	31.091.507.964	233.565.900	1.622.765.895	1.401.754.535	1.201.013.025	950.970.260		99,94	222,60	185,85	159,23	104,27

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
i	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		-	290.800.000	220.260.000	284.350.000	313.135.000	-	-	93.714.200	55.358.640	15.902.160	7.184.160		#DIV/0!	32,23	19,47	5,59	2,29
91	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		*85.000.000	85.000.000	220.260.000	102.850.000	113.135.000			20.800.000	7.148.200	-	1.934.900		#VALUE!	24,47	6,95	0,00	1,71
92	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		*155.800.000	205.800.000		181.500.000	200.000.000			72.914.200	48.210.440	15.902.160	5.249.260		#VALUE!	35,43	26,56	8,76	2,62
ii	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		74.035.100	188.200.000	300.000.000	229.900.000	338.865.000	30.639.836.964	73.901.000	191.933.495	117.634.045	946.013.000	85.153.100		99,82	101,98	51,17	411,49	25,13
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar							30.639.836.964				2.800.000	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
93	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		74.035.100	85.000.000	300.000.000	100.000.000	200.665.000		73.901.000	73.901.000	30.736.900	83.317.000	957.100		99,82	86,94	30,74	83,32	0,48
94	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		*200.000.000	103.200.000		129.900.000	138.200.000			118.032.495	86.897.145	859.896.000	84.196.000		#VALUE!	114,37	66,90	661,97	60,92
iii	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		159.664.900	250.000.000	454.000.000	240.000.000	260.000.000	451.671.000	159.664.900	1.337.118.200	1.228.761.850	239.097.865	858.633.000		100,00	534,85	511,98	99,62	330,24
95	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		159.664.900	250.000.000	454.000.000	240.000.000	260.000.000	451.671.000	159.664.900	1.337.118.200	1.228.761.850	239.097.865	858.633.000		100,00	534,85	511,98	99,62	330,24
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN		365.702.000	278.000.000	79.000.000	470.000.000	465.000.000	256.565.300	329.648.500	471.248.900	506.148.445	239.097.865	239.390.800		90,14	169,51	107,69	50,87	51,48

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	DAN MAKANAN MINUMAN																		
i	Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		185.280.500	134.000.250	79.000.000	300.460.302	291.506.333	66.359.900	38.960.000	93.866.400	63.730.000	-	13.331.600		21,03	70,05	21,21	0,00	4,57
96	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		99.131.500	70.000.000	79.000.000	221.460.302	216.506.333	66.359.900	38.960.000	15.731.000	63.730.000	-	13.331.600		39,30	22,47	28,78	0,00	6,16
97	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			-						63.730.000		-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
98	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		86.149.000	64.000.250		79.000.000	75.000.000			14.405.400		-	-		0,00	22,51	0,00	0,00	0,00
ii	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		113.149.000	70.000.000	-	80.000.000	75.000.000	119.744.400	121.390.000	155.050.000	209.490.595	23.132.700	15.942.600		107,28	221,50	261,86	28,92	21,26

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
99	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		113.149.000	70.000.000		80.000.000	75.000.000	119.744.400	121.390.000	155.050.000	209.490.595	23.132.700	15.942.600		107,28	221,50	261,86	28,92	21,26
iii	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		35.897.900	39.487.690	-	47.780.105	52.558.115	-	35.897.900	35.897.900	24.356.800	9.185.140	6.278.200		100,00	90,91	50,98	19,22	11,95
100	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		35.897.900	39.487.690		47.780.105	52.558.115		35.897.900	35.897.900	24.356.800	9.185.140	6.278.200		100,00	90,91	50,98	19,22	11,95
iv	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		31.374.600	34.512.060	-	41.759.593	45.935.552	-	31.374.600	31.374.600	15.057.050	9.687.025	6.745.400		100,00	90,91	36,06	23,20	14,68
101	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		31.374.600	34.512.060		41.759.593	45.935.552		31.374.600	31.374.600	15.057.050	9.687.025	6.745.400		100,00	90,91	36,06	23,20	14,68

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
v	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							70.461.000	102.026.000	155.060.000	193.514.000	197.093.000	197.093.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
102	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		111.149.000	65.000.000		75.000.000	75.000.000	70.461.000	102.026.000	155.060.000	193.514.000	197.093.000	197.093.000		91,79	238,55	258,02	262,79	262,79
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		432.000.000	311.000.000	#VALUE!	351.000.000	350.000.000	552.845.400	420.032.400	706.855.050	309.581.825	139.302.600	108.479.969		97,23	227,28	88,20	39,69	30,99
i	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		98.603.600	113.145.620	-	131.391.528	130.391.528	331.134.800	344.196.600	147.863.200	136.850.125	17.950.200	12.356.700		349,07	130,68	104,15	13,66	9,48
103	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		98.603.600	113.145.620		131.391.528	130.391.528	331.134.800	344.196.600	147.863.200	136.850.125	17.950.200	12.356.700		349,07	130,68	104,15	13,66	9,48
ii	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		111.685.800	122.854.380	*200.000.000	119.608.472	119.608.472	-	75.835.800	54.575.800	33.384.500	25.336.000	17.686.600		67,90	44,42	27,91	21,18	14,79
104	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		111.685.800	122.854.380	*200.000.000	119.608.472	119.608.472		75.835.800	54.575.800	33.384.500	25.336.000	17.686.600		67,90	44,42	27,91	21,18	14,79
iii	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		221.710.600	75.000.000	100.413.338	100.000.000	100.000.000	221.710.600	-	504.416.050	139.347.200	96.016.400	78.436.669		0,00	672,55	139,35	96,02	78,44

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
105	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		221.710.600	75.000.000	100.413.338	100.000.000	100.000.000	221.710.600		504.416.050	139.347.200	96.016.400	78.436.669		0,00	672,55	139,35	96,02	78,44

2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Presiden dan wakil presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Arah Pembangunan Kesehatan dalam visi misi presiden tersebut tertuang dalam RPJMN 2025-2029 Program Nasional ke 4 yaitu “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender serta penguatan perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Dukungan Kementerian Kesehatan tertuang dalam 4 program pembangunan yaitu peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola.

Kesehatan untuk semua merupakan pilar utama dalam menciptakan manusia yang unggul pada visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional di *breakdown* dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional yaitu “Terwujudnya Kesehatan untuk Semua”.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yg sehat & produktif untuk Indonesia Emas 2045 Kementerian Kesehatan menyusun 6 sasaran strategis meliputi masyarakat sehat, komunitas gaya hidup sehat, layanan kesehatan baik, adil dan terjangkau, sistem kesehatan yang kuat, tatakelola dan pembiayaan kesehatan dan teknologi kesehatan yang maju dengan indikator sasaran strategis yang tertuang didalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). RIBK merupakan penerjemahan dari RPJMN untuk sektor kesehatan, dengan tujuan menciptakan keselarasan vertikal dan horizontal untuk seluruh pemangku kepentingan sektor kesehatan. RIBK menjadi pedoman perencanaan strategis kesehatan bagi semua pemangku kepentingan di sektor kesehatan, memperkuat visi bersama dan memastikan keselarasan program-program. Pemerintah Daerah menyelaraskan program kesehatan di daerah dengan program kesehatan nasional dalam RIBK dalam bentuk pencantuman indikator dan target kinerja RIBK. Pencantuman indikator dan target kinerja RIBK dilakukan pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah rencana strategis satuan kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 juga mengacu serta memperhatikan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah dengan arah serta prioritas pembangunan daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Sedangkan untuk keterkaitan dengan dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-202 Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mempedomani RPJMD dalam perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo, yang disusun berpedoman kepada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada selanjutnya menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1. Hubungan Rentra dan RTRW

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo berupaya menyesuaikan arah kebijakan pengembangan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimaksud dalam rangka pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dan sebagai dasar menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Purworejo sebagai bentuk operasionalisasi perwujudan rencana struktur dan pola ruang dalam RTRW.

2. Hubungan Renstra dengan KLHS

KLHS merupakan rangkaian analisis sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). KLHS berfungsi untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari KRP yang diusulkan, serta memberikan rekomendasi lingkungan untuk mendukung pengambilan keputusan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo perlu mengintegrasikan pertimbangan rekomendasi isu strategis, permasalahan, dan sasaran hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS dapat secara efektif dan efisien mewujudkan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan menjadikan isu lingkungan sebagai dasar untuk semua isu pembangunan lainnya termasuk kemiskinan, kesehatan dan infrastruktur. KLHS memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan kaidah lingkungan, serta mengarahkan rencana pembangunan pada pilihan dan skenario yang lebih berkelanjutan, sehingga mendukung pencapaian 17 tujuan global tersebut.

Tantangan dan peluang pembangunan Kesehatan merupakan faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) dan jajarannya guna mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Tantangan harus diidentifikasi, dipahami serta dihadapi dengan mindset positif, dukungan jaringan, dan strategi yang matang, seperti inovasi, pengembangan keterampilan, serta perencanaan yang tepat. Sedangkan Peluang harus dimanfaatkan dengan analisis yang cermat dalam menentukan potensi potensi yang dimiliki untuk mengatasi tantangan tantangan guna mendukung keberhasilan pembangunan Kesehatan di kabupaten Purworejo.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Purworejo adalah:

Tantangan

a. Perubahan beban penyakit pada setiap siklus hidup.
b. Masalah gizi khususnya pada sasaran kelompok rentan.
c. Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.
d. Peningkatan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak.
e. Transformasi layanan kesehatan.
f. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana dan alat Kesehatan.
g. Sumber daya manusia (SDM) Kesehatan belum optimal

Peluang

a. Komitmen pimpinan daerah terhadap pelayanan kesehatan.
b. Digitalisasi Sistem Informasi di Puskesmas dan Rumah Sakit
c. Optimalisasi CSR (*Corporate Social Responsibility*)
d. Integrasi Layanan Primer
e. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
f. Penguatan pembiayaan kesehatan

2.2.5 Kelompok Sasaran Layanan :

1. Kelompok Sasaran

Secara Umum kelompok sasaran pelayanan kesehatan mencakup semua umur, baik yang sehat maupun yang sakit, serta kelompok masyarakat. Pelayanan kesehatan yang efektif harus mencakup keempat pendekatan: promotif (memperbaiki kesehatan), preventif (mencegah penyakit), kuratif (mengobati penyakit), dan rehabilitatif (memulihkan kesehatan).

a. Promotif:
   Sasaran utamanya adalah kelompok orang sehat, dengan tujuan meningkatkan perilaku dan gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit di masa depan. Contoh: penyuluhan kesehatan di sekolah.
b. Preventif:
   Sasaran utamanya adalah individu dan kelompok masyarakat yang berisiko terkena penyakit, dengan tujuan mencegah penyakit atau memperlambat perkembangan penyakit. Contoh: vaksinasi.
c. Kuratif:
   Sasaran utamanya adalah individu yang sakit, dengan tujuan mengobati dan menyembuhkan penyakit. Contoh: pemberian antibiotik.
d. Rehabilitatif:
   Sasaran utamanya adalah individu yang telah sembuh dari penyakit atau mengalami kecacatan, dengan tujuan memulihkan fungsi tubuh dan kemampuannya. Contoh: terapi fisik untuk pasien stroke.

Selain sasaran umum di atas, pelayanan kesehatan juga dapat ditargetkan pada kelompok khusus yaitu kumpulan individu yang mempunyai kesamaan jenis kelamin, umur, permasalahan, kegiatan yang tergonaisasi yang rawan masalah Kesehatan, seperti:

a. Kelompok dengan kebutuhan khusus
   Misalnya, wanita hamil, bayi, anak-anak, anak usia sekolah, lansia, dan orang dengan penyakit kronis
b. Kelompok rentan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan Kesehatan karena berbagai faktor:
   Misalnya, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, disabilitas dan masyarakat dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan.
c. Kelompok pekerja:
   Layanan kesehatan kerja bertujuan untuk mencegah penyakit dan cedera di tempat kerja, serta memberikan perawatan medis kepada pekerja.

d. Kelompok masyarakat:
   Pelayanan kesehatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

2. Mitra Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan berperan di berbagai kegiatan dalam pembanguan di Kabupaten Purworejo antara lain:

a. Sekretaris pada Tim Pembina Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat
b. Sekretaris pada Satuan Tugas (Satgas) Kawasan Tanpa Rokok.
c. Ketua II dan anggota pada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Purworejo
d. Sekretaris pada Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Purworejo
e. Koordinator bidang pelayanan Intervensi sensitif dan spesifik pada Tim Percepatan Penurunan

3. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dalam pelayanan kesehatan mencakup berbagai pihak yang berperan penting dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan, peningkatan akses, meningkatkan kesehatan masyarakat serta sinergi dan kolaborasi dalam pelayanan kesehatan. Mitra ini dapat berupa lembaga pendidikan kesehatan, rumah sakit, organisasi profesi, dunia usaha, hingga individu atau kelompok masyarakat yang peduli dengan kesehatan antara lain :

a. Universitas dan Perguruan Tinggi Kesehatan:
   Melibatkan dosen, mahasiswa, dan fasilitas untuk penelitian, pelatihan, dan penyuluhan kesehatan.
b. Rumah Sakit Swasta:
   Berperan dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi bagi masyarakat.
c. Organisasi Profesi:
   Organisasi Profesi Kesehatan meliputi organisasi profesi dokter, perawat, bidan, nutrisionis, sanitarian dan lainnya.
   Melakukan kerjasama dalam pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan program kesehatan.
d. Dunia Usaha:
   Mencakup investasi dalam fasilitas kesehatan dan program kesehatan, berperan dalam penyediaan akses kesehatan yang lebih luas, serta mendorong inovasi melalui pengembangan produk dan layanan.
e. Perusahaan Industri Farmasi:
   Menyediakan obat-obatan, alat kesehatan, dan dukungan finansial untuk program kesehatan.
   Perusahaan Asuransi Kesehatan:
   Memfasilitasi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui asuransi.
f. Kelompok Masyarakat:
   Melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan, penggalangan dana, dan pemberdayaan masyarakat dalam isu kesehatan.
g. Individu
   Menjadi relawan dalam kegiatan kesehatan, menjadi agen perubahan dalam isu kesehatan, dan menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga.

2.2 Permasalah dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

1. Masih banyak kasus Kematian Ibu

Banyaknya kematian ibu (Angka Kematian Ibu/AKI) menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan yang masih rendah. Hal ini karena AKI adalah indikator kritis kesejahteraan masyarakat yang merefleksikan kondisi kesehatan ibu, gizi, lingkungan, serta kualitas dan akses fasilitas pelayanan kesehatan.

Di Kabupaten Purworejo Kematian ibu paling banyak disebabkan karena penyakit dan kondisi lain yang mempersulit kehamilan. Kenaikan kasus kematian ibu disebabkan meningkatnya ibu hamil berisiko tinggi (33,5%). Pemantauan yang kurang maksimal dan kurangnya kerjasama jejaring dalam pelayanan ibu hamil, bersalin, dan nifas menyebabkan ibu hamil berisiko tidak tertangani dengan baik sehingga berakibat terhadap kematian ibu. Beberapa faktor yang menyebabkan kehamilan risiko tinggi antara lain adanya riwayat penyakit pada ibu, seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung, serta adanya penyulit dalam persalinan seperti posisi janin yang tidak normal, kehamilan ganda, dan perdarahan.

2. Masih banyak kasus kematian bayi dan balita

Masih banyaknya kasus Kematian Bayi di Kabupaten Purworejo sebagai gambaran derajat kesehatan masyarakat secara umum, khususnya layanan kesehatan ibu dan anak. Penyebab utama kematian bayi adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia (kekurangan oksigen saat lahir), infeksi (seperti sepsis dan pneumonia), serta kelainan bawaan (kongenital). Penyebab utama dari faktor ibu adalah ibu yang mengandung dengan kehamilan risiko tinggi. Kehamilan risiko tinggi ini menimbulkan bahaya dan komplikasi baik bagi ibu maupun janin yang dikandung.

Kasus Kematian Balita di Kabupaten Purworejo juga masih banyak, dengan penyebab terbanyak kematian balita adalah infeksi (seperti Diare, Pneumonia, DBD), kelainan kongenital, dan penyebab lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk terus menurunkan angka kematian balita di wilayah Kabupaten Purworejo. Imunisasi untuk mencegah penyakit infeksi dan upaya kesehatan anak yang terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan sangat dibutuhkan. Peningkatan kesehatan anak memerlukan perhatian khusus pada beberapa aspek penting.

3. Prevalensi Stunting tinggi

Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita masih menjadi permasalah utama di Purworejo. Permasalahan stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, yang menghambat perkembangan fisik dan kognitif, bahkan hingga dewasa. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, pola asuh yang tidak tepat, sanitasi buruk, dan infeksi berulang. Dampaknya meliputi tubuh pendek, kecerdasan di bawah rata-rata, dan kerentanan terhadap penyakit kronis. Meskipun prevalensi stunting mengalami penurunan, akan tetapi penanggulangan stunting memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk perbaikan gizi, pola asuh, sanitasi, edukasi, serta perhatian pada isu sosial seperti kemiskinan dan perkawinan anak.

4. Persentase cakupan kekebalan kelompok rendah

Persentase cakupan kekebalan kelompok yang rendah berarti semakin banyak orang dalam suatu populasi yang tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu, sehingga meningkatkan risiko penyakit tersebut menyebar dan menimbulkan wabah di komunitas. Hal ini terjadi karena kurangnya cakupan imunisasi atau vaksinasi di masyarakat, membuat lebih banyak individu rentan terhadap infeksi.

Berdasarkan sasaran Pusdatin, Capaian imunisasi di Kabupaten Purworejo masih rendah pada kelompok bayi dan anak sekolah. Hal ini dapat mengakibatkan tidak terbentuknya *Herd Immunity*, yang akan berpotensi terjadinya *Outbreak* atau KLB

5. Cakupan PKG masih rendah

Cakupan PKG (Pemeriksaan Kesehatan Gratis) adalah jangkauan dan target pelaksanaan program pemerintah untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat, dengan fokus pada berbagai kelompok usia sesuai siklus hidup, seperti anak sekolah, bayi, balita, dewasa, hingga lansia. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pencegahan penyakit, dengan sasaran yang meliputi pemeriksaan gigi, mata, anemia, gangguan pernapasan, hingga kesehatan jiwa

Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya program PKG atau belum menyadari pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, fasilitas kesehatan yang terbatas atau lokasi yang jauh dapat menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan PKG. Keterbatasan anggaran, tenaga medis, dan peralatan dapat menghambat pelaksanaan program PKG secara optimal, dan keterlibatan pemerintah daerah yang kurang aktif dapat mengurangi dorongan untuk pelaksanaan PKG di wilayahnya menjadi permasalahan dalam pelaksanaan PKG.

6. Angka populasi bebas PTM masih rendah

Populasi bebas PTM adalah istilah yang mengacu pada kelompok populasi yang tidak menderita Penyakit Tidak Menular, seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, kanker, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Populasi ini dapat dicapai dengan menghindari faktor risiko PTM seperti pola hidup tidak sehat (makanan tidak bergizi, kurang aktivitas fisik, merokok, alkohol) dan menjaga kesehatan melalui deteksi dini dan skrining PTM secara rutin

Rendahnya populasi bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) disebabkan oleh faktor risiko yang terkait dengan gaya hidup tidak sehat, seperti kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang buruk (kurang sayur, buah, dan terlalu banyak makanan manis, asin, berlemak), serta kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Faktor-faktor ini menyebabkan peningkatan tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan obesitas, yang semuanya meningkatkan risiko PTM.

7. Angka populasi bebas PM masih rendah

Populasi bebas penyakit menular adalah kelompok orang yang memiliki kekebalan, tidak terpapar agen penyakit, serta menerapkan gaya hidup sehat, sehingga tidak terinfeksi atau menyebarkan penyakit menular. Upaya mencapai populasi ini termasuk melakukan vaksinasi, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, deteksi dini penyakit, serta promosi kesehatan melalui edukasi tentang pola hidup sehat dan pencegahan penyakit.

Kekebalan tubuh yang kuat, menjaga kebersihan, pola makan seimbang, aktivitas fisik yang cukup, lingkungan yang bersih dan terhindar dari sumber penularan seperti air terkontaminasi, sampah, dan vektor penyakit (misalnya nyamuk) membantu mencegah penyakit menular. Ketersediaan serta akses terhadap layanan kesehatan untuk deteksi dini, pengobatan penyakit menular, dan imunisasi sangat krusial untuk menciptakan populasi yang sehat dan bebas dari penyakit menular.

8. Tingkat aktivitas fisik masyarakat rendah

Tingkat aktivitas fisik adalah ukuran gerakan tubuh dan pengeluaran energi, yang umumnya dibagi menjadi tiga kategori yaitu ringan, sedang, dan berat. Klasifikasi ini membantu menentukan pola aktivitas harian dan dampaknya pada kesehatan serta kebugaran tubuh dengan rekomendasi seperti 150 menit aktivitas intensitas sedang per minggu untuk orang dewasa.

Tingkat aktivitas fisik masyarakat masih rendah, terlihat dari angka kebugaran yang rendah, rata-rata langkah per-hari yang minim dan partisipasi aktif olahraga yang rendah yang dapat diukur melalui berbagai instrumen atau kuesioner. Tingkat aktifitas fisik yang rendah menyebabkan tingginya risiko penyakit tidak menular (PTM)

9. Persentase Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) rendah

Persentase STBM adalah tingkat pencapaian program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang diukur melalui pencapaian lima pilar STBM, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT), dan Pengelolaan Air Limbah Domestik Rumah Tangga.

Rendahnya persentase STBM disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebiasaan buruk masyarakat seperti membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran akan perilaku hidup bersih, tantangan lingkungan seperti kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan, serta keterbatasan partisipasi masyarakat dalam menganalisis dan mengambil tindakan terhadap kondisi sanitasi mereka melalui pemicuan STBM.

Rendahnya pelaksanaan STBM menyebabkan peningkatan penyakit berbasis lingkungan seperti stunting serta kurangnya akses terhadap sanitasi dan air minum yang aman yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

10. Prevalensi Obesitas meningkat

Prevalensi obesitas meningkat secara global ditandai dengan peningkatan persentase kasus obesitas pada dewasa dan anak-anak. Peningkatan ini dipicu oleh berbagai faktor seperti gaya hidup tidak aktif, pola makan tidak sehat dan pengaruh lingkungan. Peningkatan obesitas membawa dampak kesehatan serius seperti peningkatan risiko penyakit jantung, stroke, diabetes dan beberapa jenis kanker serta masalah pernapasan seperti *sleep apnea* dan asma. Obesitas juga memicu gangguan musculoskeletal (sendi dan tulang), masalah hati dan empedu hingga berdampak pada kesehatan mental, menurunkan kualitas hidup serta mengganggu sistem reproduksi.

11. Rasio Nakes dan Named terhadap populasi belum sesuai standar

Perencanaan tenaga kesehatan secara teknis memastikan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang tersedia dalam wilayah tertentu tersedia sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, memiliki keterampilan yang sesuai standar kompetensinya dan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk memberikan layanan yang tepat kepada mereka yang membutuhkan

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, perencanaan tenaga kesehatan digunakan sebagai acuan sistematis untuk dasar pelaksanaan, kegiatan pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan.

WHO juga merespon target agenda SDGs yang berdasarkan dua belas indikator terpilih termasuk pelayanan penyakit tidak menular, penyakit menular dan pelayanan kesehatan reproduksi, ibu, maternal, bayi dan anak untuk menghitung ambang batas rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk. Angka yang diperoleh adalah 4,45 per 1.000 penduduk dengan asumsi untuk dapat mencapai 80% cakupan pada dua belas indikator terpilih SDGs.

12. Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar rendah

Proporsi fasilitas Kesehatan merujuk pada perbandingan jumlah jenis atau tipe fasilitas kesehatan yang tersedia dalam suatu wilayah atau populasi tertentu dan seringkali digunakan untuk mengukur ketersediaan, pemerataan atau kesesuaian infrastruktur kesehatan terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan layanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) dapat diakses dan dirasakan oleh masyarakat secara merata.

Faktor penyebab rendahnya Proporsi Fasilitas Kesehatan antara lain kekurangan tenaga medis termasuk dokter spesialis, ketersediaan dan kualitas fasilitas kesehatan yang belum sesuai standar serta anggaran dan investasi yang belum memadai yang dapat menghambat peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan serta produksi obat-obatan. Kondisi ini menyebabkan sulitnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai sehingga berdampak negatif pada kesehatan penduduk.

13. Proporsi faskes dengan perbekalan kesehatan (diagnostik, obat, vaksin, reagen) sesuai standar rendah

Proporsi fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar adalah ukuran persentase fasilitas kesehatan (seperti puskesmas, klinik, rumah sakit) yang memiliki obat-obatan dan alat kesehatan yang lengkap dan memenuhi standar kualitas dan jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah terutama oleh Kementerian Kesehatan melalui peraturan-peraturan yang relevan. Pengukuran ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan.

Dampak dari fasilitas kesehatan dan perbekalan yang tidak sesuai standar adalah peningkatan angka kesakitan dan kematian, kualitas pelayanan yang buruk, ketidakpercayaan masyarakat, penyebaran penyakit yang lebih luas dan risiko kegagalan pengobatan. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan penanganan yang tepat serta dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan.

14. Belum semua faskes terakreditasi paripurna

Akreditasi Fasyankes adalah proses penting untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan laboratorium. Proses ini dilakukan oleh lembaga akreditasi independen yang menilai kepatuhan fasilitas terhadap standar pelayanan nasional. Tujuan utamanya adalah menjamin bahwa layanan kesehatan yang diberikan aman, berkualitas, dan standar. Akreditasi Paripurna Fasyankes adalah status akreditasi tertinggi yang diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) setelah memenuhi seluruh standar mutu dan keselamatan pasien yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi independen . Status ini menunjukkan bahwa fasyankes telah mencapai keunggulan dalam setiap standar pelayanan dan dinilai sangat baik. Masih adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakrediatsi Paripurna berdampak pada pelayanan kesehatan yang tidak bermutu dan tidak sesuai dengan standar.

15. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan rendah

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM menjadi acuan penting dalam evaluasi kebijakan pelayanan publik terutama terkait kualitas layanan rumah sakit dan puskesmas. Faktor penentu kepuasan adalah kualitas layanan menjadi faktor determinan penting dalam keselamatan pasien yang berdampak pada penurunan kejadian mortalitas di rumah sakit.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara lebih spesifik beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah Kualitas Pelayanan, Kemudahan Akses dan Komunikasi Efektif.

Tingkat kepuasan masyarakat yang rendah terhadap layanan kesehatan dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan publik, penurunan kunjungan ke fasilitas kesehatan, ketidakpatuhan terhadap anjuran medis serta keresahan sosial jika masalah kesehatan meluas. Dampak negatif ini dapat diperparah dengan meningkatnya angka kesakitan dan kematian serta menurunnya kualitas hidup masyarakat secara umum.

16. Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif rendah

Tingkat keaktifan peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain Frekuensi Utilisasi FKTP (Peserta dengan frekuensi utilisasi FKTP yang tinggi memiliki probabilitas status kepesertaan aktif lebih tinggi), Pilihan FKTP (Peserta yang memilih FKTP di Klinik Pratama memiliki probabilitas status kepesertaan aktif lebih tinggi) dan Status Pernikahan (Peserta yang belum menikah memiliki probabilitas status kepesertaan aktif lebih tinggi)

Untuk meningkatkan tingkat keaktifan peserta JKN, perlu dilakukan kerjasama lintas sektoral serta evaluasi beberapa regulasi atau kebijakan. UHC (*Universal Health Coverage*) Prioritas adalah memberikan akses kesehatan yang lebih baik dan lebih cepat kepada masyarakat. Dengan UHC Prioritas, warga tidak perlu menunggu masa aktif 14 hari untuk mendapatkan layanan kesehatan, cukup menunjukkan KTP untuk langsung mendapatkan perawatan bahkan dalam kondisi darurat.

17. Indeks Kesehatan Lingkungan rendah

Indeks Kesehatan Lingkungan (IKL) adalah salah satu komponen penting dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH sendiri merupakan alat untuk mengukur kualitas lingkungan suatu wilayah atau negara dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kualitas Udara, kualitas Air, kesehatan lingkungan, pengelolaan limbahdan keanekaragaman hayati.

Sedangkan IKL digunakan untuk menilai kualitas lingkunganm, membuat kebijakan dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dampak Indeks Kesehatan Lingkungan (IKL) yang rendah dapat sangat signifikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN rendah

18. Fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional)

Melalui *platform* SATUSEHAT memungkinkan fasilitas kesehatan untuk berbagi data kesehatan pasien secara elektronik dan terintegrasi. Integrasi SIKN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, mengurangi duplikasi tes medis dan mendukung pengambilan keputusan medis yang lebih akurat dan bermanfaat untuk akses data medis pasien secara *real-time*, mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan keselamatan pasien serta mendukung perencanaan kebijakan kesehatan nasional

Jika fasyankes terintegrasi tidak terintegrasi dengan SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) dapat berdampak pada kualitas layanan kesehatan menurun, kesalahan medis meningkat, inefisiensi layanan kesehatan, pengambilan keputusan yang kurang tepat dan keterlambatan dalam penanganan pasien

Dengan demikian, integrasi SIKN sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mendukung pembangunan sistem kesehatan nasional yang lebih baik.

19. Koordinasi antar unit kerja belum optimal

Koordinasi antar unit kerja yang belum optimal dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya komunikasi, persepsi yang berbeda, atau ego sektoral di setiap unit. Hal ini dapat menyebabkan ketidakefisienan, tumpang tindih pekerjaan dan menghambat pencapaian tujuan organisasi.

20. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang belum optimal disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesenjangan infrastruktur dan akses, kesenjangan keterampilan dan literasi digital masyarakat (*skill* operator), anggaran yang terbatas untuk implementasi TI serta kurangnya kesadaran dan budaya positif dalam memanfaatkan TI secara maksimal. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dapat menyebabkan dampak negatif seperti penurunan produktivitas peningkatan kejahatan siber dan penyalahgunaan teknologi.

21. Kurangnya standar pelayanan

Kurangnya standar pelayanan publik disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk sumber daya manusia yang kurang kompeten dan profesional, manajemen kelembagaan yang birokratis dan tidak responsif, kurangnya komitmen pimpinan serta pemahaman yang tidak memadai terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini berdampak pada kualitas layanan yang rendah seperti prosedur yang rumit, lambat, tidak informatif dan munculnya praktik pungutan liar yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan publik.

2.2.2 Isu Strategis

1. Masyarakat Sehat

Masyarakat sehat dapat diwujudkan dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang berfokus pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit melalui perubahan perilaku hidup sehat. GERMAS mendorong masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup sehat dan meninggalkan kebiasaan tidak sehat.

Selain hal tersebut Program Indonesia Sehat (penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional), Program Gizi Seimbang dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat sehat. Program-program ini bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan mengurangi risiko penyakit tidak menular.

2. Prosentase Komunitas Gaya Hidup Sehat rendah

Program komunitas gaya hidup sehat yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Berikut beberapa informasi tentang GERMAS yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat dan mengurangi faktor risiko penyakit tidak menular.

GERMAS mendukung pembentukan kelompok-kelompok komunitas yang mendukung gaya hidup sehat, seperti kelompok senam, klub lari dan kelompok dukungan untuk berhenti merokok. Bekerjasama dengan sektor swasta dan Kementerian Pendidikan untuk mengimplementasikan program-program kesehatan di tempat kerja, sekolah dan masyarakat.

3. Masyarakat belum mendapatkan layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau

Program pelayanan yang baik, adil, dan terjangkau mencakup beberapa inisiatif penting antara lain transformasi layanan primer, program layanan kesehatan primer, program layanan kesehatan lanjutan, sistem ketahanan kesehatan dan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola.

Beberapa strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal dengan meningkatkan pemeriksaan kesehatan catin dan pemberian TTD pada ibu hamil, penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah, dan penanganan bencana dengan meningkatkan kompetensi SDM pengawas pangan olahan siap saji, pengembangan teknologi kesehatan untuk meningkatkan inovasi layanan kesehatan yang efisien dan terjangkau serta penguatan tata kelola dan pendanaan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan dan pendanaan kesehatan yang berkelanjutan.

4. Sistem Kesehatan belum optimal

Sistem kesehatan masih menghadapi beberapa tantangan yang membuat sistem kesehatan belum optimal. Berikut kondisi yang mempengaruhi adalah masih ada kesenjangan dalam akses layanan kesehatan terutama di daerah terpencil dan pedesaan kualitas pelayanan kesehatan masih bervariasi dan beberapa fasilitas kesehatan belum memenuhi standar yang diharapkan, biaya kesehatan masih menjadi beban bagi banyak masyarakat terutama bagi mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan, Sumber Daya Manusia kesehatan yang terampil dan terdistribusi secara merata masih kurang.

Dengan demikian, perlu dilakukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholders lainnya untuk meningkatkan optimalisasi sistem kesehatan.

5. Teknologi Kesehatan belum maju

Teknologi kesehatan telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa contoh perkembangan teknologi bidang kesehatan antara lain payanan telemedisin yang memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter secara online melalui video atau telekonferensi sehingga meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) untuk penyimpanan dan pertukaran data medis pasien secara elektronik sehingga meningkatkan efisiensi dan koordinasi perawatan dan platform SATUSEHAT yang memungkinkan integrasi data kesehatan dan meningkatkan efisiensi layanan Kesehatan.

Dengan teknologi Kesehatan yang terus berkembang diharapkan teknologi kesehatan dapat meningkatkan kualitas perawatan medis dan memperpanjang umur harapan hidup manusia.

6. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah upaya untuk meningkatkan layanan agar lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai strategi seperti menerapkan teknologi, meningkatkan kompetensi aparatur, menyederhanakan prosedur, memperjelas biaya, serta menyederhanakan sistem penanganan keluhan

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik memiliki dampak positif seperti meningkatnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi daerah

Tabel 2.9 Isu Strategis Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS DAERAH	ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
Bonus Demografi	Masih banyak kasus Kematian Ibu	Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dampak buruk teknologi AI	Transformasi sosial	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat Sehat
	Masih banyak kasus kematian bayi dan balita		*Involuntary migration*	Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat		Prosentase Komunitas Gaya Hidup Sehat rendah
	Prevalensi Stunting tinggi		*Aging population negara maju*				Masyarakat belum mendapatkan layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau
	Persentase cakupan kekebalan kelompok rendah						Sistem Kesehatan belum optimal
	Cakupan PKG masih rendah						Teknologi Kesehatan belum maju
	Angka populasi bebas PTM masih rendah						
	Angka populasi bebas PM masih rendah						
	Tingkat aktivitas fisik masyarakat rendah						

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS DAERAH	ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
	Persentase Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) rendah						
	Prevalensi Obesitas meningkat						
	Rasio Nakes dan Named terhadap populasi belum sesuai standar						
	Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar rendah						
	Proporsi faskes dengan perbekalan kesehatan (diagnostics, obat, vaksin, reagen) sesuai standar rendah						
	Belum semua faskes terakreditasi paripurna						
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan rendah						
	Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif rendah						
	Indeks Kesehatan Lingkungan rendah						
	Fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional)						

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS DAERAH	ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Koordinasi antar unit kerja belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif	Peningkatan kualitas pelayanan publik
	Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal		Cyber insecurity	Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia			
	Kurangnya standar pelayanan publik		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral				

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah gambaran tentang kondisi atau tujuan ideal yang ingin dicapai di masa depan, yang berfungsi sebagai arah dan panduan dalam perencanaan serta pengambilan keputusan di pemerintahan.

visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah " Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius dan Inovatif (Purworejo Berseri) ".

Guna mencapai visi tersebut langkah-langkah strategis atau upaya yang dilakukan dalam 5 tahun kedepan dituangkan dalam misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
2. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
4. Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi

Untuk mewujudkan tujuan daerah "Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif' dan Sasaran Daerah "Meningkatnya kualitas manusia" Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) menetapkan Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan perangkat daerah adalah penjabaran dari tujuan dan sasaran daerah, merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah. Sedangkan sasaran perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tingkat prioritas dan hasil spesifik yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, berfungsi sebagai tolak ukur dan pedoman untuk mengukur kinerja, pengendalian, evaluasi, serta dasar penyusunan kebijakan dan rencana kerja selanjutnya. Adapun Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo Tahun 2026-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan Daerah: Mewujudkan Purworejo berdaya saing, sejahtera, religius, dan inovatif	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	66,26	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	
Sasara Daerah: Meningkatnya kualitas manusia			Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan	90,00	90,67	91,33	92,00	92,67	93,33	
			Usia Harapan Hidup (UHH)	75,89	76,14	76,34	76,64	77,09	77,34	
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	66,26	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	
		Meningkatkan kualitas layanan BLUD kepada masyarakat	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di Puskesmas	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	
			Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo	86,00	87,00	87,00	89,00	90,00	91,00	
			Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjokronegoro	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	
		Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	14,40	13,90	13,40	12,90	12,40	11,90	
			Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	70,73	75,00	78,00	80,00	90,00	100,00	
			Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	
			Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80,00	80,00	80,00	80,00	83,00	83,00	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna	78,00	78,00	78,00	80,00	80,00	80,00	

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah rencana tindakan yang disusun secara matang untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi pembangunan kesehatan adalah serangkaian upaya terencana dan terkoordinasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Strategi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, hingga upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pembangunan kesehatan juga melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan pembangunan, yang difokuskan pada pencapaian tujuan dan sasaran tertentu. Arah kebijakan dirumuskan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan Arah kebijakan pembangunan kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat secara optimal.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Memantapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Mewujudkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Meneguhkan kualitas layanan kesehatan masyarakat
Menguatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Menguatkan kualitas layanan BLUD kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan BLUD kepada masyarakat	Memantapkan kualitas layanan BLUD kepada masyarakat	Mewujudkan kualitas layanan BLUD kepada masyarakat	Meneguhkan kualitas layanan BLUD kepada masyarakat

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	S1. Meningkatnya kualitas manusia			
		2026		
		Penguatan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh.	Penguatan fasilitas dan layanan kesehatan melalui - Pengadaan sarana alat kesehatan dan perbekalan kesehatan - Transformasi Layanan Kesehatan Primer yang berkualitas dan terstandar - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Intervensi Terpadu untuk Penurunan Stunting dan Masalah Gizi - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular - Pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup - Penanggulangan Tuberkulosis - Penguatan Layanan Kesehatan Rujukan - Peningkatan Ketahanan Sistem Kesehatan terhadap Krisis dan Bencana - Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	
		Penguatan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar.	Penguatan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui - Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Peningkataan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Penguatan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan kualitas hidup yang sehat	Penguatan Pemberdayaan Masyarakat melalui - penerapan PHBS dan penyehatan lingkungan. - Peningkatan peran serta masyarakat dalam program kesehatan.	
		2027		
		Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh.	Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan melalui - Pengadaan sarana alat kesehatan dan perbekalan kesehatan - Transformasi Layanan Kesehatan Primer yang berkualitas dan terstandar - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Intervensi Terpadu untuk Penurunan Stunting dan Masalah Gizi - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular - Pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup - Penanggulangan Tuberkulosis - Penguatan Layanan Kesehatan Rujukan - Peningkatan Ketahanan Sistem Kesehatan terhadap Krisis dan Bencana - Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Peningkatan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar	Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui - Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Peningkataan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Peningkatan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan kualitas hidup yang sehat	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui - menerapan PHBS dan penyehatan lingkungan. - Peningkatan peran serta masyarakat dalam program kesehatan.	
		2028		
		Pemantapan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh	Pemantapan fasilitas dan layanan kesehatan melalui - Pengadaan sarana alat kesehatan dan perbekalan kesehatan - Transformasi Layanan Kesehatan Primer yang berkualitas dan terstandar - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Intervensi Terpadu untuk Penurunan Stunting dan Masalah Gizi - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular - Pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup - Penanggulangan Tuberkulosis - Penguatan Layanan Kesehatan Rujukan - Peningkatan Ketahanan Sistem Kesehatan terhadap Krisis dan Bencana - Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	
		Pemantapan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar	Pemantapan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui - Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Peningkataan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Pemantapan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan kualitas hidup yang sehat	Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat melalui - menerapan PHBS dan penyehatan lingkungan. - Peningkatan peran serta masyarakat dalam program kesehatan.	
		2029		
		Perwujudan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh	Perwujudan fasilitas dan layanan kesehatan melalui - Pengadaan sarana alat kesehatan dan perbekalan kesehatan - Transformasi Layanan Kesehatan Primer yang berkualitas dan terstandar - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Intervensi Terpadu untuk Penurunan Stunting dan Masalah Gizi - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular - Pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup - Penanggulangan Tuberkulosis	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			- Penguatan Layanan Kesehatan Rujukan - Peningkatan Ketahanan Sistem Kesehatan terhadap Krisis dan Bencana - Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	
		Perwujudan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar	Perwujudan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui - Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Peningkataan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Perwujudan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi	Perwujudan Pemberdayaan Masyarakat melalui - Penerapan PHBS dan penyehatan lingkungan. - Peningkatan peran serta masyarakat dalam program kesehatan.	
		2030		
		Peneguhan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh	Peneguhan fasilitas dan layanan kesehatan melalui - Pengadaan sarana alat kesehatan dan perbekalan kesehatan - Transformasi Layanan Kesehatan Primer yang berkualitas dan terstandar - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Intervensi Terpadu untuk Penurunan Stunting dan Masalah Gizi - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular - Pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup - Penanggulangan Tuberkulosis - Penguatan Layanan Kesehatan Rujukan - Peningkatan Ketahanan Sistem Kesehatan terhadap Krisis dan Bencana - Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	
		Peneguhan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar	Peneguhan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui - Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Peningkataan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Peneguhan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan kualitas hidup yang sehat	Peneguhan Pemberdayaan Masyarakat melalui - menerapan PHBS dan penyehatan lingkungan - Peningkatan peran serta masyarakat dalam program kesehatan.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi			
		2026		
		Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)*	Penguatan akuntabilitas kinerja Dinkesda melalui perbaikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan program dan kegiatan, disertai peningkatan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan integritas aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor.	
		2027		
		Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinkesda melalui penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang transparan dan terintegrasi, disertai peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, penyusunan dokumen dan walidata perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, laporan, gaji dan tunjangan ASN, barang milik daerah, serta kepegawaian; penyediaan barang, jasa, logistik, peralatan, sarana prasarana, serta dukungan pelayanan umum kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi kunjungan tamu; penatausahaan arsip, komunikasi, dan utilitas; serta pengadaan dan pemeliharaan kendaraan, peralatan, mebel, gedung kantor, dan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah.	
		2028		
		Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	Pemantapan akuntabilitas kinerja Dinkesda melalui konsistensi pelaksanaan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang terukur dan terintegrasi, serta pemantapan kapasitas aparatur untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor.	
		2029		
		Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	Perwujudan akuntabilitas kinerja Dinkesda melalui penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang terintegrasi dan berbasis kinerja, serta perwujudan kapasitas aparatur yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor.	
		2030		
		Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	Peneguhan akuntabilitas kinerja Dinkesda melalui penguatan penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang akuntabel dan berkelanjutan, serta peneguhan kapasitas aparatur yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun maka disusun pula langkah langkah strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu 5 tahun kedepan meliputi progran, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah. Program, kegiatan dan subkegiatan dimaksud untuk mendukung penyelengggaraan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas mutu pelayanan disajikan pula target indikator kinerja dan pencapaian pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan atau rencana kerja yang akan datang yang dijadikan sebagai pedoman operasional. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Purworejo dan berikut adalah *Cascading* Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Rencana Program/Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan di lingkup Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) yang akan dilaksanakan pada periode 2026-2029 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
S1. Meningkatnya kualitas manusia	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Usia Harapan Hidup (UHH)		
		Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita		
					Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)		
					Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)		
					Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna		
			Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional		
				Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi kelengkapan Sarana Prasarana Alat Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar		
						Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
						Pembangunan Puskesmas	
						Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
						Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
						Pengembangan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
						Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
						Pengembangan Rumah Sakit	
						Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
				Tercapainya Mutu dan Layanan Kesehatan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Mutu dan Layanan Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
						Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
						Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
						Operasional Pelayanan Puskesmas	
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	
						Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Izin operasional	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Izin operasional	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
						Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
						Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
						Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate)*	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Neglected Tropical Diseases (NTDs)		
					Angka Kematian *Dengue*		
					Annual Parasite Incidence (API)		
					Persentase Diabetes Melitus Terkendali		
					Insiden HIV		
					Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap		
					Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat		
					Persentase Hipertensi terkendali		
				Tersedianya layanan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis *(treatment coverage)*	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Layanan Kesehatan Pengendalian dan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menyelenggarakan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
						Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
						Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
						Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	
						Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
						Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	
			Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar		Jumlah Kasus Kematian Ibu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Jumlah Kematian Balita		
					Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik		
					Persentase lanjut usia yang mandiri		
					Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis		
					Prevalensi Obesitas		
					Persentase merokok penduduk 10-21 tahun		
					Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan		
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan berdasarkan Siklus Hidup	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat berdasarkan Siklus Hidup	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menyelenggarakan Pelayanan siklus hidup sesuai standar		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
						Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	
						Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			Tersedianya data dan sistem informasi kesehatan		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tercapainya pemanfatan ERM di fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemanfatan ERM yang terintegrasi satu sehat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
						Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			Tersedianya SDM kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi		Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Tercapainya Tenaga Kesehatan yang Memiliki Izin Praktik	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Memiliki Izin Praktik	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
						Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
				Tercapainya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Standar Ketenagaan Minimal	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Teknis Sesuai Standar	Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar Profesi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			Tersedianya obat, alat kesehatan dan optikal serta makanan yang aman dan bermutu		Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, serta Makanan yang Aman dan Bermutu	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Tersedianya Obat, Alat Kesehatan dan Optikal serta Makanan yang Aman dan Bermutu	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
				Terwujudnya Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang sesuai standar	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dilakukan pembinaan sesuai standar	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
				Terwujudnya Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Ketentuan Keamanan Pangan	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
					Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Tercapainya Sarana Tempat Pengelolaan Pangan (Jasa Boga dan Depot Air Minum) yang memenuhi persyaratan	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
				Tercapainya Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajajan yang mendapatkan Pembinaan	Perentase Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajajan yang mendapatkan Label Pembinaan	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
				Tercapainya produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi persyaratan saat dilakukan pengawasan	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
			Terwujudnya desa siaga aktif mandiri		Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Terwujudnya Pokjanal Desa Siaga di Tingkat Kecamatan yang aktif	Jumlah Pokjanal Desa Siaga di Tingkat Kecamatan yang aktif	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkat an Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningka tan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				Terwujudnya Desa Sehat Utama dan Mandiri	Jumlah Desa Sehat Utama dan Mandiri	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	
						Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
				Tercapainya Posyandu yang Menerapkan SPM Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu yang Menerapkan SPM Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupa ten/Kota	
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksana an Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
		Meningkatkan kualitas layanan BLUD kepada masyarakat			Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di Puskesmas		
					Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo		
					Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjokronegoro		
			Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat		Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Kemiri	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bagelen	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Banyuasin	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Banyuurip	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bayan	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Butuh	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Gebang	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Grabag	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Karanggetas	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Ngombol	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bener	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Kaligesing	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Pituruh	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Sruwohrejo	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Semawung daleman	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bragolan	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Mranti	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Purworejo	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Wirun	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Dadirejo	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bubutan	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Cangkrep	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Seborokrapyak	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Kutoarjo	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Winong	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bruno	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Loano	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat		Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terlaksananya Kinerja Penunjang dan Manajemen BLUD	Persentase Capaian Kinerja Penunjang dan Manajemen BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Kinerja Pelayanan Medis dan Keperawatan BLUD	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Medis dan Keperawatan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di RSUD Tjitrowardojo	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Kinerja Tata Usaha dan Rumah Tangga BLUD	Persentase Capaian Kinerja Tata Usaha dan Rumah Tangga BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Kinerja Perencanaan dan Humas BLUD	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Humas BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Kinerja Keuangan BLUD	Persentase Capaian Kinerja Keuangan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat		Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD Tjokronegoro	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Kinerja Pelayanan Medis BLUD	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Medis BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terlaksananya Kinerja Pelayanan Keperawatan BLUD	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Keperawatan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Kinerja Pelayanan Penunjang Medis BLUD	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang Medis BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Kinerja Pelayanan Penunjang Non Medis BLUD	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang Non Medis BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di RSUD Tjokronegoro	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Layanan Penunjang Medis dan Nonmedis		Persentase Ketercapaian Layanan Penunjang Medis dan Nonmedis di RSUD Tjokronegoro		
				Terlaksananya Kinerja Perencanaan BLUD	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Kinerja Keuangan BLUD	Persentase Capaian Kinerja Keuangan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Terlaksananya Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian BLUD	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Truwulanan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Pendanaan Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan akuntabilitas kinerja perangkatÂ daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	63,11	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,64	76,14		76,34		76,64		77,09		77,34		77,34			
			Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan	Angka	87,36	90,67		91,33		92		92,67		93,33		93,33			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka															
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						150.009.742.588		149.999.742.249		139.999.742.249		139.999.742.249		139.999.742.249				
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat	Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	%	50	60	501.745.266.339	65	501.745.266.000	70	491.745.266.000	72	491.745.266.000	75	491.745.266.000	75	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat	Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo	%	84	86		87		88		89		90		90	RSUD DR. TJITROWARDOJO	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di RSUD Tjitrowardojo	%	100	100		100		100		100		100		100	RSUD DR. TJITROWARDOJO	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat	Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD Tjokronegoro	%	90,83	91,5		92		92,5		93		93,5		93,5	RSUD R.A.A TJOKRONEGORO	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di RSUD Tjokronegoro	%	100	100		100		100		100		100		100	RSUD R.A.A TJOKRONEGORO	Kabupaten Purworejo	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
		Meningkatnya Layanan Penunjang Medis dan Nonmedis	Persentase Ketercapaian Layanan Penunjang Medis dan Nonmedis di RSUD Tjokronegoro	%	100	100		100		100		100		100		100	RSUD R.A.A TJOKRONEGORO	Kabupaten Purworejo	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	23	32.680.200	24	77.500.000	24	84.500.000	24	91.000.000	24	99.000.000	24			
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	29.568.600	22	55.500.000	22	57.000.000	22	59.500.000	22	62.000.000	110			
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	20	3.111.600	20	10.000.000	20	12.500.000	20	14.000.000	20	17.000.000	100			
1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	1	12.000.000	1	15.000.000	1	17.500.000	1	20.000.000	4			
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	45	149.057.304.068	45	148.408.984.549	45	137.457.794.239	45	136.867.230.738	45	138.017.175.287	45			
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1.405	2.105	148.980.430.868	2.105	148.196.215.549	2.105	137.245.025.239	2.105	136.654.461.738	2.105	137.804.406.287	2.105			
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	26	26	76.873.200	26	212.769.000	26	212.769.000	26	212.769.000	26	212.769.000	130			
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	11	5.637.000	11	18.799.000	11	20.678.900	11	22.746.790	11	25.021.469	55			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	5.637.000	1	18.799.000	1	20.678.900	1	22.746.790	1	25.021.469	5			
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	0	0		16	10.000.000	16	10.000.000	16	10.000.000	16	10.000.000	64			
1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4			
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	21	1.944.000	21	16.506.600	21	18.157.260	21	19.972.986	21	21.970.285	105			
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	1	1	1.944.000	1	16.506.600	1	18.157.260	1	19.972.986	1	21.970.285	5			
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	0	8	185.643.620	8	366.800.500	8	403.480.550	8	443.828.605	8	488.211.465	40			
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	5.273.800	1	5.876.300	1	6.463.930	1	7.110.323	1	7.821.355	5			
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	5.672.700	1	8.662.000	1	9.528.200	1	10.481.020	1	11.529.122	5			
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	25.578.000	1	106.714.200	1	117.385.620	1	129.124.182	1	142.036.600	5			
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	4.326.000	1	8.629.400	1	9.492.340	1	10.441.574	1	11.485.731	5			
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	76.609.720	1	8.529.000	1	9.381.900	1	10.320.090	1	11.352.099	5			
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	4.300.000	1	7.905.000	1	8.695.500	1	9.565.050	1	10.521.555	5			
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	62.882.000	1	216.581.000	1	238.239.100	1	262.063.010	1	288.269.311	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1.001.400	1	3.903.600	1	4.293.960	1	4.723.356	1	5.195.692	5			
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	3	0		0		3	832.314.400	35	1.293.314.400	0		38			
1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	1	416.157.200	1	416.157.200	0	0	2			
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	2	416.157.200	2	416.157.200	0	0	4			
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	10	56.000.000	0	0	10			
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	0	0	0	0	0	14	225.000.000	0	0	14			
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	3	105.000.000	0	0	3			
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	5	75.000.000	0	0	5			
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	24	375.209.700	24	409.854.600	24	412.390.200	24	415.179.360	24	418.247.436	24			
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	349.544.200	12	384.498.600	12	384.498.600	12	384.498.600	12	384.498.600	60			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	25.665.500	12	25.356.000	12	27.891.600	12	30.680.760	12	33.748.836	60			
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	7	12	351.324.000	12	691.297.000	12	760.426.700	12	836.469.370	12	920.116.307	12			
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	39.950.000	1	39.945.000	1	43.939.500	1	48.333.450	1	53.166.795	1			
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11	131.350.000	11	359.505.000	11	395.455.500	11	435.001.050	11	478.501.155	11			
1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	122	122	2.400.000	122	5.000.000	122	5.500.000	122	6.050.000	122	6.655.000	122			
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	64	64	34.990.000	64	39.290.000	64	43.219.000	64	47.540.900	64	52.294.990	64			
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	55.843.000	3	124.560.000	3	137.016.000	3	150.717.600	3	165.789.360	3			
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	8	3.360.000	8	13.892.000	8	15.281.200	8	16.809.320	8	18.490.252	8			
1.02.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Ha	17.112	17.112	83.431.000	17.112	109.105.000	17.112	120.015.500	17.112	132.017.050	17.112	145.218.755	17.112			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Kemiri	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	2.695.532.436	100	2.695.532.436	100	2.695.532.436	100	2.695.532.436	100	2.695.532.436	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.695.532.436	1	2.695.532.436	1	2.695.532.436	1	2.695.532.436	1	2.695.532.436	1			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bener	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	1.206.500.000	100	1.206.500.000	100	1.206.500.000	100	1.206.500.000	100	1.206.500.000	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.206.500.000	1	1.206.500.000	1	1.206.500.000	1	1.206.500.000	1	1.206.500.000	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Loano	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	1.536.490.160	100	1.536.490.160	100	1.536.490.160	100	1.536.490.160	100	1.536.490.160	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.536.490.160	1	1.536.490.160	1	1.536.490.160	1	1.536.490.160	1	1.536.490.160	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Sruwohrejo	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	1.525.109.874	100	1.525.109.874	100	1.525.109.874	100	1.525.109.874	100	1.525.109.874	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.525.109.874	1	1.525.109.874	1	1.525.109.874	1	1.525.109.874	1	1.525.109.874	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Grabag	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	2.473.356.000	100	2.473.356.000	100	2.473.356.000	100	2.473.356.000	100	2.473.356.000	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.473.356.000	1	2.473.356.000	1	2.473.356.000	1	2.473.356.000	1	2.473.356.000	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Wirun	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	2.394.000.000	100	2.394.000.000	100	2.394.000.000	100	2.394.000.000	100	2.394.000.000	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.394.000.000	1	2.394.000.000	1	2.394.000.000	1	2.394.000.000	1	2.394.000.000	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Butuh	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	2.194.664.751	100	2.194.664.751	100	2.194.664.751	100	2.194.664.751	100	2.194.664.751	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.194.664.751	1	2.194.664.751	1	2.194.664.751	1	2.194.664.751	1	2.194.664.751	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Semawung daleman	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	3.822.429.224	100	3.822.429.224	100	3.822.429.224	100	3.822.429.224	100	3.822.429.224	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	3.822.429.224	1	3.822.429.224	1	3.822.429.224	1	3.822.429.224	1	3.822.429.224	1			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Kutoarjo	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	1.121.409.246	100	1.121.409.246	100	1.121.409.246	100	1.121.409.246	100	1.121.409.246	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.121.409.246	1	1.121.409.246	1	1.121.409.246	1	1.121.409.246	1	1.121.409.246	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bragolan	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	2.759.696.307	100	2.759.696.307	100	2.759.696.307	100	2.759.696.307	100	2.759.696.307	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.759.696.307	1	2.759.696.307	1	2.759.696.307	1	2.759.696.307	1	2.759.696.307	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Karanggetas	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	3.303.161.739	100	3.303.161.739	100	3.303.161.739	100	3.303.161.739	100	3.303.161.739	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	3.303.161.739	1	3.303.161.739	1	3.303.161.739	1	3.303.161.739	1	3.303.161.739	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Seborokrapyak	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	2.193.360.261	100	2.193.360.261	100	2.193.360.261	100	2.193.360.261	100	2.193.360.261	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.193.360.261	1	2.193.360.261	1	2.193.360.261	1	2.193.360.261	1	2.193.360.261	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Pituruh	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	2.360.067.875	100	2.360.067.875	100	2.360.067.875	100	2.360.067.875	100	2.360.067.875	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.360.067.875	1	2.360.067.875	1	2.360.067.875	1	2.360.067.875	1	2.360.067.875	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Purworejo	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.050.000.000	1	1.050.000.000	1	1.050.000.000	1	1.050.000.000	1	1.050.000.000	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Mranti	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	1.606.168.774	100	1.606.168.774	100	1.606.168.774	100	1.606.168.774	100	1.606.168.774	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.606.168.774	1	1.606.168.774	1	1.606.168.774	1	1.606.168.774	1	1.606.168.774	1			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Cangkrep	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	2.786.035.040	100	2.786.035.040	100	2.786.035.040	100	2.786.035.040	100	2.786.035.040	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.786.035.040	1	2.786.035.040	1	2.786.035.040	1	2.786.035.040	1	2.786.035.040	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bagelen	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	1.477.475.280	100	1.477.475.280	100	1.477.475.280	100	1.477.475.280	100	1.477.475.280	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.477.475.280	1	1.477.475.280	1	1.477.475.280	1	1.477.475.280	1	1.477.475.280	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Banyuurip	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	1.915.886.622	100	1.915.886.622	100	1.915.886.622	100	1.915.886.622	100	1.915.886.622	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.915.886.622	1	1.915.886.622	1	1.915.886.622	1	1.915.886.622	1	1.915.886.622	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Gebang	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	957.200.000	100	967.200.000	100	967.200.000	100	967.200.000	100	967.200.000	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	957.200.000	1	967.200.000	1	967.200.000	1	967.200.000	1	967.200.000	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Winong	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	1.295.574.408	100	1.295.574.408	100	1.295.574.408	100	1.295.574.408	100	1.295.574.408	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.295.574.408	1	1.295.574.408	1	1.295.574.408	1	1.295.574.408	1	1.295.574.408	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bruno	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	1.450.352.900	100	1.450.352.900	100	1.450.352.900	100	1.450.352.900	100	1.450.352.900	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.450.352.900	1	1.450.352.900	1	1.450.352.900	1	1.450.352.900	1	1.450.352.900	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Banyuasin	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	1.640.100.000	100	1.640.100.000	100	1.640.100.000	100	1.640.100.000	100	1.640.100.000	100			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.640.100.000	1	1.640.100.000	1	1.640.100.000	1	1.640.100.000	1	1.640.100.000	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Ngombol	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	984.847.944	100	984.847.944	100	984.847.944	100	984.847.944	100	984.847.944	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	984.847.944	1	984.847.944	1	984.847.944	1	984.847.944	1	984.847.944	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Kaligesing	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	1.229.530.854	100	1.229.530.854	100	1.229.530.854	100	1.229.530.854	100	1.229.530.854	100			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bayan	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	1.409.854.244	100	1.409.854.244	100	1.409.854.244	100	1.409.854.244	100	1.409.854.244	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.409.854.244	1	1.409.854.244	1	1.409.854.244	1	1.409.854.244	1	1.409.854.244	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bubutan	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	4.164.108.247	100	4.164.108.247	100	4.164.108.247	100	4.164.108.247	100	4.164.108.247	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	4.164.108.247	1	4.164.108.247	1	4.164.108.247	1	4.164.108.247	1	4.164.108.247	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Dadirejo	Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas	%	100	100	2.692.032.116	100	2.692.032.116	100	2.692.032.116	100	2.692.032.116	100	2.692.032.116	100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2.692.032.116	1	2.692.032.116	1	2.692.032.116	1	2.692.032.116	1	2.692.032.116	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Kinerja Penunjang dan Manajemen BLUD	Persentase Capaian Kinerja Penunjang dan Manajemen BLUD	%	100	100	232.111.079.449	100	232.111.079.449	100	232.111.079.449	100	232.111.079.449	100	232.111.079.449	100			
		Terlaksananya Kinerja Pelayanan Medis dan Keperawatan BLUD	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Medis dan Keperawatan BLUD	%	100	100		100		100		100		100		100			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
		Terlaksananya Kinerja Tata Usaha dan Rumah Tangga BLUD	Persentase Capaian Kinerja Tata Usaha dan Rumah Tangga BLUD	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Terlaksananya Kinerja Perencanaan dan Humas BLUD	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Humas BLUD	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Terlaksananya Kinerja Keuangan BLUD	Persentase Capaian Kinerja Keuangan BLUD	%	100	100		100		100		100		100		100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	232.111.079.449	1	232.111.079.449	1	232.111.079.449	1	232.111.079.449	1	232.111.079.449	1			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Kinerja Perencanaan BLUD	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan BLUD	%	100	100	65.379.500.000	100	65.379.500.000	100	65.379.500.000	100	65.379.500.000	100	65.379.500.000	100			
		Terlaksananya Kinerja Keuangan BLUD	Persentase Capaian Kinerja Keuangan BLUD	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Terlaksananya Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian BLUD	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian BLUD	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Terlaksananya Kinerja Pelayanan Medis BLUD	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Medis BLUD	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Terlaksananya Kinerja Pelayanan Keperawatan BLUD	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Keperawatan BLUD	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Terlaksananya Kinerja Pelayanan Penunjang Medis BLUD	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang Medis BLUD	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Terlaksananya Kinerja Pelayanan Penunjang Non Medis BLUD	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang Non Medis BLUD	%	100	100		100		100		100		100		100			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	65.379.500.000	1	65.379.500.000	1	65.379.500.000	1	65.379.500.000	1	65.379.500.000	1			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	14,9	13,9		13,4		12,9		12,4		11,9		11,9			
			Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	0	75		78		80		90		100		100			
			Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	%	40	45		50		55		60		65		65			
			Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	73,65	80		80		80		83		83		83			
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna	%	79	78		78		80		80		80		80			
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						149.097.033.763		150.798.559.000		147.631.892.000		133.278.469.000		156.399.722.000				
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	79	90,31	147.373.856.534	90,63	149.308.332.000	90,94	146.156.032.000	91,25	131.779.291.000	91,56	154.876.857.000	91,56	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kabupaten Purworejo	
			Neglected Tropical Diseases (NTDs)	%	70,4	92		96,2		100		100		100		100	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kabupaten Purworejo	
			Angka Kematian Dengue	%	0,38	0,34		0,3		0,2		0,1		0,1		0,1	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kabupaten Purworejo	
			Annual Parasite Incidence (API)	per 1000 penduduk	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kabupaten Purworejo	
			Persentase Diabetes Melitus Terkendali	%	0	35		37		39		41		45		45	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kabupaten Purworejo	
			Insiden HIV	per 1000 penduduk	0,14	0,16		0,18		0,2		0,23		0,25		0,25	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kabupaten Purworejo	
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	87,91	95		96		97		98		99		99	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kabupaten Purworejo	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
			Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	58	65		67		70		73		75		75	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kabupaten Purworejo	
			Persentase Hipertensi terkendali	%	0,66	5,17		5,67		6,17		6,67		7,17		7,17	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kabupaten Purworejo	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	7	5		5		4		4		4		22	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Purworejo	
			Jumlah Kematian Balita	Kasus	96	86		81		80		79		78		404	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Purworejo	
			Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	%	0	37,04		55,56		74,07		85,19		100		100	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Purworejo	
			Persentase lanjut usia yang mandiri	%	65	77		79		81		83		85		85	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Purworejo	
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	0	55		65		75		80		80		80	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Purworejo	
			Prevalensi Obesitas	%	21,8	21,6		21,5		21,4		21,3		21,2		21,2	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Purworejo	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	0	11,4		10,4		9,4		8,4		7,4		7,4	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Purworejo	
			Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	%	1,0	1,5		1,7		2,0		2,5		3,0		3,0	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Purworejo	
		Tersedianya data dan sistem informasi kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	46,88	56		59		61		63		65		65	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	12,5	27,78		27,78		33,33		36,66		41,11		41,11	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Kabupaten Purworejo	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,31	98,4		98,5		98,6		98,7		98,8		98,8	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Kabupaten Purworejo	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi kelengkapan Sarana Prasarana Alat Kesehatan	%	70	70	59.842.578.883	72	55.601.637.292	75	49.399.534.730	77	34.102.042.749	80	56.260.325.752	80			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	82	85		88		92		95		96		96			
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	0	0	0	1	5.075.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	0	0	0	2	22.000.000.000	2	12.476.897.639	0	0	1	12.000.000.000	5			
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	0	0	0	0	0	0	1	1.521.000.000	1	1.446.000.000	2			
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	2	700.000.000	1	1.000.000.000	1	700.000.000	4			
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1	1	5.266.622.060	11	9.000.000.000	11	17.500.000.000	11	13.604.405.658	11	11.825.000.000	27			
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1	1	6.030.732.770	1	1.200.000.000	1	1.446.000.000	0	0	0	0	3			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	0	0	2			
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	0	0	0	1	150.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	4			
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	0	0	0	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	2			
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	1	300.000.000	2			
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	200	30	6.048.692.842	15	800.000.000	15	800.000.000	15	800.000.000	350	13.812.688.661	425			
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit	0	0	0	1	3.000.000.000	0	0	1	2.000.000.000	0	0	2			
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	300	150	280.380.760	150	299.625.000	150	299.625.000	150	299.625.000	150	299.625.000	750			
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana,	Unit	0	2	27.978.535.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
		standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit															
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	72	72	14.151.475.351	84	13.178.693.952	84	13.178.693.751	84	12.178.693.751	84	14.178.693.751	408			
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	27	27	86.140.000	27	98.318.340	27	98.318.340	27	98.318.340	27	98.318.340	27			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Mutu dan Layanan Kesehatan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Mutu dan Layanan Kesehatan	Dokumen	3	3	87.298.442.552	3	93.315.877.789	3	96.365.680.351	3	97.286.431.332	3	98.225.714.329	15			
		Tersedianya layanan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	51	90,63		91,25		91,88		92,5		93,13		93,13			
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Layanan Kesehatan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	17	17		17		17		17		17		85			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menyelenggarakan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas	27	27		27		27		27		27		27			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan berdasarkan Siklus Hidup	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat berdasarkan Siklus Hidup	Dokumen	21	21		21		21		21		21		21			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menyelenggarakan Pelayanan siklus hidup sesuai standar	Puskesmas	27	27		27		27		27		27		27			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6.268	6.706	2.356.157.000	6.706	2.356.157.000	6.706	2.356.157.000	6.706	2.356.157.000	6.706	2.356.157.000	33.530			
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6.333	6.510	50.444.600	6.510	50.444.600	6.510	50.444.600	6.510	50.444.600	6.510	50.444.600	32.550			
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6.697	6.513	68.529.800	6.513	75.167.967	6.513	75.167.967	6.513	75.167.967	6.513	75.167.967	32.565			
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	38.531	44.881	215.658.600	44.881	215.658.600	44.881	215.658.600	44.881	215.658.600	44.881	215.658.600	224.405			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	98.574	127.510	620.341.000	127.510	620.341.000	127.510	620.341.000	127.510	620.341.000	127.510	620.341.000	637.550			
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	268.398	452.396	19.451.200	452.396	24.677.354	452.396	24.677.354	452.396	24.677.354	452.396	24.677.354	2.261.980			
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	118.381	133.326	331.865.400	133.326	331.865.400	133.326	331.865.400	133.326	331.865.400	133.326	331.865.400	666.630			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	81.252	239.112	12.907.000	239.112	15.964.592	239.112	15.964.592	239.112	15.964.592	239.112	15.964.592	1.195.560			
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11.876	7.033	17.396.200	7.033	20.491.106	7.033	20.491.106	7.033	20.491.106	7.033	20.491.106	35.165			
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	4.138	5.535	213.354.200	5.535	230.000.000	5.535	230.000.000	5.535	230.000.000	5.535	230.000.000	27.675			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	9.923	7.843	289.900.600	7.843	289.900.600	7.843	289.900.600	7.843	289.900.600	7.843	289.900.600	39.215			
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	8.286	8.985	61.325.200	8.985	74.687.140	8.985	82.155.854	8.985	90.371.439	8.985	99.408.583	44.925			
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	29	0	0	1	13.480.625	1	13.480.625	1	13.480.625	1	13.480.625	4			
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	27	0	0	1	13.445.421	1	13.445.421	1	13.445.421	1	13.445.421	4			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	27	27	3.851.100.200	1	3.950.000.000	1	3.950.000.000	1	3.950.000.000	1	3.950.000.000	31			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	130.500.800	1	130.500.800	1	130.500.800	1	130.500.800	1	130.500.800	5			
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	1	297.457.400	1	297.457.400	1	297.457.400	1	297.457.400	1	297.457.400	5			
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	29	29	449.015.000	29	474.894.796	29	474.894.796	29	474.894.796	29	474.894.796	145			
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	90	4	3.410.800	4	8.349.331	4	8.349.331	4	8.349.331	4	8.349.331	20			
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	2	1	557.696.700	1	557.696.700	1	557.696.700	1	557.696.700	1	557.696.700	5			
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	404	16.770.000	404	18.000.000	404	19.000.000	404	20.000.000	404	22.000.000	2.020			
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	12.457	404	33.226.600	404	35.000.000	404	40.000.000	404	25.000.000	404	25.000.000	2.020			
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	1	1	10.547.600	1	13.621.850	1	13.621.850	1	13.621.850	1	13.621.850	5			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	4	2.835.005.800	4	2.835.005.800	4	2.835.005.800	4	2.835.005.800	4	2.835.005.800	20			
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	4	4	70.578.156.752	4	75.761.280.430	4	78.684.787.569	4	79.494.914.369	4	80.305.041.000	20			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	6.767	0	0	6.750	6.081.765	6.750	6.081.765	6.750	6.081.765	6.750	6.081.765	27.000			
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	Paket	165	104	458.609.200	104	458.609.200	104	458.609.200	104	458.609.200	104	458.609.200	520			
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Dokumen	3	0	0	1	100.812.804	1	168.021.338	1	235.229.872	1	302.438.406	4			
1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	22	0	0	7	45.140.736	7	75.234.542	7	105.328.348	7	135.422.154	7			
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	0	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	8			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	27	27	2.650.931.800	27	2.400.931.800	27	2.400.931.800	27	2.400.931.800	27	2.400.931.800	135			
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1	152.991.400	1	152.991.400	1	152.991.400	1	152.991.400	1	152.991.400	5			
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota	Unit	56	0	0	63	17.048.416	63	17.048.416	63	17.048.416	63	17.048.416	63			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	1	37.665.300	1	50.556.550	1	55.612.205	1	61.173.426	1	67.290.769	5			
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	0	0	1	46.000.000	1	46.000.000	1	46.000.000	1	46.000.000	4			
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1	221.895.000	1	479.745.250	1	479.745.250	1	479.745.250	1	479.745.250	1			
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1.141	1.614	16.866.600	1.614	33.294.500	1.614	33.294.500	1.614	36.623.950	1.614	40.286.345	8.070			
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	89	518	14.499.800	518	74.687.140	518	82.155.854	518	90.371.439	518	99.408.583	2.590			
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	Orang	10	218	542.646.000	218	820.187.481	218	820.187.481	218	820.187.481	218	820.187.481	1.090			
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Tatanan	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1			
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dokumen	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4			
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	1	15.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	4			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	0	3	182.119.000	3	50.702.235	3	50.702.235	3	50.702.235	3	50.702.235	15			
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tercapainya pemanfatan ERM di fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemanfatan ERM yang terintegrasi satu sehat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	46,88	80	168.482.099	83	177.642.019	86	177.642.019	90	177.642.019	95	177.642.019	95			
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	3	1	168.482.099	1	177.642.019	1	177.642.019	1	177.642.019	1	177.642.019	5			
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Izin operasional	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Izin operasional	%	100	100	64.353.000	100	213.174.900	100	213.174.900	100	213.174.900	100	213.174.900	100			
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	66	15	4.335.000	25	13.148.200	30	13.148.200	35	13.148.200	40	13.148.200	40			
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	0	0	0	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30			
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	66	32	60.018.000	30	100.026.700	30	100.026.700	30	100.026.700	30	100.026.700	30			
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tersedianya SDM kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	per 1000 penduduk	3,22	5,3	950.970.260	5,3	965.996.000	5,4	950.970.000	5,5	965.996.000	5,6	981.258.000	5,6	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Kabupaten Purworejo	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Tercapainya tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Memiliki Izin Praktik	Orang	3.280	3.400	7.184.160	3.450	32.000.000	3.500	32.000.000	3.550	32.000.000	3.600	32.000.000	3.600			
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	1	1.934.900	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	5			
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	1	5.249.260	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5			
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tercapainya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Standar Ketenagaan Minimal	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	37	44	85.153.100	48,15	106.000.000	51,85	106.000.000	55,56	106.000.000	59,26	106.000.000	59,26			
			Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		100			
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	957.100	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	5			
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	84.196.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	5			
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Teknis Sesuai Standar	Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar Profesi	%	96,15	97	858.633.000	97,5	827.996.000	98	812.970.000	98	827.996.000	98,25	843.258.000	98,25			
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	302	250	858.633.000	325	827.996.000	325	812.970.000	325	827.996.000	350	843.258.000	1.575			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tersedianya obat, alat kesehatan dan optikal serta makanan yang aman dan bermutu	Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, serta Makanan yang Aman dan Bermutu	%	94	95	239.390.800	97	243.173.000	98	239.391.000	98	243.173.000	98,5	247.015.000	98,5	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Kabupaten Purworejo	
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	0	82,5		85		90		95		100		100	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Kabupaten Purworejo	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya Obat, Alat Kesehatan dan Optikal serta Makanan yang Aman dan Bermutu	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	75	80	13.331.600	82,5	27.331.600	85	28.331.600	87,5	26.331.600	90	25.331.600	90			
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	3	1	13.331.600	1	27.331.600	1	28.331.600	1	26.331.600	1	25.331.600	5			
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terwujudnya Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang sesuai standar	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dilakukan pembinaan sesuai standar	%	0	0		70	10.000.000	70	12.000.000	70	13.000.000	72	10.000.000	72			
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu	Dokumen	0	0	0	1	10.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	10.000.000	4			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
			Perusahaan Rumah Tangga																
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terwujudnya Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Ketentuan Keamanan Pangan	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar	%	70	72,5	15.942.600	75	37.400.000	80	40.000.000	85	40.000.000	90	42.500.000	90			
			Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	30	40		45		50		55		60		60			
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	1	15.942.600	1	37.400.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	42.500.000	5			
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Tercapainya Sarana Tempat Pengelolaan Pangan (Jasa Boga dan Depot Air Minum) yang memenuhi persyaratan	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	30	40	6.278.200	45	37.400.000	50	37.400.000	55	37.400.000	60	37.400.000	60			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	1	6.278.200	12	37.400.000	12	37.400.000	12	37.400.000	12	37.400.000	49			
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Tercapainya Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajajan yang mendapatkan Pembinaan	Perentase Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajajan yang mendapatkan Label Pembinaan	%	55	62	6.745.400	62	30.800.000	66	30.800.000	70	30.800.000	74	30.800.000	74			
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	100	1	6.745.400	1	30.800.000	1	30.800.000	1	30.800.000	1	30.800.000	5			
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Tercapainya produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi persyaratan saat dilakukan pengawasan	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	75	77,5	197.093.000	80	100.241.400	82,5	90.859.400	85	95.641.400	90	100.983.400	90			
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market Dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Sarana/ Produk	80	80	197.093.000	80	100.241.400	80	90.859.400	80	95.641.400	80	100.983.400	400			
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Terwujudnya desa siaga aktif mandiri	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	39,07	42	532.816.169	45	281.058.000	47	285.499.000	48	290.009.000	50	294.592.000	50	Bidang Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Purworejo	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pokjanal Desa Siaga di Tingkat Kecamatan yang Aktif	Jumlah Pokjanal Desa Siaga di Tingkat Kecamatan yang aktif	Kecamatan	16	16	12.356.700	16	59.348.380	16	65.283.009	16	71.811.310	16	78.992.441	16			
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	16	1	12.356.700	1	59.348.380	1	65.283.009	1	71.811.310	1	78.992.441	5			
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Desa Sehat Utama dan Mandiri	Jumlah Desa Sehat Utama dan Mandiri	Desa/Kelurahan	382	384	17.686.600	395	85.798.020	405	94.377.822	414	103.815.604	424	114.197.165	424			
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	6	1	17.686.600	1	85.798.020	1	94.377.822	1	103.815.604	1	114.197.165	5			
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Posyandu yang Menerapkan SPM Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu yang Menerapkan SPM Bidang Kesehatan	%	0	100	502.772.869	100	135.911.600	100	125.838.169	100	114.382.086	100	101.402.394	100			
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyara kat (UKBM)	Dokumen	1	1	502.772.869	1	135.911.600	1	125.838.169	1	114.382.086	1	101.402.394	5			
Jumlah							**650.842.300.102**		**652.543.825.000**		**639.377.158.000**		**625.023.735.000**		**648.144.988.000**				

4.2 Dukungan Terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) mendukung pencapaian tujuan nasional, provinsi, dan kegiatan unggulan daerah dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang selaras dalam dokumen perencanaan jangka waktu 1-5 tahunan, baik di tingkat kementerian/lembaga (KL), pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah/perangkat daerah. Penyelarasan ini memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat daerah berkontribusi pada pencapaian prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta fokus pada pengembangan kegiatan unggulan daerah secara terstruktur dan terukur.

Penyelarasan ini bertujuan agar kebijakan dan program di tingkat daerah selaras, konsisten, dan berkesinambungan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta sejalan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah

Table 4.3 Dukungan Asta Cita

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Asta Cita 4: Memperperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Fasilitasi integrasi layanan primer (ILP)	Fasilitasi integrasi layanan primer (ILP)	Kesehatan	Dinkesda
		Pemenuhan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, dan pos jesehatan desa	Pemenuhan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, dan pos jesehatan desa	Kesehatan	Dinkesda

Tabel 4.3 Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Terkait
1	Penanggulangan kemiskinan				
	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar cakupan layanan BPJS dan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi masyarakat	Kesehatan	Dinkesda
2	Kesehatan untuk semua				
	Jaminan kesehatan nasional	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Fasilitasi jaminan kesehatan bagi masyarakat	Kesehatan	Dinkesda

Tabel 4.4 Proiritas Utama Nasional

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Prioritas Nasional 4	Penurunan kematian ibu dan anak	Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kesehatan	Dinkesda

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
2		Pencegahan dan penurunan stunting	Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kesehatan	Dinkesda
3		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kesehatan	Dinkesda
4		Penuntasan TBC	Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan	Kesehatan	Dinkesda

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
			Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
5		Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinkesda
6		Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kesehatan	Dinkesda
7		Investasi pelayanan kesehatan primer	Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: (semua) Sub Kegiatan: (semua)	Kesehatan	Dinkesda
8		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	-	Kesehatan	Dinkesda

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
9		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Program: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan: (semua) Sub Kegiatan: (semua)	Kesehatan	Dinkesda

Tabel 4.5 Penjabaran Program yang Mendukung Program kabupaten

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas di 2026	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Sehat Penduduke	Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk semua warga	Pendampingan pelaksanaan intergrasi layanan terpadu (ILP), Pelaksanaan akreditasi di fasilitas kesehatan, Pelaksanaan promosi kesehatan, Pelayanan cek kesehatan gratis		Kesehatan	Dinkesda
		Mempermudah dan mempercepat proses pengurusan jaminan sosial kesehatan	Pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS dan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat	Pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS dan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat	Kesehatan	Dinkesda
		Peningkatan kualitas gizi masyarakat	Inspeksi kesehatan lingkungan sarana dan tempat fasilitas umum		Kesehatan	Dinkesda
			Pembentukan tim pembina kab/kota sehat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat		Kesehatan	Dinkesda

Tabel 4.6 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Monitoring Perencanaan Puskesmas	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan laporan kinerja bulanan /triwulanan/ semesteran dan tahunan. - Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	- Penyusunan Data Dasar Pembangunan - Penyusunan Data Statistik Sektoral Daerah - Koordinasi Penyusunan Data Dasar Pembangunan dan Data Stitistik Sektoral	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran/ Tahunan SKPD - Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan - Monitoring Laporan Keuangan Puskesmas	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Penyusunan RKBDM - Penatausahaan BMD - Monitoring BMD - Koordinasi BMD	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Penyusunan laporan Pengelolaan Retribusi Daerah - Koordinasi Pengelolaan Retribusi Daerah - Monitoring Retribusi Daerah	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian - Monitoring Kepegawaian	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan/Material	- Penyediaan Bahan/Material	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Koordinasi Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Mebel	- Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
			Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan - Biaya Pemeliharaan - Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan - Biaya Pemeliharaan - Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	- Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah (Sewa Tanah)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat			
		Meningkatnya Layanan Penunjang Medis dan Nonmedis			
			Peningkatan Pelayanan BLUD		
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- Jasa Pelayanan Kesehatan - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi - Administrasi Keuangan - Administrasi Barang Milik Daerah - Administrasi Kepegawaian - Administrasi Umum - Pengadaan Barang Milik Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang - Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggarany a pelayanan kesehatan sesuai standar	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
1			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	- Appraisal Tanah - Pembelian Tanah - Pembangunan RS - Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung	
2			Pembangunan Puskesmas	- Pembangunan Puskesmas Bubutan, Banyuasin ,Bayan, Gebang, Seborokrapyak, Bagelen, Wirun	
3			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Appraisal Tanah - Pembelian Tanah - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
4			Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Puskemas dan Puskesmas Pembantu	
5			Pengembangan Puskesmas	Pengembangan Puskesmas Bubutan, Banyuasin, Bayan, Gebang, Seborokrapyak, Bagelen, Wirun	
6			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Pembangunan gedung RMC (Regional Mantainace Center) dan UPAK (Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan) - Pembangunan Gudang Farmasi, - Pembangunan PSC (Publik Safety Center)	
7			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Renovasi dan Pemeliharaan gedung/bangunan Rumah Sakit	
8			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	- Renovasi Pukesmas Sruwohrejo, Kutoarjo, Wirun, Dadirejo, Karanggetas - Pembangunan Pustu 20 Unit (per tahun 5 Unit) - Renovasi Pustu 20 Unit (per tahun 5 Unit)	
9			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
10			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Renovasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Puskemas dan Puskesmas Pembantu	
11			Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
12			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	- Pengadaan alat pengujian kalibrasi - Pengadaan alat Pemeliharaan alat kesehatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
13			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Kalibrasi Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pemeliharaan alat dan pengujian Kalibrasi - Operasional RMC (Regional Maintenace Center)	
14			Pengembangan Rumah Sakit	Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	
15			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	- Monev perencanaan pengadaan - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Reagen, Vaksin, - Monev ketersediaan obat - Pemusnahan obat	
16			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Pelayanan distribusi Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Reagen, Vaksin ke 27 Puskesmas dan Fasyankes. - Pertemuan rekonsiliasi Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Reagen, Vaksin dengan Puskesmas dan RSUD setiap bulan. - Pemeliharaan aplikasi persediaan obat SIMO IF Dinkesda dan SIMO Puskesmas.	
17			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
18			Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	
19			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	- Iuran JKN bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja - Bantua n Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja - Penggantian biaya layanan masyarakat tertentu yang tidak	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
				tercover dalam BPJS Kesehatan - Bantuan iuran bagi pesera pekerja bukan penerima upah mandiri kelas III.	
20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Koordinasi kesiapan pelaksanaan telemedicine - Worskshoop telemedisin - Pendampingan pelaksanaan telemedisin - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan telemedisin	
21			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	- Koordinasi kesiapan akreditasi fasyankes - Pendampingan kesiapan akreditasi fasyankes - Pelaksanaaan akreditasi fasyankes - Monitoring dan Evaluasi pasca akreditasi	
22			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	- Persiapan Pelaksanaan SPGDT - Pelaksanaan Kegiatan SPGDT - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SPGDT - Pencatatan dan pelaporan Kegiatan SPGDT	
23			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
24			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	- Koordinasi kesiapan pelaksanaan Penilaian kesesuaian dan pengawasan perizinan Faskes - Sosialisasi standart perizinan berusaha fasilitas kesehatan - Pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian perizinan berusaha faskes	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
				- Monitoring dan pengawasan kesesuaian terhadap standar perizinan berusaha faskes	
25			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	- Koordinasi dan sosialisasi Tata Kelola Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan - Bimtek tata kelola RS dan fasilitas pelayanan kesehatan - Monitoring dan evaluasi implementasi tata kelola RS dan fasilitas pelayanan kesehatan	
26			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- Rapat Koordinasi pelaksanaan keg peningkatan mutu - Bimtek tata kelola mutu fasyankes - Workshop PPI, MFK, Pasien Safety dan manajemen resiko di fasyankes - Monitoring dan evaluasi Implementasi mutu fasyankes	
27			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	- Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
28		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
29			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	- Koordinasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Monitoring pelaksanaan dan pelaporan pelayanan ibu hamil - Penyediaan Buku KIA - Rapat koordinasi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan Ibu hamil	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
				- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan Ibu hamil	
30			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	- Koordinasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar - Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan Ibu bersalin - Melaksanakan Pengkajian dan Tindak lanjut kematian Maternal (AMPSR) - Melaksanakan Desiminasi Rekomendasi TindakLanjut AMPSR - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan maternal dan neonatal	
31			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	- Koordinasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar - Monitoring pelaksanaan dan pelaporan CKG BBL (Skrening BBL) - Pengemasan, pengiriman dan pemeriksaan sampel skrining BBL dan sampel konfirmasi - Penyediaan Buku KIA Bayi Kecil - Penyediaan BMHP test konfirmasi hasil skrining BBL - Melaksdanakan Pengkajian dan Tindak lanjut kematian Perinatal (AMPSR) - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam perawatan Bayi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
				Muda dan Bayi Risiko Tinggi	
32			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	- Koordinasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar - Monitoring pelaksanaan dan pelaporan CKG Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah (Skrening Pertumbuhan dan perkembangan) - Kalakarya MTBS - Penyediaan form skrining pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita - Penyediaan form MTBM dan MTBS - Pelaksanaan AMPSR Bayi Balita	
33			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	- Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas - Sosialisasi dan Edukasi program pendidikan dasar dan remaja - Koordinasi dan advokasi - Monitoring dan Evaluasi Konsultasi dan Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi	
34			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	- Sosialiasi dan Kordinasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai Standar - Monitoring dan evaluasi Pelayanan Kesehatan pada Usia	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
				Produktif sesuai Standar di Puskesmas - Pertemuan evaluasi hasil capaian CKG Usia Produktif	
35			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	- Sosialiasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai Standar - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan PJP pada lansia Resti - Pertemuan evaluasi hasil capaian pelayanan CKG pada usia lanjut - Penigkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait pelayanan PJP pada lansia resti 5. Pertermuan HLUN tingkat Kabupaten	
36			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas - Sosialisasi dan Edukasi - Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) - Pemberian Makanan Tambahan (PMT) - Monitoring dan Evaluasi - Konsultasi dan Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi	
37			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga - Pembinaan fasyankes yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga - Pembinaan kebugaran jasmani - Pembinaan kesehatan kerja - Monitoring dan evaluasi capaian pelayanan kesehatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
				kerja dan olahraga di Fasyankes	
38			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Sosialisasi dan koordinasi Promosi Kesehatan untuk Mendukung GERMAS - Kampanye dan Penggerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat GERMAS - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Promosi Kesehatan Puskesmas	
39			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	- Sosialisasi Terkait perizinan pada pelaku Hatra - Monitoring dan evaluasi pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas - Peningkatan Kapasitas pada Petugas Kesehatan Tradisional di Puskesmas	
40			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	- Pembinaan program kesehatan jiwa (program ODGJ dan program Bebas Pasung) di Puskesmas, - Koordinasi dan Monitoring evaluasi capaian pelayanan kesehatan ODGJ di Puskesmas sesuai standar, dan program bebas pasung	
41			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Rapat koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan siklus hidup. - Monitoring dan evaluasi pelayanan integrasi layanan primer (ILP) - Supervisi layanan di TPMD/ TPMB/ Klinik - Pembinaan teknis dalam rangka peningkatan pelayanan ILP - Peningkatan kapasitas dalam rangka	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
				peningkatan pelayanan ILP	
42			Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	- Koordinasi Penerapan KTR - Sosialisasi dan Penegakan KTR - Monitoring dan Evaluasi Penerapan KTR	
43			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota - Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	
44			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	- Koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak - Supervisi Layanan Gizi dan KIA - Pendampingan dokter spesialis Obsgyn dan spesialis Anak ke puskesmas - Pertemuan dalam rangka verikasi kelengkapan data kematian ibu dan bayi - Kalakarya pengkajian kematian Maternal dan Perinatal (AMPSR) - Pertemuan sosialisasi hasil rekomendasi hasil pengkajian kematian Ibu dan Perinatal.	
45			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	- Pembinaan program kesehatan jiwa dan napza di Fasyankes dan sekolah, - Koordinasi dan Monitoring capaian deteksi dini dan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza di Puskesmas.	
46			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah	- Koordinasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
			Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kesehatan Jiwa (ODMK) - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
47			Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	- Koordinasi Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah - Monitoring dan Evaluasi Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	
48		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
49			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	- Koordinasi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
50			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	- Koordinasi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus - Penyediaan bahan Medis Habis Pakai	
51			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	- Skrining Tuberkulosis dan Penemuan kasus TBC - Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai - Koordinasi Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
52			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	- Koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan HIV AIDS	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
				- Optimalisasi skrining pada Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
53			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	- Respon cepat kasus KLB kurang dari 24 jam - Desmininasi kasus KLB - Koordinasi Pelayanan KLB	
54			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	- Koordinasi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana - Penanganan masalah kesehatan pada penduduk terdampak bencana - Tersedianya Tim Tanggap Bencana	
55			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Pertemuan Renval, Bintek Program Kesehatan Lingkungan - Rapat Koordinasi Lintas Sektoral& Lintas Program STBM Berkelanjutan dan DEKSI - Pertemuan & Pelaksanaan PKAM, SKAMRT dan SKUDR Inspeksi Kesehatan Lingkungan TFU & TPP SPPG	
56			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Penyelidikan Epidemiologi - Verifikasi Sinyal SKDR Puskesmas dan RS Pemerintah dan Swasta - Pelayanan Kesehatan Haji - Koordinasi Pengelolaan Surveilans Kesehatan - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Surveilans Kesehatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
57			Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	- Koordinasi Pelayanan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan - penyediaan posko kesehatan	
58			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Pengendalian dan Penanganan Pasien yang disebabkan oleh tular vektor dan binatang pembawa penyakit - Deteksi dini terhadap pasien suspek kusta - Sosialisasi Penyakit Menular dan Tidak Menular - Koordinasi Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
59			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	- Pengambilan specimen penyakit potensial KLB - Pengiriman Spesimen penyakit potensial KLB ke Lab Rujukan - Koordinasi pengelolan Spesimen penyakit potensial KLB	
60			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	- Pelacakan Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) - Koordinasi Pelayanan Imunisasi - Pengambilan Vaksin - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Imunisasi - Peningkatan Kapasitas SDM	
61			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
62			Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	- Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan - Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
				- Pemantapan Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat - Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	
63			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	- Koordinasi Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis - Penyediaan logistik - Peningkatan tatalaksana pengobatan TBC - Penangana efek samping pengobatan - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis - Peningkatan kapasitas SDM	
64			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	- Koordinasi Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV - Penambahan faskes layanan PDP untuk peningkatan akses layanan HIV - Penyedian logistik untuk penderita HIV - Peningkatan Mutu SDM - Penanganan Efek samping pengonbatan	
65			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	- Koordinasi Pelayanan Kesehatan Malaria - Penyediaan logistik - Peningkatan kapasitas SDM - Peningkatan tatalaksana pengobatan Malaria - Penangana efek samping pengobatan - Pengendalian Vektor malaria dan pencegahan penularan malaria di daerah reseptif malaria - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pelayanan Kesehatan Malaria	
66			Pengelolaan Pelayanan	- Rapat koordinasi lintas program dan lintas	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
			Kesehatan Reproduksi	sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan Reproduksi - Pendataan PUS (Skrining Layak Hamil) - Pendampingan ke puskesmas (Skrining Layak Hamil). - Pertemuan perencanaan dan evaluasi layanan kesehatan reproduksi.	
67		Tersedianya data dan sistem informasi kesehatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		
68			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	- Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - Pemeliharaan Jaringan - Pengembangan Aplikasi berbasis Website - Implementasi Inovasi bidang Kesehatan - Penyusunan Profil Kesehatan - Penyusunan laporan PPID badan publik - Monitoring dan evaluasi Pengelolaan SIK Pengelolaan Media Informasi Publik	
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tersedianya SDM kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota		
1			Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	- Koordinasi perizinan tenaga kesehatan - Monitoring dan evaluasi perizinan tenaga kesehatan	
2			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	- Monitoring dan evaluasi praktik tenaga kesehatan - Visitasi pengawasan perizinan tenaga kesehatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
3			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota		
4			Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Penyusunan Dokumen perencanaan dan kebutuhan tenaga kesehatan - Pertemuan Penyusunan Peta Jabatan	
5			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kredensialing tenaga kesehatan	
6			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
7			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	- Uji Kompetensi tenaga kesehatan - Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui Pelatihan, Bimbingan Tekhnis, Worksop dan lainnya.	
III	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tersedianya obat, alat kesehatan dan optikal serta makanan yang aman dan bermutu	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
1			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Pengawasan dan Pembinaan Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan UMOT. - Bimbingan Teknis bagi penanggung jawab sarana Kefarmasian - Pendampingan penyusunan rencana perbaikan dan pencegahan (CAPA) atas hasil pengawasan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
				dan pemeriksaan sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan UMOT	
2			Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		
3			Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengawasan dan Pembinaan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
4			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
5			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	- Pemeriksaan sarana Industri Rumah Tangga dalam rangka penerbitan izin SPP-IRT. - Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Penanggungjawab Industri Rumah Tangga. - Rapat validasi perizinan SPP-IRT	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
6			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
7			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	- Penyelenggaraan Kursus Higine dan Sanitasi bagi Penanggungjawab TPP dan bagi Penjamah Pangan - Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat-tempat Pengelolaan Pangan - Rapat validasi perizinan SPP-IRT	
8			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		
9			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	- Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Pengelola Gerai dan Penjamah Pangan - Inspeksi Kesehatan Lingkungan Gerai dan Sentra Jajanan - Penerbitan Label Pembinaan / Stiker Pembinaan pada Tempat Jajanan/Sentra Jajanan/Gerai Pangan yang memenuhi persyaratan	
10			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
11			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	- Pengawasan Pasca Produksi pada sarana industri rumah tangga pangan (IRPT) - Bimtek Cara Produksi Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga Pangan - Pengujian Laboratorium Sampel Pangan Industri Rumah Tangga yang beredar di Pasaran. - Pengawasan Iklan dan Label Pangan Industri Rumah Tangga	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Terwujudnya desa siaga aktif mandiri	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkat an Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
1			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberda yaan Masyarakat	- Koordinasi Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberda yaan Masyarakat - Rakor Pokjanal Desa Siaga Kecamatan - Monev Pelaksanaan Desa siaga	
2			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		
3			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	- Koordinasi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat - Promosi kesehatan tentang PHBS	
4			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupa ten/Kota		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
5			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	- Koordinasi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - Bimbingan teknis Kader Posyandu Bidang Kesehatan - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Posyandu	

4.3 Penentuan indikator dan target kinerja penyelengaraan bidang urusan

Penentuan indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Bidang Urusan Kesehatan dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, lalu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang relevan.

IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah indikator yang mengukur pencapaian tujuan atau sasaran strategis utama organisasi, sering kali berfokus pada hasil akhir (outcome) sementara itu, IKK (Indikator Kinerja Kunci) lebih fokus pada aspek-aspek krusial dalam proses atau kegiatan yang menunjang pencapaian IKU, dan dapat berupa ukuran kualitatif maupun kuantitatif.

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat								Tujuan PD
1	Usia harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,89	76,14	76,34	76,64	77,09	77,34	IUP
2	Persentase BLUD Bidang Kesehatan yang mencapai target Indikator Nasional Mutu (INM) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selama 12 bulan	%	3.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	
II	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan								Sasaran PD
1	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	14,40	13,90	13,40	12,90	12,40	11,90	IUP
2	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	70,37	75,00	78,00	80,00	90,00	100,00	IUP
3	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	%	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	IUP
4	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	80	80,00	80,00	80,00	83,00	83,00	
5	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna	%	78,00	78,00	78,00	80,00	80,00	80,00	RIBK

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	%	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Permendagri 18 Tahun 2020
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Permendagri 18 Tahun 2020
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	Bidang Kesehatan Masyarakat	SPM
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	Bidang Kesehatan Masyarakat	SPM
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	Bidang Kesehatan Masyarakat	SPM
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Bidang Kesehatan Masyarakat	SPM
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Bidang Kesehatan Masyarakat	SPM
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Bidang Kesehatan Masyarakat	SPM
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Bidang Kesehatan Masyarakat	SPM
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	SPM
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	SPM

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	SPM
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	SPM
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	SPM
15	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	12.50	27,78	30.00	33.33	36.66	41.11	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	RIBK
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98.28	98.40	98.50	98.60	98.70	98.80	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	IUP,RIBK
17	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	90.00	90.31	90.63	90.94	91.25	91.56	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	IUP,RIBK
18	*Neglected Tropical Diseases* (NTDs)	%	85.00	92.00	96.20	100.00	100.00	100.00	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	RIBK
19	Angka Kematian Dengue	%	0.36	0.34	0.30	0.20	0.10	0.10	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	-
20	*Annual Parasite Incidence* (API)	per 1000 penduduk	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	-

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
21	Persentase Diabetes Melitus Terkendali	%	33.00	35.00	37.00	39.00	41.00	45.00	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	-
22	Insiden HIV	per 1000 penduduk	0.15	0.16	0.18	0.20	0.23	0.25	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	-
23	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	94.00	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	RIBK
24	Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	60.00	65.00	67.00	70.00	73.00	75.00	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	RIBK
25	Persentase Hipertensi terkendali	%	4.67	5.17	5.67	6.17	6.67	7.17	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	RIBK
26	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	Bidang Kesehatan Masyarakat	IUP, RIBK
27	Jumlah Kematian Balita	Kasus	91.00	86.00	81.00	80.00	79.00	78.00	Bidang Kesehatan Masyarakat	RIBK
28	Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	%	11.11	37.04	55.56	74.07	85.19	100.00	Bidang Kesehatan Masyarakat	RIBK
29	Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	%	75.00	77.00	79.00	81.00	83.00	85.00	Bidang Kesehatan Masyarakat	RIBK
30	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	44.00	55.00	65.00	75.00	80.00	80.00	Bidang Kesehatan Masyarakat	RIBK
31	Prevalensi Obesitas	%	21.70	21.60	21.50	21.40	21.30	21.20	Bidang Kesehatan Masyarakat	RIBK
32	Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	%	12.30	11.40	10.40	9.40	8.40	7.40	Bidang Kesehatan Masyarakat	RIBK

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
33	Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	%	0.00	1.00	1.50	1.70	2.00	2.50	Bidang Kesehatan Masyarakat	RIBK
	Prevalensi Wasting	%	5	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	Bidang Kesehatan Masyarakat	-
34	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	54.00	56.00	59.00	61.00	63.00	65.00	Sekretariat	RIBK
35	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi	per 1000 penduduk	3,22	5,3	5,3	5,4	5.50	5.60	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	RIBK
36	Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, serta Makanan yang Aman dan Bermutu	%	94.50	95.00	97.00	97.50	98.00	98.50	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	-
37	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	80.00	82.50	85.00	90.00	95.00	100.00	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	RIBK
38	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	40.00	42.00	45.00	47.00	48.00	50.00	Bidang Kesehatan Masyarakat	-
39	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi kelengkapan Sarana Prasarana Alat Kesehatan	%	70.00	70.00	75.00	75.00	75.00	75.00	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	-
40	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	83.00	85.00	88.00	92.00	95.00	96.00	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	RIBK
41	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	65	65	67	70	73	75	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	IUP, RIBK

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
42	Persentase pemanfatan ERM yang terintegrasi satu sehat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	47.71	80.00	83.00	86.00	90.00	95.00	Sekretariat	-
43	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Izin operasional	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	
44	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Memiliki Izin Praktik	Orang	3350.00	3400.00	3450.00	3500.00	3550.00	3600.00	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	
45	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	40,74	44,44	48,15	51,85	55,56	59,26	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	
46	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	
47	Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar Profesi	%	96,75	97	97,5	97,75	98	98,25	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	
48	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	77.50	80.00	82.50	85.00	87.50	90.00	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	
49	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dilakukan pembinaan sesuai standar	%	0	0	70	70	70	72	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	
50	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar	%	70.00	72.50	75.00	80.00	85.00	90.00	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
51	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	30.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	RIBK
52	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	80.00	82.50	85.00	87.50	90.00	90.00	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	
53	Prosentase Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajajan yang mendapatkan Label Pembinaan	%	60	62	62	66	70	74	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	
54	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	75.00	77.50	80.00	82.50	85.00	90.00	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	RIBK
55	Jumlah Pokjanal Desa Siaga di Tingkat Kecamatan yang aktif	Kecamatan	16	16	16	16	16	16	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	-
56	Jumlah Desa Sehat Utama dan Mandiri	Desa/ Kelurahan	383	384	395	405	414	424	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	-
57	Persentase Posyandu yang Menerapkan SPM Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	-
58	Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK	%	84	85	86	88	90	95	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
59	Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan;	%	90	92	94	96	100	100	Bidang Kesehatan Masyarakat	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025
60	Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil	%	80	82	85	88	90	95	Bidang Kesehatan Masyarakat	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025
61	Pemeriksaan Kehamilan 6 kali selama masa kehamilan	%	80	82	85	88	90	95	Bidang Kesehatan Masyarakat	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025
62	Praktik lnisiasi Menyusui Dini	%	50	55	60	65	75	80	Bidang Kesehatan Masyarakat	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025
63	Bayi usia < 6 bulan mendapatkan ASI Ekslusif	%	73	76	70	82	85	90	Bidang Kesehatan Masyarakat	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025
64	Anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping_ASI (MPASI) beragam	%	73	76	70	82	85	90	Bidang Kesehatan Masyarakat	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
65	Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat Asl	%	73	76	70	82	85	90	Bidang Kesehatan Masyarakat	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025
66	Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana gizi buruk	%	91	92	93	94	95	100	Bidang Kesehatan Masyarakat	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025
67	Anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	50	55	60	65	70	75	Bidang Kesehatan Masyarakat	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025
68	Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	%	65	70	75	80	85	90	Bidang Kesehatan Masyarakat	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025
69	Anak usia 0-23 bulan mendapatkan lmunisasi Rutin Lengkap	%	80	85	90	93	95	95	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025
70	Persentase anak usia 0- 59 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar	%	85	85	90	93	95	95	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
71	Anak usia 6-23 bu Ian mendapatkan obat cacing (POPM)	%	100	100	100	100	100	100	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025
72	Anak usia 24-59 bulan gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk	%	91	92	93	94	95	100	Bidang Kesehatan Masyarakat	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025
73	Anak usia 24-59 bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	50	55	60	65	70	75	Bidang Kesehatan Masyarakat	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025
74	Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	%	65	70	75	80	85	90	Bidang Kesehatan Masyarakat	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025
75	Anak usia 24-59 bulan yang terpantau kasus pneumonia	%	85	90	95	95	95	95	Bidang Kesehatan Masyarakat	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025
76	Persentase anak usia 24-59 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar	%	85	85	90	93	95	95	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
77	Anak usia 24-59 bulan mendapatkan obat cacing (POPM)	%	100	100	100	100	100	100	Bidang Kesehatan Masyarakat	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025
78	Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri	%	65	67	70	75	80	90	Bidang Kesehatan Masyarakat	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025
79	Skrining anemia terhadap Remaja Putri	%	75	77	80	83	85	90	Bidang Kesehatan Masyarakat	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025
80	Calon pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan	%	50	55	60	65	70	75	Bidang Kesehatan Masyarakat	Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025

BAB IV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun kedepan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo setiap tahunnya.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo setiap tahun.
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c. Kepala Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra.

b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

c. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

Bupati Purworejo,

Ttd

Yuli Hastuti

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo tahun periode 2021-2026 dan berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun periode 2021-2026, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo berkewajiban menyusun Renstra tahun periode 2025-2029.

Sesuai dengan pasal 13 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis selama 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan untuk kemudian disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau timbul sehingga diharapkan setiap Perangkat Daerah dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud suatu pelayanan prima.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan hasil suatu proses secara sistematis yang berkelanjutan dari serangkaian kegiatan yang berupa rencana tindakan yang mendasar selama kurun waktu 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi dan misi, menguraikan rincian daftar program dan kegiatan, serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan melalui penyusunan suatu laporan akuntabilitas kinerja sehingga diketahui keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan pasal 16 ayat (2) Permendagri Nomor 87 Tahun 2017 yaitu:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan Rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sesuai dengan pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Penyempurnaan Rancangan Awal Renstra dilakukan setelah tersusunnya perbaikan Rancangan Awal RPJMD.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, yang meliputi bidang perencanaan dan pengembangan, sumber daya air, bina marga, serta cipta karya dan tata ruang.

Penyusunan Renstra 2025–2029 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang juga akan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20025–2045.

Susunan Renstra 2025–2029 dimulai dengan pemaparan tentang kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; isu-isu strategis; serta program dan kegiatan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun yakni periode tahun 2025–2029.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD
   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo sebagai dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo. Renstra Perangkat Daerah menjabarkan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih, strategi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran serta indikator sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD. Selanjutnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Purworejo.
b. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
   Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah kabupaten, perlu dianalisis juga Renstra K/L dan Renstra Provinsi untuk mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi.
c. Hubungan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah
   Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah. Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang tercantum pada Renstra Perangkat Daerah dijabarkan secara rinci dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo yang disesuaikan

dengan kondisi setiap tahunnya. Renja Perangkat Daerah juga memuat capaian kinerja dari Perangkat Daerah sesuai target kinerja yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai tolok ukur pelayanan Perangkat Daerah setiap tahunnya.

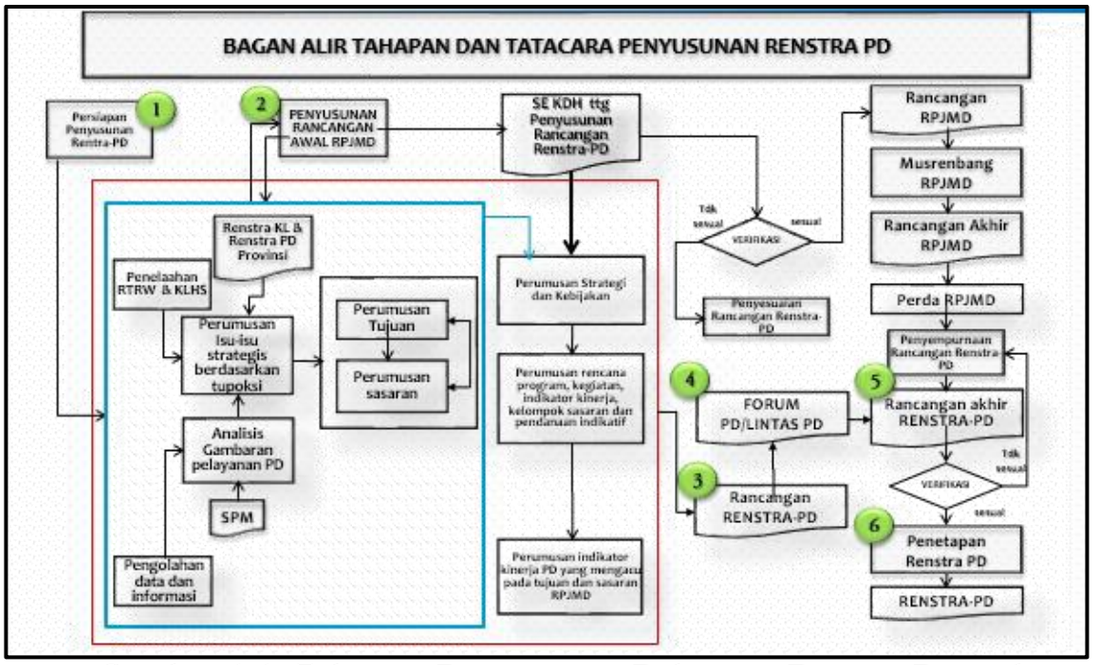

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo tahun 2025–2029 adalah:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 12 Seri D Nomor 6).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga tujuan dan sasaran dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dapat tercapai. Dalam penyusunannya tetap berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan, sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah.
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.

c. Menjadi instrument pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya) dan Kelompok Sasaran Layanan. Selain itu juga memuat Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan telaah dari Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah, rumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif, uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Khusus (IKK)

BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab penting dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta penataan ruang di daerah. Pelayanan yang diberikan oleh dinas ini mencakup berbagai aspek terkait pengelolaan infrastruktur fisik dan tata ruang yang mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di daerah. Gambaran dari pelayanan perangkat daerah dapat disajikan dalam data dan informasi pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah dalam hal ini urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Penyajian gambaran pelayanan ini dilengkapi dengan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, serta data pendukung lain yang relevan dengan kebutuhan perencanaan.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran umum atas capaian, serta analisis diagnostik guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun kendala dalam penyelenggaraan urusan. Fokus utama penyajian evaluasi kinerja diarahkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merepresentasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, data dan informasi yang disajikan baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun gambar akan dipaparkan secara naratif dengan menekankan pada makna dan kesimpulan dari data tersebut, bukan sekadar menjelaskan angka-angka yang tersaji.

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

   Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya dan bina konstruksi serta tata ruang.

2. Fungsi

   Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

   a. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air, cipta karya dan bina konstruksi, bina marga, serta tata ruang;
   b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air, cipta karya dan bina konstruksi, bina marga, serta tata ruang;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air, cipta karya dan bina konstruksi, bina marga, serta bidang tata ruang;
   d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPUPR; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

1. Kepala Dinas PUPR;
2. Sekretariat;
3. Bidang Sumber Daya Air;
4. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
5. Bidang Bina Marga;
6. Bidang Tata Ruang;
7. UPT;
8. Jabatan Fungsional.

Adapun tugas setiap bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Bupati diatas adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DPUPR. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

   a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
   b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
   c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
   d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR berkaitan dengan tugas dan fungsi.

   Sedangkan tugas dari setiap subbagian yang berada langsung dibawah Sekretariat adalah sebagai berikut:

   a. Subbagian Perencanaan

      Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapkan bahan perumusan dan pelaksanakan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi:

      a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
      b. menyusun perjanjian kinerja; dan
      c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

   b. Subbagian Keuangan

      Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi:

      a. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
      b. menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah; dan
      c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

   c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

      Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

      a. menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;

b. menyelenggarakan administrasi umum;
c. menyelenggarakan pengadaaan barang milik Daerah;
d. menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
g. menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan dan hukum; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

2. Bidang Sumber Daya Air
Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman Pantai pada wilayah Sungai dalam Daerah;
b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam Daerah;
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR berkaitan dengan tugas dan fungsi.

3. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi
Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem dan pengelolaan persampaahan regional, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, penataan bangunan gedung, dan pengembangan jasa konstruksi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
b. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Daerah;
c. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah;
d. penyelenggaraan bangunan Gedung di wilayah Daerah dan pemberian persetujuan bangunan Gedung;
e. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
f. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
g. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
h. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemenfaatan jasa konstruksi; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala DPUPR berkaitan dengan tugas dan fungsi.

4. Bidang Bina Marga
Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, dan penyelenggaraan jalan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah;

b. penyelenggaraan jalan Kabupaten;
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR terkait dengan tugas dan fungsi.

5. Bidang Tata Ruang
   Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan penataan ruang.
   Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:
   a. penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang;
   b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang;
   c. koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
   d. koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR sesuai dengan tugas dan fungsi.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
7. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dengan tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada DPUPR sesuai dengan wilayah kerja dan fungsi yang meliputi:
a. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
b. pelaksanaan pemeliharaan drainase;
c. pelaksanaan pengawasan bangunan dan tata ruang;
d. pelaksanaan operasi irigasi dan pemeliharaan irigasi;
e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan camat dan unit kerja terkait di tingkt kecamatan di wilayah kerjanya;
f. penyelenggaraan ketatausahaa UPT; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh keplaa DPUPR sesuai dengan tugas dan fungsi

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo terdiri dari:
1. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Purworejo, dengan wilayah kerja di Kecamatan Purworejo, Bayan, Banyuurip dan Kaligesing
2. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Kutoarjo, dengan wilayah kerja di Kecamatan Kutoarjo, Butuh dan Grabag
3. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Purwodadi dengan wilayah kerja di Kecamatan Purwodadi, Bagelen dan Ngombol
4. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Loano dengan wilayah kerja di Kecamatan Loano, Bener dan Gebang
5. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Kemiri dengan wilayah kerja di Kecamatan Kemiri, Pituruh, dan Bruno

Sedangkan untuk UPT yang tekait pelayanan Laboratorium dan Alat Berat diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Konstruksi dan Pengelokaan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang dalam penyelenggaraan layanan laboratorium konstruksi dan pengelolaan alat berat dan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat;
b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat;
c. pelaksanaan pengadaan peralatan laboratorium konstruksi dan alat berat;
d. pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, dan pengembangan peralatan laboratorium konstruksi dan alat berat;
e. pemungutan retribusi pemanfaatan laboratorium konstruksi dan alat berat;
f. pelaksanaan ketatausahaan;
g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk lebih jelasnya tentang struktur organisasi yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Bagan Organisasi berikut ini.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWOREJO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 121 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWOREJO

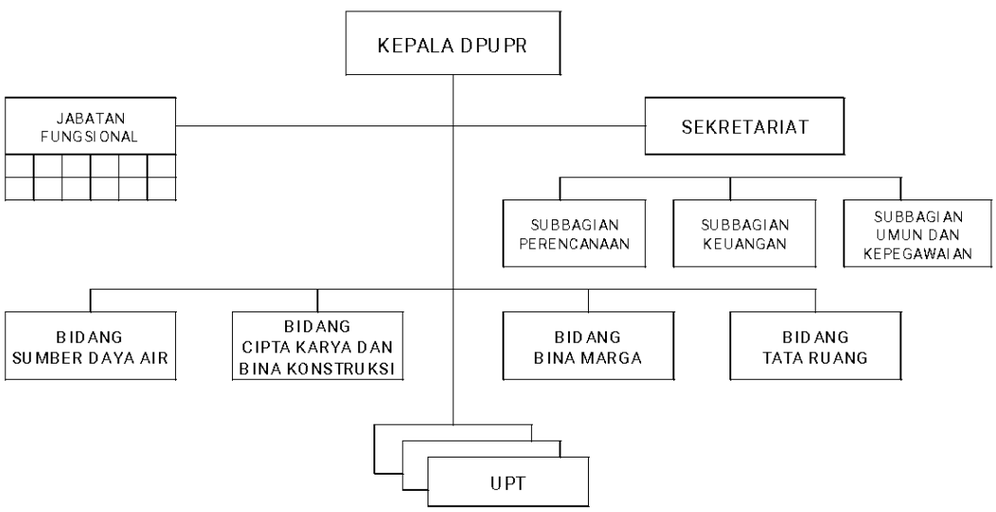

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWOREJO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 113 Tahun 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWOREJO

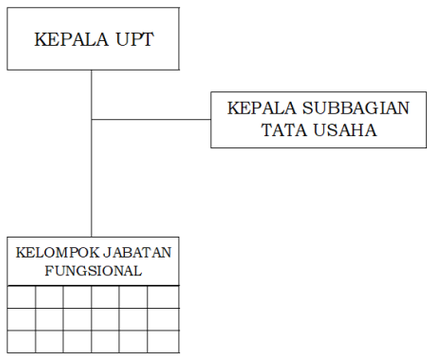

Gambar 2.2 Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

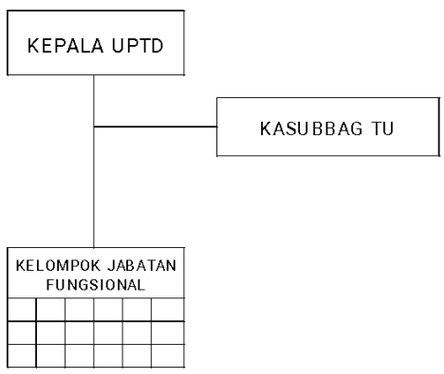

Gambar 2.3 Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium dan Pengelolaan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo tersebut, perlu didukung oleh sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sarana dan prasarana pendukung

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jabatan struktural dan fungsional yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Jabatan Struktural dan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo

No	Jabatan	PNS (orang)	PPPK (orang)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Eselon II.B (Kepala Dinas)	1		
2.	Eselon III.A (Sekretaris)	1		jabatan masih kosong
3.	Eselon III.B (Kepala Bidang)	4		
4.	Eselon IV.A (Kepala Subbag/ UPT)	9		2 jabatan Kepala UPT masih kosong
5.	Eselon IV.B (Kasubbag TU UPT)	6		2 jabatan masih kosong
6.	Jabatan Fungsional Umum	69	93	
7.	Jabatan Fungsional Tertentu	28	1	
Jumlah		118	94	

Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparat Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan formal, golongan/kepangkatan dan jabatan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
   Berdasarkan tingkat pendidikannya, sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	PNS (orang)	PPPK (orang)	Non-ASN (orang)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	S-2	8	-	
2.	S-1/D-IV	45	4	
3.	D-III	10	-	
4.	D-II	-	-	
5.	D-I	-	-	
6.	SMA/SMK	46	72	17
7.	SMP	4	-	
8.	SD	-	18	
JUMLAH		113	94	17
JUMLAH TOTAL		207		

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang
   Berdasarkan golongan/ruang, sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3
Rincian Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo berdasarkan golongan/ruang (khusus ASN)

Golongan	a	b	c	d	Jumlah (orang)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
I	-	-	-	-	-

Golongan	a	b	c	d	Jumlah (orang)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
II	3	3	7	12	25
III	37	32	2	11	82
IV	5	-	1	-	6
PPK-Gol. IX					4
PPK-Gol. V					72
PPK-Gol. I					18
JUMLAH					207

3. Jumlah pegawai pada masing-masing bagian/bidang/UPT berdasarkan jenis kelamin

   Jumlah pegawai pada masing-masing bagian/bidang/UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo pada Masing-masing Bagian/Bidang/UPT berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bagian/Bidang/UPT	PNS (orang)		PPPK (orang)		Non-ASN (orang)		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8*	*(9)*	*(10)*
1.	Sekretariat	12	4	2	8	8	1	22	13
		16		10		9		35	
2.	Bidang Sumber Daya Air	11	1	4	3			15	4
		12		7		0		19	
3.	Bidang Bina Marga	8	1	2	4			10	5
		9		6		0		15	
4.	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi	11	5	3	1			14	6
		16		4		0		20	
5.	Bidang Tata Ruang	7	1		2			7	3
		8		2		0		10	
6.	UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Purworejo	8		18	1	3		29	1
		8		19		3		30	
7.	UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigas Wilayah Kutoarjo	11		10		1		22	0
		11		10		1		22	
8.	UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigas Wilayah Purwodadi	8		7	2			15	2
		8		9		0		17	
9.	UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigas Wilayah Kemiri	10		7	1			17	1
		10		8		0		18	
10.	UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigas Wilayah Loano	6		9	1	3		18	1
		6		10		3		19	
11.	UPT-D Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat	7	2	9		1		17	2
		9		9		1		19	
JUMLAH		99	14	71	23	16	1	186	38
		113		94		17		224	
JUMLAH TOTAL		207							

Data diatas merupakan kondisi kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bulan Juli Tahun 2025. Jika dilihat dari tabel-tabel diatas, selain masih terdapat kekosongan jabatan pada beberapa jabatan struktural, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih memerlukan bantuan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga non-ASN dengan jumlah hampir sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)-nya.

Walaupun jumlah tenaga teknis sudah banyak, akan tetapi masih dibutuhkan cukup banyak tambahan tenaga teknis terutama untuk tenaga fungsional tertentu mengingat selain melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu sendiri, seringkali juga ada permintaan pendampingan teknis dari Perangkat Daerah lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Untuk tenaga administrasi secara jumlah sudah mencukupi akan tetapi tetap diperlukan pelatihan-pelatihan begitu pula dengan tenaga teknis agar kedepannya dapat mengikuti perkembangan jaman dan mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berasal dari beberapa sumber pendanaan, yaitu:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digunakan untuk mendukung pembiayaan operasional, program, dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
2) Dana Alokasi Umum (DAU), yang digunakan untuk mendukung pembiayaan operasional, program, dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang terdiri dari:
   a. DAK Fisik Bidang Irigasi, yang digunakan untuk peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan
   b. DAK Fisik Bidang Jalan, yang digunakan untuk rekonstruksi, dan rehabilitasi jalan
   c. DAK Fisik Bidang Air Minum, yang digunakan untuk peningkatan dan perluasan jaringan SPAM
   d. DAK Fisik Bidang Sanitasi, yang digunakan untuk pembangunan jamban beserta septic tank untuk masyarakat.
4) Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, yang digunakan untuk penanganan jalan di Kabupaten Purworejo

Secara umum, alokasi anggaran dari keempat sumber tersebut setiap tahunnya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan prioritas pembangunan daerah. Ketersediaan sumber daya keuangan tersebut telah memberikan dukungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya terutama untuk penyediaan infrastruktur.

Selain ketersediaan anggaran tersebut, pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan juga cukup penting, sehingga untuk periode Renstra 2025–2029 diharapkan bahwa sumber dana tersebut dapat dikelola untuk lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

3. Sarana dan Prasarana

Selain kondisi Sumber Daya Manusia yang telah disebutkan sebelumnya, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung dengan sarana dan prasarana untuk memperlancar semua kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo. Daftar sarana dan prasarana yang ada dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Daftar Aset yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo

NO	NAMA BARANG	KUANTITAS
(1)	*(2)*	*(3)*
A.	REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A: TANAH	
	Rawa	52.266,00 m2
	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	5.113,45 m2
	Tanah Bangunan Rumah Penjaga	31.493,41 m2
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7.612,00 m2
	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	2.558,00 m2
	Tanah Jalan	31.400,00 m2
	Tanah Jembatan	4.529,00 m2
	Tanah Persil Lainnya	35.062,00 m2
	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	4.518.952,90 m2
	Tanah Untuk Jalan Desa	2.815,00 m2
	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	1.552.450,87 m2
	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.357,00 m2
B.	REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B: PERALATAN DAN MESIN	
	Dump Truck	3 buah
	Asbuton Dryer	2 buah
	Macadam Roller/Three Whell Roller	6 buah
	Tandam Roller	2 buah
	Vibration Roller	5 buah
	Tyre Roller	1 buah
	Compacting Equipment Lain-lain	2 buah
	Portable Generating Set	8 buah
	Portable Water Pump	25 buah
	Stationary Water Pump	4 buah
	Station Wagon	6 buah
	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2 buah
	Truck + Attachhment	4 buah
	Pick Up	2 buah
	Sepeda Motor	58 buah
	Gerobak Tarik	1 buah
	Mesin Gergaji	6 buah
	Mesin Bor Tangan	5 buah
	Mesin Las Listrik	5 buah
	Perkakas bengkel service lainnya	1 buah
	Tool Cabinet Set	4 buah
	Gergaji	1 buah
	Palu	1 buah
	Alat Laboratorium Mekanika Tanah	1 buah
	Perkakas Bengkel Kerja Lainnya	60 buah
	Global Positioning System	7 buah
	ALat Ukur Universal Lain-lain	1 buah
	Scanner	5 buah
	Alat Penyaring	1 buah
	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	5 buah

NO	NAMA BARANG	KUANTITAS
(1)	*(2)*	*(3)*
	Alat Pengukur Curah Hujan	5 buah
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1 buah
	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1 buah
	Lemari Besi	26 buah
	Rak Besi/Metal	43 buah
	Rak Kayu	24 buah
	Filing Cabinet Besi	64 buah
	Brandkas	6 buah
	Lemari Kaca	1 buah
	Lemari kayu	39 buah
	Papan Tulis	2 buah
	White Board	9 buah
	Mesin Absensi	11 buah
	Overhead Projektor	4 buah
	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	11 buah
	Alat timbangan/biara lainnya (dst)	1 buah
	Alat peraga praktek	1 buah
	Meja Kerja Kayu	4 buah
	Kursi Besi/Metal	22 buah
	Kursi Kayu	129 buah
	Sice	4 buah
	Meja Rapat	25 buah
	Alat Uji Kuat Lentur	1 buah
	Meja Telepon	1 buah
	Meja Tambahan	6 buah
	Meja Panjang	13 buah
	Meja Kartu	1 buah
	Kursi Rapat	8 buah
	Kursi Tamu	1 buah
	Lemari Sorok	3 buah
	Meja 1/2 Biro	180 buah
	Kursi Putar	18 buah
	Kursi Biasa	82 buah
	Kursi Lipat	299 buah
	Meja Komputer	3 buah
	Sofa	3 buah
	Moubiler Lainnya	9 buah
	Jam Elektronik	6 buah
	Mesin Potong Rumput	27 buah
	A.C.	25 buah
	Kipas Angin	4 buah
	Televisi	3 buah
	Sound System	1 buah
	Unit Power Supply	5 buah
	Camera Digital	1 buah
	Camera Video	4 buah
	Tustel	9 buah
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	8 buah
	P.C Unit	37 buah
	Lap Top	48 buah
	Note Book	9 buah
	Harddisk Eksternal	2 buah
	Printer	46 buah
	Personal Komputer lainnya	2 buah
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 buah
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 buah
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 buah
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3 buah
	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	4 buah
	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	3 buah
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	14 buah

NO	NAMA BARANG	KUANTITAS
(1)	*(2)*	*(3)*
	Buffet Kaca	1 buah
	LCD Projector/Infocus	6 buah
	Video Tape Recorder Stationer	1 buah
	Layar Film	5 buah
	Alti Meter	1 buah
	Alat Studio Pemetaan lainnya	1 buah
	Wireless Amplifier	6 buah
	Drill Machine	1 buah
	Basic Cylinder Capping Set	1 buah
	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain	1 buah
	Universal Testing Machine	1 buah
	Hammer Mill	3 buah
	Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain)	1 buah
	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	1 buah
	Water Current Meter	1 buah
	Crawler Excavator + Attachment	1 buah
	Gergaji Chain Saw	6 buah
	GPS	3 buah
	Kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	15 buah
	Kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1 buah
	Kendaraan tak bermotor penumpang lainnya (dst)	1 buah
	Kendaraan Toilet	10 buah
	Mobil Tinja	2 buah
	Papan Pengumuman	20 buah
	Proctor Standard	1 buah
	Sepeda	5 buah
	Stamper	9 buah
	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1 buah
	Universal Test Machine (Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi)	1 buah
C.	REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C: GEDUNG DAN BANGUNAN	
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7 Unit
	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	4 Unit
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1 Unit
	Bangunan Bengkel Permanen	1 Unit
	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1 Unit
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 Unit
	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1 Unit
	Gedung Garasi/Pool Permanen	1 Unit
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	5 Unit
	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	13 Unit
	Rumah Negara Gol I Lain-lain	40 Unit
	Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya	1 Unit
D.	REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D: JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
	Jalan Kabupaten Lain-lain	14 Unit
	Jalan Desa	194 Unit
	Jalan Khusus Lain-lain	10 Unit
	Jalan Khusus Lainnya	3 Unit
	Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain	1 Unit
	Bendung	52 Unit
	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	15 Unit
	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	137 Unit
	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)	3 Unit
	Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	3 Unit
	Bangunan Bagi	194 Unit
	Bangunan Bagi dan Sadap	2 Unit

NO	NAMA BARANG	KUANTITAS
(1)	*(2)*	*(3)*
	Bangunan Sadap (Bangunan Pelengkap Irigasi)	376 Unit
	Bangunan Got Miring	5 Unit
	Bangunan Terjun (Bangunan Pelengkap Irigasi)	65 Unit
	Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Irigasi)	37 Unit
	Bangunan Syphon (Bangunan Pelengkap Irigasi)	32 Unit
	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	37 Unit
	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai)	1 Unit
	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Irigasi)	31 Unit
	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pasang Surut)	1 Unit
	Bangunan Mandi Hewan	1 Unit
	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	1 Unit
	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	2 Unit
	Bangunan Pelimpah Banjir	13 Unit
	Bangunan Pelimpah Sampah	27 Unit
	Bangunan Pemasukan/Pembuang	2 Unit
	Bangunan Pembuang Air Bersih Lain-lain	1 Unit
	Bangunan Pemecah Gelombang	18 Unit
	Bangunan Pengaman Pengembangan Lain-lain	10 Unit
	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	11 Unit
	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	3 Unit
	Bangunan Pengeluaran/Pintu	1 Unit
	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	47 Unit
	Bangunan Pengukur	108 Unit
	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi)	5 Unit
	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Pasang Surut)	2 Unit
	Saluran Pembuang	1 Unit
	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Pasang Surut)	19 Unit
	Saluran Drainase	44 Unit
	Pintu Pengatur Banjir	1 Unit
	Instalasi Air Kotor Lain-lain	3 Unit
	Jaringan Pembawa Lain-lain	3 Unit
	Jaringan Cabang Distribusi lain-lain	1 Unit
	Dam Konsolidasi	2 Unit
	Instalasi pengolahan sampah lainnya	1 Unit
	Jalan Kabupaten Arteri	237 Unit
	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	1 Unit
	Jembatan Pada Jalan Desa	3 Unit
	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	432 Unit
	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	1 Unit
	Sumur Resapan	1 Unit
	Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan sungai/pantai)	36 Unit
E.	REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E: ASET TETAP LAINNYA	
	Buku Umum Lain-lain	8 buah
	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	1 buah
	Arsitektur	1 buah
	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain	3 buah
	Tanaman Keras	9.016 pohon
F.	REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F: KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	
	Bangunan Bagi	11 unit
	Bangunan Bagi Dan Sadap (Bangunan Pelengkap Irigasi)	9 unit
	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	1 unit
	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1 unit
	Jalan Kabupaten Arteri	1 unit
	Jalan Khusus Lainnya	1 unit

NO	NAMA BARANG	KUANTITAS
(1)	*(2)*	*(3)*
	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	3 unit
	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Pasang Surut)	1 unit

Dengan sarana dan prasarana yg tersedia, masih diperlukan cukup banyak sarana prasarana pendukung kerja pegawai seperti komputer/laptop, printer, proyektor dan lain-lain. Selain itu diperlukan juga beberapa peralatan kerja yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti peralatan pendukung pemetaan dan peralatan laboratorium dan alat berat untuk mendukung akreditasi Laboratorium Konstruksi DPUPR. Selama ini pelayanan Laboratorium Konstruksi masih menggunakan peralatan yang ada dan manual yang usianya sudah tua, serta belum terakreditasi.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi perencanaan teknis dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan tata ruang, serta sumber daya air. Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dari tabel capaian kinerja sasaran Renstra Tahun 2021-2026 berikut ini.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025*)	2026	2021	2022	2023	2024	2025*)	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
	INDIKATOR TUJUAN:																					
1	Indeks Pertanaman (IP)				218,50	219,00	219,50	220,00	227,05	221,00	218,50	219,20	219,55	226,95	226,95	NA	100,00	100,09	100,02	103,16	99,96	0,00
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)				55,75	58,00	62,33	89,61	89,70	89,76	85,00	89,35	89,42	90,95	90,95	NA	152,45	154,06	143,46	101,50	101,39	0,00
3	Persentase peningkatan kualitas pelayanan inftastruktur bidang pekerjaan umum	V			80,11	81,42	82,92	86,06	87,65	87,95	80,20	82,43	79,46	65,95	65,95	NA	100,12	101,24	95,82	76,63	75,24	0,00
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				81,32	81,35	81,45	81,60	81,75	82,00	81,32	84,19	85,71	84,71	84,71	NA	100,00	103,48	105,23	103,81	103,61	0,00
	INDIKATOR SASARAN:																					
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)				66,25	67,00	67,75	68,50	69,25	70,00	66,26	70,03	70,09	68,06	68,06	NA	100,01	104,52	103,45	99,36	98,28	0,00
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)				55,75	58,00	62,33	89,61	89,70	89,76	85,00	89,35	89,42	90,95	90,95	NA	152,45	154,06	143,46	101,50	101,39	0,00
3	Persentase layanan air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat	V	V		60,72	61,42	62,12	66,33	66,63	66,82	61,01	63,24	65,84	66,46	66,46	NA	100,47	102,96	105,99	100,19	99,74	0,00
4	Rasio Kepatuhan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten		V		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	Persentase pelayanan jasa konstruksi tingkat kabupaten		V		79,80	83,33	87,63	94,95	100,00	100,00	79,80	84,73	88,94	100,00	100,00	NA	100,00	101,67	101,50	105,32	100,00	0,00
6	Tingkat kemantapan jalan kabupaten		V		79,91	80,93	81,95	82,96	83,98	85,00	80,01	81,75	63,05	63,28	63,28	NA	100,12	101,01	76,94	76,27	75,35	0,00
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				81,32	81,35	81,45	81,60	81,75	82,00	81,32	84,19	85,71	84,71	84,71	NA	100,00	103,48	105,23	103,81	103,61	0,00
	INDIKATOR PROGRAM:																					
1	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik		V		63,62	64,82	66,02	67,22	68,42	69,62	63,64	67,02	67,17	67,37	67,37	NA	100,03	103,39	101,74	100,23	98,47	0,00
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang				55,75	58,00	62,33	89,61	89,70	89,76	85,00	89,35	89,42	90,95	90,95	NA	152,45	154,06	143,46	101,50	101,39	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025*)	2026	2021	2022	2023	2024	2025*)	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
	terhadap Rencana Tata ruang (RTR)																					
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	V	V		94,83	96,30	97,77	99,24	100,00	100,00	95,45	96,86	97,97	99,34	99,34	NA	100,65	100,58	100,20	100,10	99,34	0,00
4	Presentase ketersediaan sarana prasarana persampahan				2,63	3,04	3,44	4,25	4,25	4,66	2,63	3,44	4,25	4,25	4,25	NA	100,00	113,33	123,53	100,00	100,00	0,00
5	Persentase Rumah Tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	V	V		84,70	84,93	85,16	95,50	95,64	95,79	84,94	89,43	95,32	95,79	95,79	NA	100,28	105,29	111,93	100,30	100,15	0,00
6	Persentase bangunan milik daerah dengan kondisi baik		V		71,67	73,75	77,92	81,25	84,58	100,00	73,33	74,58	75,83	79,58	79,58	NA	102,33	101,13	97,33	97,95	94,09	0,00
7	Rasio rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) yang disusun				0,00	12,50	37,50	62,50	87,50	100,00	0,00	12,50	37,50	100,00	100,00	NA	0,00	100,00	100,00	160,00	114,29	0,00
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		V		72,73	75,00	79,55	93,18	100,00	100,00	72,73	79,19	91,82	100,00	100,00	NA	100,00	105,58	115,43	107,32	100,00	0,00
9	Rasio ketersediaan informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota		V		66,67	75,00	83,33	91,67	100,00	100,00	66,67	75,00	75,00	100,00	100,00	NA	100,00	100,00	90,00	109,09	100,00	0,00
10	Persentase Badan Usaha yang tertib dalam usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan kabupaten		V		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
11	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat		V		28,79	29,79	31,23	32,67	34,11	35,55	28,27	28,70	29,06	30,52	30,52	NA	98,19	96,33	93,04	93,41	89,47	0,00
12	Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik sedang		V		79,91	80,93	81,95	82,96	83,98	85,00	80,01	81,75	63,05	63,28	63,28	NA	100,12	101,01	76,94	76,27	75,35	0,00
13	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Keterangan:
*) sampai dengan triwulan II Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan untuk capaian indikator kinerja perangkat daerah tahun 2021-2024 sebagian besar tercapai (untuk tahun 2025, realisasi baru sampai triwulan II saja). Walaupun sebagian besar target kinerja sudah tercapai, terdapat beberapa indikator yang belum tercapai antara lain:

1. Persentase peningkatan kualitas pelayanan inftastruktur bidang pekerjaan umum (indikator tujuan)
2. Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) (indikator sasaran)
3. Tingkat kemantapan jalan kabupaten (indikator sasaran)
4. Persentase bangunan milik daerah dengan kondisi baik (indikator program)
5. Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (indikator program)
6. Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik sedang (indikator program)

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah dijelaskan diatas tentunya didukung dengan pendanaan yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun 2021-2026 yang disajikan dalam data anggaran dan realisasi pendanaan pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo
Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2021: (tanpa anggaran gaji ASN) - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	4.453.752.553,6	10.581.090.820	11.024.345.351	12.116.130.041	12.444.693.294	12.509.812.020	13.841.597.168	21.616.324.858	14.468.328.597	13.740.581.877	15.980.670.223	20.747.524.754	310,79	204,29	131,24	113,41	128,41	165,85	30,98%	12,84%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 2021: Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	29.311.692.118,0	30.269.000.000	21.819.000.000	23.968.000.000	24.615.000.000	24.558.000.000	23.937.242.914	25.208.200.640	4.160.743.720	11.418.949.300	9.706.152.398	5.100.327.200	81,66	83,28	19,07	47,64	39,43	20,77	-2,47%	6,76%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	dilaksanakan oleh DINPERKIMTAN	17.254.000.000	12.438.000.000	13.663.000.000	14.031.000.000	13.999.000.000	-	9.695.807.000	11.900.557.000	14.540.682.700	308.583.000	1.372.503.000	0	56,19	95,68	106,42	2,20	9,80	-3,90%	72,96%
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	dilaksanakan oleh DLHP	600.000.000	433.000.000	475.000.000	488.000.000	487.000.000	-	-	366.691.000	-	-	-	0	-	84,69	-	-	-	-3,90%	0

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	dilaksanakan oleh DINPERKIMTAN	6.250.000.000	4.505.000.000	4.949.000.000	5.083.000.000	5.071.000.000	-	4.287.415.000	4.576.783.000	5.684.441.000	7.106.284.425	7.256.376.400	0	68,60	101,59	114,86	139,80	143,10	-3,90%	14,52%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 2021: Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase	54.332.707.995,0	3.674.000.000	2.648.000.000	2.909.000.000	2.988.000.000	2.981.000.000	2.650.256.223	4.014.200.000	875.000.000	945.360.000	993.001.000	997.073.600	4,88	109,26	33,04	32,50	33,23	33,45	-21,77%	-2,65%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 2021: Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	22.973.566.461,0	35.878.000.000	25.863.000.000	28.410.000.000	29.176.000.000	29.109.000.000	16.488.656.487	34.010.391.504	12.821.165.668	187.500.980	7.604.579.800	666.467.400	71,77	94,79	49,57	0,66	26,06	2,29	8,11%	761,99%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 2021: Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	419.762.880,0	200.000.000	144.000.000	158.000.000	163.000.000	162.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	-		-	100,00	138,89	-	-	-	-13,62%	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 2021: - Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis	380.668.796.088,0	175.000.000.000	174.242.000.000	192.497.000.000	194.983.000.000	184.012.000.000	133.247.344.437	154.921.543.968	55.291.169.964	83.794.526.384	80.843.271.800	61.981.355.764	35,00	88,53	31,73	43,53	41,46	33,68	-9,66%	-4,67%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 2021: Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi	14.569.241.981,0	120.000.000	87.000.000	95.000.000	98.000.000	97.000.000	128.660.000	89.017.868	163.938.400	206.362.100	152.598.000	109.518.200	0,88	74,18	188,43	217,22	155,71	112,91	-23,07%	4,99%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2021: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	591.865.661,0	733.000.000	528.000.000	580.000.000	596.000.000	595.000.000	719.531.477	627.376.340	544.434.000	541.156.500	664.870.400	742.581.800	121,57	85,59	103,11	93,30	111,56	124,80	1,66%	1,58%

Dari penjabaran penganggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rasio anggaran jika dibandingkan dengan Renstra sebagian besar kurang dari 100% yang menunjukkan bahwa pendanaan sebagian besar lebih kecil dari rencana penganggaran yang tercantum pada dokumen Renstra periode 2021-2026. Sedangkan jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan, walaupun dalam dokumen renstra sebagian besar negatif akan tetapi untuk realisasi pendanaan sebagian besar positif yang dapat diartikan bahwa realisasi pendanaan rata-rata meningkat setiap tahunnya untuk masing-masing program.

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, merupakan penggabungan dari 5 program di tahun 2021. Pendanaan cenderung naik dari tahun ke tahun, terutama dari tahun 2021 ke tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur kegiatan dimana untuk gaji ASN yang semula terpisah pada belanja pegawai, di tahun 2022 dan seterusnya dimasukkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kenaikan nilai pendanaan dari tahun 2022-2026 selain adanya penambahan gaji ASN di tahun 2025, juga adanya kebutuhan untuk penyediaan sarana prasarana kantor pendukung kinerja.

Pendanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), merupakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasipada tahun 2021, selama tahun 2021-2026 mengalami fluktuasi dengan pendanaan maksimal di tahun 2021-2022 dikarenakan adanya perpanjangan program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) yang merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mulai tahun 2022 yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan. Pendanaan untuk kedua program ini cenderung naik turun selama tahun 2022-2026 dikarenakan sebagian besar pendanaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi yang besarannya menyesuaikan alokasi dan prioritas dari pusat. Kedua program ini merupakan program pendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga senantiasa mendapat perhatian dari pusat.

Untuk Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, selama periode 5 tahun, pelaksanaan program hanya di tahun 2023 dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya berwenang dalam pembangunan fisik saja sedangkan kebutuhan, kesiapan lahan, kesiapan penerima manfaat serta pengelolaan selanjutnya menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan. Pelaksanan program ini menjadi terhambat sebagian besar dikarenakan kurangnya kesiapan pengelola sampah nantinya setelah bangunan TPS3R dibangun nantinya.

Pendanaan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase di tahun 2021) cenderung mengalami penurunandari tahun

ke tahun dikarenakan dari tahun 2023, kemampuan pendanaan kabupaten berkurang sehingga penanganan drainase diprioritaskan pada opersai dan pemeliharaan drainase saja untuk mempertahankan kondisi baik saluran drainase di perkotaan dan mengurangi genangan akibat air hujan.

Untuk Program Penataan Bangunan Gedung (pada tahun 2021 berupa Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung), alokasi pendanaan cukup signifikan pada tahun 2022 dengan adanya pembangunan beberapa gedung perangkat daerah dan kelurahan. Pembangunan terhadap gedung perkantoran ini juga dilaksanakan di tahun 2021, 2022 dan 2025. Sebagian gedung yang dibangun merupakan gedung kelurahan dan kecamatan yang sudah tidak layak dan menjadi prioritas kabupaten karena langsung berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat.

Pendanaan untuk Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya (pada tahun 2021 merupaakn Program Penataan Bangunan dan Lingkungan) hanya dialokasikan pada tahun 2022 dan 2023 dengan menyusun dokumen Naskah Akademik Rencana Tata bangunan dan Lingkungan. Untuk tahun-tahun selanjutnya, penyusunan dokumen ini tidak dilaksanakan dikarenakan jika mengacu pada Undang-undang Cipta Kerja, persyaratan dasar perijinan ada 3 yaitu KKPR, PBG dan Persetujuan Lingkungan. Sesuai PP 21/2021 saat ini dalam penerbitan persyaratan tersebut diarahkan untuk sesuai dengan RTRW/RDTR. Dilihat daari skalanya RDTR dengan skala 1:5000 adalah instrumen perijnan yang paling rinci untuk dijadikan pedoman dalam penerbitan KKPR, PBG dan Persetujuan Lingkungan. Sehingga dengan berbagai aturan yang berlaku saat ini, pelaksanaan perijinan cukup dilayani dengan RDTR dan tidak diperlukan RTBL.

Program Penyelenggaraan Jalan merupakan gabungan dari Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis di tahun 2021. Program ini merupakan salah satu program yang pendanaannya cukup besar baik pada perencanaan di dokumen Renstra maupun pada realisasi pendanaan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, rata-rata pertumbuhan realisasi penganggaran untuk program ini bernilai negatif. Selain dikarenakan kemampuan pendanaan daerah yang fluktuatif juga sebagian pendanaan untuk Program Penyelenggaraan Jalan bersumber dari pusat melalui DAK Fisik Bidang Jalan dan dari provinsi melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Alokasi kedua pendanaan ini tidak dapat diprediksi besarannya setiap tahun, tergantung dari prioritas pusat dan provinsi. Untuk pendanaan dari APBD Kabupaten tetap menempati porsi terbesar dari anggaran yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikarenakan adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah serta memperkecil kesenjangan infrastruktur dengan daerah sekitanya.

Untuk Program Pengembangan Jasa Konstruksi (Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi pada tahun 2021), pendanaan cukup fluktuatif juga tergantung dengan kebutuhan terutama untuk kebutuhan pelatihan tenaga konstruksi dan keperluan penyediaan data informasi jasa konstruksi dimana perlu melakukan survei lapangan dan pengelolaan data.

Pendanaan untuk Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah pada tahun 2021)

cenderung sama setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kegiatan dalam program ini cenderung rutin dilaksanakan setiap tahunnya mulai dari perencanaan ruang termasuk sosialisasi kepada masyarakat, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan hasil analisa terhadap kedua tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian indikator tujuan, sasaran dan program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu adanya dukungan dari pendanaan yang cukup mengingat sebagian besar merupakan kegiatan fisik yang membutuhkan pendanaan cukup besar.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, selain dilihat dari capaian indikator dan efektivitas pendanaan, juga perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang selama tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Indikator Tujuan (IT)						
	Indeks Pertanaman (IP)	218,00	218,50	219,20	219,55	226,95	Indikator Indeks Pertanaman (IP) merupakan indikator penting dalam sektor pertanian, dalam hal ini DPUPR mendukung dari segi penyediaan infrastruktur dan pengelolaan irigasi. Selama peiode 2020-2024, nilai IP terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan guna meningkatkan produktivitas dan produksi pangan nasional semakin meningkat yang salah satunya dengan terpenihinya ketersediaan air irigasi
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	51,67	85,00	89,35	89,42	90,95	Indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) menunjukkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Purworejo terhadap rencana pengembangan wilayah yang telah direncanakan dalam RTR. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan nilanya menunjukkan semakin sadarnya masyarakat untuk mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah
	Persentase peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur bidang pekerjaan umum	78,59	80,20	82,43	79,46	65,95	Indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur bidang pekerjaan umum terdiri dari kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum, penyediaan dan pengelolaan air limbah, penyediaan prasarana persampahan, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan jalan, serta penyelenggaraan jasa konstruksi. Kinerja indikator ini dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan, hal ini sesuai dengan komitmen untuk peningkatkan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur akan tetapi pada tahun 2023-2024 mengalami penurunan dikarenakan adanya SK Jalan Kabupaten baru dimana terdapat upgrade dan downgrade jalan menjadi kabupaten akan tetapi kondisi fisiknya rusak

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,29	81,32	84,19	85,71	84,71	Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPUPR. Selama tahun 2020-2024, nilai IKM selalu mengalami peningkatan yang dapat diasumsikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh DPUPR senantiasa lebih baik dari tahun ke tahun walaupun di tahun 2024 mengalami penurunan. Beberapa hal yang berpengaruh terutama adanya perubahan Keputusan Bupati atas tarif retribusi penyewaan alat dan biaya pengujian labortorium. Hal ini akan menjadi evaluasi layanan kedepannya dan jika memungkinkan perlu mengadakan sosialisasi agar masyarakat atau penerima layanan dapat memahami perubahan tarif tersebut
2	Indikator Sasaran Perangkat Daerah						
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	65,50	66,26	70,03	70,09	68,06	Indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) merupakan indikator sasaran DPUPR yang menunjukkan kinerja dari sistem irigasi dari aspek prasarana fisik, produktivitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi, kondisi kelembagaan P3A. Nilai kinerja mulai 2020-2023 mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa kinerja penyediaan infrastruktur irigasi beserta pengelolaannya semakin meningkat sesuai dengan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung ketahanan pangan,akan tetapi di tahun 2024 mengalami penurunan yang disebabkan adanya efisiensi anggaran untuk penanganan infrastruktur irigasi dan adanya kerusakan saluran irigasi akibat bencana
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	51,67	85,00	89,35	89,42	90,95	Indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) menunjukkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Purworejo terhadap rencana pengembangan wilayah yang telah direncanakan dalam RTR. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan nilanya menunjukkan semakin sadarnya masyarakat untuk mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
	Persentase layanan air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat	59,95	61,01	63,24	65,84	66,46	Indikator Persentase layanan air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat merupakan indikator sasaran yang menunjukkan kinerja layanan penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi (air limbah dan persampahan). Jika dilihat dari persentase kinerjanya selalu meningkat selama tahun 2020-2024 yang menunjukkan bahwa penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi di Kabupaten Purworejo dapat tercapai sesuai dengat target yang direncanakan. Hal ini didukung dengan adanya komintmen dari pemerintah pusat maupun provinsi dengan pendanaan untuk penyediaan SPAM, pelayanan air limbah maupun penyediaan prasarana persampahan
	Rasio Kepatuhan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator Rasio Kepatuhan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten merupakan indikator sasaran yang menunjukkan kepatuhan masyarakat terhadap perijinan dalam mendirikan bangunan gedung. Selama tahun 2020-2024, persentase dapat dipertahankan sebesar 100% yang dapat diartikan seluruh pengajuan PBG yang telah memenuhi syarat dapat dikeluarkan ijin pembangunannya
	Persentase pelayanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	75,51	79,80	84,73	88,94	100,00	Indikator Persentase pelayanan jasa konstruksi tingkat kabupaten merupakan indikator sasaran yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi yang terdiri dari pelatihan tenaga trampil konstruksi, penyediaan data dan pengawasan jasa konstruksi. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan dan tercapai maksimal di tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini didukung dengan adanya perubahan UU Cipta Kerja yang mengatur beberapa kewenangan kabupaten menjadi kewenangan pusat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	78,89	80,01	81,75	63,05	63,28	Indikator Tingkat kemantapan jalan kabupaten merupakan indikator sasaran yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan jalan dan pengelolaan drainase jalan di perkotaan. Pada tahun 2020-2021, kinerja indikator ini mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2023 menurun secara signifikan dikarenakan adanya SK Jalan Kabupaten baru dimana terdapat upgrade dan downgrade jalan menjadi kabupaten akan tetapi kondisi fisiknya rusak. Pada tahun 2024, kondisi jalan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun masih jauh dari target yang sudah ditetapkan.
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,29	81,32	84,19	85,71	84,71	Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPUPR. Selama tahun 2020-2024, nilai IKM selalu mengalami peningkatan yang dapat diasumsikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh DPUPR senantiasa lebih baik dari tahun ke tahun walaupun di tahun 2024 mengalami penurunan. Beberapa hal yang berpengaruh terutama adanya perubahan Keputusan Bupati atas tarif retribusi penyewaan alat dan biaya pengujian labortorium. Hal ini akan menjadi evaluasi layanan kedepannya dan jika memungkinkan perlu mengadakan sosialisasi agar masyarakat atau penerima layanan dapat memahami perubahan tarif tersebut
3	Indikator Program (IP)						
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	62,43	63,64	67,02	67,17	67,37	Indikator Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik merupakan indikator program yang menunjukkan kondisi fisik dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan pengambilan, bangunan pengatur, bangunan pembagi dan saluran irigasi. Kinerja indikator ini dari tahun 2020 sampai tahun 2024 selalu mengalami peningkatan yang dapat diartikan bahwa kondisi fisik jaringan irigasi dapat dipertahankan bahkan meningkat baik itu melalui kegiatan rehabilitasi, peningkatan maupun pemeliharaan jaringan irigasi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata ruang (RTR)	51,67	85,00	89,35	89,42	90,95	Indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) menunjukkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Purworejo terhadap rencana pengembangan wilayah yang telah direncanakan dalam RTR. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan nilanya menunjukkan semakin sadarnya masyarakat untuk mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	92,51	95,45	96,86	97,97	99,34	Indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak merupakan indikator yang menggambarkan ketersediaan layanan dasar air minum pada masyarakat. Arti layak disini berupa ketersediaan masyarakat akan air minum walaupun mungkin ada yang belum menerus sepanjang tahun. Pada tahun 2024, kinerja sudah mencapai 99,34% yang dapat diartikan bahwa hampir seluruh masyarakat sudah dapat mengakses air minum untuk keperluan sehari-hari
	Presentase ketersediaan sarana prasarana persampahan	2,63	2,63	3,44	4,25	4,25	Indikator Presentase ketersediaan sarana prasarana persampahan menunjukan persentase ketersediaan prasarana pengolah limbah di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Purworejo guna mengurangi timbunan sampah di TPA. Walaupun dari 2020-2024 kinerja terus meningkat akan tetapi sebagian besar didukung oleh pendanaan lain selain di DPUPR seperti APBD Provinsi dan DAK. Capian kinerja tidak dapat naik secara signifikan dikarenakan pengelolaannya akan diserahkan kepada masyarakat sehingga sebelum membangun prasarana pengelahan sampah tersebut perlu kesiapan pengelolanya terlebih dahulu agar nantinya tidak mangkrak
	Persentase Rumah Tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	84,70	84,94	89,43	95,32	95,79	Indikator Persentase Rumah Tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik merupakan indikator program terkait penyediaan layanan air limbah di Kabupaten Purworejo. Dari kurun waktu tahun 2020-2024, persentase cenderung meningkat dan pada tahun 2024 tercapai 95,79% yang menunjukkan hampir seluruh rumah tangga sudah memiliki akses terhadap layanan limbah domestik. Peningkatan capaian kinerja ini didukung dengan adanya pendanaan yang cukup signifikan dari pusat dan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
							kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
	Persentase bangunan milik daerah dengan kondisi baik	70,42	73,33	74,58	75,83	79,58	Indikator Persentase bangunan milik daerah dengan kondisi baik merupakan indikator program yang menunjukkan kondisi bangunan milik daerah yang menjadi kewenangan pengawasannya oleh DPUPR. Kondisi bangunan milik daerah semakin lama smakin meningkat akan tetapi kurang signifikan karena sebagian besar hanya dilakukan rehabilitasi untuk mempertahankan kondisi agar layak dan nyaman untuk kerja
	Rasio rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) yang disusun	0,00	0,00	12,50	37,50	100,00	Indikator Rasio rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) yang disusun merupakan indikator kinerja program yang menunjukkan tentang rencana penyusunan dokumen tata bangunan dan lingkungan (RTBL) sebagai salah satu dokumen lanjutan dalam penataan ruang di tingkat kabupaten. Selama kurun waktu 2020-2024 cenderung meningkat terutama di tahun 2024 dengan telah diselesaikannya penyusunan dokumen RTBL
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	68,18	72,73	79,19	91,82	100,00	Indikator Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi merupakan indikator program yang menunjukkan jumlah tenaga operator/teknisi/analis yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat di Kabupaten Purworejo. Persentase cenderung meningkat disesuaikan dengan rencana jumlah tenaga yang akan dilatih setiap tahunnya selama 5 tahun
	Rasio ketersediaan informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	58,33	66,67	75,00	75,00	100,00	Indikator Rasio ketersediaan informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota menunjukkan ketersediaan dokumen informasi jasa konstruksi yang disusun setiap tahunnya. Jumlah dokumen yang tersedia semakin meningkat setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa seluruh informasi jasa konstruksi di tingkat kabupaten sebanyak 9 jenis dokumen telah tersedia dan terupdate

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
	Persentase Badan Usaha yang tertib dalam usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator Persentase Badan Usaha yang tertib dalam usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan kabupaten menunjukkan tingkat ketertiban Badan Usaha terhadap pelaksanaan konstruksi sehingga kecelakaan dalam pekerjaan konstruksi dapat dihindari. Selama tahun 2020-2024, kinerja selalu tercapai 100% yang menunjukkan bahwa tidak ada pekerjaan konstruksi/proyek di Kabupaten Purworejo yang mengalami kecelakaan konstruksi dalam pelaksanaannya
	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	28,21	28,27	28,70	29,06	30,52	Indikator Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat menunjukkan kondisi dari saluran pada sistem drainase jalan di daerah perkotaan. Walaupun dalam kurun waktu 2020-2024 selalu mengalami peningkatan akan tetapi masih kurang dari target yang direncanakan sehingga kedepannya masih perlu peningkatan penanganan drainase sampai ke hilir saluran
	Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik sedang	78,89	80,01	81,75	63,05	63,28	Indikator Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik sedang merupakan indikator program yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan jalan. Pada tahun 2020-2021, kinerja indikator ini mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2023 menurun secara signifikan dikarenakan adanya SK Jalan Kabupaten baru dimana terdapat upgrade dan downgrade jalan menjadi kabupaten akan tetapi kondisi fisiknya rusak. Pada tahun 2024, kondisi jalan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun masih jauh dari target yang sudah ditetapkan
	Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan Indikator Program yang mengukur tingkat keterlaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan penunjang telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai rencana setiap tahunnya. Hasil ini mencerminkan kinerja yang optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
4	SPM						
	Pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari (%)	92,51	95,5	96,86	97,97	99,34	Indikator SPM untuk Pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari merupakan indikator yang menggambarkan ketersediaan layanan dasar air minum pada masyarakat. Arti layak disini berupa ketersediaan masyarakat akan air minum walaupun mungkin ada yang belum menerus sepanjang tahun. Pada tahun 2024, kinerja sudah mencapai 99,34% yang dapat diartikan bahwa hampir seluruh masyarakat sudah dapat mengakses air minum untuk keperluan sehari-hari
	Penyediaan unit pengolahan setempat (%)	85,01	84,7	84,94	95,32	95,79	Indikator Penyediaan unit pengolahan setempat merupakan indikator program terkait penyediaan layanan air limbah di Kabupaten Purworejo. Dari kurun waktu tahun 2020-2024, persentase cenderung meningkat dan pada tahun 2024 tercapai 95,79% yang menunjukkan hampir seluruh rumah tangga sudah memiliki akses terhadap layanan limbah domestik. Peningkatan capaian kinerja ini didukung dengan adanya pendanaan yang cukup signifikan dari pusat dan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
5	Permendagri 18 2020						
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	26,18	22,68	65,66	67,73	Indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi menunjukkan kinerja sistem irigasi dalam melayani kebutuhan air irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dengan luas areal irigasi maksimal 1.000 Ha. Capaian kinerja setiap tahun dapat meningkat yang menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah dalam mengelola dan menjaga fungsi jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	-	95,45	97,74	97,97	99,34	Indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota menggambarkan ketersediaan layanan dasar air minum pada masyarakat. Arti layak disini berupa ketersediaan masyarakat akan air minum walaupun mungkin ada yang belum menerus sepanjang tahun. Pada tahun 2024, kinerja sudah mencapai 99,34% yang dapat diartikan bahwa hampir seluruh masyarakat sudah dapat mengakses air minum untuk keperluan sehari-hari
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	91,63	89,45	95,32	95,79	Indikator Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik merupakan indikator kinerja terkait penyediaan layanan air limbah di Kabupaten Purworejo. Dari kurun waktu tahun 2020-2024, persentase cenderung meningkat dan pada tahun 2024 tercapai 95,79% yang menunjukkan hampir seluruh rumah tangga sudah memiliki akses terhadap layanan limbah domestik. Peningkatan capaian kinerja ini didukung dengan adanya pendanaan yang cukup signifikan dari pusat dan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	-	100	100	100	100	Indikator Rasio kepatuhan IMB kab/ kota merupakan indikator kinerja yang menunjukkan kepatuhan masyarakat terhadap perijinan dalam mendirikan bangunan gedung. Selama tahun 2020-2024, persentase dapat dipertahankan sebesar 100% yang dapat diartikan seluruh pengajuan PBG yang telah memenuhi syarat dapat dikeluarkan ijin pembangunannya
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	-	80,01	81,75	63,05	63,28	Indikator Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota menunjukkan kinerja penyelenggaraan jalan. Pada tahun 2020-2021, kinerja indikator ini mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2023 menurun secara signifikan dikarenakan adanya SK Jalan Kabupaten baru dimana terdapat upgrade dan downgrade jalan menjadi kabupaten akan tetapi kondisi fisiknya rusak. Pada tahun 2024, kondisi jalan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun masih jauh dari target yang sudah ditetapkan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	100	79,19	107,45	103,77	Indikator Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi merupakan indikator program yang menunjukkan jumlah tenaga operator/teknisi/analis yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat di Kabupaten Purworejo. Persentase cenderung meningkat disesuaikan dengan rencana jumlah tenaga yang dibutuhkan setiap tahun dengan asumsi tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga ahli/terampil pada pekerjaan di tahun yang sama
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	-	100	100	100	100	Indikator Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi menunjukkan tingkat ketertiban Badan Usaha terhadap pelaksanaan konstruksi sehingga kecelakaan dalam pekerjaan konstruksi dapat dihindari. Selama tahun 2020-2024, kinerja selalu tercapai 100% yang menunjukkan bahwa tidak ada pekerjaan konstruksi/proyek di Kabupaten Purworejo yang mengalami kecelakaan konstruksi dalam pelaksanaannya

Penjelasan dari masing-masing capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

a. Kinerja Jalan dan Jembatan

Kondisi infrastruktur prasarana jalan dan jembatan di Kabupaten Purworejo di tahun 2020 sampai dengan 2024 sebenarnya menunjukkan kondisi yang lebih baik, akan tetapi untuk capaian kinerja program dan sasarannya mengalami penurunan terutama mulai tahun 2023 dikarenakan adanya Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/497/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Purworejo. Dalam Keputusan tersebut, terdapat *upgrade* dan downgrade jalan kabupaten. *Upgrade* jalan dari jalan poros desa menjadi jalan kabupaten maupun jalan kabupaten menjadi jalan provinsi dan jalan nasional. Sedangkan untuk *downgrade* jalan kabupaten dari jalan kabupaten menjadi jalan poros kelurahan maupun jalan provinsi dan jalan nasional menjadi jalan kabupaten. Secara total panjang kabupaten terdapat penurunan akan tetapi secara kondisi jalan sangat menurun drastis dikarenakan kondisi jalan kabupaten yang di*upgrade* maupun di*downgrade* dalam kondisi baik, sedangkan kondisi jalan yang di*upgrade* maupun di*downgrade* menjadi jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat, terutama untuk jalan poros desa. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian kineja kondisi jalan.

Adapun tingkat perkembangan kondisi jalan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Kondisi Fisik Jalan Kabupaten Purworejo
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Jalan Kondisi Baik (KM)	248	227,17	214,09	146,822	119,94
2	Jalan Kondisi Sedang (KM)	358,88	409,26	414,77	335,196	298,78
3	Jalan Kondisi Rusak (KM)	101,6	78,02	97,74	160,112	224,68
4	Jalan Kondisi Rusak Berat (KM)	60,77	54,8	42,65	115,664	114,39
JUMLAH		769,250	769,250	769,250	757,794	757,790

Sedangkan untuk kondisi infrastruktur prasarana jembatan di Kabupaten Purworejo di tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung stabil, hal ini dikarenakan untuk survey kondisi jembatan dilakukan secara rutin agar menjamin bahwa seluruh jembatan yang ada di ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik dan bisa dilalui kendaraan dan mengantisipasi adanya jembatan yang roboh sehingga menyebabkan terdapat daerah yang terisolir dan menghambat distribusi barang dan jasa. Untuk jembatan dengan rusak berat, jika masih memungkinkan sementara penanganannya dengan pemeliharaan rutin dan berkala jembatan. Pada tahun 2023 terdapat penambahan jumlah jembatan kabupaten yaitu di ruas jalan kabupaten yang di*upgrade* dari jalan poros desa.

Adapun kondisi jembatan dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Kondisi Fisik Jembatan Kabupaten Purworejo
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Jembatan Kondisi Baik-Rusak Ringan (Unit)	420	420	420	420	421
2	Jembatan Kondisi Rusak Berat-Runtuh (Unit)	6	6	6	7	6
JUMLAH		426	426	426	427	427

b. Kinerja Pengelolaan Sistem Drainase

Capaian kinerja indikator program Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat selalu mengalami peningkatan setiap tahun akan tetapi masih dibawah target yang ditetapkan dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Penambahan tingkat kerusakan di bagian hilir (belum tertanganinya kerusakan saluran drainase pada daerah hilir) serta kapasitas salurannya yang masih kecil sehingga aliran air di bagian hulu terhambat (menimbulkan genangan di perkotaan)
- Saluran drainase perkotaan berfungsi ganda, selain sebagai saluran drainase jalan juga berfungsi sebagai saluran pembuangan limbah rumah tangga masyarakat sekitar (drainase permukiman) sehingga menimbulkan tumpukan sedimen yang berlebihan di saluran drainase (mengurangi kapasitas tampung saluran)

Peningkatan panjang penanganan maupun kondisi saluran drainase dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11
Penanganan Drainase di Kabupaten Purworejo
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Panjang saluran drainase yang tertangani (Meter)	484	150	1.206	1.553	2.812
2	Panjang saluran drainase dengan kondisi baik (Meter)	16.533	16.683	17.889	19.442	22.254

c. Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air

i). Prasarana Infrastruktur Irigasi

Total areal oncoran untuk seluruh Daerah Irigasi (DI) tercatat sebesar ± 31.657 Ha. Prasarana infrastruktur pengairan di Kabupaten Purworejo sebanyak 250 Daerah Irigasi yang terdiri dari :

- Jaringan irigasi teknis = 20 DI
- Jaringan irigasi semi teknis = 26 DI
- Jaringan irigasi sederhana = 204 DI
- Jumlah bangunan air = 4.029 bangunan
- Jumlah bendung = 233 bendung
- Panjang saluran Irigasi = 533.410 Km

Daerah Irigasi tersebut terbagi dalam 3 (tiga) Daerah Pengaliran Sungai (DPS), yaitu :

- DPS Bogowonto mencakup 27 DI
- DPS Cokroyasan mencakup 15 DI

- DPS Wawar mencakup 11 DI

ii). Sumber Air Irigasi

Potensi air Kabupaten Purworejo berasal dari air permukaan (sungai) dan air tanah. Terdapat beberapa sungai dan anak sungai yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu:

- DAS Bogowonto terdiri dari 1 (satu) sungai induk panjang: 57,750 Km dan 33 anak sungai sepanjang 200,89 Km dan 5 (lima) mata air.
- DAS Cokroyasan terdiri dari 1 (satu) sungai induk panjang 40,740 Km dan 13 (tiga belas) anak sungai, 4 (empat) avour, dan 12 (dua belas) drainase alam sepanjang158,15 Km.
- DAS Wawar terdiri dari 1 (satu) sungai induk dengan panjang 51,050 Km dan 35 (tiga puluh lima) anak sungai, dan 12 (dua belas) drainase alam sepanjang 173,80 Km.

iii). Ketersediaan Air Irigasi

Pada dasarnya ketersediaan air irigasi di bangunan pengambilan (bendung) masih dalam batas yang cukup, meskipun debit sungai dari DAS yang ada cenderung menurun dari tahun ke tahun. Namun demikian ketersedian air irigasi di bendung tidak otomatis akan mencukupi kebutuhan di tingkat petak-petak tersier. Perlu diketahui bahwa infrastruktur irigasi di Kabupaten Purworejo rata-rata dalam kondisi sedang dan rusak, sehingga faktor kehilangan air di saluran pembawa cukup besar.

Kondisi yang demikian menyebabkan terjadinya defisit di beberapa DI. Pada Daerah Irigasi Sudagaran terjadi defisit air selama 4 (empat) bulan. Untuk Daerah irigasi Rebug, Loning, Kragilan, dan Kedung putri defisit terjadi pada bulan Oktober dan November.

Daerah irigasi yang dapat dianggap tercukupi kebutuhan airnya adalah meliputi: Daerah Irigasi Penungkulan dan Guntur, sedangkan untuk Daerah Irigasi Kedunggupit Kulon dan Kedunggupit Wetan pada dasarnya juga mengalami defisit air, namun karena memperoleh suplesi dari induk Wadas Lintang Timur, maka kedua Daerah Irigasi tersebut tidak mengalami kekurangan air.

iv). Kondisi Daerah Irigasi

Dari 250 Daerah Irigasi ada 49 yang masuk dalam kategori kondisi baik (nilai kondisi > 80% berfungsi). Dari 250 DI, 38 DI (66,04 %) masuk dalam kategori sedang (nilai kondisi 80 – 60 %), dan 133 DI (30,19 %) kondisi rusak (nilai kondisi 60 – 40 %).

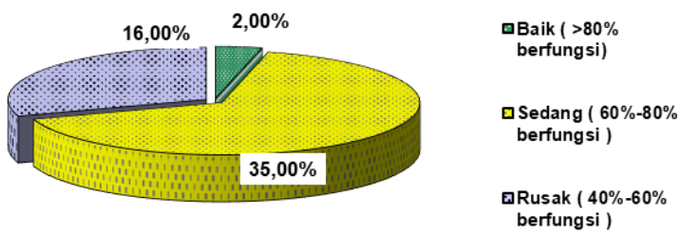

Gambar 2.4 Jumlah DI menurut kondisi

- Bangunan Utama

Dari 55 bangunan utama berupa bendung tetap, maupun pengambilan bebas yang ada tercatat sebanyak 57 bangunan utama masuk dalam kategori kondisi baik, 38 kondisi sedang, 114 dalam kondisi rusak, dan 11 dalam kondisi rusak berat.

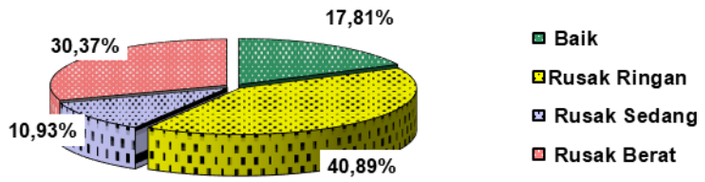

Gambar 2.5 Jumlah Bangunan Utama menurut kondisi

- Saluran Pembawa
  Menurut kelompok DI dari 250 DI yang ada tercatat 72 DI saluran pembawanya (primer dan sekunder) masuk dalam kategori sedang, 141 kondisi rusak, dan 9 DI kondisi rusak berat.

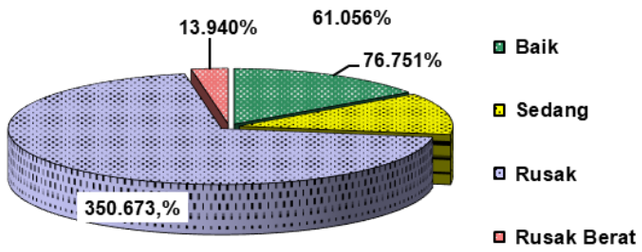

Gambar 2.6 Panjang Saluran menurut kondisi

- Bangunan pada Saluran Pembawa
  Menurut kelompok DI dari 250 DI yang baik ada tercatat 81 DI bangunan pada saluran pembawanya (primer dan sekunder) masuk dalam kategori sedang, 131 kondisi rusak, dan 8 DI bangunan pada saluran pembawanya dalam kondisi rusak berat.

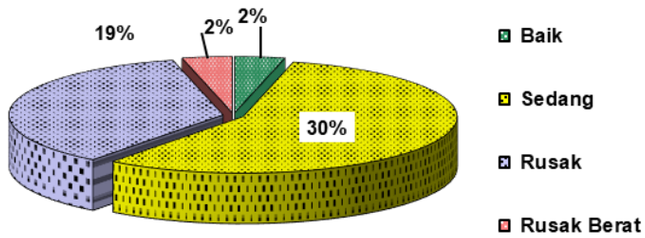

Gambar 2.7 Jumlah Bangunan pada Saluran Pembawa menurut kondisi

- Saluran Pembuang dan Bangunan pada Saluran Pembuang
  Secara umum kondisi saluran pembuang dan bangunan pada saluran pembuang yang ada di seluruh (250 DI) di Kabupaten Purworejo masuk dalam kategori rusak. Beberapa kondisi DI saluran pembuangnya sedang, tetapi secara mayoritas dapat dikatakan rusak.

d. Kinerja Sistem Penyediaan Air Minum

Kinerja Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Purworejo setiap tahun cenderung meningkat dan sudah mencapai target yang ditetapkan. Seiring dengan peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas SDM yang nantinya akan menjadi pengelola SPAM tersebut. Kedepannya,

penyediaan air minum ditingkatnya tidak hanya secara kuantitasnya akan tetapi secara kualitas, yang selama ini akses air minum layak saja menjadi akses air minum aman.

Kondisi penyediaan infrastruktur SPAM di Kabupaten Purworejo dan pengelolanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12
Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum di Kabupaten Purworejo
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Perpipaan (SR)	69.794	74.207	77.037	80.425	88.419
2	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Bukan Perpipaan (SR)	131.922	133.899	191.067	189.531	188.038
3	Jumlah Rumah Tangga Perkotaan yang terlayani PDAM (SR)	NA	NA	29.585	30.505	32.717
4	Jumlah lembaga pengelola SPAM seluruh Kabupaten (Lembaga)	204	224	230	234	238
5	Jumlah lembaga pengelola SPAM yang telah dibina (Lembaga)	0	0	118	134	172

e. Kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah

Kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Purworejo setiap tahun juga meningkat sebagaimana yang terlihat pada tabel 2.12 dibawah ini. Mulai awal tahun 2023, pembangunan dan pengolahan infrastruktur air limbah lebih difokuskan untuk rumah tangga individu/setempat. Seiring dengan pembangunan infrastrukturnya, SDM pada lembaga pengelola sanitasi juga perlu dibina walaupun baru dimulai Tahun 2024, diharapkan kedepannya akan lebih banyak lembaga yang dibina oleh pemerintah agar meningkat kinerjanya.

Tabel 2.13
Penyediaan dan Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Purworejo
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Jumlah Rumah Tangga dengan pengolahan air limbah setempat (KK)	0	520	570	1.325	2.821
2	Jumlah Rumah Tangga dengan pengolahan air limbah komunal (KK)	2.899	2.899	3.542	3.542	3.542
3	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh layanan sedot WC dalam setahun (Rumah Tangga)	144	201	315	424	552
4	Jumlah lembaga pengelola Air Limbah seluruh Kabupaten (lembaga)	79	89	102	118	132

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
5	Jumlah lembaga pengelola Air Limbah yang telah dibina (lembaga)	0	0	0	0	30

f. Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Kinerja penyelenggaraan bangunan Gedung di Kabupaten Purworejo diukur dengan pengecekan kondisi bangunan geudng negara milik daerah yang telah diinventarisasi. Kinerjanya selama tahun 2020-2024 cenderung meningkat walaupun belum sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini salah satunya disebabkan pembangunan Gedung Pemerintah kurang menjadi prioritas Pemerintah Daerah. Pembangunan hanya dilakukan di beberapa kelurahan yang memang kondisinya sudah tidak layak dan karena memang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi prioritas. Untuk bangunan gedung yang lain, sebagian besar hanya dilakukan rehabilitasi atau pemeliharaan ringan untuk mempertahankan kondisi agar layak.

Selain terkait kondisi bangunan gedung, kinerja penyelenggaraan bangunan gedung juga diukur dengan kepatuhan persetujuan bangunan gedung. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, capaian kinerja selalu 100% yang menunjukkan bahwa bangunan persetujuan bangunan gedung (PBG) yang dikeluarkan selalu sesuai dengan peruntukannya. Capaian ini didukung dengan tingkat kesadaran dari masyarakat akan legalitas perizinan setiap akan melaksanakan pembangunan maupun renovasi bangunan.

Kinerja penyelenggaraan bsngunan gedung dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Purworejo
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Jumlah bangunan gedung negara milik daerah dengan kondisi Baik (Unit)	169	176	179	182	191
2	Jumlah seluruh bangunan gedung negara milik daerah (Unit)	240	240	240	240	240
3	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dikeluarkan (Buah)	Masih IMB	Masih IMB	39	229	365

g. Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Purworejo diukur dengan 3 komponen, yaitu pelatihan terhadap tenaga kerja konstruksi, penyediaan informasi jasa konstruksi dan pengawasan jasa konstruksi. Untuk pelatihan tenaga konstruksi, setiap tahun selalu diagendakan bekerjasama dengan beberapa lembaga pelatihan dan diikuti secara umum oleh masyarakat. Sedangkan untuk penyediaan jasa informasi jasa konstruksi, pada awal tahun perencanaan direncanakan sebanyak 12 data akan tetapi dengan dikeluarkannya Undang-undang Cipta Kerja pada Tahun 2023, sebagian kewenangan ditarik pusat sehingga data informasi

jasa konstruksi yang harus disediakan di tingkat Kabupaten menjadi 9 yang terdisi dari:

1) data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota
2) data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN
3) data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala
4) data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota
5) data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.
6) data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis
7) data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota
8) data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
9) data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya

Untuk pengawasan terhadap proyek yang dilaksanakan di Kabupaten Purworejo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait klaim kecelakaan konstruksi yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Selama kurun waktu tahun 2020-2024, capaian kinerja selalu 100% yang diartikan bahwa tidak terdapat kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasan. Secara umum, kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten Purworejo
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat (Orang)	150	155	175	202	220
2	Jumlah data dan informasi jasa konstruksi yang ada (Dokumen)	7	8	9	9	9
3	Jumlah data dan informasi jasa konstruksi yang seharusnya ada (Dokumen)	12	12	12	12	9
4	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (Paket)	80	100	142	94	66

h. Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang

Komponen kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Akan tetapi di periode tahun 2020-2024, pengukuran kinerja penataan ruang diukur dengan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana tata Ruang (RTR) dalam hal ini dihitung dengan jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang sesuai dibanding dengan jumlah KKPR yang dikeluarkan. Data yang ada dimulai dari tahun 2022 dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya masih berupa Izin Kesesuaian Tata Ruang (IKTR). Capaian kinerja cenderung meningkat yang didukung dengan kesadaran masyarakat akan legalitas dalam pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang yang direncanakan.

Tabel 2.16
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Purworejo
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Jumlah KKPR yang sesuai (Buah)	-	-	277	575	794
2	Jumlah KKPR yang dikeluarkan (Buah)	-	-	310	643	873

2.1.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen perencanaan yang relevan, antara lain Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan dengan memperhatikan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada periode 2020–2024, dapat diidentifikasi beberapa poin penting yang perlu mendapat perhatian untuk perencanaan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada periode selanjutnya. Beberapa poin penting tersebut antara lain:

1. Isu strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-245 antara lain:
    a. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan lingkungan sosial masyarakat,
    b. Menurunnya kualitas lingkungan hidup,
    c. Tingginya risiko bencana,
    d. Belum terpadunya infrastruktur wilayah,
    e. Belum optimalnya produktivitas dan kondisi inklusivitas perekonomian daerah,
    f. Tata kelola pemerintahan yang belum agile, adaptif, dan kolaboratif
2. Isu Strategis Daerah dalam RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 antara lain:
    a. Rencana pembangunan double track jalan kereta api Purworejo-Kroya,
    b. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan (jalan tol),
    c. Keberadaan Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA),
    d. Rencana pembangunan Jalan lingkar Timur,

e. Pengembangan kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB),
f. Pembangunan Bendungan Bener.

3. Isu strategis Daerah dalam KLHS RPJMD yaitu:
   a. Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia,
   b. Distribusi kesejahteraan yang belum merata dan inklusif,
   c. Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata,
   d. Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
   e. Tingginya risiko bencana dan dampak perubahan iklim, dan
   f. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi.

Dari hasil telaah terhadap beberapa isu strategis yang menjadi tantangan dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo, dapat ditentukan sejumlah tantangan dan peluang yang akan mempengaruhi arah pengembangan pelayanan pada periode 2025–2029.Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pelaksanaan lima tahun mendatang berdasarkan masing-masing bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, diuraikan di bawah ini:

Tantangan:

1. Semakin menurunnya kualitas air karena banyaknya pencemaran air
2. Sistem pengolahan limbah terpusat yang masih konvensional dan sudah melebihi kapasitas
3. Kualitas jalan kabupaten/kota banyak yang rusak/berlubang karena beban kendaraan berlebih
4. Intensitas bencana alam yang cukup tinggi yang menimbulkan kerusakan infrastruktur
5. Perubahan iklim yang tidak menentu sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan air dan mengganggu pelaksanaan kegiatan di lapangan (rendahnya kualitas pekerjaan)
6. Masih kurangnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumber daya air
7. Potensi konflik antar pengguna air yang cukup besar
8. Rusaknya daerah tangkapan air, sehingga mengurangi inflow air yang masuk ke waduk/embung/bendung dan mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya air
9. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang tanpa menyebabkan degradasi lingkungan
10. Masih lemahnya pengawasan penerapan standar teknis bangunan gedung
11. Rendahnnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang
12. Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang (izin dan pengawasan)
13. Alih fungsi lahan pertanian yang kurang terkendali
14. Daya saing pelaku usaha konstruksi lokal masih rendah
15. Keterbatasan tenaga kerja konstruksi bersertifikat di daerah
16. Ketergantungan dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari pusat dan provinsi

Peluang:

1. Dukungan program dari pusat terhadap akses air minum oleh Masyarakat

2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya akses air minum sehat
3. Adanya program percepatan sanitasi dari pusat
4. Peluang kerjasama antara daerah dan swasta dalam pengelolaan limbah
5. Dukungan regulasi melalui OSS dan KKPR untuk percepatan perizinan
6. Penerapan standar bangunan tahan gempa, ramah lingkungan, dan inklusif
7. Keterlibatan P3A/GP3A (kelembagaan petani) dalam operasi & pemeliharaan
8. Dukungan program ketahanan pangan nasional
9. Adanya transformasi digital berupa pemanfaatan GIS, geospasial, dan sistem OSS berbasis tata ruang
10. Peningkatan daya saing jasa konstruksi melalui sertifikasi tenaga kerja.
11. Dukungan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
12. Tersedianya bahan material lokal
13. Adanya potensi penambahan sumber daya air dengan dibangunnya Bendungan Bener
14. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan Kabupaten/kota lain dan instansi vertikal.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencakup berbagai pihak yang menjadi fokus layanan dan programnya, berdasarkan rencana strategis (Renstra) dari berbagai daerah di Indonesia. DPUPR bertanggung jawab atas infrastruktur publik, pengelolaan sumber daya air, irigasi, jalan, jembatan, drainase, air minum, sanitasi, serta penataan ruang wilayah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa menjalin kerjasama dengan berbagai instansi maupun unsur masyarakat. Kerjasama yang dimaksud berupa koordinasi dalam mendukung pelaksanaan program maupun berbentuk layanan kepada masyarakat.

Kelompok sasaran layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

1. Masyarakat umum
   Masyarakat disini yang dimaksudkan adalah masyarakat yang memanfaatkan infrastruktur bidang pekerjaan umum (meliputi jalan, jembatan, drainase, air minum, sanitasi dan bangunan gedung) serta masyarakat umum yang menggunakan layanan (KKPR, PBG, sedot tinja, penyewaan WC portabel, laboratorium pengujian bahan konstruksi dan penyewaan alat berat)
2. Organisasi Masyarakat
   - Irigasi: P3A, GP3A, IP3A, KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan)
   - Air minum dan sanitasi: Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KP-SPAM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sanitasi Lingkungan
3. Pelaku Usaha merupakan badan usaha yang menerima atau memanfaatkan layanan antara lain layanan KKPR dan PBG serta penyedia jasa konstruksi terkait informasi jasa konstruksi serta pengujian laboratorium bahan konstruksi
4. Instansi vertikal berupa koordinasi data dan informasi terkait urusan antara lain:

- Irigasi: BBWS Serayu Opak Kementerian PU; Dinas Pusdataru Provinsi Jateng; Balai PSDA Probolo;
- Air minum dan sanitasi: Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kementerian PU; Dinas BMCK Provinsi Jateng;
- Bangunan gedung (PBG): DPMPTSP
- Jasa konstruksi: Balai Jasa Konstruksi Kemeterian PU; Dinas BMCK Provinsi Jateng; BPJS Ketenagakerjaan
- Tata ruang: BPN, BIG, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kementerian PU; Dinas Pusdataru Provinsi Jateng
- Jalan: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Kementerian PU; Dinas BMCK Provinsi Jateng

5. Instansi tingkat Pemda Kabupaten Purworejo antara lain: Bapperida, DKPP, DLHP, Dinas Kesehatan Daerah, DLHP, DINDUKCAPIL, DINSOSDALDUKKB, DPPPAPMD, Satpol PP dan PDAM.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga berperan dalam koordinasi terkait tata ruang dengan menjadi Sekretariat Forum Penataan Ruang serta koordinasi terkait irigasi dengan menjadi Sekretariat Komisi Irigasi (KOMIR).

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo 5 tahun terakhir ini telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada subbab ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM ataupun RPJMD Tahun 2021-2026. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan. Hasil identifikasi permasalahan diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.17
Pemetaan Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	*(2)*	*(3)*
Rendahnya persentase jalan dalam kondisi mantap	Kurangnya kegiatan peningkatan/rehabilitasi jalan	Banyaknya peningkatan jalan/jembatan yang bukan merupakan kewenangan kabupaten
		Semakin mahalnya biaya konstruksi jalan/jembatan
		Prioritas penanganan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan
	Kurang terpeliharanya jalan/jembatan	Penanganan pemeliharaan jalan/jembatan tidak sebanding dengan panjang jalan
		Kondisi eksisting Kabupaten Purworejo yang secara geografis rawan bencana (bencana longsor, banjir dll)
		Kurang tersedianya bangunan pelengkap jalan/jembatan (talud, drainase dan gorong-gorong)
		Kurangnya pengendalian pemanfaatan bangunan di sekitar jalan
	Kurangnya pengendalian terhadap kendaraan bermuatan	Masih banyaknya kendaraan Over Load Over Dimension (ODOL) yang melintas
		Belum berfungsinya aturan kelas jalan
		Belum adanya jalan khusus angkutan dengan beban berat
Sistem Drainase Perkotaan belum dapat berfungsi optimal	Kurangnya kegiatan peningkatan/rehabilitasi sistem drainase perkotaan	Semakin mahalnya biaya konstruksi sistem drainase perkotaan
		Belum sesuainya penanganan sistem drainase sesuai prioritas kerusakan
		Penanganan masih bersifat parsial/belum dilakukan secara tuntas dari hulu ke hilir

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	*(2)*	*(3)*
	Kurang terpeliharanya sistem drainase perkotaan	Penanganan pemeliharaan sistem drainase perkotaan tidak sebanding dengan panjang saluran drainase
		Kurang berfungsinya bak kontrol dengan baik
	Kurangnya pengendalian terhadap kondisi saluran	Kurangnya pengendalian pemanfaatan bangunan di sepanjang saluran drainase
		Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara saluran yang sudah ada
		Saluran drainase banyak digunakan sebagai saluran pembuangan limbah rumah tangga
Belum optimalnya kinerja layanan irigasi	Kurangnya keandalan Air pada sumber air / bangunan Pengambilan	Sumber air berkurang
		Tutupan Lahan di bagian hulu berkurang (vegetasi penyimpan air kurang)
		Perubahan Iklim
		Bangunan Bendung banyak yang rusak
		Kurangnya konservasi sumber daya air / Daerah Aliran Sungai
		Erosi dan Degradasi dasar sungai
	Tingginya kerusakan Jaringan Irigasi	Banyaknya konstruksi jaringan irigasi yang sudah lapuk karena berumur tua
		Banyaknya Jaringan irigasi yang belum permanen/masih sederhana
		Tingginya longsoran tebing di Jaringan irigasi
		Lokasi saluran banyak yang di tebing sungai
		Tingginya sedimentasi di saluran irigasi
	Distribusi air irigasi belum adil dan lancar	Banyaknya Bangunan Pengatur yang belum tertangani
		Jumlah Tenaga OP yang kurang ideal
		Pemeliharaan jaringan irigasi masih kurang optimal
		Banyaknya sampah yang masuk ke saluran irigasi
		Belum tertibnya ketepatan jadwal masa tanam oleh petani
		Belum optimalnya pengaturan dan pengawasan air pada saat air kurang
	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan irigasi	Banyaknya Lembaga P3A dan GP3A yang tidak aktif
		Pengurus P3A dan GP3A banyak yang belum diperbaharui (sesuai masa kepengurusannya)

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	*(2)*	*(3)*
		Kurangnya informasi dan kepedulian terhadap kelestarian jaringan irigasi
		Banyaknya pelanggaran sempadan jaringan irigasi
		Masih rendahnya minat petani usia muda (produktif)
	Rendahnya penyediaan data Sumber Daya Air/Irigasi	Banyaknya data dan informasi Sumber Daya Air belum diinventarisir
		Masih kurangnya fasilitas/sarana dan prasarana pengelolaan Data SDA
		Kurangnya Tenaga Ahli dan terampil di bidang SDA baik dari segi jumlah maupun kompetensinya
		Adanya kendala sistem Informasi yang sudah terbangun
		Masih minimnya peralatan pengukur data pencatat Data SDA
	Areal genangan persawahan masih cukup tinggi	Tingginya sedimentasi saluran pembuang irigasi
		Banyaknya saluran pembuang irigasi yang tidak terawat
		Tanggul saluran pembuang banyak yang longsor
		Antrian air pada sistem pembuangan yang tidak lancar ke sungai
Masih banyak masyarakat yang belum mendapat akses air minum aman	Berkurangnya sumber air	Sumber air tercemar
		Mata air tidak kontinu sepanjang tahun mengeluarkan air
	Pengelolaan SPAM tidak berjalan	Kurangnya pengelola yang kompeten
		Masih minimnya pembinaan kapasitas untuk pengelola SPAM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah belum optimal	Pelayanan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja belum dapat dilaksanakan secara Optimal	Promosi jasa pelayanan sedot tinja belum optimal
		Lokasi penyedotan sulit dijangkau (di pegunungan dan atau di jalan sempit)
		Jumlah personil kurang
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan air limbah domestik (SPAL-D) setempat belum optimal	Jamban dan tangki septic yang dimiliki belum standar
		Belum semua RT memiliki jamban dan tangki septic
	Kurangnya pengelolaan air limbah domestik	Kurangnya kemampuan pengelolaan air limbah domestik
		Kurangnya koordinasi dalam pengelolaan air limbah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	*(2)*	*(3)*
Penyelenggaraan Gedung di Kabupaten belum Optimal	Proses layanan PBG belum maksimal	Pemohon kurang memahami persyaratan/ kelengkapan yang harus dipenuhi
		Pemohon (konsultan) kurang memahami ketentuan teknis
	Penanganan bangunan gedung milik Negara belum Optimal	Penanganan gedung masih dirpiroritaskan ke pemeliharaan saja, untuk mempertahankan bangunan layak digunakan
		Penanganan gedung milih daerah kurang menjadi prioritas utama
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten belum Optimal	Kurangnya pelatihan tenaga terampil konstruksi	Stigma/ pandangan masyarakat masih lebih conodong kepada pelatihan Ahli bukan Terampil (Sedangkan pelatihan yang dijalankan oleh Kabupaten/ Kota adalah Terampil)
		Kurangnya minat pelatihan tenaga terampil konstruksi
	Update data terkait jasa konstruksi setiap tahun belum optimal	Harga pasaran untuk bahan konstruksi yang tiap tahun berubah
		Pengumpulan data Jasa Konstruksi yang kurang maksimal
	Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi belum optimal	OPD Kesulitan Mendata Penyelenggara Jasa Konstruksi (Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi)
		Perubahan Regulasi Perizinan Jasa Konstruksi (perizinan melalui OSS) membuat Tidak Optimalnya Pembinaan dan Pengendalian Jasa Konstruksi
Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang	Masyarakat tidak mengajukan izin ketika mendirikan bangunan	Masyarakat belum paham keberadaan tata ruang
		Perizinan tata ruang membingungkan
		Masyarakat belum paham cara mengajukan perizinan tata ruang keberadaan tata ruang
		Minimnya sosialisasi tata ruang
	Data sektoral tidak lengkap	OPD antar sektor tidak paham data tata ruang
		Tidak ada tupoksi wajib penyediaan data tata ruang di OPD antar sektor
	Ketidaksesuaian peta rencana tata ruang dengan kondisi eksisting	Tim penyusun lalai dalam proses pembuatan peta
		Penyusunan peta hanya mengandalkan data sekunder
		Penyusunan peta hanya dihandle satu OPD tanpa ada koordinasi
		Peta rencana tidak bisa memprediksi kegiatan masyarakat dalam jangka waktu perencanaan 20 tahun

2.2.2 Isu Strategis

Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses

penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelkumnnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksesitabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimasudkan agar layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan ekternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknnya yang signifikan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dimasa mendatang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulakan kerugian yang lebih besar atau sebaliknnya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk menignkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo tahun 2025 – 2029 disususun berdasarkan kajian terhadap:

a. Identifikasi permasalahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo
b. Telaahan Visi dan Misi Kepada daerah terpilih
c. Telaahan terhadap Renstra Kementrian/Lembaga
d. Telaahan terhadap RTRW DAN KLHS Kabupaten Purworejo

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan diatas, maka dengan mempertimbangkan kriteria – kriteria penentuan permasalahan pembangunan daerah, dapat diketahui permasalahan-permasalahan strategis yang memegang peranan penting/strategis untuk diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah 2025-2029. Kriteria-kriteria tersebut antara lain:

a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran
b. Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat
c. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
d. Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi
e. Kemudahan untuk menangani
f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dirumuskanlah isu-isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo yang akan diselesaikan dengan program pembangunan daerah 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.18
Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Wilayah Pengembangan Keburejo (Kebumen-Purworejo)	Berkurangnya sumber air	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Transisi energi untuk mendorong pemerataan	Transformasi Ekonomi	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Kurangnya aksesibilitas SPAM yang berkualitas dan tata kelola kelembagaan SPAM
	Pengelolaan SPAM tidak berjalan					
	Pelayanan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja belum dapat dilaksanakan secara Optimal					Masih adanya kesenjangan terhadap akses dan pengelolaan sanitasi
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan air limbah domestik (SPAL-D) setempat belum optimal					
	Kurangnya pengelolaan air limbah domestik					
	Kurangnya kegiatan peningkatan/rehabilitasi sistem drainase perkotaan					Penanganan drainase perkotaan belum menyeluruh sampai hilir
	Kurang terpeliharanya sistem drainase perkotaan					
	Kurangnya pengendalian terhadap kondisi saluran drainase					
	Proses layanan PBG belum maksimal					Masih kurangnya kepatuhan terhadap

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Penanganan bangunan gedung milik Negara belum Optimal					regulasi perizinan bangunan gedung
	Kegiatan peningkatan/rehabilitasi jalan masih kurang					Pendanaan terbatas untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan & pemeliharaan jalan/jembatan yang cukup besar 2. Masih banyak ruas jalan kabupaten/kota dalam kondisi rusak ringan/berat
	Pemeliharaan jalan/jembatan dan jembatan masih kurang					
	Pengendalian terhadap kendaraan bermuatan belum optimal					
	Kurangnya pelatihan tenaga terampil konstruksi					1. Kebutuhan tenaga kerja terampil tinggi 2. Standar K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) belum sepenuhnya diterapkan
	Update data terkait jasa konstruksi setiap tahun belum optimal					
	Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi belum optimal					
	Masyarakat tidak mengajukan izin ketika mendirikan bangunan					1. Masih banyak pelanggaran tata ruang 2. Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya mengacu RTRW/RDTR
	Data sektoral tidak lengkap					
	Ketidaksesuaian peta rencana tata ruang dengan kondisi eksisting					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi	Kurangnya keandalan Air pada sumber air / bangunan Pengambilan	Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata	Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia	Transformasi Ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Pendanaan untuk rehabilitasi jaringan irigasi terbatas 2. Peran P3A/GP3A/IP3A (perkumpulan petani pemakai air) belum optimal
	Tingginya kerusakan Jaringan Irigasi					
	Distribusi air irigasi belum adil dan lancar					
	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan irigasi					
	Rendahnya penyediaan data Sumber Daya Air/Irigasi					
	Areal genangan persawahan masih cukup tinggi					
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan belum optimal serta berbasis sistem informasi

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo terpilih tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo tersebut.

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2045.

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

VISI : “PURWOREJO BERDAYA SAING, SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN INOVATIF (PURWOREJO BERSERI)”

Terhadap Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan tugas pembantuan, perlu menjabarkan, memprogramkan dan melaksanakan visi dimaksud sesuai tugas dan fungsinya agar hasil pembangunan sesuai dengan mutu, waktu dan kualitas yang dipersyaratkan.

Penjabaran berdasarkan masing-masing misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu:

Misi 2: “Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah”

Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung pencapaian Misi 2 ini yaitu dengan meningkatkan kinerja infrastruktur wilayah yang meliputi air minum, sanitasi, drainase, bangunan gedung, jalan, dan jasa konstruksi

Misi 4: “Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal”

Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung pencapaian Misi 4 ini yaitu dengan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatkan kinerja sistem irigasi yang mendukung ketahan pangan dan peningkatan kinerja penataan yang diharapkan dapat membuka pengembangan investasi di Kabupaten Purworejo

Misi 5: “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi”

Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung pencapaian Misi 5 ini yaitu dengan ikut mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil telaah terhadap visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Terpilih periode Tahun 2025-2029, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengimplimentasikan dalam tujuan-tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dalam 5 tahun mendatang yaitu:

"Meningkatkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum, sistem irigasi, penataan ruang, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah"

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk sasaran Dinas Pekerjaa Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dalam 5 tahun kedepan yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya kinerja sistem irigasi
3. Meningkatnya kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum
4. Meningkatnya kinerja penataan ruang

Untuk lebih lengkapnya, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
S2, Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Meningkatkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum, sistem irigasi, penataan ruang, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	60,03	60,41	60,79	61,17	61,45	63,22	
			Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	70,99	71,38	71,85	72,32	72,79	73,27	
			Persentase Kinerja Penataan Ruang	44,70	52,77	59,07	65,82	70,42	72,99	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	
		Meningkatnya kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum	Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	60,03	60,41	60,79	61,17	61,45	63,22	
		Meningkatnya kinerja sistem irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	70,99	71,38	71,85	72,32	72,79	73,27	
		Meningkatnya kinerja penataan ruang	Persentase Kinerja Penataan Ruang	44,70	52,77	59,07	65,82	70,42	72,99	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Strategi

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat disajikan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Purworejo
Tahun 2025-2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Menguatkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum	Meningkatkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum	Memantapkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum	Mewujudkankan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum	Meneguhkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum
Menguatkan kinerja penataan ruang	Meningkatkan kinerja penataan ruang	Memantapkan kinerja penataan ruang	Mewujudkankan kinerja penataan ruang	Meneguhkan kinerja penataan ruang
Menguatkan kinerja sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan	Meningkatkan kinerja sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan	Memantapkan kinerja sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan	Mewujudkankan kinerja sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan	Meneguhkan kinerja sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan
Menguatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan Kapasitas sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rumusan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan sesuai dengan Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	SASARAN RPJMD S2, Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Arah Kebijakan 2026: Penguatan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata	Penguatan penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum melalui pemeliharaan rutin dan berkala jalan, pemeliharan rutin dan berkala jembatan, survey kondisi jalan/jembatan, penyusunan DED jalan, rehabilitasi/rekonstruksi jalan, peningkatan Kapasitas Jalan, penggantian jembatan, penyusunan DED drainase perkotaan, penyusunan masterplan drainase perkotaan, rehabilitasi/peningkatan drainase perkotaan, pemeliharaan drainase perkotaan, pembangunan gedung pemerintah daerah, penyusunan DED/review DED pembangunan gedung pemerintah daerah, penerbitan PBG, SLF, SBKBG, RTP, fasilitasi Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis dan Penilik bangunan Gedung, penyediaan data dan informasi jasa konstruksi lingkup kabupaten, pelatihan tenaga kerja konstruksi (operator, teknisi dan analis), pengawasan dan evaluasi tertib Jasa konstruksi, penyusunan DED SPAM, peningkatan dan perluasan SPAM jaringan pepipaan, pembinaan Kelompok Pembina Sistem Pembangunan Air Minum, pembinaan SPAM Tingkat Desa, penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja, pembinaan kelompok penerima pemanfaat sanitasi, pembangunan jamban sehat, optimalisasi kapasitas IPLT, penyusunan DED Pembangunan IPLT	
		Arah Kebijakan 2027: Peningkatan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata	Peningkatan penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum melalui pemeliharaan rutin dan berkala jalan, pemeliharan rutin dan berkala jembatan, survey kondisi jalan/jembatan, penyusunan DED jalan, rehabilitasi/rekonstruksi jalan, peningkatan Kapasitas Jalan, penggantian jembatan, penyusunan DED drainase perkotaan, penyusunan masterplan drainase perkotaan, rehabilitasi/peningkatan drainase perkotaan, pemeliharaan drainase perkotaan, pembangunan gedung pemerintah daerah, penyusunan DED/review DED pembangunan gedung pemerintah daerah, penerbitan PBG, SLF, SBKBG, RTP, fasilitasi Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis dan Penilik bangunan Gedung, penyediaan data dan informasi jasa konstruksi lingkup kabupaten, pelatihan tenaga kerja konstruksi (operator, teknisi dan analis), pengawasan dan evaluasi tertib Jasa konstruksi, penyusunan DED SPAM, peningkatan dan perluasan SPAM jaringan pepipaan, pembinaan Kelompok Pembina Sistem Pembangunan Air Minum, pembinaan SPAM Tingkat Desa, penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja, pembinaan kelompok penerima pemanfaat sanitasi, pembangunan jamban sehat, optimalisasi kapasitas IPLT, penyusunan DED Pembangunan IPLT	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Arah Kebijakan 2028: Pemantapan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata	Pemantapan penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum melalui pemeliharaan rutin dan berkala jalan, pemeliharan rutin dan berkala jembatan, survey kondisi jalan/jembatan, penyusunan DED jalan, rehabilitasi/rekonstruksi jalan, peningkatan Kapasitas Jalan, penggantian jembatan, penyusunan DED drainase perkotaan, penyusunan masterplan drainase perkotaan, rehabilitasi/peningkatan drainase perkotaan, pemeliharaan drainase perkotaan, pembangunan gedung pemerintah daerah, penyusunan DED/review DED pembangunan gedung pemerintah daerah, penerbitan PBG, SLF, SBKBG, RTP, fasilitasi Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis dan Penilik bangunan Gedung, penyediaan data dan informasi jasa konstruksi lingkup kabupaten, pelatihan tenaga kerja konstruksi (operator, teknisi dan analis), pengawasan dan evaluasi tertib Jasa konstruksi, penyusunan DED SPAM, peningkatan dan perluasan SPAM jaringan pepipaan, pembinaan Kelompok Pembina Sistem Pembangunan Air Minum, pembinaan SPAM Tingkat Desa, penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja, pembinaan kelompok penerima pemanfaat sanitasi, pembangunan jamban sehat, optimalisasi kapasitas IPLT, penyusunan DED Pembangunan IPLT	
		Arah Kebijakan 2029: Perwujudan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata	Perwujudan penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum melalui pemeliharaan rutin dan berkala jalan, pemeliharan rutin dan berkala jembatan, survey kondisi jalan/jembatan, penyusunan DED jalan, rehabilitasi/rekonstruksi jalan, peningkatan Kapasitas Jalan, penggantian jembatan, penyusunan DED drainase perkotaan, penyusunan masterplan drainase perkotaan, rehabilitasi/peningkatan drainase perkotaan, pemeliharaan drainase perkotaan, pembangunan gedung pemerintah daerah, penyusunan DED/review DED pembangunan gedung pemerintah daerah, penerbitan PBG, SLF, SBKBG, RTP, fasilitasi Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis dan Penilik bangunan Gedung, penyediaan data dan informasi jasa konstruksi lingkup kabupaten, pelatihan tenaga kerja konstruksi (operator, teknisi dan analis), pengawasan dan evaluasi tertib Jasa konstruksi, penyusunan DED SPAM, peningkatan dan perluasan SPAM jaringan pepipaan, pembinaan Kelompok Pembina Sistem Pembangunan Air Minum, pembinaan SPAM Tingkat Desa, penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja, pembinaan kelompok penerima pemanfaat sanitasi, pembangunan jamban sehat, optimalisasi kapasitas IPLT, penyusunan DED Pembangunan IPLT	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Arah Kebijakan 2030: Peneguhan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata	Peneguhan penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum melalui pemeliharaan rutin dan berkala jalan, pemeliharan rutin dan berkala jembatan, survey kondisi jalan/jembatan, penyusunan DED jalan, rehabilitasi/rekonstruksi jalan, peningkatan Kapasitas Jalan, penggantian jembatan, penyusunan DED drainase perkotaan, penyusunan masterplan drainase perkotaan, rehabilitasi/peningkatan drainase perkotaan, pemeliharaan drainase perkotaan, pembangunan gedung pemerintah daerah, penyusunan DED/review DED pembangunan gedung pemerintah daerah, penerbitan PBG, SLF, SBKBG, RTP, fasilitasi Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis dan Penilik bangunan Gedung, penyediaan data dan informasi jasa konstruksi lingkup kabupaten, pelatihan tenaga kerja konstruksi (operator, teknisi dan analis), pengawasan dan evaluasi tertib Jasa konstruksi, penyusunan DED SPAM, peningkatan dan perluasan SPAM jaringan pepipaan, pembinaan Kelompok Pembina Sistem Pembangunan Air Minum, pembinaan SPAM Tingkat Desa, penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja, pembinaan kelompok penerima pemanfaat sanitasi, pembangunan jamban sehat, optimalisasi kapasitas IPLT, penyusunan DED Pembangunan IPLT	
2	SASARAN RPJMD S4, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Arah Kebijakan 2026: Penguatan sistem irigasi untuk menjamin ketersedian air sepanjang musim	Penguatan sistem irigasi melalui peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan kabupaten, pembinaan P3A/GP3A Daerah Irigasi kewenangan kabupaten, pemeliharaan darurat jaringan irigasi, penyediaan bahan banjiran, bahan/material OP, peralatan kerja OP, pemeliharaan rutin dan berkala Jaringan irigasi, operasi jaringan irigasi, operasional KOMIR dan UPI di Tingkat Pengamat, penyusunan/review DED Jaringan Irigasi, penyusunan Data Hidrologi (Curah Hujan & Debit Sungai), rehabilitasi bendung irigasi kewenangan kabupaten	
		Arah Kebijakan 2027: Peningkatan sistem irigasi untuk menjamin ketersedian air sepanjang musim	Peningkatan sistem irigasi melalui peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan kabupaten, pembinaan P3A/GP3A Daerah Irigasi kewenangan kabupaten, pemeliharaan darurat jaringan irigasi, penyediaan bahan banjiran, bahan/material OP, peralatan kerja OP, pemeliharaan rutin dan berkala Jaringan irigasi, operasi jaringan irigasi, operasional KOMIR dan UPI di Tingkat Pengamat, penyusunan/review DED Jaringan Irigasi, penyusunan Data Hidrologi (Curah Hujan & Debit Sungai), rehabilitasi bendung irigasi kewenangan kabupaten	
		Arah Kebijakan 2028: Pemantapan sistem irigasi untuk menjamin ketersedian air sepanjang musim	Pemantapan sistem irigasi melalui peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan kabupaten, pembinaan P3A/GP3A Daerah Irigasi kewenangan kabupaten, pemeliharaan darurat jaringan irigasi, penyediaan bahan banjiran, bahan/material OP, peralatan kerja OP, pemeliharaan rutin dan berkala Jaringan irigasi, operasi jaringan irigasi, operasional KOMIR dan UPI di Tingkat	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			Pengamat, penyusunan/review DED Jaringan Irigasi, penyusunan Data Hidrologi (Curah Hujan & Debit Sungai), rehabilitasi bendung irigasi kewenangan kabupaten	
		Arah Kebijakan 2029: Perwujudan swasambeda air dan sistem irigasi untuk menjamin ketersedian air sepanjang musim	Perwujudan sistem irigasi melalui peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan kabupaten, pembinaan P3A/GP3A Daerah Irigasi kewenangan kabupaten, pemeliharaan darurat jaringan irigasi, penyediaan bahan banjiran, bahan/material OP, peralatan kerja OP, pemeliharaan rutin dan berkala Jaringan irigasi, operasi jaringan irigasi, operasional KOMIR dan UPI di Tingkat Pengamat, penyusunan/review DED Jaringan Irigasi, penyusunan Data Hidrologi (Curah Hujan & Debit Sungai), rehabilitasi bendung irigasi kewenangan kabupaten	
		Arah Kebijakan 2030: Peneguhan swasambeda air dan sistem irigasi untuk menjamin ketersedian air sepanjang musim	Peneguhan sistem irigasi melalui peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan kabupaten, pembinaan P3A/GP3A Daerah Irigasi kewenangan kabupaten, pemeliharaan darurat jaringan irigasi, penyediaan bahan banjiran, bahan/material OP, peralatan kerja OP, pemeliharaan rutin dan berkala Jaringan irigasi, operasi jaringan irigasi, operasional KOMIR dan UPI di Tingkat Pengamat, penyusunan/review DED Jaringan Irigasi, penyusunan Data Hidrologi (Curah Hujan & Debit Sungai), rehabilitasi bendung irigasi kewenangan kabupaten	
3	SASARAN RPJMD S4, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Arah Kebijakan 2026: Penguatan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Penguatan kinerja penataan ruang melalui pelaksanaan persetujuan substansi RTRW dan RDTR, penetapan kebijakan tata ruang, evaluasi kebijakan dan penilaian perwujudan tata ruang, sosialisasi kebijakan tata ruang, penyusunan peta dasar, penyusunan RTRW dan RDTR, koordinasi tata ruang, pelaksanaan dan penilaian KKPR, pelaksanaan SPPR, pengenaan sanksi administratif pelanggaran tata ruang	
		Arah Kebijakan 2027: Peningkatan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Peningkatan kinerja penataan ruang melalui pelaksanaan persetujuan substansi RTRW dan RDTR, penetapan kebijakan tata ruang, evaluasi kebijakan dan penilaian perwujudan tata ruang, sosialisasi kebijakan tata ruang, penyusunan peta dasar, penyusunan RTRW dan RDTR, koordinasi tata ruang, pelaksanaan dan penilaian KKPR, pelaksanaan SPPR, pengenaan sanksi administratif pelanggaran tata ruang	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Arah Kebijakan 2028: Pemantapan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Pemantapan kinerja penataan ruang melalui pelaksanaan persetujuan substansi RTRW dan RDTR, penetapan kebijakan tata ruang, evaluasi kebijakan dan penilaian perwujudan tata ruang, sosialisasi kebijakan tata ruang, penyusunan peta dasar, penyusunan RTRW dan RDTR, koordinasi tata ruang, pelaksanaan dan penilaian KKPR, pelaksanaan SPPR, pengenaan sanksi administratif pelanggaran tata ruang	
		Arah Kebijakan 2029: Perwujudan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Perwujudan kinerja penataan ruang melalui pelaksanaan persetujuan substansi RTRW dan RDTR, penetapan kebijakan tata ruang, evaluasi kebijakan dan penilaian perwujudan tata ruang, sosialisasi kebijakan tata ruang, penyusunan peta dasar, penyusunan RTRW dan RDTR, koordinasi tata ruang, pelaksanaan dan penilaian KKPR, pelaksanaan SPPR, pengenaan sanksi administratif pelanggaran tata ruang	
		Arah Kebijakan 2030: Peneguhan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Peneguhan kinerja penataan ruang melalui pelaksanaan persetujuan substansi RTRW dan RDTR, penetapan kebijakan tata ruang, evaluasi kebijakan dan penilaian perwujudan tata ruang, sosialisasi kebijakan tata ruang, penyusunan peta dasar, penyusunan RTRW dan RDTR, koordinasi tata ruang, pelaksanaan dan penilaian KKPR, pelaksanaan SPPR, pengenaan sanksi administratif pelanggaran tata ruang	
4	SASARAN RPJMD S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan 2026: Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Penguatan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan program dan kegiatan, disertai peningkatan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan integritas aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Arah Kebijakan 2027: Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang transparan dan terintegrasi, disertai peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, penyusunan dokumen dan walidata perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, laporan, gaji dan tunjangan ASN, barang milik daerah, serta kepegawaian; penyediaan barang, jasa, logistik, peralatan, sarana prasarana, serta dukungan pelayanan umum kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi kunjungan tamu; penatausahaan arsip, komunikasi, dan utilitas; serta pengadaan dan pemeliharaan kendaraan, peralatan, mebel, gedung kantor, dan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah.	
		Arah Kebijakan 2028: Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Pemantapan akuntabilitas kinerja melalui konsistensi pelaksanaan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang terukur dan terintegrasi, serta pemantapan kapasitas aparatur untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor.	
		Arah Kebijakan 2029: Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Perwujudan akuntabilitas kinerja melalui penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang terintegrasi dan berbasis kinerja, serta perwujudan kapasitas aparatur yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Arah Kebijakan 2030: Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peneguhan akuntabilitas kinerja melalui penguatan penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang akuntabel dan berkelanjutan, serta peneguhan kapasitas aparatur yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo perlu menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang kaan menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada standar klasifikasi sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya, sehingga menjamin adanya keterpaduan antara perencanaan daerah, provinsi, maupun nasional. Program, kegiatan dan sub kegiatan dapat menjelaskan indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif beserta sumbernya baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi serta APBN.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan empat sasaran strategis yang dijabarkan menjadi sembilan program prioritas 22 kegiatan dan 113 sub kegiatan. Secara umum, program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Penataan Bangunan Gedung
6. Program Penyelenggaraan Jalan
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan untuk kegiatan dan sub kegiatan yang berada di program tersebut diatas secara rinci dapat dijelaskan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
S2, Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Meningkatkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum. sistem irigasi. penataan ruang. dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum		
		Meningkatkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum			Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum		
			Meningkatknya rumah tangga dengan akses air minum aman		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Terlayani Penambahan Sambungan Rumah melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
						Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
						Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	
						Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Meningkatnya rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Terlayaninya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayaninya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
						Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	
						Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Meningkatnya drainase jalan di perkotaan dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat		Persentase Drainase Jalan di Perkotaan dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				Tertanganinya Saluran Drainase Jalan di Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Jalan di Perkotaan yang Ditangani	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
			Meningkatnya bangunan gedung dengan kondisi baik		Persentase Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
						Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			Meningkatnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik		Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Tertanganinya Jalan dan Jembatan Kabupaten	Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten yang Ditangani	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
						Survey Kondisi Jalan/Jembatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Pemeliharaan Rutin Jalan	
						Pembangunan Jalan	
						Rehabilitasi Jalan	
						Pemeliharaan Berkala Jalan	
						Penggantian Jembatan	
						Rekonstruksi Jalan	
						Pemeliharaan Berkala Jembatan	
						Pelebaran Jalan Menuju Standar	
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi		Persentase Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Terlatihnya Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
						Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Disediakan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib	Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Konstruksi yang Disusun		
						Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
S4, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif		Meningkatnya kinerja sistem irigasi			Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten		
			Meningkatnya jaringan irigasi dalam kondisi baik, ketersediaan dokumen Daerah Irigasi dan kondisi kelembagaan pengelola irigasi		Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Persentase Ketersediaan Dokumen Daerah Irigasi		
					Persentase Kondisi Kelembagaan Pengelola Irigasi		
				Tersusunnya Dokumen Pengelolaan SDA dalam 1 (Satu) Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA dalam 1 (Satu) Wilayah Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tertanganinya Saluran Irigasi Kabupaten	Panjang Saluran Irigasi Kabupaten yang tertangani	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
						Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
						Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	
						Peningkatan Bendung Irigasi	
						Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
						Rehabilitasi Bendung Irigasi	
		Meningkatnya kinerja penataan ruang			Persentase Kinerja Penataan Ruang		
			Meningkatnya kinerja penyusunan dokumen RTR. meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR dan terselenggaranya pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata ruang		Persentase Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
					Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Rencana Tata Ruang (RTR)		
					Persentase Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tata Ruang		
				Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang Disusun	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
						Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
						Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Peta Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
						Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
						Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
						Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
				Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
						Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
						Penilaian Perwujudan RTR	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (sama untuk semua perangkat daerah)			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (semua PD)	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Alat Besar	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	

Masing-masing penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejoa sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo melaksanakan enam program prioritas, yaitu:

Program 1: Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- Outcome: Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum aman
- Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

  Output: Terlayani Penambahan Sambungan Rumah melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu

  - Sub Kegiatan:
    1. Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
    2. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
    3. Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa
    4. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
    5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Program 2: Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- Outcome: Meningkatnya rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
- Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

  Output: Terlayaninya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

  - Sub Kegiatan:
    1. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
    2. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
    3. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)
    4. Penyediaan Unit Pengolahan Setempat
    5. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Program 3: Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

- Outcome: Meningkatnya drainase jalan di perkotaan dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
- Kegiatan: Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

  Output: Tertanganinya Saluran Drainase Jalan di Perkotaan

  - Sub Kegiatan:
    1. Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
    2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

3. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

Program 4: Program Penataan Bangunan Gedung
- Outcome: Meningkatnya bangunan gedung dengan kondisi baik
- Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
  Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan:
    1. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
    2. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Program 5: Program Penyelenggaraan Jalan
- Outcome: Meningkatnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik
- Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
  Output: Tertanganinya Jalan dan Jembatan Kabupaten
  - Sub Kegiatan:
    1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
    2. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
    3. Pemeliharaan Rutin Jalan
    4. Pembangunan Jalan
    5. Rehabilitasi Jalan
    6. Pemeliharaan Berkala Jalan
    7. Penggantian Jembatan
    8. Rekonstruksi Jalan
    9. Pemeliharaan Berkala Jembatan
    10. Pelebaran Jalan Menuju Standar

Program 6: Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- Outcome: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi
- Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
  Output: Terlatihnya Tenaga Terampil Konstruksi
  - Sub Kegiatan:
    1. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
- Kegiatan 2: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  Output: Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan:
    1. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
- Kegiatan 3: Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Output: Tersusunnya Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

- Sub Kegiatan:
  1. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

Sasaran 2: Meningkatnya kinerja sistem irigasi

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kinerja sistem irigasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo melaksanakan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan outcome Meningkatnya jaringan irigasi dalam kondisi baik, ketersediaan dokumen Daerah Irigasi dan kondisi kelembagaan pengelola irigasi. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain:

- Kegiatan 1: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

  Output: Tersusunnya Dokumen Pengelolaan SDA dalam 1 (Satu) Wilayah Kabupaten/Kota

  - Sub Kegiatan:
    1. Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota

- Kegiatan 2: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

  Output: Tertanganinya Saluran Irigasi Kabupaten

  - Sub Kegiatan:
    1. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
    2. Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
    3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
    4. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
    5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
    6. Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
    7. Peningkatan Bendung Irigasi
    8. Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa
    9. Rehabilitasi Bendung Irigasi

Sasaran 3: Meningkatnya kinerja penataan ruang

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kinerja penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo melaksanakan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan outcome Meningkatnya kinerja penyusunan dokumen RTR. meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR dan terselenggaranya pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata ruang. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain:

- Kegiatan 1: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

  Output: Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

  - Sub Kegiatan:
    1. Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
    2. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
    3. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
    4. Penetapan RDTR Kabupaten/Kota

5. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang

- Kegiatan 2: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  Output: Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan:
    1. Penyusunan Peta Dasar
    2. Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
    3. Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
- Kegiatan 3: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  Output: Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan:
    1. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
    2. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
    3. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
- Kegiatan 4: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  Output: Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan:
    1. Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
    2. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
    3. Penilaian Perwujudan RTR

Sasaran 4: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan outcome Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- Kegiatan 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Output: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan:
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    3. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- Kegiatan 2: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Output: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan:
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Kegiatan 3: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  Output: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan:
    1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

2. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

- Kegiatan 4: Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  Output: Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan:
    1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Kegiatan 5: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Output: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan:
    1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
    2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Kegiatan 6: Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Output: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan:
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    6. Penyediaan Bahan/Material
    7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Kegiatan 7: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Output: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan:
    1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    2. Pengadaan Alat Besar
    3. Pengadaan Mebel
    4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan 8: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Output: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan:
    1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan 9: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Output: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan:
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
    4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

Program dan kegiatan ini merupakan penjabaran operasional dari strategi kebijakan yang telah dirumuskan, dirancang untuk memberikan dampak optimal dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas tugas, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan Kabupaten Purworejo. Setiap program dan kegiatannya akan diimplementasikan secara sinergis, didukung oleh alokasi sumber daya yang efisien, dan dimonitor secara berkelanjutan untuk memastikan tercapainya target kinerja.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan beserta pendanaan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo periode 2025-2029 dijabarkan dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum, sistem irigasi, penataan ruang, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	68,96	71,38		71,85		72,32		72,79		73,27		73,27			
			Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	%	58,79	60,41		60,79		61,17		61,45		63,22		63,22			
			Persentase Kinerja Penataan Ruang	%	0	55,36		65,09		72,96		81,76		88,73		88,73			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						21.003.658.855		21.003.659.900		16.574.233.000		16.574.233.000		16.574.233.000				
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	21.003.658.855	100	21.003.659.900	100	16.574.233.000	100	16.574.233.000	100	16.574.233.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	24	197.655.400	24	219.872.000	24	134.003.000	24	164.223.000	24	156.812.000	120			
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	150.604.200	22	171.193.000	22	104.334.000	22	127.865.000	22	122.095.000	110			
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	24	45.081.200	24	48.850.000	24	28.554.000	24	34.992.000	24	33.413.000	120			
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	1	2.000.000	1	1.829.000	1	1.115.000	1	1.366.000	1	1.304.000	5			
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	33	45	18.502.993.855	45	18.919.767.900	45	10.312.065.000	45	12.637.490.000	45	12.067.148.000	225			
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	130	200	18.460.858.055	195	18.881.237.900	190	10.288.582.000	185	12.604.712.000	180	12.039.667.000	950			
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	44	42.135.800	44	38.530.000	44	23.483.000	44	28.778.000	44	27.479.000	220			
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	3	12	154.188.800	12	160.788.000	12	97.995.000	12	120.084.000	12	114.674.000	60			
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	11	32.239.800	11	29.481.000	11	17.968.000	11	22.020.000	11	21.026.000	55			
1.03.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	121.946.800	1	131.307.000	1	80.027.000	1	98.074.000	1	93.648.000	5			
1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	16	2.500.000	16	4.572.000	16	2.787.000	16	3.415.000	16	3.261.000	80			
1.03.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	16	2.500.000	16	4.572.000	16	2.787.000	16	3.415.000	16	3.261.000	80			
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	2	18	33.846.800	18	50.294.000	18	30.652.000	18	37.565.000	18	35.870.000	90			
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	17	5.367.000	17	9.144.000	17	5.573.000	17	6.830.000	17	6.522.000	85			
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	30	18.479.800	30	41.150.000	30	25.079.000	30	30.735.000	30	29.348.000	150			
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	415.588.200	9	658.813.000	9	401.527.000	9	492.073.000	9	469.865.000	45			
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	8	5.993.200	8	10.059.000	8	6.131.000	8	7.513.000	8	7.174.000	40			
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	18	8.611.000	18	15.545.000	18	9.474.000	18	11.611.000	18	11.087.000	90			
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	1	40.656.000	1	194.738.000	1	118.687.000	1	145.451.000	1	138.887.000	5			
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	3	29.992.800	3	60.353.000	3	36.783.000	3	45.078.000	3	43.043.000	15			

1.03.01.2.08.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1.332.000	1	1.372.000	1	836.000	1	1.025.000	1	979.000	5			
1.03.01.2.08.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	17	31.764.800	17	40.235.000	17	24.522.000	17	30.652.000	17	28.695.000	85			
1.03.01.2.08.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	17.000.000	12	30.176.000	12	18.392.000	12	22.539.000	12	21.522.000	60			
1.03.01.2.08.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	140.729.000	12	160.026.000	12	97.531.000	12	119.524.000	12	114.130.000	60			
1.03.01.2.08.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	2	139.509.400	2	146.309.000	2	89.171.000	2	109.280.000	2	104.348.000	10			
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	10	0		25	556.973.000	123	4.058.769.000	28	1.169.972.000	37	1.797.583.000	213			
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	2	249.391.000	6	656.668.000	0	0	6	839.882.000	14			
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	2	3.109.010.000	1	898.005.000	1	968.164.000	4			
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	10	83.130.000	100	144.394.000	10	71.840.000	10	66.816.000	130			
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	0	0	10	191.200.000	10	115.149.000	12	153.944.000	15	178.177.000	47			
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Bedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Laineya yang Disediakan	Unit	0	0	0	3	33.252.000	5	34.545.000	5	46.183.000	5	44.544.000	18			
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	24	387.554.000	24	524.702.000	24	319.796.000	24	391.803.000	24	374.217.000	120			
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	174.140.000	12	169.170.000	12	103.104.000	12	126.354.000	12	120.852.000	60			
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	213.414.000	12	355.532.000	12	216.686.000	12	265.549.000	12	253.565.000	60			
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahat Daerah	Laporan	7	7	1.309.304.000	7	1.907.876.000	7	1.215.645.000	7	1.557.496.000	7	1.554.805.000	35			
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	214.350.000	6	294.080.000	6	187.379.000	6	240.072.000	6	239.857.000	6			
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	68	56	362.120.000	56	667.287.000	56	425.177.000	56	544.741.000	57	543.799.000	57			
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	14	14	170.614.000	14	167.300.000	14	106.598.000	14	136.575.000	15	136.339.000	15			
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	113	43	21.500.000	43	89.195.000	43	56.832.000	43	72.814.000	50	72.688.000	50			
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	503.520.000	2	690.079.000	2	414.213.000	2	530.893.000	2	529.776.000	2			
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	17	12.200.000	17	16.037.000	17	10.218.000	17	13.092.000	17	13.069.000	17			
1.03.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	0,975	0,975	25.000.000	0,975	23.900.000	0,975	15.228.000	0,975	19.511.000	0,975	19.477.000	0,975			
2	Meningkatnya kinerja sistem irigasi		Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	68,06	71,38		71,85		72,32		72,79		73,27		73,27			
01:03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUH DAN PENATAAN RUANG						5.100.327.200		10.000.000.000		5.100.327.000		5.180.912.000		5.262.771.000				
01:03:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	67,38	68,38	5.100.327.200	69,17	10.000.000.000	69,35	5.100.327.000	69,53	5.180.912.000	69,72	5.262.771.000	69,72	Bidang Sumber Daya Air	Kabupaten Purworejo	
			Persentase Ketersediaan Dokumen Daerah Irigasi	%	83,4	87		87,5		88		88,4		90		90	Bidang Sumber Daya Air	Kabupaten Purworejo	
			Persentase Kondisi Kelembagaan Pengelola Irigasi	%	50,74	56,16		56,65		57,14		57,64		58,13		58,13	Bidang Sumber Daya Air	Kabupaten Purworejo	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan SDA dalam 1 (Satu) Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA dalam 1 (Satu) Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2	14.902.000	2	20.000.000	2	21.327.000	2	22.912.000	2	22.771.000	10			
1.03.02.2.01.0130	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	14.902.000	2	20.000.000	2	21.327.000	2	22.912.000	2	22.771.000	10			
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya Saluran Irigasi Kabupaten	Panjang Saluran Irigasi Kabupaten yang tertangani	KM	6	1	5.065.425.200	2,8	9.960.000.000	0,8	5.079.000.000	0,8	5.158.000.000	0,9	5.240.000.000	6,3			

01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya bangunan gedung dengan kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik	%	79,58	87,5	216.467.480	88,69	4.000.000.000	89,88	216.467.008	90,48	3.000.000.000	91,67	3.047.400.000	91,67	Bidang Cipta Karyadan Bina Konstruksi	Kabupaten Purworejo	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	216.467.480	2	4.000.000.000	1	216.467.008	2	3.000.000.000	4	3.047.400.000	10			
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pemboongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pemboongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pemboongkaran Bangunan Gedunguntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	1	3.783.533.000	0	0	1	2.783.533.000	3	2.830.933.000	5			
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pemboongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pemboongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan BangunanGedung (SBKBG), Rencana Teknis Pemboongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	1	1	216.467.480	1	216.467.000	1	216.467.008	1	216.467.000	1	216.467.000	5			
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	15,83	17,15	53.071.294.600	17,81	102.806.907.000	18,47	68.446.175.000	19,13	68.915.241.000	19,79	108.077.971.000	19,79	Bidang Bina Marga	Kabupaten Purworejo	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tertanganinya jalan dan jembatan kabupaten	Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten yang Ditangani	KM	26,952	6	53.071.294.600	6,44	102.806.907.000	5,9	68.446.175.000	5,4	68.915.241.000	7,7	108.077.971.000	33,44			
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	16	8	795.000.000	7	672.800.000	7	722.508.008	5	612.800.000	9	870.823.000	36			
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	757,79	757,79	49.522.000	757,79	55.000.000	757,79	60.500.000	757,79	66.550.000	757,79	80.500.000	757,79			
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	160	95	20.287.872.600	95	27.029.185.000	104	29.344.991.000	95	26.644.423.000	105	32.162.836.000	494			
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	KM	0	0	0	0,44	4.571.465.000	0,4	4.571.386.000	0,4	5.029.525.000	0,6	8.297.000.000	1,84			
1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	9,47	5	22.033.500.000	4	30.679.500.000	4	34.947.538.000	4	27.442.290.000	5	37.793.150.000	22			
1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	0,611	0	0	0,5	3.106.221.000	0,5	3.416.840.000	0	0	0,6	4.961.256.000	1,6			
1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan	Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	Meter	0	12	4.700.000.000	8	5.913.600.000	0	0	0	0	8	7.871.000.000	28			
1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	12	1	4.200.000.000	2,5	21.536.936.000	1	7.273.612.000	1	8.000.973.000	1,5	13.201.606.000	7			
1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Meter	0	8	1.005.700.000	8	1.008.000.000	8	1.108.800.000	8	1.219.680.000	16	2.900.000.000	48			
1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM	0	0	0	1	6.250.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	%	100	100	109.518.280	100	111.249.000	100	109.518.008	100	109.518.000	100	111.249.000	100	Bidang Cipta Karyadan Bina Konstruksi	Kabupaten Purworejo	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlatihnya Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Laporan	1	1	47.671.680	1	39.249.000	1	39.518.000	1	39.518.000	1	39.249.000	5			
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	20	10	47.671.680	10	39.249.000	10	39.518.000	10	39.518.000	10	39.249.000	50			
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	1	1	25.891.280	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5			
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	1	1	25.891.280	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5			
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersusunnya Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yang Disusun	Laporan	1	1	35.955.480	1	47.800.000	1	45.000.000	1	45.080.000	1	47.000.000	5			
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	BadanUsaha	40	15	35.955.480	15	47.800.000	15	45.000.000	15	45.080.000	15	47.000.000	75			
4	Meningkatnya kinerja penataan ruang		Persentase Kinerja Penataan Ruang	%	0	55,36		65,09		72,96		81,76		88,73		88,73			
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						742.581.880		754.315.000		742.582.008		749.100.000		760.938.000				
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kinerja penyusunan dokumen RTR, meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR dan terselenggaranya pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata ruang	Persentase Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang(RTR)	%	8,33	50	742.581.880	66,67	754.315.000	77,78	742.582.008	91,67	749.100.000	100	760.938.000	100	Bidang Tata Ruang	Kabupaten Purworejo	
			Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	%	90,95	91,08		91,1		91,11		91,13		91,18		91,18	Bidang Tata Ruang	Kabupaten Purworejo	
			Persentase Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tata Ruang	%	0	25		37,5		50		62,5		75		75	Bidang Tata Ruang	Kabupaten Purworejo	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	3	3	70.195.080	2	125.800.000	1	130.000.008	3	125.000.000	2	125.000.000	11			

1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga	20	10	58.546.000	20	120.800.000	20	122.000.000	20	123.000.000	20	124.000.000	90			
1.03.02.2.02.0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga	7	7	59.202.880	7	65.000.000	7	67.000.000	7	68.000.000	7	69.000.000	35			
1.03.02.2.02.0048	Peningkatan Bendung Irigasi	Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	UNIT	0	0	0	1	1.200.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	1	1	97.576.000	2	150.800.000	2	155.000.000	2	155.000.000	2	160.000.000	9			
1.03.02.2.02.0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	UNIT	0	0	0	2	1.245.000.000	0	0	0	0	0	0	2			
3	Meningkatnya kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum		Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	%	58,79	60,41		60,79		61,17		61,45		63,22		63,22			
01:03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						63.023.233.200		126.870.591.000		78.244.463.000		85.174.796.000		128.235.665.000				
01:03:03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum aman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	31,58	31,6	1.372.503.800	31,61	4.002.435.000	31,62	1.372.503.080	31,63	2.829.800.000	40	4.002.435.000	40	Bidang Cipta Karyadan Bina Konstruksi	Kabupaten Purworejo	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlayani Penambahan Sambungan Rumah melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	1.656	192	1.372.503.800	408	4.002.435.000	200	1.372.503.080	300	2.829.800.000	400	4.002.435.000	1.492			
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	10	0	0	1	100.800.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4			
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	10	2	1.325.296.800	2	2.000.000.000	3	1.200.000.080	2	1.650.800.000	3	2.000.000.000	12			
1.03.03.2.01.0027	Pemolnaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Terbinanya Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Desa yang dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Desa	8	6	27.207.080	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	46			
1.03.03.2.01.0032	Pertuasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Pertuasan	Jumlah Sambungan Rumah yang tertayani oleh Pertuasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	1.070	0	0	364	1.820.000.000	0	0	200	1.000.800.000	366	1.830.000.000	930			
1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	40	25	20.000.080	20	32.498.000	20	22.503.000	15	29.080.000	10	22.435.000	90			
01:03:05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	Persentase Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	95,21	95,23	7.256.376.400	95,24	13.000.000.000	95,25	7.102.726.080	95,26	7.371.827.000	95,27	10.000.000.800	95,27	Bidang Cipta Karyadan Bina Konstruksi	Kabupaten Purworejo	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	RumahTangga	857	250	7.256.376.400	308	13.000.000.000	250	7.102.726.080	250	7.371.827.000	300	10.000.000.800	1.350			
1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit	1	0	0	1	3.000.000.000	1	230.000.000	0	0	0	0	1			
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Tertayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	RumahTangga	120	120	63.655.080	128	70.000.000	120	80.000.000	120	85.080.000	120	90.000.000	600			
1.03.05.2.01.0040	Pemolnaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	70	50	23.349.680	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.080.000	20	30.000.000	130			
1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	RumahTangga	557	250	7.169.371.800	308	9.900.000.000	250	6.662.726.080	250	7.256.827.000	300	9.780.000.000	1.350			
1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	2			
01:03:06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya drainase jalan di perkotaan dalam kondisi baik / pembangan ataunali tidak tersumbat	Persentase Drainase Jalan di Perkotaan dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Airnya Air Tidak Tersumbat	%	30,52	31	997.073.680	31,4	2.950.000.000	31,81	997.074.000	32,21	2.950.800.000	32,61	2.996.610.000	32,61	Bidang Bina Marga	Kabupaten Purworejo	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya Saluran Drainase Jalan di Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Jalan di Perkotaan yang Ditangani	Meter	1.384	200	997.073.680	208	2.950.000.000	200	997.074.000	200	2.950.800.000	200	2.996.610.000	1.000			
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	0	0	0	1	1.850.000.000	0	0	1	1.650.800.000	1	1.896.610.000	3			
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	0	0	0	1	100.800.000	0	0	1	100.000.000	0	0	2			
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	2	2	997.073.680	2	1.000.000.000	2	997.074.000	2	1.000.800.000	2	1.100.000.000	10			

1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	15.060.000	0	0	1			
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	0	1	130.000.000	0	0	0	0	1			
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substasi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	41.320.000	1	100.800.000	0	0	1	85.060.000	1	100.000.000	4			
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	7.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Laporan	1	1	21.125.000	1	25.000.000	0	0	1	25.060.000	1	25.000.000	4			
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	3	518.386.880	1	409.315.000	2	336.000.000	2	366.100.000	1	286.436.000	9			
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta	1	1	150.000.000	0	0	0	0	1	138.100.000	0	0	2			
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	93.386.880	0	0	1	336.000.000	1	260.000.000	1	286.436.000	4			
1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	245.000.000	1	409.315.000	0	0	0	0	0	0	2			
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	126.625.000	2	140.900.000	2	136.582.000	2	142.000.000	3	265.500.000	11			
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	1	1	93.500.000	1	95.000.000	1	90.582.000	1	95.060.000	1	105.500.000	5			
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	60	20	33.125.000	25	45.000.000	26	46.000.000	27	47.060.000	28	60.000.000	126			
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1			
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Dokumen	2	1	27.375.000	2	60.000.000	3	140.000.000	2	84.060.000	2	84.000.000	10			
1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	10	2	27.375.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.060.000	2	30.000.000	10			
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	54.060.000	1	54.000.000	4			
1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	0	0	0	0	0	1	60.000.000	0	0	0	0	1			
Jumlah							**89.888.801.055**		**158.628.585.000**		**190.981.805.000**		**107.878.031.000**		**150.033.805.000**				

Selanjutnya untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah tidak dapat dilakukan tanpa dukungan yang kuat dari berbagai sektor. Oleh karena itu, implementasi kegiatan pendukung prioritas pembangunan dirancang secara strategis untuk mendukung pencapaian setiap target untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan secara keseluruhan. Subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya jaringan irigasi dalam kondisi baik,ketersediaan dokumen Daerah Irigasi dan kondisi kelembagaan pengelola irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan P3A/GP3A DI kewenangan kabupaten	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Pemeliharaan darurat jaringan irigasi	
				Penyediaan bahan banjiran, bahan/material OP, peralatan kerja OP	
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jaringan irigasi	
				Operasi Jaringan Irigasi	
			Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Operasional KOMIR dan UPI di Tingkat Pengamat	
			Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Penyusunan/Review DED Jaringan Irigasi	
			Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Data Hidrologi (Curah Hujan & Debit Sungai)	
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rehabilitasi Bendung Irigasi kewenangan kabupaten	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatknya rumah tangga dengan akses air minum aman	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Penyusunan DED SPAM	
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Peningkatan SPAM Jaringan pepipaan	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara	Pembinaan Kelompok Pembina Sistem Pembangunan Air Minum	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Pembinaan SPAM Tingkat Desa	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan SPAM Jaringan perpipaan	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Penyediaan jasa penyedotan Lumpur Tinja	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pembinaan Kelompok Penerima Pemanfaat Sanitasi	
			Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	Pembangunan Jamban Sehat	
			Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Optimalisasi kapasitas IPLT	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyusunan DED Pembangunan IPLT	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya drainase jalan di perkotaan dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Penyusunan DED drainase perkotaan Purworejo Kutoarjo	
				Penyusunan masterplan drainase perkotaan Purwodadi	
			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Rehabilitasi/Peningkatan drainase Perkotaan Purworejo Kutoarjo	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Pemeliharaan drainase perkotaan Purworejo Kutoarjo	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya bangunan gedung dengan kondisi baik	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan gedung pemerintah daerah	
				Penyusunan DED/review DED pembangunan gedung pemerintah daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penerbitan PBG, SLF, SBKBG, RTP	
				Fasilitasi Tim Profesi Ahli (TPA); Tim Penilai Teknis dan Penilik Bangunan Gedung	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Pemeliharaan rutin jalan	Pemeliharaan rutin jalan	
			Pemeliharaan berkala jalan	Pemeliharaan berkala jalan	
			Pemeliharaan rutin jembatan	Pemeliharaan rutin jembatan	
			Pemeliharaan Berkala Jembatan	Pemeliharaan Berkala Jembatan	
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	survey kondisi jalan/jembatan	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan DED jalan	
			Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan	
			Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	
			Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	
			Pelebaran Jalan menuju Standar	Pelebaran Jalan menuju Standar	
			Penggantian Jembatan	Penggantian Jembatan	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi lingkup kabupaten	
			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Pelatihan tenaga kerja konstruksi (operator, teknisi dan analis)	
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Jakon	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kinerja penyusunan dokumen RTR. meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR dan terselenggaranya pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata ruang	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Pelaksanaan persetujuan substansi RTRW dan RDTR	
			Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penetapan Kebijakan Tata Ruang	
			Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Evaluasi Kebijakan dan Penilaian Perwujudan Tata Ruang	
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Kebijakan Tata Ruang	
			Penyusunan Peta Dasar	Penyusunan peta dasar	
			Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Penyusunan RTRW dan RDTR	
			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi Tata Ruang	
			Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan dan Penilaian KKPR	
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan SPPR	
			Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tata Ruang	

4.2. Dukungan Terhadap Nasional, Provinsi, Dan Kegiatan Unggulan Daerah

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 selain sebagai rencana strategis untuk mencapai tujuan daerah, juga harus mendukung tujuan Pembangunan secara lebih luas yaitu tingkat provinsi maupun nasional. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, selain harus selaras dengan program unggulan dari Kabupaten Purworejo, program yang direncanakan juga harus mendukung kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah maupun dari pusat. Bentuk dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap kebijakan-kebijakan Pembangunan tersebut antara lain:

1. Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional)

Tabel 4.4
Program yang Mendukung Program Nasional Asta Cita

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi	Rehabilitasi, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi	PUPR	DPUPR
		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	PUPR	DPUPR
		Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	PUPR	DPUPR
		Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan	PUPR	DPUPR
		Penyelenggaraan jalan	Penyelenggaraan jalan	PUPR	DPUPR
		Penataan bangunan gedung	Penataan bangunan gedung	PUPR	DPUPR
		Pengembangan jasa konstruksi	Pengembangan jasa konstruksi	PUPR	DPUPR
		Penyelenggaraan penataan ruang	Penyelenggaraan penataan ruang	PUPR	DPUPR

Asta Cita 3 yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menekankan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Dalam inplementasinya, fokus utama berupa perwujudan konektivitas antarwilayah (jalan dan jembatan), pembangunan infrastruktur pelayanan dasar (air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung dan jasa konstruksi) dan akses yang merata dalam pembangunan melalui rencana tata ruang yang terintegrasi antara pusat dan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain mendukung Asta Cita, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mendukung Program Strategis Nasional terutama program penanggulangan kemiskinan.

Tabel 4.5
Program yang Mendukung Program Nasional Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Terkait
1	Penanggulangan kemiskinan				
	a. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1. Penyediaan unit pengolahan setempat 2. Penyediaan jamban sehat 3. Pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	PUPR	DPUPR

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Terkait
			4. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Bimtek kelembagaan pengelola SPAM 2. Pembinaan pengelolaan dan pengembangan SPAM desa 3. Peningkatan kapasitas SPAM jaringan perpipaan 4. Perluasan SPAM jaringan perpipaan	PUPR	DPUPR

Dalam pengentasan kemiskinan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung melalui pelaksanaan program dua program prioritas yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah berupa penyediaan dan pelayanan pengolahan air limbah domestik serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berupa penyediaan dan pengelolaan SPAM jaringan perpipaan.

2. Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi)

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas dari Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Pembangunan infrastruktur terutama terkait perizinannya, baik terhadap tata ruang berupa KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) maupun perizinan untuk mendirikan bangunan itu sendiri berupa Persetujuan bangunan Gedung (PBG). Hal ini ditujukan untuk meminimalisir adanya pelanggaran terhadap ketidaksesuaian penggunaan lahan di Kabupaten Purworejo terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
2) Pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru melalui penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo beserta dokumen rencana detilnya

Aktivitas maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah dapat dijabarkan dalam tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6

Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi)

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	1. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); 2. Pelayanan Konsultasi Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR)	PUPR	DPUPR
2	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	1. Revisi RTRW; 2. Revisi RDTR Purworejo-Kutoarjo; 3. Penyusunan RDTR Kemiri Pituruh (lanjutan); 4. Penyusunan RDTR KPI (lanjutan); 5. Penyusunan RDTR Bendungan Bener atau Revisi RDTR Border City	PUPR	DPUPR

3. Penjabaran Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan)

Program unggulan Kabupaten Purworejo yang disebut 'PITULUNGAN' merupakan program-program yang disusun guna menyelesaikan berbagai permasalahan dan merespon berbagai isu strategis yang ada di Kabupaten Purworejo. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo sesuai dengan tugas dan fungsinya ikut mendukung implementasi dari program-program unggulan tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.7
Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan)

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas di 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Sehat Penduduke	Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk semua warga	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	PUPR	DPUPR
			Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	PUPR	DPUPR
2	Sejahtera Wargane	Membangun dan/ atau memperbaiki sanitasi lingkungan	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	PUPR	DPUPR
3	Alus Dalane	Pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Purworejo	Rehabilitasi, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi	PUPR	DPUPR
			Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	PUPR	DPUPR
			Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	PUPR	DPUPR

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas di 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
			Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan	PUPR	DPUPR
			Penyelenggaraan jalan	PUPR	DPUPR
			Penataan bangunan gedung	PUPR	DPUPR
			Pengembangan jasa konstruksi	PUPR	DPUPR
			Penyelenggaraan penataan ruang	PUPR	DPUPR

Program unggulan kesatu yang didukung adalah “Sehat Penduduke” yang bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses yang terjangkau, berkualitas, dan berkeadilan terhadap layanan dan edukasi kesehatan. Dalam program unggulan ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung melalui pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.

Program unggulan kedua yaitu “Sejahtera Wargane” Sejahtera Wargane merupakan program prioritas yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk mendukung program ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung dari sektor penyediaan infrastruktur dasar berupa Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah guna memperbaiki kondisi sanitasi lingkungan.

Program unggulan ketiga yaitu “Alus Dalane” yang merupakan program unggulan yang berfokus pada pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang mencakup peningkatan. Dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang dalam pelaksanaan program ini antara lain dengan kegiatan rehabilitasi, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi, pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan, penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung, pengembangan jasa konstruksi dan penyelenggaraan penataan ruang guna mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Purworejo.

4.3. Penentuan Indikator Dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo, yang secara khusus

mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang. Indikator ini harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo kedepan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.

Prestasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja juga akan digunakan dalam laporan pertanggungjawaban, sehingga nilainya merupakan sesuatu yang terukur, oleh karena itu dalam penetapan indikator kinerja diharapkan dapat menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk tahun 2025-2029 menjadi 2 macam indicator yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diuraikan pada Tabel 4.8 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Tabel 4.9.

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo
Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	%	60,03	60,41	60,79	61,17	61,45	63,22	Indikator Tujuan dan Sasaran DPUPR
2	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	70,99	71,38	71,85	72,32	72,79	73,27	Indikator Tujuan dan Sasaran DPUPR
3	Persentase Kinerja Penataan Ruang	%	44,70	52,77	59,07	65,82	70,42	72,99	Indikator Tujuan dan Sasaran DPUPR
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Indikator Tujuan dan Sasaran DPUPR

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo telah menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah. Tingkat capaian tujuan dan sasaran tersebut dirumuskan dalam beberapa indikator yaitu:

1. Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Indikator Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum merupakan indikator tujuan sekaligus indikator sasaran yang pengukuran kinerjanya terdiri dari kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum, penyediaan dan pengelolaan air limbah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan jalan, serta penyelenggaraan jasa konstruksi.

2. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten
   Indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten merupakan indikator tujuan sekaligus indikator sasaran yang menunjukkan kinerja sistem irigasi dengan pengukuran kinerja yang didukung oleh beberapa komponen (sesuai dengan Rumus perhitungan IKSI dari Kementerian PUPR), yaitu: prasarana fisik termasuk jalan inspeksi dan kantor/gudang/rumah jaga bendung, produktivitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi, kondisi kelembagaan P3A
3. Persentase Kinerja Penataan Ruang
   Indikator Persentase Kinerja Penataan Ruang merupakan indikator tujuan sekaligus indikator sasaran yang pengukurannya berdasarkan rata-rata kinerja penataan ruang meliputi kinerja perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
   Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan indikator tujuan sekaligus indikator sasaran yang memastikan kinerja instansi pemerintah berjalan efektif dan akuntabel. Penilaian SAKIP meliputi beberapa komponen penilaian yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Selain indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga memiliki indikator kinerja kunci sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Indikator-indikator tersebut didasarkan pada beberapa peraturan antara lain:

a. Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang ditentukan dlam RPJPD Kabupaten Purworejo,
b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
c. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta
d. Berbagai ketentuan mandatory lain yang relevan.

Target yang telah ditentukan untuk setiap indikator kinerja kunci tersebut sebagai pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara spesifik dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta target kinerjanya dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini.

Tabel 4.9

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Purworejo
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	%	66,53	66,54	66,55	66,56	71,15	71,16	IUP
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	34,85	39,01	43,16	47,32	34,85	51,47	IUP
3	Rumah Tangga dengan akses Sanitasi aman	%	4,61	4,96	5,31	5,66	6,01	14,46	IUP
4	Pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari	%	99,34	99,36	99,37	99,38	100,00	100,00	SPM
5	Penyediaan unit pengolahan setempat	%	95,22	95,23	95,24	95,25	95,26	95,27	SPM
6	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SPM
7	Persentase Rumah tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP)	%	31,59	31,60	31,61	31,62	31,63	40,00	Indikator Kinerja dari Provinsi
8	Akses terhadap Air Minum Aman	%	31,59	31,60	31,61	31,62	31,63	40,00	RPJPN Tahun 2025-2045, indikator layanan prevelensi penurunan stunting
9	Akses terhadap Sanitasi Aman	%	4,61	4,96	5,31	5,66	6,01	14,46	RPJPN Tahun 2025-2045, indikator layanan prevelensi penurunan stunting
10	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	67,78	67,85	67,90	67,95	68,00	68,06	Permendagri No. 18 Tahun 2020
11	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	99,34	99,36	99,37	99,38	100,00	100,00	Permendagri No. 18 Tahun 2020
12	Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,22	95,23	95,24	95,25	95,26	95,27	Permendagri No. 18 Tahun 2020
13	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri No. 18 Tahun 2020
14	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	66,53	66,54	66,55	66,56	71,15	71,16	Permendagri No. 18 Tahun 2020
15	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri No. 18 Tahun 2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
16	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri No. 18 Tahun 2020

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 khususnya urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mulai tahun 2025 hingga 2029.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 dan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen Renstra ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan tahun transisi dan untuk menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaannya selama kurun waktu lima tahun kedepan, diharapkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 ini dapat dilaksanakan dengan konsisten sesuai rencana, yang tentu saja perlu juga didukung peran aktif seluruh *stakeholders* dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Purworejo periode berikutnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo setiap tahun.

a. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.

b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode Renstra.

a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dilandasi oleh amanat peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan setiap perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan jangka menengah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 lebih lanjut mengatur bahwa perangkat daerah wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra juga merupakan tindak lanjut dari pelantikan Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, yang telah ditetapkan Kepala Daerah terpilih yaitu Ibu Hj. Yuli Hastuti, S.H. sebagai Bupati dan Bapak Dion Agasi Setiabudi., S.I.Kom., M.Si. sebagai Wakil Bupati untuk periode Tahun 2025-2030, yang mengamanatkan bahwa RPJMD harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah, yaitu pada 20 Februari 2025, serta menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang rencana strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah RPJMD.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Rencana strategis (Renstra) ini menjadi dokumen penting dalam menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah, serta sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian program pembangunan daerah.

Selain sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Renstra juga berperan strategis untuk mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis pada potensi dan permasalahan aktual daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 mengacu pada:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Daereah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun

2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 6 Seri E Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
29. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Disusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran operasional visi, misi, dan program kepala daerah dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo dalam periode Tahun 2025–2029.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 ini adalah:

a. Menjabarkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan RPJMD Kabupaten Purworejo;
b. Mewujudkan sistem evaluasi dan pengendalian secara efektif, efisien dan terukur atas capaian kinerja tahunan dan lima tahunan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.
c. Menjamin terciptanya koordinasi, sinergi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan instansi-instansi terkait dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder's*) pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo;

d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 adalah:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- 4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah
- 4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinperkimtan) merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai mandat strategis dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan layak, penataan lingkungan permukiman, serta pengelolaan pertanahan yang tertib dan berkeadilan. Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, dinas ini menjadi garda terdepan dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat di bidang hunian, lingkungan, dan tanah yang memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Pelayanan yang diselenggarakan oleh dinas ini mencakup beberapa bidang utama. Pertama, pelayanan di bidang perumahan rakyat, yang menitikberatkan pada upaya pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bentuk pelayanan meliputi fasilitasi pembangunan rumah layak huni, fasilitasi penyediaan hunian vertikal berupa rumah susun, serta fasilitasi program bantuan stimulan perumahan swadaya untuk mendorong masyarakat memperbaiki atau membangun rumah secara mandiri. Kedua, pelayanan di bidang kawasan permukiman. Dinas memiliki tanggung jawab dalam menata dan mengembangkan kawasan permukiman agar tertata rapi, sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, serta penerangan jalan. Selain itu, dinas juga menjalankan program peningkatan kualitas lingkungan permukiman, terutama di wilayah yang masih tergolong kumuh, melalui pendekatan penataan kawasan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan permukiman berjalan sesuai standar teknis dan prinsip keberlanjutan. Ketiga, pelayanan di bidang pertanahan, yang berfokus pada pengelolaan, pengendalian, serta pemanfaatan tanah baik yang dimiliki pemerintah daerah maupun masyarakat. Dinas berperan melakukan inventarisasi dan pengamanan aset tanah negara *(ground government)* agar tidak beralih fungsi secara tidak sah. Selain itu, dinas juga memberikan pelayanan dalam penyelesaian permasalahan pertanahan melalui fasilitasi mediasi, penyusunan dokumen legalitas, hingga koordinasi dengan instansi terkait dalam percepatan sertifikasi tanah.

Dinas juga menyediakan data dan informasi pertanahan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, sekaligus mendukung terwujudnya tertib administrasi dan keadilan dalam pemanfaatan tanah. Lebih jauh, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup fungsi strategis dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, serta koordinasi lintas sektor. Dinas menjadi motor penggerak dalam penyusunan regulasi daerah di bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan, sekaligus menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan tugasnya, dinas berorientasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas pelayanan, dan keberlanjutan pembangunan.

Dengan fungsi dan pelayanan yang komprehensif tersebut, keberadaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan menjadi sangat penting dalam mewujudkan hunian yang layak, lingkungan permukiman yang tertata, serta tata kelola pertanahan yang mendukung terciptanya keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelayanan yang diberikan bukan hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup, pengurangan kesenjangan sosial, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

2.1.1. Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo, bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta Pertanahan terkait dengan kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pengembangan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
d. pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINPERKIMTAN;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 122 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
   a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
   b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat, dibantu oleh:
   a. Pejabat Fungsional; dan;
   b. Pelaksana.
4. Bidang Kawasan Permukiman, dibantu oleh;
   a. Pejabat Fungsional;
   b. Pelaksana,
5. Bidang Pertanahan, dibantu oleh:
   a. Pejabat Fungsional;
   b. Pelaksana.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tugas dari masing-masing unit organisasi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretariat dalam melaksanakn tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

a) pengkoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
b) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
c) pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi bidang perencanaan dan keuangan;
d) pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi bidang umum dan kepegawaian; dan
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinperkimtan berkaitan dengan tugas dan fungsi.

A.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan administrasi perencanaan dan keuangan,yang meliputi:

a) menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
b) menyusun perjanjian kinerja;
c) menyelenggarakan administrasi keuangan
d) menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
e) menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah; dan
f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya;

A.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b,bertugas menyiapkan bahan

perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi:

a) menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
b) menyelenggarakan administrasi umum;
c) menyelenggarakan pengadaaan barang milik daerah;
d) menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
e) menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
f) menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
g) menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum, dan
h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya;

B. Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat

Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

a) pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi progam Daerah:
b) pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi progam Daerah:
c) pembangunan dan Rhabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Progam Daerah;
d) pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi progam Daerah;
e) pembinaan pengelolaan rumah sususn umum dan/rumah khusus;
f) penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
g) penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
h) pelaksanaan urusan penyelenggaraan prasarana dan sarana umum perumahan; dan
i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi.

C. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

a) penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
b) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;;
c) peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;
d) Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Daerah;
e) Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh; dan

f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi.

D. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, bertugas mengelola izin lokasi, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pertanahan, yang meliputi pengelolaan izin lokasi, pengelolaan izin membuka tanah, penatagunaan tanah, pengelolaan tanah kosong, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absente.

Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, menyelenggarakan fungsi:

a) Pemberian izin lokasi dalam Daerah
b) Penerbitan izin membuka tanah;
c) Penggunaan tanah yang hamparannya beradadi Daerah
d) Penyelesaian masalah tanah kosong berupa melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong,
e) Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong,
f) Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah
g) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
h) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente dalam Daerah;
i) Penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah; dan
j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan berkaitan dengan tugas dan fungsi.

E. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun jabatan fungsional yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Purworejo saat ini yaitu: Analis Kebijakan Ahli Muda dan Teknik Tata Bangunan dan Permukiman Ahli Muda.

Struktur organisasi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada gambar berikut:

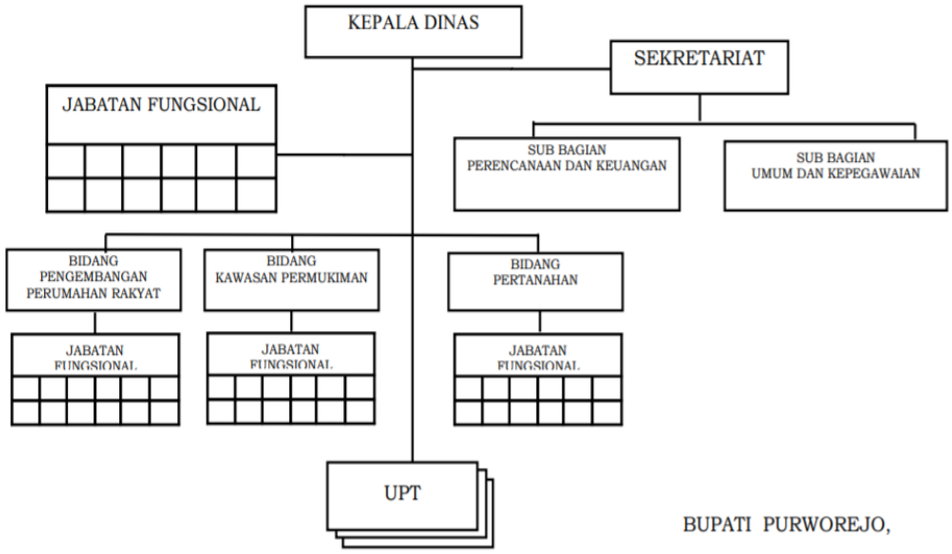

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinperkimtan

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya, baik itu berupa SDM maupun dukungan sarana dan prasarana. Jumlah PNS Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang laki-laki dan 9 (sembilan) orang perempuan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Berdasarkan Golongan

Golongan IV	:	6 orang
IV/a	:	5 orang
IV/b	:	1 orang
IV/c	:	-
Golongan III	:	9 orang
III/a	:	1 orang
III/b	:	4 orang
III/c	:	2 orang
III/d	:	2 orang
Golongan II	:	4 orang
II/a	:	-
II/b	:	-
II/c	:	1 orang
II/d	:	3 orang
Golongan I	:	1 orang
I/a	:	-
I/b	:	-
I/c	:	-
I/d	:	1 orang
P3K	:	7 orang
Jumlah Total	:	27 orang

- Berdasarkan Pendidikan

- SD : 1 orang
- SLTP : 1 orang
- SLTA : 9 orang
- D3 : 3 orang
- S1 : 7 orang
- S2 : 6 orang

Secara umum jumlah personil di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo sudah cukup untuk melaksanakan pelayanan kinerja Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan. Akan tetapi secara kompetensi dan keahlian masih kurang karena kurangnya personil tenaga fungsional bidang pengembangan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Oleh karena itu untuk meningkatkan kapasitas kinerja personil pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, personilnya diikutkan dalam pelatihan-pelatihan baik itu yang sifatnya teknis maupun non teknis, misalnya diklat terkait pengelolaan Rusun/Rusus; diklat pengadaan barang jasa, diklat terkait penanganan kawasan kumuh dan lain-lain.

Sarana prasarana merupakan komponen penting dalam menunjang pencapaian kinerja organisasi agar lebih efektif, efisien dan terarah. Permasalahan daya dukung sarana prasarana kelembagaan merupakan isu sentral yang dominan terdapat di seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Purworejo. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kemampuan anggaran daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana.

Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo beralamat di Jalan Pahlawan No. 2 Purworejo. Dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purworejo didukung oleh sarana dan prasarana pendukung yang menunjang kinerja para pegawainya, sebagaimana berikut:

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1.	Gedung kantor	1 unit
2.	Aula pertemuan	1 unit
3.	Mushola	1 unit
4.	Ruang Arsip	1 unit
5.	Kendaraan roda 4	6 unit
6.	Kendaraan Roda 2	16 unit
7.	Kendaraan Roda 3	1 unit
8.	Komputer/ Laptop	29 unit
9.	Aset lainnya (mebelair)	396 unit

Dari data diatas terlihat bahwa sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terlihat minimalis. Untuk itu perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana pendukung lagi untuk menunjang kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan agar lebih meningkat, diantaranya

pengadaan motor dinas roda 2, pengadaan drone, pengadaan GPS dan lain-lain.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menilai kinerja layanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Purworejo, digunakan perangkat penilaian yang bersifat terukur, terstandar, dan mengacu pada regulasi pemerintah. Penentuan indikator tersebut membantu menilai sejauhmana tujuan, sasaran dan target yang ditetapkan telah tercapai dengan indikator yang terukur, bukan hanya berdasarkan opini atau asumsi.

Melalui capaian indikator, pimpinan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program atau kegiatan. Jika capaian tidak sesuai target, maka dapat segera dilakukan perbaikan atau penyesuaian target. Hal tersebut juga akan mempermudah bagi perangkat daerah untuk menentukan kebijakan baru, menetapkan prioritas dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih tepat. Data capaian kinerja Dinperkimtan selama kurun waktu 2021-2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*	*(23)*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah					89,32	89,2	90,5	91	91,5		89,32	89,82	90,54				100	100	100		
2	Persentase izin rekomendasi siteplan perumahan yang disetujui oleh Pemkab Purworejo					100	100	100	100	100		100	100	100				100	100	100		
3	Persentase capaian penanganan kawasan kumuh					90.7	93	95	97	100		90,70	85,29	86,85				100	91,7	91,4		
4	Persentase akses perumahan terhadap PSU yang layak					35	45	62	78	95		35	45	78,03				100	100	125		
5	Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum					15,11	38.51	60.53	77.98	100		15,11	38,51	61,5				100	100	78,8		

Dari Tabel 2.1 di atas, disimpulkan bahwa beberapa indikator telah menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target, seperti dalam angka indeks kepuasan masyarakat, dan izin rekomendasi siteplan perumahan yang disetujui oleh Pemkab, Bahkan ada yang nilai capaiannya melampaui target yaitu akses perumahan terhadap PSU yang layak. Namun di sisi lain, terdapat sektor yang masih mengalami kendala dalam pencapaian target, yaitu capaian penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi kepentingan masyarakat yang mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir. Penurunan capaian penanganan kawasan kumuh disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan pendanaan. Anggaran yang dialokasikan pemerintah, baik dari pusat maupun daerah, sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan nyata di lapangan. Sementara itu, pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kemitraan swasta, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun partisipasi masyarakat masih belum berjalan optimal. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman.

Selain itu, faktor kelembagaan juga memegang peranan penting. Koordinasi antar-perangkat daerah yang seharusnya menjadi kunci dalam program penanganan kumuh sering kali tidak berjalan secara efektif. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik dalam aspek teknis maupun manajerial, menyebabkan implementasi program menjadi tidak maksimal. Masalah ini semakin diperburuk dengan kurangnya integrasi kebijakan antar-sektor, sehingga banyak program penanganan kumuh berjalan parsial dan tidak berkesinambungan. Faktor eksternal berupa tingginya laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan turut memperparah kondisi. Keterbatasan lahan yang layak huni membuat masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa menempati kawasan yang tidak sesuai peruntukan, seperti bantaran sungai, sempadan rel, hingga daerah rawan bencana. Implementasi tata ruang yang belum konsisten semakin memperbesar risiko timbulnya kawasan kumuh baru. Di sisi lain, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan lingkungan juga berpengaruh terhadap capaian program. Banyak masyarakat di kawasan kumuh yang masih memiliki keterbatasan kesadaran mengenai pentingnya sanitasi, pengelolaan sampah, serta perawatan infrastruktur lingkungan yang telah dibangun. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang didominasi oleh kelompok berpenghasilan rendah membuat mereka sulit berkontribusi dalam perbaikan mandiri, baik dari sisi finansial maupun teknis

Selain dari capaian indicator, untuk menilai keberhasilan program juga ditentukan dari rasio penyerapan anggaran. data rasio penyerapan anggaran Dinperkimtan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.487.000	28.000.000	29.119.960	30.284.718	31.192.782	31.348.731	46.375.000	37.960.000	19.752.100	15.143.250	-	-	45,25%	135,57%	67,83%	50,00%	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.000.000	1.040.000	1.081.520	1.113.922	1.119.421		1.000.000	1.056.100	1.129.300	-	-		100,00%	101,55%	104,42%	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.000.000	1.040.000	1.081.520	1.113.922	1.119.421		1.000.000	1.039.900	1.128.950	-	-		100,00%	99,99%	104,39%	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1.000.000	1.040.000	1.081.540	1.113.523	1.119.011		1.000.000	1.039.900	1.129.780	-	-		100,00%	99,99%	104,46%	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1.000.000	1.040.000	1.081.540	1.113.523	1.119.011		1.000.000	785.800	1.127.600	-	-		100,00%	75,56%	104,26%	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.500.000	1.560.000	1.622.388	1.670.609	1.678.872		1.500.000	555.000	2.919.340	-	-		100,00%	35,58%	179,94%	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.000.000	2.079.940	2.163.114	2.227.843	2.238.902		2.000.000	1.326.800	3.188.100	-	-		100,00%	63,79%	147,38%	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											-	-					-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.777.364.788	2.102.793.368	2.190.893.514	2.423.921.597	2.484.159.245	2.492.338.844	2.626.340.980	2.915.396.650	2.718.022.156	2.586.434.420	-	-	94,56%	138,64%	124,06%	106,70%	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.282.000	20.500.000	21.319.980	22.172.683	22.837.062	22.951.207	20.045.400	20.500.000	21.094.900	10.818.060	-	-	68,46%	100,00%	98,94%	48,79%	-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Administrasi Umum Perangkat Daerah											-	-					-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.270.760	-	-	-	-	-				2.635.500	-	-					-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	-	-	-					-	-					-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.027.680	-	-	-	-	-				3.280.000	-	-					-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.061.400	-	-	-	-	-				36.749.000	-	-					-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		-	-	-	-	-				2.054.200	-	-					-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.749.920	2.229.000	2.318.120	-	-	-					-	-					-	-
Penyediaan Bahan/Material	35.138.400	25.000.000	25.999.920	27.039.857	27.850.146	27.989.316		25.000.000	24.945.800	14.844.840	-	-		100,00%	95,95%	54,90%	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.094.700	79.000.000	82.159.920	85.446.225	88.008.637	88.448.655	70.384.072	91.232.342	72.324.700	30.750.000	-	-	71,75%	115,48%	88,03%	35,99%	-	-
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	-	-	-	-					-	-					-	-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		-	-	-	-	-					-	-					-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											-	-					-	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	-	-	-	-					-	-					-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	-	-	-	-					-	-					-	-
Pengadaan Alat Besar		-	-	-	-	-					-	-					-	-
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		-	-	-	-	-					-	-					-	-
Pengadaan Mebel	47.918.000	-	-	-	-	-	13.032.500				-	-					-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.027.600	-	-	-	-	-		29.984.000			-	-					-	-
Pengadaan Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-	-					-	-					-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pengadaan Aset Tak Berwujud		-	-	-	-	-					-	-					-	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	-	-	-					-	-					-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	-	-	-				47.516.500	-	-					-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	-	-	-					-	-					-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											-	-					-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.664.000	-	-	-	-	-	42.664.000				-	-	100,00%				-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.033.720	48.000.000	49.919.920	51.916.681	53.473.820	53.741.104	46.373.379	41.863.202	44.331.459	51.886.606	-	-	64,38%	87,22%	88,81%	99,94%	-	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	-	-	-					-	-					-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.866.000	15.000.000	15.600.000	16.223.964	16.710.354	16.793.846	8.866.000	15.135.968	15.598.500	26.594.140	-	-	100,00%	100,91%	99,99%	163,92%	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											-	-					-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		65.000.000	67.599.940	70.303.894	72.412.713	72.774.687		80.304.000	67.298.500	110.378.602	-	-		123,54%	99,55%	157,00%	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.940.000	-	-	-	-	-	69.940.000				-	-	100,00%				-	-
Pemeliharaan Mebel		-	-	-	-	-					-	-					-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	-	-	-					-	-					-	-
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-	-					-	-					-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		-	-	-	-	-					-	-					-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.094.600	11.000.000	12.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	14.094.600	25.894.200	212.361.580	30.165.000	-	-	100,00%	235,40%	1769,68%	201,10%	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.981.000	30.000.000	31.199.800	32.447.670	33.416.490	33.583.270	45.981.000		28.502.000	27.545.000	-	-	100,00%		91,35%	84,89%	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											-	-					-	-
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											-	-					-	-
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		-	48.500.000	-	-	-			12.783.500	53.471.521	-	-			26,36%		-	-
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota											-	-					-	-
Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		17.500.000	20.000.000	22.000.000	25.000.000	25.000.000		17.245.750	795.000	3.902.840	-	-		98,55%	3,98%	17,74%	-	-
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		-	20.000.000	-	-	-			8.446.000	7.671.170	-	-			42,23%		-	-
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				-	-	-					-	-					-	-
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				-	-	-			4.897.500	7.884.430	-	-					-	-
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		15.000.000	22.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000					-	-					-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											-	-					-	-
Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	587.291.500	550.500.000	-	-	-	-	581.086.600	148.314.750			-	-	98,94%	26,94%			-	-
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		-	500.000.000	650.000.000	750.000.000	700.000.000			771.372.540	2.405.000	-	-			154,27%	0,37%	-	-
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		700.000.000	325.000.000	-	-	-			811.933.800		-	-			249,83%		-	-
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				317.000.000	331.000.000	383.000.000		197.163.650			-	-					-	-
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota		-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000					-	-					-	-
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus											-	-					-	-
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	204.248.725	362.000.000	275.000.000	275.000.000	290.000.000	300.000.000	187.405.640	352.810.546	245.216.552	201.840.710	-	-	91,75%	97,46%	89,17%	73,40%	-	-
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000		14.945.000	4.830.800	4.854.080	-	-		99,63%	32,21%	24,27%	-	-
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan											-	-					-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	41.310.500	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	41.232.000	74.809.650			-	-	99,81%	299,24%			-	-
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN											-	-					-	-
Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman											-	-					-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		-	50.000.000								-	-					-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		-	25.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000					-	-					-	-
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha											-	-					-	-
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		-	75.000.000	-	50.000.000	-			58.444.950		-	-			77,93%		-	-
Pembentukaan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		-	20.000.000	22.500.000	25.000.000	30.000.000					-	-					-	-
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		-	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000					-	-					-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		50.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000		299.935.154			-	-		100,00%			-	-
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		212.000.000	-	-	-	-		209.695.700			-	-		98,91%			-	-
Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha											-	-					-	-
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	200.000.000	50.000.000	50.000.000				57.950.000	48.201.250			-	-	28,98%	96,40%			-	-
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	20.360.000.000	5.193.982.000	5.252.720.000	5.252.720.000	5.252.720.000	5.252.720.000	1.003.408.600				-	-	4,93%				-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		5.792.720.000	-	2.747.280.000	2.747.280.000	2.747.280.000					-	-					-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	165.711.500	-	.	300.000.000	300.000.000	300.000.000	165.566.916		295.627.920	234.307.030	-	-	99,91%			78,10%	-	-
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	6.600.000.000	7.537.298.000	7.758.280.000	6.427.500.000	6.738.000.000	6.617.000.000		1.083.660.050			-	-		14,38%			-	-
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha								2.150.882.500			-	-					-	-
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH											-	-					-	-
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota											-	-					-	-
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.459.310.000	6.060.000.000	4.368.000.000	4.799.000.000	4.928.000.000	4.917.000.000	1.280.506.301	5.760.000.000	4.035.131.388	990.025.676	-	-	87,75%	95,05%	92,38%	20,63%	-	-
Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	75.000.000									33.369.300	-	-					-	-
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM											-	-					-	-
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan											-	-					-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		100.000.000	-	-	-	-		83.259.700			-	-		83,26%			-	-
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.242.080.000	475.000.000	16.922.560.000	4.897.780.000	559.000.000	2.016.280.000	2.242.080.000	445.000.000	8.922.600.020	5.485.870.253	-	-	100,00%	93,68%	52,73%	112,01%	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		-	-	-	-	-		110.460.650			-	-					-	-
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang		112.000.000	54.466.400	60.000.000	65.000.000	70.000.000			38.293.200	3.966.500	-	-			70,31%	6,61%	-	-
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											-	-					-	-
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN											-	-					-	-
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota											-	-					-	-
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	77.175.000	5.000.000	12.000.000				77.064.890	4.910.000	10.003.000	10.711.440	-	-	99,86%	98,20%	83,36%		-	-
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000	60.000.000	90.000.000		76.263.468	74.048.421	74.870.598	-	-				74,87%	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH											-	-					-	-
Penerbitan Izin Membuka Tanah											-	-					-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		9.992.300	5.173.200	6.257.340	-	-		99,92%	51,73%	62,57%	-	-
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	107.131.000	190.000.000	50.000.000	50.000.000	95.000.000	90.000.000	97.590.532	165.902.468	128.930.225	86.513.668	-	-	91,09%	87,32%	257,86%	173,03%	-	-

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa rasio anggaran dibandingkan dengan anggaran yang tercantum dalam dokumen Renstra Dinperkimtan secara keseluruhan hampir mendekati 100%. Capaian rasio penyerapan anggaran sebesar 100% merefleksikan kondisi ideal dalam siklus manajemen keuangan publik, di mana seluruh alokasi belanja yang telah ditetapkan pada dokumen anggaran dapat direalisasikan sepenuhnya. Secara konseptual, hal ini berkaitan erat dengan prinsip *value for money* dalam manajemen keuangan publik, yang menekankan pada efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Terdapat sejumlah faktor utama yang dapat menjelaskan tercapainya serapan penuh ini. Pertama, perencanaan anggaran yang matang dan realistis. Anggaran yang disusun dengan mempertimbangkan data kebutuhan aktual, kapasitas pelaksanaan, serta proyeksi waktu pelaksanaan program akan lebih mudah direalisasikan. Dalam konteks teori *planning and budgeting*, perencanaan yang baik mampu menjembatani kesenjangan antara ketersediaan sumber daya dengan target pembangunan yang ingin dicapai.

Dengan demikian, kegiatan yang direncanakan bersifat *implementable* dan terhindar dari potensi gagal serap. Kedua, kapasitas kelembagaan dan sumber daya pelaksana yang memadai. Menurut perspektif teori kapasitas institusional, keberhasilan organisasi dalam menyerap anggaran sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur, efektivitas sistem administrasi, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Aparatur yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial akan mampu melaksanakan kegiatan sesuai jadwal, mengelola proses pengadaan dengan tertib, serta menghindari keterlambatan yang berimplikasi pada rendahnya serapan. Ketiga, mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengendalian anggaran yang ketat. akuntabilitas kinerja keuangan tidak hanya ditunjukkan melalui kepatuhan administratif, tetapi juga melalui keberhasilan menghubungkan input (anggaran) dengan output maupun outcome pembangunan. Monitoring yang rutin dan sistematis memungkinkan adanya tindakan korektif jika ditemukan deviasi, sehingga serapan anggaran tetap dapat terjaga pada jalur optimal. Keempat, fleksibilitas manajerial dalam melakukan penyesuaian anggaran. Dalam praktiknya, capaian serapan penuh sering kali dihasilkan melalui mekanisme *budget reallocation* atau revisi DPA, yang memungkinkan pergeseran anggaran dari kegiatan yang kurang feasible menuju kegiatan lain yang lebih realistis untuk direalisasikan.

Langkah ini merupakan bentuk adaptasi manajerial agar tidak terjadi *under spending* yang dapat menurunkan kinerja keuangan daerah. Yang wajib menjadi concern kita yaitu evaluasi kinerja anggaran seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek kuantitatif berupa persentase serapan, melainkan juga pada keterkaitan antara alokasi, realisasi, dan capaian tujuan pembangunan.

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Indikator Tujuan Perangkat Daerah						
	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	-	0,00	
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	66	67,04	67,27	67,68	68,16	
	Persentase luasan kumuh kawasan perkotaan yang ditangani	26,27	45,98	90,70	85,29	86,81	
	Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	-	-	-	-	0,00	
2	Indikator Sasaran Perangkat Daerah						
	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	-	0,00	
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	66	67,04	67,27	67,68	68,16	
	Persentase luasan kumuh kawasan perkotaan yang ditangani	26,27	45,98	90,70	85,29	86,81	
	Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	-	-	-	-	0,00	
3	Indikator Program Perangkat Daerah						
	Persentase Ketercapaian Kinerja , Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Ditangani	38,5	38,5	45,81	79,36	87,56	
	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Diserahkan	0	11,43	30,00	40,00	48,57	
	Persentase Peningkatan Kinerja Pengembangan Perumahan	100	100	100	100	100	
	Persentase Luas Kawasan Kumuh 0-10 Ha yang Ditangani	0	26,26	45,98	45,98	86,21	
	Persentase Permohonanan Izin Membuka Tanah Negara yang Disetujui	-	-	-	-	0,00	
	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	-	-	-	-	0,00	
		NA	NA	NA	NA	0	
4	IUP						
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	66	67,04	67,27	67,68	68,16	
5	SPM						
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100	100	
6	Permendagri 18 2020						
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	78	11	6	25	5	
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	9	0	5	0	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0	45,98%	90,70%	85,29%	86,81%	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0	7,06%	6,66%	6,19%	5,92%	
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0	8	13	7	6	

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran, dan indikator kinerja program di Dinperkimtan Kabupaten Purworejo pada periode 2020-2024 fluktuatif, ada yang mencapai target, tetapi ada juga yang capaiannya masih dibawah target. Tindak lanjut atas capaian program yang belum optimal dilakukan melalui pendekatan evaluatif, korektif, dan adaptif, yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi faktor penyebab utama ketidakcapaian target. Analisis ini mencakup dimensi internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kelemahan koordinasi antar-perangkat daerah, kendala teknis operasional, maupun keterbatasan alokasi anggaran. Selain itu, faktor eksternal juga harus diperhitungkan, misalnya adanya perubahan regulasi, dinamika sosial-ekonomi masyarakat, keterbatasan partisipasi pemangku kepentingan, hingga kondisi *force majeure* seperti bencana alam. Evaluasi berbasis data dan fakta lapangan ini penting untuk memastikan bahwa penyusunan strategi tindak lanjut benar-benar berangkat dari akar permasalahan yang nyata. Tahap berikutnya adalah perumusan strategi perbaikan yang terukur. Strategi ini dapat berupa penyesuaian metode pelaksanaan program, penambahan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, optimalisasi mekanisme penganggaran, maupun peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor. Pada konteks tertentu, strategi juga dapat berupa reorientasi program agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta penguatan sinergi dengan aktor non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil maupun sektor swasta.

Selanjutnya, diperlukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) serta reorientasi target kinerja. Dalam praktiknya, banyak target pembangunan yang ditetapkan terlalu ambisius atau tidak mempertimbangkan dinamika lingkungan yang cepat berubah. Oleh karena itu, prinsip SMART *(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)* harus dijadikan pedoman dalam perumusan target baru, sehingga perencanaan menjadi lebih realistis dan implementatif. Dengan demikian, target yang diperbaharui tetap menantang tetapi dapat dicapai dengan sumber daya dan kondisi yang tersedia. Tidak kalah penting adalah penguatan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) yang lebih ketat dan terstruktur. Melalui Monev yang berbasis indikator kinerja utama (IKU) serta indikator kinerja program (IKP), perangkat daerah dapat memantau progres implementasi secara berkala. Mekanisme *early warning system* perlu dikembangkan agar hambatan yang muncul dapat terdeteksi sejak dini, sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan tanpa menunggu program berakhir.

Selain aspek teknis, peningkatan kolaborasi dan partisipasi pemangku kepentingan juga merupakan langkah strategis. Capaian program yang rendah sering kali disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat, swasta, ataupun lembaga mitra. Oleh karena itu, tindak lanjut harus diarahkan pada peningkatan sinergi multi-pihak (multi-stakeholder partnership), dengan memfasilitasi forum koordinasi, memperluas jejaring kerja sama, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan maupun pengawasan. Lebih lanjut, setiap tindak lanjut program harus disertai

dengan pelaporan dan akuntabilitas publik yang transparan. Mekanisme pelaporan yang terbuka tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Transparansi ini juga akan mendorong pengambil kebijakan dan pelaksana program untuk bekerja lebih akuntabel. Terakhir, diperlukan inovasi dan adaptasi kebijakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis. Inovasi dapat berupa pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring program, pengembangan model pelayanan yang lebih efisien, maupun pendekatan partisipatif yang lebih inklusif. Sementara adaptasi berarti kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan dan strategi pelaksanaan dengan kondisi sosial-ekonomi-politik yang dinamis, sehingga program tetap relevan dan berdaya guna. Dengan pendekatan yang menyeluruh tersebut, tindak lanjut atas program yang capaian kinerjanya di bawah target tidak hanya berfokus pada perbaikan jangka pendek, melainkan juga memperkuat fondasi tata kelola pembangunan yang lebih efektif, efisien, adaptif, dan akuntabel. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengembangan pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dihadapkan pada dinamika yang kompleks, di mana terdapat berbagai tantangan struktural, teknis, dan sosial yang perlu diatasi, namun pada saat yang sama terdapat pula peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Tantangan pertama yang cukup mendasar adalah keterbatasan anggaran. Besarnya kebutuhan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, dan pelayanan pertanahan tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya keuangan. Ketergantungan yang tinggi terhadap APBD maupun APBN sering kali membuat program yang telah direncanakan tidak sepenuhnya dapat direalisasikan. Selain itu, alternatif pembiayaan melalui skema kemitraan publik-swasta, dana hibah, atau pembiayaan kreatif lainnya masih belum dimaksimalkan. Hal ini menimbulkan keterlambatan pembangunan infrastruktur dasar, keterbatasan pembangunan rumah layak huni, dan kurang optimalnya pelayanan pertanahan berbasis digital.Tantangan berikutnya adalah keterbatasan lahan yang semakin nyata seiring dengan meningkatnya laju urbanisasi dan alih fungsi lahan produktif. Harga tanah yang terus melambung tinggi membuat akses terhadap hunian layak semakin sulit, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, masih banyak terjadi sengketa kepemilikan lahan maupun tumpang tindih hak atas tanah, yang disebabkan oleh lemahnya database pertanahan serta belum terintegrasinya sistem informasi secara menyeluruh. Permasalahan ini juga memicu munculnya kawasan kumuh baru, di mana tata ruang permukiman tidak terkelola secara baik dan sering kali rawan bencana. Dari sisi kelembagaan, tantangan tidak kalah besar datang dari keterbatasan kapasitas aparatur. Sebagian pegawai belum memiliki kompetensi optimal dalam pemanfaatan teknologi informasi, penguasaan regulasi terbaru, maupun kemampuan

manajerial dalam perencanaan pembangunan. Rotasi pegawai yang cepat juga mengakibatkan berkurangnya kesinambungan pengetahuan teknis. Di samping itu, koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan belum berjalan harmonis, sehingga menyebabkan tumpang tindih program atau bahkan keterlambatan dalam implementasi kebijakan. Aspek sosial-ekonomi masyarakat turut memperberat tantangan. Masih tingginya angka kemiskinan membuat sebagian masyarakat belum mampu mengakses rumah layak huni, meskipun pemerintah menyediakan program rumah bersubsidi. Banyak masyarakat yang masih membangun rumah secara swadaya tanpa memperhatikan standar teknis, sehingga kualitas bangunan kurang memadai. Selain itu, resistensi masyarakat terhadap program penataan kawasan, khususnya relokasi dari kawasan rawan bencana atau kumuh, menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan pendekatan persuasif dan partisipatif. Tidak kalah penting, tantangan juga datang dari sisi regulasi. Kerumitan regulasi, tumpang tindih aturan antara pusat dan daerah, serta perubahan kebijakan yang cepat menuntut aparat untuk selalu adaptif. Di sisi lain, aspek lingkungan dan perubahan iklim menghadirkan risiko tambahan. Kawasan permukiman sering menjadi titik rawan banjir, longsor, dan masalah sanitasi, sementara kualitas bangunan belum sepenuhnya tahan terhadap perubahan iklim. Hal ini menuntut adanya perencanaan permukiman yang berketahanan lingkungan. Namun, di balik tantangan yang cukup besar tersebut, terdapat pula peluang yang signifikan. Perkembangan teknologi digital membuka ruang transformasi pelayanan publik menjadi lebih modern dan responsif. Pemanfaatan sistem informasi geografis (SIG), database pertanahan digital, dan aplikasi layanan daring mampu meningkatkan transparansi, mempercepat proses pelayanan, sekaligus meminimalisasi potensi sengketa. Digitalisasi juga memungkinkan monitoring pembangunan rumah dan kawasan permukiman secara real time sehingga kebijakan dapat lebih tepat sasaran. Peluang berikutnya datang dari dukungan regulasi dan kebijakan nasional. Program strategis seperti Program Tiga Juta Rumah, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), serta target RPJMN bidang perumahan memberi arah dan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program yang sejalan dengan agenda nasional. Adanya transfer dana dari pusat, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), membuka ruang pembiayaan tambahan untuk memperkuat program perumahan dan permukiman. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dan masyarakat menjadi peluang penting yang dapat digarap. Skema kemitraan pemerintah-swasta memungkinkan swasta berperan dalam penyediaan hunian terjangkau maupun pembangunan infrastruktur permukiman. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam program rumah swadaya, bank sampah, atau pengelolaan lingkungan berbasis komunitas dapat memperkuat keberlanjutan program. Dengan memberikan ruang partisipasi, masyarakat akan memiliki rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil pembangunan, sehingga mendorong keberlanjutan program. Kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan yang semakin meningkat juga menjadi peluang strategis. Konsep hunian hijau (*green housing*), eco-village, dan pembangunan berketahanan iklim kini mulai diterima masyarakat sebagai bagian dari gaya hidup modern yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 11 tentang

Sustainable Cities and Communities, yang dapat dijadikan pijakan normatif sekaligus membuka akses pada potensi dukungan pendanaan internasional. Di sisi lain, peluang sinergi lintas sektor juga semakin terbuka. Dengan penguatan koordinasi bersama sektor pekerjaan umum, kesehatan, sosial, dan lingkungan hidup, pembangunan perumahan dan permukiman dapat dilakukan secara lebih terpadu dan menyentuh akar permasalahan. Integrasi program dengan pengentasan kemiskinan, pengendalian tata ruang, serta adaptasi perubahan iklim akan memperbesar dampak pembangunan.

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) sesungguhnya sangat luas dan beragam, karena sektor perumahan, permukiman, dan pertanahan menyentuh langsung aspek fundamental kehidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan dinas ini tidak hanya sebatas penyedia layanan administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, pemetaan kelompok sasaran layanan menjadi krusial agar setiap program dan kebijakan dapat diarahkan secara tepat, berkeadilan, serta berkelanjutan.

1. **Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**
   Kelompok pertama yang menjadi sasaran utama layanan adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Keterbatasan daya beli membuat kelompok ini tidak mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang layak secara mandiri. Dinas hadir melalui berbagai program seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan rumah susun sederhana, hingga fasilitasi pembiayaan rumah bersubsidi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan akses MBR terhadap hunian yang sehat, aman, dan terjangkau. Lebih jauh lagi, intervensi pada kelompok ini juga berdampak pada peningkatan derajat kesehatan, produktivitas, serta mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

2. **Masyarakat yang Tinggal di Kawasan Kumuh dan Kawasan Rentan**
   Sasaran penting berikutnya adalah masyarakat penghuni kawasan kumuh atau kawasan dengan risiko sosial-ekonomi dan lingkungan tinggi. Permukiman kumuh umumnya ditandai dengan kepadatan penduduk, kualitas bangunan yang rendah, keterbatasan sarana prasarana dasar (air bersih, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, dan ruang terbuka), serta rentan terhadap bencana banjir maupun kebakaran. Dinas melakukan program penataan kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penyediaan sarana air minum dan sanitasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, bukan hanya aspek fisik yang diperbaiki, melainkan juga kualitas sosial dan ekonomi masyarakatnya agar kawasan tersebut berkembang menjadi lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.

3. **Masyarakat yang Terdampak Relokasi atau Pembangunan Strategis**

   Dalam proses pembangunan daerah, tidak jarang terdapat masyarakat yang terdampak program strategis seperti pembangunan jalan, bendungan, atau penataan kawasan kota. Masyarakat terdampak relokasi ini termasuk dalam kelompok sasaran layanan yang membutuhkan penanganan khusus. Dinas berperan memberikan solusi berupa hunian pengganti, bantuan biaya sewa, hingga penyediaan lahan baru dengan kepastian hukum yang jelas. Selain itu, diperlukan pula pendampingan sosial agar masyarakat dapat beradaptasi di lokasi baru tanpa mengalami penurunan kualitas hidup. Hal ini penting untuk mencegah munculnya masalah sosial baru, seperti pengangguran, kemiskinan, atau konflik horizontal.

4. **Pemilik Tanah dan Masyarakat yang Memerlukan Kepastian Hukum Pertanahan**

   Kelompok sasaran lainnya adalah pemilik tanah serta masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum terkait aset pertanahan. Ketidakjelasan status tanah sering menimbulkan konflik dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, Dinas memfasilitasi proses legalisasi aset, sertifikasi tanah, inventarisasi, hingga pemetaan pertanahan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat lebih aman dalam mengelola tanahnya, sementara pemerintah daerah memperoleh dasar yang kuat dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan. Kepastian pertanahan juga mendukung tumbuhnya iklim investasi yang sehat karena lahan tersedia secara legal dan jelas status kepemilikannya.

5. **Pemerintah Desa/Kelurahan dan Lembaga Masyarakat**

   Selain individu, pemerintah desa/kelurahan serta lembaga masyarakat juga termasuk kelompok sasaran layanan. Hal ini karena pembangunan perumahan dan penataan permukiman tidak dapat dilepaskan dari peran komunitas lokal. Dinas perlu melibatkan mereka dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan. Partisipasi lokal dapat memperkuat rasa memiliki dan memastikan keberlanjutan program. Misalnya, dalam pembangunan sistem air bersih atau sanitasi komunal, peran pemerintah desa dan kelompok masyarakat sangat penting untuk pengelolaan dan pemeliharaan pasca pembangunan.

6. **Pengembang, Swasta, dan Mitra Pembangunan**

   Dalam perspektif pembangunan kolaboratif, pengembang perumahan, pihak swasta, serta mitra pembangunan juga termasuk kelompok sasaran. Mereka memiliki peran signifikan dalam penyediaan perumahan, baik untuk MBR maupun non-MBR, serta pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung. Dinas berperan sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pengawas agar pembangunan oleh swasta sesuai dengan ketentuan tata ruang, ramah lingkungan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Kolaborasi ini menjadi salah satu strategi untuk mempercepat penyediaan perumahan layak huni, mengingat keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

7. **Kelompok Rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Korban Bencana)**
   Tidak kalah penting, terdapat kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak terlantar, serta masyarakat yang terdampak bencana. Kelompok ini membutuhkan layanan yang lebih spesifik, misalnya pembangunan hunian yang ramah difabel, lingkungan yang aman bagi lansia, serta hunian sementara maupun permanen bagi korban bencana alam. Layanan terhadap kelompok rentan ini menunjukkan prinsip inklusivitas, di mana Dinas berkomitmen untuk tidak meninggalkan kelompok mana pun dalam proses pembangunan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) merupakan isu yang multidimensional, karena mencakup aspek ketersediaan perumahan, penataan permukiman, pengelolaan pertanahan, hingga penguatan kelembagaan. Permasalahan utama yang sering dihadapi adalah:

a) Keterbatasan ketersediaan rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Harga tanah dan rumah yang terus meningkat tidak sebanding dengan daya beli masyarakat, sementara dukungan dari pengembang untuk membangun rumah bersubsidi masih terbatas di beberapa daerah. Hal ini menyebabkan banyak keluarga yang terpaksa tinggal di hunian tidak layak atau di kawasan padat penduduk.
b) Persoalan kawasan permukiman kumuh masih menjadi tantangan besar. Banyak kawasan perkotaan maupun perdesaan yang menghadapi keterbatasan akses air bersih, sanitasi, drainase, serta pengelolaan sampah yang memadai. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat. Permasalahan ini diperparah dengan adanya pembangunan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), sehingga menimbulkan ketidakteraturan tata ruang dan kesulitan dalam penataan kawasan.
c) Di bidang pertanahan, muncul persoalan sengketa dan tumpang tindih kepemilikan lahan. Kepastian hukum atas hak tanah seringkali lemah, sementara proses administrasi, seperti sertifikasi dan penataan tanah, berjalan lambat.
d) Keterbatasan ketersediaan lahan untuk perumahan baru juga menjadi kendala serius, terutama di daerah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi.
e) Dari sisi infrastruktur permukiman, banyak kawasan yang belum memiliki akses memadai terhadap prasarana dasar, seperti jalan lingkungan, saluran drainase, listrik, dan jaringan air bersih. Bahkan di kawasan yang sudah memiliki infrastruktur, kualitasnya sering tidak terjaga akibat keterbatasan pemeliharaan. Hambatan utama dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur ini adalah keterbatasan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.

f) Permasalahan aspek pendanaan dan anggaran. Program perumahan dan permukiman masih sangat bergantung pada alokasi APBN maupun APBD, sementara pola kemitraan dengan sektor swasta maupun masyarakat belum berjalan optimal. Hal ini membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam memperluas layanan.
g) Aspek koordinasi juga sering menjadi kendala. Sinergi lintas sektor antara Dinas Perkimtan dengan instansi lain, seperti pekerjaan umum, kesehatan, dan lingkungan hidup, belum sepenuhnya terbangun.
h) Integrasi antara program pusat, provinsi, dan kabupaten/kota masih lemah, sehingga menimbulkan tumpang tindih kebijakan maupun kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan permukiman juga masih rendah, padahal aspek ini sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan. Secara keseluruhan, permasalahan pelayanan Dinas Perkimtan dapat dikatakan sebagai hasil dari kombinasi antara keterbatasan sumber daya, lemahnya regulasi, kurangnya sinergi lintas sektor, serta tingginya dinamika sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat secara aktif.
   Sedangkan peluang

2.2.2. Isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis perangkat daerah perlu mempertimbangkan beberapa faktor antara lain potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, isu KLHS yang relevan dan isu lingkungan dinamis yang relevan. Isu strategis Dinperkimtan Kabupaten Purworejo dan analisisnya tersaji dalam Tabel 2.4

Tabel 2.4 Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bonus Demografi	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Belum Memadai	Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aging population negara maju	Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Keterbatasan infrastruktur permukiman dasar, kawasan kumuh perkotaan maupun perdesaan, tingkat keterjangkauan hunian layak, ketidaksesuaian antara pertumbuhan penduduk dan penataan ruang.
Kawasan Pesisir Pantai Selatan	Status tanah belum jelas, konflik pemanfaatan lahan, keterbatasan regulasi dan penegakan hukum, ancaman lingkungan (alih fungsi tanpa kaijan dapat mempercepat abrasi dan merusak ekosistem), kepentingan pembangunan strategis.	Distribusi kesejahteraan yang belum merata dan inklusif	Polarisasi sosial	Transformasi Ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Legalitas dan penataan tanah negara di pesisir, ancaman bencana bagi permukiman, pertumbuhan kawasan permukiman tidak terencana, keterbatasan infrastruktur, pengendalian alih fungsi lahan, keterlibatan masyarakat dan akses keadilan pertanahan.
Wilayah Pengembangan Keburejo (Kebumen-Purworejo)	Kualitas infrastruktur dasar permukiman belum memadai	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Transisi energi untuk mendorong pemerataan	Transformasi Ekonomi	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Belum memadai infrastruktur dasar yang terintegrasi, meningkatnya kebutuhan hunian layak dan terjangkau, belum optimalnya koordinasi lintas daerah.
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Belum optimalnya kompetensi teknis pegawai sesuai kebutuhan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2025-2030 yaitu : *"Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)".* Guna mewujudkan visi tersebut, ditempuh langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan yang dituangkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
2. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
4. Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo mendukung beberapa misi bupati yaitu Misi 2: Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah, Misi 4: Meningkatkan produktivitas dan inklusifitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi local yang mendukung ketahanan pangan dan Misi 5: Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsive dan inovatif berbasis teknologi informasi.

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global, sebuah perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan kinerja pelayanan suatu instansi. Hal tersebut berlaku juga pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Kabupaten Purworejo. Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak boleh mengesampingkan isu-isu strategis yang sedang berkembang saat ini maupun proyeksi 5 (lima) tahun yang akan datang. Kesalahan dalam hal mengidentifikasi berbagai permasalahan pada bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan akan menjadikan blunder terhadap rencana aksi kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat

dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun selanjutnya. Permasalahan terkait perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan merupakan persoalan yang kompleks dan dinamis.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo menetapkan tujuan dan sasaran renstra PD Tahun 2025-2029. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo yaitu “Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman, luas kawasan kumuh perkotaan yang ditangani, tertib administrasi pertanahan serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman, meningkatnya luasan kawasan kumuh perkotaan yang ditangani dan meningkatnya tertib admnistrasi pertanahan. Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo daat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	60	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	68,43	68,51	68,58	68,66	68,74	78,29	
			Persentase luasan kumuh kawasan perkotaan yang ditangani	91,76	93,41	95,05	96,7	98,35	100	
			Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	81	20	40	60	80	100	
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah		70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah		Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak		68,51	68,58	68,66	68,74	78,29	
		Meningkatnya luasan kawasan kumuh perkotaan yang ditangani	Persentase luasan kumuh kawasan perkotaan yang ditangani		93,41	95,05	96,7	98,35	100	
Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan		Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum		20	40	60	80	100	

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Sebagai langkah awal untuk menyusun strategi yang tepat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan merupakan perangkat daerah yang memiliki peran fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah, khususnya terkait penyediaan perumahan layak, penataan permukiman yang berkelanjutan, serta pengelolaan pertanahan yang transparan dan berkeadilan. Peran tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, serta arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menekankan pentingnya penyediaan hunian layak, peningkatan kualitas permukiman, dan tata kelola pertanahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Strategi di bidang perumahan rakyat diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau. Mengingat masih tingginya angka backlog perumahan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Untuk menjamin keterlaksanaan yang efektif dan berkesinambungan, strategi Renstra disusun secara bertahap (*phased strategy*) mulai dari tahap penguatan, peningkatan, pemantapan, hingga mewujudkan dan meneguhkan capaian. Penahapan ini dimaksudkan agar setiap langkah pembangunan memiliki fokus yang jelas, target yang terukur, serta sinergi yang kuat antara program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Berikut Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029:

Tabel 3.2. Pentahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Menguatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan	Memantapkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan	Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan	Meneguhkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan
Menguatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah melalui peningkatan produktivitas pariwisata, industri, dan perdagangan yang inklusif, ekosistem investasi yang kondusif, serta kemandirian desa	Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah melalui peningkatan produktivitas pariwisata, industri, dan perdagangan yang inklusif, ekosistem investasi yang kondusif, serta kemandirian desa	Memantapkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah melalui peningkatan produktivitas pariwisata, industri, dan perdagangan yang inklusif, ekosistem investasi yang kondusif, serta kemandirian desa	Mewujudkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah melalui peningkatan produktivitas pariwisata, industri, dan perdagangan yang inklusif, ekosistem investasi yang kondusif, serta kemandirian desa	Meneguhkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah melalui peningkatan produktivitas pariwisata, industri, dan perdagangan yang inklusif, ekosistem investasi yang kondusif, serta kemandirian desa
Menguatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Meneguhkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah

Dalam konteks penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya pada sektor perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan, terdapat keterkaitan yang erat antara arah kebijakan dengan strategi pembangunan yang dirumuskan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinperkimtan). Hubungan ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi: arah kebijakan memberikan kerangka normatif, sedangkan strategi menyediakan pendekatan implementatif yang konkret. Arah kebijakan Dinperkimtan dapat dipahami sebagai pedoman makro yang disusun untuk mewujudkan tujuan pembangunan sektor perumahan dan permukiman di tingkat daerah. Arah kebijakan ini biasanya bersumber dari dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Dengan demikian, arah kebijakan berfungsi menetapkan *apa yang harus dicapai* oleh Dinperkimtan dalam kurun waktu tertentu. Strategi berperan sebagai instrumen implementatif yang menjabarkan bagaimana arah kebijakan tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk program, kegiatan, maupun sub-kegiatan. Strategi memuat langkah-langkah operasional, pendekatan teknis, serta mekanisme kerja yang memungkinkan arah kebijakan diwujudkan secara efektif dan efisien. Misalnya, jika arah kebijakan menekankan perbaikan kualitas rumah tidak layak huni, maka strategi yang dipilih dapat berupa: (a) pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya; (b) pemanfaatan dana alokasi khusus dan dukungan pembiayaan alternatif; serta (c) penggunaan teknologi bangunan sederhana, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Korelasi antara arah kebijakan dan strategi bersifat hierarkis sekaligus sinergis. Arah kebijakan menetapkan tujuan makro pembangunan sektor perumahan, permukiman, dan pertanahan, sedangkan strategi menyediakan pendekatan implementasi yang bersifat terukur. Dengan kata lain, arah kebijakan berfungsi sebagai “kompas pembangunan”, sementara strategi merupakan “langkah kaki” yang menuntun setiap program menuju tujuan akhir. Tanpa arah kebijakan yang jelas, strategi akan kehilangan arah dan tidak memiliki pijakan normatif; sebaliknya, tanpa strategi yang tepat, arah kebijakan hanya akan menjadi dokumen deklaratif yang tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, korelasi antara arah kebijakan dan strategi juga merefleksikan prinsip *policy cycle* yang terintegrasi. Arah kebijakan berada pada tahap perumusan visi dan sasaran, sementara strategi berada pada tahap implementasi dan manajemen program. Hubungan ini memastikan adanya kesinambungan antara dimensi normatif dengan dimensi operasional, sehingga pelayanan publik di bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan dapat berjalan secara optimal. Berikut adalah strategi dan arah kebijakan Dinperkimtan Tahun 2025-2029:

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Peningkatan penyediaan penyediaan rumah untuk rakyat, dukungan satu KK satu rumah layak huni (kontribusi kabupaten 30%, desa 20%), perbaikan RTLH, pembangunan rumah bagi korban bencana, pengelolaan rumah susun, penyediaan persetujuan bangunan gedung, serta dukungan penyediaan hunian berkualitas terjangkau/ rumah murah dengan sanitasi baik untuk yang membutuhkan (generasi milenial, generasi z, dan masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan perdesaan)	Arah kebijakan ini menitikberatkan pada Peningkatan Penyediaan Rumah untuk Rakyat yang meliputi : a) Meningkatkan ketersediaan unit rumah layak huni bagi masyarakat secara berkelanjutan. b) Mengembangkan skema pembiayaan kolaboratif dengan kontribusi kabupaten (30%) dan desa (20%) untuk memperkuat sinergi pendanaan. c) Mendorong keterlibatan sektor swasta dan BUMN/BUMD dalam pembangunan perumahan rakyat. d) Mengintegrasikan pembangunan rumah dengan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, listrik, sanitasi).	
			Arah kebijakan ini menitikberatkan pada Dukungan Program Satu KK Satu Rumah Layak Huni, yang meliputi : a) Menyediakan skema subsidi, kredit perumahan, dan bantuan stimulan untuk MBR. b) Mendorong swadaya masyarakat melalui program rumah swadaya dengan pendampingan teknis. c) Menjamin kepemilikan rumah layak bagi setiap keluarga guna menekan backlog perumahan.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
			Arah kebijakan ini menitikberatkan pada Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) a) Melaksanakan program rehabilitasi rumah masyarakat miskin/MBR dengan standar kelayakan teknis. b) Memastikan rumah hasil perbaikan memiliki sanitasi layak, akses air bersih, dan ventilasi sehat. c) Menghubungkan perbaikan RTLH dengan program penataan kawasan permukiman kumuh. d) Mendorong partisipasi CSR, filantropi, dan lembaga sosial dalam program perbaikan RTLH.	
			Arah kebijakan ini menitikberatkan pada Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, yang meliputi : a) Menyediakan hunian tetap (huntap) yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak bencana. b) Menerapkan prinsip *disaster-resilient housing* dalam desain rumah. c) Mengintegrasikan pembangunan hunian pascabencana dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan. d) Mempercepat proses pemulihan sosial-ekonomi masyarakat melalui penyediaan rumah yang cepat dan berkualitas.	
			Arah kebijakan ini menitikberatkan pada Pengelolaan Rumah Susun	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
			a) Mengembangkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (rusunami) untuk MBR, generasi milenial, dan generasi Z. b) Mendorong efisiensi penggunaan lahan perkotaan dengan konsep vertikalisasi hunian. c) Menyediakan sarana prasarana pendukung seperti ruang terbuka hijau, fasilitas sosial, dan transportasi publik. d) Membentuk sistem pengelolaan berbasis partisipasi penghuni untuk menjamin keberlanjutan rumah susun	
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Mendorong reforma agraria dengan fokus pada kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) serta penataan akses dan dorongan penataan aset	Arah kebijakan ini menitikberatkan pada Penguatan Kelembagaan GTRA, yang meliputi: a) Memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPN, dan pemangku kepentingan terkait. b) Mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian konflik agraria dan tumpang tindih lahan. c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan GTRA melalui pengembangan sistem informasi, pelatihan, dan pendampingan.	
			Arah kebijakan ini menitikberatkan pada Penataan Aset (Asset Reform) a) Mendorong percepatan redistribusi tanah bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, terutama petani kecil, nelayan, dan masyarakat adat.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
			b) Memperkuat legalisasi aset tanah untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan dan perlindungan hak masyarakat. c) Melaksanakan inventarisasi dan pemetaan tanah secara terpadu untuk meminimalisir konflik dan memperjelas status kepemilikan.	
			Arah kebijakan ini menitikberatkan pada Penataan Akses (Access Reform) a) Memfasilitasi penerima tanah reforma agraria dengan akses pembiayaan, modal usaha, serta dukungan kelembagaan ekonomi. b) Menyediakan sarana dan prasarana penunjang produktivitas, termasuk irigasi, jalan usaha tani, dan akses pasar. c) Memberikan pendampingan teknis dan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola aset secara produktif dan berkelanjutan.	
			Arah kebijakan ini menitikberatkan pada Penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria a) Memprioritaskan penyelesaian konflik agraria melalui mediasi, konsolidasi, dan pendekatan partisipatif. b) Mengembangkan mekanisme penyelesaian yang adil, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.	
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang good clear government dan collaborative governance melalui peningkatan	a) Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
		kesejahteraan, profesionalitas, dan kualitas ASN dan perangkat desa, penerapan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan, penguatan reformasi hukum dan pemberian bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak, memastikan kebebasan beribadan dan perawatan rumah ibadah, serta dorongan rencana aksi daerah tentang ekonomi hijau		

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purworejo, memiliki tugas strategis dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan melalui urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta Pertanahan terkait dengan kewenangan Daerah. Untuk mengoperasionalkan urusan tersebut, program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 melaksanakan delapan program utama, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
5. Program Kawasan Permukiman
6. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
8. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purworejo sampai dengan tahun 2029 yang tersaji dalam Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purworejo, terlampir.

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
S2. Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman, luas kawasan kumuh perkotaan yang ditangani, tertib administrasi pertanahan serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah						
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman			Persentase Rumah Tangga dengn Akses Hunian Layak		
			Meningkatnya kinerja pengembangan perumahan		Persentase Peningkatan Kinerja Pengembangan Perumahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tersusun	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
					Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
					Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Data Rumah yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Terselenggaranya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	
					Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Siteplan Perumahan	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
			Meningkatnya perumahan yang dilengkapi demgan prasarana. sarana dan utilitas umum		Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang diserahkan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan PSU Perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	
			Meningkatnya rumah tidak layak huni yang ditangani		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
		Meningkatnya luasan kawasan kumuh perkotaan yang ditangani			Persentase luasan kumuh kawasan perkotaan yang ditangani		
			Meningkatnya luas kawasan kumuh 0-10 Ha yang ditangani		Persentase luas kawasan kumuh 0-10 Ha yang ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
					Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		
					Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	
					Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Pembentukaan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview / Terlegalisasi	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	
					Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
					Jumlah Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	
					Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
S4. Meningkatnya produktivitas, pemerataan dan inklusivitas perekonomian daerah							
		Meningkatnya tertib administrasi pertanahan			Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum		
			Meningkatnya permohonan izin membuka tanah negara yang disetujui		Persentase Permohonan Izin Membuka Tanah Negara yang Disetujui	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	
					Jumlah Dokumen Permohonan Izin Membuka Tanah	Penerbitan Izin Membuka Tanah	
					Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	
					Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	
			Meningkatnya penanganan sengketa tanah garapan		Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)		Persentase Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
					Jumlah Laporan Penetapan Subjek Tanah Reforma Agraria	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	
S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah			Nilai Sakip Perangkat Daerah		
			Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL(2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
	1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman, luas kawasan kumuh perkotaan yang ditangani, tertib administrasi pertanahan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	53	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	68,16	68,51		68,58		68,66		68,74		78,29		78,29			
			Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang Ditangani	%	86,21	93,41		95,05		96,7		98,35		100		100			
			Persentase Peningkatan Kepastian Hukum atas Tanah bagi Masyarakat dan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	%	21,23	40		60		80		100		100		100			
	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	53	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						3.459.168.555		3.513.823.000		3.459.169.000		3.459.169.000		3.459.169.000				
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	3.459.168.555	100	3.513.823.000	100	3.459.169.000	100	3.459.169.000	100	3.459.169.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	7	3	8.502.000	3	9.557.200	3	9.557.200	3	9.557.200	3	9.557.200	15			
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	7.552.000	22	8.307.200	22	8.307.200	22	8.307.200	22	8.307.200	110			
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	24	625.000	24	625.000	24	625.000	24	625.000	24	625.000	120			
1.04.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	1	625.000	1	625.000	1	625.000	1	625.000	1	625.000	5			
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	27	45	3.003.299.205	45	3.053.352.690	45	3.053.338.048	45	3.053.338.048	45	3.053.338.048	225			
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	26	29	3.002.674.205	29	3.052.727.690	29	3.052.713.048	29	3.052.713.048	29	3.052.713.048	29			
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDdan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	26	44	625.000	44	625.000	44	625.000	44	625.000	44	625.000	220			
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlayaninya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0		1	375.000	1	375.000	1	375.000	1	375.000	4			
1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	11	375.000	11	375.000	11	375.000	11	375.000	44			
1.04.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlayaninya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0		16	375.000	16	375.000	16	375.000	16	375.000	64			
1.04.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	0	0	0	16	375.000	16	375.000	16	375.000	16	375.000	64			
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	0		17	375.000	17	375.000	17	375.000	17	375.000	68			
1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	17	375.000	17	375.000	17	375.000	17	375.000	68			
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	9	5	107.605.300	5	110.538.743	5	73.000.000	5	73.000.000	5	73.000.000	35			
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	2.636.300	12	2.768.115	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	60			
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	18	18	3.216.700	18	3.377.535	18	2.000.000	18	2.000.000	18	2.000.000	90			
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	36.745.800	1	37.113.258	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5			

1.04.01.2.08.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	5	5.245.200	5	5.769.720	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	25			
1.04.01.2.08.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	34	34	16.676.300	34	17.510.115	34	15.000.000	34	15.000.000	34	15.000.000	170			
1.04.01.2.08.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	12	2.500.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	48			
1.04.01.2.08.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	43.085.000	12	40.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	60			
1.04.01.2.08.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	0	0	2	1.500.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	8			
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disdakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	unit	0	20	12.100.000	0		0		0		0		20			
1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	0	20	12.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20			
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	172.960.050	24	179.305.732	24	177.693.752	24	177.693.752	24	177.693.752	120			
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	57.994.050	12	60.893.752	12	60.893.752	12	60.893.752	12	60.893.752	60			
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	114.966.000	12	118.414.980	12	117.000.000	12	117.000.000	12	117.000.000	60			
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	9	7	154.402.000	7	159.940.635	7	144.255.000	7	144.255.000	7	144.255.000	35			
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	21	21	110.380.000	21	112.567.600	21	110.380.000	21	110.380.000	21	110.380.000	105			
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	1	21.492.000	1	24.353.035	1	13.875.000	1	13.875.000	1	13.875.000	5			
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	45	45	22.530.000	45	23.000.000	45	20.000.000	45	20.000.000	45	20.000.000	225			
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	68,16	68,51		68,56		68,66		68,74		78,29		78,29			
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						3.549.529.450		3.850.428.008		3.549.530.800		3.571.017.000		3.627.439.000				
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya kinerja pengembangan perumahan	Persentase Peningkatan Kinerja Pengembangan Perumahan	%	100	100	232.771.000	100	236.449.000	100	232.771.000	100	236.449.000	100	240.185.000	100	Bidang Pengembangan Perumahan	Kabupaten Purworejo	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tersusun	Dokumen	4	4	8.869.100	5	14.586.400	5	15.706.300	5	16.449.000	5	16.000.000	24			
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	dokumen	1	1	1.355.300	1	1.355.300	1	1.500.000	1	1.600.000	1	2.000.000	5			
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	dokumen	1	1	2.655.600	1	2.655.600	1	3.000.000	1	3.200.000	1	3.560.000	5			
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Permahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	dokumen	1	0	0	1	3.317.800	1	3.500.000	1	3.600.000	1	4.000.000	5			
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Permahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawas Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1.560.400	1	1.560.400	1	2.000.000	1	2.100.000	1	2.500.000	5			
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	dokumen	1	1	3.317.800	1	5.706.300	1	5.706.300	1	5.949.000	1	6.000.000	5			
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Beacana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Terselenggaranya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0		0		0		0		0		0			
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Beacana Kabupaten/Kota yang Terbangan	Unit Rumah	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khasus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Prograre Kabupaten/Kota yang terbangun	Unit Rumah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khasus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Doksumen	2	2	228.040.200	2	218.011.900	2	202.064.700	2	207.200.000	2	210.185.000	10			
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Peghuni Rumah Susun	laporan	1	1	218.011.900	1	215.983.600	1	200.064.700	1	205.000.000	1	207.185.000	5			
1.04.02.2.05.0002	Pelatausahaan Pemantaatan Rumah Sasun Umum dan/atau Rumah Khasus	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khasus	Jumlah Dokumen Pemanfaatas Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khasus	dokumen	2	2	2.028.300	2	2.028.300	2	2.000.000	2	2.200.000	2	3.000.000	10			
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tersetunnya Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Siteplan Perumahan	Dokumen	1	1	3.841.700	1	3.841.700	1	15.000.000	1	12.800.000	1	12.000.000	5			
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	laporan	1	1	3.841.700	1	3.841.700	1	15.000.000	1	12.800.000	1	12.000.000	5			
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya rumah tidak layak huni yang ditangani	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Ditangani	%	87,56	93,4	2.189.618.600	96,02	2.189.619.000	98,72	2.189.619.000	100	2.189.619.000	100	2.224.215.000	100	Bidang Kawasan Permukimas	Kabupaten Purworejo	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kamuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlanganinya Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	unit	263	100	2.189.618.600	100	2.189.619.000	100	2.189.619.000	100	2.189.619.000	100	2.224.215.000	500			
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Peacegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permakiman Kumuh dengan Laas di Bawah 10 (Sepaluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukimas Kumuh di Laar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepulah) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit rumah	263	100	2.091.493.600	100	2.091.494.000	100	2.091.494.800	100	2.091.494.000	100	2.126.090.000	500			
1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumah dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kamuh Baru	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	laporan	0	1	98.125.000	1	98.125.000	1	98.125.000	1	98.125.000	1	98.125.000	5			
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya perumahan yang dilengkapi dengan prasarana. sarana dan utilitas umum	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang disorahkan	%	48,57	65,71	1.127.139.850	74,29	1.424.360.000	82,86	1.127.140.800	91,43	1.144.949.000	100	1.163.039.000	100	Bidang Pengembangan Perumahan	Kabupaten Purworejo	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terselenggaranya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dokumen	100	2	1.127.139.850	2	1.424.360.000	2	1.127.140.800	2	1.144.949.000	2	1.163.039.000	10			
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersetunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaaa Penyediaaa PSU Perumahan	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasidalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	laporan	8	6	8.313.200	6	10.000.000	6	12.000.000	6	14.000.000	6	15.000.000	30			
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Permahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	lokasi	2	4	1.118.826.650	5	1.414.360.000	6	1.115.140.000	6	1.130.949.000	6	1.148.039.000	28			
3	Meningkatnya layaan kawasan kumuh perkotaan yangditangani		Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang Ditangani	%	66,21	93,41		95,05		96,7		98,35		100		100			
01:04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						118.346.600		1.500.000.000		118.347.000		1.000.000.000		1.015.800.000				
01:04:03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya luas kawasan kumuh 0-10 Ha yangditangani	Persentase luas kawasan kumuh 0-10 Ha yang ditangani	%	86,81	93,69	118.346.600	95,27	1.500.000.000	96,85	118.347.000	98,42	1.000.000.000	100	1.015.800.000	100	Bidang Kawasan Permukimas	Kabupaten Purworejo	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Tersusunnya Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukimas Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen	1	0		1	15.000.000	2	20.000.000	3	120.000.000	3	120.800.000	10			
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Tereview/Terlegalis asinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview / Terlegalinasi	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.800.000	0			
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat	0	0	0	2	15.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	8			
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahas dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Survei dan Peaetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahandan Permukiman Kumuh	dokumen	1	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	1			
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Dokumen	1	2	118.346.600	2	1.485.000.000	2	96.347.000	3	680.000.000	4	895.800.000	100			
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Husi yang Diperbaiki	unit rumah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kumuh	laporan	1	1	54.940.000	1	55.000.000	1	43.347.000	1	80.000.000	1	65.000.000	5			
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	0	0	0	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	unit rumah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	1,93	2	83.406.800	2	1.355.000.000	1	55.000.000	2	820.000.000	2	830.800.000	9			
4	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan		Persentase Peningkatan Kepastian Hukum atas Tanah bagi Masyarakat dan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	%	21,23	40		60		80		100		100		100			
02:10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						161.526.200		205.429.000		161.526.000		164.078.000		166.871.000				
02:10:04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya penanganan sengketa tanah garagan	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	%	100	20	45.039.200	40	118.794.000	60	45.039.000	80	45.751.000	100	46.474.000	100	Bidang Pertanahan	Kabupaten Purworejo	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersetunnya Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1	45.039.200	2	118.794.000	2	45.039.000	2	45.751.000	2	46.474.000	9			
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasas Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	45.039.200	1	118.794.000	1	45.039.000	1	45.751.000	1	46.474.000	5			
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02:10:06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria(TORA)	Persentase Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	%	0	20	16.000.000	40	16.253.000	60	16.000.000	80	16.253.000	100	16.510.000	100	Bidang Pertanahan	Kabupaten Purworejo	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan Penetapan Subjek Tanah Reforma Agraria	Jumlah Laporan Penetapan Subjek Tanah Reforma Agraria	Laporan	0	1	16.000.000	1	16.253.000	1	16.000.000	1	16.253.000	1	16.510.000	5			
2.10.06.2.01.0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fuegsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fuegsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	0	1	16.000.000	1	16.253.000	1	16.000.000	1	16.253.000	1	16.510.000	5			

02.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Meningkatnya permohonan izin membuka tanah negara yang disetujui	Persentase Permohonanan Izin Membuka Tanah Negara yang Disetujui	%	100	20	108.487.000	40	170.382.000	60	100.487.000	80	102.075.000	100	103.687.000	100	Bidang Pertanahan	Kabupaten Purworejo	
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Tersusunnya Dokumen Permohonan Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Permohonan Izin Membuka Tanah	dokumen	1	1	108.487.000	1	170.382.000	1	100.487.000	1	102.075.000	1	103.687.000	5			
2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	dokumen	1	1	108.487.000	1	170.382.000	1	100.487.000	1	102.075.000	1	103.687.000	5			
Jumlah							7.288.570.805		9.169.680.004		7.288.572.800		8.194.268.000		8.269.079.000				

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun: 1) Renja = 1 dokumen 2) Perubahan Renja = 1 dokumen 3) RKT = 1 dokumen 4) RKT Perubahan = 1 dokumen 5) PK = 1 dokumen 6) PK Perubahan = 1 dokumen 7) MR OPD = 1 dokumen 8) RKO = 1 dokumen 9) RKO Perubahan = 1 dokumen 10) KAK = 1 dokumen 11) KAK Perubahan = 1 dokumen 12) ASB = 1 dokumen 13) ASB Perubahan = 1 dokumen 14) RUP (Rencana Umum Pengadaan) = 1 dokumen 15) RUP Perubahan = 1 dokumen 16) RKA = 1 dokumen 17) RKA Perubahan = 1 dokumen 18) DPA = 1 dokumen 19) DPA Perubahan = 1 dokumen 20) GAP GBS = 1 dokumen 21) GAP GBS Perubahan = 1 dokumen 22) BA Forum PD/Musrenbang Kecamatan = 1 dokumen 23) Renstra = 1 dokumen 24) Perubahan Renstra = 1 dokumen, jika ada	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun: 1) Laporan Bulanan (Fisik, Keuangan, Program) = 12 laporan (per bulan) 2) Laporan Triwulanan = 4 laporan (per triwulan) 3) Dokumen LKJIP = 1 laporan 4) Dokumen LKPJ = 1 laporan 5) Dokumen LPPD = 1 laporan 6) Laporan SPIP = 1 laporan 7) Laporan SKM = 2 laporan (per semester) 8) Laporan SPM = 2 laporan (per semester), hanya untuk OPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1) Walidata Pendukung adalah Sekretaris Perangkat Daerah yang membantu pelaksanaan tugas Walidata Tingkat Daerah (Dinkominfostasandi)2) Walidata Pendukung pada tahap perencanaan pengumpulan DSSD: menyerahkan Daftar Data yang dilakukan disabled (tidak diambil/bukan kewenangan) kepada Walidata Tingkat Daerah3) Walidata Pendukung pada tahap pengumpulan DSSD: merekapitulasi data pada masing-masing bidang dalam Perangkat Daerah4) Walidata Pendukung pada tahap pemeriksaan DSSD: memeriksa hasil DSSD yang telah dikumpulkan oleh masing-masing bidang untuk selanjutnya disampaikan kepada Walidata Tingkat Daerah5) Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dapat berupa Laporan/Berita Acara/Surat yang merupakan hasil dari koordinasi dan konsultasi dengan Walidata Daerah, dan membantu Walidata Daerah mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola data pada Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam kurun waktu satu tahun	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD yang dikoordinasikan dan disusun: 1) Laporan rekonsiliasi gaji = 12 laporan (per bulan) 2) Laporan keuangan bulanan (fungsional) = 12 laporan (per bulan) 3) Laporan keuangan bulanan (LRA) = 12 laporan (per bulan) 4) Laporan keuangan semesteran = 2 laporan (per semester) 5) Laporan akhir tahun = 6 laporan (CaLK; LRA; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Penjabaran APBD)	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD yang disusun: 1) Laporan RKBMD Murni = 1 laporan 2) Laporan RKBMD Perubahan = 1 laporan 3) Laporan RKPBMD Murni = 1 laporan 4) Laporan RKPBMD Perubahan = 1 laporan 5) Laporan Semesteran = 2 laporan (per semester) 6) Laporan Pemanfaatan Aset = 1 laporan 7) Laporan Triwulanan = 4 laporan (per triwulan)	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun: 1) Data retribusi dan wajib retribusi = 1 laporan 2) Data potensi retribusi murni = 1 laporan 3) Data potensi retribusi perubahan = 1 laporan 4) Data laporan realisasi bulanan = 12 laporan (per bulan) 5) Data piutang = 1 laporan	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen administrasi kepegawaian yang disusun: 1) DUK = 1 dokumen 2) Nominatif Pegawai = 1 dokumen 3) Rekap Kehadiran = 12 dokumen (per bulan) 4) Dokumen Realisasi Pengembangan Kompetensi = 1 dokumen 5) Laporan Realisasi Disiplin Pegawai = 2 dokumen (per semester)	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, seperti: lampu, batu baterai, roll kabel, dsb dalam kurun waktu satu tahun Dihitungnya per jenis, sehingga 1 jenis = 1 paket Jika membeli lampu, baterai, dan kabel berarti ada 3 jenis = 3 paket	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga: keset, sapu, pel, sabun (bahan dan peralatan kebersihan) dalam kurun waktu satu tahun Hanya bisa diambil oleh PD yang belum outsourcing Dihitungnya per jenis, sehingga 1 jenis = 1 paket Jika membeli sapu dan pel berarti ada 2 jenis = 2 paket	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor: jamuan (minum) harian pegawai, pakan rusa dalam kurun waktu satu tahun	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan/ penggandaan: stopmap, spanduk, kartu kendali, kuitansi dinas, fotokopi, kalender dalam kurun waktu satu tahun Dihitungnya per jenis, sehingga 1 jenis = 1 paket Jika membeli stopmap, spanduk, kartu kendali, dan kalender berarti ada 4 jenis = 4 paket	
			Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan bahan/ material: ATK, benda pos, dalam kurun waktu satu tahun Dihitungnya per jenis, sehingga 1 jenis = 1 paket	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu dalam kurun waktu satu tahun Laporan Bulanan = 12 laporan (per bulan), jika tidak ada tamu = laporan nihil	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD: rapat koordinasi (internal & eksternal), konsultasi dalam dan luar daerah dalam kurun waktu satu tahun Laporan Bulanan = 12 laporan (per bulan)	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD yang disusun: Laporan Semesteran = 2 laporan (per semester)	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan pada tahun n Bisa diambil oleh seluruh PD dengan tetap menyesuaikan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	
			Pengadaan Mebel	Mebel yang diadakan: kursi, meja, lemari pada tahun tertentu	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung meliputi : laptop, printer, scanner, GPS	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana pendukung meliputi : AC	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran listrik, air dan telepon	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Outsourcing jasa keamanan dan kebersihan kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas	
			Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebelair, meja, kursi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan/ mesin lainnya yang dipelihara: komputer, laptop, scanner, printer, pesawat telepon, fax, jaringan internet	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi: gedung kantor	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi: AC, pompa air, TV, papan tulis, layar LCD, LCD proyektor, dsb. (berada di dalam gedung kantor, sebagai kelengkapan gedung yang tidak langsung mendukung kelancaran tugas pegawai)	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya kinerja pengembangan perumahan			
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
			Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Penyusunan Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Penyusunan Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	
			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen data bakal calon penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota yang terverifikasi	
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Penyusunan data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota (meliputi kawasan sempadan rel KA, sempadan sungai, daerah SUTET, kolong jembatan, kawasan permukiman kumuh/ilegal, rawan bencana, kawasan bukan fungsi permukiman)	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
			Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana melalui rehabilitasi	
			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana melalui pembangunan baru	
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		
			Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Penyusunan Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
			Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penyusunan Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Meningkatnya perumahan yang dilengkapi demgan prasarana sarana dan utilitas umum			
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan PSU perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
			Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Melaksanakan verifikasi dan penyerahan PSU perumahan yang dibangun oleh pengembang	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya rumah tidak layak huni yang ditangani			
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota		
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan rumah tidak layak huni	
			Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Penyusunan laporan Pengawasan dan Pengendalian	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya luas kawasan kumuh 0-10 Ha yang ditangani			
			Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman		
			Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Penyusunan dokumen dan proses legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Penyusunan Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
			Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Penyusunan dokumen hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
			Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Penyusunan dokumen Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
			Pembentukaan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Penyusunan Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Penyusunan Laporan Penyadaran Publik terkait Pencegahan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Penyusunan laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
			Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Penyusunan dokumen kebijakan bidang PKP	
			Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha		
			Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Penyusunan dokumen DED dan siteplan	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Penyusunan laporan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
			Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	
			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Pemugaran kawasan permukiman kumuh	
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Meningkatnya permohonan izin membuka tanah negara yang disetujui			

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
			Penerbitan Izin Membuka Tanah		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Penyusunan dokumen koordinasi dan sinkronisasi, Rapat, Kelengkapan Berkas Permohonan izin membuka tanah	
			Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Penyusunan dokumen Penetapan Lokasi Tanah Negara yang akan dimohonkan Haknya	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya penanganan sengketa tanah garapan			
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Basis Data Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	
			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)			
			Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan laporan pelaksanaan fungsi GTRA	

Strategi merupakan agenda sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, pegangan atau Petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasant indak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2021–2026.

Rumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan sesuai dengan **table 5.1 (Tabel TC-26)** dibawah ini.

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1. Dukungan Dinperkimtan Terhadap Program Delegasi Provinsi

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026
1	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Perbaikan rumah tidak layak huni	Perkim	Dinperkimtan	Perbaikan rumah tidak layak huni
		Fasilitasi penanganan rumah bagi korban bencana	Perkim	Dinperkimtan	Fasilitasi penanganan rumah bagi korban bencana
		Fasilitasi pengesahan *siteplan* perumahan bagi pengembang	Perkim	Dinperkimtan	Fasilitasi pengesahan *siteplan* perumahan bagi pengembang
		Pengelolaan sarana dan prasarana Rusunawa	Perkim	Dinperkimtan	Pengelolaan sarana dan prasarana Rusunawa

Berdasarkan Tabel 4.1 tentang Dukungan Dinperkimtan terhadap Program Delegasi Provinsi, dapat dijelaskan bahwa Dinperkimtan Kabupaten Purworejo memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian program delegasi *Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan*

Gelanggang Olah Raga Internasional, khususnya dalam bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diakomodasi Dinperkimtan Kabupaten Purworejo melalui pelaksanaan kegiatan:

1. Perbaikan rumah tidak layak huni
2. Fasilitasi penanganan rumah bagi korban bencana
3. Fasilitasi pengesahan *siteplan* perumahan bagi pengembang
4. Pengelolaan sarana dan prasarana Rusunawa

Tabel 4.2. Dukungan Dinperkimtan Terhadap Program strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Terkait	Aktivitas Pendukung di 2026
1	a. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pengelolaan sarana dan prasarana Rusunawa	Pengembangan Perumahan	Dinperkimtan	Pengelolaan sarana dan prasarana Rusunawa
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penanganan kawasan permukiman kumuh	Kawasan Permukiman	Dinperkimtan	Penanganan kawasan permukiman kumuh
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah tidak layak huni	Kawasan Permukiman	Dinperkimtan	Perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah tidak layak huni
2	c. Pembangunan 3 juta rumah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Fasilitasi pengesahan *siteplan* perumahan bagi pengembang	Pengembangan Perumahan	Dinperkimtan	Fasilitasi pengesahan *siteplan* perumahan bagi pengembang
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perbaikan PSU perumahan	Pengembangan Perumahan	Dinperkimtan	Perbaikan PSU perumahan
			Koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan perumahan	Pengembangan Perumahan	Dinperkimtan	Koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan perumahan
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah tidak layak huni	Kawasan Permukiman	Dinperkimtan	Perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah tidak layak huni

Berdasarkan Tabel 4.2 tentang Dukungan Dinperkimtan terhadap Program Strategis Nasional, dapat dijelaskan bahwa Dinperkimtan Kabupaten Purworejo memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Program Strategis Nasional :

a. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
b. Pembangunan 3 juta rumah

Kedua Program Strategis Nasional tersebut, diakomodir Dinperkimtan Kabupaten Purworejo melalui pelaksanaan empat program utama, yaitu :

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman

3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Tabel 4.3. Dukungan Dinperkimtan Terhadap Pitulungan

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas di 2026	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Sejahtera Wargane	Melaksanakan program perumahan rakyat dengan merenovasi dan membangun bagi masyarakat yang membutuhkan	Perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah tidak layak huni	Perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah tidak layak huni	Kawasan Permukiman	Dinperkimtan
2	Alus Dalane	Pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Purworejo	Perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah tidak layak huni	Perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah tidak layak huni	Kawasan Permukiman	Dinperkimtan
			Koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan perumahan	Koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan perumahan	Kawasan Permukiman	Dinperkimtan
			Perbaikan PSU perumahan	Perbaikan PSU perumahan	Pengembangan Perumahan	Dinperkimtan

Berdasarkan Tabel 4.3 tentang Dukungan Dinperkimtan terhadap Pitulungan, dapat dijelaskan bahwa Dinperkimtan Kabupaten Purworejo memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Program Pitulungan pada Program Unggulan :

1. Sejahtera Wargane,
   Yang dilaksanakan melalui program perumahan rakyat, dengan melaksanakan renovasi/perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. Alus Dalane,
   Yang dilaksanakan melalui program perumahan rakyat, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), dengan tujuan Pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Purworejo.

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Dinperkimtan Kabupaten Purworejo menetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merepresentasikan keberhasilan pelaksanaan peran dan fungsi organisasi. IKU merupakan tolok ukur kunci untuk menilai efektivitas program dan kegiatan yang dijalankan, serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja secara terukur dan objektif.

Indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinperkimtan Kabupaten Purworejo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029 adalah sebagaimana Tabel 4.4/T-C.28 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Tujuan/ Sasaran PD
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	68,43	68,51	68,58	68,66	68,74	78,29	Tujuan/ Sasaran PD
3	Persentase luasan kumuh kawasan perkotaan yang ditangani	%	91,76	93,41	95,05	96,7	98,35	100	Tujuan/ Sasaran PD
4	Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	30	40	60	80	100	100	Tujuan/ Sasaran PD

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	68,43	68,51	68,58	68,66	68,74	78,29	Kawasan Permukiman	IUP
2	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	Pengembangan Perumahan	SPM
3	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	Pengembangan Perumahan	SPM
4	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	Pengembangan Perumahan	Permendagri No 18 Tahun 2020
5	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	Pengembangan Perumahan	Permendagri No 18 Tahun 2020
6	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	92,11	93,69	95,27	96,85	98,42	100	Kawasan Permukiman	Permendagri No 18 Tahun 2020

7	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	5,85	5,77	5,69	5,61	5,54	5,46	Kawasan Permukiman	Permendagri No 18 Tahun 2020
8	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	57,14	65,71	74,29	82,86	91,43	100	Pengembangan Perumahan	Permendagri No 18 Tahun 2020

BAB IV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan , serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan setiap tahun.
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal,

didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.

c. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
d. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

Bupati Purworejo,

Ttd

Yuli Hastuti

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian pada Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya, maka dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) Kabupaten Purworejo perlu menyusun dokumen perencanaan strategis yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Renstra Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, yang akan dicapai oleh Satpol PP Damkar 5 (lima) tahun kedepan serta strategi, kebijakan serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo terpilih. Dokumen Renstra ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan serta penganggaran dapat lebih terpadu, terarah serta konsisten dalam mencapai tujuan pembangunan sehingga pelayanan wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dapat terpenuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Renstra Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 disusun, merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran, mencapai tujuan dan misi sehingga visi Bupati terpilih yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2025–2029. Renstra juga sebagai dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa

pembagian urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam huruf E menyebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dimana dalam sub urusan dibagi menjadi antara lain Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bencana, dan Kebakaran. Selanjutnya untuk tingkat daerah kabupaten/kota dalam urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu daerah kabupaten/kota; melaksanakan penegakan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota dan melaksanakan pembinaan PPNS kabupaten/kota. Dalam urusan Bencana melaksanakan Penanggulangan bencana kabupaten/ kota, kemudian dalam urusan Kebakaran melaksanakan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota; Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; Investigasi kejadian kebakaran dan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Selanjutnya dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo; dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan urusan Kebakaran.

Secara geografis, Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak pada posisi antara 1090 47’ 28”sampai 1100 8’ 20” Bujur Timur dan 70 32’ – 70 54” Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Purworejo adalah sebelah utara dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang, sebelah barat dengan Kabupaten Kebumen, sebelah timur dengan Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia serta menjadi jalur lalu lintas dari wilayah Jawa Timur serta Jawa Barat wilayah selatan.

Luas administratif Kabupaten Purworejo adalah sebesar 1.081,45 km^2. Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo memiliki persentase luas 3,18% dari total luasan provinsi. Kabupaten Purworejo terbagi dalam 16 kecamatan, 25 kelurahan, dan 469 desa.

Dengan kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Kabupaten Purworejo, menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi menimbulkan kerawanan trantibumlinmas (ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat) yang dapat mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis pada masyarakat ditambah dengan adanya situasi pendemi *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Situasi dan kondisi yang demikian sangat berpotensi menimbulkan tingkat kerawanan. Hal tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka pelaksanaan Renstra

Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai suatu serta dalam pelayanan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kabupaten Purworejo.

Dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah perlu ditangani secara bertahap, kontinyu dan berkesinambungan, sedangkan untuk menyelesaikan potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menurunkan tingkat kerawanan yang ada, peran serta masyarakat perlu terus kita tumbuh kembangkan.

Tujuan dari penegakan perda, pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat adalah dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Visi Bupati Purworejo tahun 2025 – 2029 adalah "Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)".

Strategi yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya tahapan penyusunan Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan Renstra PD;
b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD;
c. Penyampaian Rancangan Awal RPJMD kepada PD;
d. Penyampaian Rancangan Renstra PD;
e. Forum Perangkat Daerah/ Lintas PD;
f. Verifikasi Rancangan Renstra PD;
g. Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD;
h. Reviu APIP;
i. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;
j. Penetapan Renstra PD.

Penyusunan Rancangan Renstra Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 ini memerlukan dukungan semua pihak dalam pelaksanaannya yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan kondisi masyarakat Purworejo yang tertib dengan iklim kondusif didukung aparat Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang profesional.

Adapun hubungan keterkaitan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya digambarkan dengan skema sebagaimana Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

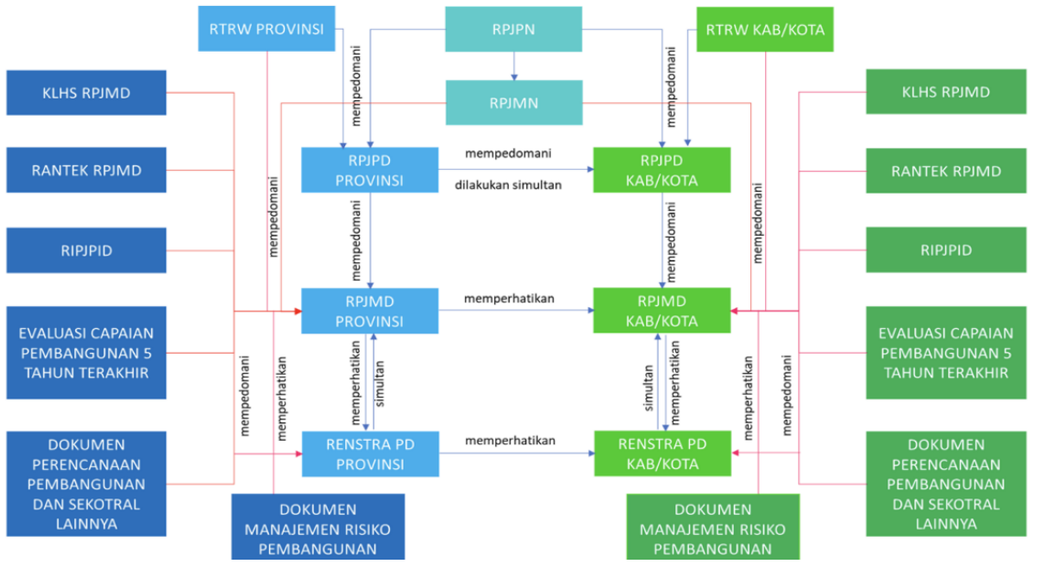

Sumber: Inmen Nomor 2 Tahun 2025

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 548);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).

30. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 135 Seri D Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Renstra Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud:

   a. Memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas selama 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo;
   b. Menjadi tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.

2. Tujuan

   Renstra Satpol PP Damkar Kabupaten Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan:

   a. Mewujudkan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Untuk mengintegrasikan program-program pembangunan di daerah dalam rangka penyusunan program lima tahunan, serta menjamin konsistensi perencanaan dan komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo.
   b. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program-program/kegiatan serta akuntabilitasnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) Bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra PD.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan data-data dan informasi terkait urusan yang menjadi tanggungjawab PD dan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta tentang gambaran pelayanan Perangkat Daerah meliputi Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah dihasilkan berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, tantangan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi serta peluang-peluang pengembangan Perangkat Daerah dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada melalui Renstra Perangkat Daerah ini, serta Permasalahan dan Isu Strategis

Perangkat Daerah yang menguraikan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra yang mengemukakan apa saja faktor- faktor penghambat maupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu- isu Strategis.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif. Kemudian uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Pada bab ini juga dikemukakan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah tahun 2025-2029 serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Satpol PP Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol PP Damkar berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

a. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Satpol PP Damkar menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
2) Penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program kerja bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
3) Pembinaan dan pengendalian teknis bidang penegakan Perda dan perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
4) Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
5) Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
6) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
7) Penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP Damkar;
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1.1.2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo mengacu pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo terdiri atas:

a. Kepala Satpol PP Damkar

Kepala Satpol PP Damkar bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Damkar.

b. Sekretariat

Sekretariat Satpol PP Damkar dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP Damkar.

Sekretariat bertugas mengoordinasikan penyiapkan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Satpol PP Damkar. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, dan keuangan;
d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP Damkar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a. Pejabat Fungsional; dan
b. Pelaksana.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi:
   a) Menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
   b) Menyusun perjanjian kinerja;
   c) Menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
   d) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan jabatannya.
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas melakukan menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:
   a) menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
   b) menyelenggarakan administrasi umum;
   c) menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
   d) menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
   e) menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
   f) menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

g) menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Damkar.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah bertugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, yang meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan dan mengawasi di bidang penyidikan dan penindakan;
c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP Damkar berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:

a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;dan
b. Seksi Penyelidikan dan Penindakan.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah. Kepala seksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a. Pejabat Fungsional; dan
b. Pelaksana.

1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan yang meliputi:
   a) melaksanakan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
   b) melaksanakan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;dan
   c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah berkaitan dengan tugas jabatannya.
2) Seksi Penyelidikan dan Penindakan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Penyelidikan dan Penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati), yang meliputi:
   a) melaksanakan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
   b) melaksanakan penyelidikan dan penindakan;
   c) melaksanakan Pengembangan Kapasitas dan Karier Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS); dan

d) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah berkaitan dengan tugas jabatannya.

d. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Damkar.

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi Operasi Pengendalian dan Pembinaan Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana serta Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang Penyelenggaraan Trantibumlinmas;
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana; dan
c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP Damkar berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:

a. Seksi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.

Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a. Pejabat Fungsional; dan
b. Pelaksana.

1) Seksi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Ketentraman , Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, yang meliputi:
   a) melaksanakan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
   b) melaksanakan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
   c) melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten;
   d) melaksanakan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada;

e) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat berkaitan dengan tugas jabatannya.

2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana, yang meliputi:
   a) melaksanakan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   b) melaksanakan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
   c) melaksanakan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   d) melaksanakan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   e) Melaksanakan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
   f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat berkaitan dengan tugas jabatannya.

e. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Damkar. Bidang Pemadam Kebakaran bertugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang Pemadam Kebakaran yang meliputi Pemadaman, penyelamatan investigasi, pemberdayaan masyarakat, dan sarana dan prasarana kebakaran.

Bidang Pemadam Kebakaran Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang Pemadaman, penyelamatan, dan investigasi;
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kebakaran;dan
c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

a. Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Investigasi; dan
b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kebakaran.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a. Pejabat Fungsional; dan

b. Pelaksana.

1) Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Investigasi bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pemadaman penyelamatan kebakaran dan investigasi, yang meliputi:
   a) melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah meliputi:
      1. melaksanakan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten;
      2. melaksanakan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten;
      3. melaksanakan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran;dan
      4. melaksanakan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten;
   b) menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia; pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia;
   c) menyelenggarakan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
   d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pemadam kebakaran berkaitan dengan tugas jabatannya.
2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kebakaran bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kebakaran yang meliputi:
   a) Memberdayakan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran meliputi:
      1. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
      2. melaksanakan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran; dan
      3. melaksanakan dukungan pemberdayaan masyarakat/ relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana.
   b) Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten, meliputi:
      1. melaksanakan standarisasi sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
      2. melaksanakan pengadaan sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
      3. melaksanakan pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
      4. melakukan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK);
      5. melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan,

penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
6. melaksanakan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
7. melaksanakan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;

c) Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, meliputi:
1. melakukan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi;
2. melakukan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi; dan
3. melakukan pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi.

d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas jabatannya.

f. UPT

UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Satpol PP Damkar. Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan peraturan Perundang-undangan. UPT Satpol PP Damkar dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol Damkar. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

g. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Satpol PP Damkar. Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Fungsional.

Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas, dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah.

2.1.1.3. Tata Kerja

Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya.

a. Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
b. Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
c. Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam menyampaikan laporan dapat menyampaikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
d. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk ke bawahan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur Sistem Kerja Perangkat Daerah.

Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 disajikan dalam Gambar 2.1 Bagan Organisasi Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

Gambar: 2.1
Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Pemadam Kebakaran Praja Kabupaten Purworejo
Sesuai Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022

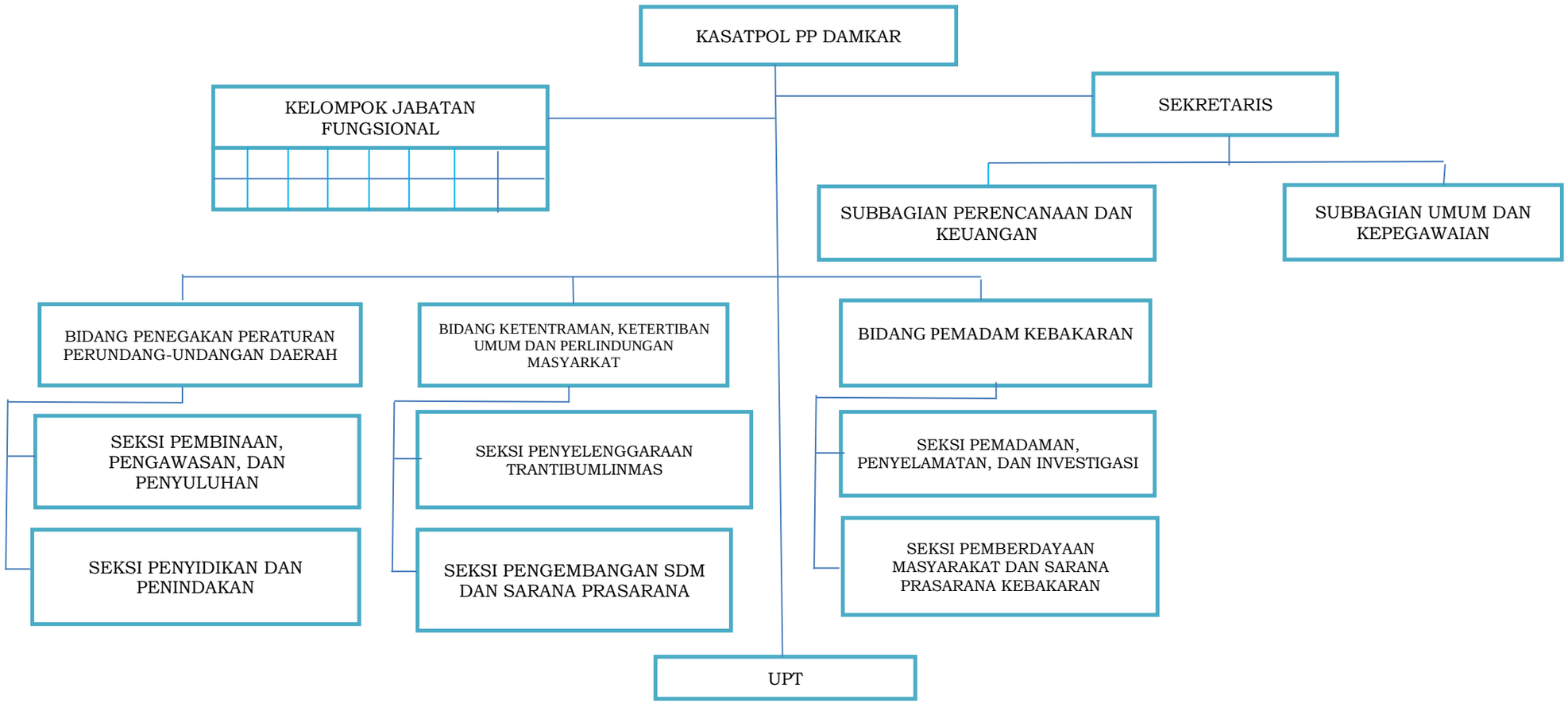

2.1.2. Sumber Daya Satpol PP Damkar

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025 memiliki pegawai sebanyak 112 orang, dengan rincian PNS sebanyak 56 orang, PPPK sebanyak 54 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 2 orang. Keseluruhan pegawai terdiri dari 92 laki-laki dan 21 perempuan dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Berdasarkan Golongan (ASN)

Tabel: 2.1
Pegawai Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Berdasarkan Golongan

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								0
Golongan IV/d								0
Golongan IV/c		1						1
Golongan IV/b			1				1	2
Golongan IV/a			3	1				4
JUMLAH GOLONGAN IV	0	1	4	1	0	0	1	7
Golongan III/d				2			2	4
Golongan III/c				3		1	3	7
Golongan III/b				1		1	5	7
Golongan III/a						2	12	14
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	0	6	0	4	22	32
Golongan II/d						1	7	8
Golongan II/c						6	2	8
Golongan II/b							1	1
Golongan II/a								0
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	7	10	17
Golongan I/d								0
Golongan I/c								0
Golongan I/b								0
Golongan I/a								0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH PPPK GOLONGAN 1							1	1
JUMLAH PPPK GOLONGAN 5						37	15	52
JUMLAH PPPK GOLONGAN 7						1		1
JUMLAH PPPK GOLONGAN 9								0
JUMLAH PPPK GOLONGAN 10								0
JUMLAH PPPK	0	0	0	0	0	38	15	54
TOTAL	0	1	4	7	0	49	48	110

Sumber Data: Data Kepegawaian Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 (Juli)

b. Berdasarkan Pangkat

Tabel: 2.2
Pegawai Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Berdasarkan Pangkat

No	Berdasarkan Pangkat	Jumlah
1	Pembina Utama	0
2	Pembina Utama Madya	0
3	Pembina Utama Muda	1
4	Pembina Tk. I	2
5	Pembina	4
6	Penata Tk. I	4
7	Penata	7
8	Penata Muda Tk. I	7
9	Penata Muda	13
10	Pengatur Tk. I	9
11	Pengatur	8
12	Pengatur Muda Tk. I	1
13	Pengatur Muda	0
14	Juru Tk. I	0
15	Juru	0
16	Juru Muda Tk. I	0
17	Juru Muda	0
18	VII	1
19	V	52
20	I	1
21	Tenaga Non ASN Satpol PP	1
22	Tenaga Non ASN Damkar	0
23	Honorer Tenaga Kebersihan	1
	Jumlah	112

Sumber Data: Data Kepegawaian Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 (Juli)

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel: 2.3
Pegawai Satpol PP Damkar Kabupaten. Purworejo Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah	
		ASN	NON ASN
1	Laki-laki	90	1
2	Perempuan	20	1
	Jumlah	110	2

Sumber Data: Data Kepegawaian Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 (Juli)

d. Berdasarkan Usia

Tabel: 2.4
Pegawai Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Berdasarkan Usia

No	Berdasarkan Usia	Jumlah	
		ASN	NON ASN
1.	20 - 35 tahun	41	0
2.	36 - 55 tahun	56	2
3.	≥ 56 tahun	13	0
	Jumlah	110	2

Sumber Data: Data Kepegawaian Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 (Juli)

e. Berdasarkan Pendidikan

Tabel: 2.5
Pegawai Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Berdasarkan Pendidikan

No.	Berdasarkan Pendidikan Formal	Jumlah	
		ASN	Non ASN
1	S3	0	
2	S2	7	
3	S1	16	
4	D4	3	
5	D3	9	
6	SMA/SLTA	73	2
7	SMP	1	
8	SD	1	
	Jumlah	110	2

Sumber Data: Data Kepegawaian Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 (Juli)

f. Berdasarkan Pendidikan Diklat

Tabel: 2.6
Pegawai Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Berdasarkan Pendidikan Diklat

No	Berdasarkan Pendidikan Dasar dan Diklat	Jumlah
1.	Diklat Pimpinan II	2
2.	Diklat Pimpinan III	4
3.	Diklat Pimpinan IV	9
4.	Diklat PPNS	4
5.	Diklat Dasar Pol PP	47
6.	Diklat Damkar	38
	Jumlah	104

Sumber Data: Data Kepegawaian Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 (Juli)

2.1.2.2. Sarana Prasarana

Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.7
Inventaris Tanah Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Luas (m2)
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.572
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	539

Sumber Data: Data KIB (A) Satpol PP Damkar Tahun 2024 (Desemberi)

Tabel: 2.8
Inventaris Peralatan dan Mesin Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		Keterangan
			Layak	Tidak Layak	
1.	Air Compressor	3	3		
2.	Portable generating set	1	1		
3.	Stationary generating set	1	1		
4.	Electric generating set lainnya (dst)	1	1		
5.	Portable water pump	2	2		
6.	Pompa Air	3	3		
7.	Station Wagon	5	5		

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		Keterangan
			Layak	Tidak Layak	
8.	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2	2		
9.	Truck + Attachment	2	2		
10.	Pick up	2	2		1 Pinjam Pakai ke Polres
11.	Sepeda Motor	11	11		
12.	Mobil Pemadam Kebakaran	6	6		
13.	Mobil Tangki Air	1	1		
14.	Gergaji Chain Saw	1	1		
15.	Perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	1		
16.	Perkakas khusus (special tools) lainnya (dst)	1	1		
17.	Mesin ketik manual standard (12-16 inci)	1	0	1	Rusak Berat
18.	Mesin ketik manual langewagon (18-27 inci)	1	0	1	Rusak Berat
19.	Lemari besi/metal	20	20		
20.	Lemari kayu	1	1		
21.	Rak besi	2	2		
22.	Rak kayu	2	2		
23.	Filing cabinet besi	8	8		
24.	Filing cabinet kayu	2	2		
25.	Brandkas	1	1		
26.	Kardex kayu	2	2		
27.	Mesin absensi	1	0	1	Rusak Berat
28.	Overhead projector	1	0	1	Rusak Berat
29.	Papan pengumuman	2	2		
30.	Alat kantor lainnya	8	8		
31.	Meja kerja kayu	2	2		
32.	Kursi besi/metal	5	5		
33.	Kursi kayu	8	8		
34.	Sice	2	1	1	1 Rusak Berat
35.	Meja rapat	6	6		
36.	Meja 1/2 Biro	57	53	4	4 Rusak Berat
37.	Kursi rapat	52	50	2	2 Rusak Berat
38.	Kursi putar	18	15	3	3 Rusak Berat
39.	Kursi biasa	2	2		
40.	Bangku tunggu	1	1		
41.	Kursi lipat	54	53	1	1 Rusak Berat
42.	Sofa	2	2		
43.	Lemari es	1	1		
44.	AC window	2	1	1	1 Rusak Berat
45.	AC split	4	4		
46.	Kipas angin	3	1	2	2 Rusak Berat
47.	Televisi	1	1		

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		Keterangan
			Layak	Tidak Layak	
48.	Sound system	1	1		
49.	Wireless	1	1		
50.	Megaphone	3	3		
51.	Tustel	4	2	2	2 Rusak Berat
52.	Timbangan barang	1	1		
53.	Dispenser	2	1	1	1 Rusak Berat
54.	Bracket Standing Peralatan	1	1		
55.	Alat rumah tangga lain-lain	39	39		
56.	Alat Pemadam/ Portable	8	8		
57.	Pakaian panas/lengkap	20	20		
58.	Alat pembantu kebakaran	34	34		
59.	Alat pemadam kebakaran lainnya	3	3		
60.	Meja kerja Pejabat Eselon IV	1	1		
61.	Meja kerja pegawai non structural	17	13	4	4 Rusak Berat
62.	Kursi kerja pegawai non structural	25	25		
63.	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	5	5		
64.	Buffet kayu	1	1		
65.	Automatic emergency light	3	3		
66.	Layar film/projector	1	1		
67.	Pesawat Telephone	1	1		
68.	Handy Talky (HT)	34	32	2	2 Rusak Berat
69.	Facsimile	1	1		
70.	Unit transceiver VHF Portable	1	1		
71.	Wireless amplifier	1	1		
72.	Alat Komunikasi Lainnya	2	2		
73.	Peralatan pemancar mf/mw lainnya (dst)	1	1		
74.	Antena VHF/ FM Stationary	2	2		
75.	Switcher/menara antena lainnya (dst)	1	0	1	Rusak Berat
76.	Alat khusus keamanan lainnya	6	6		
77.	PC Unit	19	16	3	3 Rusak Berat
78.	Lap top	26	19	7	7 Rusak Berat
79.	Note Book	1	0	1	Rusak Berat
80.	Personal komputer lainnya	6	3	3	3 Rusak Berat
81.	Printer (peralatan personal komputer)	16	16		
82.	Scanner (peralatan personal komputer)	1	1		
83.	Rambu tidak bersuar lainnya (dst)	105	99	6	6 Rusak Berat
	Jumlah	709	661	48	

Sumber Data: Data KIB (B) Satpol PP Damkar Tahun 2024 (Desember)

Tabel: 2.9
Inventaris Gedung dan Bangunan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Luas Lantai (m2)	Kondisi Bangunan
1.	Bangunan gedung kantor permanen (alih fungsi Rumah Negara)	90	Baik
2.	Bangunan gedung kantor permanen (gd. SatpolPP Damkar)		Baik
3.	Bangunan gedung kantor lain-lain (Papan Nama)	0,6	Baik
4.	Bangunan gedung kantor lain-lain (Aula dan R. Kasat PolPP Damkar)		Baik
5.	Bangunan gedung garasi/pool lain-lain (dst) (Pos Damkar Kutoarjo)		Baik
6.	Bangunan gedung garasi/pool lain-lain (dst) (Kantor Induk)		Baik
7.	Bangunan gedung garasi/pool lain-lain (dst) (Pos Damkar Purwodadi)		Baik
8.	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen (Mushola)	54	Baik

Sumber Data : Data KIB (C) Satpol PP Damkar Tahun 2024 (Desember)

Tabel: 2.10
Inventaris Jalan, Irigasi, dan Jaringan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo

No	Jenis Barang/Nama Barang	Konstruksi
1.	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya (dst)	Sumur Bor

Sumber Data : Data KIB (D) Satpol PP Damkar Tahun 2024 (Desember)

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai hak-hak dasar setiap warga negara. Pelayanan publik ini merupakan tolak ukur apakah pemerintah melakukan kinerjanya dengan baik karena kualitas pelayanan publik ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan publik ini harus dilakukan secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo mempunyai peranan dalam membantu Bupati Purworejo dalam memberikan pelayanan publik. Dasar urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Berikut dapat kami sajikan dalam Tabel 2.11 (TC.23) Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.11 (TC.23)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1	Indikator sasaran I: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				93,05	93,10	88,31	88,32	88,33	88,34	77	93,11	89,18	88,32	93,10	N/A	83%	100%	101%	100%	105%	N/A
2	Indikator Sasaran II Sebelum: Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat diselesaikan	100%			100%	100%					100%	100%					100%	100%				
	Indikator Sasaran III Sebelum: Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	100%			100%	100%					100%	100%					100%	100%				
	Indikator Sasaran II Sesudah: Persentase Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%					100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	N/A			100%	100%	100%	N/A

Dari Tabel 2.11(TC.23) diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dari target yang ditetapkan adalah 100%, hal tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mencapai kinerja maksimal serta menunjukkan fokus perangkat daerah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pada kepuasan Masyarakat dalam hal Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dan Pemadaman Kebakaran.

Target IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) menunjukkan peningkatan bertahap dari tahun 2021 hingga 2026. Tahun 2021 Realisasi sebesar 77,00 jauh di bawah target 93,05. Kemudian terjadi lonjakan realisasi IKM pada tahun 2022 sebesar 93,11, hal ini menunjukkan pencapaian yang baik. Tahun 2023 dan 2024 juga secara konsisten memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan meskipun terdapat penurunan pada nilai target IKM, hal ini dikerenakan adanya perubahan kebijakan. Selanjutnya pada capaian tahun 2025 merupakan realisasi capaian semester I (satu) tahun 2025 dengan nilai IKM sebesar 93,10. Capaian ini jauh melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025, yaitu 88,33. Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam meningkatkan kepuasan masyarakat di awal tahun. Tantangan yang mungkin dihadapi adalah bagaimana menjaga konsistensi pada kualitas layanan dan mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia, sehingga capaian kepuasan masyarakat yang sudah baik pada semester pertama dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan hingga akhir tahun.

Kemudian pada capaian Indikator Sasaran Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran mencapai 100%. Dalam hal ini berarti tidak ditemukan adanya kesenjangan/ gap pelayanan Perangkat Daerah, baik dari segi pelayanan trantibum maupun pelayanan kebakaran. Antara target renstra perangkat daerah yang ditetapkan, realisasi capaian renstra, dan rasio capaian renstra perangkat daerah mencapai 100%. Tentu saja keberhasilan pelayanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah mempunyai dasar hukum yang kuat, tersedianya Sumber Daya Aparatur yang unggul, semangat dalam menyelesaikan tugas, dan selalu melakukan monitoring dan koordinasi apabila ada hambatan dalam pelaksanaannya, dan tersedianya anggaran serta dan upaya untuk terus memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan SOP terhadap masyarakat.

Adapun untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo pada periode Renstra 2021-2026 Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo disajikan dalam Tabel 2.12 (TC.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo berikut:

Tabel 2.12 (TC.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.114.738.944	12.122.578.989	12.183.904.463	15.849.953.381	12.992.849.670	13.101.207.902	12.297.307.805	11.812.198.299	11.861.589.270	15.428.070.811	5.505.962.867	0	93,77	97,44	97,35	97,34	42,38	0,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7.899.942.912	7.836.189.653	6.729.254.657	7.339.384.117	8.715.959.770	10.754.755.702	7.471.708.343	7.671.260.939	6.492.466.277	7.199.837.693	4.416.967.842	0	94,58	97,90	96,48	98,10	50,68	0,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.211.600	43.737.300	32.833.600	16.882.000	20.604.200	22.489.200	19.498.500	40.728.000	31.660.600	16.846.000	19.140.600	0	96,47	93,12	96,43	99,79	92,90	0,00
1	Sebelum: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.211.600	27.288.400	16.841.000				19.498.500	27.055.200	15.728.000				96,47	99,15	93,39			
	Sesudah: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13.292.900	14.088.600	16.641.100				13.278.600	13.406.200	0				99,89	95,16	0
2	Sebelum: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	2.987.300	1.508.700				0	1.988.300	1.508.700				0	66,56	100,00			
	Sesudah: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0	594.100	0				0	271.500	0				0	45,70	0
3	Sebelum: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	2.319.600	1.914.600				0	1.875.500	1.914.600				0	80,85	100,00			

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Sesudah: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0	340.000	0				0	0	0				0	0,00	0
4	Sebelum: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	2.327.900	2.409.600				0	2.327.900	2.409.600				0	100,00	100,00			
	Sesudah: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0	324.000	0				0	324.000	0				0	100,00	0
5	Sebelum: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0	1.700.200	1.168.500				0	1.700.200	1.168.500				0	100,00	100,00			
	Sesudah: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				512.000	0	0				512.000	0	0				0	0	0
6	Sebelum: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	3.144.100	5.130.000					2.477.100	5.070.000				0	78,79	98,83			
	Sesudah: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.777.100	2.999.100	0				2.755.400	2.888.800	0				99,22	96,32	0
7	Sebelum: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	3.969.800	3.861.200				0	3.303.800	3.861.200				0	83,22	100,00			
	Sesudah: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.000	2.258.400	5.848.100				300.000	2.250.100	0				100,00	99,63	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.857.792.454	6.176.581.598	6.094.976.039	6.682.903.511	8.123.959.520	10.182.605.752	5.587.459.596	6.073.837.247	5.917.108.406	6.580.947.048	4.176.779.137	0	95,39	98,34	97,08	98,47	51,41	0,00
1	Sebelum: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.848.864.454	6.165.354.098	6.086.827.039				5.578.893.096	6.063.503.547	5.909.752.206				95,38	98,35	97,09			
	Sesudah: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.677.863.411	8.120.643.820	10.177.964.952				6.575.914.748	4.173.878.287	0				98,47	51,40	0

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
2	Sebelum: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0	0	0				0	0	0				0	0	0
3	Sebelum: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0	0	0				0	0	0				0	0	0
4	Sebelum: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0	0	0				0	0	0				0	0	0
5	Sebelum: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	3.688.600	2.042.200				0	3.133.600	2.004.500				0	84,95	98,15			
	Sesudah: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				703.800	929.400	0				701.720	923.700	0				99,70	99,39	0
6	Sebelum: Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0	0	0				0	0	0				0	0	0

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
7	Sebelum: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.928.000	7.538.900	6.106.800				8.566.500	7.200.100	5.351.700				95,95	95,51	87,64			
	Sesudah: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.336.300	2.386.300	4.640.800				4.330.580	1.977.150	0				99,87	82,85	0
8	Sebelum: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0	0	0				0	0	0				0	0	0
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.710.150.674	821.373.405	46.849.300	21.487.400	4.841.200	4.872.900	1.559.497.200	775.232.490	33.118.667	4.075.400	1.915.000	0	91,19	94,38	70,69	18,97	39,56	0,00
1	Sebelum: Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	520.600	2.615.500				0	460.600	2.449.000				0	88,47	93,63			
	Sesudah: Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0	0	0				0	0	0				0	0	0
2	Sebelum: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	196.669.200	0				0	191.650.900	0				0	97,45	0			
	Sesudah: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0	0	0				0	0	0				0	0	0
3	Sebelum: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	3.439.900	4.000.000				0	2.870.900	3.377.400				0	83,46	84,44			

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Sesudah: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.042.600	1.279.900	4.872.900				2.042.200	1.108.700	0				99,98	86,62	0
4	Sebelum: Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0	0	0				0	0	0				0	0	0
5	Sebelum: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		3.124.600	3.500.000				0	3.099.800	3.437.400					99,21	98,21			
	Sesudah: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.830.800	3.561.300	0				1.830.800	806.300	0				100,00	22,64	0
6	Sebelum: Pemulangan Pegawai yang Pensiun	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pemulangan Pegawai yang Pensiun				0	0	0				0	0	0				0	0	0
7	Sebelum: Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				0	0	0				0	0	0				0	0	0
8	Sebelum: Pemindahan Tugas ASN	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pemindahan Tugas ASN				0	0	0				0	0	0				0	0	0
9	Sebelum: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	57.700.000	72.345.600	36.733.800				54.146.300	61.915.000	23.854.867				93,84	85,58	64,94			

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Sesudah: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				17.614.000	0	0				202.400	0	0				1,15	0	0
10	Sebelum: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.652.450.674	545.273.505	0				1.505.350.900	515.235.290	0				91,10	94,49	0			
	Sesudah: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0	0	0				0	0	0				0	0	0
11	Sebelum: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0	0	0				0	0	0				0	0	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.973.800	251.431.300	252.209.000	231.716.300	189.101.300	179.705.300	61.254.673	248.882.827	213.921.000	217.088.200	61.635.249	0	98,84	98,99	84,82	93,69	32,59	0,00
1	Sebelum: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	15.504.700	6.937.000				0	14.614.000	6.930.600				0	94,26	99,91			
	Sesudah: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				7.560.900	7.340.100	7.114.800				7.560.200	2.275.300	0				99,99	31,00	0
2	Sebelum: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	8.576.900	9.175.700				0	8.562.300	9.169.300				0	99,83	99,93			
	Sesudah: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.700.600	11.329.200	0				10.700.000	3.657.000	0				99,99	32,28	0
3	Sebelum: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	5.961.700	6.378.100				0	5.951.400	6.376.000				0	99,83	99,97			
	Sesudah: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.712.400	8.313.300	19.610.800				8.051.100	4.102.505	0				92,41	49,35	0

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
4	Sebelum: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	95.789.100	84.999.600				0	95.288.000	71.911.000				0	99,48	84,60			
	Sesudah: Penyediaan Bahan Logistik Kantor				124.299.000	117.110.700	107.167.200				111.795.600	36.015.000	0				89,94	30,75	0
5	Sebelum: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	22.840.000	25.875.000				0	22.821.500	25.874.800				0	99,92	100,00			
	Sesudah: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.221.800	8.575.200	8.575.200				13.062.900	7.000.000	0				91,85	81,63	0
6	Sebelum: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	2.292.000	0				0	2.040.000	0				0	89,01	0			
	Sesudah: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0	0	0				0	0	0				0	0	0
7	Sebelum: Penyediaan Bahan/Material	0	15.117.400	18.792.900				0	15.107.600	18.792.300				0	99,94	100,00			
	Sesudah: Penyediaan Bahan/Material				10.532.600	5.463.800	6.518.300				10.532.500	2.931.204	0				100,00	53,65	0
8	Sebelum: Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	5.170.500				0	0	5.170.400				0	0	100,00			
	Sesudah: Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.345.000	2.226.000	2.226.000				2.078.000	950.000	0				88,61	42,68	0
9	Sebelum: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.973.800	85.349.500	84.870.000				61.254.673	84.498.027	61.495.000				98,84	99,00	72,46			
	Sesudah: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47.470.000	25.373.400	25.123.400				47.470.000	2.755.000	0				100,00	0	0

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
10	Sebelum: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	10.010.200				0	0	8.201.600				0	0	81,93			
	Sesudah: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.874.000	3.369.600	3.369.600				5.837.900	1.949.240	0				99,39	57,85	0
11	Sebelum: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0	0	0				0	0	0				0	0	0
5	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.112.400	322.352.400	0	0	0	0	38.558.200	317.464.940	0	0	0	0	98,58	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sebelum: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0	0	0				0	0	0				0	0	0
2	Sebelum: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0	0	0				0	0	0				0	0	0
3	Sebelum: Pengadaan Alat Besar	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pengadaan Alat Besar				0	0	0				0	0	0				0	0	0

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
4	Sebelum: Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0	0	0				0	0	0				0	0	0
5	Sebelum: Pengadaan Mebel	0	121.608.200	0				0	117.956.680	0				0	97,00	0			
	Sesudah: Pengadaan Mebel				0	0	0				0	0	0				0	0	0
6	Sebelum: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.112.400	200.744.200					38.558.200	199.508.260					98,58	99,38				
	Sesudah: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0	0	0				0	0	0				0	0	0
7	Sebelum: Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0	0	0				0	0	0				0	0	0
8	Sebelum: Pengadaan Aset Tak Berwujud	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pengadaan Aset Tak Berwujud				0	0	0				0	0	0				0	0	0
9	Sebelum: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	0	0				0	0	0				0	0	0
10	Sebelum: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0				0	0	0				0	0	0			

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Sesudah: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	0	0				0	0	0				0	0	0
11	Sebelum: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	0	0				0	0	0				0	0	0
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.176.584	61.974.850	78.504.318	85.935.906	91.517.550	80.153.550	107.039.904	57.217.390	74.202.587	80.826.592	37.417.507	0	95,42	92,32	94,52	94,05	40,89	0,00
1	Sebelum: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.193.400	3.000.000	0				32.164.050	1.700.000	0				96,90	56,67	#DIV/0!			
	Sesudah: Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0	0	0				0	0	0				0	0	0
2	Sebelum: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.098.000	34.342.250	53.750.886				48.466.502	30.907.838	49.449.155				93,03	90,00	92,00			
	Sesudah: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				63.587.106	68.681.550	68.681.550				58.492.312	27.843.019	0				91,99	40,54	0
3	Sebelum: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0	0	0				0	0	0				0	0	0
4	Sebelum: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.885.184	24.632.600	24.753.432				26.409.352	24.609.552	24.753.432				98,23	99,91	100,00			

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Sesudah: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				22.348.800	22.836.000	11.472.000				22.334.280	9.574.488	0				99,94	0	0
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.525.400	158.738.800	223.882.400	300.459.000	285.936.000	284.929.000	98.400.270	157.898.045	222.455.017	300.054.453	120.080.349	0	99,87	99,47	99,36	99,87	42,00	0,00
1	Sebelum: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	10.429.000	10.429.000				0	10.413.000	10.427.452				0	99,85	99,99			
	Sesudah: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.950.000	38.220.000	34.880.000				39.950.000	26.021.642	0				100,00	68,08	0
2	Sebelum: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.000.000	78.214.000	87.079.000				68.974.870	77.955.545	86.734.125				99,96	99,67	99,60			
	Sesudah: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				194.150.000	181.260.000	183.690.000				194.002.293	82.794.707	0				99,92	45,68	0
3	Sebelum: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	0	0	0				0	0	0				0	0	0			

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Sesudah: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0	0	0				0	0	0				0	0	0
4	Sebelum: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0	0	0				0	0	0				0	0	0
5	Sebelum: Pemeliharaan Mebel	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pemeliharaan Mebel				0	0	0				0	0	0				0	0	0
6	Sebelum: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.779.000	10.995.000	17.400.000				7.679.000	10.971.000	16.319.500				98,71	99,78	93,79			
	Sesudah: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.400.000	17.400.000	17.400.000				17.225.000	6.895.000	0				98,99	39,63	0
7	Sebelum: Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0	0	0				0	0	0				0	0	0
8	Sebelum: Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0	0	0				0	0	0				0	0	0
9	Sebelum: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.746.400	59.100.800	108.974.400				21.746.400	58.558.500	108.973.940				100,00	99,08	100,00			

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Sesudah: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				48.959.000	49.056.000	48.959.000				48.877.160	4.369.000	0				99,83	8,91	0
10	Sebelum: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	0	0				0	0	0				0	0	0
11	Sebelum: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	0	0				0	0	0				0	0	0
12	Sebelum: Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah				0	0	0				0	0	0				0	0	0

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.023.046.720	1.150.591.034	2.445.986.088	5.464.850.664	3.061.334.100	1.709.930.600	1.894.096.045	1.090.814.791	2.415.300.823	5.263.545.009	731.056.057	0	93,63	94,80	98,75	96,32	23,88	0,00
8	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.615.907.320	773.436.434	1.708.507.788	4.754.033.400	1.041.896.400	594.308.200	1.502.431.838	725.838.576	1.680.092.973	4.569.279.579	386.769.657	0	92,98	93,85	98,34	96,11	37,12	0,00
1	Sebelum: Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	742.360.300	508.886.334	1.531.134.788				708.375.925	508.001.444	1.513.121.288				95,42	99,83	98,82			
	Sesudah: Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				324.608.900	333.642.900	88.216.200				312.129.047	123.588.994	0				96,16	37,04	0
2	Sebelum: Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	0	0	0				0	0	0				0	0	0			

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Sesudah: Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				0	0	0				0	0	0				0	0	0
3	Sebelum: Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	239.876.200	109.811.700	54.296.200				236.368.199	84.704.982	52.132.985				98,54	77,14	96,02			
	Sesudah: Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				4.180.722.200	500.623.800	150.585.300				4.025.725.947	244.668.263	0				96,29	48,87	0
4	Sebelum: Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	272.117.520	64.064.900	45.796.400				271.148.800	55.531.150	45.796.400				99,64	86,68	100,00			
	Sesudah: Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				157.437.700	156.520.000	5.119.700				153.400.000	0	0				97,44	0,00	0

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
5	Sebelum: Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	39.436.000	84.114.200	70.410.300				26.223.914	77.601.000	69.042.300				66,50	92,26	98,06			
	Sesudah: Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				84.764.600	42.202.000	0				78.024.585	16.060.000	0				92,05	38,06	0
6	Sebelum: Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.340.000	0	0				4.315.000	0	0				80,81	0	0			
	Sesudah: Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0	0	0				0	0	0				0	0	0
7	Sebelum: Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	310.218.000	0	0				256.000.000	0	0				82,52	0	0			
	Sesudah: Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				0	0	348.080.000				0	0	0				0	0	0

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
8	Sebelum: Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				0	6.600.700	0				0	2.452.400	0				0	37,15	0
9	Sebelum: Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Peraturan Daerah dan Perkada	6.559.300	6.559.300	6.870.100				0	0	0				0,00	0,00	0,00			
	Sesudah: Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan Kepala Daerah				6.500.000	2.307.000	2.307.000				0	0	0				0,00	0,00	0
10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan				0	0	0				0	0	0				0	0	0
11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat				0	0	0				0	0	0				0	0	0
12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				0	0	0				0	0	0				0	0	0

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
9	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	407.139.400	341.604.600	714.264.500	696.477.564	1.976.404.700	1.076.071.800	391.664.207	332.227.000	711.994.050	683.724.630	312.036.400	0	96,20	97,25	99,68	98,17	15,79	0,00
1	Sebelum: Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0	111.447.300	102.922.300				0	29.100.000	0				0	26,11	0
2	Sebelum: Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	178.749.400	139.805.900	71.055.400				165.274.927	130.719.300	71.055.400				92,46	93,50	100,00			
	Sesudah: Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				128.331.140	283.857.700	297.585.400				128.286.300	101.656.600	0				99,97	35,81	0
3	Sebelum: Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	228.390.000	201.798.700	643.209.100				226.389.280	201.507.700	640.938.650				99,12	99,86	99,65			
	Sesudah: Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				568.146.424	1.021.076.300	652.670.700				555.438.330	167.009.200	0				97,76	16,36	0
4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0	23.160.400	11.655.400				0	13.813.600	0				0	59,64	0
5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0	0	0				0	0	0				0	0	0

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)				0	525.000.000	0				0	0	0				0	0,00	0
7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0	0	0				0	0	0				0	0	0
8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				0	11.863.000	11.238.000				0	457000	0				0	3,85	0
9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah				0	0	0				0	0	0				0	0	0
10	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0	35.550.000	23.213.800	14.339.700	43.033.000	39.550.600	0	32.749.215	23.213.800	10.540.800	32.250.000	0	0,00	92,12	100,00	0,00	74,94	0,00
1	Sebelum: Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0	35.550.000	23.213.800				0	32.749.215	23.213.800				0	92,12	100,00			
	Sesudah: Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				14.339.700	6.339.700	6.339.700				10.540.800	0	0				73,51	0,00	0
2	Pembentukan Sekretariat PPNS				0	0	0				0	0	0				0	0	0
3	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				0	0	0				0	0	0				0	0	0
4	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah				0	0	0				0	0	0				0	0	0
5	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				0	36.693.300	33.210.900				0	3225000	0				0	87,89	0

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3.191.749.312	3.135.798.302	3.008.663.718	3.045.718.600	1.215.555.800	636.521.600	2.931.503.417	3.050.122.569	2.953.822.170	2.964.688.109	357.938.968	0	91,85	97,27	98,18	97,34	29,45	0,00
11	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.191.749.312	3.021.206.102	2.727.004.118	2.840.746.600	1.111.993.200	550.381.800	2.931.503.417	2.950.542.169	2.694.327.770	2.765.585.189	331.063.968	0	91,85	97,66	98,80	97,35	29,77	0,00
1	Sebelum: Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0				0	0	0				0	0	0
2	Sebelum: Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.141.749.312	824.572.100	716.735.918				2.882.905.417	810.762.355	706.446.887				91,76	98,33	98,56			
	Sesudah: Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				839.590.900	585.036.800	165.182.600				788.937.647	208.361.978	0				93,97	35,62	0
3	Sebelum: Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	0	0	52.060.000				0	0	43.109.909				0	0	82,81			

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Sesudah: Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				40.380.800	37.938.600	29.529.000				40.353.820	14.295.790	0				99,93	37,68	0
4	Sebelum: Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0				0	0	0				0	0	0
5	Sebelum: Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0	93.603.000	127.932.000				0	93.355.514	127.897.674				0	99,74	99,97			
	Sesudah: Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				147.420.000	242.950.000	231.680.000				147.290.000	58.082.700	0				99,91	23,91	0
6	Sebelum: Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan, Penaggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	50.000.000	1.908.279.402	1.819.250.400				48.598.000	1.891.379.000	1.806.108.500				97,20	99,11	99,28			
	Sesudah: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				1.813.354.900	97.744.500	97.630.400				1.789.003.722	42.325.000	0				98,66	43,30	0
7	Sebelum: Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	0	130.000.000	1.481.000				0	124.504.000	1.480.000				0	95,77	99,93			

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Sesudah: Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				0	27.735.000	26.359.800				0	7.230.000	0				0	26,07	0
8	Sebelum: Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				0	0	0				0	0	0				0	0	0
9	Sebelum: Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0	64.751.600	9.544.800				0	30.541.300	9.284.800				0	47,17	97,28			
	Sesudah: Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				0	6.624.000	0				0	0	0				0	0,00	0
10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0	0	0				0	0	0				0	0	0
11	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				0	0	0				0	0	0				0	0	0

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
12	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				0	113.964.300	0				0	768.500	0				0	0,67	0
13	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran				0	0	0				0	0	0				0	0	0
14	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				0	0	0				0	0	0				0	0	0
15	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran				0	0	0				0	0	0				0	0	0
16	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				0	0	0				0	0	0				0	0	0
17	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran				0	0	0				0	0	0				0	0	0
12	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	0	21.031.900	9.448.500	4.386.700	3.962.800	2.075.000	0	14.358.600	8.948.500	4.342.920	0	0	0,00	68,27	94,71	99,00	0,00	0,00
1	Sebelum: Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0	21.031.900	9.448.500				0	14.358.600	8.948.500				0	68,27	94,71			
	Sesudah: Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				4.386.700	3.962.800	2.075.000				4.342.920	0	0				99,00	0,00	0
2	Sebelum: Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0	0	0				0	0	0				0	0	0			

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Sesudah: Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				0	0	0				0	0	0				0	0	0
13	Investigasi Kejadian Kebakaran	0	0	7.500.000	15.816.900	9.709.800	3.304.800	0	0	6.905.000	15.597.500	375.000	0	0,00	0,00	92,07	98,61	3,86	0,00
1	Sebelum: Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	0	0	7.500.000				0	0	6.905.000				0	0	92,07			
	Sesudah: Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				15.816.900	9.709.800	3.304.800				15.597.500	375.000	0				98,61	3,86	0
14	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	0	93.560.300	264.711.100	184.768.400	89.890.000	80.760.000	0	85.221.800	243.640.900	179.162.500	26.500.000	0	0,00	91,09	92,04	96,97	29,48	0,00
1	Sebelum: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	0	0	74.994.200				0	0	74.638.100				0	0	99,53			
	Sesudah: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				16.568.900	78.170.000	73.420.000				16.502.200	24.500.000	0				99,60	31,34	0
2	Sebelum: Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	0	93.560.300	92.435.000				0	85.221.800	71.893.400				0	91,09	77,78			
	Sesudah: Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				19.181.100	11.720.000	7.340.000				18.300.900	2.000.000	0				95,41	17,06	0

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
3	Sebelum: Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	0	0	97.281.900				0	0	97.109.400				0	0	99,82			
	Sesudah: Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				149.018.400	0	0				144.359.400	0	0				96,87	0	0
15	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Sebelum: Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				0	0	0				0	0	0				0	0	0
2	Sebelum: Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	0	0	0				0	0	0				0	0	0			

No.	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Sesudah: Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				0	0	0				0	0	0				0	0	0
3	Sebelum: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				0	0	0				0	0	0				0	0	0
4	Sebelum: Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	0	0	0				0	0	0				0	0	0			
	Sesudah: Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				0	0	0				0	0	0				0	0	0

Dalam Tabel 2.12 (TC.24) dapat dijelaskan bahwa Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran, dilakukan analisis terhadap capaian anggaran selama lima tahun terakhir, yaitu 2021 hingga 2025. Analisis capaian anggaran periode 2021-2026 bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Anggaran tahun 2021 anggaran direncanakan sebesar Rp 13.114.738.944,00 realisasi anggaran sebesar Rp 12.297.307.805,00. Rasio capaian sebesar 93,77% menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target. Hal tersebut dikarenakan terkait adanya pendemi Covid-19 sehingga kegiatan tidak bisa berjalan dengan semestinya meskipun anggaran telah dialokasikan dengan baik dan hampir mencapai target, dampak pandemi Covid-19 secara signifikan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, yang pada akhirnya mempengaruhi capaian anggaran.

Anggaran tahun 2022 anggaran direncanakan sebesar Rp 12.122.578.989,00 realisasi anggaran sebesar Rp 11.812.198.299,00. Rasio capaian sebesar 97,44% juga menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target, hal tersebut dikarenakan dalam pencapaian target realisasi anggaran pada tahun 2022 menyesuaikan dengan kebutuhan maupun tagihan.

Anggaran tahun 2023, anggaran direncanakan sebesar Rp 12.183.904.463,00 realisasi anggaran sebesar Rp 11.861.589.270,00. Rasio capaian sebesar 97,35%. Capaian realisasi anggaran tersebut juga menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target. Hal tersebut dikarenakan pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.

Kemudian pada tahun 2024, anggaran direncanakan sebesar Rp15.849.953.381,00 realisasi anggaran sebesar Rp 15.428.070.811,00. Rasio capaian sebesar 97,34% menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target. Hal tersebut juga dikarenakan belanja/ realisasi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan atau tagihan. Selain itu terdapat beberapa kegiatan pengadaan adanya efisiensi dari hasil negosiasi harga pengadaan. Selanjutnya pada tahun 2025, anggaran direncanakan sebesar Rp 12.992.849.670,00. Hingga akhir semester pertama (bulan Juni) tahun 2025 realisasi anggaran yang telah tercapai adalah Rp5.505.962.867,00. Angka realisasi ini menunjukkan persentase sebesar 42,38%. Secara umum, realisasi anggaran sebesar 42,38% pada semester pertama (6 bulan) merupakan indikator kinerja yang baik. Idealnya, realisasi anggaran semester pertama berada di kisaran 40% hingga 50%, sehingga capaian 42,38% ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan telah berjalan sesuai jadwal.

Dari hasil penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan capaian yang signifikan dari tahun 2021 ke 2022. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan realisasi anggaran dimana pemulihan kondisi ekonomi dan operasional setelah pandemi *covid-19* berdampak langsung pada peningkatan realisasi anggaran. Dengan kondisi yang mulai normal, kegiatan-kegiatan yang tertunda pada tahun sebelumnya dapat dilaksanakan, dan penerimaan daerah juga mulai pulih. Kemudian setelah tahun 2022, capaian anggaran cenderung stabil kisaran 97%.

Pada tahun 2022-2024 capaian diatas 97% menunjukkan kinerja yang baik. Fluktuasi kecil antara tahun-tahun ini (penurunan tipis) disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang tidak terlalu signifikan.

Kemudian untuk tahun 2025 meskipun kinerja sudah baik, masih ada sisa anggaran yang besar untuk direalisasikan pada semester kedua, yaitu sekitar 57,62%. Tantangan yang mungkin dihadapi adalah memastikan semua program berjalan lancar tanpa hambatan administratif atau teknis agar target realisasi 100% di akhir tahun dapat tercapai.

Sedangkan untuk capaian kinerja program dan kegiatan rata-rata keberhasilan kegiatan dengan interval nilai 100% atau kegiatan dengan capaian kinerja sangat baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan dengan capaian kinerja adalah:

a. Adanya peraturan / perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yang kuat atau mendukung Tupoksi Satpol PP Damkar dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maupun dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah diantaranya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.
b. Ketersediaan Sumber Daya
    1) Tersedianya Sumber Daya Aparatur

        Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kemampuan, pengetahuan dan keterampilan akan sangat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
    2) Tersedianya Anggaran

        Adanya dukungan APBD dalam pencapaian target-target indikator kinerja dan anggaran yang cukup serta pengelolaan keuangan yang efektif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
    3) Tersedianya Sumber Daya Material

        Ketersediaan peralatan, teknologi, dan bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan atau adanya dukungan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.
c. Komitmen yang tinggi dari kepala organisasi perangkat daerah yang diikuti seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di dalam pencapaian target indikator kinerja;
d. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan organisasi perangkat daerah teknis serta jajaran TNI/POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan di dalam pelaksanaan tugas.

Sebagai bagian dari komitmen Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dokumen ini juga memuat Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan selama periode 2020 hingga 2024. Tabel berikut merinci indikator-indikator kinerja, target yang telah ditetapkan, dan realisasi capaian di setiap urusan. Data ini disusun untuk memberikan gambaran

yang jelas mengenai kemajuan yang telah dicapai, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan strategi perbaikan di masa mendatang. Berikut Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan selama periode 2020 hingga 2024 yang tersaji pada Tabel 2.13 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024:

Tabel 2.13
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	*Indikator Tujuan PD Renstra Periode 2025-2029*						
	1. Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024
	2. Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024
	3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,12	NA	NA	NA	70,21	Nilai SAKIP Tahun 2020 tercatat 72,12, Angka ini menunjukkan kategori akuntabilitas kinerja yang baik. Tahun 2021 s.d 2023 data tidak tersedia (NA). Ketidaktersediaan data ini disebabkan oleh tidak adanya reviu dari Inspektorat. Ini berarti tidak ada evaluasi resmi yang dilakukan pada periode tersebut, untuk itu Satpol PP Damkar tidak dapat mengetahui apakah kinerja SAKIP membaik, memburuk, atau tetap stabil selama tiga tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2024 Nilai SAKIP adalah 70,21. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, dengan penurunan sebesar 1,91 poin. Ketiadaan reviu dari Inspektorat pada tahun 2021 hingga 2023 menjadi celah informasi yang signifikan, sehingga tidak memungkinkan untuk menganalisis tren atau penyebab penurunan yang terjadi.
2	*Indikator Sasaran PD Renstra Periode 2025-2029*						
	1. Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024
	2. Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,12	NA	NA	NA	70,21	Nilai SAKIP Tahun 2020 tercatat 72,12, Angka ini menunjukkan kategori akuntabilitas kinerja yang baik. Tahun 2021 s.d 2023 data tidak tersedia (NA). Ketidaktersediaan data ini disebabkan oleh tidak adanya reviu dari Inspektorat. Ini berarti tidak ada evaluasi resmi yang dilakukan pada periode tersebut, untuk itu Satpol PP Damkar tidak dapat mengetahui apakah kinerja SAKIP membaik, memburuk, atau tetap stabil selama tiga tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2024 Nilai SAKIP adalah 70,21. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, dengan penurunan sebesar 1,91 poin. Ketiadaan reviu dari Inspektorat pada tahun 2021 hingga 2023 menjadi celah informasi yang signifikan, sehingga tidak memungkinkan untuk menganalisis tren atau penyebab penurunan yang terjadi.
3	*Indikator Program PD Renstra Periode 2025-2029*						
	1.a. Persentase Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, capaiannya selalu berada di angka 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh gangguan Trantibum yang dilaporkan berhasil diselesaikan. Kinerja ini menunjukkan efektivitas dan responsivitas yang tinggi dari pihak yang berwenang dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
	1.b. Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian indikator pada penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) juga mencapai 100% setiap tahunnya, dari 2020 hingga 2024. Konsistensi ini menunjukkan komitmen kuat dan implementasi yang efektif dalam menegakkan peraturan hukum di tingkat daerah.
	2.a. Persentase kejadian kebakaran yg ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap	65,4%	58,3%	81,1%	80,8%	100,0%	Capaian indikator ini menunjukkan tren yang sangat tidak stabil namun dengan peningkatan signifikan di akhir periode. Dimana capaian pada tahun 2021 mengalami penurunan, kemudian tahun 2022 mengalami peningkatan tajam, tahun 2023 relatif stabil kemudian tahun 2024 mengalami peningkatan pesat dan mencapai target maksimal. Peningkatan capaian ini tidak terlepas dari peran Relawan Kebakaran (Redkar) yang telah menjadi mitra strategis dalam penanganan kebakaran.
	2.b. Persentase Pelayanan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian indikator ini menunjukkan kinerja pelayanan penyelamatan non kebakaran yang sangat baik, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	3. Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian 100% yang konsisten dari 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa semua layanan yang mendukung fungsi dan urusan pemerintah daerah berjalan optimal.
4	*SPM*						
	1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%	99%	99,87%	100%	Kedua indikator menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dari tahun ke tahun. Penurunan kecil di tahun 2022 dan 2023 mengindikasikan adanya kendala operasional (mutu pelayanan) Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga tidak tercapai 100%. Namun, pemulihan ke angka 100% di tahun 2024 menunjukkan adanya evaluasi dan perbaikan strategis yang efektif.
	2. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	99%	99,36%	100%	
5	*Permendagri 18 2020 (IKK)*						
	1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, capaiannya selalu berada di angka 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh gangguan Trantibum yang dilaporkan berhasil diselesaikan. Kinerja ini menunjukkan efektivitas dan responsivitas yang tinggi dari pihak yang berwenang dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
	2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian indikator pada penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) juga mencapai 100% setiap tahunnya, dari 2020 hingga 2024. Konsistensi ini menunjukkan komitmen kuat dan implementasi yang efektif dalam menegakkan peraturan hukum di tingkat daerah.
	3. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	65,4%	58,3%	81,1%	80,8%	100,0%	Capaian indikator ini menunjukkan tren yang sangat tidak stabil namun dengan peningkatan signifikan di akhir periode. Dimana capaian pada tahun 2021 mengalami penurunan, kemudian tahun 2022 mengalami peningkatan tajam, tahun 2023 relatif stabil kemudian tahun 2024 mengalami peningkatan pesat dan mencapai target maksimal. Peningkatan capaian ini tidak terlepas dari peran Relawan Kebakaran (Redkar) yang telah menjadi mitra strategis dalam penanganan kebakaran.
	4. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15,5 menit	15,58 menit	10,59 menit	5,15 menit	6,12 menit	Waktu Tanggap meningkat dari 15,5 menit (2020) menjadi 15,58 (2021) dan menurun 10,59 (2022), lalu 5,15 (2023) dan 6,12 (2024). Peningkatan responsivitas di tahun-tahun terakhir (menurunnya waktu tanggap) adalah sebuah pencapaian yang positif.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4.1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 Visi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan adalah *"Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif dalam mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tata kelola kewilayahan yang efektif dan terintegrasi untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Dalam Negeri"*

Untuk mencapai visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) misi yakni:

1. Merumuskan regulasi yang mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dan kewilayahan;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan trantibum, pelayanan bencana dan pelayanan kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standar;
3. Memperkuat fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) menjadi katalisator yang mampu menjadi poros strategis dalam peningkatan hubungan pusat dan daerah melalui koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, menyinkronkan pengelolaan kawasan dan perkotaan, meningkatkan kerja sama daerah, mengawal penyelenggaraan layanan perizinan terintegrasi dan terpadu serta mengefektifkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah;
4. Memperkuat basis data integrasi segmen batas dan pembakuan rupabumi dengan informasi geospasial, serta kinerja kecamatan selaku perangkat daerah yang bersifat kewilayahan;
5. Mengembangkan proses bisnis trantibumlinmas dan kewilayahan yang didukung SDM yang kompeten dan optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Untuk mewujudkan visi dan misinya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yakni:

1. Terwujudnya sistem politik yang demokratis berlandaskan nilai-nilai Pancasila (T1);
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas;
2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Untuk mencapai tujuan pada T1 Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan Sasaran Strategis 1 (SS1) yakni "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas". Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1 ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu:

1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "baik";
2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Kemudian untuk mencapai tujuan pada T2 Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan Sasaran Strategis 2 (SS2) yakni "Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan". Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2 ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

Sehubungan dengan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas, dengan indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".
2. Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Berdasarkan Renstra Kementerian dan Renstra Kabupaten/Kota yang ada, dapat ditemukan adanya keterkaitan yang konsisten dan saling mendukung pada pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Masing-masing tingkatan telah menetapkan Renstra sesuai kewenangan yang dimilikinya meskipun dengan objek tugas yang sama.

Dengan memperhatikan keterkaitan Renstra Kementerian dan Renstra Kabupaten/Kota yang ada terdapat beberapa hal ditemukan sebagai faktor penghambat dan pendorong bagi penyelenggaraan tugas Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo meliputi:

1. Faktor Penghambat
    a. Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Masyarakat yang Rendah: Masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan mematuhi Perda/Perkada, seperti masalah PKL yang tidak tertib, pelanggaran tata ruang, atau pelanggaran terkait K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan). Hal ini membuat tugas penegakan hukum menjadi lebih berat dan berulang;
    b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Jumlah personil Satpol PP Damkar yang belum sebanding dengan standar pelayanan minimal/ luas wilayah dan jumlah penduduk Purworejo menjadi hambatan. Keterbatasan ini mempengaruhi waktu respons dan cakupan wilayah layanan.
    c. Tantangan Geografis: Kondisi wilayah Kabupaten Purworejo yang bervariasi, dari perkotaan hingga perbukitan dan daerah pesisir, menimbulkan tantangan tersendiri. Akses jalan yang sulit dijangkau untuk armada besar, terutama di wilayah pelosok, dapat menghambat kecepatan penanganan bencana;
    d. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana: Anggaran yang terbatas dapat menghambat pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan rutin sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan personil. Untuk Damkar, ketersediaan armada maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai atau tidak sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Purworejo (misalnya, jalan sempit) menjadi hambatan besar dalam respons cepat. Begitu juga untuk penyelenggaraan trantibumlinmas, belum optimalnya pemberdayaan Linmas (Perlindungan Masyarakat) yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dikarenakan anggaran yang belum mencukupi.

2. Faktor Pendorong
   a. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah: Adanya Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang jelas memberikan landasan hukum yang kuat bagi Satpol PP Damkar untuk bertindak. Komitmen pemerintah daerah terhadap penegakan aturan dan alokasi anggaran yang memadai menjadi pendorong utama;
   b. Sinergi dengan Instansi Lain: Kerja sama yang solid dengan Polres, Kodim, BPBD, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya mempermudah koordinasi dalam penanganan masalah yang kompleks. Sinergi ini menciptakan kekuatan kolektif dalam menjaga stabilitas daerah;
   c. Semangat dan Loyalitas Petugas: Dedikasi, semangat juang, dan loyalitas personil Satpol PP Damkar dalam menjalankan tugas di lapangan, sering kali dengan risiko tinggi, adalah faktor pendorong internal yang sangat penting;
   d. Partisipasi Aktif Masyarakat: Kesadaran masyarakat yang meningkat akan pentingnya ketertiban, keamanan, dan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran menjadi aset berharga. Partisipasi warga, seperti melalui peran aktif Linmas, RT/RW, dan Karang Taruna, dapat membantu tugas pencegahan dan deteksi dini.

Berdasarkan dari perkembangan latar belakang sosial dan budaya, faktor kunci keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo dalam membangun fondasi yang kuat untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, responsif, dan profesional kepada masyarakat dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM

   Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualitas SDM yang bertaqwa kepada Tuhan YME, Kompeten, Produktif, Profesional dan Proporsional sesuai dengan bidang tugasnya untuk melaksanakan Program sesuai dengan visi, misi Bupati;

b. Tersedianya dukungan anggaran dan sarana dan prasarana yang memadai

   Peralatan yang memadai dan modern adalah penopang utama keberhasilan di lapangan melalui pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, dan peningkatan ketersediaan perlengkapan untuk memastikan seluruh personil memiliki perlengkapan standar yang lengkap dan layak, seperti alat komunikasi, alat pelindung diri (APD), dan peralatan penunjang lainnya, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung operasional maupun pelaporan;

c. Sinergi dan Kolaborasi dengan berbagai pihak

   Sinergi antar lembaga dengan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam setiap penanganan masalah yang membutuhkan respons terpadu. Serta pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan mendorong masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam deteksi dini, pencegahan, dan penanganan awal.

d. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat

Pemanfaatan media sosial, kampanye kreatif, dan sosialisasi kepada Masyarakat akan meningkatkan kesadaran hukum dan kewaspadaan Masyarakat;

e. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Landasan hukum yang kuat akan menjamin efektivitas tindakan di lapangan. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah melakukan evaluasi berkala terhadap Perda dan Perkada yang ada untuk memastikan relevansinya dengan dinamika masyarakat dan menyusun dan menerapkan SOP yang jelas dan terukur untuk setiap tuga, dimana hal ini akan mengurangi potensi tumpang tindih wewenang dan memberikan kepastian hukum bagi petugas dan masyarakat.

2.1.4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

A. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041. Tujuan penataan ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berdaya saing bertumpu pada sektor pariwisata, industri dan pertanian yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW secara prinsip pelayanan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo mencakup seluruh wilayah Kabupaten Purworejo secara merata untuk menjamin kondusifitas seluruh wilayah Kabupaten Purworejo dalam hal ini Pelaksanaan Perda RTRW telah dilaksanakan oleh Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo sebagai Perwujudan Kawasan Strategis dalam sub Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya dan Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup pada sub urusan kebakaran berupa kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran yang selama ini telah dilaksanakan dengan kegiatan berupa Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat; Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran; dan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana.

B. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

a. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam rangka pembangunan masyarakat Kabupaten Purworejo seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
c. melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah, menanggulangi, dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak;
d. memelihara lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pencadangan, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer terhadap perubahan iklim; dan
e. memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Selanjutnya, meskipun Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo tidak secara langsung menyusun dokumen KLHS maka secara otomatis Satpol PP Damkar selaku penyelenggara Trantibumlinmas, penegak Perda dan Perkada serta pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran mendukung terhadap pelaksanaan KLHS dapat berjalan sukses di Kabupaten Purworejo. Untuk mendukung kegiatan, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun ke depan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo melaksanakan penegakan Perda dan Perkada terhadap:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Pelacuran;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol;
3. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Irigasi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perburuan Burung & Satwa Liar Lainnya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Penyakit;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
20. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Zona Penempatan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purworejo;
21. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
22. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame;
23. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 38 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
24. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 54 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung kesinambungan pembangunan. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat, namun demikian masih banyak tantangan dalam rangka mewujudkannya antara lain:

2.1.4.3. Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo adalah:

a. Globalisasi, AEC *(Asean Economic Community)* atau MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)
   Memberikan pengaruh pada individu dan antar kelompok dalam masyarakat akibat pengaruh dunia luar yang tanpa batas, tidak ada filter negara terhadap pengaruh atau dunia luar dalam segala bidang kehidupan sehingga muncul dampak negatif antara lain berupa hambatan sektor industri domestik untuk berkembang sebagai efek perdagangan bebas, sektor keuangan semakin tidak stabil akibat pengaruh pasar saham, kejahatan siber *(Cybercrime)* dan penipuan online maupun informasi-informasi yang tidak tersaring dapat mengadu domba antar kelompok masyarakat serta mengakibatkan munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga sehingga sangat rawan terjadinya gesekan antar masyarakat dan dapat memicu keresahan sosial, konflik antarkelompok, atau bahkan kekerasan massal jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat.
b. Proses Demokrasi Langsung dan Otonomi Daerah.
   Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung mempunyai dampak dan memicu konflik sosial di masyarakat (bentrok antar pendukung) dan dengan adanya otonomi daerah dapat menimbulkan konflik antar daerah satu dengan yang lain karena menganggap daerahnya paling baik.
c. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik.
   Saat ini kecepatan dan ketepatan pelayanan sangat diharapkan oleh masyarakat sehingga Satpol PP Damkar harus merespon dengan baik tuntutan masyarakat tersebut agar tidak menimbulkan kekecewaan yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP Damkar yang merupakan garda terdepan Pemerintah Daerah menyangkut ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
d. Kabupaten Purworejo merupakan jalur strategis sebagai lintasan penghubung Jalur Lintas Selatan (JLS) dan Pantai Utara (Pantura).
   Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah atau bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah, dimana Kabupaten Purworejo merupakan jalur strategis sebagai lintasan penghubung Jalur Lintas Selatan (JLS) dan Pantai Utara (Pantura) hal tersebut sangat berpotensi terkait dengan mobilitas perekonomian masyarakat atau distribusi barang maupun orang. Ditambah dengan adanya pembangunan jalan lintas Selatan dimana jaringan jalan yang baik menyebabkan urat nadi perekonomian suatu wilayah atau daerah akan menjadi lancar dalam mengakomodasikan faktor-faktor produksi dan potensi daerah, selain itu Kabupaten Purworejo sebagai bagian dari jalur distribusi, berpotensi menjadi titik transit atau target operasi, sehingga hal tersebut sangat berkaitan erat dengan tupoksi Satpol PP Damkar untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan menjaga kondusifitas wilayah.

e. Cakupan Penegakan Perda dan Perkada dan Penyelenggaraan Urusan Kebakaran yang kompleks.
   Luas Kabupaten Purworejo seluas 1.081,45 km^2. Kondisi wilayah Kabupaten Purworejo secara umum terbagi menjadi dua yaitu bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25–1.050 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sedangkan bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-25 mdpl, dan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Purworejo yang berbeda-beda, sementara keterbatasan jumlah anggota Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo akan menjadikan cakupan penegakan Perda dan Perkada, menjadi tantangan besar untuk dapat mewujudkan inovasi dalam pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada serta efektivitas penegakan Perda dan Perkada.
   Selain itu pada penyelenggaraan sub urusan kebakaran di Kabupaten Purworejo mengingat pentingnya kecepatan dan efektivitas dalam penanganan bencana ini. Tantangan-tantangan tersebut mencakup aspek SDM, peralatan, infrastruktur, hingga kesadaran masyarakat, sehingga untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan investasi, penguatan regulasi, serta kolaborasi aktif dengan masyarakat dan sektor swasta.
f. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Kabupaten Purworejo.
   Kondisi masyarakat yang beragam dan letak serta luas geografis Kabupaten Purworejo diantara lalu lintas ekonomi antar Provinsi dan antar Kabupaten menimbulkan potensi rawan gangguan Trantibum berupa konflik sosial.
g. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam masyarakat di Kabupaten Purworejo.
   Terbatasnya personil Satpol PP Damkar dan luasnya wilayah Kabupaten Purworejo serta jumlah penduduk yang besar dan adanya potensi-potensi gangguan trantibum sehingga dibutuhkan peran serta partisipasi masyarakat dalam membantu Satpol PP Damkar untuk menjaga kondusifitas wilayah dimana kondusifitas wilayah menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.
h. Dengan beroperasinya bandara Internasional Yogyakarta International Airport (YIA) yang sangat dekat dengan sisi timur atau berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo akan menambah keramaian dan kerawanan di wilayah Kabupaten Purworejo dan ini menjadi pemikiran bersama untuk lebih meningkatkan potensi Satpol PP Damkar yang ada baik dari segi SDM, jumlah anggotanya dan sarana prasarana penunjang lainnya yang sangat diperlukan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

2.1.4.4. Peluang

Sedangkan peluang untuk pengembangan pelayanan di Satpol PP Damkar adalah:

a. Semakin lengkapnya regulasi penegakan hukum baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri, termasuk Perda dan Perkada sebagai dasar penegakan hukum daerah;

b. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman, tertib dan tenteram;
c. Meningkatnya pemahaman Aparatur terhadap Tugas dan Fungsi;
d. Dukungan dan Kerjasama dari berbagai pihak terhadap Satpol PP Damkar dalam penyelenggaraan penegakan Perda serta ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat;
e. Adanya hubungan yang harmonis dalam menjalin koordinasi antar satuan dan instansi terkait dengan pelayanan kepada masyarakat;
f. Tekad Satpol PP Damkar untuk mewujudkan good governance;
g. Antusias kerjasama antar daerah sangat tinggi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di wilayah perbatasan;
h. Kerjasama antara Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo dengan wilayah berbatasan antar provinsi maupun wilayah berbatasan antar kabupaten/ kota perlu ditingkatkan dalam menciptakan wilayah perbatasan yang kondusif.

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo tidak hanya mencakup masyarakat umum, tetapi juga pihak-pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kelompok sasaran utama Satpol PP berfokus pada individu dan entitas yang dapat memengaruhi ketertiban dan ketentraman masyarakat, termasuk:

1. Masyarakat Umum: Layanan utama adalah pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, termasuk penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) seperti larangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di area terlarang, penertiban bangunan liar, dan pengamanan aset daerah.
2. Pelaku Usaha: Sasaran ini mencakup pemilik tempat usaha, pengelola hiburan malam, atau pengusaha yang berpotensi melanggar Perda/ Perkada terkait izin operasional, jam kerja, atau gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Masyarakat Rentan: Satpol PP juga memiliki tugas untuk melindungi dan menertibkan kelompok rentan seperti gelandangan, pengemis, dan anak jalanan, dengan berkoordinasi bersama Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut.

2. Pemadam Kebakaran (Damkar)

Kelompok sasaran utama Damkar adalah semua pihak yang berpotensi membutuhkan layanan darurat, baik dalam kejadian kebakaran maupun non-kebakaran.

1. Masyarakat Umum: Sasaran utama adalah warga negara yang membutuhkan layanan darurat seperti pemadaman kebakaran, penyelamatan korban, dan evakuasi dari berbagai insiden, baik di rumah, tempat kerja, maupun ruang publik.
2. Bangunan dan Properti: Damkar memberikan layanan perlindungan terhadap bangunan, baik properti publik maupun pribadi, dari ancaman kebakaran, serta membantu evakuasi aset berharga.

3. Institusi dan Organisasi: Layanan edukasi dan pencegahan kebakaran ditujukan kepada sekolah, perkantoran, dan fasilitas publik untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi bahaya kebakaran.
4. Hewan dan Lingkungan: Damkar juga memiliki peran dalam penyelamatan hewan yang terjebak atau terancam bahaya, serta penanganan kejadian yang berdampak pada lingkungan, seperti tumpahan bahan kimia berbahaya.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo disebutkan bahwa Satpol PP Damkar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan daerah, yang meliputi penegakan peraturan Perundang- Undangan Daerah, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat, dan Penanganan Serta Pencegahan Kebakaran.

Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas oleh Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang tertib dan menciptakan iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Permasalahan- permasalahan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pemetaan Permasalahan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Kualitas Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal	Masih kurang optimalnya pencegahan gangguan Trantibumlinmas dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyelenggaraan trantibumlinmas maupun penegakan perda dan perkada
		Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda dan Perkada atau Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang rendah
	Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama antar instansi dalam penanganan Trantibumlinmas dan penegakan Perda/Perkada	Belum optimalnya forum koordinasi lintas instansi.
	Kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pemeliharaan Trantibumlinmas	Belum optimalnya pemberdayaan potensi masyarakat (Linmas, RT/RW, Karang Taruna).

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Program edukasi dan sosialisasi yang menarik dan mudah dijangkau masyarakat belum optimal
Kualitas Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Pemadaman, dan Penyelamatan Kebakaran serta Non-Kebakaran belum optimal	Belum optimalnya kapasitas dan kecepatan respon pemadaman dan penyelamatan	Keterbatasan jumlah dan sebaran personil pemadam kebakaran yang siaga
		Keterbatasan sarana dan prasarana serta ketersediaan dan kondisi armada mobil pemadam kebakaran yang belum sesuai kebutuhan wilayah (terutama untuk area sempit dan kondisi jalan yang sulit dijangkau) serta belum terpenuhinya target minimal Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
	Masih tingginya potensi risiko dan kejadian kebakaran	Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran belum optimal
		Keterbatasan infrastruktur pendukung (hydran air) yang berfungsi dan tersebar merata
		Kurangnya kepatuhan bangunan gedung dan fasilitas umum terhadap standar keamanan kebakaran
		Keterbatasan program inspeksi dan mitigasi risiko kebakaran.
	Belum optimalnya penanganan kejadian non kebakaran (penyelamatan dan evakuasi)	Kurangnya spesialisasi dan pelatihan khusus untuk jenis penyelamatan non-kebakaran (misalnya, penyelamatan di ketinggian, di air, atau penanganan material berbahaya)
		Keterbatasan peralatan khusus untuk penanganan kejadian non-kebakaran
		Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan cara penanganan kejadian non-kebakaran.
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah belum optimal	Belum optimalnya perencanaan dan pelaporan kinerja yang berkualitas	Keterbatasan pemahaman dan kapasitas ASN dalam menyusun perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan organisasi serta belum optimalnya pelaporan kinerja
		Keterbatasan jumlah personel yang spesialis di bidang akuntabilitas kinerja

Sebagai garda terdepan dalam menjaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo saat ini menghadapi tantangan dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang optimal serta memastikan kualitas penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran serta non kebakaran yang optimal. Kondisi ideal yang diharapkan masih belum tercapai sepenuhnya, menuntut evaluasi mendalam terhadap berbagai aspek operasional dan dukungan. Permasalahan yang masih mendera adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya pencegahan gangguan Trantibumlinmas dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kesenjangan ini bersumber dari akar masalah yaitu:
   a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyelenggaraan trantibumlinmas maupun penegakan perda dan perkada.
      Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP, baik dari segi kuantitas personil yang belum ideal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, untuk Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo dengan tipe B anggota minimal berjumlah 251 - 350 orang, maupun kompetensi yang perlu untuk terus ditingkatkan. Di samping itu, ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyelenggaraan trantibumlinmas maupun penegakan perda dan perkada yang belum memadai turut menjadi penghambat kinerja di lapangan.
   b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda dan Perkada atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang rendah.
      Rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda dan Perkada, yang berimplikasi langsung pada tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya edukasi dan komunikasi persuasif perlu digencarkan.
2. Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama antar instansi dalam penanganan Trantibumlinmas dan Penegakan Perda dan Perkada. Akar permasalahannya terletak pada belum optimalnya fungsi forum koordinasi lintas instansi yang ada, sehingga sinergi penanganan di lapangan belum terjalin secara maksimal. Hal ini juga terkait adanya potensi pelanggaran perda/ perkada dan timbulnya gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di daerah perbatasan Provinsi maupun perbatasan antar Kabupaten/ Kota. Satpol PP seringkali memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari Perangkat Daerah (PD) lain atau lintas instansi dan aparat penegak hukum terkait untuk penanganan yang komprehensif atau menyeluruh.
3. Kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam upaya pemeliharaan Trantibumlinmas juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Akar masalahnya adalah belum optimalnya pemberdayaan potensi masyarakat seperti Linmas, pengurus RT/RW, dan Karang Taruna sebagai mitra strategis Satpol PP dikarenakan anggaran yang belum mencukupi; Selain itu, program edukasi dan sosialisasi yang menarik dan mudah

dijangkau masyarakat juga belum sepenuhnya optimal. Ini menyebabkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan belum terbangun secara merata.

Sementara itu, pada sub urusan kebakaran, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo juga menghadapi sejumlah permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kapasitas dan kecepatan respons pemadaman dan penyelamatan, hal ini disebabkan oleh:
   a. Keterbatasan jumlah dan sebaran personil pemadam kebakaran yang siaga. Keterbatasan jumlah dan sebaran personil pemadam kebakaran yang siaga merupakan masalah yang berdampak langsung pada efektivitas penanganan kebakaran dan penyelamatan. Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo menghadapi tantangan dalam memenuhi standar ideal jumlah personel dan pos pemadam kebakaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Standar Jumlah Aparatur/Sumber Daya Manusia Setiap 1 (satu) unit kendaraan pemadam kebakaran (mobil pemadam kebakaran) dioperasionalkan oleh 6 (enam) petugas damkar dengan pembagian tugas 1 (satu) orang sebagai Komandan Regu, 1 (satu) orang sebagai pengemudi sekaligus Operator Pompa, dan 4 (empat) orang anggota petugas damkar yang dilengkapi dengan alat perlindungan diri aparatur. Untuk kondisi saat ini jumlah setiap regu petugas damkar belum sesuai standar, dikarenakan jumlah anggota Damkar Kabupaten Purworejo masih kurang;
   b. Keterbatasan sarana dan prasarana serta ketersediaan dan kondisi armada mobil pemadam kebakaran yang belum sesuai kebutuhan wilayah (terutama untuk area sempit dan kondisi jalan yang sulit dijangkau) serta belum terpenuhinya target minimal Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
      Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan sehingga kinerja aparat Satpol PP Damkar kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk didalamnya yang berkaitan dengan waktu tanggap *(Respon Time)* pada Pelayanan Pemadam Kebakaran 15 menit dari diterimanya laporan kejadian sampai ke lokasi kejadian kebakaran untuk melakukan pemadaman/ pengendalian kebakaran dengan kondisi wilayah kabupaten Purworejo yang merupakan sebagian besar wilayah pegunungan/ dataran tinggi dan infrastruktur jalan di wilayah pegunungan serta beberapa kawasan padat pemukiman masih terdapat kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilalui mobil Damkar sehingga mempersulit proses penanganan kebakaran;
2. Masih tingginya potensi risiko dan kejadian kebakaran juga menjadi masalah yang dihadapi Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo. Akar masalahnya adalah partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur pendukung (hydran air) yang berfungsi dan tersebar merata, kurangnya kepatuhan bangunan gedung dan fasilitas umum terhadap standar keamanan

kebakaran, dan kurangnya program inspeksi serta mitigasi risiko kebakaran yang proaktif.

3. Tidak hanya kebakaran, belum optimalnya penanganan kejadian non kebakaran (penyelamatan dan evakuasi) juga menjadi perhatian. Ini disebabkan oleh kurangnya spesialisasi dan pelatihan khusus untuk jenis penyelamatan tertentu (misalnya, di ketinggian, di air, atau penanganan material berbahaya), Keterbatasan peralatan khusus untuk penanganan kejadian non kebakaran, serta minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan cara penanganan kejadian non kebakaran.

Seluruh permasalahan ini memerlukan langkah strategis dan terpadu dari Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo dalam penyusunan Rencana Strategis periode 2025-2029, guna mewujudkan Purworejo yang aman, tertib, dan mampu merespons setiap potensi ancaman terhadap keselamatan masyarakat.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis dalam perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo, merupakan kondisi faktual yang perlu diperhatikan. Karena, penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan secara signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan pada masa yang akan datang. Isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam 5 (lima) tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo. Adapun isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran, dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Isu Strategis Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Bonus Demografi	Stabilitas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Belum Kondusif	Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dampak buruk teknologi AI	Transformasi sosial	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	1. Banyaknya potensi gangguan trantibum dikarenakan belum optimalnya peran serta masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta dalam berpartisipasi menyelenggarakan urusan trantibumlinmas
			Involuntary migration	Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat	2. Potensi pelanggaran perda/ perkada dan timbulnya gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di daerah perbatasan Provinsi maupun perbatasan antar Kabupaten/ Kota;
			Aging population negara maju			3. Tingkat kepatuhan Masyarakat terhadap peraturan masih rendah, yang menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami atau menghargai pentingnya peraturan yang ada;
						4. Jumlah dan kemampuan anggota Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo masih kurang dan belum sebanding dengan standar pelayanan minimal/ luas wilayah dan jumlah penduduk;
						5. Belum optimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung optimalisasi fungsi Trantibumlinmas dikarenakan anggaran yang belum mencukupi;

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
						6.Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana trantibumlinmas sehingga berdampak kepada kinerja di lapangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
						7. Belum terpenuhinya target minimal Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sehingga mempengaruhi waktu respons dan jangkauan pelayanan;
						8. Belum optimalnya partisipasi relawan kebakaran atau masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran.

1. Isu Strategis 1: Banyaknya potensi gangguan trantibum dikarenakan belum optimalnya peran serta masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta dalam berpartisipasi menyelenggarakan urusan trantibumlinmas;

   Partisipasi masyarakat, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan, belum sepenuhnya tergerak. Kesadaran atau kepedulian masyarakat akan pentingnya Trantibumlinmas juga masih rendah. Selain itu sinergi antar instansi pemerintah dan pihak swasta juga belum berjalan optimal. Penyelenggaraan trantibum sering kali terkesan menjadi tanggung jawab tunggal Satpol PP, padahal isu-isu ketertiban seperti perizinan, tata ruang, dan kebersihan seharusnya menjadi urusan bersama. Akibatnya, penanganan masalah kerap kali menjadi reaktif, bukan proaktif. Kondisi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh potensi gangguan trantibum untuk berkembang, mulai dari PKL yang tidak tertib, dan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) lainnya. Strategi ke depan harus berfokus pada membangun kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan. Perlu partisipasi aktif dari seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman.
2. Isu Strategis 2: Potensi pelanggaran perda/ perkada dan timbulnya gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di daerah perbatasan Provinsi maupun perbatasan antar Kabupaten/ Kota;

   Wilayah perbatasan seringkali menjadi zona abu-abu dalam hal penegakan hukum dan koordinasi. Masyarakat di area ini cenderung memiliki hubungan dan mobilitas yang tinggi di kedua sisi perbatasan. Kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran. Kurangnya koordinasi yang terpadu antar pemerintah daerah di perbatasan membuat penegakan aturan menjadi tidak efektif. Kondisi ini menuntut adanya kerja sama yang lebih kuat dan terstruktur antar pemerintah daerah di perbatasan, agar tindakan preventif dan penanganan masalah dapat dilakukan secara sinergis dan cepat.
3. Isu Strategis 3: Tingkat kepatuhan Masyarakat terhadap peraturan masih rendah, yang menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami atau menghargai pentingnya peraturan yang ada;

   Meski berbagai upaya telah dilakukan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) di Kabupaten Purworejo masih tergolong rendah. Kepatuhan yang rendah ini tidak hanya terlihat dari pelanggaran kasat mata seperti pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertib atau parkir liar. Lebih dari itu, masalah ini mencakup ketidakdisiplinan dalam mendirikan bangunan tanpa izin, pemasangan reklame tidak berizin, hingga kurangnya kesadaran dalam menjaga keamanan lingkungan. Strategi ke depan harus berfokus pada membangun kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis dan edukatif, sehingga masyarakat tidak lagi patuh karena takut, melainkan karena memahami dan meyakini manfaat dari peraturan yang ada.
4. Isu strategis 4: Jumlah dan kemampuan anggota Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo masih kurang dan belum

sebanding dengan standar pelayanan minimal/ luas wilayah dan jumlah penduduk;

Dengan wilayah yang membentang dari pesisir selatan hingga perbukitan dan populasi yang terus bertumbuh, kebutuhan akan kehadiran petugas yang sigap dan terlatih di setiap sudut Purworejo sangatlah mendesak. Namun, realitanya, jumlah personil yang ada saat ini belum mencukupi untuk menjangkau seluruh area secara optimal. Akibatnya, waktu tanggap (*response time)* menjadi lebih lama, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pos-pos utama. Selain masalah kuantitas, kualitas dan kemampuan juga menjadi perhatian dimana para personil juga memerlukan pelatihan dan peralatan yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan, mulai dari negosiasi dengan masyarakat hingga penanganan kebakaran di lokasi yang sulit. Kesenjangan ini menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh potensi gangguan Trantibum dan memperbesar risiko saat terjadi bencana. Oleh karena itu penambahan jumlah personel yang disertai dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme merupakan strategi kedepan untuk memastikan bahwa pelayanan trantibumlinmas dan pemadaman kebakaran dapat berjalan efektif dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

5. Isu Strategis 5: Belum optimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung optimalisasi fungsi Trantibumlinmas dikarenakan anggaran yang belum mencukupi;

   Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan forum-forum komunitas seperti RT/RW, dan Karang Taruna, yang memiliki potensi besar untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan, masih belum diberdayakan secara maksimal. Satlinmas adalah mata dan telinga pemerintah di lapangan, yang paling mengetahui kondisi lingkungan dan menjadi garda terdepan di tingkat RT/RW dan kelurahan/desa dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan awal masalah sosial maupun bencana.

   Sayangnya, potensi besar ini belum dimaksimalkan. Anggaran yang belum mencukupi untuk pemberdayaan Satlinmas menjadi kendala utama. Keterbatasan ini mempengaruhi berbagai hal, mulai dari minimnya pelatihan yang layak, insentif yang kurang memadai, hingga ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti seragam dan alat komunikasi. Akibatnya, semangat dan motivasi anggota Satlinmas menjadi turun, dan peran mereka dalam menjaga lingkungan pun tidak berjalan optimal.

6. Isu Strategis 6: Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana trantibumlinmas sehingga berdampak kepada kinerja di lapangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

   Sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam operasional kegiatan. Namun saat ini kita mendapati kondisi di mana banyak peralatan maupun kendaraan yang dimiliki belum memadai sehingga berdampak kepada kinerja di lapangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti penegakan Perda dan Perkada, penertiban dan penanganan kebakaran yang berkaitan dengan waktu tanggap *(Response Time)* pada Pelayanan Pemadam Kebakaran 15 menit dari diterimanya laporan kejadian sampai ke lokasi kejadian kebakaran untuk melakukan pemadaman/ pengendalian kebakaran dengan kondisi wilayah kabupaten Purworejo yang merupakan sebagian besar wilayah pegunungan/ dataran tinggi dan infrastruktur jalan di wilayah pegunungan

serta beberapa kawasan padat pemukiman masih terdapat kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilalui mobil Damkar sehingga mempersulit proses penanganan kebakaran;
Hal ini menegaskan pentingnya modernisasi sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, sehingga kinerja Satpol PP dan Damkar akan meningkat, dan rasa aman masyarakat dapat lebih terjamin.

7. Isu Strategis 7: Belum terpenuhinya target minimal Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sehingga mempengaruhi waktu respons dan jangkauan pelayanan;
   WMK adalah konsep penting dalam dunia pemadam kebakaran, yang bertujuan memastikan setiap wilayah dapat dijangkau oleh tim pemadam dalam waktu respons yang ideal, yaitu kurang dari 15 menit. Namun, dengan kondisi yang ada, masih banyak area di Purworejo yang berada di luar jangkauan WMK, yang berarti bahwa jika terjadi kebakaran di wilayah tersebut, tim pemadam akan membutuhkan waktu lebih lama untuk tiba di lokasi. Dimana setiap detik memiliki peran besar dalam menentukan seberapa parah kerusakan yang akan terjadi. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan pos-pos pemadam kebakaran yang ada. Pos-pos yang ada saat ini belum cukup untuk mencakup pelayanan pemadaman kebakaran dalam Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time)* 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo secara merata.
   Dengan demikian, diketahui pentingnya pemenuhan WMK sehingga dapat memperpendek waktu respons, memperluas jangkauan pelayanan, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo dari ancaman bencana kebakaran.
8. Isu Strategis 8: Belum optimalnya partisipasi relawan kebakaran atau masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran.
   Masyarakat adalah pihak pertama yang berada di lokasi kejadian. Namun, kurangnya pelatihan, edukasi, dan pembentukan tim relawan yang terstruktur membuat potensi ini belum sepenuhnya termanfaatkan. Relawan atau masyarakat yang terlatih dapat melakukan deteksi dini, penanganan awal menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), serta membantu proses evakuasi. Keterbatasan ini bukan hanya sekadar isu partisipasi, melainkan juga masalah keselamatan. Ketika masyarakat tidak siap, risiko kerugian material dan korban jiwa akan meningkat. Oleh karena itu, pentingnya membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Strategi kedepan adalah mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran maupun non kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi serta pembentukan dan pembinaan relawan kebakaran (Redkar) di setiap kelurahan/desa. Dengan demikian masyarakat berpartisipasi aktif dalam penanganan dan penanggulangan kebakaran maupun non kebakaran dan terlatih siap siaga untuk menjaga keselamatan di lingkungannya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut juga Visi Kabupaten Purworejo merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu mulai tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi Kabupaten Purworejo Tahun 2029 yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Visi dan misi Bupati Purworejo terpilih Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Purworejo tahun 2025 – 2029 adalah “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan 5 (lima) misi Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompeten, Produktif, dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Lingkungan Masyarakat yang Sehat, Berbudaya, dan Sejahtera.
2. Meningkatkan Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah.
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Inklusivitas ekonomi Melalui Peran Serta dan Kontribusi Pelaku Ekonomi Lokal yang Mendukung Ketahanan Pangan.
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Inovatif berbasis Teknologi Informasi.

Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo mengemban Misi yang ke-3 (ketiga) yaitu “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana” dan ke-5 (kelima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Inovatif berbasis Teknologi Informasi”, yang mana keterkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo adalah “Membantu Bupati dalam Melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan kewenangan daerah, yang meliputi Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat dan Penanganan serta Pencegahan Kebakaran”.

Sejalan dengan visi dan misi dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo sebagai salah satu elemen dari sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang Penegakan Perda, Penyelenggaraan Trantibumlinmas serta Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purworejo. Kegiatan Satpol PP Damkar yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dalam mendukung misi ke-3 (ketiga) dan ke-5 (kelima) adalah:

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota;

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan peraturan Bupati/ Wali Kota;
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota;
4. Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota;
5. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
7. Investigasi Kejadian Kebakaran;
8. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
9. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Purworejo serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang akan dicapai oleh Kabupaten Purworejo yang mana berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo, sejalan dengan hal tersebut, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo sebagai salah satu elemen dari sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, dan Penanganan serta Pencegahan Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purworejo sesuai dengan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Purworejo.

Dalam hal ini tujuan dan sasaran Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan untuk periode Renstra (2025-2029) merupakan turunan langsung dari visi dan misi Bupati Purworejo, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo. Penetapan tujuan dan sasaran ini menjadi arah strategis utama yang akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan yang tersaji dalam Tabel 3.1 *Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo* sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			2. Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,22	70,45	72,89	75,53	77,76	80,20	
SASARAN RPJMD: S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana		1. Meningkatnya kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SASARAN RPJMD: S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi.		2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
SASARAN RPJMD: S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi.		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,22	70,45	72,89	75,53	77,76	80,20	

Sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo pelayanan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang tertib dan menciptakan iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo, yang didukung dengan indikator- indikator urusan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo meliputi:

1. Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah;
2. Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
3. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota yang Dibina;
4. Jumlah Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota
5. Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten;
6. Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran yang Sesuai Standar;
7. Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran;
8. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
9. Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

3.3.1. Strategi

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan atau sasaran Renstra PD. Berikut strategi Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo untuk mendukung mewujudkan visi misi Bupati dalam kurun waktu lima tahun ke depan:

Tabel 3.2
Strategi Rensta Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatnya kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	1. Meningkatkan kualitas Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
	2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2. Meningkatkan Kualitas Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibumlinmas

Tujuan	Sasaran	Strategi
	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3. Meningkatkan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1. Meningkatkan Kualitas Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

   Tercapainya strategi ini diindikasikan dengan meningkatnya layanan pemadaman, penyelamatan, investigasi, pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kebakaran sehingga terciptanya rasa aman dalam masyarakat dari bahaya kebakaran maupun non kebakaran.

   Upaya untuk mencapai strategi ini adalah dengan 1). Meningkatnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK); 2). Menambah cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang dilengkapi dengan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi di tempat yang strategis dan rawan kebakaran sesuai dengan perencanaan dan penataan wilayah; 3). menambah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pemadam kebakaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi dalam bidang Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, meningkatkan keselamatan petugas, mempercepat respons terhadap kebakaran dan bencana lainnya, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 4). Meningkatkan pelaksanaan kerjasama dan koordinasi internal maupun eksternal maupun antar daerah berbatasan (Kedu dan Kulon Progo) dalam penanganan pemadaman kebakaran serta penyelamatan; serta 5) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam mendukung upaya cegah dini bahaya kebakaran dan non kebakaran melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran yang dilakukan dengan cara pembentukan relawan Pemadam Kebakaran, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan kebakaran secara dini yang bertujuan untuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran dan non-kebakaran, serta pentingnya pencegahan. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan akan meningkatkan pemahaman mereka tentang penyebab kebakaran, cara pencegahan, dan tindakan yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran yang bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran, dimana Masyarakat yang teredukasi dan terlatih akan mampu memberikan respons awal yang cepat dan tepat saat terjadi kebakaran sehingga Respons cepat dari masyarakat dapat meminimalkan dampak kerugian akibat kebakaran.

2. Meningkatkan Kualitas Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibumlinmas

Strategi ini diindikasikan dengan kondusifitasnya 16 Kecamatan di wilayah Kabupaten Purworejo melalui sinergitas antara lembaga vertikal, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo dan Kecamatan serta kemitraan dengan Masyarakat dalam menjaga Trantibumlinmas, melalui Peningkatan dalam Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pelaksanaan Patroli rutin, Pengamanan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap potensi-potensi yang menimbulkan kerawanan gangguan trantibumlinmas, serta Peningkatan sosialisasi Trantibumlinmas dan Perda dan/ atau Perkada untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketentraman dan ketertiban umum serta kesadaran hukum, menciptakan keterlibatan masyarakat dalam menjaga Trantibumlinmas, membangun budaya tertib serta mencegah pelanggaran. Selain itu strategi Meningkatkan Kualitas Penanganan Gangguan Trantibumlinmas diindikasikan dengan menurunnya tingkat pelanggaran perda dan perkada maupun gangguan trantibumlinmas di lingkungan masyarakat dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta dan partisipasi dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat. Upaya yang dilaksanakan dalam peningkatan penanganan gangguan trantibumlinmas diantaranya dengan cara melakukan penanganan gangguan Trantibumlinmas dan penegakan peraturan daerah secara tegas dan konsisten, dengan mengedepankan pendekatan yang humanis dan proporsional; Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kewenangan dalam penanganan gangguan Trantibumlinmas secara tuntas; Peningkatan Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan terhadap potensi-potensi yang menimbulkan kerawanan gangguan trantibum; Peningkatan layanan dalam rangka Penegakan Perda dan Perkada secara profesional dan sesuai dengan SOP; dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung cipta kondisi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku urusan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

3. Meningkatkan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tercapainya strategi ini diindikasikan dengan peningkatan dalam berbagai komponen sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah, seperti Sumber daya manusia (SDM), perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

SDM adalah salah satu penggerak suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan. Upaya yang dilakukan adalah untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme SDM agar berkualitas dan berdaya saing antara lain melalui jalur pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk pegawai/ karyawan maupun karyawati di lingkungan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo.

Selanjutnya untuk memastikan setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan yang ditetapkan, diperlukan sistem akuntabilitas kinerja yang kuat dan transparan. Dokumen perencanaan kinerja disusun secara lebih berkualitas, akurat, dan relevan serta dokumen-dokumen perencanaan kinerja tersebut harus memuat indikator kinerja yang jelas, terukur, dan relevan dengan tujuan dan sasaran instansi. Dokumen perencanaan kinerja akan menjadi acuan utama yang kemudian diterjemahkan ke dalam laporan yang akurat dan tepat waktu. Anggaran yang dialokasikan secara lebih efektif dan efisien berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Terdapat keterkaitan yang kuat antara alokasi anggaran dengan pencapaian kinerja. Proses ini akan memastikan bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Pengawasan yang efektif adalah kunci untuk mencegah penyimpangan. Meningkatkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan mengambil langkah korektif yang cepat. Sistem ini akan didukung oleh teknologi informasi untuk memastikan data yang gunakan akurat dan *real-time*.

Selanjutnya peningkatan transparansi dan partisipasi publik serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan cara mempublikasikan informasi kinerja secara luas melalui platform digital, untuk menyajikan data kinerja, anggaran, dan program kerja secara terbuka agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan serta umpan balik. Selain itu, juga membuka ruang interaksi untuk menampung masukan dan kritik, menjadikan publik sebagai mitra strategis dalam pengawasan. Kemudian Peningkatan sinergi antara instansi perangkat daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah serta meningkatkan komitmen, konsistensi dan tanggungjawab untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Dimana koordinasi yang efektif yang dibangun untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan setiap kebijakan berjalan selaras.

3.3.2. Pentahapan Pembangunan

Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1. Sub Urusan Kebakaran	1. Sub Urusan Kebakaran	1. Sub Urusan Kebakaran	1. Sub Urusan Kebakaran	1. Sub Urusan Kebakaran
Menguatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Memantapkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Mewujudkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran yang berkualitas dan terjangkau	Meneguhkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran yang berkualitas dan terjangkau

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
2. Sub Urusan Trantibumlinmas	2. Sub Urusan Trantibumlinmas	2. Sub Urusan Trantibumlinmas	2. Sub Urusan Trantibumlinmas	2. Sub Urusan Trantibumlinmas
Menguatkan Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Memantapkan Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Mewujudkan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang berkualitas dan terjangkau	Meneguhkan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang berkualitas dan terjangkau
3. Urusan Penunjang	3. Urusan Penunjang	3. Urusan Penunjang	3. Urusan Penunjang	3. Urusan Penunjang
Menguatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan Kapasitas sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

3.3.3. Lokus Rencana Strategis Perangkat Daerah

Lokus atau ruang lingkup Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 mencakup wilayah kerja dan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Damkar selama periode perencanaan. Penentuan lokus ini penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

1. Lokus Geografis

   Lokus geografis adalah wilayah tempat Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo melaksanakan tugasnya. Lokus ini meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Purworejo, yang mencakup 16 Kecamatan, 469 Desa dan 25 Kelurahan.

   Lokus ini menjadi area penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda/ Perkada, , dan pelayanan darurat kebakaran dan non-kebakaran.

2. Lokus Tugas dan Fungsi

   Lokus ini berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab institusional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo. Lokus ini mencakup:

   1. Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat: Menjaga kondisi wilayah agar tetap kondusif, aman, dan tertib.
   2. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada): Menindaklanjuti pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di seluruh Kabupaten Purworejo.
   3. Perlindungan Masyarakat: Memberikan perlindungan dari ancaman dan gangguan, serta mengorganisir dan pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
   4. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran: Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait upaya pencegahan kebakaran, merespons dan memadamkan serta penyelamatan kejadian kebakaran di semua sektor, baik perumahan, industri, maupun hutan.

5. Penyelamatan dan Evakuasi Non-Kebakaran: Memberikan pertolongan darurat pada insiden di luar kebakaran, seperti evakuasi korban bencana, penyelamatan hewan, atau penanganan bahan berbahaya.

3.3.4. Arah Kebijakan

Menghadapi berbagai tantangan yang ada, maka diperlukan langkah strategis dan terukur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD.

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran juga berupaya mengoptimalkan perencanaan dan pengembangan organisasi dengan melakukan pembenahan manajemen, penempatan SDM di posisi yang tepat, dan efektivitas realisasi anggaran dalam rangka menghadapi tantangan di masa depan. Berikut arah kebijakan yang akan menjadi panduan dalam setiap langkah dan program kerja yang akan dijalankan:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1.	SASARAN RPJMD S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Arah Kebijakan 2026: Penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan	Arah Kebijakan 2026 yang dilaksanakan melalui aktivitas Penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana kebakaran, penguatan Relawan Kebakaran (Redkar) dalam penanganan kebakaran berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem cegah dini kebakaran berbasis teknologi pada wilayah rawan kebakaran, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.	
		Arah Kebijakan 2027: Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan	Arah Kebijakan 2027 yang dilaksanakan melalui aktivitas Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana kebakaran, penguatan Relawan Kebakaran (Redkar) dalam penanganan kebakaran berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem cegah dini kebakaran berbasis teknologi pada wilayah rawan kebakaran, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.	
		Arah Kebijakan 2028: Pemantapan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan	Arah Kebijakan 2028 yang dilaksanakan melalui aktivitas Pemantapan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana kebakaran, penguatan Relawan Kebakaran (Redkar) dalam penanganan kebakaran berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem cegah dini kebakaran berbasis teknologi pada wilayah rawan kebakaran, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.	
		Arah Kebijakan 2029: Perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan	Arah Kebijakan 2029 yang dilaksanakan melalui aktivitas Perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana kebakaran, penguatan Relawan Kebakaran (Redkar) dalam penanganan kebakaran berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem cegah dini kebakaran berbasis teknologi pada wilayah rawan kebakaran, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan	
		Arah Kebijakan 2030: Peneguhan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan	Arah Kebijakan 2030 yang dilaksanakan melalui aktivitas Peneguhan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana kebakaran, penguatan Relawan Kebakaran (Redkar) dalam penanganan kebakaran berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem cegah dini kebakaran berbasis teknologi pada wilayah rawan kebakaran, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
2.	SASARAN RPJMD: S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi.	Arah Kebijakan 2026: Penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan.	Arah Kebijakan 2026 yang dilaksanakan melalui aktivitas Penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.	
		Arah Kebijakan 2027: Peningkatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan.	Arah Kebijakan 2027 yang dilaksanakan melalui aktivitas Peningkatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.	
		Arah Kebijakan 2028: Pemantapan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan.	Arah Kebijakan 2028 yang dilaksanakan melalui aktivitas Pemantapan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.	
		Arah Kebijakan 2029: Perwujudan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan.	Arah Kebijakan 2029 yang dilaksanakan melalui aktivitas Perwujudan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Arah Kebijakan 2030: Peneguhan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan	Arah Kebijakan 2030 yang dilaksanakan melalui aktivitas Peneguhan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.	
3.	SASARAN RPJMD: S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi.	Arah Kebijakan 2026: Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	Arah Kebijakan 2026 yang dilaksanakan melalui aktivitas Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	
		Arah Kebijakan 2027: Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	Arah Kebijakan 2027 yang dilaksanakan melalui aktivitas Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	
		Arah Kebijakan 2028: Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	Arah Kebijakan 2028 yang dilaksanakan melalui aktivitas Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	
		Arah Kebijakan 2029: Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	Arah Kebijakan 2029 yang dilaksanakan melalui aktivitas Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	
		Arah Kebijakan 2030: Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	Arah Kebijakan 2030 yang dilaksanakan melalui aktivitas Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 terdiri dari rencana program yang secara langsung menunjang pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 serta mendukung prioritas pembangunan daerah. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo juga melaksanakan upaya yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mencabut Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo meliputi 2 (dua) jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo meliputi:

1) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten:

   Jenis pelayanan dasar pada sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target capaian pada pelayanan ini adalah 100%.

   Indikator Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Sedangkan mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

   Mutu layanan pada Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten meliputi:

   a. Standar Operasional Prosedur Satpol PP;
   b. Standar Sarana Prasarana Satpol PP;
   c. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat; dan
   d. Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada.

2) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten:

   Jenis pelayanan dasar pada sub urusan Kebakaran Daerah Kabupaten adalah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan target capaian pada pelayanan ini adalah 100%.

Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Sedangkan mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Mutu layanan pada Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten meliputi:

a. Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time)* 15 Menit Sejak diterimanya Informasi/Laporan Sampai Tiba di Lokasi dan Siap Memberikan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi;
b. Prosedur Operasional Penanganan Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi;
c. Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi;
d. Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Sumber Daya Manusia;
e. Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Bagi Warga Negara yang Menjadi Korban Kebakaran; dan
f. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bagi Warga Negara yang Terdampak Kebakaran.

Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah (PD), perumusan program, kegiatan, dan sub-kegiatan harus dilakukan secara terstruktur dan logis. Berikut adalah kerangka perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan seperti pada Gambar 4.1 *Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD* dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 pada Tabel 4.1 *Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025-2029*:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

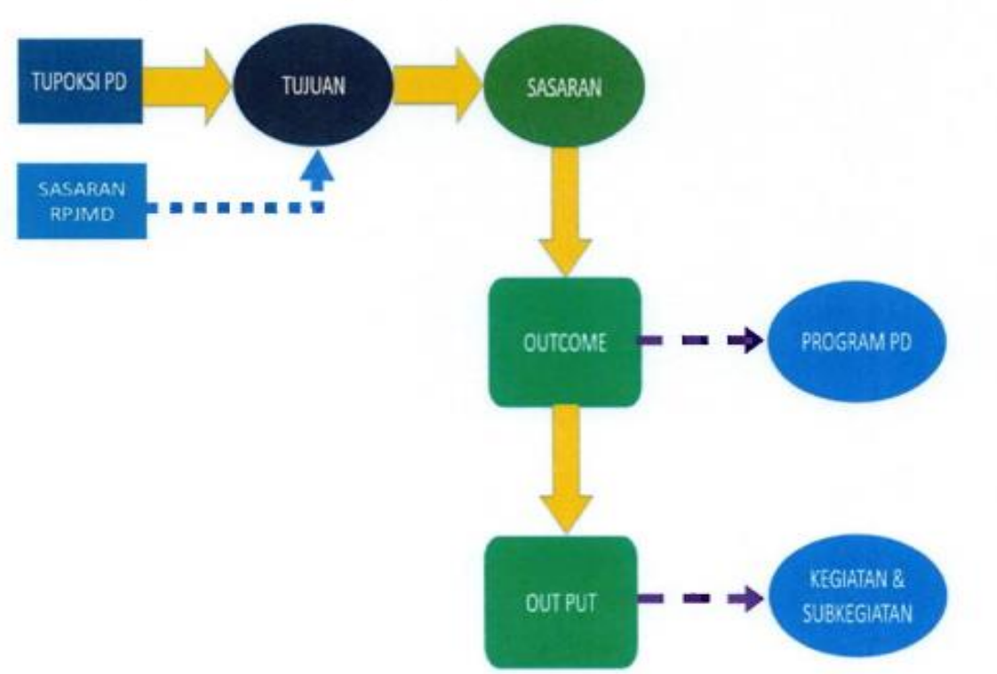

Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo. SASARAN RPJMD: S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				1. Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas		
					2. Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
					3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas		
			Sasaran Program: 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada				

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
						Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
						Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
						Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	
						Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	
				Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
						Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
						Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	
						Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	
						Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
						Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
				Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota		Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	
S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah		2. Meningkatnya kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran			Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
			Sasaran Program: Meningkatnya kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
						Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
						Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
						Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	
						Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
						Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Sasaran Kegiatan: Tersedianya Peralatan Proteksi Kebakaran yang Sesuai Standar		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
						Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
						Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
				Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran		Investigasi Kejadian Kebakaran	
						Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
				Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
						Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
						Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	
				Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
						Penyelenggaran Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan manusia	
						Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 4 (empat) kegiatan meliputi :
   a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
      1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
      2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
      3) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas;
      4) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
      5) Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
      6) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
      7) Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota.
   b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan sub kegiatan meliputi:
      1) Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
      2) Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
      3) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti);
      4) Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
      5) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
      6) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah;
      7) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
   c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
      1) Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah;
      2) Dukungan Operasional Sekretariat PPNS;
      3) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
   d. Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
      1) Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota;

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terdiri dari 5 (lima) kegiatan meliputi :
   a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:

1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
2) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran;
3) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
4) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;
5) Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK);
6) Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP);
7) Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
9) Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran dengan sub kegiatan meliputi:
   1) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran;
   2) Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran;
c. Investigasi Kejadian Kebakaran dengan sub kegiatan meliputi:
   1) Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran.
d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan su bkegiatan meliputi:
   1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat;
   2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
   3) Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran.
e. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia dengan sub kegiatan meliputi:
   1) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan. Dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia;
   2) Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi;
   3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan meliputi :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan meliputi:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
      3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan meliputi:
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   2) Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan meliputi:
   1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan meliputi:
   1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
   2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
   3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan meliputi:
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
   2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   5) Penyediaan Bahan/Material;
   6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan meliputi:
   1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   2) Pengadaan Mebel;
   3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
   5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan meliputi:
   1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan meliputi:
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   4) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dalam upaya mencapai tujuan strategis dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, serta mewujudkan visi dan misi daerah yang progresif dan berdaya saing, dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 ini memuat serangkaian program dan kegiatan yang terukur dan terencana.

Program dan kegiatan ini merupakan penjabaran operasional dari strategi kebijakan yang telah dirumuskan, dirancang untuk memberikan dampak optimal dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas tugas, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan Kabupaten Purworejo. Setiap program dan kegiatannya akan diimplementasikan secara sinergis, didukung oleh alokasi sumber daya yang efisien, dan dimonitor secara berkelanjutan untuk memastikan tercapainya target kinerja.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan beserta pendanaan untuk mendukung pencapaian kinerja Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo periode 2025-2029 tersaji dalam Tabel 4.2: *Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo*, sebagai berikut:

Tabel:4.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanganan kebakaran dan non kebakaran, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	100	100		100		100		100		100		100			
			Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	100		100		100		100		100		100			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70,21	70,45		72,89		75,53		77,76		80,2		80,2			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70,22	70,45		72,89		75,53		77,76		80,2		80,2			
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.754.755.702		9.992.203.000		8.878.475.000		8.878.475.000		8.878.475.000				
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	10.754.755.702	100	9.992.203.000	100	8.878.475.000	100	8.878.475.000	100	8.878.475.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	22	23	22.489.200	24	24.000.000	24	26.200.000	24	28.400.000	24	30.500.000	119			
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	16.641.100	22	17.000.000	22	18.000.000	23	19.000.000	22	20.000.000	111			
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	24	5.848.100	24	6.000.000	24	7.000.000	24	8.000.000	24	9.000.000	120			
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	1	1.000.000	1	1.200.000	1	1.400.000	1	1.500.000	4			
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	45	45	10.182.605.752	45	9.195.017.700	45	8.198.631.700	45	8.182.781.700	45	8.167.031.700	225			
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	70	110	10.177.964.952	110	9.190.017.700	110	8.193.631.700	110	8.176.781.700	110	8.160.031.700	110			
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	44	4.640.800	44	5.000.000	44	5.000.000	44	6.000.000	44	7.000.000	220			
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0		11	1.000.000	11	1.000.000	11	1.000.000	11	1.000.000	44			
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	11	1.000.000	11	1.000.000	11	1.000.000	11	1.000.000	44			
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	17	4.872.900	17	168.292.000	17	35.500.000	17	36.000.000	17	36.500.000	85			
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	142	133.292.000	0	0	0	0	0	0	142			
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	17	4.872.900	17	5.000.000	17	5.500.000	17	6.000.000	17	6.500.000	85			
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	0	0	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	20			
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	9	8	179.705.300	8	185.500.000	8	193.500.000	8	201.500.000	8	209.500.000	40			
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	14	7.114.800	14	7.500.000	14	8.000.000	14	8.500.000	14	9.000.000	70			
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	35	19.610.800	35	20.000.000	35	21.000.000	35	22.000.000	35	23.000.000	175			
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	107.167.200	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	5			
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	5	8.575.200	5	9.000.000	5	9.500.000	5	10.000.000	5	10.500.000	25			
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	31	6.518.300	31	7.000.000	31	7.500.000	31	8.000.000	31	8.500.000	155			
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	2.226.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	60			
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	25.123.400	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	60			
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	3.369.600	2	4.000.000	2	4.500.000	2	5.000.000	2	5.500.000	10			
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	0	0		16	200.000	10	200.000	10	100.000	0		36			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	100.000	0	0	0	0	0	0	1			
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	15	100.000	0	0	0	0	0	0	15			
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	10	100.000	0	0	0	0	10			
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	10	100.000	0	0	10			
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	1	100.000	0	0	0	0	1			
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	24	80.153.550	24	124.623.300	24	124.873.300	24	125.123.300	24	125.373.300	120			
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	68.681.550	12	112.873.300	12	112.873.300	12	112.873.300	12	112.873.300	60			
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	11.472.000	12	11.750.000	12	12.000.000	12	12.250.000	12	12.500.000	60			
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	4	284.929.000	4	293.570.000	4	298.570.000	4	303.570.000	4	308.570.000	20			
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1			
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	20	183.690.000	20	183.690.000	20	183.690.000	20	183.690.000	20	183.690.000	20			
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	37	25	17.400.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30			
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	48.959.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1			
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat		Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	100	100		100		100		100		100		100			
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						1.709.930.600		2.500.000.000		1.709.931.000		1.736.948.000		1.764.391.000				
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persentase Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100	1.709.930.600	100	2.500.000.000	100	1.709.931.000	100	1.736.948.000	100	1.764.391.000	100	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100		100		100		100		100		100	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Kabupaten Purworejo	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	100	594.308.200	100	764.580.000	100	937.431.000	100	778.080.000	100	788.580.000	100			
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	150.585.300	1	160.000.000	1	165.000.000	1	170.000.000	1	175.000.000	5			
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	5.119.700	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000	1	7.500.000	5			
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	78	0	0	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	400			
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	12	12	88.216.200	12	90.000.000	12	95.000.000	12	100.000.000	12	105.000.000	60			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan Kepala Daerah	Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	2	2	2.307.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	10			
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	0	4	348.080.000	4	348.080.000	5	517.931.000	4	348.080.000	4	348.080.000	21			
1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Dokumen	0	0	0	1	7.500.000	0	0	0	0	0	0	1			
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	%	100	100	1.076.071.800	100	1.655.420.000	100	700.500.000	100	884.868.000	100	899.811.000	100			
1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	5	11.655.400	6	15.000.000	8	17.500.000	10	20.000.000	12	22.500.000	41			
1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	2			
1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Unit	0	0	0	1	978.420.000	0	0	0	0	0	0	1			
1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Laporan	3	3	11.238.000	3	12.000.000	3	13.000.000	3	14.000.000	3	15.000.000	15			
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	4	4	102.922.300	4	100.000.000	5	120.000.000	6	130.000.000	7	140.000.000	26			
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	12	652.670.700	12	350.000.000	12	350.000.000	12	470.868.000	12	442.311.000	60			
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	12	297.585.400	12	200.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	60			
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota yang Dibina	Orang	100	15	39.550.600	14	65.000.000	14	72.000.000	14	74.000.000	14	76.000.000	14			
1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4			
1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Laporan	12	12	33.210.900	12	35.000.000	12	42.000.000	12	44.000.000	12	46.000.000	60			
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	1	1	6.339.700	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5			
1.05.02.3.05	Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0		1	15.000.000	0		0		0		1			
1.05.02.3.05.0001	Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas Linmas di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan	Orang	0	0	0	200	15.000.000	0	0	0	0	0	0	200			
3	Meningkatnya kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran		Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	100		100		100		100		100		100			
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						636.521.600		4.000.000.000		636.522.000		3.000.000.000		3.047.400.000				
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran dan non kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap	%	100	76	636.521.600	77	4.000.000.000	78	636.522.000	79	3.000.000.000	80	3.047.400.000	80	Bidang Pemadam Kebakaran	Kabupaten Purworejo	
			Persentase Pelayanan Non Kebakaran	%	100	100		100		100		100		100		100	Bidang Pemadam Kebakaran	Kabupaten Purworejo	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	%	100	100	550.381.800	100	3.020.000.000	100	470.522.000	100	2.598.000.000	100	2.839.400.000	100			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	165.182.600	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	60			
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1	1	29.529.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	5			
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	1	1	231.680.000	1	250.000.000	1	200.522.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5			
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	0	50	26.359.800	120	50.000.000	120	50.000.000	120	50.000.000	120	50.000.000	530			
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa / kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	494	80.000.000	0	0	494			
1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000	1			
1.05.04.2.01.0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	20	51	97.630.400	1	2.314.000.000	0	0	2	1.988.000.000	1	2.004.400.000	55			
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	dokumen	0	0	0	1	36.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Tersedianya Peralatan Proteksi Kebakaran yang Sesuai Standar	Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran yang sesuai standar	%	100	100	2.075.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100			
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	1	2.075.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5			
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4			
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	%	100	100	3.304.800	100	5.000.000	100	6.000.000	100	7.000.000	100	8.000.000	100			
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen	1	1	3.304.800	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	5			
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jenis	3	2	80.760.000	3	105.000.000	3	95.000.000	3	115.000.000	3	120.000.000	3			
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	205	350	73.420.000	350	75.000.000	350	75.000.000	350	85.000.000	350	90.000.000	1.750			
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/kel	382	494	7.340.000	494	15.000.000	494	10.000.000	494	15.000.000	494	15.000.000	494			
1.05.04.2.04.0004	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Orang	0	0	0	200	15.000.000	150	10.000.000	200	15.000.000	200	15.000.000	750			
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terlaksananya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jenis	0	0		3	835.000.000	3	30.000.000	3	240.000.000	3	40.000.000	3			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	0	0	0	12	15.000.000	12	10.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	48			
1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	laporan	0	0	0	4	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	7			
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	0	0	0	3	800.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	4			
Jumlah						**13.101.207.902**		**16.492.203.000**		**11.224.928.000**		**13.615.423.000**		**13.690.266.000**					

Selanjutnya untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah tidak dapat dilakukan tanpa dukungan yang kuat dari berbagai sektor. Oleh karena itu, implementasi kegiatan pendukung prioritas pembangunan dirancang secara strategis untuk mendukung pencapaian setiap target untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan secara keseluruhan. Berikut subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah:

Tabel 4.3
Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)			
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada			
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Aktivitas pada Penjabaran Program: Mobil mini bus – SPM*
			Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	*Aktivitas pada Penjabaran Program: Pembentukan satgas linmas*
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
			Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	*Aktivitas pada Penjabaran Program: Penyediaan sarana dan prasarana pendukung penegakan perda dan perkada*
			Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota		
			Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	
			Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
			Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota		
			Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	
			Pemberdayaan Satgas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Satgas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran			
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
			Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	
			Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Aktivitas pada Penjabaran Program:* *1. Pengadaan kendaraan pemadam kebakaran;* *2. Pengadaan pos pemadam kebakaran;* *3. Pengadaan kendaraan rescue.*
			Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			Investigasi Kejadian Kebakaran		
			Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
			Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;	
			Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan kegiatan Unggulan Daerah

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis yang tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga turut mendukung visi pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam dan Kebakaran Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk menyelaraskan program dan kegiatan dengan kebijakan strategis pusat dan provinsi, serta memberikan dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Lebih dari itu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo berpartisipasi dan berkontribusi pada kegiatan unggulan daerah yang bertujuan untuk memajukan Kabupaten Purworejo, serta memastikan bahwa setiap upaya selaras dengan tujuan pembangunan yang terintegrasi. Pada Renstra ini menopang dukungan terhadap Asta Cita Presiden, Program Delegasi Provinsi dan Program Prioritas Bupati melalui beberapa poin sebagai berikut:

a. Penjabaran Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional)

Tabel 4.4
Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita)

No.	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penegakan Perda Perkada	Penegakan Perda Perkada	Trantibumlinmas	Satpol PP Damkar

b. Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi)

Tabel 4.5
Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi)

Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026
Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Damkar	Satpol PP Damkar	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Damkar	Satpol PP Damkar	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Damkar	Satpol PP Damkar	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran

Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026
Peningkatan operasional kader Posyandu	Pemberdayaan Posyandu dalam pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas	Trantibumlinmas dan Damkar	Satpol PP Damkar	Pemberdayaan Posyandu dalam pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas

c. Penjabaran Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan)

Tabel 4.6
Program yang Mendukung Program Program Kabupaten (Pitulungan)

No.	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas di 2026	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1.	Sejahtera Wargane (4)	Penguatan mitigasi kebencanaan secara terstruktur dan non struktur.	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Damkar	Satpol PP Damkar
			Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Damkar	Satpol PP Damkar
			Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Damkar	Satpol PP Damkar

4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

4.3.1. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur efektivitas dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian suatu tujuan atau sasaran strategis organisasi dalam periode waktu tertentu. IKU berfungsi sebagai alat ukur untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja organisasi, unit kerja, program, atau bahkan individu.

Indikator kinerja Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesainya kegiatan. Bertujuan untuk melakukan evaluasi apakah kegiatan bersangkutan memberikan manfaat terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Indikator kinerja yang akan dicapai oleh Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029 adalah sebagaimana Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Utama Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Indikator Tujuan PD 1. Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*Tujuan PD: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*
	2. Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70,22	70,45	72,89	75,53	77,76	80,20	
2.	Indikator Sasaran I: Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*Sasaran PD:* *1. Meningkatnya kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran*
	Indikator Sasaran II: Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*Sasaran PD:* *2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat*
	Indikator Sasaran III: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70,22	70,45	72,89	75,53	77,76	80,20	*Sasaran PD:* *3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*

4.3.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Untuk memastikan sejauh mana fokus dan upaya Perangkat Daerah dalam merealisasikan tujuan strategis Perangkat Daerah, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo juga telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK dalam konteks pemerintahan, IKK adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan atau instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikut IKK Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo:

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*Permendagri No. 18 Tahun 2020*

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*Permendagri No. 18 Tahun 2020*
3.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	75%	76%	77%	78%	79%	80%	*Permendagri No. 18 Tahun 2020*
4.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	14	13	12	11	10	9	*Permendagri No. 18 Tahun 2020*

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran setiap tahun.
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD) Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk periode lima tahun. Penyusunan Renstra ini dilandasi oleh dinamika kondisi kebencanaan, amanat peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan untuk memperkuat tata kelola penanggulangan bencana yang terarah, terukur, dan akuntabel.

Wilayah Indonesia, termasuk daerah ini, memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi akibat faktor geografis, geologis, hidrologis, klimatologis, dan demografis. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan terjadi secara berulang setiap tahun, sementara potensi bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi tetap menjadi ancaman signifikan.

Perubahan iklim global yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata, pergeseran pola curah hujan, dan anomali cuaca, semakin memperbesar intensitas dan frekuensi kejadian bencana. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk, degradasi lingkungan, serta pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan aspek mitigasi risiko turut memperburuk kondisi kerentanan masyarakat.

Situasi tersebut menuntut adanya perencanaan strategis yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan guna meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara efektif. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Purworejo menyusun Renstra Tahun 2025–2029 sebagai pedoman arah pembangunan bidang penanggulangan bencana untuk lima tahun ke depan.

Renstra BPBD Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan resmi perangkat daerah yang memuat arah kebijakan, strategi, serta program penanggulangan bencana selama periode lima tahun. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan BPBD serta menjadi dasar dalam pengalokasian sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terukur dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 merupakan kewajiban konstitusional dan administratif yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi-regulasi tersebut memberikan arahan, mandat, sekaligus legitimasi bagi BPBD Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan bidang penanggulangan bencana.

Secara khusus, amanat regulasi dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

   Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. UU ini juga mengamanatkan pembentukan BPBD

di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis penanggulangan bencana.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

PP ini mengatur bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup tiga tahapan utama, yaitu pra bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Ketiga tahapan tersebut harus dilaksanakan secara sistematis melalui kebijakan, strategi, dan program yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah, termasuk Renstra BPBD.

Dengan demikian, penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 bukan hanya merupakan kebutuhan teknis perencanaan, tetapi juga merupakan amanat regulasi yang harus dilaksanakan. Renstra ini berfungsi sebagai instrumen perencanaan sekaligus instrumen akuntabilitas yang memastikan keterpaduan antara kebijakan penanggulangan bencana dengan kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Renstra BPBD Tahun 2025–2029 memiliki nilai strategis sebagai berikut:

1. Menjadi instrumen perencanaan dalam memperkuat kapasitas daerah pada aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana.
2. Berfungsi sebagai alat integrasi kebijakan yang menyinergikan program penanggulangan bencana dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional.
3. Menjadi dasar penganggaran dalam memastikan pemanfaatan sumber daya keuangan daerah secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
4. Berperan sebagai pedoman koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, lintas daerah, dunia usaha, masyarakat, serta lembaga non-pemerintah.
5. Menjadi instrumen akuntabilitas publik yang menjamin transparansi kinerja BPBD sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah daerah dalam melindungi keselamatan warganya.

Dengan demikian, penyusunan Renstra BPBD Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari upaya pembangunan daerah yang berketahanan bencana, sejalan dengan amanat regulasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat, serta menjadi pedoman strategis bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada, setiap Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (PD) wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Adapun landasan hukum yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah memiliki Renstra PD adalah:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembara Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah:(9-221/2024) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 78);
22. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Puworejo Provinsi Jawa Tengah :10-2026/2024);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Puworejo (Lembaran Daerah kabupaten Puworejo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Puworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
27. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Puworejo Tahun 2025-2029;

28. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 139 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Puworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 139 Seri D Nomor 24);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Puworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5 Seri E Nomor 5, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 5/2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Puworejo Nomor 5);
30. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 000.7/91/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Puworejo Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra Perangkat Daerah BPBD Tahun 2026-2030 dimaksudkan untuk:

a. Memberikan arahan kebijakan pembangunan bagi program dan kegiatan penanggulangan bencana di daerah untuk periode liam tahun ke depan;
b. Pedoman dan kerangka acuan dalam proses pelaksanaan program, kegiatan dan evaluasi di lingkup BPBD Kabupaten Purworejo;
c. Menggambarkan kondisi data saat ini dan 5 (lima) tahun yang akan datang;
d. Konsistensi antara perencanaan, penanggaran, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pegawasan di BPBD Kabupaten Purworejo pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan.

2. Tujuan

Renstra Perangkat Daerah BPBD Tahun 2026-2030 memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2026-2030, yang disertai dengan program prioritas BPBD;
b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2026-2030;
c. Sebagai pedoman pemantauan kinerja dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Purworejo.
d. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi BPBD Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan visi dan misi daerah;
e. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pada BPBD Kabupaten Purworejo;
f. Memudahkan seluruh jajaran pada BPBD Kabupaten Purworejo untuk mencapai tujuan dengan cara

menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK). Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum dan ringkas tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

2.1.5 Kelompok sasaran layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.

2.2.2 Isu Strategis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini menarasikan ringkas apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Penentuan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada:

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD. Penahapan Renstra PD

Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

narasi singkat terkait dukungan terhadap nasional, provinsi, dan kegiatan unggulan daerah.

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana, pada bagian ini disajkan data dan informasi capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo selama periode 2021-2024. Penyajian ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sekaligus bahan evaluasi dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar perumusan arah kebijakan dan strategi penanggulangan bencana pada periode perencana berikutnya.

Gambar 2.1 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat

Gambar 2.2 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Analisis Deskriptif

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan BPBD Kabupaten Purworejo menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Realisasi capaian IKM selalu memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 89,2 poin dari target 88,7 poin. Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja pelayanan publik BPBD yang semakin baik dan semakin diapresiasi masyarakat.

Sementara itu, indikator Terpenuhinya Unsur Penanggulangan Bencana secara konsisten tercapai 100% sepanjang periode 2021–2024. Artinya, seluruh komponen utama penanggulangan bencana (pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana) telah dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan.

2. Analisis Diagnostik

a. Kekuatan (Strengths):

Tingkat kepuasan masyarakat yang meningkat secara konsisten menandakan adanya perbaikan kualitas layanan.

Pencapaian 100% pada indikator unsur penanggulangan bencana menunjukkan tata kelola kelembagaan yang stabil.

b. Kelemahan (Weaknesses):

Pada tahun 2021, data IKM belum tersedia sehingga sulit digunakan sebagai basis tren jangka penuh lima tahun.

Indikator kinerja masih relatif terbatas (lebih bersifat output administratif daripada outcome keberlanjutan).

c. Peluang (Opportunities):

Dengan tren positif, BPBD memiliki modal sosial untuk memperluas program berbasis partisipasi masyarakat.

Dukungan regulasi nasional dan daerah semakin kuat dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana.

d. Tantangan (Threats):

Perubahan iklim meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi yang berpotensi menekan kualitas pelayanan.

Keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan anggaran berisiko menghambat peningkatan capaian kinerja di masa depan.

Secara umum, kinerja BPBD Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dikatakan berhasil menjaga konsistensi capaian indikator kunci. Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan peningkatan yang positif dan indikator pemenuhan unsur penanggulangan bencana tercapai penuh setiap tahun. Namun demikian, tantangan berupa keterbatasan data historis, dinamika ancaman bencana, serta keterbatasan sumber daya perlu menjadi perhatian dalam perumusan Renstra BPBD 2025–2029.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi

Pembentukan BPBD ini mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan sesuai dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah, sedangkan untuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo telah diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 139 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.

1. Tugas

BPBD bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana yang meliputi :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
d. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal, dan sewaktu-waktu saat dibutuhkan apabila dalam kondisi darurat bencana;
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam rangka penanggulangan bencana;
g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

BPBD dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penanggulangan bencana;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penanggulangan bencana;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah bidang penanggulangan bencana;
e. Pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPBD; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi

2.1.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPBD sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 139 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

1. Kepala BPBD adalah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi
2. Unsur pengarah bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Unsur pengarah terdiri dari ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan anggota seperti pejabat Pemerintah Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah yang terkait penanggulangan bencana sebanyak 5 (lima) orang dan tenaga profesional/ ahli yang berasal dari pakar, professional, dan tokoh masyarakat di Daerah sebanyak 4 (empat) orang. Mekanisme pemilihan anggota dan hal lain yang berkaitan dengan Unsur Pengarah diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;
3. Unsur pelaksana dalam melaksanakan fungsi merumuskan konsep pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah, memantau penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah, dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah. Unsur pelaksana BPBD terdiri atas :
   a. Kepala Pelaksana BPBD bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksana, membantu Kepala BPBD dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi;
   b. Sekretariat unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Bertugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan BPBD. Sekretariat unsur pelaksana menyelenggarakan fungsi:
      1) pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
      2) pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
      3) pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
      4) penggordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
      5) pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
      6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas 2 subbagian yang dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pejabat fungsional dan pelaksana. Adapun 2 sub bagian antara lain:

1) Subbagian Keuangan, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang keuangan, yang meliputi menyelenggarakan administrasi keuangan, menyelenggarakan administrasi pendapatan Daerah dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi menyelenggarakan administrasi Barang Milik Daerah, menyelenggarakan administrasi umum, menyelenggarakan pengadaan Barang Milik Daerah, menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan pemeliharaan Barang Milik Daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bertugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD berkaitan dengan tugas dan fungsi. Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Bidang Kedaruratan dan Logistik bertugas mengkoordinasikan melaksanakan perumusan rencana, mengkoordinasi, melaksanakan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan di bidang kedaruratan logistik pada saat terjadi bencana. Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD berkaitan dengan tugas dan fungsi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan informasi rawan bencana di Daerah, penataan sistem dasar penanggulangan bencana dan pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD berkaitan dengan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana;

f. UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan BPBD. Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

g. Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada BPBD. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta pejabat berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas, dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan. Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi dan/atau lintas perangkat Daerah.

Berikut merupakan gambar bagan struktur organisasi BPBD Kabupaten Purworejo berdasarkan peraturan Bupati Purworejo Nomor 139 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BPBD Kabupaten Purworejo

Gambar 2.3
Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Purworejo

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia (SDM) merupakan penggerak dalam memanfaatkan sumber daya dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

SDM pada BPBD Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 terdapat 54 orang pegawai terdiri dari 22 ASN dan 32 Non ASN.

Tabel 2.1
Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Golongan

No	Pendidikan	Non ASN			ASN			Golongan ASN												
								PNS				PPPK								
		L	P	Jml	L	P	Jml	I	II	III	IV	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	S2				2	2	4			1	3									
2	S1	6	3	9	7	4	11			8	1									2
3	D3	5	3	8		2	2		1								1			
4	SLTA/ Sederajat	14	1	15	4	1	5		5											
Jumlah		25	7	32	9	12	22		6	9	4						1			2

Jumlah Kebutuhan pegawai dan kompensasi pensiun di BPBD Kabupaten Purworejo dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 2.2
Jumlah Kebutuhan Pegawai BPBD dan Komposisi Pensiun Kabupaten Purworejo

No	Jabatan	Kondisi Saat ini	Kebutuhan Pegawai	Kekurangan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kepala Pelaksana BPBD	0	1	-1						
2	Kepala Sekretariat	1	1	0	1					
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	1	0			1			
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	1	1	0		1				
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	1	0						
6.	Kasubag Keuangan	1	1	0				1		
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	1	0	1					
8.	Bendahara	1	1	0						
9.	Verifikator Keuangan	1	4	-3						
10.	Pengadministrasi Keuangan	1	5	-4						
11.	Pengadministrasi Umum	2	2	0						
12.	Pengelola Data	0	1	-1						
13.	Pengelola Program dan Laporan	0	1	-1						
14.	Pengadministrasi Kepegawaian	0	1	-1						
15.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2	2	0						
16.	Pengelola Kepegawaian	0	1	-1						
17.	Pengemudi	0	1	-1						
18.	Penyuluh Bencana	1	2	-1						
20.	Analisis Mitigasi Bencana	0	1	-1						
21.	Pengadministrasi Pencegahan Bencana	0	1	-1						
22.	Analisis Bencana	3	3	0						
23.	Pengolah Bahan untuk Rencana Penanggulangan Bencana	0	1	-1						
26.	Pengadministrasi Sarana Prasarana Darurat	0	1	-1						
27.	Pengadministrasi Kesiapsiagaan	0	1	-1						
28.	Pranata Bencana	0	1	-1						
29.	Pengadministrasi Logistik	0	1	-1						
30.	Pengadministrasi Evakuasi dan Pengungsi	0	1	-1						
31.	Pengadministrasi Rehabilitasi	0	1	-1						
32.	Pengadministrasi Rekonstruksi	0	1	-1						
33.	JF Pranata Komputer	0	4	-4						
34.	JF Terampil - Arsiparis	1	1	0						
35.	JF Perencana Ahli Muda	1	1	0						
36.	JF Penata Penanggulangan Bencana	3	3	0	1					
	Jumlah	22	50	-28						

Sumber : KIB BPBD Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan peta jabatan yang dibutuhkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo baik yang bersifat administratif maupun tenaga teknis maka ketersediaan tenaga saat ini sebesar 44% dari tenaga yang dibutuhkan. Juga perlu diperhitungkan ketersediaan pegawai berstatus ASN sampai dengan tahun 2030 yang akan memasuki masa pensiun.

Sarana dan Prasarana yang tersedia digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari maupun dalam kondisi tertentu yang dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, regional maupun nasional. BPBD Kabupaten Purworejo menggunakan sarana dan prasarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah dalam menangani bencana.

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana BPBD

No	Jenis/ Nama Sarana Prasarana	Tahun Perolehan	JML	Kondisi Saat Ini
A	**Sosial Media/ Aplikasi**			
1	Website : http://bpbd.purworejokab.go.id		1	Aktif
2	Instagram : @bpbdpurworejo		1	Aktif
3	Youtube : BPBD Purworejo		1	Aktif
4	WhatsApp : 0812 2911 2914		1	Aktif
5	Radio : ferk : 155.45 MHz, Dup+5.25 tone 88.5		1	Aktif
6	Telepon/Fax : (0275) 325667		1	Aktif
7	Aplikasi Informasi dan Pelaporan Bencana : https//e-siska.id	2023	1	Aktif
B	**Peralatan Transportasi**			
1	Kendaraan Roda 2 (Motor)	2009	1	Baik
2	Kendaraan Roda 2 (Motor)	2014	4	Baik
3	Kendaraan Roda 2 (Motor)	2015	8	Baik
4	Kendaraan Roda 2 (Trail)	2016	4	Baik
5	Kendaraan Roda 4 (Hilux – Pick Up)	2009	1	Baik
6	Kendaraan Roda 4 (Inova)	2014	1	Baik
7	Kendaraan Roda 4 (Ranger)	2016	1	Baik
8	Kendaraan Roda 4 (Hilux Double Cabin)	2022	1	Baik
9	Kendaraan Roda 6 (Truk Tangki Air)	2014	1	Baik
10	Kendaraan Roda 6 (Truk Evakuasi)	2015	1	Baik
11	Kendaraan Roda 6 (Truk Tangki Air)	2018	1	Baik
12	Kendaraan Roda 6 (Truk Tangki Air)	2022	1	Baik
13	Perahu Penumpang	2019	7	Baik
14	Perahu Penumpang Lipat	2017	2	Baik
15	Perahu Polythylane	2023	10	Baik
16	Perahu Polythylane Model LCR Pro	2023	2	Baik
17	Mesin Perahu	2016	3	Baik
18	Mesin Perahu	2019	2	Baik
19				
C	**Peralatan Komunikasi/Peringatan Dini**			
1	Early Warning System (EWS) Tanah Longsor	2017	5	Rusak Berat
2	Early Warning System (EWS) Tanah Longsor	2023	9	Baik
3	Early Warning System (EWS) Banjir	2017	5	Baik
4	Early Warning System (EWS) Banjir	2023	22	Baik
5	Early Warning System (EWS) Tsunami	2011	3	Baik
6	Early Warning System (EWS) Tsunami	2013	3	Baik
7	Early Warning System (EWS) Tsunami	2015	3	Baik
8	Early Warning System (EWS) Tsunami	2017	4	Baik
9	Early Warning System (EWS) Tsunami	2019	2	Baik
10	Early Warning System (EWS) Tsunami	2022	2	Baik
11	Early Warning System (EWS) Tsunami	2024	4	Baik
12	Handphone Samsung A53	2023	3	Baik
13	Handphone Iphone 11	2023	1	Baik
14	Handy Talky (HT)	2016	5	Baik
15	Handy Talky (HT)	2017	13	Baik
16	Handy Talky (HT)	2019	3	Baik
17	Handy Talky (HT)	2020	2	Baik
18	Handy Talky (HT)	2018	1	Baik
19	RIG	2008	1	Rusak Berat
20	SSB	2016	1	Baik
21	Tower Base Station	2017	1	Baik
22	Tablet PC	2023	1	Baik
23	Router Switch	2018	7	Baik
24	Router KVM Switch Aten	2018	8	Baik
25	Pesawat Radio Meter	2020	2	Baik
26	Radio Pancar Ulang (RPU)	2018	1	Rusak Berat
27	Radio Pancar Ulang (RPU)	2023	1	Baik
D	**Peralatan Penerangan/ Kelistrikan**			
1	Portable Generating Set	2009	1	Rusak Berat
2	Portable Generating Sert	2016	1	Baik

3	Lampu Sorot	2023	6	Baik
4	UPS	2018	1	Baik
5	Stabilizer	2018	1	Baik
6	Lampu Tenda	2023	12	Baik
7	Lampu Penerangan Solar Cell	2016	35	Baik
8	Lampu Penerangan Solar Handle Lamp	2016	12	Baik
9	Senter	`2016	1	Baik
E	**Peralatan Pengungsian**			
1	Velbed	2016	13	Baik
2	Tenda Pengungsi	2016	3	Baik
3	Tenda Keluarga	2016	11	Baik
F	**Peralatan Evakuasi Pohon Tumbang**			
1	Gergaji Mesin	2014	2	Baik
2	Gergaji Mesin	2018	8	Baik
3	Gergaji Mesin	2021	3	Baik
4	Gergaji Mesin	2023	20	Baik
5	Helmet	2023	12	Baik
G	**Peralatan Evakuasi Laka Air/ Banjir**			
1	Pelampung	2009	10	Rusak Berat
2	Pelampung	2019	16	Baik
3	Pelampung	2023	30	Baik
4	Peralatan Selam	2016	2	Baik
5	Dayung Perahu	2019	16	Baik
6	Sepatu Coral	2022	5	Baik
7				
H	**Peralatan Evakuasi Tanah Longsor**			
1	Excavator/ Backhoe	2015	2	Rusak
I	**Peralatan Evakuasi Laka Sumur/ Tebing**			
1	Peralatan Panjat Tebiing	2022	4	Baik
2	Basket Stretcher Haider	2022	2	Baik
3	Tali Tambang	2022	1	Baik
4	Karmentel beal 12 mm 50	2022	1	Baik
J	**Peralatan Evakuasi Kebakaran Hutan/ Bantuan Kekeringan**			
1	Pompa Pemadam Kebakaran	2015	1	Baik
2	Fire Horse Rubber	2007	1	Baik
3	Fire Horse Rubber	2013	2	Baik
4	Selang Pemadam Kebakaran	2014	1	Baik
5	Selang Pemadam Kebakaran	2015	2	Baik
6	Portable Water Pump	2003	1	Baik
7	Pompa Air	2014	1	Baik
8	Pompa Portable	2016	2	Baik
9	Pompa Air	2019	3	Baik
G	**Sarana Prasarana Pusdalop**			
1	Lemari Penyimpanan (Kabinet Operator)	2018	6	Baik
2	Lemari Besi/ Metal (Almari Radio)	2017	1	Baik
3	Alat ukur universal (tripod/ Kamera)	2023	1	Baik
4	LCD Projector / Infocus	2023	2	Baik
5	Focussing Screen/ Layar LCD Projector	2023	1	Baik
6	Projector Spider Bracket	2023	2	Baik
7	Alat Monitoring EWS	2021	2	Baik
8	AC Split	2023	2	Baik
9	Televisi	2018	2	Baik
10	Televisi 27 Inch	2023	1	Baik
11	Camera Video	2023	1	Baik
12	Camera Film	2014	1	Baik
13	Karpet	2017	1	Baik
14	Meja Operator	2018	6	Baik
15	Camera Digital	2023	1	Baik
16	Camera Digital Go Pro	2023	1	Baik
17	Video Conference	2023	1	Baik
18	Drone	2023	1	Baik
19	Stabilizer Camera	2023	1	Baik
20	Monitor cctv EWS Banjir	2017	1	Rusak
21	Monitoring Center	2017	1	Baik
22	Alite Dry Cabinet GPS 70 L (Lemari untuk GPS)	2023	1	Baik
23	PC Unit	2023	4	Baik
24	PC Unit	2022	1	Baik
25	PC Unit	2023	1	Baik
26	PC Unit	2023	3	Baik
27	Server File	2018	1	Baik

28	Hard Disk External	2023	3	Baik
29	Monitor	2023	1	Baik
30	Tenda Posko	2016	1	Baik
H	**Sarana Prasarana Gedung Kantor**			
1	Lemari Besi/ Metal	2016	7	Baik
2	Lemari Kayu	2008	2	Baik
3	Lemari Kayu	2015	1	Baik
4	Rak Besi	2014	1	Baik
5	Rak Besi	2016	2	Baik
6	Rak Besi	2017	24	Baik
7	Filling Kabinet	2016	19	Baik
8	Mesin Absensi	2013	1	Baik
9	Overhead Projector	2013	1	Rusak
10	Kursi Tamu	1992	1	Baik
11	Kursi Tamu	2013	1	Baik
12	Meja Rapat	2013	3	Baik
13	Kursi Putar	2018	4	Baik
14	Bangku Tunggu	2020	2	Baik
15	kursi lipat	2013	88	Rusak
16	Meja Komputer	2013	9	Baik
17	Vacum Cleaner	2016	1	Baik
18	AC Window	2013	2	Baik
19	AC Window	2014	4	Baik
20	AC Window	2018	1	Baik
21	AC Split	2014	1	Baik
22	AC Split	2019	1	Baik
23	AC Split	2020	2	Baik
24	Kipas Angin	2016	7	Baik
25	Kompor Gas	2013	1	Baik
26	Kompor Gas	2015	1	Baik
27	Kompor Gas	2016	2	Baik
28	Kompor Gas	2017	1	Baik
29	Tabung Gas	2013	1	Baik
30	Tabung Gas	2015	1	Baik
31	Tabung Gas	2016	1	Baik
32	Tabung Gas	2017	1	Baik
33	Selang Regulator	2016	1	Baik
34	Televisi 24 Inch	2014	1	Baik
35	Televisi 32 Inch	2015	1	Baik
36	Microphone	2013	4	Rusak
37	Tustel	2013	2	Rusak
38	Tangga Aluminium	2013	1	Baik
39	Dispenser	2014	2	Baik
40	Dispenser	2015	1	Baik
41	Handy Cam	2015	1	Baik
42	Tangga	2023	2	Baik
43	Microphone	2013	1	Rusak
44	Termos	2013	2	Baik
45	Lemari	2010	1	Baik
46	Gordyn	2016	43	Baik
47	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2013	1	Baik
48	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2013	4	Baik
49	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2013	9	Baik
50	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2013	32	Baik
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2013	1	Baik
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2013	4	Baik
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2013	9	Baik
54	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2013	28	Baik
55	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2013	4	Baik
56	Rak Peralatan	2014	1	Baik
57	Pesawat Telepon	2013	2	Baik
58	Pesawat Telepon	2018	1	Baik
59	Facsimile	2013	1	Baik
60	PC Unit	2013	9	Baik
61	PC Unit	2015	1	Baik
62	Laptop	2013	5	Baik
63	Laptop	2015	3	Baik
64	Laptop	2017	2	Baik
65	Laptop	2020	2	Baik
66	Laptop	2022	3	Baik
67	Laptop	2023	2	Baik
68	Printer	2018	1	Baik
69	Printer	2015	3	Baik
70	Printer	2017	1	Baik
71	Printer	2020	3	Baik
72	Printer	2022	4	Baik

73	Printer	2023	1	Baik
74	Scanner	2013	1	Rusak
75	Server	2014	1	Baik
I	**Rambu-Rambu**			
1	Rambu Jalur Evakuasi Tsunami	2013	39	Baik
2	Rambu Jalur Evakuasi Tsunami	2022	74	Baik

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai hak-hak dasar setiap warga negara. Pelayanan publik ini merupakan tolak ukur apakah pemerintah melakukan kinerjanya dengan baik karena kualitas pelayanan publik ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan publik ini harus dilakukan secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. BPBD Kabupaten Purworejo mempunyai peranan dalam membantu Bupati Purworejo dalam memberikan pelayanan publik.

Pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja pelayanan daerah menggambarkan capaian atas sasaran/target pada periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah digratifikasi oleh pemerintah. Capaian kinerja pelayanan terangkum dalam tabel T-C.23 berikut:

Tabel 2.4
T-C.23 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				N/A	85.44	87.05	88.67	90.26	91.91	N/A	85.44	8
2	Terpenuhinya Unsur Penanggulangan Bencana (Penanganan Pra Bencana, Penanganan tanggap darurat bencana, penanganan pasca bencana)	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana			N/A	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	1
		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			N/A	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	1
		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			N/A	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	1

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dari target yang ditetapkan adalah 100%, hal tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mencapai kinerja maksimal serta menunjukkan fokus perangkat daerah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pada kepuasan Masyarakat dalam hal penanggulangan bencana. Adapun sasaran pada Renstra BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan melakukan survei Kepuasan masyarakat (SKM) secara mandiri. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner secara digital. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.

   Target IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) menunjukkan peningkatan bertahap dari tahun 2022 hingga 2024. Realisasi IKM selama 3 Tahun menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2024.

   Meskipun IKM melebihi target yang telah ditetapkan namun masih terdapat permasalahan/ kekurangan, adapun permasalahan/ kekurangan adalah sebagai berikut :

   a. Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent*, serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi
   b. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Banyaknya permintaan masyarakat terhadap layanan bantuan air bersih tidak sebanding dengan jumlah sarana prasarana yang ada dan juga keterbatasan personil
   c. Pengaduan masyarakat yang diajukan terkadang di luar kewenangan BPBD

2. Terpenuhinya Unsur Penanggulangan Bencana (Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana, Penanganan Pasca Bencana)

   Capaian indikator Terpenuhinya unsur Penanggulangan Bencana (Penanganan pra bencana, penanganan tanggap darurat bencana, penanganan pasca bencana) adalah 100%. Dalam hal ini berarti tidak ditemukan adanya kesenjangan/gap pelayanan Perangkat Daerah. Antara target renstra perangkat daerah yang ditetapkan, realisasi capaian renstra, dan rasio capaian renstra perangkat daerah mencapai 100%. Hal ini tidak lepas dari adanya dukungan pimpinan dalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan. Meski didukung oleh sumber daya manusia yang belum memiliki sertifikasi yang dibutuhkan dan sarana prasarana yang sudah sudah tua dan terbatas namun BPBD Kabupaten Purworejo juga memaksimalkan fungsi pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan yang terencana, terpadu dan terkoordinasi.

   Adapun untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Purworejo pada periode Renstra 2021-2026 BPBD Kabupaten Purworejo disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 T-C 24
Anggaran dan Realisasi Anggaran BPBD Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***3,011,510,627***	***2,267,376,604***	***2,546,440,518***	***2,865,165,080***	***2,668,755,992***	***2,680,674,104***	***2,958,038,596***	***3,189,188,981***	***3,310,163,224***	***3,386,758,208***	***1,486,897,106***	-	***98.22***	***141***	***129.99***	***118***	***56***	**-**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**20,744,000**	**45,826,000**	**48,117,200**	**50,522,600**	**53,048,700**	**55,701,400**	**20,744,000**	**23,658,050**	**21,468,700**	**18,728,400**	**5,068,000**	-	***100***	***51.63***	***44.62***	***37.07***	***10***	**-**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,655,000	39,080,800	41,034,800	43,086,500	45,240,800	47,502,900	14,655,000	17,080,800	15,561,000	14917400	5,068,000		*100*	*43.71*	*37.92*	*34.62*	*11*	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	996,000	1,045,800	1,098,000	1,152,900	1,210,600	-	995,750	1,098,100	-	-		-	*100*	*105*	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	996,000	1,045,800	1,098,000	1,152,900	1,210,600	-	995,750	925,400	-	-		-	*100*	*88.49*	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	1,070,000	1,123,500	1,179,600	1,238,600	1,300,500	-	1,069,750	906,000	-	-		-	*100*	*80.64*	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	-	1,070,000	1,123,500	1,179,600	1,238,600	1,300,500	-	903,250	506,100	-	-		-	*84.42*	*45.05*	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1,251,200	1,313,700	1,379,300	1,448,300	1,520,700	-	1,250,750	1,108,600	-	-		-	*100*	*84.39*	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,089,000	1,362,000	1,430,100	1,501,600	1,576,600	1,655,600	6,089,000	1,362,000	1,363,500	3,811,000	-		***100***	***100***	***95.34***	***254***	**-**	**-**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2,646,553,443**	**1,810,901,804**	**1,883,061,918**	**2,093,051,880**	**2,138,295,292**	**2,125,828,204**	**2,603,738,585**	**2,769,637,033**	**2,740,106,795**	**2,734,303,348**	**1,348,787,382**	-	***98.38***	***153***	***146***	***131***	***63***	**-**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,636,217,843	1,800,389,104	1,872,023,618	2,081,461,780	2,126,125,792	2,113,050,104	2,593,405,985	2,759,124,533	2,728,825,595	2,724,219,748	1,346,697,582		*98.38*	*153*	*146*	*131*	*63*	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1,288,500	1,352,900	1,420,500	1,491,500	1,566,100		1,288,500	1,066,700	-	-		-	*100*	*78.85*	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10,335,600	9,224,200	9,685,400	10,169,600	10,678,000	11,212,000	10,332,600	9,224,000	10,214,500	10,083,600	2,089,800		*100*	*100*	*105*	*99*	*20*	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**-**	**2,752,900**	**2,890,500**	**3,035,000**	**3,186,700**	**3,346,100**	**-**	**2,744,200**	**2,621,700**	**-**	**-**	-	**-**	***100***	***90.70***	**-**	**-**	**-**
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		2,752,900	2,890,500	3,035,000	3,186,700	3,346,100	-	2,744,200	2,621,700	-	-		-	*100*	*90.70*	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan							-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**97,970,000**	**164,381,800**	**183,190,400**	**187,902,700**	**192,328,000**	**199,806,500**	**97,169,680**	**163,717,407**	**173,034,256**	**144,649,810**	**31,045,400**	-	***99.18***	***100***	***94.46***	***76.98***	***16***	**-**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		2,988,000	3,137,400	3,294,200	3,458,900	3,631,900	-	2,986,000	3,054,100	2,941,100	762,400		-	*100*	*97.34*	*89.28*	*22*	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7,234,900	7,596,600	7,976,400	8,375,200	8,794,000	-	7,227,400	4,478,100	4,837,100	2,619,100		-	*100*	*58.95*	*60.64*	*31*	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		69,576,000	73,054,800	76,707,500	80,542,900	84,570,000	-	63,825,000	60,614,400	53,907,000	16,799,700		-	*91.73*	*82.97*	*70.28*	*21*	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		8,613,500	9,044,100	9,496,300	9,971,100	10,469,600	-	13,413,400	7,897,300	8,502,450	573,600		-	*156*	*87.32*	*89.53*	*6*	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2,292,000	2,406,600	2,526,900	2,653,200	2,785,900	-	2,280,000	-	-	-		-	*99.48*	-	-	-	-
Penyediaan Bahan/ Material		7,131,400	7,487,900	7,862,200	8,255,400	8,668,100	-	7,131,400	7,055,600	5,898,400	1,617,600		-	*100*	*94.23*	*75.02*	*20*	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu			4,689,000	2,640,000	2,036,000		-	-	3,955,000	2,640,000	975,000		-	-	*84.35*	*100*	*48*	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97,970,000	66,546,000	69,873,300	73,366,900	77,035,300	80,887,000	97,169,680	66,854,207	80,859,056	62,126,760	7,146,000		*99.18*	*100*	*116*	*84.68*	*9*	-
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			5,900,700	4,032,300			-	-	5,120,700	3,797,000	552,000		-	-	*86.78*	*94.16*	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**-**	**-**	**21,882,600**	**64,459,200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21,750,100**	**64,452,800**	**-**	-	**-**	**-**	***99.39***	***100***	**-**	**-**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Pengadaan Mebel							-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			21,882,600	64,459,200			-	-	21,750,100	64,452,800	-		-	-	*99.39*	*100*	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**137,560,184**	**126,363,100**	**132,681,000**	**139,315,000**	**146,280,700**	**153,594,800**	**131,221,637**	**111,634,331**	**118,437,936**	**124,470,530**	**56,228,347**	-	***95.39***	***88.34***	***89.27***	***89.34***	***38***	**-**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,462,000	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,200	2,431,000	20,414,000	1,893,500	-	-	-		*100*	*94.68*	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87,271,000	100,800,000	105,840,000	111,132,000	116,688,600	122,523,000	80,980,653	87,641,679	96,194,916	102,306,462	51,543,977		*92.79*	*86.95*	*90.89*	*92.06*	*44*	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29,827,184	23,563,100	24,741,000	25,978,000	27,276,900	28,640,800	29,826,984	22,099,152	22,243,020	22,164,068	4,684,370		*100*	*93.79*	*89.90*	*85.32*	*17*	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**108,683,000**	**117,151,000**	**274,616,900**	**326,878,700**	**135,616,600**	**142,397,100**	**105,164,694**	**117,797,960**	**232,743,737**	**300,153,320**	**45,767,977**	-	***96.76***	***101***	***85***	***91.82***	***34***	**-**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	47,273,000	57,693,000	60,577,600	63,606,400	66,786,800	70,126,100	43,792,694	53,978,557	33,018,776	34,074,137	4,658,325		*92.64*	*93.56*	*54.51*	*53.57*	*7*	-

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			151,608,500	197,720,000			-	-	133,262,613	164,617,636	12,288,400		-	-	*87.90*	*83.26*	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		13,597,000	14,276,800	14,990,600	15,740,100	16,527,100	-	17,228,000	14,105,000	23,655,000	4,225,000		-	*127*	*98.80*	*158*	*27*	-
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46,410,000	35,040,000	36,792,000	38,631,600	40,563,100	42,591,000	46,408,600	35,022,403	40,738,348	61,503,447	21,561,252		*100*	*100*	*111*	*159*	*53*	-
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000	10,821,000	11,362,000	11,930,100	12,526,600	13,152,900	14,963,400	11,569,000	11,619,000	16,303,100	3,035,000		*100*	*107*	*102*	*137*	*24*	-
Program Penanggulangan Bencana	**1,770,445,710**	**3,787,000,000**	**2,881,600,700**	**3,158,302,880**	**3,080,000,000**	**3,072,030,000**	**1,701,388,323**	**4,415,205,287**	**4,024,222,731**	**4,666,062,549**	**286,682,896**	-	***96.10***	***117***	***140***	***148***	***9***	**-**
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	**6,500,000**	**305,903,400**	**60,886,000**	**72,693,100**	**83,769,600**	**328,951,100**	**6,500,000**	**352,317,742**	**43,191,800**	**89,200,400**	**39,062,900**	-	***100***	***115***	***70.94***	***123***	***47***	**-**
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	6,500,000	245,336,400				245,336,400	6,500,000	244,970,942	-	-	-		*100*	*100*	-	-	-	-
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)		60,567,000	60,886,000	72,693,100	83,769,600	83,614,700	-	107,346,800	43,191,800	89,200,400	39,062,900		-	*177*	*70.94*	*123*	*47*	-
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**535,165,400**	**1,683,085,400**	**1,170,535,900**	**1,136,931,480**	**1,187,108,000**	**1,018,572,200**	**529,310,799**	**2,273,543,087**	**2,707,812,715**	**2,887,404,981**	**101,746,501**	-	***98.91***	***135***	***231***	***254***	***9***	**-**
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota			145,233,200			-	-	-	173,205,600	-	-		-	-	*119*	-	-	-
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota			18,560,300	21,693,780		-	-	-	16,824,800	21,211,100	58,978,200		-	-	*90.65*	*97.78*	-	-
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	174,325,400	342,235,000	242,235,000	322,172,500	354,389,700	262,265,000	171,995,599	323,797,164	280,862,100	427,089,320	35,501,400		*98.66*	*94.61*	*116*	*133*	*10*	-
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	184,607,000	924,085,800	221,502,800	265,803,300	279,093,400	221,502,800	181,764,000	1,565,592,580	2,110,561,215	1,985,454,620	-		*98.46*	*169*	*953*	*747*	-	-
Pengeloaan Resiko Bencana Kabupaten/ Kota			50,000,000			-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		41,683,000	41,683,000	45,851,300	48,143,800	48,143,800	-	40,636,300	87,711,500	129,863,800	-		-	*97.49*	*210*	*283*	-	-
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	25,000,000					-	24,998,200	-	-		-		*100*	-	-	-	-	-
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepatn (TRC)	50,000,000	165,760,000	152,000,000	159,600,000	167,580,000	159,600,000	50,000,000	143,434,153	13,029,400	221,843,341	3,029,000		*100*	*86.53*	*8.57*	*139*	*2*	-

Bencana Kabupaten/ Kota																		
Penyusunan Rencana Kontijensi	101,233,000		100,000,000	105,000,000	110,250,000	110,250,000	100,553,000				100,000		*99.33*	-	-	-	*0*	-
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		160,460,000	150,460,000	165,506,000	173,781,300	165,506,000	-	160,500,290	23,183,400	101,942,800	4,137,901		-	*100*	*15.41*	*61.59*	*2*	-
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		48,861,600	48,861,600	51,304,600	53,869,800	51,304,600	-	39,582,600	2,434,700	-	-		-	*81.01*	*4.98*	-	-	-
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam							-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**1,203,780,310**	**1,773,037,200**	**1,480,204,800**	**1,711,555,600**	**1,704,413,600**	**1,572,946,500**	**1,165,577,524**	**1,755,932,908**	**1,230,045,416**	**1,581,877,347**	**136,788,495**	-	***96.83***	***99.04***	***83.10***	***92.42***	***8***	**-**
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas											-		-	-	-	-	-	-
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	802,465,810	950,036,500	920,036,500	996,038,300	1,045,840,200	996,038,300	795,941,416	915,010,149	808,694,177	709,521,108	130,800,595		*99.19*	*96.31*	*87.90*	*71.23*	*13*	-
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	401,314,500	28,571,600	20,000,000	21,000,000	22,050,000	20,000,000	369,636,108	27,681,400	-	11,012,500	1,285,100		*92.11*	*96.88*	-	*52.44*	*6*	-
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota		569,785,200	369,785,200	517,696,200	595,354,000	517,699,200	-	638,024,609	295,070,939	695,725,139	2,581,800		-	*112*	*79.80*	*134*	*0*	-
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		37,342,700	37,342,700	39,209,000	41,169,400	39,209,000	-	13,211,100	11,411,200	30,661,100	-		-	*35.38*	*30.56*	*78.20*	-	-
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit		187,301,200	133,040,400	137,612,100			-	162,005,650	114,869,100	134,957,500	2,121,000		-	*86.49*	*86.34*	*98.07*	-	-
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**25,000,000**	**24,974,000**	**169,974,000**	**237,122,700**	**104,708,800**	**151,560,200**	**-**	**33,411,550**	**43,172,800**	**107,579,821**	**9,085,000**	-	**-**	***133.79***	***25.40***	***45.37***	***8.68***	**-**
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota			75,000,000	87,400,000			-		13,030,300		-		-	-	*17.37*	-	-	-
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota		24,974,000	24,974,000	26,222,700	27,533,800	26,222,700	-	33,411,550	10,908,600	43,275,521	7,920,000		-	*134*	*43.68*	*165*	*29*	-
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota			25,000,000	26,250,000	27,562,500	26,250,000	-		-		-		-	-	-	-	-	-
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			10,000,000	10,500,000	11,025,000	10,500,000	-		-	33,824,200	-		-	-	-	*322*	-	-
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				50,000,000		50,000,000	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	25,000,000		35,000,000	36,750,000	38,587,500	38,587,500	-		19,233,900	30,480,100	1,165,000		-	-	*54.95*	*82.94*	*3*	-

Dari tabel 2.5 diatas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Terjadinya efisiensi fluktuatif yang mana realisasi anggaran pada tahun 2021 cukup efisien (97.4%), namun pada tahun-tahun berikutnya (2022-2024), realisasi melebihi anggaran secara signifikan (hingga 135%). Ini menunjukkan karena pada saat penyusunan anggaran APBD di tahun 2022-2024 anggaran difokuskan pada kegiatan yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pemulihan pasca Covid -19.
2. Kegiatan tidak merata dalam efektivitas. Hal ini dikarenakan terdapat kegiatan yang sangat efisien (rasio > 120%), tetapi juga banyak kegiatan teknis dengan realisasi rendah (rasio <60%). Ini mencerminkan ketimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan
3. Perlunya evaluasi penyusunan anggaran. Ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi mengindikasi bahwa proses penyusunan anggaran belum akurat atau responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan, BPBD Kabupaten Purworejo menetapkan sejumlah indikator kinerja yang menjadi tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Indikator tersebut disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan minimal, serta kebijakan nasional dan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Indikator kinerja ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengukur tingkat keberhasilan program dan kegiatan, sekaligus memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh layanan penanggulangan bencana secara optimal. Melalui penetapan indikator yang terukur dan terstandar, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dapat berjalan secara efektif, akuntabel, serta mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.6
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					KET.
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Indikator Tujuan Perangkat Daerah Renstra BPBD Tahun 2025-2030							
	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0.40	0.77	0.69	0.79	0.84	Indeks Ketahanan Daerah Kewenangan BPBD menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai awal sebesar 0,40 pada tahun 2020 naik signifikan menjadi 0,77 di tahun 2021, meski sempat menurun ke 0,69 pada 2022. Selanjutnya indeks kembali meningkat menjadi 0,79 pada 2023 dan mencapai capaian tertinggi 0,84 pada 2024. Secara keseluruhan, kinerja BPBD menunjukkan arah perbaikan positif dengan peningkatan indeks yang konsisten.
	Nilai SAKIP	Nilai	74.10	N/A	76.30	73.05	74.20	Nilai SAKIP BPBD periode 2020–2024 relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Tahun 2020 tercatat 74,1, tahun 2021 N/A karena tidak ada reviu dari Inspektorat, tahun 2022 naik menjadi 76,3, lalu menurun pada 2023 sebesar 73,05, dan kembali meningkat pada 2024 menjadi 74,2. Hal ini menunjukkan capaian kinerja akuntabilitas BPBD tetap terjaga dalam kisaran nilai 73–76.
2	Indikator Sasaran Perangkat Daerah Renstra BPBD Tahun 2025-2030							
	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0.40	0.77	0.69	0.79	0.84	Indeks Ketahanan Daerah Kewenangan BPBD menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai awal sebesar 0,40 pada tahun 2020 naik signifikan menjadi 0,77 di tahun 2021, meski sempat menurun ke 0,69 pada 2022. Selanjutnya indeks kembali meningkat menjadi 0,79 pada 2023 dan mencapai capaian tertinggi 0,84 pada 2024. Secara keseluruhan, kinerja BPBD menunjukkan arah perbaikan positif dengan peningkatan indeks yang konsisten.
	Nilai SAKIP	Nilai	74.10	N/A	76.30	73.05	74.20	Nilai SAKIP BPBD periode 2020–2024 relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Tahun 2020 tercatat 74,1, tahun 2021 N/A karena tidak ada reviu dari Inspektorat, tahun 2022 naik menjadi 76,3, lalu menurun pada 2023 sebesar 73,05, dan kembali meningkat pada 2024 menjadi 74,2. Hal ini menunjukkan capaian kinerja

								akuntabilitas BPBD tetap terjaga dalam kisaran nilai 73–76.
3	Indikator Program Perangkat Daerah							
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024
	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%	100	100	100	100	100	Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024
4	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024
5	Indikator IKK berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020							
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024

Rangkaian indikator dalam Renstra BPBD Tahun 2021–2025 secara umum menunjukkan arah peningkatan kinerja dan komitmen dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Indikator Tujuan memperlihatkan adanya peningkatan Indeks Ketahanan Daerah serta Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menandakan perbaikan kapasitas kelembagaan sekaligus meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan BPBD. Indikator Sasaran ditetapkan dengan capaian 100% pada seluruh unsur penanggulangan bencana (pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana), menegaskan konsistensi pelaksanaan tugas pokok BPBD.

Selanjutnya, Indikator Program menunjukkan jaminan akses penuh bagi masyarakat atas layanan kebencanaan, mulai dari informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, hingga penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yang seluruhnya ditargetkan 100% setiap tahun. Sejalan dengan itu, Indikator SPM dan IKK Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 juga menetapkan capaian 100%, mencerminkan standar minimum pelayanan kebencanaan telah diposisikan sebagai prioritas utama yang wajib terpenuhi.

Dengan konsistensi target yang meningkat maupun terjaga pada tingkat 100%, keseluruhan indikator tersebut mencerminkan komitmen kuat BPBD dalam mewujudkan daerah yang tangguh bencana, pelayanan publik yang prima, serta akuntabilitas kinerja yang selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2026–2029, dilakukan telaahan terhadap berbagai dokumen perencanaan nasional, regional, dan daerah, antara lain Renstra BNPB, Renstra Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hasil analisis menunjukkan adanya tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan pelayanan penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo dalam lima tahun mendatang.

1. Tantangan Utama
    a. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang sudah tua dan frekuensi penggunaan yang sangat tinggi sehingga diperlukan peremajaan dan peningkatan kualitas untuk menunjang kesiapsiagaan.
    b. Budaya sadar bencana masyarakat yang masih rendah, mengakibatkan tingginya risiko korban dan kerugian saat bencana terjadi.
    c. Koordinasi lintas lembaga dan stakeholder masih terhambat oleh kepentingan sektoral masing-masing pihak.
    d. Dokumen kebencanaan (KRB, RPB, RPB Desa, dan lain-lain) belum sah atau sesuai standar, sehingga mengurangi efektivitas perencanaan dan pengambilan keputusan.
    e. Kapasitas petugas penanggulangan bencana masih terbatas karena belum memiliki keahlian khusus yang memadai, berpotensi menimbulkan risiko tambahan saat penanganan bencana.
    f. Kesulitan memperoleh data dasar jumlah penduduk desa rawan bencana serta jumlah aparat yang berada di desa rawan bencana, yang berdampak pada keterlambatan

pemetaan kerentanan, penentuan prioritas intervensi, dan penyusunan strategi mitigasi yang tepat sasaran..

g. Ancaman perubahan iklim global, degradasi lingkungan, dan alih fungsi lahan yang meningkatkan potensi banjir, longsor, serta kerentanan kawasan pesisir terhadap tsunami.

h. Saat terjadi bencana, penanganan tidak berjalan sesuai dengan SOP dalam dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon), karena tidak adanya sosialisasi maupun pemahaman terhadap dokumen Renkon, RPB, KRB, dan turunannya, sehingga petugas tidak memahami alur kerja, koordinasi menjadi lemah, dan sistem komando penanggulangan bencana tidak berjalan optimal.

2. Peluang Strategis

a. Dukungan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Adanya Renstra BNPB, Renstra Kemendagri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, serta Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana menjadi peluang bagi Kabupaten Purworejo untuk mendapatkan arahan, fasilitasi, dan dukungan pendanaan dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana daerah.

b. Integrasi dengan Dokumen Perencanaan Wilayah

Hasil telaahan RTRW Kabupaten Purworejo dan KLHS memberikan peluang untuk mengintegrasikan aspek kebencanaan ke dalam tata ruang dan pembangunan berkelanjutan, sehingga pencegahan dan mitigasi bencana dapat berjalan beriringan dengan pengendalian pemanfaatan ruang.

c. Pemanfaatan Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi digital, aplikasi berbasis data spasial, serta sistem informasi kebencanaan nasional memberikan peluang untuk memperkuat pelayanan informasi rawan bencana, mempercepat penyampaian peringatan dini, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

d. Penguatan Kolaborasi Multi Pihak

Tersedianya potensi kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, serta organisasi masyarakat sipil menjadi peluang dalam memperkuat budaya sadar bencana, memperluas jaringan relawan, serta meningkatkan efektivitas penanganan darurat bencana.

e. Dukungan Anggaran dan Sumber Daya dari Pusat dan Provinsi

Tersedianya alokasi Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi peluang untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Purworejo.

f. Partisipasi Masyarakat dan Relawan

Tingginya antusiasme masyarakat, kelompok relawan, dan komunitas lokal dalam upaya tanggap darurat serta inisiatif desa tangguh bencana menjadi modal sosial yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi.

g. Peluang Inovasi Layanan Publik

Terdapat ruang untuk pengembangan inovasi layanan publik bidang kebencanaan, seperti layanan edukasi kebencanaan

berbasis sekolah, aplikasi layanan darurat berbasis digital, dan pembentukan pusat data kebencanaan kabupaten.

3. Macam Pelayanan yang Dibutuhkan
   a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten: penyediaan data dan informasi kebencanaan yang akurat, mutakhir, serta mudah diakses oleh publik dan pemangku kepentingan.
   b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana: peningkatan kapasitas masyarakat, pendidikan kebencanaan, simulasi bencana, serta pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
   c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana: peningkatan sarana prasarana tanggap darurat, kemampuan teknis petugas, serta koordinasi lintas sektor dalam operasi penyelamatan.
   d. Pelayanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana: legalisasi dan penataan dokumen kebencanaan (KRB, RPB, RPB Desa), penguatan kelembagaan, serta pengembangan sistem informasi terpadu berbasis teknologi.
4. Perkiraan Kebutuhan Pelayanan
   a. Peningkatan jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) dari yang telah terbentuk saat ini menuju target minimal 50% desa/kelurahan di Purworejo pada tahun 2029.
   b. Pengadaan dan peremajaan sarana prasarana darurat (kendaraan operasional, alat komunikasi, logistik) dengan perkiraan kebutuhan minimal 30–40% peremajaan aset per periode renstra.
   c. Peningkatan kapasitas petugas dan relawan dengan target minimal 80% personel bersertifikat penanggulangan bencana dasar hingga lanjutan.
   d. Penguatan sistem data dan informasi kebencanaan terpadu, termasuk pemetaan risiko berbasis GIS yang dapat diakses oleh publik dan lembaga terkait.
   e. Peningkatan jumlah simulasi kebencanaan di sekolah, desa, dan tempat publik dengan target rata-rata 2 kali per tahun per wilayah kecamatan.
5. Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
   a. Wilayah selatan (pesisir pantai selatan): fokus pada mitigasi tsunami, abrasi, dan banjir rob.
   b. Wilayah tengah (perkotaan dan bantaran sungai): penguatan sistem peringatan dini banjir dan kesiapsiagaan kedaruratan.
   c. Wilayah utara (perbukitan Menoreh): mitigasi longsor dan gempa bumi, penguatan Destana, serta edukasi masyarakat.
   d. Wilayah rawan strategis lainnya: lokasi dengan kepadatan penduduk tinggi dan infrastruktur vital (jalan nasional, bendungan, jaringan listrik, dan telekomunikasi).

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

BPBD Kabupaten Purworejo memiliki tugas pokok untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Beberapa kelompok sasaran layanan BPBD Kabupaten Purworejo meliputi :

1. Masyarakat Umum

Masyarakat menerima informasi tentang bahaya bencana, mengikuti simulai dan mendapatkan bantuan saat terjadi bencana.

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam penanggulangan bencana di tingkat desa

3. Organisasi Perangkat Daerah

Melakukan sinkronisasi program terkait penanggulangan bencana

4. Sektor Swasta

Melibatkan pihak swasta dalam upaya penanggulangan bencana

5. Lain-lain

BPBD juga dapat melayani kelompok masyarakat lain yang berpotensi terdampak bencana seperti sekolah, rumah sakit dan tempat – tempat umum lainnya

Dengan demikian, BPBD Purworejo memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, terutama dalam menghadapi ancaman bencana

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD didukung oleh pentahelix (lima pihak/ lima pilar). Pentahelix disini adalah konsep kolaborasi yang melibatkan lima elemen utama yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media. Pentahelix yang menjadi mitra BPBD Kabupaten Purworejo antara lain :

1. Pemerintah bertanggung jawab dalam membuat kebijakan, peraturan dan regulasi terkait penanggulangan bencana serta menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Perangkat Daerah yang menjadi mitra BPBD yaitu Dinkes, Dindukcapil, Dishub, Satpol PP Damkar, Dinsosdaldukkb, Dinperkimtan, DPUPR, Dinkominfostasandi, 16 Kecamatan di Purworejo, Polisi dan TNI
2. Masyarakat merupakan bagian penting dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana, serta dapat memberikan kontribusi dalam mitigasi dan pemulihan pasca bencana. Berbagai bentuk organisasi masyarakat yang menjadi relawan penanggulangan bencana seperti PMI, SAR, BASARNAS, Tagana, Sabgana, FPRB kecamatan, Destana, RAPI, Senkom, Ubaloka, MDMC, Muda Ganesha, Pordista, Orari, SAR Lintas Batas, RJP dll
3. Dunia Usaha berkontribusi dalam menyediakan sumber daya, teknologi, dan informasi terkait penanggulangan bencana. Dunia usaha yang menjadi mitra BPBD Kabupaten Purworejo yaitu PDAM, PLN, TELKOM, Bank Jateng, DRW Skincare, BPJS Kesehatan dll
4. Media memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi, sosialisasi dan membangun kesadaran publik tentang bahaya bencana. Media yang menjadi mitra BPBD Kabupaten Purworejo yaitu Purworejo Express, Irama FM, Kompas,
5. Akademisi memiliki peran dalam penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan penyebaran informasi terkait bencana. Akademisi di purworejo yaitu UMP, SD, SMP dan SMA di Kabupaten Purworejo yang dibentuk menjadi SMAB

Adapun Manfaat dari pentahelix dalam penanganan bencana antara lain:

1. Menambah efektivitas penanggulangan bencana dengan melibatkan berbagai pihak, sistem penanggulangan bencana menjadi lebih komprehensif dan efektif.
2. Meningkatkan keberlanjutan. Kolaborasi pentahelix memungkinkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang berkelanjutan dalam jangka Panjang
3. Meningkatkan ketangguhan masyarakat. Melalui sosialisasi dan partisipasi masyarakat, diharapkan kesiapsiagaan bencana masyarakat meningkat
4. Meningkatkan daya saing, Dalam Konteks ekonomi, dunia usaha dapat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana yang dapat meningkatkan daya saing di sektor terkait.
5. Mempercepat pemulihan. Dengan kolaborasi antar pihak, proses pemulihan pasca bencana dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Bab II Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029, Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025–2029, serta hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan dominan yang berkaitan dengan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo. Permasalahan tersebut menggambarkan kesenjangan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia, sehingga memerlukan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah lima tahun mendatang. Permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang tersedia saat ini sebagian besar sudah berusia tua dan terbatas, sehingga sering mengalami gangguan dalam operasional. Kondisi ini berimplikasi terhadap terhambatnya efektivitas, kecepatan, dan keselamatan dalam operasi penyelamatan. Idealnya, BPBD memiliki sarana prasarana modern, terpelihara, serta sesuai dengan standar nasional.
2. budaya sadar bencana pada masyarakat Kabupaten Purworejo masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan bencana, belum memiliki pemahaman yang memadai tentang mitigasi risiko maupun kesiapsiagaan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan dengan kondisi ideal, yaitu terwujudnya masyarakat tangguh bencana yang memiliki kesadaran, keterampilan, serta partisipasi aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana.
3. koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana belum optimal. Realitanya, masih terdapat ego sektoral antar lembaga, yang mengakibatkan lemahnya sistem komando saat terjadi bencana. Selain itu, kurangnya sosialisasi dokumen kebencanaan seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Kajian Risiko Bencana (KRB), dan Rencana Kontinjensi (Renkon) mengakibatkan petugas tidak memahami pedoman yang ada, sehingga tidak terkoordinir dengan baik. Idealnya, mekanisme koordinasi berjalan secara terpadu dengan sistem komando yang jelas, didukung oleh pemahaman seluruh pihak terkait.
4. dokumen kebencanaan belum seluruhnya sah, legal, dan sesuai standar yang ditetapkan. Beberapa dokumen seperti

KRB, RPB, dan Renkon belum disusun secara lengkap ataupun dilegalisasi sebagai dokumen resmi, sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia, yakni tersedianya dokumen legal, sesuai standar nasional, dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

5. kapasitas dan kompetensi petugas penanggulangan bencana masih terbatas. Sebagian besar petugas lapangan belum memiliki pelatihan maupun sertifikasi khusus terkait penanganan berbagai jenis bencana. Hal ini menimbulkan risiko terjadinya penanganan yang tidak sesuai prosedur dan berpotensi menimbulkan korban tambahan. Idealnya, BPBD memiliki petugas yang terlatih, profesional, dan siap bertugas sesuai standar teknis.
6. ketersediaan data dasar kebencanaan belum optimal. Data jumlah penduduk desa rawan bencana, jumlah aparat di wilayah rawan bencana, peta kerentanan, dan data sektoral lainnya sulit diperoleh secara valid dan terintegrasi. Kondisi ini menyulitkan penyusunan kebijakan maupun rencana aksi berbasis data. Idealnya, tersedia basis data kebencanaan yang valid, mutakhir, dan terintegrasi antar-lembaga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Purworejo masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana, baik dari sisi sarana prasarana, kapasitas sumber daya manusia, tata kelola dokumen kebencanaan, sistem koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, maupun ketersediaan data dasar kebencanaan. Permasalahan ini bersifat mendasar dan perlu mendapat perhatian serius dalam perumusan arah kebijakan, strategi, serta program prioritas pada periode 2026–2029.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan faktor-faktor utama yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029, isu strategis dipandang sebagai persoalan penting dan mendesak yang harus segera diantisipasi serta ditangani secara sistematis, mengingat dampaknya yang luas terhadap keberlangsungan pembangunan daerah dan perlindungan masyarakat.

Identifikasi isu strategis dilakukan melalui pendekatan integratif yang mencakup hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, permasalahan aktual yang dihadapi perangkat daerah, serta kesenjangan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal yang diharapkan. Selain itu, isu strategis juga dirumuskan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, baik pada tingkat global, nasional, maupun regional, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, Renstra BNPB, Renstra Kemendagri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah, serta hasil telaahan terhadap dokumen RTRW dan Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029.

Dengan demikian, isu strategis yang telah dirumuskan tidak hanya mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi Kabupaten Purworejo dalam bidang penanggulangan bencana, tetapi juga mengakomodasi potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung

pencapaian visi pembangunan daerah. Isu-isu strategis ini akan menjadi landasan dalam perumusan tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan BPBD Kabupaten Purworejo pada periode lima tahun mendatang.

Tabel 2.7
Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Kapasitas Masyarakat Menghadapi Bencana	Percepatan perubahan iklim meningkatkan risiko bencana dan degradasi lingkungan	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Perubahan kritikal terhadap ekosistem	Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas masyarakat tangguh bencana melalui kesadaran, keterampilan, dan partisipasi aktif
			Krisis sumber daya alam			Modernisasi sarana prasarana penanggulangan bencana yang modern, standar, dan terpelihara baik
			Biodiversity loss dan gangguan ekosistem			Penguatan koordinasi lintas sektor dan sistem komando terpadu dalam penanggulangan bencana
			Polusi			Penyusunan, legalisasi, dan sosialisasi dokumen kebencanaan sesuai standar nasional
			Penerapan standar sustainability yang tinggi di level global			Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas penanggulangan bencana secara profesional
			Cuaca ekstrem			Penguatan basis data kebencanaan yang valid, mutakhir, dan terintegrasi
						Adaptasi terhadap perubahan iklim melalui ketahanan sosial, budaya, ekologi, serta keberlanjutan SDA dan lingkungan
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif

Berdasarkan hasil analisis potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, serta kecenderungan kebutuhan pelayanan ke depan, dapat dirumuskan sejumlah isu strategis perangkat daerah yang menjadi fokus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo pada periode 2025–2029, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Tangguh Bencana

   Rendahnya budaya sadar bencana pada masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana, menjadi tantangan besar. Sebagian masyarakat belum memahami langkah mitigasi dan kesiapsiagaan, sehingga rentan terhadap dampak bencana. Isu strategis ini menekankan pentingnya membangun kesadaran, keterampilan, dan partisipasi aktif masyarakat agar terbentuk masyarakat tangguh bencana yang mandiri dan adaptif terhadap risiko.

2. Modernisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

   Sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagian besar masih berusia tua, sering mengalami gangguan, dan tidak sesuai standar nasional. Hal ini menghambat efektivitas, kecepatan, dan keselamatan dalam operasi penyelamatan. Isu strategis ini menuntut modernisasi, pemeliharaan, serta pemenuhan sarana prasarana kebencanaan yang sesuai standar nasional agar lebih andal dan responsif.

3. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Sistem Komando Terpadu

   Penanggulangan bencana memerlukan keterlibatan berbagai sektor, namun masih ditemui ego sektoral dan lemahnya sistem komando saat bencana terjadi. Selain itu, sosialisasi dokumen kebencanaan belum optimal, sehingga pelaksanaan di lapangan sering tidak terkoordinasi. Isu strategis ini mendorong terciptanya sinergi lintas sektor dengan mekanisme komando yang jelas, terpadu, serta dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

4. Penyusunan, Legalisasi, dan Sosialisasi Dokumen Kebencanaan

   Beberapa dokumen penting seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Kajian Risiko Bencana (KRB), dan Rencana Kontinjensi (Renkon) belum lengkap, sah, dan sesuai standar. Akibatnya, dokumen tersebut belum dapat dijadikan acuan resmi. Isu strategis ini menekankan percepatan penyusunan, legalisasi, serta sosialisasi dokumen kebencanaan sesuai standar nasional agar menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan dan operasional kebencanaan.

5. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Petugas Penanggulangan Bencana

   Kapasitas SDM penanggulangan bencana masih terbatas, ditandai dengan kurangnya pelatihan maupun sertifikasi teknis bagi petugas. Kondisi ini berisiko menghambat efektivitas penanganan, bahkan menimbulkan korban tambahan. Isu strategis ini menekankan peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi sesuai standar, serta pembinaan teknis agar profesional, cepat, dan tepat dalam bertugas.

6. Penguatan Basis Data Kebencanaan yang Valid, Mutakhir, dan Terintegrasi

   Data dasar kebencanaan, seperti peta kerentanan, jumlah penduduk di daerah rawan, hingga kapasitas aparat, belum

tersedia secara lengkap, valid, dan terintegrasi antar-lembaga. Hal ini menyulitkan penyusunan kebijakan berbasis data. Isu strategis ini menekankan pentingnya pembangunan sistem informasi kebencanaan yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses lintas sektor sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

7. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim melalui Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

   Perubahan iklim global yang ditandai dengan cuaca ekstrem, degradasi ekosistem, dan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi memberi dampak langsung bagi Kabupaten Purworejo. Isu strategis ini menekankan penguatan upaya adaptasi iklim dengan meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, serta menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar masyarakat lebih siap menghadapi dinamika risiko bencana.

8. Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas, Adaptif, Akuntabel, dan Kolaboratif

   Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo. Tantangan berupa ego sektoral, lemahnya sistem komando, minimnya sosialisasi dokumen kebencanaan, serta kurangnya transparansi kinerja perlu diatasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor, penerapan mekanisme komando terpadu, transparansi dan akuntabilitas pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi non-pemerintah. Dengan tata kelola yang responsif, profesional, dan partisipatif, diharapkan tercipta pemerintahan yang mampu menjawab dinamika risiko bencana sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

BPBD memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 139 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD, maka Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana, memiliki fungsi menyusun kebijakan, melaksankaan tugas dukungan, memantau, mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penanggulangan bencana, membina teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanggulangan Bencana, melaksanakan kesekretairatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPBD, melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Kehadiran dan peran BPBD Kabupaten Purworejo sangat erat kaitannya dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tangguh, serta berdaya saing. Melalui fungsi koordinasi lintas sektor, pelayanan penanganan darurat bencana, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, serta penataan sistem komando penanggulangan bencana, BPBD mendukung secara langsung terwujudnya misi pembangunan daerah yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan sosial, serta perlindungan lingkungan hidup.

Dengan demikian, BPBD Kabupaten Purworejo bukan hanya sebagai lembaga teknis yang menangani bencana, tetapi juga sebagai perangkat daerah strategis yang berkontribusi pada pencapaian visi daerah, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat Purworejo yang berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Purworejo serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang akan dicapai oleh Kabupaten Purworejo yang mana berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo, sejalan dengan hal tersebut, BPBD Kabupaten Purworejo sebagai salah satu elemen dari sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang penanggulangan bencana, BPBD harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purworejo sesuai dengan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Purworejo.

Dalam hal ini tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Purworejo yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan untuk periode Renstra (2025-2029) merupakan turunan langsung dari visi dan misi Bupati Purworejo, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo. Penetapan tujuan dan sasaran ini menjadi arah strategis utama yang akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan yang tersaji dalam Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NSPK : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota 3. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 139 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Puworejo Sasaran RPJMD : S3, Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Ketahanan Daerah Kewenangan BPBD	0.841	0.842	0.843	0.844	0.845	0.846	
			Nilai Sakip Perangkat daeah	68.02	70.45	72.89	75.33	77.76	80.20	
		Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks Ketahanan Daerah Kewenangan BPBD	0.841	0.842	0.843	0.844	0.845	0.846	
Sasaran RPJMD : S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat daeah	68.02	70.45	72.89	75.33	77.76	80.20	

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

3.3.1 Strategi Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan atau sasaran Renstra PD. Berikut strategi BPBD Kabupaten Purworejo untuk mendukung mewujudkan visi misi Bupati dalam kurun waktu lima tahun ke depan:

Tabel 3.2
Strategi Rensta BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya ketahanan daerah Kewenangan BPBD	Meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana (penanganan pra bencana. penanganan tanggap darurat bencana. penanganan pasca bencana)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, terukur, dan akuntabel, BPBD Kabupaten Purworejo menetapkan tujuan strategis yaitu meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran utama:

1. meningkatnya ketahanan daerah, yang diwujudkan melalui strategi peningkatan kualitas layanan penanggulangan bencana. Layanan ini mencakup penanganan pada tiga tahapan penting, yakni pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Dengan strategi ini, diharapkan kapasitas daerah dalam menghadapi, merespons, dan memulihkan diri dari dampak bencana dapat semakin optimal.
2. meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang diwujudkan melalui strategi penguatan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Strategi ini mencakup perbaikan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan BPBD dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Dengan penerapan tujuan, sasaran, dan strategi tersebut, BPBD Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus memastikan layanan penanggulangan bencana dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.3.2 Penahapan Pembangunan

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah merumuskan penahapan Rencana Strategis (Renstra) yang terstruktur dan berfokus pada penguatan serta peningkatan layanan penanganan bencana. Penahapan ini direncanakan berlangsung dari tahun 2026

hingga 2030, dengan lima tahapan yang masing-masing memiliki tujuan spesifik.

Penahapan Renstra BPBD Kabupaten Purworejo ini mengacu pada strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan Kabupaten Purworejo dapat meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tabel 3.2.
Pentahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Sub Urusan Kebencanaan	Sub Urusan Kebencanaan	Sub Urusan Kebencanaan	Sub Urusan Kebencanaan	Sub Urusan Kebencanaan
Menguatkan kualitas layanan penanggulangan bencana (penanganan pra bencana, penanganan tanggap darurat bencana, penanganan pasca bencana)	Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan bencana (penanganan pra bencana, penanganan tanggap darurat bencana, penanganan pasca bencana)	Memantapkan kualitas layanan penanggulangan bencana (penanganan pra bencana, penanganan tanggap darurat bencana, penanganan pasca bencana)	Mewujudkan kualitas layanan penanggulangan bencana (penanganan pra bencana, penanganan tanggap darurat bencana, penanganan pasca bencana)	Meneguhkan kualitas layanan penanggulangan bencana (penanganan pra bencana, penanganan tanggap darurat bencana, penanganan pasca bencana)tahap
Urusan Penunjang	Urusan Penunjang	Urusan Penunjang	Urusan Penunjang	Urusan Penunjang
Menguatkan sistem menejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo dirumuskan sebagai panduan utama dalam upaya peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan ini mencakup periode tahun 2026 hingga 2030, dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi bencana, penguatan peran Tagana, pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

3.3.3 Lokus Rencana Strategis BPBD Kabupaten Purworejo

Lokus atau ruang lingkup Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 mencakup wilayah kerja dan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama periode perencanaan. Penentuan lokus ini penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

1. Lokus Geografis

   Lokus geografis adalah wilayah tempat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan tugasnya. Lokus ini meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Purworejo, yang mencakup 16 Kecamatan, 469 Desa dan 25 Kelurahan. Lokus ini menjadi area pelayanan penanggulangan bencana.

2. Lokus Tugas dan Fungsi

   Lokus ini berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab institusional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo yaitu melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3.3.4 Arah Kebijakan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Purworejo

Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo dirumuskan sebagai panduan utama dalam upaya peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan ini mencakup periode tahun 2026 hingga 2030, dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi bencana, penguatan peran Tagana, pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Arah kebijakan ini menjadi landasan bagi BPBD Kabupaten Purworejo dalam merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan, demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Purworejo yang tangguh bencana.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	S3, Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Arah Kebijakan 2026 Penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan	Arah Kebijakan 2026 yang dilaksanakan melalui aktivitas Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana), Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Penguatan Kapasitas Kawasan/ desa untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten, Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten, Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten, penyusunan dokumen rencana penanggulangan kedaruratan Bencana Kabupaten, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten untuk masyarakat dan kelompok rentan, Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit, Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana	
		Arah Kebijakan 2027 Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan	Arah Kebijakan 2027 yang dilaksanakan melalui aktivitas Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana), Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Penguatan Kapasitas Kawasan/ desa untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten, Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten, Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten, penyusunan dokumen rencana penanggulangan kedaruratan Bencana Kabupaten, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten untuk masyarakat dan kelompok rentan, Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit, Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana	
		Arah Kebijakan 2028 Pemantapan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan	Arah Kebijakan 2028 yang dilaksanakan melalui aktivitas Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana), Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Penguatan Kapasitas Kawasan/ desa untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten, Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten, Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten untuk masyarakat dan kelompok rentan, Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit, Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana,	
		Arah Kebijakan 2029 Perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan	Arah Kebijakan 2029 yang dilaksanakan melalui aktivitas Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana), Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Penguatan Kapasitas Kawasan/ desa untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten, Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten, Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten untuk masyarakat dan kelompok rentan, Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit, Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana,	
		Arah Kebijakan 2030 Peneguhan kapasitas adaptasi dan mitigasi	Arah Kebijakan 2030 yang dilaksanakan melalui aktivitas Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten	

		terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan	(Per Jenis Bencana), Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Penguatan Kapasitas Kawasan/ desa untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten, Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten, Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten untuk masyarakat dan kelompok rentan, Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit, Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana,	
	S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan 2026: Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	Arah Kebijakan 2026: Dilaksanakan melalui aktivitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Arah Kebijakan 2027: Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	Arah Kebijakan 2027: Dilaksanakan melalui aktivitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,	

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Arah Kebijakan 2028: Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	Arah Kebijakan 2028: Dilaksanakan melalui aktivitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Arah Kebijakan 2029: Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	Arah Kebijakan 2029: Dilaksanakan melalui aktivitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Arah Kebijakan 2030: Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	Arah Kebijakan 2030: Dilaksanakan melalui aktivitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Penyediaan Komponen Instalasi	

			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Setiap program diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, sekaligus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan kelompok rentan dan potensial.

Penyusunan program dan kegiatan ini dilaksanakan dengan mengacu pada standar klasifikasi sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya, sehingga menjamin adanya keterpaduan antara perencanaan daerah, provinsi, maupun nasional. Selain itu, setiap program dan kegiatan dirinci ke dalam sub kegiatan yang lebih spesifik, agar pelaksanaannya dapat lebih fokus, terukur, serta mudah dievaluasi. Dengan demikian, keseluruhan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Purworejo tidak hanya sekedar memenuhi mandat administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo.

Sebagai penjabaran dari arah kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi instrumen utama pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Trantibumlinmas (Kebencanaan). Penyusunan program dan kegiatan ini memperhatikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberdayaan kelompok rentan.

Agar pelaksanaan Renstra dapat lebih terarah, efektif, dan terukur, maka program dan kegiatan dijabarkan ke dalam sub kegiatan yang lebih spesifik. Dengan demikian, setiap unit pelaksana di lingkungan perangkat daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo telah merumuskan sebuah tujuan strategis, yaitu meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan tersebut dipilih karena sejalan dengan visi dan misi Bupati Purworejo yang menekankan pada terwujudnya masyarakat Purworejo yang berdaya saing, sejahtera, religius dan inovatif (Purworejo berseri).

Dari tujuan yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo memiliki dua sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam dua program, dua belas kegiatan, dan lima puluh lima sub kegiatan.

Adapun rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
S3, Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana					Indeks Ketahanan Daerah		
	Meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian,		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	

			serta keuangan perangkat daerah				
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlayaninya Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

				Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Baran Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Daerah			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	
						Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Indeks Ketahanan Daerah		
		Meningkatnya Ketahanan Daerah Kewenangan BPBD			Indeks Ketahanan Daerah		

			Meningkatnya layanan pencengahan dan kesiapsiagaan		Persentase layanan penanganan pra bencana	Program Penanggulangan Bencana	

			terhadap bencana				
				Terlayaninya Informasi Rawan Bencana Kabupaten	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	
						Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	
						Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	
				Terlayaninya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	

						Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
						Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
						Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat tanggap darurat		Persentase layanan penanganan saat terjadi bencana	Program Penanggulangan Bencana	

				Terlayananinya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
						Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
						Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
						Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
						Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	
						Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
			Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat pasca bencana		Persentase layanan penanganan pasca bencana	Program Penanggulangan Bencana	
				Tertatanya Sistem Dasar Penanggulangan	Persentase Kerjasama Antar Pilar Penanggulangan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

				Bencana	Bencana		
						Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
						Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
						Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
						Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
						Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	

BPBD memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029. BPBD berkontribusi pada sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Dalam rangka mewujudkan kontribusi tersebut, BPBD menetapkan satu tujuan utama, yaitu Meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan (2) Meningkatnya Ketahanan Daerah Kewenangan BPBD. Setiap sasaran ini didukung oleh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun secara terarah dan terukur, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Trantibumlinmas (Kebencanaan).

Dalam Renstra Tahun 2025–2029, BPBD menyelenggarakan bidang urusan yaitu Bidang Trantibumlinmas (Kebencanaan). Bidang tersebut dijabarkan ke dalam 2 program, yang terdiri atas program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program penanggulangan bencana. Keseluruhan program tersebut dilaksanakan melalui 12 kegiatan, yang selanjutnya dirinci menjadi 55 sub kegiatan. Di antara sub kegiatan tersebut terdapat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Trantibumlinmas Sub Kebencanaan serta dukungan terhadap Program Delegasi Provinsi, Program Strategis Nasional dan Kegiatan Unggulan Daerah.

Untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan strategis dan implementasi tahunan, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD perlu disertai dengan rencana kebutuhan pendanaan. Penyusunan rencana pendanaan ini dimaksudkan agar pelaksanaan Renstra dapat dilakukan secara realistis sesuai kemampuan keuangan daerah, sekaligus memberikan gambaran kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Selain itu, program hingga tahun 2030 juga dirumuskan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan BPBD, sehingga dapat menjadi pijakan yang kokoh dalam penyusunan Rencana Kerja BPBD tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya.

Rencana pendanaan yang dimaksud mencakup proyeksi kebutuhan anggaran untuk lima tahun periode Renstra, baik untuk program dan kegiatan prioritas maupun kegiatan pendukung lainnya. Dengan demikian, penyusunan rencana pendanaan tidak hanya menjadi instrumen perencanaan fiskal, tetapi juga berfungsi sebagai alat kendali dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang trantibumlinmas (kebencanaan).

Adapun rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2
Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purworejo 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,841	0,842		0,843		0,844		0,845		0,846		0,846			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						5.459.624.144		4.843.890.900		4.012.737.000		4.012.737.000		4.012.737.000				
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	5.459.624.144	100	4.843.890.900	100	4.012.737.000	100	4.012.737.000	100	4.012.737.000	100	SEKRETARIAT	Kabupaten Purworejo	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	31.904.600	3	35.095.000	3	38.604.500	3	42.465.100	3	46.711.600	15			
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	19	23	15.018.600	22	16.520.400	22	18.172.500	22	19.989.800	22	21.988.800	111			
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	22	24	4.886.000	24	5.374.600	24	5.912.000	24	6.503.300	24	7.153.600	120			
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	1	12.000.000	1	13.200.000	1	14.520.000	1	15.972.000	1	17.569.200	5			
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	26	100	4.838.591.944	100	4.044.168.500	100	3.120.337.600	100	2.578.492.200	100	2.300.782.700	100			
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	25	51	4.827.826.044	51	4.032.326.000	51	3.107.310.800	51	2.564.162.700	51	2.285.020.300	255			
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	32	44	10.765.900	44	11.842.500	44	13.026.800	44	14.329.500	44	15.762.400	220			
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	4.000.000	100	4.400.000	100	4.840.000	100	5.324.000	100	5.856.400	100			
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	11	4.000.000	11	4.400.000	11	4.840.000	11	5.324.000	11	5.856.400	55			
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	4.250.000	100	4.675.000	100	5.142.500	100	5.656.800	100	6.222.500	100			
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	17	4.250.000	17	4.675.000	17	5.142.500	17	5.656.800	17	6.222.500	85			
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	152.993.600	100	168.293.200	100	185.122.600	100	203.634.900	100	223.998.400	100			
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	3.054.800	4	3.360.300	4	3.696.400	4	4.066.000	4	4.472.600	20			
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	3.887.200	4	4.276.000	4	4.703.600	4	5.173.900	4	5.691.300	20			
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	60.060.000	4	66.066.000	4	72.672.600	4	79.939.900	4	87.933.900	20			
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	9.088.000	4	9.996.800	4	10.996.500	4	12.096.200	4	13.305.800	20			
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	4	5.899.800	4	6.489.800	4	7.138.800	4	7.852.700	4	8.638.000	20			
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	11	11	2.640.000	11	2.904.000	11	3.194.400	11	3.513.900	11	3.865.300	55			
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	64.331.500	12	70.764.700	12	77.841.200	12	85.625.300	12	94.187.800	60			
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	4.032.300	2	4.435.600	2	4.879.100	2	5.367.000	2	5.903.700	10			
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	0	0		11	107.216.000	26	140.950.000	58	607.650.000	58	802.700.000	153			
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	580.000.000	1			
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	1	470.000.000	0	0	1			
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	4	20.316.000	20	60.000.000	51	45.900.000	51	127.500.000	126			
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	4	40.000.000	4	42.000.000	4	60.000.000	4	68.000.000	16			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	0	0	1	46.900.000	1	38.950.000	1	31.750.000	1	27.200.000	4			
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	24	126.530.000	24	148.553.800	24	153.101.400	24	168.411.500	24	185.252.700	120			
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	104.138.000	12	114.551.800	12	126.007.000	12	138.607.700	12	152.468.500	60			
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	22.392.000	12	34.002.000	12	27.094.400	12	29.803.800	12	32.784.200	60			
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	69	69	301.354.000	69	331.489.400	69	364.638.400	69	401.102.500	69	441.212.700	345			
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	34.880.000	1	38.368.000	1	42.204.800	1	46.425.300	1	51.067.900	5			
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	26	182.700.000	26	200.970.000	26	221.067.000	26	243.173.700	26	267.491.100	130			
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	23.810.000	20	26.191.000	20	28.810.100	20	31.691.200	20	34.860.300	100			
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	43.250.000	1	47.575.000	1	52.332.500	1	57.565.800	1	63.322.400	5			
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	21	21	16.714.000	21	18.385.400	21	20.224.000	21	22.246.500	21	24.471.000	105			
2	Meningkatnya Ketahanan Daerah		Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,841	0,842		0,843		0,844		0,845		0,846		0,846			
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						1.769.627.914		4.607.609.100		1.769.628.000		3.000.000.000		3.047.400.000				
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase layanan penanganan pasca bencana	%	100	100	1.769.627.914	100	4.607.609.100	100	1.769.628.000	100	3.000.000.000	100	3.047.400.000	100	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase layanan penanganan saat terjadi bencana	%	100	100		100		100		100		100		100	KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase layanan penanganan pra bencana	%	100	100		100		100		100		100		100	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Kabupaten Purworejo	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlayaninya Informasi Rawan Bencana Kabupaten	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	%	100	100	384.000.000	100	102.500.000	100	105.250.000	100	33.275.000	100	36.602.500	100			
1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	1	359.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Orang	420	300	25.000.000	300	102.500.000	300	105.250.000	300	33.275.000	300	36.602.500	1.500			
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlayaninya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	937.827.914	100	3.663.529.100	100	894.640.000	100	2.144.013.200	100	2.129.814.520	100			
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	101	10	199.827.914	32	234.929.100	32	72.110.000	120	1.239.230.200	140	1.134.553.220	334			
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	300	500	110.000.000	500	121.000.000	500	125.000.000	500	137.500.000	500	151.250.000	2.500			
1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0	25	17.600.000	25	19.360.000	25	21.296.000	25	23.425.600	100			
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	10	10	111.000.000	10	0	10	0	10	0	10	0	50			
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk	Orang	35	55	16.000.000	54	0	54	0	54	0	54	0	271			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
		untuk penanganan awal darurat bencana	penanganan awal darurat bencana															
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	2	190.000.000	2	200.000.000	2	210.000.000	1	231.000.000	1	254.100.000	8			
1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	0	0	1	120.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan	2	2	250.000.000	2	2.650.000.000	2	250.000.000	2	275.000.000	2	302.500.000	10			
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	0	0	1	120.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	20	20	61.000.000	20	200.000.000	20	218.170.000	20	239.987.000	20	263.985.700	100			
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlayananinya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	407.000.000	100	447.700.000	100	492.470.000	100	541.717.000	100	595.888.700	100			
1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	1	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	1	46.585.000	1	51.243.500	5			
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	1	300.000.000	1	250.000.000	1	283.000.000	1	319.300.000	1	359.230.000	5			
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	19	15	16.000.000	15	17.600.000	15	19.360.000	15	21.296.000	15	23.425.600	75			
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	19	15	30.000.000	15	113.000.000	15	116.300.000	15	119.930.000	15	123.923.000	75			
1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Laporan	1	1	26.000.000	1	28.600.000	1	31.460.000	1	34.606.000	1	38.066.600	5			
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tertatanya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	100	100	40.800.000	100	393.880.000	100	277.268.000	100	280.994.800	100	285.094.280	100			
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	0	0	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	4			
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1	1	12.800.000	1	14.080.000	1	15.488.000	1	17.036.800	1	18.740.480	5			
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	0	0	0	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	4			
1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1	18.000.000	1	19.800.000	1	21.780.000	1	23.958.000	1	26.353.800	5			
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	1	10.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5			
1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	0	0	1	120.000.000	0	0	0	0	0	0	1			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
Jumlah							7.229.252.058		9.451.500.000		5.782.365.000		7.012.737.000		7.060.137.000				

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo disusun dengan memperhatikan kondisi riil perencanaan, kebutuhan pelayanan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah. Penyusunan rencana pendanaan dilakukan secara proporsional agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terukur, efektif, serta tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Meskipun demikian, terdapat harapan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik melalui dukungan berbagai faktor pendukung, termasuk ketersediaan sumber daya, sinergi antar pemangku kepentingan, serta alokasi anggaran yang memadai. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan kualitas keluaran program dapat tercapai secara optimal, sehingga tujuan pembangunan di bidang trantibumlinmas (kebencanaan) dapat terwujud sesuai target yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun dalam Renstra tidak hanya berorientasi pada pencapaian target internal perangkat daerah, tetapi juga selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan BPBD dirancang secara terpadu, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan yang lebih luas.

Keselarasan tersebut tercermin melalui adanya dukungan langsung terhadap program prioritas pembangunan daerah, yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas atau sub kegiatan strategis. Sub kegiatan ini dirancang untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program prioritas daerah, sehingga capaian pembangunan dapat lebih optimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.

Adapun rincian sub kegiatan prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah			
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	

				Lapangan	
			Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	
			Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	**Program Penanggulangan Bencana**	Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat pra bencana			
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota		
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
			Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	

			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	
			Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyusunan Rencana Kontijensi	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	
		Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat saat bencana			
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
		Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat pasca bencana			
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	
			Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
			Koordinasi penanganan Pascabencana	Koordinasi penanganan Pascabencana	

			Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
			Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	

4.1

Selain memberikan dukungan terhadap program prioritas pembangunan daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupate Purworejo juga melaksanakan kewajiban penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai amanat regulasi. Hal ini diwujudkan melalui penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam pelaksanaannya, BPBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, sub kegiatan yang dirumuskan tidak hanya diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat, khususnya bagi warga negara yang berada di daerah/kawasan rawan bencana dan warga negara yang menjadi korban/ terdampak bencana, sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan pemerintah.

Aktivitas yang direncanakan dalam Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi aktual yang ada, sehingga diharapkan dapat berjalan secara optimal serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian atau munculnya aktivitas baru di kemudian hari sebagai respon terhadap dinamika dan perubahan kondisi yang terjadi, agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap relevan dan efektif.

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo menyelaraskan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra dengan kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, serta program unggulan Kabupaten Purworejo. Keselarasan ini dimaksudkan agar pelaksanaan program perangkat daerah tidak hanya mendukung pencapaian target internal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan di berbagai tingkatan.

Lebih lanjut, bentuk dukungan BPBD terhadap kebijakan pembangunan tersebut dapat diuraikan ke dalam tiga bagian utama, yaitu dukungan terhadap program nasional, program provinsi, dan dukungan terhadap program kabupaten (Pitulungan).

4.2.1. Penjabaran Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional)

1. Asta Cita

Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Asta Cita Kepala Daerah, dapat disampaikan bahwa program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2026–2030 tidak terdapat keterkaitan langsung dengan Asta Cita dimaksud. Hal ini dikarenakan program dan kegiatan BPBD lebih bersifat mendukung urusan wajib sub-urusan kebencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dipetakan secara eksplisit ke dalam butir-butir Asta Cita. Dengan demikian, penjabaran

program Renstra BPBD yang mendukung Asta Cita dinyatakan nihil

Tabel 4. 4
Program yang Mendukung Program Nasional Asta Cita

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
	NIHIL			

2. Program Strategi Nasional

Dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional Penanggulangan Kemiskinan, khususnya optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kabupaten Purworejo melalui BPBD melaksanakan sejumlah program dan aktivitas pendukung di periode 2026–2030.

Melalui Program Penanggulangan Bencana, BPBD berperan tidak hanya dalam aspek mitigasi dan respons bencana, tetapi juga secara langsung mendukung pengurangan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Aktivitas yang dilakukan mencakup sosialisasi KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kebencanaan, pelatihan Purworejo Disabilitas Tangguh (PORDISTA), serta pelatihan mitigasi bencana di desa-desa kawasan rawan bencana. Upaya ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, agar lebih tangguh menghadapi risiko bencana yang berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan.

Selain itu, BPBD juga melaksanakan kegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana, serta menyediakan bantuan kejadian bencana dan melakukan penanganan kekeringan. Langkah-langkah ini merupakan bentuk perlindungan sosial darurat yang penting untuk mencegah jatuhnya kelompok masyarakat rawan ke dalam kondisi kemiskinan ekstrem akibat dampak bencana.

Dengan demikian, program dan kegiatan BPBD Kabupaten Purworejo tidak hanya berorientasi pada pengurangan risiko bencana, tetapi juga sejalan dengan agenda nasional dalam menurunkan tingkat kemiskinan, memperkuat perlindungan sosial, serta membangun ketahanan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Tabel 4.5
Program yang Mendukung Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026-2030	Perangkat Daerah Terkait
1	Penanggulangan kemiskinan			
	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Program Penanggulangan Bencana	Pelaksanaan Sosialisasi KIE	BPBD

			Pelaksanaan Pelatihan PORDISTA (Purworejo Disabilitas Tangguh)	BPBD
			Pelaksanaan Pelatihan di desa kawasan rawan bencana	BPBD
			Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD
			Penyediaan Bantuan Kejadian Bencana	BPBD
			Penanganan Kekeringan	BPBD

4.2.2. Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi)

Dalam rangka melaksanakan Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah, BPBD Kabupaten Purworejo menyusun sejumlah kegiatan prioritas yang mendukung penguatan kapasitas kebencanaan berbasis masyarakat dan pemanfaatan teknologi.

Pertama, melalui Program Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat, BPBD menyelenggarakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, gladi kesiapsiagaan, penguatan kapasitas kawasan, serta pelatihan Keluarga Tangguh Bencana (KATANA). Seluruh kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat ketangguhan masyarakat, serta mendorong partisipasi kelompok rentan dalam menghadapi potensi bencana. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek dalam penanggulangan bencana.

Kedua, dalam mendukung Program Monitoring dan Sistem Peringatan Dini Bencana berbasis Teknologi di Seluruh Wilayah Rawan Bencana, BPBD Kabupaten Purworejo mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat sistem peringatan dini, mempercepat penyebaran informasi rawan bencana, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan real-time.

Melalui dua program utama tersebut, BPBD Kabupaten Purworejo berkomitmen mendukung kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. Hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas kelembagaan, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang terpadu, responsif, dan berbasis teknologi.

Tabel 4.6
Program yang Mendukung Program Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi)

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Trantibumlinmas (Kebencanaan)	BPBD
		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Trantibumlinmas (Kebencanaan)	BPBD
		Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Trantibumlinmas (Kebencanaan)	BPBD

		Pelatihan Keluarga Tangguh Bencana (KATANA)	Trantibumlinmas (Kebencanaan)	BPBD
2	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Trantibumlinmas (Kebencanaan)	BPBD

4.2.3. Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pitulungan yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Purworejo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyelaraskan berbagai aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 4.7
Program yang Mendukung Program Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi)

Kegiatan Unggulan	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
Penguatan mitigasi kebencanaan secara terstruktur dan non struktur.	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota 2. Penyusunan Rencana Kontijensi 3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota 4. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 5. Pembangunan Gedung untuk Gudang Logistik 6. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Trantibumlinmas (Kebencanaan)	BPBD
Pengembangan mitigasi dengan Early Warning System (EWS) bencana berbasis internet of thing (IoT).	1. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota 4. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Trantibumlinmas (Kebencanaan)	BPBD
Pemberian penyuluhan dini dan pelatihan untuk mengurangi risiko dampak bencana.	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) 2. Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	Trantibumlinmas (Kebencanaan)	BPBD
Penguatan daerah dan masyarakat yang tangguh bencana	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana), 2. Pelatihan Mitigasi kepada masyarakat daerah rawan bencana, lembaga pendidikan dan Komunitas, 3. Pembentukan Destana, 4. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, 5. Pelatihan dan sosialisasi Keluarga tangguh bencana	Trantibumlinmas (Kebencanaan)	BPBD

Dalam upaya meningkatkan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana, BPBD Kabupaten Purworejo merumuskan sejumlah kegiatan unggulan pada periode 2026–2030. Seluruh kegiatan diarahkan untuk memperkuat Trantibumlinmas di bidang kebencanaan, dengan menitikberatkan pada penguatan mitigasi, sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, serta pembangunan masyarakat tangguh bencana.

Pertama, melalui penguatan mitigasi kebencanaan secara terstruktur dan non-struktur, BPBD akan melaksanakan kegiatan strategis seperti penyusunan Kajian Risiko Bencana, Rencana Kontijensi, dan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota. Selain itu, akan dilakukan penguatan kapasitas kawasan rawan bencana, pembangunan gedung gudang logistik, serta penguatan

kerja sama antar lembaga dan mitra dalam penanggulangan bencana.

Kedua, dalam hal pengembangan mitigasi berbasis teknologi, BPBD mengembangkan *Early Warning System* (EWS) bencana berbasis *Internet of Things* (IoT). Kegiatan ini meliputi penyediaan peralatan perlindungan, pelaksanaan gladi kesiapsiagaan, serta pengendalian operasi dengan penyediaan sarana-prasarana kesiapsiagaan dan pelatihan mitigasi bencana.

Ketiga, untuk memperkuat penyuluhan dini dan peningkatan kapasitas masyarakat, BPBD akan menyelenggarakan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait potensi rawan bencana per jenis bencana, serta pelaksanaan gladi lapang penanggulangan bencana.

Keempat, dalam rangka mewujudkan daerah dan masyarakat yang tangguh bencana, kegiatan difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan mitigasi di desa rawan bencana, lembaga pendidikan, dan komunitas, pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), pelaksanaan gladi kesiapsiagaan, serta sosialisasi dan pelatihan Keluarga Tangguh Bencana (Katana).

Dengan pelaksanaan kegiatan unggulan tersebut, BPBD Kabupaten Purworejo berkomitmen mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih siap, sigap, dan tangguh menghadapi berbagai potensi bencana, sekaligus selaras dengan arah kebijakan nasional maupun program prioritas pembangunan daerah.

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penentuan indikator dan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo merupakan langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Indikator dan target kinerja dirumuskan secara terukur agar dapat menjadi pedoman dalam mengevaluasi capaian program dan kegiatan, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dalam penyusunannya, indikator kinerja dipilih berdasarkan relevansi dengan sasaran pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi BPBD. Sementara itu, target kinerja ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya, kondisi faktual masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan sosial dan kependudukan di Kabupaten Purworejo.

Adapun indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan BPBD dapat dilihat pada Tabel 4.8 Indikator Kinerja Utama BPBD.

Tabel 4. 8
Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.841	0.842	0.843	0.844	0.845	0.846	Tujuan PD : Meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68.02	70.45	72.89	75.33	77.76	80.2	Tujuan PD : Meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2	Indeks Ketahanan Daerah Kewenangan BPBD	Angka	0.841	0.842	0.843	0.844	0.845	0.846	Sasaran PD : Meningkatnya Ketahanan Daerah Kewenangan BPBD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68.02	70.45	72.89	75.33	77.76	80.2	Sasaran PD : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat dalam bidang penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Purworejo menetapkan arah pembangunan jangka menengah melalui indikator kinerja utama yang terukur, konsisten, serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Penetapan indikator ini juga bertujuan memastikan tercapainya peningkatan ketahanan daerah sekaligus penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Indikator pertama adalah Indeks Ketahanan Daerah, yang menjadi tolok ukur tingkat kemampuan daerah dalam menghadapi risiko bencana. Target peningkatan ditetapkan secara bertahap dari 0,841 pada tahun 2025 hingga 0,846 pada tahun 2030. Peningkatan angka ini mencerminkan keberhasilan program dan kegiatan BPBD dalam memperkuat kapasitas mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons bencana.

Selanjutnya, indikator Indeks Ketahanan Daerah Kewenangan BPBD secara khusus menilai kontribusi langsung BPBD dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat dan wilayah terhadap bencana. Dengan target capaian yang sama, yaitu 0,841 pada tahun 2025 menjadi 0,846 pada tahun 2030, indikator ini menegaskan peran BPBD dalam mengawal sasaran perangkat daerah berupa meningkatnya ketahanan daerah kewenangan BPBD.

Indikator ketiga adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peningkatan nilai SAKIP dari 68,02 di tahun 2025 menjadi 80,20 pada tahun 2030 menunjukkan komitmen BPBD untuk terus memperbaiki tata kelola organisasi. Hal ini tidak hanya mencerminkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan penetapan indikator tersebut, BPBD Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana serta birokrasi yang lebih akuntabel. Peningkatan secara bertahap selama periode 2025–2030 menjadi landasan penting bagi keberhasilan implementasi program penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan nasional maupun daerah.

Selain indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo juga memiliki indikator kinerja kunci yang wajib dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Indikator kinerja kunci ini mengacu pada berbagai ketentuan normatif dan regulatif, antara lain Indikator Urusan Pemerintahan (IUP), Standar Pelayanan Minimal (SPM),

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta berbagai ketentuan *mandatory* lain yang relevan. Dengan demikian, indikator kinerja kunci berfungsi sebagai instrumen pengukuran yang lebih spesifik dan bersifat wajib, untuk memastikan bahwa pelayanan dasar dan target pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat terpenuhi sesuai standar nasional. Adapun rincian indikator kinerja kunci BPBD disajikan pada Tabel 4.9 Indikator Kinerja Kunci.

Tabel 4. 9
Indikator Kinerja Kunci BPBD Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	124.57	122,66	120,76	118,85	116.94	115,03	IUP
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	SPM
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	SPM
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	SPM
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	Permendagri No 18 Tahun 2020
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	Permendagri No 18 Tahun 2020
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	Permendagri No 18 Tahun 2020

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana serta memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah, BPBD Kabupaten Purworejo menetapkan indikator kinerja utama yang mengacu pada regulasi nasional, yaitu Indeks Risiko Bencana (IRB), Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta ketentuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di Kabupaten Purworejo. Target IRB ditetapkan secara menurun dari 124,57 pada tahun 2025 hingga 115,03 pada tahun 2030. Penurunan ini mencerminkan komitmen BPBD dalam mengurangi potensi dampak bencana melalui program mitigasi struktural dan non-struktural, peningkatan kesiapsiagaan, serta penguatan kapasitas masyarakat.

Selanjutnya, indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ditetapkan dengan target 100% setiap tahun sepanjang periode 2025–2030. Hal ini sesuai dengan amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah, sehingga seluruh warga Kabupaten Purworejo berhak memperoleh akses terhadap informasi, pencegahan, serta penanganan darurat bencana secara merata.

Di samping itu, indikator yang sama juga diatur melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 sebagai bentuk penguatan kinerja pemerintah daerah dalam urusan wajib kebencanaan. Dengan target capaian 100% untuk seluruh layanan kebencanaan, BPBD memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh perlindungan dasar dari risiko bencana.

Dengan demikian, indikator kinerja yang telah ditetapkan tidak hanya mencerminkan arah kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi untuk menjamin terwujudnya daerah tangguh bencana serta peningkatan kualitas layanan publik di bidang kebencanaan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun kedepan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utam, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strtegi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pendanggulangan Bencana Daerah Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo setiap tahunnya.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi :

1. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Purworejo setiap tahun
2. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi :

1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra
2. Badan Perencanaan Pembangunan Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencaan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUSTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) Kabupaten Purworejo disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo periode 2025–2030. Renstra ini menjadi pedoman sekaligus arah bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang diemban.

Penyusunan Renstra ini dilatarbelakangi oleh tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta perlunya arah pembangunan sektor sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dinamika permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat, seperti kemiskinan, kerentanan sosial, serta isu kependudukan, menuntut adanya strategi yang tepat untuk mewujudkan masyarakat Purworejo yang sejahtera, berdaya, dan inklusif.

Dengan demikian, Renstra Dinsosdaldukkb tidak hanya berfungsi sebagai arahan teknis operasional, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian, pengukuran, dan evaluasi capaian kinerja, serta wujud komitmen perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) Kabupaten Purworejo dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029. Penyusunan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir, serta penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan melalui kegiatan orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja, serta pengumpulan data dan informasi.
b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan melalui proses perumusan rancangan Renstra dan penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah.
c. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen resmi perencanaan.

RPJMD menjadi pedoman utama dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berjangka lima tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis dari RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo.

Renstra yang merupakan rencana jangka menengah dijabarkan melalui rencana tahunan atau rencana jangka pendek dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.Apabila digambarkan dalam skema, keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat dalam bagan berikut:

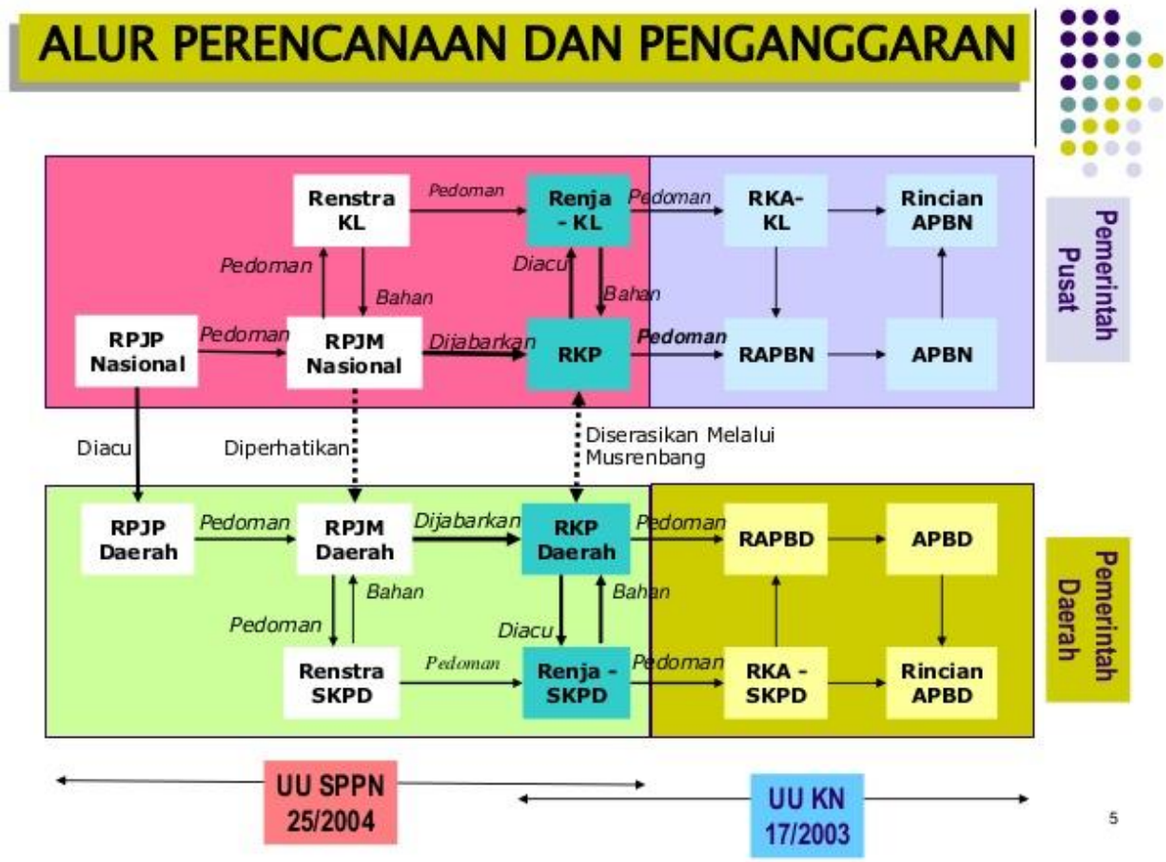

Gambar 1. 1
Alur Perencanaan dan Penganggaran

Sumber : Dokumen Perencanaan Kabupaten Purworejo, 2025

Gambar tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi, dan berjenjang. Pada level nasional, perencanaan dimulai dari RPJP Nasional, yang kemudian dijabarkan ke dalam RPJM Nasional, selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L), yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) K/L, dan selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP menjadi dasar penyusunan RAPBN, yang kemudian ditetapkan menjadi APBN beserta rincian anggarannya.

Sementara itu, pada level daerah, RPJP Daerah menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM Daerah, yang dijabarkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah (Renstra SKPD/PD), kemudian diturunkan menjadi Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi APBD beserta rincian anggarannya.

Hubungan antara perencanaan pusat dan daerah diwujudkan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang memastikan adanya konsistensi, sinkronisasi, dan sinergi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah. Dengan demikian, dokumen Renstra Perangkat Daerah tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 memiliki peran penting dalam memberikan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Purworejo, RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta RPJM Nasional. Renstra ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah khususnya di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Purworejo yang sejahtera, inklusif, dan berdaya saing.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Renstra Dinsosdaldukkb) Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
30. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 123 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo;
31. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/16/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029; dan
32. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/13/2025 tentang Pembentukan Tim Pembahas Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di Kabupaten Purworejo. Renstra ini berfungsi sebagai instrumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas selama periode lima tahun, agar selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo adalah:

a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo ke dalam kebijakan teknis pada bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
b. Menjadi pedoman operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinsosdaldukkb dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program serta kegiatan selama periode 2025–2029;
c. Mewujudkan keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi dalam urusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinsosdaldukkb sebagai perangkat daerah melalui pengukuran capaian kinerja yang terencana dan terstruktur;
e. Memberikan arah strategis dalam penanggulangan permasalahan sosial, penanganan kemiskinan, pemberdayaan kelompok rentan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Purworejo;
f. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu pemerintahan yang transparan, partisipatif, adil, akuntabel, responsif, dan berkelanjutan;
g. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo selama periode 2025–2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.3.1 Maksud
- 1.3.2 Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Telaah Visi, dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Terpilih
3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah
4.2.1. Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional)
4.2.2. Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi provinsi)
4.2.3. Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan)
4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VII PENUTUP
5.1. Kesimpulan Penting Substansial
5.2. Kaidah Pelaksanaan
5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo disajikan melalui data dan informasi yang mencerminkan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Penyajian gambaran pelayanan ini dilengkapi dengan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, serta data pendukung lain yang relevan dengan kebutuhan perencanaan.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran umum atas capaian, serta analisis diagnostik guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun kendala dalam penyelenggaraan urusan. Fokus utama penyajian evaluasi kinerja diarahkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merepresentasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, data dan informasi yang disajikan baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun gambar akan dipaparkan secara naratif dengan menekankan pada makna dan kesimpulan dari data tersebut, bukan sekadar menjelaskan angka-angka yang tersaji.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial,Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo, susunan Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo terdiri dari :

1. Kepala Dinsosdaldukkb;
   - Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinsosdaldukkb.
2. Sekretariat;
   - Bertugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinsosdaldukkb.
   - Menyelenggarakan fungsi :
     - Pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
     - Pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
     - Pengoordinasian pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
     - Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
     - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSDALDUKKB berkaitan dengan tugas dan fungsi.

2.1. Subbagian Perencanaan;

- Subbagian Perencanaan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan meliputi:

- Menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- Menyusun perjanjian kinerja; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

2.2. Subbagian Keuangan ;

- Subbagian Keuangan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan, yang meliputi:
  - Menyelenggarakan administrasi keuangan;
  - Menyelenggarakan administrasi pendapatan Daerah; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

2.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi:
  - Menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
  - Menyelenggarakan administrasi umum;
  - Menyelenggarakan pengadaan barang milik Daerah;
  - Menyediakan jasa penunjang urusan;
  - Menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
  - Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
  - Menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

3. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
   - Bertugas melakukan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial
   - Menyelenggarakan fungsi :
     - Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
     - Pengumpulan sumbangan dalam wilayah Daerah;
     - Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah;
     - Pemeliharaan anak-anak terlantar;
     - Pengelolaan data fakir miskin cakupan wilayah Daerah; dan
     - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSDALDUKKB berkaitan dengan tugas dan fungsi.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
   - Bertugas melakukan rehabilitasi sosial, melakukan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, melakukan penanganan bencana dan melakukan pengelolaan taman makam pahlawan.
   - Menyelenggarakan fungsi :
     - Pelaksanaan_ rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
     - Pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial;

- Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa atau Kelurahan asal di wilayah Daerah;
- Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di wilayah Daerah;
- Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional di wilayah Daerah; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSDALDUKKB berkaitan dengan tugas dan fungsi.

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
   - Bertugas melakukan kegiatan pengendalian penduduk dan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.
   - Menyelenggarakan fungsi :
     - Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
     - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan wilayah Daerah;
     - Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
     - Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
     - Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSDALDUKKB berkaitan dengan tugas dan fungsi.
6. Bidang Keluarga Berencana;
   - Bertugas melakukan pembinaan keluarga berencana
   - Menyelenggarakan fungsi :
     - Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
     - Pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana /petugas lapangan keluarga berencana;
     - Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di wilayah Daerah;
     - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;dan
     - Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSDALDUKKB berkaitan dengan tugas dan fungsi.
7. UPT; dan
8. Jabatan Fungsional.

Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kewenangan Daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana Dan Penglolaan Taman Makam Pahlawan, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera, serta Keluarga Berencana;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana Dan Penglolaan Taman Makam Pahlawan, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera, serta Keluarga Berencana;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Sosial Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana Dan Penglolaan Taman Makam Pahlawan, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera, serta Keluarga Berencana;
d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINSOSDALDUKKB; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

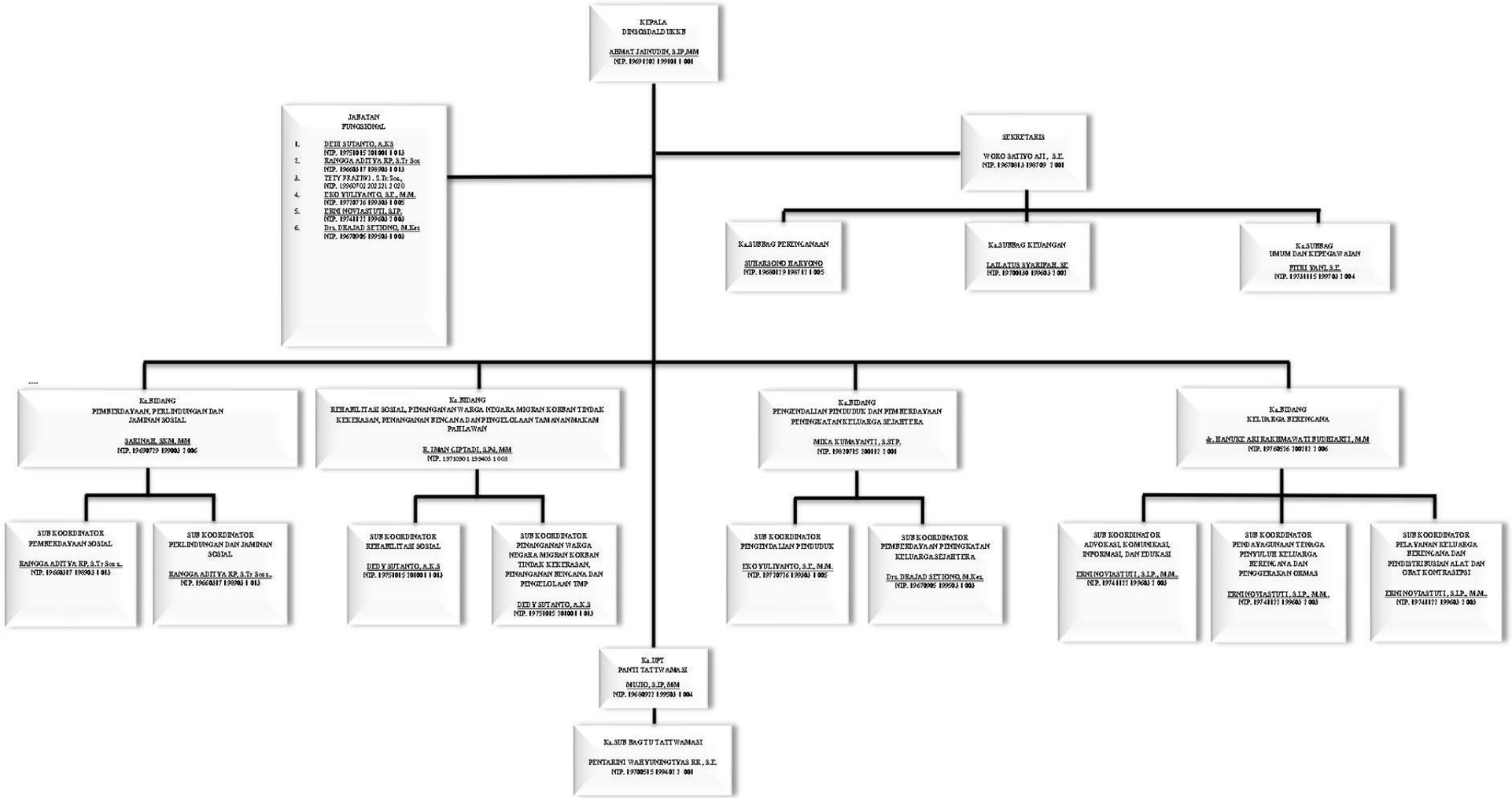

Gambar 2. 1

SOTK DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWOREJO

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo didukung oleh sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sarana dan prasarana pendukung.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo memiliki aparatur yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta didukung oleh tenaga Non-ASN yang membantu pelaksanaan tugas teknis operasional.

SDM tersebut tersebar pada sekretariat, bidang-bidang teknis, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Komposisi aparatur didominasi oleh jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan pelaksana. Dari sisi kualifikasi pendidikan, sebagian besar aparatur telah berpendidikan sarjana (S1), diikuti dengan tingkat pendidikan pascasarjana (S2), diploma, dan sekolah menengah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung dengan komposisi pegawai dengan jumlah 47 orang yang terdiri dari 36 orang ASN dan 11 orang tenaga jasa perseorangan. Untuk 36 orang ASN terbagi menjadi 28 PNS dan 8 orang PPPK dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Jumlah ASN Dinsosdaldukkb Tahun 2025 Bulan Agustus berdasarkan jenis kelamin.

   Pada bulan Agustus Tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) tercatat sebanyak 36 orang dengan rincian sebagai berikut:

   - Laki-laki : 24 orang
   - Perempuan : 12 orang

   Komposisi ini menunjukkan bahwa Dinsosdaldukkb memiliki keberagaman berdasarkan jenis kelamin yang sejalan dengan semangat Pengarusutamaan Gender (PUG). Dinsosdaldukkb berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif dan setara, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi ASN laki-laki maupun perempuan untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan.

   Dukungan terhadap PUG diwujudkan melalui peningkatan kapasitas SDM, pengembangan karier tanpa diskriminasi gender, serta pembagian peran yang adil dan proporsional. Dengan demikian, keberadaan ASN laki-laki dan perempuan diharapkan dapat saling melengkapi dalam menjalankan tugas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung terwujudnya pembangunan sosial yang responsif gender.

b. Jumlah ASN Dinsosdaldukkb Tahun 2025 Bulan Agustus berdasarkan golongan.

Struktur kepegawaian pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo berdasarkan golongan ASN menunjukkan sebaran yang beragam. Data ini penting untuk menggambarkan kondisi sumber daya manusia yang dimiliki perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik.

Sebaran ASN berdasarkan Golongan :

- Golongan IV/d : 0 orang
- Golongan IV/c : 1 orang
- Golongan IV/b : 0 orang
- Golongan IV/a : 7 orang
- Golongan III/d : 6 orang
- Golongan III/c : 1 orang
- Golongan III/b : 3 orang
- Golongan III/a : 2 orang
- Golongan II/d : 5 orang
- Golongan II/c : 0 orang
- Golongan II/b : 3 orang
- Golongan II/a : 8 orang

Jumlah keseluruhan : 36 orang

Dari data tersebut terlihat bahwa komposisi ASN didominasi oleh golongan II dan III, dengan jumlah relatif kecil pada golongan IV. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas, pembinaan karier, serta peningkatan kompetensi ASN agar keberlanjutan pelayanan publik dapat berjalan optimal di masa mendatang.

c. Jumlah ASN Dinsosdaldukkb Tahun 2025 Bulan Agustus berdasarkan Pendidikan

Selain komposisi berdasarkan golongan, tingkat pendidikan ASN pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo juga menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja organisasi. Data ini memberikan gambaran kapasitas dasar pegawai dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik.

Sebaran ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

- Pendidikan S3 : 0 orang
- Pendidikan S2 : 7 orang
- Pendidikan S1 : 6 orang
- Pendidikan D IV : 4 orang
- Pendidikan D III : 1 orang
- Pendidikan SLTA/SMA/SMK : 15 orang
- Pendidikan SLTP/SMP : 3 orang
- Pendidikan SD : 0 orang

Jumlah keseluruhan : 36 orang

Dari komposisi tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar ASN memiliki pendidikan menengah atas (SLTA), sementara yang berpendidikan tinggi (S1 dan S2) jumlahnya cukup signifikan untuk menopang kebutuhan teknis dan manajerial. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas aparatur dalam menjawab tantangan pelayanan sosial dan kependudukan di masa depan.

d. Jumlah Mitra Dinsosdaldukkb Tahun 2025 Bulan Agustus Sektor Sosial :

Dalam penyelenggaraan urusan sosial, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo didukung oleh mitra sektor sosial yang memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial kepada masyarakat. Mitra sektor sosial tersebut terdiri atas:

1. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
   Sebanyak 105 orang pendamping PKH bertugas melakukan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan. Tugas mereka meliputi fasilitasi akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta mendorong

perubahan perilaku keluarga miskin agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
   Terdapat 16 orang TKSK, masing-masing satu orang di setiap kecamatan di Kabupaten Purworejo. TKSK berperan sebagai tenaga relawan sosial yang membantu pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan sosial di tingkat kecamatan, termasuk dalam hal penanganan permasalahan sosial, penyaluran bantuan sosial, serta pemberdayaan masyarakat.
3. Pekerja Sosial (Peksos)
   Sebanyak 3 orang pekerja sosial profesional (Peksos) ditugaskan untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Peksos berperan dalam asesmen, intervensi sosial, pendampingan, dan rujukan layanan, sehingga penanganan masalah sosial dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan profesional.

Keberadaan mitra sektor sosial tersebut sangat membantu Dinsosdaldukkb dalam memperluas cakupan layanan sosial, memperkuat koordinasi di tingkat kecamatan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial di Kabupaten Purworejo.

e. Jumlah Mitra Dinsosdaldukkb Tahun 2025 Bulan Agustus Sektor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

Dalam mendukung pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo memperoleh dukungan sumber daya manusia dari mitra sektor yang tersebar di seluruh kecamatan. Dukungan tersebut meliputi:

1. Penyuluh Keluarga Berencana
   Sebanyak 45 orang Penyuluh Keluarga Berencana merupakan tenaga fungsional yang berasal dari penugasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Kemendukbangga) yang ditempatkan di Kabupaten Purworejo. Penyuluh KB memiliki peran strategis dalam melaksanakan penyuluhan, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di masyarakat.
2. Pramusaji
   Terdapat 16 orang tenaga Pramusaji yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Pramusaji bertugas mendukung operasional Balai Penyuluhan KB, khususnya dalam aspek pelayanan administrasi, kebersihan, dan penunjang teknis kegiatan penyuluhan keluarga berencana.
3. Tenaga Keamanan
   Sebanyak 16 orang tenaga keamanan juga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik BOKB. Tenaga keamanan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Balai Penyuluhan KB, serta memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional di tingkat kecamatan.

Seluruh tenaga tersebut tersebar secara merata di 16 Balai Penyuluhan KB yang berada di setiap kecamatan di Kabupaten Purworejo. Keberadaan mitra sektor ini memperkuat kapasitas pelayanan Dinsosdaldukkb, khususnya dalam meningkatkan

aksesibilitas dan kualitas layanan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana hingga ke tingkat kecamatan

Secara keseluruhan, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo terdiri dari aparatur sipil negara, tenaga non-ASN, serta dukungan mitra sektor sosial dan mitra sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Aparatur dan tenaga pendukung tersebut telah tersebar pada unit-unit kerja dinas, bidang-bidang teknis, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), serta balai penyuluhan KB di setiap kecamatan.

Dari sisi jumlah, kualitas, maupun kualifikasi, SDM yang ada sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi agar mampu menjawab tantangan pelayanan yang semakin kompleks. Keberadaan mitra sektor sosial (PKH, TKSK, Pekerja Sosial) dan mitra sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana (penyuluh KB, pramusaji, tenaga keamanan) memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, kolaborasi antara aparatur dinas dan mitra sektor menjadi kekuatan utama dalam mendukung penyelenggaraan urusan sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sekaligus memperkuat peran Dinsosdaldukkb dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purworejo.

2. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berasal dari beberapa sumber pendanaan, yaitu:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Purworejo, yang digunakan untuk mendukung pembiayaan operasional, program, dan kegiatan urusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik – Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), yang dialokasikan pemerintah pusat untuk mendukung operasional program keluarga berencana, termasuk kegiatan penyuluhan, pelayanan KB, dan pembinaan masyarakat.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana serta peningkatan kualitas fasilitas pelayanan.

Secara umum, alokasi anggaran dari ketiga sumber tersebut setiap tahunnya disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat. Ketersediaan sumber daya keuangan tersebut telah memberikan dukungan bagi Dinsosdaldukkb dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Meskipun demikian, kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan urusan sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana relatif terus meningkat seiring dengan berkembangnya permasalahan dan kompleksitas pelayanan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan pada periode Renstra 2025–2029 diarahkan untuk lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

3. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo didukung oleh sarana dan prasarana yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) meliputi kategori tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan dan jaringan. Rincian aset tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

- Tanah (KIB A)

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) saat ini memiliki aset tanah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Aset tanah tersebut terdiri dari:

- Tanah Bangunan Kantor : 2 bidang, digunakan sebagai Kantor Induk Dinsosdaldukkb yang menjadi pusat koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan program serta kegiatan.
- Tanah Panti Sosial : 1 bidang, dimanfaatkan untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tat Twam Asi dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial.
- Tanah Makam Pahlawan : 1 bidang, digunakan untuk pengelolaan dan pemeliharaan Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.
- Tanah Kosong : 1 bidang, yang saat ini dipersiapkan untuk pembangunan Rumah Singgah pada periode mendatang, guna memperkuat layanan sosial berbasis kebutuhan masyarakat.

Kepemilikan tanah tersebut menunjukkan bahwa Dinsosdaldukkb tidak hanya berfokus pada pelayanan jangka pendek, tetapi juga memiliki visi jangka panjang dalam pengembangan sarana dan prasarana. Dengan pengelolaan yang optimal, aset tanah yang dimiliki diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan sosial, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan

- Peralatan & Mesin (KIB B)

Tabel 2. 1
Aset Peralatan dan Mesin di Dinsosdaldukkb Tahun 2025

Aset	Jumlah
A.C. Split	12
A.C. Window	4
Alas Dengan Lampu + Kontak	2
Alat Kantor Lainnya	7
alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	16
alat kesehatan kerja lainnya (dst)	5
alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya (dst)	9
Alat Pemadam/Portable	1
alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	20
Alat Rumah Tangga Lain-lain	77
Bangku Tunggu	5
Brandkas	1
Camera Electronic	1
Camera Film	1
Camera Video	2
CCTV - Camera Control Television System	1
Compact Disc Player	1
Dispenser	2
electric generating set lainnya (dst)	1
Exhause Fan	3
Facsimile	1
Filing Cabinet Besi	45

Aset	Jumlah
Gerobak Dorong	2
Gerobak Tarik	1
Handy Cam	1
Kardex Besi	2
Kasur/Spring Bed	28
kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1
Kipas Angin	5
Kompor Gas (Alat Dapur)	3
Komputer Jaringan lainnya	2
Kursi Besi/Metal	94
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2
Kursi Lipat	270
Kursi Putar	68
Kursi Rapat	132
Lap Top	163
Layar Film/Projector	12
LCD Projector/Infocus	17
Lemari Besi/Metal	4
Lemari Es	1
Lemari Kayu	23
Loudspeaker	3
Meja 1/2 Biro	78
Meja Kerja Kayu	12
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	29
Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
Meja Kerja Pejabat Eselon III	2
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5
Meja Komputer	2
Meja Panjang	2
Meja Rapat	82
Meja Resepsionis	1
Mesin Absensi	1
Mesin Cuci	1
Mesin Gergaji	1
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	2
Mesin Pemotong Rumput	2
Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	1
Mobil Unit Penerangan Darat	1
Oven Listrik	1
Overhead Projector	27
P.C Unit	69
Papan Nama Instansi	15
Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1
peralatan mainframe lainnya (dst)	30
Peralatan Personal Komputer lainnya	2
Personal Komputer lainnya	200
Photo Micrograph Camera	1
Portable Generating Set	1
Portable Noise Monitoring	11
Portable Water Pump	1
Printer (Peralatan Personal Komputer)	64
Rak Besi	8
Rak Kayu	18
rambu tidak bersuar lainnya (dst)	4
Rotary Bottle Rack	2
Sepeda Motor	138
Sice	14
Sound System	2
Station Wagon	5
Tangga Aluminium	3

Aset	Jumlah
Telephone (PABX)	1
Televisi	3
Tempat Tidur Besi	14
TV Monitor	1
Uninterruptible Power Supply (UPS)	30
White Board	15
Wireless	16

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) memiliki sarana dan prasarana berupa peralatan dan mesin sebanyak 1.917 unit. Peralatan tersebut tersebar pada beberapa lokasi kerja, yaitu Kantor Induk Dinsosdaldukkb, UPT Tat Twam Asi, Taman Makam Pahlawan, serta Balai KB yang berada di 16 kecamatan.

Ketersediaan peralatan dan mesin tersebut merupakan penunjang utama dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan publik yang diberikan oleh Dinsosdaldukkb. Namun, mengingat jumlah dan sebarannya yang luas, diperlukan perawatan berkala agar kondisi peralatan tetap terjaga dengan baik, berfungsi optimal, serta dapat mendukung kinerja organisasi secara berkelanjutan. Kondisi kekurangan Sarana Prasarana terjadi di UPT Tat Twam Asi dan Taman Makam Pahlawan. Dimana di UPT Tat Twam Asi dimana kondisi tempat tidur, dan lemari dalam kondisi yang sudah tidak layak guna dan rusak sedangkan di Taman Makam Pahlawan tidak lengkapnya sarana prasarana sesuai dengan peraturan yang berlaku selain itu kekurangan tempat sampah, papan petunjuk, sarana digital seperti papan selamat datang digital dan komputer.

Upaya pemeliharaan yang dilakukan meliputi perawatan rutin, perbaikan apabila terjadi kerusakan, serta penggantian secara bertahap terhadap peralatan yang sudah tidak layak pakai. Dengan demikian, keberadaan sarana dan prasarana peralatan dan mesin tidak hanya menjadi aset penting, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain peralatan dan mesin, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) juga memiliki sarana berupa kendaraan dinas/operasional yang berfungsi mendukung pelaksanaan tugas pelayanan sosial, keluarga berencana, dan penanganan kebencanaan. Kendaraan tersebut meliputi:

- Bus Pelayanan KB Keliling, yang digunakan untuk menjangkau pelayanan KB secara langsung ke masyarakat di wilayah kecamatan maupun desa/kelurahan.
- Kendaraan Dapur Umum, yang dioperasikan dalam mendukung penanganan bencana maupun pelayanan sosial darurat.
- Mobil Operasional PMKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), yang digunakan dalam kegiatan pelayanan, rehabilitasi, serta pendampingan masyarakat.
- Mobil Operasional Penanganan Bencana, yang diperuntukkan sebagai sarana respons cepat dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Kendaraan-kendaraan tersebut memiliki peranan penting dalam mendukung mobilitas program dan layanan Dinsosdaldukkb. Namun, seiring dengan intensitas pemakaian dan usia kendaraan, saat ini kondisinya memerlukan perbaikan dan perawatan berkala agar tetap layak digunakan. Perhatian terhadap aspek pemeliharaan kendaraan menjadi hal strategis, mengingat sarana transportasi ini secara langsung

berpengaruh pada kecepatan, jangkauan, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

- Gedung & Bangunan (KIB C)

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) memiliki berbagai jenis aset bangunan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan data Tahun 2025, jumlah aset bangunan tercatat sebanyak 32 unit, dengan rincian sebagai berikut:

- Asrama Permanen : 1 unit
- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain : 4 unit
- Bangunan Gedung Kantor Permanen : 17 unit
- Bangunan Gudang Tertutup Permanen : 1 unit
- Bangunan Tempat Kerja Lain-lain : 6 unit
- Gedung Garasi/Pool Permanen : 1 unit
- Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen : 1 unit
- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat Lain-lain : 1 unit

  Total keseluruhan : 32 unit

Bangunan-bangunan tersebut berfungsi sebagai pusat layanan, sarana operasional, serta fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan program Dinsosdaldukkb. Namun demikian, seiring dengan usia pemanfaatan dan intensitas penggunaan, beberapa bangunan sudah mulai mengalami kerusakan dan memerlukan pemeliharaan berkala. Pada UPT Tat Twam Asi terdapat suatu kondisi terkait adanya bangunan di atas aset milik UPT Tat Twam Asi serta untuk Taman Makam Pahlawan kekurangan sarana prasarana baik utama seperti kamar mandi khususnya untuk disabilitas, tembok abadi, dan perataan tanah Taman Makam Pahlawan.

Pemeliharaan aset gedung secara rutin sangat diperlukan agar kondisi fisik bangunan tetap terjaga, fungsi layanan dapat berjalan optimal, serta keberadaan aset daerah dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberlanjutan pengelolaan aset bangunan menjadi bagian penting dalam strategi penguatan sarana prasarana Dinsosdaldukkb pada periode 2025–2029.

- Jalan/Jaringan (KIB D)

- Jalan Khusus TMP : 1 unit
- Menara Air TMP : 1 unit
- Jaringan Listrik Dinsos : 1 unit

Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut berfungsi sebagai penunjang utama penyelenggaraan pelayanan publik, baik di bidang sosial maupun pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tanah dan gedung dimanfaatkan sebagai kantor pelayanan, balai penyuluhan KB, serta fasilitas pendukung seperti panti sosial dan Taman Makam Pahlawan. Peralatan dan mesin berupa kendaraan roda empat, sepeda motor, serta perlengkapan operasional lainnya digunakan untuk mendukung mobilitas dan efektivitas pelayanan di lapangan. Sementara itu, jalan dan jaringan berperan dalam menjaga kelancaran aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas dasar pada lokasi pelayanan tertentu.

Secara umum, sarana dan prasarana yang tersedia telah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Namun, masih diperlukan peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, khususnya pada fasilitas pelayanan di tingkat kecamatan serta dukungan peralatan modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Optimalisasi pemanfaatan aset yang ada juga

menjadi perhatian penting agar sarana prasarana dapat benar-benar mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

secara keseluruhan, penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo telah ditopang oleh tiga unsur utama sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sarana dan prasarana.

Dari sisi sumber daya manusia, aparatur sipil negara, tenaga non-ASN, serta dukungan mitra sektor sosial dan mitra sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana berperan penting dalam memperluas jangkauan layanan hingga ke tingkat kecamatan. Namun demikian, peningkatan kapasitas dan kompetensi tetap menjadi kebutuhan agar kualitas pelayanan semakin optimal.

Dari sisi sumber daya keuangan, dukungan anggaran yang bersumber dari DAU APBD Kabupaten Purworejo, DAK Nonfisik BOKB, dan DAK Fisik BOKB telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendanaan program dan kegiatan. Pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel perlu terus ditingkatkan agar setiap alokasi anggaran benar-benar berorientasi pada pencapaian hasil.

Dari sisi sarana dan prasarana, ketersediaan tanah, gedung, balai penyuluhan KB, fasilitas Taman Makam Pahlawan, kendaraan operasional, serta peralatan penunjang telah menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan tugas dinas. Namun, peningkatan kualitas, kuantitas, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang semakin kompleks.

Dengan demikian, ketiga aspek sumber daya tersebut merupakan fondasi penting dalam mendukung penyelenggaraan urusan sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sekaligus menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada periode Renstra 2025–2029.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pelayanan perangkat daerah pada periode ini diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Pengukuran kinerja pelayanan dilakukan dengan mengacu pada sasaran dan target yang tercantum dalam Renstra Dinsosdaldukkb periode sebelumnya, serta memperhatikan indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK), dan indikator yang ditetapkan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib bidang sosial. Evaluasi capaian kinerja juga mempertimbangkan indikator sektoral lain yang relevan, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sebagai salah satu basis evaluasi, capaian kinerja diukur melalui data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menggambarkan kelompok masyarakat rentan dan membutuhkan intervensi pelayanan sosial. Data ini menjadi rujukan utama dalam merumuskan arah kebijakan dan program, sekaligus menjadi tolok ukur atas efektivitas pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Tabel 2. 2
Tabel Data PPKS di Kabupaten Purworejo tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Anak Balita Terlantar (ABT)	279	113	71	15
Anak Terlantar (AT)	107	83	53	5
Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)	89	38	25	7
Anak Jalanan	20	19	15	6
Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	840	667	639	458
Anak dengan Disabilitas Fisik	606	235	200	144
a.1. Tubuh (Tuna Daksa)	352	235	200	144
a.2. Mata (Tuna Netra)	155	37	37	16
a.3. Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	99	15	48	43
Disabilitas Sensorik		109	106	75
Disabilitas Mental	162	223	229	158
b.1. Mental Retardasi (Tuna Grahita)	141	178	183	138
b.2. Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	21	10	8	2
Disabilitas Mental dan Fisik	72	100	36	22
Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	8	7	4	3
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	8	18	8	4
Lanjut Usia Terlantar	9	2.079	1.466	152
Penyandang Disabilitas	7.435	6.547	6.434	6.305
Penyandang Disabilitas Fisik	5.365	2.437	2.385	2.112
a.1. Tubuh (Tuna Daksa)	2.674	2.437	2385	2112
a.2. Mata (Tuna Netra)	1.688	463	445	440
a.3. Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	1.003	637	501	500
Penyandang Disabilitas Sensorik		1.232	1.129	1.133
Disabilitas Mental	1.738	2.410	2.485	2.592
b.1. Mental Retardasi (Tuna Grahita)	903	1384	1376	1342
b.2. Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	835	180	238	222
Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	332	249	199	458
Tuna Susila (TS)	79	80	63	50
Gelandangan	35	35	35	21
Pengemis	58	57	49	36
Pemulung	101	102	105	87
Kelompok Minoritas/Waria	2	1	-	
Waria	-	1	-	
Gay	-	-	-	
Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	255	230	195	81
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	8	8	7	6
Korban Penyalahgunaan NAPZA	10	10	6	1
Korban Trafficking	2	2	1	1
Korban Tindak Kekerasan	18	15	3	1
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	2	2	-	0
Korban Bencana Alam	20	20	18	0
Korban Bencana Sosial	2	2	2	2
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	965	906	664	308
Fakir Miskin	129.779	112.545	121.993	117.594

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	36	40	28	8
Komunitas adat Terpencil	-	-	-	0
JUMLAH	140.167	123.626	131.884	121.151

Sumber : Data Publikasi PPKS dan PMKS Dinsos Provinsi Jawa Tengah, 2021-2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purworejo mengalami tren penurunan dari tahun 2021 hingga 2024. Total PPKS yang semula sebanyak 140.167 jiwa pada tahun 2021 menurun menjadi 121.151 jiwa pada tahun 2024, atau berkurang sekitar 13,6 persen dalam kurun waktu empat tahun. Penurunan ini terutama terjadi pada kelompok fakir miskin, lanjut usia terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi, anak terlantar, serta bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan intervensi kebijakan dan program perlindungan sosial yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Apabila dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo yang relatif rendah, maka penurunan jumlah PPKS tidak hanya dipengaruhi oleh faktor demografi, tetapi juga merupakan cerminan dari peningkatan efektivitas kinerja pelayanan sosial. Dengan demikian, meskipun jumlah penduduk tidak mengalami kenaikan yang signifikan, proporsi masyarakat yang masuk dalam kategori rentan sosial dapat ditekan melalui upaya perlindungan dan pemberdayaan yang lebih terarah.

Namun demikian, terdapat beberapa kelompok PPKS yang masih tinggi jumlahnya bahkan cenderung meningkat, khususnya penyandang disabilitas dan disabilitas mental. Fakta ini mengindikasikan bahwa meskipun capaian kinerja pelayanan sosial menunjukkan perbaikan, masih terdapat tantangan besar yang harus dihadapi. Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan kebijakan dan program pelayanan sosial pada periode perencanaan berikutnya, terutama dalam hal rehabilitasi sosial, dukungan layanan kesehatan jiwa, serta pemberdayaan bagi penyandang disabilitas agar lebih mandiri dan berdaya.

Selanjutnya, evaluasi juga mencakup data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Keberadaan PSKS menjadi penting karena merupakan basis penggerak masyarakat dalam membantu penanganan berbagai masalah sosial.

Tabel 2. 3
Tabel Data PSKS di Kabupaten Purworejo tahun 2021-2024

No	Jenis	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pekerja Sosial Profesional	9	11	8	8
2	Pekerja Sosial Masyarakat	129	1167	4	4
3	Taruna Siaga Bencana	29	60	42	42
4	Pendamping PKH	113	104	110	110
5	Karang Taruna	224	339	54	54
6	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0	286	286	286

No	Jenis	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
7	Penyuluh Sosial	1	3	2	2
8	TKSK	16	16	17	17
9	LKS	12	0	9	9
10	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	1	1
11	Keluarga Pioner	0	86	84	84
12	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	1	10	5	5
13	Dunia Usaha	0	28	0	0
14	Family Care Unit	0	0	0	0
15	SLRT	-	-	494	494

Sumber : Data Publikasi PPKS dan PMKS Dinsos Provinsi Jawa Tengah, 2021-2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah PSKS mengalami dinamika yang cukup fluktuatif sepanjang periode 2021–2024. Beberapa elemen PSKS seperti Karang Taruna, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, dan Keluarga Pioner sempat meningkat tajam pada 2022, namun menurun kembali pada 2023–2024. Sementara itu, unsur-unsur seperti Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) relatif stabil dan konsisten dalam menjalankan perannya.

Fluktuasi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan regenerasi kader sosial agar keberadaan PSKS lebih berkelanjutan dan efektif dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial. Revitalisasi dan pengembangan PSKS menjadi agenda penting dalam Renstra periode berikutnya, terutama untuk menjawab kebutuhan yang terus berkembang di masyarakat.

Secara umum, capaian kinerja pelayanan Dinsosdaldukkb menunjukkan adanya kemajuan pada beberapa aspek, meskipun masih terdapat sejumlah indikator yang belum sepenuhnya mencapai target. Hal ini mencerminkan adanya keberhasilan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan.

Hasil capaian kinerja Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
T1	Persentase Penurunan Kelompok Rumah Tangga 20% berpenghasilan terendah dari DTKS	n/a	n/a	n/a	35,05	33,19	31,42	29,75	28,17	26,67	47,21	45,11	32,12	17,63	n/a	n/a	74,24	73,58	97,82	168,75	n/a	n/a
T2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a
T3	Laju pertumbuhan penduduk	n/a	n/a	n/a	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,48	0,6	1,29	0,85	n/a	n/a	184,62	230,77	496,15	326,92	n/a	n/a
T4	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	98,3	98,3	100	100	100	94,35	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	94,35	n/a	n/a
S1.1	Persentase pemerlu pelayanan kersejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a
S2.1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a
S3.1	TFR (Total Fertility Rate)	n/a	n/a	n/a	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,3	2,67	1,16	2,05	n/a	n/a	61,90	127,14	55,24	97,62	n/a	n/a
S4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	98,3	98,3	100	100	100	94,35	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	94,35	n/a	n/a
S4.2	Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai standar	n/a	n/a	n/a	50	50	70	80	90	100	50	50	70	80	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a
P1	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a
P2	Persentase Potensi Sumber	n/a	n/a	n/a	89,58	90	93	95	97	100	18,52	90,2	95,26	100	n/a	n/a	20,67	100,22	102,43	105,26	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina																					
P3	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapat penanganan	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a
P4	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a
P5	Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	n/a	n/a	n/a	69,87	69,47	69,47	69,47	69,47	69,47	79,85	69,47	92,99	80,75	n/a	n/a	114,28	100,00	133,86	116,24	n/a	n/a
P6	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a
P7	persentase pemenuhan standar sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	n/a	n/a	n/a	50	50	70	80	90	100	50	50	70	80	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a
P8	Age Spesific Fertility Rate (ASFR)	n/a	n/a	n/a	18	17	17	16	16	15	18	4,77	14,6	14,4	n/a	n/a	100,00	356,39	116,44	111,11	n/a	n/a
P9.1	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (modern contraceptive prevalence rate /mCPR) / Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	n/a	n/a	n/a	52,09	52,82	53,49	64	65,5	65,5	52,09	69,18	63,24	65,98	n/a	n/a	100,00	130,97	118,23	103,09	n/a	n/a
P9.2	Persentase kebutuhan ber-KB	n/a	n/a	n/a	22,43	21,81	21,28	20,83	20,43	20,43	13,99	15,42	16,69	9,38	n/a	n/a	160,33	141,44	127,50	222,07	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	yang tidak terpenuhi (Unmet Need)																					
P10.1	Persentase Keluarga yang mendapat layanan tribina	n/a	n/a	n/a	63	63,3	63,55	79	79	79	64,96	64,88	78,96	87,57	n/a	n/a	103,11	102,50	124,25	110,85	n/a	n/a
P10.2	Persentase PUS Peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	n/a	n/a	n/a	84,18	84,22	84,3	90	90	90	72,14	57,56	84,3	66,98	n/a	n/a	85,70	68,34	100,00	74,42	n/a	n/a
SPM 1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			SPM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a
SPM 2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			SPM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a
SPM 3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			SPM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a
SPM 4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			SPM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a
SPM 5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			SPM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a
PMD 1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)			Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PMD 2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

Selama periode 2021–2024, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) telah berupaya maksimal dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai 100%, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan strategi pada periode Renstra 2025–2029. Adapun indikator dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Persentase Penurunan Kelompok Rumah Tangga 20% Berpenghasilan Terendah dari DTKS
   - Tahun 2021: 74,24%
   - Tahun 2022: 73,58%
   - Tahun 2023: 97,82%

   Capaian ini belum mencapai 100% karena masih tingginya jumlah rumah tangga rentan miskin yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan, serta keterbatasan program intervensi yang menjangkau seluruh sasaran.
2. Indikator Tujuan – Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah
   - Tahun 2024: 94,35%

   Capaian IKM belum mencapai 100% disebabkan masih adanya masyarakat yang menilai pelayanan belum optimal, baik dari sisi kecepatan layanan, keterjangkauan, maupun kualitas fasilitas pendukung selain itu penargetan dalam perencanaan yang tidak sesuai dengan menargetkan 100% tingkat kepuasan masyarakat.
3. Total Fertility Rate (TFR)
   - Tahun 2021: 61,90%
   - Tahun 2023: 55,24%
   - Tahun 2024: 97,62%

   Indikator ini belum mencapai target akibat masih adanya perbedaan perilaku ber-KB antarwilayah, keterbatasan akses pelayanan KB, serta belum meratanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengendalian kelahiran.
4. Indikator Sasaran – Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah
   - Tahun 2024: 94,35%

   Sama seperti indikator tujuan, capaian IKM ini dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan, meskipun secara umum telah menunjukkan tren positif.
5. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina
   - Tahun 2021: 20,67%

   Rendahnya capaian ini disebabkan keterbatasan sumber daya dalam melakukan pembinaan secara menyeluruh kepada seluruh PSKS yang ada, serta perlunya model pembinaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
6. Persentase PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB
   - Tahun 2021: 85,70%
   - Tahun 2022: 68,34%
   - Tahun 2024: 74,42%

   Belum tercapainya target disebabkan oleh adanya fluktuasi partisipasi PUS dalam program KB, dipengaruhi faktor sosial,

ekonomi, serta tingkat keberlanjutan usaha UPPKS yang berbeda antarwilayah.

Meskipun terdapat sejumlah indikator yang belum mencapai target 100% dan memerlukan strategi perbaikan di periode berikutnya, di sisi lain terdapat pula beberapa indikator yang justru melampaui target kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinsosdaldukkb tidak hanya menghadapi tantangan, tetapi juga memiliki capaian yang melampaui ekspektasi, sehingga menjadi modal positif untuk penguatan kebijakan dan perencanaan pada Renstra 2025–2029.

Selama periode 2021–2024, terdapat 9 indikator kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) yang capaian realisasinya melampaui 100%. Hal ini menunjukkan adanya pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak hanya memenuhi target, tetapi juga mampu memberikan hasil melebihi ekspektasi. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase Penurunan Kelompok Rumah Tangga 20% Berpenghasilan Terendah dari DTKS
   - Tahun 2024: 168,74%

     Capaian yang jauh melampaui target ini menunjukkan efektivitas program perlindungan sosial, meskipun dipengaruhi juga oleh penyesuaian data DTKS serta intervensi bantuan sosial yang semakin tepat sasaran.
2. Laju Pertumbuhan Penduduk
   - Tahun 2021: 184,61%
   - Tahun 2022: 230,76%
   - Tahun 2023: 496,15%
   - Tahun 2024: 326,92%

     Angka yang melampaui target dipengaruhi oleh faktor dinamika demografi, termasuk migrasi masuk dan perubahan struktur penduduk, sehingga realisasi lebih tinggi dari perkiraan awal.
3. Total Fertility Rate (TFR)
   - Tahun 2022: 127,14%

     Hal ini disebabkan peningkatan akses dan partisipasi masyarakat terhadap program KB yang melebihi proyeksi, serta meningkatnya kesadaran pengendalian kelahiran pada sebagian wilayah.
4. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina
   - Tahun 2022: 100,22%
   - Tahun 2023: 102,43%
   - Tahun 2024: 105,26%

     Melampauinya capaian ini menunjukkan optimalisasi pembinaan PSKS, termasuk keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial.
5. Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
   - Tahun 2021: 114,28%
   - Tahun 2023: 133,85%
   - Tahun 2024: 116,23%

     Capaian di atas target terjadi karena perluasan jangkauan penerima manfaat serta integrasi program perlindungan sosial lintas sektor yang lebih baik.
6. Age Specific Fertility Rate (ASFR)
   - Tahun 2022: 356,39%
   - Tahun 2023: 116,43%

- Tahun 2024: 111,11%
  Realisasi yang tinggi dipengaruhi oleh peningkatan cakupan data fertilitas pada kelompok usia tertentu, serta keberhasilan intervensi program dalam mengendalikan angka kelahiran.

7. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)
   - Tahun 2022: 130,97%
   - Tahun 2023: 118,22%
   - Tahun 2024: 103,09%
     Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran perempuan usia reproduksi untuk menggunakan kontrasepsi modern, didukung dengan ketersediaan layanan KB yang semakin mudah diakses.
8. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)
   - Tahun 2021: 160,32%
   - Tahun 2022: 141,43%
   - Tahun 2023: 127,50%
   - Tahun 2024: 222,06%
     Angka yang melampaui target ini mengindikasikan terjadinya dinamika permintaan layanan KB di masyarakat yang lebih besar dari perkiraan, sehingga mendorong realisasi lebih tinggi.
9. Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina
   - Tahun 2021: 103,11%
   - Tahun 2022: 102,49%
   - Tahun 2023: 124,24%
   - Tahun 2024: 110,84%
     Capaian ini dipengaruhi oleh tingginya partisipasi masyarakat dalam program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia, serta sinergi dengan kader dan mitra di tingkat desa/kelurahan.

Secara umum, capaian indikator yang melampaui target pada periode 2021–2024 menunjukkan bahwa program-program Dinsosdaldukkb telah berjalan dengan baik dan bahkan mampu menghasilkan output serta outcome lebih tinggi daripada yang direncanakan. Namun demikian, capaian di atas 100% juga mencerminkan adanya kebutuhan untuk menyempurnakan perumusan target agar lebih realistis dan sesuai dengan dinamika lapangan, sehingga pengukuran kinerja pada periode Renstra 2025–2029 dapat lebih akurat dan terukur.

Secara umum, potensi keberhasilan pelayanan perangkat daerah terletak pada indikator-indikator pelayanan dasar yang bersifat wajib (SPM), serta program-program keluarga dan kependudukan yang didukung oleh kebijakan nasional dan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, permasalahan masih dijumpai pada indikator yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan dinamika masyarakat, seperti kemiskinan, pola fertilitas, serta perilaku ber-KB. Oleh karena itu, strategi adaptif, penguatan data, serta pendekatan kultural dan pemberdayaan masyarakat menjadi faktor penting untuk menutup kesenjangan pelayanan yang masih ada.

Capaian kinerja tersebut tentu tidak terlepas dari dukungan pendanaan yang dialokasikan kepada Dinsosdaldukkb dalam periode 2020–2024. Untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas dukungan fiskal serta efektivitas pemanfaatannya, berikut disajikan data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.122.502.917,00	4.295.199.487,00					5.132.235.789,00	5.132.235.789,00					124,49	119,49	-	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.330.597.425,00	4.704.060.644,00	4.386.738.846,00				5.152.813.249,00	4.755.286.618,00	5.065.203.017,00		-	-	96,66	101,09	115,47
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		63.981.800,00	63.981.800,00						44.737.114,00					-	69,92	-	-	-
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				34.220.572,00	47.938.400,00	53.568.400,00				47.938.616,00	40.394.500,00	17.946.500,00		-	-	140,09	84,26	33,50
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		51.632.100,00	51.632.100,00					51.755.568,00	40.184.214,00					100,24	77,83	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.552.900,00	43.385.500,00	4.552.900,00				43.385.716,00	40.394.500,00	12.255.000,00		-	-	952,92	93,11	269,17
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12.349.700,00	12.349.700,00					12.349.700,00	4.552.900,00					100,00	36,87	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.552.900,00	4.552.900,00	4.552.900,00				4.552.900,00	4.552.900,00	463.400,00		-	-	100,00	100,00	10,18
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah												1.062.100,00		-	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.105.312.417,00	3.278.008.987,00						4.304.937.391,00					-	131,33	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.481.390.217,00	3.996.549.400,00	3.697.467.246,00				4.481.390.217,00	4.054.010.658,00	4.428.920.867,00		-	-	100,00	101,44	119,78
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.070.400.017,00	3.243.096.587,00					4.707.158.384,00	4.269.901.523,00					153,31	131,66	-	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.199.761.876,00	3.969.584.000,00	3.668.467.246,00				4.452.409.817,00	4.027.045.258,00	4.421.754.867,00		-	-	106,02	101,45	120,53

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		34.912.400,00	34.912.400,00					35.035.868,00	35.035.868,00					100,35	100,35	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12.166.000,00	26.965.400,00	29.000.000,00				28.980.400,00	26.965.400,00	7.166.000,00		-	-	238,21	100,00	24,71
Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD												1.240.000,00		-	-	-	-	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												1.240.000,00		-	-	-	-	-
Adminisrasi Kepegawaian perangkat Daerah				181.007.300,00	221.481.028,00					181.317.400,00	217.337.700,00	1.274.000,00		-	-	100,17	98,13	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		6.049.000,00	6.049.000,00					6.049.000,00	6.041.500,00			1.274.000,00		100,00	99,88	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah		270.917.100,00	270.917.100,00						210.423.400,00					-	77,67	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah				181.007.300,00	221.481.028,00	192.394.200,00				181.317.400,00	217.337.700,00	123.115.200,00		-	-	100,17	98,13	63,99
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6.049.000,00	6.049.000,00					6.049.000,00	6.041.500,00					100,00	99,88	-	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.014.100,00	6.014.100,00	6.500.000,00				6.014.100,00	6.008.000,00	5.371.100,00		-	-	100,00	99,90	82,63
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		26.621.300,00	26.621.300,00					26.621.300,00	19.552.500,00					100,00	73,45	-	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.613.800,00	25.613.800,00	25.613.800,00				25.613.800,00	25.613.700,00	16.476.100,00		-	-	100,00	100,00	64,33
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		95.151.200,00	95.151.200,00					81.568.400,00	88.750.800,00					85,73	93,27	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				69.066.800,00	81.130.800,00	95.151.200,00				81.130.800,00	73.755.500,00	46.754.400,00		-	-	117,47	90,91	49,14
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		15.597.600,00	15.597.600,00					16.169.200,00	15.597.600,00					103,66	100,00	-	-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.278.600,00	11.278.600,00	11.279.000,00				11.278.600,00	11.278.600,00	11.328.400,00		-	-	100,00	100,00	100,44
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.252.000,00	3.252.000,00					32.352.000,00	800.000,00					994,83	24,60	-	-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.252.000,00	3.253.000,00				3.252.000,00	3.252.000,00			-	-	-	100,00	-
Penyediaan Bahan/Material		17.930.000,00	17.930.000,00					17.930.000,00	15.930.000,00					100,00	88,85	-	-	-
Penyediaan Bahan/Material				17.930.000,00	12.658.100,00	12.659.000,00				12.658.100,00	12.658.100,00	6.693.000,00		-	-	70,60	100,00	52,87
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		106.316.000,00	106.316.000,00					106.316.000,00	63.751.000,00					100,00	59,96	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51.104.000,00	84.785.628,00	41.190.000,00				41.190.000,00	84.771.800,00	33.857.000,00		-	-	80,60	99,98	82,20
Fasilitasi Kunjungan Tamu												1.800.000,00		-	-	-	-	-
Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD												835.200,00		-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		247.083.000,00	247.083.000,00					282.033.552,00	282.451.584,00					114,15	114,31	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				281.767.236,00	266.062.916,00	166.170.000,00				266.062.916,00	266.061.960,00	266.703.650,00		-	-	94,43	100,00	160,50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		71.370.000,00	71.370.000,00					76.120.200,00	76.054.992,00					106,66	106,56	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				76.873.836,00	61.169.516,00	61.170.000,00				61.169.516,00	61.168.760,00	87.639.650,00		-	-	79,57	100,00	143,27
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		175.713.000,00	175.713.000,00					205.913.352,00	206.396.592,00					117,19	117,46	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				204.893.400,00	204.893.400,00	205.000.000,00				204.893.400,00	204.893.200,00	179.064.000,00		-	-	100,00	100,00	87,35
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah		218.336.000,00	218.336.000,00					216.665.000,00	91.880.600,00					99,23	42,08	-	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah				21.809.600,00						-				-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		218.336.000,00	218.336.000,00					216.665.000,00	22.372.500,00	-				99,23	10,25	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.809.600,00						-				-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			69.508.100,00						69.508.100,00	-				-	100,00	-	-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		216.872.600,00	216.872.600,00					188.907.600,00	197.805.700,00					87,11	91,21	-	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				352.212.100,00	172.928.900,00	177.139.000,00				176.284.100,00	172.928.900,00	226.001.800,00		-	-	50,05	100,00	127,58
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		141.428.000,00	141.428.000,00					120.570.000,00	142.025.100,00					85,25	100,42	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				152.035.200,00	113.800.000,00	118.000.000,00				117.155.200,00	113.800.000,00	39.950.000,00		-	-	77,06	100,00	33,86
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												93.460.000,00		-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar												37.110.000,00		-	-	-	-	-
Pemeliharaan Mebel												4.755.000,00		-	-	-	-	-
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		10.478.000,00	10.478.000,00					10.784.000,00	7.992.000,00					102,92	76,27	-	-	-
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12.980.000,00	10.060.000,00	10.000.000,00				10.060.000,00	10.060.000,00	8.560.000,00		-	-	77,50	100,00	85,60
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		15.357.000,00	15.357.000,00					49.607.200,00	39.844.600,00					323,03	259,46	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				179.266.900,00	41.138.900,00	41.139.900,00				41.138.900,00	41.138.900,00	35.456.800,00		-	-	22,95	100,00	86,19
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		49.609.600,00	49.609.600,00					7.934.000,00	7.944.000,00					15,99	16,01	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.930.000,00	7.930.000,00	8.000.000,00				7.930.000,00	7.930.000,00	6.710.000,00		-	-	100,00	100,00	83,88

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.957.692.000,00	2.107.000.000,00	4.825.684.700,00	6.396.653.900,00	8.109.700.000,00		6.311.129.304,00	3.454.259.828,00	4.625.270.728,00	6.815.472.700,00	7.138.273.600,00		213,38	163,94	95,85	106,55	88,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		2.957.692.000,00	2.107.000.000,00	4.825.684.700,00	6.396.653.900,00	8.109.700.000,00		6.311.129.304,00	3.454.259.828,00	4.625.270.728,00	6.815.472.700,00	7.138.273.600,00		213,38	163,94	95,85	106,55	88,02
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		69.000.000,00	50.000.000,00	26.389.200,00	37.248.000,00	36.200.000,00		68.950.100,00	69.151.100,00	30.639.200,00	37.247.300,00	16.738.400,00		99,93	138,30	116,11	100,00	46,24
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	1.689.000,00	2.000.000,00	4.999.700,00	1.768.200,00		100,00	84,45	100,00	99,99	88,41
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00	1.689.000,00					100,00	84,45	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				2.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00	4.999.700,00	1.768.200,00		-	-	100,00	99,99	88,41
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		67.000.000,00	48.000.000,00	24.389.200,00	32.248.000,00	34.200.000,00		66.950.100,00	67.462.100,00	28.639.200,00	32.247.600,00	14.970.200,00		99,93	140,55	117,43	100,00	43,77
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		20.000.000,00	20.000.000,00					20.000.000,00	14.530.000,00					100,00	72,65	-	-	-
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				8.281.200,00	15.140.000,00	17.000.000,00				11.531.200,00	15.139.700,00	7.643.400,00		-	-	139,25	100,00	44,96
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		47.000.000,00	28.000.000,00					46.950.100,00	52.932.100,00					99,89	189,04	-	-	-
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				16.108.000,00	17.108.000,00	17.200.000,00				17.108.000,00	17.107.900,00	7.326.800,00		-	-	106,21	100,00	42,60

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00		4.880.100,00	7.456.200,00	4.000.000,00	4.000.000,00	783.800,00		97,60	186,41	100,00	100,00	15,68
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00		4.880.100,00	7.456.200,00	4.000.000,00	4.000.000,00	783.800,00		97,60	186,41	100,00	100,00	15,68
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		5.000.000,00	4.000.000,00					4.880.100,00	7.456.200,00					97,60	186,41	-	-	-
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00	4.000.000,00	783.800,00		-	-	100,00	100,00	19,60
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		782.692.000,00	589.000.000,00	252.963.100,00	316.670.400,00	332.500.000,00		339.303.896,00	368.155.304,00	329.748.100,00	302.269.400,00	266.769.600,00		43,35	62,51	130,35	95,45	80,23
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		471.000.000,00	342.000.000,00	143.515.300,00	181.465.000,00	153.500.000,00		329.303.896,00	363.920.904,00	151.465.300,00	181.464.000,00	193.094.100,00		69,92	106,41	105,54	100,00	125,79
Penyediaan Sandang		12.500.000,00	10.000.000,00					12.496.400,00	7.704.900,00					99,97	77,05	-	-	-
Penyediaan Alat Bantu		65.700.000,00	40.000.000,00					65.690.400,00	72.513.800,00					99,99	181,28	-	-	-
Penyediaan Alat Bantu						47.000.000,00						40.125.000,00		-	-	-	-	85,37
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		62.900.000,00	30.000.000,00					62.939.468,00	39.438.068,00					100,06	131,46	-	-	-
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				69.465.300,00	99.465.000,00	70.000.000,00				69.465.300,00	99.465.000,00	97.201.000,00		-	-	100,00	100,00	138,86
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,		9.908.000,00	7.000.000,00					9.726.500,00	5.929.400,00					98,17	84,71	-	-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				7.000.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00				7.000.000,00	7.000.000,00	1.968.500,00		-	-	100,00	100,00	26,25
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		10.000.000,00	5.000.000,00					10.000.000,00	4.234.400,00					100,00	84,69	-	-	-
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00				5.000.000,00	4.999.000,00	1.012.500,00		-	-	100,00	99,98	16,88
Pemberian Layanan Rujukan		8.300.000,00	50.000.000,00					40.050.000,00	49.125.736,00					482,53	98,25	-	-	-
Pemberian Layanan Rujukan				62.050.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00				70.000.000,00	70.000.000,00	53.799.600,00		-	-	112,81	100,00	76,86
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		311.692.000,00	247.000.000,00	109.447.800,00	135.205.400,00	179.000.000,00		138.401.128,00	189.209.000,00	178.282.800,00	120.805.400,00	73.675.500,00		44,40	76,60	162,89	89,35	41,16
Penyediaan Permakanan		311.692.000,00	247.000.000,00					138.401.128,00	189.209.000,00					44,40	76,60	-	-	-
Penyediaan Permakanan				109.447.800,00	135.205.400,00	179.000.000,00				178.282.800,00	12.805.400,00	73.675.500,00		-	-	162,89	9,47	41,16
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		1.759.000.000,00	1.218.000.000,00	4.297.789.300,00	5.770.426.500,00	7.598.500.000,00		3.517.618.340,00	2.595.017.708,00	4.005.651.500,00	6.203.647.200,00	6.611.855.600,00		199,98	213,06	93,20	107,51	87,02
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		518.200.000,00	260.000.000,00	350.000.000,00	300.000.000,00	310.000.000,00		518.285.536,00	393.729.000,00	300.000.000,00	392.700.000,00	390.794.500,00		100,02	151,43	85,71	130,90	126,06
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		465.000.000,00	260.000.000,00					464.929.600,00	393.729.000,00					99,98	151,43	-	-	-
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar				350.000.000,00	300.000.000,00	310.000.000,00				300.000.000,00	392.700.000,00	390.794.500,00		-	-	85,71	130,90	126,06

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Rujukan Anak-Anak Terlantar		53.200.000,00						53.355.936,00						100,29	-	-	-	-
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1.240.800.000,00	958.000.000,00	3.947.789.300,00	5.470.426.500,00	7.288.500.000,00		2.999.332.804,00	2.201.288.708,00	3.705.651.500,00	5.810.947.200,00	6.221.061.100,00		241,73	229,78	93,87	106,22	85,35
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		339.800.000,00	250.000.000,00					339.996.936,00	435.990.408,00					100,06	174,40	-	-	-
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				339.152.800,00	339.152.800,00	185.000.000,00				339.152.800,00	339.152.800,00	157.981.000,00		-	-	100,00	100,00	85,40
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		8.900.000,00	8.000.000,00					8.639.000,00	3.621.500,00					97,07	45,27	-	-	-
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				5.700.800,00	8.000.800,00	8.500.000,00				8.000.800,00	8.000.800,00	4.337.000,00		-	-	140,35	100,00	51,02
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		421.500.000,00	400.000.000,00					2.284.621.500,00	729.665.200,00					542,02	182,42	-	-	-
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				1.217.624.800,00	1.287.609.200,00	4.450.000.000,00				982.834.200,00	1.558.380.000,00	4.645.015.200,00		-	-	80,72	121,03	104,38
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		470.600.000,00	300.000.000,00					366.075.368,00	1.032.011.600,00					77,79	344,00	-	-	-
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				2.385.310.900,00	3.835.663.700,00	2.645.000.000,00				2.375.663.700,00	3.905.413.600,00	1.413.727.900,00		-	-	99,60	101,82	53,45
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		218.000.000,00	157.000.000,00	175.572.100,00	178.317.100,00	58.500.000,00		2.202.818.600,00	337.266.400,00	165.239.800,00	178.316.900,00	172.079.200,00		1.010,47	214,82	94,12	100,00	294,15
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		160.095.000,00	130.000.000,00	148.331.100,00	151.076.100,00	29.500.000,00		2.145.367.800,00	288.605.900,00	137.998.800,00	151.075.900,00	120.473.400,00		1.340,06	222,00	93,03	100,00	408,38
Penyediaan Makanan		84.999.000,00	80.000.000,00					172.791.800,00	225.000.000,00					203,29	281,25	-	-	-
Penyediaan Makanan				91.656.100,00	93.076.100,00					79.998.800,00	93.076.100,00	72.674.100,00		-	-	87,28	100,00	-
Penyediaan Sandang		34.910.000,00	30.000.000,00					34.910.000,00	29.568.400,00					100,00	98,56	-	-	-
Penyediaan Sandang				30.000.000,00	30.000.000,00					30.000.000,00	30.000.000,00	29.562.400,00		-	-	100,00	100,00	-
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		22.986.000,00	10.000.000,00					1.920.466.000,00	19.469.300,00					8.354,94	194,69	-	-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.500,00				18.000.000,00	18.000.000,00	13.214.100,00		-	-	100,00	100,00	73,41
Pelayanan Dukungan Psikososial		17.200.000,00	10.000.000,00					17.200.000,00	14.568.200,00					100,00	145,68	-	-	-
Pelayanan Dukungan Psikososial				8.675.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00				10.000.000,00	99.998.000,00	5.022.800,00		-	-	115,27	999,98	45,66
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		57.905.000,00	27.000.000,00	27.241.000,00	27.241.000,00	29.000.000,00		57.450.800,00	48.660.500,00	27.241.000,00	27.241.000,00	51.605.800,00		99,22	180,22	100,00	100,00	177,95
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		23.557.600,00	15.000.000,00					23.557.600,00	19.953.000,00					100,00	133,02	-	-	-
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				9.257.000,00	9.257.000,00	11.000.000,00				9.257.000,00	9.257.000,00	39.515.100,00		-	-	100,00	100,00	359,23
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		34.347.400,00	12.000.000,00					33.893.200,00	28.707.500,00					98,68	239,23	-	-	-
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				17.984.000,00	17.984.000,00	18.000.000,00				17.984.000,00	17.984.000,00	12.090.700,00		-	-	100,00	100,00	67,17
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		124.000.000,00	89.000.000,00	68.971.000,00	89.991.900,00	79.000.000,00		177.558.268,00	77.213.116,00	89.992.128,00	89.991.900,00	70.047.000,00		143,19	86,76	130,48	100,00	88,67
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		124.000.000,00	89.000.000,00	68.971.000,00	89.991.900,00	79.000.000,00		177.558.268,00	77.213.116,00	89.992.128,00	89.991.900,00	70.047.000,00		143,19	86,76	130,48	100,00	88,67
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		57.193.900,00	50.000.000,00					73.235.100,00	42.350.000,00					128,05	84,70	-	-	-
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				32.651.300,00	42.014.300,00	42.500.000,00				42.014.300,00	42.014.300,00	32.028.800,00		-	-	128,68	100,00	75,36
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		43.694.100,00	15.888.000,00					92.601.000,00	33.687.700,00					211,93	212,03	-	-	-
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				36.320.200,00	47.977.600,00	36.500.000,00				36.320.200,00	47.977.600,00	27.972.200,00		-	-	100,00	100,00	76,64
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		23.112.000,00	23.112.000,00					11.679.468,00	1.175.416,00	11.657.628,00				50,53	5,09	-	-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota												10.046.000,00		-	-	-	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		7.899.957.000,00	5.708.111.000,00	10.057.793.900,00	10.102.777.800,00	10.105.103.300,00		11.831.933.404,00	12.788.790.604,00	10.102.777.800,00	14.438.033.800,00	14.338.418.000,00		149,77	224,05	100,45	142,91	141,89
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		7.899.957.000,00	5.708.111.000,00	10.057.793.900,00	10.102.777.800,00	10.105.103.300,00		11.831.933.404,00	12.788.790.604,00	10.102.777.800,00	14.438.033.800,00	14.338.418.000,00		149,77	224,05	100,45	142,91	141,89
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		188.200.000,00	153.200.000,00	647.124.400,00	658.272.800,00	658.320.000,00		2.283.955.400,00	555.320.300,00	658.272.800,00	673.222.800,00	716.769.800,00		1.213,58	362,48	101,72	102,27	108,88
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		93.300.000,00	58.300.000,00	11.278.400,00	20.602.800,00	20.650.000,00		93.121.400,00	11.573.100,00	20.602.800,00	17.952.800,00	42.841.800,00		99,81	19,85	182,67	87,14	207,47
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		93.300.000,00	58.300.000,00					93.121.400,00	11.573.100,00					99,81	19,85	-	-	-
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				11.278.400,00	20.602.800,00	20.650.000,00				20.602.800,00	17.952.800,00	13.783.100,00		-	-	182,67	87,14	66,75
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal												29.058.700,00		-	-	-	-	-
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		94.900.000,00	94.900.000,00	635.846.000,00	637.670.000,00	637.670.000,00		190.834.000,00	543.747.200,00	637.670.000,00	655.270.000,00	673.928.000,00		201,09	572,97	100,29	102,76	105,69

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		64.200.000,00	64.200.000,00					60.000.000,00	64.200.000,00					93,46	100,00	-	-	-
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00				60.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00		-	-	100,00	133,33	133,33
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		30.700.000,00	30.700.000,00					54.034.000,00	23.547.200,00					176,01	76,70	-	-	-
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				19.046.000,00	20.870.000,00	20.870.000,00				20.870.000,00	20.870.000,00	5.074.800,00		-	-	109,58	100,00	24,32
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				364.800.000,00	364.800.000,00	364.800.000,00			360.000.000,00	364.800.000,00	362.400.000,00	362.400.000,00		-	-	100,00	99,34	99,34
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				192.000.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00		76.800.000,00	96.000.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00		-	-	100,00	100,00	100,00
Pembentukan dan Opperasional rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain												34.453.200,00		-	-	-	-	-
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		6.617.000.000,00	4.755.136.000,00	5.302.874.500,00	5.302.874.500,00	5.304.849.400,00		5.819.988.536,00	8.052.889.436,00	5.302.874.500,00	9.459.290.500,00	9.339.911.400,00		87,96	169,35	100,00	178,38	176,06
Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		1.711.261.200,00	1.555.000.000,00	1.650.107.300,00	1.650.107.300,00	1.651.600.000,00		1.163.488.468,00	1.421.912.368,00	1.650.107.300,00	1.643.255.300,00	1.555.869.600,00		67,99	91,44	100,00	99,58	94,20
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		11.692.700,00	15.000.000,00					15.125.000,00	128.124.400,00					129,35	854,16	-	-	-
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal		118.334.200,00	120.000.000,00					140.123.468,00	85.387.968,00		110.022.900,00			118,41	71,16	-	-	-
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK		197.475.600,00	190.000.000,00											-	-	-	-	-
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik		150.000.000,00	150.000.000,00					70.640.000,00	150.000.000,00					47,09	100,00	-	-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
serta Media Luar Ruang																		
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00				150.000.000,00		124.999.000,00		-	-	100,00	-	83,33
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		1.153.758.700,00	1.000.000.000,00					648.000.000,00	770.400.000,00					56,16	77,04	-	-	-
Pengendalian Program KKBPK		80.000.000,00	80.000.000,00					40.000.000,00	80.000.000,00					50,00	100,00	-	-	-
Pengendalian Program KKBPK				80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00				80.000.000,00	18.360.000,00	15.420.000,00		-	-	100,00	22,95	19,28
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				793.600.000,00	793.600.000,00	793.600.000,00				793.600.000,00	908.320.000,00	908.320.000,00		-	-	100,00	114,46	114,46
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00		249.600.000,00	208.000.000,00	240.000.000,00	361.120.000,00	361.120.000,00		-	-	100,00	150,47	150,47
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				128.382.900,00	128.382.900,00	129.000.000,00				128.382.900,00	125.008.000,00	33.710.600,00		-	-	100,00	97,37	26,13
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				258.124.400,00	258.124.400,00	259.000.000,00				258.124.400,00	120.424.400,00	112.300.000,00		-	-	100,00	46,65	43,36
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		2.392.000.000,00	1.275.000.000,00	1.497.517.800,00	1.497.517.800,00	1.498.000.000,00		2.390.250.000,00	1.397.250.600,00	1.497.517.800,00	3.967.517.800,00	3.952.000.000,00		99,93	109,59	100,00	264,94	263,82
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga		20.800.000,00	25.000.000,00					19.050.000,00	23.250.600,00					91,59	93,00	-	-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Berencana (PKB/PLKB)																		
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		2.371.200.000,00	1.250.000.000,00	1.482.000.000,00	1.482.000.000,00	1.482.000.000,00		2.371.200.000,00	988.000.000,00	1.482.000.000,00	3.952.000.000,00	3.952.000.000,00		100,00	79,04	100,00	266,67	266,67
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB									386.000.000,00					-	-	-	-	-
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					15.517.800,00	15.517.800,00				14.417.800,00	15.517.800,00			-	-	-	100,00	-
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		1.723.602.800,00	1.135.000.000,00	1.505.999.400,00	1.505.999.400,00	1.505.999.400,00		1.559.000.068,00	4.589.226.468,00	1.505.999.400,00	3.604.375.400,00	3.585.451.800,00		90,45	404,34	100,00	239,33	238,08
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		122.932.000,00	130.000.000,00					23.850.000,00	47.700.000,00					19,40	36,69	-	-	-
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				51.300.000,00	51.300.000,00	51.300.000,00				51.300.000,00	50.265.000,00	50.265.000,00		-	-	100,00	97,98	97,98
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		1.598.060.600,00	1.000.000.000,00					1.513.339.868,00	1.488.533.468,00					94,70	148,85	-	-	-
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1.419.999.400,00	1.419.999.400,00	1.419.999.400,00				1.419.999.400,00	1.297.754.400,00	1.277.558.800,00		-	-	100,00	91,39	89,97

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			3.023.430.000,00						3.023.430.000,00					-	100,00	-	-	-
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB					2.030.000.000,00	2.030.000.000,00					2.217.341.000,00	2.217.341.000,00		-	-	-	109,23	109,23
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			90.300.000,00					19.200.000,00	26.700.000,00					-	29,57	-	-	-
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya				34.700.000,00	34.700.000,00	34.700.000,00				34.700.000,00	39.015.000,00	39.015.000,00		-	-	100,00	112,44	112,44
Peningkatan Kesertaan KB Pria		2.610.200,00	5.000.000,00					2.610.200,00	2.863.000,00					100,00	57,26	-	-	-
Peningkatan Kesertaan KB Pria					5.000.000,00	5.000.000,00						1.272.000,00		-	-	-	-	25,44
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		790.136.000,00	790.136.000,00	649.250.000,00	649.250.000,00	649.250.000,00		707.250.000,00	644.500.000,00	649.250.000,00	244.142.000,00	246.590.000,00		89,51	81,57	100,00	37,60	37,98
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00			9.000.000,00	3.750.000,00		2.448.000,00		-	-	100,00	-	65,28
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		790.136.000,00	790.136.000,00					707.250.000,00	635.500.000,00					89,51	80,43	-	-	-
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB				645.500.000,00	645.500.000,00	645.500.000,00				645.500.000,00	244.142.000,00	244.142.000,00		-	-	100,00	37,82	37,82
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		1.094.757.000,00	799.775.000,00	4.107.795.000,00	4.141.630.500,00	4.141.933.900,00		3.727.989.468,00	4.180.580.868,00	4.141.630.500,00	4.305.520.500,00	4.281.736.800,00		340,53	522,72	100,82	103,96	103,38
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan		958.341.600,00	663.341.600,00	336.602.400,00	336.093.900,00	336.093.900,00		3.632.712.400,00	4.120.710.600,00	366.093.900,00	352.083.900,00	300.471.400,00		379,06	621,20	108,76	104,76	89,40

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
dan Kesejahteraan Keluarga																		
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		330.000.000,00	330.000.000,00					339.600.000,00	360.000.000,00					102,91	109,09	-	-	-
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00				300.000.000,00	286.000.000,00	286.000.000,00		-	-	100,00	95,33	95,33
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		594.329.200,00	299.329.200,00					3.259.100.000,00	3.745.500.000,00					548,37	1.251,30	-	-	-
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		340.124.000,00	340.124.000,00					34.012.400,00	15.210.600,00					10,00	4,47	-	-	-
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				7.313.800,00	32.176.500,00	32.176.500,00				32.176.500,00	32.176.500,00	4.881.400,00		-	-	439,94	100,00	15,17
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanann Keluarga Sejahtera (PPKS)				9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00				9.600.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00		-	-	100,00	99,90	99,90
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,				19.688.600,00	24.317.400,00	24.317.400,00				24.317.400,00	24.317.400,00			-	-	123,51	100,00	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)														-	-	-	-	-
Penyediaan dan Pengembangan Materi Ibangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														-	-	-	-	-
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		136.433.400,00	136.433.400,00	3.771.192.600,00	3.775.536.600,00	3.775.900.000,00		95.277.068,00	59.870.268,00	3.775.536.600,00	3.953.436.600,00	3.981.265.400,00		69,83	43,88	100,12	104,71	105,44
Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		96.568.400,00	96.568.400,00											-	-	-	-	-
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan		39.775.000,00	39.775.000,00					95.277.068,00	59.870.268,00					239,54	150,52	-	-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				35.292.600,00	35.292.600,00	40.000.000,00				39.636.600,00	39.636.600,00			-	-	112,31	112,31	-
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS/Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,Baduta/Balita)				1.779.000.000,00	1.779.000.000,00	1.779.000.000,00				1.779.000.000,00	1.779.000.000,00	1.846.465.400,00		-	-	100,00	100,00	103,79
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS/Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,Baduta/Balita)				1.956.900.000,00	1.956.900.000,00	1.956.900.000,00				1.956.900.000,00	2.134.800.000,00	2.134.800.000,00		-	-	100,00	109,09	109,09

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinsosdaldukkb, dapat diketahui bahwa terdapat variasi capaian rasio antara tahun ke tahun. Rasio anggaran Renstra Perangkat Daerah dari kolom 14 sampai dengan kolom 19 merupakan perbandingan realisasi anggaran renstra perangkat daerah yang ditetapkan di bandingkan dengan anggaran renstra perangkat daerah. Rasio yang terjadi diantara tahun 2022-2026 sangat beragam yang tidak dapat di generalkan dimana masing-masing sub kegiatan mempunyai kondisi yang berbeda-beda.

Pada sub kegiatan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (penyusunan dokumen, evaluasi kinerja, serta koordinasi dan penyusunan laporan SKPD), penetapan pagu tahun 2022 relatif sesuai dengan rencana. Namun sejak tahun 2023–2025 terjadi penurunan alokasi dibandingkan rencana awal akibat keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan realokasi anggaran untuk mendukung program prioritas lain. Selanjutnya pada tahun 2026, terjadi pengurangan yang lebih signifikan seiring dengan penghapusan pembiayaan non-ASN serta penyesuaian arah belanja pada kegiatan yang lebih langsung mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Untuk sub kegiatan administrasi kelembagaan, seperti validata statistik, penatausahaan barang milik daerah, pengelolaan arsip, maupun kepegawaian, belum terdapat alokasi pada tahun 2022–2025. Baru pada tahun 2026 kegiatan tersebut memperoleh alokasi dengan jumlah terbatas, seiring dengan kebutuhan administratif dan penyesuaian regulasi yang menuntut adanya dukungan anggaran, meskipun masih dalam skala dasar.

Pada sub kegiatan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan ASN, realisasi penetapan pagu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rencana awal. Hal ini terjadi bukan karena pembengkakan anggaran, melainkan dipengaruhi oleh faktor struktural berupa kenaikan gaji berkala, penambahan komponen tunjangan, serta adanya formasi ASN baru yang tidak sepenuhnya dapat diproyeksikan pada saat penyusunan Renstra.

Sementara itu, pada sub kegiatan belanja operasional perkantoran (penyediaan listrik, logistik, bahan cetakan, komunikasi, hingga rapat koordinasi), terjadi fluktuasi antara rencana dan realisasi. Beberapa tahun penetapan lebih rendah dari rencana awal sebagai upaya efisiensi, sementara pada tahun tertentu justru lebih tinggi untuk menyesuaikan kebutuhan operasional, seperti peningkatan kebutuhan logistik pada tahun 2024. Pada tahun 2026, tren penurunan lebih dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi, digitalisasi tata kelola administrasi, serta pembatasan belanja non-esensial.

Pada sub kegiatan pengadaan dan pemeliharaan aset (peralatan, mesin, sarana prasarana, serta gedung kantor), sebagian alokasi ditiadakan setelah tahun 2024 karena dianggap telah selesai siklus pengadaannya. Namun, untuk kegiatan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana, penetapan anggaran masih lebih rendah dibandingkan kebutuhan riil, sehingga terdapat keterbatasan dalam menjaga kondisi optimal fasilitas, khususnya balai KB. Faktor yang memengaruhi antara lain rasionalisasi aset, keterbatasan sumber daya teknis dalam pemeliharaan, serta pengalihan anggaran pada program yang lebih strategis.

Pada sub kegiatan koordinasi perizinan undian berhadiah serta pengumpulan uang atau barang, alokasi relatif stabil dan mendekati rencana, meskipun terdapat sedikit penyesuaian di beberapa tahun. Sementara itu, pada sub kegiatan peningkatan kemampuan pekerja sosial masyarakat dan penguatan LK3, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Perbedaan antara rencana dan realisasi dipengaruhi oleh kebutuhan program yang lebih besar pada tahun tertentu serta keterbatasan fiskal pada tahun lainnya.

Sub kegiatan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan menunjukkan alokasi yang pada dasarnya stabil, namun di tahun tertentu lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan mendesak, dan pada tahun lainnya justru lebih rendah akibat keterbatasan anggaran. Hal serupa juga terlihat pada sub kegiatan penyediaan sandang yang pada awal Renstra mendapat alokasi, namun pada tahun-tahun berikutnya tidak lagi dianggarkan karena adanya penyesuaian prioritas.

Pada sub kegiatan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, tren anggaran cenderung meningkat dengan dukungan fiskal yang lebih besar pada tahun-tahun tertentu untuk memperluas cakupan layanan. Sub kegiatan penyediaan alat bantu dan bimbingan sosial bagi kelompok rentan juga mengalami dinamika, dengan beberapa tahun lebih tinggi dari rencana untuk mengakomodasi kebutuhan riil, serta tahun lainnya lebih rendah karena pengetatan belanja.

Sementara itu, pada sub kegiatan fasilitasi dokumen kependudukan dan pemberian layanan rujukan, anggaran menunjukkan kecenderungan mengikuti arah prioritas pelayanan. Pada tahun tertentu, alokasi lebih tinggi untuk mendukung kebutuhan strategis, sementara pada tahun lainnya mengalami penurunan signifikan sebagai bentuk efisiensi.

Berbagai sub kegiatan di bidang sosial menunjukkan dinamika antara rencana anggaran dengan realisasi penetapan pagu. Pada sub kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar, alokasi anggaran berfluktuasi dengan kisaran Rp260.000.000–Rp465.000.000. Realisasi pagu pada umumnya mendekati rencana, meskipun terdapat kondisi khusus seperti tahun 2023 yang lebih tinggi dari rencana, serta tahun 2024 yang justru lebih rendah. Demikian pula pada sub kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar, alokasi anggaran hanya diberikan pada tahun 2022 dengan realisasi hampir sama dengan rencana, sedangkan tahun 2023–2026 tidak lagi direncanakan karena menyesuaikan kebutuhan prioritas.

Sub kegiatan terkait pendataan dan pengelolaan data fakir miskin juga memperlihatkan pola penyesuaian anggaran yang signifikan. Pada sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin, alokasi berkisar Rp185.000.000–Rp339.800.000, dengan realisasi tertentu yang jauh lebih tinggi dari rencana, khususnya pada tahun 2023. Sebaliknya, pada sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin yang memiliki alokasi lebih kecil, terdapat penyesuaian yang cukup besar pada tahun-tahun tertentu, baik berupa kenaikan maupun penurunan, menyesuaikan prioritas program serta kapasitas fiskal daerah.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat memiliki alokasi yang relatif besar

dengan tren meningkat. Realisasi pagu dalam beberapa tahun menunjukkan lonjakan signifikan, seperti pada tahun 2022 dan 2023, sekaligus penurunan pada tahun-tahun tertentu. Sementara itu, sub kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar melalui Penyediaan Makanan dan Penyediaan Sandang berjalan dengan pola penganggaran yang relatif stabil, meskipun terdapat lonjakan signifikan pada tahun 2022 dan 2023 untuk kebutuhan mendesak, serta penyesuaian efisiensi pada tahun-tahun selanjutnya.

Selanjutnya, beberapa sub kegiatan lain yang bersifat khusus dan berhubungan dengan pelayanan sosial maupun nilai kepahlawanan juga memperlihatkan dinamika anggaran. Pada Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, alokasi tahun 2022 jauh melampaui rencana, sedangkan pada tahun berikutnya lebih seimbang. Demikian pula pada Pelayanan Dukungan Psikososial, Kampung Siaga Bencana, dan Taruna Siaga Bencana, alokasi anggaran mengalami fluktuasi sesuai arah kebijakan dan kebutuhan penguatan kapasitas. Sementara itu, pada sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, meskipun sebagian besar mendekati rencana, terdapat tahun-tahun dengan kebutuhan tambahan yang cukup besar. Khusus pada sub kegiatan Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, tidak terdapat rencana maupun penetapan anggaran pada periode 2022–2025. Namun, pada tahun 2026 mulai dialokasikan sebesar Rp10.046.000 sebagai langkah awal dalam fasilitasi kegiatan ziarah dan studi sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian nilai kepahlawanan.

Pelaksanaan program pembangunan kependudukan dan keluarga dalam Renstra menunjukkan adanya perbedaan antara rencana dan penetapan pagu pada sejumlah sub kegiatan. Beberapa kegiatan, seperti penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan serta pembinaan dan pengawasan sistem informasi keluarga, sebagian besar berjalan sesuai rencana, namun mengalami penyesuaian karena perubahan prioritas dan ketersediaan anggaran. Penyesuaian tersebut merupakan bentuk fleksibilitas pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program dengan tetap memperhatikan kondisi fiskal.

Sub kegiatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas pendidikan dan penyediaan data kependudukan, antara lain advokasi pendidikan kependudukan, penyediaan data dan informasi keluarga, serta pencatatan dan pengumpulan data keluarga, menunjukkan arah kebijakan yang konsisten. Beberapa kegiatan baru juga mulai dialokasikan dalam periode Renstra ini, seperti operasional rumah data kependudukan di Kampung KB, yang diarahkan untuk memperkuat integrasi Program Bangga Kencana di tingkat masyarakat. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat basis data serta pendidikan kependudukan secara berkelanjutan.

Pada aspek ketahanan dan kesejahteraan keluarga, beberapa sub kegiatan seperti pengadaan sarana kelompok kegiatan, penyediaan biaya operasional, dan promosi kelompok kegiatan mengalami fluktuasi alokasi anggaran. Sebagian kegiatan memperoleh peningkatan dukungan untuk memperluas jangkauan, sementara kegiatan lain disesuaikan atau tidak dialokasikan pada periode tertentu. Strategi pengelolaan ini menunjukkan adanya upaya penyeimbangan antara

efektivitas penggunaan anggaran dan pemenuhan prioritas pembangunan keluarga.

Selain itu, terdapat pula kegiatan baru yang diarahkan untuk menjawab tantangan aktual, seperti pemantauan data serta pendampingan keluarga berisiko stunting. Sub kegiatan ini telah direncanakan dengan alokasi anggaran yang cukup signifikan dan terus diperkuat sesuai kebutuhan. Dukungan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan stunting melalui pendekatan berbasis data, pendampingan intensif, serta pelibatan langsung masyarakat.

Pelaksanaan sub kegiatan program KKBPK dan Bangga Kencana dalam periode Renstra menunjukkan adanya variasi antara rencana dan penetapan pagu anggaran. Beberapa kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) telah dilaksanakan secara konsisten sejak awal periode, baik melalui pendekatan langsung kepada pemangku kepentingan maupun dengan memanfaatkan media massa, budaya lokal, serta sarana penyuluhan. Mulai tahun 2026, kegiatan advokasi diperkuat dengan tambahan dukungan fasilitasi agar jangkauannya lebih luas dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pada aspek pengelolaan operasional, sejumlah sub kegiatan seperti operasional Balai Penyuluhan dan pelaksanaan mekanisme koordinasi di tingkat kecamatan serta desa telah berjalan sejak tahun 2024. Kegiatan ini terus mendapatkan alokasi pada tahun-tahun berikutnya sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program di lini lapangan. Penambahan dukungan operasional mulai tahun 2026 menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kesinambungan kegiatan di tingkat daerah.

Kegiatan yang terkait dengan penguatan kapasitas petugas dan kader, termasuk penyuluh lapangan KB, kader IMP, serta fasilitasi pembinaan program di lini lapangan, juga mulai diarahkan secara lebih intensif sejak tahun 2025. Dukungan ini dilanjutkan pada tahun 2026 dengan penyesuaian anggaran agar dapat memperkuat peran kader dan tenaga penyuluh sebagai ujung tombak pelaksanaan program di masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fokus yang konsisten sepanjang periode Renstra.

Sementara itu, pada aspek pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, sejumlah kegiatan mulai dialokasikan pada tahun 2025, seperti distribusi alat dan obat kontrasepsi serta pelayanan KB pria. Selanjutnya, pada tahun 2026 diperkuat dengan peningkatan kesertaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan integrasi lintas sektor melalui Kampung KB. Dengan adanya kesinambungan alokasi tersebut, arah kebijakan program KB dan kesehatan reproduksi tetap konsisten untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat ketahanan keluarga di tingkat akar rumput pada periode Renstra 2025–2029.

Sebagai bagian dari evaluasi, penting untuk mengidentifikasi permasalahan dan penyebab yang muncul pada periode Renstra sebelumnya, agar dapat menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan yang lebih tepat di periode selanjutnya.

1. Permasalahan/Penyebab yang Ditemukan

- Keterbatasan kapasitas fiskal daerah, yang mengakibatkan terjadinya penurunan alokasi pada beberapa sub kegiatan strategis, meskipun masih dibutuhkan di lapangan.
- Ketidakstabilan antara rencana dan realisasi, di mana beberapa sub kegiatan berjalan lebih tinggi dari rencana akibat kebutuhan mendesak, sementara di tahun lain justru lebih rendah karena efisiensi.
- Rasionalisasi dan pergeseran prioritas program, yang menyebabkan beberapa kegiatan ditiadakan atau diganti, meskipun secara substansi masih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan pemeliharaan aset, sehingga layanan tidak sepenuhnya optimal, terutama pada fasilitas balai KB dan sarana prasarana pendukung.
- Kebutuhan SDM dan kader di lapangan yang belum seluruhnya terpenuhi, baik dari segi jumlah maupun kapasitas, sehingga memengaruhi jangkauan dan kualitas layanan.

Dengan memahami permasalahan tersebut, langkah berikutnya adalah merumuskan arah kebijakan yang lebih adaptif dan responsif untuk periode Renstra baru.

2. Rencana ke Depan Renstra 2025–2029

Renstra 2025–2029 akan menekankan konsistensi antara perencanaan dan implementasi anggaran, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi. Fokus diarahkan pada:

- Penguatan layanan dasar di bidang sosial, kependudukan, dan keluarga, termasuk distribusi alat kontrasepsi, layanan kesehatan reproduksi, serta penurunan stunting.
- Penguatan SDM dan kader melalui pelatihan berkelanjutan serta peningkatan peran penyuluh KB dan pekerja sosial sebagai ujung tombak pelayanan.
- Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi tata kelola, untuk meningkatkan efisiensi administrasi serta integrasi data keluarga dan penduduk.
- Pemeliharaan sarana prasarana yang berkelanjutan, agar fasilitas pelayanan tetap dalam kondisi optimal dan mendukung kelancaran program.
- Integrasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat, terutama melalui Kampung KB dan kelompok kegiatan masyarakat, agar keberlanjutan program lebih terjamin.

Dengan rencana tersebut, Renstra baru diharapkan mampu menjawab tantangan sekaligus mengoptimalkan potensi yang ada. Secara umum, evaluasi periode sebelumnya menunjukkan bahwa dinamika fiskal dan pergeseran kebijakan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan program. Namun demikian, melalui strategi yang lebih terarah dalam Renstra 2025–2029, Dinsosdaldukkb meneguhkan komitmennya untuk memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan berbasis data, penguatan kapasitas SDM, serta integrasi lintas sektor akan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program.

Dengan demikian, Renstra 2025–2029 diharapkan dapat lebih responsif, berkelanjutan, dan selaras dengan misi pembangunan daerah,

sekaligus menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk, dan pembangunan keluarga.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja Dinsosdaldukkb, selain dilihat dari capaian indikator dan efektivitas pendanaan, juga perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas. Evaluasi ini meliputi pelaksanaan urusan sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang mencakup program, kegiatan, target, serta realisasi pencapaiannya. Hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo selama tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2. 6

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024 Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo berdasarkan Indikator Renstra 2021-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
T1	Persentase Penurunan Kelompok Rumah Tangga 20% berpenghasilan terendah dari DTKS	52,13	47,21	45,11	32,12	17,63	Indikator Persentase Penurunan Kelompok Rumah Tangga 20% Berpenghasilan Terendah dari DTKS merupakan Indikator Tujuan Dinsosdaldukkb yang bersifat invert, artinya semakin kecil nilainya semakin baik. Capaian dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan signifikan, dari 52,13% pada 2020 menjadi hanya 17,63% pada 2024. Penurunan terbesar terjadi pada periode 2022–2023, mencerminkan keberhasilan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan intervensi ketepatan sasaran bantuan yang dilakukan. Secara keseluruhan, target tujuan ini dapat dinilai tercapai dengan sangat baik karena indikator bergerak menuju kondisi ideal.
T2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100	100	100	Indikator Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana merupakan Indikator Tujuan Dinsosdaldukkb yang mengukur keberhasilan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana secara cepat dan tepat. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, menunjukkan bahwa seluruh korban bencana telah mendapatkan bantuan sesuai standar pelayanan minimal setiap tahunnya. Hasil ini mencerminkan kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, dan efektivitas mekanisme tanggap darurat yang berjalan optimal.
T3	Laju pertumbuhan penduduk	0,604	0,48	0,6	1,29	0,85	Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan Indikator Tujuan Dinsosdaldukkb yang menggambarkan persentase perubahan jumlah penduduk dalam satu tahun. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini berfluktuasi, dimulai dari 0,604% pada 2020, turun ke 0,48% pada 2021, naik kembali menjadi 0,6% pada 2022, melonjak signifikan ke 1,29% pada 2023, lalu menurun ke 0,85% pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika faktor demografis seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi serta dampak pandemi di awal periode. Secara umum, nilai masih dalam kisaran terkendali, meskipun lonjakan 2023 perlu menjadi perhatian untuk penguatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
T4	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	100	100	100	100	94,35	Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah merupakan Indikator Tujuan Dinsosdaldukkb yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Selama periode 2020–2023, capaian indikator ini konsisten pada angka maksimal 100, mencerminkan pelayanan yang dinilai sangat memuaskan oleh masyarakat. Namun, pada 2024 terjadi penurunan menjadi 94,35, yang meskipun masih tergolong sangat baik, menunjukkan adanya sedikit penurunan persepsi kepuasan publik. Hal ini dapat menjadi masukan untuk menjaga konsistensi mutu pelayanan dan meningkatkan aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan masyarakat.
S1.1	Persentase pemerlu pelayanan kersejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani	100	100	100	100	100	Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani merupakan Indikator Sasaran Dinsosdaldukkb yang mengukur tingkat keberhasilan penanganan kelompok rentan yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, menunjukkan bahwa seluruh PPKS yang teridentifikasi setiap tahun berhasil mendapatkan penanganan sesuai standar. Hasil ini mencerminkan keberlanjutan komitmen dan efektivitas program intervensi sosial yang dijalankan secara optimal.
S2.1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100	100	100	Indikator Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana merupakan Indikator Sasaran Dinsosdaldukkb yang menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana secara cepat dan tepat. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada di angka 100%, yang berarti seluruh korban bencana setiap tahun berhasil mendapatkan bantuan sesuai standar pelayanan minimal. Capaian ini mencerminkan kesiapsiagaan yang tinggi, koordinasi yang solid antar pihak terkait, serta efektivitas mekanisme tanggap darurat yang telah berjalan optimal.
S3.1	TFR (Total Fertility Rate)	2,11	1,3	2,67	1,16	2,05	Indikator TFR (Total Fertility Rate) merupakan Indikator Sasaran Dinsosdaldukkb yang bertujuan mempertahankan rata-rata jumlah anak per perempuan usia reproduksi pada angka ideal 2,1. Selama periode 2020–2024, capaian TFR mengalami fluktuasi cukup tajam, mulai dari 2,11 pada 2020, turun

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
							signifikan menjadi 1,3 pada 2021, naik menjadi 2,67 pada 2022, kembali turun ke 1,16 pada 2023, dan mendekati target di angka 2,05 pada 2024. Variasi ini menunjukkan adanya dinamika faktor sosial, ekonomi, dan program pengendalian kelahiran yang memengaruhi perilaku reproduksi masyarakat. Meskipun akhir periode mendekati target, stabilisasi angka TFR masih perlu diperkuat agar capaian lebih konsisten sesuai sasaran ideal.
S4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	100	100	100	100	94,35	Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah merupakan Indikator Sasaran Dinsosdaldukkb yang mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Pada periode 2020–2023, capaian indikator ini konsisten di angka maksimal 100, menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi dan pelayanan yang dinilai optimal. Namun, pada 2024 terjadi penurunan menjadi 94,35, yang meskipun masih berada pada kategori sangat baik, mengindikasikan adanya sedikit penurunan persepsi masyarakat terhadap pelayanan. Kondisi ini menjadi masukan penting untuk menjaga mutu layanan dan memperbaiki aspek-aspek yang memengaruhi kepuasan publik agar kembali pada capaian maksimal.
S4.2	Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai standar	40	50	50	70	80	Indikator Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai Standar merupakan Indikator Sasaran Dinsosdaldukkb yang mengukur tingkat kesesuaian pengelolaan dan fasilitas Taman Makam Pahlawan dengan standar yang ditetapkan. Selama periode 2020–2024, capaian indikator menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 40% pada 2020 menjadi 80% pada 2024. Kenaikan signifikan ini mencerminkan adanya perbaikan sarana, prasarana, dan tata kelola secara berkelanjutan, sehingga memberikan penghormatan yang lebih layak kepada para pahlawan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan agar seluruh Taman Makam Pahlawan mencapai standar optimal 100%.
P1	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100	100	100	100	100	Indikator Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang mengukur tingkat keterlaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan penunjang telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai rencana setiap tahunnya. Hasil ini mencerminkan kinerja yang optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
P2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	12,32	18,52	90,2	95,26	100	Indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang mengukur proporsi PSKS yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah. Capaian indikator ini menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan, dari 12,32% pada 2020 menjadi 100% pada 2024. Lonjakan besar terutama terjadi pada 2022, menandakan adanya percepatan program pembinaan yang masif dan terstruktur. Pencapaian penuh di akhir periode mencerminkan keberhasilan strategi pembinaan PSKS secara menyeluruh, sehingga seluruh potensi sumber kesejahteraan sosial di daerah dapat berfungsi optimal dalam mendukung pelayanan sosial.
P3	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapat penanganan	100	100	100	100	100	Indikator Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan layanan perlindungan dan penanganan bagi WNI migran korban kekerasan. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, yang berarti seluruh kasus yang teridentifikasi telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur dan standar layanan. Hasil ini menunjukkan komitmen kuat serta efektivitas koordinasi lintas instansi dalam memberikan perlindungan maksimal bagi warga negara migran.
P4	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	100	100	100	100	100	Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang mengukur tingkat keberhasilan pemberian layanan rehabilitasi sosial berbasis komunitas bagi PPKS. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh PPKS yang memerlukan layanan telah mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai standar tanpa harus melalui panti sosial. Capaian ini mencerminkan efektivitas pendekatan rehabilitasi berbasis masyarakat serta komitmen dalam memperluas akses layanan yang cepat, inklusif, dan tepat sasaran.
P5	Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	76,23	79,85	69,47	92,99	80,75	Indikator Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang mengukur proporsi penduduk miskin penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial. Capaian pada periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi, dari 76,23% pada 2020 meningkat menjadi 79,85% di 2021, lalu menurun ke 69,47% pada 2022,

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
							melonjak signifikan menjadi 92,99% pada 2023, dan sedikit menurun ke 80,75% di 2024. Dinamika ini mencerminkan adanya perbedaan jumlah penerima manfaat dan cakupan program setiap tahun, yang dapat dipengaruhi oleh validasi data kemiskinan, ketersediaan anggaran, serta kebijakan penyaluran bantuan. Meskipun sempat mencapai angka tertinggi di 2023, upaya stabilisasi capaian diperlukan agar cakupan perlindungan sosial tetap tinggi dan merata.
P6	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	100	100	100	Indikator Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana secara cepat dan tepat. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten pada angka 100%, yang berarti seluruh korban bencana yang terdata setiap tahun mendapatkan bantuan sesuai standar pelayanan minimal. Hasil ini mencerminkan tingkat kesiapsiagaan yang tinggi, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta respons tanggap darurat yang optimal di tingkat daerah
P7	persentase pemenuhan standar sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	40	50	50	70	80	Indikator Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang mengukur tingkat kesesuaian fasilitas dan sarana Taman Makam Pahlawan dengan standar yang ditetapkan. Capaian indikator ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 40% pada 2020 menjadi 80% pada 2024. Tren ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam perbaikan sarana, prasarana, dan tata kelola Taman Makam Pahlawan, sehingga memberikan penghormatan yang lebih layak kepada para pahlawan. Meskipun progresnya positif, masih terdapat ruang untuk mencapai standar optimal 100%
P8	Age Spesific Fertility Rate (ASFR)	17,7	18	4,77	14,6	14,4	Indikator Age Specific Fertility Rate (ASFR) merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang bersifat invert, artinya semakin kecil nilainya semakin baik, dan mengukur tingkat fertilitas spesifik usia tertentu pada populasi perempuan usia subur. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini mengalami fluktuasi, dari 17,7 pada 2020, naik sedikit ke 18 pada 2021, turun drastis ke 4,77 pada 2022, kembali meningkat ke 14,6 pada 2023, dan sedikit menurun menjadi 14,4 pada 2024. Variasi ini menunjukkan adanya dinamika perilaku reproduksi, pengaruh program keluarga berencana, serta faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi fertilitas. Meskipun nilai akhir menurun dibanding beberapa tahun sebelumnya, pengelolaan ASFR masih perlu diperkuat agar konsisten mendekati kondisi ideal yang lebih rendah.
P9.1	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (modern contraceptive prevalence rate /mCPR) / Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	58,21	52,09	69,18	63,24	65,98	Indikator Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) / Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15–49 Tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi Menurut Metode Kontrasepsi Modern merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang mengukur cakupan penggunaan kontrasepsi modern sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan keluarga berencana. Capaian indikator ini selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi, dimulai dari 58,21% pada 2020, turun ke 52,09% pada 2021, meningkat signifikan ke 69,18% pada 2022, turun ke 63,24% pada 2023, dan naik kembali menjadi 65,98% pada 2024. Tren ini mencerminkan dinamika kesadaran masyarakat, akses terhadap layanan keluarga berencana, dan efektivitas program promosi serta penyuluhan KB. Secara keseluruhan, capaian cenderung meningkat dan menunjukkan progres positif, meskipun konsistensi capaian masih perlu diperkuat.
P9.2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	14,23	13,99	15,42	16,69	9,38	Indikator Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang bersifat invert, artinya semakin kecil nilainya semakin baik, dan mengukur proporsi perempuan usia reproduksi yang membutuhkan pelayanan KB tetapi belum terpenuhi. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini berfluktuasi, dimulai dari 14,23% pada 2020, sedikit menurun menjadi 13,99% pada 2021, naik ke 15,42% pada 2022, meningkat lagi ke 16,69% pada 2023, dan akhirnya turun signifikan ke 9,38% pada 2024. Penurunan pada 2024 menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana dalam menekan unmet need, sekaligus mencerminkan peningkatan efektivitas akses layanan dan intervensi KB.
P10.1	Persentase Keluarga yang mendapat layanan tribina	62,58	64,96	64,88	78,96	87,57	Indikator Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang mengukur proporsi keluarga yang menerima layanan pembinaan dan pendampingan sesuai program Tribina. Capaian indikator ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 62,58% pada 2020 menjadi 87,57% pada 2024, dengan lonjakan signifikan terjadi pada periode 2022–2023. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas intervensi, perluasan jangkauan layanan, serta keberhasilan strategi pendampingan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas keluarga sasaran.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
P10.2	Persentase PUS Peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	74,83	72,14	57,56	84,3	66,98	Indikator Persentase PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang mengukur proporsi perempuan usia subur peserta KB dalam kelompok UPPKS yang menggunakan metode kontrasepsi. Capaian indikator selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi, dari 74,83% pada 2020, menurun ke 72,14% pada 2021, turun lebih tajam ke 57,56% pada 2022, meningkat signifikan menjadi 84,3% pada 2023, dan turun kembali ke 66,98% pada 2024. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika partisipasi peserta KB dalam kelompok UPPKS, yang dipengaruhi oleh faktor kesadaran, akses layanan, dan efektivitas program pembinaan. Upaya konsistensi dan peningkatan cakupan layanan KB perlu diperkuat agar proporsi anggota UPPKS yang ber-KB tetap tinggi.
SPM 1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100	Indikator Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti merupakan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Dinsosdaldukkb yang mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas yang tidak tinggal di panti sosial. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh penyandang disabilitas terlantar berhasil mendapatkan layanan dan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar. Hasil ini mencerminkan efektivitas program intervensi sosial berbasis komunitas serta komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan inklusif dan tepat sasaran.
SPM 2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100	Indikator Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti merupakan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Dinsosdaldukkb yang mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak terlantar yang tidak tinggal di panti sosial. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, menandakan bahwa seluruh anak terlantar yang teridentifikasi setiap tahun telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar pelayanan minimal. Hasil ini mencerminkan efektivitas program perlindungan anak, kesiapan layanan sosial, dan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan inklusif bagi anak-anak yang rentan.
SPM 3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100	Indikator Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti merupakan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Dinsosdaldukkb yang mengukur pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia yang tidak tinggal di panti sosial. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, menunjukkan bahwa seluruh lansia terlantar berhasil mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar pelayanan minimal. Hasil ini mencerminkan efektivitas program perlindungan sosial, kesiapan layanan, serta komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi kelompok lanjut usia yang rentan.
SPM 4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100	Indikator Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti merupakan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Dinsosdaldukkb yang mengukur pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis yang tidak tinggal di panti sosial. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, menunjukkan bahwa seluruh gelandangan dan pengemis yang teridentifikasi setiap tahun berhasil mendapatkan layanan sesuai standar. Hasil ini mencerminkan efektivitas program intervensi sosial, kesiapan layanan, serta komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.
SPM 5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	Indikator Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota merupakan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Dinsosdaldukkb yang menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana secara cepat dan tepat. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, yang berarti seluruh korban bencana yang teridentifikasi setiap tahun telah mendapatkan bantuan sesuai standar pelayanan minimal. Hasil ini mencerminkan kesiapsiagaan tinggi, koordinasi lintas sektor yang efektif, dan respons tanggap darurat yang optimal di tingkat daerah.
PMD 1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100	100	100	100	Indikator Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan/Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM) merupakan Indikator Mandatory sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 yang menilai pemenuhan kebutuhan dasar kelompok masyarakat rentan di luar panti sosial. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, menunjukkan bahwa seluruh kelompok rentan yang teridentifikasi berhasil

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
							mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar pelayanan minimal. Hasil ini mencerminkan efektivitas intervensi sosial, kesiapan layanan, dan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
PMD 2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	Indikator Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota merupakan Indikator Mandatory sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 yang menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana secara cepat dan tepat. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, menunjukkan bahwa seluruh korban bencana yang teridentifikasi telah mendapatkan bantuan sesuai standar pelayanan minimal. Hasil ini mencerminkan kesiapsiagaan tinggi, koordinasi lintas sektor yang efektif, dan respons tanggap darurat yang optimal di tingkat daerah

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

Secara umum, capaian indikator kinerja Dinsosdaldukkb selama periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang positif dan dapat dikategorikan sesuai dengan arah kebijakan Renstra 2021–2026. Beberapa indikator yang berbasis penurunan angka memperlihatkan tren membaik, seperti T1 (penurunan kelompok rumah tangga berpenghasilan terendah) yang turun signifikan dari 52,13% pada tahun 2020 menjadi 17,63% pada tahun 2024, serta P9.2 (unmet need KB) yang berkurang tajam pada tahun 2024 menjadi 9,38%. Indikator fertilitas seperti ASFR (P8) juga menunjukkan penurunan meskipun masih terdapat fluktuasi pada pertengahan periode.

Indikator pelayanan dasar sesuai SPM, meliputi penanganan PPKS, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, serta urusan penunjang (P1), relatif konsisten mencapai 100% selama periode evaluasi. Hal ini menandakan bahwa kepastian layanan dasar publik tetap terjaga dan sesuai dengan mandat Renstra 2021–2026.

Sejumlah indikator lain menunjukkan dinamika yang beragam. Laju pertumbuhan penduduk (T3) sempat naik pada tahun 2023 sebelum kembali menurun, capaian PSKS (P2) justru meningkat pesat hingga mencapai 100% pada 2024, sedangkan perlindungan sosial bagi penduduk miskin (P5) mengalami naik-turun. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) relatif terjaga di angka 100% hingga 2023, meskipun sedikit menurun pada 2024 menjadi 94,35%. Adapun indikator layanan keluarga seperti P10.1 meningkat stabil, sementara partisipasi PUS anggota UPPKS (P10.2) masih menunjukkan fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada 2023.

Capaian indikator SPM yang stabil di angka 100% memberikan landasan kuat bagi pengembangan layanan inovatif di periode mendatang. Penurunan signifikan jumlah rumah tangga miskin dalam DTKS mencerminkan efektivitas intervensi sosial yang dapat diperluas cakupannya. Tren penurunan unmet need KB serta peningkatan partisipasi dalam layanan Tribina juga membuka peluang strategis untuk memperkuat program keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Fluktuasi jumlah penduduk miskin penerima jaminan sosial menunjukkan bahwa perlindungan sosial belum sepenuhnya stabil, dipengaruhi dinamika ekonomi serta validasi data penerima manfaat. Indikator fertilitas seperti ASFR dan TFR yang belum konsisten mengindikasikan perlunya penguatan akses layanan KB yang lebih merata. Penurunan nilai IKM pada 2024 menjadi 94,35% menandakan adanya tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Selain itu, ketergantungan pada ketersediaan anggaran dan kapasitas SDM berpotensi menimbulkan kesenjangan capaian antarindikator jika tidak diantisipasi dengan manajemen yang baik.

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan publik Dinsosdaldukkb pada periode 2020–2024 yang berada dalam kerangka Renstra 2021–2026 dapat dinilai cukup baik, ditandai dengan pencapaian indikator pelayanan dasar yang mendekati target serta realisasi anggaran yang relatif stabil pada program prioritas. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dan prioritas yang jelas dalam penyelenggaraan pelayanan.

Namun, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran, fluktuasi capaian indikator strategis, serta keterbatasan kapasitas SDM dan mekanisme evaluasi. Capaian ini menjadi dasar penting untuk penguatan perencanaan, pengelolaan anggaran, serta monitoring dan evaluasi pada periode Renstra berikutnya agar pelayanan publik dapat lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan

Apabila capaian kinerja tahun 2020–2024 tersebut ditinjau menggunakan indikator yang dirumuskan dalam Renstra 2025–2029, maka kondisi Dinsosdaldukkb dapat digambarkan lebih komprehensif. Perubahan indikator dalam periode Renstra baru ini menekankan pada penguatan outcome pelayanan, keterpaduan intervensi, serta kesinambungan program lintas bidang. Oleh karena itu, data capaian pada periode sebelumnya perlu dipetakan kembali sesuai indikator Renstra 2025–2029 untuk memberikan gambaran awal posisi capaian Dinsosdaldukkb menjelang periode perencanaan yang baru sebagai berikut :

Tabel 2. 7

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024 Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo berdasarkan Indikator Renstra 2025-2029

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
T1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	23,12	24,26	24,95	25,60	26,90	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren meningkat dari 23,12% pada 2020 menjadi 26,9% pada 2024, mencerminkan perbaikan kinerja penanganan kelompok rentan. Peningkatan ini didukung oleh efektivitas program perlindungan sosial dan pendampingan yang semakin terarah, sementara penghambatnya adalah keterbatasan anggaran, kapasitas SDM, serta masih tingginya jumlah PPKS sehingga cakupan layanan belum sepenuhnya optimal
T2	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	n/a	n/a	n/a	62,74	63,50	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) di Kabupaten Purworejo baru dapat diukur mulai tahun 2023 dengan capaian 62,74 dan meningkat menjadi 63,50 pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya perbaikan meskipun masih dalam kategori sedang. Keterbatasan data pada tahun 2020–2022 (n/a) membuat tren jangka panjang belum dapat dianalisis secara menyeluruh, namun capaian dua tahun terakhir menggambarkan bahwa upaya peningkatan ketahanan, keberdayaan, dan kesejahteraan keluarga mulai menunjukkan hasil positif. Faktor pendukung peningkatan Ibangga antara lain implementasi program keluarga berencana, penguatan ketahanan keluarga melalui Tribina, serta intervensi perlindungan sosial bagi kelompok rentan, sedangkan faktor penghambatnya meliputi masih adanya kesenjangan kesejahteraan antar rumah tangga, keterbatasan kualitas data keluarga, serta tantangan dalam memastikan partisipasi masyarakat secara merata di seluruh wilayah.
T3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada layanan Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Purworejo belum memiliki data capaian sepanjang periode 2020–2024 (n/a), sehingga belum dapat dilakukan analisis kinerja secara kuantitatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengukuran kepuasan masyarakat pada layanan TMP belum terbangun secara sistematis, meskipun dari sisi implementasi pelayanan kegiatan operasional, pemeliharaan, serta fungsi TMP tetap berjalan. Faktor pendukung yang dapat memperkuat capaian indikator ini ke depan adalah adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pelestarian nilai kepahlawanan dan penghormatan kepada pahlawan, sedangkan faktor penghambatnya terletak pada belum tersedianya instrumen pengukuran kepuasan masyarakat yang baku serta keterbatasan sumber daya untuk melakukan survei secara reguler.
T4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62,66	62,66	62,66	62,66	62,66	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo pada periode 2020–2024 tercatat stagnan di angka 62,66, yang menunjukkan konsistensi kinerja akuntabilitas tetapi belum memperlihatkan adanya peningkatan kualitas secara signifikan. Kondisi capaian ini mengindikasikan bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sudah berjalan sesuai mekanisme dasar, namun penguatan inovasi dan perbaikan berkelanjutan belum optimal. Faktor pendukung capaian stabil ini antara lain adanya kepatuhan terhadap regulasi, keterjagaan mekanisme pelaporan, serta konsistensi dalam menjalankan siklus manajemen kinerja, sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan kapasitas SDM, minimnya inovasi program, dan belum optimalnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja yang dapat mendorong peningkatan nilai SAKIP ke level lebih tinggi.
T1.S1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	23,12	24,26	24,95	25,60	26,90	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren meningkat dari 23,12% pada 2020 menjadi 26,9% pada 2024, mencerminkan perbaikan kinerja penanganan kelompok rentan. Peningkatan ini didukung oleh efektivitas program perlindungan sosial dan pendampingan yang semakin terarah, sementara penghambatnya adalah keterbatasan anggaran, kapasitas SDM, serta masih tingginya jumlah PPKS sehingga cakupan layanan belum sepenuhnya optimal
T2.S1	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	17,42	16,20	15,67	15,21	14,80	Indikator Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren penurunan dari 17,42% pada 2020 menjadi 14,8% pada 2024, mencerminkan perbaikan dalam pengendalian penduduk dan peningkatan kesadaran keluarga berencana. Capaian ini didukung oleh perluasan akses layanan KB, edukasi reproduksi, serta partisipasi masyarakat, sementara faktor penghambat masih terkait dengan keterbatasan pemahaman sebagian kelompok usia subur dan tantangan pemerataan layanan di seluruh wilayah.
T2.S2	Demand Satisfied	79,20	80,42	81,42	82,95	83,90	Indikator Demand Satisfied di Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan konsisten dari 79,2% pada 2020 menjadi 83,9% pada 2024, menandakan semakin banyak kebutuhan ber-KB yang terpenuhi. Capaian ini didukung oleh ketersediaan alat kontrasepsi, peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi, serta

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
							dukungan program edukasi keluarga berencana. Namun, penghambatnya masih berupa keterbatasan akses di wilayah tertentu dan faktor sosial budaya yang memengaruhi penerimaan penggunaan kontrasepsi secara merata.
T2.S3	*Total Fertility Rate*	2,10	2,10	2,10	2,05	2,11	Indikator Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Purworejo relatif stabil pada kisaran 2,1 anak per wanita selama 2020–2024, dengan sedikit penurunan pada 2023 (2,05) dan kembali naik ke 2,11 pada 2024. Stabilitas ini menunjukkan keberhasilan pengendalian kelahiran melalui program KB, meskipun fluktuasi kecil dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, preferensi jumlah anak, serta keterbatasan akses layanan KB di sebagian wilayah.
T3.S1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada layanan Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Purworejo sepanjang 2020–2024 tidak memiliki data capaian (n/a), sehingga analisis kuantitatif belum dapat dilakukan. Ketiadaan data ini mengindikasikan bahwa pengukuran kepuasan masyarakat belum terimplementasi secara sistematis. Faktor pendukung yang tersedia meliputi keberlangsungan layanan dan pemeliharaan TMP, sedangkan penghambat utamanya adalah belum tersedianya instrumen survei dan keterbatasan mekanisme evaluasi pelayanan.
T4.S1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62,66	62,66	62,66	62,66	62,66	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo pada periode 2020–2024 tercatat stagnan di angka 62,66, menunjukkan konsistensi penerapan akuntabilitas kinerja namun tanpa adanya peningkatan kualitas yang signifikan. Capaian ini didukung oleh kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan dan pelaporan kinerja, sementara penghambatnya meliputi keterbatasan inovasi, kapasitas SDM, serta belum optimalnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dapat mendorong peningkatan nilai SAKIP lebih tinggi.
P1	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah menunjukkan capaian 100% secara konsisten pada 2020–2024, menandakan seluruh kegiatan penunjang urusan pemerintahan telah terlaksana sesuai target. Capaian penuh ini didukung oleh kepatuhan terhadap regulasi, keberlanjutan sistem administrasi, serta ketersediaan anggaran rutin. Namun, potensi penghambatnya adalah keterbatasan inovasi dan efisiensi, sehingga meskipun capaian stabil, peningkatan kualitas layanan penunjang masih perlu diperhatikan agar tidak hanya berorientasi pada kepatuhan semata.
P2	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Kebutuhan Dasar pada Saat dan Pasca Bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Kebutuhan Dasar pada Saat dan Pasca Bencana menunjukkan capaian 100% secara konsisten pada 2020–2024, yang mencerminkan kepastian layanan dasar bagi masyarakat terdampak bencana selalu terpenuhi. Keberhasilan ini didukung oleh kesiapsiagaan sumber daya, ketersediaan logistik, serta koordinasi penanganan bencana yang berjalan baik. Meski demikian, tantangan yang berpotensi menjadi penghambat adalah keterbatasan anggaran darurat dan ketergantungan pada distribusi cepat di wilayah sulit dijangkau.
P3	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	12,65	12,93	13,22	13,51	13,81	Indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren meningkat dari 12,65% pada 2020 menjadi 13,81% pada 2024, mencerminkan penguatan kapasitas kelembagaan sosial secara bertahap. Peningkatan ini didukung oleh pembinaan berkelanjutan, dukungan program pemberdayaan, serta partisipasi aktif masyarakat. Namun, penghambat yang masih dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterjangkauan wilayah binaan, dan kebutuhan pendanaan tambahan untuk memperluas cakupan pembinaan PSKS.
P4	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan menunjukkan capaian 100% secara konsisten pada 2020–2024, menandakan seluruh kasus yang teridentifikasi telah tertangani sesuai standar layanan. Capaian ini didukung oleh mekanisme respons cepat, koordinasi lintas pihak, serta komitmen perlindungan sosial terhadap korban. Meski demikian, tantangan yang berpotensi menghambat adalah keterbatasan data akurat, kesadaran pelaporan dari korban, serta kendala geografis dan administratif dalam proses penanganan.
P5	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	3,95	4,03	4,11	4,19	4,27	Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial menunjukkan tren meningkat dari 3,95% pada 2020 menjadi 4,27% pada 2024, menandakan perluasan layanan berbasis masyarakat berjalan positif meski masih terbatas. Capaian ini didukung oleh penguatan peran pendamping sosial, kolaborasi kelembagaan, dan pendekatan rehabilitasi non-panti. Faktor penghambatnya meliputi keterbatasan anggaran, jumlah SDM, serta tantangan menjangkau PPKS di wilayah terpencil.
P6	Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial	85,00	87,17	89,40	91,69	94,04	Indikator Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial menunjukkan peningkatan konsisten dari 85% pada 2020 menjadi 94,04% pada 2024, mencerminkan semakin luasnya cakupan perlindungan bagi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
							kelompok rentan. Capaian ini didukung oleh penguatan program bantuan sosial, perbaikan basis data penerima, serta efektivitas layanan jaminan sosial. Namun, penghambat yang masih dihadapi adalah keterbatasan anggaran, dinamika ekonomi masyarakat, serta potensi ketidakakuratan data yang dapat memengaruhi ketepatan sasaran.
P7	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai Standar	47,50	50,00	52,50	55,00	57,50	Indikator Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar mengalami peningkatan dari 47,5% pada 2020 menjadi 57,5% pada 2024, menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam pemenuhan fasilitas yang layak. Capaian ini didukung oleh alokasi anggaran pemeliharaan dan komitmen menjaga kelestarian nilai kepahlawanan. Namun, keterbatasan dana pembangunan, kebutuhan renovasi berkelanjutan, serta kurangnya sarana pendukung modern masih menjadi penghambat optimalisasi standar layanan TMP.
P8.1	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*)	51,27	52,09	69,18	63,24	65,98	Indikator Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) menunjukkan tren meningkat dari 51,27% pada 2020 menjadi 65,98% pada 2024, meskipun sempat melonjak tinggi pada 2022 (69,18%) lalu menurun kembali sebelum stabil. Peningkatan ini didukung oleh ketersediaan alat kontrasepsi, intensifikasi pelayanan KB, dan edukasi kesehatan reproduksi. Namun, fluktuasi capaian dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, preferensi metode kontrasepsi, serta tantangan pemerataan akses layanan di wilayah tertentu.
P8.2	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)	12,84	13,99	15,42	16,69	9,38	Indikator Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) mengalami fluktuasi, meningkat dari 12,84% pada 2020 hingga 16,69% pada 2023, sebelum turun tajam menjadi 9,38% pada 2024. Peningkatan sempat terjadi akibat keterbatasan akses layanan dan faktor sosial budaya, sedangkan penurunan signifikan di 2024 mencerminkan keberhasilan perluasan layanan KB, ketersediaan alat kontrasepsi, serta penguatan edukasi reproduksi. Tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan tren positif ini secara merata di seluruh wilayah.
P9	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19	19,00	18,00	17,70	14,60	14,40	Indikator Age Specific Fertility Rate (ASFR) usia 15–19 di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren menurun dari 19 pada 2020 menjadi 14,4 pada 2024, menandakan keberhasilan dalam menekan angka kelahiran remaja. Capaian ini didukung oleh peningkatan akses informasi kesehatan reproduksi, layanan konseling, serta edukasi remaja melalui program keluarga berencana. Namun, tantangan yang masih ada meliputi pengaruh faktor sosial budaya, pernikahan usia dini, serta keterbatasan jangkauan edukasi di wilayah tertentu.
P10.1	Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	61,74	64,96	64,88	78,96	87,57	Indikator Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina menunjukkan peningkatan signifikan dari 61,74% pada 2020 menjadi 87,57% pada 2024, dengan lonjakan tajam mulai 2023. Capaian ini didukung oleh perluasan cakupan program Tribina, peningkatan peran kader keluarga, serta dukungan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan keluarga. Namun, penghambat yang masih dihadapi meliputi keterbatasan pemerataan layanan di seluruh desa dan tantangan menjaga keberlanjutan partisipasi keluarga secara konsisten.
P10.2	Persentase Remaja Calon Pengantin yang Mendapat Edukasi Kesehatan Reporduksi dan Perencanaan Keluarga	56,60	57,80	59,10	60,40	61,70	Indikator Persentase Remaja Calon Pengantin yang Mendapat Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga menunjukkan peningkatan bertahap dari 56,6% pada 2020 menjadi 61,7% pada 2024, mencerminkan perluasan jangkauan layanan edukasi pranikah. Peningkatan ini didukung oleh penguatan program edukasi reproduksi, peran penyuluh, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persiapan pernikahan sehat. Namun, penghambatnya masih berupa keterbatasan akses di wilayah terpencil, serta tantangan budaya yang memengaruhi keterbukaan remaja dalam menerima materi sensitif.
SPM 1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Indikator Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti menunjukkan capaian 100% secara konsisten pada 2020–2024, menandakan seluruh penerima manfaat yang teridentifikasi telah mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan minimum. Keberhasilan ini didukung oleh ketersediaan mekanisme rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dan komitmen layanan dasar yang terjaga. Namun, tantangan yang berpotensi menghambat adalah keterbatasan cakupan data, kemungkinan belum terjangkaunya semua kasus di lapangan, serta keterbatasan sumber daya pendukung.
SPM 2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Indikator Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti menunjukkan capaian 100% secara konsisten pada 2020–2024, yang berarti seluruh anak terlantar teridentifikasi telah mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan minimum. Capaian ini didukung oleh keberadaan mekanisme layanan berbasis masyarakat, pendampingan sosial, serta perhatian berkelanjutan pada pemenuhan hak anak. Namun, potensi penghambatnya adalah keterbatasan cakupan data, kemungkinan adanya anak yang belum terlaporkan, serta keterbatasan sumber daya dalam menjangkau seluruh wilayah.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
SPM 3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Indikator Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti mencapai 100% secara konsisten pada 2020–2024, menunjukkan seluruh lansia terlantar yang teridentifikasi telah mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan minimum. Capaian ini didukung oleh keberlanjutan program rehabilitasi sosial berbasis komunitas dan komitmen pemenuhan kebutuhan dasar lansia. Namun, penghambat yang berpotensi muncul adalah keterbatasan cakupan data, potensi lansia yang belum teridentifikasi, serta keterbatasan sumber daya dalam memperluas jangkauan layanan.
SPM 4	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Indikator Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti mencapai 100% secara konsisten pada 2020–2024, menandakan seluruh penerima manfaat yang teridentifikasi telah mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan minimum. Capaian ini didukung oleh adanya mekanisme penjangkauan lapangan, layanan rehabilitasi berbasis komunitas, serta komitmen pemenuhan hak dasar tuna sosial. Namun, penghambat yang berpotensi muncul adalah keterbatasan cakupan data, dinamika mobilitas gelandangan dan pengemis, serta keterbatasan sumber daya untuk menjangkau kasus baru secara menyeluruh.
SPM 5	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Capaian indikator Standar Pelayanan Minimum mengenai jumlah warga korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial konsisten mencapai 100% dari 2020 hingga 2024. Keberhasilan ini didorong oleh koordinasi antar OPD yang efektif, kesiapsiagaan penanganan bencana, serta dukungan anggaran yang memadai. Faktor penghambat relatif sedikit, namun keberlanjutan pencatatan dan pendataan korban perlu diperkuat agar layanan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan setiap korban bencana.
PMD 18 2020	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Capaian indikator SPM terkait persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti konsisten 100% dari 2020 hingga 2024. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi antar OPD, ketersediaan anggaran yang memadai, serta program pelayanan sosial yang terstruktur dan responsif. Faktor penghambat relatif minimal, meskipun penguatan sistem pendataan dan pemantauan individu masih diperlukan agar pemenuhan kebutuhan dasar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan
PMD 18 2020	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Capaian indikator SPM mengenai persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat di kabupaten/kota menunjukkan hasil 100% secara konsisten dari 2020 hingga 2024. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi antar OPD yang efektif, kesiapsiagaan tanggap darurat, serta alokasi anggaran yang memadai. Faktor penghambat relatif sedikit, namun peningkatan pendataan dan pemantauan korban tetap diperlukan agar layanan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

Periode 2021–2024 menunjukkan dinamika capaian kinerja yang relatif positif di Kabupaten Purworejo. Indikator yang terkait dengan layanan langsung kepada masyarakat juga memperlihatkan perkembangan. Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang tertangani meningkat dari 24,26% di tahun 2021 menjadi 26,9% pada 2024. Meskipun tren ini positif, capaian tersebut masih relatif rendah dan menunjukkan masih banyak kelompok rentan yang belum sepenuhnya terjangkau layanan sosial.

Dari sisi Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga), capaian meningkat dari 62,74 pada tahun 2023 menjadi 63,5 di tahun 2024. Perbaikan ini menunjukkan adanya penguatan fungsi keluarga dalam aspek ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Namun, kenaikan relatif kecil ini mengindikasikan masih adanya hambatan struktural, seperti rendahnya literasi keluarga dalam perencanaan, serta keterbatasan dukungan layanan yang bersifat preventif dan promotif. Di sisi lain, Nilai SAKIP perangkat daerah cenderung stagnan di angka 62,66, yang menandakan perlunya peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di sektor Taman Makam Pahlawan belum memiliki tren data lengkap, tetapi menjadi penting sebagai ukuran kualitas layanan yang bersifat simbolik dan historis. Di sisi kependudukan, indikator Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) terus menurun dari 16,2% di tahun 2021 menjadi 14,8% pada tahun 2024, yang menandakan program keluarga berencana semakin efektif. Konsisten dengan hal tersebut, Demand Satisfied meningkat dari 80,42% ke 83,9%, mencerminkan semakin terpenuhinya kebutuhan ber-KB masyarakat.

Faktor pendukung capaian tersebut antara lain adanya konsistensi program keluarga berencana, peningkatan daya beli masyarakat, serta dukungan regulasi dan kebijakan nasional terkait penanggulangan kemiskinan serta pembangunan keluarga. Namun, terdapat pula sejumlah faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia pelaksana program, keterjangkauan layanan yang belum merata, serta koordinasi antarperangkat daerah yang masih bisa ditingkatkan. Tantangan lainnya adalah memastikan kualitas layanan publik yang tidak hanya terukur secara administratif, tetapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Sebagai kesimpulan, capaian indikator baru pada periode 2021–2024 secara umum menunjukkan tren positif, baik dari sisi kesejahteraan ekonomi, pembangunan keluarga, maupun efektivitas program KB. Meski demikian, masih ada ruang perbaikan dalam aspek kualitas layanan publik, pemerataan akses, serta tata kelola kinerja instansi pemerintah. Ke depan, upaya yang perlu dilakukan mencakup penguatan integrasi program lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan layanan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis hasil (outcome). Dengan langkah tersebut, capaian yang telah diraih dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kajian terhadap Renstra K/L, Renstra Provinsi, RTRW Kabupaten Purworejo 2021–2041, dan KLHS RPJMD, terdapat beberapa isu strategis yang berdampak langsung pada pengembangan pelayanan Dinsosdaldukkb:

1. Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Purworejo menunjukkan tantangan terkait kualitas sumber daya manusia dan lingkungan sosial masyarakat yang belum optimal, risiko bencana yang tinggi, keterbatasan infrastruktur wilayah, produktivitas dan inklusivitas ekonomi yang masih perlu ditingkatkan, serta tata kelola pemerintahan yang belum agile dan adaptif. Hal ini berdampak pada efektivitas pelayanan sosial, kapasitas intervensi keluarga, serta akuntabilitas penyelenggaraan program.
2. RTRW Kabupaten Purworejo 2021–2041 menegaskan arah pembangunan infrastruktur strategis, termasuk double track jalan kereta Purworejo-Kroya, jalan tol, Yogyakarta International Airport, Jalan Lingkar Timur, pengembangan kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur, dan Bendungan Bener. Infrastruktur ini membuka peluang bagi Dinsosdaldukkb untuk memperluas jangkauan layanan sosial dan kependudukan, menempatkan fasilitas pelayanan di lokasi strategis, dan menurunkan kesenjangan layanan antarwilayah.
3. KLHS RPJMD menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM, pemerataan kesejahteraan, optimalisasi ekonomi daerah, perlindungan lingkungan hidup, mitigasi risiko bencana, serta tata kelola pemerintahan berbasis sistem informasi. Hal ini menjadi dasar perumusan strategi penguatan kapasitas kelembagaan, transformasi digital pelayanan, dan integrasi layanan sosial dengan program pembangunan berkelanjutan.

Tantangan

1. Ketepatan Perencanaan dan Efektivitas Belanja
   Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat kesenjangan signifikan antara alokasi anggaran dan realisasi (<80% maupun >200%). Kondisi ini sejalan dengan temuan nasional terkait perlunya peningkatan akurasi perencanaan dan efisiensi belanja daerah. Bagi Dinsosdaldukkb, hal ini berimplikasi langsung terhadap keterlambatan pelaksanaan program dan rendahnya efektivitas pelayanan sosial maupun kependudukan.
2. Fluktuasi Indikator Kinerja Kependudukan
   Indikator strategis nasional seperti Total Fertility Rate (TFR), Age Specific Fertility Rate (ASFR), dan Unmet Need KB yang menjadi sasaran utama Renstra BKKBN, masih menunjukkan ketidakstabilan di Purworejo. Kondisi ini menandakan perlunya intervensi yang lebih konsisten, karena fluktuasi tersebut dapat berpengaruh pada beban ketergantungan penduduk dan kualitas keluarga di masa mendatang.
3. Kapasitas SDM dan Kelembagaan
   Jumlah dan kualitas aparatur, baik pada fungsi perencanaan maupun pelaksanaan, masih terbatas. Hal ini berdampak pada kecepatan adaptasi terhadap dinamika kebutuhan pelayanan sosial dan kependudukan. Renstra Provinsi Jawa Tengah juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan dan

kompetensi SDM merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pelayanan dasar yang efektif.

4. Kerentanan Sosial dan Bencana
   KLHS Kabupaten Purworejo menegaskan tingginya risiko bencana alam (longsor, banjir, gempa) yang berdampak pada meningkatnya kerentanan sosial. Tantangan muncul karena pelayanan darurat sosial masih mengandalkan mekanisme konvensional dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem penanggulangan bencana daerah.
5. Kesenjangan Layanan Antarwilayah
   Telaahan terhadap RTRW menunjukkan masih terdapat wilayah pedesaan, perbukitan, dan pesisir selatan dengan keterbatasan aksesibilitas. Kesenjangan jangkauan layanan ini menjadi tantangan serius karena justru kelompok masyarakat di wilayah tersebut memiliki tingkat kerentanan sosial dan kependudukan yang relatif lebih tinggi.

Peluang

1. Sinergi Kebijakan Nasional dan Provinsi
   Keselarasan prioritas nasional dan provinsi dalam bidang perlindungan sosial, penghapusan kemiskinan ekstrem, ketahanan keluarga, serta pengendalian penduduk membuka peluang dukungan program, pendanaan, dan bantuan teknis bagi Kabupaten Purworejo. Sinergi ini menjadi modal penting untuk memperkuat efektivitas program daerah.
2. Pengembangan Tata Ruang Wilayah (RTRW)
   Arah RTRW Kabupaten Purworejo 2021–2041 mendorong pemerataan pembangunan di kawasan selatan dan pedesaan. Kondisi ini memberikan peluang untuk memperluas jangkauan layanan sosial dan KB sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.
3. Transformasi Digital Pelayanan Publik
   Kebijakan nasional dan provinsi mendorong digitalisasi pelayanan publik, termasuk penguatan basis data sosial dan kependudukan. Pemanfaatan sistem seperti DTSEN, SIMPATI, dan aplikasi KB digital memberi peluang percepatan layanan, peningkatan akurasi perencanaan, serta penguatan akuntabilitas kinerja.
4. Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat
   Keterlibatan organisasi masyarakat, lembaga sosial keagamaan, dunia usaha, dan relawan sosial sesuai dengan arah pembangunan SDGs dapat memperkuat pembinaan keluarga, pemberdayaan PPKS, serta penanganan masalah sosial berbasis komunitas. Potensi kemitraan ini menjadi peluang untuk memperluas cakupan sekaligus meningkatkan kualitas layanan.
5. Integrasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (KLHS/SDGs)
   KLHS dan agenda SDGs memberikan kerangka integrasi isu lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam program pembangunan daerah. Hal ini membuka peluang bagi Dinsosdaldukkb untuk mengarahkan pelayanan sosial dan kependudukan yang tidak hanya responsif jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender, inklusi sosial, serta penghapusan kemiskinan.

Berdasarkan analisis Renstra K/L, Renstra Provinsi, RTRW, dan KLHS, pengembangan pelayanan Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo dalam lima tahun mendatang menghadapi tantangan utama berupa ketepatan perencanaan, fluktuasi indikator kependudukan,

keterbatasan kapasitas SDM, kerentanan sosial akibat risiko bencana, dan kesenjangan layanan antarwilayah.

Namun, peluang strategis yang dapat dimanfaatkan meliputi sinergi kebijakan nasional dan provinsi, arah pembangunan tata ruang yang mendukung pemerataan layanan, transformasi digital pelayanan publik, kemitraan aktif dengan masyarakat, serta integrasi isu pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan peluang ini, Dinsosdaldukkb memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas, jangkauan, dan kualitas layanan sosial serta kependudukan secara berkelanjutan dan inklusif.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo adalah sekumpulan individu, keluarga, kelompok dan wilayah yang menjadi prioritas penerima layanan sosial serta program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk kejelasan operasional, sasaran dibagi menurut domain layanan dan dimensi lintas-sektor sebagai berikut.

A. Bidang Sosial (pelayanan kesejahteraan sosial)

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), meliputi: fakir miskin, keluarga sangat miskin/rentan, gelandangan dan pengemis, serta kelompok tunawisma.
2. Lanjut Usia (lansia) yang rentan, termasuk lansia terlantar atau tanpa keluarga pendamping.
3. Penyandang Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi, pelayanan kesejahteraan, atau pendampingan sosial.
4. Anak yang memerlukan perlindungan sosial, mis. anak terlantar atau anak dari keluarga sangat miskin (memerlukan intervensi perlindungan dan pembinaan).
5. Korban kekerasan dan penyalahgunaan NAPZA, termasuk layanan pemulihan dan rujukan.
6. Keluarga penerima Program Keluarga Harapan (KPM/PKH) dan kelompok prioritas lain yang terdaftar dalam basis data kesejahteraan (DTKS).
7. Masyarakat terdampak bencana yang memerlukan layanan perlindungan sosial darurat, rehabilitasi dan pemulihan.
8. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKSK) meliputi berbagai unsur masyarakat yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, antara lain: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial (Peksos), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta organisasi sosial keagamaan dan komunitas yang mendukung pelayanan sosial.
9. Ahli waris pahlawan dan pengguna layanan Taman Makam Pahlawan (TMP) (layanan pemeliharaan serta administrasi terkait).

B. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB & Pembangunan Keluarga)

1. Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi sasaran utama program KB.
2. Ibu hamil, ibu nifas, bayi dan balita, khususnya keluarga berisiko stunting atau dengan kebutuhan gizi/layanan kesehatan reproduksi.

3. Remaja dan calon pengantin, sasaran program Generasi Berencana (GenRe) untuk pencegahan pernikahan dini dan kehamilan remaja.
4. Keluarga berisiko tinggi (unmet need KB, multiparitas tinggi, atau akses layanan terbatas) yang memerlukan intervensi KB intensif.
5. Komunitas/kelompok di wilayah dengan indikator kependudukan tinggi (mis. daerah dengan TFR/ASFR tinggi atau cakupan KB rendah).

C. Sasaran Berdasarkan Dimensi Geografis dan Data

1. Wilayah terpencil, perdesaan perbukitan, dan pesisir yang memiliki keterbatasan akses layanan.
2. Kecamatan/kelurahan dengan konsentrasi kemiskinan atau kerentanan tinggi (mengacu pada DTKS dan peta kerentanan).
3. Kelompok sasaran berbasis data — rumah tangga terdaftar di DTKS, keluarga penerima PKH, serta daftar prioritas BOKB/DAK.

D. Sasaran Institusional (untuk penguatan layanan)

1. Balai Penyuluhan KB dan UPT KB kecamatan sebagai titik layanan utama; sasaran program meliputi peningkatan kapasitas dan akses bagi pengguna layanan.
2. Posyandu / Puskesmas / Sekolah / Kelompok Masyarakat sebagai mitra implementasi agar intervensi mencapai sasaran akhir (individu/keluarga).

Kriteria prioritas penetapan sasaran mencakup: tingkat kerentanan sosial/ekonomi, status dalam basis data kesejahteraan (DTKS/PKH), kebutuhan KB (unmet need, PUS), risiko kesehatan (stunting), dan keterbatasan akses geografis. Kelompok-kelompok sasaran ini akan menjadi dasar penentuan prioritas program, alokasi anggaran, strategi layanan (stasioner, mobile, satelit), serta indikator capaian dalam Renstra 2025–2029.

E. Mitra dan Kerjasama

Dinsosdaldukkb menjalin kerja sama strategis dengan berbagai mitra, baik di tingkat pemerintah, lembaga keuangan, penyedia layanan kesehatan, maupun lembaga non-pemerintah, untuk mendukung pelaksanaan program dan layanan yang lebih efektif, merata, dan berkualitas. Bentuk kerja sama ini meliputi koordinasi program, penyediaan fasilitas pendukung, distribusi bantuan, serta integrasi layanan lintas sektor.

Beberapa peran Dinsosdaldukkb dalam kemitraan perangkat daerah antara lain:

1. Dinsosdaldukkb berperan dalam Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat TJSLP bersama Bapperida, untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan strategi pengentasan kemiskinan.
2. Dinsosdaldukkb berperan bersama Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purworejo sebagai sekretariat TPID, dalam mendukung kegiatan Penanggulangan Inflasi Daerah yang bersumber dari DBH CHT.
3. Dinsosdaldukkb berperan bermitra dengan Dinas Kesehatan Daerah dalam penyelenggaraan jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah dan mendukung pelayanan Keluarga Berencana di 27 Puskesmas, RSUD dr. Tjitrowardojo, RSUD RAA Tjokronegoro, 8 RS Swasta, dan 37 fasilitas kesehatan lainnya (klinik pratama, dokter praktik mandiri, bidan praktik mandiri).

4. Dinsosdaldukkb berperan bersama DPM PTSP sebagai pengelola pelayanan terintegrasi Mall Pelayanan Publik, untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi publik.
5. Dinsosdaldukkb berperan sebagai Sekretariat Pokja Pemenuhan Alat Bantu Disabilitas dan Lansia, untuk mendukung penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lansia.
6. Dinsosdaldukkb berperan sebagai sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Purworejo Tahun 2025, untuk koordinasi program percepatan penurunan stunting secara terpadu bermitra dengan 104 mitra baik Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah/Swasta dan Individu dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.
7. Dinsosdaldukkb bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dalam penyaluran operasional penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan di 494 desa/kelurahan, serta penyaluran bantuan sosial berupa uang kepada Kelompok Usaha Bersama dan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
8. Dinsosdaldukkb bekerjasama dengan perusahaan Ekspedisi, untuk mendukung distribusi alat dan obat kontrasepsi ke 74 fasilitas kesehatan di Kabupaten Purworejo, termasuk RSUD, RS Swasta, klinik, Puskesmas, dokter praktik mandiri, dan bidan praktik mandiri.
9. Dinsosdaldukkb bekerjasama dengan Pusat Rehabilitasi Yakkum, dalam proyek kesehatan jiwa masyarakat “Every Life Matters”.
10. Dinsosdaldukkb berperan bermitra dengan Pengadilan Negeri, untuk mendukung pelayanan bagi penyandang disabilitas melalui penerjemah bahasa isyarat dan konsultan aksesibilitas.

Melalui kemitraan ini, Dinsosdaldukkb dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan sosial, kesehatan, dan kependudukan di Kabupaten Purworejo.

Pada bagian ini telah memaparkan secara komprehensif tugas, fungsi, sasaran, kelompok sasaran layanan, serta mitra perangkat daerah Dinsosdaldukkb. Penjabaran ini memberikan gambaran jelas mengenai lingkup tugas, tanggung jawab, dan peran strategis Dinsosdaldukkb dalam penyelenggaraan layanan sosial, kependudukan, dan keluarga berencana di Kabupaten Purworejo.

Selain itu, identifikasi mitra perangkat daerah menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung efektivitas program dan pelayanan. Keseluruhan informasi dalam sub bab ini menjadi landasan yang kuat bagi penyusunan permasalahan, isu strategis, dan arah kebijakan yang akan dibahas pada sub bab berikutnya dan bab-bab berikutnya, sehingga strategi pembangunan Dinsosdaldukkb dapat berjalan secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinsosdaldukkb, terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program serta layanan kepada masyarakat. Permasalahan tersebut muncul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang terkait dengan sumber

daya manusia, kelembagaan, koordinasi antar sektor, ketersediaan data, serta akses dan kualitas layanan bagi kelompok sasaran.

Selain itu, terdapat isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam perencanaan Renstra, yang harus ditangani secara terintegrasi untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi permasalahan dan isu strategis ini menjadi dasar bagi penyusunan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang relevan, sehingga strategi pembangunan sosial, kependudukan, dan keluarga berencana dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius agar visi dan misi pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif. Permasalahan tersebut mencakup aspek perlindungan sosial, pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, kesiapsiagaan bencana, serta tata kelola pemerintahan. Setiap isu berikut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kapasitas layanan yang tersedia, sehingga diperlukan langkah strategis, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal.

- Mekanisme perlindungan dan layanan bagi migran korban kekerasan belum optimal

  Upaya perlindungan dan pemberian layanan bagi migran yang menjadi korban kekerasan masih menghadapi kendala baik dari sisi regulasi maupun implementasi di lapangan. Mekanisme yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan akses yang cepat, terpadu, dan berkeadilan bagi para korban.
- Layanan rehabilitasi sosial dan akses dasar bagi PPKS/PMKS belum menjangkau semua sasaran

  Pelayanan bagi Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS/PMKS) masih terbatas, baik dari segi jumlah penerima manfaat maupun cakupan wilayah. Hal ini menyebabkan sebagian kelompok rentan belum memperoleh pemenuhan hak dasar secara memadai.
- Optimalisasi pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM/Lembaga Sosial

  Kapasitas lembaga sosial maupun SDM pendukung masih bervariasi, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan belum merata. Pembinaan dan peningkatan kompetensi belum sepenuhnya terintegrasi dalam program yang berkesinambungan.
- Akurasi data dan pelaksanaan program perlindungan sosial belum efektif

  Data perlindungan sosial belum terkelola secara akurat dan mutakhir, sehingga berpengaruh pada efektivitas penyaluran program bantuan. Ketidakakuratan data ini menimbulkan potensi tidak tepat sasaran dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
- Rendahnya kualitas pembangunan keluarga

  Pembangunan keluarga belum mampu menghasilkan ketahanan keluarga yang kuat. Faktor pendidikan, ekonomi, dan lingkungan

sosial masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keluarga yang berdaya dan harmonis.

- Belum terpenuhinya kebutuhan layanan KB
  Pelayanan Keluarga Berencana belum menjangkau seluruh pasangan usia subur. Hal ini terkait dengan keterbatasan sarana, tenaga penyuluh, serta tingkat kesadaran masyarakat yang belum merata.
- Tingkat fertilitas masih tinggi
  Angka fertilitas total masih berada di atas target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa program pengendalian kelahiran belum sepenuhnya berhasil. Kondisi ini berdampak pada tekanan laju pertumbuhan penduduk.
- Sistem informasi, data dan dokumen kependudukan belum akurat dan terintegrasi
  Pengelolaan data kependudukan masih menghadapi masalah konsistensi dan integrasi antar-sistem. Hal ini menghambat tersedianya informasi yang valid dan komprehensif untuk perencanaan pembangunan.
- Advokasi, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor belum optimal
  Sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program belum terbangun secara efektif. Advokasi dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat juga belum menjangkau seluruh lapisan sehingga dampak yang dihasilkan kurang maksimal.
- Kapasitas Taruna Siaga Bencana yang belum merata
  Ketersediaan dan kemampuan Taruna Siaga Bencana di wilayah kabupaten masih belum merata. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam kesiapan komunitas menghadapi potensi bencana.
- Kesiapsiagaan dan penanganan bencana belum maksimal
  Kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana belum optimal, baik dari sisi sistem peringatan dini, peralatan, maupun sumber daya manusia. Hal ini berpotensi memperbesar dampak kerugian saat bencana terjadi.
- Tata kelola pemerintahan dan kapasitas aparatur belum optimal
  Masih ditemukan keterbatasan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya terkait akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas kinerja aparatur. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diberikan.
- Koordinasi antarunit kerja dan inovasi layanan publik belum optimal
  Koordinasi internal antarunit perangkat daerah belum sepenuhnya berjalan efektif. Selain itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih terbatas, sehingga belum mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat secara cepat.
- Integrasi data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan secara optimal
  Sistem informasi antarunit kerja belum terintegrasi dengan baik, menyebabkan terjadinya duplikasi maupun keterlambatan data. Hal ini menghambat proses pengambilan keputusan berbasis data yang akurat.

- Pelayanan publik masih terbatas kualitas layanan, perawatan fasilitas, serta akses masyarakat

  Kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Beberapa fasilitas pelayanan kurang terawat, sementara akses masyarakat terutama di wilayah terpencil masih menghadapi kendala sarana maupun jangkauan layanan.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam menghadapi dinamika lingkungan pembangunan yang bersifat kompleks dan berubah cepat, Dinsosdaldukkb perlu mengidentifikasi isu-isu strategis yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis ini dirumuskan berdasarkan berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Renstra Kementerian/Lembaga terkait, laporan resmi lembaga pemerintah dan internasional, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, serta hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Identifikasi isu strategis ini menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, program, dan kegiatan Dinsosdaldukkb yang relevan, tepat sasaran, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan pembangunan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Berikut merupakan tabel isu strategis Dinsosdaldukkb.

Tabel 2. 8
Isu Strategis Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Bonus Demografi	Mekanisme perlindungan dan layanan bagi migran korban kekerasan belum optimal	Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dampak buruk teknologi AI	Transformasi Sosial	Kualitas Hidup dan daya saing sumber daya manusia	Terbatasnya pelayanan dalam peningkatan dan penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat
	Layanan rehabilitasi sosial dan akses dasar bagi PPKS/PMKS belum menjangkau semua sasaran					
	Optimalisasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM/Lembaga Sosial					
	Akurasi data dan pelaksanaan program perlindungan sosial belum efektif					
	Rendahnya kualitas pembangunan keluarga		*Aging Population* Negara Maju	Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat	Rendahnya kualitas pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk
	Belum terpenuhinya kebutuhan layanan KB					
	Tingkat fertilitas masih tinggi					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Sistem informasi, data dan dokumen kependudukan belum akurat dan terintegrasi					
	Advookasi, sosialisasi, dan koordinasi lintas sekor belum optimal					
	Kapasitas taruna siaga bencana yang belum merata					Terbatasnya pelayanan dalam peningkatan dan penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat
	Kesiapsiagaan dan penanganan bencana belum maksimal					
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Tata kelola pemerintahan dan kapasitas aparatur belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Pengelolaan tata kelola, administrasi, perencanaan, dan layanan dukungan sekretariat yang belum sepenuhnya responsif, akuntabel,
Peningkatan Pelayanan Publik	Koordinasi antarunit kerja dan inovasi layanan publik belum optimal		Sinkronisasi kebijakan			

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
dan Pemerintahan	Integrasi data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan secara optimal		makro dan sektoral			efektif, dan didukung transformasi digital
	Pelayanan publik yang masih terbatas kualitas layanan, perawatan fasilitas, serta akses masyarakat.					Kualitas Pelayanan taman makam pahlawan belum optimal

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

Potensi utama Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan pembangunan sosial dan kependudukan adalah adanya bonus demografi, yaitu meningkatnya proporsi penduduk usia produktif yang dapat menjadi modal besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Bonus demografi ini merupakan peluang sekaligus tantangan, karena tanpa pengelolaan yang tepat, kondisi tersebut justru dapat memunculkan persoalan baru berupa meningkatnya angka pengangguran, kerentanan sosial, hingga degradasi kualitas keluarga. Dalam konteks inilah, peran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) menjadi strategis untuk memastikan bahwa potensi penduduk dapat diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, di balik potensi tersebut, masih terdapat berbagai permasalahan pelayanan perangkat daerah yang perlu ditangani secara serius. Mekanisme perlindungan dan layanan bagi migran korban kekerasan, misalnya, masih belum optimal, sehingga kelompok rentan ini belum memperoleh perlindungan menyeluruh. Layanan rehabilitasi sosial dan akses dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pun belum menjangkau semua sasaran, yang menyebabkan masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak dasar. Sementara itu, kualitas pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga sosial maupun SDM pendukung masih terbatas, sehingga layanan yang diberikan belum merata di seluruh wilayah.

Dari sisi data dan perencanaan program, masih terdapat persoalan akurasi data perlindungan sosial dan kependudukan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini berimplikasi pada efektivitas pelaksanaan program, termasuk dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Rendahnya kualitas pembangunan keluarga, belum terpenuhinya kebutuhan layanan KB, serta tingginya tingkat fertilitas menjadi tantangan nyata dalam memanfaatkan peluang bonus demografi. Masalah ini diperburuk dengan keterbatasan sistem informasi, dokumen kependudukan yang belum akurat, serta advokasi dan koordinasi lintas sektor yang belum berjalan optimal.

Selain itu, permasalahan kesiapsiagaan bencana juga masih menonjol. Kapasitas Taruna Siaga Bencana belum merata, sementara penanganan bencana secara kelembagaan maupun komunitas belum maksimal. Padahal, Kabupaten Purworejo memiliki potensi risiko bencana cukup tinggi yang memerlukan sistem penanggulangan cepat, terukur, dan terkoordinasi.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, masih ditemukan kendala dalam kapasitas aparatur, koordinasi antarunit kerja, serta inovasi pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik, termasuk perawatan fasilitas dan akses masyarakat, masih belum sesuai harapan. Keterbatasan ini juga terlihat dalam pelayanan Taman Makam Pahlawan, di mana kualitas layanan penghormatan dan pemeliharaan belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan sebagai bagian dari penghargaan terhadap jasa pahlawan bangsa.

Kondisi permasalahan tersebut berkaitan erat dengan isu-isu strategis eksternal. Pada level global, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan fenomena aging population di negara maju menuntut peningkatan daya saing SDM sekaligus penguatan ketahanan keluarga. Pada level nasional, transformasi sosial, tantangan ketahanan

budaya, dan keberlanjutan ekologi menjadi isu penting yang memengaruhi arah kebijakan daerah. Sementara itu, isu regional terkait kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, serta kekuatan budaya sebagai identitas daerah menjadi faktor relevan dalam mendukung keberhasilan program-program Dinsosdaldukkb.

Dengan memperhatikan potensi daerah, permasalahan pelayanan, serta isu-isu strategis global, nasional, dan regional, maka dapat dirumuskan bahwa Dinsosdaldukkb menghadapi empat isu strategis utama sebagai dasar perumusan tujuan, sasaran, dan kebijakan ke depan, yaitu:

1. Terbatasnya pelayanan dalam peningkatan dan penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat.
   Masih terdapat kesenjangan layanan sosial, baik dalam rehabilitasi sosial, perlindungan korban, maupun pemenuhan hak dasar kelompok rentan. Keterbatasan kapasitas SDM dan lembaga sosial turut memperbesar hambatan dalam penyelesaian masalah kesejahteraan sosial.
2. Rendahnya kualitas pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk.
   Program KB belum sepenuhnya menjangkau masyarakat, angka fertilitas masih tinggi, dan kualitas pembangunan keluarga belum optimal. Hal ini menimbulkan risiko meningkatnya beban sosial dan mengurangi potensi pemanfaatan bonus demografi.
3. Pengelolaan tata kelola, administrasi, perencanaan, dan layanan dukungan sekretariat yang belum sepenuhnya responsif, akuntabel, efektif, dan didukung transformasi digital.
   Kelemahan dalam tata kelola pemerintahan, koordinasi antarunit kerja, serta keterbatasan integrasi sistem informasi menjadi hambatan dalam penyelenggaraan layanan publik yang efisien dan transparan. Transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas layanan.
4. Kualitas pelayanan Taman Makam Pahlawan belum optimal.
   Sebagai simbol penghormatan terhadap jasa para pahlawan, Taman Makam Pahlawan seharusnya memberikan layanan yang layak, tertib, dan bermartabat. Namun, kualitas layanan yang ada masih terbatas, baik dalam hal pemeliharaan fasilitas maupun pelayanan kepada masyarakat.

Keempat isu strategis tersebut merupakan fondasi dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinsosdaldukkb untuk periode Renstra mendatang. Dengan penanganan yang terarah dan berbasis pada data yang akurat serta dukungan kolaborasi lintas sektor, isu strategis ini dapat menjadi peluang bagi terwujudnya kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk, pembangunan keluarga yang berkualitas, serta penghargaan yang layak kepada jasa pahlawan bangsa.

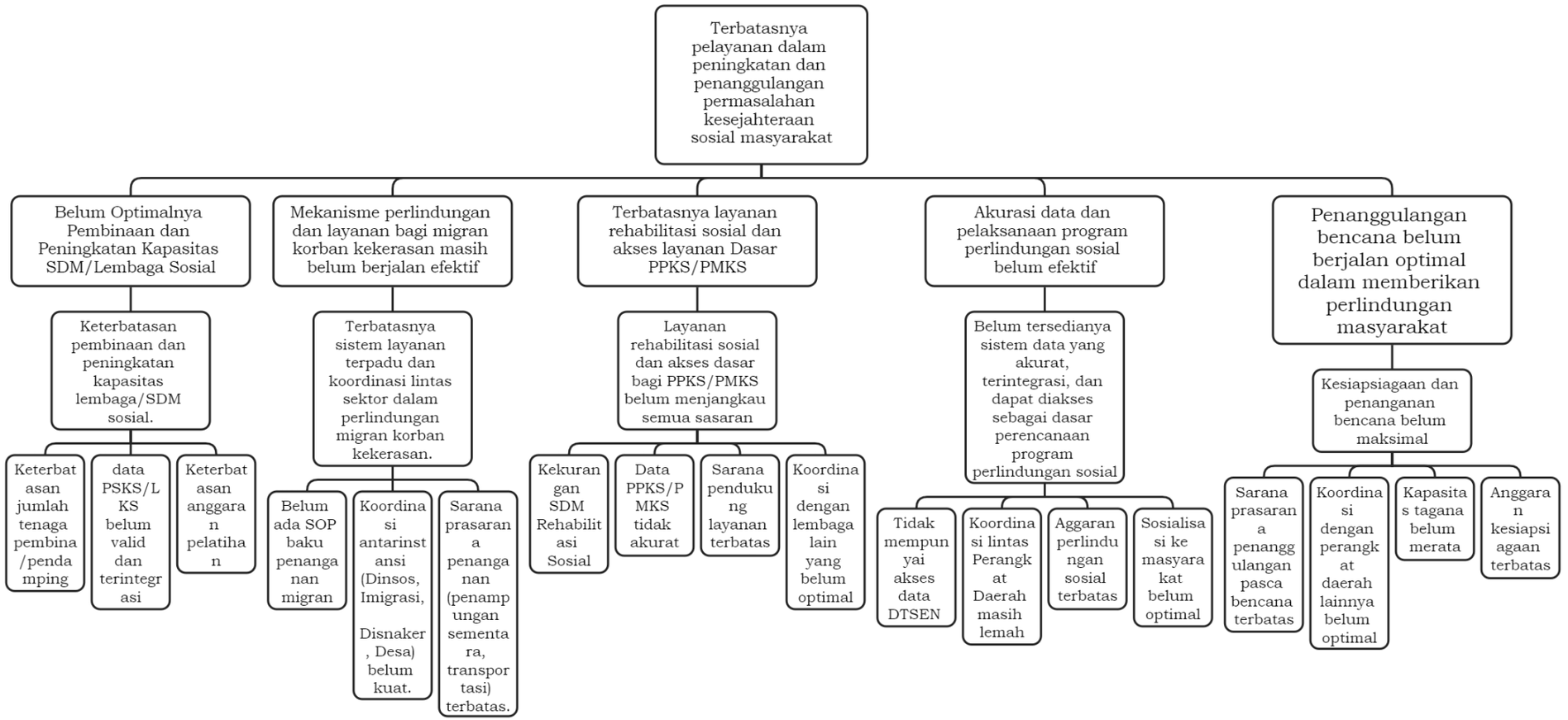

Gambar 2. 2
Pohon Masalah Terbatasnya Pelayanan dalam peningkatan penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

1. Terbatasnya pelayanan dalam peningkatan dan penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah terbatasnya pelayanan dalam peningkatan dan penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat. Permasalahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari aspek pembinaan dan peningkatan kapasitas, perlindungan kelompok rentan, perluasan layanan rehabilitasi, validasi data, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana. Setiap aspek menyimpan hambatan yang bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, koordinasi, serta sarana prasarana pendukung.

Pertama, pada optimalisasi pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM serta lembaga sosial, kendala terjadi akibat terbatasnya pembinaan dan peningkatan kapasitas yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah tenaga pembina maupun pendamping sosial di lapangan, sehingga tidak mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran. Selain itu, alokasi anggaran untuk pelatihan masih terbatas, sehingga proses peningkatan kompetensi SDM sosial tidak dapat berjalan secara berkelanjutan. Masalah ini diperparah dengan kondisi data PSKS/LKS yang belum valid dan terintegrasi, menghambat perencanaan dan evaluasi program secara akurat.

Kedua, pada aspek penguatan layanan perlindungan migran dan korban kekerasan, mekanisme perlindungan yang ada belum berjalan optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum tersedianya SOP baku penanganan migran, yang menyebabkan pelayanan tidak memiliki standar yang seragam. Koordinasi antarinstansi terkait, seperti Dinas Sosial, Imigrasi, Tenaga Kerja, dan Pemerintah Desa, juga belum terjalin secara kuat, sehingga penanganan seringkali terfragmentasi. Keterbatasan sarana dan prasarana penanganan turut menjadi faktor yang memperlemah efektivitas layanan bagi korban.

Ketiga, dalam perluasan layanan rehabilitasi sosial dan akses layanan dasar bagi PPKS/PMKS, hambatan muncul karena layanan yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh sasaran. Penyebab utamanya adalah kekurangan tenaga SDM rehabilitasi sosial yang kompeten serta ketidakakuratan data PPKS/PMKS, yang menyebabkan sasaran layanan tidak tepat. Sarana pendukung layanan yang terbatas, seperti pusat rehabilitasi dan transportasi sosial, menambah hambatan dalam pelaksanaan layanan. Di samping itu, koordinasi dengan lembaga lain yang berperan dalam layanan rehabilitasi belum berjalan optimal, sehingga efektivitas program menurun.

Keempat, dari sisi validasi data dan efektivitas program perlindungan serta jaminan sosial, permasalahan muncul akibat akurasi data yang rendah dan pelaksanaan program yang belum efektif. Data DTKS yang tidak diperbarui secara berkala membuat sasaran program perlindungan sosial tidak tepat. Lemahnya koordinasi lintas unit memperburuk implementasi program di daerah. Keterbatasan anggaran perlindungan sosial juga membatasi cakupan bantuan yang diberikan.

Selain itu, sosialisasi program ke masyarakat masih kurang optimal, sehingga tidak semua masyarakat memahami dan memanfaatkan program perlindungan sosial yang ada.

Kelima, pada aspek peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana sosial maupun alam, permasalahan utama adalah kesiapsiagaan yang belum maksimal. Penyebabnya antara lain keterbatasan sarana dan prasarana tanggap darurat, seperti peralatan dan fasilitas evakuasi. Koordinasi dengan pihak terkait, termasuk perangkat daerah dan lembaga kemasyarakatan, belum solid sehingga penanganan bencana seringkali tidak terintegrasi. Kapasitas Tagana juga belum merata di seluruh wilayah, yang menyebabkan kesenjangan dalam respon darurat. Ditambah lagi, anggaran kesiapsiagaan terbatas sehingga upaya antisipasi maupun pemulihan pascabencana tidak berjalan optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terbatasnya pelayanan kesejahteraan sosial disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan kapasitas SDM, lemahnya koordinasi lintas sektor, data yang belum valid, keterbatasan anggaran, serta sarana prasarana yang belum memadai. Permasalahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang menyeluruh dan terpadu agar pelayanan kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan secara signifikan dan berkelanjutan.

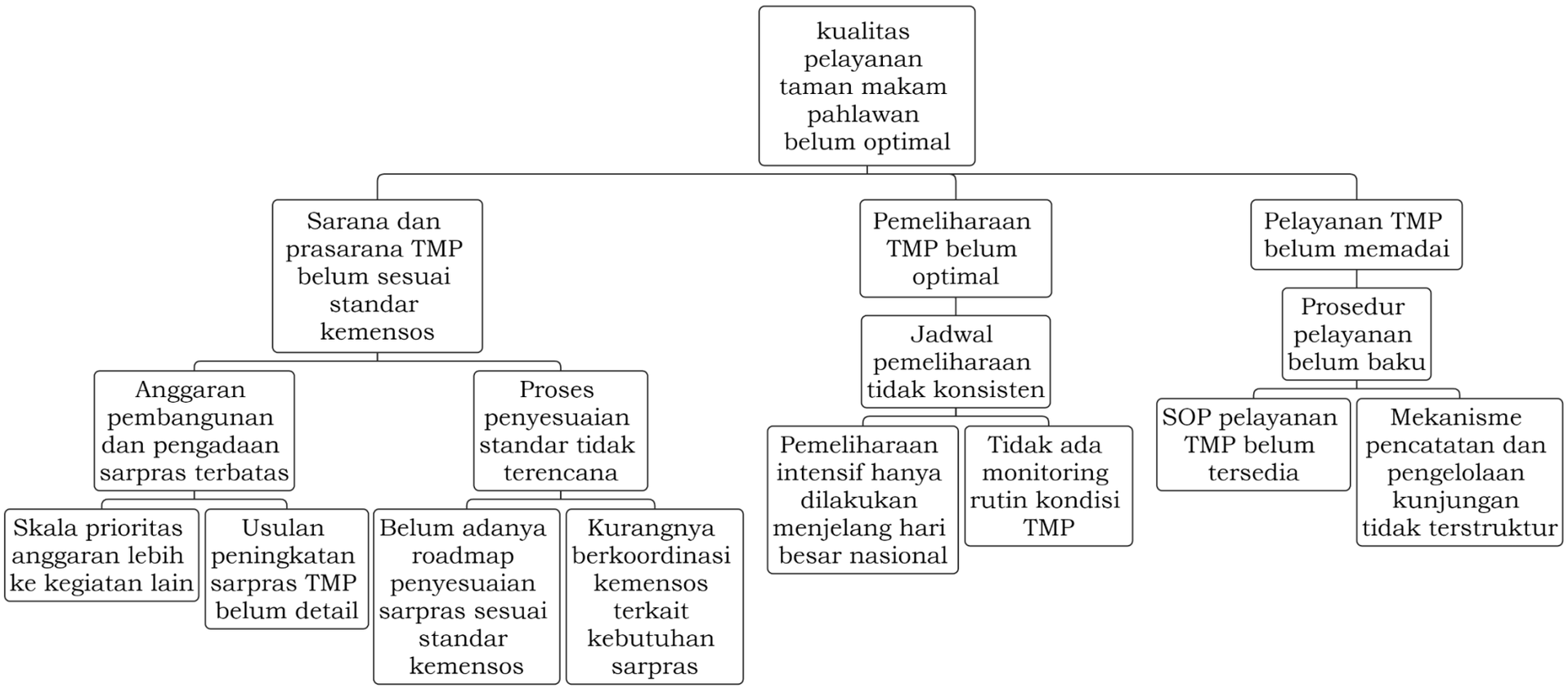

Gambar 2. 3
Pohon Masalah Kualitas Pelayanan Taman makam pahlawan belum optimal

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

2. Kualitas pelayanan taman makam pahlawan belum optimal

Permasalahan utama yang dihadapi adalah kualitas pelayanan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mencakup keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya pemeliharaan, serta belum memadainya prosedur pelayanan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menyebabkan pelayanan TMP belum mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial maupun ekspektasi masyarakat.

Pertama, pada aspek sarana dan prasarana TMP, permasalahan yang muncul adalah belum terpenuhinya standar Kemensos. Penyebab utamanya adalah keterbatasan anggaran pembangunan maupun pengadaan sarana dan prasarana. Skala prioritas anggaran lebih diarahkan pada kegiatan lain yang dianggap lebih mendesak, sehingga pengembangan sarana TMP seringkali tertunda. Selain itu, usulan peningkatan sarana dan prasarana TMP yang diajukan belum disusun secara detail dan komprehensif, sehingga tidak dapat sepenuhnya diakomodasi dalam perencanaan anggaran.

Kedua, selain keterbatasan anggaran, proses penyesuaian standar sarana dan prasarana TMP juga belum terencana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh belum tersusunnya roadmap penyesuaian sarpras yang mengacu pada standar Kemensos. Akibatnya, arah pengembangan TMP tidak memiliki pedoman yang jelas dan berkesinambungan. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya koordinasi dengan Kemensos terkait kebutuhan sarana prasarana, sehingga proses standarisasi berjalan lambat dan tidak terintegrasi dengan kebijakan nasional.

Ketiga, dalam aspek pemeliharaan TMP, permasalahan yang menonjol adalah jadwal pemeliharaan yang tidak konsisten. Pemeliharaan intensif umumnya hanya dilakukan menjelang peringatan hari besar nasional, sementara pada hari-hari biasa pemeliharaan dilakukan secara terbatas. Hal ini membuat kondisi fisik TMP kurang terjaga sepanjang waktu. Selain itu, tidak adanya mekanisme monitoring rutin terhadap kondisi TMP menyebabkan berbagai kerusakan atau kekurangan tidak segera teridentifikasi, sehingga semakin memperburuk kualitas pemeliharaan.

Keempat, pada aspek pelayanan TMP, kelemahan terletak pada belum adanya prosedur pelayanan yang baku. Ketiadaan SOP pelayanan membuat mekanisme pelayanan TMP belum memiliki standar yang seragam, baik dari sisi teknis maupun administratif. Kondisi ini berdampak pada pelayanan yang kurang konsisten dan terkadang berbeda antarpetugas. Selain itu, mekanisme pencatatan dan pengelolaan kunjungan juga belum seragam, sehingga data kunjungan tidak terdokumentasi secara baik dan sulit digunakan untuk evaluasi maupun perencanaan pengembangan layanan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan TMP belum optimal bukan hanya karena faktor teknis, tetapi juga karena kurangnya perencanaan strategis, koordinasi, serta kelemahan dalam tata kelola. Keterbatasan anggaran dan

minimnya prioritas menyebabkan pengembangan sarana prasarana tidak sesuai standar. Ketidakteraturan pemeliharaan memperburuk kondisi fisik TMP, sementara belum adanya prosedur pelayanan baku melemahkan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan TMP memerlukan pendekatan yang lebih terencana dan komprehensif. Penyusunan roadmap penyesuaian standar, penguatan koordinasi dengan Kemensos, penetapan SOP pelayanan, serta penjadwalan pemeliharaan rutin menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Tanpa adanya perbaikan di seluruh aspek ini, kualitas pelayanan TMP akan terus tertinggal dan belum mampu memenuhi standar pelayanan yang diharapkan.

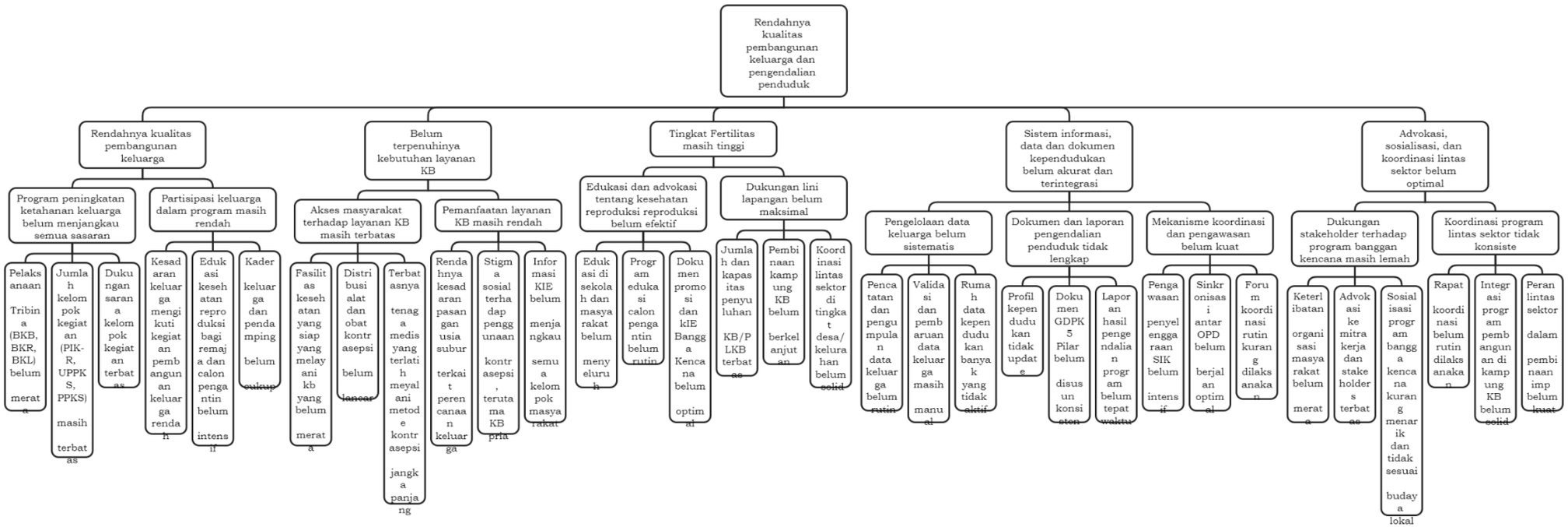

Gambar 2. 4
Pohon Masalah Rendahnya kualitas pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

3. Rendahnya kualitas pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk

Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari keterbatasan program pembangunan keluarga, belum terpenuhinya layanan KB, tingginya tingkat fertilitas, lemahnya sistem informasi kependudukan, hingga kurang optimalnya advokasi, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor. Hambatan-hambatan ini menurunkan efektivitas program Bangga Kencana dan berdampak pada belum tercapainya sasaran pembangunan kependudukan secara menyeluruh.

Pertama, pada aspek kualitas pembangunan keluarga, masalah muncul karena program peningkatan ketahanan keluarga belum menjangkau semua sasaran. Pelaksanaan Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia) masih belum merata di semua wilayah. Jumlah kelompok kegiatan seperti PIK-R, UPPKS, dan PPKS juga masih terbatas, sementara sarana pendukung bagi kelompok kegiatan belum memadai. Selain itu, partisipasi keluarga dalam program juga masih rendah. Kesadaran keluarga untuk mengikuti kegiatan pembangunan keluarga belum optimal, edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja maupun calon pengantin belum intensif, dan jumlah kader serta pendamping keluarga masih belum mencukupi.

Kedua, dalam hal pelayanan keluarga berencana (KB), terdapat dua permasalahan utama, yaitu terbatasnya akses layanan KB dan rendahnya pemanfaatan layanan KB. Dari sisi akses, belum semua fasilitas kesehatan siap melayani KB karena sebarannya tidak merata. Distribusi alat dan obat kontrasepsi juga belum lancar, ditambah dengan keterbatasan tenaga medis terlatih dalam melayani metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Dari sisi pemanfaatan, rendahnya kesadaran pasangan usia subur dalam perencanaan keluarga menjadi kendala signifikan. Stigma sosial terhadap penggunaan kontrasepsi, terutama KB pria, masih kuat, dan informasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) belum menjangkau semua kelompok masyarakat.

Ketiga, permasalahan tingginya tingkat fertilitas juga menjadi tantangan. Edukasi dan advokasi tentang kesehatan reproduksi belum berjalan efektif. Edukasi di sekolah dan masyarakat belum menyeluruh, program edukasi bagi calon pengantin belum rutin, dan dokumen promosi maupun KIE Bangga Kencana belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, dukungan lini lapangan juga belum maksimal. Jumlah dan kapasitas penyuluh KB/PLKB terbatas, pembinaan Kampung KB tidak berkelanjutan, serta koordinasi lintas sektor di tingkat desa dan kelurahan belum solid.

Keempat, dalam aspek sistem informasi, data, dan dokumen kependudukan, permasalahan muncul karena data keluarga belum dikelola secara sistematis. Pencatatan dan pengumpulan data keluarga belum rutin, validasi dan pembaruan data masih dilakukan secara manual, dan banyak Rumah Data Kependudukan yang tidak aktif. Dokumen dan laporan pengendalian penduduk juga belum lengkap;

profil kependudukan tidak selalu update, dokumen GDPK 5 Pilar belum disusun secara konsisten, serta laporan hasil pengendalian program seringkali tidak tepat waktu. Selain itu, mekanisme koordinasi dan pengawasan belum kuat karena pengawasan penyelenggaraan SIK tidak intensif, sinkronisasi antar-OPD belum berjalan optimal, dan forum koordinasi rutin jarang dilaksanakan.

Kelima, permasalahan advokasi, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor juga masih menonjol. Dukungan stakeholder terhadap program Bangga Kencana masih lemah, ditandai dengan keterlibatan organisasi masyarakat yang belum merata, advokasi ke mitra kerja yang terbatas, serta sosialisasi program yang kurang menarik dan tidak sesuai dengan budaya lokal. Koordinasi program lintas sektor pun tidak konsisten. Rapat koordinasi di tingkat kecamatan (Rakorcam), desa (Rakordes), maupun pertemuan minilok tidak dilaksanakan secara rutin. Integrasi program pembangunan di Kampung KB juga belum solid, sementara peran lintas sektor dalam pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) belum kuat.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga terkait dengan kelemahan dalam perencanaan, koordinasi, ketersediaan sumber daya, serta dukungan lintas sektor. Keterbatasan akses layanan, lemahnya data, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga minimnya sosialisasi yang efektif, semuanya saling berkaitan dan memperburuk kondisi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk, dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif dan terarah. Upaya yang diperlukan meliputi pemerataan program Tribina, peningkatan akses dan pemanfaatan layanan KB, penguatan edukasi dan advokasi kesehatan reproduksi, penataan sistem data kependudukan yang lebih akurat, serta optimalisasi peran stakeholder melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor. Tanpa langkah-langkah perbaikan ini, kualitas pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk akan sulit ditingkatkan secara signifikan dan berkelanjutan.

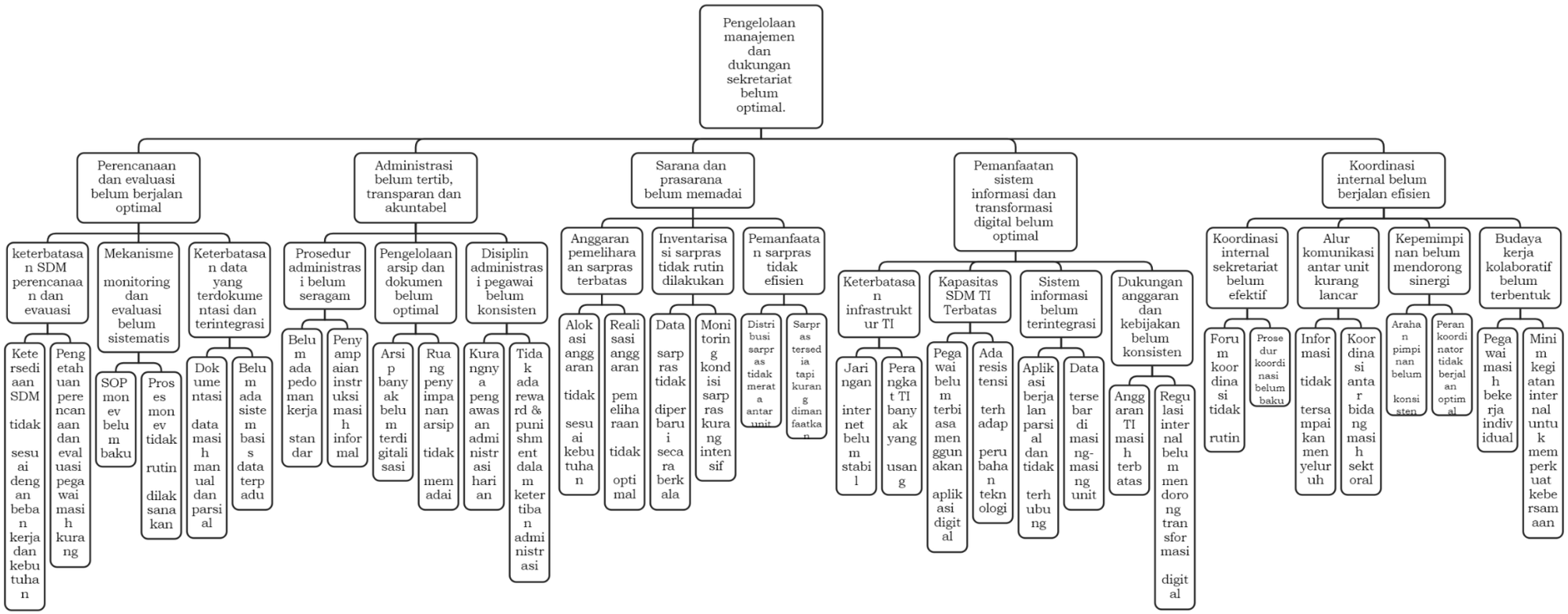

Gambar 2. 5
Pengelolaan manajemen dan dukungan sekretariat belum optimal

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

4. Pengelolaan manajemen dan dukungan sekretariat belum optimal

Permasalahan utama yang dihadapi adalah pengelolaan manajemen dan dukungan sekretariat yang belum optimal. Permasalahan ini berimplikasi pada kurang maksimalnya fungsi sekretariat dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam hal perencanaan, tata kelola administrasi, sarana prasarana, pemanfaatan sistem informasi, serta koordinasi internal. Berbagai penyebab yang melatarbelakangi kondisi tersebut dapat diuraikan secara rinci melalui lima aspek utama (CSF).

Pertama, dalam aspek perencanaan dan evaluasi, kelemahan utama bersumber dari keterbatasan SDM serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang belum sistematis. Ketersediaan SDM tidak sebanding dengan beban kerja dan kebutuhan, sementara pengetahuan pegawai tentang perencanaan dan evaluasi masih terbatas. Di sisi lain, mekanisme monitoring dan evaluasi belum berjalan baik karena belum adanya SOP baku serta kegiatan monev yang tidak rutin dilaksanakan. Keterbatasan data yang terdokumentasi dan terintegrasi semakin memperparah keadaan, karena dokumentasi masih dilakukan secara manual dan parsial tanpa adanya sistem basis data terpadu.

Kedua, dari sisi administrasi dan tata kelola, masalah muncul karena prosedur administrasi yang belum seragam. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya pedoman kerja standar dan penyampaian instruksi yang masih bersifat informal. Selain itu, pengelolaan arsip dan dokumen belum optimal, di mana sebagian besar arsip belum terdigitalisasi dan ruang penyimpanan fisik tidak memadai. Disiplin administrasi pegawai juga masih rendah, karena kurangnya pengawasan administrasi harian dan tidak adanya penerapan reward and punishment dalam menjaga ketertiban administrasi.

Ketiga, pada aspek sarana dan prasarana, kendala muncul akibat kondisi sarpras yang belum memadai dan sebagian dalam keadaan rusak. Hal ini dipengaruhi oleh anggaran pemeliharaan yang terbatas, di mana alokasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan realisasi pemeliharaan sering tidak optimal. Inventarisasi sarpras juga tidak rutin dilakukan, sehingga data sarana prasarana tidak diperbarui secara berkala dan monitoring kondisinya kurang intensif. Pemanfaatan sarpras pun belum efisien, misalnya distribusi yang tidak merata antar unit serta sarpras yang tersedia namun kurang dimanfaatkan secara maksimal.

Keempat, dalam aspek pemanfaatan sistem informasi dan transformasi digital, masalah mendasar terletak pada keterbatasan infrastruktur dan kapasitas SDM. Jaringan internet belum stabil dan sebagian perangkat TI sudah usang, sehingga menghambat digitalisasi. Selain itu, banyak pegawai yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital, bahkan masih terdapat resistensi terhadap perubahan teknologi. Sistem informasi yang ada juga belum terintegrasi, karena aplikasi berjalan parsial dan data tersebar di masing-masing unit. Dukungan anggaran dan kebijakan internal pun belum konsisten, sehingga transformasi digital belum sepenuhnya terwujud.

Kelima, terkait koordinasi internal sekretariat, hambatan utama adalah mekanisme koordinasi yang belum terstruktur. Forum koordinasi tidak rutin dilaksanakan, sementara prosedur koordinasi belum dibakukan. Alur komunikasi antarunit juga belum lancar, ditandai dengan informasi yang tidak tersampaikan menyeluruh serta koordinasi yang masih bersifat sektoral. Kepemimpinan pun belum mendorong sinergi, karena arahan pimpinan belum konsisten dan peran koordinator tidak berjalan optimal. Di samping itu, budaya kerja kolaboratif belum terbentuk, pegawai cenderung bekerja secara individual, dan minim kegiatan internal yang memperkuat kebersamaan.

Keseluruhan permasalahan ini menunjukkan bahwa akar utama dari belum optimalnya pengelolaan sekretariat adalah lemahnya tata kelola manajemen, keterbatasan sumber daya, dan minimnya dukungan sistem pendukung. Keterbatasan SDM, infrastruktur, dan anggaran menjadi faktor penghambat teknis, sedangkan lemahnya mekanisme koordinasi, tata kelola, dan transformasi digital memperburuk kondisi secara kelembagaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan manajemen dan dukungan sekretariat yang optimal, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas SDM, penyusunan pedoman kerja standar, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, digitalisasi administrasi, penyediaan sarpras yang memadai, serta penguatan budaya kerja kolaboratif. Tanpa adanya perbaikan menyeluruh di seluruh aspek tersebut, sekretariat akan sulit menjalankan perannya secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaah terhadap visi, misi, dan program kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih diperlukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dijalankan selama periode kepemimpinan mereka. Telaah ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang memengaruhi efektivitas pelayanan perangkat daerah, sehingga pencapaian visi dan misi dapat berlangsung secara optimal.

Sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Purworejo adalah:

"Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
(Purworejo Berseri)"

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan lima misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera.
2. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
4. Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

Dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinsosdaldukkb secara khusus mendukung Misi 1, dan Misi 5 melalui penyelenggaraan pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, pengendalian penduduk, dan penguatan tata kelola layanan publik.

- Mendukung Misi 1, Dinsosdaldukkb berfokus pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pendampingan keluarga, serta pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana.
- Mendukung Misi 5, Dinsosdaldukkb menekankan penguatan tata kelola internal, peningkatan sistem informasi dan administrasi pelayanan, serta pemeliharaan fasilitas publik sebagai bagian dari penunjang urusan pemerintah daerah.

Dengan demikian, tugas dan fungsi Dinsosdaldukkb sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan sosial, ekonomi, dan tata kelola yang lebih baik di Kabupaten Purworejo.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Penetapan tujuan dan sasaran Renstra Dinsosdaldukkb dilakukan untuk menjembatani visi dan misi kepala daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Tujuan Renstra mencerminkan capaian strategis yang ingin diwujudkan selama periode 2025-2029, sedangkan sasaran merupakan indikator yang lebih spesifik dan terukur untuk memastikan efektivitas dan efisiensi layanan.

Perumusan tujuan dan sasaran disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinsosdaldukkb, selaras dengan sasaran RPJMD, kondisi saat ini, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku. Dengan demikian, tujuan dan sasaran ini menjadi landasan bagi strategi, arah

kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Purworejo.

Dalam penyusunan tujuan dan sasaran Renstra, Dinsosdaldukkb berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. NSPK menjadi dasar acuan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan standar nasional, efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mempermudah pengelolaan, NSPK yang relevan dibagi menjadi dua bidang utama sesuai urusan yang diampu Dinsosdaldukkb, yaitu:

a. Bidang Sosial

Bidang sosial mengacu pada regulasi yang mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat rentan di tingkat kabupaten/kota. NSPK di bidang sosial mencakup:

1. Permensos Nomor 23 tahun 2014 tentang TENTANG STANDAR PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL DAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL
2. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak
6. Permensos No. 19 Tahun 2012 tentang pedoman pelayanan sosial lansia
7. Permensos No. 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas
9. Peraturan Menteri Sosial No 2 tahun 2019 tentang Bantuan sosial Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin
10. Peraturan menteri Sosial No 5 tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
11. Peraturan menteri Sosial no 3 tahun 2025 tentang pemutakhiran dan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk bantuan Sosial, Pemberdayaan sosial dan Program Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial
12. Peraturan menteri Keuangan No 72 tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Pelaksanaan NSPK di bidang sosial menjadi dasar bagi perumusan program, kegiatan, dan evaluasi kinerja Dinsosdaldukkb, sehingga layanan sosial dapat berjalan sesuai standar, merata, dan berkualitas.

b. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang ini mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Kementerian Dukcapil terkait pengendalian penduduk dan program keluarga berencana di tingkat kabupaten/kota. NSPK di bidang ini mencakup:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat

Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana.

3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025.
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
5. Peraturan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pendayagunaan Penyuluh KB dan PLKB.
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Dengan memahami dan menerapkan NSPK di kedua bidang tersebut, Dinsosdaldukkb dapat memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan standar nasional, mendukung pencapaian tujuan pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Purworejo

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan, penyusunan tabel Tujuan dan Sasaran Renstra Dinsosdaldukkb disajikan untuk memudahkan pemahaman dan pemetaan capaian yang ingin dicapai selama periode 2025-2029. Tabel ini menyajikan tujuan utama perangkat daerah, diikuti oleh sasaran spesifik yang terukur sesuai urusan yang diampu, sehingga setiap sasaran dapat dijadikan indikator keberhasilan program dan kegiatan. Dengan adanya tabel ini, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinsosdaldukkb dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan akuntabel, sekaligus memudahkan pemantauan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S1, Meningkatnya kualitas manusia	Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	27,00 %	27,50 %	28,00 %	28,50 %	29,00 %	29,50 %	
		Meningkatnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	27,00 %	27,50 %	28,00 %	28,50 %	29,00 %	29,50 %	
			Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	64,23	65,16	66,09	67,02	67,95	68,88	
		Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	13,80	12,90	12,00	11,20	10,50	9,80	
			Demand Satisfied	84,20	84,50	84,80	85,20	85,50	85,80	
			Total Fertility Rate	2,10	2,09	2,09	2,08	2,07	2,06	
S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif	Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam		Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan)	73,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	
		Meningkatnya pelayanan Taman	Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman	73,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
berbasis teknologi informasi	pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Makam Pahlawan	Makam Pahlawan)							
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

Tujuan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) adalah Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), palayanan taman makam pahlawan, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis.

Pertama, peningkatan kualitas keluarga merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan generasi yang sehat, berpendidikan, dan produktif. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional maupun provinsi yang menekankan pentingnya ketahanan keluarga sebagai basis pengendalian penduduk dan kesejahteraan sosial.

Kedua, penanganan PPKS menjadi mandat utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kehadiran negara melalui perangkat daerah diwujudkan dalam perlindungan, pemberdayaan, serta pemenuhan hak dasar bagi kelompok rentan seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia, fakir miskin, dan korban bencana. Dengan penanganan yang tepat, diharapkan tingkat kerentanan sosial dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara inklusif.

Ketiga, pelayanan taman makam pahlawan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan merupakan upaya pelestarian jati diri bangsa dan penguatan karakter kebangsaan di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks. Penghargaan terhadap pahlawan nasional maupun daerah tidak hanya bersifat seremonial, melainkan juga menjadi sarana pembelajaran nilai kejuangan, semangat gotong royong, dan nasionalisme bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Keempat, akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah prasyarat penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Dinsosdaldukkb dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas kinerja juga menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan keempat tujuan tersebut, Dinsosdaldukkb berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah, mewujudkan masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera, berketahanan, inklusif, serta berdaya saing dalam menghadapi tantangan masa depan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinsosdaldukkb menetapkan sejumlah indikator kinerja yang terukur dan terintegrasi dengan sasaran Renstra.

1. Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani menjadi tolok ukur pencapaian tujuan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo. Target indikator ini ditetapkan secara bertahap, dari 27% pada tahun 2025 hingga 29,5% pada tahun 2030. Peningkatan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan bagi anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, fakir miskin, serta korban bencana. Dengan demikian, langkah terarah ini diharapkan mampu menekan tingkat kerentanan sosial serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.
2. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) merupakan indikator kunci untuk sasaran Meningkatnya kualitas manusia (S1). Nilai Ibangga ditargetkan meningkat dari 64,23 pada 2025 menjadi 68,88 pada 2030. Indikator ini mendukung sasaran Renstra Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, yang diukur melalui beberapa sub-indikator:
   - Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD), menurun dari 13,80% pada 2025 menjadi 9,80% pada 2030;
   - Demand Satisfied, meningkat dari 84,20% menjadi 85,80%;
   - Total Fertility Rate (TFR), menurun dari 2,10 menjadi 2,06. Peningkatan nilai Ibangga dan perbaikan indikator pengendalian penduduk ini mencerminkan upaya Dinsosdaldukkb dalam memperkuat kualitas keluarga melalui program keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Taman Makam Pahlawan (TMP) digunakan untuk mendukung sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, dan responsif berbasis teknologi informasi (S5). Target IKM TMP meningkat dari 73,00 pada 2025 menjadi 79,00 pada 2030, sejalan dengan sasaran Renstra Meningkatnya pelayanan Taman Makam Pahlawan. Peningkatan kepuasan masyarakat ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang berkualitas dan menghormati nilai kepahlawanan.
4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah juga menjadi indikator untuk sasaran S5, serta mendukung sasaran Renstra Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Nilai SAKIP ditargetkan naik dari 68,02 pada 2025 menjadi 80,20 pada 2030. Peningkatan ini menunjukkan fokus Dinsosdaldukkb dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dinsosdaldukkb dalam upaya mencapai tujuan tersebut didukung dengan adanya sasaran yang disusun secara terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Sasaran ini menjadi landasan operasional bagi perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan, sehingga setiap langkah yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan indikator kinerja, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Dengan demikian, keberadaan sasaran strategis berfungsi sebagai jembatan antara tujuan jangka panjang dan implementasi pelayanan yang diberikan Dinsosdaldukkb.

1. Meningkatnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)

Sasaran strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo adalah meningkatnya penanganan Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sasaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan layanan perlindungan, pendampingan, serta pemberdayaan bagi kelompok rentan, seperti anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, fakir miskin, dan korban bencana.

Indikator yang digunakan adalah persentase PPKS yang tertangani, dengan target capaian yang terus meningkat setiap tahun, yaitu 27% pada tahun 2025, naik menjadi 27,5% pada 2026, 28% pada 2027, 28,5% pada 2028, 29% pada 2029, hingga 29,5% pada 2030. Peningkatan ini menggambarkan upaya sistematis memperluas cakupan layanan dan meningkatkan kualitas intervensi sosial, sehingga mampu menekan kerentanan serta mewujudkan kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2. Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk

Sasaran meningkatnya kualitas pengendalian penduduk merupakan upaya strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan kualitas pembangunan manusia. Fokus ini diarahkan agar dinamika kependudukan tidak menimbulkan beban ketergantungan tinggi, tetapi justru menjadi modal pembangunan daerah yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Indikator pertama adalah Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) yang perlu ditekan karena berimplikasi pada kesehatan ibu-anak, kesiapan keluarga, hingga kesejahteraan sosial. Target KTD diturunkan secara bertahap dari 13,8 pada tahun 2025 menjadi 9,8 pada 2030, melalui edukasi reproduksi, peningkatan akses layanan KB, serta dukungan konseling keluarga.

Indikator kedua, Demand Satisfied, mencerminkan persentase kebutuhan ber-KB yang terpenuhi. Target meningkat dari 84,2% pada tahun 2025 hingga 85,8% pada 2030. Pencapaian ini diupayakan lewat penguatan layanan KB yang merata, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kesadaran masyarakat untuk merencanakan keluarga.

Indikator ketiga adalah Total Fertility Rate (TFR) dengan target stabil menurun dari 2,1 pada 2025 menjadi 2,06 pada 2030. Capaian ini akan mendukung tercapainya keluarga kecil berkualitas sesuai sasaran nasional melalui peran aktif penyuluh KB, pemberdayaan keluarga, dan kerja sama lintas sektor.

3. Meningkatnya pelayanan Taman Makam Pahlawan

Sasaran meningkatnya pelayanan Taman Makam Pahlawan (TMP) merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan penghormatan kepada jasa para pahlawan serta menjaga nilai-nilai kepahlawanan tetap hidup di tengah masyarakat. Pelayanan TMP tidak hanya menyangkut pemeliharaan fisik dan kebersihan area makam, tetapi juga mencakup peningkatan tata kelola, kenyamanan pengunjung, dan penyelenggaraan upacara yang khidmat.

Indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) TMP, dengan target yang meningkat secara konsisten, yakni dari 73 pada tahun 2025 menjadi 79 pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan upaya sistematis dalam memperbaiki kualitas layanan, melibatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat peran TMP sebagai sarana pendidikan karakter dan penghayatan nilai patriotisme bagi generasi mendatang.

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah mencerminkan komitmen Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi hasil. Akuntabilitas menjadi kunci agar setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Indikator yang digunakan adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan target peningkatan secara konsisten dari 68,02 pada tahun 2025 hingga mencapai 80,20 pada tahun 2030. Peningkatan ini menggambarkan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, serta evaluasi capaian program. Dengan demikian, perangkat daerah mampu memberikan pelayanan publik yang lebih terukur, akuntabel, dan berdaya guna.

Berdasarkan tujuan, indikator, dan sasaran Renstra Dinsosdaldukkb, dapat disimpulkan bahwa arah pembangunan daerah fokus pada empat hal utama, yaitu: peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator kinerja yang terukur, seperti Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga), Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Makam Pahlawan, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah, menunjukkan target yang meningkat secara bertahap hingga 2030.

Peningkatan indikator tersebut mencerminkan upaya Dinsosdaldukkb dalam mewujudkan kualitas manusia yang lebih baik, kesejahteraan sosial yang merata, pelayanan publik yang profesional dan berkeadilan, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Dengan sasaran dan target yang jelas, Dinsosdaldukkb mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program secara terarah, sehingga seluruh kegiatan berdampak nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi-misi Kabupaten Purworejo.

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, memuat langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi ini mencakup optimalisasi sumber daya, penentuan fokus dan prioritas, tahapan pelaksanaan, serta perumusan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tepat. Pendekatan ini dirancang untuk menghadapi lingkungan yang dinamis dan kompleks, sekaligus memastikan setiap langkah pembangunan selaras dengan visi dan misi Dinsosdaldukkb.

Dalam rangka menjamin pencapaian sasaran secara bertahap dan terukur, pembangunan daerah dilaksanakan melalui penahapan pembangunan tahunan. Penahapan ini menunjukkan prioritas kegiatan setiap tahun yang disusun berdasarkan urgensi, sumber daya yang tersedia, dan dampak yang diharapkan terhadap kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat. Penahapan Renstra PD dapat disajikan secara sistematis dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				
Menguatkan penanganan PPKS melalui program pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, serta penanganan bencana	Meningkatkan efektivitas program pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, dan penanganan bencana untuk mendukung keluarga berkualitas dan PPKS yang responsif	Memantapkan integrasi program pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, dan penanganan bencana sehingga penanganan PPKS lebih optimal, keluarga berkualitas meningkat	Mewujudkan layanan PPKS yang terstandarisasi melalui program pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, dan penanganan bencana, untuk membentuk keluarga berkualitas	Meneguhkan keberlanjutan program pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, dan penanganan bencana sebagai bagian dari penanganan PPKS yang efektif dan keluarga berkualitas yang mandiri
Menguatkan pengelolaan Taman Makam Pahlawan melalui peningkatan kualitas layanan, perawatan fasilitas, dan dokumentasi sejarah, dan penghormatan terhadap nilai kepahlawanan	Meningkatkan efektivitas pelayanan Taman Makam Pahlawan dengan memperluas akses masyarakat, meningkatkan kualitas informasi sejarah, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam perawatan TMP	Memantapkan pengelolaan Taman Makam Pahlawan melalui integrasi sistem informasi layanan, pemeliharaan berkelanjutan, dan program edukasi sejarah untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap nilai kepahlawanan	Mewujudkan Taman Makam Pahlawan yang representatif, aman, dan terawat dengan pelayanan prima bagi pengunjung serta penghormatan penuh terhadap nilai kepahlawanan, mendukung reputasi TMP sebagai ikon sejarah loka.	Meneguhkan keberlanjutan pengelolaan TMP melalui sistem manajemen terintegrasi, pemeliharaan berkelanjutan, inovasi pelayanan berbasis teknologi, dan pelibatan masyarakat untuk memastikan TMP tetap menjadi simbol penghormatan dan edukasi sejarah
Menguatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Menguatkan kualitas keluarga dan pengendalian penduduk melalui program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan serta Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).	Meningkatkan efektivitas program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan serta Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) untuk mendukung keluarga berkualitas, kesadaran pengendalian penduduk, dan kesejahteraan keluarga.	Memantapkan integrasi program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan serta Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) sehingga pengendalian penduduk lebih optimal dan keluarga berkualitas meningkat.	Mewujudkan pelayanan pengendalian penduduk dan pembinaan keluarga berkualitas melalui program KB, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan serta Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) untuk membentuk keluarga yang mandiri dan sejahtera	Meneguhkan keberlanjutan program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan serta Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) sebagai bagian dari pengendalian penduduk yang efektif, dan keluarga berkualitas yang mandiri.

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

Pembangunan bidang sosial, kepahlawanan, dan pengendalian penduduk–KB diarahkan secara bertahap mulai 2026 hingga 2030. Pada tahap awal, kebijakan menekankan penguatan kualitas program layanan dasar, seperti pemberdayaan sosial, perlindungan korban, pengelolaan Taman Makam Pahlawan, serta peningkatan kualitas program KB dan keluarga sejahtera.

Selanjutnya, pada tahap kedua dilakukan peningkatan efektivitas melalui perluasan akses layanan, pemanfaatan informasi publik, dan penguatan partisipasi masyarakat. Memasuki tahap ketiga, fokus diarahkan pada integrasi antarprogram agar lebih sinergis, optimal, dan berkelanjutan.

Pada tahap keempat, layanan yang dihasilkan ditujukan untuk mencapai standar pelayanan publik yang representatif dan merata, sekaligus meningkatkan reputasi daerah. Akhirnya, tahap kelima meneguhkan keberlanjutan dengan sistem manajemen yang terintegrasi, mandiri,

berkualitas, serta melibatkan peran aktif masyarakat sehingga menjadi simbol pembangunan sosial yang efektif dan berkesinambungan.

Berdasarkan tahapan pembangunan yang telah dijelaskan, langkah-langkah strategis tersebut dijabarkan lebih rinci dalam bentuk tabel arah kebijakan Renstra Dinsosdaldukkb, yang memuat sasaran, program/kegiatan, dan sub-kegiatan beserta indikator dan target yang akan dicapai. Tabel ini memberikan panduan operasional mengenai aktivitas yang akan dilakukan setiap tahun, sehingga pelaksanaan strategi dapat terukur, terarah, dan selaras dengan tujuan peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk, pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel 3. 3

Arah Kebijakan Renstra Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1	S1, Meningkatnya kualitas manusia	Arah Kebijakan 2026 : Penguatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk	Penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial ekonomi, peningkatan kapasitas layanan PPKS, serta rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui aktivitas fasilitasi lumbung sosial penanganan bencana, pembinaan dan koordinasi Taruna Siaga Bencana, fasilitasi bantuan sandang dan pangan korban bencana, fasilitasi penanganan kelompok rentan, pelayanan dukungan psikososial, penyediaan permakanan dan sandang PPKS, fasilitasi penyediaan alat bantu disabilitas, fasilitasi reunifikasi keluarga, bimbingan fisik mental spiritual, pengelolaan data sosial-ekonomi, verifikasi data bantuan sosial, pembinaan dan pendampingan KUBE, pembinaan PKH, penyaluran bantuan sosial PPKS, buruh tembakau, serta penguatan tata kelola kepahlawanan dan pelayanan TMP.	Sosial
		Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk	Peningkatan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial ekonomi, peningkatan kapasitas layanan PPKS, serta rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui aktivitas fasilitasi lumbung sosial penanganan bencana, pembinaan dan koordinasi Taruna Siaga Bencana, fasilitasi bantuan sandang dan pangan korban bencana, fasilitasi penanganan kelompok rentan, pelayanan dukungan psikososial, penyediaan permakanan dan sandang PPKS, fasilitasi penyediaan alat bantu disabilitas, fasilitasi reunifikasi keluarga, bimbingan fisik mental spiritual, pengelolaan data sosial-ekonomi, verifikasi data bantuan sosial, pembinaan dan pendampingan KUBE, pembinaan PKH, penyaluran bantuan sosial PPKS, buruh tembakau, serta penguatan tata kelola kepahlawanan dan pelayanan TMP.	Sosial
		Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk	Pemantapan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial ekonomi, peningkatan kapasitas layanan PPKS, serta rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui aktivitas fasilitasi lumbung sosial penanganan bencana, pembinaan dan koordinasi Taruna Siaga Bencana, fasilitasi bantuan sandang dan pangan korban bencana, fasilitasi penanganan kelompok rentan, pelayanan dukungan psikososial, penyediaan permakanan dan sandang PPKS, fasilitasi penyediaan alat bantu disabilitas, fasilitasi reunifikasi keluarga, bimbingan fisik mental spiritual, pengelolaan data sosial-ekonomi, verifikasi data bantuan sosial, pembinaan dan pendampingan KUBE, pembinaan PKH, penyaluran bantuan sosial PPKS, buruh tembakau, serta penguatan tata kelola kepahlawanan dan pelayanan TMP.	Sosial
		Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk	Perwujudan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial ekonomi, peningkatan kapasitas layanan PPKS, serta rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui aktivitas fasilitasi lumbung sosial penanganan bencana, pembinaan dan koordinasi Taruna Siaga Bencana, fasilitasi bantuan sandang dan pangan korban bencana, fasilitasi penanganan kelompok rentan, pelayanan dukungan psikososial, penyediaan permakanan dan sandang PPKS, fasilitasi penyediaan alat bantu disabilitas, fasilitasi reunifikasi keluarga, bimbingan fisik mental spiritual, pengelolaan data sosial-ekonomi, verifikasi data bantuan sosial, pembinaan dan pendampingan KUBE, pembinaan PKH, penyaluran bantuan sosial PPKS, buruh tembakau, serta penguatan tata kelola kepahlawanan dan pelayanan TMP.	Sosial
		Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat,	Peneguhan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial ekonomi, peningkatan kapasitas layanan PPKS, serta rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui aktivitas fasilitasi lumbung sosial penanganan bencana, pembinaan dan koordinasi Taruna Siaga Bencana, fasilitasi bantuan sandang dan	Sosial

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk	pangan korban bencana, fasilitasi penanganan kelompok rentan, pelayanan dukungan psikososial, penyediaan permakanan dan sandang PPKS, fasilitasi penyediaan alat bantu disabilitas, fasilitasi reunifikasi keluarga, bimbingan fisik mental spiritual, pengelolaan data sosial-ekonomi, verifikasi data bantuan sosial, pembinaan dan pendampingan KUBE, pembinaan PKH, penyaluran bantuan sosial PPKS, buruh tembakau, serta penguatan tata kelola kepahlawanan dan pelayanan TMP.	
2		Arah Kebijakan 2026 : Penguatan optimalisasi pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana	Penguatan optimalisasi pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana, yang dilaksanakan melalui koordinasi pengendalian program Bangga Kencana, fasilitasi pemanfaatan data dan informasi (GDPK, SIGA, Rumah Data Kampung KB), penyuluhan, promosi, dan distribusi sarana KIE, pelayanan serta penyediaan sarana penunjang KB termasuk MKJP dan KB pria, pembinaan fasilitas kesehatan dan tenaga lini lapangan, pendampingan keluarga berisiko stunting serta percepatan penurunan stunting, pembinaan UPPKA dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, penguatan peran IMP/PPKBD, fasilitasi Duta Genre, serta peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan secara terintegrasi lintas sektor.	PPKB
		Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana	Peningkatan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana, yang dilaksanakan melalui koordinasi dan fasilitasi program Bangga Kencana, optimalisasi pemanfaatan data dan informasi keluarga (GDPK, SIGA, dan Rumah Data Kampung KB), penguatan penyuluhan, promosi, dan distribusi sarana KIE, peningkatan pelayanan serta sarana penunjang KB termasuk MKJP dan KB pria, pembinaan fasilitas kesehatan dan tenaga lini lapangan, pemantapan pendampingan keluarga berisiko stunting dan percepatan penurunan stunting, pengembangan UPPKA dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, penguatan IMP/PPKBD, fasilitasi Duta Genre, serta pemantapan peran mitra dan organisasi kemasyarakatan melalui integrasi lintas sektor.	PPKB
		Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana	Pemantapan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana, yang dilaksanakan melalui koordinasi dan fasilitasi program Bangga Kencana, optimalisasi pemanfaatan data dan informasi keluarga (GDPK, SIGA, dan Rumah Data Kampung KB), penguatan penyuluhan, promosi, dan distribusi sarana KIE, peningkatan pelayanan serta sarana penunjang KB termasuk MKJP dan KB pria, pembinaan fasilitas kesehatan dan tenaga lini lapangan, pemantapan pendampingan keluarga berisiko stunting dan percepatan penurunan stunting, pengembangan UPPKA dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, penguatan IMP/PPKBD, fasilitasi Duta Genre, serta pemantapan peran mitra dan organisasi kemasyarakatan melalui integrasi lintas sektor.	PPKB
		Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana	Perwujudan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana, yang dilaksanakan melalui penguatan koordinasi program Bangga Kencana, pemanfaatan optimal data dan informasi keluarga (GDPK, SIGA, dan Rumah Data Kampung KB), perwujudan layanan penyuluhan dan promosi KIE yang merata, peningkatan kualitas pelayanan dan sarana penunjang KB termasuk MKJP dan KB pria, pembinaan berkelanjutan fasilitas kesehatan dan tenaga lini lapangan, perwujudan pendampingan keluarga berisiko stunting dan percepatan penurunan stunting, penguatan kemandirian UPPKA dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, optimalisasi IMP/PPKBD, fasilitasi Duta Genre, serta perwujudan sinergi mitra dan organisasi kemasyarakatan melalui integrasi lintas sektor.	PPKB
		Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana	Peneguhan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana, yang dilaksanakan melalui peneguhan koordinasi dan integrasi lintas sektor program Bangga Kencana, pemantapan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan (GDPK, SIGA, dan Rumah Data Kampung KB), peneguhan layanan penyuluhan dan promosi KIE berbasis media massa maupun komunitas, peningkatan keberlanjutan pelayanan KB berkualitas termasuk MKJP dan KB pria, penguatan fasilitas kesehatan dan tenaga lini lapangan, peneguhan pendampingan keluarga berisiko stunting dan program ketahanan keluarga, pengembangan UPPKA dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang mandiri, serta peneguhan peran Duta Genre, IMP/PPKBD, mitra, dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung kesejahteraan keluarga.	PPKB

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
4	S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan 2026 : Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi pengelolaan Taman Makam Pahlawan melalui penerapan digitalisasi data kepahlawanan dan makam, integrasi sistem informasi pelayanan TMP, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang transparan dan mudah diakses untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan melalui Pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar Kemensos, pengelolaan serta pemeliharaan rutin Taman Makam Pahlawan Nasional, penyediaan layanan pemakaman, serta fasilitasi kegiatan ziarah dan studi di TMP Nasional.	TMP
		Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peningkatan inovasi pengelolaan Taman Makam Pahlawan melalui pemanfaatan digitalisasi data kepahlawanan dan makam, peningkatan integrasi sistem informasi layanan TMP, serta keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pelestarian nilai kepahlawanan melalui Pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar Kemensos, pengelolaan serta pemeliharaan rutin Taman Makam Pahlawan Nasional, penyediaan layanan pemakaman, serta fasilitasi kegiatan ziarah dan studi di TMP Nasional.	TMP
		Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Pemantapan inovasi pengelolaan Taman Makam Pahlawan melalui digitalisasi data kepahlawanan dan makam, pemantapan integrasi sistem informasi pelayanan TMP, serta penguatan keterbukaan informasi dan layanan publik yang transparan dan mudah diakses untuk menjaga keberlanjutan penghormatan dan pelestarian nilai kepahlawanan melalui Pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar Kemensos, pengelolaan serta pemeliharaan rutin Taman Makam Pahlawan Nasional, penyediaan layanan pemakaman, serta fasilitasi kegiatan ziarah dan studi di TMP Nasional.	TMP
		Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan inovasi dalam pengelolaan Taman Makam Pahlawan melalui digitalisasi data kepahlawanan dan makam, perwujudan integrasi sistem informasi pelayanan TMP, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pelestarian nilai kepahlawanan melalui Pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar Kemensos, pengelolaan serta pemeliharaan rutin Taman Makam Pahlawan Nasional, penyediaan layanan pemakaman, serta fasilitasi kegiatan ziarah dan studi di TMP Nasional.	TMP
		Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi dalam pengelolaan Taman Makam Pahlawan melalui digitalisasi data kepahlawanan dan makam, peneguhan integrasi sistem informasi pelayanan TMP, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, serta pelestarian nilai kepahlawanan melalui Pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar Kemensos, pengelolaan serta pemeliharaan rutin Taman Makam Pahlawan Nasional, penyediaan layanan pemakaman, serta fasilitasi kegiatan ziarah dan studi di TMP Nasional.	TMP
5		Arah Kebijakan 2026 : Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Penunjang
		Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Penunjang
		Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Penunjang
		Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Penunjang

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Penunjang

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

Arah kebijakan yang tercantum dalam tabel secara umum menunjukkan upaya peningkatan kualitas pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan kepahlawanan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara bertahap dan terintegrasi. Fokus utamanya adalah pada penanggulangan kemiskinan, perlindungan kelompok rentan, penguatan keluarga, dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dalam bidang sosial, kebijakan diarahkan pada penguatan layanan pemberdayaan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial dengan menekankan efektivitas program, integrasi layanan, hingga keberlanjutan yang berorientasi pada kualitas hidup masyarakat.

Pada aspek kepahlawanan, pengelolaan Taman Makam Pahlawan ditingkatkan melalui perbaikan layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyediaan fasilitas representatif yang menghormati nilai sejarah dan memperkuat identitas lokal.

Sementara itu, pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebijakan menekankan penguatan pembinaan keluarga, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta peningkatan kualitas keluarga sejahtera dengan dukungan data yang terintegrasi.

Secara menyeluruh, arah kebijakan ini berpijak pada prinsip penguatan kualitas – peningkatan efektvitas – integrasi layanan – standarisasi – keberlanjutan, dengan tujuan akhir membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bab III telah menguraikan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinsosdaldukkb dalam rangka mewujudkan kualitas keluarga yang lebih baik, pengendalian penduduk yang efektif, pelayanan sosial yang profesional, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkeadilan. Strategi yang disusun mencakup optimalisasi sumber daya, penentuan prioritas tahunan, dan perumusan program/kegiatan yang terukur, dengan tahapan pelaksanaan yang jelas hingga tahun 2030.

Dengan penjabaran arah kebijakan dan aktivitas yang terstruktur, Dinsosdaldukkb memiliki panduan operasional yang jelas untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Bab ini menegaskan bahwa pencapaian sasaran Renstra bukan hanya merupakan tanggung jawab institusi, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sosial yang berkesinambungan dan mandiri.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD, serta sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi instrumen pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Penyusunan program dan kegiatan ini mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya, yang memastikan adanya keselarasan antara perencanaan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mencapai target kinerja perangkat daerah, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, serta program prioritas dan unggulan Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu, setiap rumusan program disertai indikator kinerja yang terukur sehingga dapat menjadi acuan dalam pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Renstra.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Setiap program diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, sekaligus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan kelompok rentan dan potensial.

Penyusunan program dan kegiatan ini dilaksanakan dengan mengacu pada standar klasifikasi sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya, sehingga menjamin adanya keterpaduan antara perencanaan daerah, provinsi, maupun nasional. Selain itu, setiap program dan kegiatan dirinci ke dalam sub kegiatan yang lebih spesifik, agar pelaksanaannya dapat lebih fokus, terukur, serta mudah dievaluasi. Dengan demikian, keseluruhan program dan kegiatan Dinsosdaldukkb tidak hanya sekadar memenuhi mandat administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo.

Sebagai penjabaran dari arah kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi instrumen utama pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Penyusunan program dan kegiatan ini memperhatikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberdayaan kelompok rentan.

Agar pelaksanaan Renstra dapat lebih terarah, efektif, dan terukur, maka program dan kegiatan dijabarkan ke dalam sub kegiatan yang lebih spesifik. Dengan demikian, setiap unit pelaksana di lingkungan perangkat

daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo telah merumuskan sebuah tujuan strategis, yaitu Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan tersebut dipilih karena sejalan dengan visi dan misi Bupati Purworejo yang menekankan pada terwujudnya masyarakat Purworejo yang berdaya saing, sejahtera, religius dan inovatif (Purworejo berseri).

Kualitas keluarga menjadi landasan utama dalam mencetak generasi yang sehat, berpendidikan, serta memiliki daya saing, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan. Penanganan PPKS diprioritaskan karena kelompok rentan membutuhkan perlindungan dan intervensi nyata agar tidak tertinggal dari arus pembangunan daerah. Sementara itu, pelayanan taman makam pahlawan sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan yang merupakan bentuk pelestarian jati diri dan karakter bangsa yang tidak hanya menjaga warisan sejarah, tetapi juga menanamkan nilai kebangsaan bagi generasi muda. Di sisi lain, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan Dinsosdaldukkb tidak hanya merefleksikan kebutuhan nyata di lapangan, tetapi juga merupakan implementasi langsung dari arah pembangunan daerah Purworejo yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, berlandaskan nilai luhur, dan menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo memiliki empat sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam sepuluh program, dua puluh enam kegiatan, dan sembilan puluh lima sub kegiatan.

Sasaran 1: Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo menyelenggarakan lima program utama sebagai berikut:

Program 1: Penanganan Bencana

- Outcome: Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana.
- Kegiatan 1: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
    - Output: Tersusunnya laporan pelaksanaan bantuan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial.
      Sub Kegiatan:
        - Penyediaan makanan
        - Penyediaan sandang
        - Penanganan khusus bagi kelompok rentan
        - Pelayanan dukungan psikososial
        - Penyediaan tempat penampungan pengungsi
- Kegiatan 2: Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.
    - Output: Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.
      Sub Kegiatan:

        - Koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
        - Koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
        - Peningkatan kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam penanganan bencana

Program 2: Pemberdayaan Sosial

- Outcome: Meningkatnya pemberdayaan sosial.
- Kegiatan 1: Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
    - Output: Terlaksananya pengumpulan sumbangan melalui undian sesuai ketentuan.
      Sub Kegiatan:
        - Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang
- Kegiatan 2: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
    - Output: Terbinanya potensi sumber kesejahteraan sosial lembaga dan non-lembaga.
      Sub Kegiatan:
        - Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota
        - Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota
        - Peningkatan kemampuan SDM dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
        - Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial perseorangan kewenangan kabupaten/kota

Program 3: Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

- Outcome: Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.
- Kegiatan 1: Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota ke desa/kelurahan asal.
    - Output: Terfasilitasinya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke desa/kelurahan asal.
      Sub Kegiatan:
        - Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota ke desa/kelurahan asal

Program 4: Rehabilitasi Sosial

- Outcome: Meningkatnya rehabilitasi sosial.
- Kegiatan 1: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial.
    - Output: Terehabilitasinya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial.
      Sub Kegiatan:
        - Penyediaan permakanan
        - Penyediaan sandang
        - Penyediaan alat bantu
        - Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
        - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial

- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga sasaran
- Pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar
- Pemberian layanan data dan pengaduan
- Pemberian layanan kedaruratan
- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
- Pemberian layanan rujukan
- Fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan
- Penyediaan perbekalan kesehatan

- Kegiatan 2: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
  - Output: Terehabilitasinya PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
    Sub Kegiatan:
    - Penyediaan permakanan
    - Fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan dasar
    - Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial

Program 5: Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Outcome: Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial.
- Kegiatan 1: Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar.
  - Output: Terlayaninya anak-anak terlantar melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial.
    Sub Kegiatan:
    - Penjangkauan anak-anak terlantar
- Kegiatan 2: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
  - Output: Terdatanya fakir miskin untuk mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial.
    Sub Kegiatan:
    - Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
    - Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
    - Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
    - Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo melaksanakan tiga program utama, yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pengendalian Penduduk, serta Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Program 1 : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan pokok, yaitu:
- Kegiatan 1: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
  - Output: Terlaksananya promosi pembangunan keluarga berencana (Bangga Kencana) sesuai kearifan budaya lokal di tingkat kecamatan.
    Sub kegiatan:
    - Pengendalian Program KKBPK

        - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
        - Pelaksanaan Rakorcam, Rakordes, dan Mini Lokakarya
        - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media massa cetak, elektronik, dan luar ruang
        - KIE Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal
        - Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada stakeholders dan mitra kerja
- Kegiatan 2: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
    - Output: Terdayagunakannya tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB.
      Sub kegiatan:
        - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
        - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di lini lapangan
        - Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, dan pengembangan Program Bangga Kencana oleh PKB/PLKB
- Kegiatan 3: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelayanan KB di Daerah
    - Output: Terpenuhinya fasilitas kesehatan yang siap melayani program KB.
      Sub kegiatan:
        - Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi
        - Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
        - Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
        - Pembinaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan
        - Peningkatan kesertaan KB pria
- Kegiatan 4: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
    - Output: Terberdayakannya organisasi kemasyarakatan melalui Kampung KB aktif.
      Sub kegiatan:
        - Pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB
        - Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB

Program 2 : Program Pengendalian Penduduk

Outcome dari program ini adalah terkendalinya pertambahan jumlah penduduk. Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan utama:

- Kegiatan 1: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk
    - Output: Terpadu dan tersinkronisasinya kebijakan pengendalian penduduk antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
      Sub kegiatan:
        - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten
        - Advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan pada jalur formal, nonformal, dan informal
- Kegiatan 2: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
    - Output: Tersusunnya dokumen profil kependudukan daerah.
      Sub kegiatan:

- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga
- Penyediaan data dan informasi keluarga
- Pencatatan dan pengumpulan data keluarga
- Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB
- Pembentukan serta operasional Rumah Data Kependudukan di Kampung KB

Program 3 : Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Outcome dari program ini adalah meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Kegiatan 1: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - Output: Terbinanya kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
    Sub kegiatan:
    - Pengelolaan ketahanan keluarga melalui PPKS
    - Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, UPPKA)
    - Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- Kegiatan 2: Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - Output: Terlibatkannya elemen masyarakat dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
    Sub kegiatan:
    - Pendampingan keluarga berisiko stunting (remaja calon pengantin, ibu hamil, pasca salin, baduta/balita)
    - Promosi dan sosialisasi program pembangunan keluarga

3. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran ini ditetapkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan outcome Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah. Program ini terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Output: Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
    Sub kegiatan:
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Output: Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah.
    Sub kegiatan:
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Output: Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah.
  Sub kegiatan:
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Output: Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah.
    Sub kegiatan:
    - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Output: Tersusunnya dokumen administrasi umum perangkat daerah.
    Sub kegiatan:
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan/Material
    - Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Output: Tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
    Sub kegiatan:
    - Pengadaan Mebel
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Output: Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
    Sub kegiatan:
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Output: Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
    Sub kegiatan:
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar
    - Pemeliharaan Mebel
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4. Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Taman Makam Pahlawan

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini ditetapkan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan outcome berupa meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan berikut:

- Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
  - Output: Tersedianya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar.
    Sub kegiatan:
    - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
    - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
    - Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
    - Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Adapun rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran RPJMD : S1, Meningkatnya kualitas manusia S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani		%
		Meningkatnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani		%
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana		*Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Kebutuhan Dasar pada Saat dan Pasca Bencana*	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Tersusunnya laporan pelaksanaan bantuan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bantuan Perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Makanan	
						Penyediaan Sandang	
						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
						Pelayanan Dukungan Psikososial	
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.	Persentase Lembaga Masayarakat yang diperbadayakan dalam Kesiapsiagaan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
						Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		*Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan*	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
				Terfasilitasinya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke desa/kelurahan asal.	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang di fasilitasi pemulangan ke Desa/Kelurahan Asal	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
						Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Terlayaninya anak-anak terlantar melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial.	Persentase Anak terlantar yang mendapatkan layanan	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
						Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
				Terdatanya fakir miskin untuk mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial.	Persentase fakir miskin terdata yang mendapat layanan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial		*Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina*	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Terlaksananya pengumpulan sumbangan melalui undian yang mendapatkan izin sesuai ketentuan.	Persentase Pelaksanaan Undian yang mendapatkan ijin	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Terbinanya potensi sumber kesejahteraan sosial lembaga dan non-lembaga.	Jumlah PSKS Lembaga dan Non lembaga yang di Bina	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial		*Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial*	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Terehabilitasinya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabiltiasi	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
						Penyediaan Permakanan	
						Penyediaan Sandang	
						Penyediaan Alat Bantu	
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
						Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
						Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
						Pemberian Layanan Kedaruratan	
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
						Pemberian Layanan Rujukan	
						Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
				Terehabilitasinya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA, di luar panti sosial.	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang memperoleh rehailitasi	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
						Penyediaan Permakanan	
						Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
						Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
Sasaran RPJMD : S1. Meningkatnya kualitas manusia	Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)		Angka
		Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk			Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)		Angka
		Meningkatnya kualitas			Demand Satisfied		Angka

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		pengendalian penduduk					
		Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk			*Total Fertility Rate*		Angka
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)		*Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)*	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)		*Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)*	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Terlaksananya promosi pembangunan keluarga berencana (Bangga Kencana) sesuai kearifan budaya lokal di tingkat kecamatan	Jumlah Kecamatan yang melakukan promosi pembagnunan keluarga berencana (Bangga Kencana)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
						Pengendalian Program KKBPK	
						Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
						Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
						Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
						Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
						Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Terdayagunakannya tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) terdayaguna	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
						Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
						Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
				Terpenuhinya fasilitas kesehatan yang siap melayani program keluarga berencana (KB).	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
						Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
						Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
						Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
						Peningkatan Kesertaan KB Pria	
				Terberdayakannya organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB melalui Kampung KB aktif.	Jumlah Kampung KB yang aktif dalam Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
						Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
						Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Terpadu dan tersinkronisasinya kebijakan pengendalian kuantitas penduduk antara pemerintah	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				daerah provinsi dan kabupaten/kota.	kabupatne/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
						Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
						Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	
				Tersusunnya dokumen profil kependudukan daerah.	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
						Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
						Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
						Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
						Pembentukan dan Operasional Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		*Persentase Remaja Calon Pengantin yang Mendapat Edukasi Kesehatan Reporduksi dan Perencanaan Keluarga*	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Terbinanya kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R,	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)		
						Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
						Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlibatkannya elemen masyarakat dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	Jumlah Elemen masyarakat yang dilibatkan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
						Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
						Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	
Sasaran RPJMD : S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Angka
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*		Angka
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			keuangan perangkat daerah		Keuangan Perangkat Daerah		
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah.	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan barang Milik Daerah Pada SKPD	
				Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Tersusunnya dokumen administrasi umum perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainyna	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan)		*Angka*
		Meningkatnya pelayanan Taman Makam Pahlawan			Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan)		*Angka*
			Meningkatnya tata kelola taman makan pahlawan		*Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai Standar*	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Tersedianya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar.	Jumlah sarana dan prasarana TMP yang tersedia sesuai standar	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
						Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
						Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
						Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
						Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029. Secara langsung, Dinsosdaldukkb berkontribusi terhadap tiga sasaran RPJMD, yaitu sasaran 1, sasaran 4, dan sasaran 5. Dalam rangka mewujudkan kontribusi tersebut, perangkat daerah ini menetapkan satu tujuan utama, yaitu Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam empat sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), (2) meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, (3) meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan (4) meningkatnya pelayanan Taman Makam Pahlawan. Setiap sasaran ini didukung oleh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun secara terarah dan terukur, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial maupun bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam Renstra Tahun 2025–2029, Dinsosdaldukkb menyelenggarakan dua bidang urusan, yaitu Bidang Sosial serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kedua bidang tersebut dijabarkan ke dalam 10 program, yang terdiri atas 6 program pada bidang sosial, 3 program pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Keseluruhan program tersebut dilaksanakan melalui 26 kegiatan, yang selanjutnya dirinci menjadi 95 sub kegiatan. Di antara sub kegiatan tersebut terdapat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial serta dukungan terhadap program instansi vertikal yang sejalan dengan program pemerintah pusat.

Dengan demikian, seluruh rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinsosdaldukkb bukan hanya ditujukan untuk memenuhi target Renstra perangkat daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purworejo.

Untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan strategis dan implementasi tahunan, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu disertai dengan rencana kebutuhan pendanaan. Penyusunan rencana pendanaan ini dimaksudkan agar pelaksanaan Renstra dapat dilakukan secara realistis sesuai kemampuan keuangan daerah, sekaligus memberikan gambaran kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Selain itu, program hingga tahun 2030 juga dirumuskan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinsosdaldukkb, sehingga dapat menjadi pijakan yang kokoh dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinsosdaldukkb tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya.

Rencana pendanaan yang dimaksud mencakup proyeksi kebutuhan anggaran untuk lima tahun periode Renstra, baik untuk program dan kegiatan prioritas maupun kegiatan pendukung lainnya. Dengan demikian, penyusunan rencana pendanaan tidak hanya menjadi instrumen perencanaan fiskal, tetapi juga berfungsi sebagai alat kendali dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Adapun rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

TABEL 4.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	62,36	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	%	26,9	27,5		28		28,5		29		29,5		29,5			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan)	Angka	0	75		76		77		78		79		79			
			Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,5	65,16		66,09		67,02		67,95		68,88		68,88			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	62,36	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						5.120.628.517		5.171.835.000		4.755.287.000		4.755.287.000		4.755.287.000				
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	5.120.628.517	100	5.171.835.000	100	4.755.287.000	100	4.755.287.000	100	4.755.287.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	24	17.947.500	24	19.627.620	24	12.250.000	24	11.000.000	25	11.000.000	121			
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	12.255.000	22	13.480.500	22	8.750.000	22	8.000.000	23	8.000.000	111			
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	24	4.630.400	24	4.861.920	24	2.750.000	24	2.500.000	24	2.500.000	120			
1.06.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Walidata pendukung statistik sektoral	Dokumen	0	1	1.062.100	1	1.285.200	1	750.000	1	500.000	1	500.000	5			
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah.	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	45	45	4.484.346.367	45	4.497.004.887	45	4.226.825.000	45	4.240.245.000	45	4.240.245.000	225			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	41	37	4.477.180.367	37	4.490.197.187	37	4.221.719.000	37	4.235.394.000	37	4.235.394.000	37			
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	44	7.166.000	44	6.807.700	44	5.106.000	44	4.851.000	44	4.851.000	220			
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	11	1.240.000	11	1.240.000	11	750.000	11	500.000	11	500.000	55			
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	11	1.240.000	11	1.240.000	11	750.000	11	500.000	11	500.000	55			
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	17	1.274.000	17	1.274.000	17	750.000	17	500.000	17	500.000	85			
1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	17	1.274.000	17	1.274.000	17	750.000	17	500.000	17	500.000	85			
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi umum perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	123.115.200	8	128.611.916	8	92.439.000	8	83.500.000	8	83.500.000	39			
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Yang Disediakan	Paket	2	2	5.371.100	2	5.639.655	2	4.000.000	2	3.750.000	2	3.750.000	10			
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4	16.476.100	4	16.640.861	4	12.500.000	4	11.500.000	4	11.500.000	20			
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor Yang Disediakan	Paket	1	1	46.754.400	1	49.092.120	1	35.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5			
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2	11.328.400	2	11.894.820	2	8.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	10			
1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	1	1	6.693.000	1	7.027.650	1	5.271.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5			
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	12	1.800.000	12	1.890.000	12	1.418.000	12	1.250.000	12	1.250.000	60			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	33.857.000	12	35.549.850	12	25.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	60			
1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	2	835.200	2	876.960	2	750.000	2	500.000	2	500.000	10			
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	0	0		4	26.750.000	0		0		0		4			
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	10	7.500.000	0	0	0	0	0	0	10			
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0			
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	5.250.000	0	0	0	0	0	0	1			
1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	0	0	0	1	8.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	266.703.650	24	269.370.687	24	257.500.000	24	256.500.000	24	256.500.000	120			
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	87.639.650	12	88.516.047	12	82.500.000	12	81.500.000	12	81.500.000	60			
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	12	179.064.000	12	180.854.640	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	60			
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	7	7	226.001.800	7	227.955.890	7	164.773.000	7	163.042.000	7	163.042.000	35			
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	41	1	39.950.000	1	41.947.500	1	40.150.000	1	40.150.000	1	40.150.000	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	0	9	93.460.000	9	88.787.000	9	52.000.000	9	52.000.000	9	52.000.000	45			
1.06.01.2.09.0003	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	0	1	37.110.000	1	38.965.500	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	5			
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	0	15	4.755.000	15	4.992.750	0	0	0	0	0	0	30			
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainyna Yang dipelihara	Unit	3	12	8.560.000	12	8.988.000	12	5.843.000	12	5.551.000	12	5.551.000	60			
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	2	35.456.800	2	37.229.640	2	24.200.000	2	22.990.000	2	22.990.000	10			
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	11	6.710.000	11	7.045.500	11	4.580.000	11	4.351.000	11	4.351.000	55			
2	Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	%	26,9	27,5		28		28,5		29		29,5		29,5			
01:06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						7.068.226.600		7.130.623.000		7.068.227.000		7.075.673.000		7.187.468.000				
01:06:02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	%	13,81	16,5	16.738.400	18	37.247.000	19,5	16.738.000	21	17.003.000	21,5	17.272.000	21,5	Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kabupaten Purworejo	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengumpulan sumbangan melalui undian yang mendapatkan izin sesuai ketentuan.	Persentase Pelaksanaan Undian yang mendapatkan ijin	%	100	100	1.768.200	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.128.000	100	3.272.000	100			
1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	1	1	1.768.200	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.128.000	1	3.272.000	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya potensi sumber kesejahteraan sosial lembaga dan non-lembaga.	Jumlah PSKS Lembaga dan Non lembaga yang di Bina	Unit	56	58	14.970.200	59	34.247.000	60	13.738.000	61	13.875.000	62	14.000.000	300			
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	0	0	0	23	8.247.000	26	7.238.000	29	7.250.000	32	7.500.000	110			
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0	12	8.500.000	14	6.500.000	0	0	0	0	26			
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	6	7.643.400	7	9.000.000	0	0	0	0	10	6.500.000	23			
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	0	35	7.326.800	40	8.500.000	0	0	45	6.625.000	0	0	120			
01:06:03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	%	100	100	783.800	100	934.000	100	784.000	100	1.031.000	100	1.047.000	100	Bidang Rehabillitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan bencana dan Pengelolaan Taman makam Pahlawan	Kabupaten Purworejo	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terfasilitasinya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke desa/kelurahan asal.	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang di fasilitasi pemulangan ke Desa/Kelurahan Asal	Orang	3	3	783.800	3	934.000	3	784.000	3	1.031.000	3	1.047.000	15			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	3	783.800	3	934.000	3	784.000	3	1.031.000	3	1.047.000	15			
01:06:04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	%	4,27	5	266.769.600	5,5	302.269.000	6	266.770.000	6,5	270.985.000	7	275.266.000	7	Bidang Rehabillitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan bencana dan Pengelolaan Taman makam Pahlawan	Kabupaten Purworejo	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya rehabilitasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabiltiasi	%	100	100	193.094.100	100	300.000.000	100	264.250.000	100	270.985.000	100	272.516.000	100			
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	20	85.000.000	22	90.000.000	24	95.000.000	25	90.000.000	91			
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	0	0	20	10.000.000	24	12.500.000	0	0	26	14.000.000	70			
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12	11	40.125.000	12	45.000.000	0	0	13	45.000.000	0	0	36			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	0	0	6	4.500.000	7	5.000.000	0	0	13			
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	70	97.201.000	80	90.000.000	90	95.000.000	95	90.000.000	100	95.000.000	435			
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	20	1.968.500	22	2.500.000	24	2.750.000	0	0	26	3.000.000	92			
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	10	7.500.000	12	8.500.000	0	0	14	10.000.000	36			
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	25	2.500.000	27	3.000.000	0	0	29	3.500.000	81			
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	20	2.500.000	22	3.000.000	0	0	24	3.500.000	66			
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3.500.000	7			
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	20	53.799.600	22	46.250.000	24	45.000.000	26	26.000.000	28	40.000.000	120			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	13	1.250.000	0	0	15	1.985.000	17	2.016.000	45			
1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	12	7.500.000	0	0	13	8.000.000	14	8.000.000	39			
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA, di luar panti sosial.	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang memperoleh rehailitasi	%	100	100	73.675.500	100	2.269.000	100	2.520.000	0		100	2.750.000	100			
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	49	17	72.663.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17			
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	10	1.012.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10			
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	1	2.269.000	1	2.520.000	1	0	1	2.750.000	4			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
01:06:05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	93,1	97,39	6.611.855.600	97,65	6.611.856.000	97,94	6.611.856.000	98,12	6.611.856.000	98,54	6.716.323.000	98,54	Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kabupaten Purworejo	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terlayaninya anak-anak terlantar melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial.	Persentase Anak terlantar yang mendapatkan layanan	%	100	100	390.794.500	100	395.000.000	100	395.000.000	100	395.000.000	100	395.000.000	100			
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	29	30	390.794.500	37	395.000.000	37	395.000.000	37	395.000.000	37	395.000.000	178			
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terdatanya fakir miskin untuk mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial.	Persentase fakir miskin terdata yang mendapat layanan	%	100	100	6.221.061.100	100	6.216.856.000	100	6.216.856.000	100	6.216.856.000	100	6.321.323.000	100			
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	11.000	12.500	157.981.000	12.750	289.856.000	13.000	289.856.000	13.250	289.856.000	13.500	294.323.000	65.000			
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	2.600	4.645.015.200	2.650	4.422.000.000	2.700	4.422.000.000	2.750	4.422.000.000	2.800	4.472.000.000	13.500			
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	270	700	1.413.727.900	720	1.500.000.000	740	1.500.000.000	760	1.500.000.000	780	1.550.000.000	3.700			
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penidaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	80	85	4.337.000	87	5.000.000	89	5.000.000	91	5.000.000	93	5.000.000	445			
01:06:06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Kebutuhan Dasar pada Saat dan Pasca Bencana	%	100	100	172.079.200	100	178.317.000	100	172.079.000	100	174.798.000	100	177.560.000	100	Bidang Rehabillitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan bencana dan Pengelolaan Taman makam Pahlawan	Kabupaten Purworejo	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bantuan Perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan sosial	Laporan	12	12	120.473.400	12	125.817.000	12	119.579.000	12	122.298.000	12	125.060.000	60			
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	300	72.674.100	315	70.317.000	330	67.500.000	345	69.123.000	360	69.750.000	1.635			
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	120	125	29.562.400	130	31.250.000	135	29.750.000	140	30.175.000	145	30.350.000	675			
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	35	13.214.100	38	14.500.000	41	12.750.000	44	13.250.000	47	14.460.000	205			
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	25	5.022.800	27	5.500.000	29	5.329.000	31	5.500.000	33	6.250.000	145			
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	4			
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.	Persentase Lembaga Masayarakat yang diperbadayakan dalam Kesiapsiagaan Bencana	%	100	100	51.605.800	100	52.500.000	100	52.500.000	100	52.500.000	100	52.500.000	100			
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1	1	39.515.100	2	40.000.000	3	40.000.000	4	40.000.000	5	40.000.000	15			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	47	50	12.090.700	0	0	52	12.500.000	0	0	54	12.500.000	156			
1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	0	0	0	52	12.500.000	0	0	53	12.500.000	0	0	105			
3	Meningkatnya pelayanan Taman Makam Pahlawan		Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan)	Angka	0	75		76		77		78		79		79			
01:06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						70.047.000		77.287.000		70.047.000		71.154.000		72.278.000				
01:06:07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya tata kelola taman makan pahlawan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai Standar	%	55	62,5	70.047.000	65	77.287.000	67,5	70.047.000	70	71.154.000	72,5	72.278.000	72,5	Bidang Rehabillitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan bencana dan Pengelolaan Taman makam Pahlawan	Kabupaten Purworejo	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar.	Jumlah sarana dan prasarana TMP yang tersedia sesuai standar	Unit	4	6	70.047.000	7	77.287.000	8	70.047.000	9	71.154.000	10	72.278.000	10			
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	32.028.800	1	40.500.000	1	37.500.000	1	37.750.000	1	38.500.000	5			
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	429	437	27.972.200	439	23.500.000	441	20.750.000	443	21.000.000	445	21.250.000	445			
1.06.07.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	2	4.250.000	2	3.750.000	2	3.950.000	2	4.000.000	8			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1.06.07.2.01.0005	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Orang	0	150	10.046.000	155	9.037.000	160	8.047.000	165	8.454.000	170	8.528.000	800			
4	Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk		Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Angka	14,8	12,9		12		11,2		10,5		9,8		9,8			
			Demand Satisfied	Angka	83,9	84,5		84,8		85,2		85,5		85,8		85,8			
			Total Fertility Rate	Angka	2,11	2,09		2,09		2,08		2,07		2,06		2,06			
02:14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						14.338.418.000		14.481.582.000		14.338.418.000		14.492.907.000		14.721.894.000				
02:14:02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19	per 1.000 wanita pada kelompok umur 15-19 tahun	14,4	12,3	716.769.800	11,3	716.770.000	10,4	716.770.000	9,5	728.095.000	8,7	739.599.000	8,7	Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Kabupaten Purworejo	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya pengendalian kuantitas penduduk yang terpadu dan sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk yang terpadu dan sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.	Dokumen	1	1	42.841.800	1	45.250.000	1	47.145.000	1	57.995.000	1	68.849.000	5			
2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	13.783.100	1	12.750.000	1	11.750.000	1	11.750.000	1	12.150.000	5			
2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Satuan Pendidikan	0	8	29.058.700	9	32.500.000	10	35.395.000	11	46.245.000	12	56.699.000	50			
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen profil kependudukan daerah	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	Dokumen	1	1	673.928.000	1	671.520.000	1	669.625.000	1	670.100.000	1	670.750.000	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5			
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	1	1	5.074.800	1	4.595.000	1	4.375.000	1	4.450.000	1	4.750.000	5			
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1	12	362.400.000	12	362.400.000	12	362.400.000	12	362.400.000	12	362.400.000	60			
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	1	192.000.000	1	192.000.000	1	192.000.000	1	192.000.000	1	192.000.000	5			
2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	0	1	34.453.200	1	32.525.000	1	30.850.000	1	31.250.000	1	31.600.000	1			
02:14:03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)	%	65,98	67,74	9.339.911.400	69,09	9.459.291.000	70,47	9.339.911.000	71,88	9.459.291.000	72	9.608.747.000	72	Bidang Keluarga Berencana	Kabupaten Purworejo	
			Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	9,38	9,16		9,07		8,98		8,89		8,85		8,85	Bidang Keluarga Berencana	Kabupaten Purworejo	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya promosi pembangunan keluarga berencana (Bangga Kencana) sesuai kearifan budaya lokal di tingkat kecamatan	Jumlah Kecamatan yang melakukan promosi pembangunan keluarga berencana (Bangga Kencana)	Kecamatan	16	16	1.555.869.600	16	1.559.319.600	16	1.555.869.200	16	1.559.319.600	16	1.559.319.600	16			
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	1	15.420.000	1	15.420.000	1	15.420.000	1	15.420.000	1	15.420.000	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	16	12	908.320.000	12	908.320.000	12	908.320.000	12	908.320.000	12	908.320.000	60			
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	12	361.120.000	12	361.120.000	12	361.120.000	12	361.120.000	12	361.120.000	60			
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	4	124.999.000	4	124.999.000	4	124.999.000	4	124.999.000	4	124.999.000	20			
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	1	12	33.710.600	12	33.710.600	12	33.710.200	12	33.710.600	12	33.710.600	60			
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Oraganisasi	25	29	112.300.000	31	115.750.000	32	112.300.000	33	115.750.000	34	115.750.000	159			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terwujudnya tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang terdayaguna	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) terdayaguna	%	100	100	3.952.000.000	100	3.997.929.600	100	3.952.000.000	100	3.997.929.600	100	3.997.929.600	100			
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	494	840	3.952.000.000	850	3.952.000.000	860	3.952.000.000	870	3.952.000.000	880	3.952.000.000	4.300			
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	0	0	0	18	26.550.000	0	0	20	26.550.000	22	26.550.000	60			
2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	1	0	0	1	19.379.600	0	0	1	19.379.600	1	19.379.600	3			
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya fasilitas kesehatan yang siap melayani program keluarga berencana (KB).	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB	%	100	100	3.585.451.800	100	3.655.451.800	100	3.585.451.800	100	3.655.451.800	100	3.804.907.800	100			
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	16	12	50.265.000	12	50.265.000	12	50.265.000	12	50.265.000	12	50.265.000	60			
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	725	775	1.277.558.800	785	1.347.558.800	795	1.277.558.800	805	1.347.558.800	815	1.497.014.800	3.975			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	0	61	2.217.341.000	61	2.217.341.000	61	2.217.341.000	61	2.217.341.000	61	2.217.341.000	305			
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	48	48	39.015.000	48	39.015.000	48	39.015.000	48	39.015.000	48	39.015.000	240			
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	0	10	1.272.000	12	1.272.000	14	1.272.000	15	1.272.000	16	1.272.000	67			
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terwujudnya Kampung KB yang melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah Kampung KB yang aktif dalam Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kampung KB	41	43	246.590.000	45	246.590.000	47	246.590.000	49	246.590.000	51	246.590.000	235			
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung KB	41	43	244.142.000	45	244.142.000	47	244.142.000	49	244.142.000	51	244.142.000	225			
2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	1	2.448.000	1	2.448.000	1	2.448.000	1	2.448.000	1	2.448.000	5			
02:14:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	%	87,57	89,26	4.281.736.800	89,71	4.305.521.000	90,16	4.281.737.000	90,61	4.305.521.000	91,06	4.373.548.000	91,06	Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Kabupaten Purworejo	
			Persentase Remaja Calon Pengantin yang Mendapat Edukasi Kesehatan Reporduksi dan Perencanaan Keluarga	%	61,7	65		67		69		71		73		73	Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Kabupaten Purworejo	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terwujudnya kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terbina	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Kelompok	20	22	300.471.400	24	304.625.000	26	300.471.600	28	304.625.000	30	304.625.000	130			
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan/ Dokumen	1	1	9.590.000	1	12.050.000	1	9.590.000	1	12.050.000	1	12.050.000	5			
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	16	16	4.881.400	16	6.575.000	16	4.881.600	16	6.575.000	16	6.575.000	80			
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	2	2	286.000.000	2	286.000.000	2	286.000.000	2	286.000.000	2	286.000.000	10			
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang melibatkan elemen masyarakat	Jumlah Elemen masyarakat yang dilibatkan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Mitra	32	38	3.981.265.400	40	4.000.896.000	42	3.981.265.400	44	4.000.896.000	46	4.068.923.000	210			
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	593	12	2.134.800.000	12	2.134.800.000	12	2.134.800.000	12	2.134.800.000	12	2.145.000.000	60			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Laporan	0	12	1.846.465.400	12	1.866.096.000	12	1.846.465.400	12	1.866.096.000	12	1.923.923.000	60			
Jumlah							**26.597.320.117**		**26.861.327.000**		**26.231.979.000**		**26.395.021.000**		**26.736.927.000**				

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan memperhatikan kondisi riil perencanaan, kebutuhan pelayanan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah. Penyusunan rencana pendanaan dilakukan secara proporsional agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terukur, efektif, serta tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Meskipun demikian, terdapat harapan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik melalui dukungan berbagai faktor pendukung, termasuk ketersediaan sumber daya, sinergi antar pemangku kepentingan, serta alokasi anggaran yang memadai. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan kualitas keluaran program dapat tercapai secara optimal, sehingga tujuan pembangunan di bidang sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat terwujud sesuai target yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menegaskan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun dalam Renstra tidak hanya berorientasi pada pencapaian target internal perangkat daerah, tetapi juga selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan Dinsosdaldukkb dirancang secara terpadu, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan yang lebih luas.

Keselarasan tersebut tercermin melalui adanya dukungan langsung terhadap program prioritas pembangunan daerah, yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas atau sub kegiatan strategis. Sub kegiatan ini dirancang untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program prioritas daerah, sehingga capaian pembangunan dapat lebih optimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.

Adapun rincian sub kegiatan prioritas Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4. 2

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana			
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
			Penyediaan Makanan	Fasilitasi bantuan penyediaan makanan bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	SPM
			Penyediaan Sandang	Fasilitasi bantuan penyediaan sandang bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	SPM
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Fasilitasi penanganan khusus bagi kelompok rentan korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	SPM
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Fasilitasi pelayanan dukungan psikosoial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	SPM
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Fasilitasi penyediaan tempat penampungan pengusi korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	SPM
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	Fasilitasi lumbung sosial penanganan bencana	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Kampung Siaga Bencana		
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi penanggulangan bencana melalui taruna siaga bencana	
			Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Peningkatan Kompetensi taruna siaga bencana	
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan			
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Daerah/Kelurahan Asal	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial			
			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		
			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Pengelolaan UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi dalam penjangkauan anak-anak terlantar kewenangan kabupaten/kota	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan Koordinasi pemutakhiran data sosial dan ekonomi	
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pembinaan, Pendampingan, dan fasilitasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	
				Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH)	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Buruh Tembakau	
				Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial untuk LKSA, Panti, PAYMD, PAY, dan Yayasan Sosial	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan sinkronisasi data penerima bantuan jaminan kesehatan dan bantuan sosial	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial			
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pelaksanaan Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan Koordinasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan	Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam Mendukung Pengentasan Masalah Sosial	
5	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
			Penyediaan Permakanan	Penyediaan permakanan bagi PPKS kewenangan kabupaten/kota sesuai standar gizi minimal kewenangan kabupaten	SPM
			Penyediaan Sandang	Penyediaan sandang bagi PPKS kewenangan kabupaten/kota	SPM
			Penyediaan Alat Bantu	Fasilitasi Penyediaan Alat Bantu Disabilitas	SPM
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Fasilitasi reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	SPM
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Fasilitasi Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi disabilitas	SPM
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pelaksanaan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan, pengemis, dan masyarakat	SPM
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi pelaksanaan program sekolah rakyat	SPM
				Fasilitasi pelaksanaan program kesehatan dasar	SPM
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pengelolaan dan penyediaan layanan data dan pengaduan bagi masyarakat kabupaten/kota	SPM
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Penyediaan dan pengelolaan layanan kedaruratan bagi masyarakat kabupaten/kota	SPM
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pengelolaan dan fasilitasi pelayanan penelusuran keluarga	SPM
			Pemberian Layanan Rujukan	Pengelolaan dan koordinasi layanan rujukan sosial	SPM
			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi pendataan dan penyusunan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan	SPM
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Penyediaan dan distribusi perbekalan kesehatan di luar panti	SPM
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
			Penyediaan Permakanan	Penyediaan permakanan bagi PMKS bukan korban HIV/AIDs dan NAPZA kewenangan kabupaten/kota sesuai standar gizi minimal kewenangan kabupaten	
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Fasilitasi pendataan dan penyusunan dokumen kependudukan bagi PMKS bukan korban HIV/AIDs dan NAPZA	
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Fasilitasi koordinasi dan penguatan kemitraan antar lembaga dalam rehabilitasi sosial kewenangan kabupaten/kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
6	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)			
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
			Pengendalian Program KKBPK	Audit Kasus Stunting	
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Penyuluhan program dan pembinaan tenaga lini lapangan	
				Penyediaan layanan sarana dan operasional di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Koordinasi Program Bangga Kencana	
			Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Penyusunan materi promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media massa cetak, elektronik, dan media luar ruang	
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan promosi dan KIE melalui media massa cetak, elektronik, dan media luar ruang	
			Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting	
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Fasilitasi Pelaksanaan IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) / PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana)	
			Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana untuk PKB dan PLKB	
			Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Fasilitasi penyuluhan dan pelayanan program Bangga Kencana oleh PKB/PLKB	
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Distribusi Alat Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan	
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode	Fasilitasi Pelayanan KB MKJP	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Fasilitas Kesehatan terkait Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
			Peningkatan Kesertaan KB Pria	Fasilitasi Peningkatan dan Pelayanan KB Pria	
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Sosialisasi Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Penyusunan dokumen integrasi lintas sektor di Kampung KB	
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk			
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
			Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Fasilitasi pemanfaatan GDPK	
			Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Fasilitasi, koordinasi dan monitoring evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kependudukan	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Koordinasi pembinaan dan pengawasan SIGA	
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Fasilitasi Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga SIGA	
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Koordinasi pencatatan dan pengumulan data keluarga	
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Penyediaan layanan pengolahan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	
			Pembentukan dan Operasional Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Fasilitasi Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan			

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
		Keluarga Sejahtera (KS)			
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di balai penyuluh KB	
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Penyediaan BKB Kit Stunting	
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pendampingan keluarga berisiko stunting	
			Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko stunting	
				Pemilihan dan Fasilitasi Duta Genre	
				Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan	
				Pelaksanaan program ketahanan keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting	
				Peningkatan Kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	
9	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya tata kelola taman makan pahlawan			
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana TMP sesuai standar Kemensos	
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan pemeliharaan rutin Taman Makam Pahlawan Nasional	
			Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengelolaan layanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional	
			Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan fasilitasi pelayanan ziarah dan studi di TMP Nasional	

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

Selain memberikan dukungan terhadap program prioritas pembangunan daerah, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga melaksanakan kewajiban penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai amanat regulasi. Hal ini diwujudkan melalui penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya di bidang sosial.

Dalam pelaksanaannya, Dinsosdaldukkb berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, sub kegiatan yang dirumuskan tidak hanya diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat, khususnya bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan pemerintah.

Aktivitas yang direncanakan dalam Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi aktual yang ada, sehingga diharapkan dapat berjalan secara optimal serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian atau munculnya aktivitas baru di kemudian hari sebagai respon terhadap dinamika dan perubahan kondisi yang terjadi, agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap relevan dan efektif.

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) menyelaraskan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra dengan kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, serta program unggulan Kabupaten Purworejo. Keselarasan ini dimaksudkan agar pelaksanaan program perangkat daerah tidak hanya mendukung pencapaian target internal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan di berbagai tingkatan.

Lebih lanjut, bentuk dukungan Dinsosdaldukkb terhadap kebijakan pembangunan tersebut dapat diuraikan ke dalam tiga bagian utama, yaitu dukungan terhadap program nasional, program provinsi, dan dukungan terhadap program kabupaten (Pitulungan).

4.2.1. Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional)

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Asta Cita yang menjadi arah kebijakan pembangunan nasional, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) Kabupaten Purworejo telah menetapkan berbagai program dan rencana aktivitas yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 4. 3

Program yang Mendukung Program Nasional Asta Cita

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Pelayanan ziarah taman makan pahlawan	Pelayanan ziarah taman makan pahlawan	SOSIAL	DINSOSDALDUKKB
2	Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	Bantuan Sosial KUBE	Bantuan Sosial KUBE	SOSIAL	DINSOSDALDUKKB

	lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				
3	Asta Cita 4: Memperperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial penyandang disabilitas	Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial penyandang disabilitas	SOSIAL	DINSOSDALDUKKB
4	Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Pendampingan lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang anak-anak terlantar	Pendampingan lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang anak-anak terlantar	Sosial	DINSOSDALDUKKB
5		Identifikasi, verifikasi, dan pembaruan data fakir miskin	Identifikasi, verifikasi, dan pembaruan data fakir miskin	Sosial	DINSOSDALDUKKB
6		Penyaluran bantuan bagi keluarga kurang mampu	Penyaluran bantuan bagi keluarga kurang mampu	Sosial	DINSOSDALDUKKB
7		Meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban hidup keluarga yang bekerja sebagai buruh/ petani tembakau	Meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban hidup keluarga yang bekerja sebagai buruh/ petani tembakau	Sosial	DINSOSDALDUKKB
8		Memfasilitasi kelompok masyarakat untuk mendukung usaha ekonomi produktif dalam rangka peningkatan kemandirian dan kesejahteraan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Memfasilitasi kelompok masyarakat untuk mendukung usaha ekonomi produktif dalam rangka peningkatan kemandirian dan kesejahteraan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Sosial	DINSOSDALDUKKB

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

Pertama, Asta Cita 1 yang berfokus pada upaya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), diwujudkan melalui pelayanan ziarah di Taman Makam Pahlawan. Aktivitas ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan, tetapi juga sebagai media pembelajaran nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan penguatan ideologi Pancasila bagi masyarakat.

Kedua, dalam mendukung Asta Cita 3 terkait pengembangan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja berkualitas, pengembangan kewirausahaan, serta penguatan koperasi dan industri kreatif, Dinsosdaldukkb melaksanakan program bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, mengurangi angka pengangguran, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang berbasis pada potensi lokal.

Ketiga, sejalan dengan Asta Cita 4 tentang pembangunan sumber daya manusia yang unggul, kesetaraan gender, serta pemberdayaan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, Dinsosdaldukkb menyelenggarakan kegiatan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas agar mampu berdaya, mandiri, dan berperan aktif dalam pembangunan.

Keempat, mendukung Asta Cita 6 mengenai pembangunan dari desa, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan,

Dinsosdaldukkb melaksanakan sejumlah aktivitas strategis, antara lain pendampingan lembaga non-pemerintah di bidang anak terlantar, identifikasi dan verifikasi data fakir miskin, penyaluran bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu, pemberian bantuan bagi buruh dan petani tembakau, serta fasilitasi usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Usaha Bersama. Seluruh aktivitas tersebut diarahkan untuk mengurangi beban hidup masyarakat miskin, sekaligus mendorong peningkatan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Selain Asta Cita, Dinsosdaldukkb juga memiliki peran penting dalam mendukung Program Strategis Nasional, khususnya penanggulangan kemiskinan melalui dua pendekatan utama.

Tabel 4. 4

Program yang Mendukung Program Nasional Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026	Aktivitas Pendukung di 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Terkait
1	Penanggulangan kemiskinan					
	a. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi 2. Koordinasi dan Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi 2. Koordinasi dan Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	DINSOSDALDUKKB
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Pemberian Bantuan Program Rehabilitasi Sosial	1. Pemberian Bantuan Program Rehabilitasi Sosial	Sosial	DINSOSDALDUKKB
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.Pemetaan dan Pengelolaan permasalahan sosial 2.Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan LK3	1.Pemetaan dan Pengelolaan permasalahan sosial 2.Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan LK3	Sosial	DINSOSDALDUKKB
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting 2. Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3. UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)	1. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting 2. Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3. UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)	Sosial	DINSOSDALDUKKB
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Pelatihan Penguatan Taruna Siaga 2. Bantuan Lumbung Sosial 3. Penguatan Kampung Siaga Bencana 4. Program Penanganan saat dan pasca bencana	1. Pelatihan Penguatan Taruna Siaga 2. Bantuan Lumbung Sosial 3. Penguatan Kampung Siaga Bencana 4. Program Penanganan saat dan pasca bencana	Sosial	DINSOSDALDUKKB
	b. Sekolah rakyat	Koordinasi dan Fasilitasi Sekolah Rakyat	Koordinasi dan fasilitasi sekolah rakyat	Koordinasi dan fasilitasi sekolah rakyat	Sosial	DINSOSDALDUKKB

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

Pendekatan pertama adalah optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui lima program pokok. Program tersebut meliputi: (a) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, seperti penyelenggaraan Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi dan fasilitasi pemberian bantuan perlindungan sosial; (b) Program Rehabilitasi Sosial, berupa pemberian bantuan untuk

meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi; (c) Program Pemberdayaan Sosial, melalui pemetaan masalah sosial, penguatan LK3, serta sertifikasi sumber daya kesejahteraan sosial; (d) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), yang meliputi pendampingan keluarga berisiko stunting, penguatan mitra organisasi masyarakat, dan pengembangan UPPKA; serta (e) Program Penanganan Bencana, yang dilaksanakan melalui pelatihan Taruna Siaga, bantuan lumbung sosial, penguatan kampung siaga bencana, serta program tanggap darurat pasca bencana.

Pendekatan kedua adalah melalui penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan masyarakat dengan mendukung pelaksanaan sekolah rakyat. Dinsosdaldukkb berperan dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi sekolah rakyat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan literasi sosial, serta perluasan akses pendidikan non-formal bagi kelompok rentan.

Dari berbagai program dan aktivitas yang telah dirancang, terlihat bahwa Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo berkomitmen penuh untuk menyelaraskan kebijakan dan program daerah dengan Asta Cita maupun Program Strategis Nasional. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk penyaluran bantuan, tetapi juga melalui pemberdayaan, penguatan kapasitas, serta fasilitasi partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan program-program ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan, mengurangi angka kemiskinan, dan mendorong kemandirian sosial-ekonomi masyarakat.

Dengan adanya keterpaduan antara program Asta Cita dan Program Strategis Nasional, Dinsosdaldukkb berperan sebagai motor penggerak dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Purworejo. Ke depan, sinergi lintas sektor, kolaborasi dengan masyarakat, serta penguatan kelembagaan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4.2.2. Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi)

Dalam upaya mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) Kabupaten Purworejo menjalankan berbagai program strategis yang diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan kelompok rentan.

Tabel 4. 5

Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi)

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Penjangkauan Anak-anak terlantar di UPT Tat TWAM ASI	Sosial	DINSOSDALDUKKB
		Peningkatan kemampuan potensi PSKS	Sosial	DINSOSDALDUKKB
2	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam rehabilitasi sosial	Sosial	DINSOSDALDUKKB
3	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana	Sosial	DINSOSDALDUKKB
		Bantuan Lumbung Sosial	Sosial	DINSOSDALDUKKB
4	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Penjangkauan Anak-Anak terlantar di UPT Tat TWAM ASI	Sosial	DINSOSDALDUKKB
		Bimbingan dan Bantuan kepada LKS/LKSA	Sosial	DINSOSDALDUKKB

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
		Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin, Petugas Lapangan Penanganan Sosial TKSK	Sosial	DINSOSDALDUKKB
		Bantuan Alat Bantu, Bantuan Sandang, Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Sosial	DINSOSDALDUKKB
		Bantuan Sosial Bersyarat	Sosial	DINSOSDALDUKKB
5	Peningkatan kualitas hidup lansia	Bantuan Penyediaan Permakanan, Bantuan Penyediaan Sandang, Bimbingan sosial kepada keluarga lansia, pemberian layanan kedaruratan, penyediaan perbekallan kesehatan	Sosial	DINSOSDALDUKKB

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

Pertama, dukungan diwujudkan melalui pembentukan Kecamatan Berdaya, yang dilaksanakan dengan menjangkau anak-anak terlantar melalui layanan di UPT Tat Twam Asi serta peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Langkah ini ditujukan agar kecamatan menjadi pusat penggerak dalam pemberdayaan sosial yang berkelanjutan.

Kedua, Dinsosdaldukkb juga mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan, dan Penyandang Disabilitas di setiap kecamatan. Melalui kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial, program ini diharapkan mampu memperluas jangkauan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak kelompok rentan.

Ketiga, dalam mendukung ketangguhan daerah terhadap bencana, dilakukan penguatan BPBD dan Tagana berbasis kelompok masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan kompetensi Taruna Siaga Bencana dan pemberian bantuan lumbung sosial. Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin siap, tanggap, dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana.

Keempat, dalam bidang pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar serta fakir miskin, Dinsosdaldukkb melaksanakan berbagai program, antara lain penjangkauan anak-anak terlantar di UPT Tat Twam Asi, bimbingan serta bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS/LKSA), pendataan dan pengelolaan data fakir miskin yang didukung oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta pemberian bantuan sosial berupa alat bantu, sandang, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), hingga bantuan sosial bersyarat. Upaya ini diarahkan untuk memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga miskin.

Kelima, program peningkatan kualitas hidup lanjut usia dilaksanakan melalui penyediaan bantuan permakanan, bantuan sandang, bimbingan sosial kepada keluarga lansia, pemberian layanan kedaruratan, serta penyediaan perbekalan kesehatan. Program ini memastikan lansia memperoleh perhatian, dukungan, dan perlindungan sehingga tetap dapat hidup dengan layak, sehat, dan sejahtera.

Berbagai program yang dilaksanakan oleh Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo menunjukkan adanya sinergi nyata dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Fokus utama terletak pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan perlindungan sosial, penanganan bencana, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup kelompok rentan, termasuk anak-anak terlantar, fakir miskin, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Dengan adanya keselarasan program daerah dan provinsi, Dinsosdaldukkb berkomitmen untuk terus memperkuat peranannya dalam membangun sistem kesejahteraan sosial yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Ke depan, kolaborasi lintas sektor serta partisipasi

aktif masyarakat akan menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata, adil, dan berdaya saing di Kabupaten Purworejo.

4.2.3. Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pitulungan yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Purworejo, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) telah menyelaraskan berbagai aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 4. 6
Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan)

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Sejahtera Wargane	Pemberian bantuan hukum, pendidikan, pembinaan, dan pengembangan organisasi perempuan dan perempuan difabel.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Sosial	DINSOSDALDUKKB
		Pemberian advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi, dan sinkronisasi kegiatan peningkatan kualitas keluarga.	Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan kearifan budaya lokal	PPKB	DINSOSDALDUKKB
		Penguatan mitigasi kebencanaan secara terstruktur dan non struktur.	peningkatan kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Sosial	DINSOSDALDUKKB

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

Pertama, pada Program Unggulan Sejahtera Wargane melalui kegiatan pemberian bantuan hukum, pendidikan, pembinaan, serta pengembangan organisasi perempuan dan perempuan difabel, Dinsosdaldukkb berperan melalui pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Aktivitas ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perempuan difabel, sehingga mereka dapat berdaya, mandiri, serta memiliki akses yang lebih luas terhadap pembangunan.

Kedua, pada kegiatan unggulan berupa pemberian advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi, dan sinkronisasi kegiatan peningkatan kualitas keluarga, Dinsosdaldukkb mendukung melalui pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan kearifan budaya lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sekaligus menanamkan nilai-nilai lokal sebagai penguat jati diri masyarakat Purworejo.

Ketiga, dalam rangka mendukung kegiatan penguatan mitigasi kebencanaan secara terstruktur maupun non-struktur, Dinsosdaldukkb melaksanakan peningkatan kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana). Program ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan keterampilan penanganan bencana, serta memastikan masyarakat memiliki kemampuan tanggap darurat yang memadai.

Program-program yang dijalankan Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Program Pitulungan. Dukungan tersebut mencakup pemberdayaan perempuan dan difabel, peningkatan kualitas keluarga, serta penguatan mitigasi kebencanaan. Hal ini menunjukkan komitmen Dinsosdaldukkb dalam mengintegrasikan layanan sosial,

kependudukan, dan keluarga berencana untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Purworejo secara menyeluruh.

Selain mendukung secara langsung program-program unggulan dalam kerangka Pitulungan, Dinsosdaldukkb juga siap memberikan kontribusi dalam seluruh program Kabupaten Purworejo. Dengan keterpaduan kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat, diharapkan pembangunan sosial dapat terlaksana secara inklusif, adil, dan berkelanjutan, sehingga terwujud masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera dan berdaya.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh berbagai arah kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Dukungan terhadap program nasional diwujudkan melalui implementasi program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, pengentasan kemiskinan, hingga penanganan bencana. Sementara itu, dukungan terhadap program provinsi dilakukan melalui pembentukan Kecamatan Berdaya, penguatan rumah perlindungan, peningkatan kapasitas Tagana, pemberdayaan fakir miskin, serta peningkatan kualitas hidup lansia. Adapun pada program kabupaten (Pitulungan), Dinsosdaldukkb hadir melalui pemberdayaan perempuan dan difabel, peningkatan kualitas keluarga, serta penguatan mitigasi kebencanaan.

Keseluruhan upaya tersebut mencerminkan sinergi yang erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dengan integrasi program, kerja sama lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat, Dinsosdaldukkb berperan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ke depan, dukungan ini akan terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Purworejo secara menyeluruh.

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penentuan indikator dan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) merupakan langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Indikator dan target kinerja dirumuskan secara terukur agar dapat menjadi pedoman dalam mengevaluasi capaian program dan kegiatan, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dalam penyusunannya, indikator kinerja dipilih berdasarkan relevansi dengan sasaran pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinsosdaldukkb. Sementara itu, target kinerja ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya, kondisi faktual masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan sosial dan kependudukan di Kabupaten Purworejo.

Adapun indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan Dinsosdaldukkb dapat dilihat pada Tabel 4.8 Indikator Kinerja Utama Dinsosdaldukkb.

Tabel 4. 7
Indikator Kinerja Utama Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T1	Persentase Pemerlu Pelayanan	%	27,00%	27,50%	28,00%	28,50%	29,00%	29,50%	Indikator Tujuan Dinsosdaldukkb. Tujuan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kesejahteraan Sosial yang Tertangani								Dinsosdaldukkb : Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
T2	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64,23	65,16	66,09	67,02	67,95	68,88	
T3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	
T4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan)	Angka	73,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	
T1.S1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	%	27,00%	27,50%	28,00%	28,50%	29,00%	29,50%	Indikator Sasaran Dinsosdaldukkb. Sasaran 1. Meningkatnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
T2.S1	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Angka	13,80	12,90	12,00	11,20	10,50	9,80	Indikator Sasaran Dinsosdaldukkb. Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk
T2.S2	Demand Satisfied	Angka	84,20	84,50	84,80	85,20	85,50	85,80	
T2.S3	*Total Fertility Rate*	Angka	2,10	2,09	2,09	2,08	2,07	2,06	
T3.S1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Indikator Sasaran Dinsosdaldukkb. Sasaran 3. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah
T4.S1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan)	Angka	73,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	Indikator Sasaran Dinsosdaldukkb. Sasaran 4. Meningkatnya pelayanan Taman Makam Pahlawan

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) memiliki tujuan utama yaitu Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui empat indikator kinerja utama yang dipilih secara terukur, relevan, dan selaras dengan mandat kelembagaan Dinsosdaldukkb.

Pertama, Indikator *Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani* digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan kepada kelompok rentan, seperti anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, fakir miskin, serta korban bencana. Indikator ini mencerminkan sejauh mana intervensi sosial yang dilakukan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan, sehingga semakin tinggi persentase yang dicapai menunjukkan semakin luas cakupan dan semakin baik kualitas pelayanan. Dengan demikian, indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam pencapaian tujuan peningkatan penanganan PPKS secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Purworejo.

Kedua, Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) dipilih karena menjadi ukuran langsung terhadap kualitas keluarga dari aspek ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Indikator ini sesuai dengan fungsi Dinsosdaldukkb dalam penyelenggaraan program pengendalian penduduk

dan keluarga berencana, di mana keluarga yang sehat, mandiri, dan berkualitas merupakan fondasi pembangunan sosial.

Ketiga, Nilai SAKIP Perangkat Daerah dijadikan indikator tujuan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan efektivitas pengelolaan pemerintahan. Dengan indikator ini, Dinsosdaldukkb memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dijalankan secara transparan, efisien, serta mampu menunjukkan hasil yang nyata bagi masyarakat.

Keempat, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Taman Makam Pahlawan menjadi indikator tujuan yang mengukur kualitas layanan publik dalam menjaga, merawat, dan memberikan pelayanan di Taman Makam Pahlawan. Indikator ini dipilih karena relevan dengan pelayanan taman makan pahlawan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan, sekaligus memastikan bahwa masyarakat memperoleh layanan yang layak dalam kegiatan ziarah maupun penghormatan kepada para pahlawan.

Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Dinsosdaldukkb menetapkan empat sasaran utama yang selaras dengan indikator kinerja.

Sasaran pertama adalah meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan indikator persentase PPKS yang tertangani. Indikator ini dipilih karena secara langsung mencerminkan keberhasilan program rehabilitasi sosial, pemberdayaan, dan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, sehingga selaras dengan tujuan meningkatkan penanganan PPKS.

Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, dengan indikator Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD), Demand Satisfied, dan Total Fertility Rate (TFR). Indikator-indikator ini dipilih karena dapat menggambarkan efektivitas program keluarga berencana, pengendalian penduduk, dan kualitas layanan kesehatan reproduksi. Pengendalian penduduk yang baik akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Indikator ini mencerminkan tingkat keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan tujuan Dinsosdaldukkb untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan Taman Makam Pahlawan, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Taman Makam Pahlawan. Indikator ini dipilih karena menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai kepahlawanan tetap dihormati melalui penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas.

Dengan demikian, indikator tujuan dan indikator sasaran yang dipilih oleh Dinsosdaldukkb telah disusun secara relevan, terukur, dan selaras. Seluruhnya dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan utama yaitu Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Selain indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) juga memiliki indikator kinerja kunci yang wajib dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Indikator kinerja kunci ini mengacu pada berbagai ketentuan normatif dan regulatif, antara lain Indikator Urusan Pemerintahan (IUP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta berbagai ketentuan

mandatory lain yang relevan. Dengan demikian, indikator kinerja kunci berfungsi sebagai instrumen pengukuran yang lebih spesifik dan bersifat wajib, untuk memastikan bahwa pelayanan dasar dan target pembangunan sosial, kependudukan, serta keluarga berencana dapat terpenuhi sesuai standar nasional. Adapun rincian indikator kinerja kunci Dinsosdaldukkb disajikan pada Tabel 4.9 Indikator Kinerja Kunci.

Tabel 4. 8
Indikator Kinerja Kunci Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64,23	65,16	66,09	67,02	67,95	68,88	Bidang Keluarga Berencana Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera	IUP
2	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Rehabilitasi Sosial, Pengendalian Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	SPM
3	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		SPM
4	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		SPM
5	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		SPM
6	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		SPM
7	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Rehabilitasi Sosial, Pengendalian Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
9	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2.10	2.09	2.08	2.07	2.06	2.05	Bidang Keluarga Berencana Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan	
10	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	66.41	67.74	69.09	70.47	71.88	72.00		
11	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9.25	9.16	9.07	8.98	8.89	8.85		

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pemerintahan Daerah
12	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of demand satisfied)	Angka	84,20	84,50	84,80	85,20	85,50	85,80		Surat Kemendagri No : 400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025
13	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age spesific fertility rate (ASFR) 15-19 Tahun	Angka	13,05	12,3	11,3	10,4	9,2	8,7		
14	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	%	49,44	49,84	50,24	50,64	51,04	51,44		
15	Persentase Calon Pengantin Mendapatkan Bimbingan Perkawinan dengan materi pencegahan stunting	%	65,00	67,00	69,00	71,00	73,00	73,00		
16	Persentase Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Pendampingan Oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)	%	71,81	72	73,5	75	76,5	78		

Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) tidak hanya menetapkan indikator kinerja utama, namun juga memiliki indikator kinerja kunci (IKK) yang berfungsi sebagai ukuran wajib dalam penyelenggaraan bidang urusan. Indikator kinerja kunci ini bersumber dari beberapa regulasi penting, yaitu: Indikator Urusan Pemerintahan (IUP) sebagai ukuran kinerja spesifik sesuai bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana; Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat dalam bidang pelayanan sosial; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan indikator wajib dalam evaluasi kinerja perangkat daerah.

Selain itu, terdapat pula indikator mandatory yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, khususnya terkait upaya pengendalian penduduk, kesehatan reproduksi, dan penurunan stunting. Hal ini menjadi bagian integral dari peran Dinsosdaldukkb dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten. Dengan demikian, IKK yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan kewajiban normatif, namun juga menunjukkan komitmen Dinsosdaldukkb dalam meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Adapun rincian indikator kinerja kunci tersebut disajikan pada Tabel 4.9 Indikator Kinerja Kunci.

Dengan demikian, dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) mengemban amanah penyelenggaraan dua bidang urusan utama, yakni Bidang Sosial serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kedua bidang tersebut telah diterjemahkan secara operasional ke dalam 10 program, yang mencakup 6 program pada Bidang Sosial, 3 program pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Keseluruhan program tersebut dijalankan melalui 26 kegiatan yang selanjutnya diuraikan menjadi 95 sub kegiatan, sehingga mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif.

Selain itu, Dinsosdaldukkb sebagai perangkat daerah memiliki tanggung jawab penting dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, khususnya terkait pemenuhan hak dasar masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial. Hal ini sekaligus menegaskan peran strategis Dinsosdaldukkb dalam memastikan terjaminnya kualitas pelayanan publik yang berkeadilan, terukur, dan berkelanjutan. Dengan landasan tersebut, Bab IV menjadi pijakan penting dalam rangkaian Renstra untuk mengarahkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Purworejo secara menyeluruh.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo setiap tahun.
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Urusan Lingkungan Hidup merupakan salah satu urusan yang wajib dilaksanakan, sedangkan Urusan Perikanan merupakan salah satu urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo karena letak geografis Kabupaten Purworejo yang berada di pantai selatan. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib bidang Lingkungan Hidup serta urusan pilihan bidang Perikanan. Adapun pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sedangkan urusan Perikanan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (DLHP) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan direvisi dengan Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup, kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas DLHP menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang konservasi dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan penaatan lingkungan, persampahan dan keanekaragaman hayati, dan perikanan. Selain itu juga melaksanakan fungsi kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DLHP dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi DLHP.

Dengan adanya isu strategis masalah lingkungan hidup dan perikanan meliputi meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup karena peningkatan pencemaran air dan udara terutama yang berasal dari limbah domestik dan aktivitas pertanian yang memerlukan penanganan secara optimal, pengelolaan sampah yang belum optimal terutama disebabkan oleh tingginya timbulan sampah yang belum terkelola melalui sistem pengangkutan dan pengolahan yang baik, lemahnya system pengelolaan sampah dari sumber asalnya, terbatasnya sarana prasarana persampahan, dan lemahnya sistem pengelolaan sampah dari sumber asalnya harus segera diintervensi agar tidak memberikan dampak yang lebih besar pada pencemaran tanah, air, dan udara. Di sisi lain, penurunan kualitas tutupan lahan turut menjadi perhatian serius. Meskipun kualitas udara masih tergolong cukup baik, tetap diperlukan langkah antisipatif dalam

menghadapi peningkatan emisi dari transportasi, pembakaran terbuka, dampak perubahan iklim serta optimalisasi upaya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam ketaatan terhadap persetujuan lingkungan. Dalam urusan perikanan, belum optimalnya produksi perikanan baik dari sisi produksi perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan perlu upaya strategis untuk peningkatannya. Intervensi dilakukan terhadap beberapa permasalahan yang mempengaruhi, antara lain: keterbatasan kapasitas SDM Perikanan, keterbatasan fasilitas (Sarana dan Prasarana) usaha perikanan, kerusakan ekosistem perikanan, dan ketergantungan terhadap musim dan iklim. Berbagai isu strategis urusan lingkungan hidup dan perikanan menjadikan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai posisi yang strategis terhadap kebijakan-kebijakan baik di tingkat nasional maupun regional.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan di lingkup Perangkat Daerah disusun memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo 2025-2029, serta berpedoman pada Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu, karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya yang digambarkan sebagai berikut:

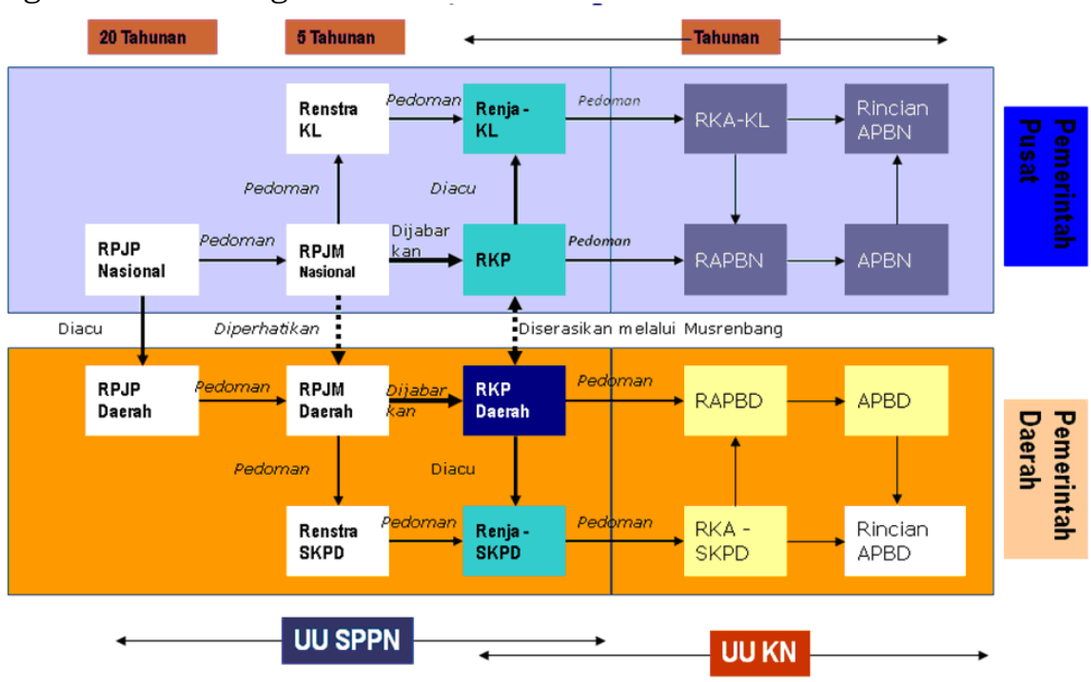

(Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003)
Gambar 1.1 : Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk hasil Perikanan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Sampah Spesifik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH);
21. Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSRT);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Manteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;

31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMENKP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Bank Sampah;
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
37. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo

Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
46. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra ini disusun sebagai penjabaran operasional visi, misi, dan program kepala daerah dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo dalam periode Tahun 2025–2029.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan adalah:

1. Menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) DLHP Kabupaten Purworejo;
2. Menjadi instrumen pengendalian, evaluasi, dan pengawasan kinerja DLHP Kabupaten Purworejo

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah meliputi Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok sasaran layanan serta Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029, serta Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan Uraian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan, Dukungan terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan

Daerah, serta Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Merujuk Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup, kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DLHP menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang konservasi dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan penaatan lingkungan, persampahan dan keanekaragaman hayati, dan perikanan. Selain itu juga melaksanakan fungsi kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DLHP dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi DLHP.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, maka ditetapkan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

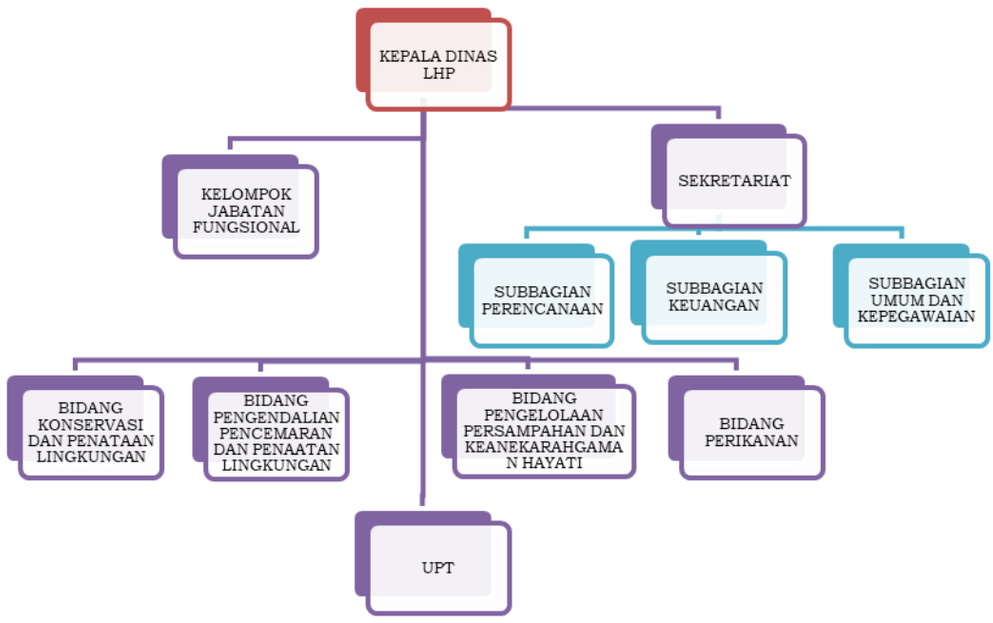

Sumber : Perbup Nomor 125 Tahun 2022

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan terdiri dari atas :

1. Kepala Dinas, bertugas memimpin pelaksanaan Tugas dan Fungsi DLHP.
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DLHP. Sekretariat bertugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan DLHP. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
b. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
d. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan, bertugas menyelenggarakan pengakuaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, perencanaan lingkungan hidup dan peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan (Bidang KPL) menyelenggarakan fungsi:
   a. Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
   b. Meningkatkan kapasitas Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
   c. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten;
   d. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
   e. Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis daerah;
   f. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah; dan
   g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan berkaitan dengan tugas dan fungsi.
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan, bertugas mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, memberi penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penanganan pengaduan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan (Bidang P3L) menyelenggarakan fungsi:
   a. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
   b. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
   c. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
   d. Penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun;
   e. Pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam daerah;
   f. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;

g. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan berkaitan dengan tugas dan fungsi.

5. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman Hayati, bertugas mengelola persampahan dan keanekaragaman hayati. Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman Hayati (Bidang PPKH) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengelolaan persampahan;
   b. pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
   c. pengelolaan keanekaragam hayati;
   d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan berkaitan dengan tugas dan fungsi
6. Bidang Perikanan, bertugas mengelola perikanan tangkap, perikanan budidaya, mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan dan mengolah serta memasarkan hasil perikanan. Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi;
   a. pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Daerah;
   b. pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah;
   c. pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
   d. penerbitkan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 Gross Tonnage di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
   e. penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 Gross Tonnage di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
   f. pelaksanaan pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 Gross Tonnage yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
   g. penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan;
   h. pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
   i. penerbitan tanda daftar begi pembudi daya ikan kecil dalam Daerah;
   j. pengelolaan pembudidayaan ikan;
   k. pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Derah;
   l. penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan lagi usaha skala mikro dan kecil;
   m. pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
   n. penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam Daerah; dan
   o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan berkaitan dengan tugas dan fungsi.
7. UPT, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DLHP. UPT Keanekaragaman Hayati

Heroes Park dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang urusan keanekaragaman hayati.

8. Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan. Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, DLHP didukung oleh sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Sumber Daya Manusia dan Kelengkapan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat sebagai berikut:

Unit	Pria	Wanita	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kepala	1	-	-	-	-	1	1
Sekretaris	-	1	-	-	-	1	1
Sub. Bagian Perencanaan	2	1	-	-	3	-	3
Sub. Bagian Keuangan	2	2	-	3	1	-	4
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3	2		3	2	-	5
Bidang Konservasi Dan Penataan Lingkungan	2	2	-	1	3	-	4
Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Penaatan Lingkungan	3	2	-	-	4	1	5
Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman hayati	52	18	17	39	12	2	70
Bidang Perikanan	6	-	-	-	6	0	6
Jumlah	71	28	17	46	31	5	99

Sumber : DLHP, 2024

Dalam melaksanaan Tugas pokok dan fungsi, DLHP juga ditunjang oleh perlengkapan (Aset dan Sarana Prasarana) yang dimiliki per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

No	Kategori	Jumlah Aset
(1)	(2)	(3)
A.	Gedung/ bangunan	
1	Dinas	6.305 m^2
2	Rumah Kompos	327 m^2
B.	Luas tanah Dinas	2000 m^2
C.	Alat Dinas / RT	meja, kursi, mesin ketik, komputer, almari dll (perincian terlampir)
D.	Kendaraan Dinas	- Kendaraan roda 4 : 7 buah - Kendaraan roda 2 : 24 buah
E.	Alat laboratorium	alat uji kualitas air dan alat uji kualitas udara
F.	Mesin pembuat kompos	1 paket
G.	Jumlah Taman	25 lokasi luas 150.402 m^2
H.	Hutan Kota	1 lokasi luas 60.044 m^2
I.	Jumlah Tugu	10 lokasi
J.	Jumlah pohon ayoman jalan perkotaan : 3.333 pohon	
K.	Sarana dan Prasarana	
1.	Mobil tangga	1 unit
2.	Pick-up	2 unit
3.	Truck	16 unit
4.	Mobil sapu	1 unit

No	Kategori	Jumlah Aset
(1)	(2)	(3)
5.	Motor tangki air	3 unit
6.	Mobil tangki air	3 unit
7.	Kendaraan roda 3	34 buah
8.	Mesin potong rumput gendong	33 unit
9.	Mesin pompa air	2 unit
L.	Jumlah Makam	8 lokasi luas 163.478 m²
1.	Kota Purworejo	5 lokasi luas 112.878 m²
2.	Kota Kutoarjo	3 lokasi luas 50.600 m²

Sumber : SIMDA BMD, 2024

Nilai Aset dan Sarana Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

KODE	BARANG	NILAI (Rp.)
1	*2*	*3*
1.3	ASET TETAP	112,711,967,503.96
1	TANAH	17,685,309,905.00
1.01	TANAH	17,685,309,905.00
2	PERALATAN DAN MESIN	26,953,499,038.09
2.01	ALAT BESAR	5,611,612,924.00
2.02	ALAT ANGKUTAN	11,618,027,519,19
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1,745,398,584,54
2.04	ALAT PERTANIAN	3,424,795,075,2
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	512,154,081.60
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	885.477.535,60
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	67.929.246,60
2.08	ALAT LABORATORIUM	2.400.000,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	3.024.094.887,00
2.10	KOMPUTER	2.184.000,45
2.11	ALAT EKSPLORASI	499.322.794,29
2.12	ALAT PENGEBORAN	0.00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0.00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0.00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0.00
2.16	ALAT PERAGA	13.827.200,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0.00
2.18	RAMBU – RAMBU	1.660.000,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	38.769.271,52
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	42,618,161,898,20
3.02	MONUMEN	34,216,861,146,00
3.03	BANGUNAN MENARA	8.351.555.252,20
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0.00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	24,272,455,947,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	8,756,266,068,00
4.02	BANGUNAN AIR	1,703,434,267,73
4.03	INSTALASI	13,639,430,156,27
4.04	JARINGAN	173,325,455,00
5	ASET TETAP LAINNYA	1.96.058.165,67
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	241.712.350,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0.00
5.03	HEWAN	0.00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0.00
5.05	TANAMAN	854,345,815,67
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0.00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0.00
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	86,482,550.00
6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	86,482,550.00
1.5	ASET LAINNYA	1,853,120,872.00

KODE	BARANG	NILAI (Rp.)
1	*2*	*3*
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0.00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0.00
3	ASET TIDAK BERWUJUD	1,853,120,872.00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	1,853,120,872.00
4	ASET LAIN-LAIN	0.00
4.01	ASET LAIN-LAIN	0.00

Sumber data : Simda BMD Tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan urusan Lingkungan Hidup dan Perikanan dapat dilihat dari ketercapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang dirinci dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo sampai dengan tahun 2024 cukup baik, terlihat dari hasil evaluasi dan capaian target Renstra tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
Kab. Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
T.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah					88,15	88,35	88,45	88,65	88,75		85,28	90,01	81,66				96,74 %	101,87 %	92,32 %		
S.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)					88,15	88,35	88,45	88,65	88,75		85,28	90,01	81,66				96,74 %	101,87 %	92,32 %		
T.2	Indek Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)		IKK	IUP		65,67	65,69	65,71	65,73	65,75		69,39	67,81	66,33				105,66 %	103,23 %	100,94 %		
S.2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan (Persen)		IKK			55 %	60 %	65 %	70 %	75 %		55 %	65 %	65 %				100 %	108,3 %	100 %		
S.3	Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola					42,68	43,30	43,86	44,36	44,89		46,85	48,78	49,92				109,77 %	112,66 %	113,82 %		
T.3	Nilai Tambah Usaha Perikanan (%)					12	12	12	12	12		12	33,75	15				100,00 %	281,25 %	125,00 %		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
S.4	Persentase Kenaikan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya					2	2	2	2	2		2	2,50	2,19				100,00 %	125,00 %	109,50 %		
	INDIKATOR PROGRAM																					
1	Persentase Ketersediaannya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Berkualitas					50	75,00	75,00	100,00	100,00		60	60	75				120,00 %	80,00 %	100,00 %		
2	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Kualitas Air Sungai dan Udara Ambien					65	65,00	65,00	65,00	65,00		85,2	87,5	87,5				131,08 %	134,62 %	134,62 %		
3	Persentase Pengendalian B3 dan LB3					30	35	40	45	50		45	62,2	65				150,00 %	177,77 %	162,50 %		
4	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan terhadap Pengendalian Pencemaran Air yang Tertuang dalam Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan					50 %	55,00 %	60,00 %	65,00 %	70,00 %		57,5 %	55 %	65 %				115,00 %	100,00 %	108,33 %		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
5	Persentase Pengakuan Kearifan Lokal terkait PPLH					4,5	4,9	5,3	5,7	6,07		4,25	4,86	4,86				95,43 %	100,04 %	92,34 %		
6	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan					100	100	100	100	100		100	100	100				100,00 %	100,00 %	100,00 %		
7	Indeks Tutupan Lahan					49,4	49,39	49,41	49,43	49,45		49,3	63,3	68,7				99,94 %	128,18 %	139,00 %		
8	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif					7,51	7,69	7,86	8,03	8,21		12,4	12,9	14,1				165,49 %	167,20 %	179,64 %		
9	Persentase Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat					66,67	66,67	66,67	66,67	66,67		66,67	66,67	66,7				100,00 %	100,00 %	100,01 %		
10	Persentase Penanganan Sampah		IKK			16,97	16,78	16,59	16,40	16,24		20,6	26,1	26,7				121,52 %	155,40 %	160,80 %		
11	Persentase Pengurangan Sampah					25,71	26,52	27,27	27,96	28,65		26,2	22,70	23,3				102,03 %	85,59 %	85,26 %		
12	Persentase Kenaikan Produksi Perikanan Tangkap					3	3	3	3	3		-0,3	4,06	4,86				-10,00 %	135,33 %	162,00 %		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
13	Persentase Kenaikan Produksi Perikanan Budidaya					2	2	2	2	2		2	2	2,09				100,00 %	100,00 %	104,40 %		
14	Persentase Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)					46,2	53,85	69,23	84,62	100,00		53,8	61,5	84,6				116,64 %	114,28 %	122,23 %		
15	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan					10	10	10	10	10		1,3	88	2,52				13,00 %	879,60 %	25,20 %		

Analisis capaian kinerja indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan dan Sasaran DLHP selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 tercapai sesuai target per tahunnya dengan rasio capaian diatas 100 persen. Hanya indikator Tujuan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang tidak mencapai target pada tahun 2022 dan tahun 2024. Hal ini karena kurangnya Sosialisasi dan Diseminasi kepada masyarakat pengguna layanan terkait survey kepuasan masyakat. Pada tahun 2024, survey dilakukan terhadap pengguna layanan persampahan. Dimana layanan persampahan menetapkan adanya retribusi persampahan (berbayar), sedangkan survey tahun sebelumnya dilakukan terhadap pengguna layanan rekomendasi BBM subsidi, dimana penggurusan rekomendasi BBM gratis. Hal ini mempengaruhi hasil survey sehingga membutuhkan sosialisasi lebih mendalam.
2. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan meliputi :
    a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 rasio capaian renstranya sebesar 101,87 persen atau tercapai melebihi target. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2024 masing-masing sebesar 96,74 persen dan 92,32 persen atau tidak tercapai. Hal ini karena survey dilakukan terhadap pengguna layanan DLHP yang berbeda, sehingga perlu upaya sosialisasi mendalam agar responden memahami terkait survey layanan yang dilakukan;
    b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan, dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD). Selama periode tahun 2022-2024 rasio capaian kinerjanya diatas 100 persen, atau melebihi target. Hal ini menunjukan bahwa kualitas lingkungan hidup Kabupaten Purworejo dapat dijaga dengan baik, baik dari segi kualitas air, kualitas udara maupun kualitas tutupan lahan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran seluruh perangkat daerah, Masyarakat dan stakeholder terkait didalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah dari segala bentuk kerusakan ataupun pencemaran lingkungan;
    c. Peningkatan nilai tambah usaha perikanan, dengan indikator Persentase Nilai Tambah Usaha Perikanan. Selama periode tahun 2022-2024 rasio capaian kinerjanya diatas 100 persen, atau melebihi target. Hal ini karena nilai ekonomis tinggi produk perikanan tangkap, sosialisasi pengawasan lebih optimal dan produksi sudah berangsur normal sesuai permintaan pasar.
3. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan ada tiga yaitu:
    a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 rasio capaian renstranya sebesar 101,87 persen atau tercapai melebihi target. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2024 masing-masing sebesar 96,74 persen dan 92,32 persen atau tidak tercapai. Hal ini karena survey dilakukan terhadap pengguna layanan DLHP yang berbeda, sehingga perlu upaya sosialisasi mendalam agar responden memahami terkait survey layanan yang dilakukan.
    Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)”.
    b. Meningkatnya jumlah penanggung jawab usaha yang taat terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan, dengan indikator Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan

lingkungan yang diterbitkan. Selama periode tahun 2022-2024 rasio capaian kinerjanya diatas 100 persen, atau melebihi target. Hal yang mendorong ketercapaian target adalah meningkatnya jumlah penanggungjawab usaha/kegiatan yang taat dalam pengendalian pencemaran, dan meningkatnya desa/kelurahan yang menerapkan PPLH. Hal ini mendorong ketercapaian uji kualitas air memenuhi baku mutu kualitas air (PH, COD, BOD, TSS, Nitrit, DO). 2 parameter yang belum memenuhi yaitu total phosphate dan Fecal Coliform. Hal ini menjadikan evaluasi bahwa pencemaran dari aktivitas pertanian dan penggunaan sungai dalam aktivitas McK masih cukup tinggi.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi".

c. Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten, dengan indikator Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola. Selama periode tahun 2022-2024 rasio capaian kinerjanya diatas 100 persen. Hal ini masih perlu upaya peningkatan dan akselerasi dalam pengelolaan persampahan adalah fokus pada upaya-upaya pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang sampah. Peningkatan upaya pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan dilakukan melalui upaya peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat. Harapannya, masyarakat/kelompok masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah. Selain itu tentunya pelibatan pemerintah desa dalam upaya pengurangan sampah juga perlu didorong lebih aktif.

   Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi".

d. Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan, dengan indikator Persentase Kenaikan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya. Selama periode tahun 2022-2024 rasio capaian kinerjanya diatas 100 persen. Hal yang mendorong ketercapaian target produksi antara lain peningkatan jumlah hari melaut, kondisi cuaca, pengawasan usaha perikanan yang dilakukan, dan adanya dukungan/pendampingan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

   Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri."

4. Selama periode tahun 2022-2024, 12 indikator kinerja Program rasio capaiannya lebih dari 100 persen, sedangkan 3 Indikator kinerja program masih belum tercapai, atau rasionya dibawah 100 persen. Ketiga indikator kinerja program tersebut meliputi:
   a. Indikator Persentase Pengakuan Kearifan Lokal terkait PPLH yang merupakan indikator program Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH. Hal ini disebabkan adanya pengalihan anggaran untuk penyusunan dokumen Masterplan Konservasi mengingat hasil advokasi dan inventarisasi terhadap peraturan desa terkait PPLH baik dari data informasi tentang pengelolaan lingkungan desa maupun anggaran dalam penyusunan Perdes masih kurang. Hal ini karena dalam penyusunan Perdes terkait PPLH membutuhkan kesiapan dan respon Masyarakat.

b. Indikator Persentase Pengurangan Sampah yang merupakan salah satu indicator Program Pengelolaan Persampahan. Hal ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan pengurangan sampah pada aplikasi SIPSN. Dimana agenda pengurangan sampah melalui kegiatan pungut sampah pada Hari Lingkungan Hidup, World Clean Day, dll tidak dapat dimasukkan sebagai pengurang sampah.
c. Indikator Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang merupakan indicator Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Ketidaktercapaian indikatornya disebabkan kesalahan pencantuman target Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Dimana target sebesar 10 persen merupakan target dalam periode Renstra 5 tahun (Renstra 2021-2026) sehingga target per tahun sebenarnya sebesar 2 persen.

5. Capaian Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo periode tahun 2022-2024 secara detail dijelaskan sebagai berikut:
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, target sampai dengan tahun 2024 sebesar 100 persen, realisasi sebesar 100 persen.
   b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, target sampai dengan tahun 2024 sebesar 75 persen, realisasi sebesar 75 persen. Dari target 4 Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang wajib disusun, terealisasi sebanyak 3 dokumen, meliputi : 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 3) Neraca Sumber Daya Alam Strategis (pada tahun 2024 telah dilakukan kajian terkait Neraca Sumber Daya Alam oleh Bapperida dengan judul Analisis NSDA Spasial untuk Forcasting PAD Berkelanjutan di Kabupaten Purworejo). Untuk dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup baru akan mulai disusun pada tahun 2025 sehingga pada tahun 2025 akan tercapai 100 persen.
   c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, target sampai dengan tahun 2024 sebesar 65 persen, realisasi sebesar 87,5 persen. Hal ini karena Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan, mengelola sampah dengan baik dan berkembangnya teknologi untuk pengelolaan limbah dan penghematan sumber daya alam. Dari 8 parameter uji kualitas air, memenuhi baku mutu kualitas air sebanyak 6 parameter uji.
   d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), target tahun 2024 sebesar 49,41, realisasi sebesar 68,68. Hal ini didukung adanya perhitungan penyediaan data deliniasi tutupan lahan menggunakan Arc-GIS.
   e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), target tahun 2024 sebesar 62,22 persen, realisasi sebesar 65 persen. Hal ini karena meningkatnya kepatuhan pelaku usaha/kegiatan dalam mengelola LB3 sesuai regulasi sejalan dengan meningkatya pengetahuan tentang pengeolaan LB3 serta adanya dukungan sistem informasi dalam pelaporan pengelolan LB3 sebagai alat pengendalian.
   f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), target tahun 2024 sebesar 60 persen, realisasi 65 persen. Pencapaian target ini didukung adanya optimalisasi sistem informasi untuk pelaporan kinerja perusahaan/pelaku usaha sebagai dasar pengawasan kinerja lingkungn hidup dan tingkat kepatuhan pelaku usaha untuk mengelola lingkungan sesuai pedoman pengelolaan lingkungan hidup.
   g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, target tahun

2024 sebesar 5,26 persen, realisasi sebesar 4,86 persen yang terdiri dari 24 Desa/Kelurahan yang sudah menerapkan PPLH. Penambahan target tahun 2024 sebanyak 2 Desa/Kelurahan tidak dapat tercapai karena adanya pengalihan alokasi anggaran mengingat hasil advokasi dan inventarisasi terhadap peraturan desa terkait PPLH baik dari data informasi tentang pengelolaan lingkungan desa maupun anggaran dalam penyusunan Perdes masih kurang. Hal ini karena dalam penyusunan Perdes terkait PPLH membutuhkan kesiapan dan respon.

h. MasyarakatProgram Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, target tahun 2024 sebesar 12,85 persen, realisasi sebesar 14,12 persen yang terdiri dari 90 lembaga yang diberikan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang lingkungan hidup yang terdiri dari 70 Sekolah Adiwiyata dan 20 Desa Proklim. Keberhasilan program ini didukung oleh adanya peran aktif masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup.
i. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, target tahun 2024 sebesar 66,67 persen, realisasi 66,67 persen yang meliputi 2 penghargaan lingkungan hidup, penghargaan sekolah adiwiyata dan proklim.
j. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, target tahun 2024 sebesar 100 persen, realisasi sebesar 100 persen meliputi 10 pengaduan lingkungan hidup yang ditangani.
k. Program Pengelolaan Persampahan, target tahun 2024 Penanganan sebesar 26,78 persen, dan Pengurangan Sampah 27,27 persen, realisasi sebesar 26,67 persen untuk penanganan sampah dan sebesar 23,25 persen untuk pengurangan Sampah. Hal ini karena adanya penambahan jumlah timbulan sampah karena adanya peningkatan jumlah penduduk di kabupaten Purworejo dan perubahan metode perhitungan pengurangan sampah pada aplikasi SIPSN. Dimana agenda pengurangan sampah melalui kegiatan pungut sampah pada Hari Lingkungan Hidup, *World Clean Day,* dll tidak dapat dimasukkan sebagai pengurang sampah.
l. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, target tahun 2024 sebesar 3 persen, realisasi sebesar 4,86 persen. Hal ini karena peningkatan jumlah hari melaut, peningkatan upaya pengawasan penangkapan ikan, dan peningkatan pendampingan dan pembinaan nelayan.
m. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, target tahun 2024 sebesar 2 persen, realisasi sebesar 2,088 persen. Hal ini karena peningkatan kapasitas pembudidayaan ikan, efektifitas penanganan hama penyakit ikan, dan dukungan sarana-prasarana pembudidayaan ikan.
n. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, target tahun 2024 sebesar 69,23 persen, realisasi sebesar 84,62 persen. Sampai dengan tahun 2024 sudah terbentuk 11 Pokmaswas.
o. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, target tahun 2024 sebesar 10 persen, realisasi sebesar 2,52 persen. Hal ini karena ketidaktepatan pencantuman target Renstra dalam target Renja masing-masing tahun. Seharusnya target 10 persen untuk 5 tahun periode renstra.

6. Dari hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Renstra periode tahun 2022-2024 dapat disimpulkan beberapa permasalahan dan potensi penyelesaian kedepan, antara lain:
   a. Dalam upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dari hasil uji terhadap kualitas air menunjukkan hasil bahwa masih ditemukan pencemaran dari aktivitas pertanian dan penggunaan sungai dalam aktivitas McK yang cukup tinggi. Hal tersebut membutuhkan penyelesaian dan tindak lanjut dengan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait;

b. Seiring dengan adanya pertumbuhan dan peningkatan jumlah penduduk, jumlah timbulan sampah juga semakin meningkat. Hal ini perlu adanya upaya penurunan jumlah timbulan sampah melalui pembatasan timbulan yang dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat. Harapannya, masyarakat/kelompok masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah. Selain itu tentunya pelibatan pemerintah desa dalam upaya pengurangan sampah juga perlu didorong lebih aktif untuk mengurangi potensi timbulan sampah dari sumbernya di Masyarakat;
c. Hasil advokasi dan inventarisasi terhadap peraturan desa terkait PPLH baik dari data informasi tentang pengelolaan lingkungan desa maupun anggaran dalam penyusunan Perdes masih kurang. Perlu Upaya tindak lanjut dalam rangka mendorong kesiapan dan respon desa dalam menyusun peraturan desa terkait PPLH. Selain itu, pelibatan DP3APMD penting dilakukan dalam upaya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sosialisasi lebih lanjut;
d. Dalam Upaya peningkatan produksi perikanan, masih diperlukan upaya pendampingan berkelanjutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat baik untuk usaha penangkapan ikan maupun usaha pembudidayaan ikan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan. Hal ini mengingat masih adanya kesenjangan dalam hal keterbatasan kapasitas SDM Perikanan, Fasilitas (Sarana dan Prasarana) dan masih ketergantungannya usaha pada musim dan iklim.

Kinerja Pelayanan urusan Lingkungan Hidup dan Perikanan juga dapat dilihat dari hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
A. Urusan Lingkungan Hidup																		
Program Perencanaan Lingkungan Hidup		100,000,000	333.591.000	146.951.400				99,617,990	319,203,910	141,143,688				99.6 %	95.7 %	96.05 %		
Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		488.025.464	604,664,000	319.860.900				477,628,747	601,277,123	316,781,386				97,9 %	99.4 %	99.04 %		
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		32.237.000	21,659,000	10.959.100				32,236,408	21,070,960	10,874,000				99,99 %	97.3 %	99.22 %		
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		59.119.000	79,462,900	72.388.300				58,995,100	77.743,144	72,268,740				99.8 %	97.8 %	99.83 %		
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		130.198.600	16,520,500	310.154.400				123.640.200	14,855,500	294,072,700				94,96 %	89.9 %	94.81 %		
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		24.905.100	21,172,000	13.033.500				24,876,000	20,908,600	13,033,500				99.9%	98.8 %	100 %		
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		5.612.866.454	4,071,293,500	4.107.511.183				5,368,215,199	3,768,631,482	4,037,844,865				95.6%	92.6 %	98.30 %		

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		167.345.300	137,766,400	93.256.000				167,252,420	125,828,600	91,376,604				99.9%	91.3 %	97.98 %		
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		60.000.000	75,000,000	65.000.000				59,492,000	74,071,400	62,849,429				99.2%	98.8 %	96.69 %		
Program Pengelolaan Persampahan		10.454.903.520	7,113,438,598	6.764.104.127				9.236.452.435	6,933,137,961	6,009,572,443				88.3 %	97.5%	88.85 %		
B. Urusan Perikanan																		
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		95.581.400	436,109,500	29.245.400				95,079,900	436,109,500	29,217,288				99.5 %	100 %	99.9 %		
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		1.177.299.900	1,586,821,900	1.121.861.900				941,535,740	1,458,868,850	1,101,956,776				79,97 %	91.9 %	98,23 %		
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		6.154.000	80,309,700	26.115.800				6,064,000	70,063,630	25,779,900				98.5%	87.2 %	98,71 %		
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		20,000,000	28,310,900	105.871.300				19,958,000	27,909,900	105,178,040				99.8 %	98.6 %	99,35 %		

Analisis capaian Kinerja keuangan periode tahun 2022-2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagai berikut :

a. Secara keseluruhan capaian kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan periode tahun 2022-2024 cukup baik dengan rasio diatas 95 persen. Hal ini didukung oleh Pengelolaan pendanaan yang baik, kesesuaian antara perencanaan aktivitas dengan pelaksanaan aktivitas, dukungan manajemen, dan dukungan sumber daya. Faktor eksternal yang mendukung adalah adanya kontribusi dan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan anggaran, termasuk OPD terkait, stakeholder dan juga masyarakat pengguna layanan.
b. Beberapa program yang rasio capaian realisasi anggarannya dibawah 95 persen antara lain:
    1. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH. Hal ini disebabkan adanya pengalihan alokasi anggaran mengingat hasil advokasi dan inventarisasi terhadap peraturan desa terkait PPLH baik dari data informasi tentang pengelolaan lingkungan desa maupun anggaran dalam penyusunan Perdes masih kurang. Hal ini karena dalam penyusunan Perdes terkait PPLH membutuhkan kesiapan dan respon.
    2. Program Pengelolaan Persampahan, pada tahun 2022 dan 2024 rasionya sebesar 88,30 persen dan 88,85 persen karena adanya optimalisasi belanja pengadaan barang dan jasa terkait operasional pengelolaan sampah di TPA.
    3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada tahun 2022 dan 2023 rasionya sebesar 79,97 persen dan 91,9 persen karena adanya optimalisasi belanja pengadaan barang dan jasa.
    4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023 rasio realisasinya sebesar 87,2 persen karena optimalisasi belanja pengadaan.
c. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran, dapat disimpulkan bahwa pentingnya kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran untuk mencapai sasaran perangkat daerah dan mewujudkan ketercapaian output dan outcome belanja. Hal ini digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran kedapan untuk Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan meningkatkan akurasi realisasi pencairan dana (kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana), mendorong akselerasi belanja, meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan, dan mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi capaian output yang berkualitas.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan pada Indikator Rencana Strategis 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Indeks Kualitas Air	72,72	67,27	42,50	47,89	65,74	(Tujuan/ Sasaran PD) Capaian IKA sampai dengan tahun 2024 tergolong kurang. Beberapa penyebab kurangnya IKA antara lain adalah masih terjadinya pencemaran air yang berasal dari limbah domestik (aktivitas Mck) dan penggunaan pupuk pertanian yang tidak ramah lingkungan yang mnnimbulkan pencemaran air. Hal ini didapat dari hasil uji sampel terhadap kualitas air di 3 DAS yang menunjukkan bahwa 2 parameter uji tersebut tidak terpenuhi. Upaya akselerasi untuk meningkatkan IKA, memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait yang menangani pertanian dan aktivitas masyarakat (DP3APMD; DKPP).
2	Indeks Kualitas Udara	96,35	96,03	88,45	88,74	85,97	(Tujuan/ Sasaran PD) Capaian IKU sampai dengan tahun 2024 tergolong Baik, walaupun cenderung turun nilainya pada setiap tahunnya. Ketercapaian ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya yang mengakibatkan pencemaran udara. Kedepan, beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain pengendalian pencemaran udara yang berasal dari aktivitas pembakaran sampah domestik dan sisa hasil pertanian melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait. Selain itu, gerakan untuk menggunakan angkutan umum masal perlu dilakukan agar polusi yang berasal dari kendaraan bermotor dapat dikendalikan.
3	Indeks Kualitas Lahan	45,66	42,33	34,63	63,31	68,68	(Tujuan/ Sasaran PD) Capaian IKL sampai dengan tahun 2024 tergolong sedang, hal ini mengambarkan bagaimana upaya untuk menjaga kualitas tutupan lahan masih cukup baik ditengah-tengah meningkatnya jumlah aktivitas manusia, jumlah industri, peralihan lahan dll. Kedepan, upaya peningkatan kualitas dan juga kuantitas tutupan lahan perlu ditingkatkan agar IKL meningkat antara lain

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
							melalui rehab beberapa taman kota, dan perwujudan kebun raya heroes park.
a	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pada periode tahun 2020-2024, beberapa target rekomendasi kajian lingkungan hidup yang wajib disusun, meliputi : 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 3) Neraca Sumber Daya Alam Strategis (pada tahun 2024 telah dilakukan kajian terkait Neraca Sumber Daya Alam oleh Bapperida dengan judul Analisis NSDA Spasial untuk Forcasting PAD Berkelanjutan di Kabupaten Purworejo).
b	Persentase Pengendalian Pencemaran yang Dilaksanakan	85,07 %	85,72 %	85,20 %	87,50 %	87,50 %	Sampai dengan periode tahun 2024, dari 8 parameter uji kualitas air, memenuhi baku mutu kualitas air sebanyak 6 parameter uji (PH, COD, BOD, TSS, Nitrit, DO) atau 75 % memenuhi baku mutu kualitas air. 2 parameter yang belum memenuhi yaitu total phosphate dan Fecal Coliform. Hal ini menjadikan evaluasi bahwa pencemaran dari aktivitas pertanian dan penggunaan sungai dalam aktivitas McK masih cukup tinggi.
c	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap Luas Perkotaan	7,234 %	7,234 %	7,234 %	7,234 %	7,234 %	Pada periode tahun 2020-2024, dapat dipertahankan Luas RTH yang dikelola oleh DLHP. Hal ini karena keterbatasan lahan untuk menambah luasan RTH Publik. Kedepan perlu upaya koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan luas RTH.
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	25,45 %	25,27%	25,59 %	25,63 %	26,43 %	(IUP; Tujuan PD) Indikator ini mengambarkan proporsi sampah yang berhasil ditangani oleh fasilitas resmi pengolahan sampah di suatu wilayah. Tingginya persentase sampah yang terolah mencerminkan keberhasilan sistem pengelolaan sampah dalam mengurangi beban TPA, mengurangi dampak lingkungan, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Kabupaten/Kota. Indikator ini merupakan gambaran dari upaya daerah untuk

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
							melakukan aktivitas Pendauran Ulang Sampah dan Pengolahan Sampah.
5	Persentase Sampah Terkelola	41,75 %	43,62 %	49,11 %	49,15 %	49,92 %	(Sasaran PD) Indikator ini mengukur persentasi penanganan dan pengurangan sampah atas timbulan sampah. Capaian selama 2022-2024 naik signifikan dan tercapai sesuai target kinerjanya.
d	Persentase Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang Dilaksanakan	35,00 %	40,00 %	45,00 %	62,22 %	65,00 %	Peningkatan realisasi mengambarkan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha/kegiatan dalam mengelola LB3 sesuai regulasi sejalan dengan meningkatya pengetahuan tentang pengeolaan LB3 serta adanya dukungan sistem informasi dalam pelaporan pengelolan LB3 sebagai alat pengendalian.
e	Persentase Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan dalam Pemenuhan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan	-	-	50 %	55 %	65 %	Pencapaian target ini didukung adanya optimalisasi sistem informasi untuk pelaporan kinerja perusahaan/pelaku usaha sebagai dasar pengawasan kinerja lingkungn hidup dan tingkat kepatuhan pelaku usaha untuk mengelola lingkungan sesuai pedoman pengelolaan lingkungan hidup
f	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif	5,84 %	6,16 %	6,55 %	6,95 %	7,19 %	Sampai dengan tahun 2024, 90 lembaga telah diberikan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang lingkungan hidup. Target lembaga kemasyarakatan yang akan diintervensi meliputi lembaga pendidikan/kemasyarakatan dan desa/kelurahan (jumlah sekolah SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK Negeri dan swasta=757) ditambah jumlah desa/kel =494. Total =1251)
g	Persentase Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	33,33 %	0,00	66,67 %	66,67 %	66,67 %	Meliputi 2 penghargaan lingkungan hidup, penghargaan sekolah adiwiyata dan penghargaan program kampung iklim. Implementasi ini sebagai wujud penilaian atas kinerja masyarakat dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup
h	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanganan pengaduan adalah proses untuk menanggapi dan menyelesaikan keluhan atau masalah yang disampaikan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Pencemaran Lingkungan yang Ditangani						oleh pelanggan atau masyarakat sebagai wujud respon terkait permasalahan lingkungan hidup, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Sampai dengan saat ini setiap pengaduan yang ada selalu direspon dengan baik.
i	Persentase Penanganan Sampah	17,87 %	18,13 %	23,04 %	26,16 %	26,67 %	Hasil perhitungan jumlah penanganan sampah melalui pengolahan dan pemrosesan akhir terhadap timbulan sampah pada tahun yang sama. Penanganan sampah yang efektif dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kinerja penanganan sampah sampai dengan tahun 2024 cukup baik, sesuai dengan target dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun kenaikannya tidak cukup signifikan yang disebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah. Hal ini perlu upaya mengurangi timbulan sampah dan penanganan sampah dari sumber sampahnya.
j	Persentase Pengurangan Sampah	23,88 %	25,49 %	26,07 %	22,99 %	23,25 %	Hasil perhitungan jumlah pengurangan sampah terhadap timbulan sampah pada tahun yang sama.Kinerje pengurangan sampah cenderung turun karena perubahan metode perhitungan pengurangan sampah pada aplikasi SIPSN. Dimana agenda pengurangan sampah melalui kegiatan pungut sampah pada Hari Lingkungan Hidup, World Clean Day, dll tidak dapat dimasukkan sebagai pengurang sampah.
6	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	7.327,48 Juta Rupiah	5.871,41 Juta Rupiah	5.462,88 Juta Rupiah	5.799,38 Juta Rupiah	8.059,89 Juta Rupiah	(Tujuan dan Sasaran PD) Nilai ini menggambarkan Nilai Ekonomi Total dari hasil Penangkapan Ikan yang diperoleh dari sumber perikanan alami yang terdiri dari hasil usaha perikanan tangkap laut dan hasil perikanan tangkap darat. Nilai produksi perikanan tangkap juga menggambarkan kontribusisektor perikanan tangkap terhadap perekonomian nasional atau daerah. Selama periode tahun 2020-2024, nilai produksi perikanan tangkap cenderung naik

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
7	Nilai Produksi Perikanan Budidaya	169.299,53 Juta Rupiah	174.302,73 Juta Rupiah	182.886,33 Juta Rupiah	181.386,91 Juta Rupiah	183.427,10 Juta Rupiah	(Tujuan dan Sasaran PD) Nilai ini menggambarkan Nilai Ekonomi Total dari hasil Budidaya Ikan. Nilai produksi perikanan budidaya dapat dihitung berdasarkan jenis komoditas, Nilai Produksi Tambak Semi Intensif/Payau dan Nilai Produksi Kolam Air Tenang. Selama periode tahun 2020-2024, nilai produksi perikanan budidaya cenderung naik
8	Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	-	-	1.253,78 Juta Rupiah	2.356,61 Juta Rupiah	2.416,05 Juta Rupiah	(Tujuan dan Sasaran PD) Nilai ini menggambarkan Nilai ekonomi total dari semua produk yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan ikan. Selama periode tahun 2020-2024 nilai produksinya naik yang didukung oleh faktor pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sehingga dapat meningkatkan nilai produksi dan pendapatan nelayan serta pengusaha perikanan. Kedepan, untuk mengetahui nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang lebih spesifik, perlu dilakukan analisis lebih lanjut berdasarkan data produksi, harga, dan biaya produksi.
k	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	152,80 Ton	159,36 Ton	149,45 Ton	155,51 Ton	163,08 Ton	Ketercapaian indikator dipengaruhi oleh jumlah hari melaut, peningkatan upaya pengawasan penangkapan ikan, dan peningkatan pendampingan dan pembinaan nelayan
l	Jumlahn Produksi Perikanan Budidaya	3.723,57 Ton	3.945,84 Ton	3.957,36 Ton	4.036,51 Ton	4.120,78 Ton	Ketercapaian indikator ini karena didukung oleh upaya peningkatan kapasitas pembudidayaan ikan, efektifitas penanganan hama penyakit ikan, dan dukungan sarana-prasarana pembudidayaan ikan
m	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa atau Diawasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Indikator ini mengambarkan Akumulasi pelaku usaha perikanan yang patuh terhadap pelaku usaha yang diawasi
n	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil	-	-	-	236,99 Ton	242,97 Ton	Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah proses untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan memasarkannya kepada konsumen. Ketercapaian

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Kelautan dan Perikanan						indikator ini bergantung pada ketersediaan bahan baku, pengolahan dan pengemasan produk.
9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	(Tujuan dan Sasaran PD) Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah menggambarkan tingkat akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan meningkatkan nilai SAKIP, perangkat daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai sasaran pembangunan yang lebih baik. Indikator ini belum dilakukan penilaian pada periode tahun 2020-2024. Untuk menilai kinerje perangkat daerah menggunakan indikator Indeks Kepuasa masyarakat (IKM).
o	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
10	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	25,45 %	25,27 %	25,59 %	25,63 %	26,43 %	(IUP; Tujuan PD)
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	-	65,92	59,39	67,81	66,33	IKK sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020 Indikator Indek Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) ini mencerminkan kondisi aktual lingkungan dan menunjukkan seberapa baik suatu daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan manusia dan perlindungan lingkungan. Komponen IKLH meliputi : Kualitas Udara, Kualitas Air, dan Kualitas Tanah dan Penggunaan Lahan. Capaian indeks ini masuk dalam kategori Sedang, artinya cukup baik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun memang perlu ditingkatkan karena dalam periode tahun 2022 sampai 2024 cenderung turun. Beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain pengendalian pencemaran air dan udara yang berasal dari aktivitas pertanian dan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
							limbah domestik rumah tangga. Peningkatan upaya pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup bagi masyarakat untuk meningkatkan peras serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
12	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	-	18,14 %	23,04 %	26,07 %	26,67 %	IKK sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020 (Program PD) definisi operasional indikator terlaksananya pengelolaan sampah adalah total vol sampah yang dapat ditangani dibagi dengan total vol timbunan sampah kabupaten/kota. Ini merupakan salah satu indikator Program pengelolaan sampai yaitu indikator Penanganan Sampah, meliputi jumlah Pengolahan Sampah dan jumlah Pemrosesan akhir sampah
13	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	0,00	0,00	45,00 %	35,00 %	IKK sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020 (Program PD) definisi operasional indikator ini adalah jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota dibagi dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan x 100% (kebalikan dari Persentase Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan dalam Pemenuhan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan). Semakin rendah capaian indikator ini maka semakin baik.
14	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	-	4.005,00 Ton	4.107,00 Ton	4.192,00 Ton	4.283,85 Ton	IKK sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020 (Program PD) definisi operasional jumlah total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Rumusan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 merumuskan 5 Sasaran Utama Pembangunan Nasional, yang salah satunya yaitu "Intensitas Emisi GRK menurun menuju "*net zero emission*" yang akan diarahkan melalui kebijakan :

1. Penurunan Intensitas Emisi GRK; dan
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Selain merumuskan 5 Sasaran Utama, Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional yang merupakan *goals* periode jangka menengah 2025-2029. Asta Cita kedua "Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru." Urusan lingkungan hidup mendukung sasaran utama dalam pengembangan Ekonomi hijau melalui ketercapaian target:

1. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah;
2. Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati; dan
3. Indeks kualitas lingkungan hidup.

Ketiga target tersebut menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo untuk berupaya mendukung keberhasilan ketercapaian target melalui intervensi terhadap perubahan perilaku dan tata Kelola persampahan, peningkatan pengelolaan kualitas air di Sungai, pengembangan ekosistem ekonomi sirkular, dan pemanfaatan sumber daya hayati. Sedangkan Urusan perikanan mendukung sasaran utama dalam pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru melalui ketercapaian target:

1. Nilai tambah sektor ekonomi biru, melalui peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan, industri pengolahan kelautan dan perikanan; dan
2. Perlindungan Kawasan perairan melalui peningkatan efektifitas pengelolaannya.

Target tersebut dapat dicapai dengan intervensi terhadap peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan; dan pengembangan industri berbasis sumber daya laut dan perairan.

Sejalan dengan Rumusan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang andal;
2. Meningkatnya ekonomi hijau dan kapasitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim;
3. Menguatnya penegakan lingkungan hukum hidup bersama lintas sektor;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak.

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo berupaya mendukung pencapaian Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya ekonomi hijau dan kapasitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim dalam pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah melalui intervensi terhadap pengendalian pencemaran lingkungan, pengurangan timbulan sampah, peningkatan kualitas dan kuantitas RTH, dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, yakni:
   a. Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan meningkat
   b. Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan menguat
2. Peningkatan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, yakni :

a. Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal.
b. Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat.
c. Pengawasan pengelolaan SDKP.
d. Sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat.
e. Pengelolaan ruang laut optimal.

3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yakni :Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, Yakni : Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo berupaya mendukung pencapaian tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan kedua yaitu Peningkatan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui upaya peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dengan intervensi terhadap peningkatan kapasitas SDM Perikanan, Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Fasilitas (Sarana dan Prasarana) Perikanan, upaya pencegahan kerusakan ekosistem perikanan dan upaya penurunan ketergantungan terhadap musim dan iklim.

Sejalan dengan Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Asta Cita yang merupakan Prioritas Nasional, Jawa Tengah menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Jawa Tengah 2025-2029 sebagai berikut: “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045” dengan Misi:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaandan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; dan
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo, maka urusan Lingkungan Hidup dan Perikanan mendukung terlaksananya Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah terutama misi kedua dan keempat. Selain itu, dalam upaya mendukung Tujuan Daerah Provinsi Jawa Tengah “Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan” Sasaran Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dapat didukung oleh dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan adalah Sasaran 2, “Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan.” yang keberhasilan pencapaian sasarannya diukur dengan tiga indikator kinerja yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, beberapa strategi yang bisa diintervensi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dalam upaya mendukung pencapaian target sasaran “Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan.” meliputi:

1. Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian,

perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, melalui peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Sebagai upaya menjalankan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menetapkan beberapa Isu Strategis antara lain Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Meningkatnya timbulan sampah, Alih Fungsi Hutan dan Degradasi Sumber Daya Hutan/Lahan, Kerusakan Ekosistem Wilayah Pesisir dan Laut, Ancaman Penurunan Keanekaragaman Hayati, dan Peningkatan Intensitas Kejadian Bencana Alam Hidrometeorologis dan Perubahan Iklim. Dari berbagai isu strategis tersebut, menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo untuk berupaya mendukung penyelesaiannya melalui berbagai upaya antara lain:

1. Pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup (pemantauan, pengawasan, penyediaan pengolah air limbah, dll)
2. Penanganan Ruang Terbuka Hijau;
3. Peningkatan Pengolahan Timbulan sampah di fasilitas pengolahan sampah.

Sedangkan tantangan urusan Kelautan dan Perikanan dalam 5 (lima) tahun kedepan Adalah bagaimana Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan. Hal ini menjadikan tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo untuk berupaya mendukung melalui berbagai upaya strategis meliputi:

1. Peningkatan produktivitas dan konsumsi produk perikanan tangkap dan budidaya;
2. Peningkatan upaya pengawasan terhadap usaha perikanan;
3. Pencegahan kerusakan ekosistem perikanan yang disebabkan oleh pencemaran dan pengunaan bahan berbahaya dalam usaha perikanan; dan
4. Penurunan ketergantungan produksi perikanan terhadap musim dan iklim.

Dengan memperhatikan berbagai tantangan dan isu strategis urusan lingkungan hidup dan perikanan dalam 5 (lima) tahun kedepan baik dilevel nasional maupun provinsi, dapat disimpulkan berbagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bagi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

1) Meningkatnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terutama yang berasal dari aktivitas masyarakat (limbah domestik yang berpotensi menambah timbulan sampah) dan aktivitas pertanian baik berupa pembakaran sisa hasil pertanian maupun penggunaan pupuk kimia;
2) Meningkatnya jumlah dan jenis kegiatan/usaha/industri yang berpotensi mencemari lingkungan baik air, udara ataupun tutupan lahan jika tidak diimbangi dengan upaya pembinaan dan pengawasan;
3) Meningkatnya kebutuhan masyarakat dan dunia usaha atas layanan persetujuan lingkungan yang cepat, transparan dan akuntabel;
4) Percepatan perubahan iklim yang memerlukan upaya adaptasi dan mitigasi;
5) Meningkatnya timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
6) Semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap keindahan dan kebersihan kawasan perkotaan;
7) Adanya pusat pertumbuhan baru yaitu Bandara YIA (*Yogyakarta International Airport*), kawasan BOB (Badan Otorita Borobudur) dan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener, yang berpotensi bagi pengembangan kemajuan wilayah sekitar Proyek Strategis Nasional tersebut

8) Tingkat pemanfaatan hasil tangkapan dan budidaya ikan yang dicapai masih rendah dibandingkan tingkat potensi lestari yang ada;
9) Semakin meningkatnya permintaan pasar baik domestik maupun regional terhadap hasil perikanan;
10) Semakin meningkatnya animo masyarakat desa pesisir dibidang usaha perikanan;
11) Tersedianya lahan yang non produktif untuk beralih fungsi menjadi lahan produktif dibidang perikanan;
12) Semakin meningkatnya animo pembudidaya ikan terhadap penerapan teknologi budidaya ikan lebih intensif.

Dari berbagai tantangan yang sudah dirumuskan dan dalam upaya menyelesaikannya. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan didukung oleh berbagai peluang yang ada antara lain:

1) Aneka ragam sumber daya alam yang tersedia, selain menjadi modal pembangunan lingkungan hidup juga sebagai pelindung ekosistem dan penjaga kestabilan lingkungan hidup;
2) Hasil pembangunan bidang lingkungan hidup yang telah dilakukan merupakan modal tahap selanjutnya;
3) Tumbuhnya kesadaran, kepedulian dan tuntutan masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan;
4) Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5) Kualitas produksi perikanan tangkap yang cukup baik;
6) Peran aktif masyarakat pengawas usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok yang menjadi sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo meliputi:

1) Mitra Perangkat Daerah
   a. Sekretariat Daerah, koordinasi dan sinronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan, produk hukum/kebijakan, dukungan pengadaan barang dan jasa, dll
   b. Inspektorat Daerah, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan
   c. BPKPAD, Koordinasi dan Sinronisasi Pelaksanaan Anggaran dan retribusi persampahan
   d. Bapperida, penyusunan dokumen perencanaan anggaran, dan evaluasi pelaksanan anggaran, penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup, penyusunan dokumen Strategi Pengelolaan Sampah, dll
   e. Dinas PUPR, penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup, pengadaan sarana dan prasarana persampahan, dll
   f. Dinas KPP, program ketahanan pangan, penanganan stunting, dll
   g. DPMPTSP, pelayanan perizinan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan usaha perikanan, dll
   h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, program Sekolah Adiwiyata
   i. Dinas P3APMD, program kampung iklim, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pengelolaan sampah domestik
   j. Dinas Kesehatan Daerah, pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran, perilaku hidup bersih dan sehat,
   k. Dinas Kominfo, dokumentasi dan publikasi layanan, jaringan internet dan CCTV dilokasi taman,

l. Dinas Porapar, pengelolaan sampah di lokasi wisata, dan pada saat ada event, dll.

2) Masyarakat
   a. Masyarakat pengelolaan persampahan (Bank Sampah, KSM/Kelompok Swadaya Masyarakat, dll);
   b. Komunitas sadar lingkungan (Pecinta Anggrek Indonesia, Godhong Bagelen, dll)
   c. Sekolah yang ikut dalam Adiwiyata
   d. Desa / Kampung Iklim.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo, antara lain:

1. Meningkatnya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
   Akar permasalahan dari meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh :
   a. Peningkatan pencemaran air;
      Salah satu terjadinya peningkatan pencemaran air antara lain karena faktor masih kurangnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Limbah Domestik, belum Adanya Regulasi untuk Pemenuhan Kewajiban Pengolahan Limbah Domestik, masih tingginya aktivitas pertanian yang berdampak pada pencemaran air sungai dan Keterbatasan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan)
   b. Peningkatan pencemaran udara;
      Peningkatan pencemaran udara penyebabnya antara lain : masih rendahnya Kesadaran Masyarakat Terkait Pembakaran Sampah ataupun Sisa Hasil Pertanian, Keterbatasan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Udara Ambien dan Emisi, Belum Adanya Regulasi Penurunan Emisi yang berasal dari kendaraan bermotor (transportasi)
   c. Penurunan kualitas tutupan lahan
      Penurunan kualitas tutupan lahan secara signifikan dapat disebabkan oleh faktor Peningkatan pembukaan lahan untuk industri, permukiman, pertambangan dan kegiatan lainnya, Terbatasnya Lahan untuk Pengembangan RTH Publik, Keterbatasan Sarana Prasarana Pengelolaan RTH, dan Kurangnya Program Penghijauan dan Konservasi Lingkungan
   d. Pengelolaan sampah yang belum optimal
      Tingginya timbulan sampah yang belum terkelola melalui sistem pengangkutan dan pengolahan yang baik, Keterbatasan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah, Lemahnya sistem pengelolaan sampah dari sumber asalnya, Kurangnya regulasi pengelolaan sampah.
2. Masih Adanya Usaha dan/ atau Kegiatan yang Belum Mematuhi Ketentuan Persetujuan Lingkungan;
   Akar masalah dari usaha dan/atau kegiatan yang belum mematuhi ketentuan persetujuan lingkungan adalah belum optimalnya kegiatan pengawasan lingkungan hidup. Hal ini karena Masih Adanya Usaha dan/atau Kegiatan yang Belum Mematuhi Ketentuan Persetujuan Lingkungan yang telah diterbitkan, Masih Adanya Usaha dan/atau Kegiatan yang Belum Memiliki Persetujuan Lingkungan, Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Kurangnya Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
3. Percepatan Perubahan Iklim;
   Sektor percepatan perubahan iklim akar masalahnya antara lain : belum Adanya Rencana Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Masih Rendahnya Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dari Berbagai Sektor, Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam aksi penurunan emisi gas rumah

kaca. Hal ini disebabkan antara lain : Belum adanya dokumen Rencana Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim sektor lingkungan hidup, Belum adanya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah, Kurangnya Pemberdayaan masyarakat dalam penurunan emisi GRK.

4. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perikanan;
   Akar Masalah dari Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah Kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, Kurangnya pengalaman dan praktik dalam bidang perikanan, Kurangnya kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan kapasitas SDM perikanan.Hal ini disebabkan antara lain : Kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan berpengalaman, Keterbatasan fasilitas pendidikan yang memadai, Keterbatasan akses terhadap teknologi, Kurangnya kemitraan dengan dunia usaha, Kurangnya kesempatan magang atau pengalaman kerja di bidang perikanan, Kurangnya fasilitasi praktik yang memadai, Kurangnya mentor atau pembimbing yang berpengalaman, Kurangnya program pelatihan yang berorientasi pada praktik, Kurangnya partisipasi stakeholder, termasuk masyarakat dan industri perikanan dalam pengembangan kebijakan dan regulasi, Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi yang ada.
5. Keterbatasan Fasilitas (Sarana dan Prasarana) Perikanan;
   Akar Masalah dari Keterbatasan Fasilitas (Sarana dan Prasarana) Perikanan adalah Kurangnya investasi dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas perikanan, Kerusakan habitat seperti terumbu karang, mangrove, dan lamun. Hal ini disebabkan Kurangnya promosi dan pemasaran tentang peluang investasi dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas perikanan, Kurangnya infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan air, Kurangnya penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi perikanan, Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, Kurangnya informasi dan komunikasi tentang rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas perikanan, Kurangnya kapasitas dan kemampuan masyarakat dan industri perikanan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas perikanan.
6. Kerusakan Ekosistem Perikanan;
   Akar masalah dari Kerusakan Ekosistem Perikanan yaitu Polusi dan pencemaran dari kegiatan manusia, Kerusakan habitat seperti terumbu karang, mangrove, dan lamun. Hal tersebut disebabkan karena faktor Kurangnya edukasi dan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan yang baik, Kurangnya regulasi dan pengawasan yang efektif, Kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai, Penggunaan bahan peledak dan bahan kimia dalam penangkapan ikan, Pengembangan wilayah pesisir yang tidak berkelanjutan, dan Kurangnya pengelolaan yang efektif, berkelanjutan dan pengawasan.
7. Ketergantungan pada Musim dan Iklim;
   Akar Permasalahan dari Ketergantungan pada Musim dan Iklim adalah Kurangnya teknologi adaptasi yang efektif untuk menghadapi perubahan musim dan iklim dan Kurangnya pengetahuan dan kemampuan nelayan dalam menghadapi perubahan musim dan iklim. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh Kurangnya penelitian dan pengembangan teknologi adaptasi yang efektif, Kurangnya infrastruktur pendukung seperti jaringan internet dan listrik, Kurangnya kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan dan penggunaan teknologi adaptasi yang efektif, Kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang perubahan musim dan iklim, Kurangnya pengalaman dan pengetahuan tradisional tentang perubahan musim dan iklim dan Kurangnya akses terhadap informasi tentang perubahan musim dan iklim.

2.2.2 Isu Srategis

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Isu Strategis ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. RPJMN 2025-2029
2. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga
3. Laporan resmi dari Lembaga pemerintah/Lembaga luar negeri
4. Laporan KLHS RPJMD 2025-2029
5. Hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Tabel.2.4
Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
Kabupaten Purworejo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Perubahan kritikal terhadap ekosistem	Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengolahan Sampah
	Masih adanya usaha dan/atau kegiatan yang belum mematuhi ketentuan persetujuan lingkungan		Krisis sumber daya alam			
	Percepatan Perubahan Iklim		*Biodiversity loss* dan gangguan ekosistem			
Potensi Pertanian dan Pariwisata	Keterbatasan Kapasitas SDM Perikanan	Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata	Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomi-an Indonesia	Transforma-si Ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Belum optimalnya produksi perikanan (tangkap, budidaya, dan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan)
	Keterbatasan Fasilitas (Sarana dan Prasarana) Perikanan					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Kerusakan Ekosistem Perikanan					
	Ketergantungan pada Musim dan Iklim					

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo, dirumuskan isu strategis urusan lingkungan hidup dan perikanan yang akan diselesaikan pada periode tahun 2025-2029 adalah :

a. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengolahan sampah, Isu Strategis ini disusun berdasarkan isu global perubahan kritikal terhadap ekosistem, krisis sumber daya alam serta *Biodiversity loss* dan gangguan ekosistem. Untuk tingkat nasional adalah isu ketahanan sosial, budaya dan ekologi sedangkan ditingkat regional/provinsi adalah isu keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan adalah belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan permasalahan yang melatar belakangi dirumuskannya isu strategis menurunnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah adalah meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, masih adanya usaha dan/atau kegiatan yang belum mematuhi ketentuan persetujuan lingkungan, dan percepatan perubahan iklim. Potensi daerah yang dapat didukung untuk penyelesaian isu ini adalah Potensi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
b. Belum optimalnya produksi perikanan (tangkap, budidaya, dan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan).
   Isu Strategis ini disusun berdasarkan isu global dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia, isu di tingkat nasional yaitu transformasi ekonomi dan isu di tingkat regional/provinsi yaitu perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Isu KLHS yang relevan dengan isu strategis tersebut adalah belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata. Permasalahan yang melatarbelakangi isu strategis ini adalah Keterbatasan Kapasitas SDM Perikanan, Keterbatasan Fasilitas (Sarana dan Prasarana) Perikanan, Kerusakan Ekosistem Perikanan, dan Ketergantungan pada Musim dan Iklim. Untuk potensi daerah yang dapat didukung adalah Potensi Pertanian dan Pariwisata.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sementara misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, kemudian dirumuskan tujuan atau strategi utama (*goals*) serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai beserta indikator pengukurnya. Proses perumusan ini dilakukan dengan pendekatan perencanaan strategis, yang melibatkan analisis faktor internal dan eksternal serta mempertimbangkan program-program yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo terpilih untuk periode 2025-2029.

Merujuk Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup, kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DLHP menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang konservasi dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan penaatan lingkungan, persampahan dan keanekaragaman hayati, dan perikanan. Selain itu juga melaksanakan fungsi kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DLHP dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi DLHP.

Dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) terpilih tahun 2025-2029, yaitu : “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (PURWOREJO BERSERI)”. Visi ini berfungsi sebagai arah dan panduan dalam perencanaan serta pengambilan Keputusan Perangkat Daerah dalam menyelesaikan berbagai isu strategis dengan memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada.

Berbagai isu strategis masalah lingkungan hidup dan perikanan meliputi meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup karena peningkatan pencemaran air dan udara terutama yang berasal dari limbah domestik dan aktivitas pertanian yang memerlukan penanganan secara optimal, pengelolaan sampah yang belum optimal terutama disebabkan oleh tingginya timbulan sampah yang belum terkelola melalui sistem pengangkutan dan pengolahan yang baik, lemahnya sistem pengelolaan sampah dari sumber asalnya, terbatasnya sarana prasarana persampahan, dan lemahnya sistem pengelolaan sampah dari sumber asalnya harus segera diintervensi agar tidak memberikan dampak yang lebih besar pada pencemaran tanah, air, dan udara. Di sisi lain, penurunan kualitas tutupan lahan turut menjadi perhatian serius. Meskipun kualitas udara masih tergolong cukup baik, tetap diperlukan langkah antisipatif dalam menghadapi peningkatan emisi dari transportasi, pembakaran terbuka, dampak perubahan iklim serta optimalisasi upaya pengawasan

terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam ketaatan terhadap persetujuan lingkungan. Dalam urusan perikanan, belum optimalnya produksi perikanan baik dari sisi produksi perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan perlu upaya strategis untuk peningkatannya. Intervensi dilakukan terhadap beberapa permasalahan yang mempengaruhi, antara lain: keterbatasan kapasitas SDM Perikanan, keterbatasan fasilitas (Sarana dan Prasarana) usaha perikanan, kerusakan ekosistem perikanan, dan ketergantungan terhadap musim dan iklim.

Pada periode 5 (lima) tahunan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah diwujudkan dalam Rencana Strategis yang kemudian tertuang dalam Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun 2025-2029, selain berpedoman pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih juga berupaya mendukung ketercapaian Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan Sejahtera;
2. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
4. Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan; dan
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

Penerjemahan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dalam Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah juga mengacu pada Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu: “Mewujudkan Purworejo berdaya saing, sejahtera, religius, dan inovatif.” yang dijabarkan lebih lanjut dalam Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (Sasaran RPJMD) sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas manusia;
2. Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif;
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dalam periode 5 (lima) tahunan 2025-2029 dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan. Penentapan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah harus sinergi dengan tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta menjabarkan target-target sasaran pokok pembangunan daerah ke dalam kontribusi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dalam pencapaian target-target pemerintah daerah tersebut.

Penetapan Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo mengacu kepada Tujuan Jangka Menengah Daerah "Mewujudkan Purworejo berdaya saing, sejahtera, religius, dan inovatif." dan dalam upaya mendukung ketercapaian Sasaran Pemerintah Daerah ke-tiga "Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana."; Sasaran Pemerintah Daerah ke-empat "Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif." dan Sasaran Pemerintah Daerah ke-lima "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi." serta dilandasi dengan prinsip untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung serta meningkatkan kualitas lingkungan sehingga menjamin berlangsungnya proses pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi DLHP serta berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta dalam upaya mendukung ketercapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 dalam RPJMD Kabupaten Purworejo, ditetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Renstra) tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagai berikut :

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan periode tahun 2025-2029 yaitu:

"*Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.*"

Ketercapaiannya diukur dari beberapa Indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air;
2. Indeks Kualitas Udara;
3. Indeks Kualitas Lahan;
4. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah;
5. Nilai produksi perikanan tangkap;
6. Nilai produksi perikanan budidaya;
7. Nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; dan
8. Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi Perangkat Daerah saat ini, maka Tujuan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun 2025-2029 yang ditetapkan hanya 1 (satu) Tujuan dengan menggabungkan urusan bidang lingkungan hidup dan urusan perikanan. Hal ini dilakukan dalam upaya mensinergikan 2 (dua) urusan guna menjalankan Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagai mana tertuang dalam SOTK.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan periode tahun 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator capaian kinerjanya Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan yang ketiganya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
2. Meningkatnya pengelolaan sampah dengan indikator capaian kinerjanya Persentase sampah terkelola yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU);

3. Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan dengan indikator capaian kinerjanya nilai produksi perikanan tangkap, nilai produksi perikanan budidaya, dan nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang ketiganya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU); serta
4. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator capaian kinerjanya Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 secara detail di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kualitas Air	75,31	75,41	75,51	75,61	75,71	75,81	IKU
			Indeks Kualitas Udara	86,41	86,42	86,43	86,44	86,45	86,46	IKU
			Indeks Kualitas Lahan	58,11	58,12	58,13	58,14	58,15	58,16	IKU
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	75,31	75,41	75,51	75,61	75,71	75,81	IKU
			Indeks Kualitas Udara	86,41	86,42	86,43	86,44	86,45	86,46	IKU
			Indeks Kualitas Lahan	58,11	58,12	58,13	58,14	58,15	58,16	IKU
S3.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup,		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	42,50	IKU; IUP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
daerah dalam penanggulangan bencana	pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Pengolahan Sampah							
		Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase sampah terkelola	50,20	50,49	50,77	51,06	51,35	51,64	IKU
S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai produksi perikanan tangkap	8.059,89	8.301,68	8.550,73	8.807,26	9.071,47	9.343,62	IKU
			Nilai produksi perikanan budidaya	187.095,64	190.837,55	194.654,30	198.547,39	202.518,34	206.568,71	IKU
			Nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	2.450,04	2.500,00	2.549,89	2.599,95	2.649,93	2.700,07	IKU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan	Nilai produksi perikanan tangkap	8.059,89	8.301,68	8.550,73	8.807,26	9.071,47	9.343,62	IKU
			Nilai produksi perikanan budidaya	187.095,64	190.837,55	194.654,30	198.547,39	202.518,34	206.568,71	IKU
			Nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	2.450,04	2.500,00	2.549,89	2.599,95	2.649,93	2.700,07	IKU
S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	IKU
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	IKU

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif yang berisikan langkah-langkah dan/atau upaya yang akan dilakukan melalui optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra. Strategi Renstra dituangkan melalui Penahapan Pembangunan selama periode tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan dalam upaya penjabaran Prioritas Pembangunan tahunan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra. Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dapat disajikan seperti tabel di bawah:

Tabel 3.2
Penahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan kelembagaan dan Regulasi dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan jangkauan layanan dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup	Akselerasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi Sumberdaya, tahapan, dan fokus kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dalam mewujudkan keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Penguatan kelembagaan untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan	Meningkatkan kapasitas SDM Perikanan melalui Pelatihan dan Penguasaan Teknologi untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan	Memantapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor dalam rangka Fasilitasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perikanan untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan	Akselerasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan keberlanjutan dan pengawasan usaha perikanan untuk meningkatkan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan	Optimalisasi Sumberdaya, perluasan akses pasar, diversifikasi dan kualitas produk olahan kelautan dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan
Menguatkan Sistem Manajemen Kinerja yang Efektif dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan kapasitas sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memperkuat sinergi dalam Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Perwujudan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Keterangan : Penahapan Renstra mengacu pada strategi RPJMD serta tujuan, dan sasaran Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai Tujuan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun 2025-2029 yaitu "Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah." Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dengan penahapan Sasaran Perangkat Daerah dalam Prioritas Pembangunan selama periode Renstra 2025-2025, meliputi:

1. Tahap 1 (Tahun 2026)
   a) Menguatkan kelembagaan dan Regulasi dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan menekankan pada aspek kebijakan strategi persampahan, penyiapan *Readiness Criteria* untuk peningkatan kapasitas TPA, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, sertifikasi laboratorium

lingkungan hidup, serta Penyusunan DED Kebun Raya Heroes Park Segmen 1.

b) Penguatan kelembagaan untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan
c) Menguatkan Sistem Manajemen Kinerja yang Efektif dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah melalui pembinaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas sistem Manajemen Kinerja dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.

2. Tahap 2 (Tahun 2027)
   a) Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menekankan pada aspek perluasan TPA dalam rangka meningkatkan kapasitas TPA, kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup.
   b) Meningkatkan kapasitas SDM Perikanan melalui Pelatihan dan Penguasaan Teknologi untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan melalui Pelatihan Nelayan, Temu usaha pelaku perikanan tangkap,
   c) Meningkatkan Komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
3. Tahap 3 (Tahun 2028)
   a) Meningkatkan jangkauan layanan dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menekankan pada aspek perluasan TPA dalam rangka meningkatkan kapasitas TPA, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
   b) Memantapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor dalam rangka Fasilitasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perikanan untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan;
   c) Memantapkan kapasitas sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
4. Tahap 4 (Tahun 2029)
   a) Akselerasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menekankan pada aspek pembinaan, pendampingan dan penyuluhan pada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya membangun kemandirian pengelolaan lingkungan hidup oleh Masyarakat;
   b) Akselerasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan keberlanjutan dan pengawasan usaha perikanan untuk meningkatkan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan melalui pembinaan, pendampingan dan penyuluhan pada Masyarakat dalam pengelolaan usaha perikanan dan pengendalian kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan;
   c) Memperkuat sinergi dalam Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui kerjasama seluruh stakeholder Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
5. Tahap 5 (Tahun 2030)
   a) Optimalisasi Sumberdaya, tahapan, dan fokus kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dalam mewujudkan keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan fokus pada strategi, pengelolaan sumber daya yang dimiliki, dan memastikan tahapan Pembangunan dilaksanakan;

b) Optimalisasi Sumberdaya, perluasan akses pasar, diversifikasi dan kualitas produk olahan kelautan dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan
c) Perwujudan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

Dalam rangka pelaksanaan Prioritas Pembangunan/ Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Tahapan Pembangunan, maka ditetapkan Arah kebijakan Renstra PD tahun 2025-2029. Arah Kebijakan Renstra adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi dari NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah Kebijakan Renstra DLHP tahun 2025-2029 dijelaskan secara detail dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Penguatan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif	Penguatan kelembagaan dan regulasi yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan melalui aktivitas : 1. Penguatan Kebijakan Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Penguatan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Penyusunan dokumen adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 4. Penambahan ruang lingkup operasional laboratorium dan sertifikasi laboratorium 5. Penguatan Kelembagaan perizinan dan pengawasan usaha/kegiatan	TAHUN 2026
		Peningkatan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif	Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan melalui aktivitas : 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengujian kualitas udara dan air di lokasi yang diduga tercemar; 2. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Pemantauan evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah; 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup; dan 4. Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan pengaduan permasalahan lingkungan hidup	TAHUN 2027
		Pemantapan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif	Meningkatkan jangkauan layanan dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan melalui aktivitas: 1. Peningkatan peran Masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup; 2. Peningkatan jangkauan Pengujian kualitas udara dan air di lokasi yang diduga tercemar; 3. Peningkatan jangkauan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah; 4. Peningkatan peran dan kontribusi masyarakat dalam penyusunan dokumen mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 5. Peningkatan keterlibatan pelaku usaha dalam Pemenuhan Ketentuan	TAHUN 2028

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; 6. Peningkatan jangkauan layanan aduan lingkungan hidup	
		Perwujudan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif	Akselerasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan melalui aktivitas: 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan atas tindak lanjut dokumen perencanaan lingkungan hidup; 2. Perberdayaan masyarakat dalam Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran; 3. Akselerasi keterlibatan Masyarakat dan pelaku usaha dalam Pengawasan Perizinan Berusaha terkait lingkungan hidup;	TAHUN 2029
		Peneguhan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif	Optimalisasi Sumberdaya, tahapan, dan fokus kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis melalui aktivitas: Monitoring dan evaluasi atas implementasi dan tindaklanjut dokumen perencanaan lingkungan hidup; pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengawasan usaha dan layanan pengaduan kerusakan lingkungan hidup	TAHUN 2030
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Penguatan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya,	Menguatkan kelembagaan dan Regulasi dalam mendukung ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan melalui aktivitas Penyusunan DED Kebun Raya Heroes Park Segmen 1, Reviu DED Pembangunan taman batas kota, dan Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup.	TAHUN 2026
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya,	Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam mendukung ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan melalui aktivitas: Koordinasi dan Sinkronisasi PD dan Stakeholder terkait Penilaian Adipura, Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (Kampulng Iklim, dan Adiwiyata), serta penyusunan DED heroes park dan taman batas kota	TAHUN 2027
		Pemantapan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya,	Meningkatkan jangkauan layanan dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan melalui aktivitas: Pembangunan taman batas kota; Rehabilitasi Tugu Adipura; pendampingan dan pembinaan program adiwiyata, dan program Kampung Iklim,serta penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup.	TAHUN 2028
		Perwujudan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya,	Akselerasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan melalui aktivitas: fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup dan rehabilitasi lahan kritis serta aksi kampanye lingkungan hidup berbasis masyarakat	TAHUN 2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Peneguhan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya,	Optimalisasi Sumberdaya, tahapan, dan fokus kegiatan dalam mendukung ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan melalui aktivitas: Monitoring dan evaluasi atas implementasi dan tindaklanjut pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pendidikan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	TAHUN 2030
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Penguatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu	Menguatkan kelembagaan dan Regulasi dalam pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu yang dilaksanakan melalui aktivitas Penyusunan regulasi Pembatasan timbulan sampah; Penyusunan DED TPA; Penyusunan Perbup (Jakstrada/Pengelolaan sampah dari sumber); Penyusunan Perbup tindak lanjut reviu Inspektorat; serta penguatan kelembagaan dalam penyimpanan sementara limbah B3	TAHUN 2026
		Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu	Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu yang dilaksanakan melalui aktivitas Penanganan Sampah di TPA; Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3; Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3;	TAHUN 2027
		Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu	Meningkatkan jangkauan layanan dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu yang dilaksanakan melalui aktivitas perluasan TPA Jetis; Penyediaan sarana dan prasarana persampahan untuk kelompok masyarakat; Pendampingan kelompok masyarakat pengelola sampah; Sosialisasi, Edukasi, Regulasi Pembatasan timbulas sampah; dan Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3	TAHUN 2028
		Perwujudan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu	Akselerasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu yang dilaksanakan melalui aktivitas Penanganan Sampah di TPA; Penyediaan sarana dan prasarana persampahan untuk kelompok masyarakat; Pendampingan kelompok masyarakat pengelola sampah; Sosialisasi, Edukasi, Regulasi Pembatasan timbulas sampah; dan Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3.	TAHUN 2029
		Peneguhan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu	Optimalisasi Sumberdaya, tahapan, dan fokus kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dalam pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu yang dilaksanakan melalui aktivitas Monitoring dan evaluasi atas implementasi dan tindaklanjut pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan persampahan dan limbah B3	TAHUN 2030
4	Meningkatnya pertumbuhan	Penguatan produksi perikanan melalui	Penguatan kelembagaan dalam mendukung upaya penguatan sistem	TAHUN 2026

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	ekonomi daerah yang inklusif	penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan menuju ekonomi biru	usaha perikanan untuk meningkatkan nilai produksi perikanan yang dilaksanakan melalui aktivitas: 1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Perikanan; 2. Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan; 3. Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 4. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan	
		Peningkatan produksi perikanan melalui penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan menuju ekonomi biru	Meningkatkan kapasitas SDM Perikanan melalui Pelatihan dan Penguasaan Teknologi dalam mendukung upaya penguatan sistem usaha perikanan untuk meningkatkan nilai produksi perikanan yang dilaksanakan melalui aktivitas: 1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 2. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 3. Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	TAHUN 2027
		Pemantapan produksi perikanan melalui penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan menuju ekonomi biru	Memantapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor dalam mendukung upaya penguatan sistem usaha perikanan untuk meningkatkan nilai produksi perikanan yang dilaksanakan melalui aktivitas: 1. Koordinasi layanan penyelenggaraan usaha penangkapan ikan; 2. Koordinasi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya 3. Pembinaan dan Pemantauan cara budidaya ikan; 4. Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	TAHUN 2028
		Perwujudan ekonomi biru melalui penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan	Akselerasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan keberlanjutan dan pengawasan usaha perikanan dalam mendukung upaya penguatan sistem usaha perikanan untuk meningkatkan nilai produksi perikanan yang dilaksanakan melalui aktivitas: 1. Pemberdayaan Masyarakat melalui Fasilitasi Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap; 2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Fasilitasi Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan; 3. Perberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan usaha perikanan; 4. Pemberdayaan melalui Fasilitasi Penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan garam	TAHUN 2029
		Peneguhan ekonomi biru melalui penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan	Optimalisasi Sumberdaya, perluasan akses pasar, diversifikasi dan kualitas produk olahan kelautan dan perikanan dalam mendukung upaya penguatan sistem usaha perikanan untuk meningkatkan nilai produksi perikanan yang dilaksanakan melalui aktivitas: Monitoring dan evaluasi atas implementasi dan tindaklanjut pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan perikanan	TAHUN 2030

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
5	S-5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	TAHUN 2026
		Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	TAHUN 2027
		Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	TAHUN 2028
		Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	TAHUN 2029
		Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;	TAHUN 2030

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo, maka indikator tujuan dan sasaran tersebut akan diupayakan pencapaiannya melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Purworejo, Bantuan APBD Provinsi Jawa Tengah, ataupun Dana Alokasi Khusus.

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan pada periode tahun 2025-2029. Program, kegiatan dan Sub kegiatan merupakan rencana aksi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun 2025-2029 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo 2025-2029. Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 terdiri dari: 14 (empat belas) Program, 30 (tiga puluh) kegiatan dan 81 (delapan puluh satu) Sub Kegiatan dengan kebutuhan pagu indikatif masing-masing tahunnya meliputi:

1. Tahun 2025 sebesar Rp19.830.518.911,00 (Sembilan belas milyar Delapan ratus tiga puluh juta Lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus sebelas rupiah) dengan Lokasi kegiatan di Kabupaten Purworejo;
2. Tahun 2026 sebesar Rp27.640.398.059,00 (Dua puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) dengan Lokasi kegiatan di Kabupaten Purworejo;
3. Tahun 2027 sebesar Rp29.220.201.000,00 (Dua puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus satu ribu rupiah) dengan Lokasi kegiatan di Kabupaten Purworejo;
4. Tahun 2028 sebesar Rp28.437.535.000,00 (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan Lokasi kegiatan di Kabupaten Purworejo;
5. Tahun 2029 sebesar Rp28.360.741.000,00 (Dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan Lokasi kegiatan di Kabupaten Purworejo;
6. Tahun 2030 sebesar Rp26.428.019.000,00 (Dua puluh enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta Sembilan belas ribu rupiah) dengan Lokasi kegiatan di Kabupaten Purworejo.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan yang ditetapkan dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Hal ini karena program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan sebagai pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dalam Rencana Strategis 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut

Tabel 4.1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Indeks Kualitas Air		
					Indeks Kualitas Udara		
					Indeks Kualitas Lahan		
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			Indeks Kualitas Air		
					Indeks Kualitas Udara		
					Indeks Kualitas Lahan		
			Meningkatnya rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	
					Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	
				Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
			Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup		Persentase Pengendalian Pencemaran yang Dilaksanakan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
					Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
					Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
					Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
				Terlaksananya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
			Meningkatnya proporsi luasan ruang terbuka hijau perkotaan		Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap Luas Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap Luas Perkotaan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
penanggulangan bencana	produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah						
		Meningkatnya pengelolaan sampah			Persentase Sampah Terkelola		
			Meningkatnya pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun		Persentase Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang Dilaksanakan	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				Terlaksananya Layanan Pemenuhan Komitmen Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan LB3	Layanan Pemenuhan Komitmen Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan LB3	Penyimpanan sementara Limbah B3	
					Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
					Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	
					Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
					Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
			Meningkatnya ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam		Persentase Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan dalam Pemenuhan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan		Kewajiban Pengelolaan Lingkungan	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
					Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup yang aktif		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				untuk Lembaga Kemasyarakatan			
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
			Meningkatnya penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat		Persentase Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang Diselenggarakan	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan hidup		Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran Lingkungan yang Ditangani	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran Lingkungan yang Ditangani	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya layanan penanganan dan pengurangan sampah		Persentase Penanganan Sampah; Persentase Pengurangan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Terkelolanya timbulan sampah di kabupaten	Jumlah Penanganan Sampah; Jumlah Pengurangan Sampah	Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
					Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan,				Nilai Produksi Perikanan Tangkap		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah						
					Nilai Produksi Perikanan Budidaya		
					Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan		
		Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan			Nilai Produksi Perikanan Tangkap		
					Nilai Produksi Perikanan Budidaya		
					Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan		
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan	Pengelolaan Penangkapan Ikan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Terlaksananya Temu Kelompok/Himpunan Nelayan	Penyelenggaraan Temu Kelompok / Himpunan Nelayan	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dilaksanakan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
					Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
					Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Terselenggaranya Layanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan	Layanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan yang Dilaksanakan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Dara	
			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diperiksa atau diawasi		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa atau Diawasi	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa/ Diawasi	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin	Pengawasan Ekstraksi Garam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya		
			Meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan		Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
				Terkendalinya penggunaan bahan pengawet berbahaya	Pengendalian penggunaan bahan pengawet berbahaya yang dilaksanakan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Terjaminnya stok dan distribusi bahan baku bagi unit / industri pengolah ikan	Penyediaan dan Distribusi Bahan Baku bagi Unit/Industri Pengolah Ikan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Keuangan Perangkat Daerah			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	26,43	33		36		39		42		42,5		42,5			
			Indeks Kualitas Air	Angka	65,74	75,41		75,51		75,61		75,71		75,81		75,81			
			Indeks Kualitas Udara	Angka	85,97	86,42		86,43		86,44		86,45		86,46		86,46			
			Indeks Kualitas Lahan	Angka	68,68	58,12		58,13		58,14		58,15		58,16		58,16			
			Nilai produksi perikanan tangkap	Juta Rupiah	8.059,89	8.301,68		8.550,73		8.807,26		9.071,47		9.343,62		9.343,62			
			Nilai produksi perikanan budidaya	Juta Rupiah	183.427,10	190.837,55		194.654,30		198.547,39		202.518,34		206.568,71		206.568,71			
			Nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	Juta Rupiah	2.416,05	2.500		2.549,89		2.599,95		2.649,93		2.700,07		2.700,07			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
2.11.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						10.334.027.434		10.437.368.000		9.510.415.000		9.510.415.000		9.510.415.000				
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	10.334.027.434	100	10.437.368.000	100	9.510.415.000	100	9.510.415.000	100	9.510.415.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	23	23	19.035.400	24	28.000.000	24	28.000.000	24	28.000.000	24	28.000.000	119			
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	22	22	16.069.000	22	17.474.000	22	17.474.000	22	17.474.000	22	17.474.000	110			
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	2.966.400	1	6.226.000	1	6.226.000	1	6.226.000	1	6.226.000	5			
2.11.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	1	4.300.000	1	4.300.000	1	4.300.000	1	4.300.000	5			
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	45	45	9.753.339.834	45	9.707.583.200	45	8.861.541.500	45	8.861.541.500	45	8.861.541.500	225			
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	101	108	9.747.072.034	108	9.693.225.200	108	8.847.183.500	108	8.847.183.500	108	8.847.183.500	108			
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	44	44	6.267.800	44	14.358.000	44	14.358.000	44	14.358.000	44	14.358.000	220			
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0		11	7.000.000	11	7.000.000	11	7.000.000	11	7.000.000	44			
2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	11	7.000.000	11	7.000.000	11	7.000.000	11	7.000.000	55			
2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	0	0		16	6.000.000	16	6.000.000	16	6.000.000	16	6.000.000	64			
2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	0	0	0	16	6.000.000	16	6.000.000	16	6.000.000	16	6.000.000	80			
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	0		17	6.000.000	17	6.000.000	17	6.000.000	17	6.000.000	68			
2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	17	6.000.000	17	6.000.000	17	6.000.000	17	6.000.000	85			
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	182.291.700	8	185.000.000	8	185.000.000	8	185.000.000	8	185.000.000	38			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	6.995.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	5			
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	4.591.900	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5			
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	55.435.800	1	56.000.000	1	56.000.000	1	56.000.000	1	56.000.000	5			
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	5			
2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	5			
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	48			
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	86.269.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	60			
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	8			
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	0	0		10	80.911.300	0		0		0		10			
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	10	80.911.300	0	0	0	0	0	0	10			
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	151.859.500	24	151.859.500	24	151.859.500	24	151.859.500	24	151.859.500	120			
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100.931.500	12	100.931.500	12	100.931.500	12	100.931.500	12	100.931.500	60			
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	50.928.000	12	50.928.000	12	50.928.000	12	50.928.000	12	50.928.000	60			
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	5	227.501.000	5	265.014.000	5	265.014.000	5	265.014.000	5	265.014.000	20			
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	39.950.000	6	39.950.000	6	39.950.000	6	39.950.000	6	39.950.000	6			
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	29	50.680.000	29	87.580.000	29	87.580.000	29	87.580.000	29	87.580.000	29			
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	15.130.000	15	15.130.000	15	15.130.000	15	15.130.000	15	15.130.000	15			
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	108.931.000	3	109.544.000	3	109.544.000	3	109.544.000	3	109.544.000	3			
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	17	17	12.810.000	17	12.810.000	17	12.810.000	17	12.810.000	17	12.810.000	17			
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air	Angka	65,74	75,41		75,51		75,61		75,71		75,81		75,81			
			Indeks Kualitas Udara	Angka	85,97	86,42		86,43		86,44		86,45		86,46		86,46			
			Indeks Kualitas Lahan	Angka	68,68	58,12		58,13		58,14		58,15		58,16		58,16			
2.11.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						4.770.658.682		6.561.815.000		6.911.408.000		6.806.332.000		4.902.132.000				

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	75	100	87.960.420	100	200.000.000	100	162.960.000	100	189.350.000	100	190.762.000	100	Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan	Kabupaten Purworejo	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	0	0		1	50.000.000	1	87.960.000	1	79.350.000	1	80.762.000	4			
2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	79.350.000	0	0	1			
2.11.02.2.01.0004	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen	0	0	0	0	0	1	87.960.000	0	0	0	0	1			
2.11.02.2.01.0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Tersedianya Dokumen Rencana Tematik yang merupakan bagian Arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	Dokumen	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	1	80.762.000	2			
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Dokumen	2	1	87.960.420	2	150.000.000	1	75.000.000	2	110.000.000	2	110.000.000	8			
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	55.000.000	0	0	1			
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2	1	87.960.420	2	150.000.000	1	75.000.000	1	55.000.000	2	110.000.000	7			
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran yang Dilaksanakan	%	87,5	92	603.447.600	92,33	861.815.000	92,67	548.448.000	93	516.982.000	93,33	567.667.000	93,33	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan	Kabupaten Purworejo	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	603.447.600	1	837.815.000	1	534.448.000	1	502.982.000	1	553.667.000	1			
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	2	0	0	2	50.000.000	0	0	0	0	0	0	2			
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4			
2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kegiatan	0	0	0	1	15.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	4			
2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen	1	1	37.124.600	1	57.815.000	1	37.124.000	1	30.124.000	1	37.809.000	5			
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	0	19	84.374.300	21	100.000.000	21	64.375.000	21	54.375.000	21	60.375.000	21			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit	0	0	0	2	15.000.000	2	15.000.000	2	14.000.000	2	14.400.000	2			
2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan	0	0	0	1	25.518.200	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4			
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	0	2	47.466.900	2	100.000.000	2	47.467.000	2	47.467.000	2	39.467.000	10			
2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	0	0	0	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	4			
2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Laporan	0	0	0	1	20.000.000	1	15.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	4			
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	1	1	434.481.800	1	434.481.800	1	310.482.000	1	302.016.000	1	330.616.000	5			
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penaggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen	0	0		1	24.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	4			
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	0	0	0	1	24.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	4			
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya proporsi luasan ruang terbuka hijau perkotaan	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap Luas Perkotaan	%	7,234	7,234	4.079.250.662	7,234	5.500.000.000	7,235	6.200.000.000	7,236	6.100.000.000	7,237	4.143.703.000	7,237	Bidang Pengeloaan Sampah dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Purworejo	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan ruang Terbuka Hijau Perkotaan	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap Luas Perkotaan	%	7,234	7,234	4.079.250.662	7,234	5.500.000.000	7,235	6.200.000.000	7,236	6.100.000.000	7,237	4.143.703.000	7,237			
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	31,05	31,05	3.619.304.600	33,5	4.929.305.000	33,5	5.519.305.000	33,5	5.419.305.000	33,5	3.643.703.000	33,5			
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	1	1	459.946.062	1	570.695.000	1	680.695.000	1	680.695.000	1	500.000.000	1			
3	Meningkatnya pengelolaan sampah		Persentase sampah terkelola	%	49,92	50,49		50,77		51,06		51,35		51,64		51,64			
2.11.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						10.574.417.643		10.745.836.000		10.554.418.000		10.573.812.000		10.536.260.000				
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun	Persentase Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilaksanakan	%	65	71	13.157.200	73	33.000.000	76	13.157.000	78	53.365.000	80	23.576.000	80	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan	Kabupaten Purworejo	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya Layanan Pemenuhan Komitmen Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan LB3	Layanan Pemenuhan Komitmen Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan LB3	Bulan	12	12	13.157.200	12	33.000.000	12	13.157.000	12	53.365.000	12	23.576.000	12			
2.11.05.2.01.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	beroperasinya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.11.05.2.01.0004	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	Unit	0	0	0	0	0	0	0	1	40.000.000	0	0	1			
2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Dokumen	0	1	13.157.200	1	13.000.000	1	13.157.000	0	0	1	13.576.000	4			
2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	Usaha	0	0	0	1	20.000.000	0	0	1	13.365.000	0	0	2			
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan	Persentase tingkat Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan	%	65	73	37.896.800	76	57.897.000	78	92.897.000	80	64.496.000	83	49.104.000	83	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan	Kabupaten Purworejo	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Bulan	12	12	37.896.800	12	57.897.000	12	92.897.000	12	64.496.000	12	49.104.000	12			
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	20	20	23.069.300	20	23.069.500	20	23.069.500	20	23.370.000	20	23.670.000	20			
2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang	0	0	0	1	20.000.000	1	30.000.000	0	0	0	0	2			
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	0	1	25.000.000	1	15.000.000	0	0	2			
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	40	40	14.827.500	40	14.827.500	40	14.827.500	40	26.126.000	40	25.434.000	40			
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup yang aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif	%	14,12	7,99	96.319.800	11,51	179.000.000	12,55	96.320.000	13,59	97.842.000	14,63	99.388.000	14,63	Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan	Kabupaten Purworejo	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif	Lembaga	100	100	96.319.800	144	179.000.000	157	96.320.000	170	97.842.000	183	99.388.000	183			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	76.757.000	2	110.000.000	2	66.758.000	2	68.280.000	2	69.280.000	9			
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	750	600	19.562.800	600	39.000.000	600	19.562.000	600	19.562.000	600	20.108.000	600			
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	0	0	0	34	30.000.000	35	10.000.000	36	10.000.000	37	10.000.000	37			
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	100	100	58.707.800	100	100.000.000	100	58.708.000	100	59.635.000	100	60.578.000	100	Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan	Kabupaten Purworejo	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang Diselenggarakan	Penghargaan	2	2	58.707.800	2	100.000.000	2	58.708.000	2	59.635.000	2	60.578.000	2			
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	2	2	58.707.800	2	100.000.000	2	58.708.000	2	59.635.000	2	60.578.000	2			
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran Lingkungan yang Ditangani	%	100	100	8.751.700	100	16.355.000	100	8.752.000	100	38.890.000	100	44.030.000	100	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan	Kabupaten Purworejo	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran Lingkungan yang Ditangani	%	100	100	8.751.700	100	16.355.000	100	8.752.000	100	38.890.000	100	44.030.000	100			
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Pengaduan	10	10	8.751.700	10	16.355.000	10	8.752.000	10	38.890.000	10	44.030.000	50			
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya layanan penanganan dan pengurangan sampah	Persentase Penanganan Sampah	%	26,67	26,97	10.359.584.343	27,13	10.359.584.000	27,27	10.284.584.000	27,43	10.259.584.000	27,58	10.259.584.000	27,58	Bidang Pengeloaan Sampah dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Purworejo	
			Persentase Pengurangan Sampah	%	23,25	23,51		23,65		23,78		23,92		24,05		24,05	Bidang Pengeloaan Sampah dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Purworejo	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Terkelolanya timbulan sampah di kabupaten	Jumlah Penanganan Sampah	Ton	31.452,71	32.084,91	10.359.584.343	32.405,76	10.359.584.000	32.723,33	10.284.584.000	33.050,67	10.259.584.000	33.381,01	10.259.584.000	33.381,01			
			Jumlah Pengurangan Sampah	Ton	27.419,03	27.970,15		28.249,85		28.532,35		28.817,68		29.106,01		29.106,01			
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	10	12	502.500.000	12	602.500.000	12	602.500.000	12	602.500.000	12	602.500.000	60			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	0	1	5.218.678.490	1	5.000.198.000	1	5.000.198.000	1	5.000.198.000	1	5.000.198.000	5			
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	dokumen	1	1	41.520.000	2	60.000.000	0	0	0	0	0	0	3			
2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan	0	0	0	1	100.000.000	1	85.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	4			
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	31.452,71	17.136	4.596.885.853	17.136	4.596.886.000	17.136	4.596.886.000	17.136	4.596.886.000	17.136	4.596.886.000	17.136			
4	Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan		Nilai produksi perikanan tangkap	Juta Rupiah	8.059,89	8.301,68		8.550,73		8.807,26		9.071,47		9.343,62		9.343,62			
			Nilai produksi perikanan budidaya	Juta Rupiah	183.427,10	190.837,55		194.654,30		198.547,39		202.518,34		206.568,71		206.568,71			
			Nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	Juta Rupiah	2.416,05	2.500		2.549,89		2.599,95		2.649,93		2.700,07		2.700,07			
3.25.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.961.294.300		1.475.182.000		1.461.294.000		1.470.182.000		1.479.212.000				
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	163,08	173,01	327.150.000	178,2	327.150.000	183,54	327.150.000	189,05	332.319.000	194,54	337.570.000	194,54	Bidang Perikanan	Kabupaten Purworejo	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan	Pengelolaan Penangkapan Ikan	Kecamatan	16	16	321.525.000	16	227.150.000	16	247.150.000	16	252.319.000	16	257.570.000	16			
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	1	19.125.000	2	120.000.000	2	120.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	7			
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	0	6	302.400.000	2	107.150.000	2	127.150.000	3	192.319.000	3	197.570.000	16			
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Temu Kelompok/Himpunan Nelayan	Penyelenggaraan Temu Kelompok / Himpunan Nelayan	Bulan	12	0		12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12			
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	25	0	0	25	35.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000	100			
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	10	0	0	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	40			
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dilaksanakan	Dokumen	0	0		1	40.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4			
3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	0	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Layanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan	Layanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan	Bulan	12	12	5.625.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12			
3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendasi	10	10	5.625.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	50			
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.120,78	4.287,25	1.398.727.000	4.373	898.727.000	4.460,46	898.727.000	4.549,67	898.727.000	4.640,66	898.727.000	4.640,66	Bidang Perikanan	Kabupaten Purworejo	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan yang Dilaksanakan	Kegiatan	0	0		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4			
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	0	0	0	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	40			
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kecamatan	16	16	1.398.727.000	16	878.727.000	16	878.727.000	16	878.727.000	16	878.727.000	16			
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	81.347.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5			
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	1	1	59.500.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	5			
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	32	37	1.257.880.000	30	703.727.000	30	703.727.000	30	703.727.000	30	703.727.000	157			
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	0	0	0	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	40			
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diperiksa atau diawasi	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa atau Diawasi	%	100	100	81.022.300	100	94.910.000	100	81.022.000	100	82.302.000	100	83.603.000	100	Bidang Perikanan	Kabupaten Purworejo	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa atau Diawasi	Pelaku Usaha	1	15	81.022.300	30	94.910.000	45	81.022.000	60	82.302.000	75	83.603.000	75			
3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku usaha	1	5	25.745.800	11	39.000.000	17	33.000.000	23	33.000.000	29	33.000.000	29			
3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku usaha	0	0	0	4	26.000.000	8	22.000.000	12	22.000.000	16	22.000.000	16			
3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku usaha	0	10	55.276.500	13	19.500.000	16	16.500.000	19	16.500.000	22	16.500.000	22			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku usaha	0	0	0	2	10.410.000	4	9.522.000	6	10.802.000	8	12.103.000	8			
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Ton	242,97	245,97	154.395.000	247,47	154.395.000	248,97	154.395.000	250,47	156.834.000	251,97	159.312.000	251,97	Bidang Perikanan	Kabupaten Purworejo	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	%	0	100	10.750.000	100	10.750.000	100	10.750.000	100	10.750.000	100	10.750.000	100			
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	0	1	10.750.000	1	10.750.000	1	10.750.000	1	10.750.000	1	10.750.000	5			
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terkendalinya penggunaan bahan pengawet berbahaya	Pengendalian penggunaan bahan pengawet berbahaya yang dilaksanakan	Bulan	12	0		12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12			
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit usaha	25	0	0	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	40			
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terjaminnya stok dan distribusi bahan baku bagi unit / industri pengolah ikan	Penyediaan dan Distribusi Bahan Baku bagi Unit/Industri Pengolah Ikan	Bulan	12	12	143.645.000	12	133.645.000	12	133.645.000	12	136.084.000	12	138.562.000	12			
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	10	11	43.770.000	8	60.000.000	8	60.000.000	8	60.000.000	8	60.000.000	43			
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku usaha	10	1	99.875.000	2	73.645.000	2	73.645.000	2	76.084.000	2	78.562.000	9			
Jumlah							**27.640.398.059**		**29.220.201.000**		**28.437.535.000**		**28.360.741.000**		**26.428.019.000**				

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*		
			Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Penetapan Perda RPPLH hasil review	
			Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	Reviu dokumen RPPLH 5 tahun	
			Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Dokumen NSDA; Review dokumen D3TLH	
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Penyusunan KLHS RPJMD	
			Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	1. Pra validasi dan validasi KLHS RDTR Kemiri Pituruh 2. Pra-validasi dan validasi KLHS Revisi RDTR Purworejo-Kutoarjo; 3. Pra-validasi KLHS revisi RTRW 4. Validasi KLHS revisi RTRW 5. Pra-validasi dan validasi KLHS RDTR KPI 6. Pra-validasi dan validasi KLHS RDTR Bendungan Bener; 7. KLHS Revisi RDTR Border City	
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	*Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*		
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pengujian kualitas udara dan air di lokasi yang diduga tercemar	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pemantauan evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah;	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	
			Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Penyusunan laporan rutin tahunan inventarisasi GRK	
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkun Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pemantauan kualitas air dan udara semesteran;	
			Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Pemeliharaan alat pemantau air otomatis (Onlimo = online monitoring sistem) di Penungkulan dan Boro (termasuk listrik dan internet)	
			Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Penyusunan dokumen mitigasi perubahan iklim; Monitoring dan evaluasi mitigasi perubahan iklim	
			Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Laporan tahunan indeks respon LH,	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
				penyusunan laporan IKPLHD, IKLHD	
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Inventarisir sumber pencemar;	
			Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Penyusunan dokumen adaptasi perubahan iklim; Monitoring dan evaluasi adaptasi perubahan iklim	
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Penambahan ruang lingkup operasional laboratorium; Sertifikasi Lab per parameter	
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran	
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya proporsi luasan ruang terbuka hijau perkotaan	*Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*		
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan taman batas kota; Rehabilitasi tugu anak dan tugu adipura dan Pembangunan taman segitiga kalijali; dan Operasionalisasi Pemeliharaan RTH	
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pemeiliharaan prasarana dan sarana heroes park; Operasionalisasi heroes park, Pengembangan Kebun Raya	
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun	*Penyimpanan sementara Limbah B3*		
			Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	fasilitasi pemenuhan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	
			Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Verifikasi Lapangan pemenuhan rincian teknis penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	
			Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3	
			Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan	*Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan izin PPLH	
			Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pengiriman SDM untuk diklat teknis pengawasan (dalam rangka pengangkatan dan pembentukan pejabat pengawas lingkungan sesuai amamat PP 22 tahun 2021	
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pelatihan Pejabat Pengawas lingkungan hidup	
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	pengawasan perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan Kabupaten	
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup yang aktif	*Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	pendampingan dan pembinaan program adiwiyata; pelaksanaan Program Kampung Iklim	
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup; rehabilitasi lahan kritis	
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat	*Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penilaian kinerja masyarakat melalui Program Kampung iklim; Penilaian kinerja masyarakat melalui Program Saka Kalpataru; Koordinasi dan Sinkronisasi PD dan Stakeholder terkait Penilaian Adipura	
8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan hidup	*Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota*		
			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	penanganan pengaduan permasalahan lingkungan hidup	
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya layanan penanganan dan pengurangan sampah	*Pengelolaan Sampah*		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan untuk kelompok masyarakat; Pendampingan kelompok masyarakat pengelola sampah	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Perluasan TPA, penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Penyusunan Perbup (Jakstrada/Pengelolaan sampah dari sumber); Penyusunan Perbup tindak lanjut reviu Inspektorat	
			Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Sosialisasi, Edukasi, Regulasi Pembatasan timbulas sampah	
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Penanganan sampah di TPA	
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	*Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota*		
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Penyusunan data dan informasi sumber daya perikanan tangkap	
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan sarana penangkapan ikan	
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pelatihan Nelayan	
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Fasilitasi pertemuan HNSI; Temu usaha pelaku perikanan tangkap	
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		
			Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penyusunan SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Fasilitasi layanan penyelenggaraan usaha penangkapan ikan	
			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Fasiltasi penerbitan tanda daftar kapal perikanan	
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	*Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil*		
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Temu pelaku usaha perikanan budidaya	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan data dan informasi sumber daya perikanan budidaya	
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan; Penyediaan obat ikan; Uji sample penyakit ikan, uji sample media budidaya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan sarana budidaya ikan; Fasilitasi dan rekomendasi BBM untuk pelaku usaha perikanan	
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Dara	Pembinaan dan Pemantauan cara budidaya ikan	
12	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diperiksa atau diawasi	*Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota*		
			Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan penggunaan pakan dan obat ikan; Sosialisasi UU Perikanan dan Peraturan Turunannya	
			Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan penggunaan bahan dalam pengolahan dan pemasaran ikan	
			Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan penggunaan alat tangkap ikan (Laut dan PUD); Penebaran benih ikan ke perairan umum (restocking); Sosialisasi UU Perikanan dan Peraturan Turunannya	
			Pengawasan Ekstraksi Garam	Pengawasan Ekstraksi Garam; Sosialisasi UU Perikanan dan Peraturan Turunannya	
13	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	*Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil*		
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Penyediaan data dan informasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		
			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Sosialisasi dan Fasilitasi Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan; Bimtek cara pengolahan ikan yang baik	
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Gemarikan dalam rangka penaggulangan Stunting dan keluarga resiko stunting	
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan garam	
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
			Penyediaan Bahan/Material		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah

A. Dukungan terhadap Nasional

Dukungan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan terhadap Program Prioritas Nasional, yaitu Program Prioritas Nasional (Asta Cita) kedelapan "Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur." melalui kegiatan Prioritas utama :

1. Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, yang diintervensi melalui aktivitas Penanaman Mangrove bekerjasama dengan DLHK Provinsi Jawa Tengah;
2. Pengendalian lingkungan dengan pemantauan, pengawasan, dan fasilitasi pemenuhan izin Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH), yang diintervensi melalui:
   a. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, melalui aktivitas Pemantauan kualitas air, Pemantauan kualitas udara, Inventarisasi Sumber Pencemar dan Penyusunan data kualitas lahan;
   b. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
      - Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan
      - Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
8	Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut melalui aktivitas Penanaman Mangrove bekerjasama dengan DLHK Provinsi Jawa Tengah	KL	DLHP
		• Pemantauan kualitas air, Pemantauan kualitas udara, Inventarisasi Sumber Pencemar dan Penyusunan data kualitas lahan • Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH • Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	LH	DLHP

Terhadap program Strategis Nasional, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kab. Purworejo mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan pada Sub Program Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dukungan yang diberikan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Program, meliputi:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, melalui aktivitas Hibah perahu fiber untuk penangkapan ikan;
2. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota,
    a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, melalui aktivitas Penjaminan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan;
    b. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, melalui aktivitas pemberian hibah Sarana Produksi dan Pengolahan Garam.
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan,
    a. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, melalui aktivitas Hibah Budidaya Ikan Lele, Hibah Budidaya Ikan Gurami, Hibah Induk Ikan Nila dan aktivitas Penerbitan Surat Rekomendasi BBM;
    b. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, melalui aktivitas Pencegahan Hama Penyakit Ikan melalui Uji Sampel Hama Penyakit Ikan.

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Terkait
	Penanggulangan kemiskinan				
1	a. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penyediaan kapal penangkap ikan perairan laut (perahu/ kapal fiber)	KL	DLHP
2		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan sarana produksi dan pengolahan garam (*tunnel* garam)	KL	DLHP
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	KL	DLHP
3		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penyediaan bibit ikan lele, gurami, nila dan indukan nila dan aktivitas Penerbitan Surat Rekomendasi BBM	KL	DLHP
			Pencegahan Hama Penyakit Ikan melalui Uji Sampel Hama Penyakit Ikan	KL	DLHP

B. Dukungan terhadap Provinsi

Terhadap program Delegasi Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kab. Purworejo mendukung beberapa program, meliputi:

1. Program Delegasi Provinsi Kelima, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila, melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan,
    a. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota, aktivitas Fasilitasi dan Pemberian Hibah Bibit Ikan Nila Unggul;

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, aktivitas Pencegahan Hama Penyakit Ikan melalui Uji Sampel Hama Penyakit Ikan, Fasilitasi pemantauan kesehatan ikan dan pemberian obat ikan.

2. Program Delegasi Provinsi Ke-duapuluh enam, Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa, melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota,
   a. Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), aktivitas Pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan;
   b. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya, aktivitas Pengelolaan taman keanekaragaman hayati Heroes Park yang akan dikembangkan menjadi kebun raya.

Delegasi Ke	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	Fasilitasi dan Pemberian Hibah Bibit Ikan Nila Unggul	KL	DLHP
		Pencegahan Hama Penyakit Ikan melalui Uji Sampel Hama Penyakit Ikan, Fasilitasi pemantauan kesehatan ikan dan pemberian obat ikan	KL	DLHP
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan;	LH	DLHP
		Pengelolaan taman keanekaragaman hayati Heroes Park yang akan dikembangkan menjadi kebun raya. (FS Kebun Raya)	LH	DLHP

C. Dukungan terhadap Kegiatan Unggulan Daerah

Terhadap Program Unggulan Bupati (Pitulungan), Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kab. Purworejo mendukung program "SEJAHTERA WARGANE." Dalam beberapa kegiatan meliputi:

1. Ketahanan iklim berbasis Masyarakat, melalui:
   a. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, Aktivitas yang dilaksanakan Pendampingan Program Kampung Iklim, Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan, pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, Pendampingan Saka Kalpataru;
   b. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Aktivitas yang dilaksanakan Penghargaan Program Kampung Iklim.

2. Sinergitas stakeholder dalam pengelolaan sampah dan limbah industri, melalui:
    a. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), aktivitas yang dilaksanakan Fasilitasi pemenuhan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan melalui OSS;
    b. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), aktivitas yang dilaksanakan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH dan pengawasan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah daerah;
    c. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, aktivitas yang dilaksanakan penyelenggaraan penghargaan Kampung Iklim dan Penghargaan Sekolah Adiwiyata;
    d. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, aktivitas yang dilaksanakan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
    e. Program Pengelolaan Persampahan, aktivitas yang dilaksanakan peningkatan peran serta marsyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Sosialisasi dan Fasilitasi pemberian Hibah Kendaraaan Motor Beroda Tiga di Pengelolaan Sampah Berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R dan Sarana Pengelolaan Sampah Berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R, berupa : Timbangan duduk digital, Gerobak Sorong, Tempat Sampah Terpilah.
3. Pembinaan, sosialisasi, dan edukasi tentang fungsi perlindungan dan konservasi sumber daya alam, melalui Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, aktivitas yang dilaksanakan Pendampingan Program Kampung Iklim, Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan, Pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, Pendampingan Saka Kalpataru, Penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup.
4. Penambahan kuantitas dan kualitas RTH, melalui program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), aktivitas yang dilaksanakan Pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan dan Pengelolaan taman keanekaragaman hayati Heroes Park yang akan dikembangkan menjadi kebun raya (Penyusunan DED Segmen I Penataan Heroes Park).
5. Penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission, melalui Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, aktivitas yang dilaksanakan Inventarisasi GRK dan penyusunan profil GRK, Inventarisasi Sumber Pencemar dan Penyusunan data kualitas lahan, Pemantauan kualitas air, Pemantauan kualitas udara.

    Selain itu, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, aktivitas yang dilaksanakan Fasilitasi Program Kampung Iklim, Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan, pendampingan gerakan peduli dan

berbudaya lingkungan hidup, Pendampingan Saka Kalpataru, Penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup.
Serta Program Pengelolaan Persampahan, melalui aktivitas Penanganan sampah di TPA,

6. Pengembangan hutan sebagai kebun raya akademik, melalui program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), aktivitas yang dilaksanakan Pengelolaan taman keanekaragaman hayati Heroes Park yang akan dikembangkan menjadi kebun raya (Penyusunan DED Segmen I Penataan Heroes Park).
7. Kabupaten bersih dan bebas sampah, melalui Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), aktivitas Fasilitasi pemenuhan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan melalui OSS, dan Program Pengelolaan Persampahan, melalui aktivitas Penanganan sampah di TPA dengan optimalisasi TPA melalui perluasan (pengadaan tanah TPA), Sosialisasi dan Fasilitasi pemberian Hibah Kendaraaan Motor Beroda Tiga di Pengelolaan Sampah Berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R dan Sarana Pengelolaan Sampah Berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R, Penyusunan dokumen kelayakan (FS) TPA dan dokumen lingkungan (UKL/UPL) TPA, dan Penanganan sampah di TPA melalui Pengadaan Peralatan Daur ulang Plastik - Mesin Pirolisis.

Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
Sejahtera Wargane	Ketahanan iklim berbasis masyarakat	Pendampingan Program Kampung Iklim, Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan, pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, Pendampingan Saka Kalpataru	LH	DLHP
		Penghargaan Program Kampung Iklim.	LH	DLHP
	Sinergitas stakeholder dalam pengelolaan sampah dan limbah industri	Fasilitasi pemenuhan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan melalui OSS	LH	DLHP
		Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	LH	DLHP
		Penyelenggaraan penghargaan Kampung Iklim dan Penghargaan Sekolah Adiwiyata	LH	DLHP
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH	LH	DLHP
		Sosialisasi dan Fasilitasi pemberian Hibah Kendaraaan Motor Beroda Tiga di Pengelolaan Sampah Berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R dan Sarana Pengelolaan Sampah Berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R, berupa : Timbangan duduk digital, Gerobak Sorong, Tempat Sampah Terpilah.	LH	DLHP
	Pembinaan, sosialisasi, dan edukasi tentang fungsi perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Pendampingan Program Kampung Iklim, Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan, Pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, Pendampingan Saka Kalpataru, Penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup.	LH	DLHP
	Penambahan kuantitas dan kualitas RTH	Penyusunan DED Segmen I Penataan Heroes Park	LH	DLHP
		Pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan	LH	DLHP
	Penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission	Inventarisasi GRK dan penyusunan profil GRK, Inventarisasi Sumber Pencemar dan Penyusunan data kualitas lahan, Pemantauan kualitas air, Pemantauan kualitas udara	LH	DLHP

Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
		Fasilitasi Program Kampung Iklim, Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan, pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, Pendampingan Saka Kalpataru, Penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	LH	DLHP
		Penanganan sampah di TPA	LH	DLHP
	Pengembangan hutan sebagai kebun raya akademik	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati Heroes Park yang akan dikembangkan menjadi kebun raya (Penyusunan DED Segmen I Penataan HP)	LH	DLHP
	Kabupaten bersih dan bebas sampah	Penanganan sampah di TPA dengan optimalisasi TPA melalui perluasan (pengadaan tanah TPA)	LH	DLHP
		Sosialisasi dan Fasilitasi pemberian Hibah Kendaraaan Motor Beroda Tiga di Pengelolaan Sampah Berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R dan Sarana Pengelolaan Sampah Berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R	LH	DLHP
		Penyusunan dokumen kelayakan (FS) TPA dan dokumen lingkungan (UKL/UPL) TPA	LH	DLHP
		Penanganan sampah di TPA melalui Pengadaan Peralatan Daur ulang Plastik - Mesin Pirolisis	LH	DLHP
		Fasilitasi pemenuhan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan melalui OSS	LH	DLHP

4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja merupakan hasil, keluaran, atau dampak yang dicapai dari suatu kegiatan, program, atau sasaran yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pembangunan. Penentuan target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun 2025-2029 dilakukan melalui penetapan Indikator Kinerja. Indikator kinerja berperan sebagai alat ukur untuk menilai pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan, yang dapat berupa keluaran (*output*), hasil (*outcome*), maupun dampak (*impact*). Indikator tersebut terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, yang menjadi tolok ukur utama pencapaian tujuan dan sasaran, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator yang disajikan dalam Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang terseleksi yang mendukung pencapaian target Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) ditetapkan dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Hal ini karena Indikator tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Pembangunan serta sebagai pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dijelaskan secara detail disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kualitas Air	Angka	75,31	75,41	75,51	75,61	75,71	75,81	Tujuan dan Sasaran PD
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	86,41	86,42	86,43	86,44	86,45	86,46	Tujuan dan Sasaran PD
3	Indeks Kualitas Lahan	Angka	58,11	58,12	58,13	58,14	58,15	58,16	Tujuan dan Sasaran PD
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	42,50	Tujuan PD; IUP
5	Persentase sampah terkelola	%	50,20	50,49	50,77	51,06	51,35	51,64	Sasaran PD
6	Nilai produksi perikanan tangkap	Juta Rupiah	8.059,89	8.301,68	8.550,73	8.807,26	9.071,47	9.343,62	Tujuan dan Sasaran PD
7	Nilai produksi perikanan budidaya	Juta Rupiah	187.095,64	190.837,55	194.654,30	198.547,39	202.518,34	206.568,71	Tujuan dan Sasaran PD
8	Nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	Juta Rupiah	2.450,04	2.500,00	2.549,89	2.599,95	2.649,93	2.700,07	Tujuan dan Sasaran PD
9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Tujuan dan Sasaran PD

Tabel 4.5
Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	42,50	Bidang PPKH	IUP (Tujuan PD)
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Angka	76,04	76,08	76,13	76,17	76,21	76,25	Bidang P3L	IKK sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020
3	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	26,82	26,97	27,13	27,27	27,43	27,58	Bidang PPKH	IKK sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020 (Program PD)
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	30,00	26,67	24,00	21,82	20,00	16,92	Bidang P3L	IKK sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020 (Program PD)
5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Angka	4.371,16	4.460,26	4.551,20	4.644,00	4.738,72	4.835,20	Bidang Perikanan	IKK sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020 (Program PD)

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa, untuk IKK Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota, definisi operasionalnya adalah Total Volume sampah yang dapat ditangani dibagi dengan Total Volume Timbunan Sampah kabupaten/kota dikali 100%. Dengan definisi operasional tersebut, maka sesuai dengan salah satu indikator Program Pengelolaan Persampahan yaitu Persentase Penanganan Sampah. Selain itu, IKK Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota, definisi operasionalnya adalah Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota dibagi dengan usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan dikali 100%. Dari definisi operasional tersebut, yang menjadi target IKK adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar, artinya adalah kebalikan dari target program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu Persentase Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan dalam Pemenuhan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan setiap tahun;
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas;
c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dilakukan setiap tahun selama periode renstra;
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
d. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bagi unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Konsekuensi logis dari amanat tersebut bahwa setiap instansi pemerintah, termasuk Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yaitu dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat rencana kinerja dalam kurun waktu pelaksanaan lima tahun berdasarkan pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.

Seiring dengan disusunnya Rencana Pembangunan Menengah Daerah 2025-2029, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagaimana peraturan perundangan menyusun Rencana Strategis periode 2025-2029 dalam rangka melaksanakan berbagai program/kegiatan/sub kegiatan yang telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia dan pemantauan kinerja berorientasikan pelayanan publik. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai di masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh komponen, unsur pimpinan dan pelaksana, dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Untuk merealisasikan keinginan, harapan dan cita-cita luhur dalam pelayanan publik, rencana tersebut dituangkan dalam tujuan, sasaran dan pengukuran kinerja (outcome dan output), yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara jelas dan praktis serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu yang ditentukan.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu juga merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan dan akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo antara lain:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
24. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Purworejo.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan gambaran kondisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan program pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan, khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan umum mengenai Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Kelompok sasaran layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang tujuan Renstra Kabupaten Purworejo, Sasaran Renstra Kabupaten Purworejo, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai kewenangan daerah yang meliputi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 126 Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DISDUKCAPIL; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dibentuk melalui Peraturan Bupati Purworejo Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi

Susunan organisasi DISDUKCAPIL terdiri dari:

a. Kepala DISDUKCAPIL;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
f. Jabatan Fungsional.

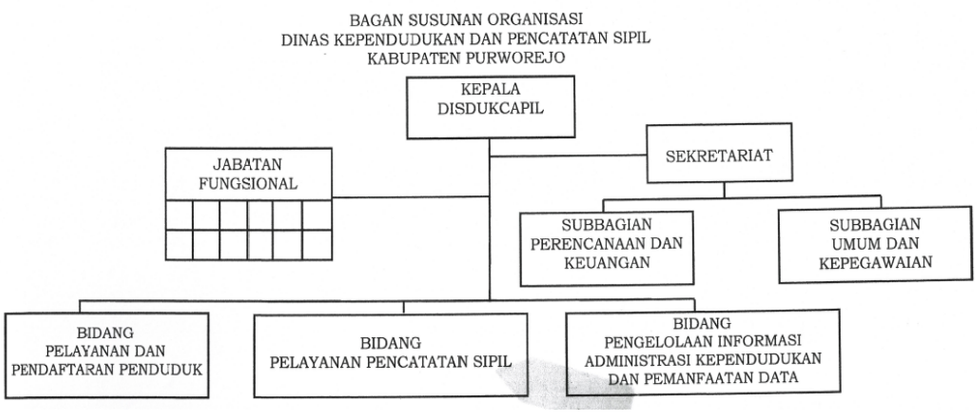

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasar Perbup. Purworejo Nomor 126 Tahun 2022

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo memiliki sumber daya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas. Pada akhir tahun 2024 terdapat 69 orang pegawai terdiri atas PNS sebanyak 40 orang, dan tenaga non PNS sebanyak 29 orang dengan komposisi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, Eselon II.b : 1 orang
2. Sekretaris, Eselon III.a : - orang
3. Kabid, Eselon III.b : 3 orang
4. Kasubbag, Eselon IVa : 2 orang
5. Pejabat Funsional Analis : 4 orang
6. Pejabat Fungsional Arsiparis : 2 orang
7. Pejabat Fungsional Pranata Komputer : 2 orang
8. Pelaksana : 26 orang
9. Tenaga non PNS : 29 orang

Jumlah = 69 orang

b. Sarana dan Prasarana kantor

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2024

KODE	NAMA BARANG	NILAI
1.3	ASET TETAP	14.829.731.827,75
1	TANAH	1.193.307.980,00
1.01	TANAH	1.193.307.980,00
2	PERALATAN DAN MESIN	8.289.801.655,00
2.01	ALAT BESAR	0,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	925.591.458,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	152.421.060,00
2.04	ALAT PERTANIAN	17.461.887,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.932.673.924,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	36.515.712,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	14.755.600,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	900.000,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	4.209.482.013,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU-RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	5.204.979.992 75
3.01	BANGUNAN GEDUNG	5.204.979.992 75
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	141.642.200,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	4.360.000,00
4.03	INSTALASI	6.220.000,00

KODE	NAMA BARANG	NILAI
4.04	JARINGAN	131.062.200,00
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0,00
6.01	KOMSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0,00
1.5	ASET LAINNYA	170.096.291,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo merupakan wujud nyata dari komitmen instansi dalam melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance),* khususnya dalam aspek transparansi dan pertanggungjawaban publik. Akuntabilitas ini tercermin melalui pelaporan secara terbuka atas capaian kinerja yang telah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara periodik. Kinerja yang dimaksud meliputi berbagai program dan kegiatan strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Salah satu penerapan akuntabilitas tercermin dari hasil pengukuran dan evaluasi sejak pelaksanaan Renstra 2022 hingga tahun 2024. Data dalam tabel berikut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesesuaian antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Penyampaian informasi ini diharapkan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, tetapi juga sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah berikut ini:

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Indikator Tujuan																					
1	Tingkat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil				0	4	4	4	4	4	0	3	3	3	3	3	0.00	75.00	75.00	75.00		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				84.3	88.80	88.90	90.00	90.10	90.20	84.3	88.8	88.95	90.01			100.00	100.02	100.06	100.01		
	Indikator sasaran																					
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil				91.2	89.9	91.3	92.8	93.4	94.3	96.94	91.16	92.97	94.36			106.33	101.37	101.81	101.64		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				84.3	88.80	88.90	90.00	90.10	90.20	84.3	88.8	88.95	90.01			100.00	100.02	100.06	100.01		

Capaian indikator “Tingkat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil” selama periode 2022 hingga 2024 berada pada level 3. Hal ini dikarenakan salah satu indikator untuk mencapai level 4, yaitu tingkat capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD), belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hingga tahun 2024, target capaian IKD sebesar 30% belum tercapai, dengan realisasi baru mencapai 8,49% dari target nasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian ini antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya aplikasi IKD, belum seluruh instansi menerima IKD sebagai syarat administrasi, serta masih adanya kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi dalam penggunaan aplikasi digital tersebut.

Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah” menunjukkan tren positif dari tahun 2021 hingga 2023, yang mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil cukup memuaskan bagi masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan tingkat capaian IKM. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang belum memahami prosedur pengajuan pelayanan secara daring, serta masih adanya keinginan untuk mendapatkan pelayanan secara langsung akibat keterbatasan akses internet di tempat tinggal mereka. Di sisi lain, masyarakat kini dituntut untuk mampu memahami dan melaksanakan proses pelayanan administrasi kependudukan secara mandiri, termasuk dalam hal pencetakan dokumen secara elektronik.

Pada indikator “Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, capaian menunjukkan peningkatan setiap tahun dari 2021 hingga 2023. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian, salah satunya disebabkan oleh rendahnya persentase kepemilikan KTP-el. Hal ini disebabkan oleh kendala dalam pelayanan perekaman KTP-el, terutama bagi penduduk yang berada di luar wilayah Kabupaten Purworejo, seperti pelajar yang menempuh pendidikan di pondok pesantren atau warga yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, yang belum sempat melakukan perekaman data kependudukan.

Untuk rasio keuangan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah berikut ini:

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	832,334,400	621,000,000	919,762,000	1,279,762,000	864,762,000	1,096,262,000	768,711,684	692,707,395	1,077,952,470	944,827,642	1,067,956,674	-	111.55	117.20	73.83	123.50	-
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	832,334,400	519,914,000	739,762,000	901,762,000	659,762,000	756,762,000	768,711,684	651,867,695	985,100,470	717,180,442	964,816,674	-	125.38	133.16	79.53	146.24	-
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		48,751,900	50,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000		33,810,947	16,367,500	9,750,000	-		69.35	32.74	17.73	0.00	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	397,086,400	280,015,600	220,000,000	245,000,000	247,000,000	247,000,000	390,594,708	258,139,667	784,284,674	431,887,442	964,816,674		92.19	356.49	176.28	390.61	
Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		77,762,000	77.762.000"	77.762.000"	77.762.000"	77.762.000"		75,791,113	15,391,496	3,395,000	-		97.47	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	435,248,000	99,564,500	378.000.000"	504.000.000"	260.000.000"	358.000.000"	378,116,976	270,437,400	157,107,400	265,671,000	-		271.62	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		13,820,000	14,000,000	20,000,000	20,000,000	19,000,000		13,688,568	11,949,400	6,477,000	-		99.05	85.35	32.39	0.00	
Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	70,000,000	75,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	-	192,740,000	103,140,000		#VALUE!	#VALUE!	256.99	206.28	
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan		-	70,000,000	75,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	-	192,740,000	103,140,000		#VALUE!	0.00	256.99	206.28	
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	61,086,000	70,000,000	222,000,000	107,500,000	239,500,000	-	40,839,700	92,852,000	34,907,200	-	-	66.86	132.65	15.72	0.00	-
Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			5.000.000"	7.000.000"	10.000.000"	15.000.000"	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		61,086,000	60,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	-	40,839,700	92,852,000	31,240,000	-		66.86	154.75	48.06	0.00	
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				8,000.000"	9.500.000"	10.000.000"	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk			5,000,000	7.000.000"	8.000.000"	9.500.000"	-	-	-	3,667,200	-		#DIV/0!	0.00	#VALUE!	#VALUE!	
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk				15.000.000"	15.000.000"	15.000.000"	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk				120.000.000"		125.000.000"	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	40,000,000	40,000,000	81,000,000	47,500,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	0.00	-
Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk				6.000.000"	6.500.000"	7.000.000"	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk		40.000.000"	40.000.000"	70.000.000"	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	0.00	
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk				5.000.000"	6.000.000"	8.000.000"	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	229,746,500	466,000,000	336,000,000	369,000,000	379,000,000	378,000,000	227,258,800	372,312,924	178,827,020	123,904,400	9,396,000	-	79.90	53.22	33.58	2.48	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Pelayanan Pencatatan Sipil	229,746,500	336,090,000	221,000,000	252,000,000	247,000,000	260,000,000	227,258,800	265,252,924	121,033,320	88,828,200	9,396,000	-	78.92	54.77	35.25	3.80	-
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	229,746,500	285,300,200	200,000,000	202,000,000	202,000,000	215,000,000	227,258,800	265,252,924	73,808,200	68,916,800			92.97	36.90	34.12	0.00	
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		50,789,800	21,000,000	50,000,000	45,000,000	45,000,000			47,225,120	19,911,400	9,396,000		0.00	224.88	39.82	20.88	
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	129,910,000	115,000,000	117,000,000	112,000,000	118,000,000	-	107,060,000	57,793,700	35,076,200	-	-	82.41	50.26	29.98	0.00	-
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	-	11,470,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	-	-	3.500.000"	3.600.000"	4.000.000"	4.500.000"	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		118,440,000	105,000,000	105,000,000	100,000,000	101,000,000		107,060,000	57,793,700	35,076,200			90.39	55.04	33.41	0.00	
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil				7.000.000*	8.000.000*	15.000.000*							#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	31.000.000*	32.000.000*	40.000.000*	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan sipil	-	-	-	12.000.000*	15.000.000*	15.000.000*	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	-	-	3.500.000*	4.000.000*	4.500.000*	5,000,000	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Penyajian data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	-	5.000.000*	7.000.000*	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	0.00	-
Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	15.000.000"	20,000,000	45.000.000"	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	0.00	
Supervisi Bersama dengan Kantor kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	-	-	5.000.000"	6.000.000"	7.000.000"	8.000.000"	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	75,542,600	337,000,000	251,000,000	274,000,000	286,000,000	285,000,000	75,492,272	278,327,888	142,181,456	130,971,821	-	-	82.59	56.65	47.80	#VALUE!	-
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	153,674,400	85,000,000	95,000,000	76,000,000	80,000,000	-	109,481,516	21,445,590	47,818,802	-	-	71.24	25.23	50.34	#VALUE!	-
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	-	79,273,400	45,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	47,835,240	11,565,500	33,733,902	9,796,496		60.34	25.70	67.47	19.59	
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-	74,401,000	40,000,000	45,000,000	26,000,000	30,000,000	-	61,646,276	9,880,090	14,084,900	5,900,000		82.86	24.70	31.30	22.69	
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	-	"10.000.000	"10.000.000	"15.000.000	"15.000.000	"20.000.000	-	-	-	-	-		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	75,542,600	"10.000.000	"15.000.000	"15.000.000	"20.000.000	"20.000.000	75,492,272	-	4,925,100	7,508,000	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	75,542,600	"10.000.000	"15.000.000	"15.000.000	"20.000.000	"20.000.000	75,492,272		4,925,100	7,508,000	-		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	173,325,600	151,000,000	164,000,000	170,000,000	185,000,000	-	168,846,372	115,810,766	75,645,019	24,694,488	-	97.42	76.70	46.13	14.53	-
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	161,856,400	140,000,000	150,000,000	155,000,000	170,000,000	-	168,846,372	115,810,766	75,645,019	24,694,488		104.32	82.72	50.43	15.93	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-	"10.000.000	"10.000.000	"15.000.000	"17.000.000	"20.000.000	-	-	-	-	-		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	"10.000.000	"15.000.000	"15.000.000	"17.000.000	"20.000.000	-	-	-	-	-		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	-	11,469,200	11,000,000	14,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	-	-	40.500.000"	41.000.000"	42.000.000"	42.000.000"	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	0.00	-
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		"10.000.000	"13.000.000	"15.000.000	20,000,000	"20.000.000							#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	0.00	
Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan		"10.000.000	"11.000.000	"12.000.000	"14.000.000	"15.000.000	-	-	-	-	-		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		"15.000.000	"20.000.000	"25.000.000	"45.000.000	"50.000.000	-	-	-	-	-		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	56,000,000	40,000,000	44,000,000	46,000,000	45,000,000	-	49,098,158	13,153,690	26,990,200	2,080,000	-	87.68	32.88	61.34	4.52	-
Penyusunan Profil Kependudukan	-	56,000,000	40,000,000	44,000,000	46,000,000	45,000,000	-	49,098,158	13,153,690	26,990,200	2,080,000	-	87.68	32.88	61.34	4.52	-
Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota		-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	1,380,000	5,131,700			#VALUE!	13.80	51.32	0.00	
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		56,000,000	30,000,000	34,000,000	36,000,000	35,000,000	-	49,098,158	11,773,690	21,858,500	2,080,000		87.68	39.25	64.29	5.78	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	#VALUE!	#VALUE!	7,296,732,522	9,188,036,064	8,836,921,188	8,387,091,830	8,315,331,905	7,722,379,456	#VALUE!	5,356,451,019	2,762,810,177		#VALUE!	#VALUE!	58.30	31.26	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	387,754,200	45,987,800	45,060,000	45,870,000	48,900,000	51,900,000	383,618,595	214,495,233	11,795,800	12,529,600	4,795,400	-	466.42	26.18	27.32	9.81	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28,814,000	14,867,800	14,000,000	14,000,000	14,600,000	15,000,000	28,674,600	17,813,000	5,862,600	6,833,600	2,600,000		119.81	41.88	48.81	17.81	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25,446,000	3,655,000	3,660,000	3,670,000	3,700,000	4,000,000	24,509,795	3,606,900	917,400	1,139,200	-		98.68	25.07	31.04	0.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		8,102,000	8,100,000	8,100,000	8,500,000	9,000,000	-	8,081,816	494,000	904,800	-		99.75	6.10	11.17	0.00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1,158,000	1,200,000	1,500,000	1,600,000	1,700,000	-	1,139,800	661,000	816,800	643,200		98.43	55.08	54.45	40.20	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1,414,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,200,000	-	1,395,800	966,000	966,000	-		98.71	64.40	48.30	0.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,848,000	7,143,000	7,100,000	7,100,000	7,500,000	8,000,000	1,848,000	7,113,900	1,532,000	820,000	-		99.59	21.58	11.55	0.00	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	331,646,200	9,648,000	9,500,000	9,500,000	11,000,000	12,000,000	328,586,200	175,344,017	1,362,800	1,049,200	1,552,200		1817.41	14.35	11.04	14.11	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,061,370,748	5,763,137,585	5,765,082,522	5,775,716,064	5,987,761,188	6,245,691,830	5,919,968,389	5,709,138,343	5,200,206,620	4,518,530,218	2,398,774,072	-	99.06	90.20	78.23	40.06	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,049,111,148	5,744,588,585	5,743,582,522	5,750,016,064	5,954,361,188	6,210,891,830	5,907,772,989	5,690,889,443	5,194,328,020	4,511,430,818	2,395,935,322		99.07	90.44	78.46	40.24	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	1,500,000	3,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	1,500,000	2,000,000	6,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-		#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	1,500,000	1,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-		#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2,125,000	2,100,000	2,200,000	2,500,000	3,000,000	-	2,097,900	1,060,000	750,000	-		98.72	50.48	34.09	0.00	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	3,896,000	3,900,000	4,000,000	4,500,000	5,000,000	-	3,845,900			-		98.71	0.00	0.00	0.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12,259,600	12,528,000	12,500,000	13,000,000	13,200,000	13,500,000	12,195,400	12,305,100	4,818,600	6,349,400	2,838,750		98.22	38.55	48.84	21.51	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	1,500,000	1,700,000	1,800,000	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	4,924,000	5,000,000	5,000,000	13,960,000	15,500,000	-	4,056,400	7,099,400	4,000,000	-	-	82.38	141.99	80.00	0.00	-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-		#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang Milik daerah pada SKPD	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,500,000	-	-	-	2,000,000	-		#DIV/0!	0.00	100.00	0.00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4,924,000	2,000,000	2,000,000	4,960,000	5,000,000	-	4,056,400	7,099,400	2,000,000	-		82.38	354.97	100.00	0.00	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Pemanfaatan Barang Milik daerah SKPD	-	-	-	-	2,000,000	3,000,000	-	-			-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56,108,000	-	5,900,000	20,150,000	116,100,000	83,000,000	54,090,600	43,710,000	-	782,200	-	-	#VALUE!	#VALUE!	3.88	0.00	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	1,900,000	1,500,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-		#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	1,000,000	1,000,000	2,500,000	3,000,000	-	-	-	782,200	-		#DIV/0!	0.00	78.22	0.00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	1,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-		#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	2,000,000	2,500,000	2,600,000	3,000,000	-	-	-	-	-		#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	8,150,000	30,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#VALUE!	0.00	0.00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56,108,000	-	-	5,000,000	10,000,000	11,000,000	54,090,600	43,710,000	-	-	-		#DIV/0!	#VALUE!	0.00	0.00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	15,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,379,547,200	268,300,300	760,690,000	2,013,200,000	1,547,000,000	1,114,000,000	1,285,226,867	1,295,990,965	257,029,625	216,159,450	76,421,540	-	483.04	33.79	10.74	4.94	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	6,923,400	6,950,000	7,000,000	7,000,000	8,000,000	-	6,923,400	5,845,500	5,235,400	4,973,630		100.00	84.11	74.79	71.05	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,061,600,000	150.000.000"	-	25,000,000	27,000,000	30,000,000	973,197,800	868,726,885	-	-	-		#VALUE!	#DIV/0!	0.00	0.00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	13,149,700	13,100,000	13,200,000	13,500,000	14,000,000	-	13,124,700	12,304,600	10,236,900	9,995,800		99.81	93.93	77.55	74.04	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	90,972,000	85,000,000	92,000,000	93,000,000	100,000,000	-	85,155,000	70,255,600	76,970,050	29,697,400		93.61	82.65	83.66	31.93	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	19,470,000	19,470,000	19,500,000	20,000,000	25,000,000	-	28,828,550	13,334,000	9,197,000	2,273,850		148.07	68.48	47.16	11.37	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	1,000,000	1,500,000	2,000,000	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	
Penyediaan Bahan/Material	-	13,765,700	13,700,000	14,000,000	15,000,000	20,000,000	-	21,506,100	18,750,300	15,125,900	12,356,900		156.23	136.86	108.04	82.38	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1,047,000	1,100,000	1,200,000	5,000,000	10,000,000	-	3,180,000	6,360,000	4,080,000	-		303.72	578.18	340.00	0.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212,860,200	87,370,000	87,370,000	88,000,000	120,000,000	140,000,000	211,865,807	163,654,944	103,557,825	71,118,100	14,753,000		187.31	118.53	80.82	12.29	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	35,602,500	35,500,000	35,500,000	75,000,000	80,000,000	-	48,594,600	26,288,800	24,196,100	2,370,960		136.49	74.05	68.16	3.16	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	105,087,000		2,500,000	3,000,000	10,000,000	15,000,000	100,163,260	56,296,786	333,000	-	-		#DIV/0!	13.32	0.00	0.00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	248,000,000	856,900,000	580,000,000	335,000,000	-	-	-	-	-		#VALUE!	0.00	0.00	0.00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	
Pengadaan Mebel	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	198,000,000	-	-	250,000,000	-	-	-	-	-		#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pengadaan aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	35,000,000	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	50,000,000	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	156,900,000	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434,192,900	238,861,000	245,000,000	246,000,000	280,000,000	271,000,000	429,907,313	248,922,775	270,729,209	287,153,146	126,881,073	-	104.21	110.50	116.73	45.31	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	163,048,000			5,000,000	6,000,000	6,000,000	161,883,400	13,441,300	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189,726,100	176,045,800	182,000,000	178,000,000	190,000,000	200,000,000	186,637,329	185,009,391	221,093,731	236,203,966	105,895,089		105.09	121.48	132.70	55.73	
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor			60.000.000*	85.000.000*	20,000,000	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	0.00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81,418,800	62,815,200	63,000,000	63,000,000	64,000,000	65,000,000	81,386,584	50,472,084	49,635,478	50,949,180	20,985,984		80.35	78.79	80.87	32.79	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242,553,200	206,085,600	222,000,000	225,200,000	263,200,000	271,000,000	242,520,141	206,065,740	195,234,384	317,296,405	155,938,092	-	99.99	87.94	140.90	59.25	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110,571,200	10,429,000	10,429,000	11,000,000	11,000,000	15,000,000	110,538,141	33,886,753	10,429,000	39,573,702	20,985,984		324.93	100.00	359.76	190.78	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	79,252,000	80,571,000	81,000,000	96,000,000	98,000,000	-	55,783,567	61,553,826	153,230,703	98,794,858		70.39	76.40	189.17	102.91	
Pemeliharaan Mebel	-		2,500,000	2,500,000		3,000,000	-			6,519,000	-		#DIV/0!	0.00	260.76	#DIV/0!	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	45,449,000	45,000,000	45,200,000	60,000,000	61,000,000	-	45,448,200	27,199,224	33,465,000	10,951,250		100.00	60.44	74.04	18.25	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	7,500,000	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	10,000,000	10,000,000	15.000.000"	15.000.000"	-	-	-	-	-		#DIV/0!	0.00	0.00	#VALUE!	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46,410,000	46,369,600	47,000,000	48,000,000	60,000,000	60,000,000	46,410,000	46,367,220	69,992,334	70,020,000	24,256,000		99.99	148.92	145.88	40.43	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85,572,000	24,586,000	24,500,000	25,000,000	26,000,000	30,000,000	85,572,000	24,580,000	26,060,000	14,488,000	950,000		99.98	106.37	57.95	3.65	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	2,000,000	2,500,000	2,700,000	4,000,000	-	-	-	-	-		#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	

Selama periode 2022 hingga 2024, pagu anggaran mengalami tren penurunan dua tahun berturut-turut. Setelah mencapai nilai tertingginya pada tahun 2022, alokasi anggaran menurun pada tahun 2023 dan kembali mengalami penyesuaian di tahun 2024. Penurunan ini merupakan bentuk respons terhadap kondisi fiskal daerah yang perlu dijaga keseimbangannya, sehingga pemerintah melakukan efisiensi belanja serta memprioritaskan program-program yang benar-benar strategis dan berdampak langsung pada masyarakat.

Sejalan dengan penurunan pagu, realisasi anggaran juga mengalami penurunan dalam dua tahun tersebut. Capaian realisasi keuangan tercatat sebesar 98,08% pada tahun 2022, menurun signifikan menjadi 93,01% pada tahun 2023, sebelum akhirnya kembali meningkat ke 98,13% pada tahun 2024. Penurunan capaian pada tahun 2023 kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, penyesuaian kebijakan, atau tantangan teknis dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Meskipun sempat mengalami penurunan, capaian realisasi tahun 2024 menunjukkan perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran yang cukup signifikan. Hal ini mencerminkan adanya upaya pembenahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta peningkatan koordinasi antar unit pelaksana. Dengan demikian, meskipun pagu anggaran menurun, efektivitas pengelolaan anggaran tetap dapat dijaga melalui pelaksanaan yang tepat waktu, efisien, dan terfokus pada capaian hasil yang diinginkan.

Untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah ditetapkan beberapa indikator utama yang mencerminkan efektivitas dan kualitas layanan kepada masyarakat. Capaian indikator kinerja selama periode Renstra 2020–2024 menjadi dasar evaluasi dalam menyusun arah kebijakan dan penetapan target kinerja pada periode Renstra 2025–2029. Berikut ini disajikan data capaian indikator kinerja utama Disdukcapil Kabupaten Purworejo tahun 2020 hingga 2024, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan target kinerja untuk lima tahun ke depan, yaitu Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024 dibawah ini:

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indikator Tujuan PD						
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	0%	0%	0.96%	6.30%	8.49%	Inovasi IKD baru dimulai sejak tahun 2022
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	88.63	84.26	88.82	88.95	90.01	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0	0	0	77.71	77.78	
2	Indikator Sasaran PD						
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	0%	0%	0.96%	6.30%	8.49%	Inovasi IKD baru dimulai sejak tahun 2022
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	88.63	84.26	88.82	88.95	90.01	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0	0	0	77.71	77.78	
3	Indikator Program						
	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Digital	0%	0%	0%	97.95%	98.68%	Dokumen Pendaftaran Penduduk Digital dimulai tahun 2023
	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Digital	0%	0%	0%	87.99%	90.04%	Dokumen Pencatatan Sipil Digital dimulai tahun 2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Desa dan Kelurahan Pengguna yang Memanfaatkan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik	0%	0%	0%	0%	0%	Sasaran Kerjasama Pemanfaatan Data Tahun 2020-2024 adalah 41 Perangkat Daerah se Kabupaten Purworejo
	Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku	0%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	0%	100%	100%	100%	100%	
4	IKK Outcome Permendagri 18 Tahun 2020						
	Perekaman KTP Elektronik	99.48%	99.30%	99.88%	99.80%	99.70%	
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	74.79%	89.44%	83.46%	94.06%	96.70%	
	Kepemilikan Akta Kelahiran	96.27%	95.39%	98.95%	99.13%	100%	
	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	6	19	24	29	34	

Sesuai tabel diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo telah menunjukkan upaya yang konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Salah satu inovasi yang mulai diimplementasikan adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang diluncurkan secara nasional sejak tahun 2022. Program ini terus dilanjutkan hingga saat ini sebagai bentuk transformasi layanan menuju digitalisasi administrasi kependudukan. Meskipun capaian IKD hingga tahun 2024 belum mencapai target nasional sebesar 30%, namun capaian di Kabupaten Purworejo terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan adanya progres yang positif dalam penerapan inovasi layanan.

Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Disdukcapil juga mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2020–2024. Tren ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, serta adanya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Disdukcapil pada tahun 2023 hingga 2024 juga menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini mencerminkan komitmen dan kesungguhan perangkat daerah dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja organisasi.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penentuan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dilakukan berdasarkan analisis terhadap Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Strategis Provinsi, hasil telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk lima tahun ke depan. Pelayanan yang diberikan mencakup berbagai jenis layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo. Telaah yang menjadi dasar penentuan tantangan dan peluang sebagai berikut:

a. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Rencana Strategis Kementerian Dalam negeri tercantum dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 adalah:

"Kementerian Dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Inovatif, Dan Kolaboratif (Apik) Sebagai Poros Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Untuk mewujudkan Visi Tahun 2025-2029 tersebut, Kementerian Dalam Negeri menjabarkan dalam 4 Misi sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kualitas demokrasi Indonesia. → Adaptif
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan dalam negeri, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kewilayahan berbasis otonomi daerah, sinergi dan kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. → Kolaboratif
3. Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang inovatif berbasis teknologi. → Inovatif
4. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pelayanan publik. → Profesional

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2026-2029 berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah “Menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.” Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik. Untuk mencapai target tersebut akan dilaksanakan melalui Program Tata Kelola Kependudukan.

b. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mendukung visi Gubernur Terpilih “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045” dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas.
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif.
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan.
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

DISPERMASDESDUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2029 menetapkan tujuan yaitu “Mewujudkan Jawa Tengah Maju yang Berkelanjutan” dengan tujuan: “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, Indikator: Nilai Kinerja Dukcapil Provinsi Jawa Tengah. Sedang sasaran “Peningkatan persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Jawa Tengah” Indikator: Persentase kepemilikan KTP-el, Kepemilikan KIA dan Kepemilikan Akta Kelahiran, Buku Pokok Pemakaman dengan strategi dan arah kebijakan berikut:

- Strategi:
  1. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pelayanan adminduk skala provinsi
  2. Peningkatan akses dan cakupan masyarakat atas dokumen pencatatan sipil
  3. Peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- Arah kebijakan:
  1. Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
  2. Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
  3. Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

c. Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasar hasil telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo, terdapat dua arah pengembangan wilayah yang berpotensi besar mempengaruhi dinamika kependudukan ke depan.

Pertama, pengembangan kawasan perbatasan atau *border city* yang mencakup Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Bagelen, diarahkan menjadi kawasan strategis dengan dukungan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, serta perumahan. Perkembangan ini diperkirakan akan mendorong peningkatan jumlah penduduk akibat daya tarik ekonomi dan mobilitas masyarakat. Kedua, kawasan perkotaan Purworejo–Kutoarjo yang meliputi Kecamatan Purworejo, Banyuurip, Bayan, Kutoarjo, dan Gebang, dirancang sebagai pusat pemerintahan yang terintegrasi dengan pengembangan sektor perdagangan dan jasa skala regional, industri, perumahan, serta penyediaan tenaga kerja terampil. Perluasan fungsi kawasan ini juga diproyeksikan akan menambah jumlah penduduk secara signifikan.

Seiring dengan hal tersebut, kebutuhan terhadap pelayanan administrasi kependudukan tentu akan meningkat. Namun, Disdukcapil Kabupaten Purworejo telah mengantisipasi hal ini melalui pengembangan layanan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara lebih cepat dan efisien. Meski demikian, optimalisasi layanan ini tetap membutuhkan dukungan infrastruktur, seperti perangkat telepon yang kompatibel dan jaringan internet yang stabil agar pelayanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata serta pemahaman tentang tata cara mengoperasian aplikasi yang belum semua penduduk memahami.

d. Telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029, terdapat isu yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan administrasi kependudukan, seperti terbatasnya akses layanan di daerah terpencil atau rawan bencana, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, hingga tantangan dalam mendukung mobilitas penduduk yang dinamis. Oleh karena itu, Disdukcapil memandang perlu adanya strategi pelayanan yang adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, serta memperhatikan pemerataan akses melalui penguatan layanan digital dan mobile.

Dalam lima tahun kedepan, pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dihadapkan pada permasalahan yang kompleks, hal tersebut tercermin dari hasil analisis terhadap dokumen perencanaan strategis baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Tantangan dan peluang yang muncul harus dimaknai secara strategis sebagai dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan pelaksanaan program prioritas. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain:

1. Masih adanya kesenjangan kepemilikan dokumen kependudukan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan dan kelompok rentan.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang aplikasi kependudukan digital, yang menghambat percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
3. Tuntutan publik terhadap pelayanan yang serba cepat dan terintegrasi, menuntut peningkatan kapasitas SDM dan sistem teknologi informasi.
4. Penyandang disabilitas atau penduduk rentan memerlukan pendekatan layanan yang inklusif dan responsif.

Dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terdapat sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang kependudukan.

Peluang ini muncul seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, kemajuan teknologi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta dukungan infrastruktur dan sistem pemerintahan yang semakin terintegrasi. Peluang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a. Komitmen nasional dan daerah terhadap transformasi digital layanan publik.
b. Ketersediaan infrastruktur Teknologi informasi komputer dan jaringan yang semakin baik.
c. Potensi besar pemanfaatan data kependudukan untuk integrasi layanan lintas sektor (pendidikan, kesehatan, bansos, dll).
d. Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik berbasis digital.

2.1.5 Kelompok sasaran layanan

a. Kelompok sasaran layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo adalah Masyarakat khususnya di Purworejo, Instansi Pemerintah maupun instansi swasta.
b. Mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam Pemberian Pelayanan antara lain:
    1) Masyarakat
    2) Perangkat Daerah lain di lingkungan pemerintah daerah
    3) Instansi vertikal dan lembaga lain (Ditjen. Dukcapil, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, KPU, Bawaslu, BPJS, Kantor Urusan Agama)
    4) Lembaga Keuangan dan Perbankan
    5) Lembaga non pemerintah (RS swasta)
    6) Lembaga Pendidikan (Sekolah dan Perguruan Tinggi)
    7) Lembaga sosial dan keagamaan (Yayasan sosial, panti asuhan)
    8) Badan Usaha Milik Daerah maupun milik swasta (PLN, PDAM)
    9) Media dan lembaga penyiaran
c. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk saat ini belum tersedia
d. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

    Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat daerah adalah seluruh PD yang ada di Pemerintah Kabupaten Purworejo

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lima tahun mendatang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja, mengingat dalam pelaksanaan urusan administrasi kependudukan belum dapat dilakukan secara optimal sehingga menimbulkan berbagai isu yang berkembang di masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo berupaya mendukung Asta Cita, Program Prioritas Presiden, dan Quick Win yang berhubungan dengan pelayanan digital/online. Hal tersebut juga

merupakan suatu inovasi yang dilakukan sebagai upaya memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan karena dapat dilakukan dari manapun. Masyarakat tidak perlu datang langsung untuk mengurusnya, cukup melalui aplikasi online yang disediakan.

Adanya digitalisasi pelayanan Administrasi Kependudukan tersebut, juga mendapatkan banyak tantangan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan berupaya menciptakan kondisi yang ideal dalam masalah tersebut karena target Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga menjadi target Nasional sejak tahun 2023 yang selama ini belum tercapai di Kabupaten Purworejo.

Adapun permasalahan pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan digital, yang menghambat akses pelayanan publik yang cepat dan efisien.
2. Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna belum optimal, menyebabkan kurangnya integrasi layanan dan kebijakan pembangunan berbasis data.
3. Keterbatasan infrastruktur dan SDM yang menguasai teknologi informasi dibandingkan dengan kebutuhan digitalisasi layanan dan tata kelola data kependudukan yang optimal.
4. Belum mutakhirnya data kependudukan jika dibandingkan dengan standar dan regulasi yang berlaku.
5. Akuntabilitas perencanaan belum mencapai tingkat yang optimal, yang tercermin dari capaian nilai SAKIP yang masih di bawah target yang diharapkan.

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditinjau dari gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil) dan Renstra Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah maka perlu menentukan isu-isu strategis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 2.4 Simpulan Isu Strategis dibawah ini:

Tabel 2.4 Isu Strategis Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Masih rendahnya kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan digital, yang menghambat akses pelayanan publik yang cepat dan efisien	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Digitalisasi layanan administrasi kependudukan untuk memperkuat daya saing dan keterjangkauan pelayanan bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan.
	Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna belum optimal, menyebabkan kurangnya integrasi layanan dan kebijakan pembangunan berbasis data.		Cyber insecurity	Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia		Peningkatan pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik lintas sektor, sebagai bagian dari transformasi menuju pemerintahan yang inklusif dan efisien
	Keterbatasan infrastruktur dan SDM yang menguasai teknologi informasi dibandingkan dengan kebutuhan digitalisasi layanan dan tata kelola		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			Penguatan sistem informasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi, guna mendukung perencanaan pembangunan daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	data kependudukan yang optimal.					yang responsif terhadap perubahan sosial dan lingkungan
	Belum mutakhirnya data kependudukan jika dibandingkan dengan standar dan regulasi yang berlaku					Peningkatan kualitas dan pemutakhiran data kependudukan yang sesuai dengan standar dan regulasi
	Akuntabilitas perencanaan belum mencapai tingkat yang optimal, yang tercermin dari capaian nilai SAKIP yang masih di bawah target yang diharapkan					Penguatan akuntabilitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan kinerja dan efektivitas implementasi sistem SAKIP

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo ke depan, memasuki tahun 2025 sesuai hasil analisis terhadap permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis, diantaranya sebagai berikut:

1. Digitalisasi layanan administrasi kependudukan untuk memperkuat daya saing dan keterjangkauan pelayanan bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan.
2. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik lintas sektor, sebagai bagian dari transformasi menuju pemerintahan yang inklusif dan efisien.
3. Penguatan sistem informasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi, guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perubahan sosial dan lingkungan.
4. Peningkatan kualitas dan pemutakhiran data kependudukan yang sesuai dengan standar dan regulasi.
5. Penguatan akuntabilitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan kinerja dan efektivitas implementasi sistem SAKIP.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada arah pembangunan nasional, provinsi, dan daerah yang terintegrasi dan berkesinambungan. Visi dan misi Bupati Purworejo menjadi panduan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan, namun secara substansi juga merupakan bagian dari dukungan terhadap program Presiden RI, kebijakan nasional, serta program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sinkronisasi ini bertujuan menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek administrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo secara langsung mendukung pelaksanaan Visi Misi Bupati Purworejo Tahun 2025–2029. Rumusan visi, misi disusun dengan memperhatikan isu dan permasalahan yang berkembang baik di lingkungan internal maupun eksternal dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Visi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2025-2029 yaitu:

"PURWOREJO BERDAYA SAING, SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN INOVATIF"
(PURWOREJO BERSERI)

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Berdaya Saing bermakna Masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan di masa datang.
b. Sejahtera bermakna Terciptanya masyarakat adil dan makmur yang ditandai dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik.
c. Religius bermakna Masyarakat yang memiliki ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjalani kehidupan sehari-hari berlandaskan nilai, norma, dan etika ajaran agama, dan bersikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan keberagaman, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda.
d. Inovatif bermakna Pemerintah dan masyarakat dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapi dengan mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki serta mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan (meliputi elemen *Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment*).
e. Berseri merupakan akronim dari kata Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif. "Berseri" memiliki arti "Tampak Cerah" yang kemudian dimaknai sebagai pengharapan untuk menciptakan masa dengan yang cerah. "Purworejo Berseri" mempunyai makna sebagai upaya memperkuat fondasi pembangunan dengan tujuan menciptakan masa depan yang cerah menuju Indonesia Emas 2045. Melalui inovasi, kolaborasi, dan dedikasi, Purworejo membangunan landasan yang kokoh untuk generasi mendatang. Pemerintah bersama masyarakat

memastikan kemakmuran yang berkelanjutan, harmoni dengan alam, serta kemajuan berkesinambungan di berbagai sektor kehidupan.

Misi Bupati Purworejo Tahun 2025-2029:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
2. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
4. Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi

Dalam mendukung visi "Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif" (PURWOREJO BERSERI), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo memfokuskan perannya pada Misi ke-5, yaitu Meningkatkan kualitas pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti layanan daring, mobile service, dan sistem informasi terintegrasi. Upaya ini bertujuan memperkuat reformasi birokrasi, mempermudah akses layanan bagi masyarakat, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang adaptif, bersih, dan berbasis data.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025–2029 mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. NSPK menjadi dasar bagi daerah dalam melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang Administrasi Kependudukan, sehingga setiap program dan kegiatan dalam Renstra ini disusun untuk menjamin kesesuaian dengan kebijakan nasional, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memenuhi hak-hak penduduk atas dokumen kependudukan secara adil, cepat, dan tepat.

Selain mengacu pada NSPK yang ditetapkan secara nasional, penentuan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025–2029 juga diselaraskan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Disdukcapil Kabupaten Purworejo berperan mendukung pencapaian sasaran ke-5, yaitu "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi," melalui penguatan layanan administrasi kependudukan digital dan akuntabel dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki mandat untuk memberikan pelayanan yang berkaitan langsung dengan hak sipil masyarakat, termasuk di dalamnya kepemilikan dokumen identitas, akta pencatatan sipil, dan berbagai dokumen kependudukan lainnya. Keberhasilan layanan ini sangat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap layanan publik lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga partisipasi dalam demokrasi (misalnya pemilu). Oleh karena itu, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan hanya administratif, melainkan juga strategis dalam menjamin

perlindungan hak-hak dasar warga negara. Selain itu, sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Penerapan prinsip-prinsip perencanaan berbasis kinerja dan akuntabilitas publik menjadi bagian integral dari pengelolaan organisasi perangkat daerah yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap kondisi aktual, isu strategis, serta arah kebijakan pembangunan daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan tujuan utama:

"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah".

Tujuan ini menitikberatkan pada upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memperbaiki mutu layanan kepada masyarakat, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, keterjangkauan, maupun kepuasan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan akan diwujudkan melalui penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta inovasi layanan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks transformasi digital pemerintahan, implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi indikator penting dalam mengukur kesiapan dan keberhasilan digitalisasi layanan kependudukan.

Indikator Tujuan:

1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital
   Menunjukkan tingkat instalasi layanan digital oleh masyarakat sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelayanan berbasis elektronik.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)
   Menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan, termasuk aspek prosedur, waktu pelayanan, dan kompetensi petugas.
3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
   Tolak ukur diatas menunjukkan sejauh mana organisasi menerapkan manajemen kinerja secara efektif dan efisien, serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program/kegiatan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang ingin dicapai oleh perangkat daerah, yang bersifat lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam periode lima tahunan. Sasaran memberikan arah bagi perumusan program, kegiatan, serta indikator kinerja yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi capaian tujuan strategis perangkat daerah.

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan yang berkualitas serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Sasaran ini juga mendukung pelaksanaan visi dan misi kepala daerah serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, maka ditetapkan dua sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Sasaran ini merupakan perwujudan dari komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan akses, mutu, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

Layanan ini mencakup seluruh dokumen dasar yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, hingga dokumen lainnya. Transformasi menuju layanan digital menjadi bagian penting dari sasaran ini, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, digunakan dua indikator utama, yaitu:

1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital
   Indikator ini menggambarkan sejauh mana penduduk telah mengakses dan menggunakan layanan adminduk secara digital. Semakin tinggi persentase ini, maka semakin berhasil pula pelaksanaan digitalisasi layanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)
   Indikator ini mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. IKM menjadi alat evaluasi penting dalam melihat efektivitas pelayanan, baik dari sisi prosedur, waktu, sikap petugas, maupun hasil pelayanan.

Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran ini mencerminkan upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memperkuat akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal perencanaan dan pelaporan kinerja. Melalui penerapan prinsip manajemen berbasis kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo diharapkan mampu menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas, melaksanakan kegiatan secara efisien, serta mampu mempertanggungjawabkan hasilnya secara transparan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: “Nilai SAKIP Perangkat Daerah.”

Nilai SAKIP mencerminkan kualitas pelaksanaan siklus manajemen kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, termasuk perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi. Nilai ini menjadi ukuran objektif terhadap seberapa baik perangkat daerah menjalankan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih jelas disajikan pada Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra berikut ini:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	9.00%	12.00%	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	90.10	90.50	90.90	91.30	91.70	92.10	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68.02	70.45	72.89	75.33	77.76	80.2	
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	9.00%	12.00%	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	90.10	90.50	90.90	91.30	91.70	92.10	
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68.02	70.45	72.89	75.33	77.76	80.20	

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diuraikan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Percepatan Transformasi Digital Layanan Kependudukan
   Strategi dapat dilakukan dengan perluasan akses layanan publik, edukasi tentang IKD dan digitalisasi layanan sesuai kebutuhan penduduk.
2. Optimalisasi Pemanfaatan Data Kependudukan antar Lembaga
   Strategi dilakukan dengan mendorong integrasi sistem informasi antara Disdukcapil dengan Perangkat Daerah/Lembaga Pengguna dan penguatan kebijakan berbasis data kependudukan
3. Penguatan Infrastruktur dan Kapasitas SDM Teknologi Informasi
   Strategi dilakukan dengan meningkatkan kualitas infrastruktur digital dan kompetensi SDM di semua level, agar layanan digital adminduk bisa berjalan optimal dan merata.
4. Pemutakhiran dan Peningkatan Kualitas Data Kependudukan Data
   Strategi dilakukan dengan menjamin akurasi dan legalitas data kependudukan melalui program jemput bola dan verifikasi data secara berkala.
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Implementasi SAKIP
   Strategi dilakukan dengan memperkuat perencanaan dan pelaporan kinerja instansi agar program adminduk lebih terukur, transparan, dan berdampak nyata bagi Masyarakat serta melakukan pembinaan teknis penyusunan dokumen kinerja dan evaluasi internal.

3.2 Penahapan Renstra PD

Dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo ditetapkan penahapan pembangunan sebagai langkah sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Penahapan ini menggambarkan prioritas pembangunan tahunan yang disusun secara bertahap dan terukur selama periode perencanaan, sehingga setiap program dan kegiatan dapat diarahkan secara efektif untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah. Penahapan Renstra PD ini disajikan dalam Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD berikut:

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Memantapkan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Mewujudkan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meneguhkan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Menguatkan sistem manejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Selain dilakukan melalui penahapan pembangunan tahunan, pelaksanaan Renstra juga diarahkan pada lokus tertentu yang menjadi sasaran program, sehingga implementasi kebijakan dapat lebih terfokus, merata, dan tepat sasaran. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, lokus pelaksanaan Renstra mencakup seluruh wilayah Desa dan Kelurahan di semua Kecamatan di Kabupaten Purworejo. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan dapat diakses secara merata oleh seluruh penduduk, tanpa terkecuali. Dengan menyasar seluruh wilayah, Disdukcapil berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan yang inklusif, adil, dan responsif, sekaligus memperkuat pencapaian target kepemilikan dokumen kependudukan secara menyeluruh.

3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029, diperlukan penetapan arah kebijakan yang menjadi acuan bagi penyusunan program, kegiatan, serta pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien. Arah kebijakan ini disusun dengan memperhatikan berbagai dinamika eksternal dan internal, termasuk permasalahan pokok, isu strategis, dan tantangan implementasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Arah kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan, tetapi juga sebagai landasan normatif bagi seluruh unsur pelaksana dalam menjamin kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Fokus utama kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo adalah memperkuat kualitas layanan, memperluas cakupan digitalisasi, serta mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

Adapun arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Tahun 2026:

1. Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk; Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil; dan Penyusunan profil kependudukan.
2. Penguatan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait, Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan; Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk

3. Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tahun 2027:

1. Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk, Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil, dan Penyusunan profil kependudukan.
2. Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait, Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan;Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tahun 2028:

1. Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk, Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil, dan Penyusunan profil kependudukan.
2. Pemantapan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan

Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait, Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan; Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk

3. Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tahun 2029:

1. Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk; Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil; dan Penyusunan profil kependudukan.
2. Perwujudan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait, Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data ke\pendudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan; Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk
3. Perwujudan akuntabilitas kine rja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tahun 2030:

1. Peneguhanan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk; Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil; dan Penyusunan profil kependudukan.

2. Peneguhan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait, Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan; Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk
3. Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahDengan arah kebijakan tersebut, diharapkan seluruh program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam periode Renstra 2025–2029 dapat dilaksanakan secara konsisten, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan kependudukan yang semakin modern, mudah diakses, dan berkeadilan. Rincian arah kebijakan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan tersaji secara rinci sebagaimana tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan 2026 : Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2026: Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk; Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil; dan Penyusunan profil kependudukan.	
		Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2027: Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk; Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil; dan Penyusunan profil kependudukan.	
		Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2028: Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk; Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil; dan Penyusunan profil kependudukan.	
		Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2029: Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk; Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil; dan Penyusunan profil kependudukan.	
		Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2030: Peneguhanan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk; Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil; dan Penyusunan profil kependudukan.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Arah Kebijakan 2026 : Penguatan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku	Arah Kebijakan 2026: Penguatan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait; Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan; Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk	
		Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku	Arah Kebijakan 2027: Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait, Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan; Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk	
		Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku	Arah Kebijakan 2028: Pemantapan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait, Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan; Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku	Arah Kebijakan 2029: Perwujudan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait; Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan; Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk	
		Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku	Arah Kebijakan 2030: Peneguhan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait; Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan;Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk	
		Arah Kebijakan 2026 : Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Arah Kebijakan 2026: Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Arah Kebijakan 2027: Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Arah Kebijakan 2028: Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Arah Kebijakan 2029: Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Arah Kebijakan 2030: Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen Renstra merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil *(result-based planning).* Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading yang sistematis dari tujuan, sasaran, outcome, dan output sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah (RPJMD). Keterkaitan antara pernyataan visi-misi, tujuan strategis, sasaran Pembangunan maupun permasalahan yang dituangkan dalam bentuk Kegiatan dan sub kegiatan dapat ditelusuri secara jelas dan logis.

Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan juga telah mengacu pada nomenklatur resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang bertujuan untuk menjamin keselarasan antara perencanaan daerah dan kebijakan nasional, serta mendukung efektivitas dalam penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan. Rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diuraikan dalam dokumen ini dirancang untuk mencapai kinerja perangkat daerah secara bertahap dan berkelanjutan, dengan rentan waktu 2025 hingga tahun 2029.

Setiap program mencantumkan indikator kinerja utama, target tahunan, serta pagu indikatif sebagai dasar pengalokasian sumber daya. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan kinerja perangkat daerah. Hal ini menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), sehingga terdapat kesinambungan antar dokumen perencanaan tahunan dan menengah.

Perumusan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan yang saling berkesinambungan disajikan pada Tabel 4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD berikut:

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Digital	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Terlaksananya Layanan Pendaftaran penduduk Digital	Layanan pendaftaran penduduk Digital	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
				Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
				Terlasaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	
				Tertatanya Layanan Pendaftaran penduduk digital	Layanan Pendaftaran Penduduk Digital yang Tertata	Penataan Pendaftaran Penduduk	
				Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
				Terselenggaranya Layanan pendaftaran penduduk digital	Layanan pendaftaran penduduk digital yang meningkat	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pendaftaran Penduduk		
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Digital	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Terselenggaranya Layanan pencatatan sipil digital	Layanan pencatatan sipil digital	Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
				Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya Layanan pencatatan sipil digital yang meningkat	Layanan pencatatan sipil digital yang meningkat	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	
				Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan		Persentase Desa dan Kelurahan Pengguna yang Memanfaatkan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Tersedianya Data Kependudukan	Ketersediaan Data Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
				Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
				Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
				Tertatanya Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Jumlah Dokumen Tatacara Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terlaksananya Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meningkat	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan		Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
				Tersedianya Profil Kependudukan	Ketersediaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	
				Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu perencanaan 2025–2029 menetapkan lima program utama yang menjadi kerangka operasional dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan. Program urusan sebanyak 4 dan program non urusan 1. Program-program ini disusun dengan mengacu pada prioritas nasional, arah kebijakan pemerintah daerah, serta kebutuhan nyata masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, dan inklusif. Kelima program yang dimaksud terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Untuk mendukung pelaksanaan program sebagaimana yang tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo menetapkan sejumlah kegiatan yang dirancang secara sistematis dan berorientasi pada pencapaian hasil. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan implementasi teknis dari masing-masing program dan dilaksanakan secara terukur melalui indikator kinerja yang relevan. Setiap kegiatan mencerminkan upaya peningkatan efisiensi kerja perangkat daerah, optimalisasi pelayanan kependudukan, pemutakhiran data, serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam tata kelola administrasi kependudukan. Pelaksanaan kegiatan juga diarahkan untuk menjawab tantangan pelayanan di tengah dinamika sosial masyarakat, serta untuk mendukung agenda digitalisasi dan reformasi birokrasi secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.

Setiap program dan kegiatan disusun dengan indikator kinerja yang terukur dan didukung oleh pagu indikatif yang menjadi acuan penganggaran selama periode 2025–2029. Dengan pendekatan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo berkomitmen mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif demi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo. Lebih jelasnya disajikan pada Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan berikut:

Tabel 4.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,02		80,02			
			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	8,49	12		20		30		40		50		50			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	90	90,5		90,9		91,3		91,7		92,1		92,1			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,02		80,02			
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						7.027.619.927		7.097.896.000		5.909.552.000		5.909.552.000		5.909.552.000				
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	7.027.619.927	100	7.097.896.000	100	5.909.552.000	100	5.909.552.000	100	5.909.552.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	23	24	10.997.300	24	12.700.000	24	14.200.000	24	14.200.000	24	19.500.000	120			
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	22	22	5.417.700	22	5.500.000	22	6.000.000	22	6.000.000	22	7.500.000	110			
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	22	22	5.579.600	22	5.700.000	22	5.700.000	22	5.700.000	22	7.000.000	110			
2.12.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	1	1.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	5.000.000	4			
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	45	45	6.310.556.058	45	6.314.196.000	45	4.004.352.000	45	4.005.352.000	45	4.506.052.000	225			
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40	65	6.306.458.958	65	6.309.996.000	65	4.000.052.000	65	4.000.852.000	65	4.500.052.000	325			
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	44	44	4.097.100	44	4.200.000	44	4.300.000	44	4.500.000	44	6.000.000	220			
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	11	0		0		11	10.000.000	11	12.000.000	11	15.000.000	33			
2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	11	0	0	0	0	11	10.000.000	11	12.000.000	11	15.000.000	33			
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	0		0		1	35.000.000	18	29.000.000	18	56.000.000	37			
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	65	35.000.000	0	0	0	0	65			
2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	17	4.000.000	17	6.000.000	34			
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	10	25.000.000	10	50.000.000	20			
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	8	8	174.516.300	8	186.000.000	8	229.000.000	8	239.000.000	8	338.000.000	40			
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	130	5.488.800	130	7.000.000	130	15.000.000	130	15.000.000	130	20.000.000	650			
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25	10.660.400	25	12.000.000	25	16.000.000	25	26.000.000	25	26.000.000	125			
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	78.258.600	12	80.000.000	12	92.000.000	12	92.000.000	12	95.000.000	60			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5	5.107.400	5	6.000.000	5	7.000.000	5	7.000.000	6	10.000.000	26			
2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	22	13.569.600	22	15.000.000	22	15.000.000	22	15.000.000	22	20.000.000	110			
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	2.415.000	12	3.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	7.000.000	60			
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	56.134.000	12	58.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	135.000.000	60			
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	2.882.500	2	5.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000	2	25.000.000	10			
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	0	0		20	40.000.000	81	1.057.000.000	19	995.000.000	4	287.000.000	124			
2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	1			
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	1	350.000.000	0	0	1			
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	12	60.000.000	0	0	12			
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	20	40.000.000	18	312.000.000	5	285.000.000	4	287.000.000	47			
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	1			
2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	62	245.000.000	0	0	0	0	62			
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	262.592.269	24	270.000.000	24	275.000.000	24	300.000.000	24	315.000.000	120			
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	210.320.269	12	215.000.000	12	220.000.000	12	240.000.000	12	240.000.000	60			
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	52.272.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	75.000.000	60			
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	6	6	268.958.000	6	275.000.000	6	285.000.000	6	315.000.000	6	373.000.000	30			
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	39.950.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	55.000.000	1			
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	26	132.960.000	26	135.000.000	26	135.000.000	26	135.000.000	26	150.000.000	26			
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	82	40	2.560.000	40	3.000.000	40	10.000.000	40	32.000.000	40	35.000.000	40			
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	47	46	21.300.000	46	22.000.000	46	22.000.000	46	25.000.000	46	33.000.000	46			
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	56.938.000	4	58.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	75.000.000	4			
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	18	7	15.250.000	7	17.000.000	7	18.000.000	7	18.000.000	7	25.000.000	7			
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	8,49	12		20		30		40		50		50			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	90	90,5		90,9		91,3		91,7		92,1		92,1			
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						920.000.800		1.159.464.000		920.001.000		934.536.000		949.303.000				
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Digital	%	98,3	99,91	872.394.000	99,93	886.178.000	99,94	872.394.000	99,95	886.178.000	99,97	900.179.000	99,97	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Purworejo	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Layanan Pendaftaran penduduk Digital	Layanan pendaftaran penduduk Digital	Bulan	12	12	862.394.000	12	862.394.000	12	840.394.000	12	850.894.000	12	867.179.000	60			
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk	Dokumen	418	0	0	0	0	0	0	650	3.500.000	650	6.785.000	1.300			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
	Rentan Administrasi Kependudukan		Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	182.718	166.000	862.394.000	166.000	862.394.000	166.000	840.394.000	166.000	847.394.000	166.000	857.394.000	830.000			
2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang	382	0	0	0	0	0	0	0	0	200	3.000.000	200			
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Tertatanya Layanan Pendaftaran penduduk digital	Layanan Pendaftaran Penduduk Digital yang Tertata	Jenis	1	0		1	13.784.000	1	22.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1			
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	38.800	0	0	35.000	13.784.000	35.000	22.000.000	35.000	20.000.000	35.000	20.000.000	140.000			
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya Layanan pendaftaran penduduk digital	Layanan pendaftaran penduduk digital yang meningkat	Layanan	0	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	15.284.000	4	13.000.000	4			
2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1			
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	0	41.650	10.000.000	41.650	10.000.000	41.650	10.000.000	41.650	10.000.000	41.650	8.000.000	208.250			
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	1	5.284.000	0	0	1			
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Digital	%	89,91	91,75	39.739.200	93	113.503.000	94,25	39.739.000	95,5	40.367.000	96,75	41.005.000	96,75	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Purworejo	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Layanan pencatatan sipil digital	Layanan pencatatan sipil digital	Bulan	12	12	39.739.200	12	74.739.200	12	30.739.000	12	30.367.000	12	31.005.000	60			
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	57.511	44.000	39.739.200	44.000	39.739.200	44.000	30.739.000	44.000	30.367.000	44.000	31.005.000	220.000			
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	2	0	0	2	35.000.000	0	0	0	0	0	0	2			
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Layanan pencatatan sipil digital yang meningkat	Layanan pencatatan sipil digital yang meningkat	Layanan	9	0		9	38.763.800	9	9.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000	9			
2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	1	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	0	0	0	1	8.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	0	0	1	25.763.800	1	9.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4			
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Desa dan Kelurahan Pengguna yang Memanfaatkan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik	%	0	23	2.570.800	41	146.837.000	61	2.571.000	80	2.611.000	100	2.653.000	100	Bidang PIAK dan Pemanfataan Data	Kabupaten Purworejo	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan	Ketersediaan Data Kependudukan	Jenis	2	0		2	66.000.000	0		0		0		2			
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	2	0	0	2	30.000.000	0	0	0	0	0	0	2			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	106	0	0	99	36.000.000	0	0	0	0	0	0	99			
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tertatanya Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Jumlah Dokumen Tatacara Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dokumen	0	0		5	10.837.000	0		0		0		5			
2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen	0	0	0	5	10.837.000	0	0	0	0	0	0	5			
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meningkat	Bulan	12	12	2.570.800	12	70.000.000	12	2.571.000	12	2.611.000	12	2.653.000	60			
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	2.570.800	1	70.000.000	1	2.571.000	1	2.611.000	1	2.653.000	5			
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku	%	100	100	5.296.800	100	12.946.000	100	5.297.000	100	5.380.000	100	5.466.000	100	Bidang PIAK dan Pemanfataan Data	Kabupaten Purworejo	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	Ketersediaan Profil Kependudukan	Dokumen	1	1	5.296.800	1	12.946.000	1	5.297.000	1	5.380.000	1	5.466.000	5			
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen	1	1	5.296.800	1	12.946.000	1	5.297.000	1	5.380.000	1	5.466.000	5			
Jumlah							**7.947.620.727**		**8.257.360.000**		**6.829.553.000**		**6.844.088.000**		**6.858.855.000**				

ub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dirancang sebagai bagian dari upaya mendukung prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sub kegiatan ini juga berperan penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan untuk memberikan layanan administrasi kependudukan yang cepat dan tepat.

Berbagai kegiatan seperti pelayanan jemput bola, digitalisasi dokumen kependudukan, pengembangan sistem informasi pelayanan, serta fasilitasi kerja sama data dengan lembaga lain, menjadi strategi utama dalam mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat terpencil, tetapi juga untuk mendorong integrasi data dan sinergi lintas sektor. Berbagai upaya yang dilaksanakan untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dirinci sebagaimana Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah berikut:

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk			
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatusahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatusahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
				Penyediaan Ribbon KTP-el dan KIA	Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA
				Koordinasi ketersediaan blangko KTP-el di Dirjend. Dukcapil	
			Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	
			Penataan Pendaftaran Penduduk		
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Penyediaan blangko KIA	
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain	Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk	Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk
			Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil		
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil	Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota	Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait
			Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinasi Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota	
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil	Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan	Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan
			Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Koordinasi pemanfaatan data kependudukan	Koordinasi pemanfaatan data kependudukan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan tata cara pengelolaan informasi adminduk	Penyusunan tata cara pengelolaan informasi adminduk
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
			Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna	Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna
				Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK	Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK
				Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk	Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan		
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Penyusunan profil kependudukan	Penyusunan profil kependudukan

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo secara aktif mengambil peran strategis melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang selaras dengan visi pembangunan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sebagai berikut:

1. Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional

Sebagai bagian dari komitmen terhadap Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita ke-6, yakni “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan Terintegrasi. Program ini merupakan pendekatan proaktif dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil, dengan tujuan meningkatkan akses terhadap dokumen kependudukan sebagai dasar memperoleh berbagai layanan dasar pemerintah.

4.4 Dukungan terhadap Asta Cita

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan Terintegrasi	Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan Terintegrasi	Adminduk capil	Dindukcapil

2. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo mendukung pelaksanaan program strategis nasional yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan, terutama pada upaya "Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem". Dukungan ini diwujudkan melalui:

- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Pelaksanaan ketiga program tersebut dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta penyusunan Profil Kependudukan yang akurat, sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan oleh berbagai sektor.

4.5 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Terkait	Aktivitas Pendukung di 2026
1	Penanggulangan kemiskinan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan	Admind uk capil	Disduk capil	Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan
	a. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Jemput Bola Dokumen Pencatatan Sipil	Admind uk capil	Disduk capil	Pelayanan Jemput Bola Dokumen Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Admind uk capil	Disduk capil	Penyusunan Profil Kependudukan

3. Dukungan terhadap Prioritas Nasional

Dalam mendukung prioritas nasional terkait “Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas”, Disdukcapil Kabupaten Purworejo menjalankan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan subkegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Disdukcapil terus mengembangkan sistem layanan berbasis teknologi informasi yang transparan, cepat, dan akurat demi mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

4.6 Dukungan terhadap Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Prioritas Nasional 7	Transformasi digital layanan publik prioritas	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Subkegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Admindukcapil	Disdukcapil

4. Dukungan terhadap Program Delegasi Provinsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo juga berperan dalam mendukung program yang didelegasikan oleh pemerintah provinsi, yakni “Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas, dan kualitas ASN dan perangkat desa”. Dukungan ini dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan Terintegrasi, yang tidak hanya memperluas jangkauan pelayanan, tetapi juga memperkuat sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah dan desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

4.7 Dukungan terhadap Program Delegasi Provinsi

No.	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026
13	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan Terintegrasi	Admindukcapil	Disdukcapil	Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan Terintegrasi

5. Dukungan terhadap Kegiatan Unggulan Daerah

Sebagai bentuk dukungan terhadap Program Unggulan Kabupaten Purworejo yang dirumuskan dalam “Pitulungan Bupati”, khususnya program “Sejahtera Wargane”, Disdukcapil Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan berupa Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan dan Pelayanan Jemput Bola Dokumen Pencatatan Sipil. Kegiatan ini sejalan dengan tujuan program untuk “Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif, dan inovatif berbasis teknologi informasi”. Dengan memperluas akses layanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo turut serta dalam meringankan beban masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga secara merata.

4.8 Dukungan terhadap Kegiatan Unggulan Daerah

No.	**Program Unggulan**	**Kegiatan Unggulan**	**Aktivitas di 2026**	**2026-2030**	**Bidang Urusan**	**Perangkat Daerah**
4	Sejahtera Wargane	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.	Pelayanan jemput bola dokumen kependudukan	Pelayanan jemput bola dokumen kependudukan	Admindukcapil	Dindukcapil
			Pelayanan jemput bola dokumen pencatatan sipil	Pelayanan jemput bola dokumen pencatatan sipil	Admindukcapil	Dindukcapil

4.1 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) tahun 2025–2029 diukur melalui sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan terukur. Beberapa Indikator Kinerja utama meliputi persentase kepemilikan identitas digital penduduk, Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) terhadap layanan administrasi kependudukan, serta nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Indikator-indikator ini dipilih untuk memberikan gambaran

menyeluruh tentang efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik dari sisi output pelayanan maupun dampaknya terhadap masyarakat.

Target pencapaian IKU tersebut diarahkan untuk mencerminkan peningkatan kualitas layanan yang inklusif, cepat, transparan, dan berbasis teknologi. Peningkatan persentase kepemilikan identitas digital, misalnya, diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik dan keuangan secara digital. Sementara itu, peningkatan nilai IKM menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam hal kepuasan dan kenyamanan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Di sisi lain, perolehan nilai SAKIP yang tinggi mencerminkan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan berorientasi pada hasil. Seluruh indikator ini secara sinergis menjadi tolok ukur untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra PD benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

Tabel 4.9. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berikut:

Tabel 4.9. Indikator Kinerja Utama PD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	SATUAN		TARGET TAHUN					KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	9.00%	12.00%	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%	Tujuan PD / Sasaran PD (urusan)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	angka	90.10	90.50	90.90	91.30	91.70	92.10	Tujuan PD / Sasaran PD (urusan)
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	77.80	77.85	78.35	79.10	79.35	80.05	Tujuan PD / Sasaran PD (non urusan)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Penetapan IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dikategorikan ke dalam indikator outcome yang secara langsung mencerminkan hasil dari pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo terhadap masyarakat dan lembaga pengguna layanan. Selama periode perencanaan tahun 2025–2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo menetapkan lima IKK outcome yang menjadi sasaran utama kinerja sebagai berikut:

1) Persentase Perekaman KTP Elektronik

Indikator ini mengukur capaian jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman data untuk KTP Elektronik (KTP-el) dibandingkan dengan total wajib KTP. Perekaman KTP-el merupakan langkah strategis dalam menjamin identitas tunggal (*single identity number*) yang mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, hingga pemilihan umum. Meningkatnya persentase perekaman KTP-el mencerminkan salah satu bukti kesadaran penduduk dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan.

2) Persentase Anak yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

Indikator ini menunjukkan sejauh mana cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak bagi anak usia 0–17 tahun. KIA merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan hukum atas identitas anak serta menjadi dasar untuk mengakses berbagai layanan, termasuk pendidikan dan kesehatan.

3) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Indikator ini menggambarkan proporsi anak usia 0–18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran terhadap total populasi anak pada rentang usia tersebut. Akta kelahiran adalah dokumen dasar yang menjamin status hukum seorang anak dan menjadi dasar untuk memperoleh dokumen kependudukan lainnya.

4) Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan

Indikator ini mengukur jumlah Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan secara legal melalui kerja sama pemanfaatan data (PKS) dengan Disdukcapil. Tingginya pemanfaatan data kependudukan menunjukkan integrasi dan sinkronisasi data antarinstansi, yang berdampak pada peningkatan efisiensi layanan publik, akurasi perencanaan, serta pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5) Anak Usia 0–59 Bulan Mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)

Indikator ini fokus pada kelompok anak usia dini yaitu 0–59 bulan, untuk menjamin bahwa sejak usia dini anak telah tercatat secara sah dalam sistem administrasi kependudukan melalui penerbitan akta kelahiran dan KIA. Hal ini penting untuk memastikan hak identitas anak sejak lahir terpenuhi, serta sebagai bagian dari perlindungan anak.

Seluruh IKK tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan target tahunan serta pengukuran kinerja capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sepanjang tahun 2026 hingga 2030. Penjabaran masing-masing indikator disajikan dalam Tabel 4.10. Indikator Kinerja Kunci berikut.

Tabel 4.10. Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perekaman KTP elektronik	%	100	99.74	99.78	99.82	99.86	99.9	Permendagri No. 18 Tahun 2020
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	100	100	100	100	100	100	Permendagri No. 18 Tahun 2021
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	100	100	100	100	100	100	Permendagri No. 18 Tahun 2022
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	92.5	23	41	61	80	100	Permendagri No. 18 Tahun 2023
5	Anak usia 0-59 bulan mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu ldentitas Anak (KlA)	%	100	100	100	100	100	100	Surat edaran mendagri nomor 400.5.7/1685/Bangda tentang stunting

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

Bupati Purworejo,

Ttd

Yuli Hastuti

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 1.1

Gambar 1.1

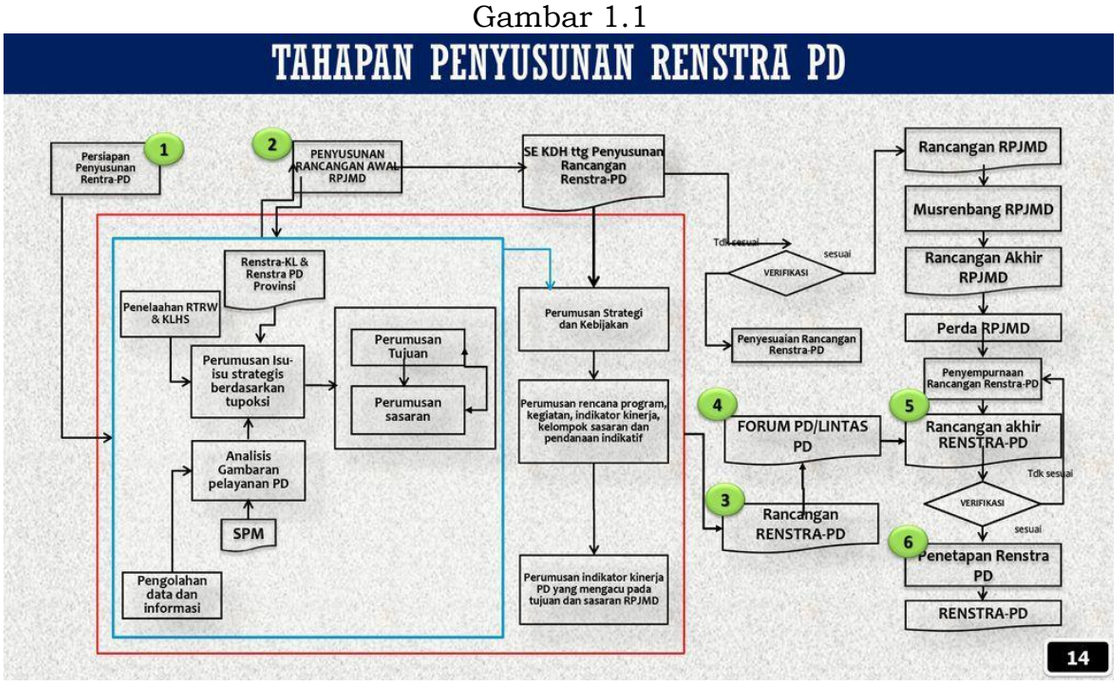

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupatem Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 127 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
2. Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Sebagai pedoman dalam mengevaluasi hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029 secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan Renstra PD, Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra PD, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan

Renstra PD dan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini menarasikan ringkas apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VI P E N U T U P

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Perangkat Daerah adalah upaya pemerintahan di tingkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Pelayanan ini melibatkan proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pengembangan potensi daerah, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berupaya memberikan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo merupakan Dinas Daerah Tipe A, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 127 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo mempunyai tugas:

- membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;

d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPPAPMD; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, terdiri atas :

1. Kepala DPPPAPMD;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
5. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. UPT; dan
8. Jabatan Fungsional.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, adalah:

1. Sekretariat :

   Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPPAPMD.

   Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

   a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
   b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
   c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
   d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
   e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

   Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

   (1) Subbagian Perencanaan

   Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi :

   a) menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
   b) menyusun perjanjian kinerja; dan
   c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

   (2) Subbagian Keuangan

   Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi :

a) menyelenggarakan administrasi keuangan;
b) melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi :

a) menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
b) menyelenggarakan administrasi umum;
c) menyelenggarakan pengadaaan barang milik daerah;
d) menyediakan jasa penunjang urusan
e) menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
f) menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
g) menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, menyelenggarakan pengelolaan sistem data gender dan anak, mengoordinasikan kegiatan pemenugan hak anak, melakukan peningkatan kualitas keluarga, dan melakukan perlindungan khusus anak.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

a. pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah kewenangan Daerah;
b. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Daerah;
c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Daerah;
d. pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah;
e. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah;
f. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam wilayah Daerah;
g. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten;
h. pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan daerah;
i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan daerah;

j. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
k. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
l. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala DPPPAPND berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dibantu oleh:
a. Pejabat Fungsional; dan
b. Pelaksana.

3. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas menyelenggarakan penataan desa, dan meningkatkan kerjasama desa.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaran penataan desa;
b. pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar desa; dan
c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPPAPMD berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, dibantu oleh:
a. Pejabat Fungsional; dan
b. Pelaksana.

4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan administasi pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Administrasi Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
a. Pembinaan dan pengawan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; dan
b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPPAPMD berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, dibantu oleh:
a. Pejabat Fungsional; dan
b. Pelaksana.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adar yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah; dan
b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPPAPMD berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, dibantu oleh:
a. Pejabat Fungsional; dan
b. Pelaksana.

6. UPT

UPT mempunyai tugas teknis operasional dan/atau tugas teknos penunjang tertentu di lingkungan DPPPAPMD.Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DPPPAPMD.Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisi tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan dengan dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo berdasarkan kondisi Tahun 2025 yang dimiliki saat ini adalah:

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas DPPPAPMD adalah 30 orang.

Adapun rincian sumber daya manusia di DPPPAPMD Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

Pegawai Berdasar Eselon
DPPPAPMD Kabupaten Purworejo

NO	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Dinas/Eselon II a	1 orang
2	Sekretaris Dinas/Eselon III a	1 orang
3	Kepala Bidang /Eselon IIIb	4 orang
4	Kepala Subagian/Eselon IV a	3 orang
5	Jabatan Fungsional/Eselon IVa	2 orang

Sumber : DPPAPMD Kabupaten Purworejo (Bulan Januari 2025)

Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan
DPPPAPMD Kabupaten Purworejo

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda (IVc)	1 orang
2	Pembina Tk. I (IV b)	1 orang
3	Pembina (IV a)	2 orang
4	Penata Tk. I (III d)	3 orang
5	Penata (III c)	9 orang
6	Penata Muda Tk. I (III b)	0 orang
7	Penata Muda (III a)	4 orang
8	Pengatur Tk. I (II d)	3 orang
9	Pengatur (II c)	2 orang
10	Pengatur Muda Tk. I (II b)	4 orang
11	Pengatur Muda (II a)	1 orang

Sumber : DPPAPMD Kabupaten Purworejo (Bulan Januari 2025)

Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan
DPPPAPMD Kabupaten Purworejo

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S 2)	7 orang
2	Sarjana (S 1)	10 orang
3	Sarjana Muda (D 3)	5 orang
4	SLTA	7 orang
5	SLTP	1 orang
6	SD	- orang

Sumber : DPPAPMD Kabupaten Purworejo (Bulan Januari 2025)

Jumlah SDM Non PNS pada DPPPAPMD Kabupaten Purworejo adalah 18 orang, penempatan pada:

Jumlah Non PNS
DPPPAPMD Kabupaten Purworejo

No	Penempatan	Jumlah
1	Sekretariat	7 orang
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 orang
3	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	1 orang
4	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	1 orang
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3 orang
6	UPT PPA	4 orang
	Jumlah	18 orang

Sumber : DPPAPMD Kabupaten Purworejo (Bulan Januari 2025)

2. Perlengkapan

Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan kinerja sebagai unsur penunjang untuk mencapai tujuan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPPPAPMD Kabupaten Purworejo.

Jumlah Aset Tahun 2025
DPPPAPMD Kabupaten Purworejo

No	Nama Sarana Gedung dan Peralatan	Jumlah	Satuan
1	Mobil	7	unit
2	Motor	20	unit
3	Komputer PC	24	unit
4	Laptop	20	unit
5	Printer	14	unit
6	AC Split	21	unit
7	Gedung kantor	1710	m2
8	LCD Proyektor	2	unit
9	Sound System	1	unit
10	Mesin Ketik	2	unit
11	Meja Kerja	65	unit
12	Kursi Kerja	45	unit
13	Meja Rapat	27	unit
14	Kursi Rapat	153	unit
15	Meja Kursi Tamu	10	unit
16	Telepon PABX	1	unit
17	Handy Talky	8	unit
18	Thermogun	2	unit
19	Televisi	3	unit
20	Filling Kabinet	19	unit

Sumber : DPPAPMD Kabupaten Purworejo (Bulan Januari 2025)

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah adalah hasil kerja atau capaian pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah.Kinerja pelayanan ini dapat diukur menggunakan indikator kinerja yang telah ditentukan.Indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo periode Renstra 2021-2026 telah di revisi 3 (tiga) kali.

2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja perangkat daerah merupakan gambaran persentase tingkat keberhasilan suatu program dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah.Kesesuaian perencanaan dengan sasaran yang berorientasi pada hasil. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	**Indikator Tujuan**																					
1	Peningkatan pemberdayaan gender dan kualitas keluarga				94.97	74,16	85,49				95,33	74,16	85,5				100,8%	100%	100%			
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa				0.6177	0.6302	0.6427				0,6934	0,7135	0,7229				112%	113%	112%			
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				83,6	84	84,5				84	85,22	84,5				100%	101%	100%			
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)							95,69	95,75	95,02				95,11						99,63%		
5	Indeks Desa Membangun (IDM)							0.738	0.7534	0.7688				0.7352						99,62%		
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa							82.5	83	83.5				NA						0		
B	**Indikator Sasaran**																					
1	Meningkatnya pemberdayaan gender dan kualitas keluarga				71.05	74,16	85,49				70.09	74,16	85,5				98,65%	100%	100%			
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa				0.6177*	0.6302	0.6427				0,6934	0,7135	0,7229				112%	113%	112%			
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				83,6	84	84,5	85	85.5	86	84	85,22	84,5	91,23			100%	101%	100%	107%		
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)							74.18	75.22	76.27				73,18						98,6%		
5	Persentase Desa Mandiri dan Maju							33.26%	35.39%	37.53%				64,81%						194%		
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				83,6	84	84,5	85	85.5	86	84	85,22	84,5	91,23			100%	101%	100%	107%		
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintahan Desa							80	80.5	81				NA						NA		
C	**Indikator Program**																					
1	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
2	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender				41,46%	41,46%	41,46%	41,46%	41,46%	41,46%	41,46%	41,46%	100%	100%			100%	100%	241%	241%		
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
4	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan Peningkatan Kualitas Keluarga				20%	20%	87,5%	88%	88,5%	89%	20%	20%	87,5%	100%			100%	100%	100%	113%		
5	Persentase Data Anak dan Gender Teranalisis dan Tersaji dalam Kelembagaan Data				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
6	Persentase Layanan Pemenuhan Hak Anak				83%	83,5%	84%	85%	86%	86,5%	83%	83,5%	84%	90%			100%	100%	100%	105%		
7	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
8	Persentase Penataan Desa sesuai peraturan yang berlaku				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
9	Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama antar Desa				36,67%	100%	100%	100%	100%	100%	36,67%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
10	Persentase tertibnya administrasi pemerintahan desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
11	Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		

Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran

1. Peningkatan pemberdayaan gender dan kualitas keluarga
   Pemberdayaan gender dan peningkatan kualitas keluarga adalah dua konsep yang saling terkait, di mana pemberdayaan gender (terutama perempuan) melalui peningkatan akses terhadap kesempatan ekonomi, pendidikan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas keluarga. Konsep ini diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan.Peningkatan pemberdayaan gender dan kualitas keluarga, dengan definisi operasional peningkatan kualitas layanan perempuan dan anak untuk capaian target program :1) persentase perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan responsif gender, 2) persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif, 3) persentase keluarga yang mendapatkan pelayanan peningkatan kualitas keluarga, 4) cakupan data anak dan gender teranalisis dan tersaji dalam kelembagaan data, 5) persentase layanan pemenuhan hak anak, 6) persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif. Indikator ini dilaksanakan di tahun 2021, 2022, dan 2023, dengan capaian lebih dari target.
2. Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa
   Penilaian kemampuan ekonomi desa dalam mensejahterakan kehidupan desa berdasarkan tingkat kemajuan/pembangunan desa dilihat dari penilaian Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. IDM Kabupaten Purworejo pada tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan. Kemajuan IDM sendiri merupakan tolak ukur dari kesuksesan pelaksanaan dana desa di desa. Dan dari IDM menentukan status desa, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan peningkatan jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Purworejo, diikuti juga dengan meningkatnya jumlah Desa Maju. Tetapi pertumbuhan Desa Mandiri masih sangat rendah, sementara jumlah desa maju semakin bertambah. Meskipun jumlah Desa Berkembang semakin turun namun jumlah tersebut masih cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Purworejo masih banyak desa yang mempunyai potensi sosial, potensi ekonomi dan potensi ekologi atau lingkungan, akan tetapi desa belum mampu mengelolanya dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Selain itu desa berkembang juga masih rentan dengan goncangan untuk turun level menjadi desa tertinggal apabila tidak dikelola dengan baik.
3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
   IPG menggambarkan kesenjanganpencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.IPG yangdifokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan diberbagai level.

IPG Kabupaten Purworejo tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 meningkat setiap tahunnya Tahun 2023 mencapai 95,38. Pada tahun 2024, nilai Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purworejo yaitu 95,34 atau mengalami sedikit penurunan dari nilai tahun 2023 yang mencapai 95,38. IPG Kabupaten Purworejo tercatat lebih tinggi dibanding Jawa Tengah dan kabupaten-kabupaten sekitar. Hal ini menunjukkan kesenjangan gender dalam pembangunan di Kabupaten Purworejo sudah semakin menurun dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Namun meskipun nilai IPG Kabupaten Purworejo semakin meningkat, nilai IPG masih di bawah 100, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian pembangunan laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan capaian pembangunan perempuan. Pencapaian hasil baik IPG menyisakan pekerjaan dan tugas yang tidak ringan, terutama yang terkait dengan isu disparitas pencapaian pembangunan manusia antar gender.

4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

   IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomiyaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatankerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen,serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagaitenaga manajer, professional, administrasi, teknisi.Meski masih belum menyamai laki-laki, kualitas pembangunanperempuan di Kabupaten Purworejo senantiasa mengalami perkembangan.Halini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terkait dengan pemberdayaan gender.IDG Kabupaten Purworejo cenderung selalu mengalami peningkatan dari tahun2010 hingga 2023.Meskipun begitu Kabupaten Purworejo selalu berada dibawah Provinsi Jawa Tengah. Setelah sempat meningkat padatahun 2021 kemudian turun menjadi 46,81 di tahun2022. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Purworejo peran laki-lakisebagai tenaga profesional lebih tinggi dibandingkan perempuan di tahun 2022setelah sebelumnya cenderung seimbang bahkan lebih tinggi perempuan.Sementara sumbangan pendapatan perempuan pada tahun 2017 sampaidengan 2023 cenderung stabil dengan peningkatan yang sangat sedikit.Sumbangan pendapatan dari laki-laki jauh lebih tinggi dari sumbanganperempuan.Peran aktif perempuan dalam politik dapat dilihat dari komposisi dankontribusi dalam lembaga-lembaga strategis, salah satunya parlemen.Selamaini, parlemen di Purworejo masih didominasi oleh laki-laki.Upaya untukmeningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dilakukan denganditetapkannya Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah.Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwasekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan padakepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRDlembaga legislatif. Keterlibatan perempuan di Kabupaten Purworejo Tahun 2023tercatat sebesar 17,78.

Angka ini jika dilihat dalam lingkup KabupatenPurworejo cenderung turun jika dibandingkan tahun 2018 yang tercatat 20,00% dan sama sejak tahun 2019 yaitu 17,78%.

5. Indeks Desa Membangun

   Dengan adanya Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Dan dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan Desa mendorong peningkatan status desa berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM). Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa.Indeks Desa Membangun (IDM) bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan.Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit, yang dibentuk dari: Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi danIndeks Ketahanan Ekologi Desa.IDM Kabupaten Purworejo pada tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan. Kemajuan IDM sendiri merupakan tolak ukur dari kesuksesan pelaksanaan dana desa di desa.

6. Persentase Desa Mandiri dan Maju

   Status desa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan peningkatan jumlah Desa Mandiri, diikuti juga dengan meningkatnya jumlah Desa Maju. Pertumbuhan Desa Mandiri masih sangat rendah, sementara jumlah desa maju semakin bertambah. Meskipun jumlah Desa Berkembang semakin turun namun jumlah tersebut masih cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Purworejo masih banyak desa yang mempunyai potensi sosial, potensi ekonomi dan potensi ekologi atau lingkungan, akan tetapi desa belum mampu mengelolanya dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Selain itu desa berkembang juga masih rentan dengan goncangan untuk turun level menjadi desa tertinggal apabila tidak dikelola dengan baik. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa menempatkan desa sebagai subjek pembangunan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Berdasarkan data Indeks Desa dari Kementrian PPN / Bappenas tahun 2024, Persentase Desa Mandiri tahun 2019 hingga tahun 2021 hanya ada 1 desa dengan perbandingan jumlah desa di Kabupaten Purworejo 469 Desa atau hanya sebanyak 0,21%.

Namun, pada tahun 2024, persentase desa mandiri di Kabupaten Purworejo meningkat menjadi 25,8%.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa

   Salah satu fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat,dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan maka perlu terus menerus upaya peningkatan kualitas pelayanan. Dalam mewujudkan kualitas pelayanan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kinerja pelayanan publik yang dihasilkan dari pengukuran pendapat masyarakat melalui survei.IKM digunakan untuk menilai kinerja pelayanan, mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan pelayanan, serta sebagai dasar untuk menyusun kebijakan perbaikan pelayanan di masa mendatang.IKM bertujuan sebagai berikut :

   a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
   b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
   c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik

   Capaian Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM) Perangkat Daerah dari tahun ke tahun meningkat dikarenakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo berkomiten meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah).Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa untuk target Renstra 2021-2026 pada tahun 2024, 2025 dan 2026. Pelaksanaan SKM DPPPAPMD dilaksanakan oleh DPPPAPMD dan UPT PPA sehingga nilai IKM perangkat daerah tahun 2024 tercapai 107%. Sedangkan Pemerintah Desa sebagai pelayan publik tetapi belum melaksanakan Survai Kepuasan Masyarakat (SKM), sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

   Dari 469 Desa yang sudah melaksanakan SKM Tahun 2024 hanya 4 (empat) Desa, sebagai berikut:

   1. Desa Jelok Kecamatan Kaligesing
   2. Desa Girimulyo Kecamatan Kemiri
   3. Desa Pekacangan Kecamatan Pituruh
   4. Desa Tunjungtejo Kecamatan Pituruh

2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Anggaran difokuskan pada program atau kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama, penyusunan anggaran memperhatikan program kerja tahunan dengan memperhatikan tingkat risiko yang ada sehingga anggaran akan digunakan untuk kegiatan yang benar-benar prioritas. Penggunaan sumber daya anggaran yang dilakukan untuk mencapai indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dengan menggunakan anggaran APBD.

a. Tahun 2021 realisasi anggaran tidak tercapai 100%

   Faktor yang mempengaruhi, efisiensi pagu anggaran pada beberapa sub kegiatan dikarenakan untuk penanganan Covid -19 di Kabupaten Purworejo pada perubahan anggaran melalui efisiensi dan penyesuaian terhadap target kinerja dengan tetap memperhatikan capaian target kinerja yang telah ditetapkan.

b. Tahun 2022, 2023 dan 2024 realisasi melebihi dari pagu anggaran Renstra 2021-2026.

   Faktor yang mempengaruhi pada perubahan APBD adanya penambahan pagu anggaran antara lain (1)DAK Non Fisik untuk Bidang PPPA dan UPT PPA dari KemenPPPA untuk pencegahan kasus kekerasan dan penganganan kasus kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2022, tahun 2023 dan Tahun 2025.(2) Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk kegiatan TMMD : tahun 2021 untuk 3 (tiga) Desa tahun 2022 untuk 3 (tiga) Desa, tahun 2023 untuk 3 (tiga) Desa, tahun 2024 untuk 4 (empat) Desa, dan tahun 2025 untuk 4 (empat) Desa. Dan realisasi anggaran tahun 2022, 2023, dan tahun 2024 menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4.818.193.917**	**3.710.252.625**	**3.865.679.539**	**4.248.513.131**	**4.363.723.622**	**4.386.557.462**	**4.358.223.128**	**4.565.984.651**	**4.147.785.364**	**4.261.290.357**	**4.435.343.274**	**4.558.398.614**	**90,45**	**123,06**	**107,30**	**100,30**	**101,64**	**103,92**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**39.148.450**	**27.664.800**	**38.700.000**	**42.500.000**	**3.600.000**	**43.900.000**	**39.148.300**	**30.804.700**	**23.452.900**	**9.738.356**	**40.040.600**	**38.450.800**	**100,00**	**111,35**	**60,60**	**93,50**	**91,84**	**87,59**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.023.050	15.096.600	20.000.000	22.000.000	22.500.000	22.600.000	32.023.000	18.870.000	11.498.800	32.076.556	35.347.900	34.783.100	100,00	125,00	57,49	145,80	157,10	153,91
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.076.000	2.500.000	2.600.000	2.750.000	2.750.000		1.630.000	652.000	650.000	0	0		151,49	26,08	25,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.076.000	2.500.000	2.600.000	2.750.000	2.750.000		1.629.900	1.372.000	625.000	0	0		151,48	54,88	24,04	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1.467.000	1.100.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000		1.467.000	1.400.000	1.300.000	1.025.000	-		100,00	127,27	104,00	78,85	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1.467.000	1.100.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000		1.467.000	1.400.000	625.000	0	0		100,00	127,27	50,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.686.900	3.000.000	3.300.000	3.300.000	3.350.000		2.240.800	2.240.900	727.700	0	0		132,84	74,70	22,05	0,00	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.125.400	5.795.300	8.500.000	9.500.000	9.700.000	9.750.000	7.125.300	3.500.000	4.889.200	3.734.100	3.667.700	3.667.700	100,00	60,39	57,52	39,31	37,81	37,62
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.511.757.833**	**3.427.852.925**	**3.592.579.539**	**3.948.413.131**	**4.055.523.622**	**4.076.657.462**	**4.058.181.996**	**4.222.227.253**	**3.756.312.592**	**3.652.304.670**	**3.795.047.689**	**3.999.709.014**	**89,95**	**123,17**	**104,56**	**92,50**	**93,58**	**98,11**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.502.270.633	3.420.852.925	3.580.679.539	3.935.313.131	4.042.023.622	4.063.157.462	**4.048.694.796**	4.210.253.053	3.745.398.392	3.643.367.770	3.788.508.789	3.993.170.114	89,93	123,08	104,60	92,58	93,73	98,28
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.151.400	3.300.000	3.600.000	3.750.000	3.700.000		4.109.400	3.300.000	3.107.600	2.281.000	2.281.000		356,90	100,00	86,32	60,83	61,65
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.487.200	5.848.600	8.600.000	9.500.000	9.750.000	9.800.000	9.487.200	7.864.800	7.614.200	5.829.300	4.257.900	4.257.900	100,00	134,47	88,54	61,36	43,67	43,45
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**25.000.000***	**30.000.000***	**35.000.000***	**40.000.000***					**0**	**0**						
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			25.000.000*	30.000.000*	35.000.000*	40.000.000*					0	0						

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**50.816.334**	**76.778.700**	**77.000.000**	**84.600.000**	**86.900.000**	**87.350.000**	**50.800.334**	**111.081.300**	**133.326.383**	**118.320.880**	**95.881.100**	**104.397.200**	**99,97**	**144,68**	**173,15**	**139,86**	**110,33**	**119,52**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.509.000	2.000.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000		2.509.000	1.390.100	4.517.100	4.500.000	3.750.000		100,00	69,51	205,32	200,00	166,67
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		5.974.600	4.750.000	5.200.000	5.350.000	5.400.000		5.970.100	1.923.400	9.246.300	6.968.000	3.256.500		99,92	40,49	177,81	130,24	60,31
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		15.850.800	12.500.000	13.850.000	14.250.000	14.300.000		28.945.800	31.500.000	46.200.000	46.197.000	35.490.000		182,61	252,00	333,57	324,19	248,18
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		9.238.200	7.500.000	8.100.000	8.300.000	8.350.000		9.238.200	6.392.400	5.773.900	2.499.000	2.499.000		100,00	85,23	71,28	30,11	29,93
Penyediaan Bahan/Material		5.981.500	4.750.000	5.250.000	5.350.000	5.400.000		5.981.500	4.181.400	2.706.300	1.343.100	1.248.700		100,00	88,03	51,55	25,10	23,12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.816.334	37.224.600	45.500.000	50.000.000	51.400.000	51.650.000	50.800.334	58.436.700	87.939.083	49.877.280	34.374.000	58.153.000	99,97	156,98	193,27	99,75	66,88	112,59
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**64.238.000***	**64.238.000***	**132.173.200**	0	0		**-**	**13.012.400**	**85.470.000**	**0**	**6.513.000**						
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				75.000.000*														
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					-	-				54.300.000	0	0						
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.500.000.000*														
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		64.238.000*	64.238.000*	132.173.200	132.173.200	132.173.200		-	13.012.400	31.170.000	0	6.513.000						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**146.195.500**	**127.886.400**	**101.700.000**	**111.750.000**	**114.800.000**	**115.400.000**	**139.927.198**	**107.065.398**	**98.006.623**	**145.338.451**	**146.215.885**	**130.145.600**	**95,71**	**83,72**	**96,37**	**130,06**	**127,37**	**112,78**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.266.000						10.266.000						100,00					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.928.500	80.400.000	64.000.000	70.250.000	72.200.000	72.500.000	76.868.422	59.108.694	50.015.695	60.961.115	63.922.885	53.921.600	92,69	73,52	78,15	86,78	88,54	74,37
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.001.000	47.486.400	37.700.000	41.500.000	42.600.000	42.900.000	52.792.776	47.956.704	47.990.928	84.377.336	82.293.000	76.224.000	99,61	100,99	127,30	203,32	193,18	177,68
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**70.275.800**	**50.069.800**	**55.700.000**	**61.250.000**	**62.900.000**	**63.250.000**	**70.165.300**	**94.806.000**	**123.674.466**	**220.118.000**	**358.158.000**	**279.183.000**	**99,84**	**189,35**	**222,04**	**359,38**	**569,41**	**441,40**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	20.000.000	31.800.000	35.000.000	35.900.000	36.100.000	40.000.000	60.840.000	72.471.966	101.301.000	38.220.000	39.950.000	100,00	304,20	227,90	289,43	106,46	110,66

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				257.350.000*	257.350.000*	257.350.000*					125.200.000	124.390.000						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.709.000	5.400.000	5.750.000	6.000.000	6.050.000		10.644.000	14.999.000	29.925.000	30.380.000	30.260.000		158,65	277,76	520,43	506,33	500,17
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.275.800	23.360.800	18.500.000	20.500.000	21.000.000	21.100.000	30.165.300	23.322.000	36.203.500	88.892.000	164.358.000	72.383.000	99,64	99,83	195,69	433,62	782,66	343,05
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												12.200.000						
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		**577.000.000**	**416.000.000**	**457.000.000**	**469.000.000**	**468.000.000**		**562.303.535**	**355.234.940**	**466.240.278**	**181.705.300**	**272.893.900**		**97,45**	**85,39**	**102,02**	**38,74**	**58,31**
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		**40.130.400**	**29.000.000**	**31.787.700**	**32.000.000**	**31.000.000**		**30.802.668**	**19.591.744**	**103.955.928**	**41.273.800**	**42.709.300**		**76,76**	**67,56**	**327,03**	**128,98**	**137,77**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		40.130.400	29.000.000	31.787.700	32.000.000	31.000.000		30.802.668	19.591.744	103.955.928	41.273.800	42.709.300		76,76	67,56	327,03	128,98	137,77
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			**20.000.000***	**22.000.000***	**24.000.000***	**26.000.000***					**0**	**11.672.900**						
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			20.000.000*	22.000.000*	24.000.000*	26.000.000*					0	11.672.900						
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		**536.869.600**	**387.000.000**	**425.212.300**	**437.000.000**	**437.000.000**		**531.500.867**	**335.643.196**	**362.284.350**	**140.431.500**	**218.511.700**		**99,00**	**86,73**	**85,20**	**32,14**	**50,00**
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		18.069.600	13.000.000	14.264.800	15.000.000	15.000.000		12.748.400	-	12.966.600	6.270.800	0		70,55	0,00	90,90	41,81	0,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		518.800.000	374.000.000	410.947.500	422.000.000	422.000.000		518.752.467	335.643.196	349.317.750	134.160.700	218.511.700		99,99	89,74	85,00	31,79	51,78
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			31.000.000*	32.000.000*	33.000.000*	34.000.000*					-	-						

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		**449.000.000**	**299.000.000**	**306.000.000**	**315.000.000**	**300.000.000**		**212.614.206**	**278.739.882**	**367.071.314**	**432.511.000**	**370.445.700**		**47,35**	**93,22**	**119,96**	**137,31**	**123,48**
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**81.053.000**	**54.000.000**	**55.050.000**	**56.500.000**	**53.000.000**		**77.431.378**	**97.311.468**	**50.298.868**	**94.304.000**	**-**		**95,53**	**180,21**	**91,37**	**166,91**	**0,00**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		81.053.000	54.000.000	55.050.000	56.500.000	53.000.000		77.431.378	97.311.468	50.298.868	94.304.000	-		95,53	180,21	91,37	166,91	0,00
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		**367.947.000**	**245.000.000**	**250.950.000**	**258.500.000**	**247.000.000**		**135.182.828**	**181.428.414**	**316.772.446**	**338.207.000**	**282.287.700**		**36,74**	**74,05**	**126,23**	**130,83**	**114,29**
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		43.997.000	30.000.000	30.000.000	31.000.000	30.000.000		43.249.888	39.287.014	316.772.446	191.822.000	135.902.700		98,30	130,96	1.055,91	618,78	453,01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		323.950.000	215.000.000	220.950.000	227.500.000	217.000.000		91.932.940	142.141.400	-	146.385.000	146.385.000		28,38	66,11	0,00	64,35	67,46
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**32.000.000***	**34.000.000***	**36.000.000***	**38.000.000***					**0**	**88.158.000**						
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			32.000.000*	34.000.000*	36.000.000*	38.000.000*					0	88.158.000						
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			**25.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**	**64.000.000**		**4.891.900**	**20.802.900**	**7.958.200**	**8.127.600**	**14.232.200**			**83,21**	**15,92**	**16,26**	**22,24**
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**		**4.891.900**	**20.802.900**	**7.958.200**	**0**	**0**			**83,21**	**31,83**	**0,00**	**0,00**

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000									0,00	0,00	0,00	0,00
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			40.000.000 *	42.000.000 *	44.000.000 *	44.000.000 *		4.891.900	20.802.900	7.958.200	0	0						
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	**25.000.000**	**25.000.000**	**39.000.000**					**8.127.600**	**14.232.200**						
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000 *	25.000.000	25.000.000	25.000.000					8.127.600	14.232.200						
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000 *	32.000.000 *	34.000.000 *	14.000.000					-	-						
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			**30.000.000***	**31.000.000***	**32.000.000***	**33.000.000***					**0**	**0**						
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000 *	31.000.000 *	32.000.000 *	33.000.000 *					0	0						
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		**9.000.000**	**6.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**		**8.264.500**	**5.114.800**	**29.722.896**	**13.450.000**	**0**		**91,83**	**85,25**	**424,61**	**192,14**	**0,00**
Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**9.000.000**	**6.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**		**8.264.500**	**5.114.800**	**29.722.896**	**13.450.000**	0		**91,83**	**85,25**	**424,61**	**192,14**	**0,00**
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		9.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		8.264.500	5.114.800	29.722.896	13.450.000	0		91,83	85,25	424,61	192,14	0,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		**101.000.000**	**73.000.000**	**80.000.000**	**82.000.000**	**82.000.000**		**162.608.404**	**56.805.296**	**191.933.200**	**124.707.900**	**134.182.300**		**161,00**	**77,82**	**239,92**	**152,08**	**163,64**

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		**101.000.000**	**73.000.000**	**80.000.000**	**82.000.000**	**82.000.000**		**162.608.404**	**56.805.296**	**191.933.200**	**124.707.900**	**134.182.300**		**161,00**	**77,82**	**239,92**	**152,08**	**163,64**
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		67.595.500	49.000.000	53.000.000	55.000.000	55.000.000		65.418.504	7.011.800	77.217.980	56.379.600	43.223.400		96,78	14,31	145,69	102,51	78,59
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		33.404.500	24.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000		97.189.900	49.793.496	114.715.220	68.328.300	90.958.900		290,95	207,47	424,87	253,07	336,88
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		**82.000.000**	**59.000.000**	**65.000.000**	**67.000.000**	**67.000.000**		**215.441.033**	**9.998.400**	**13.641.900**	**107.688.400**	**192.077.000**		**262,73**	**16,95**	**20,99**	**160,73**	**286,68**
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**82.000.000**	**59.000.000**	**65.000.000**	**67.000.000**	**67.000.000**		**138.636.033**	**9.998.400**	**13.641.900**	**107.688.400**	**108.322.000**		**169,07**	**16,95**	**20,99**	**160,73**	**161,67**
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		29.810.000	21.500.000	24.000.000	25.000.000	25.000.000		25.977.233	9.998.400	13.641.900	-	-		87,14	46,50	56,84	0,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		52.190.000	37.500.000	41.000.000	42.000.000	42.000.000		112.658.800	-	-	-	-		215,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan pencegahan KTA											107.688.400	108.322.000						
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			**25.000.000***	**28.000.000***	**34.000.000***	**36.000.000***					**-**	**83.755.000**						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			25.000.000*	28.000.000*	34.000.000*	36.000.000*					-	83.755.000						
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**76.806.000***	**80.000.000***	**83.000.000***	**85.000.000***	**87.000.000***		**76.805.000**	**-**	**-**	**-**	**-**						

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		76.806.000*	80.000.000*	83.000.000*	85.000.000*	87.000.000*		76.805.000	-	-	-	-						
PROGRAM PENATAAN DESA		**63.000.000**	**45.000.000**	**50.000.000**	**51.000.000**	**51.000.000**		**55.008.200**	**95.649.972**	**69.951.256**	**94.986.200**	**96.099.600**		**87,31**	**212,56**	**139,90**	**186,25**	**188,43**
Penyelenggaraan Penataan Desa		**63.000.000**	**45.000.000**	**50.000.000**	**51.000.000**	**51.000.000**		**55.008.200**	**95.649.972**	**69.951.256**	**94.986.200**	**96.099.600**		**87,31**	**212,56**	**139,90**	**186,25**	**188,43**
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa		20.000.000	-	-	-	-		-	-	-	-	-						
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		43.000.000	45.000.000	50.000.000	51.000.000	51.000.000		55.008.200	95.649.972	69.951.256	94.986.200	96.099.600		127,93	212,56	139,90	186,25	188,43
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**11.839.650**	**101.000.000**	**73.000.000**	**80.000.000**	**82.000.000**	**82.000.000**	**11.839.650**	**80.035.076**	**49.160.132**	**71.885.556**	**59.605.200**	**0**	**100,00**	**79,24**	**67,34**	**89,86**	**72,69**	**0,00**
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	**11.839.650**	**101.000.000**	**73.000.000**	**80.000.000**	**82.000.000**	**82.000.000**	**11.839.650**	**80.035.076**	**49.160.132**	**71.885.556**	**59.605.200**	**0**	**100,00**	**79,24**	**67,34**	**89,86**	**72,69**	**0,00**
Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	11.839.650	51.500.000	37.000.000	40.000.000	41.000.000	41.000.000	11.839.650	48.952.576	36.889.732	44.333.556	20.287.700	0	100,00	95,05	99,70	110,83	49,48	0,00
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		49.500.000	36.000.000	40.000.000	41.000.000	41.000.000		31.082.500	12.270.400	27.552.000	39.317.500	0		62,79	34,08	68,88	95,90	0,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**352.647.697**	**5.556.000.000**	**4.005.000.000**	**4.400.000.000**	**4.518.000.000**	**4.508.000.000**	**350.796.611**	**5.184.697.304**	**5.101.105.480**	**5.566.949.763**	**5.875.318.300**	**6.523.559.500**	**99,48**	**93,32**	**127,37**	**126,52**	**130,04**	**144,71**
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	**352.647.697**	**5.556.000.000**	**4.005.000.000**	**4.400.000.000**	**4.518.000.000**	**4.508.000.000**	**350.796.611**	**5.184.697.304**	**5.101.105.480**	**5.566.949.763**	**5.875.318.300**	**6.523.559.500**	**99,48**	**93,32**	**127,37**	**126,52**	**130,04**	**144,71**
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	33.983.000	69.192.200	50.000.000	54.800.000	56.000.000	56.000.000	33.983.000	67.586.500	-	18.849.088	13.419.000	6.911.300	100,00	97,68	0,00	34,40	23,96	12,34
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	59.732.275	5.111.561.500	3.697.000.000	4.044.837.000	4.150.000.000	4.145.000.000	59.546.602	4.816.198.952	4.809.052.816	5.077.608.624	5.434.025.200	5.953.028.300	99,69	94,22	130,08	125,53	130,94	143,62
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		111902000	80000000	88.627.000	91.000.000	91.000.000		83471676	0	79532020	100.290.200	40.851.800		74,59	0,00	89,74	110,21	44,89
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		0	25.000.000*	27.000.000*	29.000.000*	30.000.000*		0	0	0	0	0						
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	50.155.022	65.034.800	50.000.000	54.675.000	56.000.000	56.000.000	49.988.424	51.836.500	37.592.000	30.050.740	60.528.100	26.612.900	99,67	79,71	75,18	54,96	108,09	47,52
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		0	236.500.000*	200.000.000*	700.000.000*	-		0	201.612.232	3.549.500	51.670.900	137.768.300						

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	25.874.000	40.000.000	30.000.000	31.680.000	32.500.000	32.000.000	25.745.728	31.937.676	25.914.032	58.905.656	26.576.200	2.144.800	99,50	79,84	86,38	185,94	81,77	6,70
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	167.986.400	40.000.000	28.000.000	31.680.000	35.000.000	32.000.000	166.649.057	30.608.000	16.496.000	18.126.375	4.891.400	60.004.000	99,20	76,52	58,91	57,22	13,98	187,51
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5.702.500	36.338.100	26.000.000	28.780.000	30.000.000	29.000.000	5.702.300	28.849.900	10.438.400	11.257.900	8.323.600	34.207.800	100,00	79,39	40,15	39,12	27,75	117,96
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		31.971.400	22.000.000	25.321.000	26.000.000	26.000.000		31.968.700	-	57.689.500	23.062.000	34.691.800		99,99	0,00	227,83	88,70	133,43
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		20.000.000	-	15.840.000	16.500.000	16.000.000		16.264.600	-	177.874.600	151.074.700	227.338.500		81,32		1.122,95	915,60	1.420,87
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9.214.500	30.000.000	22.000.000	23.760.000	25.000.000	25.000.000	9.181.500	25.974.800	-	33.505.760	1.457.000	-	99,64	86,58	0,00	141,02	5,83	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**1.698.308.450**	**2.066.000.000**	**1.489.000.000**	**1.636.000.000**	**1.680.000.000**	**1.676.000.000**	**1.678.317.244**	**2.021.427.637**	**2.890.737.442**	**2.500.379.690**	**2.369.404.600**	**2.157.077.900**	**98,82**	**97,84**	**194,14**	**152,83**	**141,04**	**128,70**
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**1.698.308.450**	**2.066.000.000**	**1.489.000.000**	**1.636.000.000**	**1.680.000.000**	**1.676.000.000**	**1.678.317.244**	**2.021.427.637**	**2.890.737.442**	**2.500.379.690**	**2.369.404.600**	**2.157.077.900**	**98,82**	**97,84**	**194,14**	**152,83**	**141,04**	**128,70**
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.566.734.900	1.452.087.400	929.000.000	1.046.000.000	1.088.000.000	1.088.000.000	1.546.884.538	1.437.081.076	2.279.108.324	1.993.113.950	44.860.300	59.690.800	98,73	98,97	245,33	190,55	4,12	5,49
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		34.000.000	15.000.000	27.000.000	28.000.000	28.000.000		29.043.500	7.999.800	12.299.040	6.444.100	5.338.900		85,42	53,33	45,55	23,01	19,07
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	29.670.200	34.912.600	20.000.000	27.000.000	28.000.000	28.000.000	29.631.862	31.077.176	112.068.502	100.774.076	44.244.500	30.748.900	99,87	89,01	560,34	373,24	158,02	109,82
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		25.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	17.000.000		6.283.000	3.953.140	1.422.500	1.969.889.800	1.786.949.100		25,13	39,53	7,11	9.849,45	10.511,47

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		20.000.000	15.000.000	16.000.000	16.000.000	15.000.000		18.831.000	313.400	0	0	0		94,16	2,09	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	101.903.350	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	101.800.844	499.111.885	487.294.276	392.770.124	303.965.900	274.350.200	99,90	99,82	97,46	78,55	60,79	54,87
	6.880.989.714	**12.714.252.625**	**10.355.679.539**	**11.379.513.131**	**11.684.723.622**	**11.691.557.462**	**6.399.176.633**	**13.073.276.446**	**13.011.134.608**	**13.547.024.410**	**13.702.847.774**	**14.318.966.714**	**93,00**	**102,82**	**125,64**	**119,05**	**117,27**	**122,47**

2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024

Evaluasi capaian pelaksanaan urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo adalah perwujudan kewajiban DPPPAPMD Kabupaten Purworejo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A	Indikator Tujuan PD						
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,34	0,40	0,36	0,19	0,26	
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,96	95,33	95,59	95,34	95,11	
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	-	-	-	-	601	
4	Persentase Desa Mandiri	NA	NA	NA	NA	25,80	
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			58,66	58,81	65,36	
B	Indikator Sasaran PD						
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,83	70,09	71,13	70,77	73,18	
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	-	-	-	-	601	
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	62,57	61,29	63,86	63,86	62,87	
4	Persentase Desa Mandiri	NA	NA	NA	NA	25,80	
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			58,66	58,81	65,36	
C	Indikator Program PD						
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) tingkat Kabupaten	-	51,53	28,47	30,27	13,88	
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani	100	100	100	100	100	
3	Hasil Penilaian PUSPAGA						
4	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-	60,4	63,01	61,46	61,54	
5	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	-	69,39	68,57	69,24	69,3	
8	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100	100	100	100	100	
9	Persentase Bumdesma Mandiri dan kerjasama desa yang aktif						
10	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	
D	IUP						
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,34	0,40	0,36	0,19	0,26	
2	Persentase Desa Mandiri	NA	NA	NA	NA	25,80	
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	62.57	61.29	63.86	63.86	62,87	
E	Permendagri 18 2020						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-	51,53	28,47	30,27	13,88	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		0,01	0,02	0,01	100,00	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		9,52	11,46	9,93	0,01	
4	Persentase pengentasan desa tertinggal		100,00	100,00	0,00	100,00	
5	Persentase peningkatan status desa mandiri		1,16	2,30	7,80	0,00	

Sumber:DPPPPAPMDKabupatenPurworejo,2025

DPPPAPMD Kabupaten Purworejo melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu (1) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (2) pemberdayaan masyarakat dan Desa, sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi yang spesifik terkait pembangunan yang mengarusutamakan gender.Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan perempuan dan anak, memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan mempertimbangkan perspektif gender dan kebutuhan khusus mereka. Capaian kinerja urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut;

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. IKG menujukkan ketidakoptimalan pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan pencapaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin rendah nilai IKG maka semakin baik kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.Pada tahun 2023, IKG di Kabupaten Purworejo menurun menjadi 0,193 dibandingkan dengan 2022 sebesar 0,356. Menurunnya IKG terutama dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi. Hal yang paling mempengaruhi penurunan ketimpangan gender di Kabupaten Purworejo adalah penurunan proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan. Akan tetapi, pada tahun 2024 nilai IKG Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan menjadi 0,26. Peningkatan nilai IKG perlu ditangani dan diantisipasi agar kedepannya ketimpangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan tidak semakin besar. Berdasarkan data IKG Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 termasuk mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun meningkat kembali di tahun 2024. Peningkatan tersebut disebabkan aspek kesehatan mengalami penurunan kinerja yaitu meningkatnya

perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan dan meningkatnya perempuan melahirkan hidup di usia kurang dari 20 tahun. Selain itu TPAK baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
   Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level.Pada tahun 2024, nilai Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purworejo yaitu 95,34 atau mengalami sedikit penurunan dari nilai tahun 2023 yang mencapai 95,38. Namun disisi lain nilai IPG Kabupaten Purworejo masih di bawah 100, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian pembangunan laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan capaian pembangunan perempuan. Pencapaian hasil baik IPG menyisakan pekerjaan dan tugas yang tidak ringan, terutama yang terkait dengan isu disparitas pencapaian pembangunan manusia antargender.
3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
   Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks komposit yang digunakan dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Indonesia. Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi.Meski masih belum menyamai laki-laki, kualitas pembangunan perempuan di Kabupaten Purworejo senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terkait dengan pemberdayaan gender.Secara umum nilai IDG Kabupaten Purworejo cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 nilai IDG Kabupaten Purworejo adalah 69,83 dan meningkat menjadi 73,18 pada tahun 2024 meski sempat mengalami penurunan nilai pada tahun 2023 yakni 70,77 dibanding tahun sebelumnya yakni tahun 2022 yang mencapai 71,13.
4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
   Indeks Perlindungan Anak (IPA)adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan perlindungan anak di Indonesia, mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA). IPA terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), yang masing-masing mencakup 4 klaster hak anak dan 1 klaster perlindungan khusus. IPA bertujuan sebagai tolok ukur bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan perlindungan

anakserta menciptakan sistem yang terintegrasi. Secara umum nilai IPA Kabupaten Purworejo cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dengan meningkatnya nilai IPA menggambarkan anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

TPAK perempuan di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren peningkatan meskipun bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020, TPAK perempuan tercatat sebesar 60,14 dan meningkat menjadi 62,57 pada tahun 2021. Terjadi penurunan TPAK perempuan pada tahun 2022 menjadi 61,29 dan meningkat kembali menjadi 63,86 pada tahun 2023, hingga pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 62,87. Meskipun angka TPAK Perempuan Kabupaten Purworejo mengalami perbaikan dibandingkan awal periode, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih relatif rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Sepanjang periode lima tahun tersebut, selisih TPAK antara laki-laki dan perempuan konsisten berada di kisaran 21 hingga 23 poin, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan gender yang signifikan dalam pasar tenaga kerja di Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, melalui kebijakan yang inklusif gender, penguatan pelatihan keterampilan kerja, penyediaan infrastruktur pendukung, serta perubahan pola pikir masyarakat terkait peran perempuan dalam pembangunan ekonomi.

B. Capaian Kinerja Program Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mencakup program pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, perlindungan kekerasan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak.

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan Responsif gender	24	18	41	41	41
2	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat kabupaten	NA	NA	28,47%	30,27%	13,88%
3	Cakupan penanganan perempuan dan anak Korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	NA	60,40	63,01	61,46	61.54

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	NA	69,39	68,57	69,24	69.30

Sumber:DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, 2025

1. Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020-2024 yang sudah melaksanakan program dan kegiatan responsive gender sudah mencapai 100% pada tahun 2023. Indikator tersebut diukur dari perangkat daerah yang telah melakukan tagging pada minimal 2 sub kegiatan responsif gender sejak proses perencanaan dan penganggaran. Dengan begitu diharapkan perangkat daerah dalam melaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih responsif gender. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan juga untuk mengurangi ketimpangan gender yang ada di Kabupaten Purworejo. Tahun 2023 Kabupaten Purworejo meraih penghargaan Anugerah Prahita Ekapraya (APE) yaitu penilaian terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dengan predikat Nindya.
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap kesehatan fisik, mental, sosial, dan psikologis korban. Penanganan korban kekerasan tidak hanya mencakup aspek perlindungan hukum, tetapi juga layanan pemulihan, seperti pendampingan psikologis, medis, dan sosial. Oleh karena itu, jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tertangani menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap isu perlindungan kelompok rentan.Di Kabupaten Purworejo, perhatian terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat dalam lima tahun terakhir. Hal ini tercermin dari semakin kuatnya sistem pelaporan dan respons kasus melalui unit layanan terpadu, serta penguatan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta jejaring organisasi masyarakat sipil.Pada tahun 2020 sampai dengan 2024, data kasus kekerasan yang ditangani P2TP2A dan UPT PPA Kabupaten Purworejo cenderung meningkat meski sempat mengalami penurunan di tahun 2023 (terutama kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan). Selain karena masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini juga menunjukkan bahwa kesadaran dan keberanian korban untuk melaporkan tindak kekerasan semakin meningkat. Namun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam menjangkau korban di wilayah terpencil, menangani kekerasan berbasis digital, serta memperkuat layanan purna penanganan agar korban benar-benar pulih dan mandiri. Masih terdapat kasus yang tidak terlaporkan karena alasan rasa malu, takut stigma sosial, atau kurangnya informasi tentang mekanisme pengaduan. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat

sistem perlindungan perempuan dan anak, melalui peningkatan kapasitas tenaga pendamping, layanan konseling, integrasi data kekerasan, dan penguatan peran lintas sektor termasuk pendidikan, kesehatan, hukum, dan sosial. Upaya kolektif ini akan mendukung terciptanya lingkungan yang aman, setara, dan ramah bagi perempuan dan anak.

3. Layanan pemenuhan hak anak yang dilakukan yaitu Layanan pemenuhan hak anak atas pendidikan, hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan, hak anak atas pengasuhan keluarga dan lingkungan, hak anak atas partisipasi dan informasi sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak. Secara umum, cakupan penanganan sudah mencapai 100%. Seiring pelayanan yang semakin baik maka tingkat penyelesaian kasus yang terlayani pun semakin meningkat. Pada tahun 2023 Kabupaten Purworejo telah memiliki UPT PPA yang memudahkan para korban kekerasan dalam melaporkan kasus. Selain menunjukkan meningkatnya jumlah kasus, hal ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak korban yang berani melaporkan kasus yang dialaminya. Layanan dan jenis layanan yang harus didapatkan seorang perempuan korban kekerasan hanya dapat dilakukan oleh pendamping atau manajer kasus setelah melalui proses asesmen mendalam dan bersifat subyektif serta kasuistik. Dengan kata lain, jumlah dan jenis layanan yang diberikan oleh unit pelayanan sangat bergantung pada kebutuhan korban, kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan tingkat resiliensi korban. Lebih lanjut, Kabupaten Purworejo juga masih memiliki tantangan dalam perlindungan anak.
   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya oleh orang tua dan keluarga tetapi juga oleh masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.Dalam hal ini, sejak tahun 2015 Kabupaten Purworejo selalu meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak.Diawali dari pratama selama 4 kali dan madya 2 kali terturut-turut. Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media dalam rangka pemenuhan hak anak dinilai relatif baik. Kebijakan Kabupaten Layak Anak merupakan tanggung jawab publik terhadap pelaksanaan konstitusi UUD 1945 yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan hak anak untuk memberikan kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan kemiskinan. Meskipun demikian diperlukan peningkatan peran klaster Perangkat Daerah dan lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan inovasi-inovasi guna

mendukung Kabupaten Layak Anak (KLA). Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah sistem yang mengintegrasikan komitmen dan sumb
er daya untuk memenuhi hak anak dalam berbagai aspek pembangunan. Setelah penilaian KLA oleh KemenPPPA terhadap Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 yang hasilnya rilis di tahun 2024 adalah memperoleh predikat pratama. Selanjutnya untuk hasil penilaian KLA Tahun 2023 baru saja rilis di tahun 2025 hasilnya masih pratama. Predikat tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan kabupaten dalam memenuhi hak anak. Kabupaten Purworejo masih memperoleh nilai tingkat dasar yang artinya masih perlu upaya pengembangan untuk membangun inisiatif pemerintahan daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

b. Capaian Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Capaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa mempunyai tujuan meningkatnya pembangunan pedesaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup yang lebih baik, serta menanggulangi kemiskinan melalui berbagai aspek seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Pembangunan ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan desa yang sehat, kreatif, dan memiliki partisipasi masyarakat yang aktif dalam pengambilan keputusan. Capaian indikator kinerja urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut :

1. Persentase Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang bersumber dari Indeks Desa. Desa Mandiri merupakan desa yang dianggap telah memenuhi seluruh aspek strategis pembangunan desa berdasarkan tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa Mandiri Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik. Berdasarkan data Indeks Desa dari Kementrian PPN/ Bappenas tahun 2024, Persentase Desa Mandiri tahun 2019 hingga tahun 2021 hanya ada 1 desa, dengan perbandingan jumlah desa di Kabupaten Purworejo 469 Desa atau hanya sebanyak 0,21%. Namun, pada tahun 2024, persentase desa mandiri di Kabupaten Purworejo meningkat menjadi 25,8%.

B. Capaian Kinerja Program Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Perkembangan Desa dan Kemandiran Desa

Sebelum lahirnya Indeks Desapengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa dilihat dari penilaian Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Tabel 2.5

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purworejo

Tahun 2020-2024

No	Uraian	*2020*		*2021*		*2022*		*2023*		*2024*	
		Jumlah	**%**	**Jumlah**	**%**	**Jumlah**	**%**	**Jumlah**	**%**	**Jumlah**	**%**
1	***2***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***
1	Mandiri	0	0%	0	0%	4	1%	17	4%	38	8%
2	Maju	80	17%	116	25%	160	34%	234	50%	266	57%
3	Berkembang	362	77%	346	74%	305	65%	218	46%	165	35%
4	Tertinggal	27	6%	7	1%	0	0%	0	0%	0	0%
5	Sangat Tertinggal	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
6	Jumlah Desa	469	100%	469	100%	469	100%	469	1%	469	100%
7	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purworejo	0,661		0,6764		0,6934		0,7229		0,7352	

Sumber:Kemendesa,2024

IDM Kabupaten Purworejo pada tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan. Kemajuan IDM sendiri merupakan tolak ukur dari kesuksesan pelaksanaan dana desa di desa. Status desa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan peningkatan jumlah Desa Mandiri, diikuti juga dengan meningkatnya jumlah Desa Maju. Pertumbuhan Desa Mandiri masih sangat rendah, sementara jumlah desa maju semakin bertambah.Meskipun jumlah Desa Berkembang semakin turun namun jumlah tersebut masih cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Purworejo masih banyak desa yang mempunyai potensi sosial, potensi ekonomi dan potensi ekologi atau lingkungan, akan tetapi desa belum mampu mengelolanya dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Selain itu desa berkembang juga masih

rentan dengan goncangan untuk turun level menjadi desa tertinggal apabila tidak dikelola dengan baik.

2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

   Pemberdayaan masyarakat berperan cukup penting dalam proses pembangunan daerah, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Purworejo adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Kelembagaan ekonomi desa melalui berbagai bentuk badan usaha yang dibentuk oleh masyarakat desa untuk mengelola sumber daya ekonomi dan menggerakkan potensi lokal. Contoh utama kelembagaan ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Koperasi, yang bertujuan untuk mencapai kemandirian dan daya saing ekonomi desa. BUMDes usaha yang di bentuk oleh Pemerintah Desa dan dikelola bersama masyarakat untuk mengelola asset dan potensi ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.6

Lembaga Kemasyarakatan danLembaga Ekonomi Desadi Kabupaten Purworejo Tahun 2020- 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desayangberperan aktifdalampembangunandesa	469	469	469	469	469
2	JumlahPKKDesa/KelurahanAktif	494	494	494	494	494
3	JumlahPosyanduAktif	1.645	1.645	1.645	1.642	1.642
4	JumlahBumdes	374	419	442	465	468
5	Badan Kerjasama AntarDesa(BKAD) Aktif	16	17	15	15	15
6	Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	16	16	163	3	3
7	JumlahUnit Bumdes Bersama	3	3	2	3	3
8	Jumlah Karang Taruna	402	402	402	402	402
9	Jumlah RT dan RW	6468	6468	6468	6468	6468

Sumber: DPPPPAPMD Kabupaten Purworejo, 2025

Dalam kurun waktu 2020-2024 terlihat adanya peningkatan pada jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama desa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah desa yang melaksanakan Kerjasama meningkat.Fasilitasi dilaksanakan melalui sosialisasi perlunya Kerjasama desa dan pendampingan ke desa.Dalam melaksanakan penataan desa permasalahan yang dihadapi yaitu belum optimalnya desa dalam menggali potensi PADesa dan belum optimal dalam mengembangkan serta memanfaatkan potensi alam.Dalam melaksanakan administrasi desa, desa masih belum optimal dalam melakukan pemetaan potensi desa dalam membentuk rintisan kawasan pedesaan.Sedangkan terkait dengan lembaga kemsyarakatan, masih kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait dalam fasilitasi kegiatan

kelembagaan seperti peningkatan kapasitas dan pemberdayaan.Desa di Kabupaten Purworejo telah memiliki RPJM-Des dan tertib dalam penyelenggaraan keuangan desa.Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di setiap kecamatan telah terbentuk dan berperan aktif dalam musyawarah pembangunan.Faktor penghambat dalam bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah masih rendahnya pemberdayaan dan kemandirian desa dalam rangka mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan status desa maju.Selain itu, masih rendahnya jumlah unit usaha BUMDesa Bersama.Penyelenggaraan program pembangunan kawasan perdesaan dapat mendorong pengembangan kawasan perdesaan melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan BUMDesa Bersama, kurang optimalnya pengembangan pasar desa yang aktif akibat rendahnya kapasitas SDM serta buruknya fasilitas pasar, masih rendahnya jumlah unit usaha BUMDesa Bersama, dan masih kurangnya Posyandu yang aktif.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan dan Peluang DPPPAPMD Kabupaten Purworejo

Potensi aparatur pemerintah yang kompeten merupakan salah satu kekuatan strategis Kabupaten Purworejo dalam mendorong efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah. Kompetensi aparatur menjadi pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, serta mampu merespons dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Potensi aparatur yang kompeten ini dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi, perumusan kebijakan berbasis data, serta pelayanan publik yang cepat dan berkualitas. Aparatur yang mumpuni juga menjadi penggerak utama dalam implementasi berbagai agenda strategis daerah, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan daya saing daerah, transformasi digital, pengelolaan lingkungan hidup, dan penguatan ekonomi lokal.

Sebelum menentukan isu strategis jangka menengah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029, dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap isu jangka panjang yang diangkat Kabupaten Purworejo dalam RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Adapun isu strategis jangka panjang Kabupaten Purworejo dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan lingkungan sosial masyarakat,
2. Menurunnya kualitas lingkungan hidup,
3. Tingginya risiko bencana,
4. Belum terpadunya infrastruktur wilayah,

5. Belum optimalnya produktivitas dan kondisi inklusivitas perekonomian daerah, dan
6. Tata kelola pemerintahan yang belum *agile*, adaptif, dan kolaboratif.

Selanjutnya dalam RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, terdapat beberapa isu strategis:

a. Rencana pembangunan *double track* jalan kereta api Purworejo-Kroya,
b. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan (jalan tol),
c. Keberadaan Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA),
d. Rencana pembangunan Jalan lingkar Timur,
e. Pengembangan kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB),
f. Pembangunan Bendungan Bener.

Sementara itu pada KLHS RPJMD, dimunculkan beberapa isu:

a. Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia,
b. Distribusi kesejahteraan yang belum merata dan inklusif,
c. Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata,
d. Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
e. Tingginya risiko bencana dan dampak perubahan iklim, dan
f. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi.

DPPPAPMD Kabupaten Purworejo menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan pengembangan pelayanan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Berdasarkan hasil analisis terhadap RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, maka dapat diketahui bahwa DPPPAPMD Kabupaten Purworejo menghadapi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah, antara lain:

1. Tantangan pengembangan pelayanan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo:
   a. Penerapan tata kelola pemerintahan desa yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan desa, efektivitas tata laksana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
   b. Alokasi Dana Desa melalui APBN yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tentunya akan dapat optimal pemanfaatannya apabila didukung dengan berfungsinya kelembagaan desa dan aparatur yang kompeten.
   c. Peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat masih lemah.
   d. Desa belum mampu meningkatkan pendapatan asli desa.
   e. Pengembangan kerjasama desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

f. Masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di masyarakat.
g. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
h. Tingkat capaian Pemenuhan Hak Anak belum optimal.
i. Penguatan jaringan kelembagaan lembaga layanan korban kekerasan masih perlu ditingkatkan.
j. Kapasitas Pengurus Organisasi Perempuan dan Anak masih perlu ditingkatkan.
k. Belum terbentuknya informasi data gender yang lengkap.
l. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam melaksanakan perencanaan dan pengganggaran pembangunan yang responsif gender

2. Peluang pengembangan pelayanan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo:
a. Dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, provinsi terhadap pembangunan di sektor pedesaan yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan nasional;
b. Letak kabupaten Purworejo yang diapit oleh Kabupaten/Kota lain yang memiliki Perguruan Tinggi bermutu memudahkan transfer teknologi tepat guna;
c. Sarana pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, perangkat desa, dan masyarakat tersedia;
d. Jumlah Desa sebesar 469 Desa dapat diberdayakan menjadi desa maju sesuai dengan potensi desanya;
e. Kekayaan Desa dapat dijadikan sumber pendapatan asli desa untuk meningkatkan kemajuan pembangunan desa;
f. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, Kabupaten Purworejo Layak Anak, dan Jaringan layanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat;
g. Kualitas hidup perempuan dan anak semakin baik;
h. Kapasitas SDM pendamping terlatih semakin memadai;
i. Adanya jaringan Sistem Informasi yang mendukung pelaksanaan tugas;
j. Kepedulian masyarakat untuk peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat.

b. Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada tahun 2025 berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Ini adalah periode RPJM pertama yang mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas". RPJMN 2025-2029: merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun pertama kepresidenan 2025-2029. Dokumen ini menjadi dasar hukum bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPJM Daerah.

Selanjutnya, sesuai dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, terdapat isu strategis regional di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Beberapa isu strategis tersebut di antaranya: perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan; penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana; kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia; kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat; serta tata kelola pemerintahan yang dinamis.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Kelompok sasaran dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai berikut:

1. Tim Pokja dan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Kabupaten, sebagai Tim yang menyusun rencana kerja tahunan memfasilitasi OPD untuk menyusun anggaran responsif gender (meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan pentingnya upaya untuk mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD dan pengisi penilaian mandiri PPE.
2. Perempuan dalam organisasi melalui organisasi Dharma Wanita dan Gabungan Organisasi Wanita untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam advokasi dan gerakan sosial.
3. Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini (SERAT KARTINI) perempuan yang berdaya, yang memiliki daya ungkit yang besar dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga.
4. Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), partisipasi publik dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Forum Komunikasi Anak (Forkare) forum ini membantu pemerintah kabupaten untuk memastikan hak anak dapat terpenuhi.
6. Perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus, mencakup perempuan dari berbagai usia dan latar belakang, serta anak-anak dari segala usia dan kondisi.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, melalui peningkatan partisipasi, kelembagaan, dan kemandirian. Mencakup semua lembaga yang ada di desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), lembaga adat, karang taruna, kelompok PKK, dan lembaga lainnya. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama antar desa dengan desa, desa dengan perusahaan, desa dengan perguruan tinggi melalui kegiatan KKN di Desa. Kerjasama desa bertujuan untuk mencapai

kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat desa.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dalam pembangunan daerah merupakan isu penting karena menunjukkan ketidakselarasan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi nyata selama pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perumusan permasalahan harus dilakukan dengan cermat, karena menjadi dasar bagi penyusunan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam perencanaan pembangunan.

Di Kabupaten Purworejo, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 merupakan langkah awal menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2025-2045. RPJMD ini adalah bagian dari RPJPD, sehingga setiap kebijakan dan program yang direncanakan harus selaras dengan tujuan jangka panjang yang ditetapkan dalam RPJPD. Analisis dan kajian terhadap permasalahan pembangunan daerah sangat penting, karena hasilnya akan memberikan panduan lebih lanjut tentang arah kebijakan pembangunan untuk tahap pertama periode 2025-2029 dalam RPJPD.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dijabarkan ke dalam 2 urusan yang diampu oleh DPPPAPMD, yaitu

1. Permasalahan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

   Kualitas hidup perempuan dan anak di Kabupaten Purworejo masih belum setara dan merata, yang ditunjukkan oleh masih lemahnya pemenuhan hak dasar, tingginya kasus kekerasan, serta adanya kesenjangan gender dalam berbagai aspek pembangunan. Permasalahan ini bersumber dari belum optimalnya pemenuhan hak anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, baik dari aspek kebijakan maupun implementasi di lapangan. Dalam pelaksanaanya, permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

a. Pemenuhan Hak Anak Belum Optimal.

   Pemenuhan hak anak menurut Kementerian PPPA yang terbaru berfokus pada Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2024 yang mengatur acuan penyelenggaraan layanan pemenuhan hak anak, serta penekanan pada kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), hak untuk tumbuh dan berkembang, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak partisipasi anak dalam pembangunan melalui Forum Anak. Upaya ini juga didukung dengan penguatan pendidikan karakter, literasi digital yang aman, dan lingkungan yang mendukung melalui kerja sama lintas sektor. Mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) dalam setiap kebijakan dan layanan.

b. Perlindungan Perempuan dan Anak Belum Optimal.

   Masih banyak kasus kekerasan, diskriminasi, dan masalah lain yang dihadapi oleh perempuan dan anak di Kabupaten Purworejo. KemenPPPA terus berupaya melalui berbagai program dan kebijakan

untuk mengatasi tantangan tersebut. Perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Diperlukan sinergi hukum, kelembagaan, serta layanan perlindungan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan korban. Banyak perempuan dan anak korban kekerasan yang menghadapi tekanan psikologis berlapis saat memasuki proses peradilan. Oleh karena itu, kerja sama lintas lembaga ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan keadilan yang berpihak pada korban. UPTD PPA menjadi ujung tombak layanan. Menteri PPPA mendorong penguatan kelembagaan UPTD PPA melalui dukungan anggaran, tenaga profesional, rumah aman, serta sistem pelaporan yang terintegrasi, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik diharapkan dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas layanan secara merata dan akuntabel.

c. Masih Rendahnya Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Keterlibatan perempuan dalam bidang ipoleksosbud (ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya) masih rendah di Kabupaten Purworejo, terutama di bidang politik dan pengambilan keputusan strategis, meskipun adanya upaya dan kebijakan seperti kuota 30%.Faktor penyebabnya meliputi kondisi sosial budaya yang masih kental dengan stereotip pembagian peran gender, dominasi laki-laki dalam partai politik, serta interpretasi agama yang menghambat partisipasi perempuan di ruang publik. Rendahnya partisipasi perempuan mengurangi perspektif yang beragam dalam pembuatan kebijakan, serta menghambat pencapaian kesetaraan gender dan tujuan pembangunan yang lebih inklusif.

d. Masih rendahnya Penerapan Kebijakan Responsif Gender.

Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Di samping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Dalam pelaksanaanya, permasalahan gender yang masih perlu perhatian antara lain:

1. Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan responsif gender;
2. Rendahnya kesadaran desa untuk menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa;
3. Kurangnya perhatian terhadap isu gender dan pemberdayaan perempuan dalam perumusan kebijakan.

2. Permasalahan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tingkat kemandirian desa di Kabupaten Purworejo masih tergolong rendah dan belum mampu menjadi motor penggerak pembangunan di tingkat lokal secara optimal. Hal ini disebabkan oleh permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

a. Masih Rendahnya Peran BUMDes/BUMDesMa dalam Pembangunan Desa.

Rendahnya peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan BUMDesma (BUM Desa Bersama) dalam pembangunan desa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk minimnya keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat, kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang manfaat BUMDes, keterbatasan sumber daya manusia (termasuk kurangnya motivasi pengelola), ketidakjelasan tata kelola keuangan, serta kelemahan dalam kepemimpinan dan pendampingan yang belum optimal. Faktor tersebut berdampak pada potensi ekonomi desa tidak dapat digali dan dimanfaatkan secara maksimal dan nilai kebermanfaatan BUMDes yang seharusnya dapat dirasakan masyarakat menjadi hilang atau tidak optimal.

b. Masih Rendahnya Kerjasama antar Desa dan Pihak Ketiga.

Rendahnya kerja sama desa dengan pihak ketiga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran (APB Desa), kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat kerja sama, risiko keamanan data, potensi ketergantungan pada pihak ketiga, serta masalah dalam negosiasi dan penyusunan perjanjian yang mengikat para pihak. Solusi untuk mengatasi ini adalah melalui fasilitasi pemerintah daerah, pemanfaatan dukungan dan pelatihan dari pihak ketiga, serta pemilihan mitra yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa.

c. Belum Tercukupinya Sarana dan Prasarana Desa.

Meskipun ada dana desa, keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia dapat memengaruhi kecepatan pemenuhan sarana dan prasarana di semua desa secara merata, dikarenakan pembangunan desa tidak hanya fokus pada sarana fisik, tetapi juga pada aspek non-fisik seperti sosial budaya dan sosial ekonomi. Berbagai peraturan, seperti Permendesa PDTT, dibuat untuk mengatur dan memastikan penggunaan Dana Desa sesuai prioritas yang telah ditetapkan, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana di desa.

d. Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang *Good Governance.*

Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang *good governance* disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, seperti korupsi, birokrasi yang kaku, kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta lemahnya akuntabilitas dan pengawasan. Untuk mencapainya, diperlukan partisipasi publik, penegakan hukum yang tegas, SDM yang

profesional, serta komitmen dari pemerintah desa untuk menerapkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.Adanya perbedaan akses dan kemampuan masyarakat dalam teknologi informasi dapat menghambat partisipasi dan transparansi.

e. Belum Optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Kurangnya pemahaman tentang fungsi LKD di lapangan, keterbatasan kapasitas SDM, kurangnya pendampingan dari pemerintah desa, serta keterbatasan anggaran dan perencanaan kegiatan yang menyebabkan LKD tidak efektif.Hal ini menyebabkan LKD tidak maksimal dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan desa. Fungsi LKD sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih jauh dari kata baik.

f. Kelembagaan dan Pelayanan Desa.

Pelayanan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dasar, pemberdayaan, dan pembangunan, yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga desa tersebut sesuai dengan Undang-Undang Desa.

Di mana kelembagaan desa meliputi organisasi pemerintah desa (Pemerintah Desa, BPD) dan lembaga kemasyarakatan (PKK, RT/RW, LPMD, Karang Taruna, BUMDes) yang berperan memfasilitasi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Pelayanan desa dengan pemanfaatan SPBE adalah upaya pemerintah desa untuk menyelenggarakan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga menjadi lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

g. Tata Kelola Keuangan Desa.

Proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang harus transparan, akuntabel, dan partisipatif, diatur oleh UU Desa dan Permendagri Nomor 20/2018. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa, dokumen rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang memuat sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa untuk satu tahun anggaran. Sumber-sumber pendapatan desa, seperti dari pajak, retribusi, dana alokasi umum (ADD), dana desa, serta pendapatan asli desa lainnya dari pemanfaatan aset desa.

3. Permasalahan Bidang Urusan Penunjang.

Dimensi pemerintahan di Kabupaten Purworejo memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.Namun,

dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius.Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal, pelayanan publik prima belum merata, serta tata kelola pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya baik.Selain itu, penyelenggaraan statistik sektoral dan reformasi hukum juga belum berjalan optimal.Belum optimalnya implementasi kualitas kebijakan semakin menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo perlu memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahannya agar mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.Permasalahan pada dimensi pemerintahan (*management)* DPPPAPMD Kabupaten Purworejo antara lain sebagai berikut :

a. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah belum Optimal

Permasalahan mengenai akuntabilitas kinerja di DPPPAPMD Kabupaten Purworejo terindikasi dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperoleh pada tahun 2024, yakni sebesar 65,36 (kategori B). Nilai ini mencerminkan beberapa akar masalah utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan di DPPPAPMD Kabupaten Purworejo.

Pertama, kualitas perencanaan perangkat daerah belum optimal, yang ditandai dengan belum optimalnya keselarasan antardokumen perencanaan, perencanaan kinerja belum memenuhi standar yang baik karena *logframe* dan *crosscutting* belum tersusun dengan baik, belum tersedianya pedoman teknis perencanaan kinerja, perencanaan kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, belum optimalnya manajemen risiko Perangkat Daerah, serta perencanaan kinerja yang belum belum menjawab isu strategis perangkat daerah karena kualitas data belum optimal serta pengendalian dan evaluasi belum optimal. Kedua, pengukuran kinerja perangkat daerah juga belum optimal.Hal ini disebabkan oleh implementasi capaian kinerja yang seringkali tidak disertaidengan bukti yang memadai, sehingga sulit untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian secara akurat.Selain itu, pengukuran kinerja juga belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment.*Ketiga, pelaporan kinerja belum optimal.Hal ini disebabkan oleh dokumen pelaporan yang belum memenuhi standar serta pelaporan kinerja yang belum digunakan sepenuhnya dalam penyusunan perencanaan berikutnya.Keempat, evaluasi kinerja belum optimal.Hal tersebut disebabkan oleh evaluasi akuntabilitas kinerja yang belum dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai serta evaluasi SAKIPbelum memberikan dampak nyata dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.Kelima, akuntabilitas keuangan belum optimal.Hal tersebut disebabkan oleh belum stabilnya kondisi keuangan daerah, anggaran belanja perangkat daerah yang kurang efektif dan efisien, penyerapan anggaran kurang efektif, dan kurangnya kemudahan akses informasi keuangan perangkat daerah oleh publik.Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya berlandaskan kemampuan keuangan daerah.Selain itu, akar masalah utama yang perlu

diatasi yaitu belum terciptanya lingkungan yang berintegritas. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya penerapan manajemen kepegawaian berbasis merit sistem, pelaksanaan pengawasan, serta kapabilitas APIP.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni laporan resmi dari lembaga pemerintah dan lembaga internasional, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo 2025-2045, serta Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.7

Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Bonus Demografi	Pemenuhan Hak Anak Belum Optimal	Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dampak buruk teknologi AI *Involuntary migration* *Aging population* negara maju	Transformasi sosial Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat	Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Belum Setara dan Merata
	Perlindungan Perempuan dan Anak Belum Optimal					
	Masih Rendahnya Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya					
	Masih rendahnya Penerapan Kebijakan Responsif Gender					
	Masih Rendahnya Peran BUMDes/BUMDesMa dalam Pembangunan Desa					Masih Rendahnya Kemandirian Desa
	Masih Rendahnya Kerjasama antar Desa dan Pihak Ketiga					
	Belum Tercukupinya Sarana dan Prasarana Desa					
	Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Good Governance					
	Belum Optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)					
	Kelembagaan dan Pelayanan Desa					
	Tata Kelola Keuangan Desa					
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal

Sumber:DPPPPAPMDKabupatenPurworejo,2025

Isu strategis berdasarkan permasalahan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 :

a. Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Belum Setara dan Merata

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender, pemberdayaan organisasi perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan. Melaksanakan kebijakan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam pembangunan.Memberikan dukungan dan pengembangan kepada organisasi perempuan agar lebih berperan aktif dalam masyarakat.Meningkatkan dan mengembangkan kualitas hidup perempuan melalui berbagai program.Sementara itu, urusan perlindungan anak mencakup pencegahan dan penanganan kekerasan serta eksploitasi anak, pengelolaan dan analisis data perlindungan anak serta melaksanakan program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, termasuk penanganan kasus dan pemulihan korban.Mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk pemenuhan hak anak dan sebagai penyelenggaraan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA).KLA adalah kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak, dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, dengan adanya kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung hak-hak anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis jangka menengah tahun 2025-2029 terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Anak Belum Optimal
2. Perlindungan Perempuan dan Anak Belum Optimal
3. Masih Rendahnya Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya
4. Masih rendahnya Penerapan Kebijakan Responsif Gender

b. Masih Rendahnya Kemandirian Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah proses pembangunan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk menentukan nasib sendiri. Proses ini melibatkan berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Tujuannya adalah untuk memandirikan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan desa yang maju dan sejahtera. Penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan desa dapat mendorong peningkatan status desa berdasarkan pengukuran Indeks Desa.Penyusunan Indeks Desa dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan

dan kemandirian desa.Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.Desa Mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik.Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis jangka menengah tahun 2025-2029 terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut :

1. Masih Rendahnya Peran BUMDes/BUMDesMa dalam Pembangunan Desa
2. Masih Rendahnya Kerjasama antar Desa dan Pihak Ketiga
3. Belum Tercukupinya Sarana dan Prasarana Desa
4. Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang*Good Governance*
5. Belum Optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

c. Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal

Akuntabilitas kinerja memberikan kontrol demokratis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah.Melalui akuntabilitas, masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah dan layanan publik yang diberikan. Dan merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah (perangkat daerah) untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuannya.Pertanggungjawaban ini disampaikan melalui laporan kinerja kepada para pemangku kepentingan.Melalui pelaksanaan SAKIP yang melibatkan pengukuran, pengumpulan, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja secara berkala dan hasil kinerja kemudian dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat resmi pertanggungjawaban perangkat daerah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2025-2029 yaitu: “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius dan Inovatif (Purworejo Berseri)”,dan pada rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2029, DPPPAPMD Kabupaten Purworejo memberikan dukungan pada misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
2. Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-halyang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategisdaerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkandari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalamjangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (Reff. PermendagriNomor 86 tahun 2017).

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan: Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak, kemandirian desa, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,29	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,37	95,38	95,39	95,41	95,42	95,43	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,56	65,15	65,74	66,32	66,91	67,5	
			Persentase Desa Mandiri	25.91	26.01	26.23	26.44	26.44	26.65	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
S1, Meningkatnya kualitas manusia Indikator kinerja : Indeks Pembangunan Manusia		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,38	73,58	73,98	74,38	74,78	75,22	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,56	65,15	65,74	66,32	66,91	67,5	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	65,07	66,07	67,06	68,06	69,05	70,05	
S4, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Indikator kinerja : Laju Pertumbuhan Ekonomi		Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	25.91	26.01	26.23	26.44	26.44	26.65	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Indikator kinerja : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	

Sumber: DPPPPAPMD Kabupaten Purworejo ,2025

a. Tujuan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo

Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan lima tahun ke depan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut "Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak, Kemandirian Desa serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"

Indikator tujuan:

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

   IKG adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan keterwakilan politik), serta partisipasi dalam pasar kerja. Semakin tinggi nilai IKG, semakin besar ketimpangan yang ada dan semakin besar pula potensi hilangnya pembangunan manusia akibat ketidaksetaraan gender. Sehingga diharapkan adanya penurunan IKG setiap tahunnya, menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender di berbagai bidang.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

   IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender.IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki.

   IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan.Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) setiap tahunnya, diperlukan upaya konkret dalam berbagai bidang, termasuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pengarusutamaan gender dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah.Selain itu, perlu adanya komitmen dan penganggaran yang responsif gender untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

   Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan perlindungan anak di Indonesia, mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA). IPA terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan

Khusus Anak (IPKA), yang masing-masing mencakup 4 klaster hak anak dan 1 klaster perlindungan khusus. IPA bertujuan sebagai tolok ukur bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan perlindungan anakserta menciptakan sistem yang terintegrasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) terdiri dari dua komponen utama, sebagai berikut :

a. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA): Menggambarkan capaian pemenuhan hak-hak anak, yang mencakup empat klaster:
   1. Klaster 1 : Hak sipil dan Kebebasan
   2. Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
   3. Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
   4. Klaster 4 : Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang
b. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) : Menggambarkan capaian perlindungan khusus anak dari kekerasan dan diskriminasi

4. Persentase Desa Mandiri

   Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota.Persentase Desa mandiri diukur dengan menggunakan Indeks Desa.Indeks Desa adalah ukuran tunggal yang dirancang untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia, yang dimulai digunakan secara resmi pada tahun 2025 oleh Kementerian PPN/Bappenas.Indeks ini menggabungkan berbagai data pembangunan desa, seperti layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi desa.Desa mandiri merupakan salah satu tujuan dari pembangunan desa di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.Desa mandiri memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri, memiliki seperti ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang memadai, infrastruktur yang baik, aksesibilitas yang mudah, pelayanan umum yang berkualitas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif melalui tata kelola pemerintahan desa.

5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

   SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasiterhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapananggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukurankinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.SAKIP yang diterapkan pada unit kerja perangkat daerah itu sendiri, sebagai rangkaian sistematis dari aktivitas, alat, dan prosedur untuk menetapkan dan mengukur, mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja.

Tujuannya adalah untuk memastikan sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi kinerja pemerintah.

b. Sasaran

Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran pembangunan adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan untuk periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
   Indikator kinerja;
   a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
      IDG adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, khususnya dalam pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan pendapatan.IDG berfokus pada partisipasi aktif perempuan dalam berbagai bidang.IDG memberikan gambaran tentang sejauh mana perempuan memiliki kesempatan dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan yang penting untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Semakin tinggi nilai IDG, semakin baik tingkat pemberdayaan dan kesetaraan gender dalam suatu wilayah.
   b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
      TPAK adalah persentase jumlah perempuan usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total jumlah penduduk perempuan usia kerja. Ini adalah indikator penting yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi.
      Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan pemberdayaan ekonomi perempuan dan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
   c. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
2. Meningkatnya Kemandirian Desa, indikator kinerja Persentase Desa Mandiri.
3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arahkebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini menjadi panduan dalam menentukan program prioritas serta fokus pembangunan daerah yang dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan

program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Renstra DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi DPPPAPMD Kabupaten Purworejo dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD

TAHAP I	**TAHAP II**	**TAHAP III**	**TAHAP IV**	**TAHAP V**
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Menguatkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	**Meningkatkan** pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	**Memantabkan** pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	**Mewujudkan** pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	**Meneguhkan** pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak
Menguatkan pembangunan desa dalam mewujudkan kemandirian desa	**Meningkatkan** pembangunan desa dalam mewujudkan kemandirian desa	**Memantabkan** pembangunan desa dalam mewujudkan kemandirian desa	**Mewujudkan** pembangunan desa dalam mewujudkan kemandirian desa	**Meneguhkan** pembangunan desa dalam mewujudkan kemandirian desa
Menguatkan sistem manejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatkan** komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	**Memantapkan** Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	**Memperkuat** sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	**Perwujudan** akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Sumber: DPPPPAPMDKabupatenPurworejo,2025

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas manusia	**Penguatan** kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas,	**Penguatan** Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif, layanan pengaduan dan penjangkauan penganganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Tahun 2026
		Peningkatan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas,	**Peningkatan** Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif, layanan pengaduan dan penjangkauan penganganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Tahun 2027

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Pemantapan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas,	**Pemantapan** Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif, layanan pengaduan dan penjangkauan penganganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Tahun 2028
		Perwujudan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas,	**Perwujudan** Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif, layanan pengaduan dan penjangkauan penganganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Tahun 2029
		Peneguhan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas,	**Peneguhan** Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif, layanan pengaduan dan penjangkauan penganganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Tahun 2030
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	**Penguatan** produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat	**Penguatan** produktivitas desa berorientasi pada kemandirian desa, kerja sama desa dengan desa, desa dengan pihak ketiga, desa dengan perguruan tinggi, perbaikan tata kelola pemerintah desa, peningkatan lembaga ekonomi desa melalui Bumdes dan Bumdesma, serta pemberdayaan masyarakat melalui lembaga desa	Tahun 2026
		Peningkatan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat	**Peningkatan** produktivitas desa berorientasi pada kemandirian desa, kerja sama desa dengan desa, desa dengan pihak ketiga, desa dengan perguruan tinggi, perbaikan tata kelola pemerintah desa, peningkatan lembaga ekonomi desa melalui Bumdes dan Bumdesma, serta pemberdayaan masyarakat melalui lembaga desa	Tahun 2027
		Pemantapan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat	**Pemantapan** produktivitas desa berorientasi pada kemandirian desa, kerja sama desa dengan desa, desa dengan pihak ketiga, desa dengan perguruan tinggi, perbaikan tata kelola pemerintah desa, peningkatan lembaga ekonomi desa melalui Bumdes dan Bumdesma, serta pemberdayaan masyarakat melalui lembaga desa	Tahun 2028

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Perwujudan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat	**Perwujudan** produktivitas desa berorientasi pada kemandirian desa, kerja sama desa dengan desa, desa dengan pihak ketiga, desa dengan perguruan tinggi, perbaikan tata kelola pemerintah desa, peningkatan lembaga ekonomi desa melalui Bumdes dan Bumdesma, serta pemberdayaan masyarakat melalui lembaga desa	Tahun 2029
		Peneguhan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat	**Peneguhan** produktivitas desa berorientasi pada kemandirian desa, kerja sama desa dengan desa, desa dengan pihak ketiga, desa dengan perguruan tinggi, perbaikan tata kelola pemerintah desa, peningkatan lembaga ekonomi desa melalui Bumdes dan Bumdesma, serta pemberdayaan masyarakat melalui lembaga desa	Tahun 2030
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	**Penguatan** akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	**Penguatan** akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Tahun 2026
		Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	**Peningkatan** akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Tahun 2027
		Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	**Pemantapan** akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Tahun 2028

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	**Perwujudan** akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Tahun 2029
		Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	**Peneguhan** akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Tahun 2030

Sumber: DPPPPAPMD Kabupaten Purworejo,2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perumusan program pembangunan yang mencakup kerangka pendanaan dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah serta memenuhi layanan perangkat daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah. Program pembangunan yang sudah mencantumkan kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra PD, termasuk merincinya ke dalam kegiatan atau sub-kegiatan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun kedepan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang telah diidentifikasi dengan mempertimbangkan (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045 (3) RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja perangkat daerah dimulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030.Program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.Program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra PD berdasar NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan dengan sasaran pemerintah daerah dan sesuai dengan tugas dan fungsi DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, sebagai berikut.

A. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan peran mereka dalam pembangunan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Program ini mencakup kegiatan koordinasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG); koordinasi dan pembinaan terkait perencanaan dan penganggaran responsif gender; koordinasi dan fasilitasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA); fasilitasi dan koordinasi Program Kecamatan Berdaya; pembinaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota; fasilitasi Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Dharma wanita persatuan, dan sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini (Serat Kartini) Kabupaten Purworejo. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase anggaran responsif gender (ARG) tingkat kabupaten sebesar 14,5% pada akhir periode RPJMD.

2. Program Perlindungan Perempuan
   Program perlindungan perempuan bertujuan untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya untuk mendukung Program Prioritas Sejahtera Wargane.Program perlindungan perempuan diarahkan melalui koordinasi perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan; pembinaan dan pembekalan pengasuhan keluarga rentan; serta penyediaan layanan kasus kekerasan terhadap perempuan.Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani sebesar 100% selama periode 2026 hingga 2030.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
   Program peningkatan kualitas keluarga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga melalui berbagai aspek seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan.Program ini mencakup kegiatan koordinasi dan fasilitasi peningkatan kualitas keluarga yang mendorong kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pembentukan keluarga yang harmonis untuk mendukung Program Prioritas Sejahtera Wargane.Program ini ditargetkan untuk pencapaian hasil penilaian Pusat Perlindungan Keluarga (PUSPAGA) sebesar 245 pada akhir periode RPJMD.
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
   Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) adalah upaya konkrit untuk memastikan setiap anak dapat menikmati hak-haknya, termasuk hak hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan. Program ini mencakup kegiatan fasilitasi Forum Komunikasi Anak Kabupaten Purworejo (Forkare); koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraanKabupaten Layak Anak (KLA); pelaksanaan pencegahan pernikahan anak dan pekerja anak; koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak/Konvensi Hak Anak (KHA); serta pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan Kecamatan/Desa Layak Anak.Program ini ditargetkan untuk pencapaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)sebesar 62 pada akhir periode RPJMD.
5. Program Perlindungan Khusus Anak
   Program Perlindungan Khusus Anak (PPA) bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak dalam situasi dan kondisi tertentu, serta memastikan mereka mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan tumbuh kembang mereka. Program ini mencakup kegiatan koordinasi perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak; advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak; dan kampanye perlindungan perempuan dan anak di sekolah. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) sebesar 69,90 pada akhir periode RPJMD.

B. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

   Tata kelola pemerintahan desa adalah proses pengelolaan dan pengawasan sumber daya serta kebijakan di tingkat desa oleh pemerintah desa, yang bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat desa. Tata kelola yang baik di desa melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuan pemerintahan desa yang *good governance*. Program ini diarahkan melalui kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa; Pembinaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar Desa; Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Pedesaan; Fasilitasi dan Koordinasi BUMDes, BUMDesma, dan Lembaga Kerjasama Desa; Fasilitasi Penyusunan Prodeskel, Penyusunan Regulasi terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa; Penyediaan Data BPD se-Kabupaten; Pembinaan BPD; fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa; serta Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Peserta ke Tingkat Provinsi.Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Desa yang Tertib Administrasi sebesar 100%; Persentase Bumdesma Mandiri dan kerjasama desa yang aktif sebesar 21,75% di akhir periode RPJMD.

2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

   Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Lembaga kemasyarakatan, seperti RT/RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPM, memiliki fungsi penting dalam penampungan aspirasi masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Program ini diarahkan melalui kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna); Fasilitasi Lembaga RT RW; Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan Posyandu 6 SPM; Pembinaan dan pengembangan pasar desa; Pembinaan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; Fasilitasi penyelenggaraan TTG; Fasilitasi kegiatan TMMD; Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; serta Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2030 dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan: Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak, kemandirian desa, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
					Indeks Perlindungan Anak (IPA)		
					Persentase Desa Mandiri		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
S1, Meningkatnya kualitas manusia Indikator kinerja : Indeks Pembangunan Manusia		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		
					Indeks Perlindungan Anak (IPA)		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Kabupaten	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Meningkatnya Anggaran Responsif Gender (ARG) tingkat kabupaten	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksanaya Peningkatan Kapasitas di Sektor Ipoleksosbud pada Organisasi Wanita	Jumlah Organisasi Wanita yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas di Sektor Ipoleksosbud	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
						Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi kewenangan kabupaten/kota	
				Terfasilitasinya Organisasi Wanita Kewenangan Kabupaten	Jumlah Organisasi wanita kewenangan kabupaten yang terfasilitasi	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Sub kegiatan Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Perlindungan	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Sub kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
						Sub kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengembangan pada Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub kegiatan Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas keluarga		Hasil Penilaian PUSPAGA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Terlaksananya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Terlaksananya kegiatan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	
						Sub kegiatan Pendampingan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak lingkup daerah kabupaten/ kota yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak lingkup daerah kabupaten/ kota yang dilaksanakan	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kta kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan kabupaten/kota	
				Terlaksananya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sesuai standar	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Tertangani	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
						Sub kegiatan Layanan pendampingan korban bagi anak korban kekerasan tingkat kabupaten/kota	
S4, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Indikator kinerja : Laju Pertumbuhan Ekonomi		Meningkatnya kemandirian desa			Persentase Desa Mandiri		
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatn. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Terlaksananya pemberdayaan dan fasilitasi dalam peningkatan kapasitas pada lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
						Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
						Sub kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
						Sub kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
						Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	
						Sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa		1. Persentase Desa yang Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				1. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Desa	1. Jumlah Desa yang Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	
						Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
						Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
						Sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
						Sub kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
						Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
						Sub kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	
						Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
						Sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
						Sub kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			2. Meningkatnya kerja sama desa		2. Persentase Bumdesma Mandiri dan Kerja Sama Desa yang Aktif	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				2. Terlaksanya Bumdes/ Bumdesma Maju dan kerjasama desa yang aktif	2. Persentase Desa yang Melaksanakan Kerjasama Antar Desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	
						Sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	
S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Indikator kinerja : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	
						Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber:DPPPPAPMDKabupatenPurworejo,2025

Tabel 4.2.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak, kemandirian desa, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	65,36	70,45		72,89		72,89		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,263	0,262 - 0,243		0,260 - 0,232		0,258 - 0,221		0,257 - 0,210		0,255 - 0,200		0,255 - 0,200			
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,11	95,38		95,39		95,41		95,42		95,43		95,43			
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	0	65,15		65,74		66,32		66,91		67,5		67,5			
			Persentase Desa Mandiri	%	25,8	26,01		26,23		26,44		26,44		26,65		26,65			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	65,36	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						4.613.636.814		4.659.773.000		4.439.604.000		4.439.604.000		4.439.604.000				
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	4.613.636.814	100	4.659.773.000	100	4.439.604.000	100	4.439.604.000	100	4.439.604.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	38.450.800	7	43.000.000	7	38.950.800	7	39.500.000	7	43.000.000	35			
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	34.783.100	22	37.000.000	22	34.783.100	23	35.000.000	22	37.000.000	111			
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	22	3.667.700	22	5.500.000	22	3.667.700	22	4.000.000	22	5.500.000	110			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.08.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	5			
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	36	45	4.054.947.214	45	4.033.946.200	45	3.889.323.315	45	3.887.921.000	45	3.842.924.000	225			
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	37	34	4.048.408.314	40	4.026.446.200	38	3.882.784.415	36	3.880.421.000	34	3.835.424.000	182			
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	44	6.538.900	44	7.500.000	44	6.538.900	44	7.500.000	44	7.500.000	220			
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0		11	500.000	11	500.000	11	500.000	11	500.000	43			
2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	11	500.000	11	500.000	11	500.000	11	500.000	55			
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	0		17	500.000	17	500.000	17	500.000	17	500.000	68			
2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	17	500.000	17	500.000	17	500.000	17	500.000	85			
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	6	8	104.397.200	8	112.497.000	8	101.000.000	8	101.000.000	8	112.497.000	40			
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3	3.750.000	3	4.500.000	3	2.500.000	3	2.500.000	3	4.500.000	15			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	16	3.256.500	16	3.700.000	16	2.500.000	16	2.500.000	16	3.700.000	80			
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	11	1	35.490.000	1	36.197.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	36.197.000	5			
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	3	2.499.000	3	3.200.000	3	1.500.000	3	1.500.000	3	3.200.000	15			
2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	6	1.248.700	6	1.400.000	6	1.500.000	6	1.500.000	6	1.400.000	30			
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	12	1.000.000	12	500.000	12	500.000	12	1.000.000	60			
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	58.153.000	12	62.000.000	12	62.000.000	12	62.000.000	12	62.000.000	60			
2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	10			
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	2	1	6.513.000	10	50.000.000	0		0		5	30.000.000	16			
2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	0	0	5	30.000.000	0	0	0	0	5	30.000.000	24			
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1	6.513.000	5	20.000.000	0	0	0	0	0	0	21			
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	24	130.145.600	24	130.146.800	24	130.146.885	24	131.000.000	24	131.000.000	120			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	53.921.600	12	53.922.800	12	53.922.885	12	54.000.000	12	54.000.000	60			
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	76.224.000	12	76.224.000	12	76.224.000	12	77.000.000	12	77.000.000	60			
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	5	279.183.000	5	289.183.000	5	279.183.000	5	279.183.000	5	279.183.000	25			
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	1	39.950.000	1	39.950.000	1	39.950.000	1	39.950.000	1	39.950.000	5			
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	15	124.390.000	15	124.390.000	15	124.390.000	15	124.390.000	15	124.390.000	75			
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	42	43	30.260.000	43	30.260.000	43	30.260.000	43	30.260.000	43	30.260.000	215			
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4	72.383.000	5	82.383.000	5	72.383.000	5	72.383.000	4	72.383.000	23			
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	7	12.200.000	7	12.200.000	9	12.200.000	10	12.200.000	10	12.200.000	43			
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	0	65,15		65,74		66,32		66,91		67,5		67,5			
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	73,18	73,58		73,98		74,38		74,78		75,22		75,22			
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	62,87	66,07		67,06		68,06		69,05		70,05		70,05			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						983.831.100		1.244.894.000		983.831.000		999.376.000		1.015.165.000				
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Kabupaten	%	13,88	14	272.893.900	14,2	439.295.000	14,3	272.894.000	14,4	277.206.000	14,5	281.585.000	14,5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kabupaten Purworejo	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender (ARG) tingkat kabupaten	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Perangkat daerah	41	43	42.709.300	43	91.242.800	43	45.000.000	43	46.000.000	43	50.000.000	43			
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	1	1	42.709.300	1	91.242.800	1	45.000.000	1	46.000.000	1	50.000.000	5			
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Peningkatan Kapasitas di Sektor Ipoleksosbud pada Organisasi Wanita	Jumlah Organisasi Wanita yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas di Sektor Ipoleksosbud	Organisasi	0	34	11.672.900	34	38.052.200	34	12.000.000	34	12.000.000	34	13.000.000	34			
2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang	0	0	0	40	20.000.000	0	0	0	0	0	0	40			
2.08.02.2.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	0	60	11.672.900	60	18.052.200	60	12.000.000	60	12.000.000	60	13.000.000	300			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Organisasi Wanita Kewenangan Kabupaten	Jumlah Organisasi wanita kewenangan kabupaten yang terfasilitasi	Organisasi	2	3	218.511.700	3	310.000.000	3	215.894.000	3	219.206.000	3	218.585.000	3			
2.08.02.2.03.0007	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	2	3	218.511.700	3	310.000.000	3	215.894.000	3	219.206.000	3	218.585.000	3			
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani	%	100	100	370.445.700	100	429.091.000	100	370.446.000	100	376.299.000	100	382.244.000	100	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kabupaten Purworejo	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	kegiatan	1	0		1	25.000.000	0		0		1	20.000.000	5			
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	16	0	0	16	25.000.000	0	0	0	0	16	20.000.000	16			
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Perlindungan	%	100	100	282.287.700	100	315.933.000	100	282.288.000	100	288.141.000	100	274.086.000	100			
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	89	55	135.902.700	60	169.548.000	60	135.903.000	60	141.756.000	60	127.701.000	295			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0	20	146.385.000	20	146.385.000	20	146.385.000	20	146.385.000	20	146.385.000	100			
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengembangan pada Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan	Lembaga	0	16	88.158.000	16	88.158.000	16	88.158.000	16	88.158.000	16	88.158.000	16			
2.08.03.2.03.0007	Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	Orang	0	16	88.158.000	16	88.158.000	16	88.158.000	16	88.158.000	16	88.158.000	16			
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga	Hasil Penilaian PUSPAGA	Angka	215	225	14.232.200	230	20.429.000	235	14.232.000	240	14.457.000	245	14.685.000	245	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kabupaten Purworejo	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan	Lembaga	0	1	14.232.200	1	20.429.000	1	14.232.000	1	14.457.000	1	14.685.000	1			
2.08.04.2.02.0007	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga	0	16	14.232.200	16	20.429.000	16	14.232.000	16	14.457.000	16	14.685.000	16			
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	61,54	61,7	134.182.300	61,78	157.100.000	61,86	134.182.000	61,94	136.302.000	62	138.456.000	62	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kabupaten Purworejo	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan	kegiatan	0	2	134.182.300	2	157.100.000	2	134.182.000	2	136.302.000	2	138.456.000	2			
2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	106	106	43.223.400	100	48.000.000	100	44.000.000	100	44.000.000	100	45.000.000	100			
2.08.06.2.02.0009	Pendampingan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	1.135	150	90.958.900	150	109.100.000	150	90.182.000	150	92.302.000	150	93.456.000	150			
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. eksploitasi. penelantaran. perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	69,3	69,5	192.077.000	69,6	198.979.000	69,7	192.077.000	69,8	195.112.000	69,9	198.195.000	69,9	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kabupaten Purworejo	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak lingkup daerah kabupaten/ kota yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak lingkup daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	kegiatan	0	1	108.322.000	2	115.224.000	2	108.322.000	2	111.357.000	2	114.440.000	9			
2.08.07.2.01.0006	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	0	0	0	1	6.902.000	0	0	1	3.035.000	1	6.118.000	1			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota	Kegiatan	0	1	108.322.000	1	108.322.000	1	108.322.000	1	108.322.000	1	108.322.000	1			
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sesuai standar	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Tertangani	%	0	100	83.755.000	100	83.755.000	100	83.755.000	100	83.755.000	100	83.755.000	100			
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi anak korban kekerasan tingkat kabupaten/kota	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban tingkat kabupaten/kota	Orang	0	50	83.755.000	50	83.755.000	50	83.755.000	50	83.755.000	50	83.755.000	50			
3	Meningkatnya kemandirian desa		Persentase Desa Mandiri	%	25,8	26,01		26,23		26,44		26,44		26,65		26,65			
02.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						8.776.737.000		8.943.377.000		8.776.738.000		8.812.022.000		8.951.251.000				
02.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kerja sama desa	Persentase Bumdesma Mandiri dan Kerja Sama Desa yang Aktif	%	19,19	20,04	6.619.659.100	20,47	6.715.217.000	20,9	6.619.660.000	21,32	6.620.862.000	21,75	6.725.471.000	21,75	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa yang Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Desa	%	100	100		100		100		100		100		100	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Purworejo	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Desa	469	469	6.619.659.100	469	6.715.217.000	469	6.619.660.000	469	6.620.862.000	469	6.725.471.000	469			
		Terlaksananya Bumdes/ Bumdesma Maju dan kerjasama desa yang aktif	Persentase Desa yang Melaksanakan Kerjasama Antar Desa	%	19,19	20,04		20,47		20,9		21,32		21,75		21,75			
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	6.911.300	1	10.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1	1	6.029.127.900	1	5.955.739.000	1	6.119.821.500	1	6.110.523.500	1	6.215.132.500	1			
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	469	469	40.851.800	469	42.000.000	469	40.000.000	469	40.000.000	469	40.000.000	469			
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	1	26.612.900	1	80.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1			
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	1	341	157.768.300	341	223.784.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1			
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	1	1	2.144.800	1	7.460.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1			
2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	60.004.000	1	62.500.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1			
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	1	34.207.800	1	35.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000	1			
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	469	469	34.691.800	469	50.000.000	469	40.000.000	469	40.000.000	469	40.000.000	469			
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	12	29	227.338.500	40	238.734.000	50	227.338.500	60	227.338.500	70	227.338.500	70			
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
02.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	97,62	98,09	2.157.077.900	98,19	2.228.160.000	98,76	2.157.078.000	99,32	2.191.160.000	100	2.225.780.000	100	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Purworejo	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dalam peningkatan kapasitas	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Lembaga	6	6	2.157.077.900	6	2.228.160.000	6	2.157.078.000	6	2.191.160.000	6	2.225.780.000	6			
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	6	6	59.690.800	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6			
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	5.338.900	1	5.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	1			
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	30.748.900	1	54.303.500	1	25.221.500	1	19.303.500	1	41.923.500	1			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1	1.786.949.100	1	1.788.856.500	1	1.788.856.500	1	1.788.856.500	1	1.788.856.500	1			
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	274.350.200	1	320.000.000	1	280.000.000	1	320.000.000	1	330.000.000	1			
Jumlah							**14.374.204.914**		**14.848.044.000**		**14.200.173.000**		**14.251.002.000**		**14.406.020.000**				

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan kinerja	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyusunan dokumen data dasar pembangunan	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai selama 12 bulan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyusunan Dokumen administrasi kepegawaian	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan/ penggandaan	
			Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan bahan/ material	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu dalam kurun waktu satu tahun	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan/ mesin lainnya	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana/ prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana/ prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan/ mesin lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rakor Pengarusutamaan Gender (PUG), Pelatihan PPRG, Rapat Penerimaan Penganugerahan Ekapraya (PPE), Fasilitasi dan Monev GAP GBS OPD, Rakor Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), fasilitasi kecamatan berdaya	
			Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
			Peningkatan Kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Pembekalan Perempuan di Bidang Politik	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	Fasilitasi Kegiatan organisasi wanita 1. Dharma Wanita Kab. Purworejo 2. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Purworejo 3. Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini (Serat Kartini)	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rakor Pencegahan Kekerasan Keluarga Rentan, Sosialisasi Pembentukan PATBM di Desa, Pelatihan Konseling Kader	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Menerima laporan pengaduan langsung dan tidak langsung, Pelayanan Penjangkauan, Pelayanan Penampungan Sementara, Pelayanan Pendampingan Korban, Gelar kasus, mediasi, Layanan Pengelolaan kasus	
			Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban kekerasan dan mediasi	
			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi penguatan lembaga penyedia layanan	
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga, Rapat Koordinasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	1. Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak dan Pekerja Anak 2. Sosialisasi Sekolah Ramah Anak / Konvensi Hak Anak (KHA) 3. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) 4. Kabupaten Layak Anak : Rakor Tim KLA 5. Evaluasi Kecamatan/ Desa Layak Anak	
			Pendampingan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	1. Fasilitasi Kegiatan Rembugan Bocah Purworejo dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Anak Kabupaten Purworejo (Forkare) 2. Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Anak Kabupaten Purworejo (Forkare) 3. Penyuluhan Forkare ke sekolah	
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. eksploitasi. penelantaran. perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
			Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan pencegahan KTA	Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan pencegahan KTA	
			Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kta kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan kabupaten/kota	1. Pelatihan Trust and safety trainning internet aman 2. Kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak di sekolah	
			Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Layanan pendampingan korban bagi anak korban kekerasan tingkat kabupaten/kota	1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat 2. Pelayanan Penjangkauan 3. Pelayanan Pendampingan Korban 4. Gelar Kasus 5. Mediasi 6. Pelayanan Penampungan Sementara	
7	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan desa	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa		
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Sosialisasi Bantuan Gubernur tahun 2026 dan Banbup 2026, Sosialisasi Penyusunan LPJ Bantuan Gubernur tahun 2026 dan Banbup, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Bantuan Gubernur tahun 2026 dan Bantuan Bupati 2026	
				Sosialisasi Bangub 2026 tingkat Prop Jateng, Rakor Percepatan Pencairan Bangub tahun 2026 tingkat Prop Jateng, Pengiriman berkas pencairan Bangub 2026 dan LPJ Bangub 2025	
8	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa 2. Meningkatnya kerja sama desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa		
			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rakor Camat/Sekcam/ Kasi Pemerintahan Kecamatan, TAPM//Korcam PD untuk Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi/Juknis baru, koordinasi pelaksaaan program kerja, Updating data personil Aparatur Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Penyaluran Dana Transfer Desa (DD, ADD, PDRD, Bankeu Siltap Staf, Insentif Tambahan DD), Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kades dan Perangkat Desa, Penyusunan Regulasi yang mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Desa Anti Korupsi	
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kades dan Perangkat Desa, pelayanan konsultasi pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Desa, pemberian persetujuan/penolakan Bupati untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap kinerja perangkat desa	
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Updating data Pengurus Bumdes se Kabupaten, Pemeringkatan Status Bumdes, Pembinaan Manajemen Pengelolaan Bumdes, Fasilitasi kegiatan Pameran produk Bumdes	
				Rakor Pengembangan Kawasan Perdesaan tingkat Kabupaten, Monitoring dan evaluasi ke Kawasan yang sudah terbentuk, Pembekalan Mahasiswa KKN, Monitoring dan evaluasi ke Desa tempat pelaksanaan KKN	
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Penyusunan Regulasi terkait Pilkades dan Pilkades PAW, Fasilitasi Proses Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kades	
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Updating data (pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan data dan informasi Prodeskel, Status Desa	
			Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Fasilitasi penyusunan Perbup yang mengatur kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Inventarisasi Aset Desa se Kabupaten, Pelatihan SiPades. Fasilitasi ijin Tukar Menukar TKD, Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Aset Desa	
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Tersedianya data pengurus BPD dan pembinaan anggota BPD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Penentuan Titik Koordinat dan BA Kesepakatan serta Peta 12 Batas Desa di Kecamatan Grabag, Verifikasi Pembuatan Peta Desa dengan BIG, Perbup Penetapan dan Penegasan Batas Desa,	
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Updating data perkembangan desa pada aplikasi Epdeskel, Fasilitasi kegiatan Lomba desa tingkat kabupaten dan propinsi	
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatn. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	- Peningkatan mutu Kader Posyandu - Peran aktif KPMD dalam pembangunan partisipatif - Fasilitasi insentif RT dan RW	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pembinaan/bintek pengurus pasar desa	
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Bintek TTG, Seleksi TTG Kategori Unggulan, TTG Kategori Inovasi dan TTGKategori Posyantekdes Berprestasi tingkat kabupaten, Tk. Provinsi dan Tk. Nasional, Mengikuti Gelar TTG Nasional	
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Bulan Bhakti Gotong Royong (Pencanangan Upacara BBGRM) Fasilitasi kegiatan TMMD (Sosialisasi, Penyuluhan,Pelaksanaan pembukaan dan penutupan TMMD)	
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan mutu kader PKK Tk. Kecamatan dan Desa Memantau, membina dan memverifikasi kegiatan PKK di Kecamatan dan Desa	

Sumber:DPPPPAPMDKabupatenPurworejo,2025

4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah

Arah kebijakan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 disusun sebagai acuan bagi penyusunan tema 5 (lima) lima tahunan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Purworejo. Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 disusun dengan mengacu kepada arah kebijakan di dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan arah kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 untuk Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo akan dikembangkan sebagai pusat kegiatan pertanian, perikanan dan pariwisata berdasarkan arah kebijakan kewilayahan Provinsi Provinsi Jawa Tengah.

a. Dukungan terhadap Asta Cita

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Penjangkauan, pemberian perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan	PPPA	DPPPAPPMD

Sumber:DPPPPAPMDKabupatenPurworejo,2025

b. Dukungan terhadap Program Nasional

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Terkait
1	Penanggulangan kemiskinan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Permasdes	DPPPAPMD
	a. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		
			Monitoring dan evaluasi Bumdesma LKD, Fasilitasi kerjasama Desa dengan Desa, kerjasama Desa dengan perusahaan dan kerjasama Desa dengan Universitas/KKN	Permasdes	DPPPAPMD
		Program Perlindungan Perempuan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten	PPPA	DPPPAPMD
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Permasdes	DPPPAPMD

Sumber:DPPPPAPMDKabupatenPurworejo,2025

c. Dukungan terhadap Program Delegasi Provinsi

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak	PPPA	DPPPAPMD
2	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Layanan rumah perlindungan	PPPA	DPPPAPMD
3	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa	Permasdes	DPPPAPMD
4	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan	PPPA	DPPPAPMD
5	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Fasilitasi peningkatan kawasan perdesaan (kerjasama antar desa atau kerja sama dengan pihak ketiga)	Permasdes	DPPPAPMD
		Fasilitasi kegiatan BUMDesma	Permasdes	DPPPAPMD
6	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Permasdes	DPPPAPMD
		Fasilitasi pemerintah desa dalam peningkatan desa mandiri energi		
7	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Pemberdayaan wanita mandiri	PPPA	DPPPAPMD

Sumber:DPPPPAPMDKabupatenPurworejo,2025

d. Dukungan terhadap Kegiatan Unggulan Daerah/Pitulungan

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Sejahtera Wargane	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Perangkat Daerah.	Semua Sub Kegiatan OPD dapat di PPRGkan	PPPA	DPPPAPMD
		Pemberian bantuan hukum, pendidikan, pembinaan, dan pengembangan organisasi perempuan dan perempuan difabel.	Pemberian bantuan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan	PPPA	DPPPAPMD
		Membentuk lembaga/forum/ satuan tugas yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat desa/ kelurahan.	Optimalisasi Pembentukan RPPA di Kecamatan Berdaya	PPPA	DPPPAPMD

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
		Penguatan koordinasi, kerja sama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.	Fasilitasi penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak yang berjenjang dari pemulihan korban secara berkelanjutan dan menyediakan akses rujukan	PPPA	DPPPAPMD
		Pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penanganan kasus kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	PPPA	DPPPAPMD
2	Rame Pasare	Hilirisasi hasil penelitian/ penerapan teknologi tepat guna.	1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan tekhnis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG kepada masyarakat 2. Melaksanakan lomba TTG dan pemenang juara pertama diusulkan mengikuti lomba di tingkat Provinsi	Permasdes	DPPPAPMD

Sumber: DPPPPAPMD Kabupaten Purworejo,2025

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

a. Penentuan Indikator dan Target Kinerja

Penentuan indikator dan target kinerja dalam penyelenggaraan bidang urusan adalah proses menetapkan ukuran keberhasilan dan target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi atau instansi, baik di tingkat daerah maupun kementerian/lembaga. Indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur, sedangkan target kinerja adalah angka kuantitatif yang ingin dicapai dari indikator tersebut. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 telah disusun indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam5 (lima) tahun mendatang dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sesuai tugas dan fungsi DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, sebagai berikut

1. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

   Indikator bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan dan anak, serta kualitas hidup mereka. Aspek penting dalam penyelenggaraan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai berikut:

   a. Pengarusutamaan Gender, integrasi perspektif gender dalam semua kebijakan dan program pembangunan

b. Penguatan Kelembagaan, peningkatan kapasitas lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

c.Peningkatan Kualitas Hidup, upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.

d.Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Program dan kegiatan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memberikan dukungan bagi korban.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, di mana perempuan dan anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri dan hidup sejahtera.

2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kabupaten mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, memperkuat kelembagaan desa, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Faktor sosial budaya juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi desa, misalnya adanya semangat gotong royong, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, dan tradisi yang mendukung kegiatan ekonomi dapat menjadi potensi untuk pertumbuhan desa. Kemitraan antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan usaha dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui kerja sama desa dan pembentukan kawasan perdesaan.Kualitas SDM yang baik, termasuk pendidikan dan keterampilan, sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. SDM yang berkualitas akan lebih produktif dan inovatif dalam mengelola sumber daya desa.

b. Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran.

Indikator kinerja dalam sebuah organisasi merupakan alat atau mediayang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan entitas organisasidalam mencapai tujuan dan sasarannya.Indikator kinerja yang baik akanmenghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baikdan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Indikator kinerjayang didukung oleh suatu sistem pengumpulan dan pengelolahan data yangkinerja yang memadahi, akan dapat memberikan arah organisasi pada hasilpengukuran yang handal realliable mengenai hasil apa saja yang telahdiperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja sebenarnya tidakhanya dapat digunakan pada saat penyusunan laporanpertanggungjawaban saja, namun indikator kinerja juga dapat menjadikomponen yang sangat penting pada saat perencanaan kinerja.Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alatukur yang akan yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencanayang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saatmerencanakan kinerja pada saat

merencanakan kinerja akan lebihmeningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektifkeberhasilannya.

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,29	Tujuan PD
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,37	95,38	95,39	95,41	95,42	95,43	Tujuan PD
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	64,56	65,15	65,74	66,32	66,91	67,5	Tujuan PD
4	Persentase Desa Mandiri	Persentase	25.91	26.01	26.23	26.44	26.44	26.65	Tujuan PD
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Tujuan PD
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	73,38	73,58	73,98	74,38	74,78	75,22	Sasaran PD
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	64,56	65,15	65,74	66,32	66,91	67,5	Sasaran PD
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persentase	65,07	66,07	67,06	68,06	69,05	70,05	Sasaran PD
9	Persentase Desa Mandiri	Persentase	25.91	26.01	26.23	26.44	26.44	26.65	Sasaran PD
10	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Sasaran PD

Sumber: DPPPPAPMD Kabupaten Purworejo, 2025

Indikator tujuan dan sasaran yang mempengaruhi pencapaian kinerja penyelenggaraan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, sebagai berikut :

A. Indikator tujuan :

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

   Ukuran yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan keterwakilan politik), serta partisipasi dalam pasar kerja. Nilai IKG berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar antara laki-laki dan perempuan. IKG digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana ketimpangan gender berdampak pada pencapaian pembangunan manusia dan memberikan gambaran tentang keberhasilan program-program pengarusutamaan gender. Dengan kata lain, semakin rendah nilai IKG, semakin baik kesetaraan gender di suatu wilayah.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

   IPG mengukur pencapaian dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia: kesehatan (misalnya, harapan hidup), pendidikan (misalnya, tingkat melek huruf dan partisipasi sekolah), dan penguasaan sumber daya ekonomi (misalnya, pendapatan dan kesempatan kerja). IPG membantu dalam mengidentifikasi area-area

di mana ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah dan memberikan informasi yang diperlukan untuk merancang kebijakan dan program yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

   Indeks Perlindungan Anak (IPA)adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan perlindungan anak di Indonesia, mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA). IPA terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), yang masing-masing mencakup 4 klaster hak anak dan 1 klaster perlindungan khusus. IPA bertujuan sebagai tolok ukur bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan perlindungan anakserta menciptakan sistem yang terintegrasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) terdiri dari dua komponen utama, sebagai berikut :

   a. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA): Menggambarkan capaian pemenuhan hak-hak anak, yang mencakup empat klaster:
      1. Klaster 1 : Hak sipil dan Kebebasan
      2. Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
      3. Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
      4. Klaster 4 : Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang
   b. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) : Menggambarkan capaian perlindungan khusus anak dari kekerasan dan diskriminasi

6. Persentase Desa Mandiri

   Persentase status desa mandiri adalah perbandingan jumlah desa yang berstatus mandiri dengan total desa di suatu wilayah (misalnya, kabupaten, provinsi, atau bahkan skala nasional). Ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak desa dalam wilayah tersebut yang telah mencapai tingkat kemandirian tertinggi.Proporsi desa-desa yang mencapai tingkat kemandirian tertinggi dalam pembangunan desa, diukur berdasarkan Indeks Desa.Desa mandiri adalah desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kuat, serta pemerintahan yang efektif dan partisipatif.Persentase ini menunjukkan sejauh mana suatu wilayah atau daerah telah berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

   Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

B. Indikator sasaran :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

   IDG bertujuan untuk mengukur sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, termasuk

keterlibatan dalam posisi pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan pendapatan. IDG yang tinggi menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses dan kesempatan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan dibandingkan dengan IDG yang rendah.

6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
   Persentase jumlah perempuan usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total jumlah penduduk perempuan usia kerja. Ini adalah indikator penting yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi.
7. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
   Indeks Perlindungan Anak (IPA)adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan perlindungan anak di Indonesia, mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA). IPA terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), yang masing-masing mencakup 4 klaster hak anak dan 1 klaster perlindungan khusus. IPA bertujuan sebagai tolok ukur bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan perlindungan anakserta menciptakan sistem yang terintegrasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) terdiri dari dua komponen utama, sebagai berikut :
   a. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA): Menggambarkan capaian pemenuhan hak-hak anak, yang mencakup empat klaster:
      1. Klaster 1 : Hak sipil dan Kebebasan
      2. Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
      3. Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
      4. Klaster 4 : Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang
   b. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) : Menggambarkan capaian perlindungan khusus anak dari kekerasan dan diskriminasi
8. Persentase Desa Mandiri
   Persentase status desa mandiri adalah perbandingan jumlah desa yang berstatus mandiri dengan total desa di suatu wilayah (misalnya, kabupaten, provinsi, atau bahkan skala nasional). Ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak desa dalam wilayah tersebut yang telah mencapai tingkat kemandirian tertinggi.Proporsi desa-desa yang mencapai tingkat kemandirian tertinggi dalam pembangunan desa, diukur berdasarkan Indeks Desa.Desa mandiri adalah desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kuat, serta pemerintahan yang efektif dan partisipatif.Persentase ini menunjukkan sejauh mana suatu wilayah atau daerah telah berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

9. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,29	BIDANG PPPA	IUP
2	Persentase Desa Mandiri	%	25,91	26,01	26,23	26,44	26,44	26,65	BIDANG APD, BIDANG PKD, BIDANG PM	IUP
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	65,07	66,07	67,06	68,06	69,05	70,05	BIDANG PPPA	IUP
4	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	14	14	14,2	14,3	14,4	14,5	BIDANG PPPA	Permendagri No.18 Tahun 2020
5	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	BIDANG PPPA	Permendagri No.18 Tahun 2020
6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	per 100.000 jiwa	0,014	0,015	0,016	0,017	0,018	0,019	BIDANG PPPA	Permendagri No.18 Tahun 2020
7	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	BIDANG APD, BIDANG PKD	Permendagri No.18 Tahun 2020
8	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	25,59	26.01	26.23	26.44	26.65	26,86	BIDANG APD, BIDANG PKD	Permendagri No.18 Tahun 2020

Sumber:DPPPPAPMDKabupatenPurworejo,2025

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten PurworejoTahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana KerjaDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana StrategisDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana StrategisDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejosetiap tahun.
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c. KepalaDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana StrategisDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten PurworejoKabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra memuat tentang tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bapperida Kabupaten Purworejo. Selain itu Renstra juga berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran Perangkat daerah serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui sebagai berikut :

a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan dimulai dengan kegiatan orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja serta pengumpulan data dan informasi.

b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

c. Tahapan penetapan Renstra PD.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra K/L dan Renstra Provinsi. Selanjutnya, Renstra yang merupakan rencana jangka menengah dijabarkan melalui Rencana Tahunan / Rencana Jangka Pendek dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja).

Apabila diilustrasikan dengan gambar, Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1.2

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renstra yang dilakukan oleh Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Persiapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah meliputi:

   a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
   b) Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
   c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
   d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra

   Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD yang mencakup :

   a) Analisis gambaran pelayanan;
   b) Analisis permasalahan;
   c) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
   d) Analisis isu strategis;
   e) Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
   f) Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
   g) Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (f) serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

   Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

   a) Pendahuluan;
   b) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
   c) Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
   d) Tujuan dan Sasaran;
   e) Strategi dan Arah Kebijakan;

f) Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
g) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; serta
h) Penutup.

3. Penyusunan Rancangan Renstra

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah selanjutnya dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dengan hasil kesepakatan dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bapperida untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Hasil verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapperida serta dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi

rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

6. Penetapan

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapperida untuk diverifikasi paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila pada hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bapperida dapat menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapperida untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Bapperida menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Agenda Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kab. Purworejo

Tahun 2025 – 2029

NO	TAHAPAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah	Minggu ke-2 Februari 2025
2.	Penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah	Minggu ke-4 Maret 2025
3.	Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Minggu ke-3 April 2025
4.	Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah	Minggu ke-4 April 2025
5.	Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah	Minggu ke-2 Agustus 2025
6.	Verifikasi Rancangan Akhir Renstra	Minggu ke-3 Agustus 2025
7.	Penetapan Renstra Perangkat Daerah	Minggu ke-1 September 2025

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Memuat tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);

17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
30. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Seri D Nomor 13).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 adalah untuk penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan 5 (lima) tahunan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai

apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan.

Selengkapnya mengenai tujuan disusunnya Renstra sebagai berikut :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
2. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah serta Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 serta Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dukungan terhadap nasional provinsi dan kegiatan unggulan daerah serta indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWOREJO

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
   a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
   a. Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan; dan
   b. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
4. Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran, membawahi :
   a. Seksi Angkutan;
   b. Seksi Pengelolaan Terminal; dan
   c. Seksi Perparkiran
5. Bidang Pengujian Kendaraan dan Perbengkelan, membawahi :
   a. Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor; dan
   b. Pelaksana Administrasi Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PURWOREJO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 128 TAHUN 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo

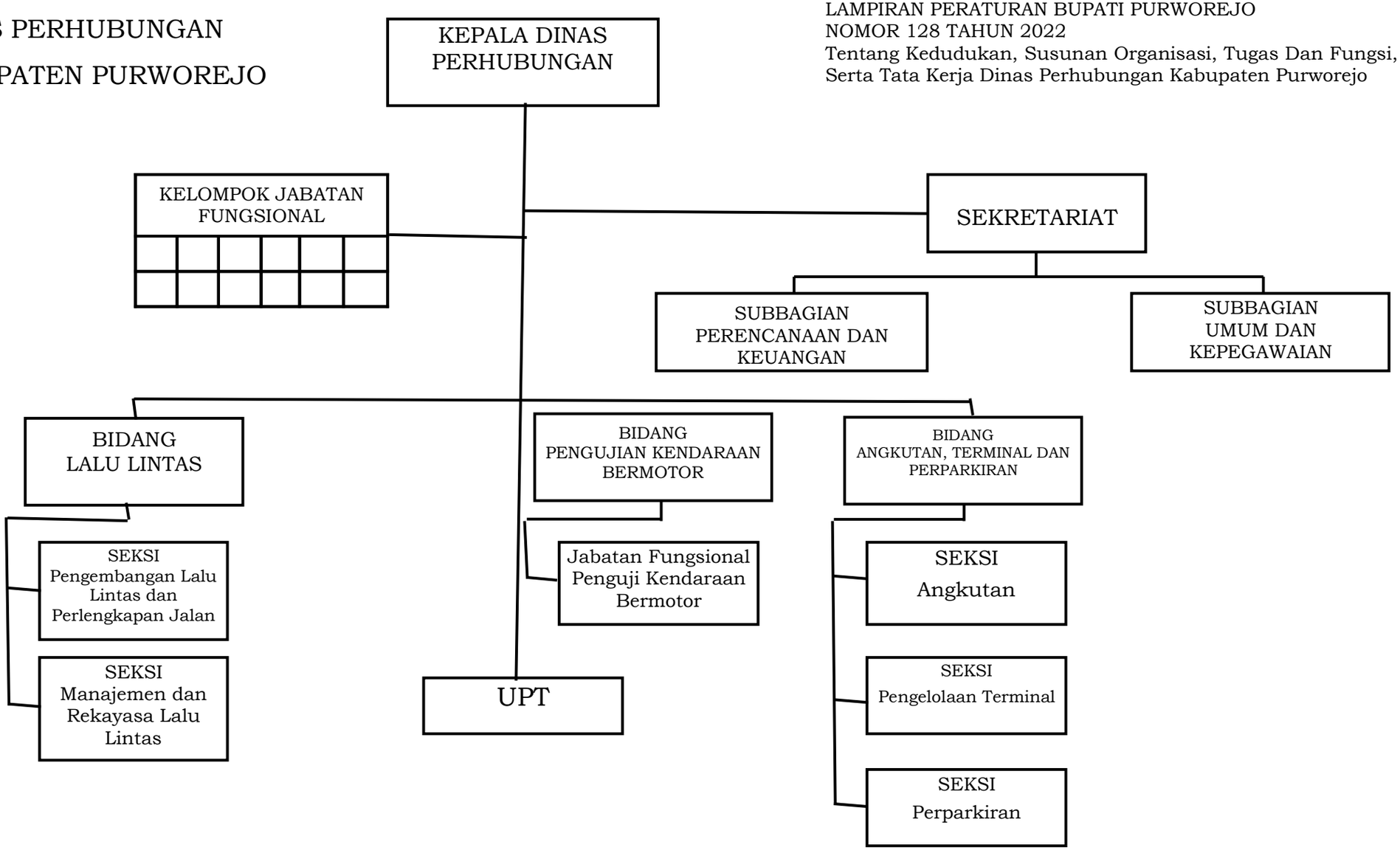

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

   Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, yang meliputi lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, serta angkutan terminal dan perparkiran.

2. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

   a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
   b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
   c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang perhubungan yang meliputi bidang bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
   d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
   e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
   f. pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
   g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
   h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perhubungan; dan
   i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Tata Kerja

Untuk mempermudah pembagian tugas dan tanggung jawab, Dinas Perhubungan membawahkan 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) bidang yang masing – masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda – beda.

Adapun Sekretariat dan Bidang tersebut adalah :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat membawahkan :

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, menyusun perjanjian kinerja; menyelenggarakan administrasi keuangan dan menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah kewenangan DINHUB serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi menyelenggarakan administrasi barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi umum, menyelenggarakan pengadaaan barang milik daerah, menyediakan jasa, menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah, dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

b. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang lalu lintas, yang meliputi Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten, dan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.

Dalam penyelenggaraan tugas Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten;
c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Persetujuan Hasil

Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten;

e. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinhub sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Lalu Lintas dan membawahkan:

1) Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan

Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan, yang meliputi:

a) menetapkan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten, yang meliputi:
   1. melaksanakan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
   2. menetapkan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
   3. mengendalikan pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten.

b) menyediakan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, yang meliputi:
   1. pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten;
   2. menyediakan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
   3. merehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan;
   4. merehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;

c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas jabatannya.

2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas ,yang meliputi :

a) melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten yang meliputi:
   1. menata manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
   2. melakukan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
   3. melakukan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
   4. melakukan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten;
   5. melaksanakan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten.

b) membuat persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kabupaten yang meliputi:
   1. menetapkan kebijakan tata kelola andalalin;
   2. meningkatkan kapasitas penilai andalalin;
   3. mengoordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin;
   4. mengawasi pelaksanaan rekomendasi andalalin.

c) audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan yang meliputi:
   1. meningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ;
   2. melakanakan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
   3. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan terminal;
   4. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten;
   5. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum.

d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas jabatannya.

c. Bidang Angkutan Terminal dan Perparkiran

Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang angkutan, terminal dan perparkiran, yang meliputi angkutan orang dan barang, pengelolaan terminal dan perparkiran.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang angkutan orang dan barang;
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengelolaan terminal ;
c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perparkiran ;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinhub sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran membawahkan:

1) Seksi Angkutan

   Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang angkutan orang dan barang, yang meliputi:

   a. menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
      1. menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
      2. mengendalikan dan mengawasi ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten;
   b. menetapkan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten:

1. merumuskan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten;
2. mensosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten.

c. menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
   1. melaksanakan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
   2. menetapkan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
   3. mengendalikan pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
   4. merumuskan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten;
   5. mensosialisasi dan menguji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten.

d. menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
   1. merumuskan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten;
   2. mensosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten.

e. menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
   1. memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten. dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

2. mengoordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten.

f. menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten:
   1. memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
   2. mengoordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten.

g. menetapkan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten:
   1. menganalisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
   2. menyediakan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
   3. mengendalikan dan mengawasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang angkutan, terminal dan perparkiran sesuai dengan tugas jabatannya.

2) Seksi Pengelolaan Terminal

Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang pengelolaan terminal, yang meliputi:

a) mengelola terminal penumpang tipe C:
   1. menyusun rencana pembangunan terminal penumpang tipe C;

2. membangun gedung terminal;
3. mengembangkan sarana dan prasarana terminal;
4. merehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung); dan
5. meningkatkan kapasitas SDM pengelola terminal tipe C.

b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran sesuai dengan tugas jabatannya.

3) Seksi Perparkiran

Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang perparkiran, yang meliputi:

a) menerbitkan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir:
   1. memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
   2. mengoordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten;

b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang angkutan, Terminal dan Perparkiran sesuai dengan tugas jabatannya.

d. Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor

Bidang Pengujian Kendaraan bermotor mempunyai tugas menyiapkan menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

a) melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor, meliputi :
   1. menyediakan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
   2. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor;

3. meregistrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor;
4. menyediakan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor;
5. mensosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor;
6. mengidentifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji;
7. memelihara sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor; mengoordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
8. menetapkan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor;
9. memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.

b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengujian Kendaraan dan Perbengkelan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengujian kendaraan bermotor;
b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinhub sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pengujian Kendaraan dan Perbengkelan, membawahkan:

a. Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
b. Pelaksana Administrasi Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

e. UPT

UPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinhub. (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan :

1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Perhubungan;
2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional;
3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah syarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. G*ood governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Non PNS	Jml
1	Kepala Dinas	0	1	0	0	0	0	1
2	Sekretariat	0	0	1	2	11	3	17
3	Bidang lalu Lintas	0	0	1	1	15	23	40
4	Bidang Pengujian Kendaraan dan Perbengkelan	0	0	1	0	3	0	4
5	Bidang Angkutan dan Terminal	0	0	1	3	11	11	26
6	Fungsional Penguji Kendaraan	0	0	0	0	6	0	6
7	Fungsional Pranata Komputer	0	0	0	0	3	0	3
	JUMLAH	0	1	4	6	49	37	97

Ket : Kondisi per Agustus 2025

Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan baik berstatus ASN dan Non ASN sebanyak 97 orang. Sekretariat memiliki pejabat eselon dan pegawai sebanyak 17 orang, berstatus PNS 14 orang dan tenaga non PNS 3 orang merupakan Tenaga Administrasi Analisis Data, Tenaga Jaga Malam dan Kebersihan. Sedangkan jumlah pejabat eselon dan pegawai pada Bidang Lalu Lintas sebanyak 40 orang, berstatus PNS 17 orang dan non PNS 23 orang yang terdiri dari petugas penjaga perlintasan sebidang, penjaga underpass dan pengemudi mobil derek. Bidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor jumlah pegawai sebanyak 4 orang yaitu berstatus PNS 4 orang. Jumlah pegawai pada Bidang Angkutan, terminal dan perparkiran PNS sebanyak 15 orang dan non PNS 11 orang. Tenaga fungsional yang ada

adalah 6 orang Fungsional penguji kendaraan dan 3 orang Fungsional Pranata Komputer.

Kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional Penguji Kendaraan. Di bagian pelayanan administrasi Pengujian kendaraan juga diperlukan peningkatan kemampuan personal dalam hal pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Pengujian. Dengan berkembangnya teknologi pada Traffic Light maka juga diperlukan SDM khusus untuk menangani ATCS yang saat ini belum ada.

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Dinas Perhubungan Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Uraian	Pangkat Golongan				Jml
		D	C	B	A	
1	Kepala Dinas					1
	Golongan IV	1				1
	Golongan III					
	Golongan II					
	Golongan I					
2	Sekretariat					9
	Golongan IV				1	1
	Golongan III	3	1	1		5
	Golongan II	1	1	1		3
	Golongan I					
3	Bidang Lalu Lintas					7
	Golongan IV				1	1
	Golongan III	1		1		2
	Golongan II	3	1			4
	Golongan I					
4	Bidang Pengujian Kendaraan dan Perbengkelan					1
	Golongan IV					
	Golongan III	1				1
	Golongan II					
	Golongan I					
5	Bidang Angkutan dan Terminal					7
	Golongan IV				1	1
	Golongan III		3	2		5
	Golongan II		1			1
	Golongan I					
6	Pejabat Fungsional					7
	Golongan IV					
	Golongan III			4	2	6
	Golongan II	1				1
	Golongan I					
7	PPPK Fungsional					28
	JUMLAH					60

Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo menempati kantor dengan alamat di Jalan Gajah Mada Km.7 No.2 Bayan Purworejo terdiri dari gedung kantor, gedung pengujian, tempat parkir dan halaman. Beberapa perlengkapan penunjang kinerja baik yang berada di Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut : Kendaraan dinas/operasional 4 unit, kendaraan operasional lalu lintas sebanyak 8 unit terdiri atas Kendaraan Patwal, Truck Crane, Truck Derek, dan Kendaraan Operasional Perlengkapan Jalan. Kendaraan roda 2 sebanyak 19 unit, Peralatan uji kendaraan 1 paket, serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya. Alat kelengkapan Jalan yang telah terpasang di wilayah Kabupaten Purworejo saat ini terdiri dari Traffic Light 26 lokasi (ATCS : 11 lokasi), Warning Light 82 unit, Pelican Crossing 3 lokasi, Rambu 2699 buah, RPPJ 215 buah, Cermin Tikungan 124 buah, 6.090 unit LPJU dan Halte 15 lokasi. Pemerintah Kabupaten Purworejo memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus. Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas mapun peralatan penunjang pekerjaan dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai.

Permasalahan pada asset, sarana dan prasarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil maupun keberadaan peralatan penunjang pekerjaan, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk (arsip).

2.1.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya yaitu Urusan Perhubungan.

Tabel 2.1 (T-C.23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Semester 1)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (Semester 1)	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
	Indikator Renstra 21-26																					
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																					
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,17%	81,5%	82,5%	83,5%	84,5%	86,5%	82,17%	83,03%	84,14%	83,89%	83,64%		100,00%	101,88%	101,99%	100,47%	98,98%	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																					
	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Urusan Perhubungan																					
	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat				29,61%	29,14%	32,00%	35,02%	38,14%	39,33%	27,81%	40,99%	32,89%	33,12%	32,31%		93,92%	140,67%	102,78%	94,57%	84,71%	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																					
	Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia				46,90%	47,82%	55,09%	62,47%	69,86%	73,19%	47,16%	49,52%	59,68%	61,66%	59,95%		100,55%	103,55%	108,33%	98,70%	85,81%	
	Persentase Penurunan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas				12,32%	10,47%	8,90%	7,57%	6,43%	5,47%	8,46%	32,45%	6,09%	4,57%	4,67%		145,63%	32,27%	146,14%	165,65%	137,69%	

Adapun capaian dari 2 Indikator Kinerja Program setiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun belum seluruhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan.

Selain itu, faktor pendukung pencapaian target indikator program diantaranya adanya pengadaan Alat Kelengkapan Jalan yang bersumber dari dana APBN maupun APBD Provinsi. Sedangkan beberapa indikator yang belum memenuhi target karena sumber dana hanya dari APBD saja, banyak ruas jalan yang semula dilalui angkudes tidak lagi dilalui angkudes sehingga berkurangnya juga penumpang angkutan umum dan tidak dilaksanakannya KIR kendaraan sehubungan dengan adanya biaya KIR yang gratis sehingga tidak adanya denda. Solusi yang akan dilakukan adalah pengusulan kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator RPJMD.

Indikator dengan predikat Tercapai yaitu Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dikarenakan tren turun sehingga apabila nilai lebih kecil dari target maka tercapai.

Faktor pendukung ketercapaian target diantaranya :

1. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.
2. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
3. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

Adapun faktor pendukung pencapaian yang Melebihi target pada indikator Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia dan Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas, diantaranya :

1. Adanya pengadaan Alat Perlengkapan Jalan yang bersumber dari dana APBN maupun APBD Provinsi.
2. Telah ada kesadaran dari beberapa Masyarakat dalam berkendara dan berlalu lintas sehingga menurunnya Tingkat kecelakaan lalu lintas di Jalan Kabupaten.

Sedangkan untuk indikator dengan predikat Tidak Tercapai pada indikator Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia

Faktor penyebab tidak tercapainya target diantaranya :

1. Adanya pengadaan Alat Perlengkapan Jalan pada tahun 2024 kurang maksimal di beberapa titik karena telah ada sedikit kesadaran Masyarakat mengenai ketertiban lalu lintas.
2. Banyak ruas jalan yang semula dilalui angkudes, dengan tidak beroperasinya beberapa angkudes maka ruas jalan tersebut tidak lagi dilalui angkudes sehingga menyebabkan penurunan penumpang.
3. Pelayanan KIR Kendaraan mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2024 biaya KIR Kendaraan gratis termasuk denda. Dikarenakan tidak adanya denda sehingga banyak Kendaraan yang tidak melakukan KIR. Untuk operasi di jalan dari Dinas Perhubungan harus bekerja sama dengan stakeholder terkait.

Rekomendasi Langkah yang akan ditempuh dalam pencapaian target diantaranya :

1. Perencanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan target, baik dari dana yang bersumber dari DAU, APBD Prov, DAK sesuai dengan kewenangannya maupun Sektoral Pusat dan Provinsi.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi Jaringan Trayek.
3. Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor secara rutin / berkala.
4. Melakukan perencanaan Program dan Kegiatan lebih baik untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 (T-C.24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (s/d Agustus)	2026	2021	2022	2023	2024	2025 (s/d Agustus)	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Urusan Perhubungan	12.934.732.696	22.344.956.658	23.485.872.049	27.182.526.787	23.611.358.063	-	12.514.160.276	20.235.472.944	22.070.456.955	24.230.064.039	10.083.808.129		97%	91%	94%	89%	43%	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	4.876.545.196	5.518.331.156	5.398.733.134	5.315.905.103	5.387.099.381	-	4.600.263.657	5.131.675.540	5.022.843.173	4.788.715.752	2.793.611.505	-	94%	93%	93%	90%	52%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.588.000	48.778.668	48.806.316	20.149.100	19.672.800		47.574.850	48.773.476	44.921.116	19.264.000	11.335.214		100%	100%	92%	96%	58%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	47.588.000	38.583.268	38.300.716	10.974.400	10.998.300		47.574.850	38.581.876	34.547.216	10.170.200	7.550.134		100%	100%	90%	93%	69%	
Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.562.000	1.395.700	1.766.300	1.641.200			1.562.000	1.393.700	1.763.600	337.470		0%	100%	100%	100%	21%	
Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-		1.762.000	1.050.000	1.766.300	1.641.200			1.762.000	1.049.800	1.723.300	318.600		0%	100%	100%	98%	19%	
Kordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		629.700	760.500	750.400	750.400			627.900	760.000	749.000	561.900		0%	100%	100%	100%	75%	
Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-		829.700	563.000	750.400	750.400			827.900	559.800	722.300	157.620		0%	100%	99%	96%	21%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		3.483.900	4.552.300	2.835.200	2.585.200			3.483.900	4.427.300	2.832.100	1.120.060		0%	100%	97%	100%	43%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.928.100	2.184.100	1.306.100	1.306.100			1.927.900	2.183.300	1.303.500	1.289.430		0%	100%	100%	100%	99%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.361.175.796	4.832.111.208	4.592.121.975	4.257.013.837	4.774.167.672		4.094.046.065	4.489.370.841	4.269.088.856	3.808.710.162	2.588.998.910		94%	93%	93%	89%	54%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.330.175.796	4.800.315.840	4.576.101.275	4.246.151.837	4.754.620.472		4.063.046.215	4.457.576.865	4.258.600.756	3.797.981.662	2.575.810.180		94%	93%	93%	89%	54%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.696.900	738.000	1.737.800	1.737.800			1.695.800	710.600	1.734.600	745.380		0%	100%	96%	100%	43%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31,000,000	30,098,468	15,282,700	9,124,200	17,809,400		30,999,850	30,098,176	9,777,500	8,993,900	12,443,350		100%	100%	64%	99%	70%	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			35,301,719	20,362,986	35,505,359				18,369,000	17,914,189			0%	0%	52%	88%	0%	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			35,301,719	20,362,986					18,369,000	17,914,189			0%	0%	52%	88%	0%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	128,605,000	248,057,500	182,491,100	138,425,060	104,559,100		128,605,000	223,851,400	163,548,240	135,315,717	63,237,792		100%	90%	90%	98%	60%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5,513,900	4,760,400	4,760,400				5,504,500	4,470,600	4,433,340		0%	0%	100%	94%	93%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7,378,700	6,518,900	4,395,300	4,395,300			7,378,700	6,503,800	3,680,700	3,527,780		0%	100%	100%	84%	80%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				70,245,000	65,250,000					69,802,500	33,357,600		0%	0%	0%	99%	51%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		10,310,000	11,640,000	7,519,600	3,250,200			10,103,900	8,815,800	7,445,900	2,332,802		0%	98%	76%	99%	72%	
Penyediaan Bahan/Material		9,093,300	8,059,800	5,932,300	3,699,600			9,093,300	7,839,300	5,785,300	3,684,940		0%	100%	97%	98%	100%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128,605,000	221,275,500	147,581,000	42,679,960	21,012,100		128,605,000	197,275,500	131,850,840	41,513,717	13,809,040		100%	89%	89%	97%	66%	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			3,177,500	2,892,500	2,191,500				3,034,000	2,617,000	2,092,290		0%	0%	95%	90%	95%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40,698,000	40,226,200	111,253,200	608,747,600	168,438,400		39,675,000	40,112,000	110,260,000	543,710,000			97%	100%	99%	89%	0%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				532,934,000						468,830,000			0%	0%	0%	88%	0%	
Pengadaan Mebel				11,108,000	74,018,500					11,000,000			0%	0%	0%	99%	0%	

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,698,000		111,253,200	64,705,600	94,419,900		39,675,000		110,260,000	63,880,000			97%	0%	99%	99%	0%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		40,226,200						40,112,000					0%	100%	0%	0%	0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170,328,800	157,984,380	172,431,624	159,349,520	143,566,050		162,263,030	149,789,378	165,536,300	156,557,285	90,716,589		95%	95%	96%	98%	63%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36,877,200						36,859,000						100%	0%	0%	0%	0%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87,600,000	87,600,000	90,000,000	89,498,520	96,921,050		81,913,030	81,733,586	84,807,476	87,506,062	55,617,701		94%	93%	94%	98%	57%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45,851,600	70,384,380	82,431,624	69,851,000	46,645,000		43,491,000	68,055,792	80,728,824	69,051,223	35,098,888		95%	97%	98%	99%	75%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128,149,600	191,173,200	256,327,200	111,857,000	141,190,000		128,099,712	179,778,445	251,119,661	107,244,399	39,323,000		100%	94%	98%	96%	28%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62,073,600	131,150,000	79,446,000	58,580,000	54,030,000		62,031,712	119,868,805	74,613,250	54,039,499	27,959,500		100%	91%	94%	92%	52%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,296,000	23,348,000	19,526,000	16,708,000	16,641,000		26,291,500	23,240,000	19,390,000	16,706,900	11,363,500		100%	100%	99%	100%	68%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	39,780,000	36,675,200	157,355,200	36,569,000	70,519,000		39,776,500	36,669,640	157,116,411	36,498,000	-		100%	100%	100%	100%	0%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	8,058,187,500	16,826,625,502	18,087,138,915	21,866,621,684	18,224,258,682	-	7,913,896,619	15,103,797,404	17,047,613,782	19,441,348,287	7,290,196,624		98%	90%	94%	89%	40%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5,306,015,600	12,131,112,052	10,474,300,276	15,952,060,964	13,038,536,617		5,208,117,784	10,808,453,109	9,789,867,262	14,229,494,483	4,481,087,755		98%	89%	93%	89%	34%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		5,886,731,900	3,881,058,850	9,256,455,400	6,258,003,900			4,598,409,100	3,356,927,794	7,778,997,259	179,254,150		0%	78%	86%	84%	3%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5,306,015,600	6,244,380,152	6,593,241,426	6,695,605,564	6,780,532,717		5,208,117,784	6,210,044,009	6,432,939,468	6,450,497,224	4,301,833,605		98%	99%	98%	96%	63%
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	160,000,000	308,824,016	2,988,599,864	255,250,250	411,612,020		151,739,980	308,555,854	2,964,864,381	247,308,065	78,482,011		95%	100%	99%	97%	19%
Pembangunan Gedung Terminal			2,742,881,500						2,733,687,150				0%	0%	100%	0%	0%
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	160,000,000	213,281,616	155,198,364				151,739,980	213,051,262	140,968,716				95%	100%	91%	0%	0%
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C				150,878,250	151,340,720					144,052,070	77,498,011		0%	0%	0%	95%	51%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang)		95,542,400	90,520,000	104,372,000	260,271,300			95,504,592	90,208,515	103,255,995	984,000		0%	100%	100%	99%	0%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1,350,639,600	2,973,176,176	3,502,248,712	3,996,995,160	3,632,937,600		1,329,179,800	2,611,423,540	3,205,947,112	3,334,792,646	2,140,489,482		98%	88%	92%	83%	59%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1,350,639,600	2,973,176,176	3,502,248,712	3,996,995,160	3,632,937,600		1,329,179,800	2,611,423,540	3,205,947,112	3,334,792,646	2,140,489,482		98%	88%	92%	83%	59%
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	663,916,000	360,204,490	275,031,308	305,380,370	217,135,219		650,114,600	355,990,843	262,832,128	298,326,298	73,335,592		98%	99%	96%	98%	34%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	440,754,000	38,967,850	36,977,300	62,843,710	68,967,519		433,595,700	38,332,400	33,192,000	60,135,990	-		98%	98%	90%	96%	0%
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	170,041,000	145,956,040	115,260,008	120,237,700	53,700,800		165,577,900	143,711,412	109,020,508	118,890,028	51,245,442		97%	98%	95%	99%	95%
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100,000,000	50,000,000	50,000,000	30,000,000			100,000,000	50,000,000	50,000,000	-		0%	100%	100%	100%	0%
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		10,855,000						10,848,836					0%	100%	0%	0%	0%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	48,121,000	53,041,600	53,701,000	53,108,800	57,820,700		45,191,000	52,004,195	52,000,320	51,850,280	19,356,200		94%	98%	97%	98%	33%
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5,000,000						5,750,000						115%	0%	0%	0%	0%

Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		11,384,000	19,093,000	19,190,160	6,646,200			11,094,000	18,619,300	17,450,000	2,733,950		0%	97%	98%	91%	41%
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	531,617,700	910,126,800	718,016,739	1,165,079,360	786,516,226		529,136,855	885,532,482	702,200,983	1,152,145,855	418,786,320		100%	97%	98%	99%	53%
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	506,461,000	645,000,000	659,615,339	834,066,460	734,271,826		503,989,755	641,125,283	650,033,083	828,346,255	399,747,270		100%	99%	99%	99%	54%
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		21,328,000	7,496,600	7,511,400	26,005,700			7,262,000	4,730,000	7,101,200	1,559,672		0%	34%	63%	95%	6%
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	25,156,700	30,998,800	25,196,000	29,830,400	26,238,700		25,147,100	30,998,800	25,037,900	29,728,500	17,479,378		100%	100%	99%	100%	67%
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		212,800,000	25,708,800	293,671,100				206,146,399	22,400,000	286,969,900			0%	97%	87%	98%	0%
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		10,000,000	7,861,200	7,040,000	4,535,300			2,250,000	7,772,000	6,662,100	1,800,070		0%	23%	99%	95%	40%
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin		10,000,000	7,861,200	7,040,000	4,535,300			2,250,000	7,772,000	6,662,100	1,800,070		0%	23%	99%	95%	40%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	22,978,000	111,594,000	98,766,900	161,496,380	128,394,700		22,660,000	110,058,200	95,040,300	150,899,400	94,141,894		99%	99%	96%	93%	73%
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	22,978,000	40,594,000	43,746,400	65,244,380	56,683,700		22,660,000	40,235,700	40,850,500	61,677,200	23,735,194		99%	99%	93%	95%	42%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		71,000,000	55,020,500	96,252,000	71,711,000			69,822,500	54,189,800	89,222,200	70,406,700		0%	98%	98%	93%	98%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23,020,600	21,587,968	22,313,916	23,319,200	4,591,000		22,947,600	21,533,376	19,089,616	21,719,440	2,073,500		100%	100%	86%	93%	45%
Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	23,020,600	21,587,968	22,313,916	23,319,200	4,591,000		22,947,600	21,533,376	19,089,616	21,719,440	2,073,500		100%	100%	86%	93%	45%

1. Target dan Realisasi Belanja untuk rasio antara anggaran dan realisasi anggaran cenderung tidak stabil. Dikarenakan tahun 2025 anggaran menurun disebabkan dengan adanya efisiensi. Untuk realisasi penurunan tahun 2024 sebesar 89% dikarenakan adanya sisa Tender Pengadaan.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah diantaranya :
   a. Adanya sisa tender pengadaan barang/jasa.
   b. Adanya kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan undangan dari pihak luar sehingga mempengaruhi pengelolaan anggaran belanja.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024 Dinas Perhubungan dengan menggunakan Indikator Renstra terbaru beserta analisisnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Rasio Konektivitas	71	73	73	73	74	Sesuai dengan realisasi trayek yang dilayani saat tahun tersebut
2	Penurunan Angka Kecelakaan	505	482	688	761	562	Capaian yang didapat dari pihak Kepolisian terkadang mengalami penurunan/peningkatan dikarenakan faktor kecelakaan tidak hanya dari alat perlengkapan jalan tetapi juga terkadang dari faktor manusia/ pengguna kendaraan
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	33,50	33,90	34,40	34,80	36,56	Pengadaan alat perlengkapan jalan sesuai dengan lokasi yaitu Jalan Kabupaten (PJU, rambu, cermin)
	Persentase Angkutan Umum, Terminal, dan Titik Parkir yang Tersedia	41,24	41,25	42,29	55,14	53,17	Terjadi penurunan pada tahun 2024 dikarenakan berkurangnya penumpang angkutan umum
	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana	71,16	70,76	87,03	79,42	71,84	Capaian yang tidak stabil dikarenakan biaya KIR kendaraan dan denda gratis serta kurang aktifnya melaksanakan operasi dan sosialisasi pada pengguna kendaraan di jalan

4	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	33,50	33,90	34,40	34,80	36,56	IUP
5	Rasio Konektivitas	71	73	73	73	74	
	Kinerja Lalu Lintas		0,37	0,44	0,05	0,32	Capaian tidak stabil dikarenakan kinerja lalu lintas disesuaikan dengan kebijakan yang ada di jalan (pengalihan arus atau event tertentu)

2.1.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kab. Purworejo. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan Kab. Purworejo meliputi :

A. Tantangan

Tantangan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo di masa mendatang adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan.
2. Belum maksimalnya pemeliharaan alat perlengkapan jalan.
3. APJ yang belum berbasis IT.
4. Disiplin berlalu lintas pengguna jalan masih rendah, sehingga mengakibatkan sering terjadi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan.
5. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya sarana dan fasilitas transportasi
6. Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien.
7. Usia kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan rata-rata diatas 10 tahun, mengakibatkan pelayanan angkutan umum tidak optimal dan menyebabkan kecelakaan.
8. Masih terdapat kendaraan angkutan umum orang dan barang yang kurang laik jalan.

9. Masih terdapat perlintasan sebidang kereta api yang tidak dijaga dan tidak dilengkapi fasilitas keselamatan, mengakibatkan rawan kecelakaan di perlintasan sebidang.
10. Masih terdapat kendaraan wajib uji yang belum melakukan pengujian kendaraan dikarenakan tidak adanya denda / sanksi.

Tantangan dalam pengelolaan Pendapatan :

1. Belum berfungsinya karcis parkir dengan baik.
2. Masih kurang disiplinnya petugas pemungut parkir / juru parkir di lapangan.

B. Peluang

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Kab. Purworejo.
2. Posisi geostrategis Kabupaten Purworejo sebagai lintasan penghubung antar kabupaten dan antar provinsi.
3. Keberadaan jaringan transportasi sebagai modal dasar pengembangan transportasi Kabupaten Purworejo.
4. Meningkatnya sistem layanan transportasi darat semakin meningkatkan kelancaran proses koneksi dan distribusi barang/jasa.
5. Meningkatnya kualitas jaringan prasarana lalu lintas semakin mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara.
6. Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perhubungan.
7. Adanya kerjasama dan hubungan baik dengan Lembaga Pendidikan Transoprtasi Darat memudahkan mendapat alokasi Pendidikan dan Pelatihan.
8. Sistem dan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang terakreditasi dan ter kalibrasi dengan baik.

9. Terdapat Inovasi KIREJO berupa system aplikasi pendaftaran dan pengaduan secara online pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor agar pelayanan lebih cepat dan pemilik kendaraan mudah untuk menyampaikan aduan.
10. Adanya pula inovasi SIMPEL MPU PANJALU berupa system informasi pelayanan lampu penerangan jalan umum serta data Lokasi lampu penerangan jalan umum di kabupaten purworejo sehingga dapat dengan cepat dalam pemeliharaan lampu penerangan jalan umum

Peluang Pendapatan :

1. Penambahan titik parkir.
2. Perbaikan penentuan target pendapatan berdasarkan analisa potensi.
3. Adanya kerjasama dengan Bank dalam pengelolaan e-retribusi.
4. Peningkatan kesadaran pengguna layanan retribusi dalam meminta karcis retribusi.
5. Peningkatan kesadaran pemungut retribusi dalam disiplin di lapangan.
6. Terdapat inovasi Menduan Nyengkir (layanan pengaduan dan informasi tentang perparkiran) yang dapat meningkatkan pendapatan dengan bantuan masyarakat dalam pengawasan perparkiran.

C. Kekuatan

Kekuatan yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya kuantitas SDM yang cukup memadai dalam melaksanakan tugas.
2. Terdapatnya regulasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang jelas.
3. Tersedianya dukungan sumber dana dari APBD, APBD Prov serta APBN.
4. Terdapatnya pendelegasian tugas dan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
5. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang cukup memadai.
6. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait.
7. Terdapatnya 4 Terminal Tipe C yang masih berjalan hingga saat ini.

8. Terdapatnya titik parkir sebagai salah satu sumber pendapatan.
9. Terpenuhinya kuantitas SDM penarik restribusi rerminal dan parkir.
10. Adanya regulasi terkait pelayanan Uji KIR.
11. Tersedianya sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang memadai dan terakreditasi serta terkalibrasi secara rutin.

D. Kelemahan

Kelemahan yang dapat menghambat dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya motivasi dan produktivitas kerja pegawai;
2. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan.
3. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian.
4. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi internal dan eksternal.
5. Belum memadainya angkutan orang dan barang yang beroperasi.
6. Kurangnya rambu-rambu lalu lintas.
7. Kurangnya sarana dan prasarana terminal yang memadai.
8. Kurangnya kualitas SDM penarik retribusi parkir.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perhubungan mayoritas tertuju ke masyarakat pada pelayanan Lalu Lintas yaitu pengadaan alat perlengkapan jalan di beberapa ruas jalan kabupaten (Lampu PJU, rambu, cermin, APILL) dan rekayasa lalu lintas serta pengaturan lalu lintas apabila ada kegiatan tertentu. Untuk pelayanan pengujian kendaraan bermotor yaitu pelaksanaan KIR kendaraan yang sesuai dengan prosedur. Dan pelayanan angkutan, terminal, perparkiran yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam penggunaan angkutan umum, pengelolaan terminal tipe C yang ada serta penataan perparkiran yang ada harus mewujudkan pelayanan yang aman, nyaman, terjangkau dan berkualitas.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Kabupaten

Purworejo. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor Perhubungan khususnya di Wilayah Kabupaten Purworejo diantaranya :

1. Masih kurangnya ketersediaan Alat Perlengkapan Jalan.
2. Perlunya meningkatkan kualitas kendaraan umum laik jalan.
3. Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas.
4. Masih adanya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.
5. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya sarana dan fasilitas transportasi.
6. Banyaknya kendaraan angkutan umum orang dan barang yang beroperasi kurang laik jalan dan tidak sesuai dengan trayek.
7. Belum adanya kebijakan terkait subsidi angkutan umum untuk pelajar agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kendaraan umum.
8. Kurangnya angkutan umum yang masuk ke Terminal Tipe C.
9. Kurangnya kendaraan yang tertib melaksanakan Uji KIR.
10. Masih kurang tertibnya petugas pemungut retribusi parkir dalam menjalankan tugasnya.
11. Gedung kantor yang ada masih belum representative/memadai.

2.2.2 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksetabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Metoda yang digunakan dalam penentuan isu – isu strategis adalah dengan mereview kembali faktor – faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari :

- Gambaran pelayanan Perangkat Daerah.
- Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
- Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan kondisi dan kewenangan Dinas Perhubungan, isu-isu strategis yang akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan Urusan Perhubungan adalah :

- Masih kurangnya jumlah Alat Perlengkapan Jalan di wilayah Kabupaten Purworejo;
- Perlu adanya Sistem Aplikasi Pengelolaan Perlengkapan Jalan;
- Masih kurangnya kemampuan personil dalam hal pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Bidang Perhubungan;
- Keberadaan *Yogyakarta International Airport* dan KSPN Borobudur, serta Bendungan Bener membutuhkan dukungan prasarana jalan yang lebih lengkap dan memadai di wilayah jalan menuju Bandara dan menuju KSPN Borobudur serta menuju Bendungan Bener.
- Perlunya meningkatkan kualitas kendaraan umum laik jalan.
- Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas.
- Masih adanya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.
- Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya sarana dan fasilitas transportasi.
- Banyaknya kendaraan angkutan umum orang dan barang yang beroperasi kurang laik jalan dan tidak sesuai dengan trayek.
- Belum adanya kebijakan terkait subsidi angkutan umum untuk pelajar agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kendaraan umum.
- Kurangnya angkutan umum yang masuk ke Terminal Tipe C.
- Kurangnya kendaraan yang tertib melaksanakan Uji KIR.
- Masih kurang tertibnya petugas pemungut retribusi parkir dalam menjalankan tugasnya.
- Gedung kantor yang sekarang ada masih belum representative

Adapun secara garis besar permasalahan perangkat daerah Dinas Perhubungan yaitu Aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah yang belum merata sehingga isu strategis yang bisa disimpulkan yaitu pemerataan layanan infrastruktur dasar seperti jumlah alat perlengkapan jalan dan kendaraan angkutan umum, dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Wilayah Pengembangan Keburejo (Kebumen-Purworejo)	Aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah belum merata	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Transisi energi untuk mendorong pemerataan	Transformasi Ekonomi	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemerataan layanan infrastruktur dasar dan pelayanan pada bidang Perhubungan
Potensi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masih adanya kendaraan yang belum memenuhi standar emisi	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Polusi	Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Penurunan emisi gas rumah kaca

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TELAAH VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2025-2030 yaitu :

"Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)"

Visi ini merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021 – 2026.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi. Misi merupakan sebuah komitmen bersama yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan guna mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri) 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2030 diwujudkan dalam "*Purworejo Berseri*".

Urusan Perhubungan mendukung Misi 2 **:** Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah.

Sedangkan pendukung urusan mendukung Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsive dan inovatif berbasis teknologi informasi.

"Alus Dalane" adalah program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing infrastruktur di sepanjang Jalan Kabupaten. Dinas Perhubungan berkontribusi dalam infrastruktur PJU yang merupakan infrastruktur penunjang penting bagi masyarakat di malam hari untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Purworejo untuk beraktivitas di malam hari.

A. Faktor Penghambat :

   Jumlah Lampu Penerangan Jalan yang ada, belum dapat mengakomodir kebutuhan Lampu Penerangan Jalan di ruas jalan kabupaten. Semakin bertambahnya ruas jalan kabupaten dan jalan poros desa yang membutuhkan lampu penerangan jalan, berkurangnya umur ekonomis

lampu penerangan jalan yang sudah terpasang membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi.

B. Faktor Pendorong :

Adanya alokasi anggaran pengadaan perlengkapan jalan (lampu penerangan jalan umum) dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak ketiga yang bisa menambah angka capaian pengadaan lampu penerangan jalan umum.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan tersebut didukung oleh 4 (empat) faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi dan sarana serta prasarana kerja, faktor-faktor ini sangatlah berpengaruh terhadap tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perangkat daerah dimana apabila salah satu factor tersebut tidak ada maka dapat berpengaruh signifikan terhadap tercapainya tujuan perangkat daerah.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Urusan Perhubungan sebagai langkah pemfokusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah “Meningkatkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau serta akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah”.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo adalah “Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau”.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo beserta indicator dan targetnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Meningkatkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Rasio Konektivitas	76	83	85	86	88	89	
			Penurunan angka kecelakaan	562	546	530	514	498	480	
		Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	Rasio Konektivitas	76	83	85	86	88	89	
			Penurunan angka kecelakaan	562	546	530	514	498	480	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan arah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan bagaimana penyelesaian isu strategis pembangunan daerah.

Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah Kebijakan berguna untuk membantu menghubungkan setiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan merupakan fokus/tema pembangunan tahunan dalam RKPD.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Purworejo Urusan Perhubungan pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Menguatkan penyelenggaraan keselamatan transportasi dan fasilitas keselamatan	Meningkatkan penyelenggaraan keselamatan transportasi dan fasilitas keselamatan	Memantapkan penyelenggaraan keselamatan transportasi dan fasilitas keselamatan	Mewujudkan penyelenggaraan keselamatan transportasi dan fasilitas keselamatan	Meneguhkan penyelenggaraan keselamatan transportasi dan fasilitas keselamatan

Tabel 3.5. Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
2026	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Penguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum	

2027		Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum	
2028		Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Pemantapan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum	
2029		Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Perwujudan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum	
2030		Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peneguhan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum	
2026	Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Penguatan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi	Penguatan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, terintegrasi, merata dan infrastruktur transportasi yang berkualitas serta konektivitas antar wilayah melalui aktivitas penyediaan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal, penataan perparkiran, pengelolaan pengujian, pengaturan lalu lintas, rekomendasi andalalin dan pengendalian pengawasan angkutan	
2027		Peningkatan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, terintegrasi, merata dan infrastruktur transportasi yang berkualitas serta konektivitas antar wilayah melalui aktivitas penyusunan rencana induk, penyediaan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal, penataan perparkiran, pengelolaan pengujian, pengaturan lalu lintas, rekomendasi andalalin dan pengendalian pengawasan angkutan	
2028		Pemantapan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi	Pemantapan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, terintegrasi, merata dan infrastruktur transportasi yang berkualitas serta konektivitas antar wilayah melalui aktivitas penyediaan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal, penataan perparkiran, pengelolaan pengujian, pengaturan lalu lintas, rekomendasi andalalin dan pengendalian pengawasan angkutan	
2029		Perwujudan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi	Perwujudan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, terintegrasi, merata dan infrastruktur transportasi yang berkualitas serta konektivitas antar wilayah melalui aktivitas penyediaan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal, penataan perparkiran, pengelolaan pengujian, pengaturan lalu lintas, rekomendasi andalalin dan pengendalian pengawasan angkutan	
2030		Peneguhan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi	Peneguhan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, terintegrasi, merata dan infrastruktur transportasi yang berkualitas serta konektivitas antar wilayah melalui aktivitas penyediaan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal, penataan perparkiran, pengelolaan pengujian, pengaturan lalu lintas, rekomendasi andalalin dan pengendalian pengawasan angkutan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusun program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja SKPD.

Pada Urusan Perhubungan didukung 1 (satu) program, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini mendukung program unggulan Alus Dalane dengan rencana implementasi Pembangunan PJU (infrastruktur) melalui Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. PJU merupakan infrastruktur penunjang penting bagi masyarakat di malam hari untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Purworejo untuk beraktivitas di malam hari. Pada RTRW, program ini memiliki keterkaitan terhadap pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kawasan rawan pada sekitar kawasan peruntukan industri Purwodadi-Ngombol-Grabag serta kawasan kota perbatasan (*border city*) sekitar Bandara YIA. Program ini juga terkait dengan percepatan pengembangan dan peningkatan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), pemantapan fungsi PPK melalui pengembangan infrastruktur kawasan, serta pengembangan dan pemantapan PPL dalam koteks perwujudan struktur ruang pada sistem perkotaan.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
   Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
   Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten, Persentase Angkutan Umum, Terminal, dan Titik Parkir yang Tersedia dan Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana.

Dari program tersebut diimplementasikan melalui kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

   b. Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
      1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

   c. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

   d. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :
      1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

   e. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :
      1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
      2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
      3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
      4) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
      5) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

f. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6) Penyediaan Bahan/Material
7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

g. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pengadaan Alat Besar
3) Pengadaan Mebel
4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

i. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

a. Kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
3) Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

b. Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

c. Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan :

1) Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C
2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

d. Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan :

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

e. Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
3) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
4) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
5) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
7) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
8) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

f. Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota
2) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
4) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
5) Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
6) Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

g. Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin

h. Kegiatan : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
   Sub Kegiatan :
   1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
   2) Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C
   3) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

i. Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan :
   1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
   2) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

j. Kegiatan : Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan :
   1) Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
   2) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota

k. Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan :
   1) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

Dari uraian tersebut di atas secara rinci rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan 4.2 berikut ini :

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Meningkatkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Rasio Konektivitas		
					Penurunan angka kecelakaan		
		Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau			Rasio Konektivitas		
					Penurunan angka kecelakaan		
			Meningkatnya Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Ditetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kegiatan
						Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
						Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	

						Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
						Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
						Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
						Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
						Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	

						Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan
						Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Angkutan Umum, Terminal dan Titik Parkir yang Tersedia		Persentase Angkutan Umum, Terminal, dan Titik Parkir yang Tersedia		
				Terkelolanya Terminal Tipe C	Jumlah Dokumen Pengelolaan Terminal Penunpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kegiatan
						Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Terwujudnya Layanan Perparkiran yang Tertib dan Terkelola Dengan Baik	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kegiatan

						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kegiatan
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	
						Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
				Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
						Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Ditetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
						Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kegiatan
						Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana		Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana		

				Terlayaninya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kegiatan
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
						Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi							

		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan

						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kegiatan
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	66,51	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Rasio Konektivitas	%	74	83		85		86		88		89		89			
			Penurunan angka kecelakaan	Angka	562	546		530		514		498		480		480			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka															
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						7.498.380.658		7.573.364.000		5.519.737.000		5.519.737.000		5.519.737.000				
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	7.498.380.658	100	7.573.364.000	100	5.519.737.000	100	5.519.737.000	100	5.519.737.000	100	Sekretariat		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	21	45	39.448.900	45	49.000.000	45	39.448.900	45	39.448.900	45	39.448.900	225			
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	35.456.800	22	40.000.000	22	35.456.800	22	35.456.800	22	35.456.800	110			
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	22	2.834.300	22	5.000.000	22	2.834.300	22	2.834.300	22	2.834.300	110			
2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	1	1.157.800	1	4.000.000	1	1.157.800	1	1.157.800	1	1.157.800	5			
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	27	45	6.921.630.649	45	6.851.735.693	45	4.903.623.439	45	4.897.649.599	45	4.880.600.258	225			
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	33	65	6.911.124.449	65	6.838.235.693	65	4.893.117.239	65	4.887.143.399	65	4.870.094.058	65			
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	44	10.506.200	44	13.500.000	44	10.506.200	44	10.506.200	44	10.506.200	220			
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	11	1.078.600	11	3.000.000	11	4.000.000	11	5.000.000	11	6.000.000	55			
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	11	1.078.600	11	3.000.000	11	4.000.000	11	5.000.000	11	6.000.000	55			
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	1	35.505.359	1	35.505.359	1	35.505.359	1	35.505.359	1	35.505.359	5			
2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	1	35.505.359	1	35.505.359	1	35.505.359	1	35.505.359	1	35.505.359	5			
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	1	737.000	5	34.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	21			
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	70	10.000.000	0	0	0	0	0	0	70			
2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	17	737.000	17	4.000.000	17	3.000.000	17	3.000.000	17	3.000.000	85			
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	60	10.000.000	0	0	0	0	0	0	60			
2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	50	5.000.000	0	0	0	0	0	0	50			
2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	55	5.000.000	0	0	0	0	0	0	55			
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	6	8	110.563.000	9	153.234.940	9	125.939.534	9	136.179.282	9	137.257.828	44			
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	4.264.100	1	4.477.305	1	4.301.170	1	4.301.170	1	4.301.170	5			
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	8	1	4.618.000	1	4.848.900	1	5.091.345	1	5.345.912	1	5.613.208	5			
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	11	65.062.200	11	68.024.050	11	65.062.200	11	65.062.200	11	65.062.200	55			
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	2	5.659.700	2	5.942.685	2	6.239.819	2	16.225.000	2	17.036.250	10			
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	24			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	2	4.002.200	2	9.996.000	2	7.995.000	2	7.995.000	2	7.995.000	10			
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	12	600.000	12	3.500.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	60			
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	23.875.000	12	49.446.000	12	27.000.000	12	27.000.000	12	27.000.000	60			
2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	2.481.800	2	5.000.000	2	5.250.000	2	5.250.000	2	5.250.000	10			
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	28	0		25	40.000.000	1	10.000.000	0		10	10.000.000	36			
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
2.15.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	1			
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	20	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10.000.000	10			
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	0	0	20	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20			
2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	4	10.000.000	0	0	0	0	0	0	4			
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	132.073.950	24	136.677.648	24	135.092.985	24	136.716.637	24	138.421.471	120			
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	102.619.950	12	105.750.948	12	102.619.950	12	102.619.950	12	102.619.950	60			
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	29.454.000	12	30.926.700	12	32.473.035	12	34.096.687	12	35.801.521	60			
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	5	257.343.200	5	270.210.360	5	263.126.783	5	266.237.223	5	269.503.184	25			
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	2	39.950.000	2	41.947.500	2	44.044.875	2	46.247.119	2	48.559.475	2			
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	19	165.610.000	19	173.890.500	19	165.610.000	19	165.610.000	19	165.610.000	19			
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	46	12.205.200	58	12.815.460	58	13.456.233	58	14.129.045	58	14.835.497	58			
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	35.308.000	1	37.073.400	1	35.308.000	1	35.308.000	1	35.308.000	1			
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	7	4.270.000	7	4.483.500	7	4.707.675	7	4.943.059	7	5.190.212	7			
2	Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau		Rasio Konektivitas	%	74	83		85		86		88		89		89			
			Penurunan angka kecelakaan	Angka	562	546		530		514		498		480		480			
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						15.305.727.700		15.547.558.000		15.305.728.000		15.305.728.000		15.547.558.000				
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	%	36,56	40,09	15.305.727.700	41,41	15.547.558.000	42,29	15.305.728.000	43,61	15.305.728.000	44,49	15.547.558.000	44,49	Bidang Lalu Lintas		
		Meningkatnya Penyelenggaraan Angkutan Umum, Terminal dan Titik Parkir yang Tersedia	Persentase Angkutan Umum, Terminal, dan Titik Parkir yang Tersedia	%	53,17	63,72		64,78		65,69		66,29		66,75		66,75	Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran		
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang terlaksana	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor yang terlaksana	%	71,84	93,48		95,28		96,63		97,98		98,88		98,88	Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor		
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ditetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0		1	200.457.000	2	35.000.000	1	20.000.000	0		4			
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	1	200.457.000	0	0	0	0	0	0	1			
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	1			
2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	0	0	2			
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jenis	2	2	10.595.810.400	2	10.312.321.480	2	10.519.146.571	2	10.519.164.346	2	10.444.877.907	2			
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	385	126	3.441.054.800	250	3.478.696.990	325	3.414.390.971	350	3.414.408.746	380	3.585.129.183	1.431			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	839	1.154	7.154.755.600	1.200	6.833.624.490	1.400	7.104.755.600	1.500	7.104.755.600	1.650	6.859.748.724	1.650			
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terkelolanya Terminal Tipe C	Jumlah Dokumen Pengelolaan Terminal Penunpang Tipe C	Dokumen	2	2	339.121.900	2	341.224.960	2	339.121.900	2	339.121.900	2	341.224.960	10			
2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Dokumen	4	4	173.296.300	4	178.819.000	4	173.298.300	4	173.296.300	4	178.819.000	20			
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	4	4	165.823.600	4	162.405.960	4	165.823.600	4	165.823.600	4	162.405.960	4			
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terwujudnya Layanan Perparkiran yang Tertib dan Terkelola Dengan Baik	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Laporan	1	1	3.471.521.500	1	3.226.521.500	1	3.431.521.500	1	3.431.521.500	1	3.271.521.500	5			
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	3.471.521.500	12	3.226.521.500	12	3.431.521.500	12	3.431.521.500	12	3.271.521.500	60			
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlayaninya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	4	5	176.849.900	7	300.314.315	6	157.037.908	6	167.410.698	7	328.740.769	31			
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	1	150.000.000	2			
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	3	42.563.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	3.100	2.000	20.045.400	2.000	22.049.940	2.000	24.254.934	2.000	26.680.427	2.000	29.348.470	10.000			
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	2.000	2.000	50.000.000	2.000	50.000.000	2.000	50.000.000	2.000	50.000.000	2.000	50.000.000	10.000			
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	0	0	0	4	5.255.000	4	5.655.000	4	6.055.000	4	6.455.000	16			
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	30	17	58.225.500	17	61.136.775	17	64.193.614	17	70.612.975	17	77.674.273	85			
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	10	10	6.016.000	10	6.617.600	10	7.279.360	10	8.007.296	10	8.808.026	50			
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	0	0	0	4	5.255.000	4	5.655.000	4	6.055.000	4	6.455.000	16			
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	4	3	600.325.600	4	952.419.964	5	673.711.400	6	673.711.400	5	975.554.800	23			
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	576.868.000	12	612.419.964	12	595.711.400	12	590.711.400	12	620.554.800	60			
2.15.02.2.06.0010	Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	2			
2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit	0	0	0	0	0	1	40.000.000	1	40.000.000	0	0	2			
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	5	3	3.637.400	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	20.000.000	15			
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	4	0	0	1	300.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	300.000.000	4			
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan	2	2	19.820.200	2	30.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	30.000.000	10			
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	3.026.200	1	3.177.510	1	3.336.386	1	3.503.205	1	3.678.365	5			
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan	3	3	3.026.200	3	3.177.510	3	3.336.386	3	3.503.205	3	3.678.365	15			
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Laporan	0	0		3	18.500.000	0		0		3	21.000.000	6			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	0	0	0	4	10.000.000	0	0	0	0	4	11.500.000	8			
2.15.02.2.08.0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Laporan	0	0	0	4	3.500.000	0	0	0	0	4	4.500.000	8			
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	0	0	0	12	5.000.000	0	0	0	0	12	5.000.000	24			
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2	2	114.411.600	2	144.621.271	2	133.852.335	2	138.294.951	2	147.959.699	10			
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	35.326.300	12	60.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	60			
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	5	4	79.085.300	5	84.621.271	6	88.852.335	7	93.294.951	8	97.959.699	8			
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0		1	40.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4			
2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3			
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	4.660.600	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	5			
2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	4.660.600	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	60			
Jumlah							22.804.108.368		23.120.922.000		20.826.466.000		20.826.466.000		21.067.296.000				

Adapun berdasarkan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Tahun 2026 – 2030 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dengan 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang terbagi menjadi kegiatan dan sub kegiatan rutin seperti tahun sebelumnya. Kecuali pada tahun 2027 yang direncanakan pada Dinas Perhubungan membuat Dokumen Tatralok (Tatanan Transportasi Lokal) pada sub kegiatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.

Pada masing-masing sub kegiatan terdapat aktivitas untuk memperjelas rencana kegiatan pada sub kegiatan tersebut seperti adanya Penyediaan perlengkapan jalan (Pengadaan PJU, APILL, Rambu, Marka), Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Pemeliharaan Rambu, APILL, PJU), Pengelolaan Terminal, Penataan perparkiran, Pengelolaan Pengujian, Pengaturan Lalu Lintas, Rekomendasi Andalalin dan Pengendalian Pengawasan Angkutan.

Dari uraian tersebut di atas secara rinci daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan hingga aktivitas sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten			
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tatralok
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	
			Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Evaluasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		

			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan APILL, PJU, Rambu, Marka
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan Rambu, APILL, PJU
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengaturan dan Ketertiban Lalu Lintas Jalan	Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas, Fasilitasi Patwal, Pemeliharaan Perlintasan Sebidang
			Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Monitoring ZOSS	
			Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Pembangunan ZOSS	
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Forum LLAJ
			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Pengadaan Perlintasan Sebidang
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rekayasa Lalu Lintas dan Penyediaan Posko Lebaran Tahun Baru
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Fasilitasi Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Rekomendasi Persetujuan Andalalin
		Meningkatnya Penyelenggaraan Angkutan Umum. Terminal dan Titik Parkir yang Tersedia			
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		
			Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Fasilitasi Operasional Terminal
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C	Pemeliharaan Terminal

			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Penataan Perparkiran	Pengawasan dan Penyelenggaraan Perparkiran
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Audit dan Pemantauan Terminal	
			Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Orang atau Barang	Pengawasan dan Pengendalian angkutan umum
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Angkutan Umum	Penyediaan Angkutan Mudik Gratis
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek	
			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Kebijakan Rencana Umum	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		
			Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Angkutan Orang	Evaluasi trayek, re-routing trayek, Fasilitasi Izin Penyelengga

					raan Angkutan
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana			
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana Prasarana Pengujian	Penyediaan Alat Uji
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kapasitas SDM	Diklat dan Uji Kompetensi Tenaga Uji Kendaraan Bermotor
			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji	Fasilitasi dan Operasional Pengujian
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji	Bukti Lulus Uji
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi SOP Pengujian	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengujian	Pemeliharaan Alat Uji
			Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Koordinasi Pengujian Kendaraan	Koordinasi Pengujian Kendaraan
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Evaluasi Pengujian	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja, RKT, PK, RKO, KAK, ASB, RUP, RKA, DPA, GAP GBS, Renstra, MR, Forum OPD

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Bulanan, Triwulanan, LKJIP, LKPJ, LPPD, SPIP, SKM
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen Walidata
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji Pegawai
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rekon Gaji, Fungsional, LRA, Semesteran, akhir tahun
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	RKBMD, RKPBMD, Semesteran, Aset, Triwulanan
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Data retribusi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DUK, Rekap Kehadiran, Nominatif Pegawai, Realisasi Disiplin Pegawai
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Bulanan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Bulanan
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Semesteran
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan per bulan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan per bulan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam renstra 2025-2029 disusun untuk mendukung Kegiatan Unggulan Kabupaten Purworejo (Pitulungan) yaitu Program Alus Dalane

“Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Purworejo” untuk Program Urusan Perhubungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur penerangan jalan umum di sepanjang Jalan Kabupaten.

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan mendukung program tersebut dengan rencana implementasi melalui Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yaitu Penyediaan Rambu Jalan, Cermin Tikung, Lampu PJU dan Marka. Untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas didukung melalui kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang ada di Kabupaten Purworejo yang dapat terintegrasi antar moda transportasi. Secara rinci Dinas Perhubungan mendukung program unggulan tersebut hingga ke aktivitas untuk 5 tahun kedepan yaitu pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah (Breakdown Pitulungan)

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas di 2026	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
5	Alus Dalane	Pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Purworejo	Penyediaan alat perlengkapan jalan	Penyediaan alat perlengkapan jalan	Perhubungan	Dinhub
			Pengaturan dan ketertiban lalu lintas jalan	Pengaturan dan ketertiban lalu lintas jalan	Perhubungan	Dinhub
			Fasilitasi pengujian kendaraan angkutan	Fasilitasi pengujian kendaraan angkutan	Perhubungan	Dinhub
			Penataan parkir	Penataan parkir	Perhubungan	Dinhub
			Fasilitasi dan pengelolaan terminal penumpang	Fasilitasi dan pengelolaan terminal penumpang	Perhubungan	Dinhub
			Fasilitasi penyediaan angkutan orang atau barang	Fasilitasi penyediaan angkutan orang atau barang	Perhubungan	Dinhub

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo berdasarkan Renstra terbaru 2025-2029 terdiri dari 2 Indikator yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan IUP dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dengan rincian target Tahun 2025 – 2030 dapat dilihat pada tabel 4.5 dan 4.6 berikut ini :

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Tujuan dan Sasaran PD
2	Rasio Konektivitas	%	76	83	85	86	88	89	Tujuan dan Sasaran PD
3	Penurunan Angka Kecelakaan	Angka	562	546	530	514	498	480	Tujuan dan Sasaran PD

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	%	39,21	40,09	41,41	42,29	43,61	44,49	Bidang Lalu Lintas	IUP
2	Rasio Konektivitas	%	76	83	85	86	88	89	Bidang Angkutan	Permendagri No. 18 Tahun 2020
3	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Angka	0,25	0,27	0,30	0,30	0,32	0,32	Bidang Lalu Lintas	Permendagri No. 18 Tahun 2020

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Perhubungan, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Dinas Perhubungan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan setiap tahun.
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c. Kepala Dinas Perhubungan wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan dilakukan setiap tahun selama periode renstra.

b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 sesuai urusan dan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo atau merupakan penjabaran dari capaian-capaian sasaran yang ditargetkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo selama tahun 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 pasal 16, bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun dalam beberapa tahap yaitu :

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Proses persiapan penyusunan renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo diawali dengan pembentukan tim penyusun yang selanjutnya mengumpulkan data dan informasi untuk menyusun rancangan renstra yang berasal dari Rancangan Awal RPJMD. Setelah rancangan renstra jadi maka selanjutnya dilaksanakanlah forum Perangkat Daerah dengan mengundang *stakeholder*s Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Hasil kesepakatan dalam forum Perangkat Daerah selanjutnya disajikan dalam rancangan renstra dan dilakukan verifikasi menjadi usulan Rancangan RPJMD dan selanjutnya setelah RPJMD ditetapkan dilakukan penyempurnaan akhir untuk ditetapkan Renstra dengan Keputusan Bupati. Adapun tahapan penyusunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana Gambar 1.1

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Dokumen Renstra PD

Adapun Tahapan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 seperti terlihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

No.	Tahapan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan Rancangan Awal	Pebruari-April 2025
	- Pemetaan Visi Misi kedalam draf tujuan, sasaran, indikator sasaran dan targetnya, strategi, kebijakan, program, indikator outcome dan target dengan tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	- Desk bahan rancangan awal Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku Perangkat Daerah	
	- Penyesuaian dengan prioritas pusat dan provinsi	
2.	Koordinasi Tim Penyusun Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan Steakholders	April - Agustus 2025
4.	Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra	Agustus 2025
5	Desk Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029	Agustus 2025
6	Penyerahan Rancangan Renstra ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Agustus 2025
7	Penetapan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	September 2025

Renstra ini kemudian akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan perangkat daerah periode tahun 2025-2029.

Sasaran-sasaran dalam RPJMD pada umumnya perlu ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan mengunakan pendekatan *common goals* dan *non common goals.* Pendekatan ini digunakan untuk memilah sasaran mana yang menjadi *core business* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan sasaran lain sebagai pendukung atau penunjang.

Terdapat hubungan antara dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen lain. Adapun hubungan keterkaitan antara tahapan penyusunan RPJMD dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

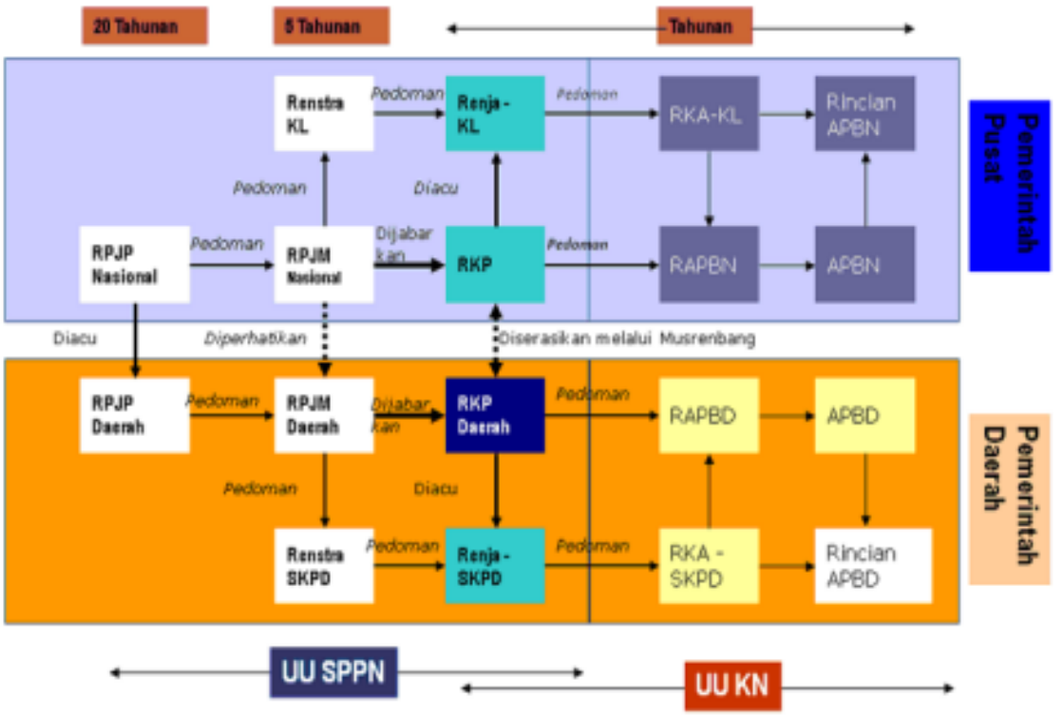

Gambar 1.2. Hubungan antara dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen lain

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029. Selain itu penyusunan Renstra juga mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu dokumen KLHS RPJMD 2025-2029, dokumen RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029, Renstra Badan Pusat Statistik 2025-2029, Renstra Badan Siber Sandi Nasional 2025-2029.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2026 mengacu pada:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupatem Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 129 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo selama kurun waktu Tahun 2025-2029.

Maksud penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo adalah untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJMD.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

a) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan, sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah.
b) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c) Menjadi instrument pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah yang terdiri dari Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah serta Kelompok sasaran layanan. Bab ini juga memuat Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan, Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah, Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STATEGIS

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo selanjutnya disebut Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 129 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo.

Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi informasi dan komunikasi publik, dan teknologi informasi, statistik dan persandian serta, pengembangan dan pengelolaan pemerintahan elektronik *(e-government*) sesuai dengan kewenangan Daerah.

Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informatika, statistik dan persandian, serta pengembangan kota cerdas (*smart city*);
b. pelaksanaan kebijakan bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informatika, statistik dan persandian, serta pengembangan kota cerdas (*smart city*);
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informatika, statistik dan persandian, serta pengembangan kota cerdas (*smart city*);
d. pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinkominfostasandi; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo dipimpin oleh seorang Kepala Dinkominfostasandi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekrtetaris Daerah.

Dalam melaksakan tugasnya Kepala Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) bidang yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Susunan Organisasi Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo terdiri dari :

1. Kepala Dinkominfostasandi;
2. Sekretariat
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
4. Bidang Teknologi Informatika, Statistik Dan Persandian;
5. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas (*smart city*);
6. UPT; dan
7. Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi dari Sekretariat, bidang, UPT dan Jabatan Fungsional tersebut adalah :

1. Sekretariat

   Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinkominfostasandi. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas Bidang, serta memberikan

dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinkominfostasandi.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kominfostatsandi sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas 2 subbagian sebagai berikut :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi :

a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
b. menyusun perjanjian kinerja;
c. menyelenggarakan pengadministrasian keuangan;
d. menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah kewenangan Dinkominfostatsandi; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi :

a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
b. menyelenggarakan administrasi umum;
c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
d. menyediakan jasa penunjang;
e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
f. menyelenggarakan pengadministrasian kepegawaian;
g. menyelenggarakan adminitrasi organisasi, kehumasan dan hukum;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkominfostasandi. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas megelola informasi dan komunikasi publik, serta mengelola aplikasi informatika.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;

b. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusan dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinkominfostasandi berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

3. Bidang Teknologi Informatika, Statistik Dan Persandian;

Bidang Teknologi Informatika, Statistik dan Persandian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkominfostasandi. Bidang Teknologi Informatika, Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Teknologi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan statistik sektoral dan persandian untuk pengamanan informasi, infrastruktur teknologi informasi, statistik dan manajemen data, serta persandian, telekomunikasi dan keamanan informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Teknologi Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah;
b. penyelenggaraaan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
c. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinkominfostasandi berkaitan dengan tugas dan fungsi

Kepala Bidang Teknologi Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

4. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas (*Smart City*);

Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas (*Smart City*) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkominfostasandi. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas (*Smart City*) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas (*Smart City*) mempunyai tugas menyelenggarakan mengelola aplikasi informatika, layanan kota cerdas, serta tata kelola pemerintahan elektronik (*e-government*).

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas (*Smart City*) menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan pemerintahan elektronik (*e-government*) di lingkup Pemerintah Daerah;
b. pembinaan, pengembangan dan pengendalian layanan Kota Cerdas (*Smart City*) beserta layanan pendukung yang terintegrasi;
c. pembinaan, pengembangan dan pengendalian pemerintahan elektronik (*e-government*) meliputi sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah, ekosistem Sistem Pemerintahahn Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan terpadu implementasi pemerintahan elektronik (*e-government*) di Daerah; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinkominfostasandi berkaitan dengan tugas dan fungsi

Kepala Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas (*Smart City*) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

5. UPT

UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinkominfostasandi. Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan. UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkominfostasandi. Untuk saat ini tidak ada UPT di lingkungan Dinkominfostasandi.

6. Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinkominfostandi. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. kedudukan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten adalah sebagai berikut:

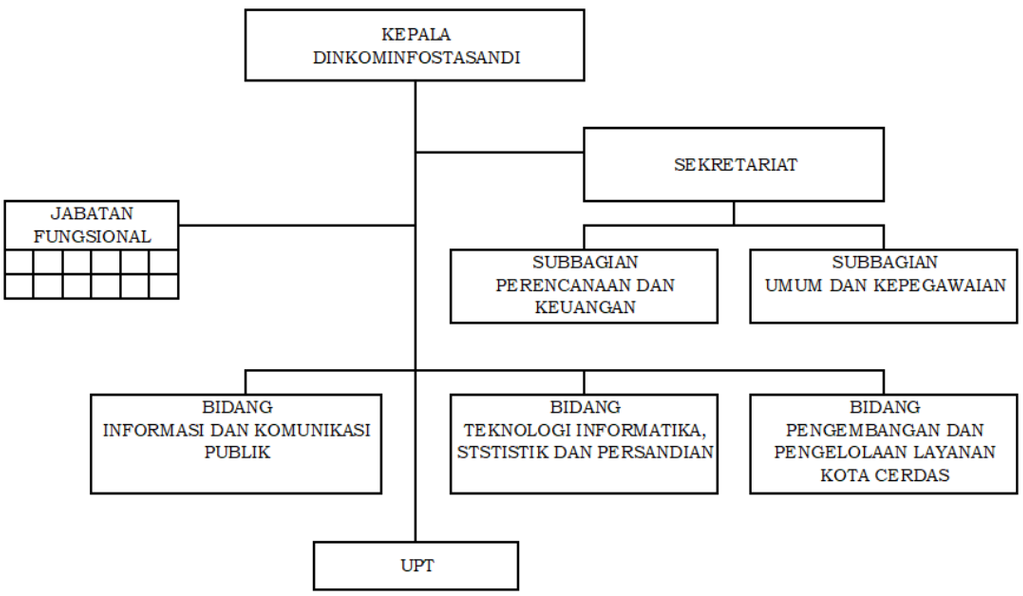

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinkominfostasandi

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Ketersediaan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala pada Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo. Kendala tersebut adalah mengenai kuantitas dan kualitas pegawai dengan latar belakang bidang Telekomunikasi, bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik serta bidang Persandian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 didukung oleh 52 (lima puluh dua) orang aparatur yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang Aparatur Sipil Negara dan 17 (tujuh belas) orang Tenaga Non ASN.

Kondisi aparatur Dinkominfostasandi saat ini berdasarkan eselon, golongan adalah sebagaimana Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	JPT/ Es II	Es III	Es IV	JFT/ JFU	PPPK	Non ASN	Jml
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	2	4	1	5	13
3	Bidang Komunikasi Informasi dan Komunikasi Publik	-	1	-	4	3	3	11
4	Bidang Teknologi Informatika Statistik dan Persandian	-	1	-	5	3	6	15
5	Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas	-	1	-	4	4	3	12
	Jumlah	1	4	2	17	11	17	52

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

Kondisi aparatur Dinkominfostasandi saat ini berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	S3	S2	S1	D III	SMA	SMP	SD	Jml
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	4	1	7	-	-	13
3	Bidang Komunikasi Informasi dan Komunikasi Publik	-	1	3	1	6	-	-	11
4	Bidang Teknologi Informatika Statistik dan Persandian	-	-	6	5	4	-	-	15
5	Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas	-	1	7	3	1	-	-	12
	Jumlah	0	4	20	10	18	0	0	52

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

Selain adanya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, sarana dan prasarana yang memadai merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh organisasi dalam mencapai tujuannya. Permasalahan pada

terbatasnya aset, sarana dan prasarana pada Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo berkaitan dengan belum memiliki Gedung sendiri yang memadai, dimana saat ini menumpang pada Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil, peralatan penunjang yang sudah mulai usang, tidak memiliki mobil pemeliharaan jaringan, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk (arsip). Selain itu biaya pemeliharaan yang belum bisa menjangkau semua asset yang dimiliki juga menjadi sebuah kendala tersendiri.

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 tertuang dalam tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	1 bidang	di tempati Irama FM
2	Bangunan	2 lokasi	lingkungan Setda dan Irama FM
3	Kendaraan Roda 4	3 unit	
4	Kendaraan Roda 2	9 unit	
5	Rak besi	10 buah	
6	Filling besi	5 buah	
7	Lemari kaca	1 buah	
8	Lemari kayu	4 buah	
9	Meja Besi	1 buah	
10	Meja Kayu	3 buah	
11	Meja rapat	4 buah	
12	Kursi rapat	84 buah	
13	Kursi putar	84 buah	dengan jenis tipe merek yang beda
14	Meja Komputer	45 buah	dengan jenis tipe merek yang beda
15	AC	12 unit	dengan jenis tipe merek yang beda
16	PC Unit	63 unit	dengan jenis tipe merek yang beda
17	Sound System	2 unit	
18	Peralatan jaringan	303 unit	
19	Mebelair	6 unit	
20	Printer	10 unit	
21	Camera shoting digital	4 unit	
22	Camera Digital	1 unit	
23	Slide Projektor	2 unit	
24	Televise LED	2 unit	
25	Monitor Whaiboard	2 unit	
26	Video wall	12 unit	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

2.1.3 Kinerja Pelayanan

Capaian Kinerja Pelayanan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo yang berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statitik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian tertuang dalam tabel 2.4.

Hasil pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu sebagaimana Tabel 2.4, menunjukkan bahwa:

1. Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten telah tercapai 100%.
2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi telah tercapai 100%.
3. Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan subdomain instansi penyelenggara negara telah tercapai 100%.
4. Cakupan ketersediaan statistik dasar dan sektoral telah tercapai 100%.
5. Persentase layanan persandian telah tercapai 100%.

Faktor pendukung keberhasilan dalam mencapai target adalah optimalisasi sumber daya yang ada, perencanaan kegiatan yang berfokus untuk mencapai target yang ditentukan sesuai dengan skala prioritas, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Adapun Capaian Realisasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo selama 5 tahun sebelumnya tertera dalam tabel 2.5. Sedangkan Evaluasi terhadap Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024 Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo tersaji dalam tabel 2.6.

Secara garis besar capaian kinerja pelayanan selama pelaksanaan periode renstra sebelumnya berjalan dengan baik dan dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Hal ini tidak lepas dari peran seluruh stake holder dalam pelaksanaan pelayanan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggara kan secara online dan terintegrasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan ketersediaan statistik dasar dan sektoral				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase layanan persandian				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.5
Capaian Realisasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.232.360.553	2.473.501.750	2.662.763.292	2.832.342.087	2.908.299.082	2.924.371.641	2.879.151.219	3.043.064.992	3.447.979.483	3.573.925.003	2.213.544.345	0	89,07%	123,03%	129,49%	126,18%	76,11%	0,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.015.000	36.000.000	40.000.000	78.000.000	69.150.000	80.000.000	63.014.800	61.366.740	69.108.956	76.748.848	42.137.554	0	100,00%	170,46%	172,77%	98,40%	60,94%	0,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.015.000	31.000.000	34.550.000				58.015.000	55.335.440	64.747.156				100,00%	178,50%	187,40%			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				71.550.000	63.550.000	72.100.000				72.847.248	38.973.954	0				101,81%	61,33%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		750.000	800.000					1.640.800	1.001.000					218,77%	125,13%			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.000.000	800.000	1.250.000				606.000	606.000	0				60,60%	75,75%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		750.000	800.000					1.640.800	1.001.000					218,77%	125,13%			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.000.000	800.000	1.250.000				606.000	240.000	0				60,60%	30,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1.000.000	1.100.000					750.000	692.800					75,00%	62,98%			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.250.000	1.100.000	1.500.000				852.000	852.000	0				68,16%	77,45%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1.000.000	1.100.000					750.000	692.800					75,00%	62,98%			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.250.000	1.100.000	1.500.000				612.000	0	0				48,96%	0,00%	0,00%
Sub Keg; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		1.000.000	1.100.000					749.800	468.200					74,98%	42,56%			

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Sub Keg; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD				1.250.000	1.100.000	1.500.000				604.000	844.000	0				48,32%	76,73%	0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	500.000	550.000				4.999.800	499.900	506.000				100,00%	99,98%	92,00%			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				700.000	700.000	900.000				621.600	621.600					88,80%	88,80%	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.777.015.253	2.201.501.750	2.225.419.692	2.332.342.087	2.404.149.082	2.451.371.641	2.490.076.127	2.582.993.462	2.664.375.274	2.875.430.771	1.853.838.343	0	89,67%	117,33%	119,72%	123,29%	77,11%	0,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.765.015.253	2.199.001.750	2.222.669.692				2.478.093.527	2.580.493.562	2.662.175.274				89,62%	117,35%	119,77%			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.329.342.087	2.400.949.082	2.447.871.641				2.874.622.771	1.853.038.343					123,41%	77,18%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.000.000	1.100.000					1.000.000	1.000.000					100,00%	90,91%			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.250.000	1.350.000	1.500.000				410.000	620.000					32,80%	45,93%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.000.000	1.500.000	1.650.000				11.982.600	1.499.900	1.200.000				99,86%	99,99%	72,73%			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.750.000	1.850.000	2.000.000				398.000	180.000					22,74%	9,73%	0,00%
Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000	20.000.000	25.000.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000		62.347.800	395.977.999	311.721.500	134.525.605	0	0,00%	311,74%	1583,91%	779,30%	448,42%	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	20.000.000	20.000.000				58.280.000	62.347.800	84.085.399				97,13%	311,74%	420,43%			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000	10.000.000	10.000.000				-	-					0,00%	0,00%	0,00%
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan			5.000.000						311.892.600						6237,85%			
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan				30.000.000	20.000.000	20.000.000				311.721.500	134.525.605					1039,07%	672,63%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.694.400	20.500.000	43.700.000	121.000.000	138.000.000	100.000.000	113.656.797	106.600.528	116.698.896	92.159.763	34.117.200	0	99,97%	520,00%	267,05%	76,17%	24,72%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.694.400	20.500.000	43.700.000				113.656.797	106.600.528	116.698.896				99,97%	520,00%	267,05%			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				121.000.000	138.000.000	100.000.000				92.159.763	34.117.200					76,17%	24,72%	0,00%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	40.000.000	55.000.000	59.000.000	60.000.000	50.000.000		47.740.000	0	0	0	0	0,00%	119,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000												0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		40.000.000	55.000.000					47.740.000	0				0,00%	119,35%	0,00%			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				59.000.000	60.000.000					0	0					0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.888.300	65.500.000	80.000.000	88.000.000	90.000.000	93.000.000	88.812.192	75.811.540	82.143.656	66.320.348	95.281.541	0	93,60%	115,74%	102,68%	75,36%	105,87%	0,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.889.100	15.000.000	17.500.000				52.469.600	24.264.500	30.284.800				95,59%	161,76%	173,06%			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				18.000.000	18.250.000	18.500.000				10.922.600	8.999.380					60,68%	49,31%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	10.000.000	12.500.000				10.000.000	9.167.000	8.077.400				100,00%	91,67%	64,62%			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				13.250.000	13.500.000	13.750.000				8.868.600	55.461.273					66,93%	410,82%	0,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.999.200	40.500.000	50.000.000				26.342.592	42.380.040	43.781.456				87,81%	104,64%	87,56%			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				56.750.000	58.250.000	60.750.000				46.529.148	30.820.888					81,99%	52,91%	0,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.747.600	90.000.000	193.643.600	114.000.000	117.000.000	120.000.000	123.591.303	106.204.922	119.674.702	151.543.773	53.644.102	0	99,87%	118,01%	61,80%	132,93%	45,85%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	66.785.600	60.000.000	68.000.000				66.775.303	54.929.922	67.477.702				99,98%	91,55%	99,23%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan				74.000.000	60.000.000	62.000.000				92.531.773	33.424.102					125,04%	55,71%	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.962.000	30.000.000	40.000.000				56.816.000	51.275.000	52.197.000				99,74%	170,92%	130,49%			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000	38.000.000	40.000.000				59.012.000	20.220.000					147,53%	53,21%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0	85.643.600					0	0				0,00%	0,00%	0,00%			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0	19.000.000	18.000.000				0	0	0				0,00%	0,00%	0,00%
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	917.066.900	2.097.000.000	1.512.000.000	1.661.000.000	1.705.000.000	1.701.000.000	913.654.641	2.489.538.241	1.638.193.852	1.312.855.173	672.081.963	0	99,63%	118,72%	108,35%	79,04%	39,42%	0,00%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	917.066.900	2.097.000.000	1.512.000.000	1.661.000.000	1.705.000.000	1.701.000.000	913.654.641	2.489.538.241	1.638.193.852	1.312.855.173	672.081.963	0	99,63%	118,72%	108,35%	79,04%	39,42%	0,00%
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		20.000.000	20.000.000					19.999.900	9.860.872				0,00%	100,00%	49,30%			
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				20.000.000						0	0					0,00%	0,00%	0,00%
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	295.147.000	360.000.000	200.000.000				294.611.800	356.657.253	237.324.800				99,82%	99,07%	118,66%			
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				200.000.000						241.348.300								
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik					300.000.000	300.000.000					51.985.200					0,00%	17,33%	0,00%
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		68.000.000	68.000.000					68.718.900	118.675.332					101,06%	174,52%			
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				89.000.000						59.576.374					0,00%			
Penyusunan Konten					200.000.000	200.000.000					26.837.279					0,00%	13,42%	0,00%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	488.048.100	389.000.000	380.000.000				485.937.937	438.243.900	401.186.206				99,57%	112,66%	105,58%			
Pengelolaan Media Komunikasi Publik				440.000.000						380.716.870						86,53%		
Pengelolaan Media Komunikasi Publik					500.000.000	500.000.000					328.125.416						65,63%	0,00%
Pelayanan Informasi Publik	85.727.800	68.000.000	68.000.000				85.038.981	67.779.104	142.717.126				99,20%	99,68%	209,88%			
Pelayanan Informasi Publik				136.000.000						134.382.391						98,81%		
Pelayanan Informasi Publik					100.000.000	100.000.000					70.171.336						70,17%	0,00%
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	48.144.000	52.577.000	50.000.000				48.065.923	59.999.896	0				99,84%	114,12%	0,00%			
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				50.000.000						0	10.473.796					0,00%	0,00%	0,00%
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		17.123.000	15.000.000					16.944.950	0				0,00%	98,96%	0,00%			
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				30.000.000						0	3.803.561					0,00%	0,00%	0,00%
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		15.500.000	15.000.000					15.494.362	22.652.360				0,00%	99,96%	151,02%			
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				30.000.000						0						0,00%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		1.006.800.000	597.000.000					1.347.671.346	705.777.156				0,00%	133,86%	118,22%			
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				567.000.000						496.831.238						87,62%		
Relasi Media					250.000.000	250.000.000					180.685.375						72,27%	
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat					155.000.000	151.000.000												
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik					200.000.000	200.000.000												
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupatan/Kota		100.000.000	99.000.000					98.028.630	0					98,03%	0,00%			
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupatan/Kota				99.000.000						0						0,00%		
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.553.637.900	6.373.000.000	4.594.000.000	5.046.000.000	5.183.000.000	5.171.000.000	5.025.563.526	7.108.014.647	6.079.692.435	5.348.269.199	2.844.209.026	-	90,49%	111,53%	132,34%	105,99%	54,88%	0,00%
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	4.830.000.000	3.151.000.000	3.500.000.000	135.000.000	125.000.000	0	5.753.983.184	4.030.557.685	4.826.500.983	8.084.500	0	0,00%	119,13%	127,91%	137,90%	5,99%	0,00%
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		4.830.000.000	3.151.000.000					5.753.983.184	4.030.557.685					119,13%	127,91%			
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				3.500.000.000						4.826.500.983						137,90%		
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa					135.000.000	125.000.000					8.084.500						5,99%	0,00%
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.553.637.900	1.543.000.000	1.443.000.000	1.546.000.000	5.048.000.000	5.046.000.000	5.025.563.526	1.354.031.463	2.049.134.750	521.768.216	2.836.124.526	0	90,49%	87,75%	142,01%	33,75%	56,18%	0,00%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	607.360.200	320.000.000	320.000.000				501.108.145	320.955.700	160.445.835				82,51%	100,30%	50,14%			
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				320.000.000						22.742.058						7,11%		
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda					100.000.000	100.000.000					12.637.520						12,64%	0,00%
Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah		400.000.000	300.000.000					382.876.100						95,72%	0,00%			
Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah				400.000.000						0						0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		60.000.000	60.000.000					99.843.800						166,41%	0,00%			
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				60.000.000						0						0,00%	0,00%	0,00%
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		268.000.000	268.000.000					216.220.634	34.276.231					80,68%	12,79%			
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				268.000.000						136.354.042						50,88%		
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah					348.000.000	348.000.000					49.274.504						14,16%	0,00%
Pengembangan dan Pengelolaan Ekositem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	4.946.277.700	55.000.000	55.000.000				4.524.455.381	192.545.600	369.670.866				91,47%	350,08%	672,13%			
Pengembangan dan Pengelolaan Ekositem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas				55.000.000						351.183.116						638,51%		
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas					200.000.000	200.000.000					1.561.600						0,78%	0,00%
Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas					450.000.000	498.000.000					67.689.282						15,04%	0,00%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		400.000.000	400.000.000					121.634.529	1.469.170.418				0,00%	30,41%	367,29%			
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				400.000.000						0						0,00%		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		40.000.000	40.000.000					19.955.100	15.571.400					49,89%	38,93%			
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE				43.000.000						11.489.000						26,72%		
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE					100.000.000	100.000.000					3.254.900						3,25%	0,00%
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo					250.000.000	300.000.000					4.598.000						1,84%	0,00%
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					3.600.000.000	3.500.000.000					2.697.108.720						74,92%	0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	109.111.000	226.000.000	163.000.000	179.000.000	184.000.000	183.000.000	104.551.344	222.630.062	248.458.876	109.793.012	39.532.138	0	95,82%	98,51%	152,43%	61,34%	21,48%	0,00%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	109.111.000	226.000.000	163.000.000	179.000.000	184.000.000	183.000.000	104.551.344	222.630.062	248.458.876	109.793.012	39.532.138	0	95,82%	98,51%	152,43%	61,34%	21,48%	0,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	109.111.000	146.000.000	84.000.000				104.551.344	146.236.162	98.741.826				95,82%	100,16%	117,55%			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				81.000.000						71.650.512						88,46%		
Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		30.000.000	30.000.000					29.102.900	31.977.300				0,00%	97,01%	106,59%			
Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				40.000.000						0						0,00%		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional					100.000.000	100.000.000					33.676.138						33,68%	0,00%
Membangun Metadata Statistik Sektoral		0	0					0	0					0,00%	0,00%			
Membangun Metadata Statistik Sektoral				10.000.000						12.291.000						122,91%		
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral					40.000.000	40.000.000					0					0,00%	0,00%	0,00%
Pengembangan Infrastruktur		50.000.000	49.000.000					47.291.000	117.739.750				0,00%	94,58%	240,29%			
Pengembangan Infrastruktur				48.000.000						25.851.500						53,86%		
Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral					44.000.000	43.000.000					5.856.000						13,31%	0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																		
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	29.342.500	165.000.000	119.000.000	131.000.000	134.000.000	134.000.000	21.683.931	228.461.411	507.105.852	135.769.071	22.004.982	0	73,90%	138,46%	426,14%	103,64%	16,42%	0,00%
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.342.500	145.000.000	99.000.000	101.000.000	90.000.000	90.000.000	21.683.931	183.097.095	490.862.025	114.690.700	11.810.000	0	73,90%	126,27%	495,82%	113,56%	13,12%	0,00%
Penetepan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		115.000.000	69.000.000					108.616.095	0				0,00%	94,45%	0,00%			
Penetepan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				71.000.000	50.000.000	50.000.000				101.984.200	900.000					143,64%	1,80%	0,00%
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Derah Kabupaten/Kota	29.342.500	30.000.000	30.000.000				21.683.931	74.481.000	490.862.025				73,90%	248,27%	1636,21%			
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Derah Kabupaten/Kota				30.000.000	40.000.000	40.000.000				12.706.500	10.910.000					42,36%	27,28%	0,00%
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0	20.000.000	20.000.000	30.000.000	44.000.000	44.000.000	0	45.364.316	16.243.827	21.078.371	10.194.982	0	0,00%	226,82%	81,22%	70,26%	23,17%	0,00%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		20.000.000	20.000.000					45.364.316	16.243.827				0,00%	226,82%	81,22%			
Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000	44.000.000	44.000.000				21.078.371	10.194.982					70,26%	23,17%	0,00%

Tabel 2.6
Evaluasi terhadap Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Indeks Pemerintah Digital	-	-	-	-	0.00	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	61.81	60.53	69.44	64.34	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	61.81	60.53	69.44	64.34	
4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	35.8	57.43	65.98	82.22	84.66	
5	Indeks Satu Data Indonesia	-	-	40.05	58.25	59.80	
6	Indeks KAMI	-	-	584.00	590.00	779.00	

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana prasarana.
2. Pelayanan, pengelolaan serta pemanfaatan informasi publik belum optimal.
3. Pelaksanaan Kota Cerdas dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum sepenuhnya optimal dikarenakan Perangkat Daerah pendukung masih beranggapan ini merupakan tugas Dinkominfostasandi saja sehingga peran Perangkat Daerah lain belum optimal.
4. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral, koordinasi dilakukan dengan BPS, instansi vertikal lain dan Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo, sehingga ketersediaan data dan informasi dari instansi lain yang tepat waktu merupakan permasalahan eksternal yang perlu dicarikan solusinya dengan meningkatkan koordinasi
5. Penanganan urusan statistik secara bersama antara BPS, Perangkat Daerah dan instansi serta lembaga terkait lainnya, sering terjadi perbedaan angka atau data, hal tersebut merupakan tantangan untuk menyamakan data dengan definisi yang disepakati bersama.
6. Fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi belum optimal.

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfostandi Kabupaten Purworejo di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo.
2. Posisi strategis Kabupaten Purworejo sebagai lintasan penghubung dengan antar kabupaten dan antar provinsi.
3. Keberadaan jaringan transportasi sebagai modal dasar pengembangan transportasi Kabupaten Purworejo seiring dengan adanya Bandar Udara YIA di Kulon Progo.
4. Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan.
5. Semakin bertumbuhkembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang, komunikasi dan informatika.
6. Mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan kemampuan dengan integrasi wilayah
7. Kinerja Urusan Statistik diprediksikan akan semakin meningkat khususnya terjadi perkembangan penyediaan data statistik dan informasi daerah, serta dokumen statistik bagi kalangan dunia usaha dan masyarakat.
8. Manajemen penyimpanan data secara elektronik semakin meningkat seiring dengan penggunaan sistem informasi manajemen di berbagai bidang pembangunan.
9. Penyediaan data statistik juga mengalami kemajuan, tidak terbatas pada data manual, tapi juga dalam bentuk data digital, sehingga

mempermudah proses akan memudahkan kalangan dunia usaha dan masyarakat semakin mudah mengakses data dan informasi tentang pembangunan daerah.

10. Validitas dan kemutakhiran data semakin meningkat, sehingga dapat menjamin ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, sehingga jenis statistik yang tersusun di Kabupaten Purworejo diperkirakan juga akan semakin bervariasi.
11. Pengelolaan dan perlindungan informasi sudah diklasifikasikan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan berdasar Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemberian akses terhadap layan informasi publik kepada masyarakat. Dalam pelayanan informasi publik telah dibentuk PPID. PPID adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PPID adalah badan publik yang ditunjuk untuk mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani informasi publik sesuai dengan undang-undang. PPID dibentuk sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Dinkominfostasandi memberikan pelayanan kepada semua Perangkat Daerah untuk penyediaan akses intranet pemerintah. Dinkominfostasandi juga menyediakan akses internet kepada seluruh Perangkat Daerah serta memberikan layanan internet gratis di beberapa area publik. Penyediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik dilaksanakan dalam rangka menunjang pelayanan kepada masyarakat serta mefasitilasi pelayan kota cerdas.

Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahahn Bidang Statistik, Dinkominfo juga menyediakan data sektoral yang dihimpun dari penyedia data seluruh Perangkat Daerah. Data sektoral ini dapat dipakai oleh masyarakat serta perangkat daerah sendiri. Penyediaan Data sektoral ini juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Dinkominfostasandi bekerjasama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN). Layanan persandian melayani pengamanan informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah, termasuk kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaannya. Bidang ini juga bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan tugas di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analis permasalahan dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan dan isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam

hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo dalam mengemban tugas dan fungsinya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Perencanaan Strategis Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun selanjutnya.

Permasalahan terkait komunikasi, informatika, statistik dan persandian merupakan persoalan yang kompleks dan dinamis. Kompleksitas persoalan tidak hanya menyangkut variabel masalah yang luas, namun juga menyangkut optimalisasi integrasi dan sinergitas lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam pengembangan perencanaan dan pengendalian kebijakan, strategi dan progam agar lebih menyentuh akar permasalahan yang mendasar.

Sementara sisi dinamis dari persoalan komunikasi, informatika, statistik dan persandian adalah terkait bahwa persoalan tersebut memiliki kecenderungan untuk meningkat, dengan faktor penyebab yang beragam dari tahun ke tahun sehingga memerlukan penanganan yang komperehensif, tidak hanya penanganan masalahnya semata namun juga penanganan yang bersifat antisipatif atas potensi permasalahan yang dapat muncul dikemudian hari.

Sumber daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan tahun-tahun sebelumnya dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, maka yang menjadi permasalahan dalam pelayanan dan isu strategis Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo dapat diidentifikasi seperti yang tersaji dalam tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7

Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINASMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Pelayanan publik prima belum optimal		Cyber insecurity			
	Jangkauan penyebaran Informasi Publik terhadap masyarakat belum optimal					
	Literasi Digital Masyarakat masih rendah					
	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal					
	Pelaksanaan Kota Cerdas belum optimal					
	Infrastruktur dan jaringan TIK belum optimal					
	Keamanan informasi belum optimal					
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Belum Optimal		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaah visi, misi dan progam Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo terpilih. Hal tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo tersebut. Hasil identifikasi terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo.

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan,tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2025 – 2029 yaitu:

"Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (PURWOREJO BERSERI)"

Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Terpilih yang menyangkut bidang komunikasi dan informatika adalah Misi 5 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Misi 5 memiliki sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi yang diukur keberhasilannya melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Penentuan Tujuan dan Sasaran Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 didasarkan pada :

a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
b. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
c. Mempertimbangkan kondisi Perangkat Daerah yang ada saat ini,

Untuk merealisasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo 2025-2029, Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo perlu meneetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Adapun tujuan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029, yaitu: "Mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah".

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur, maka Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo menjabarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut kedalam beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan kematangan digital pemerintahan;
3. Meningkatnya kualitas statistik sektoral;
4. Meningkatnya layanan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah.

Secara rinci tujuan dan sasaran serta target yang telah ditetapkan dan akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel 3.1. Penetapan tujuan dan sasaran sejalan dengan RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 dan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan tujuan dan sasaran renstra sebelumnya.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Pemerintah Digital	0	1,70	1,70	2,00	2,00	2,20	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan kematangan digital pemerintahan	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	
			Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	3,25	3,38	3,38	3,50	3,50	3,63	
		Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Indeks Satu Data Indonesia	59,80	61,60	61,60	63,40	63,40	65,20	
		Meningkatnya layanan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI	780	790	800	810	820	825	

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo. Penahapan Renstra Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Penahapan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Menguatkan sistem menejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Menguatkan keterbukaan informasi publik	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Memantapkan keterbukaan informasi publik	Mewujudkan keterbukaan informasi publik	Meneguhkan keterbukaan informasi publik
Menguatkan kualitas statistik sektoral	Meningkatkan kualitas statistik sektoral	Memantapkan kualitas statistik sektoral	Mewujudkan kualitas statistik sektoral	Meneguhkan kualitas statistik sektoral
Menguatkan layanan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah	Meningkatkan layanan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah	Memantapkan layanan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah	Mewujudkan layanan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah	Meneguhkan layanan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah

Arah kebijakan Renstra Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinkominfostasandi Kabupate Purworejo. Adapun Arah kebijakan Renstra Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2026	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Konsolidasi pondasi Purworejo cerdas dan sinergi kebijakan, digitalisasi layanan publik, pengembangan kota cerdas, fasilitasi SPBE, penyediaan internet, optimalisasi website PD, pengintegrasian/ pengembangan sistem informasi, publikasi informasi, penguatan PPID, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Penyusunan Konten, Penguatan SDM	
		Penguatan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi	Penguatan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi melalui aktivitas Koordinasi, Evaluasi, Monitoring, Workshop, Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral, dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Statistik Sektoral	
		Penguatan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif	Penguatan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif melalui aktivitas Monitoring Opini dan Aspirasi publik, Monitoring dan Cepat Tanggap Respon Layanan Aduan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2027		Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Integrasi dan optimalisasi inovasi Purworejo Cerdas, digitalisasi layanan publik, pengembangan kota cerdas, fasilitasi SPBE, penyediaan internet, optimalisasi website PD, pengintegrasian/ pengembangan sistem informasi, publikasi informasi, penguatan PPID, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Penyusunan Konten, Penguatan SDM	
		Peningkatan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi	Peningkatan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi melalui aktivitas Koordinasi, Evaluasi, Monitoring, Workshop, Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral, dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Statistik Sektoral	
		Peningkatan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif	Peningkatan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif melalui aktivitas Monitoring Opini dan Aspirasi publik, Monitoring dan Cepat Tanggap Respon Layanan Aduan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2028		Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Akselerasi inovasi berbasissektor unggulan, digitalisasi layanan publik, pengembangan kota cerdas, fasilitasi SPBE, penyediaan internet, optimalisasi website PD, pengintegrasian/ pengembangan sistem informasi, publikasi informasi, penguatan PPID, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Penyusunan Konten, Penguatan SDM	
		Pemantapan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi	Pemantapan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi melalui aktivitas Koordinasi, Evaluasi, Monitoring, Workshop, Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral, dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Statistik Sektoral	
		Pemantapan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif	Pemantapan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif melalui aktivitas Monitoring Opini dan Aspirasi publik, Monitoring dan Cepat Tanggap Respon Layanan Aduan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2029		Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Ekspansi Ekosistem dan Kolaborasi, digitalisasi layanan publik, pengembangan kota cerdas, fasilitasi SPBE, penyediaan internet, optimalisasi website PD, pengintegrasian/ pengembangan sistem informasi, publikasi informasi, penguatan PPID, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Penyusunan Konten, Penguatan SDM	
		Perwujudan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi	Perwujudan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi melalui aktivitas Koordinasi, Evaluasi, Monitoring, Workshop, Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral, dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Statistik Sektoral	
		Perwujudan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif	Perwujudan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif melalui aktivitas Monitoring Opini dan Aspirasi publik, Monitoring dan Cepat Tanggap Respon Layanan Aduan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2030		Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Purworejo Cerdas Berkelanjutan, digitalisasi layanan publik, pengembangan kota cerdas, fasilitasi SPBE, penyediaan internet, optimalisasi website PD, pengintegrasian/ pengembangan sistem informasi, publikasi informasi, penguatan PPID, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Penyusunan Konten, Penguatan SDM	
		Peneguhan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi	Peneguhan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi melalui aktivitas Koordinasi, Evaluasi, Monitoring, Workshop, Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral, dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Statistik Sektoral	
		Peneguhan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif	Peneguhan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif melalui aktivitas Monitoring Opini dan Aspirasi publik, Monitoring dan Cepat Tanggap Respon Layanan Aduan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo yaitu pijakan penyusunan Renja Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2030.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra

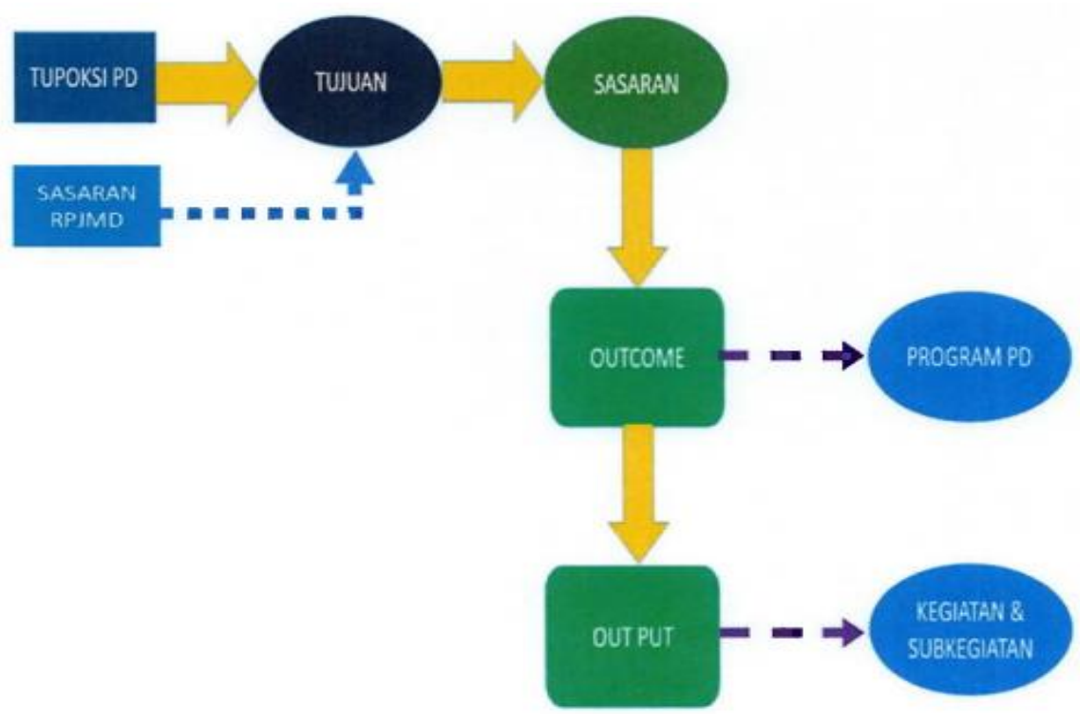

Adapun Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 seperti digambarkan dalam tabel 4.1 sedangkan Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 digambarkan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Indeks Pemerintah Digital		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan : Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah		
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Daerah	Daerah yang Disediakan		
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik			Indeks Keterbukaan Informasi Publik		
			Meningkatnya jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten		Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan, dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Relasi Media	
						Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
						Pelayanan Informasi Publik	
						Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
						Diseminasi Informasi	
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
						Penyusunan Konten	
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
			Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terselenggaranya kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Terselenggaranya perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
						Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
						Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
						Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
						Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
						Penyediaan Akses Internet	
						Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Kota Cerdas	
		Meningkatnya kualitas statistik sektoral			Indeks Satu Data Indonesia		
			Meningkatnya jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Terselenggaranya layanan statistik sektoral	Layanan Statistik Sektoral	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
						Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
						Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
		Meningkatnya layanan persandian dan keamanan informasi			Indeks KAMI		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		pemerintah daerah					
			Meningkatnya keamanan informasi pemerintah		Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Terlaksananya Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
						Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
						Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Terlayaninya Persandian	Prosentase layanan persandian	Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Pemerintah Digital	Angka	0	1,7		1,7		2		2		2,2		2,2			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
2.16.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						4.478.816.196		4.523.604.000		3.976.775.000		3.976.775.000		3.976.775.000				
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	4.478.816.196	100	4.523.604.000	100	3.976.775.000	100	3.976.775.000	100	3.976.775.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	3	73.528.200	3	54.000.000	3	54.000.000	3	54.000.000	3	54.000.000	3			
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	71.448.200	22	50.000.000	22	50.000.000	22	50.000.000	22	50.000.000	22			
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	22	1.160.000	22	2.000.000	22	2.000.000	22	2.000.000	22	2.000.000	22			
2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	1	920.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1			
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	27	45	3.886.977.996	45	3.887.772.396	45	3.356.224.200	45	3.356.224.200	45	3.356.224.200	45			
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	27	37	3.885.772.396	37	3.885.772.396	34	3.354.224.200	34	3.354.224.200	34	3.354.224.200	34			
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	44	1.205.600	44	2.000.000	44	2.000.000	44	2.000.000	44	2.000.000	44			
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	11	1.239.200	11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000	11			
2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	11	1.239.200	11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000	11			
2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	0	16	950.000	16	1.000.000	16	1.000.000	16	1.000.000	16	1.000.000	16			
2.16.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	0	16	950.000	16	1.000.000	16	1.000.000	16	1.000.000	16	1.000.000	16			
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	17	3.810.000	17	3.800.000	17	3.800.000	17	3.800.000	17	3.800.000	17			
2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	17	3.810.000	17	3.800.000	17	3.800.000	17	3.800.000	17	3.800.000	17			
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	9	133.060.000	9	131.000.000	9	131.000.000	9	131.000.000	9	131.000.000	9			
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	7	12.000.000	7	12.000.000	7	12.000.000	7	12.000.000	7	12.000.000	35			
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	17	13.223.300	17	12.000.000	17	12.000.000	17	12.000.000	17	12.000.000	85			
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	11	52.852.800	11	53.000.000	11	53.000.000	11	53.000.000	11	53.000.000	55			
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	4	13.240.000	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	20			
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	12	1.332.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	60			
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	15	10.288.700	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	75			
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	12	2.756.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	60			
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	17.564.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	60			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.16.01.2.05.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	2	9.803.200	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10			
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	0	0		1	124.051.604	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	16			
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	124.051.604	0	0	0	0	0	0	1			
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	5	50.000.000	0	0	0	0	5			
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	5	50.000.000	0	0	5			
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	50.000.000	5			
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	146.754.000	24	142.000.000	24	146.754.000	24	146.754.000	24	146.754.000	120			
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	102.000.000	12	102.000.000	12	102.000.000	12	102.000.000	12	102.000.000	60			
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	44.754.000	12	40.000.000	12	44.754.000	12	44.754.000	12	44.754.000	60			
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	6	232.496.800	5	178.480.000	6	232.496.800	6	232.496.800	6	232.496.800	29			
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	2	74.830.000	2	74.830.000	2	74.830.000	2	74.830.000	2	74.830.000	2			
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	7	27.650.000	7	27.650.000	7	27.650.000	7	27.650.000	7	27.650.000	7			
2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	0	125	10.000.000	125	10.000.000	125	10.000.000	125	10.000.000	125	10.000.000	125			
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	227	137	64.602.000	137	60.000.000	137	64.602.000	137	64.602.000	137	64.602.000	137			
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1	48.595.800	0	0	1	48.595.800	1	48.595.800	1	48.595.800	1			
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	11	6.819.000	11	6.000.000	11	6.819.000	11	6.819.000	11	6.819.000	11			
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan kematangan digital pemerintahan		Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	3,25	3,38		3,38		3,5		3,5		3,63		3,63			
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	84,66	85,5		86		86,5		87		87,5		87,5			
2.16.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						4.820.188.933		4.845.147.000		4.820.189.000		4.896.348.000		4.973.710.000				
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan, dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	%	61	63	1.149.501.133	64	1.155.453.000	65	1.149.501.000	66	1.167.663.000	67	1.186.112.000	67	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten Purworejo	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabi/kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota	%	100	100	1.149.501.133	100	1.155.453.000	100	1.149.501.000	100	1.167.663.000	100	1.186.112.000	100			
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	0	1	218.026.600	1	221.013.000	1	218.000.000	1	225.000.000	1	230.000.000	1			
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	1	10	12.669.200	10	13.000.000	10	13.000.000	10	15.000.000	10	18.000.000	10			
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	1	10	115.994.000	10	116.500.000	10	115.561.000	10	118.000.000	10	120.000.000	10			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	1	2	122.282.600	2	123.000.000	2	121.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	2			
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase	0	100	289.940.933	100	289.940.000	100	289.940.000	100	289.940.000	100	289.940.000	100			
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	1	2	357.750.300	2	358.000.000	2	358.000.000	2	358.000.000	2	360.000.000	2			
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	1	4	20.502.000	4	21.000.000	4	21.000.000	4	21.000.000	4	25.000.000	4			
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	0	50	12.335.500	50	13.000.000	50	13.000.000	50	15.723.000	50	18.172.000	50			
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya jumlah aplikasi yang dibangun/ dikembangkan	Persentase pembangunan/ pengembangan aplikasi sesuai dengan Peta Rencana SPBE	%	13,33	20	3.670.687.800	40	3.689.694.000	60	3.670.688.000	80	3.728.685.000	100	3.787.598.000	100	Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas	Kabupaten Purworejo	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	%	100	100	100.496.100	100	101.694.000	100	100.496.000	100	105.000.000	100	110.000.000	100			
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	1	1	100.496.100	1	101.694.000	1	100.496.000	1	105.000.000	1	110.000.000	1			
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	3.570.191.700	100	3.588.000.000	100	3.570.192.000	100	3.623.685.000	100	3.677.598.000	100			
2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	0	4	6.606.400	4	10.000.000	4	6.607.000	4	12.000.000	4	17.598.000	4			
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	41	0	3.135.270.300	41	639.255.000	41	703.180.000	41	773.498.000	41	850.848.000	41			
2.16.03.2.02.0025	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen	0	2	7.242.000	2	10.000.000	2	7.242.000	2	15.000.000	2	25.000.000	2			
2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	2	2	222.313.000	2	225.000.000	2	222.313.000	2	235.000.000	2	240.000.000	2			
2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Laporan	0	4	23.617.000	4	25.000.000	4	23.617.000	4	25.000.000	4	30.000.000	4			
2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	0	41	0	41	2.500.745.000	41	2.432.090.000	41	2.378.187.000	41	2.319.152.000	41			
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1	3	175.143.000	3	178.000.000	3	175.143.000	3	185.000.000	3	195.000.000	3			
3	Meningkatnya kualitas statistik sektoral		Indeks Satu Data Indonesia	Angka	59,8	61,6		61,6		63,4		63,4		65,2		65,2			
2.20.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						129.068.800		129.069.000		129.069.000		131.108.000		133.180.000				
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	129.068.800	100	129.069.000	100	129.069.000	100	131.108.000	100	133.180.000	100	Bidang Teknologi, Informatika, Statistik dan Persandian	Kabupaten Purworejo	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya layanan statistik sektoral	Layanan Statistik Sektoral	Bulan	12	12	129.068.800	12	129.069.000	12	129.069.000	12	131.108.000	12	133.180.000	12			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	%	0	100	72.940.800	100	72.941.000	100	72.941.000	100	73.000.000	100	73.000.000	100			
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	%	0	100	11.161.000	100	11.161.000	100	11.161.000	100	13.000.000	100	15.000.000	100			
2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	0	50	44.967.000	50	44.967.000	50	44.967.000	50	45.108.000	50	45.180.000	50			
4	Meningkatnya layanan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah		Indeks KAMI	Angka	779	790		800		810		820		825		825			
2.21.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						338.806.400		338.806.000		338.806.000		344.160.000		349.597.000				
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	84,86	86,06	338.806.400	87,15	338.806.000	88,24	338.806.000	89,32	344.160.000	89,87	349.597.000	89,87	Bidang Teknologi, Informatika, Statistik dan Persandian	Kabupaten Purworejo	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	100	100	338.806.400	100	287.000.000	100	287.000.000	100	291.000.000	100	295.597.000	100			
2.21.02.2.01.0005	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Laporan	0	1	48.949.000	1	47.000.000	1	47.000.000	1	48.000.000	1	49.597.000	1			
2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	41	41	95.729.100	41	95.000.000	41	95.000.000	41	96.000.000	41	96.000.000	41			
2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen	1	1	194.128.300	1	145.000.000	1	145.000.000	1	147.000.000	1	150.000.000	1			
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlayaninya Persandian	Prosentase layanan persandian	%	100	0		100	51.806.000	100	51.806.000	100	53.160.000	100	54.000.000	100			
2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah	Kegiatan	1	0	0	5	51.806.000	5	51.806.000	5	53.160.000	5	54.000.000	5			
Jumlah							**9.766.880.329**		**9.838.828.000**		**9.264.839.000**		**9.348.391.000**		**9.433.262.000**				

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2024 memiliki Visi “Indonesia Emas 2045”. RPJPN menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN dibagai menjadi periodisasi 5 Tahunan. Saat ini adalah periode RPJMN I Tahun 2025-2029.

Dalam rangka menjaga kesimbungan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah maka Pemerintah Daerah membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah dengan jangka waktu 20 tahun. RPJPD kemudian dijabarkan kedalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 tahun.

Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam Menyusun RPJMDnya berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memastikan keselarasan antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo sebagai sebuah Dinas yang melaksanakan tugas dari Bupati Purworejo menyusun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung terhadap program nasional, provinsi, dan kegiatan unggulan daerah. Dukungan yang diberikan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo sesuai dengan 3 urusan yang menjadi kewenangannya yaitu: Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang mencakup program, kegiatan, dan subkegiatan terkait Pelayanan Administrasi Umum, Pelayanan Bidang Komunikasi Publik, Pelayanan Bidang Informatika yang salah satunya terkait dengan dukungan terhadap Riset Unggulan Daerah tentang Smart City (Penyediaan internet, Pelaksanaan SPBE, Pengembangan Aplikasi, Fasilitasi Pengelolaan Kota Cerdas dan lain lain), Pelayanan bidang Statistik utamanya Statistik Sektoral dan Pelayanan Bidang Persandian yang terkait dengan pengamanan informasi.

Penjabaran Program Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional), Mendukung Program Prioritas Nasional, Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) dan Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan) dapat dijabarkan seperti dalam Tabel 4.3 tentang Penjabaran Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional) Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, Tabel 4.4 tentang Penjabaran Program yang Mendukung Program Prioritas Nasional Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, Tabel 4.5 tentang Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dan Tabel 4.6 tentang Penjabaran Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan) Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Penjabaran Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional) yang dilaksanakan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penjabaran Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional)
Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Mendiseminasikan informasi kepada Publik terkait Ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM	Mendiseminasikan informasi kepada Publik terkait Ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi
2	Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Fasilitasi publikasi dan mendiseminasikan informasi terkait industri kreatif	Fasilitasi publikasi dan mendiseminasikan informasi terkait industri kreatif	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi
		Pelatihan Konten Kreator untuk turut mengembangkan industri Kreatif	Pelatihan Konten Kreator untuk turut mengembangkan industri Kreatif	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3	Asta Cita 4: Memperperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Fasilitasi publikasi dan mendiseminasikan informasi terkait Asta Cita 4	Fasilitasi publikasi dan mendiseminasikan informasi terkait Asta Cita 4	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi
		Pelatihan konten kreator untuk turut membangun SDM	Pelatihan Konten Kreator untuk turut membangun SDM	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi
4	Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi
		Fasilitasi publikasi dan mendiseminasikan informasi terkait produk hukum, birokrasi, pencegahan dan pemberantasan Korupsi narkoba, judi, dan penyelundupan	Fasilitasi publikasi dan mendiseminasikan informasi terkait produk hukum, birokrasi, pencegahan dan pemberantasan Korupsi narkoba, judi, dan penyelundupan	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi
5	Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Fasilitasi publikasi dan mendiseminasikan informasi tentang toleransi antar umat beragama	Fasilitasi publikasi dan mendiseminasikan informasi tentang toleransi antar umat beragama	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi

Penjabaran Program yang Mendukung Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penjabaran Program yang Mendukung Program Prioritas Nasional
Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Prioritas Nasional 3	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	Program: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Kegiatan: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi
			Program: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Kegiatan: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim	Program: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Kegiatan: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi
2	Prioritas Nasional 7	Transformasi digital layanan publik prioritas	Program: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Kegiatan: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi

Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) yang dilaksanakan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

Tabel 4.5
Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi)
Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Pemberian akses internet gratis di kecamatan dan kelurahan	Pemberian akses internet gratis di kecamatan dan kelurahan	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi
2	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Penyusunan konten	Penyusunan konten	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi
		Pembuatan podcast	Pembuatan podcast	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi
		Pelatihan konten kreator	Pelatihan konten kreator	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi
3	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Penyediaan data statistik yang akurat dan relevan	Penyediaan data statistik yang akurat dan relevan	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Dinkominfostasandi

Penjabaran Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan) yang dilaksanakan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

Tabel 4.6
Penjabaran Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan)
Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Sejahtera Wargane	Peningkatan citra dan positioning kepariwisataan Purworejo	Dukungan promosi digital dan media sosial	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi
			Dukungan pemuatan konten digital	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi
		Sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Intranet & pusat data	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi
		Pengembangan inovasi dan kompetensi teknologi informasi bagi ASN	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Intranet & pusat data	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi
			Pelatihan Konten Kreator	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Intranet & pusat data	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinkominfostasandi
			Pengelolaan Data Statistik	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Dinkominfostasandi
			Penguatan Keamanan Siber dan Perlindungan Data	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Dinkominfostasandi

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. IKU membantu dalam memantau dan mengevaluasi kinerja, serta menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja di masa depan. Dengan menggunakan IKU, organisasi dapat memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan strategis mereka dan dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan informasi yang akurat.

Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo mempunyai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan disertai dengan target yang realistis untuk bisa dicapai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta stakeholder lainnya. Kemduian target yang telah ditetapkan akan selalu dievaluasi guna memantau capaian target dalam periode tertentu sebagai salah satu dasar mengambil keputusan serta melakukan perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dilihat dalam tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Utama Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Indeks Pemerintah Digital	Angka	3,49	1,70	1,70	2,00	2,00	2,20	Indikator Tujuan
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Indikator Tujuan
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Indikator Sasaran
4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	Indikator Sasaran
5	Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	3,25	3,38	3,38	3,50	3,50	3,63	Indikator Sasaran
6	Indeks Satu Data Indonesia	Angka	59,80	61,60	61,60	63,40	63,40	65,20	Indikator Sasaran
7	Indeks KAMI	Angka	780	790	800	810	820	825	Indikator Sasaran

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo juga menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 13 Permendagri No. 18 Tahun 2020, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah Indikator kinerja yang paling menentukan atau paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara sederhana, IKK adalah ukuran-ukuran paling strategis (makro) yang digunakan untuk menilai sejauh mana seorang Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) beserta jajarannya berhasil menjalankan roda pemerintahan dan mencapai janji-janji yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

IKK dalam kerangka Permendagri No. 18 Tahun 2020 adalah "rapor" utama bagi seorang Kepala Daerah dan pemerintahannya. Indikator ini bersifat strategis, tingkat tinggi, dan menjadi penentu utama dalam laporan serta evaluasi kinerja oleh pemerintah pusat, yang pada akhirnya mencerminkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat dan negara.

Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui IKK adalah proses menetapkan ukuran kinerja yang spesifik dan terukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan di suatu daerah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja dan evaluasi.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Kunci Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	PPLKC	Permendagri No 18 Tahun 2020
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	PPLKC dan TISP	Permendagri No 18 Tahun 2020
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	67,00	IKP	Permendagri No 18 Tahun 2020
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	TISP	Permendagri No 18 Tahun 2020
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	TISP	Permendagri No 18 Tahun 2020
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	PERSANDIAN									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	84,97	86,06	87,15	88,24	89,32	89,87	TISP	Permendagri No 18 Tahun 2020
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	83,28	83,63	83,98	84,33	84,68	85,03	TISP	IUP
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / Indeks Pemerintahan Digital	Angka	3,55	3,61	3,68	3,74	3,80	3,86	PPLKC	IUP

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo setiap tahun.
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029 disusun untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Persiapan penyusunan meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPERIDA. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi.

Verifikasi harus dapat harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra

Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPERIDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPERIDA. BAPPERIDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Permendag No 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
19. Permenkop UKM No 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil
20. Permendag No 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun

2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
28. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah dan dasar bagi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan kabupaten Purworejo dalam pengambilan keputusan dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama lima tahun yang akan datang

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029:

1. Dasar Penyusunan Renja Perangkat Daerah tiap tahunnya;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah.

D. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjabaran latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan yang relevan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra PD Tahun 2025-2029

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab DKUKMP disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta penjelasan permasalahan dan isu strategis terkait Koperasi UKM dan Perdagangan

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat menarasikan ringkas apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, menetapkan tujuan, dan sasaran untuk lima tahun yang akan datang, beserta strategi dan arah kebijakan untuk mencapainya.

Bab IV PROGAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Mneteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya
3. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2029 merupakan bagian dari upata menjaga kesinambungan perencanaan PD yatitu pijakan penyusunan Renja PD tahun 2029

Bab V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, DKUKMP memiliki tugas yaitu : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta perdagangan sesuai dengan kewenangan daerah.

Fungsi yang dilaksanakan oleh DKUKMP adalah :

a. Perumusan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro, perizinan, barang pokok dan penting, dan kemetrologian serta sarana prasarana pengembangan perdagangan
b. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro, perizinan, barang pokok dan penting, dan kemetrologian serta sarana prasarana pengembangan perdagangan
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha mikro, perizinan, barang pokok dan penting, dan kemetrologian serta sarana prasarana pengembangan perdagangan
d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi dilingkungan DKUKMP
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tigas dan fungsi.

Struktur yang ada di DKUKMP adalah sebagai berikut :

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan semua program kerja dan kegiatan DKUKMP Kabupaten Purworejo didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagaimana dalam tabel berikut :

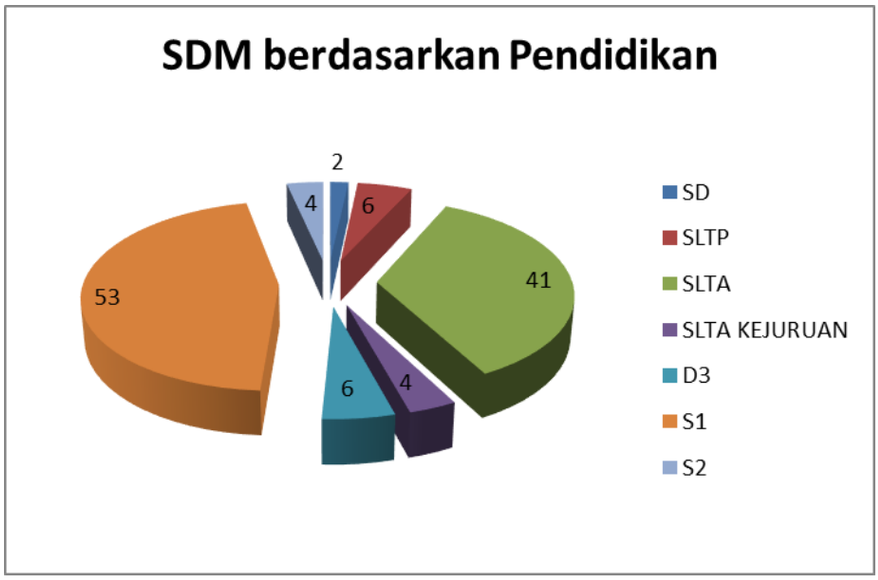

Gambar 2.1 SDM DKUKMP Kabupaten Purworejo berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.2. Data Pegawai Berdasar Golongan

NO	GOL	JUMLAH	ASN
1	ID	1	PNS
2	IIA	3	
3	IIB	1	
4	IIC	7	
5	IID	11	
6	IIIA	24	
7	IIIB	4	
8	IIIC	1	
9	IIID	5	
10	IVA	3	
11	IVB	2	
JUMLAH TOTAL PNS		**62**	
1	V	12	PPPK
2	VII	1	
3	IX	42	
JUMLAH TOTAL PPPK		**55**	

2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan perangkat daerah DKUKMP mencakup berbagai aspek pelayanan terkait dengan pengelolaan kopersi, pengembangan UMKM serta sektor perdagangan. Tugas utama dari DKUKMP adalah mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan sekotr koperasi dan UMKM serta pengelolaan sektor perdagangan yang efisien dan transparan. Berikut adalah pencapaian kinerja:

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				75,38	76,00	76,50	77,00	77,50	80,00		90	90,61	90,67				118,54	118,44	117,75		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				75,38	76,00	76,50	77,00	77,50	80,00		90,00	90,61	90,67				118,54	118,44	117,75		
Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100	100,00	100,00				100	100	100		
Persentase Koperasi Modern				2,02	3,03	7,07	11,11	15,15	19,19		7,07	10,81					100,01	152,91			
Persentase Koperasi yang Berkualitas				34,79	36,26	37,73	39,19	40,66	42,12		48,35	40,66	39,19				128	107,77	101,53		
Persentase Rekomendasi Izin Koperasi (simpan pinjam dan usaha simpan pinjam) yang tepat waktu				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100	0,00	100				100	0	100		
Persentase Koperasi yang kelembagaan dan Pengelolaan Usahanya Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian				66,66	67,40	71,06	74,73	78,39	82,05		83,8	84,15	97,54				124,34	118,43	115,41		
Persentase Koperasi Sehat				69,33	86,05	86,36	86,67	86,96	87,23		100	95,2	92,68				116,21	110,24	96,54		
Persentase Koperasi yang Memiliki SDM Berkompeten				0,00	6,59%	10%	15%	20%	25%		6,59	75%	78,76				100	747,75	97,14		
Persentase Koperasi yang Dibina				10,99	14,65	18,32	21,98	25,64	29,30		15,25	18,32	35,21				104,08	99,97	160,2		
Persentase Usaha Mikro Berizin yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global				1,49	1,72%	2,13%	2,38%	3,11%	3,69%			9,86					438,07	462,95			
Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan				1,29	1,97%	2,29%	2,62%	2,95%	3,28%		2,29	2,29	2,62				116,41	149,49	234,45		
Persentase Usaha Mikro yang Dibina				22,44	4,47	5,96	7,46	8,95	10,44		6,19	7,69	8,41				138,44	129,1	109,36		

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
Persentase Usaha Mikro Berizin yang Meningkat Menjadi Wira Usaha				3,60	5,08	6,55	8,03	9,5	10,97		6,54	7,09	8,32				128,77	108,28	103,62		
Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda				0,00	4,00%	4,59%	5,18%	5,76%	6,35%			2,55					63,75	55,56			
PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda				1.754.951,40	1.825.149,50	1.908.923,80	2.007.806,10	2.123.455,70	2.258.295,10		1 870 043,35	1917785,35	2000760				105,07	100,46%	99,65%		
persentase belanja penggunaan produk dalam negeri di pemeritah daerah				0	0	0	65	70	75	0	0	0	88,74			0	0	0	136,52		
Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik				17,24	19,35	22,58	25,81	29,03	32,26		19,35	22,58	38,71				100	100	149,98		
Persentase Ketertiban Pengelola Sarana Distribusi				15,91	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00		25,64	39,66	67,86				128,21	165,24	168,94		
Persentase koefisien variasi harga antar waktu				5,80	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		11,48	9,91	8,7				57,4	49,55	43,5		
Persentase kinerja realisasi pupuk				36,54	74,00	78	82	86	90		91,72	79,41	93,43				123,95	101,81	113,94		
Persentase Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor				0,00	6,67	13,33	20,00	26,67	33,33		25	35	40				374,81	262,57	111,11		
Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku				57,39	61,00	64	68	72	76		124,28	105,45	100				203,74	164,77	147,06		
Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipromosikan				0,00	14,29	29	43	57	71		57,14	57,14	57,14				399,88	200,01	100,01		

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			11.870.243.732,00	985.184.700					9.784.953.350,00	958.986.244					82,43%	97,34%		
															98,88%	97,47%		
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		10.820.000,00	6.775.000,00	2.499.000				10.810.000,00	6.758.100,00	2.374.000				99,91%	99,75%	95,00%		
Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten kota		6.820.000,00	3.387.500,00	1.237.500				6.820.000,00	3.379.050,00	1.124.400				100,00%	99,75%	90,86%		
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		6.820.000,00	3.387.500	1.237.500				6.820.000,00	3.379.050	1.124.400				100,00%	99,75%	90,86%		
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		4.000.000,00	3.387.500,00	1.261.500				3.990.000,00	3.379.050,00	1.249.600				99,75%	99,75%	99,06%		
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		4.000.000,00	3.387.500	1.261.500				3.990.000,00	3.379.050	1.249.600				99,75%	99,75%	99,06%		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		20.000.000,00	11.857.000,00	4.649.000				20.000.000,00	11.839.150,00	3.689.200				100,00%	99,85%	79,35%		
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		*20.000.000,00*	*11.857.000,00*	*4.649.000*				*20.000.000,00*	*11.839.150,00*	*3.689.200*				100,00%	99,85%	79,35%		
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				4.649.000						3.689.200						79,35%		
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		10.000.000,00	5.928.500					10.000.000,00	5.919.400					100,00%	99,85%			
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap PeraturanPerundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		10.000.000,00	5.928.500					10.000.000,00	5.919.750					100,00%	99,85%			
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP		71.279.600,00	40.470.600,00	24.629.600				71.279.400,00	40.419.350,00	24.549.900				100,00%	99,87%	99,68%		
KOPERASI																		
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan																		
Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang																		
Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah		71.279.600,00	40.470.600,00	24.629.600				71.279.400,00	40.419.350,00	24.549.900				100,00%	99,87%	99,68%		
Kabupaten/Kota																		
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP		58.910.800,00	34.139.100	24.629.600				58.910.800,00	34.106.200	24.549.900				100,00%	99,90%	99,68%		
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Penghargaan kesehatan Ksp/USP koperasi kewenangan Kabupaten/Kota		12.368.800,00	6.331.500					12.368.600,00	6.313.150					100,00%	99,71%			
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN		404.200.000,00	496.151.000,00	516.346.000				401.491.600,00	490.424.500,00	501.612.544				99,33%	98,85%	97,15%		
PERKOPERASIAN																		
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		404.200.000,00	496.151.000,00	516.346.000				401.491.600,00	490.424.500,00	501.612.544				99,33%	98,85%	97,15%		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta		404.200.000,00	496.151.000	516.346.000				401.491.600,00	490.424.500	501.612.544				99,33%	98,85%	97,15%		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN		112.525.000,00	72.424.000,00	66.808.000				112.525.000,00	72.042.480,00	66.763.900				100,00%	99,47%	99,93%		
PERLINDUNGAN KOPERASI																		
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		112.525.000,00	72.424.000,00	66.808.000				112.525.000,00	72.042.480,00	66.763.900				100,00%	99,47%	99,93%		
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai																		
Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,																		
Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,		112.525.000,00	72.424.000	66.808.000				112.525.000,00	72.042.480	66.763.900				100,00%	99,47%	99,93%		
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi																		
Kewenangan Kabupaten/Kota																		

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,57	2,37	1,50	1,70	2,02	IUP
2	Rasio Kewirausahaan	1,64	1,89	3,11%	2,3%	1,49%	IUP
3	Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,36	6,56	2,55	4,33	3,52	Tujuan PD
4	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1,57	2,37	1,50	1,70	2,02	Tujuan PD
5	Persentase Ketercapaian kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Program PD
6	Persentase Koperasi yang Memiliki Akuntabilitas Baik	54,95	45,36	44,72	44,01	43,31	Program PD
7	Persentase Koperasi Sehat	23,66	55,36	52,23	53,13	50,89	Program PD
8	Persentase SDM Koperasi yang Tersertifikasi	10,88	11,44	0,00	22,18	34,59	Program PD
9	Persentase Koperasi Aktif yang Berkembang Usahanya	0,00	0,00	0,00	1,76	2,46	Program PD
10	Persentase UMKM yang Berkualitas	1,38%	2,96%	4,76%	6,71%	8,71%	Program PD
11	Persentase UMKM yang mengalami Peningkatan Usaha	0,29%	0,61%	0,89%	1,18%	1,53%	Program PD
12	Persentase Pasar Rakyat menuju Ber-SNI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,23%	Program PD
13	Disparitas Harga	-0,5	+1,0	+2,5	-0,6	+2,0	Program PD
14	Persentase Distribusi Pupuk Bersubsidi sampai dengan Kios Pupuk Lengkap	0,96	0,88	0,99	0,79	0,93	Program PD
15	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Program PD
16	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	40%	89%	100%	100%	100%	Program PD
17	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang dipromosikan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Program PD
18	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas		48,35%	40,66%	39,19%	25,52%	IKK Outcome
19	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha				2,32%	1,51%	IKK Outcome
20	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)			100%	100%	100%	IKK Outcome
21	Persentase Kinerja realisasi Pupuk			91,72%	79,41%	93,44%	IKK Outcome
22	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			100%	100%	100%	IKK Outcome

Kinerja Pelayanan pada DKUKMP dapat dilihat dari SKM (Survey Kepuasan Masyarakat). SKM dilakukan secara mandiri dengan menggunakan kuisioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuisioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 9 usur tersebut yaitu :

1. Persyaratan
   Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
2. Sistem mekanisme dan prosedur
   Adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
3. Waktu penyelesaian
   Adalah jangka wktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/tarif
   Adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesisifikasi jenis pelayanan
   Adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dngan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
   Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, kahlian, keterampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana
   Adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
8. Maklumat pelayanan
   Adalah pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
9. Penanganan pengaduan saran dan masukan
   Adalah tata cara pelaksanaan penanganan pngaduan dan tindak lanjut.

Pada semester 1 tahun 2025 dilakukan penilaian SKM dengan melibatkan 135 responden yang dipilih secara acak. Jenis pelayanan yang di survei adalah pelayanan permohonan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi untuk Usaha Mikro.

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3,70	3,73	3,53	3,72	3,68	3,61	3,80	3,51	3,70
Kategori	A	A	B	A	A	A	A	B	A
IKM Unit Layanan	**90,70 (A atau Sangat Baik)**								

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembang Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan pertumbuhan ekonomi inklusif di Purworejo bagi Dinas Koperasi UKM Perdagangan meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM dalam adaptasi teknologi dan riset pasar, serta akses permodalan. Peluangnya adalah memperkuat UMKM melalui kebijakan yang tepat, pelatihan dan pendampingan oleh dinas, serta akses ke teknologi dan pembiayaan untuk memperluas pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Tantangan

a Koperasi dan UMKM menjadi Motor Penggerak Ekonomi Lokal

- Keterbatasan Modal dan Akses Pembiayaan
  Banyak pelaku UMKM dan Koperasi kesulitan mengakses kredit dari Bank atau lembaga keuangan lain karena kendala teknis dan non-teknis. Terkadang modal dari internal koperasi atau UMKM tidak cukup dan ketergantungan pada modal eksternal pun dapat membebani keuangan
- Rendahnya SDM dan Kualitas Manajemen
  Kualitas manajemen dan profesionalisme SDM pengelola Koperasi dan UMKM masih perlu ditingkatkan. Pemilik UMKM seringkali kurang memiliki pengetahuan tentang pencatatan, pengelolaan keuangan dan adaptasi teknologi digital yang menghambat keputusan keuangan yang tepat.

- Akses dan pemanfaatan teknologi yang terbatas
  Keterbatasan kemampuan dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital, termasuk untuk administrasi dan keuangan menjadi kendala signifikan di era digital. Kurangnya infrastruktur teknologi informasi yang memadai juga menghambat efisiensi dan pelayanan
- Kualitas Produk dan Inovasi
  Koperasi dan UMKM sering menbghadpai masalah dalam standar kualitas produk untuk meningkatkan daya saing. Tantangan dlam menciptakan inovasi produk dan strategis bisnis yang mampu menciptakan pasar dan memberikan keuntungan.
- Pemasaran dan Jangkauan Pasar
  Keterbatasan strategis pemasaran dan akses ke saluran distribusi yang efektif membuat UMKM sulit memperluas jangkauan pasar.

b. Perdagangan Produk UMKM Lokal

- Infratruktur dan Sarana Perdagangan yang kurang memadai
  Pasar daerah banyak yang belum tertata baik (sanitasi, tata letak dan fsilitas umum).
- Kualitas SDM Perdagangan masih rendah
  Kurangnya literasi bisnis dan pemasaran modern, minimnya kemampuan dalam pengelolaan usaha, manajemen stok, keuangan, layanan pelanggan. Rendahnya adaptasi terhadap teknologi digital dalam operasional usaha
- Daya saing produk masih rendah
  Produk lokal belum memiliki diferensial atau keunggulan kompetitif yang kuat, kurangnya branding dan promosi produk lokal
- Regulasi dan Tata Kelola Pasar
  Belum ada regulasi secara spesifik mendorong transformasi digital dan perdagangan modern serta regulasi terhadap pengawasan toko modern

2. Peluang
   a. Pemberian fasilitas, pendampingan serta akses ke berbagai program dan kebijakan untuk mendukung UMKM
   b. Kebijakan yang tepat dan akses pembiayaan misal melalui koperasi yang bisa memperkuat UMKM dan mendorong pertumbuhan yang inklusif
   c. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi, akses pasar dan daya saing UMKM.
   d. Pertumbuhan UMKM berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan mengurangi ketimpangan ekonomi
   e. Dengan memberdayakan UMKM, kesejahgteraan masyarakat dapat meningkat karena mereka menjadi penggerak utama dalam perekonomian daerah

2.1.5 Kelompok sasaran layanan

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas KUKMP Nomor : 800.1/1799/2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan DUKMP adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Pendirian Koperasi
2. Pelayanan Pembukaan Kantor Cabang
3. Pelayanan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu
4. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi
5. Pelayanan pemantauan koperasi
6. Pelayanan hibah
7. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi BBM Jenis tertentu
8. Pelayanan Penerbitan Surat SP-PKL
9. Pelayanan Pendaftaran Calon Peserta Pelathan
10. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan
11. Pelayanan Penerbitan Izin Menggunakan Tempat Berdagang di Pasar Daerah secara tetap
12. Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Pasar
13. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Distributor Pupuk
14. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Tanda Daftar Gudang
15. Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP di Dinas
16. Pelayanan sidang Tera ulang di luar dinas
17. Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP di tempat UTTP terpakai, UTTP terpasang atap, Gudang Importir, Pabrik atau Laboratorium lain
18. Pelayanan Fasilitasi Pembuatan NIB
19. Pelayanan Kemasan Produk UMKM
20. Pelayanan Kurasi Produk UMKM
21. Pelayanan Pelatihan dan Pengembangan UMKM
22. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pendampingan Tenant
23. Pelayanan Pendataan UMKM
24. Pelayanan Promosi Produk UMKM
25. Pelayanan Standarisasi dan Sertifikasi Produk UMKM
26. Pelayanan Sertifikasi Produk UMKM
27. Pelayanan Inkubasi Bisnis Purworejo Mulyo

Dari keseluruhan pelayanan tersebut maka kelompok sasaran layanan DKUKMP adalah koperasi, UMKM, Pedagang Pasar Daerah, Pemilik Gudang, SPBU, SPBE.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Permasalahan

1. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Kinerja koperasi selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan baik dalam jumlah maupun kesehatan koperasi. Meskipun jumlah koperasi aktif di Kabupaten Purworejo cenderung meningkat pada tahun 2024, namun jumlah koperasi sehat mengalami penurunan dari 119 tahun 2023 menjadi 114 tahun 2024. Penurunan jumlah koperasi yang sehat menyoroti tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan manajemen kelembagaan koperasi. Permasalahan yang dihadapi adalah

a. Ketergantungan pada pembiayaan internal atau kurangnya modal usaha. karena tidak memiliki modal dari luar yang cukup untuk operasi dan pertumbuhan. Kondisi ini dapat menghambat operasional, menghalangi pengembangan produk, membatasi ekspansi, dan bahkan mengancam keberlanjutan bisnis, serta dapat menyebabkan keengganan dalam berinovasi atau merespons perubahan pasar.

b. Keterbatasan SDM pelaku perkoperasian dan UMKM dalam manajemen, pemasaran, keuangan dan teknologi, kurangnya keterampilan dalam manajemen, pemasaran, keuangan, dan adopsi teknologi. Hambatan ini diperparah dengan keterbatasan anggaran untuk pelatihan, akses teknologi yang belum memadai, minimnya pengetahuan digital, serta kurangnya karyawan atau divisi khusus untuk mengelola area-area tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan metode tradisional, kurangnya efisiensi operasional, dan kesulitan bersaing dalam ekonomi digital yang pesat
c. Rendahnya kesadaran berkoperasi mengacu pada kurangnya pemahaman anggota dan masyarakat umum terhadap konsep, prinsip, manfaat, serta potensi koperasi, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi aktif dan kontribusi mereka dalam usaha koperasi

Jumlah UMKM di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, kontribusi DKUKMP dalam membina usaha mikro hanya mencapai 8,41% dari keseluruhan UMKM. Peningkatan jumlah UMKM disebabkan adanya program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), yang hanya mensyaratkan NIB untuk membantu pelaku usaha mikro bertahan selama pandemi Covid-19. Pertumbuhan jumlah UMKM terutama sektor kuliner dan kriya menunjukkan kemajuan, peningkatan omzet tidak sejalan dengan pertumbuhan tersebut. Permasalahan yang dihadapi adalah

a. Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha
b. Kualitas produk yang belum memenuhi standar
c. Kurangnya inovasi dan jaringan pemasaran
d. Kesulitan dalam mengakses pasar dan teknologi

2. Bidang Perdagangan

Dari tahun 2020 hingga 2024 kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Purworejo menunjukkan penurunan yang relatif konsisten. Pada tahun 2020 sektor perdagangan menyumbang laju pertumbuhan sebesar 4,36% laju tersebut dipengaruhi oleh pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang menghambat kegiatan perdagangan. Laju pertumbuhan 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Permasalahan yang dihadapi adalah

a. Peningkatan transaksi perdagangan online, toko banyak berada di luar Purworejo
b. Nilai barang yang diekspor lebih rendah jika dibandingkan barang yang diimpor mayoritas barang yang diekspor oleh Kabupaten Purworejo merupakan bahan mentah (hasil-hasil pertanian, perikanan dan kehutanan) sehingga bernilai lebih rendah jika dibandingkan barang-barang yang diimpor
c. Kondisi pasar daerah yang belum memadai sebagai tempat transaksi jual beli
d. Kurangnya alat UTTP dalam upaya memenuhi perlindungan konsumen

B. Isu Strategis

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Nomor 100.2.4/3207/SJ, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan

Program Strategis Nasional Tahun 2025 – 2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Salah satu Program Strategis Nasional yaitu Pertumbuhan Ekonomi dengan proyek/kegiatan :

1. Pencegahan inflasi
2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
3. Kemudahan Perizinan di daerah

Dinas KUKMP memiliki kendali atas:

1. Pencegahan inflasi yaitu berupa stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan kegiatan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan barang penting dan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar serta penawasan pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten
2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yaitu berupa sosialisasi dan pendampingan dalam pembentukan KDMP. Setelah koperasi sudah terbentuk maka DKUKMP akan memberikan pelatihan kepada pengurus, pengawas, pengelola, melakukan pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta menilai kesehatan koperasi dan juga akan melakukan pemberdayaan koperasi dengan harapan koperasi aktif dan berkembang usahanya.

Tabel 2.4 Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal	Ketergantungan pada pembiayaan internal atau Kurangnya modal usaha	Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia	Transformasi Ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kinerja Koperasi dan UMKM belum efektif sebagai lembaga ekonomi masyarakat
	Keterbatasan SDM pelaku perkoperasian dan UMKM dalam manajemen, pemasaran, keuangan dan teknologi					
	keterbatasan akses pemasaran dan kualitas produk					
Perdagangan produk UMKM lokal	kondisi pasar yang belum memadai					Rendahnya Daya Saing Sektor Perdagangan
	keterbatasan SDM di pasar daerah					
	Rendahnya produk ekspor					
	Panjangnya rantai distribusi perdagangan					
	Keterbatasan kepedulian pelaku usaha untuk tertib ukur					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah gambaran tentang kondisi atau tujuan ideal yang ingin dicapai di masa depan, yang berfungsi sebagai arah dan panduan dalam perencanaan serta pengambilan keputusan di pemerintahan. Berdasarkan perkembangan dan kondisi pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Purworejo 5 (lima) tahun yang akan datang, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Rumusan visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

> "Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (PURWOREJO BERSERI)"

Untuk mewujudkan visi "Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)" ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera.
2. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
4. Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan DKUKMP, tidak lepas dari aturan yang berada di atasnya sesuai dengan bagan dibawah ini :

Gambar 3.1 Konsep renstra

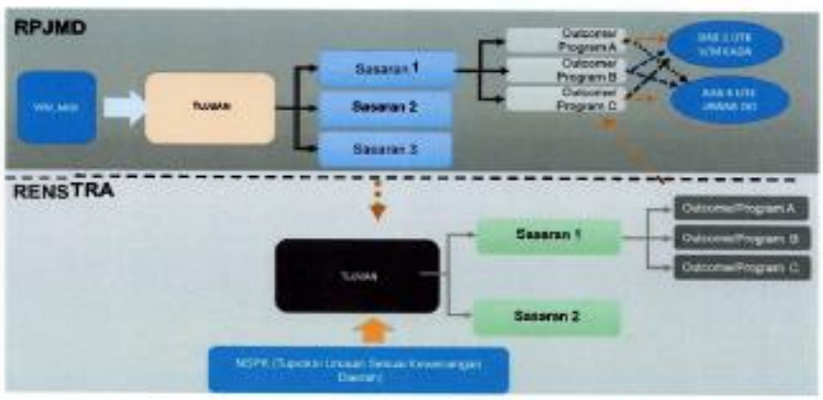

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra PD

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan DKUKMP tidak lepas dari RPJMD Kabupaten Purworejo, RPJMN serta visi misi Presiden 2025-2029. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Misi Presiden tertuang dalam 8 Asta Cita yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengambangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi poltik, hukum dan birokrasi serta memerkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Asta cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat / Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Untuk mendukung program Pemerintah, Kabupaten Purworejo memiliki visi “ Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius dan Inovatif”. Serta memiliki 4 misi yaitu :

Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
Misi 2 Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
Misi 3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
Misi 4 Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan
Misi 5 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi

Dengan tujuan yaitu mewujudkan Purworejo berdaya saing, sejahtera, religius dan inovatif. Untuk DKUKMP berada di sasaran 4 dan 5 yaitu

Sasaran Pemda	Indikator Sasaran Pemda
S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi
S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan sasaran pemda di atas, DKUKMP Kabupaten Purworejo merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai berikut:

a. Tujuan

Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, UMKM dan peranan koperasi terhadap perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tujuan tersebut diukur kinerjanya menggunakan indikator :

1. Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
2. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB; dan
3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

b. Sasaran

Terdapat 4 sasaran perangkat daerah untuk mendukung ketercapaian tujuan tersebut yaitu:

1. Meningkatnya daya saing sektor perdagangan yang diukur menggunakan indikator kinerja PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)
2. Meningkatnya volume usaha koperasi dengan indikator Jumlah volume usaha koperasi.
3. Meningkatnya kemitraan UMKM dan koperasi, dengan indikator kinerja Persentase UMKM yang Bermitra dengan Koperasi
4. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Berikut penetapan target tujuan dan sasaran DKUKMP Kabupaten Purworejo:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DKUKMP 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, UMKM dan peranan koperasi terhadap perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,02	4,53	5,03	5,54	6,04	6,54	%
		Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	3.106,12	3.246,76	3.410,14	3.598,92	3.816,30	4.066,04	Miliar Rupiah
	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, UMKM dan peranan koperasi terhadap perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	2,03%	2,04%	2,05%	2,06%	2,07%	2,08%	%
		Meningkatnya volume usaha koperasi	Jumlah volume usaha koperasi	503.460	505.940	508.421	510.901	513.381	515.861	Juta Rupiah
		Meningkatnya kemitraan UMKM dan koperasi	Persentase UMKM yang Bermitra dengan Koperasi	10,03	10,75	12,10	13,44	14,79	16,13	%
S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, UMKM dan peranan koperasi terhadap perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,9	71,5	72,89	75,33	77,76	80,2	Angka
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,9	71,5	72,89	75,33	77,76	80,2	Angka

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD. Penahapan Renstra DKUKMP Tahun 2025-2029 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Penguatan Fondasi Pelayanan dan Kebijakan pada Sektor Perdagangan yang efisien	Peningkatan kualitas sarana perdagangan yang disertai tranformasi digital pada sektor perdagangan	Penguatan mutu dan nilai tambah produk lokal	Ekspansi pasar dan integrasi pasar dengan jaringan perdagangan luar daerah	Perwujudan daya saing sektor perdagangan
Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM	Pemantapan Kapasitas serta Kualitas Sumber Daya Manusia koperasi dan UMKM	Penguatan jejaring kemitraan antara koperasi dan UMKM	Perluasan akses pasar dan inovasi digital pada sektor koperasi dan UMKM	Perwujudan daya saing koperasi dan UMKM
Menguatkan sistem Manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memantapkan kapasitas sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Perwujudan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1	S4, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Penguatan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal	Penguatan Fondasi Pelayanan dan Kebijakan pada Sektor Perdagangan yang efisien melalui aktivitas penyediaan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan, penstabilian menjamin ketersediaan barang pokok dan penting, pengendalian harga dan stok, pengawasan pupuk bersubsidi, promosi dagang melalui pameran, pelaksanaan metrologi legal, melaksanakan promosi pemasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Tahun 2026

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
2		Peningkatan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal	Peningkatan kualitas sarana perdagangan yang disertai tranformasi digital pada sektor perdagangan melalui aktivitas penyediaan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan, penstabilian menjamin ketersediaan barang pokok dan penting, pengendalian harga dan stok, pengawasan pupuk bersubsidi, promosi dagang melalui pameran, pelaksanaan metrologi legal, melaksanakan promosi pemasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Tahun 2027
3		Pemantapan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal	Penguatan mutu dan nilai tambah produk lokal melalui aktivitas penyediaan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan, penstabilian menjamin ketersediaan barang pokok dan penting, pengendalian harga dan stok, pengawasan pupuk bersubsidi, promosi dagang melalui pameran, pelaksanaan metrologi legal, melaksanakan promosi pemasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Tahun 2028
		Perwujudan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal	Ekspansi pasar dan integrasi pasar dengan jaringan perdagangan luar daerah melalui aktivitas penyediaan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan, penstabilian menjamin ketersediaan barang pokok dan penting, pengendalian harga dan stok, pengawasan pupuk bersubsidi, promosi dagang melalui pameran, pelaksanaan metrologi legal, melaksanakan promosi pemasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Tahun 2029
4		Peneguhan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal	Perwujudan daya saing sektor perdagangan melalui aktivitas penyediaan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan, penstabilian menjamin ketersediaan barang pokok dan penting, pengendalian harga dan stok, pengawasan pupuk bersubsidi, promosi dagang melalui pameran, pelaksanaan metrologi legal, melaksanakan promosi pemasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Tahun 2030
5		Penguatan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis	Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM melalui aktivitas pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, peningkatan pemahaman perkoperasian, pemberdayaan dan perlndungan koperasi, memberdayakan usaha	Tahun 2026

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			mikro dan mengembangkan usaha mikro	
6		Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis	Pemantapan Kapasitas serta Kualitas Sumber Daya Manusia koperasi dan UMKM melalui aktivitas pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, peningkatan pemahaman perkoperasian, pemberdayaan dan perlndungan koperasi, memberdayakan usaha mikro dan mengembangkan usaha mikro	Tahun 2027
7		Pemantapan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis	Penguatan jejaring kemitraan antara koperasi dan UMKM melalui aktivitas pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, peningkatan pemahaman perkoperasian, pemberdayaan dan perlndungan koperasi, memberdayakan usaha mikro dan mengembangkan usaha mikro	Tahun 2028
8		Perwujudan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis	Perluasan akses pasar dan inovasi digital pada sektor koperasi dan UMKM melalui aktivitas pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, peningkatan pemahaman perkoperasian, pemberdayaan dan perlndungan koperasi, memberdayakan usaha mikro dan mengembangkan usaha mikro	Tahun 2029
9		Peneguhan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis	Perwujudan daya saing koperasi dan UMKM melalui aktivitas pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, peningkatan pemahaman perkoperasian, pemberdayaan dan perlndungan koperasi , memberdayakan usaha mikro dan mengembangkan usaha mikro	Tahun 2030
10	S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Menguatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Menguatkan sistem Manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui aktivitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi pendapatan daerah, aministrasi kepegawaian daerah, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang pemeliharaan barang milik daerah	Tahun 2026
11		Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Meningkatkan Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui aktivitas perencanaan,	Tahun 2027

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi pendapatan daerah, aministrasi kepegawaian daerah, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang pemeliharaan barang milik daerah	
12		Memantapkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Memantapkan kapasitas sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui aktivitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi pendapatan daerah, aministrasi kepegawaian daerah, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang pemeliharaan barang milik daerah	Tahun 2028
13		Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui aktivitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi pendapatan daerah, aministrasi kepegawaian daerah, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang pemeliharaan barang milik daerah	Tahun 2029
14		Meneguhkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Perwujudan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui aktivitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi pendapatan daerah, aministrasi kepegawaian daerah, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang pemeliharaan barang milik daerah	Tahun 2030

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil dari cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Nomenklatur nama program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya. Kerangka perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dilakukan seperti bagan dibawah ini

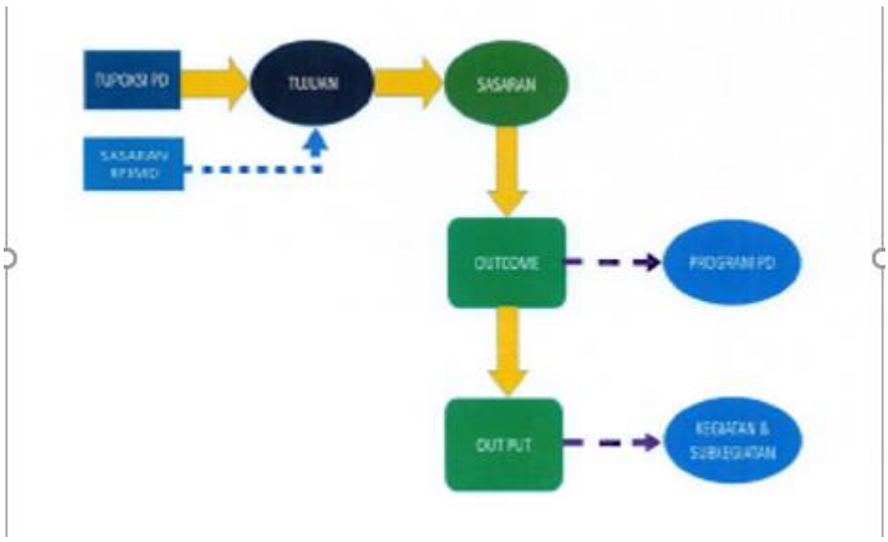

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra PD

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang ditetapkan dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Hal ini karena program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan sebagai pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam Rencana Strategis 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, peranan koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah yang disertai peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		
		Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan			PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)		
			Meningkatnya pasar rakyat yang memenuhi indikator Pasar Ber-SNI		Persentase Pasar Rakyat menuju Ber-SNI	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Terkelolanya Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan yang Dikelola	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
						Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
						Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Terbinanya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibina	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
						Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Terlaksananya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta terjaminnya distribusi pupuk bersubsidi sampai dengan Kios pupuk lengkap		Disparitas Harga	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
					Persentase Distribusi Pupuk Bersubsidi sampai dengan Kios Pupuk Lengkap		
				Terlaksananya Koordinasi Ketersediaan Barang	Jumlah Koordinasi Ketersediaan Barang	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
				Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				Tersedianya Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
						Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
						Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
						Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Dokumen Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
						Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			Meningkatnya omzet pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang		Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
				Terlaksananya Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang	Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Pameran Dagang Nasional	
						Pameran Dagang Lokal	
						Peningkatan Citra Produk Ekspor	
			Meningkatnya alat UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku		Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP)	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Bertanda Tera Sah yang Berlaku		
				Terlayaninya metrologi legal dan pengawasannya	Dokumen Hasil Pelayanan dan Pengawasan Metrologi Legal	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
						Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
						Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
			Meningkatnya omzet pelaku usaha yang dipromosikan penggunaan produk dalam negeri		Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang dipromosikan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Terlaksananya Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kegiatan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
						Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
						Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, peranan koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah yang serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		
		Meningkatnya volume usaha koperasi			Jumlah volume usaha koperasi		
			Meningkatnya koperasi dengan akuntabilitas baik		Persentase Koperasi yang Memiliki Akuntabilitas Baik	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Laporan Koperasi yang Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
						Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya koperasi sehat		Persentase Koperasi Sehat	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				Terukurnya Kesehatan KSP/USP	Jumlah Koperasi yang Sehat	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	
			Meningkatnya koperasi yang memiliki SDM yang berkompeten		Persentase SDM Koperasi yang Tersertifikasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Terlaksananya peningkatan kualitas SDM koperasi	Jumlah Koperasi yang Ditingkatkan Kualitas SDMnya	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya perkembangan usaha koperasi		Persentase Koperasi Aktif yang Berkembang Usahanya	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Meningkatnya koperasi yang berkembang usahanya	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
						Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
						Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kemitraan UMKM dan koperasi			Persentase UMKM yang Bermitra dengan Koperasi		
			Meningkatnya UMKM yang berkualitas dilihat pada aspek		Persentase UMKM yang Berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
			kelembagaan, legalitas, dan kemitraan				
				Meningkatnya usaha mikro yang produktif	Jumlah usaha mikro yang produktif	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
						Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
						Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
						Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
						Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
						Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
						Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			Meningkatnya UMKM yang mengalami peningkatan usaha pada aspek jumlah tenaga kerja, penjualan produk, dan area pemasaran		Persentase UMKM yang mengalami Peningkatan Usaha	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Meningkatnya jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
						Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
						Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	
						Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan,	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, peranan koperasi dan UMKM terhadap				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
responsif berbasis teknologi informasi	perekonomian daerah yang serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, UMKM dan peranan koperasi terhadap perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70,71	71,5		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,98	2,04		2,05		2,06		2,07		2,08		2,08			
			Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	3,52	4,53		5,03		5,54		6,04		6,54		6,54			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70,71	71,5		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
2.17.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						12.505.109.309		12.630.160.000		9.792.810.000		9.792.810.000		9.792.810.000				
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	12.505.109.309	100	12.630.160.000	100	9.792.810.000	100	9.792.810.000	100	9.792.810.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	23	16.886.000	24	34.000.000	24	37.000.000	24	39.000.000	25	42.000.000	120			
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	16.126.000	22	27.000.000	22	25.000.000	22	25.000.000	23	25.000.000	111			
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	0	0	22	5.000.000	22	10.000.000	22	12.000.000	22	15.000.000	88			
2.17.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	1	760.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5			
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	2	1	11.872.244.809	45	10.847.160.000	45	8.218.810.000	45	7.326.810.000	45	7.468.810.000	181			
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	87	118	11.872.244.809	121	10.842.160.000	121	8.213.810.000	121	7.321.810.000	121	7.463.810.000	121			
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	0	0	44	5.000.000	44	5.000.000	44	5.000.000	44	5.000.000	176			
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	11	3.230.000	11	15.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	55			
2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	11	3.230.000	11	15.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	11			
2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	0	16	5.403.400	16	15.000.000	16	20.000.000	16	30.000.000	16	30.000.000	80			
2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	0	16	5.403.400	16	15.000.000	16	20.000.000	16	30.000.000	16	30.000.000	80			
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	17	1.140.000	17	5.000.000	17	5.000.000	17	5.000.000	17	5.000.000	85			
2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	17	1.140.000	17	5.000.000	17	5.000.000	17	5.000.000	17	5.000.000	80			
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	5	178.557.900	7	326.000.000	7	372.000.000	7	382.000.000	7	392.000.000	33			
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	12			
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	12	4.680.500	15	6.000.000	15	7.000.000	15	7.000.000	15	7.000.000	72			
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	12	66.066.000	12	75.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000	60			
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	3	15.444.000	3	25.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	15			
2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	22	17.544.400	22	30.000.000	22	30.000.000	22	30.000.000	22	30.000.000	110			
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	12	74.823.000	12	170.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	60			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	2	15.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	8			
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	15	0		83	430.000.000	10	50.000.000	108	800.000.000	9	520.000.000	210			
2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	2	100.000.000	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	0			
2.17.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0	0	10	50.000.000	10	50.000.000	0	0	0	0	20			
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	50	100.000.000	0	0	100	400.000.000	0	0	150			
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	0	0	20	60.000.000	0	0	6	300.000.000	6	300.000.000	32			
2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	120.000.000	0	0	0	0	1	120.000.000	2			
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	24	140.934.200	24	190.000.000	24	220.000.000	24	250.000.000	24	280.000.000	24			
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	85.266.200	12	120.000.000	12	140.000.000	12	160.000.000	12	180.000.000	12			
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	55.668.000	12	70.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	12			
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	5	286.713.000	5	768.000.000	5	855.000.000	5	945.000.000	5	1.040.000.000	25			
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	39.950.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	1			
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	26	159.940.000	26	350.000.000	26	400.000.000	26	450.000.000	26	500.000.000	26			
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	39	20	19.350.000	20	45.000.000	20	55.000.000	20	65.000.000	20	80.000.000	20			
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2	60.450.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2			
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	12	7.023.000	26	163.000.000	26	180.000.000	26	200.000.000	26	220.000.000	26			
2	Meningkatnya volume usaha koperasi		Jumlah volume usaha koperasi	Juta Rupiah	492.233	505.940		508.421		510.901		513.381		515.861		515.861			
2.17.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						332.934.000		417.959.000		331.376.000		336.611.000		341.818.000				
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya koperasi dengan akuntabilitas baik	Persentase Koperasi yang Memiliki Akuntabilitas Baik	%	43,31	44,01	14.240.000	45,77	31.397.000	47,54	14.240.000	48,24	14.465.000	49,3	14.694.000	49,3	Bidang Koperasi Usaha Mikro	Kabupaten Purworejo	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Laporan Koperasi yang Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Laporan	277	284	14.240.000	738	31.397.000	738	14.240.000	738	14.465.000	738	14.694.000	738			
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	284	284	14.240.000	738	31.397.000	738	14.240.000	738	14.465.000	738	14.694.000	738			
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya koperasi sehat	Persentase Koperasi Sehat	%	50,89	53,57	40.842.500	54,46	81.562.000	54,91	40.843.000	55,36	41.488.000	55,8	42.143.000	55,8	Bidang Koperasi Usaha Mikro	Kabupaten Purworejo	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terukurnya Kesehatan KSP/USP	Jumlah Koperasi yang Sehat	Koperasi	114	120	40.842.500	120	81.562.000	574	40.843.000	574	41.488.000	574	42.143.000	574			
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	123	224	40.842.500	224	10.000.000	678	10.000.000	678	10.000.000	678	10.000.000	678			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	0	0	0	454	71.562.000	454	30.843.000	454	31.488.000	454	32.143.000	454			
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya koperasi yang memiliki SDM yang berkompeten	Persentase SDM Koperasi yang Tersertifikasi	%	34,59	41,28	214.876.600	45,47	210.000.000	49,65	213.318.000	53,84	216.688.000	58,02	220.000.000	58,02	Bidang Koperasi Usaha Mikro	Kabupaten Purworejo	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM koperasi	Jumlah Koperasi yang Ditingkatkan Kualitas SDMnya	Koperasi	89	460	214.876.600	80	210.000.000	80	213.318.000	80	216.688.000	80	220.000.000	780			
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	240	2.140	214.876.600	240	210.000.000	240	213.318.000	240	216.688.000	240	220.000.000	3.100			
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya perkembangan usaha koperasi	Persentase Koperasi Aktif yang Berkembang Usahanya	%	2,46	3,52	62.974.900	5,28	95.000.000	7,04	62.975.000	8,8	63.970.000	10,56	64.981.000	10,56	Bidang Koperasi Usaha Mikro	Kabupaten Purworejo	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya koperasi yang berkembangÂ usahanya	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Unit usaha	50	10	62.974.900	15	95.000.000	20	62.975.000	25	63.970.000	30	64.981.000	100			
2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	0	50	9.758.200	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	250			
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	50	0	0	1	6.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	4			
2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	0	0	0	50	4.000.000	50	4.975.000	50	5.970.000	50	4.498.100	200			
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	0	10	53.216.700	15	80.000.000	20	50.000.000	25	50.000.000	30	52.482.900	100			
3	Meningkatnya kemitraan UMKM dan koperasi		Persentase UMKM yang Bermitra dengan Koperasi	%	9,17	10,75		12,1		13,44		14,79		16,13		16,13			
2.17.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						1.189.479.500		1.208.273.000		1.189.479.000		1.208.273.000		1.227.364.000				
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya UMKM yang berkualitas dilihat pada aspek kelembagaan, legalitas, dan kemitraan	Persentase UMKM yang Berkualitas	%	8,71	11,87	517.520.100	13,97	525.697.000	16,07	517.520.000	18,16	525.697.000	20,26	534.003.000	20,26	Bidang Koperasi Usaha Mikro	Kabupaten Purworejo	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya usaha mikro yang produktif	Jumlah usaha mikro yang produktif	UMKM	1.410	3.090	517.520.100	3.130	525.697.000	3.170	517.520.000	3.210	525.697.000	3.220	534.003.000	15.820			
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	200	200	17.571.300	300	20.000.000	300	20.000.000	300	20.000.000	300	20.000.000	1.400			
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	150	150	22.595.500	300	20.000.000	300	20.000.000	300	20.000.000	300	20.000.000	1.350			
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	780	780	188.985.000	1.800	100.000.000	1.800	100.000.000	1.800	100.000.000	1.800	100.000.000	7.980			
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	270	270	29.703.400	300	30.000.000	300	30.000.000	300	30.000.000	300	30.000.000	1.470			
2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Unit usaha	0	0	0	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	100			
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	0	0	0	37.198	68.000.000	480	68.000.000	480	68.000.000	480	68.000.000	38.638			
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	0	210	258.664.900	430	267.697.000	470	259.520.000	510	267.697.000	520	276.003.000	2.140			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya UMKM yang mengalami peningkatan usaha pada aspek jumlah tenaga kerja, penjualan produk, dan area pemasaran	Persentase UMKM yang mengalami Peningkatan Usaha	%	1,53	2	671.959.400	2,32	682.576.000	2,65	671.959.000	2,97	682.576.000	3,29	693.361.000	3,29	Bidang Koperasi Usaha Mikro	Kabupaten Purworejo	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	unit usaha	97	92	671.959.400	94	682.576.000	96	671.959.000	98	682.576.000	100	693.361.000	480			
2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi	Orang	97	0	0	110	50.000.000	120	50.000.000	130	50.000.000	140	50.000.000	500			
2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	0	30	43.375.000	35	100.000.000	40	100.000.000	45	100.000.000	50	100.000.000	200			
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	2.327	3.100	628.584.400	3.200	532.576.000	3.300	521.959.000	3.400	532.576.000	3.500	543.361.000	16.500			
4	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan		PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	Miliar Rupiah	2.985,96	3.246,76		3.410,14		3.598,92		3.816,30		4.066,04		4.066,04			
3.30.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						3.835.388.350		8.920.242.000		3.835.389.000		22.845.125.000		22.855.015.000				
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya pasar rakyat yang memenuhi indikator pasar ber-SNI	Persentase Pasar Rakyat menuju Ber-SNI	%	3,23	9,68	3.219.148.200	12,9	8.000.000.000	16,13	3.219.148.000	19,35	22.219.148.000	22,58	22.219.148.000	22,58	Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Purworejo	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terkelolanya Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan yang Dikelola	Pasar Daerah	0	31	3.187.250.100	31	7.950.000.000	31	3.169.148.000	31	22.169.148.000	31	22.169.148.000	31			
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	0	0	2	4.800.000.000	0	0	1	17.000.000.000	1	20.000.000.000	3			
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	31	31	3.187.250.100	31	3.150.000.000	31	3.169.148.000	31	5.169.148.000	31	2.169.148.000	31			
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terbinanya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibina	Pengelola	232	40	31.898.100	50	50.000.000	60	50.000.000	70	50.000.000	74	50.000.000	294			
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Indikator :Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	4	4	31.898.100	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	20			
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terlaksananya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta terjaminnya distribusi pupuk bersubsidi sampai dengan Kios pupuk lengkap	Disparitas Harga	%	2	÷10	114.140.800	÷10	162.655.000	÷10	114.141.000	÷10	115.944.000	÷10	117.776.000	÷10	Bidang Perizinan Barang Pokok dan Penting dan	Kabupaten Purworejo	
			Persentase Distribusi Pupuk Bersubsidi sampai dengan Kios Pupuk Lengkap	%	93,16	94,45		94,47		94,49		94,51		94,53		94,53	Bidang Perizinan Barang Pokok dan Penting dan Kemetrologian	Kabupaten Purworejo	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Koordinasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Koordinasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kali	4	4	27.509.200	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	20			
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	4	4	27.509.200	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	20			
3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	4	0	0	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	16			
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dokumen	4	4	62.381.600	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	20			
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	4	4	36.535.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	20			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	4	4	25.846.600	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	20			
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4			
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Dokumen Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Dokumen	1	2	24.250.000	3	62.655.000	3	14.141.000	3	15.944.000	3	17.776.000	14			
3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	0	0	0	1	12.655.000	1	2.141.000	1	3.944.000	1	2.776.000	4			
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	2	2	24.250.000	2	50.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	15.000.000	10			
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang	%	0	2	382.902.850	2	426.893.000	2	382.903.000	2	388.953.000	2	395.098.000	2	Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Purworejo	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang	Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kali	2	3	382.902.850	6	426.893.000	6	382.903.000	6	388.953.000	6	395.098.000	27			
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	40	32	116.209.750	32	100.000.000	32	100.000.000	32	100.000.000	32	100.000.000	160			
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	192	100	266.693.100	100	300.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	500			
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	0	0	0	30	26.893.000	30	32.903.000	30	38.953.000	30	45.098.000	120			
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya alat UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	100	100	94.026.500	100	284.230.000	100	94.027.000	100	95.512.000	100	97.021.000	100	Bidang Perizinan Barang Pokok dan Penting dan Kemetrologian	Kabupaten Purworejo	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlayaninya metrologi legal dan pengawasannya	Dokumen Hasil Pelayanan dan Pengawasan Metrologi Legal	Dokumen	2	2	94.026.500	2	284.230.000	2	94.027.000	2	95.512.000	2	97.021.000	10			
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	5.887	6.358	66.342.000	6.358	234.230.000	6.358	44.027.000	6.358	45.512.000	6.358	47.021.000	6.358			
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	40	40	27.684.500	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40			
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang dipromosikan penggunaan produk dalam negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang dipromosikan	%	0	2	25.170.000	2	46.464.000	2	25.170.000	2	25.568.000	2	25.972.000	2	Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Purworejo	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kegiatan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kali	1	1	25.170.000	2	46.464.000	2	25.170.000	2	25.568.000	2	25.972.000	9			
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	0	0	0	100	36.464.000	100	15.170.000	100	15.568.000	100	15.972.000	400			
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	45	50	25.170.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	250			
Jumlah							**17.862.911.159**		**23.176.634.000**		**15.149.054.000**		**34.182.819.000**		**34.217.007.000**				

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	penyelenggaraan walidata guna mendukung data statistik sektoral daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan laporan keuangan pada bulanan/triwulanan/ semesteran	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Penyusunan Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor,	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor: minum harian pegawai	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan cetak banner atau spanduk dan fotokopi dokumen.	
			Penyediaan Bahan/Material	Penyedian bahan material, seperti: ATK, benda pos.	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD: rapat koordinasi (internal & eksternal), konsultasi dalam dan luar daerah	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penata usahaan arsip dinamis perangkat daerah	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	
			Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik: pembayaran rekening telepon, internet, air, listrik, jasa tambah daya/ pemeliharaan jaringan listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor: jasa tenaga kebersihan, dan jasa teknis lainnya.	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pada tahun tertentu	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peralatan/ mesin lainnya yang dipelihara	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi: gedung kantor, rumah dinas pada tahun tertentu	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pada tahun tertentu	
2.	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya koperasi dengan akuntabilitas baik	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi	
3.	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya koperasi sehat	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan KSP/USP	
			Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Penilaian Kesehatan seluruh koperasi	
4.	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya koperasi yang memiliki SDM yang berkompeten	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelaksanaan pendidikan pelatihan bagi SDM koperasi	
5.	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya perkembangan usaha koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM,	
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Pembinaan koperasi	
			Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi akses permodalan koperasi	
			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan koperasi	
6.	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya UMKM yang berkualitas dilihat pada aspek kelembagaan. legalitas. dan kemitraan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	fasilitasi kemitraan usaha mikro	
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	fasilitasi kemudahan perizinan UMKM	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	menyusun barang milik daerah Pengembangan PD	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan	
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	fasilitasi HAKI	
			Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	penyusunan basis data usaha mikro	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	pelatihan bagi UMKM	
7.	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya UMKM yang mengalami peningkatan usaha pada aspek jumlah tenaga kerja. penjualan produk. dan area pemasaran	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		
			Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	pengembangan kewirausahaan	
			Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	inkubasi usaha mikro	
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	fasilitasi peningkatan produksi pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi pada UMKM	
8.	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Meningkatnya pasar rakyat yang memenuhi	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
	DISTRIBUSI PERDAGANGAN	indikator pasar ber-SNI			
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan Pasar Kutoarjo, pembangunan dan rehabilitasi pasar daerah sesuai kemampuan keuangan daerah	
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	fasilitasi pengelolaan pasar daerah	
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	
9.	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta terjaminnya distribusi pupuk bersubsidi sampai dengan Kios pupuk lengkap	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	koordinasi ketersediaan bahan pokok dan bahan penting pada tingkat agen dan pasar	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	koordinasi ketersediaan bahan pokok dan bahan penting pada tingkat agen dan pasar aksesbilitasnya	
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	pemantauan harga dan stok bahan pokok dan bahan penting pada pelaku usaha distribusi	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	pemantauan harga dan stok bahan pokok dan bahan penting terintegrasi sistem informasi	
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	pelaksanaan operasi pasar	
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	pengawasan dokumen penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi ke tingkat agen	
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi ke tingkat agen	
10.	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			Pameran Dagang Nasional	pameran dagang nasional	
			Pameran Dagang Lokal	pameran dagang lokal	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	peningkatan kapasitas dan daya saing produk unggulan daerah	
11.	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya alat UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	pelayanan metrologi legal	
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	pengawasan metrologi legal	
12.	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang dipromosikan penggunaan produk dalam negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	promosi produk dalam negeri	
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	pemasaran produk dalam negeri	

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

a. Dukungan terhadap Nasional

Dinas KUKMP ikut berkontribusi untuk mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional)

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)
1	Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembinaan dan pelatihan UMKM
		Pembinaan dan pelatihan koperasi

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026-2030
1	a. Pengendalian inflasi	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026-2030
2	b. Percepatan pembentukan koperasi desa/ kelurahan merah putih	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pembinaan koperasi merah putih (2027-2030)
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pelatihan koperasi merah putih (2027-2030)
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi merah putih (2027-2030)
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian kesehatan koperasi (2027-2030)

b. Dukungan terhadap Provinsi

Program DKUKMP yang mendukung terhadap Program Delegasi Provinsi adalah

No	Program Delegasi Propinsi	Program Dukungan di kabupaten Purworejo	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)
1	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pendampingan HAKI
			Pendampingan P-IRT
2	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pembinaan dan pelatihan UMKM
3	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pembinaan dan pelatihan koperasi

c. Kegiatan Unggulan Daerah

Program DKUKMP yang mendukung Program Unggukan Daerah (Pitulungan)

No	Program Unggulan Daerah	Kegiatan Unggulan	Program Dukungan	Aktivitas di 2026
1	Rame Pasare	Memperbesar peluang kepada pelaku ekonomi lokal untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM), PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Mendorong para pelaku usaha/UMKM lokal untuk bisa tayang produk di Katalog
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pameran dagang lokal dan nasional
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pembuatan e-katalog UMKM
		Fasilitas akses permodalan, pemasaran, pelatihan, dll untuk usaha mikro dan kecil, terutama bagi industri rumahan yang dikelola perempuan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pameran dagang lokal dan nasional
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Inkubasi bisnis

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

IKU adalah singkatan dari Indikator Kinerja Utama. IKU mengacu pada ukuran atau indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan dna sasaran strategis. Tujuan IKU adalah :

1. Mengetahui kinerja organisasi, unit kerja atau individu
2. Meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
3. Memberikan target yang harus dicapai
4. Memberikan tolak ukur untuk mengukur kemajuan
5. Memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik

Prinsip yang dipake adalah SMART – C yaitu Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound dan Cintinuously Improved. IKU yang ada di DKUKMP untuk tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama DKUKMP

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1.98	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	Tujuan PD/ IUP
2.	Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	3,52	4,02	4,53	5,03	5,54	6,04	6,54	Tujuan PD
3.	Jumlah Volume Usaha Koperasi	Juta Rupiah	492,233	503,460	505,940	508,421	510,901	513,381	515,861	Sasaran PD
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70,71	70,9	71,5	72,89	75,33	77,76	80,2	Tujuan PD/

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Sasaran PD
5.	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	Milyar Rupiah	2.985,96	3.106,12	3.246,76	3.410 ,14	3.598,9 2	3.816,3	4.066,0 4	Sasaran PD
6.	Persentase UMKM yang Bermitra dengan Koperasi	%	9,17	10,03	10,75	12,1	13,44	14,79	16,13	Sasaran PD

IKK adalah Indikator Kinerja Kunci yaitu suatu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Perbedaan dengan IKU adalah jika IKU berfokus pada pencapain tujuan strategis dan hasil akhir. Sedangkan IKK kebih berfokus pada kinerja pada tingkat kegiatan atau proses yang lebih operasional. IKK yang ada di DKUKMP adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	42,60	44,01	45,07	46,12	47,18	48,23	Bidang Koperasi UKM	IKK dalam Permendagri 18 2020
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	1,79	1,67	1,72	1,77	1,83	1,88	Bidang Koperasi UKM	IKK dalam Permendagri 18 2020
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SI UP Toko Swalayan)	%	100,0 0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0 0	Bidang Perizinan, Barang Pokok Penting dan Kemetrologian	IKK dalam Permendagri 18 2020
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	94,43	94,45	94,47	94,49	94,51	94,53	Bidang Perizinan, Barang Pokok Penting dan Kemetrologian	IKK dalam Permendagri 18 2020
5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100,0 0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0 0	Bidang Perizinan, Barang Pokok Penting dan Kemetrologian	IKK dalam Permendagri 18 2020
6	Rasio Kewirausahaa n	%	2,47	3,15	3,21	3,41	3,51	3,62	Bidang Koperasi UKM	IUP
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	Bidang Koperasi UKM	IUP
8	Disparitas Harga	%	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10	Bidang Perizinan, Barang Pokok Penting dan Kemetrologian	IUP

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tahun.
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan setiap tahun;
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas;
c. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan dilakukan setiap tahun selama periode renstra;
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
a. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Oleh karena itu diperlukan kegiatan penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk menjamin agar arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selaras dengan/tidak menyimpang dari arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 sesuai urusan dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau merupakan penjabaran dari capaian-capaian sasaran yang ditargetkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2025 – 2029.

Untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas dan kompetitif serta meningkatkan citra kualitas Pemerintah Kabupaten Purworejo, khususnya yang terlibat langsung dengan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang ada dapat diwujudkan aparat yang berkualitas, tumbuh kreativitas dan penuh prakarsa. Mengingat pentingnya kegiatan – kegiatan tersebut diatas, perlu adanya peningkatan dalam hal sistem kerja aparatur yang disiplin, berkemampuan tinggi, punya motivasi kerja yang kuat dan bersih dari korupsi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No.459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan

Kabupaten/Kota, Dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).

29. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
30. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Dengan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas dalam bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat terarah, terukur, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra ini dimaksudkan untuk memastikan adanya keselarasan antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah dalam mendorong iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui pengelolaan penanaman modal yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sinergis program dan kegiatan maupun pengendalian dalam pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat serta diharapkan semua pegawai dapat memahami, mengerti dan melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat dijadikan pedoman baku jangka waktu yang telah ditentukan untuk diaplikasikan dan dioptimalkan. Selain itu dokumen Rencana Strategis digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja DPMPTSP tiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo ditetapkan menjadi dokumen menggunakan sistematika penulisan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Bappeda Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penyusunan dokumen, landasan hukum yang mendasari penyusunan, serta maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Pada bagian akhir disajikan sistematika penulisan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran pelayanan perangkat daerah yang mencakup tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, serta mitra dalam penyelenggaraan pelayanan. Selain itu, pada bab ini juga

diuraikan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah untuk periode 2025–2029, serta menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh guna mewujudkan sasaran pembangunan tersebut.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat uraian mengenai program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah, termasuk subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan. Selain itu, bab ini juga menguraikan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan.

BAB VII PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari keseluruhan isi dokumen serta penutup yang berisi kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen rencana strategis perangkat daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

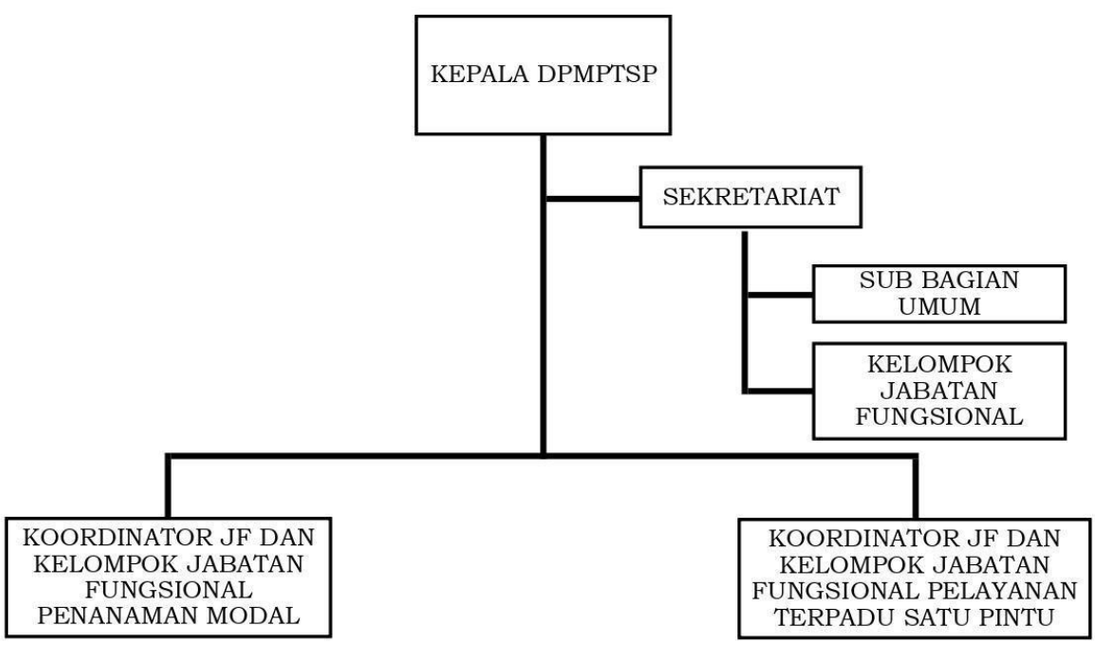

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi DPMPTSP

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo memiliki 14 ASN yang terdiri dari 6 orang laki – laki dan 8 orang perempuan dengan klasifikasi sebagai berikut

1. Berdasarkan Golongan
   a. Golongan IV : 2 orang
      - IV/a : -
      - IV/b : 1 orang
      - IV/c : 1 orang
   b. Golongan III : 5 orang
      - III/a : 2 orang
      - III/b : 2 orang
      - III/c : 1 orang
      - III/d : -
   c. Golongan II : 2 orang
      - II/a : -
      - II/b : -
      - II/c : -
      - II/d : 2 orang
   d. Golongan I : 2 orang
      - I/a :
      - I/b :
      - I/c :
      - I/d : 2 orang
   e. Golongan V : 12 orang
   f. Golongan VII : 1 orang
   g. Golongan IX : 2 orang

2. Berdasarkan Pendidikan
   a. SD : 2 orang
   b. SMP : -
   c. SMA : 13 orang
   d. D3 : 2 orang
   e. S1 : 7 orang
   f. S2 : 1 orang

Gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo berlokasi di Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo. Kepemilikan tanah gedung kantor adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Saat ini gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo menjadi satu dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Purworejo. Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo memiliki 1 unit kendaraan dinas jabatan, 2 unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 5 unit kendaraan dinas operasional roda dua. Selain itu dalam memaksimalkan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo memiliki aplikasi Si IDA dan e-Permit yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses perizinan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kabupaten Purworejo sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja mengampu bidang urusan Penanaman Modal. Oleh karena itu, realisasi penanaman modal menjadi indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Data capaian kinerja urusan penanaman modal selama kurun waktu 2020 – 2024 tersaji dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah (%)					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1.	Realisasi Penanaman Modal		√		45,79	67,65	74,415	81,86	90,04	99,05	45,78	71,24	139,20	125,94			99,98	105,31	187,06	153,85		
	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100,00	100,00	100,00	100,00		
	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal				5%	5%	5%	5%	5%	5%	N/A	-24,33%	142%	-1100%			-	486,60	2839,00	-220,00		
	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan				99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	100%	99,87%	100%	100%			100,50	100,37	100,50	100,50		
	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100,00	100,00	100,00	100,00		
	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Ketentuan NSPK				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100,00	100,00	100,00	100,00		
	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100,00	100,00	100,00	100,00		

Dari Tabel 2.1. terlihat bahwa terdapat pergerakan realisasi penanaman modal yang tidak konsisten mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 terdapat penurunan realisasi penanaman modal yang disebabkan adanya pandemi COVID-19. Sedangkan penurunan realisasi penanaman modal pada tahun 2024 lebih disebabkan tidak adanya penambahan penanaman modal baru sehingga tidak terjadi peningkatan pada laporan LKPM pelaku usaha.

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026 *)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
PENANAMAN MODAL		3.542.126.604	3.280.584.718	4.054.313.580	3.828.719.992	3.839.674.004		7.681.717.110	3.790.303.276	4.129.740.882	3.968.035.394	4.089.369.826		216,87%	115,54%	101,86%	103,64%	106,50%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.262.126.604	2.356.584.718	2.996.313.580	2.766.719.992	2.780.674.004		6.201.703.180	2.990.355.376	2.492.744.197	2.966.758.034	3.433.738.896	-	274,15%	126,89%	83,19%	107,23%	123,49%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14.500.000	15.950.000	23.897.500	26.287.250	28.915.975		19.750.000	12.411.000	7.709.000	4.816.000	4.816.000	-	136,21%	77,81%	32,26%	18,32%	16,66%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.250.000	5.775.000	-	-	-		5.250.000	12.411.000	-	-	-	-	100,00%	214,91%	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.352.500	6.987.750	7.686.525		-	-	4.375.000	4.816.000	4.816.000	-	-	-	68,87%	68,92%	62,66%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.500.000	1.650.000	-	-	-		1.500.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.815.000	1.996.500	2.196.150		-	-	1.004.000	-	-	-	-	-	55,32%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.500.000	1.650.000	-	-	-		1.500.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.815.000	1.996.500	2.196.150		-	-	200.000	-	-	-	-	-	11,02%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2.000.000	2.200.000	-	-	-		2.000.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.420.000	2.662.000	2.928.200		-	-	240.000	-	-	-	-	-	9,92%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		2.000.000	2.200.000	-	-	-		2.000.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.420.000	2.662.000	2.928.200		-	-	240.000	-	-	-	-	-	9,92%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2.500.000	2.750.000	-	-	-		2.500.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.025.000	3.327.500	3.660.250		-	-	650.000	-	-	-	-	-	21,49%	0,00%	0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.000.000	5.500.000	-	-	-		5.000.000	-	-		-	-	100,00%	0,00%	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.050.000	6.655.000	7.320.500		-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	16,53%	0,00%	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.943.217.104	2.005.784.268	2.204.080.585	2.235.263.698	2.206.072.080		2.188.962.012	2.182.402.012	1.624.996.297	2.051.018.574	2.590.541.640	-	112,65%	108,81%	73,73%	91,76%	117,43%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.920.445.104	1.980.735.068	-	-	-		2.166.066.544	2.166.066.544	-	-	-	-	112,79%	109,36%	-	-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026 *)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.176.526.465	2.204.954.166	2.172.731.595		-	-	1.599.221.297	2.039.363.574	2.590.541.640	-	-	-	73,48%	92,49%	119,23%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.000.000	2.200.000	-	-	-		2.000.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.420.000	2.662.000	2.928.200		-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	41,32%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18.772.000	20.649.200	-	-	-		18.895.468	16.335.468	-	-	-	-	100,66%	79,11%	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22.714.120	24.985.532	27.484.085		-	-	23.400.000	11.655.000	-	-	-	-	103,02%	46,65%	0,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2.000.000	2.200.000	-	-	-		2.000.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	-	-	-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.420.000	2.662.000	2.928.200		-	-	1.375.000	-	-	-	-	-	56,82%	0,00%	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		29.000.000	31.900.000	35.090.000	38.599.000	42.458.900		29.000.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		29.000.000	31.900.000	-	-	-		29.000.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				35.090.000	38.599.000	42.458.900		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		142.000.400	156.200.440	171.820.484	189.002.532	207.902.786		192.367.000	165.000.400	165.275.500	125.099.500	121.603.671	-	135,47%	105,63%	96,19%	66,19%	58,49%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		-	-	-	-	-		-	-	-	-	3.702.400	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Bahan/Material		-	-	-	-	-		-	-	-	-	14.327.475	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		142.000.400	156.200.440	-	-	-		192.367.000	165.000.400	-	-	-	-	135,47%	105,63%	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				171.820.484	189.002.532	207.902.786		-	-	165.275.500	125.099.500	103.573.796	-	-	-	96,19%	66,19%	49,82%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.000.000.000	-	400.000.000	-	-		3.254.306.200	-	-	52.945.500	-	-	162,72%	-	0,00%	-	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				400.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026 *)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.000.000.000	-	-	-	-		3.254.306.200	-	-	-	-	-	162,72%	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	-	-		-	-	-	52.945.500	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		72.214.500	79.435.950	87.379.545	96.117.500	105.729.249		410.327.164	534.551.864	575.688.400	620.528.460	605.277.585	-	568,21%	672,93%	658,84%	645,59%	572,48%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		23.484.500	25.832.950	-	-	-		23.484.500	24.963.500	-	-	-	-	100,00%	96,63%	-	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				28.416.245	31.257.870	34.383.656		-	-	22.859.250	15.250.875	-	-	-	-	80,44%	48,79%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		30.500.000	33.550.000	-	-	-		147.300.000	173.596.164	-	-	-	-	482,95%	517,43%	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.905.000	40.595.500	44.655.050		-	-	183.873.400	195.849.085	195.849.085	-	-	-	498,23%	482,44%	438,58%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		18.230.000	20.053.000	-	-	-		239.542.664	335.992.200	-	-	-	-	1314,00%	1675,52%	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				22.058.300	24.264.130	26.690.543				368.955.750	409.428.500	409.428.500	-	-	-	1672,64%	1687,38%	1533,98%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		61.194.600	67.314.060	74.045.466	181.450.013	189.595.014		106.990.804	95.990.100	119.075.000	112.350.000	111.500.000	-	174,84%	142,60%	160,81%	61,92%	58,81%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		35.786.600	39.365.260	-	-	-		59.772.804	55.990.100	-	-	-	-	167,03%	142,23%	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				43.301.786	47.631.965	52.395.161		-	-	71.850.000	38.220.000	39.950.000	-	-	-	165,93%	80,24%	76,25%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	50.000.000	50.000.000		-	-	-	31.620.000	34.880.000	-	-	-	-	63,24%	69,76%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-	50.000.000	50.000.000		-	-	19.325.000	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	30,00%	30,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		25.408.000	27.948.800	-	-	-		47.218.000	40.000.000	-	-	-	-	185,84%	143,12%	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.743.680	33.818.048	37.199.853		-	-	27.900.000	27.510.000	21.670.000	-	-	-	90,75%	81,35%	58,25%
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		195.000.000	141.000.000	199.000.000	179.000.000	178.000.000		228.320.000	49.811.500	81.893.720	199.165.160	111.053.530	-	117,09%	35,33%	41,15%	111,27%	62,39%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026 *)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		195.000.000	100.000.000	154.000.000	90.000.000	90.000.000		228.320.000	46.011.500	20.626.660	-	-	-	117,09%	46,01%	13,39%	0,00%	0,00%
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		195.000.000	100.000.000	-	-	-		228.320.000	46.011.500	-	-	-	-	117,09%	46,01%	-	-	-
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				154.000.000	70.000.000	70.000.000		-	-	20.626.660	-	-	-	-	-	13,39%	0,00%	0,00%
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		0	0	0	20.000.000	20.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		-	41.000.000	45.000.000	89.000.000	88.000.000		-	3.800.000	61.267.060	199.165.160	111.053.530	-	-	9,27%	136,15%	223,78%	126,20%
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		0	0	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					59.000.000	58.000.000		-	-	-	188.654.080	43.297.450	-	-	-	-	319,75%	74,65%
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			41.000.000	-	-	-		-	3.800.000	-	-	-	-	-	9,27%	-	-	-
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				45.000.000	30.000.000	30.000.000		-	-	61.267.060	10.511.080	67.756.080	-	-	-	136,15%	35,04%	225,85%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		183.000.000	132.000.000	145.000.000	149.000.000	148.000.000		203.144.150	56.211.700	277.716.990	329.994.900	155.416.700	-	111,01%	42,58%	191,53%	221,47%	105,01%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		183.000.000	132.000.000	145.000.000	149.000.000	148.000.000		203.144.150	56.211.700	277.716.990	329.994.900	155.416.700	-	111,01%	42,58%	191,53%	221,47%	105,01%
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		100.000.000	66.000.000	-	-	-		143.254.450	46.211.700	-	-	-	-	143,25%	70,02%	-	-	-
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				72.600.000	74.500.000	74.000.000		-	-	277.716.990	329.994.900	155.416.700	-	-	-	382,53%	442,95%	210,02%
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		83.000.000	66.000.000	-	-	-		59.889.700	10.000.000	-	-	-	-	72,16%	15,15%	-	-	-
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal				72.400.000	74.500.000	74.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		380.000.000	274.000.000	301.000.000	309.000.000	308.000.000		498.437.208	294.662.100	413.711.450	175.004.200	157.388.400	-	131,17%	107,54%	137,45%	56,64%	51,10%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026 *)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		380.000.000	274.000.000	301.000.000	309.000.000	308.000.000		498.437.208	294.662.100	413.711.450	175.004.200	157.388.400	-	131,17%	107,54%	137,45%	56,64%	51,10%
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		200.000.000	68.500.000	-	-	-		334.722.800	189.683.200	-	-	-	-	167,36%	276,91%	-	-	-
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				75.250.000	77.250.000	77.000.000		-	-	256.687.250	122.789.000	126.519.000	-	-	-	341,11%	158,95%	164,31%
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		100.000.000	68.500.000	-	-	-		126.490.808	99.985.900	-	-	-	-	126,49%	145,96%	-	-	-
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				75.250.000	77.250.000	77.000.000		-	-	96.029.500	50.840.400	-	-	-	-	127,61%	65,81%	0,00%
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		40.000.000	68.500.000	-	-	-		12.913.000	2.493.000	-	-	-	-	32,28%	3,64%	-	-	-
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				75.250.000	77.250.000	77.000.000		-	-	58.494.700	1.374.800	30.869.400	-	-	-	77,73%	1,78%	40,09%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		40.000.000	68.500.000	-	-	-		24.310.600	2.500.000	-	-	-	-	60,78%	3,65%	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				75.250.000	77.250.000	77.000.000		-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	3,32%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		402.000.000	290.000.000	318.000.000	327.000.000	328.000.000		399.818.468	366.700.000	798.985.000	265.109.000	210.935.000	-	99,46%	126,45%	251,25%	81,07%	64,31%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		402.000.000	290.000.000	318.000.000	327.000.000	328.000.000		399.818.468	366.700.000	798.985.000	265.109.000	210.935.000	-	99,46%	126,45%	251,25%	81,07%	64,31%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		268.000.000	250.000.000	-	-	-		382.754.276	337.630.808	-	-	-	-	142,82%	135,05%	-	-	-
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				50.000.000	50.000.000	50.000.000		-	-	119.847.000	-	-	-	-	-	239,69%	0,00%	0,00%
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				162.000.000	168.000.000	168.000.000		-	-	439.443.000	178.375.000	166.421.000	-	-	-	271,26%	106,18%	99,06%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026 *)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		134.000.000	40.000.000	-	-	-		17.064.192	29.069.192	-	-	-	-	12,73%	72,67%	-	-	-
Pengawasan Penanaman Modal				106.000.000	109.000.000	110.000.000		-	-	239.695.000	86.734.000	44.514.000	-	-	-	226,13%	79,57%	40,47%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		120.000.000	87.000.000	95.000.000	98.000.000	97.000.000		150.294.104	32.562.600	64.689.525	32.004.100	20.837.300	-	125,25%	37,43%	68,09%	32,66%	21,48%
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		120.000.000	87.000.000	95.000.000	98.000.000	97.000.000		150.294.104	32.562.600	64.689.525	32.004.100	20.837.300	-	125,25%	37,43%	68,09%	32,66%	21,48%
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		120.000.000	87.000.000	-	-	-		150.294.104	32.562.600	-	-	-	-	125,25%	37,43%	-	-	-
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				95.000.000	98.000.000	97.000.000		-	-	64.689.525	32.004.100	20.837.300	-	-	-	68,09%	32,66%	21,48%

Keterangan :

*) berdasarkan RKA DPMPTSP tahun 2026

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa rasio anggaran dibandingkan dengan anggaran yang tercantum dalam dokumen Renstra DPMPTSP secara keseluruhan hampir mendekati 100% bahkan lebih dari 100%. Rasio terbesar ada di tahun 2022 sebesar 216,87% atau 2x lipat dari anggaran yang direncanakan pada dokumen Renstra DPMPTSP. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Operasional MPP Kabupaten Purworejo mulai berjalan di tahun 2022 sehingga adanya kenaikan kebutuhan anggaran listrik;
2. Sebagai bentuk layanan publik yang prima, DPMPTSP Kabupaten Purworejo membutuhkan anggaran untuk *outsourcing* petugas keamanan dan kebersihan.

Evaluasi terhadap Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah akan dijelaskan pada tabel berikut

Tabel 2.3.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Indikator Tujuan						
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,09	26,89	26,39	25,71	26,14	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	75,36	28,16	66,51	-	
2	Indikator Sasaran PD						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	75,36	28,16	66,51	-	
	Realisasi Penanaman Modal	73,14 Miliar	45,79 Miliar	82,66 Miliar	147,12 Miliar	135,86 Miliar	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	85,67	92,74	94,39	95,48	96,41	
3	Indikator Program PD						
	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Persentase penyediaan informasi potensi penanaman modal yang siap dipublikasikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Jumlah kepeminatan (LOI)	5	1	6	6	9	
	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Tingkat Kepatuhan LKPM	17,64	29,41	46,67	29,41	17,64	
	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	IUP						
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,09	26,89	26,39	25,71	26,14	
5	SPM						
	-						
6	Permendagri 18 2020						
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	5,76	16	134	95,40	-9,53	
7	Mandatory Lain						
	-						

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kebijakan nasional pasca UU Cipta Kerja menempatkan OSS Berbasis Risiko sebagai tulang punggung perizinan dan pengawasan investasi. Beberapa kebijakan nasional yang berhubungan langsung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo antara lain :

a. PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (basis OSS–RBA, klasifikasi risiko & jenis perizinan/standar);
b. PP 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PTSP daerah, integrasi elektronik, pembagian kewenangan & pengawasan);
c. Perpres 10/2021 jo. Perpres 49/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (DPI/sektor prioritas & pembukaan bidang usaha);
d. PermenPANRB 92/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
e. Peraturan Menteri Investasi/BKPM 5/2021 tentang Pedoman & Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (termasuk kewajiban LKPM);

Tantangan implementasi di daerah terutama bagi DPMPTSP Kabupaten Purworejo antara lain :

a. Konsistensi penerapan berbasis risiko di level KBLI
   Masih terjadi perbedaan interpretasi dokumen/standar antara *front office*, verifikator, dan dinas teknis. Hal ini berdampak pada waktu layanan dan kepastian pelaku usaha.
b. Sinkronisasi kewenangan & sistem
   PP 6/2021 menuntut integrasi proses elektronik *end-to-end*. Daerah perlu memastikan *single source of truth* (OSS terintegrasi dengan aplikasi daerah/SiCantik/arsip digital) agar tidak ada “perizinan bayangan”.
c. Kualitas pelaporan investasi (LKPM) & pengawasan
   Banyak pelaku usaha UMK belum patuh/tepat waktu; tanpa LKPM yang baik, data realisasi & pengawasan berbasis risiko melemah.
d. Perubahan peta sektor prioritas
   Revisi Daftar Prioritas Investasi (DPI) mengubah daya tarik subsektor contohnya kemitraan UMKM, persyaratan tertentu. Pemerintah Daerah perlu *agile* menyesuaikan promosi dan layanan.
e. Standarisasi layanan MPP
   Penataan SOP lintas-instansi sesuai petunjuk teknis MPP dan kepastian *service level* ketika terjadi gangguan operasional (akses/gedung/sistem) masih jadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan.

Disisi lain, kebijakan nasional memberikan peluang bagi DPMPTSP Kabupaten Purworejo yaitu :

a. Kepastian & percepatan layanan dengan OSS–RBA
   Dengan pemetaan KBLI-risiko dan daftar prasyarat yang jelas, banyak izin berisiko rendah cukup NIB + Sertifikat Standar (pernyataan). Hal ini mempersingkat *time-to-permit*.
b. Penajaman promosi pada Daftar Prioritas Investasi (DPI)
   Daerah dapat menyasar investor sesuai Perpres 10/2021 jo. 49/2021 (contohnya industri pengolahan pertanian/hasil hutan, logistik, pariwisata), serta memfasilitasi kemitraan UMKM lokal.
c. Penguatan MPP sebagai single front door
   PermenPANRB 92/2021 memberi kerangka kolokasi dan joint SOP. MPP dapat menjadi pusat konsultasi praperizinan, helpdesk OSS,

   dan, edukasi LKPM triwulanan.

d. Pengawasan berbasis data (post-audit)
Perizinan sederhana di depan, pengawasan kuat di belakang melalui sampling risiko & kepatuhan LKPM. Hal ini berdampak pada biaya kepatuhan pelaku usaha turun, namun kualitas tata kelola naik.

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo adalah pihak-pihak yang menjadi target utama dalam pemberian layanan oleh dinas ini, terutama dalam bidang perizinan dan penanaman modal. Target utama dalam memberikan layanan antara lain kepada masyarakat pemohon perizinan dan non perizinan, investor, dan pelaku usaha yang membutuhkan layanan terkait penanaman modal, perizinan, dan pelayanan administrasi terpadu.

Dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, DPMPTSP Kabupaten Purworejo telah didukung dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diisi oleh perangkat daerah Kabupaten Purworejo, instansi vertikal, BUMD dan BUMN. MPP Kabupaten Purworejo diisi oleh 31 gerai pelayanan dengan jumlah layanan kurang lebih 120 layanan diharapkan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Purworejo. 31 gerai layanan MPP terdiri dari :

1. DPMPTSP
2. DISDUKCAPIL
3. BPKPAD
4. DINLHP
5. DINAS PERHUBUNGAN
6. DPUPR
7. DINPERKIMTAN
8. DINAS KESEHATAN DAERAH
9. DINAS PERINTRANSNAKER
10. DINKUKMP
11. DINSOSDALDUKKB
12. Bagian BARJAS
13. PDAM
14. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) / SAMSAT JATENG
15. BPJS Kesehatan
16. BPJS Ketenagakerjaan
17. Kantor Pertanahan
18. KPP Pratama Kebumen
19. Kantor Kemenag
20. Bank Jateng KC Purworejo
21. POLRES Purworejo
22. Bank BRI KC Purworejo
23. Balai Besar POM di Semarang
24. BP2MI Provinsi Jawa Tengah
25. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo
26. TASPEN KC Purwokerto
27. PENGADILAN NEGERI PURWOREJO
28. KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
29. Kantor Pos Purworejo
30. Kantor Cabang ASABRI
31. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Magelang

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi fungsi dan kualitas layanan publik serta dalam mencapai tujuan sasaran perangkat daerah. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Purworejo antara lain :

1. Koordinasi dengan perangkat daerah dan kementerian/lembaga terkait belum optimal;
   Hal ini disebabkan belum ada mekanisme koordinasi rutin, sistem informasi belum terintegrasi lintas instansi. Akibatnya layanan perizinan tidak sinkron, proses lambat, investor bingung dengan alur.
2. Proses perizinan yang rumit dan lama;
   Hal ini disebabkan prosedur manual masih dominan, belum semua perizinan terintegrasi OSS secara penuh. Akibatnya Investor menunda atau membatalkan rencana investasi.
3. Pengawasan penanaman modal kurang optimal;
   Minimnya SDM pengawas dan keterbatasan anggaran untuk monitoring mengakibatkan timbulnya potensi pelanggaran perizinan meningkat dan realisasi investasi tidak terukur.
4. Kurangnya promosi penanaman modal;
   Alokasi anggaran terbatas dan strategi promosi belum terarah ke sektor prioritas mengakibatkan potensi unggulan daerah tidak dikenal investor sehingga investasi rendah.
5. Respon perangkat daerah terkait investasi kurang;
   Rendahnya kesadaran bahwa investasi butuh dukungan lintas sektor menciptakan hambatan birokrasi meningkat dan kepuasan investor menurun.
6. Infrastruktur penunjang kurang memadai;
   Keterbatasan anggaran pembangunan jalan, energi, dan kawasan industri mengakibatkan investor menilai biaya operasional tinggi sehingga daya tarik investasi menurun.
7. Pemutakhiran data investasi belum dilaksanakan;
   Sistem basis data belum berjalan serta pelaporan investor tidak terpantau sehingga data realisasi investasi tidak valid dan sulit untuk perencanaan.
8. Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan belum tersedia;
   Hal ini disebabkan belum adanya regulasi daerah (Perda/Perbup) yang mengatur arah kebijakan investasi sehingga tidak ada kepastian hukum bagi investor dan ruang interpretasi terlalu luas.
9. Keterbatasan SDM;
   Jumlah pegawai terbatas, kompetensi teknis OSS dan investasi belum merata mengakibatkan pelayanan lambat dan kapasitas pengawasan lemah.
10. Rendahnya kesadaran pelaporan LKPM;
    Kurangnya sosialisasi dan investor menganggap LKPM tidak penting mengakibatkan DPMPTSP kesulitan memantau realisasi investasi.
11. Pemutakhiran data investasi belum dilaksanakan;
    Sistem basis data belum berjalan sehingga data potensi dan realisasi investasi tidak valid.
12. Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan belum tersedia;
    Belum adanya regulasi daerah (Perda/Perbup) yang mengatur arah kebijakan investasi sehingga tidak ada kepastian hukum bagi investor.
13. Iklim investasi yang belum kondusif.
    Iklim investasi yang belum kondusif merupakan kombinasi antara hambatan birokrasi, infrastruktur belum siap dan kepastian

hukum rendah. Hal ini membuat calon investor ragu menanamkan modal sehingga pertumbuhan ekonomi lokal terhambat.

2.2.2. Isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis perangkat daerah perlu mempertimbangkan beberapa faktor antara lain potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, isu KLHS yang relevan dan isu lingkungan dinamis yang relevan. Isu strategis DPMPTSP Kabupaten Purworejo dan analisisnya tersaji dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.4.
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi	Koordinasi dengan perangkat daerah dan kementerian/lembaga terkait belum optimal	Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata	Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia	Transformasi Ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Rendahnya investasi yang berdampak pada perekonomian secara luas
	Proses perizinan yang rumit dan lama					
	Pengawasan penanaman modal kurang optimal					
	Kurangnya promosi penanaman modal					
	Respon perangkat daerah terkait investasi kurang					
	Infrastruktur penunjang kurang memadai					
	Pemutakhiran data investasi belum dilaksanakan					
	Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan belum tersedia					
	Keterbatasan SDM					
	Rendahnya kesadaran pelaporan LKPM					
	Pemutakhiran data investasi belum dilaksanakan					
	Kebijakan Penanaman Modal dan					

	Perizinan belum tersedia Iklim investasi yang belum kondusif					

Berdasarkan hasil analisis isu strategis di atas, didapatkan isu strategis terkait penanaman modal di Kabupaten Purworejo adalah Rendahnya investasi yang berdampak pada perekonomian secara luas. Rendahnya realisasi investasi yang berdampak pada terbatasnya perputaran ekonomi daerah, rendahnya penciptaan lapangan kerja, serta lambatnya peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi investasi yang dimiliki Purworejo belum sepenuhnya dioptimalkan, sehingga diperlukan strategi yang lebih agresif dan terarah dalam promosi, fasilitasi, serta penyediaan iklim usaha yang kondusif agar mampu menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi "Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)", Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo memiliki tugas dan fungsi strategis sebagai berikut:

1. Mendukung Misi : Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi
   a. DPMPTSP berperan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan dan kepastian layanan, sehingga dapat menarik investor pada sektor unggulan daerah;
   b. Melaksanakan promosi potensi investasi daerah dan memfasilitasi kemitraan antara investor dengan pelaku ekonomi lokal, sehingga kontribusi UMKM, koperasi, serta petani dapat meningkat;
   c. Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan investasi agar pelaku usaha lokal dapat berkembang dan bersaing.
   d. Melaksanakan pengawasan penanaman modal serta mendorong kepatuhan pelaporan LKPM secara digital, guna memastikan data investasi valid dan mendukung perencanaan pembangunan.
2. Mendukung Misi : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi
   a. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara cepat, transparan, dan berbasis OSS-RBA, yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
   b. Mengembangkan inovasi pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat pelayanan lintas instansi yang mudah diakses masyarakat dan dunia usaha;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merujuk pada hasil yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sasaran perangkat daerah bersifat lebih spesifik dan terukur, serta berfokus pada pencapaian yang dapat langsung mempengaruhi kinerja, pelayanan, dan dampak sosial ekonomi di daerah tersebut. Pada periode rencana strategis 2025 – 2029 sasaran DPMPTSP Kabupaten Purworejo tersaji dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Sasaran Renstra DPMPTSP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya produktivitas, pemerataan dan inklusivitas perekonomian daerah	Meningkatkan peranan investasi dalam perekonomian daerah dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,68	26,84	27,00	27,16	27,32	27,48	%
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Angka
		Meningkatnya realisasi penanaman modal dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Realisasi Penanaman Modal	128,41	131,03	133,65	136,32	139,05	141,83	Miliar Rupiah
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	96,41	96,42	96,43	96,44	96,45	96,46	Angka
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Angka

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi perangkat daerah adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran rencana strategis. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penahapan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo tersaji dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Penahapan Renstra

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan branding investasi daerah	Peningkatan kapasitas sdm, fasilitasi investor dan Kerjasama lintas sektor	Intensifikasi promosi investasi dan fasilitasi pemberian insentif dan kemudahan investasi	Pemantapan digitalisasi layanan perizinan dan nonperizinan serta informasi potensi penanaman modal	Mendorong realisasi komitmen investasi dan sustainability business (investasi yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan, ramah lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat)
Menguatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan kapasitas sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, visi misi diperlukan sebagai kondisi umum serta abstraksi kondisi dan kualitas daerah yang diinginkan dalam jangka waktu 5 tahun. Visi misi tersebut kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran masing-masing perangkat daerah. Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo tersaji pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan DPMPTSP

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peraturan perundangan-undangan terkait tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perizinan di Kementerian/ Lembaga	Penguatan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan	1. Penguatan sistem pelayanan berbasis OSS-RBA, MPP Digital dan Si IDA 2. Penyusunan database potensi investasi per sektor dan wilayah	2026
		Peningkatan investasi daerah	1. Peningkatan kompetensi SDM pelayanan (pelatihan	2027

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
	SASARAN RPJMD: S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan	frontliner, investasi, dan digitalisasi) 2. Peluncuran program *Klinik Investasi* untuk pendampingan investor 3. Kerja sama lintas OPD untuk integrasi data perizinan dan potensi daerah	
		Pemantapan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan	1. Promosi intensif potensi unggulan (seperti Kawasan Industri, pariwisata, dan pertanian modern) 2. Partisipasi aktif pada event nasional/internasional (booth pameran investasi, forum bisnis, dll) 3. Pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi	2028
		Perwujudan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan	1. Pemantapan implementasi OSS, MPP Digital dan Si IDA 2. Penyusunan peta tematik investasi berbasis GIS untuk integrasi RPJMD dan RTRW	2029
		Peneguhan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan	1. Fasilitasi dan percepatan realisasi investasi yang telah berkomitmen 2. Meningkatkan daya tarik investasi yang ramah lingkungan dan inklusif 3. Mendorong kontribusi sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal oleh investor 4. Menjamin kesinambungan usaha dan keberlanjutan pembangunan	2030
	SASARAN RPJMD: S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi.	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum	2026

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
			Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	
		Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	2027
		Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	2028
		Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan	Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang	2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
		tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	
		Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	2030

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel 4.1.
Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMPTSP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan Peranan Investasi dalam Perekonomian Daerah serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Pembentukan Modal Tetap Bruto		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Meningkatnya realisasi penanaman modal dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan			Realisasi Penanaman Modal		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)		
			Meningkatnya kualitas informasi		Persentase penyediaan informasi potensi penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
			potensi penanaman modal yang siap dipublikasikan		yang siap dipublikasikan		
				Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Jumlah kepeminatan (LOI)	Program Promosi Penanaman Modal	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya		Persentase pelayanan	Program Pelayanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
			kualitas layanan penanaman modal sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria		penanaman modal sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria	Penanaman Modal	
				Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
						Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
						Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
			Meningkatnya kepatuhan pelaporan LKPM		Tingkat Kepatuhan Pelaporan LKPM	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
				Terpenuhinya	Jumlah LKPM yang	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Kepatuhan LKPM	dilaporkan	menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
						Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
						Pengawasan Penanaman Modal	
			Meningkatnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan		Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
				Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
						Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
						Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Dalam merencanakan alokasi pendanaan pembangunan, penting untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memastikan bahwa alokasi tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan berfokus pada *money follow program* dan *money follow function*, dimana anggaran difokuskan pada program atau kegiatan yang langsung terkait dengan prioritas pembangunan daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memberikan dampak positif bagi Masyarakat dan sesuai dengan tugas dan fungsi utama perangkat daerah. Berikut merupakan daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja DPMPTSP dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 dimana pada perencanaan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan DPMPTSP yaitu pijakan penyusunan Renja DPMPTSP pada tahun 2030.

Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan peranan investasi dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	66,51	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	26,14	26,84		27		27,16		27,32		27,48		27,48			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	66,51	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
2.18.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						3.468.986.096		3.503.676.000		2.845.975.000		2.845.975.000		2.845.975.000				
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	3.468.986.096	100	3.503.676.000	100	2.845.975.000	100	2.845.975.000	100	2.845.975.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	22	22	4.816.000	24	6.297.600	24	6.827.360	25	7.410.096	24	8.051.105	120			
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	22	22	4.816.000	22	5.297.600	22	5.827.360	25	6.410.096	22	7.051.105	111			
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	22	500.000	22	500.000	22	500.000	22	500.000	88			
2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	4			
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	1	2.636.123.840	45	2.618.714.284	45	2.008.650.524	45	2.008.067.788	45	2.007.426.779	181			
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	25	2.636.123.840	25	2.617.614.284	25	2.007.440.524	25	2.006.736.788	25	2.005.962.679	25			
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	0	0	0	44	1.100.000	44	1.210.000	44	1.331.000	44	1.464.100	176			
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0		11	500.000	11	500.000	11	500.000	11	500.000	44			
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	11	500.000	11	500.000	11	500.000	11	500.000	44			
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	0		17	500.000	17	500.000	17	500.000	17	500.000	68			
2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	17	500.000	17	500.000	17	500.000	17	500.000	68			
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	122.103.671	8	171.721.531	8	125.721.531	8	125.721.531	8	125.721.531	35			
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	2	2.783.000	2	2.783.000	2	2.783.000	2	2.783.000	8			
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0	2	1.613.260	2	1.613.260	2	1.613.260	2	1.613.260	8			
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	1	44.721.600	1	44.721.600	1	44.721.600	1	44.721.600	4			
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	3.702.400	2	3.702.400	2	3.702.400	2	3.702.400	2	3.702.400	10			
2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10	10	14.327.475	10	14.327.475	10	8.327.475	10	8.327.475	10	8.327.475	50			
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	48			
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	104.073.796	12	103.573.796	12	63.573.796	12	63.573.796	12	63.573.796	60			
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	0	0	0	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	8			
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	605.277.585	24	605.277.585	24	605.277.585	24	605.277.585	24	605.277.585	120			
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	195.849.085	12	195.849.085	12	195.849.085	12	195.849.085	12	195.849.085	60			
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	409.428.500	12	409.428.500	12	409.428.500	12	409.428.500	12	409.428.500	60			
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	4	100.665.000	4	100.665.000	4	98.498.000	4	98.498.000	4	98.498.000	20			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	39.950.000	1	39.950.000	1	39.950.000	1	39.950.000	1	39.950.000	1			
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1			
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1			
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	10.835.000	5	10.835.000	5	8.668.000	5	8.668.000	5	8.668.000	5			
2	Meningkatnya realisasi penanaman modal dan meningkatnya kualitas pelayanan		Realisasi Penanaman Modal	Miliar Rupiah	125,94	131,03		133,65		136,32		139,05		141,83		141,83			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	Angka	96,4	96,42		96,43		96,44		96,45		96,46		96,46			
2.18.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						655.630.930		988.236.000		655.631.000		665.990.000		676.513.000				
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas informasi potensi penanaman modal yang siap dipublikasikan	Persentase Penyediaan Informasi Potensi Penanaman Modal yang Siap Dipublikasikan	%	100	100	111.053.530	100	159.487.000	100	111.054.000	100	112.808.000	100	114.591.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang UsahaÃ Kabupaten	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Dokumen	1	1	111.053.530	1	159.487.000	1	111.054.000	1	112.808.000	1	114.591.000	5			
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	43.297.450	0	0	1	20.000.000	0	0	1	20.000.000	3			
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	67.756.080	1	159.487.000	1	91.054.000	1	112.808.000	1	94.591.000	5			
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Jumlah Kepeminatan (LOI)	LOI	9	9	155.416.700	9	156.221.000	9	155.417.000	9	157.872.000	9	160.367.000	45	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	%	100	100	155.416.700	100	156.221.000	100	155.417.000	100	157.872.000	100	160.367.000	100			
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	155.416.700	1	156.221.000	1	155.417.000	1	157.872.000	1	160.367.000	5			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas layanan penanaman modal sesuai norma, standar prosedur dan kriteria	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	%	100	100	157.388.400	100	311.764.000	100	157.388.000	100	159.875.000	100	162.401.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	%	100	100	157.388.400	100	311.764.000	100	157.388.000	100	159.875.000	100	162.401.000	100			
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha	15.903	2.500	126.519.000	2.500	261.402.000	2.500	126.519.000	2.500	126.519.000	2.500	126.519.000	10.000			
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi Terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha	35	35	30.869.400	35	50.362.000	35	30.869.000	35	33.356.000	35	35.882.000	175			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LKPM	Tingkat Kepatuhan LKPM	%	78,57	79	210.935.000	79,2	321.543.000	79,4	210.935.000	79,6	214.268.000	79,8	217.653.000	79,8	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kepatuhan LKPM	Jumlah LKPM yang dilaporkan	Laporan	791	795	210.935.000	797	321.543.000	799	210.935.000	801	214.268.000	803	217.653.000	803			
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadap Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	0	0	0	2	40.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2			
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	439	250	166.421.000	250	183.063.100	250	166.421.000	250	166.421.000	250	166.421.000	1.250			
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	29	10	44.514.000	10	98.479.900	10	24.514.000	10	27.847.000	10	31.232.000	10			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	%	100	100	20.837.300	100	39.221.000	100	20.837.000	100	21.167.000	100	21.501.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Dokumen	4	4	20.837.300	4	39.221.000	4	20.837.000	4	21.167.000	4	21.501.000	20			
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	4	4	20.837.300	4	39.221.000	4	20.837.000	4	21.167.000	4	21.501.000	20			
Jumlah							**4.124.617.026**		**4.491.912.000**		**3.501.606.000**		**3.511.965.000**		**3.522.488.000**				

Subkegiatan prioritas DPMPTSP Kabupaten Purworejo diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas layanan perizinan dan penanaman modal. Hal ini diwujudkan antara lain dengan penyederhanaan dan percepatan layanan perizinan berbasis OSS-RBA, penguatan peran Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu, peningkatan kegiatan promosi investasi pada sektor unggulan daerah, serta fasilitasi kemitraan antara investor dengan pelaku usaha lokal. Selain itu, DPMPTSP juga memprioritaskan pemutakhiran data penanaman modal dan penguatan kepatuhan pelaporan LKPM, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan inovasi pelayanan digital. Seluruh subkegiatan tersebut ditujukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempercepat realisasi investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.

Tabel 4.3.
Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman	Meningkatnya kualitas informasi potensi penanaman modal yang siap dipublikasikan	Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Subkegiatan : 1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1. Pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha 2. Penyusunan rencana umum penanaman modal 3. Penyusunan peta potensi investasi daerah	
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1. Pameran investasi 2. Penyelenggaraan forum bisnis dan investasi 3. Pertemuan *one-on-one meeting* dengan calon investor strategis 4. Kampanye investasi melalui platform digital 5. Fasilitasi Satgas gugus investasi	
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas layanan penanaman modal sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	1. Pelayanan perizinan non non perizinan 2. Konsultasi dan penanganan pengaduan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
			Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan : 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 2. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	masyarakat	
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LKPM	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan : 1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya 2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 3. Pengawasan Penanaman Modal	1. Penyelesaian masalah pelaku usaha 2. Bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha 3. Pengawasan pelaku usaha	
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyedian data dan informasi perizinan dan non perizinan	

4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Program Strategis Nasional memiliki keterkaitan erat dengan peran DPMPTSP Kabupaten Purworejo, khususnya dalam mendorong percepatan investasi, peningkatan pelayanan perizinan, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif di daerah. Sebagai ujung tombak pelayanan terpadu, DPMPTSP berperan mengimplementasikan kebijakan nasional di tingkat daerah melalui optimalisasi Sistem *Online Single Submission* (OSS), penyediaan data dan informasi investasi yang akurat, serta fasilitasi kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dan investor. Dengan demikian, DPMPTSP Purworejo tidak hanya menjadi pelaksana teknis pelayanan, tetapi juga mitra strategis pemerintah pusat dalam mendukung realisasi Program Strategis Nasional yang berorientasi pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan ekonomi di wilayah Purworejo. Uraian program dukungan DPMPTSP Kabupaten Purworejo sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 4.4. berikut.

Tabel 4.4.
Dukungan Program Strategis Nasional

NO	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026 -2030
1.	Kemudahan Perizinan Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan non perizinan baik secara online maupun offline (MPP dan jemput bola)
		Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Penyediaan data perizinan dan non perizinan

Program Pitulungan Bupati Purworejo “Rame Pasare” menekankan penguatan sektor perdagangan rakyat, pemberdayaan UMKM, serta penghidupan kembali pasar tradisional, memiliki sinergi erat dengan tugas DPMPTSP Kabupaten Purworejo dalam mendukung pertumbuhan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Melalui layanan perizinan yang cepat, mudah, dan transparan, DPMPTSP mendorong legalitas usaha bagi pelaku UMKM serta memberikan pendampingan melalui klinik investasi agar usaha kecil dapat naik kelas dan terhubung dengan peluang pasar yang lebih luas. Selain itu, DPMPTSP juga berperan dalam promosi potensi perdagangan daerah serta fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha lokal dan investor. Dengan dukungan tersebut, program “Rame Pasare” tidak hanya menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekosistem investasi daerah yang berkelanjutan di Purworejo.

Tabel 4.5.
Program Pitulungan Bupati Wakil Bupati Terpilih

NO	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas 2026 - 2030
1.	Rame Pasare	Menciptakan iklim investasi yang kondusif	1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (2026) 2. Evaluasi RUPM (2028 dan 2030) 3. Sosialisasi Iklim Investasi 4. Mengikuti kegiatan temu usaha di luar daerah 5. Menyelenggarakan temu usaha 6. Pelayanan perizinan penanaman modal 7. Pelayanan non perizinan penanaman modal 8. Penyusunan IPRO 9. Penyediaan data perizinan dan nonperizinan

4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Purworejo pada dasarnya mencerminkan capaian strategis yang berkaitan dengan peningkatan investasi dan kualitas pelayanan publik. IKU tersebut antara lain meliputi persentase pembentukan modal tetap bruto, indeks akuntabilitas kinerja serta nilai realisasi investasi, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan. Seluruh indikator ini berfungsi untuk mengukur keberhasilan DPMPTSP dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta membangun tata kelola pelayanan yang responsif dan inovatif.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP Kabupaten Purworejo difokuskan pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan peningkatan nilai investasi. PMTB menjadi ukuran penting dalam melihat besarnya penanaman modal yang terealisasi dalam bentuk aset tetap, sehingga mencerminkan pertumbuhan kapasitas produksi dan keberlanjutan ekonomi daerah. Sementara itu, indikator peningkatan nilai investasi menunjukkan keberhasilan daerah dalam menarik minat investor dan memperluas basis usaha yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua indikator ini menjadi tolok ukur utama efektivitas peran DPMPTSP dalam menggerakkan roda perekonomian lokal melalui fasilitasi, promosi, dan kemudahan layanan penanaman modal.

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja DPMPTSP

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah								
1.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	26,68	26,84	27,00	27,16	27,32	27,48	Tujuan Perangkat Daerah
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Tujuan Perangkat Daerah
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Sasaran Perangkat Daerah
4.	Realisasi Penanaman Modal	Miliar Rupiah	138,53	141,30	144,13	147,01	149,95	152,95	Sasaran Perangkat Daerah
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	Angka	96,41	96,42	96,43	96,44	96,45	96,46	Sasaran Perangkat Daerah
	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah								
1.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	26,68	26,84	27,00	27,16	27,32	27,48	IUP
2.	Peningkatan Nilai Investasi	%	2	2	2	2	2	2	Permendagri No. 18 Tahun 2020

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahun.
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo perlu menyusun dokumen perencanaan strategis yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, yang akan dicapai oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo 5 (lima) tahun kedepan serta strategi, kebijakan serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo terpilih. Dokumen Rencana Strategis ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan serta penganggaran dapat lebih terpadu, terarah serta konsisten dalam mencapai tujuan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu mendapat perhatian adalah aspek perencanaan pembangunan daerah Dimana dalam Undang-Undang ini mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan RPJMD sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi dasar penyusunan kegiatan tahunan yang diselaraskan dengan hasil Musrenbang Kecamatan dan Kajian Teknis lapangan, serta evaluasi bersama Bapperida dan DPRD yang selanjutnya dibahas dalam Musrenbang Kabupaten dan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas.

Keterkaitan antara berbagai dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

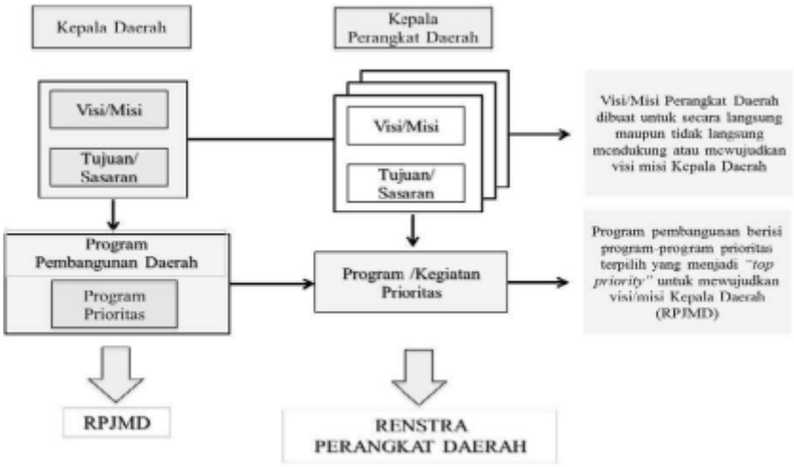

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.
25. Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Alun-Alun pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Dokuman Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya,

1.3.2. Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan:

a. Memenuhi amanat peraturan perundang-undangan tentang perencanaan dan penganggaran.
b. Memberikan pedoman untuk penyusunan rencana kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo tiap tahunnya.
c. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi apparat pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dengan pembangunan sub sektor kepemudaan, olahraga dan pariwisata dalam rangka

menentukkan prioritas program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

d. Mempermudah seluruh jajaran aparatur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dan menterjemahkan arah kebijakan, program dan kegiatan operasional selama periode renstra.
e. Menggambarkan kondisi bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada saat sekarang dan yang ingin dicapai pada 5 tahun ke depan serta tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Purworejo.
f. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang transparan, partisipatif, adil, akuntabel, responsive dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan urgensi penyusunan renstra sebagai pedoman strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata, guna mendukung pembangunan dalam lima tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan regulasi yang menjadi landasan dalam penyusunan dokumen renstra, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan sektor kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tujuan utama penyusunan renstra, yakni sebagai acuan bagi Dinporapar dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta memastikan kesinambunagan program yang selaras dengan visi dan misi pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan struktur dan isi dokumen renstra, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memberikan gambaran mengenai tugas, fungsi dan sumber daya yang dimiliki oleh Dinporapar dalam meberikan layanan kepada masyarakat.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berisi menguraikan peran dan tanggung jawab dalam pembangunan daerah, termasuk strukutur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugasnya

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Menjelaskan potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh Dinporapar, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur pendukung.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Menganalisis capaian dan efektivitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinporapar dalam bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
Mengidentifikasi kelompok masyarakat yang menjadi target layanan Dinporapar, seperti organisasi kepemudaan, atlet dan klub olahraga, pelaku usaha pariwisata.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
Menguraikan pihak-pihak yang menjadi mitra strategis Dinporapar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk instansi pemerintah, komunitas, organisasi pemuda, pelaku olahraga, pelaku industri pariwisata, dan media.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Menjelaskan berbagai tantangan dan isu penting yang dihadapi Dinporapar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pembahasan mencakup faktor internal dan eksternal yang memengaruhi capaian kinerja, baik dari aspek kepemudaan, keolahragaan, maupun pariwisata.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Berisi identifikasi kendala utama dalam pemberian layanan publik oleh Dinporapar, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program yang diselenggarakan.

2.2.2. Isu Strategis
Mengidentifikasi isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian khusus ke depan, seperti transformasi digital dalam promosi wisata, peningkatan kualitas event olahraga dan pemuda, serta pengembangan destinasi wisata berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Menjelaskan tujuan utama yang ingin dicapai perangkat daerah selama periode lima tahun ke depan. Tujuan dirumuskan sebagai arah umum pembangunan sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Menguraikan sasaran prioritas Dinporapar yang mencerminkan target kinerja pelayanan publik dan pengembangan sektor yang menjadi kewenangannya.

3.3. Strategi Perangkat Daerah
Menguraikan langkah-langkah umum dan pendekatan yang digunakan Dinporapar untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra. Strategi dirancang berdasarkan analisis kondisi, potensi

daerah, serta isu-isu strategis yang dihadapi selama periode perencanaan.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah
memuat kebijakan-kebijakan utama yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung pencapaian sasaran serta menyesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinporapar sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis periode 2025-2029.

4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah
Menjelaskan bagaimana program dan kegiatan perangkat daerah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan daerah.

4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Berisi penetapan indikator kinerja dan target yang terukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB V PENUTUP
Berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangann daerah bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo memiliki 1 (satu) sekretariat, 3 (bidang) yaitu Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga, Bidang Pariwisata, serta 1 (satu) Unit Pelayanan Teknis.

Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

a) Tugas

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
d. penyelenggaraan pelayanan umum bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata,;
g. pengelolaan sarana prasarana rekreasi dan olahraga milik Pemerintah Daerah;
h. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PURWOREJO

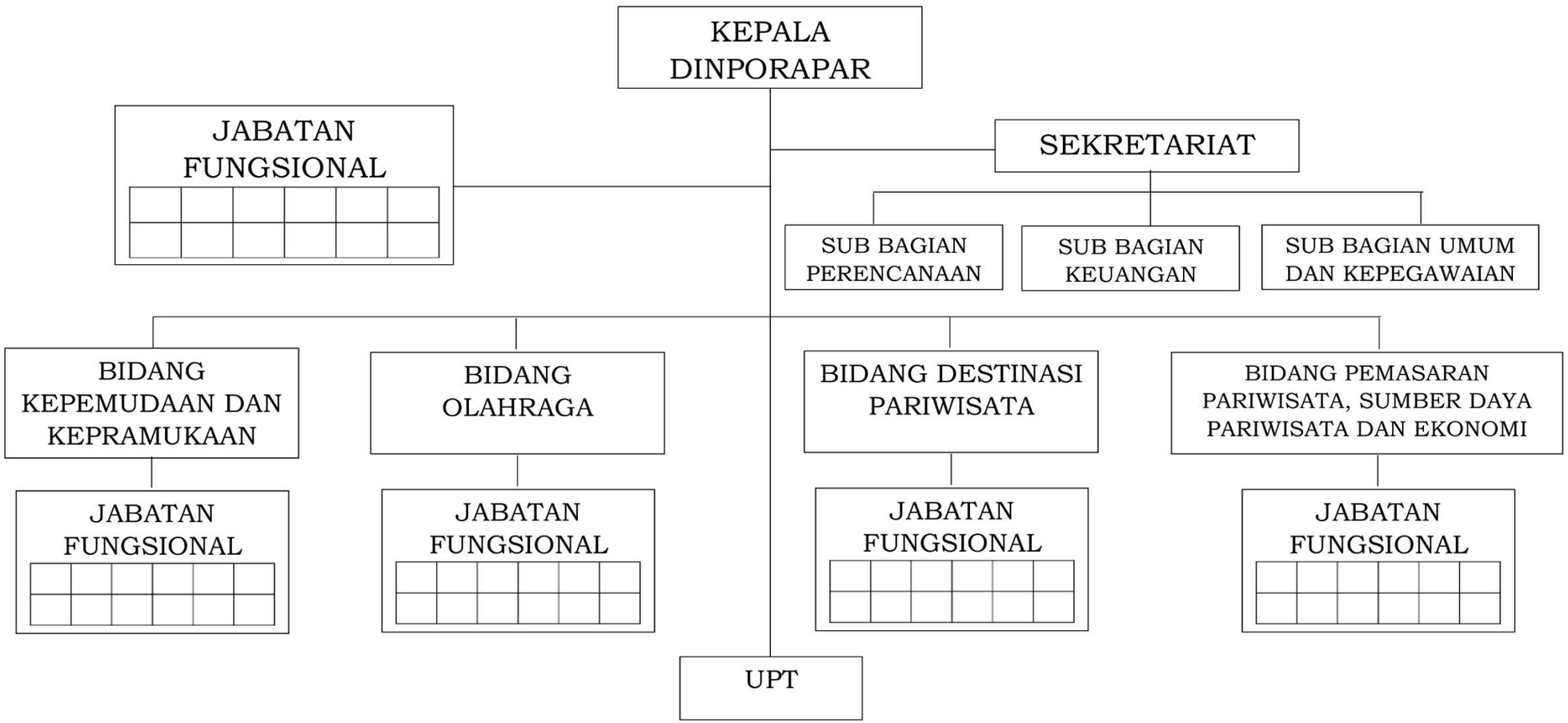

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sampai dengan 31 Juli 2025 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo memiliki 123 pegawai yang terdiri dari 50 orang ASN dan 73 orang Non ASN. Dari 50 orang ASN terdapat 31 orang laki-laki dan 19 orang Perempuan. Untuk lebih jelasnya, komposisi pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai berikut:

- Adapun rincian golongan PNS terdiri:
  a. Golongan IV : 6 orang;
  b. Golongan III : 19 orang;
  c. Golongan II : 12 orang dan;
  d. Golongan I : 2 orang.
- Adapun rincian golongan PPPK terdiri:
  a. Golongan V : 9 orang;
  b. Golongan I : 2 orang.
- Sedangkan tingkat pendidikan pada ASN dan Non ASN terdiri:
  a. S2 sebanyak 6 orang,
  b. S1 sebanyak 31orang,
  c. D4 1 orang
  d. SM/D3 sebanyak 13 orang,
  e. D II 1 orang
  f. SLTA sebanyak 64 orang
  g. SLTP sebanyak 4 orang
  h. SD sebanyak 3 orang

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo telah didukung dengan pemenuhan serta perbaikan sarana kerja. Dengan adanya sarana kerja yang baik sangat mendukung semua aktivitas dinas, sehingga semua program kegiatan yang telah direncanakan dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

2.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas kepemudaan, olaharaga serta pengembangan sektor pariwisata di daerah. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Selama periode perencanaan 2021-2025, berbagai capaian telah diraih terutama dalam pembinaan kepemudaan dan olahraga, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan dan kendala yang mempengaruhi efektivitas pelayanan, seperti keterbatasan infrastruktur, keterjangkaun akses, serta dampak pandemi COVID-19 yang sempat menghambat kegiatan di sektor pemuda, olahraga dan pariwisata.

Data capain kinerja dalam bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1	Persentase Peningkatan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga				102,86%	105,56%	107,89%	109,78%	111,11%	112,00%	102,86%	100%	100 %	100 %			100,00	94,73	92,69	91,09		
2	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Pariwisata				10%	15,14 %	27,90 %	31,95 %	35,30 %	38,73 %	10%		-26,03%	45,90%			100,00		-93,30	143,66		
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				78,49 indeks	82,00 indeks	82,50 indeks	82,24 indeks	82,00 indeks	83,00 indeks	78,49 indeks	82,00 indeks	84,16 indeks	85,25 indeks			100,00	100,00	102,01	103,96		
4	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif				98,81%	98,81 %	98,81 %	98,81 %	98,81 %	100%	99%	100%	100 %	100 %			100,00	101,20	101,20	101,20		
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan				2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3,04 %	24,31%			100,00	100,00	152,00	1215,50		
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				78,49 indeks	82,00 indeks	82,50 indeks	82,24 indeks	82,00 indeks	83,00 indeks	78,49 indeks	82,00 indeks	84,16 indeks	85,25 indeks			100,00	100,00	102,01	103,96		
7	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif				95,24%	95,24 %	95,24 %	95,24 %	98,81 %	100%	95,24 %	100%	100 %	100 %			100,00	105,00	105,00	105,00		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
8	Persentase organisasi keolahragaan yang aktif				100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %			100,00	100,00	100,00	100,00		
9	Persentase organisasi kepramukaan				100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %			100,00	100,00	100,00	100,00		
10	Persentase Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				39,55%	72,80 %	87,58 %	94,77 %	98,18 %	100%	38,10 %	47,62 %	76,19%				96,33	65,41	86,99	0,00		
11	Persentase Jumlah Sarana Promosi/Pemasaran Pariwisata				10%	10,33 %	19,00 %	20,67 %	24,33 %	25,67 %	60%	80%	100 %				600,00	774,44	526,32	0,00		
12	Persentase Fasilitasi Sub Sektor Ekonomi Kreatif				0%	0%	16,67 %	16,67 %	16,67 %	33,33 %	0%	100%	100 %				0,00	0,00	599,88	0,00		
13	Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia yang Dilatih				0%	20%	20%	20%	20%	20%	105%	173%	173 %				0,00	865,00	865,00			
14	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %								

Dari Tabel 2.1 di atas, disimpulkan bahwa beberapa indikator telah menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target, seperti dalam bidang kepemudaan dan peningkatan perjalanan wisatawan. Keberhasilan tersebut tercermin dari konsistennya capaian indikator prestasi kepemudaan dan organisasi kepemudaan aktif yang selalu memenuhi bahkan melampaui target Renstra setiap tahunnya. Selain itu, peningkatan perjalanan wisatawan mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024, yang menunjukkan efektivitas program promosi pariwisata dan pengembangan destinasi yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Namun di sisi lain, terdapat sektor yang masih mengalami kendala dalam pencapaian target, yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pariwisata yang mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, antara lain belum optimalnya pengelolaan objek wisata, terbatasnya promosi destinasi unggulan, rendahnya daya tarik investasi di sektor pariwisata, serta dampak dari kondisi eksternal seperti pandemi dan perubahan tren pariwisata masyarakat.

Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi serta tantangan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan di periode mendatang. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan meupun kendala yang dihadapi, strategi yang lebih efektif dapat dirumuskan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat dan mendukung pertumbuhan sektor kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		*88.675.798.453*	*29.173.046.171*	*31.455.237.808*	*32.744.175.759*	*33.079.200.994*	-	*68.144.546.356*	*80.270.967.074*	*26.712.966.051*	-	-		*76,85*	*275,2*	*84,92*		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		17.566.798.453	13.957.046.171	15.334.237.808	15.508.302.559	15.899.327.794	-	17.793.844.187	26.390.691.565	13.820.422.112	-	-						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA		3.985.086.153	4.152.026.171	4.563.217.808	4.482.462.409	4.899.487.644	-	4.742.583.472	4.798.917.603	4.876.887.529	-	-						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		80.119.000	74.774.950	81.063.697	88.491.882	94.566.476	-	76.033.688	68.310.010	58.531.354	-	-						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		63.119.000	55.774.950	58.563.697	61.491.882	64.566.476		62.996.288	58.132.010	46.045.854				99,81	104,23	78,63		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.800.000	2.000.000		695.100	680.000	980.000				69,51	56,67	65,33		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.800.000	2.000.000		987.400	680.000	980.000				98,74	56,67	65,33		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.800.000	2.000.000		676.100	680.000	1.000.000				67,61	56,67	66,67		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.800.000	2.000.000		695.100	680.000	980.000				69,51	56,67	65,33		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.800.000	2.000.000		695.100	680.000	976.000				69,51	56,67	65,07		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12.000.000	13.000.000	15.000.000	18.000.000	20.000.000		9.288.600	6.778.000	7.569.500				77,41	52,14	50,46		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.607.331.753	3.216.551.221	3.479.404.111	3.714.820.528	4.053.052.668	-	4.385.318.166	4.360.516.067	4.404.288.694	-	-						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.573.656.353	3.180.051.221	3.439.754.111	3.671.005.528	4.006.056.168		4.352.269.878	4.335.949.344	4.377.686.826				121,79	136,35	127,27		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.469.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000		5.459.000	1.168.000	1.500.000				99,82	19,47	21,43		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		27.203.400	29.000.000	31.000.000	34.000.000	36.000.000		26.586.288	21.025.723	22.625.268				97,73	72,50	72,98		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.003.000	1.500.000	1.650.000	1.815.000	1.996.500		1.003.000	2.373.000	2.476.600					158,20	150,10		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	39.000.000	3.000.000	2.999.999	3.000.000	-	-	8.093.600	4.672.200	-	-			20,75	155,74		
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		-	35.000.000	2.000.000	1.999.999	2.000.000		-	5.677.600	2.754.000					16,22	137,70		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		-	2.416.000	1.918.200					60,40	191,82		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		156.072.000	206.700.000	218.250.000	226.500.000	538.350.000	-	138.703.947	124.905.734	148.413.169	-	-		88,87	60,43	68,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.059.600	3.200.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000		2.924.000	3.233.000	5.025.300				95,57	101,03	143,58		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4.698.600	5.000.000	5.500.000	6.000.000	7.500.000		4.585.800	5.836.000	5.874.300				97,60	116,72	106,81		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		47.770.800	50.000.000	52.000.000	55.000.000	60.000.000		47.695.200	36.692.600	43.859.700				99,84	73,39	84,35		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		8.614.600	9.500.000	10.000.000	12.000.000	15.000.000		4.605.800	5.145.800	8.986.975				53,47	54,17	89,87		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		-	5.000.000	5.000.000	500.000	5.000.000		-	2.200.000	2.420.000				0,00	44,00	48,40		
Penyediaan Bahan/Material		25.111.400	27.000.000	28.000.000	30.000.000	320.000.000		13.064.100	16.108.200	19.030.200				52,02	59,66	67,97		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		66.817.000	82.000.000	88.000.000	92.000.000	98.000.000		65.829.047	55.690.134	63.216.694				98,52	67,91	71,84		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	25.000.000	26.250.000	27.000.000	28.350.000		-						0,00	0,00	0,00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	450.000.000	600.000.000	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-						
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	250.000.000	-	-	-								0,00	0,00	0,00		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	-	600.000.000	-	-		-						0,00	0,00	0,00		
Pengadaan Mebel		-	50.000.000	-	-	-		-						0,00	0,00	0,00		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	75.000.000	-	-	-		-						0,00	0,00	0,00		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	25.000.000	-	50.000.000	-		-						0,00	0,00	0,00		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	50.000.000	-	200.000.000	-		-						0,00	0,00	0,00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		44.818.400	63.500.000	69.850.000	76.835.000	84.518.500	-	40.531.650	72.093.910	103.832.316	-	-						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		22.292.000	23.500.000	25.850.000	28.435.000	31.278.500		29.144.742	53.241.466	83.479.448				130,74	226,56	322,94		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		22.526.400	40.000.000	44.000.000	48.400.000	53.240.000		11.386.908	18.852.444	20.352.868				50,55	47,13	46,26		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96.745.000	101.500.000	111.650.000	122.815.000	126.000.000	-	101.996.021	164.998.282	157.149.796	-	-						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		45.254.000	47.000.000	51.700.000	56.870.000	58.000.000		50.907.021	85.179.282	85.739.796				112,49	181,23	165,84		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		16.337.000	17.500.000	19.250.000	21.175.000	22.000.000		16.284.500	16.835.000	14.360.000				99,68	96,20	74,60		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		31.392.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000	41.000.000		31.052.000	60.336.000	52.560.000				98,92	182,84	144,79		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3.762.000	4.000.000	4.400.000	4.840.000	5.000.000		3.752.500	2.648.000	4.490.000				99,75	66,20	102,05		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		350.712.300	267.020.000	294.020.000	294.020.000	294.020.000	-	337.418.200	678.574.640	462.174.450	-	-						
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		267.689.700	207.020.000	234.020.000	234.020.000	234.020.000	-	288.005.600	507.548.860	230.953.450	-	-						

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota		12.546.000	12.289.600	12.289.600	12.289.600	12.289.600		13.431.900	28.127.240	45.209.900				107,06	228,87	367,87		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota		23.783.800	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		24.733.800	21.847.820	28.117.150				103,99	109,24	140,59		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota		24.812.400	21.000.000	168.000.000	-	-		20.554.800	92.104.000	67.882.600				82,84	438,59	40,41		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota					168.000.000	168.000.000		-						0,00	0,00	0,00		
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota		13.422.800	13.442.800	13.442.800	13.442.800	13.442.800		14.372.800	16.065.400	35.256.300				107,08	119,51	262,27		
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			20.287.600	20.287.600	20.287.600	20.287.600		22.287.600		54.487.500				0,00	0,00	268,58		
Penyelenggaran Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		193.124.700	120.000.000	-	-	-		192.624.700	349.404.400					99,74	291,17	0,00		
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		83.022.600	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	49.412.600	171.025.780	231.221.000	-	-						
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		58.024.400	40.000.000	40.000.000	-	-		23.014.400	53.207.400	45.707.400				39,66	133,02	114,27		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota		-	-	-	40.000.000	40.000.000		-		-				0,00	0,00	0,00		
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organiasasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		24.998.200	20.000.000	20.000.000	-	-		26.398.200	117.818.380	185.513.600				105,60	589,09	927,57		
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		-	-	-	20.000.000	20.000.000		-						0,00	0,00	0,00		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		12.919.000.000	9.313.000.000	10.230.000.000	10.477.820.150	10.452.820.150	-	12.413.842.515	20.613.199.322	8.136.245.133	-	-						

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		10.761.735.400	7.155.735.400	8.072.735.400	8.348.735.400	8.323.735.400	-	9.556.577.915	16.140.765.069	5.562.989.200	-	-						
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota		10.392.626.500	6.792.626.500	7.689.626.500	7.959.626.500	7.940.626.500		8.764.636.315	14.859.405.708	3.944.690.703				84,34	218,76	51,30		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		369.108.900	363.108.900	383.108.900	389.108.900	383.108.900		791.941.600	1.281.359.361	1.618.298.497				214,55	352,89	422,41		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		523.145.300	523.145.300	523.145.300	494.965.450	494.965.450	-	723.145.300	528.985.033	524.862.521	-	-						
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		388.672.100	388.672.100	388.672.100	360.492.250	360.492.250		588.672.100	347.592.500	359.856.100				151,46	89,43	92,59		
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		134.473.200	134.473.200	134.473.200				134.473.200	181.392.533	165.006.421				100,00	134,89	122,71		
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga					134.473.200	134.473.200		-						0,00	0,00	0,00		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		57.488.100	57.488.100	57.488.100	57.488.100	57.488.100	-	57.488.100	11.777.100	44.911.200	-	-						
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		57.488.100	57.488.100	57.488.100	57.488.100	57.488.100		57.488.100	11.777.100	44.911.200				100,00	20,49	78,12		
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	-	2.000.000.000	3.801.562.020	1.978.883.212	-	-						
Pengembangan Organisasi Keolahragaan		1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000				2.000.000.000	3.801.562.020	1.978.883.212				133,33	253,44	131,93		
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait					1.500.000.000	1.500.000.000		-						0,00	0,00	0,00		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		76.631.200	76.631.200	76.631.200	76.631.200	76.631.200	-	76.631.200	130.110.100	24.599.000	-	-						
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		76.631.200	76.631.200	76.631.200				76.631.200	130.110.100	24.599.000				100,00	169,79	32,10		
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasiona					76.631.200	76.631.200								0,00	0,00	0,00		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		312.000.000	225.000.000	247.000.000	254.000.000	253.000.000	-	300.000.000	300.000.000	345.115.000	-	-						

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		312.000.000	225.000.000	247.000.000	254.000.000	253.000.000	-	300.000.000	300.000.000	345.115.000	-	-						
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		312.000.000	225.000.000	247.000.000	254.000.000	253.000.000		300.000.000	300.000.000	345.115.000				96,15	133,33	139,72		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		71.109.000.000	15.216.000.000	16.121.000.000	17.235.873.200	17.179.873.200	-	50.350.702.169	53.880.275.509	12.892.543.939	-	-						
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		67.834.000.000	12.856.000.000	13.607.000.000	14.674.873.200	14.640.873.200	-	46.473.231.229	47.948.276.251	8.858.655.134	-	-						
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		385.000.000	409.250.000	1.064.212.500	579.923.125	616.419.281	-	300.509.000	80.280.900	568.919.523	-	-		78,05	19,62	53,46		
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		100.000.000	110.000.000					99.996.000	17.221.100					100,00	15,66	0,00		
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		285.000.000	299.250.000	549.212.500	579.923.125	616.419.281		200.513.000	63.059.800	55.489.800				70,36	21,07	10,10		
Perencanaan dan Perancangan daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				515.000.000				-		513.429.723				0,00	0,00	99,70		
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		64.704.023.500	10.249.250.000	11.265.412.500	11.500.333.125	11.308.699.781	-	41.680.915.141	40.413.705.586	3.612.295.515	-	-						
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		2.465.000.000	-	50.000.000				2.035.139.805	221.007.300	220.893.730				82,56	0,00	441,79		
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		61.577.023.500	8.799.250.000	11.215.412.500	11.500.333.125	11.308.699.781		38.990.535.336	39.958.604.651	3.391.401.785				63,32	454,11	30,24		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		612.000.000	1.450.000.000	-	-	-		612.000.000	234.093.635					100,00	16,14	0,00		
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata		50.000.000	-	-	-	-		43.240.000						86,48	0,00	0,00		
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		2.444.976.500	1.732.500.000	789.125.000	2.041.831.250	2.137.335.313	-	4.222.146.806	7.382.767.265	4.642.351.896	-	-						
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	-	-	-	131.750.000	131.750.000		-	249.679.600					0,00	0,00	0,00		
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	2.444.976.500	1.732.500.000	789.125.000	1.910.081.250	2.005.585.313		3.999.436.806	7.133.087.665	4.642.351.896				163,58	411,72	588,29		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota								222.710.000						0,00	0,00	0,00		
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		300.000.000	465.000.000	488.250.000	552.785.700	578.418.825	-	269.660.282	71.522.500	35.088.200	-	-						
Pengelolaan Investiasi Pariwisata		300.000.000	315.000.000	488.250.000	512.662.500	538.295.625		269.660.282	31.064.400					89,89	9,86	0,00		
Pembinaan dan Pangawasan Usaha Pariwisata			150.000.000						40.458.100					0,00	26,97	0,00		
Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota					40.123.200	40.123.200				35.088.200				0,00	0,00	0,00		
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		1.544.000.000	1.113.000.000	1.223.000.000	1.256.000.000	1.253.000.000	-	2.474.094.333	5.088.612.908	2.807.961.438	-	-						
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi		1.544.000.000	1.113.000.000	1.223.000.000	1.256.000.000	1.253.000.000	-	2.474.094.333	5.088.612.908	2.807.961.438	-	-						

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000		74.847.100	54.212.065	63.498.200				99,80	72,28	84,66		
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		800.000.000	369.000.000	479.000.000	512.000.000	509.000.000		1.792.947.551	4.429.476.461	1.941.005.745				224,12	1200,40	405,22		
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Neger		669.000.000	669.000.000	669.000.000	669.000.000	669.000.000		606.299.682	604.924.382	803.457.493				90,63	90,42	120,10		
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		235.000.000	169.000.000	186.000.000	191.000.000	171.000.000	-	234.700.560	76.049.700	41.246.900	-	-						
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		235.000.000	169.000.000	186.000.000	191.000.000	171.000.000	-	234.700.560	76.049.700	41.246.900	-	-		99,87	45,00	22,18		
Pengembangan Sistem Pemasaran		-	119.000.000	136.000.000	141.000.000	121.000.000			38.155.800	31.858.500				0,00	32,06	23,43		
Pemberian Insentif		125.000.000	20.000.000	-	-	-		79.850.850	19.459.600					63,88	97,30	0,00		
Fasilitasi Pemberian Insentif				20.000.000	20.000.000	20.000.000								0,00	0,00	0,00		
Fasilitasi Kekayaan Intelektual			20.000.000						11.154.300					0,00	55,77	0,00		
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual				20.000.000	20.000.000	20.000.000								0,00	0,00	0,00		
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif		110.000.000						154.849.710						140,77	0,00	0,00		
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatiF			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000			7.280.000	9.388.400				0,00	72,80	93,88		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		1.496.000.000	1.078.000.000	1.105.000.000	1.114.000.000	1.115.000.000	-	1.168.676.047	767.336.650	1.184.680.467	-	-						
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		1.496.000.000	1.078.000.000	1.105.000.000	1.114.000.000	1.115.000.000	-	1.168.676.047	767.336.650	1.184.680.467	-	-		78,12	71,18	107,21		
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		376.087.400	375.000.000											0,00	0,00	0,00		
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				375.000.000	375.000.000	375.000.000				287.839.367				0,00	0,00	76,76		
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		786.912.600	370.000.000					840.948.701	616.405.200					106,87	166,60	0,00		
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		333.000.000	333.000.000					327.727.346	150.931.450					98,42	45,32	0,00		
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				49.430.000	702.000.000	702.000.000				242.906.300				0,00	0,00	491,41		
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				25.000.000	27.000.000	28.000.000				22.375.800				0,00	0,00	89,50		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				10.000.000	10.000.000	10.000.000								0,00	0,00	0,00		
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				645.570.000						631.559.000				0,00	0,00	97,83		

Dari tabel 2.2 yang tersaji dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya data rasio antara realisasi dan anggaran mengungkapan kinerja yang bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, rasio realisasi anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata belum mencapai target yang ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas.

Melangkah ke tahun berikutnya, menunjukkan rasio yang baik pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, dimana rasio ini menandakan bahwa realisasi anggaran melebihi target yang ditetapkan, mencerminkan pencapaian yang baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ini sangat beragam, pengelolaan anggaran yang transparan dan efektif merupakan faktor kunci. Keterlibatan stakeholder dalam merancanag dan menjalankan program sangat berpengaruh terhadap pencapain hasil. Selain itu, pelatihan dan dukungan bagi pemuda, atlet, paleku usaha akan meningkatkan kapasitas mereka. Ketersediaan infrastruktur yang memadai juga dapat mendukung kegiatan pariwisata. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program yang ada juga sangat diperlukan untuk memperbaiki kekurangan di masa mendatang.

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	-	*0,06*	*0,31*	*0,31*	*0,35*	*Pemendagri 18 Tahun 2020*
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	-	*17,76*	*28,86*	*0,3*	*0,53*	*Pemendagri 18 Tahun 2021*
3	Peningkatan prestasi olahraga	-	*0*	*39*	*14*	*32*	*Pemendagri 18 Tahun 2022*
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-	*-100*	*0*	*910*	*46,53*	*Pemendagri 18 Tahun 2023*
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	-	*-49,71*	*115,16*	*1,88*	*24,16*	*Pemendagri 18 Tahun 2024*
6	Tingkat hunian akomodasi	-	*22,83*	*22,83*	*21,93*	*21,48*	*Pemendagri 18 Tahun 2025*
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	-	*0*	*2,26*	*25,63*	*2,3*	*Pemendagri 18 Tahun 2026*
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	-	88,90	0,32	0,44	07.55	*Pemendagri 18 Tahun 2027*
9	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	133	0	0	101	148	*IUP*
10	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	-	-	-	-	9,02	*Tujuan PD*
11	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2,07	2,1	2,21	2,26	2,3	*Tujuan PD*
12	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	63,91	*Tujuan PD*
13	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	-	-	-	-	9,02	*Sasaran PD*

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
14	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	63,91	*Sasaran PD*
15	Persentase Pemuda Berprestasi	-	-	-	-	7,395	*Program PD*
16	Persentase Organisasi Keolahragaan yang Aktif	100	100	100	100	100	*Program PD*
17	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	100	100	100	100	100	*Program PD*
18	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	492.411	246.911	617.606	636.498	790.969	*Program PD*
19	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	133	0	0	101	148	*Program PD*
20	Persentase Layanan Pemasaran Pariwisata	5	6	8	10	19	*Program PD*
21	Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	-	-	-	7,14	7,14	*Program PD*
22	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kapasitasnya	10	21	34	47	60	*Program PD*
23	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	*Program PD*

Pada Tabel 2.3 menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata secara umum mengalami tren positif, terutama dalam bidang kepemudaan, keolahragaan, serta kunjungan dan kontribusi pariwisata. Namun, terdapat beberapa indikator yang masih perlu perhatian, seperti penguatan sektor ekonomi kreatif, peningkatan kontribusi subsektor kuliner dan akomodasi, serta optimalisasi perlindungan kekayaan intelektual pelaku usaha.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya mempercepat pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, masih terdapat berbagai tantangan lintas sektor yang perlu segera diatasi. Tantangan-tantangan ini mencakup aspek kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif—semuanya memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat.

Di sektor kepemudaan, tantangan utama meliputi rendahnya akses dan kualitas pendidikan, terbatasnya lapangan kerja, lemahnya budaya wirausaha, serta fenomena urbanisasi yang mendorong migrasi pemuda ke wilayah lain. Selain itu, partisipasi generasi muda dalam pembangunan masih rendah, diperparah oleh persoalan sosial seperti pernikahan dini dan penyalahgunaan narkoba. Kesenjangan teknologi dan lemahnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, serta organisasi kepemudaan semakin menambah kompleksitas permasalahan. Meski demikian, terdapat peluang besar untuk mengatasinya melalui peningkatan pelatihan keterampilan, penguatan literasi digital, serta penciptaan ruang partisipasi yang aktif dan produktif bagi pemuda. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pemuda dapat menjadi motor penggerak inovasi dan perubahan positif di daerah.

Di bidang olahraga, keterbatasan fasilitas latihan, kurangnya pelatih bersertifikat, dan belum optimalnya pembinaan di sekolah dan klub menjadi hambatan dalam mencetak atlet unggul. Koordinasi antar

pemangku kepentingan belum solid, ditambah minat masyarakat terhadap olahraga prestasi yang masih rendah. Namun, dengan pembinaan yang terarah serta sinergi antara pemerintah, sekolah, pelatih, komunitas, dan sektor swasta, terbuka peluang untuk menciptakan sistem pengembangan olahraga yang lebih profesional dan berprestasi di tingkat regional hingga nasional.

Sektor pariwisata menghadapi tantangan berupa infrastruktur yang belum memadai, aksesibilitas yang terbatas, serta minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi. Promosi yang belum efektif juga menyebabkan potensi wisata belum tergarap secara optimal. Peluangnya dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata, dan strategi promosi yang lebih modern, terintegrasi, serta berbasis digital. Dengan pendekatan partisipatif, pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

Dalam sektor ekonomi kreatif, khususnya yang berbasis kekayaan intelektual (HKI), tantangan utamanya adalah rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya HKI, terbatasnya akses pembiayaan berbasis HKI, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap karya kreatif. Solusi yang dapat ditempuh mencakup sosialisasi dan edukasi intensif mengenai HKI, fasilitasi akses pembiayaan, peningkatan perlindungan hukum, serta pemberdayaan UMKM lokal. Dengan dukungan ekosistem yang tepat, ekonomi kreatif dapat tumbuh menjadi sektor unggulan yang menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat.

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo adalah pihak-pihak yang menjadi target utama dalam pemberian layanan oleh dinas ini, terutama dalam bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Target utama dalam memberikan layanan antara lain kepada masyarkat umum, pemuda, atlet dan pembina olahraga, serta pelaku pariwisata.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayananan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode perencanaan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menghadapi berbagai permasalahan strategis yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti secara terarah dan berkelanjutan. Permasalahan tersebut mencakup aspek pemberdayaan pemuda, pengembangan olahraga, serta pembangunan sektor pariwisata.

Pertama, pada bidang kepemudaan, masih ditemukan terbatasnya pemberdayaan pemuda dalam kegiatan produktif dan inovatif, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Hal ini diperparah dengan minimnya sarana serta program pembinaan olahraga yang merata dan berkelanjutan, sehingga pembinaan atlet maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat belum optimal.

Di bidang kepariwisataan, terdapat sejumlah tantangan serius, antara lain rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata, yang berimplikasi pada kualitas pelayanan serta pengelolaan destinasi yang belum memenuhi standar. Selain itu, terbatasnya program pelatihan, pembinaan, dan sertifikasi secara berkelanjutan menyebabkan rendahnya profesionalitas SDM di sektor ini.Masalah lainnya adalah aksesibilitas menuju destinasi wisata yang belum memadai, sehingga menyulitkan wisatawan dalam menjangkau lokasi wisata, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang. Kapasitas SDM pariwisata yang terbatas juga menghambat pengembangan potensi wisata secara menyeluruh.

Permasalahan juga muncul dari sisi ketersediaan fasilitas penunjang. Amenitas pada destinasi wisata masih terbatas, termasuk akomodasi yang tidak memadai, sehingga pengalaman wisatawan belum optimal. Di samping itu, kurangnya efektivitas promosi pariwisata menyebabkan rendahnya tingkat kunjungan, karena potensi yang ada belum tersampaikan secara luas kepada pasar. Selanjutnya, terdapat rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi wisata, yang menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan pariwisata berbasis komunitas. Terakhir, pengelolaan objek wisata yang belum optimal menjadi kendala dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing destinasi di tingkat lokal maupun nasional.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan perangkat daerah, guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan.

2.2.2. Isu Strategis

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, telah diidentifikasi beberapa isu strategis yang mempengaruhi capaian pembangunan daerah secara keseluruhan. Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama adalah rendahnya daya saing dalam aspek kemudahan dan olahraga**.** Permasalahan ini mencerminkan belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung, pelayanan publik yang efisien, serta minimnya inovasi dan kolaborasi dalam pengembangan sektor olahraga. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Selain itu, isu strategis lainnya yang juga menjadi perhatian adalah rendahnya daya saing sektor pariwisata. Hal ini mengindikasikan masih terbatasnya pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan, keterbatasan promosi dan pemasaran, serta kurangnya dukungan infrastruktur dan kualitas layanan kepariwisataan. Padahal, sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap sektor-sektor lainnya.

Oleh karena itu, peningkatan daya saing di kedua sektor tersebut menjadi prioritas strategis yang perlu mendapat perhatian serius melalui perencanaan program dan kegiatan yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan dalam periode rencana strategis mendatang.

Tabel 2.4
Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Bonus Demografi	Terbatasnya pemberdayaan pemuda dalam kegiatan produktif dan inovatif	Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dampak buruk teknologi AI	Transformasi sosial	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Rendahnya daya saing kepemudaan dan olahraga
	Minimnya sarana dan program pembinaan olahraga yang merata dan berkelanjutan		*Involuntary migration*	Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat	
	Rendahnya kompetensi SDM pariwisata		*Aging population negara maju*			
	Terbatasnya program pelatihan, pembinaan, dan sertifikasi secara berkelanjutan					
Potensi Pertanian dan Pariwisata	Aksebilitas menuju destinasi wisata	Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata	Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia	Transformasi Ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Rendahnya daya saing sektor pariwisata
Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi	Kapasits SDM Pariwisata terbatas					
Kawasan Pesisir Pantai Selatan	Amenitas pada destinasi wisata terbatas					
	Akomodasi terbatas					
	Kurang efektifnya promosi pariwisata					
	Rendahnya kepedulian masyakat di sekitar destinasi pariwisata					
	Pengelolaan obyek wisata belum optimal					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo memiliki peran penting dalam mendukung visi Kabupaten Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif. Dinporapar mendukung misi ke 1 dan misi ke Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Purworejo memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya visi *"Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif."* Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program-program yang selaras dengan Misi ke-1 dan Misi ke-4 Kabupaten Purworejo.

Dalam mendukung Misi ke-1, yaitu "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Kompeten, Produktif, dan Bertaqwa Serta Masyarakat yang Sehat dan Berbudaya", Dinporapar fokus pada pengembangan potensi pemuda melalui pembinaan organisasi, pelatihan, dan pemberdayaan karakter. Selain itu, melalui pembinaan dan pengembangan olahraga, Dinporapar mendorong terciptanya masyarakat yang sehat, aktif, dan berprestasi.

Sementara itu, dalam mendukung Misi ke-4, yaitu "Meningkatkan Produktivitas dan Inklusivitas Ekonomi Melalui Kontribusi Pelaku Ekonomi Lokal yang Mendukung Ketahanan Pangan", Dinporapar berperan melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi lokal. Program-program seperti pengembangan desa wisata, pelibatan UMKM, dan promosi wisata daerah dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat peran pelaku ekonomi lokal.

Dengan sinergi antara bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, Dinporapar turut mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Kabupaten Purworejo di berbagai sektor.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo adalah Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga, peranan pariwisata dalam perekonomian daerah yang disertai peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Sedangkan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo terbagi menjadi 3 yaitu meningkatnya prestasi olahraga serta daya saing pemuda, meningkatnya kunjungan wisatawan, dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Sasaran perangkat daerah bertujuan untuk mendukung tercapainya pembangunan daerah. Sasaran perangkat daerah bersifat leboh spesifik dan terukur, serta berfokus pada pencapaian yang dapat langsung mempengaruhi kinerja, pelayanan, dan dampak sosial ekonomi di daerah tersebut. Disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga, peranan pariwisata dalam perekonomian daerah yang disertai peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	9,11	9,22	9,33	9,40	9,50	9,55	
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2,58	2,86	3,15	3,43	3,71	3,99	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	
		1. Meningkatnya daya saing pemuda dan olahraga	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	9,11	9,22	9,33	9,40	9,50	9,55	
		2. Meningkatnya peranan pariwisata dalam perekonomian daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2,58	2,86	3,15	3,43	3,71	3,99	
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,62	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, diperlukan strategi yang tepat serta arah kebijakan yang jelas. Strategi dan kebijakan ini disusun untuk memberikan panduan dalam perencanan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan yang mendukung pembangunan sektor kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang berkelanjutan.

Pembangunan sektor kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Purworejo dalam lima tahun ke depan menuntut adanya strategi yang tepat dan arah kebijakan yang terarah. Strategi pembangunan harus mampu menjawab berbagai tantangan serta memanfaatkan peluan yang ada guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerh yang telah ditetapkan. Perumusan startegi didasarkan pada hasil analisis lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, serta mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Penahapan rencana strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo disajikan dalam tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4.
Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan				
Menguatkan prestasi olahraga serta daya saing pemuda pada tingkat lokal dan regional sebagai dasar pengembangan program.	Meningkatkan prestasi olahraga serta daya saing pemuda melalui pelatihan intensif dan peningkatan fasilitas olahraga yang memadai	Memantapkan prestasi olahraga serta daya saing pemuda dengan mengadakan kompetisi tingkat nasional dan menjalin kemitraan strategis.	Mewujudkan prestasi olahraga serta daya saing pemuda yang berkelanjutan dengan memperluas program pembinaan dan dukungan teknologi olahraga.	Meneguhkan prestasi olahraga serta daya saing pemuda pada tingkat internasional melalui kolaborasi global dan inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia
Urusan Pariwisata				
Penguatan kelembagaan dan kebijakan yang meningkatkan peranan pariwisata dalam perekonomian daerah	Peningkatan kapasitas SDM dan keterlibatan masyarakat yang mendukung pada peranan sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran yang efektif mendorong pada peningkatan peranan pariwisata dalam perekonomian daerah	Membangun kemitraan lintas sektor dan sinergi yang meningkatkan peranan pariwisata dalam perekonomian daerah	Penguatan kelembagaan dan kebijakan yang meningkatkan peranan pariwisata dalam perekonomian daerah
Penunjang Urusan				
Menguatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, visi misi diperlukan sebagai kondisi umum serta abstraksi kondisi dan kualitas daerah yang diinginkan dalam jangka waktu 5 tahun. Visi misi tersebut kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran masing-masing perangkat daerah.

Arah kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo disusun dalam dokumen ini mencerminkan upaya nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas serta daya saing sumber daya manusia di bidang kepemudaan dan olahraga, mengembangkan sektor pariwisata, serta memperkuat tata kelola kelembagaan yang efektof dan berkelanjutan. Hal ini disusun dalam tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5.
Arah Kebijakan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1	S1, Meningkatnya kualitas manusia	Penguatan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga	Arah kebijakan ini menitikberatkan pada penguatan peran dan kapasitas pemuda melalui pembinaan keterampilan, pengembangan prestasi di bidang olahraga dan non-olahraga, serta optimalisasi fasilitas olahraga. Kegiatan utama meliputi pelatihan, pembinaan atlet muda, penyediaan fasilitas yang representatif, dan penyelenggaraan kompetisi. Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan kolaborasi lintas sektor diupayakan untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi pemuda dalam pembangunan secara berkelanjutan.	2026
		Peningkatan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga	Arah kebijakan ini berfokus pada peningkatan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan melalui pembinaan yang terpadu dan pengembangan kompetensi di bidang keolahragaan maupun non-keolahragaan. Optimalisasi fasilitas olahraga dilakukan untuk mendukung peningkatan prestasi dan partisipasi pemuda secara maksimal. Melalui kegiatan pelatihan, pembinaan berkelanjutan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dan stakeholder terkait, diharapkan pemuda mampu berkontribusi aktif dan berprestasi dalam berbagai bidang pembangunan.	2027
		Pemantapan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga	Arah kebijakan ini menekankan pemantapan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan melalui pembinaan dan pengembangan kompetensi di bidang keolahragaan dan non-keolahragaan. Optimalisasi fasilitas olahraga dilakukan untuk mendukung peningkatan prestasi pemuda secara berkelanjutan. Kegiatan utama meliputi pelatihan, pembinaan atlet muda, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas olahraga, serta penguatan peran organisasi kepemudaan dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mendorong partisipasi aktif dan prestasi pemuda.	2028

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Perwujudan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga	Perwujudan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non-keolahragaan dilakukan melalui pelaksanaan pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan, pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan pendampingan, serta optimalisasi fasilitas olahraga yang representatif dan mudah diakses. Selain itu, penyelenggaraan kompetisi dan kegiatan pengembangan bakat secara rutin, pemberdayaan organisasi kepemudaan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi bagian integral untuk mendukung kontribusi aktif dan pencapaian prestasi pemuda secara optimal dalam berbagai bidang.	2029
		Peneguhan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga	Peneguhan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non-keolahragaan diwujudkan melalui penguatan pembinaan yang sistematis, pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas olahraga yang memadai. Selain itu, peneguhan juga dilakukan dengan memperkuat peran organisasi kepemudaan, meningkatkan partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan mendorong kolaborasi lintas sektor guna mendukung pencapaian prestasi yang berkelanjutan.	2030
2	S4, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Penguatan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan	Penguatan pengelolaan pariwisata daerah dengan mengembangkan ekonomi kreatif dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan membentuk forum kemitraan, mengadakan pelatihan ekonomi kreatif, mempromosikan produk budaya lokal, membangun fasilitas ramah lingkungan, serta menyusun kebijakan pendukung pariwisata berkelanjutan.	2026
		Peningkatan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan	Peningkatan skema pengelolaan pariwisata daerah dengan pengembangan ekonomi kreatif diwujudkan melalui penguatan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, meliputi pembentukan forum koordinasi, pelatihan kreatif bagi pelaku lokal, pengembangan produk budaya, pembangunan fasilitas ramah lingkungan, dan penyusunan kebijakan pendukung pariwisata berkelanjutan.	2027
		Pemantapan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat	Pemantapan skema pengelolaan pariwisata daerah dengan pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui penguatan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang mencakup pembentukan forum koordinasi, pelatihan ekonomi kreatif, pengembangan produk lokal,	2028

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		menuju pariwisata berkelanjutan	pembangunan fasilitas ramah lingkungan, serta penyusunan kebijakan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan.	
		Perwujudan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan	Perwujudan skema pengelolaan pariwisata daerah yang mengintegrasikan pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui peningkatan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan langkah-langkah seperti pembentukan forum koordinasi, pelatihan kreatif bagi pelaku lokal, pengembangan produk budaya, pembangunan fasilitas ramah lingkungan, serta penyusunan kebijakan pendukung pariwisata berkelanjutan.	2029
		Peneguhan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan	Peneguhan skema pengelolaan pariwisata daerah yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui penguatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan kegiatan seperti pembentukan forum koordinasi, pelatihan ekonomi kreatif, pengembangan produk lokal, pembangunan fasilitas ramah lingkungan, dan penyusunan kebijakan pendukung pariwisata berkelanjutan.	2030
3.	S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui kegiatan Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2026
		Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui kegiatan Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2027
		Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui kegiatan Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum	2028

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui kegiatan Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2029
		Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui kegiatan Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2030

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel 4.1.
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas manusia	Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga. peranan pariwisata dalam perekonomian daerah. serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan		
					Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Meningkatnya daya saing pemuda dan olahraga			Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan		Persentase Pemuda Berprestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pemuda	Persentase Pembinaan Kelompok Pemuda yang dilaksanakan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/k	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
				Terlaksananya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Presentase Pelaksanaan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga		Persentase Organisasi Keolahragaan yang Aktif	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Terlaksananya pembinaan olahraga pada satuan pendidikan	Persentase pembinaan olahraga pada satuan pendidikan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	
				Terlaksananya penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten	Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
						Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				Terlaksananya Atlet yang dibina	Jumlah Atlet yang di bina	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang Berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
				Terbinanya organisasi olahraga	Persentase Pembinaan Organisasai Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
						Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
				Terbinanya Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
						Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
			Meningkatnya kapasitas kepramukaan		Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
				Terlaksananya organisasi kepramukaan yang aktif	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
						Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
		Meningkatnya peranan pariwisata dalam perekonomian daerah			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum		
			Meningkatnya kunjungan wisatawan		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
					Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara		
				Terlaksananya kegiatan Pembinaan Pengelola Daya Tarik Wisata	Jumlag DTW yang Dikelola dan Dibina	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
						Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pengelolan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Fasilitasi dan Rekomendasi Perizinan Usaha Pariwisata	Jumlah fasilitsi dan Rekomendasi Perizinan Usaha Pariwisata	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
						Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas layanan pemasaran pariwisata		Persentase Layanan Pemasaran Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				Terlaksananya Kegiatan Promosi Pariwisata	Jumlah Kegiatan Promosi Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
			Meningkatnya fasilitasi sub sektor ekonomi kreatif		Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pengembangan ekosistem ekraf melalui pembentukan Komite Ekonomi Kreatif, Fasilitasi HAKI dan pelatihan	Jumlah pengembangan ekosistem ekraf melalui pembentukan Komite Ekonomi Kreatif, Fasilitasi HAKI dan Pelatihan	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
						Pengembangan Sistem Pemasaran	
						Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompeten		Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kapasitasnya	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
				Terlaksananya Pelatihan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilatih	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilatih	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
						Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
						Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
						Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah		
				Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Dalam merencanakan alokasi pendanaan pembangunan, penting untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memastikan bahwa alokasi tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan berfokus pada *money follow program* dan *money follow function*, dimana anggaran difokuskan pada program atau kegiatan yang langsung terkait dengan prioritas pembangunan daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan sesuai dengan tugas dan fungsi utama perangkat daerah.

Rencana program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata selama 5 tahun, dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga, peranan pariwisata dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	63,91	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Angka	9,02	9,22		9,33		9,4		9,5		9,55		9,55			
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,3	2,86		3,15		3,43		3,71		3,99		3,99			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	63,91	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
2.19.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						5.813.168.427		5.871.300.000		5.536.399.000		5.536.399.000		5.536.399.000				
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	5.813.168.427	100	5.871.300.000	100	5.536.399.000	100	5.536.399.000	100	5.536.399.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	7	23	42.731.900	24	47.500.000	24	50.500.000	25	50.500.000	24	50.500.000	120			
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	15	22	39.608.800	22	43.000.000	22	45.500.000	23	45.500.000	22	45.500.000	111			
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	laporan	6	22	3.123.100	22	3.500.000	22	4.000.000	22	4.000.000	22	4.000.000	110			
2.19.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	laporan	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4			
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	45	45	5.303.473.827	45	5.327.784.000	45	4.974.209.500	45	4.974.209.500	45	4.974.209.500	225			
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	43	49	5.302.706.927	49	5.326.934.000	49	4.973.209.500	49	4.973.209.500	49	4.973.209.500	49			
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	44	44	766.900	44	850.000	44	1.000.000	44	1.000.000	44	1.000.000	220			
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	laporan	11	11	2.228.400	11	2.450.000	11	2.695.000	11	2.695.000	11	2.695.000	55			
2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2	11	2.228.400	11	2.450.000	11	2.695.000	11	2.695.000	11	2.695.000	55			
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen	7	7	134.706.100	7	140.346.000	7	152.103.000	7	152.103.000	7	152.103.000	35			
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	6	4.368.800	6	4.800.000	6	5.280.000	6	5.280.000	6	5.280.000	30			
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	12	3.412.800	12	3.754.000	12	4.129.000	12	4.129.000	12	4.129.000	60			
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	40.573.800	1	41.000.000	1	42.600.000	1	42.600.000	1	42.600.000	5			
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	4	6.855.000	4	7.540.000	4	8.294.000	4	8.294.000	4	8.294.000	20			
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	2	3.252.000	2	3.252.000	2	3.800.000	2	3.800.000	2	3.800.000	10			
2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	1	28	17.975.700	28	18.000.000	28	19.800.000	28	19.800.000	28	19.800.000	140			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	58.268.000	12	62.000.000	12	68.200.000	12	68.200.000	12	68.200.000	60			
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	unit	0	0		3	15.000.000	0		0		0		3			
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	3	15.000.000	0	0	0	0	0	0	3			
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12	24	124.824.200	24	127.900.000	24	132.400.000	24	132.400.000	24	132.400.000	120			
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	73.152.200	12	76.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	60			
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	51.672.000	12	51.900.000	12	52.400.000	12	52.400.000	12	52.400.000	60			
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	4	4	205.204.000	4	210.320.000	4	224.491.500	4	224.491.500	4	224.491.500	20			
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	16	82.730.000	16	83.000.000	16	91.103.000	16	91.103.000	16	91.103.000	16			
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	14	14	18.010.000	14	18.200.000	14	18.910.500	14	18.910.500	14	18.910.500	14			
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	93.120.000	1	97.776.000	1	102.000.000	1	102.000.000	1	102.000.000	1			
2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	11.344.000	2	11.344.000	2	12.478.000	2	12.478.000	2	12.478.000	2			
2	Meningkatnya daya saing pemuda dan olahraga		Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Angka	9,02	9,22		9,33		9,4		9,5		9,55		9,55			
2.19.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						10.809.302.800		9.614.941.000		9.609.303.000		9.621.000.000		12.632.882.000				
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Presentase Pemuda Berprestasi	%	7,395	7,4	378.441.300	7,403	380.401.000	7,406	378.441.000	7,409	384.421.000	7,411	390.495.000	7,411	Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan	Kabupaten Purworejo	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pemuda	Persentase Pembinaan Kelompok Pemuda yang dilaksanakan	%	100	100	146.299.500	100	147.379.383	100	146.299.500	100	147.764.348	100	149.815.185	100			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	dokumen	1	1	18.772.800	1	18.960.549	1	18.772.800	1	18.962.381	1	19.292.394	5			
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	50	50	32.747.000	50	33.074.470	50	32.747.000	50	33.074.470	50	33.598.700	250			
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kegiatan	1	1	18.153.000	1	18.334.530	1	18.153.000	1	18.334.530	1	18.563.712	5			
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	4	20	76.626.700	20	77.009.834	20	76.626.700	20	77.392.967	20	78.360.379	100			
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	%	100	100	232.141.800	100	233.021.617	100	232.141.500	100	236.656.652	100	240.679.815	100			
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang	1	1	232.141.800	1	233.021.617	1	232.141.500	1	236.656.652	1	240.679.815	1			
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase organisasi keolahragaan yang aktif	%	100	100	10.069.020.500	100	8.869.021.000	100	8.869.021.000	100	8.869.021.000	100	11.869.021.000	100	Bidang Olahraga	Kabupaten Purworejo	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan olahraga pada satuan pendidikan	Persentase pembinaan olahraga pada satuan pendidikan	%	100	100	6.258.418.100	100	6.258.418.600	100	6.258.418.600	100	6.258.418.600	100	6.258.418.600	100			
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	2	2	4.535.859.000	2	4.535.859.000	2	4.535.859.000	2	4.535.859.000	2	4.535.859.000	2			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	dokumen	23	23	1.722.559.100	23	1.722.559.600	23	1.722.559.600	23	1.722.559.600	23	1.722.559.600	115			
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten	Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten	%	100	100	463.730.200	100	463.730.200	100	463.730.200	100	463.730.200	100	463.730.200	100			
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	22	1	318.105.800	1	318.105.800	1	318.105.800	1	318.105.800	1	318.105.800	5			
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Orang	40	40	145.624.400	40	145.624.400	40	145.624.400	40	145.624.400	40	145.624.400	200			
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Atlet yang dibina	Jumlah Atlet yang Dibina	orang	3.196	3.196	99.603.000	3.196	99.603.000	3.196	99.603.000	3.196	99.603.000	3.196	99.603.000	15.980			
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang Berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan Olahraga	orang	29	20	99.603.000	20	99.603.000	20	99.603.000	20	99.603.000	20	99.603.000	100			
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terbinanya organisasi olahraga	Persentase Pembinaan Organisasi Olahraga	%	100	100	3.200.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	5.000.000.000	100			
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	3.200.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	5.000.000.000	5			
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terbinanya Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan Olahraga Rekreasi	%	100	100	47.269.200	100	47.269.200	100	47.269.200	100	47.269.200	100	47.269.200	100			
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	2	1	47.269.200	1	47.269.200	1	47.269.200	1	47.269.200	1	47.269.200	1			
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kapasitas kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	%	100	100	361.841.000	100	365.519.000	100	361.841.000	100	367.558.000	100	373.366.000	100	Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan	Kabupaten Purworejo	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya organisasi kepramukaan yang aktif	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	%	100	100	361.841.000	100	365.519.000	100	361.841.000	100	367.558.000	100	373.366.000	100			
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	1	1	361.841.000	1	365.519.000	1	361.841.000	1	367.558.000	1	373.366.000	1			
3	Meningkatnya peranan pariwisata dalam perekonomian daerah		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,3	2,86		3,15		3,43		3,71		3,99		3,99			
3.26.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						5.935.993.179		6.051.243.000		5.928.734.000		6.027.623.000		6.122.860.000				
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	orang	790.969	822.607	4.787.475.679	870.066	4.814.292.000	949.163	4.787.476.000	1.028.260	4.863.118.000	1.107.357	4.939.955.000	1.107.357	Bidang Destinasi Pariwisata	Kabupaten Purworejo	
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	148	277		289		300		312		324		324	Bidang Destinasi Pariwisata	Kabupaten Purworejo	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Pengelola Daya Tarik Wisata	Jumlah DTW yang Dikelola dan Dibina	DTW	41	41	11.099.400	41	12.209.340	41	11.099.400	41	11.321.388	41	11.434.602	41			
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan	39	39	11.099.400	39	12.209.340	39	11.099.400	39	11.321.388	39	11.434.602	195			
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	%	100	100	2.900.467.279	100	2.716.794.115	100	2.700.467.279	100	2.931.923.606	100	2.975.385.684	100			
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	5	4	2.900.467.279	4	2.716.794.115	4	2.700.467.279	4	2.931.923.606	4	2.975.385.684	4			
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata	%	100	100	1.853.721.300	100	2.062.989.906	100	2.053.721.300	100	1.893.247.381	100	1.923.846.526	100			
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	5	5	1.853.721.300	5	1.862.989.906	5	1.853.721.300	5	1.893.247.381	5	1.923.846.526	5			
3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	Dokumen	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	0	0	0	0	1			
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Rekomendasi Perizinan Usaha Pariwisata	Jumlah Fasilitasi dan Rekomendasi Perizinan Usaha Pariwisata	Rekomendasi	1	1	22.187.700	1	22.298.639	1	22.188.021	1	26.625.625	1	29.288.188	5			
3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Terlaksananya komitmen melaksanakan standar usaha	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Laporan	12	12	22.187.700	12	22.298.639	12	22.188.021	12	26.625.625	12	29.288.188	60			
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya kualitas layanan pemasaran pariwisata	Persentase Layanan Pemasaran Pariwisata	%	19	28	996.762.100	33	1.093.007.000	38	996.762.000	43	1.012.511.000	48	1.028.509.000	48	Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Purworejo	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Pariwisata	Jumlah Kegiatan Promosi Pariwisata	Kegiatan	7	7	996.762.100	7	1.093.007.000	7	996.762.000	7	1.012.511.000	7	1.028.509.000	35			
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	2	35.136.200	2	37.947.096	2	35.136.200	2	35.136.200	2	36.893.010	10			
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	4	4	684.646.500	4	750.382.564	4	684.646.400	4	692.086.018	4	699.589.844	20			
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	3	3	276.979.400	3	304.677.340	3	276.979.400	3	285.288.782	3	292.026.146	15			
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya fasilitasi sub sektor ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	7,14	14,29	15.125.000	21,43	16.585.000	28,57	15.125.000	35,71	15.364.000	42,86	15.607.000	42,86	Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Purworejo	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pengembangan ekosistem ekraf melalui pembentukan Komite Ekonomi Kreatif, Fasilitasi HAKI dan pelatihan	Jumlah pengembangan ekosistem ekraf melalui pembentukan Komite Ekonomi Kreatif, Fasilitasi HAKI dan pelatihan	Laporan	1	1	15.125.000	1	16.585.000	1	15.125.000	1	15.364.000	1	15.607.000	5			
3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	2	2	15.125.000	2	6.585.000	2	5.125.000	2	5.364.000	2	5.607.000	10			
3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4			
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompeten	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekraf yang Meningkat Kapasitasnya	%	60	69	136.630.400	71	127.359.000	73	129.371.000	75	136.630.000	77	138.789.000	77	Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Purworejo	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Pelatihan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kretif yang dilatih	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilatih	Orang	350	190	136.630.400	190	127.359.000	190	129.371.000	190	136.630.000	190	138.789.000	950			
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	100	100	63.612.400	100	64.500.000	100	65.000.000	100	63.612.000	100	64.612.000	500			
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	240	80	39.131.000	80	40.000.000	80	40.500.000	80	39.131.000	80	39.290.000	400			
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	10	10	33.887.000	10	22.859.000	10	23.871.000	10	33.887.000	10	34.887.000	50			
Jumlah							**22.558.484.406**		**21.537.484.000**		**21.074.436.000**		**21.185.022.000**		**24.292.141.000**				

Tabel 4.3.

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	penyelenggaraan walidata guna mendukung data statistik sektoral daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan laporan keuangan pada bulanan/triwulanan/ semesteran	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembuatan pelaporan penatausahaan barang milik daerah	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor,	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor: minum harian pegawai	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan cetak banner atau spanduk dan fotokopi dokumen.	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	Penyedian bahan material, seperti: ATK, benda pos.	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD: rapat koordinasi (internal & eksternal), konsultasi dalam dan luar daerah	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan/ mesin lainnya yang diadakan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik: pembayaran rekening telepon, internet, air, listrik, jasa tambah daya/ pemeliharaan jaringan listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor: jasa tenaga	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
				kebersihan, dan jasa teknis lainnya.	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pada tahun tertentu	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan/ mesin lainnya yang dipelihara	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi: gedung kantor, rumah dinas pada tahun tertentu	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan			
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan lintas program terkait kepemudaan untuk penyelarasan data pada dokumen Rencana Aksi Daerah dan penyusunan dokuemen pembaruan Rencana Aksi Daerah	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	penumbuhan minat pemuda dalam berwirausaha dengan penyelenggaraan seminar pada wirausaha muda.	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	pengembangan kepemimpinan pemuda dalam rangka penumbuhan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan pemuda yang diselenggarakan dengan pelatihan kesukarelawanan di bidang pendidikan, kepedulian lingkungan, dan kesehatan	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	pemilihan pemuda pelopor dan seleksi jambore pemuda pada tingkat Kabupaten Purworejo.	
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan organisasi kepemudaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga			
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Penyediaan dan pemeliharaan sarana olahraga, pemeliharaan dan pengembangan fasilutas olahraga serta fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga kepada masyarakat	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	penyelenggaraan Popda tingkat Kabupaten, Popda tingkat Kedu dan Popda tingkat Provinsi	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	penyelenggaraan pekan olahraga kabupaten	
			Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	pengiriman atlet dalam berbagai event kejuaraan	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		
			Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang Berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	pemberian penghargaan kepada atlet yang berpestasi di Kabupaten Purworejo	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Pembinaan dan fasilitasi organisasi olahraga	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
			Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	kegiatan yang dilaksanakan untuk masyarakat umum berupa senam dan pengiriman pada kegiatan Festival Olahraga Rekreasi Daerah (Forda) dan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas).	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kapasitas kepramukaan			
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Pembinaan dan fasilitasi organisasi kepramukaan	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya PAD Pariwisata yang bersumber dari destinasi wisata yang dikelola oleh Pemda			
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	melakukan monitoring desa wisata yang berada di daerah wilayah Kabupaten Purworejo.	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Aktivitas yang dilaksanakan dalam subkegiatan ini adalah Operasional dan Pemeliharaan Alun-Alun Purworejo dan Alun-alun Kutoarjo, Pengembangan hotel melalui mekanisme kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga.	
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Operasional ODTW berupa pemeliharaan dan operasional destinasi wisata yang dikelola pemerintah seperti Pantai Jatimalang, Kolam Renang Artha Tirta, Goa Seplawan, Geger Menjangan, Ganesha Convention Hall.	
			Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen RIPPDA	
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		
			Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai standar yang berlaku dan pendampingan teknis agar pelaku usaha dapat menerapkan standar secara tepat.	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya kualitas layanan pemasaran pariwisata			
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	promosi dengan melibatkan pegiat media sosial, influencer, komunitas dan pembuatan Calender of Event.	
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	penyelenggaran event promosi wisata dan event promosi lainnya.	
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	pembuatan materi promosi, publikasi, dan pameran wisata. Materi promosi berupa pembuatan pamflet, media sosial, souvenir, dan pemeliharaan baliho	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya fasilitasi sub sektor ekonomi kreatif			
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
			Pengembangan Sistem Pemasaran	Pengembangan system pemasaran melalui penguatan kekayaan intelektual, monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	
			Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Fasilitasi kekayaan intelektual ekonomi kreatif	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompeten			
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pembinaan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	
			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Fasilitasi dan Kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata	
			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi SDM Pariwisata.	

4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah

a. Dukungan terhadap Nasional

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pembangunan nasional di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mendukung asta cita dan program nasional.

Dukungan terhadap Asta Cita

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pendampingan dan sertifikasi kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif	Pariwisata	Dinporapar
2	Asta Cita 4: Memperperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pelaksanaan POPDA Kabupaten dan fasilitasi pengiriman atlet POPDA	Pora	Dinporapar
		Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten	Pora	Dinporapar
		Pendampingan, monitoring, dan evaluasi KONI	Pora	Dinporapar
		Fasilitasi Pekan Paralimpik Pelajar Daerah bagi disabilitas	Pora	Dinporapar
		Pelaksanaan pemassalan olahraga rekreasi	Pora	Dinporapar
		Fasilitasi partisipasi kejuaraan olahraga	Pora	Dinporapar
		Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Pora	Dinporapar
		Pendampingan wirausaha pemula	Pora	Dinporapar

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo mendukung terhadap nasional yang tertuang dalam astacita khususnya cita ke-3 “Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur” dan cita ke-4 “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, dengan didukung melalui berbagai

program dan kegiatan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berupaya menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong tumbuhnya wirausaha muda dan industri kreatif, serta membangun infrastruktur pendukung sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Selain itu, penguatan sumber daya manusia juga menjadi prioritas, dengan fokus pada peningkatan prestasi olahraga, pemberdayaan pemuda, pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, serta peningkatan kapasitas pelaku pariwisata lokal.

b. Dukungan terhadap Provinsi

Dukungan Dinporapar terhadap Provinsi

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga kepada masyarakat	Pora	Dinporapar
2	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Pendampingan dan monitoring desa wisata	Pariwisata	Dinporapar
3	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Pengelolaan destinasi wisata yang ramah muslim	Pariwisata	Dinporapar
4	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pelatihan pemasaran digital dan pembuatan konten promosi desa wisata	Pariwisata	Dinporapar
5	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Pelaksanaan POPDA Kabupaten dan fasilitasi pengiriman atlet POPDA	Pora	Dinporapar
		Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten	Pora	Dinporapar
		Pendampingan, monitoring, dan evaluasi KONI	Pora	Dinporapar
		Fasilitasi Pekan Paralimpik Pelajar Daerah bagi disabilitas	Pora	Dinporapar
		Pelaksanaan pemassalan olahraga rekreasi	Pora	Dinporapar
		Fasilitasi partisipasi kejuaraan olahraga	Pora	Dinporapar
		Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Pora	Dinporapar

Dari tabel diatas dapat di jabarkan sebagai berikut:

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata berkomitmen penuh dalam mendukung berbagai program strategis Pemerintah Provinsi yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah keterlibatan aktif dalam *Pembentukan Kecamatan Berdaya*, yang menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan fasilitas olahraga berbasis gaya hidup sehat dan inovatif. Melalui sinergi lintas sektor, program ini difasilitasi melalui pelatihan, penguatan kapasitas, dan penyediaan ruang-ruang ekspresi yang produktif.

Selaras dengan visi tersebut, Dinas juga turut mendukung program pembangunan *1.000 desa/kampung wisata baru* dengan fokus pada pelatihan, pendampingan, serta promosi wisata. Tujuannya adalah membekali masyarakat desa untuk mengelola potensi wisata secara mandiri dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat infrastruktur dan akses digital sebagai bagian dari transformasi ekonomi lokal.

Di sisi lain, Dinas juga berperan dalam *melahirkan ekosistem ekonomi syariah* melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan standar layanan halal, penyediaan fasilitas ibadah, serta informasi yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim, sebagai langkah membangun sektor pariwisata yang inklusif dan kompetitif.

Untuk mendukung promosi digital, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata juga menggagas *pelatihan 1.000 konten kreator desa wisata*, dengan memberikan keterampilan teknis seperti fotografi, videografi, penulisan narasi promosi, hingga optimalisasi media sosial. Inisiatif ini diharapkan mampu memperkuat storytelling destinasi serta membuka peluang ekonomi kreatif di tingkat desa.

Terakhir, dalam bidang olahraga, perhatian juga difokuskan pada *peningkatan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga* sebagai bagian dari pembangunan SDM unggul. Kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan terus dikembangkan untuk mendukung pembinaan berkelanjutan serta membuka jalan bagi kesejahteraan jangka panjang di sektor ini.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata terus berperan aktif dalam mewujudkan Provinsi sebagai daerah yang maju, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

c. Dukungan terhadap Kegiatan Unggulan

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan unggulan sebagai bagian dari komitmen dalam mendorong pengembangan potensi kepemudaan, peningkatan prestasi olahraga, serta penguatan sektor pariwisata daerah. Hal ini sesuai dengan tabel yang disajikan berikut:

Dukungan terhadap Kegiatan Unggulan

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Pinter Bocahe				
		Fasilitasi teknologi informasi yang mendukung pendidikan dan pembelajaran yang inovatif	Pelatihan kepemimpinan bagi pemuda	Pora	Dinporapar
3	Sehat Penduduke	Pembangunan dan optimalisasi fasilitas olah raga bagi pemuda dan masyarakat	Fasilitasi dan penyediaan sarana prasarana olahraga	Pora	Dinporapar
6	Rame Pasare	Menyelenggarakan berbagai festival berbasis agroindustri, religi, dan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata.	Penyelenggaraan event promosi wisata	Pariwisata	Dinporapar
		Pengembangan pariwisata kreatif	Pendampingan dan sertifikasi kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif	Pariwisata	Dinporapar
		Peningkatan citra dan positioning kepariwisataan Purworejo.	Pemasaran dan promosi pariwisata	Pariwisata	Dinporapar
			Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata	Pariwisata	Dinporapar
			Penguatan kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan wisata	Pariwisata	Dinporapar
		Memperkuat kolaborasi pengembangan pariwisata kreatif	Pendampingan dan sertifikasi kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif	Pariwisata	Dinporapar
		Membuka peluang baru dalam sektor ekonomi kreatif, pariwisata budaya, dan kerja sama komunitas	Penguatan kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan wisata	Pariwisata	Dinporapar
		Inovasi teknologi tepat guna bagi pelaku ekonomi kreatif	Pendampingan dan sertifikasi kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif	Pariwisata	Dinporapar

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Purworejo berkomitmen mendukung berbagai kegiatan unggulan daerah di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Dalam penguatan kapasitas pemuda, Dinporapar menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan sebagai bagian dari fasilitasi pendidikan

berbasis teknologi informasi. Di sektor olahraga, dukungan diberikan melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi pemuda dan masyarakat.

Di bidang pariwisata, Dinporapar berperan dalam penyelenggaraan festival berbasis agroindustri, religi, dan budaya untuk menarik wisatawan, serta mendorong pengembangan pariwisata kreatif melalui pendampingan dan sertifikasi kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.

Guna meningkatkan citra pariwisata daerah, Dinporapar melakukan promosi wisata, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan kolaborasi antar-stakeholder. Selain itu, Dinporapar juga mendorong inovasi teknologi tepat guna dan membuka peluang baru melalui sinergi antara sektor ekonomi kreatif, budaya, dan komunitas.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Dinporapar terus mendorong pertumbuhan sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penentuan indikator dan target kinerja merupakan langkah strategis dalam penyelenggaraan bidang urusan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif dan terukur. Indikator kinerja disusun sebagai alat ukur yang jelas dan relevan untuk menilai pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, target kinerja ditentukan sebagai capaian yang ingin diraih dalam jangka waktu tertentu, sehingga memudahkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan penetapan indikator dan target yang tepat, pengelolaan bidang urusan dapat lebih terarah, transparan, dan akuntabel demi peningkatan kualitas pelayanan public.

Penentuan target keberhasilan pencapain tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kepemudaan didukung melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan dalam tabel 4.5 dan 4.6 berikut:

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olaharaga dan Pariwisata

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Angka	9,11	9,22	9,33	9,40	9,50	9,55	Tujuan PD
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,58	2,86	3,15	3,43	3,71	3,99	Tujuan PD
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Tujuan PD
4	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Angka	9,11	9,22	9,33	9,40	9,50	9,55	Sasaran PD
5	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,58	2,86	3,15	3,43	3,71	3,99	Sasaran PD
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,62	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Sasaran PD

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan, Olaharaga dan Pariwisata

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,58	2,86	3,15	3,43	3,71	3,99	Destinasi Dinporapar	IUP
2	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	265	277	289	300	312	324	Destinasi Dinporapar	IUP
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	Kepemudaan Dinporapar	IKK
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	Kepemudaan Dinporapar	IKK
5	Peningkatan prestasi olahraga	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Keolahragaan Dinporapar	IKK
6	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	46,54	46,55	46,56	46,57	46,58	46,59	Destinasi Dinporapar	IKK

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	24,17	24,18	24,19	24,20	24,21	24,22	Destinasi Dinporapar	IKK
8	Tingkat hunian akomodasi	%	21,49	21,50	21,51	21,52	21,53	21,54	Destinasi Dinporapar	IKK
9	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,31	2,32	2,33	2,34	2,35	2,36	Destinasi Dinporapar	IKK
10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,34	2,35	2,36	2,37	2,38	2,39	Destinasi Dinporapar	IKK

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata setiap tahun.
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c. Kepala Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
d. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 dan merupakan penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 sejalan dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terbaru.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 dimulai dari pembentukan Tim Penyusun dan Pelaksana Forum Perangkat Daerah, Penyusunan Pohon Masalah dan Pohon Kinerja, Penyusunan Cascading, Identifikasi Risiko Strategis, Penyusunan Rancangan Awal Renstra, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017, sebagaimana dalam gambar berikut ini:

Gambar 1.1

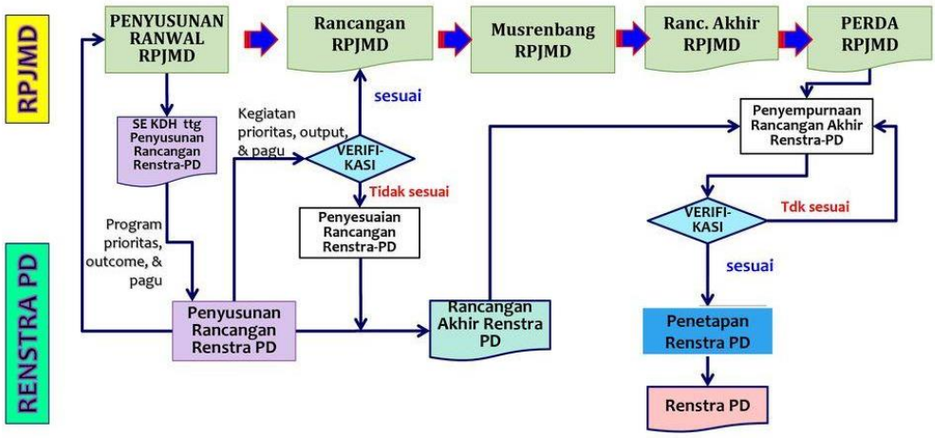

Dalam rangka penyusunan Renstra PD telah dilakukan tahapan-tahapan penyusunan renstra sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra
   Persiapan Penyusunan Renstra meliputi:
   a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah.
   b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah.
   c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
   d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra
   Rancangan awal renstra disusun setelah diterimanya surat Sekretaris Daerah perihal Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Nomor 000.7.2/2202/2025 tanggal 21 Februari 2025. Rancangan awal Renstra memuat perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD. Dalam penyusunan rancangan awal Renstra dilaksanakan:
   a. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah guna mencapai tujuan dan sasaran dan target kinerja perangkat daerah.
   b. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. Penyusunan Rancangan Renstra
   Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara Forum Perangkat Daerah.
4. Forum Penyusunan Renstra PD Forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan renstra Perangkat daerah adalah forum para pemangku kepentingan pelayanan perangkat daerah untuk membahas rancangan renstra perangkat daerah dibawah koordinasi Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan

masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah. Kesepakatan yang dihasilkan oleh Forum tersebut menjadi acuan perangkat daerah dalam penyempurnaan materi rancangan Renstra PD.

5. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD
   Rancangan Akhir Renstra PD merupakan merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penyempurnaan rancangan renstra PD bertujuan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah
   Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapperida untuk diverifikasi guna menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapperida untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Bapperida menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

a. Merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah.

b. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga sasaran, tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai.
c. Dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra PD adalah:
a. Menjabarkan rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dalam jangka waktu 5 tahun;
b. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
c. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 5 BAB, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah
- 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo disajikan melalui data dan informasi yang mencerminkan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Penyajian gambaran pelayanan ini dilengkapi dengan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, serta data pendukung lain yang relevan dengan kebutuhan perencanaan.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran umum atas capaian, serta analisis diagnostik guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun kendala dalam penyelenggaraan urusan. Fokus utama penyajian evaluasi kinerja diarahkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merepresentasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, data dan informasi yang disajikan baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun gambar akan dipaparkan secara naratif dengan menekankan pada makna dan kesimpulan dari data tersebut, bukan sekadar menjelaskan angka-angka yang tersaji.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 131 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan
2. pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan
4. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINPUSIP; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi :

a. Sekretariat
b. Bidang Perpustakaan
c. Bidang Kearsipan
d. Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok Sekretariat, Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1) pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;

2) pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
3) pengoordinasian pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
4) pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi yang meliputi umum dan kepegawaian; dan
5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPUSIP berkaitan dengan tugas dan fungsi.

b. Bidang Perpustakaan
1) Bidang Perpustakaan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINPUSIP.
2) Bidang Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Bidang Perpustakaan.

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perpustakaan dan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno.
Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
a) Pengelolaan perpustakaan;
b) Pembudayaan dan pengembangan gemar membaca;
c) Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;
d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPUSIP berkaitan dengan tugas dan fungsi;
   – mengelola dan mengembangkan bahan pustaka;
   – menyusun data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten;

Kepala Bidang Perpustakaan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
a) Pejabat Fungsional; dan
b) Pelaksana

c. Bidang Kearsipan
1) Bidang Kearsipan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPUSIP.
2) Bidang Kearsipan dipimpin oleh Kepala Bidang Kearsipan.

Bidang Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
a) Pengelolaan arsip dinamis;
b) Pengelolaan arsip statis;
c) Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan;
d) Pemusnahan arsip yang memiliki rentensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
e) Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana;
f) Penyelamatan arsip Perang Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran kecamatan dan desa atau kelurahan;
g) Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media;
h) Pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang;
i) Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup; dan;
j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPUSIP berkaitan dengan tugas dan fungsi.

d. Jabatan Fungsional
1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DINPUSIP.
2) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional.
3) Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan

berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Sedangkan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo sesuai Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:

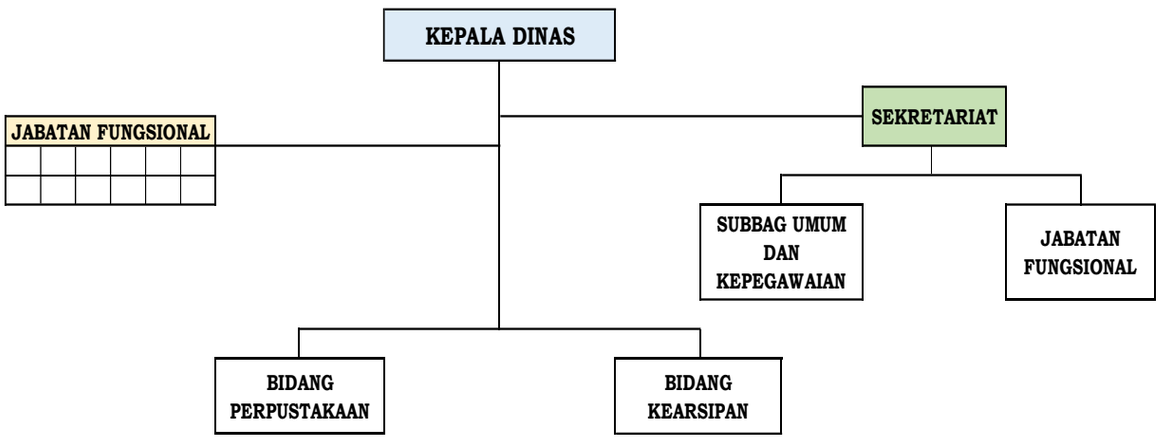

Gambar 2.1 BAGAN ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PURWOREJO
Sumber : Peraturan Bupati No. 131 Tahun 2022

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo didukung oleh sumber daya yang meliputi sumber daya manuasi, sumber daya keuangan serta sarana dan prasarana pendukung.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan asset utama dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di perpustakaan dan kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo memiliki aparatur yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta didukung oleh tenaga Non-ASN yang membantu pelaksanaan tugas teknis operasional.

SDM tersebut tersebar pada sekretariat dan bidang. Komposisi aparatur didominasi oleh jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan pelaksana. Dari sisi kualifikasi pendidikan, sebagian besar aparatur telah berpendidikan sarjana (S1), diikuti dengan tingkat pendidikan pascasarjana (S2), diploma dan sekolah menengah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didukung dengan komposisi pegawai dengan jumlah orang yang terdiri dari 36 orang ASN dan 2 orang tenaga harian lepas. Untuk 36 orang ASN terbagi menjadi 26 PNS dan 10 orang PPPK.

Klasifikasi pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo bulan September 2025 sebagai berikut:

Data pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

TP / Status	S2	S1	D III	D II	SLTA	SLTP	SD	Jml
PNS	6	7	7	-	6	-	-	26
P3K	-	2	-	-	8	-	-	10
THL	-	1	-	-	1	-	-	2

Sumber : Data Nominatif Dinpusip

Dari komposisi tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar ASN memiliki pendidikan menengah atas (SLTA), sementara yang berpendidikan tinggi (S1 dan S2) jumlahnya cukup signifikan untuk menopang kebutuhan teknis dan manajerial. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas dan kompetensi aparatur dalam menjawab tantangan pelayanan di masa depan.

Data pegawai berdasarkan Tingkat Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	-	Jml
PNS	-	8	11	7		26
P3K					10	10

Sumber : Data Nominatif Dinpusip

Dari data tersebut terlihat bahwa komposisi ASN didominasi oleh golongan II dan III, dengan jumlah relatif kecil pada golongan IV. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas, pembinaan karier, serta peningkatan kompetensi ASN agar keberlanjutan pelayanan publik dapat berjalan optimal di masa mendatang.

Jumlah ASN sebanyak 28 orang terdiri :

- Pejabat Struktural : 4 orang
- Pejabat Fungsional
  - Arsiparis : 7 orang
  - Pustakawan
    - PNS : 3 orang
    - P3K : 2 orang
      - Pranata Komputer : 1 orang
      - Perencana : 1 orang
- Pejabat Non Struktural : 10 orang

2. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berasal dari beberapa sumber pendanaan, yaitu :

1) Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Purworejo, yang digunakan untuk mendukung pembiayaan operasional, program dan kegiatan bidang perpustakaan dan kearsipan;
2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, yang digunakan untuk pembangunan gedung perpustakaan dan penyediaan sarana dan prasarana layanan perpustakaan.

Alokasi anggaran dari kedua sumber dana tersebut setiap tahunnya disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat. Ketersediaan sumber daya keuangan tersebut telah memberikan dukungan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak kalah pentingnya, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta kenyamanan dalam bekerja. Sarana dan prasarana yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
	KIB A	
1.	Tanah Bangunan Kantor	2 Lokasi
	KIB B	
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	
	• Kendaraan Jabatan	1 unit
	• Kendaraan Operasional	3 unit
	• Kendaraan Perpusling	3 unit
2.	Kendaraan Roda 3	2 unit
3.	Sepeda Motor	8 unit
4.	Portable Generating Set	1 unit
5.	Lemari Besi/Metal	44 unit
6.	Lemari Kayu	11 unit
7.	Rak Besi	98 unit
8.	Rak Kayu	32 unit
9.	Filling Cabinet	14 unit
10.	Kardex Besi	2 unit
11.	Lemari Kaca	2 unit
12.	CCTV	17 unit
13.	Papan Visual	3 unit
14.	Peta	1 unit
15.	Alat Penghancur Kertas	3 unit
16.	Overhheat Projector	2 unit
17.	Display	5 unit
18.	LCD Projector	2 unit
19.	Papan Nama Instansi	1 unit
20.	Papan Pengumuman	4 unit
21.	Meja Kerja Besi/Metal	20 unit
22.	Meja Kerja Kayu	11 unit
23.	Kursi Besi/Metal	74 unit
24.	Kursi Kayu	1 unit
25.	Sice	3 unit
26.	Meja Rapat	1 unit
27.	Meja Recepsionis	3 unit
28.	Meja ½ Biro	82 unit
29.	Kursi Rapat	88 unit
30.	Kursi Putar	1 unit
31.	Kursi Biasa	79 unit
32.	Kursi Lipat	124 unit

No.	Uraian	Jumlah
33.	Meja Komputer	11 unit
34.	Sofa	2 set
35.	Mesin Potong Rumput	2 unit
36.	AC	50 unit
37.	Kipas Angin	5 unit
38.	Lift	1 unit
	KIB C	
1.	Bangunan Gedung Kantor	6 unit
	KIB D	
1.	Jalan Khusus Kompleks	1 lokasi
2.	Jaringan Transmisi Lain-lain	2 lokasi

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pelayanan perangkat daerah pada periode ini diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam bidang perpustakaan dan kearsipan.

Pengukuran kinerja pelayanan dilakukan dengan mengacu pada sasaran dan target yang tercantum dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo periode sebelumnya, serta memperhatikan indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK), dan indikator yang ditetapkan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib bidang sosial. Evaluasi capaian kinerja juga mempertimbangkan indikator sektoral lain yang relevan, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026 terdapat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
	Indikator Tujuan (renstra 2021-2026)																					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				83,64	82,3	82,7	84,7	85	85,3	83,64	83,97	84,03	84,75	85,03		102,03%	101,61%	100,06%	100,06%	100,04%	
2	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan				1,73%	5,00%	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	1,73%	5,72%	35,33%	40,73%	-81,42%		114,40%	176,65%	162,93%	162,93%	-325,67%	
3	Persentase Arsip yang Dikelola sesuai dengan Kaidah Kearsipan				15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	80,00%	100,00%	15,00%	33,46%	67,18%	72,48%	0,00%		111,53%	149,29%	120,80%	120,80%	0,00%	
	Indikator Sasaran (renstra 2021-2026)																					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				83,64	82,3	82,7	84,7	85	85,3	83,64	83,97	84,03	84,75	85,03		102,03%	101,61%	100,06%	100,06%	100,04%	
2	Persentase Jumlah Perpustakaan yang Terakreditasi				0	30,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	0	80%	85,71%	100%	0		266,67%	107,14%	125,00%	125,00%	0,00%	
3	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip				12,00%	12,00%	29,00%	34,00%	41,00%	51,00%	12,00%	40,00%	41,46%	37,50%	64,29%		333,33%	142,97%	110,29%	110,29%	156,79%	
	Indikator Program (renstra 2021-2026)																					
1	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	
2	Persentase Perpustakaan yang Layak				2,52%	3,69%	4,86%	6,03%	7,19%	8,36%	3%	3,78%	4,86%	6,03%	0%		102,44%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
3	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan				0	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	0	5,00%	10,00%	20,00%	0%		100,00%	100,00%	133,33%	133,33%	0,00%	
4	Persentase Arsip yang Dikelola				79,17%	83,33%	87,50%	91,67%	95,83%	100,00%	79,17%	83,66%	88,05%	88,74%	0,00%		100,40%	100,63%	96,80%	96,80%	0,00%	
5	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan				50,00%	57,50%	67,50%	77,50%	90,00%	100,00%	50,00%	60,70%	70,52%	85,60%	97,32%		105,57%	104,47%	110,45%	110,45%	108,13%	

Secara umum, capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo menunjukkan adanya kemajuan pada beberapa aspek, meskipun masih terdapat sejumlah indikator yang belum sepenuhnya mencapai target. Hal ini mencerminkan adanya keberhasilan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan.

Di bidang Perpustakaan, beberapa parameter bisa menjadi indikator, antara lain TGM (Tingkat Gemar Membaca), yakni ukuran perilaku masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi, yang diukur melalui frekuensi, durasi, dan jumlah buku yang dibaca. TGM Kabupaten Purworejo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana untuk tahun 2024 sebesar 70,24 (sedang). Berbagai kegiatan seperti perpustakaan keliling dan menetap, pembinaan perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah, safari perpustakaan di desa-desa merah, ternyata mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kegemaran membaca masyarakat.

Demikian pula IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat), sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai upaya pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan budaya literasi masyarakat. Indeks ini mengukur berbagai unsur seperti pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, jumlah tenaga perpustakaan, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan. Pada Tahun 2024, IPLM Kabupaten Purworejo sebesar 78,31 (sedang), atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 sebesar 56,98. Hal ini tak lepas dari upaya yang dilakukan, dengan mengoptimalkan perpustakaan dengan berbagai aktivitas komunitas yang inklusif, tidak hanya sebagai lembaga penyedia buku.

Jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum juga mengalami peningkatan dari 4.751 orang pada tahun 2021 menjadi 56.401 orang pada tahun 2024. Kondisi tersebut terjadi karena berbagai faktor, antara lain keberadaan gedung layanan Perpustakaan yang representatif, setelah dibangun mulai tahun 2021 dan diresmikan penggunaannya pada tahun 2024. Gedung yang megah dan nyaman, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kunjungan ke Perpustakaan umum dan meningkatnya minat baca masyarakat. Apalagi pada tahun 2022, pandemi Covid-19 berangsur-angsur membaik, sehingga masyarakat mulai bisa beraktivitas seperti biasa.

Demikian juga koleksi Perpustakaan Umum terus mengalami penambahan baik secara kuantitas maupun kualitas. Koleksi buku Perpustakaan yang pada tahun 2020 masih berjumlah 28.204 eksemplar, mengalami penambahan menjadi 31.169 eksemplar pada tahun 2024. Sedangkan e-book sebanyak 1.595 eksemplar.

Beberapa indikator kinerja bidang kearsipan menunjukkan capaian yang konsisten memenuhi bahkan melampaui target. Indikator capaian kinerja yang sesuai dengan target pada indikator Persentase Arsip yang Dikelola sesuai dengan Kaidah Kearsipan, Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip dan Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja layanan perangkat daerah di bidang kearsipan didukung oleh pemenuhan regulasi di bidang kearsipan, program-program kearsipan, kebijakan nasional dan kebijakan regional, sumber daya manusia yang berkompeten, sarana prasarana yang representatif pada sebagian perangkat daerah.

Capaian kinerja perangkat daerah di bidang kearsipan pada

periode 2021-2024, dapat diidentifikasi secara umum kinerja pelayanan menunjukkan pencapaian yang optimal, namun capaian kinerja program pada indikator persentase arsip yang dikelola tahun 2024 belum sesuai target kinerja sebesar 91,67% dengan realisasi sebesar 88,74% (2,93%).

Adapun untuk indikator persentase arsip yang dikelola tahun 2024 belum memenuhi target kinerja, hal ini karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menghambat belum terpenuhinya target dikarenakan jumlah arsiparis yang belum sesuai kebutuhan. Faktor eksternal yang menghambat adalah rendahnya komitmen pimpinan perangkat daerah, belum optimalnya fungsi kepala unit kearsipan pada perangkat daerah dan rendahnya kesadaran pemindahan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan penyerahan arsip statis perangkat daerah ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).

Capaian kinerja tersebut tentu tidak terlepas dari dukungan pendanaan yang dialokasikan kepada Dinpusip dalam periode 2020–2024. Untuk memberikan gambaran mengenai dukungan pendanaan berikut disajikan data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	56.696.000	67.600.000	64.400.000	70.000.000	73.600.000	36.768.000	50.266.668	41.243.868	41.896.500	21.433.900	19.433.600	-	88,66%	61,01%	65,06%	30,62%	26,40%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		49.422.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	68.000.000	33.760.000	45.874.668	37.579.068	38.805.900	19.964.200	17.963.900		92,82%	68,33%	64,68%	30,71%	26,42%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.266.400	2.500.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-		78,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.266.400	2.500.000	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-		47,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1.181.400	2.000.000	-	-	-	-	477.000	-	-	-	-		40,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1.181.400	2.000.000	-	-	-	-	715.000	-	-	-	-		60,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.178.400	1.800.000	2.200.000	2.500.000	2.800.000	-	600.000	2.198.400	2.198.400	1.057.700	-		50,92%	122,13%	99,93%	42,31%	0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.200.000	1.800.000	2.200.000	2.500.000	2.800.000	3.008.000	1.000.000	1.466.400	892.200	412.000	1.469.700		83,33%	81,47%	40,55%	16,48%	52,49%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.498.169.824	2.380.926.299	2.508.575.271	2.511.416.959	2.521.699.460	3.498.101.864	3.753.722.863	3.681.280.755	3.657.689.511	3.730.336.972	4.356.065.485	-	150,26%	154,62%	145,81%	148,54%	172,74%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.495.542.224	2.374.926.299	2.498.575.271	2.496.416.959	2.501.699.460	3.482.898.264	3.751.095.263	3.676.133.155	3.654.356.511	3.728.645.772	4.354.374.585		150,31%	154,79%	146,26%	149,36%	174,06%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-	1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.700.000	-	-	1.113.600	557.200	340.000	-		0,00%	111,36%	46,43%	22,67%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.700.000	-	-	548.200	548.200	293.900	-		0,00%	54,82%	45,68%	19,59%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		2.627.600	4.000.000	7.600.000	12.000.000	16.600.000	15.203.600	2.627.600	3.485.800	2.227.600	1.057.300	1.690.900		100,00%	87,15%	29,31%	8,81%	10,19%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	40.000.000	50.000.000	60.000.000	75.000.000	-	-	39.980.000	19.263.700	-	-	-	-	99,95%	38,53%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							-	-	-		-	-		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			40.000.000	50.000.000	60.000.000	75.000.000	-	-	39.980.000	19.263.700	-	-		0,00%	99,95%	38,53%	0,00%	0,00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							-	-	-		-	-		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	106.080.600	149.700.000	182.500.000	218.300.000	174.100.000	65.691.000	134.813.700	169.582.100	130.060.700	95.337.250	101.536.400	-	127,09%	113,28%	71,27%	43,67%	58,32%
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.713.600	7.500.000	8.500.000	10.000.000	12.000.000		3.613.000	15.080.400	16.939.900	14.809.000	14.753.600		97,29%	201,07%	199,29%	148,09%	122,95%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10.000.000	12.000.000		-	-	-	-	-					0,00%	0,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4.951.600	8.000.000	10.000.000	12.000.000	-		4.951.600	9.365.700	9.363.300	6.759.000	6.758.200		100,00%	117,07%	93,63%	56,33%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		30.643.200	40.000.000	50.000.000	60.000.000	15.000.000		30.643.200	51.975.000	35.910.000	42.651.750	42.638.400		100,00%	129,94%	71,82%	71,09%	284,26%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12.906.000	15.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000		8.690.000	8.258.000	7.547.500	4.144.000	4.174.000		67,33%	55,05%	41,93%	23,02%	23,19%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.332.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.600.000		1.332.000	1.332.000	1.332.000	-	-		100,00%	78,35%	66,60%	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan/Material		8.443.500	10.000.000	12.500.000	15.000.000	15.000.000		8.443.500	7.924.800	5.029.600	2.922.500	4.859.300		100,00%	79,25%	40,24%	19,48%	32,40%
Fasilitasi Kunjungan Tamu		1.155.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000	4.500.000		1.155.000	3.375.000	3.375.000	1.130.000	1.130.000		100,00%	112,50%	96,43%	25,11%	25,11%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		39.365.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	85.000.000	65.691.000	72.765.000	67.500.000	47.389.000	20.514.100	24.816.000		184,85%	112,50%	67,70%	25,64%	29,20%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		3.570.700	4.500.000	8.000.000	6.500.000	10.000.000		3.220.400	4.771.200	3.174.400	2.406.900	2.406.900		90,19%	106,03%	39,68%	37,03%	24,07%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	595.000.000	660.000.000	1.280.000.000	620.000.000	-	-	-	-	-	-				0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-	600.000.000	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00%	0,00%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-	60.000.000	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00%	0,00%	
Pengadaan Mebel			270.000.000	-	250.000.000	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-		0,00%		0,00%	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			150.000.000	-	170.000.000	170.000.000	-	-	-	-	-	-	-		0,00%		0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			175.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-		0,00%		0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	189.936.000	260.000.000	290.000.000	305.000.000	320.000.000	172.609.000	206.387.468	216.002.560	374.634.300	271.101.600	280.916.400	-	108,66%	83,08%	129,18%	88,89%	87,79%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat							27.709.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		174.000.000	225.000.000	250.000.000	260.000.000	270.000.000	139.900.000	193.440.000	203.620.000	361.372.800	263.796.600	280.916.400		111,17%	90,50%	144,55%	101,46%	104,04%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		15.936.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	5.000.000	12.947.468	12.382.560	13.261.500	7.305.000	-		81,25%	35,38%	33,15%	16,23%	0,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	99.978.000	180.000.000	217.000.000	249.000.000	266.000.000	71.063.000	107.686.000	257.956.800	260.961.000	215.061.000	234.617.000	-	107,71%	143,31%	120,26%	86,37%	88,20%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000	120.000.000	125.000.000	53.500.000	77.630.000	111.125.400	110.380.000	108.530.000	39.950.000				110,38%	90,44%	31,96%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		73.522.000	90.000.000				-	-	-	-	-	58.580.000		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Mebel		296.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000	-	296.000	1.480.000	1.440.000	1.440.000	1.280.000		100,00%	29,60%	20,57%	16,00%	11,64%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2.696.000	15.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	-	6.296.000	21.242.000	24.140.000	21.300.000	24.140.000		233,53%	141,61%	68,97%	53,25%	53,64%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		15.503.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	7.605.000	15.503.000	109.610.400	109.550.000	69.560.000	98.266.000		100,00%	243,58%	243,44%	154,58%	218,37%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		7.961.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-	7.961.000	14.499.000	15.451.000	14.231.000	12.401.000		100,00%	58,00%	51,50%	40,66%	31,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							9.958.000								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		2.809.000.000	2.025.000.000	2.224.000.000	2.284.000.000	2.279.000.000	10.482.069.650	1.619.510.144	6.091.650.272	1.648.047.530	1.541.746.800	1.609.066.300		57,65%	300,82%	74,10%	67,50%	70,60%
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.656.569.800	1.042.000.000	1.928.000.000	1.189.000.000	1.719.000.000	114.046.400	1.496.278.244	1.781.308.272	1.453.246.730	852.952.200	788.000.000		56,32%	170,95%	75,38%	71,74%	45,84%
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000			22.353.500	312.683.500	1.930.000	1.903.500			111,77%	1250,73%	6,43%	5,44%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.024.282.800	200.000.000	984.000.000	280.000.000	350.000.000		1.136.811.900	36.341.700	593.233.100	4.312.000	753.002.000		56,16%	18,17%	60,29%	1,54%	215,14%
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-	50.000.000					292.485.000							0,00%
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		17.001.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000		17.001.000	14.250.000	19.128.400	10.026.000	6.418.800		100,00%	71,25%	76,51%	33,42%	18,34%
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			9.000.000	7.000.000	9.000.000	10.000.000			3.778.600	1.343.400					41,98%	19,19%	0,00%	0,00%
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota											2.770.000	2.592.600						
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		62.167.900	100.000.000	200.000.000	230.000.000	300.000.000	12.878.000	55.122.900	32.708.600	42.307.950	10.363.000	12.014.300		88,67%	32,71%	21,15%	4,51%	4,00%
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		267.534.100	383.000.000	435.000.000	450.000.000	535.000.000	75.590.400	201.758.444	132.305.572	168.725.640	340.162.800	319.913.500		75,41%	34,54%	38,79%	75,59%	59,80%
Pengembangan Bahan Pustaka		281.648.000	100.000.000	245.000.000	122.500.000	360.000.000			256.120.000	292.155.720				0,00%	256,12%	119,25%	0,00%	0,00%
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		3.936.000	10.000.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000	25.578.000	3.936.000	12.821.000	12.060.500	177.000.000	380.693.600		100,00%	128,21%	80,40%	1011,43%	1903,47%
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000	28.000.000	20.000.000	24.000.000			185.797.000	11.608.520	13.933.400	11.296.000			92,90%	41,46%	69,67%	47,07%
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		152.430.200	983.000.000	296.000.000	1.095.000.000	560.000.000	10.368.023.250	123.231.900	4.310.342.000	194.800.800	688.794.600	121.232.000		80,84%	438,49%	65,81%	62,90%	21,65%
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		54.095.600	100.000.000	155.000.000	165.000.000	180.000.000		36.726.100,00	83.239.100	80.386.900	394.785.400	57.424.900		67,89%	83,24%	51,86%	239,26%	31,90%
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			800.000.000	1.000.000.000	790.000.000	176.000.000	10.368.023.250	0	4.146.481.700	29.246.000	58.855.000	25.078.000			518,31%	2,92%	7,45%	14,25%
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			3.000.000	6.000.000	8.000.000	9.000.000			8.610.000	13.482.200	223.178.200				287,00%	224,70%	2789,73%	0,00%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		71.667.000	75.000.000	100.000.000	125.000.000	150.000.000		70.100.900,00	68.811.800	53.448.350	10.726.000	33.184.000		97,81%	91,75%	53,45%	8,58%	22,12%
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		26.667.600	5.000.000	35.000.000	7.000.000	45.000.000		16.404.900,00	3.199.300	18.237.350	1.250.000	5.545.100		61,52%	63,99%	52,11%	17,86%	12,32%
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		15.000.000	11.000.000	12.000.000	22.000.000	12.000.000		10.680.000	13.529.300	16.942.000	24.565.000	5.689.300		71,20%	122,99%	141,18%	111,66%	47,41%
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota		15.000.000	11.000.000	12.000.000	22.000.000	12.000.000		10.680.000	13.529.300	16.942.000	24.565.000	5.689.300		71,20%	122,99%	141,18%	111,66%	47,41%
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		15.000.000		4.000.000	10.000.000	4.000.000		10.680.000		10.013.200	22.365.000	1.884.000		71,20%		250,33%	223,65%	47,10%
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			11.000.000	8.000.000	12.000.000	8.000.000			13.529.300	6.928.800	2.200.000	3.805.300			122,99%	86,61%	18,33%	47,57%
BIDANG KEARSIPAN																		
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		244.000.000	126.000.000	133.000.000	128.000.000	168.000.000	148.778.200	292.199.708	402.167.912	377.181.430	229.035.500	560.940.500		119,75%	319,18%	283,60%	178,93%	333,89%
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota		153.000.000	106.000.000	110.000.000	104.000.000	104.000.000		151.030.608	87.027.342	66.216.550	61.628.600	45.793.600		98,71%	82,10%	60,20%	59,26%	44,03%
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		153.000.000	106.000.000	110.000.000	104.000.000	104.000.000		151.030.608	87.027.342	66.216.550	61.628.600	45.793.600		98,71%	82,10%	60,20%	59,26%	44,03%
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		17.176.000	18.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000	89.607.000	67.176.000	168.645.370	208.653.630	50.754.000	441.409.000		391,10%	936,92%	1043,27%	253,77%	735,68%
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		17.176.000	18.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000	89.607.000	67.176.000	168.645.370	208.653.630	50.754.000	441.409.000		391,10%	936,92%	1043,27%	253,77%	735,68%
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		73.824.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	59.171.200	73.993.100	146.495.200	102.311.250	116.652.900	73.737.900		100,23%	7324,76%	3410,38%	2916,32%	1843,45%
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		73.824.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	59.171.200	73.993.100	146.495.200	102.311.250	116.652.900	73.737.900		100,23%	7324,76%	3410,38%	2916,32%	1843,45%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			50.000.000	60.000.000	70.000.000	70.000.000	-	3.000.000	52.171.100	50.004.100	11.819.800	18.991.600			104,34%	83,34%	16,89%	27,13%
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun				15.000.000	10.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-				0,00%	0,00%	0,00%
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	-	-	-	15.000.000	10.000.000	20.000.000										0,00%	0,00%	0,00%
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			4.000.000	20.000.000	-	35.000.000			14.716.400	32.215.100	-	-			367,91%	161,08%		0,00%
Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana			2.000.000	10.000.000	-	17.500.000			7.363.800	12.337.800					368,19%	123,38%		0,00%
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana			2.000.000	10.000.000	-	17.500.000			7.352.600	19.877.300					367,63%	198,77%		0,00%
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			42.000.000	15.000.000	48.000.000	-			27.511.600	7.632.150		7.171.800			65,50%	50,88%	0,00%	
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			42.000.000	7.500.000	40.000.000				27.511.600	7.632.150		7.171.800			65,50%	101,76%	0,00%	
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				7.500.000	8.000.000	-										0,00%	0,00%	
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			4.000.000	10.000.000	12.000.000	15.000.000		3.000.000	9.943.100	10.156.850	11.819.800	11.819.800			248,58%	101,57%	98,50%	78,80%
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			4.000.000	10.000.000	12.000.000	15.000.000		3.000.000	9.943.100	10.156.850	11.819.800	11.819.800			248,58%	101,57%	98,50%	78,80%

Dalam upaya meningkatkan pembangunan literasi masyarakat, Program Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota menjadi salah satu langkah yang sangat penting dan strategis. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka keberadaan sarana prasarana fisik sangatlah dibutuhkan. Namun keterbatasan keuangan daerah membuat program-program pembangunan fisik sangat sulit diwujudkan.

Setelah melalui berbagai upaya, Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana alokasi khusus (DAK), berupa pembangunan gedung perpustakaan pada tahun 2021. Kemudian dilanjutkan pembangunan gedung penunjang layanan perpustakaan pada tahun 2023 menggunakan dana APBD, yang semakin mengokohkan keberadaan perpustakaan umum daerah sebagai sarana peningkatan literasi masyarakat. Tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo kembali mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Perpusnas yang dialokasikan untuk pengadaan sarana prasarana pendukung gedung perpustakaan dan perangkat teknologi informasi.

Dengan telah dimilikinya sarana prasarana yang representatif, maka upaya peningkatan pembangunan literasi masyarakat dapat difokuskan pada pembangunan non fisik, seperti peningkatan kualitas layanan dan koleksi perpustakaan, sosialisasi, inovasi dan pembinaan perpustakaan sekolah maupun perpustakaan khusus; serta upaya penelusuran naskah kuno secara lebih intensif.

Pembangunan non fisik mendapat dukungan dana pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF). Tahun 2025 mendapat DAK Non Fisik untuk berbagai kegiatan sebesar Rp 750 juta dan tahun 2026, Dinpusip akan mendapat DAK Non Fisik Rp 500 juta.

Bidang kearsipan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan pengolahan arsip dengan tujuan terwujudnya tertib pengelolaan arsip. Adapun indikator tertib pengelolaan arsip bisa dilihat dari persentase arsip yang dikelola sesuai kaidah kearsipan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan alokasi dana untuk pembinaan, pengolahan arsip dan pemenuhan sarana prasaran penyimpanan arsip.

Renstra Tahun 2021 – 2026, pagu anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan bidang kearsipan sangat minim terutama di subkegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis. Namun demikian, hal ini tidak mempengaruhi pemenuhan target kinerja karena sebagian arsip yang akan diolah merupakan hasil akuisisi tahun sebelumnya yang selesai diolah pada tahun 2023. Khusus untuk tahun 2024, meskipun bidang arsip sudah berupaya melakukan berbagai usaha baik melalui penerbitan surat edaran bupati, penetapan peraturan bupati tentang jadwal retensi arsip mengadakan rakor bagi unit kearsipan pada perangkat daerah, dan penerbitan surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah tentang penyerahan arsip statis namun sebagian besar perangkat daerah belum memberikan respon yang signifikan. Hal ini berakibat penyerahan arsip statis dan arsip dinamis dengan masa simpan sekurang-kurangnya 10 tahun, persentasenya belum memenuhi target.

Pada subkegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota, meskipun pagu renstra tahun 2021 – 2026 belum

sesuai kebutuhan namun pada DPA jumlahnya sesuai kebutuhan sehingga target kinerja dapat terpenuhi.

Pada subkegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis khususnya pada aktivitas pengolahan depot arsip tahun 2026 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 441.409.000. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk belanja modal sarana prasarana kearsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan pelestarian arsip statis sebesar Rp. 348.708.000 dan untuk belanja operasional pengelolaan arsip sebesar Rp. 93.331.000.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja Dinpusip, selain dilihat dari capaian indikator dan efektivitas pendanaan, juga perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas. Evaluasi ini meliputi pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo selama tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Indikator Tujuan PD						
a	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	56,98	78,43	78,32	Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator dari tujuan perangkat daerah, yang menilai upaya dan perkembangan literasi masyarakat, yang diukur berdasarkan berbagai unsur seperti layanan perpustakaan, koleksi, tenaga ahli, partisipasi masyarakat, serta ketersediaan anggota perpustakaan dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan literasi masyarakat sebagai bagian dari upaya menuju budaya literasi.
b	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	-	68,02	73,16	81,92	75,78	Angka ini hasil gabungan dari nilai pengawasan kearsipan eksternal pada Dinpusip sebesar 60% dan hasil pengawasan kearsipan internal pada perangkat daerah sebesar 40%.
c	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-		
2	Indikator Sasaran PD						
a	Tingkat Gemar Membaca	-	-	59,80	57,07	70,24	Ukuran atau indikator yang menggambarkan seberapa besar perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi melalui aktivitas membaca dan sumber media lainnya secara berkelanjutan
b	Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	0	0,00	0	21,74%	Jumlah arsip statis yang dmasukkan dalam aplikasi SIKN
c	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	68,91	
3	Indikator Program PD						
a	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	
b	Persentase Perpustakaan yang	2,43%	2,43%	3,85%	5,56%	7,42%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Terakreditasi						
c	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan	0	0	5,26%	10,53%	21,05%	
d	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip sesuai Kaidah Kearsipan dengan Kategori Cukup	0	0	25,00%	40,00%	37,50%	
e	Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah	0	0	12,81%	34,12%	57,66%	
4	IUP						
a	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	0	0	0	0,0298%	0,046%	Tingkat pemanfaatan perpustakaan dihitung dengan banyaknya pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari di tahun tersebut dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%
5	SPM	-	-	-	-	-	
6	Permendagri 18 2020						
a	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	0	59,80	57,07	70,24	
b	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	0	11,85	78,43	78,32	
c	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	-	75,00%	75,00%	83,41%	54,83%	Prosentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, prosentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip (daftar berkas dan daftar isi berkas)
d	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	16,67%	50,00%	66,67%	75,35%	Indikator ini diperoleh dari tingkat kesesuaian kegiatan berdasarkan NSPK
7	Mandatory Lain	-	-	-	-	-	

Berdasarkan tabel diatas, bahwa pelaksanaan urusan perpustakaan ditunjukkan dengan indikator tujuan berupa indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) dengan nilai kategori sedang di tahun 2022 hingga 2024. Perbedaan nilai yang signifikan d tahun 2022 ke 2023 disebabkan oleh perbedaan cara penilaian tetapi masih dalam kategori yang sama. Sedangkan Tahun 2020 dan 2021 Dinpusip belum melakukan penghitungan IPLM. Selain dengan IPLM indikator sasaran berupa tingkat gemar membaca (TGM) dengan nilai kategori sedang meskipun ada peningkatan nilai yang signifikan di tahun 2024. Hal itu terjadi juga disebabkan cara penilaian yang berbeda. Begitu juga dengan TGM, di tahun 2020 dan 2021 Dinpusip belum melakukan penghitungan nilai.

Indikator program berupa jumlah perpustakaan terakreditasi yang semakin meningkat setiap tahunnya kecuali di tahun 2021 tidak meningkat. Tahun tersebut tidak melakukan pembinaan dan pendampingan serta pengajuan penilaian aktreditasi perpustakaan karena pandemi covid. Pelestarian naskah kuno milik daerah mulai dilakukan sejak tahun 2023 dengan menghasilkan 1 naskah kuno yang dialihmediakan setiap tahunnya. Kualitas layanan perpustakaan dinilai dari animo masyarakat untuk menggunakan perpustakaan yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat peningkatan capaian kinerja urusan perpustakaan yang cukup signifikan, dilihat dari peningkatan indikator-indikator tersebut dari tahun ke tahun.

Indikator tujuan bidang kearsipan yaitu nilai hasil pengawasan kearsipan, pengawasan kearsipan dilaksanakan mulai tahun 2021. Hasil nilai pengawasan kearsipan yang fluktuatif disebabkan karena adanya audit, monitoring dan adanya perubahan SOTK pada Perangkat Daerah. Secara umum nilai audit lebih rendah dibanding dengan nilai monitoring, hal ini dikarenakan nilai monitoring adalah pemenuhan hasil audit kearsipan tahun sebelumnya.

Indikator sasaran bidang kearsipan adalah Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN sebesar 21,74 di tahun 2024. Hal ini disebabkan karena Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Purworejo baru bergabung dengan SIKN JIKN di tahun 2024.

Untuk indikator program bidang kearsipan yaitu Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip sesuai Kaidah Kearsipan dengan Kategori Cukup merupakan hasil dari pengawasan kearsipan internal yang dimulai pada tahun 2022 dan Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah dilaksanakan mulai tahun 2022.

Indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) tahun 2024 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena formula penghitungan indikator tersebut mengalami perubahan, dimana obyek penghitungan dari unit pengolah di lingkungan DINPUSIP sedangkan tahun 2024 obyek penghitungannya menjadi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Purworejo.

Sedangkan indikator tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat setiap mengalami peningkatan karena adanya peningkatan perangkat daerah yang melakukan penilaian dan pemusnahan arsip.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Sehingga perangkat daerah di Kabupaten/Kota tidak melewati proses KLHS dan fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi, globalisasi, dan kebutuhan masyarakat akan informasi.

Adapun tantangan dan peluang bidang perpustakaan dan kearsipan adalah sebagai berikut:

- Tantangan

1. Literasi digital dan persaingan informasi. Masyarakat saat ini memiliki akses informasi yang tidak terbatas melalui internet, sehingga perpustakaan harus bersaing dengan sumber-sumber lain yang lebih cepat dan mudah diakses;
2. Perpustakaan harus mampu mengelola koleksi dalam berbagai format (cetak, digital, dan multimedia) secara efektif, yang membutuhkan keahlian dan infrastruktur yang memadai;
3. Belum terbentuknya perpustakaan di sebagian besar desa/kelurahan di Kabupaten Purworejo;
4. Masih minimnya perpustakaan yang pengelolaannya sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
5. Pengelolaan arsip digital, diperlukan infrastruktur yang kuat, SDM yang kompeten, dan standar kebijakan yang jelas untuk mengelola dan melestarikan arsip digital agar tidak hilang atau rusak;
6. Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya kearsipan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan kearsipan yang efektif;
7. Meningkatkan khazanah arsip bernilai guna berkelanjutan, guna memastikan bahwa arsip statis yang memiliki nilai sejarah dan kebangsaan terus bertambah, terjaga kelestariannya, dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus oleh masyarakat luas untuk berbagai keperluan.
8. Pergeseran preferensi pengguna dari fisik ke digital baik dari pemanfaatan perpustakaan maupun kearsipan.

- Peluang

1. Pengembangan pengelolaan kearsipan melalui e-arsip sebagai perwujudan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dan sebagai pondasi manajemen pengetahuan pemerintah;
2. Peningkatan kapasitas lembaga kearsipan daerah dalam pembinaan kearsipan pada perangkat daerah;
3. Tersedianya gedung layanan perpustakaan dan gedung depot arsip yang representatif;
4. Adanya kegiatan pengembangan kapasitas yang berkaitan dengan perpustakaan dan kearsipan;
5. Adanya dukungan kebijakan untuk pengembangan perpustakaan dan kearsipan;
6. Perkembangan teknologi yang makin cepat memudahkan akses terhadap layanan perpustakaan dan kearsipan;
7. Jumlah penduduk yang besar di Kabupaten Purworejo merupakan potensi yang besar dalam pemanfaatan perpustakaan;
8. Minat stakeholder terhadap pengembangan literasi cukup tinggi;
9. Program Nasional Pengawasan Kearsipan, tersedianya instrumen pengawasan (Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan).

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo terutama bidang perpustakaan meliputi Komunitas, pelajar/mahasiswa, masyarakat dan LPKA. Dalam rangka pemberian layanan berupa pembinaan perpustakaan, Dinpusip bermitra dengan:

1. Dindikbud sebagai perangkat daerah yang membawahi satuan pendidikan dasar
2. DP3APMD sebagai perangkat daerah yang membawahi Pemdes (Perpusdes)
3. Kemenag sebagai perangkat daerah yang membawahi MI/Mts
4. Ponpes sebagai pemilik naskah kuno

Dalam rangka mewujudkan peningkatan nilai pengawasan kearsipan Kabupaten, Lembaga Kearsipan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pembinaan pada perangkat daerah, BUMD, Ormas/Orpol dan Pemerintah Desa dalam lingkungan Kabupaten Purworejo. Selain itu guna percepatan pemenuhan target kinerja maka Lembaga Kearsipan Daerah melakukkan kerjasama atau bermitra dengan DP3APMD, untuk pembinaan arsip pemerintah desa dan Bakesbangpol untuk pembinaan arsip pada Ormas dan Orpol serta Setda Bagian Perekonomian untuk pembinaan BUMD.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinpusip, terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program serta layanan kepada masyarakat. Permasalahan tersebut muncul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang terkait dengan sumber daya manusia, kelembagaan, koordinasi antar sektor, ketersediaan data, serta akses dan kualitas layanan bagi kelompok sasaran.

Selain itu, terdapat isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam perencanaan Renstra, yang harus ditangani secara terintegrasi untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi permasalahan dan isu strategis ini menjadi dasar bagi penyusunan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang relevan, sehingga strategi pembangunan sosial, kependudukan, dan keluarga berencana dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD, dan aspirasi yang dihimpun, terdapat sejumlah permasalahan dominan yang terkait langsung dengan pelayanan Dinpusip. Permasalahan ini muncul dari kesenjangan antara kondisi aktual pelayanan dengan standar dan target yang diharapkan, baik dari sisi kualitas, cakupan, maupun efektivitas layanan.

Permasalahan di bidang perpustakaan yang semula cukup banyak, berangsur-angsur tertangani dengan diterimanya dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik dalam beberapa tahun terakhir. Namun masih ada permasalahan yang masih dialami, antara lain :

1. Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan masih rendah
   Rendahnya minat baca masyarakat sedikit banyak berpengaruh terhadap tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Meskipun telah didukung dengan sarana prasarana yang representatif, namun masyarakat belum sepenuhnya tergerak untuk berkunjung ke perpustakaan. Oleh karena itu, berbagai kegiatan terus dilaksanakan seperti gerakan bersama wajib baca buku (BERJIBAKU), safari perpustakan gema literasi (SAPUGELI), serta berbagai promosi melalui media sosial.

2. Pemerataan dan Kompetensi Tenaga Perpustakaan
   Permasalahan pemerataan tenaga perpustakaan terletak pada distribusi yang tidak merata dan kurangnya SDM di berbagai wilayah perpustakaan di Kabupaten Purworejo, menyebabkan kurangnya tenaga profesional di daerah terpencil dan pelayanan yang tidak optimal. Sementara itu, masalah kompetensi tenaga perpustakaan muncul akibat kurangnya pelatihan, ketidaksesuaian keahlian dengan perkembangan teknologi, dan tuntutan tugas yang meningkat, yang berdampak pada kualitas pelayanan yang tidak memenuhi kebutuhan pemustaka.
3. Keterbatasan Sumber Pengetahuan
   Ketersediaan sumber pengetahuan berkualitas adalah aspek penting lainnya dalam upaya perpustakaan untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan di masyarakat. Hal ini menyangkut bagaimana perpustakaan mengelola, memperbarui, dan memperkaya koleksinya untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berkembang dari penggunanya. Perpustakaan menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa koleksinya tidak hanya luas tetapi juga relevan dan terkini. Koleksi yang berkualitas tinggi mencakup berbagai genre dan subjek, serta sumber yang akurat dan terpercaya, yang penting untuk mendukung penelitian dan pembelajaran. Untuk meningkatkan ketersediaan sumber pengetahuan berkualitas, perpustakaan juga harus mempertimbangkan kebutuhan khusus berbagai kelompok pengguna, termasuk anak-anak, remaja, akademisi, dan peneliti. Mereka harus menyediakan materi yang sesuai dan bermanfaat untuk semua kelompok usia dan tingkat pendidikan.
4. Masih rendahnya frekuensi dan durasi membaca masyarakat
   Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya frekuensi dan durasi membaca masyarakat. Antara lain pergeseran pola pikir dan gaya hidup masyarakat, dari budaya membaca menjadi budaya menonton. Membaca buku baik yang cetak maupun e-book, cenderung ditinggalkan oleh sebagian masyarakat, dan lebih memilih menonton berbagai konten melalui platform digital dan media sosial. Hal ini mengakibatkan rendahnya budaya literasi masyarakat, sehingga mudah termakan oleh berita bohong (hoaks). Dalam kaitan ini, maka perpustakaan hadir dengan berbagai kegiatan seperti menambah koleksi buku-buku best seller, mempermudah akses e-book, melaksanakan bimtek pembuatan konten lokal, bimtek penyusunan resensi buku dan sebagainya, yang diharapkan dapat mendorong masyarakat dalam membangun budaya literasi.

Sedangkan permasalahan dibidang kearsipan antara lain :

1. Rendahnya Nilai Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Purworejo
   Sebagian besar pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo belum berpedoman pada kaidah kearsipan dalam penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, penyediaan sarana prasarana kearsipan yang sesuai dan ketersediaan sumber daya manusia kearsipan yang kompeten. Hal ini berpengaruh pada nilai Reformasi Birokrasi, nilai SPBE, nilai SPIP dan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) Kabupaten Purworejo. Dampak langsung yang dirasakan oleh pencipta arsip bila arsip belum dikelola secara baku adalah rendahnya akuntabilitas kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap

pelayanan publik. Selain itu, ketika perangkat daerah tidak melakukan penyerahan arsip statis maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku LKD Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan kehilangan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa dan jati diri sejarah perjalanan kabupaten di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan salah satunya adalah untuk penelitian bagi mahasiswa.

2. Sumber Daya Manusia Kearsipan
   Dalam penyelenggaran kearsipan daerah, peran SDM Kearsipan terutama pimpinan unit kearsipan, bersifat kolaboratif yang dapat menjamin terlaksananya kebijakan kearsipan yang optimal. Namun, saat ini jumlah SDM Kearsipan khususnya di perangkat daerah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif belum terpenuhi. Selain itu, dengan makin digunakannya TIK dalam penyelenggaraan kearsipan, menuntut SDM kearsipan harus terus meningkatkan kemampuan di bidang TIK. Berkembangnya Srikandi mengindikasikan otomasi dalam penyelenggaraan kearsipan makin dominan, yang menjadikan ketergantungan pengelolaan arsip oleh arsiparis menjadi makin berkurang. Kualitas arsiparis harus dikelola dengan baik, tidak hanya menjadi bagian *record* manajemen namun arsiparis menjadi pelaksana yang secara aktif dalam pencapaian transformasi digital dan mampu merubah arsip menjadi informasi, *knowledge*, dan *wisdom*.
3. Stakeholder Kearsipan
   Terbatasnya anggaran menjadi bagian yang perlu diperhatikan, agar kolaborasi kearsipan baik lembaga kearsipan daerah dan pencipta arsip tidak menjadi kendala. Khusus pada perangkat daerah, kondisi SDM kearsipan yang minimalis, adanya kebijakan mutasi dan berbagai keterbatasan serta problematik lainnya berakibat pada terkendalanya penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah, harus dihadapi dengan strategi yang tepat agar penyelenggaraan kearsipan tetap berjalan optimal, sehingga tidak menghambat keberlanjutan program dan kebijakan kearsipan daerah.
4. Penyelamatan dan Pemanfaatan Arsip
   Berbagai narasi sejarah dari sumber arsip yang lengkap di masa lalu masih sangat terbatas, sehingga masyarakat masih perlu mencari berbagai sumber informasi tentang sejarah dari berbagai sumber di luar Kabupaten Purworejo. Selain itu, pengelolaan arsip cenderung hanya terbatas pada penanganan arsip sebagai sebuah entitas dokumen. Penyajian arsip kurang berorientasi pada potensi arsip sebagai data dan informasi untuk memberikan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan atau pembentukan kebijakan. Selain itu, arsip belum sepenuhnya dipandang sebagai instrumen strategis dalam perumusan kebijakan dan pembangunan daerah. Sulitnya melakukan valuasi terhadap nilai arsip berdampak pada kurangnya perhatian akan besarnya nilai arsip sebagai aset negara yang harus dijaga dan dipelihara oleh negara.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi Kearsipan
   Transformasi digital sangat bergantung pada platform yang menaunginya, sehingga tingkat keamanan yang rendah akan berdampak serius. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kearsipan, media penyimpanan, metadata, maupun

interoperabilitas juga menjadi permasalahan apabila tidak diprioritaskan mitigasi resikonya, misalnya dalam penyelamatan arsip bentuk digital dari luar Lembaga Kearsipan Daerah, agar tetap autentik, utuh, dan terpercaya.

6. Perluasan Khasanah Arsip
   Rendahnya kesadaran pencipta arsip untuk menyelamatkan dan menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah mengakibatkan terbatasnya khasanah arsip dan berdampak pada belum optimalnya pelayanan kearsipan pada pengguna.

2.2.2 Isu Strategis

Berbagai isu-isu yang akan dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan penyelenggaraan layanan perpustakaan dan kearsipan atau diperlukan sebagai mitigasi untuk menyusun strategi agar tidak menjadi halangan dalam kinerja. Isu-isu ini diperoleh dari berbagai aspirasi baik itu dari masyarakat, forum-forum perangkat daerah, maupun forum-forum lainnya, sehingga diperoleh isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo.

Berikut tabel 2.4 tentang permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo :

Tabel 2.4
Permasalahan dan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Bonus Demografi	1. Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan masih rendah 2. Pemerataan dan Kompetensi Tenaga Perpustakaan 3. Keterbatasan Sumber Pengetahuan 4. Masih rendahnya frekuensi dan durasi membaca masyarakat	Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dampak buruk teknologi AI	Transformasi sosial	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	1. Pembangunan Literasi Masyarakat 2. Transformasi Digital Perpustakaan 3. Penguatan Peran Perpustakaan sebagai Pusat Literasi dan Inklusi Sosial
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	1. Rendahnya Nilai Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Purworejo 2. Sumber Daya Manusia Kearsipan 3. Penyelamatan dan Pemanfaatan Arsip 4. Teknologi Informasi dan Komunikasi Kearsipan 5. Pemerataan dan Kompetensi Tenaga Perpustakaa	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola kearsipan	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	1. Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan 2. Kepatuhan Publik terhadap Kebijakan Kearsipan 3. Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Kearsipan

	6. Perluasan Khasanah Arsip frekuensi dan durasi					

Berdasarkan tabel di atas, isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo yaitu

1. Pembangunan Literasi Masyarakat
   Dalam menghadapi kemajuan ilmu dan teknologi informasi, maka peningkatan minat dan budaya literasi masyarakat menjadi suatu kondisi yang harus terus diupayakan. Tanpa budaya literasi yang memadai, maka upaya pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan produktif tidak akan terwujud. Perpustakaan terus diupayakan dapat menjadi rumah yang nyaman bagi upaya peningkatan budaya literasi tersebut.
2. Transformasi Digital dalam Pengelolaan Perpustakaan
   Aksesibilitas layanan melalui digitalisasi koleksi perpustakaan dan perlu terus ditingkatkan, melalui pengembangan sistem informasi berbasis teknologi untuk layanan yang lebih cepat dan memuaskan. Keberadaan e-pusda menjadi piranti penting agar masyarakat dapat mengakses koleksi perpustakaan secara digital.
3. Penguatan Peran Perpustakaan sebagai Pusat Literasi dan Inklusi Sosial
   Membangun perpustakaan sebagai pusat literasi dan inklusi sosial, merupakan salah satu cara meningkatkan eksistensi perpustakaan. Melalui ekosistem yang integratif, perpustakaan terus memberikan layanan yang inklusif bagi semua kelompok masyarakat.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan
   Mencakup seberapa baik pengelolaan arsip dilakukan, di mana pengawasan kearsipan menjadi instrumen utamanya. Pengawasan ini meliputi aspek kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip dinamis dan statis, serta penguatan SDM dan sarana prasarana di lembaga kearsipan daerah dan perangkat daerah. Hasil pengawasan ini kemudian menjadi bagian dari penilaian, termasuk dalam konteks digitalisasi arsip.
5. Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Kearsipan
   Munculnya format arsip yang terlahir elektronik dalam bentuk beragam dan kompleks, ancaman keamanan informasi arsip yang telah terdigitalisasi, serta kesulitan migrasi arsip analog ke digital, merupakan tanggungjawab seluruh insan kearsipan untuk mencegah segala bentuk ancaman kehilangan dan kerusakan arsip digital, serta menjaganya agar tetap autentik, utuh, dan terpercaya. Sistem Srikandi harus diperkuat sebagai platform utama digitalisasi arsip daerah yang aman, efisien, dan terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga mempermudah informasi arsip untuk dilayankan kepada publik melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) maupun layanan kearsipan lainnya.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah gambaran tentang kondisi atau tujuan ideal yang ingin dicapai di masa depan, yang berfungsi sebagai arah dan panduan dalam perencanaan serta pengambilan keputusan di pemerintahan. Berdasarkan perkembangan dan kondisi pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Purworejo 5 (lima) tahun yang akan datang, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Visi yang ditetapkan mencerminkan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh kepala daerah selama masa kepemimpinannya. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada dalam menciptakan Kabupaten Purworejo sebagaimana yang dicita-citakan. Rumusan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih termuat dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

"Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
(PURWOREJO BERSERI)".

Visi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 menuju pada kondisi masyarakat yang sejahtera, memiliki keterkaitan dengan visi RPJMN dalam rangka terwujudnya masyarakat yang maju serta berdaulat, dan dalam RPJMD Jawa Tengah berkaitan dengan terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera.
Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Purworejo dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo selama periode tahun 2025 - 2029.
Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan lima misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera.
2. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
4. Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

Sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo sesuai tugas pokok dan fungsinya, mendukung misi ke-1 untuk bidang perpustakaan dan mendukung misi ke-5 untuk bidang kearsipan.
Dalam rangka mendukung misi 1, Dinpusip berfokus pada peningkatan budaya literasi dan peningkatan kualitas layanan melalui kegiatan pengembangan dan pembinaan perpustakaan, peminjaman bahan

pustaka, inklusi sosial, sosialisasi budaya baca dan pelestarian naskah kuno.
Sedangkan untuk misi 5, Dinpusip berfokus pada penguatan tata kelola kearsipan, peningkatan sistem informasi dan administrasi pelayanan melalui pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan arsip daerah.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, kemudian dirumuskan tujuan atau strategi utama (goals) serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai beserta indikator pengukurnya. Proses perumusan ini dilakukan dengan pendekatan perencanaan strategis, yang melibatkan analisis faktor internal dan eksternal serta mempertimbangkan program-program yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo terpilih untuk periode 2025-2029.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu tahun 2025-2029. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan. Sedangkan sasaran merupakan indikator yang lebih spesifik dan terukur untuk memastikan efektivitas dan efisiensi layanan.

Perumusan tujuan dan sasaran disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, selaras dengan RPJMD, kondisi saat ini, serta norma, standar, prosedur dan kriterian (NSPK) yang berlaku. Dengan demikian, tujuan dan sasaran ini menjadi landasan bagi strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Purworejo.

Dalam penyusunan tujuan dan sasaran Renstra, Dinpusip berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. NSPK menjadi dasar acuan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan standar nasional, efektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang mengatur penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Selain itu, tujuan dan sasaran perangkat daerah berpedoman pada sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029. Urusan bidang perpustakaan dan kearsipan Dinpusip mengacu pada sasaran ke-1, yaitu meningkatnya kualitas manusia dan sasaran ke-5, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi karena arsip yang autentik, utuh, lengkap dan terpercaya merupakan sumber data primer

dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government).

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearipan Kabupaten Purworejo dirumuskan untuk memudahkan pemahaman dan pemetaan capaian yang ingin dicapai selama periode 2025 – 2029. Tabel ini menyajikan tujuan utama perangkat daerah, diikuti oleh sasaran spesifik yang terukur sesuai urusan yang diampu, sehingga setiap sasaran dapat dijadikan indikator keberhasilan program dan kegiatan. Dengan adanya tabel ini, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan akuntabel, sekaligus memudahkan pemantauan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Tujuan, sasaran dan indikator serta target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 terdapat dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S1, Meningkatnya kualitas manusia	Meningkatkan budaya literasi masyarakat, tertib arsip perangkat daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	78,50	78,8	79,24	79,54	79,75	80,00	
			Tingkat Gemar Membaca	70,40	71,21	71,53	71,75	72,30	72,50	
S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi			Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	75,90	76,00	76,15	76,5	76,75	76,90	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	
		Meningkatkan budaya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	78,50	78,8	79,24	79,54	79,75	80,00	
			Tingkat Gemar Membaca	70,40	71,21	71,53	71,75	72,30	72,50	
		Meningkatnya layanan dan akses arsip serta menjaga keberlanjutan arsip	Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	21,74 %	24,19%	26,50%	28,67%	30,71%	32,65%	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	

Berdasarkan tabel 3.1 tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo adalah Meningkatkan budaya literasi masyarakat, tertib arsip perangkat daerah serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinpusip menetapkan sejumlah indikator kinerja yang terukur dan terintegrasi dengan sasaran Renstra PD.

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Gemar Membaca (TGM) merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo. Indikator tersebut bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi perkembangan literasi masyarakat melalui perpustakaan.

   IPLM menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil mengembangkan perpustakaan dan kegiatan literasi guna meningkatkan budaya literasi masyarakat dan diukur berdasarkan tujuh komponen utama yang disebut Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang meliputi Meliputi pemerataan layanan, kecukupan koleksi, kecukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan, jumlah perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), tingkat keterlibatan masyarakat, dan jumlah anggota perpustakaan. IPLM mendukung sasaran pembangunan yang ke-1 yaitu Meningkatnya kualitas manusia.

   Sedangkan Tingkat Gemar Membaca (TGM) adalah ukuran atau nilai yang menunjukkan tingkat perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media bacaan. Tingkat ini diukur melalui beberapa aspek seperti frekuensi dan durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, serta frekuensi dan durasi akses internet untuk bahan bacaan.
2. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan indikator tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo bidang

kearsipan. Nilai ini untuk mengukur penyelenggaraan kearsipan yang baik, yang meliputi aspek internal dan eksternal, di mana nilai pengawasan eksternal memiliki bobot 60% dan nilai internal 40%. Hasil penilaian ini kemudian digunakan untuk meningkatkan pengelolaan arsip, memastikan akuntabilitas, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator ini mendukung sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi (S5).

3. Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN merupakan indikator sasaran Dinpusip bidang kearsipan. Persentase ini diukur dengan jumlah arsip statis dan dinamis yang diunggah oleh lembaga kearsipan daerah kedalam aplikasi SIKN melalui JIKN. Sehingga masyarakat dapat mencari dan mengakses informasi arsip yang telah diunggah ke SIKN. Sistem SIKN JIKN bertujuan untuk menyajikan informasi kearsipan secara lengkap, cepat, mudah, dan murah, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini mendukung sasaran pembangunan (S5) yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi. Target pengunggahan arsip ke dalam aplikasi SIKN bertambah setiap tahunnya sebanyak 100 arsip.
4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

   Nilai SAKIP Perangkat Daerah juga menjadi indikator untuk sasaran S5, serta mendukung sasaran Renstra Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Nilai SAKIP ditargetkan naik dari 68,02 pada 2025 menjadi 80,20 pada 2030. Peningkatan ini menunjukkan fokus Dinpusip dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peningkatan indikator tersebut mencerminkan upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan kualitas manusia yang lebih baik dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif berbasis teknologi informasi. Dengan sasaran dan target yang jelas, Dinpusip mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program secara terarah, sehingga seluruh kegiatan berdampak nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi-misi Kabupaten Purworejo.

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo (RPJMD), serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dalam periode 2025 – 2029, diperlukan adanya strategi dan arah kebijakan yang harus ditempuh.
Strategi Renstra PD Tahun 2025 – 2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, diperlukan adanya penahapan prioritas pembangunan tahunan. Penahapan Renstra PD disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.
Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan budaya literasi masyarakat	Meningkatkan budaya literasi masyarakat	Memantapkan budaya literasi masyarakat	Mewujudkan budaya literasi masyarakat	Meneguhkan budaya literasi masyarakat
Menguatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berkelanjutan	Memantapkan pengelolaan arsip yang tertib dan berkelanjutan	Mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib dan berkelanjutan	Meneguhkan pengelolaan arsip yang tertib dan berkelanjutan
Menguatkan sistem menejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Arah kebijakan dalam Renstra tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus relevan dan konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dengan memperhatikan penahapan Renstra. Visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD yang kemudian diterjemahkan oleh setiap perangkat daerah (PD) menjadi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Arah kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo tahun 2025 – 2029 disajikan dalam tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	S1, Meningkatnya kualitas manusia	Penguatan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter.	Arah Kebijakan 2026 Penguatan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan koleksi, layanan, inovasi dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian naskah kuno	Perpustakaan
		Peningkatan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter.	Arah Kebijakan 2027 Peningkatan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan koleksi, layanan, inovasi dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian naskah kuno	
		Pemantapan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter.	Arah Kebijakan 2028 Pemantapan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan koleksi, layanan, inovasi dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian naskah kuno	
		Perwujudan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter.	Arah Kebijakan 2029 Perwujudan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan koleksi, layanan, inovasi dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian naskah kuno	
		Peneguhan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter.	Arah Kebijakan 2030 Peneguhan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan koleksi, layanan, inovasi dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian naskah kuno	
	S5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2026 Penguatan lembaga kearsipan daerah selaku pembina kearsipan dan pengelola arsip bernilai guna berkelanjutan yang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas LKD, pemenuhan sarana prasarana penyimpanan arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan, sosialisasi, bimtek, rakor dan pengelolaan arsip	Kearsipan
		Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2027 Peningkatan lembaga kearsipan daerah selaku pembina kearsipan dan pengelola arsip bernilai guna berkelanjutan yang dilaksanakan melalui	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			peningkatan kapasitas LKD, pemenuhan sarana prasarana penyimpanan arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan, sosialisasi, bimtek, rakor dan pengelolaan arsip	
		Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2028 Pemantapan lembaga kearsipan daerah selaku pembina kearsipan dan pengelola arsip bernilai guna berkelanjutan yang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas LKD, pemenuhan sarana prasarana penyimpanan arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan, sosialisasi, bimtek, rakor dan pengelolaan arsip	
		Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2029 Perwujudan lembaga kearsipan daerah selaku pembina kearsipan dan pengelola arsip bernilai guna berkelanjutan yang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas LKD, pemenuhan sarana prasarana penyimpanan arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan, sosialisasi, bimtek, rakor dan pengelolaan arsip	
		Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2030 Peneguhan lembaga kearsipan daerah selaku pembina kearsipan dan pengelola arsip bernilai guna berkelanjutan yang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas LKD, pemenuhan sarana prasarana penyimpanan arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan, sosialisasi, bimtek, rakor dan pengelolaan arsip	
		Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2026 Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Penunjang
		Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2027 Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	
		Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2028 Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	
		Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2029 Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	
		Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2030 Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	

Arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo bidang perpustakaan adalah budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat yang dilaksanakan melalui aktivitas pengembangan koleksi, layanan, inovasi dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian naskah kuno. Perpustakaan mempunyai peran penting dalam membangun budaya gemar membaca dan mengembangkan literasi masyarakat melalui serangkaian aktivitas yang terintegrasi. Tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung kegiatan membaca dan pemahaman literasi secara lebih luas.

1. Pengembangan koleksi
   Perpustakaan tidak hanya harus menyediakan buku, tetapi juga majalah, koran, jurnal, dan sumber digital yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan serta minat masyarakat.
2. Layanan
   Layanan perpustakaan adalah jembatan yang menghubungkan koleksi dengan masyarakat. Tujuannya adalah membuat perpustakaan menjadi tempat yang nyaman dan menarik untuk belajar.
3. Inovasi
   Inovasi adalah upaya untuk menyesuaikan perpustakaan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan.
4. Pembinaan Perpustakaan
   Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada para pustakawan untuk meningkatkan kompetensi mereka, karena pustakawan adalah penggerak utama dalam membangun budaya literasi.
5. Pelestarian Naskah Kuno
   Pelestarian naskah kuno merupakan bagian penting dari pengembangan literasi karena menghubungkan masyarakat dengan warisan budaya dan sejarah bangsanya.

Sedangkan arah kebijakan dibidang kearsipan yaitu Lembaga Kearsipan Daerah selaku pembina kearsipan dan pengelola arsip bernilai guna berkelanjutan yang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas LKD, pemenuhan sarana prasarana penyimpanan arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan, sosialisasi, bimtek, rakor dan pengelolaan arsip.

Peran Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten Purworejo sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan arsip di tingkat daerah. LKD bertugas sebagai pembina bagi pencipta arsip (Perangkat Daerah/PD) dan mengelola arsip yang memiliki nilai guna berkelanjutan, yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan terpadu.

1. Peningkatan kapasitas LKD
   Merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan LKD maupun perangkat daerah. Peningkatan kapasitas ini dapat berupa:
   1. Penguatan SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para arsiparis dan pengelola arsip baik di lingkungan LKD maupun perangkat daerah agar mampu mengelola arsip sesuai dengan kaidah dan standar kearsipan.
   2. Mengembangkan strategi yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas kearsipan di daerah.
   3. Mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk mendukung pengelolaan arsip yang lebih modern, seperti melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

2. Pemenuhan sarana dan prasarana penyimpanan arsip
   Bertujuan memastikan arsip tersimpan dengan aman dan terpelihara dengan baik. Kegiatan ini meliputi:
   a. Melengkapi tempat penyimpanan arsip yang memenuhi standar, seperti tahan api, memiliki pengaturan suhu dan kelembapan, serta aman dari risiko kerusakan.
   b. Menyediakan sarana prasarana untuk penerapan arsip elektronik seperti komputer yang representatif dan perangkat digitalisasi.
3. Pembinaan dan pengawasan kearsipan
   LKD Kabupaten Purworejo bertanggung jawab untuk memastikan semua Perangkat Daerah melaksanakan kearsipan sesuai aturan. Ini dilakukan dengan:
   a. Menyusun dan menetapkan pedoman berupa norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam mengelola arsip.
   b. Melakukan audit atau pengawasan kearsipan secara berkala untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dan memberikan rekomendasi perbaikan.
   c. Memberikan pendampingan teknis kepada Perangkat Daerah untuk memastikan pengelolaan arsip dinamis dan statis berjalan sesuai aturan.
4. Sosialisasi, bimtek dan rakor
   Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo selaku LKD dalam menyebarkan pengetahuan dan menyelaraskan kebijakan kearsipan melalui:
   a. Sosialisasi pedoman kearsipan serta pentingnya tertib arsip kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat luas.
   b. Bimbingan teknis (bimtek) atau pelatihan teknis secara mendalam tentang pengelolaan arsip, termasuk penataan arsip inaktif, penyusutan dan penggunaan aplikasi Srikandi.
   c. Rapat koordinasi (rakor) secara rutin dengan pencipta arsip (perangkat daerah) dan pihak terkait untuk menyusun strategi, mengevaluasi program, dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan kearsipan.
5. Pengelolaan arsip bernilai guna berkelanjutan
   Arsip yang memiliki nilai guna berkelanjutan adalah arsip statis yang menjadi memori kolektif bangsa. LKD memiliki peran sentral dalam pengelolaan arsip yang meliputi:
   a. Menerima arsip inaktif dari Perangkat Daerah dengan masa simpan sekurang-kurangnya 10 tahun dan menerima arsip statis atau memiliki nilai guna sekunder.
   b. Pelestarian arsip dengan melakukan konservasi dan restorasi untuk memastikan arsip-arsip tersebut bertahan lama, namun hal ini belum dapat direalisasikan karena depot arsip belum dilengkapi dengan ruangan dan sarana konservasi dan restorasi.
   c. Menyediakan akses bagi publik untuk memanfaatkan arsip statis sebagai sumber informasi sejarah, akuntabilitas dan pelayanan publik.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo selaku LKD Kabupaten tidak hanya mengumpulkan dan menyimpan arsip, tetapi juga berperan aktif dalam membangun sistem kearsipan yang andal, berkelanjutan dan dapat diakses oleh publik, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD, serta sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Penyusunan program dan kegiatan ini mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya, yang memastikan adanya keselarasan antara perencanaan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mencapai target kinerja perangkat daerah, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, serta program prioritas dan unggulan Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu, setiap rumusan program disertai indikator kinerja yang terukur sehingga dapat menjadi acuan dalam pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Renstra.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo tahun 2025 – 2029 merupakan hasil penjabaran cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output perangkat daerah. Proses ini memastikan setiap tingkatan kegiatan, dari yang paling operasional hingga paling strategis, saling berkaitan dan berkontribusi secara logis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sehingga tercipta keselarasan kinerja dari tingkat atas ke tingkat bawah dalam suatu organisasi atau sistem perencanaan.

Cascading Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo tahun 2025 – 2029 tercantum dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
S1, Meningkatnya kualitas manusia	Meningkatkan budaya literasi masyarakat, tertib arsip perangkat daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
					Tingkat Gemar Membaca		
		Meningkatkan budaya literasi masyarakat			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
					Tingkat Gemar Membaca		
			Terwujudnya perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan		Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
				Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Layak	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
					Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	
					Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	
					Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	
				Meningkatnya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
					Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	
					Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	
			Terlaksananya pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten		Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
				Bertambahnya Koleksi Naskah Kuno yang Dialihmediakan	Koleksi Naskah Kuno yang Dialihmediakan	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	
S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi		Meningkatnya layanan dan akses arsip			Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis		Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
				Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah sesuai Kaidah Kearsipan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola arsip sesuai Kaidah Kearsipan	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten / Kota	
					Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dikelola Lembaga Kearsipan Daerah	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	
				Terlaksananya Layanan Kearsipan melalui JIKN pada Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menjadi Kontributor JIKN	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK		Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
				Terlaksananya Pemusnahan Arsip oleh Perangkat Daerah	Jumlah Arsip yang Dimusnahkan oleh Perangkat Daerah	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	
					Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
				Terselamatkannya Arsip Vital dan Arsip Penting dari Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	
					Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	
					Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyelamatan Arsip dari Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dilakukan Autentikasi	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Program, kegiatan, dan sub-kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo tahun 2025–2030 merupakan hasil dari proses penjabaran (cascading) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029. Mengingat sifat perencanaan yang berkesinambungan, program dan kegiatan pada tahun 2030 tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari kerangka perencanaan jangka menengah tersebut.

Penyusunan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2030 ini merupakan langkah final dalam melaksanakan visi dan misi yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo periode 2025–2029. Upaya ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2030 terintegrasi secara utuh dalam mencapai target kinerja lima tahunan. Oleh karena itu, dokumen Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2030 ini menjadi pijakan terakhir yang strategis untuk mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah sesuai dengan amanat RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029.

Rencana program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030 tertuang dalam tabel 4.2 berikut ini :

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan budaya literasi masyarakat, tertib arsip perangkat daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,91	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	78,32	78,8		79,24		79,54		79,75		80		80			
			Tingkat Gemar Membaca	Nilai	70,24	71,21		71,53		71,75		72,3		72,5		72,5			
			Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Angka	75,78	76		76,15		76,5		76,75		76,9		76,9			
1	Meningkatkan budaya literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	78,32	78,8		79,24		79,54		79,75		80		80			
			Tingkat Gemar Membaca	Nilai	70,24	71,21		71,53		71,75		72,3		72,5		72,5			
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						1.414.755.600		897.423.000		892.807.000		906.914.000		921.244.000				
02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Terwujudnya Perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi	%	7,42	10,27	1.409.066.300	11,7	873.320.000	13,12	887.118.000	14,55	901.135.000	15,98	915.373.000	15,98	Bidang Perpustakaan	Kabupaten Purworejo	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Layak	Perpustakaan	67	20	968.737.700	20	653.069.200	20	660.650.499	20	708.676.496	20	704.205.749	100			
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	12	10	6.418.800	10	8.989.000	10	6.438.450	10	7.082.295	10	7.790.524	50			
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	12	6	153.002.000	2	106.685.970	2	108.819.689	2	119.701.658	2	62.595.000	10			
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Layanan	19	21	319.913.500	22	302.913.500	23	306.971.770	24	337.668.950	25	371.435.758	25			
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	1	10	2.592.600	10	2.951.000	10	3.098.550	10	3.408.405	10	3.750.000	50			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	150	70	12.014.300	100	23.215.730	110	24.376.517	120	26.814.168	130	29.495.000	530			
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen	1	1	11.296.000	1	5.814.000	1	6.104.700	1	6.715.170	1	7.386.600	5			
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	4,889	3.500	380.893.600	1.990	200.000.000	2.000	202.215.823	2.010	204.398.350	2.100	218.576.617	11.600			
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yangÂ Dikembangkan	Eksemplar	0	1	80.703.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	1	1	1.903.500	1	2.500.000	1	2.625.000	1	2.887.500	1	3.176.250	1			
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	0,046	0,26	440.328.600	0,366	220.250.800	0,473	226.467.501	0,58	192.458.504	0,687	211.167.251	0,687			
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	1	1	5.545.100	1	5.700.000	1	5.822.355	1	6.840.000	1	6.986.826	2			
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	2	2	33.184.000	3	40.000.000	4	40.800.000	5	44.880.000	6	49.368.000	6			
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	1	1	200.078.000	1	90.643.000	1	92.455.860	1	44.610.299	1	49.071.400	1			
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	3	3	144.096.600	9	23.796.800	9	24.272.736	9	26.700.000	9	29.370.000	39			
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus	6	4	57.424.900	4	60.111.000	5	63.116.550	5	69.428.205	6	76.371.025	24			
02.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan	%	21,05	31,58	5.689.300	36,84	24.103.000	42,11	5.689.000	47,37	5.779.000	52,63	5.871.000	52,63	Bidang Perpustakaan	Kabupaten Purworejo	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Koleksi Naskah Kuno yang Dialihmediakan	Koleksi Naskah Kuno yang Dialihmediakan	Dokumen	2	1	5.689.300	1	24.103.000	1	5.689.000	1	5.779.000	1	5.871.000	5			
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	32	32	3.689.300	30	16.103.000	30	3.689.000	30	3.779.000	30	3.871.000	152			
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	1	1	2.000.000	1	8.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,91	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						5.047.170.885		5.097.643.000		4.313.981.000		4.313.981.000		4.313.981.000				
02.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	5.047.170.885	100	5.097.643.000	100	4.313.981.000	100	4.313.981.000	100	4.313.981.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	45	24.208.800	45	23.575.000	45	25.125.000	45	31.650.000	46	40.150.000	226			
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	19	22	23.602.700	22	20.000.000	22	20.000.000	22	25.000.000	23	30.000.000	111			
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	22	556.100	22	3.500.000	22	5.000.000	22	6.500.000	22	10.000.000	110			
2.23.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	1	50.000	1	75.000	1	125.000	1	150.000	1	150.000	5			
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	45	4.356.332.785	45	4.358.824.585	45	3.278.049.955	45	3.573.464.600	45	3.588.464.600	225			
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	29	35	4.354.374.585	35	4.354.374.585	35	3.270.549.955	35	3.563.964.600	35	3.577.964.600	35			
2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	44	1.958.200	44	4.450.000	44	7.500.000	44	9.500.000	44	10.500.000	220			
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0		11	10.000.000	11	10.000.000	11	14.000.000	11	16.000.000	44			
2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	11	10.000.000	11	10.000.000	11	14.000.000	11	16.000.000	44			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	0		1	25.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	4			
2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	17	25.000.000	17	15.000.000	17	20.000.000	17	25.000.000	68			
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	0	8	110.659.400	8	109.160.000	9	113.600.000	9	139.000.000	9	139.500.000	43			
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	14.753.600	8	10.000.000	8	10.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	33			
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	12.061.100	28	11.000.000	28	15.000.000	28	18.000.000	28	18.000.000	113			
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	42.638.400	1	38.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	5			
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	4.694.400	3	7.000.000	3	8.500.000	3	10.000.000	3	10.000.000	13			
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.000.000	3			
2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	5.688.300	23	7.500.000	23	8.500.000	23	8.500.000	23	9.000.000	93			
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	1.160.000	12	1.160.000	12	2.600.000	12	3.500.000	12	3.500.000	60			
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	26.221.000	12	30.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	60			
2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	2	3.442.600	2	4.500.000	2	5.500.000	2	5.000.000	2	5.000.000	10			
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	0	0		33	90.125.000	9	445.000.000	33	61.000.000	0		75			
2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	1			
2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	3	230.000.000	0	0	0	0	3			
2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	20	15.000.000	0	0	20	20.000.000	0	0	40			
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	3	55.125.000	0	0	3	21.000.000	0	0	6			
2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	10	20.000.000	5	15.000.000	10	20.000.000	0	0	25			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	12	280.916.400	12	280.916.400	12	280.916.400	12	280.916.400	12	280.916.400	60			
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	280.916.400	12	280.916.400	12	280.916.400	12	280.916.400	12	280.916.400	60			
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	6	275.053.500	6	200.042.015	6	146.289.645	6	193.950.000	6	223.950.000	30			
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	11	1	39.950.000	1	35.000.000	1	39.950.000	1	39.950.000	1	39.950.000	5			
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	7	99.016.500	7	70.000.000	7	28.339.645	7	50.000.000	7	80.000.000	35			
2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	18	16	1.280.000	100	4.500.000	120	9.000.000	125	10.000.000	125	10.000.000	486			
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	34	34	24.140.000	41	20.000.000	41	18.000.000	43	30.000.000	45	30.000.000	204			
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	98.266.000	4	57.042.015	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	19			
2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	26	21	12.401.000	31	13.500.000	31	11.000.000	35	24.000.000	35	24.000.000	153			
2	Meningkatnya layanan dan akses arsip serta menjaga keberlanjutan arsip		Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	21,74	24,19		26,5		28,67		30,71		32,65		32,65			
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						185.902.100		445.150.000		185.903.000		188.840.000		191.823.000				
02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip sesuai Kaidah Kearsipan dengan Kategori Cukup	%	37,5	39,53	166.910.500	41,86	416.957.000	44,19	166.911.000	46,51	169.548.000	48,84	172.227.000	48,84	Bidang Kearsipan	Kabupaten Purworejo	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah sesuai Kaidah Kearsipan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola arsip sesuai Kaidah Kearsipan	Perangkat Daerah	15	17	46.774.500	19	194.000.000	21	86.911.000	24	106.911.000	27	106.911.000	27			
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	2	2	46.774.500	2	94.000.000	2	30.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Instansi	0	0	0	19	100.000.000	19	56.911.000	19	56.911.000	19	56.911.000	19			
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dikelola Lembaga Kearsipan Daerah	Arsip	303	100	47.379.000	100	100.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	500			
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	303	100	47.379.000	100	100.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	500			
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Kearsipan melalui JIKN pada Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menjadi kontributor JIKN	Perangkat Daerah	1	1	72.757.000	1	122.957.000	1	35.000.000	1	17.637.000	1	20.316.000	1			
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	1	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	2	10.000.000	3	10.000.000	3			
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	5	72.757.000	5	112.957.000	5	25.000.000	5	7.637.000	5	10.316.000	25			
02.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah	%	57,66	60,98	18.991.600	62,52	28.193.000	63,99	18.992.000	65,39	19.292.000	66,35	19.596.000	66,35	Bidang Kearsipan	Kabupaten Purworejo	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip oleh Perangkat Daerah	Jumlah Arsip yang Dimusnahkan oleh Perangkat Daerah	Arsip	923	0		300	9.193.000	400	5.000.000	500	5.000.000	600	5.000.000	1.800			
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	923	0	0	300	9.193.000	400	5.000.000	500	5.000.000	600	5.000.000	1.800			
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Terselamatkannya Arsip Vital dan Arsip Penting dari Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	Arsip	213	0		0		150	6.000.000	150	6.000.000	150	6.000.000	450			
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	213	0	0	0	0	150	3.000.000	150	3.000.000	150	3.000.000	450			
2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencama	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	213	0	0	0	0	150	3.000.000	150	3.000.000	150	3.000.000	450			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyelamatan Arsip dari Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Daftar	1	1	7.172.600	1	8.000.000	1	3.992.000	1	3.992.000	1	3.992.000	4			
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar	1	1	7.172.600	1	8.000.000	1	3.992.000	1	3.992.000	1	3.992.000	5			
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dilakukan Autentikasi	Arsip	754	100	11.819.000	100	11.000.000	100	4.000.000	100	4.300.000	100	4.604.000	500			
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	754	100	11.819.000	100	11.000.000	100	4.000.000	100	4.300.000	100	4.604.000	500			
Jumlah							**6.647.828.585**		**6.440.216.000**		**5.392.691.000**		**5.409.735.000**		**5.427.048.000**				

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Terwijudnya perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan dan Pendampingan akreditasi perpustakaan sekolah	
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarpras perpustakaan	
				Monitoring perpustakaan	
			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan perpustakaan menetap dan keliling	
			Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan perpustakaan umum (Kecamatan, Desa) sesuai SNP	
				Pembinaan perpustakaan khusus (ponpes, lembaga) sesuai Standar Nasional Perpustakan	
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek kearsipan	
				Rakor	
				Seminar/workshop	
				Pelatihan	
				Bedah buku	
			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Sosialisasi Sistem Informasi	
				Pengumpulan dan Penyusunan Data Perpustakaan	
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Pengadaan Bahan Pustaka/perpustakaan	
				Pengolahan Bahan Pustaka	
			Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Pemeliharaan aplikasi otomasi perpustakaan	
				Pemeliharaan aplikasi otomasi perpustakaan	
			Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemilihan dan pelantikan Duta Baca,Bunda Baca/Bunda Lierasi	
				Pendampingan Kegiatan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi	
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pelatihan keterampilan	
				Lomba	
			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan sarana Perpustakaan	
				Pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan	
			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Pemberian Penghargaan kepada pemustaka aktif dan Pegiat Literasi	
			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Safari/Roadshow perpustakaan	
				Pameran Perpustakaan	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
2	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlaksananya pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Sosialisasi Naskah Kuno	
			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Penelusuran naskah kuno	
				Pengalihmediaan Naskah kuno	
3	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten / Kota	Pembinaan dan pengawasan Kearsipan	
			Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Kearsipan Perangkat Daerah	
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Akuisisi Arsip Statis,	
				Pengelolaan Depot Arsip	
				Pendataan dan Penataan Arsip Statis	
				Pengolahan Arsip Statis	
				Penyediaan Sarana Prasarana Kearsipan	
			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Sosialisasi dan Rakor JIKN/SIKN	
				Bimtek JIKN/SIKN	
				Monev JIKN/SIKN	
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek Kearsipan	
				Rakor Kearsipan	
				Sosialisasi Kearsipan	
				Penyusunan Peraturan Bupati Kearsipan	
				Partisipasi Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi	
				Pameran Kearsipan	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan Arsip	
			Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Pendampingan, identifikasi dan Penyelamatan Arsip akibat bencana	
			Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Pendampingan Penyelamatan Arsip akibat bencana	
			Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah akibat perubahan SOTK	
			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Autentikasi Arsip	

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan mengalami kemajuan, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berpikir manusia. Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak akan bisa maju selama belum memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Kualitas hidup bangsa dapat meningkat jika ditunjang dengan sistem pendidikan yang mapan. Dengan sistem pendidikan yang mapan, memungkinkan kita berpikir kritis, kreatif, dan produktif. Hal ini sangat mendukung salah satu Program Unggulan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 yang disebut Pitulungan. Program Pitulungan disusun guna menyelesaikan berbagai permasalahan dan merespon berbagai isu strategis yang ada di Kabupaten Purworejo. Setiap program unggulan mencakup beberapa kegiatan unggulan yang mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Purworejo.

Program unggulan Pinter Bocahe merupakan program prioritas dibidang pendidikan. Di dalam program unggulan pinter bocahe terdapat beberapa kegiatan unggulan antara lain Pengembangan pusat pembelajaran masyarakat. Perpustakaan memiliki peran yang krusial sebagai pusat pembelajaran masyarakat. Hal ini karena perpustakaan menjadi sarana pendidikan informal dan pembelajaran sepanjang hayat bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu perpustakaan menyediakan akses gratis ke berbagai sumber pengetahuan, mulai dari buku cetak, jurnal ilmiah, hingga sumber daya digital seperti *e-book* dan internet. Sehingga dapat membantu masyarakat dari berbagai latar belakang untuk memperluas wawasan dan mendapatkan informasi yang relevan.

Bidang perpustakaan dalam melakukan pengembangan pusat pembelajaran masyarakat melalui aktivitas sebagai berikut :

1. Layanan Perpustakaan Menetap dan Keliling
   Layanan perpustakaan yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan sebagai modal dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Purworejo memiliki wilayah yang luas sehingga tidak memungkinkan masyarakat untuk datang ke perpustakaan. Layanan perpustakaan keliling merupakan salah satu solusi agar layanan perpustakaan dapat tersampaikan ke masyarakat terutama anak-anak guna menumbuhkembangkan minat baca mereka agar tumbuh budaya gemar membaca.
2. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
   Sumber daya manusia yang tangguh dibentuk masyarakat yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Penyediaan sumber informasi yang berkualitas dan up to date sangat dibutuhkan sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan.
3. Safari Perpustakaan
   Saat ini masyarakat belum semua mengerti dan memahami kemanfaatan perpustakaan. Guna meningkatkan kemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat dibutuhkan sosialisasi dan pengenalan layanan yang tersedia di perpustakaan.
4. Pelestarian Naskah Kuno
   Naskah kuno memiliki peran penting bagi generasi muda sebagai jendela pengetahuan tentang budaya, sejarah, dan nilai-nilai luhur nenek moyang. Melalui naskah kuno, generasi muda dapat memahami akar budaya mereka, belajar dari pengalaman masa lalu, dan mengapresiasi warisan intelektual bangsa.

5. Pelatihan Keterampilan Masyarakat/ Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
   Perpustakaan berbasis inklusi sosial menawarkan banyak manfaat bagi masyarakat terutama generasi muda yakni guna peningkatan literasi, akses informasi yang lebih luas, pengembangan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi yang pada akhirnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun kepercayaan diri, serta mengurangi kesenjangan akses informasi.

Dalam rangka mewujudkan program Bupati Purworejo khususnya kegiatan unggulan Sejahtera Wargane, bidang arsip mendukung kesejahteraan warga dalam hal mengakses arsip sejarah perjalanan pemerintahan Kabupaten Purworejo melalui layanan pemutaran film documenter di Office Theatre dan layanan penelusuran arsip statis di Depot Arsip Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip dalam hal penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, penyediaan sarana prasarana kearsipan yang sesuai dan ketersediaan sumber daya manusia kearsipan yang kompeten sesuai Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 yang menghasilkan nilai pengawasan kearsipan internal bagi pencipta arsip sebagai indikator tertib tidaknya pada pencipta arsip. Kearsipan yang dikelola secara baku sesuai kaidah kearsipan merupakan salah satu sumber informasi akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

Guna mendukung program unggulan Bupati Purworejo tersebut, bidang kearsipan melakukan aktivitas antara lain :

1. Pengawasan Kearsipan di Perangkat Daerah
   Rapat koordinasi Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT), audit dan monitoring serta gelar pengawasan kearsipan bagi pencipta arsip di lingkungan Kabupaten Purworejo
2. Penguatan Unit Kearsipan pada Perangkat Daerah
   Peningkatan kapasitas unit kearsipan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas penyelenggaraan kearsipan dinamis aktif dan dinamis inaktif dilingkungannya.
   Peningkatan kompetensi bagi SDM kearsipan melalui pemberdayaan kapasitas unit kearsipan pada perangkat daerah, rakor, sosialisasi, bimtek, pelatihan kearsipan.
3. Pengelolaan Arsip Statis
   Didalam aktifitas tersebut meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses layanan arsip statis (penggunaan arsip statis yang ada di LKD dan pemutaran film dokumenter).
4. Pengelolaan Depot Arsip
   Depot arsip merupakan bangunan yang dirancang secara khusus untuk menyimpan arsip statis sebagai bukti identitas dan jati diri Pemerintah Kabupaten Purworejo. Untuk menjamin keselamatan dan keawetan arsip statis dibutuhkan sarana prasarana yang sesuai standar.

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat dalam tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	78,5	78,8	79,24	79,54	79,75	80	Tujuan & Sasaran PD
2	Tingkat Gemar Membaca	Nilai	70,4	71,21	71,53	71,75	72,3	72,5	Tujuan & Sasaran PD
3	Nilai Hasil Pengawasan Kerasipan	Angka	75,9	76,00	76,15	76,5	76,75	76,9	Tujuan PD
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Tujuan PD
5	Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	21,74	24,19	26,5	28,67	30,71	32,65	Sasaran PD
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Sasaran PD

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	0,153	0,260	0,366	0,473	0,580	0,687	Bidang Perpustakaan	IUP
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	70,40	71,21	71,53	71,75	72,30	72,50	Bidang Perpustakaan	Permendagri No. 18 Tahun 2020
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	78,50	78,80	79,24	79,54	79,75	80,00	Bidang Perpustakaan	Permendagri No. 18 Tahun 2020
4	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	55,27	56,77	57,45	58,79	59,25	60,51	Bidang Kearsipan	Permendagri No. 18 Tahun 2020
5	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	76,01	76,85	77,13	77,93	78,25	78,97	Bidang Kearsipan	Permendagri No. 18 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa salah satu indikator kinerja kunci (IKK) yang harus dilaporkan oleh Pemerintah Daerah adalah IKK bidang perpustakaan yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Tingkat Gemar Membaca yang menjadi indikator kondisi hulu literasi masyarakat Indonesia. Sedangkan IKK bidang kearsipan yaitu Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nodqmor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi :

a. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo setiap tahun.
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi :

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
d. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Kabupaten Purworejo yang selama ini berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Selain sebagai sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat, sektor pertanian juga memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Purworejo mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi daerah, serta ketahanan pangan yang merupakan aspek fundamental dalam pembangunan daerah.

Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, rendahnya produktivitas, keterbatasan akses teknologi dan modal, serta dinamika pasar yang kurang kondusif. Kondisi tersebut menuntut adanya langkah-langkah strategis dan terencana guna mengatasi tantangan tersebut dan mendorong revitalisasi sektor pertanian sebagai basis ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo menjadi sangat penting. Renstra ini disusun sebagai pedoman perencanaan dan pengelolaan program serta kegiatan yang fokus pada peningkatan produktivitas, diversifikasi usaha tani, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan pangan. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu memberikan arah kebijakan yang jelas dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan sektor pertanian yang berdampak positif terhadap PDRB dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo secara keseluruhan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo merupakan kewajiban yang diatur secara jelas dalam berbagai regulasi perundang-undangan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Amanat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode tertentu.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah memberikan pedoman teknis dan sistematis mengenai substansi dan tahapan penyusunan Renstra. Regulasi ini mengharuskan perangkat daerah, termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo, untuk menyelaraskan Renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya, sehingga tercipta sinergi dan konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi landasan operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Nilai strategis Renstra terletak pada kemampuannya untuk menjadi pedoman utama dalam

menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan program serta kegiatan pembangunan sesuai dengan visi dan misi daerah.

Renstra berfungsi sebagai alat perencanaan yang memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, sehingga tercipta sinergi dan integrasi antar sektor. Selain itu, Renstra menjadi instrumen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran, sehingga mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal.

Lebih jauh, Renstra memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan strategis, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah kepada publik. Dengan adanya Renstra, perangkat daerah mampu mengantisipasi berbagai tantangan dan peluang pembangunan, merumuskan strategi adaptif, serta mengarahkan inovasi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, Renstra bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
24. Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dimaksudkan sebagai upaya untuk merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program kerja yang terintegrasi dan terarah dalam rangka meningkatkan kinerja sektor ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Purworejo, serta memberikan landasan perencanaan yang sistematis, konsisten, dan terukur untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan arah dan prioritas pembangunan sektor ketahanan pangan dan pertanian yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo.
2. Mengembangkan strategi dan program kerja yang efektif dan efisien dalam meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan nilai tambah produk pertanian serta ketahanan pangan.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian.
4. Menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan yang mendukung peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tiap tahunnya.
6. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dengan maksud dan tujuan tersebut, Renstra ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam pembangunan sektor ketahanan pangan

dan pertanian, serta mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PELAYANAN DAERAH

Memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis perangkat. Gambaran pelayanan perangkat daerah meliputi tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah serta kelompok sasaran layanan. Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah meliputi permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat telaah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, tujuan dan sasaran renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025-2029 serta strategi dan arah kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan, dukungan terhadap nasional, provinsi, dan kegiatan unggulan daerah, serta penentuan indikator dan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah menetapkan sejumlah indikator kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur capaian pembangunan sektor pangan dan pertanian. Berikut ini adalah gambaran umum pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah terkait:

1. Ketersediaan Pangan Utama

   Ketersediaan pangan utama, khususnya beras, merupakan indikator penting dalam menjamin ketahanan pangan di Kabupaten Purworejo. Untuk mengukur ketersediaan beras secara riil bagi masyarakat, dilakukan konversi produksi padi yang dihasilkan di tingkat daerah menjadi ketersediaan beras per kapita.

   Berdasarkan data hasil konversi produksi padi, diketahui bahwa rata-rata ketersediaan beras per kapita di Kabupaten Purworejo mengalami fluktuasi dalam periode empat tahun terakhir. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi cuaca, perubahan luas panen, teknologi pertanian yang diterapkan, serta dinamika pasar dan distribusi. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 dan stabilisasi pada 2024 setelah kenaikan di tahun 2022, ketersediaan beras per kapita di Kabupaten Purworejo masih menunjukkan angka yang relatif memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

   Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo terus berupaya meningkatkan produktivitas dan stabilitas produksi padi melalui berbagai program penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pengendalian ancaman organisme pengganggu tanaman, serta peningkatan kapasitas petani melalui penyuluhan. Dengan demikian, diharapkan ketersediaan beras akan semakin terjamin untuk mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

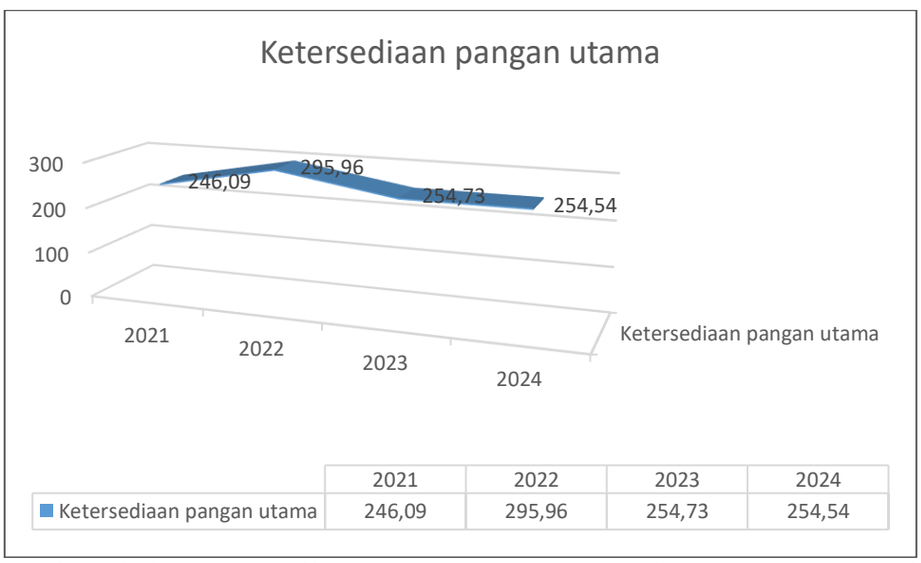

	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan pangan utama	246,09	295,96	254,73	254,54

Gambar 2.1. Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Purworejo

2. Persentase Kenaikan Produksi Pertanian

Kenaikan produksi pertanian merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan sektor pertanian di Kabupaten Purworejo. Data pertumbuhan produksi pertanian selama empat tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara umum positif. Perubahan tingkat kenaikan produksi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi iklim, ketersediaan sarana produksi, teknologi budidaya yang diterapkan, serta dukungan kebijakan dan program pemerintah daerah. Kenaikan produksi yang signifikan pada tahun 2023 menandakan efektivitas berbagai upaya peningkatan produktivitas yang dilakukan, termasuk peningkatan penyuluhan pertanian, penggunaan benih unggul, dan optimalisasi penggunaan input pertanian.

Meski terdapat fluktuasi pada tahun-tahun tertentu, secara keseluruhan tren kenaikan produksi pertanian di Kabupaten Purworejo menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui inovasi teknologi, pendampingan intensif kepada petani, serta perbaikan infrastruktur pertanian, guna memastikan peningkatan produksi yang berkelanjutan dan mendukung ketahanan pangan daerah

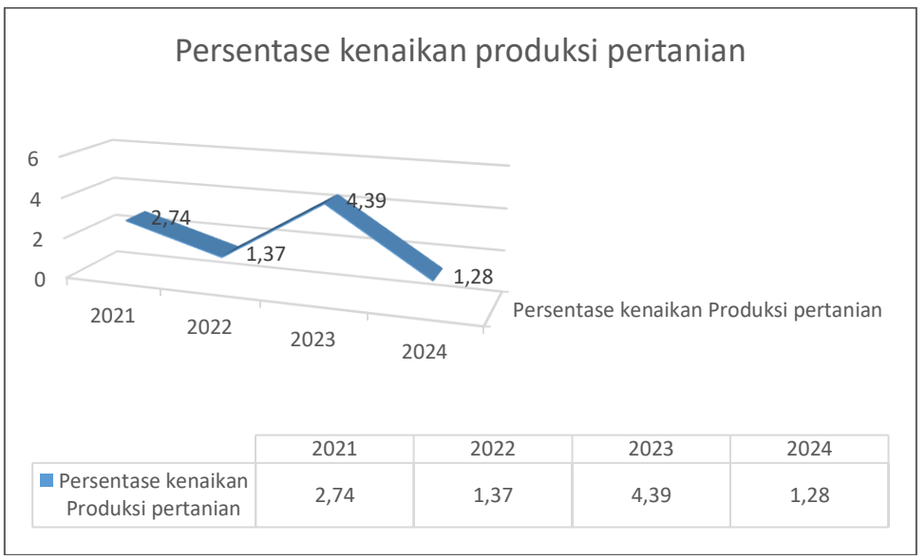

	2021	2022	2023	2024
Persentase kenaikan Produksi pertanian	2,74	1,37	4,39	1,28

Gambar 2.2. Persentase Kenaikan Produksi Pertanian

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Perangkat Daerah

Pelayanan publik yang prima menjadi komitmen utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), diperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Hasil IKM selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren membaik, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam hal kecepatan layanan, keterbukaan informasi, dan kemudahan akses terhadap layanan teknis, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.

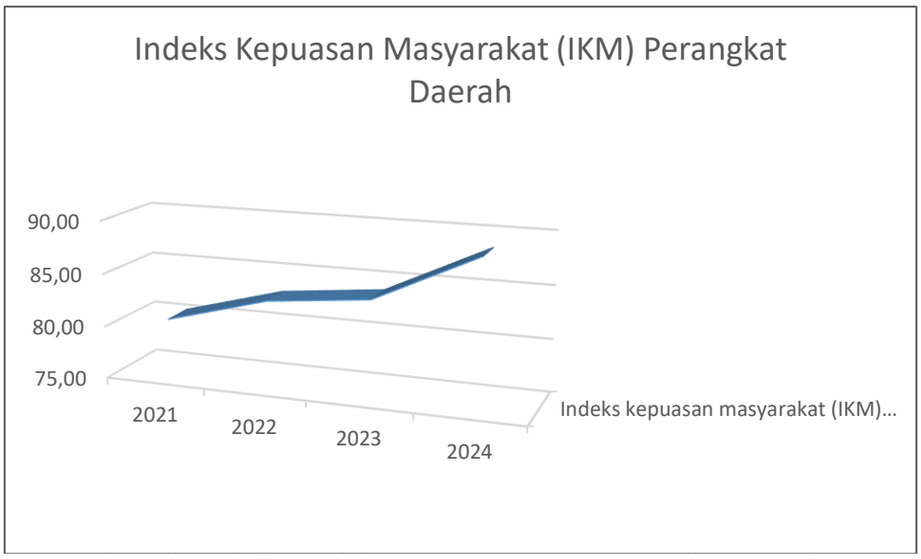

Gambar 2.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)

   Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo memiliki peran strategis dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah, khususnya cadangan beras, sebagai upaya menjaga stabilitas ketersediaan pangan dan mengantisipasi situasi darurat atau gangguan pasokan pangan.

   Pengadaan cadangan pangan dilakukan melalui pembelian gabah dari petani lokal yang kemudian diproses dan disimpan dalam gudang khusus milik pemerintah daerah. Beras cadangan ini dikelola secara terencana dan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan, baik untuk distribusi dalam penanganan kerawanan pangan maupun untuk menjaga stabilitas harga di pasar lokal.

   Persentase ketersediaan cadangan pangan beras dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah beras cadangan yang tersedia di gudang dengan jumlah cadangan pangan beras yang menjadi kewajiban penyediaan pemerintah Kabupaten Purworejo. Data persentase ini menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis.

   Perlu dicermati bahwa ketersediaan cadangan pangan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh tidak dilakukannya pengadaan cadangan pangan setiap tahun, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan anggaran, kondisi produksi pertanian, dan kebutuhan strategis daerah. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus melakukan perencanaan dan pengelolaan cadangan pangan secara hati-hati untuk memastikan ketersediaan beras yang cukup saat dibutuhkan.

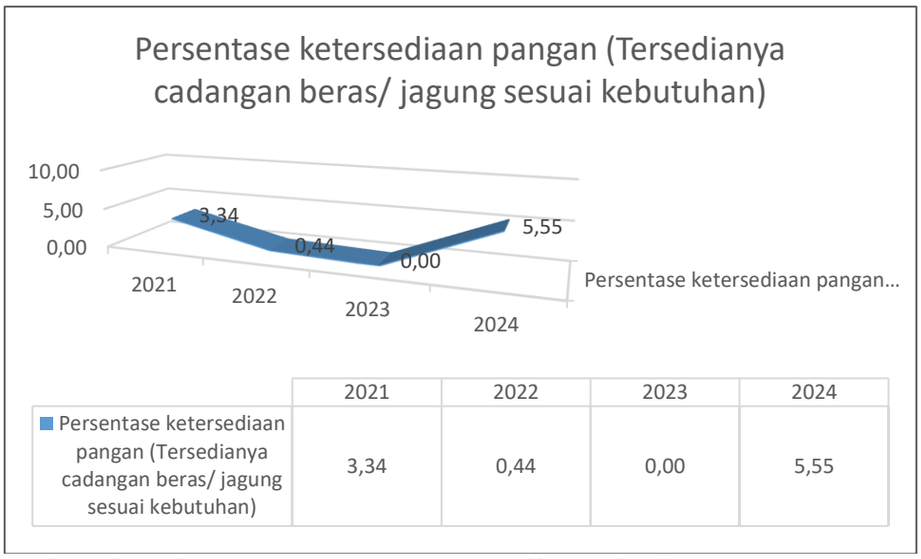

	2021	2022	2023	2024
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	3,34	0,44	0,00	5,55

Gambar 2.4. Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan

5. Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun
   Produktivitas lahan menjadi indikator penting untuk mengukur efisiensi usaha tani. Dinas telah memberikan layanan berupa bimbingan teknis melalui penyuluhan, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Hasilnya menunjukkan perbaikan produktivitas pada beberapa komoditas, meskipun peningkatan tersebut belum optimal di seluruh wilayah karena masih adanya keterbatasan sarana produksi dan perubahan iklim yang memengaruhi hasil panen. Pelayanan ke depan diarahkan pada intensifikasi pertanian ramah lingkungan dan adopsi pertanian presisi.

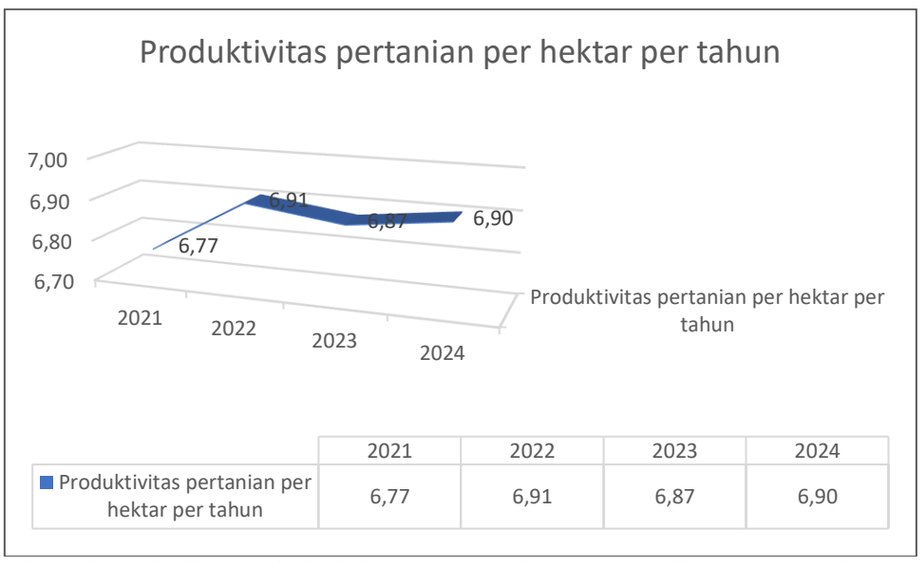

	2021	2022	2023	2024
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,77	6,91	6,87	6,90

Gambar 2.5. Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun

6. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular
   Dalam rangka menjamin keamanan pangan asal ternak dan melindungi populasi hewan ternak di daerah, Dinas memberikan layanan pengawasan dan pengendalian penyakit hewan menular, termasuk vaksinasi, pemeriksaan kesehatan hewan, serta respon cepat terhadap laporan penyakit. Upaya ini telah menunjukkan dampak positif dengan menurunnya tren kejadian penyakit seperti PMK (Penyakit Mulut dan

Kuku). Keberhasilan ini tidak lepas dari peningkatan koordinasi dengan peternak, dokter hewan, dan aparatur desa, serta layanan kesehatan hewan yang semakin responsif. Namun, kesiapsiagaan perlu terus ditingkatkan mengingat potensi ancaman penyakit hewan bersifat dinamis dan lintas wilayah.

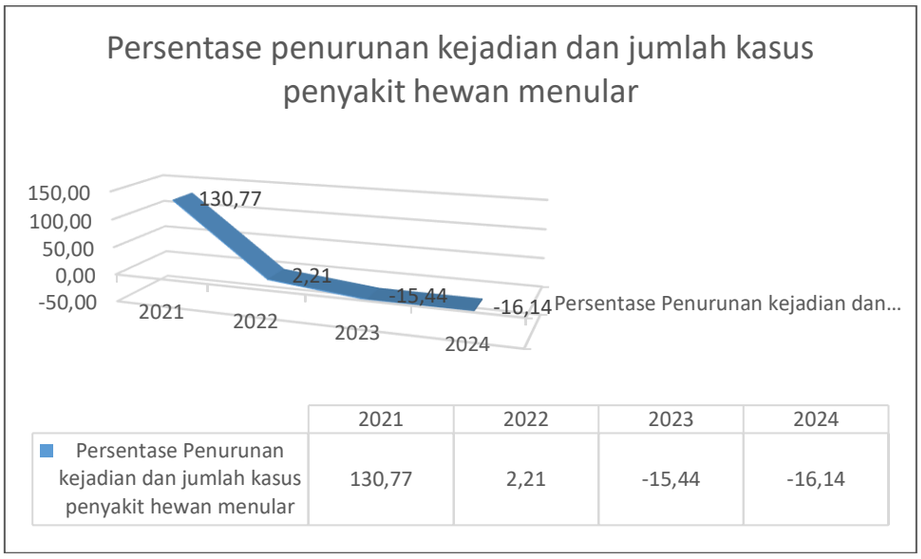

	2021	2022	2023	2024
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	130,77	2,21	-15,44	-16,14

Gambar 2.6. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

Secara umum, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo menunjukkan kemajuan dalam berbagai aspek strategis. Namun, untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di sektor pangan dan pertanian, diperlukan peningkatan efektivitas pelayanan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan sinergi antarstakeholder, guna memastikan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada hasil.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi berpedoman kepada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 124 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 124 Seri D Nomor 9).

1. Tugas
   DKPP bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian sesuai dengan kewenangan Daerah.
2. Fungsi
   DKPP dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
   a. Perumusan kebijakan bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;
   b. Pelaksanaan kebijakan bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi

3. Struktur Organisasi
Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo terdiri atas:
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.
b. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Sekretariat bertugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- penggoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- penggoordinasian pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
- pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- pengoordinasian enyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:
- Subbagian Perencanaan;
- Subbagian Keuangan; dan
- Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
c. Bidang Pangan
Bidang Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Bidang Pangan bertugas mengelola sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, menangani kerawanan pangan dan mengawasi keamanan pangan.
Bidang Pangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan;
- penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan;

- penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- penanganan kerawanan pangan kewenangan;
- pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Pangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

d. Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian

Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian bertugas menyediakan dan mengembangkan sarana pertanian dan melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- peningkatan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan;
- pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan dan mikro organisme;
- penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu Daerah kabupaten/ kota lain;
- pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner bertugas melaksanakan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;

- pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

f. Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian

Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian bertugas menyediakan dan mengembangkan prasarana pertanian, melaksanakan penyuluhan pertanian, dan menerbitkan perizinan usaha pertanian.

Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- pengembangan prasarana pertanian;
- pembangunan prasarana pertanian;
- pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak;
- pengembangan lahan penggembalaan umum;
- pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam wilayah daerah;
- penerbitan izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan, rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan;
- izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi

Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

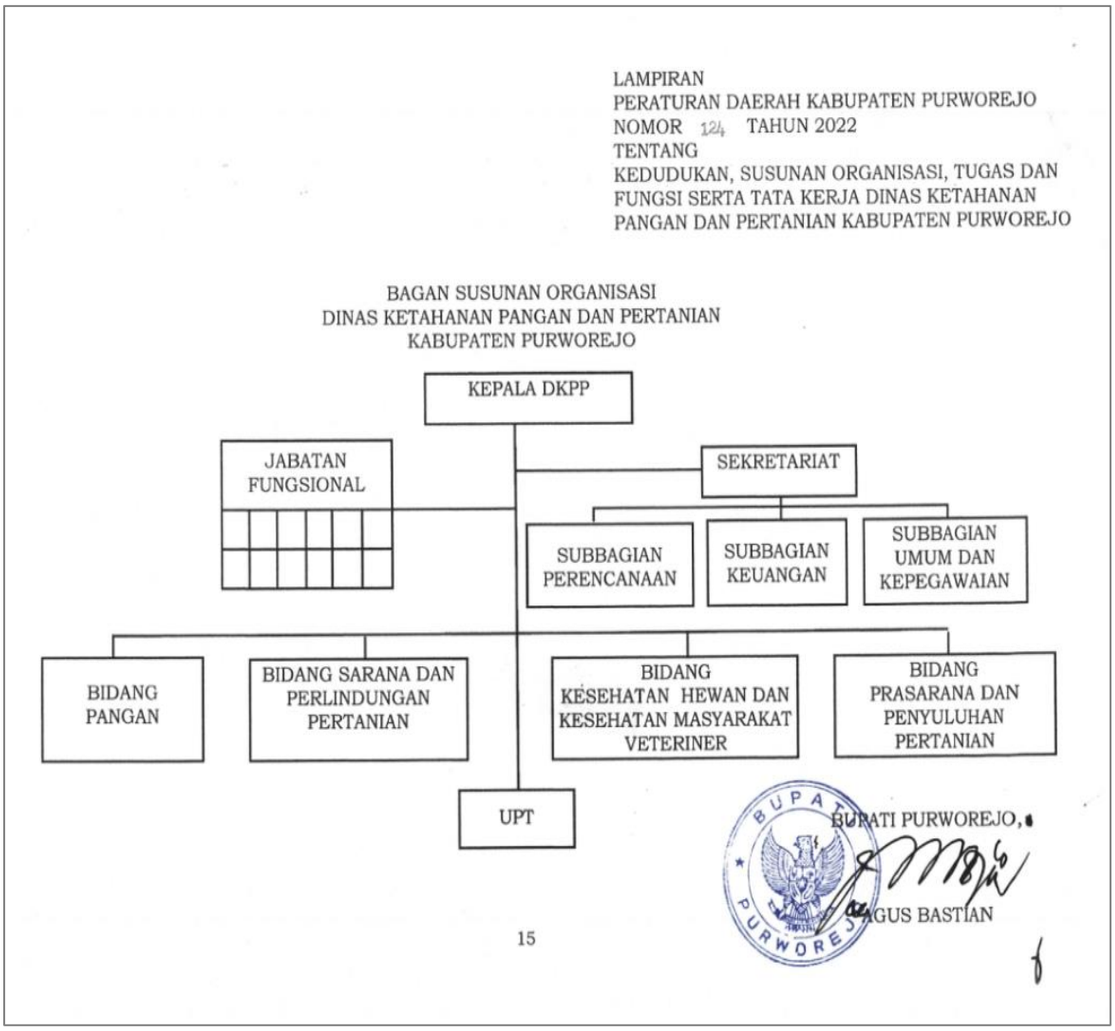

Gambar 2.7. Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Berdasarkan data terkini, jumlah pegawai sebanyak 199 orang, dengan komposisi tingkat pendidikan yang cukup beragam.

Berdasarkan tingkat pendidikan formal, tidak terdapat pegawai yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD), yang menunjukkan bahwa seluruh pegawai telah memiliki jenjang menengah atau lebih tinggi. Pegawai dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 50 orang, sementara yang berlatar belakang pendidikan Diploma III (D-III) sebanyak 21 orang.

Selanjutnya, pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV) merupakan kelompok terbanyak, yaitu 105 orang, yang mencerminkan kapasitas intelektual dan kompetensi yang cukup kuat dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis maupun administratif. Sementara itu, sebanyak 22 orang pegawai telah menempuh pendidikan hingga jenjang Strata 2 (S2), yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam inovasi kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor ketahanan pangan dan pertanian.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah didukung oleh

sumber daya manusia dengan kualifikasi pendidikan yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi strategis kelembagaan, serta mampu menjawab tantangan dan dinamika pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

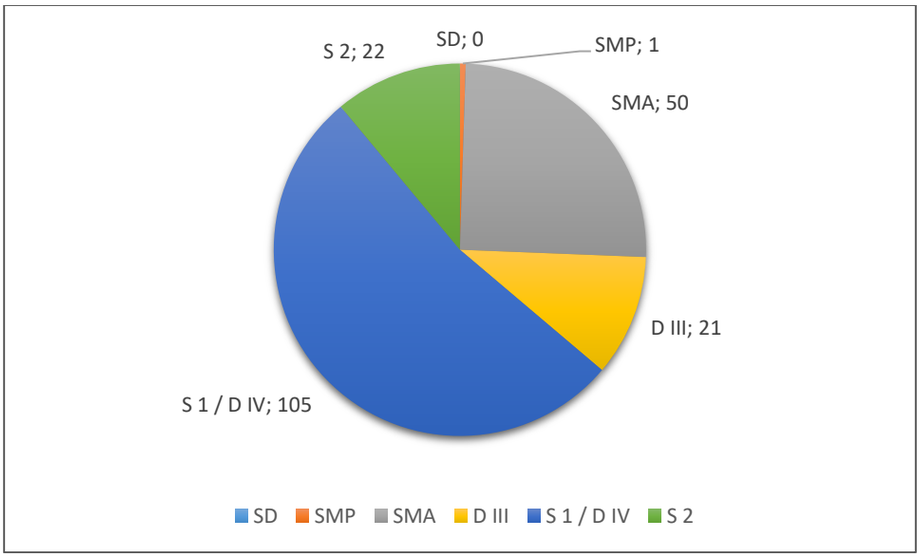

Gambar 2.8. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah menetapkan beberapa indikator kinerja utama yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator tersebut meliputi Skor Pola Pangan Harapan, Ketersediaan Pangan Utama, Persentase Kenaikan Produksi Pertanian, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berikut ini adalah penjelasan capaian kinerja berdasarkan target Renstra dan realisasi capaian dari tahun 2021 hingga 2024:

1. Skor Pola Pangan Harapan
   Target capaian skor Pola Pangan Harapan yang ditetapkan mulai tahun 2021 sebesar 85,89 dan bertambah secara bertahap hingga mencapai target 89,92 pada tahun 2026. Realisasi capaian dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan hasil yang memuaskan dengan angka capaian 85,89 pada tahun 2021, meningkat menjadi 88,50 pada tahun 2022, 89,40 pada tahun 2023, dan 90,40 pada tahun 2024. Rasio capaian terhadap target Renstra bahkan mencapai 100% pada tahun 2021 dan meningkat di atas 100% pada tahun-tahun berikutnya, yang menandakan Dinas berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.
2. Ketersediaan Pangan Utama
   Indikator ketersediaan pangan utama, yang diukur dalam kilogram beras per kapita, menunjukkan tren yang cukup stabil dengan target meningkat dari 246,09 kg pada tahun 2021 menjadi 252,00 kg pada tahun 2026. Realisasi capaian ketersediaan beras per kapita pada tahun 2021 tercatat sesuai target yaitu 246,09 kg, meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 295,96 kg, kemudian menurun sedikit pada tahun 2023 menjadi 254,73 kg dan relatif stabil pada tahun 2024 dengan 254,54 kg. Rasio capaian terhadap target Renstra pada indikator ini mencapai 100% pada tahun 2021, kemudian melonjak hingga 119,34% pada tahun 2022, dan tetap di atas 100% pada tahun-tahun berikutnya, menunjukkan keberhasilan daerah dalam menjaga ketersediaan pangan utama melebihi target yang ditetapkan.

3. Persentase Kenaikan Produksi Pertanian
   Target kenaikan produksi pertanian disepakati sebesar 1,25% setiap tahunnya dari 2021 hingga 2026. Namun realisasi kenaikan produksi menunjukkan capaian yang jauh melampaui target tersebut, dengan angka kenaikan sebesar 2,74% pada tahun 2021, 1,37% pada tahun 2022, 4,39% pada tahun 2023, dan 1,28% pada tahun 2024. Rasio capaian terhadap target Renstra pada indikator ini sangat tinggi, mencapai 219,20% pada tahun 2021, 109,60% pada tahun 2022, dan bahkan mencapai 351,20% pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan produksi yang signifikan di atas ekspektasi.
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah
   Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas ditargetkan meningkat secara bertahap dari 80,37 pada tahun 2021 menjadi 83,00 pada tahun 2026. Realisasi capaian menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dengan IKM sebesar 80,37 pada tahun 2021, meningkat menjadi 83,00 pada tahun 2022, 84,00 pada tahun 2023, dan mencapai 88,66 pada tahun 2024. Rasio capaian IKM terhadap target Renstra berada pada angka 100% di tahun 2021 dan meningkat menjadi 109,46% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas semakin diterima dengan baik dan memuaskan masyarakat.
5. Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
   Indikator ini menunjukkan konsistensi sempurna, dengan capaian 100% setiap tahunnya sejak 2021 hingga 2024, menunjukkan bahwa seluruh kewajiban dukungan terhadap fungsi pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.
6. Persentase Infrastruktur yang Disediakan
   Indikator ini menunjukkan peningkatan yang tajam dari 0% pada 2021 menjadi 60% pada 2022 dan 2023, dengan pencapaian sesuai target di tahun 2024 (60%). Rasio pencapaian sempat sangat tinggi (300%) karena target awal yang masih rendah, namun telah normal pada 2024 (100%).
7. Persentase Ketersediaan Pangan Utama
   Pengukuran capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan beras daerah dengan kebutuhan konsumsi beras masyarakat, yang diperoleh melalui data hasil survei konsumsi rumah tangga. Pencapaian indikator ini jauh melebihi target setiap tahunnya, dengan capaian tahun 2024 mencapai 286,64%.
   Indikator Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Purworejo menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten melebihi target. Hal ini tidak lepas dari peran strategis Kabupaten Purworejo sebagai daerah sentra produksi beras di Jawa Tengah, yang ditunjang oleh faktor sumber daya alam, kebijakan yang berpihak pada petani, serta peran aktif masyarakat tani dalam menjaga produktivitas lahan. Dengan demikian, indikator ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam menjamin ketersediaan pangan pokok masyarakat secara berkelanjutan.
8. Penanganan Daerah Rawan/Rentan Pangan
   Kinerja sangat positif dengan pencapaian tahun 2024 mencapai 21,13%, jauh melebihi target 9,86% (rasio pencapaian 214,27%). Jumlah desa rentan rawan pangan yang berhasil diintervensi melalui pelatihan pemanfaatan pekarangan menunjukkan capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat desa,

sekaligus menjadi indikator positif terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya lokal.

Namun demikian, perlu disadari bahwa pelatihan saja tidak cukup untuk secara menyeluruh mengentaskan desa dari status kerentanan pangan. Permasalahan ketahanan pangan bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan yang terpadu lintas sektor. Diperlukan dukungan yang sinergis dari berbagai pihak, baik dari sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur dan kelembagaan, agar intervensi yang dilakukan dapat berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.

Dengan kolaborasi yang kuat antar sektor serta penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan, diharapkan desa rentan rawan pangan dapat bertransformasi menjadi desa yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

9. Persentase Pangan Segar Aman

   Capaian indikator ini sempurna selama empat tahun berturut-turut (100%). Artinya, seluruh pangan segar yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan, berkat pengawasan yang efektif dan edukasi terhadap pelaku usaha pangan.

10. Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani

    Target terus meningkat setiap tahun. Pada 2024, capaian mencapai 143,03%, melebihi target 60%. Hal ini menunjukkan program penyediaan alat dan bahan pertanian berjalan efektif untuk mendukung produktivitas petani.

11. Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani

    Capaian tahun 2024 sebesar 81,85%, melebihi target 60% (rasio 136,42%). Ini menunjukkan pembangunan dan rehabilitasi sarana pertanian (jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi tersier) semakin baik dan berkontribusi terhadap peningkatan hasil pertanian.

12. Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular

    Indikator ini memiliki dinamika yang cukup kompleks. Tahun 2022 terjadi lonjakan kasus (capaian hanya 2,21 terhadap target penurunan -12), namun pada 2023 dan 2024 mulai terkendali, dengan capaian -15,44 dan -16,14, hampir mendekati target penurunan -16. Rasio pencapaian tahun 2024 adalah 100,86%, menandakan bahwa program pengendalian penyakit hewan seperti vaksinasi dan biosekuriti mulai menunjukkan hasil positif.

13. Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

    Capaian indikator ini sempurna dari tahun 2021 hingga 2024 (100%), menunjukkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.

14. Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian

    Rasio capaian konsisten di angka 100%, artinya seluruh permohonan izin usaha pertanian yang diajukan telah difasilitasi, mendukung pengembangan agribisnis dan legalitas usaha tani.

15. Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial

    Capaian konsisten setiap tahun sesuai target bertahap, yakni 20%, 40%, dan 60% pada tahun 2022–2024. Capaian rasio juga mencapai 100%, menandakan keberhasilan program regenerasi petani melalui pelibatan generasi muda dalam bidang pertanian modern dan digital.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sangat baik dan progresif, dengan mayoritas indikator melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini mencerminkan bahwa program-program strategis dinas telah

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Beberapa indikator bahkan menunjukkan lonjakan capaian yang signifikan, terutama dalam hal ketersediaan pangan, penanganan daerah rawan pangan, serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan pada indikator yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti penyakit hewan menular dan fluktuasi produksi pertanian, yang perlu terus dimitigasi melalui inovasi kebijakan, peningkatan sinergi antar sektor, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern.

Capaian ini juga menunjukkan bahwa Dinas telah berkontribusi signifikan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan nasional, khususnya dalam hal ketahanan pangan, kemandirian petani, dan pemberdayaan generasi muda di sektor pertanian. Pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tersaji pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1	Skor pola pangan harapan				85,89	87,83	88,88	89,72	89,82	89,92	85,89	88,50	89,40	90,40			100,00	100,76	100,59	100,76		
2	Ketersediaan pangan utama				246,09	248,00	249,00	250,00	251,00	252,00	246,09	295,96	254,73	254,54			100,00	119,34	102,30	101,82		
3	Persentase kenaikan Produksi pertanian				1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	2,74	1,37	4,39	1,28			219,20	109,60	351,20	102,67		
4	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				80,37	80,50	80,55	81,00	82,00	83,00	80,37	83,00	84,00	88,66			100,00	103,11	104,28	109,46		
5	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00		
6	Persentase Infrastruktur yang Disediakan				-	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	-	60,00	60,00	60,00			#DIV/0!	300,00	150,00	100,00		
7	Persentase Ketersediaan Pangan Utama				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	308,65	272,87	286,87	286,64			308,65	272,87	286,87	286,64		
8	Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/ Rentan Pangan				1,40	2,11	4,93	9,86	14,79	19,72	1,40	5,63	19,72	21,13			100,00	266,82	399,97	214,27		
9	Persentase Pangan Segar Aman				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00		
10	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani				-	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	-	35,15	89,90	143,03			#DIV/0!	175,76	224,75	238,38		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
11	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani				-	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	-	25,19	54,07	81,85			#DIV/0!	125,93	135,18	136,42		
12	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular				-	- 12,00	- 14,00	- 16,00	- 19,00	- 23,00	130,77	2,21	- 15,44	- 16,14			#DIV/0!	-18,39	110,27	100,86		
13	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00		
14	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00		
15	Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial				-	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	-	20,00	40,00	60,00			#DIV/0!	100,00	100,00	100,00		

Secara umum, realisasi pendanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tertentu telah melampaui target anggaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan upaya maksimal dari dinas dalam mengoptimalkan sumber daya anggaran guna mendukung program-program ketahanan pangan dan pertanian di daerah.

Namun, jika dicermati lebih lanjut secara terperinci, terdapat ketidaksesuaian antara realisasi anggaran pada masing-masing program atau kegiatan dengan anggaran yang telah direncanakan dalam Renstra. Beberapa kegiatan menunjukkan realisasi anggaran yang melebihi target, sementara sebagian lainnya justru mengalami kekurangan alokasi atau tidak terealisasi sesuai rencana. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Perubahan prioritas kebijakan di tingkat daerah maupun nasional,
2. Penyesuaian alokasi anggaran akibat keterbatasan fiskal,
3. Hambatan teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan,
4. Perubahan kondisi di lapangan yang memengaruhi pelaksanaan program.

Oleh karena itu, meskipun secara agregat total realisasi pendanaan pelayanan sudah melampaui target Renstra, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap pencapaian di tingkat program dan kegiatan. Hal ini penting agar ke depan penyusunan anggaran dapat lebih tepat sasaran, selaras dengan perencanaan strategis, serta mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di sektor ketahanan pangan dan pertanian. Realisasi anggaran selama periode renstra 2021-2026 seperti tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
URUSAN PANGAN		15.870.892.570	15.360.665.043	15.225.872.128	15.940.942.375	16.072.483.661	-	18.224.267.411	15.826.963.037	18.996.195.984	22.458.077.863	-		114,83	103,04	124,76	140,88	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		13.055.892.570	13.602.665.043	14.949.872.128	15.434.942.375	15.545.483.661	-	15.723.312.607	15.606.379.237	18.717.501.584	20.120.625.763	-		120,43	114,73	125,20	130,36	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		107.600.000	112.300.000	123.500.000	126.800.000	127.400.000	-	144.326.400	135.103.400	102.441.900	49.685.300	-		134,13	120,31	82,95	39,18	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		20.000.000	20.900.000	29.300.000	30.000.000	30.100.000		*23.826.400*	27.445.000	30.610.000	23.852.600			119,13	131,32	104,47	79,51	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.100.000	1.100.000					1.500.000						136,36	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.400.000	1.500.000					1.500.000						107,14	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1.400.000	1.500.000					2.000.000						142,86	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1.400.000	1.500.000					2.000.000						142,86	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7.400.000	7.800.000	8.500.000	8.800.000	8.800.000		*13.500.000*	19.186.400	1.284.800				182,43	245,98	15,12	0,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		74.900.000	78.000.000	85.700.000	88.000.000	88.500.000		100.000.000	88.472.000	70.547.100	25.832.700			133,51	113,43	82,32	29,36	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12.280.592.570	12.629.765.043	13.977.072.128	14.358.542.375	14.434.083.661	-	14.572.378.691	14.612.760.437	17.704.411.861	19.226.323.113	-		118,66	115,70	126,67	133,90	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12.268.492.570	12.617.165.043	13.963.172.128	14.344.242.375	14.419.783.661		14.556.012.091	14.597.113.437	17.688.764.861	19.218.500.013			118,65	115,69	126,68	133,98	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		700.000	700.000	800.000	800.000	800.000		1.036.000	1.000.000	1.000.000	500.000			148,00	142,86	125,00	62,50	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		11.400.000	11.900.000	13.100.000	13.500.000	13.500.000		15.330.600	14.647.000	14.647.000	7.323.100			134,48	123,08	111,81	54,25	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		700.000	700.000	800.000	800.000	800.000	-	1.000.000	709.000	-	-	-		142,86	101,29	0,00	0,00	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		700.000	700.000	800.000	800.000	800.000		1.000.000	709.000					142,86	101,29	0,00	0,00	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		700.000	800.000	800.000	900.000	900.000	-	1.033.000	1.027.000	1.026.800	513.200	-		147,57	128,38	128,35	57,02	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		700.000	800.000	800.000	900.000	900.000		1.033.000	1.027.000	1.026.800	513.200			147,57	128,38	128,35	57,02	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10.400.000	45.800.000	46.900.000	47.200.000	47.300.000	-	54.092.600	25.872.000	-	460.000	-		520,12	56,49	0,00	0,97	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		700.000	700.000	800.000	800.000	800.000		1.000.000	710.000		460.000			142,86	101,43	0,00	57,50	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		9.700.000	10.100.000	11.100.000	11.400.000	11.500.000		53.092.600	9.294.000					547,35	92,02	0,00	0,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000			15.868.000					#DIV/0!	79,34	0,00	0,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000								#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		297.500.000	309.800.000	340.600.000	349.900.000	351.600.000	-	395.902.700	381.742.000	346.586.200	291.392.300	-		133,08	123,22	101,76	83,28	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.700.000	3.900.000	4.200.000	4.400.000	4.400.000		5.000.000	4.023.000	4.031.700	5.513.800			135,14	103,15	95,99	125,31	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		2.600.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.499.800	2.792.000	2.782.400	3.603.000			134,61	103,41	92,75	120,10	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		132.700.000	138.300.000	152.000.000	156.000.000	157.000.000		156.273.600	188.179.800	202.025.600	203.591.300			117,76	136,07	132,91	130,51	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		6.100.000	6.300.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000		11.601.900	15.273.300	9.300.600	8.400.000			190,20	242,43	132,87	118,31	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2.300.000	2.400.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000		3.092.000	2.400.000					134,43	100,00	0,00	0,00	
Penyediaan Bahan/Material		5.900.000	6.200.000	6.800.000	7.000.000	7.000.000		7.999.400	7.180.000	6.814.900	3.380.000			135,58	115,81	100,22	48,29	
Fasilitasi Kunjungan Tamu		2.600.000	2.700.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000		13.260.000	3.750.000	3.000.000	1.800.000			510,00	138,89	100,00	58,06	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		137.600.000	143.300.000	157.500.000	161.800.000	162.600.000		183.651.000	153.600.400	105.131.000	52.081.200			133,47	107,19	66,75	32,19	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		4.000.000	4.000.000	4.500.000	4.800.000	4.600.000		11.525.000	4.543.500	13.500.000	13.023.000			288,13	113,59	300,00	271,31	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	130.000.000	50.000.000	100.000.000	130.000.000	-	74.854.800	-	58.282.600	-	-		#DIV/0!	0,00	116,57	0,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			50.000.000											#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pengadaan Mebel				50.000.000										#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000					58.282.600				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000	50.000.000		74.854.800						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			80.000.000			80.000.000								#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		196.800.000	205.100.000	225.300.000	215.500.000	216.600.000	-	264.392.816	240.944.600	248.742.223	232.708.250	-		134,35	117,48	110,40	107,99	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		13.600.000	14.200.000	15.600.000				18.317.668						134,69	0,00	0,00	#DIV/0!	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		78.700.000	82.000.000	90.000.000	92.500.000	93.000.000		105.100.000	85.400.600	90.850.975	88.075.250			133,55	104,15	100,95	95,22	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		104.500.000	108.900.000	119.700.000	123.000.000	123.600.000		140.975.148	155.544.000	157.891.248	144.633.000			134,90	142,83	131,91	117,59	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		161.600.000	168.400.000	184.900.000	235.300.000	236.800.000	-	215.331.600	208.220.800	256.010.000	319.543.600	-		133,25	123,65	138,46	135,80	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					45.000.000	45.000.000					43.960.000			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97,69	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		113.300.000	118.100.000	129.800.000	133.300.000	134.000.000		151.360.000	146.448.200	163.890.000	196.320.000			133,59	124,00	126,26	147,28	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9.000.000	9.400.000	10.300.000	10.600.000	10.600.000		12.056.000	12.000.000	12.050.000	17.320.000			133,96	127,66	116,99	163,40	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		34.900.000	36.400.000	40.000.000	41.000.000	41.300.000		46.720.000	38.777.600	72.660.000	51.900.000			133,87	106,53	181,65	126,59	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.500.000	2.600.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000		3.376.000	9.170.000	5.490.000	8.540.000			135,04	352,69	196,07	294,48	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000		*1.819.600*	1.825.000	1.920.000	1.503.600			95,77	96,05	96,00	60,14	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		2.500.000.000	1.500.000.000	-	-	-	-	2.151.000.000	-	-	1.019.576.000	-		86,04	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		2.500.000.000	1.500.000.000	-	-	-	-	2.151.000.000	-	-	1.019.576.000	-		86,04	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyediaan infrastruktur lumbung pangan		2.500.000.000	1.500.000.000					2.151.000.000						86,04	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				1.500.000.000	1.500.000.000	1.275.000.000					1.019.576.000			#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	67,97	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		180.000.000	161.000.000	168.000.000	400.000.000	415.000.000	-	244.415.304	139.743.800	132.574.800	1.231.619.700	-		135,79	86,80	78,91	307,90	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		105.000.000	97.000.000	110.000.000	142.000.000	127.000.000	-	111.561.136	45.092.000	80.457.800	67.963.900	-		106,25	46,49	73,14	47,86	
Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan		35.000.000	37.000.000					30.708.068	24.679.000					87,74	66,70	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan				25.000.000	25.000.000	25.000.000				27.223.000	10.708.000			#DIV/0!	#DIV/0!	108,89	42,83	
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				35.000.000	35.000.000	40.000.000				24.350.000	12.251.300			#DIV/0!	#DIV/0!	69,57	35,00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		70.000.000	50.000.000	50.000.000	82.000.000	57.000.000		69.251.268	20.413.000	28.884.800	45.004.600			98,93	40,83	57,77	54,88	
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia			10.000.000			5.000.000		11.601.800						#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					200.000.000	200.000.000	-	-	-	-	1.145.555.800	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	572,78	
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					200.000.000	200.000.000					1.145.555.800			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	572,78	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		75.000.000	64.000.000	58.000.000	58.000.000	88.000.000	-	132.854.168	94.651.800	52.117.000	18.100.000	-		177,14	147,89	89,86	31,21	
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		5.625.000	8.000.000					70,31	100,00	0,00	0,00	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		67.000.000	56.000.000	50.000.000	50.000.000	80.000.000		127.229.168	86.651.800	52.117.000	18.100.000			189,89	154,74	104,23	36,20	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		22.000.000	16.000.000	19.000.000	14.000.000	20.000.000	-	19.000.000	30.244.000	106.794.000	61.464.900	-		86,36	189,03	562,07	439,04	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan		11.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	7.410.500	-		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		11.000.000		5.000.000		5.000.000					7.410.500			0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		11.000.000	16.000.000	14.000.000	14.000.000	15.000.000	-	19.000.000	30.244.000	106.794.000	54.054.400	-		172,73	189,03	762,81	386,10	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		11.000.000	16.000.000	14.000.000	14.000.000	15.000.000		19.000.000	30.244.000	106.794.000	54.054.400			172,73	189,03	762,81	386,10	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		113.000.000	81.000.000	89.000.000	92.000.000	92.000.000	-	86.539.500	50.596.000	39.325.600	24.791.500	-		76,58	62,46	44,19	26,95	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		113.000.000	81.000.000	89.000.000	92.000.000	92.000.000	-	86.539.500	50.596.000	39.325.600	24.791.500	-		76,58	62,46	44,19	26,95	
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		20.000.000	20.000.000					17.625.000	15.372.000					88,13	76,86	#DIV/0!	#DIV/0!	
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				25.000.000	27.000.000	27.000.000				15.372.000	7.501.900			#DIV/0!	#DIV/0!	61,49	27,78	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		55.000.000	23.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000		35.199.600	10.624.000	10.624.000	4.675.700			64,00	46,19	42,50	18,70	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		38.000.000	38.000.000					33.714.900	24.600.000					88,72	64,74	#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				39.000.000	40.000.000	40.000.000				13.329.600	12.613.900			#DIV/0!	#DIV/0!	34,18	31,53	
URUSAN PERTANIAN		19.194.623.000	16.320.405.000	13.605.000.000	15.740.350.000	15.902.000.000	-	16.087.238.683	17.003.766.300	19.491.816.650	17.521.385.995	-		83,81	104,19	143,27	111,32	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		9.420.973.000	8.646.405.000	6.230.000.000	6.200.000.000	6.200.000.000	-	5.280.069.583	6.986.978.100	7.577.713.550	8.158.794.875	-		56,05	80,81	121,63	131,59	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		2.000.000.000	2.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	-	3.612.084.283	4.506.371.800	4.401.596.650	4.851.803.800	-		180,60	225,32	125,76	138,62	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		1.000.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000		1.714.843.483	3.955.416.500	4.013.172.650	4.525.923.800			171,48	395,54	160,53	181,04	
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		1.897.240.800	550.955.300	388.424.000	325.880.000			189,72	55,10	38,84	32,59	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		1.649.136.000	849.568.000	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	-	1.667.985.300	2.480.606.300	3.176.116.900	3.306.991.075	-		101,14	291,98	117,63	122,48	
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				200.000.000	200.000.000	200.000.000		7.472.000		494.288.700	418.147.500			#DIV/0!	#DIV/0!	247,14	209,07	
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		1.649.136.000	849.568.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000		1.660.513.300	2.480.606.300	2.681.828.200	2.888.843.575			100,69	291,98	107,27	115,55	
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijaun Pakan Ternak dalam daerah kabupaten/Kota			25.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak			25.000.000	30.000.000										#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Lainnya		5.771.837.000	5.771.837.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		5.771.837.000	5.771.837.000											0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		-	-	7.180.874.000	7.180.874.000	7.180.874.000	-	5.104.744.400	6.963.045.100	5.732.694.900	5.813.659.925	-		#DIV/0!	#DIV/0!	79,83	80,96	
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				7.180.874.000	7.180.874.000	7.180.874.000		5.104.744.400	6.963.045.100	5.732.694.900	5.813.659.925			#DIV/0!	#DIV/0!	79,83	80,96	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		7.652.650.000	6.145.000.000	5.695.000.000	7.816.350.000	7.981.000.000	-	7.425.732.100	7.495.881.800	10.430.509.400	6.875.803.500	-		97,03	121,98	183,15	87,97	
Pengembangan Prasarana Pertanian					40.000.000	20.000.000	-	-	-	145.500.000	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					20.000.000	20.000.000				145.500.000				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian					20.000.000									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
Pembangunan Prasarana Pertanian		7.622.650.000	6.115.000.000	5.660.000.000	7.736.350.000	7.921.000.000	-	7.398.019.000	7.468.131.800	10.254.989.800	6.851.453.100	-		97,05	122,13	181,18	88,56	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		2.472.500.000	1.986.000.000					2.171.750.000	2.331.410.700					87,84	117,39	#DIV/0!	#DIV/0!	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				1.986.000.000	2.217.000.000	2.371.000.000				1.422.320.100	1.435.840.400			#DIV/0!	#DIV/0!	71,62	64,77	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		5.100.150.000	2.958.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000		4.308.000.000	5.136.721.100	5.852.723.800	5.349.097.700			84,47	173,66	195,09	178,30	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan			500.000.000											#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan					550.000.000	350.000.000				2.649.945.900				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya			671.000.000	674.000.000		1.100.000.000					66.515.000			#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		50.000.000				1.100.000.000		918.269.000		330.000.000				1.836,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan					1.969.350.000									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		30.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000	-	27.713.100	27.750.000	30.019.600	24.350.400	-		92,38	92,50	85,77	60,88	
Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		30.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000		27.713.100	27.750.000	30.019.600	24.350.400,00			92,38	92,50	85,77	60,88	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		212.000.000	153.000.000	168.000.000	172.000.000	172.000.000								0,00	0,00	0,00	0,00	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan menular dalam daerah kabupaten/kota		20.000.000	-	-	-	-	-	15.797.100	-	-	-	-		78,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis		20.000.000						15.797.100						78,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan			5.000.000											#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				5.000.000	5.000.000	5.000.000								#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		90.000.000	54.000.000	101.000.000	61.000.000	61.000.000	-	266.976.704	558.544.404	798.837.500	93.383.600	-		296,64	1.034,34	790,93	153,09	
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium				40.000.000						240.000.000				#DIV/0!	#DIV/0!	600,00	#DIV/0!	
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		90.000.000	54.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000		266.976.704	558.544.404	558.837.500	93.383.600			296,64	1.034,34	916,13	153,09	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		102.000.000	94.000.000	102.000.000	95.000.000	95.000.000	-	98.587.204	-	105.079.800	66.649.000	-		96,65	0,00	103,02	70,16	
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		102.000.000	94.000.000	102.000.000	95.000.000	95.000.000		98.587.204		105.079.800,00	66.649.000			96,65	0,00	103,02	70,16	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		150.000.000	108.000.000	119.000.000	122.000.000	122.000.000	-	146.650.000	539.367.900	115.990.200	154.209.400	-		97,77	499,41	97,47	126,40	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		150.000.000	108.000.000	119.000.000	122.000.000	122.000.000	-	146.650.000	539.367.900	115.990.200	154.209.400	-		97,77	499,41	97,47	126,40	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		150.000.000	108.000.000	119.000.000	122.000.000	122.000.000		146.650.000	539.367.900	115.990.200	154.209.400			97,77	499,41	97,47	126,40	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		25.000.000	18.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	24.843.600	15.757.000	-	10.680.000			99,37	87,54	0,00	53,40	
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		25.000.000	18.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	24.843.600	15.757.000	-	10.680.000			99,37	87,54	0,00	53,40	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		25.000.000	18.000.000					24.843.600	15.757.000					99,37	87,54	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				20.000.000	20.000.000	20.000.000					10.680.000			#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	53,40	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1.759.000.000	1.268.000.000	1.393.000.000	1.430.000.000	1.427.000.000	-	3.234.787.000	1.981.538.500	1.367.603.500	2.332.578.220			183,90	156,27	98,18	163,12	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		1.759.000.000	1.268.000.000	1.393.000.000	1.430.000.000	1.427.000.000	-	3.234.787.000	1.981.538.500	1.367.603.500	2.332.578.220	-		183,90	156,27	98,18	163,12	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		440.621.200	491.976.000	500.000.000	510.000.000	510.000.000		388.163.000	222.154.100	393.392.400	1.357.814.000			88,09	45,16	78,68	266,24	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		518.378.800	436.024.000	743.000.000	755.000.000	737.000.000		446.624.000	819.014.000	888.731.100	904.104.220			86,16	187,84	119,61	119,75	
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			200.000.000											#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pembentukan Badan Usaha Milik Petani			15.000.000						15.000.000					#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani				20.000.000	25.000.000	30.000.000					12.270.000			#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	49,08	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota		800.000.000	125.000.000	130.000.000	140.000.000	150.000.000		2.400.000.000	925.370.400	85.480.000	58.390.000			300,00	740,30	65,75	41,71	

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah menunjukkan berbagai capaian penting dalam pelaksanaan urusan ketahanan pangan dan pertanian. Berdasarkan data indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, dapat disampaikan beberapa poin analisis sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja
   Capaian Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menunjukkan tren yang terus meningkat dari 55,67 pada tahun 2020 menjadi 73,30 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam aspek tata kelola, efisiensi pelaksanaan program, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
2. Perbaikan Akses dan Konsumsi Pangan
   Indikator prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengalami penurunan dari 16,51% (2020) menjadi 11,51% (2024). Ini menunjukkan bahwa program-program yang diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses pangan telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama dalam menurunkan tingkat kerawanan pangan.
3. Fluktuasi Produksi Pertanian
   Kinerja produksi pertanian, khususnya pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Misalnya, persentase peningkatan produksi hortikultura sempat mencapai angka tinggi (217,27%) pada 2023, namun kembali mengalami penurunan drastis (-11,95%) di tahun 2024. Hal serupa juga terjadi pada produksi tanaman pangan dan perkebunan yang tidak stabil. Hal ini mencerminkan adanya tantangan di tingkat teknis dan eksternal seperti iklim, serangan hama, serta ketergantungan pada pola tanam musiman yang tidak selalu konsisten.
4. Stabilitas Pangan dan Gizi Masyarakat
   Angka kecukupan energi dan protein menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, meskipun masih berada dalam ambang batas yang layak. Pada 2020, angka kecukupan energi tercatat 1992,8 kkal/ kapita/ hari, dan menurun menjadi 1896,62 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap kualitas konsumsi pangan masyarakat, bukan hanya dari sisi kuantitas tetapi juga aspek gizi seimbang.
5. Produksi Komoditas Utama
   Beberapa komoditas utama seperti padi dan cabai mengalami peningkatan produksi pada tahun-tahun terakhir, namun komoditas lain seperti jagung, biofarmaka, kelapa, dan durian justru mengalami penurunan. Penurunan yang konsisten pada produksi jagung dari 19.616 ton (2020) menjadi 6.635 ton (2024) perlu menjadi perhatian khusus, mengingat jagung merupakan salah satu komoditas pangan strategis.
6. Populasi Ternak dan Penyakit Hewan
   Populasi ternak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 100.431 ST pada 2020 menjadi 117.322 ST pada 2024. Namun demikian, jumlah kasus penyakit hewan menular strategis meningkat signifikan pada 2022 (472 kasus) dan masih cukup tinggi di tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan masih perlunya penguatan sistem pengawasan, vaksinasi, dan biosekuriti untuk mengendalikan penyakit hewan.
7. Teknologi Pertanian dan Kapasitas Petani
   Indikator penerapan teknologi pertanian dan peningkatan kapasitas kelompok tani menunjukkan tren positif. Penerapan teknologi meningkat dari 8,40% pada tahun 2020 menjadi 15,01% di tahun 2024.

Sementara itu, kapasitas kelompok tani juga meningkat dari skor 204 menjadi 239. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kompetensi petani dan adaptasi terhadap teknologi yang mendorong efisiensi usaha tani.

8. Ketersediaan Cadangan Pangan dan Ketahanan Saat Krisis
   Indikator ketersediaan cadangan pangan (beras/ jagung) menunjukkan capaian yang masih rendah, dengan nilai yang tidak konsisten dan sempat turun menjadi 0,44% pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan kerentanan dalam ketahanan pangan saat terjadi krisis atau bencana, dan perlu menjadi prioritas kebijakan ke depan.

Secara umum, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah berhasil mencatat sejumlah capaian positif, terutama dalam hal tata kelola, peningkatan akses pangan, dan peningkatan kapasitas petani. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, seperti ketidakstabilan produksi pertanian, rendahnya cadangan pangan, dan meningkatnya penyakit hewan menular.

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tahun					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Indikator Tujuan							
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	55,67	59,40	66,00	71,14	73,30	
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Angka	16,51	15,87	16,57	14,71	11,51	
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%		-8,52	-11,02	16,60	-1,07	
	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%		66,41	-76,12	217,27	-11,95	
	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%		-11,49	-0,81	0,96	-8,87	
	Persentase Peningkatan Produksi Daging	%		6,59	45,89	28,98	2,04	
2	Indikator Sasaran							
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	55,67	59,40	66,00	71,14	73,30	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	85,90	90,60	91,10	89,40	90,42	
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%		-8,52	-11,02	16,60	-1,07	
	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%		66,41	-76,12	217,27	-11,95	
	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%		-11,49	-0,81	0,96	-8,87	
	Persentase Peningkatan Produksi Daging	%		6,59	45,89	28,98	2,04	
3	Indikator Program							
	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	
	Rasio Lumbung Pangan Aktif	%					2,29	
	Angka Kecukupan Energi	kkal/ kapita/ hari	1992,8	1986,7	1828,6	1866	1896,62	
	Angka Kecukupan Protein	gram/ kap/ hari	57,90	56,2	54,60	55,7	55,08	
	Persentase penanganan desa rentan rawan pangan	%					2,29	
	Persentase Pangan Segar Aman	%	100	100	100	100	100	
	Jumlah Produksi Padi	Ton/ tahun	367.305	365.352	338.084	399.915	390.600	
	Jumlah Produksi Jagung	Ton/ tahun	19.616	14.985	6.667	7.395	6.635	
	Jumlah Produksi Cabai	Ton/ tahun	1.307	4.937	2.339	3.076	3.251	
	Jumlah Produksi Durian	Ton/ tahun	3.587	6.983	7.201	10.058	5.880	
	Jumlah Produksi Biofarmaka	Ton/ tahun	9.301	12.553	9.584	6.607	4.464	
	Jumlah Produksi Kelapa	Ton/ tahun	44.172	39.809	41.288	40.335	36.752	
	Jumlah Produksi Kopi	Ton/ tahun	171	169	187	176	165	
	Jumlah Produksi Tembakau	Ton/ tahun	248	130	78	363	292	
	Jumlah Populasi Ternak	ST/ tahun	100.431	105.623	109.453	111.772	117.322	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tahun					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Persentase kemanfaatan penyediaan prasarana pertanian	%	100	100	100	100	100	
	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Kasus	0	0	472	365	306	
	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	100	100	100	100	
	Persentase Penerapan Teknologi Pertanian	%	8,40	9,32	14,40	15,80	15,01	
	Peningkatan kapasitas kelompok tani	Skor	204	208	218	224	239	
4	Indikator Kinerja Kunci							
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	-	3,34	0,44	-	5,55	
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ ha	-	6,77	6,91	6,87	6,90	
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-	130,77	2,21	-15,44	-16,14	

2.1.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dalam pengembangan pelayanan untuk menghasilkan produk pangan yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan diantaranya adalah peningkatan jumlah penduduk, alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian, industrialisasi dan hilirisasi sektor non pangan serta perubahan iklim dan gas rumah kaca. Kondisi ini perlu disikapi secara bijak karena produksi dan produktivitas sektor pangan sebagai penopang ketahanan pangan yang didukung oleh infrastruktur dan distribusi yang merata.

Peluang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dalam pengembangan pelayanan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah salah satunya adalah pengembangan kawasan swasembada pangan, air, dan energi yang hal ini sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Purworejo dalam konstelasi kewilayahan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai kawasan swasembada pangan, air, dan energi Dieng-Serayu-Bogowonto yang meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purworejo.

Dilihat dari aspek geografi, Kabupaten Purworejo memiliki keunggulan kompetitif berupa ketersediaan lahan pertanian yang relatif subur dan luas ditopang oleh sistem irigasi teknis seperti Daerah Irigasi Wadaslintang serta dukungan dari proyek Bendungan Bener yang sedang dibangun. Komoditas utama yang dikembangkan mencakup padi, jagung, kedelai, hortikultura (sayuran dan buah-buahan), serta komoditas perkebunan rakyat seperti kelapa dan kakao. Selain itu, sektor peternakan yang berpotensi dikembangkan dengan pemanfaatan limbah pertanian yang ada.

2.1.5.Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo mencakup seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di daerah. Sasaran utama meliputi pelaku utama sektor pertanian seperti petani, peternak, pekebun, nelayan, dan rumah tangga tani yang secara langsung berperan dalam produksi pangan. Selain itu, kelompok dan kelembagaan tani, antara lain Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), koperasi, serta lembaga ekonomi petani juga menjadi sasaran layanan dalam rangka penguatan kapasitas dan kelembagaan usaha. Pelaku usaha dan UMKM di bidang pangan dan pertanian, termasuk pengolah, pedagang, serta penyedia sarana dan prasarana produksi, turut menjadi bagian penting dalam rantai layanan yang disediakan. Masyarakat luas sebagai konsumen juga menjadi penerima manfaat dari upaya terjaminnya ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan. Di samping itu, perangkat daerah terkait, lembaga pendidikan, dan mitra strategis lainnya diposisikan sebagai kelompok sasaran pendukung yang berperan dalam memperkuat sinergi pembangunan. Dengan penetapan kelompok sasaran tersebut, diharapkan seluruh program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dapat dilaksanakan secara tepat guna, tepat sasaran, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo memegang peranan penting dalam penyediaan pelayanan publik yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan pengembangan sektor

pertanian. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, terdapat sejumlah permasalahan pelayanan yang berdampak pada efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berikut ini adalah penjabaran permasalahan pelayanan yang dihadapi:

1. Konsumsi pangan masyarakat yang kurang beragam, bergizi, aman, dan seimbang
   Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat keberagaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penyuluhan gizi yang efektif dan pembinaan terhadap pola konsumsi pangan yang sehat dan seimbang. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pangan bergizi serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keamanan pangan turut memperburuk kondisi ini. Permasalahan ini menunjukkan masih belum optimalnya pelayanan informasi dan edukasi dari Dinas kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas konsumsi pangan.
2. Penanganan kerawanan pangan yang belum komprehensif
   Penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Purworejo masih belum berjalan secara menyeluruh dan terintegrasi. Koordinasi antarinstansi terkait dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penanganan masalah ini masih kurang maksimal. Selain itu, sistem pemantauan dan evaluasi kerawanan pangan yang ada belum berjalan secara optimal, sehingga respons terhadap kerentanan pangan di tingkat komunitas masih kurang cepat dan tepat sasaran. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kapasitas dan sinergi pelayanan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam menangani kerawanan pangan secara komprehensif.
   Penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Purworejo juga menghadapi tantangan signifikan yang disebabkan oleh belum optimalnya sistem distribusi pangan. Meskipun secara kuantitatif ketersediaan pangan di daerah relatif mencukupi, ketidakefisienan dan ketidakteraturan dalam proses distribusi menyebabkan sebagian wilayah dan kelompok masyarakat tetap mengalami kesulitan akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau.
   Kendala dalam distribusi pangan ini meliputi infrastruktur yang belum memadai, seperti jaringan transportasi yang kurang lancar di beberapa wilayah, keterbatasan sarana penyimpanan dan pengelolaan pangan, serta lemahnya koordinasi antar pelaku dalam rantai pasok pangan. Akibatnya, pangan yang tersedia di sentra produksi sulit tersalurkan secara merata ke daerah-daerah yang rentan kerawanan pangan, sehingga menimbulkan disparitas akses dan meningkatkan risiko kekurangan pangan di tingkat rumah tangga.
3. Ketersediaan pangan surplus namun cenderung menurun
   Meskipun secara kuantitatif Kabupaten Purworejo memiliki ketersediaan pangan yang surplus, data menunjukkan adanya tren penurunan produksi pangan yang dapat mengancam ketahanan pangan jangka panjang. Permasalahan pelayanan terkait diantaranya adalah kurang optimalnya pendataan dan perencanaan produksi pangan serta belum efektifnya pengendalian stok dan cadangan pangan oleh Dinas. Selain itu, belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau ketersediaan dan kebutuhan pangan secara real-time menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan.
4. Menurunnya produksi pertanian
   Produksi pertanian yang menurun menjadi permasalahan serius yang membutuhkan perhatian khusus. Permasalahan pelayanan yang muncul terkait dengan hal ini adalah keterbatasan pendampingan

teknis kepada petani, rendahnya akses terhadap teknologi pertanian modern, serta belum optimalnya fasilitasi dukungan input produksi seperti benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya. Selain itu, koordinasi pelayanan dengan sektor terkait juga masih perlu diperkuat untuk mengatasi berbagai kendala yang menghambat peningkatan produksi.

5. Rantai pasok pertanian yang panjang
   Rantai pasok pertanian yang panjang dan kurang efisien menyebabkan tingginya biaya distribusi dan menurunnya daya saing produk pertanian lokal. Permasalahan pelayanan yang terkait adalah kurangnya fasilitasi Dinas dalam membangun jaringan pemasaran yang efektif dan mempersingkat jalur distribusi. Kurangnya dukungan terhadap pengembangan infrastruktur logistik serta minimnya pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rantai nilai pertanian turut menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok.
6. Minimnya pengelolaan hasil pertanian
   Pengelolaan hasil pertanian yang masih minim menyebabkan rendahnya nilai tambah produk dan terjadinya pemborosan hasil panen. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian belum memberikan pelayanan optimal dalam bentuk pelatihan pengolahan hasil, fasilitasi sarana dan prasarana pasca panen, serta dukungan pengembangan agroindustri skala kecil dan menengah. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan petani dan pelaku usaha dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk yang bernilai jual lebih tinggi.

Permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo di atas menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan efektivitas dalam berbagai bidang, mulai dari penyuluhan, pendampingan teknis, manajemen data, hingga fasilitasi pengembangan usaha pertanian. Upaya perbaikan pelayanan yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan masyarakat sangat diperlukan untuk mendorong tercapainya ketahanan pangan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Purworejo.

2.2.2. Isu Strategis

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo, dilakukan identifikasi dan analisis terhadap potensi, permasalahan, serta tantangan yang dihadapi perangkat daerah dalam lingkup kewenangannya. Proses ini mempertimbangkan keterkaitan antara aspek internal (potensi dan permasalahan sektoral) serta aspek eksternal (isu lingkungan hidup strategis dan dinamika global, nasional, dan regional), guna merumuskan isu strategis yang tepat dan relevan untuk dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Penetapan isu strategis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik berdasarkan lima komponen utama:

1. Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah
2. Permasalahan daerah yang dihadapi
3. Isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
4. Isu Lingkungan Dinamis (Global, Nasional, dan Regional)
5. Sintesis permasalahan menjadi isu strategis Perangkat Daerah

Melalui pendekatan ini, dihasilkan rumusan isu strategis yang mencerminkan kebutuhan intervensi kebijakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis terhadap tabel data yang memuat berbagai aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi sektor ketahanan

pangan dan pertanian, maka ditetapkan dua isu strategis utama sebagai berikut:

1. Tingginya Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
   Meskipun Kabupaten Purworejo memiliki potensi sumber daya pangan yang cukup melimpah, tingkat konsumsi pangan masyarakat masih menunjukkan ketidakcukupan, baik dari segi keragaman, kandungan gizi, keamanan, maupun keseimbangan. Permasalahan ini berdampak langsung pada kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, yang menjadi kunci dalam memanfaatkan momentum bonus demografi. Dalam konteks isu global, fenomena aging population di negara maju mengingatkan akan pentingnya penguatan kualitas SDM sejak dini. Sementara pada skala nasional, transformasi sosial menuntut peningkatan akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan berkualitas. Oleh karena itu, isu ini ditetapkan sebagai isu strategis prioritas.
   Ketersediaan pangan di Purworejo secara agregat tergolong surplus, namun terdapat kecenderungan penurunan, serta belum meratanya distribusi dan akses pangan bagi seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kerawanan pangan belum dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
   Isu ini erat kaitannya dengan urgensi pengembangan kawasan swasembada pangan, air, dan energi sebagai bagian dari strategi adaptif terhadap perubahan iklim dan kondisi sosial ekonomi yang dinamis. Penguatan sistem distribusi pangan, early warning system kerawanan pangan, dan pengembangan cadangan pangan lokal menjadi solusi yang perlu diprioritaskan.
2. Menurunnya Daya Saing Sektor Pertanian
   Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah, namun saat ini menghadapi tantangan serius berupa penurunan produksi, panjangnya rantai pasok, serta rendahnya nilai tambah hasil pertanian akibat minimnya pengelolaan pasca panen.
   Permasalahan ini mengindikasikan belum optimalnya peran sektor pertanian dan pariwisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam skala nasional, strategi hilirisasi mulai menunjukkan dampak positif, namun belum sepenuhnya dirasakan di tingkat daerah. Oleh karena itu, isu menurunnya daya saing sektor pertanian menjadi isu strategis yang membutuhkan intervensi terintegrasi dalam bentuk modernisasi pertanian, efisiensi rantai nilai, dan penguatan agroindustri lokal.

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dalam dokumen Rencana Strategis lima tahunan. Dengan penetapan isu strategis yang berbasis data dan kontekstual, diharapkan perencanaan pembangunan sektor pangan dan pertanian dapat lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.4.
Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Bonus Demografi	Konsumsi Pangan Masyarakat yang Kurang Beragam dan Bergizi, Aman, Seimbang	Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	*Aging population* negara maju	Transformasi sosial	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Tingginya ketidakcukupan konsumsi pangan
	Penanganan Kerawanan Pangan Belum Komprehensif					
Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi	Ketersediaan pangan surplus namun cenderung menurun					
Potensi Pertanian dan Pariwisata	Menurunnya Produksi Pertanian	Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata	Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia	Transformasi ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Menurunnya daya saing sektor pertanian
	Rantai Pasok Pertanian Panjang					
	Minimnya Pengelolaan Hasil Pertanian					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Selaras dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, Dan Inovatif (Purworejo Berseri), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo mendukung misi satu yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan Sejahtera, khususnya melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia bidang pertanian, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Peningkatan ini akan berdampak pada nilai sosial ekonomi yang berkorelasi terhadap misi Bupati dan Wakil Bupati yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melal ui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan.

Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang melakukan pembinaan dan pendampingan pada masyarakat petani yang merupakan penggerak perekonomian daerah, dimana sebagian besar masayarakat menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Misi Bupati dan Wakil Bupati yang keempat menyebutkan adanya peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal, disinilah peran serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berkontribusi mendukung pencapaian misi kepala Daerah melalui kegiatan pemeberdayaan ekonomi di sektor pertanian mulai dari hulu sampai hilir.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Selama lima tahun kedepan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tujuan meningkatkan produksi pertanian, kecukupan konsumsi pangan, dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Selaras dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, Dan Inovatif (Purworejo Berseri)

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah serta menindaklanjuti arah kebijakan pembangunan daerah di sektor pangan dan pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menetapkan sejumlah sasaran strategis yang menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan selama periode lima tahun ke depan. Sasaran strategis yang dirumuskan bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan perangkat daerah.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah yang berbasis pada sektor unggulan yang disertai peningkatan kapasitas ekosistem riset dan inovasi	Meningkatkan produksi pertanian, kecukupan konsumsi pangan, dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Produksi tanaman pangan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
			Persentase Peningkatan Produksi hortikultura	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
			Persentase Peningkatan Produksi perkebunan	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
			Persentase Peningkatan Produksi Daging	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Menurunnya ketidakcukupan konsumsi pangan			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	11,30	11,00	10,80	10,50	10,23	10,00	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	
		Meningkatnya produksi pertanian	Persentase Peningkatan Produksi tanaman pangan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
			Persentase Peningkatan Produksi hortikultura	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
			Persentase Peningkatan Produksi perkebunan	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
			Persentase Peningkatan Produksi Daging	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Meningkatnya keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	90,73	91,70	92,00	92,50	93,00	93,50	
Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana tindakan yang komprehensif dan terstruktur yang memuat langkah-langkah serta upaya-upaya strategis yang akan dilaksanakan dalam periode tersebut. Strategi ini dirancang sebagai respons terhadap dinamika lingkungan eksternal dan internal yang terus berkembang, dengan tujuan memastikan keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam strategi ini, optimalisasi sumber daya menjadi salah satu fokus utama, mencakup pemanfaatan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi secara efisien dan efektif. Melalui pengelolaan sumber daya yang optimal, diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penetapan tahapan pelaksanaan juga menjadi bagian integral dari strategi ini, dengan penyusunan rencana kerja yang jelas dan sistematis agar setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat terlaksana secara berurutan dan terukur. Tahapan tersebut dirancang untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul seiring perubahan lingkungan yang dinamis, sehingga memungkinkan penyesuaian yang cepat dan tepat. Fokus strategi diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan tugas dan fungsi, sehingga seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah secara menyeluruh. Penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan prioritas strategis, dengan memperhatikan potensi, tantangan, serta sumber daya yang tersedia.

Tabel 3.2.
Penahapan Rentra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan kebijakan dan sistem kelembagaan yang mendukung ketahanan pangan	Penguatan produksi pangan lokal untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat	Memperkuat akses pangan melalui rantai pasok yang inklusif	Diversifikasi komoditas pangan lokal untuk stabilitas dan pemanfaatan pangan yang lebih baik	Mewujudkan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas
Penguatan rantai pasok komoditas pertanian strategis serta kebijakan yang mendukung pada peningkatan daya saing sektor pertanian	Penguatan sarana dan prasarana pertanian, serta Sumber Daya Manusia untuk efisiensi pada proses produksi	Meningkatkan adopsi teknologi untuk modernisasi pertanian	Optimalisasi kemitraan strategis lintas sektor untuk meningkatkan nilai tambah pada produk hasil pertanian	Terwujudnya daya saing sektor pertanian
Menguatkan Sistem Manajemen Kinerja yang Efektif dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan kapasitas sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memperkuat sinergi dalam Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Perwujudan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

1. Urusan Pangan

   Pembangunan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas strategis yang memerlukan perencanaan jangka menengah secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai kondisi ketahanan pangan yang kokoh dan berkeadilan, telah disusun pentahapan program dan kebijakan selama periode renstra, yang terdiri dari lima tahapan utama. Setiap tahapan memiliki fokus strategis yang saling mendukung, dimulai dari penguatan kelembagaan hingga perwujudan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat secara kuantitas dan kualitas.

   a. Tahap I – Tahun 2026: Penguatan Kebijakan dan Sistem Kelembagaan

      Tahap awal pembangunan diarahkan pada penguatan kebijakan dan sistem kelembagaan yang mendukung ketahanan pangan. Hal ini menjadi fondasi penting untuk memastikan tersedianya kerangka regulasi, kelembagaan, serta tata kelola yang solid dalam mengarahkan pembangunan pangan. Penataan regulasi, harmonisasi kebijakan lintas sektor, serta pembentukan kelembagaan pangan yang efektif menjadi kunci utama dalam tahap ini.

   b. Tahap II – Tahun 2027: Penguatan Produksi Pangan Lokal

      Setelah sistem kelembagaan diperkuat, fokus pada tahun kedua diarahkan kepada penguatan produksi pangan lokal. Tahap ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas produksi melalui pemanfaatan sumber daya lokal, penyediaan sarana produksi, penguatan kelembagaan petani, serta dukungan teknologi pertanian. Tujuannya adalah agar kebutuhan konsumsi pangan masyarakat dapat dipenuhi secara mandiri dan berkelanjutan dari potensi pangan lokal.

   c. Tahap III – Tahun 2028: Penguatan Akses Pangan melalui Rantai Pasok yang Inklusif

      Pada tahap ketiga, strategi difokuskan pada penguatan akses pangan melalui pembangunan rantai pasok yang inklusif dan efisien. Hal ini mencakup perbaikan sistem distribusi pangan, pembangunan infrastruktur pendukung (seperti gudang, pasar, dan transportasi), serta pelibatan seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM dan koperasi. Tujuannya agar pangan yang diproduksi dapat tersedia secara merata, terjangkau, dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat.

   d. Tahap IV – Tahun 2029: Diversifikasi Komoditas Pangan Lokal

      Memasuki tahap keempat, fokus diarahkan pada diversifikasi komoditas pangan lokal untuk mendukung stabilitas dan pemanfaatan pangan yang lebih baik. Diversifikasi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan utama (seperti beras), dengan mengembangkan pangan sumber karbohidrat, protein, dan nutrisi lainnya dari potensi lokal. Strategi ini juga mendorong pemanfaatan pangan alternatif dan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan produk.

   e. Tahap V – Tahun 2030: Mewujudkan Ketercukupan Konsumsi Pangan

      Tahap akhir pembangunan ditujukan untuk mewujudkan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada tahap ini diharapkan seluruh sistem yang telah dibangun mulai dari kebijakan, produksi, distribusi, hingga konsumsi telah berfungsi secara optimal. Fokus diberikan pada peningkatan konsumsi pangan bergizi seimbang,

penguatan program edukasi gizi masyarakat, serta pemantapan ketahanan pangan rumah tangga.

Kelima tahapan ini saling terintegrasi dan membentuk kerangka kerja strategis yang komprehensif dalam membangun ketahanan pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan bertahap, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih adaptif dalam merespons tantangan serta mampu mencapai tujuan akhir, yaitu terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas.

2. Urusan Pertanian

   Peningkatan daya saing sektor pertanian merupakan bagian penting dari agenda pembangunan jangka menengah daerah, mengingat peran strategis sektor ini dalam mendukung ketahanan pangan, perekonomian lokal, serta kesejahteraan petani. Untuk mencapai daya saing pertanian yang berkelanjutan, disusunlah strategi melalui lima tahapan bertahap dan terintegrasi dalam dokumen Renstra. Masing-masing tahapan dirancang untuk memperkuat elemen-elemen kunci yang menjadi fondasi pertanian modern dan kompetitif.

   a. Tahap I – Tahun 2026: Penguatan Rantai Pasok dan Kebijakan Pendukung

      Pada tahap awal, fokus diarahkan pada penguatan rantai pasok komoditas pertanian strategis serta pengembangan kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing. Tujuan utama pada fase ini adalah membangun sistem logistik dan distribusi pertanian yang efisien, transparan, dan terintegrasi dari hulu ke hilir, serta menyusun kerangka regulasi dan kebijakan yang kondusif untuk investasi, perdagangan, dan inovasi di sektor pertanian.

   b. Tahap II – Tahun 2027: Penguatan Sarana, Prasarana, dan SDM

      Setelah fondasi kebijakan dan rantai pasok diperkuat, tahap selanjutnya menitikberatkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertanian, seperti irigasi, jalan usaha tani, gudang, dan alat mesin pertanian (alsintan). Sejalan dengan itu, dilakukan pula penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya petani dan penyuluh, melalui pelatihan teknis dan manajerial untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan manajemen usaha tani.

   c. Tahap III – Tahun 2028: Meningkatkan Adopsi Teknologi Pertanian

      Tahap ketiga berfokus pada peningkatan adopsi teknologi modern di sektor pertanian, termasuk penerapan pertanian presisi, digitalisasi pertanian, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Inovasi teknologi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, serta ketahanan terhadap perubahan iklim dan gangguan eksternal. Pendampingan, insentif, dan kemitraan dengan penyedia teknologi akan menjadi bagian penting dari strategi ini.

   d. Tahap IV – Tahun 2029: Optimalisasi Kemitraan Strategis Lintas Sektor

      Tahap keempat menekankan pada penguatan dan optimalisasi kemitraan lintas sektor, baik dengan pelaku usaha, BUMDes, koperasi, swasta, perguruan tinggi, maupun lembaga penelitian. Tujuannya adalah untuk mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk hasil pertanian, memperluas akses pasar, serta membangun ekosistem agribisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

e. Tahap V – Tahun 2030: Terwujudnya Daya Saing Sektor Pertanian
   Tahap akhir merupakan fase konsolidasi dan pencapaian, di mana seluruh upaya yang telah dilakukan diarahkan untuk mewujudkan sektor pertanian yang berdaya saing tinggi. Ciri utamanya adalah meningkatnya produktivitas dan kualitas hasil pertanian, efisiensi sistem produksi, kuatnya jaringan pasar, tingginya adopsi teknologi, dan keterlibatan aktif berbagai pihak dalam pengembangan pertanian daerah.

Melalui lima tahapan strategis ini, sektor pertanian Kabupaten dapat berkembang dari sistem tradisional menuju sistem pertanian modern, efisien, dan adaptif terhadap dinamika global. Daya saing sektor pertanian bukan hanya ditentukan oleh hasil produksi semata, tetapi juga oleh kualitas sistem pendukung, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta kapasitas kelembagaan dan SDM yang mengelolanya.

3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
   Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel merupakan landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi salah satu fokus strategis dalam dokumen renstra. Untuk mencapai hal tersebut, disusunlah lima tahapan berkelanjutan yang saling mendukung dan membentuk proses penguatan kelembagaan dan tata kelola kinerja yang sistematis dan berorientasi hasil.
   a. Tahap I – Tahun 2026: Menguatkan Sistem Manajemen Kinerja yang Efektif
      Tahap pertama merupakan fondasi dari seluruh proses, yaitu dengan menguatkan sistem manajemen kinerja perangkat daerah. Fokus diarahkan pada penataan struktur, prosedur, serta alat ukur kinerja yang selaras dengan perencanaan pembangunan. Penguatan ini mencakup perbaikan perencanaan kinerja, pelaporan, evaluasi, serta sistem informasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.
   b. Tahap II – Tahun 2027: Meningkatkan Komitmen Perangkat Daerah
      Setelah sistem manajemen kinerja diperkuat, tahap berikutnya adalah peningkatan komitmen perangkat daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas secara konsisten. Ini mencakup internalisasi nilai akuntabilitas di seluruh tingkatan organisasi, penguatan kepemimpinan birokrasi, dan penegakan integritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
   c. Tahap III – Tahun 2028: Memantapkan Kapasitas Sumber Daya
      Pada tahap ketiga, strategi difokuskan pada pemantapan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan untuk mendukung sistem kinerja yang telah dibangun. Ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi ASN, penyusunan standar kinerja individu dan unit kerja, serta penguatan peran pengawas internal dalam menjaga mutu pelaksanaan kinerja.
   d. Tahap IV – Tahun 2029: Memperkuat Sinergi dalam Mewujudkan Akuntabilitas
      Tahap keempat diarahkan pada penguatan sinergi lintas perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja secara kolektif. Kolaborasi dan integrasi antar unit kerja menjadi krusial untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja berjalan selaras dan saling

mendukung. Termasuk di dalamnya adalah sinergi antara pengelola program, keuangan, dan evaluasi.

e. Tahap V – Tahun 2030: Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

   Tahap akhir merupakan puncak dari seluruh proses, yaitu terwujudnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pada tahap ini, seluruh perangkat daerah diharapkan telah memiliki budaya kinerja yang kuat, sistem evaluasi yang transparan, serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerja kepada publik secara terbuka dan berbasis data.

Kelima tahapan ini membentuk kerangka strategis yang terintegrasi untuk menciptakan pemerintahan daerah yang akuntabel, responsif, dan profesional. Akuntabilitas bukan hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan komitmen kolektif dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada hasil.

Arah kebijakan renstra perangkat daerah mengacu pada beberapa prinsip utama. Pertama, operasionalisasi NSPK diwujudkan melalui penyelarasan dengan sasaran-sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD, khususnya yang relevan dan sejalan dengan kewenangan perangkat daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah tetap berada dalam koridor kebijakan nasional maupun daerah.

Kedua, arah kebijakan Renstra PD disusun dengan menyesuaikan secara langsung terhadap arah kebijakan RPJMD. Meskipun redaksionalnya bersifat operasional dan lebih teknis, substansi arah kebijakan Renstra harus konsisten dan tidak menyimpang dari arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah secara keseluruhan.

Ketiga, dalam proses penyusunannya, perangkat daerah wajib memperhatikan penahapan strategi dalam dokumen Renstra, agar kebijakan yang dirancang tidak hanya responsif terhadap isu aktual, tetapi juga mencerminkan perencanaan yang berkelanjutan, terukur, dan realistis.

Dengan demikian, arah kebijakan renstra merupakan perangkat penting yang memastikan bahwa setiap langkah operasional perangkat daerah tidak hanya sesuai dengan tugas dan fungsinya, tetapi juga selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 3.5.
Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PANGAN				
1	S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan. keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam. bergizi. seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat	Penguatan kebijakan dan sistem kelembagaan yang mendukung ketahanan pangan melalui aktivitas: 1. Penyusunan dan revisi kebijakan pangan daerah 2. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan 3. Pengembangan sistem pemantauan ketahanan pangan terpadu 4. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah 5. Peningkatan sinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat	TAHUN 2026
2		Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan. keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam. bergizi. seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat	Penguatan produksi pangan lokal untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan Masyarakat melalui aktivitas: 1. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan 2. Fasilitasi akses sarana dan prasarana produksi 3. Penguatan kelembagaan Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani 4. Diversifikasi produksi pangan non beras 5. Pemanfaatan lahan pekarangan	TAHUN 2027
3		Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan. keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam. bergizi. seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat	Memperkuat akses pangan melalui rantai pasok yang inklusif melalui aktivitas: 1. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan 2. Fasilitasi kemitraan antara petani, pengolah dan pedagang 3. Pengembangan sistem informasi dan teknologi pasar pangan 4. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam manajemen rantai pasok 5. Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung rantai pasok inklusif 6. Penyelenggaraan pasar tani	TAHUN 2028
4		Perwujudan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan. keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam. bergizi. seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat	Diversifikasi komoditas pangan lokal untuk stabilitas dan pemanfaatan pangan yang lebih baik melalui aktivitas: 1. Pengembangan dan promosi komoditas pangan lokal alternatif 2. Pelatihan dan pendampingan teknologi budidaya diversifikasi pangan 3. Pengembangan produk olahan berbasis pangan lokal diversifikasi 4. Kampanye edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan diversifikasi 5. Fasilitasi akses pasar dan penguatan rantai pasok komoditas diversifikasi	TAHUN 2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			6. Pengembangan kebijakan pendukung diversifikasi pangan	
5		Peneguhan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan. keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam. bergizi. seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat	Mewujudkan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas melalui aktivitas: 1. Peningkatan produksi dan distribusi pangan pokok 2. Bantuan pangan untuk kelompok rentan 3. Kampanye dan edukasi gizi seimbang 4. Peningkatan akses pasar pangan segar dan bergizi 5. Pendampingan dan pelatihan keterampilan memasak dan pengolahan pangan 6. Monitoring dan evaluasi status konsumsi pangan masyarakat	TAHUN 2030
PERTANIAN				
1	S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Penguatan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian.	Penguatan rantai pasok komoditas pertanian strategis serta kebijakan yang mendukung pada peningkatan daya saing sektor pertanian melalui aktivitas: 1. Pengembangan kawasan sentra produksi komoditas strategis 2. Penguatan kelembagaan petani dan pelaku usaha tani 3. Peningkatan kualitas dan standar produk pertanian 4. Penguatan sistem logistik dan rantai distribusi pertanian 5. Digitalisasi rantai pasok dan pasar komoditas pertanian 6. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan sektor pertanian yang mendukung daya saing	TAHUN 2026
2		Peningkatan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian.	Penguatan sarana dan prasarana pertanian, serta Sumber Daya Manusia untuk efisiensi pada proses produksi melalui aktivitas: 1. Penyediaan sarana pertanian 2. Pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian 3. Pelatihan teknis dan manajerial bagi petani 4. Penguatan kapasitas penyuluh pertanian 5. Fasilitasi transfer teknologi pertanian 6. Pemberdayaan generasi muda dan wanita di sektor pertanian	TAHUN 2027

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3		Pemantapan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian.	Meningkatkan adopsi teknologi untuk modernisasi pertanian melalui aktivitas: 1. Sosialisasi dan kampanye penggunaan teknologi pertanian 2. Pengembangan dan penyebaran model pertanian presisi 3. Fasilitasi akses pembiayaan untuk teknologi pertanian 4. Peningkatan infrastruktur digital pertanian 5. Kolaborasi dengan startup dan perusahaan teknologi pertanian	TAHUN 2028
4		Perwujudan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian.	Optimalisasi kemitraan strategis lintas sektor untuk meningkatkan nilai tambah pada produk hasil pertanian melalui aktivitas: 1. Identifikasi dan pemetaan potensi mitra strategis 2. Fasilitasi forum dan platform kolaborasi 3. Pengembangan model kemitraan berbasis rantai nilai 4. Fasilitasi akses pembiayaan dan investasi 5. Pengembangan produk bernilai tambah dan branding	TAHUN 2029
5		Peneguhan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian.	Terwujudnya daya saing sektor pertanian melalui aktivitas: 1. Peningkatan produksi dan produktivitas 2. Penguatan infrastruktur pertanian 3. Pengembangan rantai pasok dan akses pasar 4. Pengembangan inovasi dan teknologi 5. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	TAHUN 2030
PENUNJANG URUSAN				
1	S-5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	TAHUN 2026

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2		Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	TAHUN 2027
3		Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	TAHUN 2028
4		Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	TAHUN 2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5		Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	TAHUN 2030

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan hasil dari proses cascading yang dilakukan secara sistematis dari tujuan dan sasaran organisasi menuju outcome dan output yang diharapkan. Dalam penyusunannya, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan diidentifikasi dan dirancang dengan merujuk pada kerangka logis yang menghubungkan antara input, proses, dan hasil akhir yang akan dicapai. Proses cascading ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan akan mengarah pada pencapaian tujuan organisasi yang lebih luas, serta memberikan dampak yang nyata dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Daerah.

Setiap elemen dalam struktur Renstra ini tidak hanya bersifat sebagai sekadar rincian administratif, namun juga sebagai bagian integral dari upaya pencapaian tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, program, kegiatan, dan sub kegiatan harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja. Dengan demikian, melalui proses cascading ini, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai outcome dan output yang diinginkan.

Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra ini mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini selaras dengan kebijakan yang lebih besar, serta mendukung pencapaian kinerja pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, penyusunan nomenklatur yang tepat dan sesuai dengan regulasi yang ada akan menjadi dasar penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien.

Penetapan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S4. Meningkatnya produktivitas, pemerataan dan inklusivitas perekonomian daerah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Meningkatkan produksi pertanian, kecukupan konsumsi pangan, dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
					Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura		
					Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan		
					Persentase Peningkatan Populasi Ternak		
					Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Meningkatnya produksi pertanian			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
					Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura		
					Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan		
					Persentase Peningkatan Populasi Ternak		
			Meningkatnya produksi komoditas pertanian strategis		Jumlah Produksi Padi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah Produksi Jagung		
					Jumlah Produksi Cabai		
					Jumlah Produksi Durian		
					Jumlah Produksi Biofarmaka		
					Jumlah Produksi Kelapa		
					Jumlah Produksi Kopi		
					Jumlah Produksi Tembakau		
			Meningkatnya populasi ternak		Jumlah Populasi Ternak		
				Terlaksananya Pengawasan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penggunaan Sarana Pertanian			
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
				Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan yang Dikelola	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	
				Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan	Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang Dikelola		
						Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
						Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	
				Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lainnya	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain yang Dilaksanakan	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	
						Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Termanfaatkannya prasarana pertanian yang disediakan		Persentase Kemanfaatan Prasarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	Pengembangan Prasarana Pertanian	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
				Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	Pembangunan Prasarana Pertanian	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
						Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
				Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing	Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing yang Dikelola	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
						Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	
			Menurunnya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan dan menular strategis		Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Terlaksananya Layanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular	Layanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular yang Dilaksanakan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	
						Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan	Laporan Hasil Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	
						Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dan/ atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
				Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang Dikelola	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
						Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
						Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dilaksanakan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
						Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
			Terlayaninya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase Fasilitasi Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Dilaksanakan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	
						Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan kapasitas kelompok tani		Persentase Penerapan Teknologi Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
					Skor Kapasitas Kelompok Tani		
				Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
						Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	
						Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
		Meningkatnya keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat			Skor Pola Pangan Harapan		
			Meningkatnya rasio lumbung pangan aktif		Rasio Lumbung Pangan Aktif	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	
				Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang Disediakan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
			Meningkatnya angka kecukupan energi dan protein		Angka Kecukupan Energi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
					Angka Kecukupan Protein		
				Tersusunnya Dokumen Ketersediaan Pangan	Dokumen Ketersediaan Pangan yang Disusun	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
						Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	
						Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
				Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	
						Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
						Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Meningkatnya penanganan desa rentan rawan pangan		Persentase penanganan desa rentan rawan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Disediakan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
						Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Tertanganinya Kerawanan Pangan	Kerawanan Pangan yang Ditangani	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya pangan segar aman asal tumbuhan		Persentase Pangan Segar Aman	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Tersedianya Data Pengawasan Pangan Segar	Data Pengawasan Pangan Segar yang Disediakan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	
						Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	
						Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	
						Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kinerja Perangkat Daerah			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan/ Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	

Dalam penyusunan Renstra ini, daftar program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan disusun untuk periode waktu yang mencakup tahun 2025 hingga tahun 2030. Setiap tahunnya, program dan kegiatan akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan dinamika di tingkat daerah maupun pusat. Rencana jangka panjang ini juga memastikan bahwa setiap tahapan program dan kegiatan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi selama periode tersebut.

Penting untuk ditekankan bahwa program yang direncanakan pada tahun 2030 merupakan bagian integral dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penyusunan program untuk tahun 2030 ini bukan hanya merupakan rencana jangka panjang yang terpisah, melainkan merupakan pijakan penting dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2030. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil pada tahun 2025 hingga 2029 dapat memperkuat dasar perencanaan untuk tahun 2030, sehingga terjalin kontinuitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintahan.

Dengan demikian, perencanaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Program tahun 2030 menjadi salah satu fondasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan dalam periode tersebut dapat terus meningkatkan kinerja pemerintahan daerah serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Program merupakan wujud konkret dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh instansi atau organisasi. Program berisi sekumpulan kegiatan yang terorganisir dan bertujuan untuk mencapai hasil tertentu. Dalam Renstra, program dijabarkan secara rinci dengan mempertimbangkan prioritas, urgensi, dan dampaknya terhadap tujuan jangka panjang.

Setiap program direncanakan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan yang ada, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Hal ini bertujuan agar setiap program memiliki relevansi yang tinggi dengan kondisi faktual yang ada di lapangan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat atau pihak yang menjadi sasaran dari program tersebut.

Kegiatan adalah langkah-langkah yang lebih operasional dan spesifik dalam rangka mencapai tujuan dari suatu program. Kegiatan-kegiatan ini biasanya memiliki durasi waktu tertentu, melibatkan berbagai sumber daya, serta melibatkan koordinasi antara berbagai pihak. Kegiatan ini dapat berupa penyuluhan, pelatihan, pembangunan infrastruktur, atau kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian tujuan program.

Dalam Renstra, setiap kegiatan disusun dengan merinci jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, serta output yang ingin dicapai. Setiap kegiatan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan program yang lebih besar.

Subkegiatan merupakan rincian lebih lanjut dari kegiatan. Pada level ini, pelaksanaan kegiatan dipastikan dapat dilakukan secara lebih terperinci dengan alokasi sumber daya yang jelas. Subkegiatan umumnya mengandung langkah-langkah yang lebih teknis dan mendetail untuk mendukung kelancaran kegiatan utama.

Penentuan subkegiatan dalam Renstra harus dilakukan dengan teliti, mempertimbangkan berbagai aspek operasional yang ada, serta memberikan ruang bagi evaluasi untuk memastikan bahwa setiap subkegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pendanaan merupakan elemen penting dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Tanpa adanya alokasi pendanaan yang jelas dan

memadai, program-program yang direncanakan tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, dalam Renstra, setiap program, kegiatan, dan subkegiatan harus dilengkapi dengan estimasi biaya yang diperlukan.

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan dalam Renstra merupakan bagian integral dari perencanaan yang harus disusun dengan cermat dan rinci. Penyusunan yang baik akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, serta penggunaan sumber daya dan anggaran dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Dengan adanya perencanaan yang matang, diharapkan tujuan jangka panjang dapat tercapai dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Penetapan rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kabupaten Purworejo Tahun 2025 sampai dengan 2030 sebagaimana tertuang pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan produksi pertanian, kecukupan konsumsi pangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	73,3	70,45		72,49		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	11,51	11		10,8		10,5		10,23		10		10			
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	-1,07	0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25			
			Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	-11,95	0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25			
			Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	-8,87	0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4			
			Persentase Peningkatan Produksi Daging	%	2,04	1		1		1		1		1		1			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	73,3	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
2.09.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						21.215.685.056		21.427.842.000		20.126.934.000		20.126.934.000		20.126.934.000				
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	21.215.685.056	100	21.427.842.000	100	20.126.934.000	100	20.126.934.000	100	20.126.934.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	24	37.185.100	24	38.000.000	24	38.000.000	24	38.000.000	24	38.000.000	120			
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	19	22	17.415.800	22	17.500.000	22	17.500.000	22	17.500.000	22	17.500.000	110			
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	22	3.474.700	22	4.000.000	22	4.000.000	22	4.000.000	22	4.000.000	110			
2.09.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	1	16.294.600	1	16.500.000	1	16.500.000	1	16.500.000	1	16.500.000	5			
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	100	45	20.244.000.456	45	20.296.142.000	45	19.090.234.000	45	19.020.234.000	45	19.020.234.000	225			
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	178	205	20.236.177.956	205	20.288.142.000	198	19.082.234.000	197	19.012.234.000	192	19.012.234.000	192			
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	26	44	7.822.500	44	8.000.000	44	8.000.000	44	8.000.000	44	8.000.000	220			
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	100	0		11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000	44			
2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000	44			
2.09.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	100	16	513.200	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	80			
2.09.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	16	513.200	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	80			
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	100	17	460.000	17	46.800.000	20	46.800.000	20	46.800.000	20	46.800.000	94			
2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	17	460.000	17	800.000	17	800.000	17	800.000	17	800.000	85			
2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0	0	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	3			
2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	300			
2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	150			
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	289.058.100	8	297.500.000	8	297.500.000	8	297.500.000	8	297.500.000	40			
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	5	2.936.600	6	3.500.000	6	3.500.000	6	3.500.000	6	3.500.000	29			
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5	3.975.300	5	4.000.000	5	4.000.000	5	4.000.000	5	4.000.000	25			
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	2	184.997.400	2	185.000.000	2	185.000.000	2	185.000.000	2	185.000.000	10			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	4	8.400.000	4	8.500.000	4	8.500.000	4	8.500.000	4	8.500.000	20			
2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	4	5	5.937.800	5	6.500.000	5	6.500.000	5	6.500.000	5	6.500.000	25			
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	1.800.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	60			
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	74.411.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	60			
2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	2	6.600.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	10			
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	3	0		2	95.000.000	0		2	70.000.000	2	70.000.000	6			
2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	0	1	45.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	2			
2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	2			
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah	Laporan	24	24	367.054.600	24	370.000.000	24	370.000.000	24	370.000.000	24	370.000.000	120			
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	83.182.600	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	60			
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	283.872.000	12	285.000.000	12	285.000.000	12	285.000.000	12	285.000.000	60			
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	6	277.413.600	6	282.100.000	6	282.100.000	6	282.100.000	6	282.100.000	30			
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	1	39.950.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1			
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	17	159.940.000	17	160.000.000	17	160.000.000	17	160.000.000	17	160.000.000	85			
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	17	22	15.580.000	22	17.000.000	22	17.000.000	22	17.000.000	22	17.000.000	110			
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	51.900.000	1	54.000.000	1	54.000.000	1	54.000.000	1	54.000.000	1			
2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	14	8.540.000	14	9.500.000	14	9.500.000	14	9.500.000	14	9.500.000	70			
2.09.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	0,096	0,0716	1.503.600	0,0716	1.600.000	0,0716	1.600.000	0,0716	1.600.000	0,0716	1.600.000	0,0716			
2	Meningkatnya keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan	Angka	90,42	91,7		92		92,5		93		93,5		93,5			
2.09.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						668.788.500		873.757.000		668.789.000		679.355.000		690.090.000				
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya rasio lumbung pangan yang aktif	Rasio Lumbung Pangan Aktif	%	29,41	35,29		41,18	30.000.000	47,06	30.000.000	52,94	30.000.000	58,82	30.000.000	58,82	Bidang Pangan	Kabupaten Purworejo	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	0	0		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1			
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4			
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya angka kecukupan energi dan protein	Angka Kecukupan Energi	kkal/kapita/hari	1.866	1.880	555.749.200	1.900	655.348.000	1.950	525.749.000	1.980	534.530.000	1.990	543.450.000	1.990	Bidang Pangan	Kabupaten Purworejo	
			Angka Kecukupan Protein	gram/kap/hari	55,7	56		56,1		56,21		56,3		56,4		56,4	Bidang Pangan	Kabupaten Purworejo	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersusunnya Dokumen Ketersediaan Pangan	Dokumen Ketersediaan Pangan yang Disusun	Dokumen	1	1	46.153.300	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1			
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	1	1	36.743.800	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5			
2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Dokumen	0	1	6.750.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	1	2.659.500	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5			
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota yang Disusun	Laporan	0	1	494.490.400	1	500.348.000	1	370.749.000	1	379.530.000	1	388.450.000	5			
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	0	40	494.490.400	40	500.348.000	30	370.749.000	30	379.530.000	30	388.450.000	170			
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	Kelompok	5	5	15.105.500	5	85.000.000	5	85.000.000	5	85.000.000	5	85.000.000	25			
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4			
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	1	15.105.500	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5			
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan desa rentan rawan pangan	Persentase penanganan desa rentan rawan pangan	%	2,29	12,21	91.021.800	19,85	146.208.000	27,48	91.022.000	35,11	92.460.000	42,75	93.921.000	42,75	Bidang Pangan	Kabupaten Purworejo	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Disediakan	Dokumen	0	1	5.398.600	1	5.400.000	1	5.400.000	1	6.500.000	1	7.500.000	5			
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen	0	1	5.398.600	1	5.400.000	1	5.400.000	1	6.500.000	1	7.500.000	5			
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	Kerawanan Pangan yang Ditangani	Dokumen	1	1	85.623.200	1	140.808.000	1	85.622.000	1	85.960.000	1	86.421.000	5			
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	1	1	85.623.200	1	140.808.000	1	85.622.000	1	85.960.000	1	86.421.000	5			
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pangan segar aman asal tumbuhan	Persentase Pangan Segar Aman	%	100	100	22.017.500	100	42.201.000	100	22.018.000	100	22.365.000	100	22.719.000	100	Bidang Pangan	Kabupaten Purworejo	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Pengawasan Pangan Segar	Data Pengawasan Pangan Segar yang Disediakan	Dokumen	1	1	22.017.500	1	42.201.000	1	22.018.000	1	22.365.000	1	22.719.000	5			
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	3.039.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	5			
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	11.488.400	1	31.701.000	1	11.518.000	1	11.865.000	1	12.219.000	5			
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	1	7.490.100	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	5			
3	Meningkatnya produksi pertanian		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	-1,07	0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25			
			Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	-11,95	0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25			
			Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	-8,87	0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4			
			Persentase Peningkatan Produksi Daging	%	2,04	1		1		1		1		1		1			
3.27.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						23.130.393.800		18.165.244.000		17.569.464.000		17.600.521.000		17.632.069.000				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya populasi ternak	Jumlah Populasi Ternak	ST/ tahun	117.322	120.868	11.853.910.500	122.681	7.041.202.000	124.521	7.041.202.000	126.389	7.041.202.000	128.284	7.041.202.000	128.284	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya produksi komoditas pertanian strategis	Jumlah Produksi Padi	Ton/ tahun	390.600	392.555		393.537		394.521		395.507		396.496		396.496	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
			Jumlah Produksi Jagung	Ton/ tahun	6.635	6.675		6.695		6.715		6.735		6.755		6.755	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
			Jumlah Produksi Cabai	Ton/ tahun	3.251	3.277		3.290		3.303		3.317		3.330		3.330	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
			Jumlah Produksi Durian	Ton/ tahun	5.880	5.909		5.924		5.939		5.954		5.969		5.969	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
			Jumlah Produksi Biofarmaka	Ton/ tahun	4.464	4.487		4.498		4.509		4.520		4.532		4.532	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
			Jumlah Produksi Kelapa	Ton/ tahun	36.752	37.046		37.194		37.343		37.493		37.642		37.642	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
			Jumlah Produksi Kopi	Ton/ tahun	165	166		167		168		168		169		169	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
			Jumlah Produksi Tembakau	Ton/ tahun	292	295		297		298		300		301		301	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	3.301.428.800	1	3.591.202.000	1	3.591.202.000	1	3.591.202.000	1	3.591.202.000	5			
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	1	3.301.428.800	1	3.091.202.000	1	3.091.202.000	1	3.091.202.000	1	3.091.202.000	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4			
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan yang Dikelola	Dokumen	1	1	3.438.927.500	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	5			
		Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan	Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang Dikelola	Dokumen	1	1		1		1		1		1		5			
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Dokumen	1	1	3.020.780.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	5			
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	1	1	418.147.500	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	5			
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lainnya	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	5.113.554.200	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	5			
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	1.128	808	5.113.554.200	300	2.000.000.000	300	2.000.000.000	300	2.000.000.000	300	2.000.000.000	2.008			
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya kemanfaatan prasarana pertanian yang disediakan	Persentase Kemanfaatan Prasarana Pertanian	%	100	100	8.562.628.700	100	9.062.629.000	100	8.562.629.000	100	8.562.629.000	100	8.562.629.000	100	Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Purworejo	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	Dokumen	0	0		1	650.000.000	0		0		0		0			
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Dokumen	0	0	0	1	350.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	8.546.385.700	1	8.350.000.000	1	8.500.000.000	1	8.500.000.000	1	8.500.000.000	5			
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	56	49	5.987.547.700	38	5.700.000.000	35	5.250.000.000	35	5.250.000.000	35	5.250.000.000	192			
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	0	0	0	0	1			
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	0	0	2	400.000.000	0	0	0	0	0	0	2			
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	17	20	2.558.838.000	15	2.250.000.000	15	2.250.000.000	15	2.250.000.000	15	2.250.000.000	80			
3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	1			
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	2	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	0	0	1			
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing	Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing yang Dikelola	Bulan	12	12	16.243.000	12	62.629.000	12	62.629.000	12	62.629.000	12	62.629.000	60			
3.27.03.2.03.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Laporan	1	1	16.243.000	1	62.629.000	1	62.629.000	1	62.629.000	1	62.629.000	5			
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Kasus	306	294	396.842.700	288	396.843.000	282	396.843.000	276	403.113.000	270	409.482.000	270	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kabupaten Purworejo	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular	Layanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular yang Dilaksanakan	Kecamatan	0	0		16	20.000.000	16	20.000.000	16	20.000.000	16	20.000.000	16			
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota	Laporan	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4			
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan	Laporan Hasil Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan	Dokumen	0	0		1	22.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4			
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	0	0	0	1	22.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4			
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang Dikelola	Dokumen	1	1	346.623.900	1	304.843.000	1	306.843.000	1	313.113.000	1	319.482.000	5			
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	1	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4			
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1	1	346.623.900	1	284.843.000	1	286.843.000	1	293.113.000	1	299.482.000	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dilaksanakan	Dokumen	0	1	50.218.800	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5			
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	1	50.218.800	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5			
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	100	151.749.400	100	269.570.000	100	151.749.000	100	154.147.000	100	156.583.000	100	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Dilaksanakan	Laporan	1	1	151.749.400	1	269.570.000	1	151.749.000	1	154.147.000	1	156.583.000	5			
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	752	250	151.749.400	450	269.570.000	250	151.749.000	250	154.147.000	250	156.583.000	1.450			
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan kapasitas kelompok tani	Persentase Penerapan Teknologi Pertanian	%	15,01	21,01	2.165.262.500	24	1.395.000.000	27,02	1.417.041.000	30,01	1.439.430.000	33	1.462.173.000	33	Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Purworejo	
			Skor Kapasitas Kelompok Tani	Skor	239	260		270		280		290		300		300	Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Purworejo	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian yang Dilaksanakan	Kecamatan	16	16	2.165.262.500	16	1.395.000.000	16	1.417.041.000	16	1.439.430.000	16	1.462.173.000	16			
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	16	16	1.308.080.200	16	470.000.000	16	475.000.000	16	480.000.000	16	485.000.000	16			
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	2.512	2.500	764.835.800	2.500	765.000.000	2.500	774.041.000	2.500	784.430.000	2.500	792.173.000	2.500			
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	5	5	81.467.400	5	140.000.000	5	145.000.000	5	150.000.000	5	155.000.000	25			
3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	1	1	10.879.100	1	20.000.000	1	23.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	5			
Jumlah							**45.014.867.356**		**40.486.843.000**		**38.365.187.000**		**38.406.810.000**		**38.449.093.000**				

Pembangunan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, setiap daerah merumuskan program prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan dengan cermat dan terencana. Untuk memastikan pencapaian tujuan program tersebut, diperlukan serangkaian subkegiatan yang terfokus dan terkoordinasi. Subkegiatan prioritas ini akan menjadi bagian integral dari upaya mencapai visi dan misi daerah, serta menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, subkegiatan prioritas adalah aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk mendukung dan mempercepat pencapaian tujuan program-program prioritas. Subkegiatan ini biasanya bersifat lebih teknis dan spesifik, dengan fokus pada kebutuhan nyata di lapangan. Oleh karena itu, daftar subkegiatan prioritas ini perlu disusun dengan mengacu pada kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur daerah yang bersangkutan.

Daftar subkegiatan prioritas dirancang untuk mendukung pencapaian program-program pembangunan daerah yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Setiap subkegiatan yang diusulkan tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah mendesak, tetapi juga untuk menciptakan landasan yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan. Prioritas dalam penyusunan subkegiatan ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat, potensi daerah, serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan subkegiatan prioritas ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan warganya. Penetapan daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan/ Material	Penyediaan Bahan/ Material	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya rasio lumbung pangan yang aktif			
			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya angka kecukupan energi dan protein			
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM)	
				Penyelenggaraan Pasar Tani	
			Pemantauan Stok Pangan	Penyusunan Dokumen Pemantauan Stok Bahan Pangan	
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penyusunan Dokumen Neraca Bahan Makanan	
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Penyusunan dokumen Pola Pangan Harapan (PPH)	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi	Pelatihan Pangan Lokal	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
				Sosialisasi pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	
				Lomba Olahan Pangan Lokal	
				Lomba Cipta Menu	
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan desa rentan rawan pangan			
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	Pelatihan di desa rentan rawan pangan	
				Sosialisasi Stop Boros Pangan	
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pangan segar aman asal tumbuhan			
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	
				Pembinaan dan Monitoring ke Pelaku Usaha pangan segar asal tumbuhan	
			Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Pangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi komoditas pertanian strategis			
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengadaan alat dan mesin pertanian	
				Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	
				Pengembangan varietas unggul	
				Fasilitasi indikasi geografis komoditas pertanian	
				Pelatihan UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian)	
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengadaan bibit tanaman	
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	penjaminan kelestarian sumber daya genetik kambing Kaligesing	
				Layanan inseminasi buatan	
				Kontes kambing kaligesing	
			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	penyediaan bibit ternak kepada kelompok masyarakat	
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya kemanfaatan prasarana pertanian yang disediakan			
			Pengembangan Prasarana Pertanian		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Update data jaringan irigasi tersier	
			Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota	Update Peta LP2B	
			Pembangunan Prasarana Pertanian		
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Air Tanah Dangkal (ATD)	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Puskeswan	
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH)	
			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Pengawasan wilayah sumber bibit Kambing Kaligesing	
8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis			
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota		
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	
				Pelatihan kader zoonosis	
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Layanan jasa laboratorium kesehatan hewan	
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Layanan kesehatan dan vaksinasi hewan	
				Promosi dan preventif kesehatan hewan	
				Survailans/ pengamatan penyakit hewan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha)	
				Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH)	
				Pengawasan hewan kurban	
				Operasional Rumah Potong Hewan (RPH)	
				Pembinaan pelaku usaha peternakan	
9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Penyediaan pestisida/ insektisida	
				Sekolah Lapang Agensia Hayati	
				Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	
				Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu	
10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan kapasitas kelompok tani			
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Fasilitasi Balai Penyuluhan Pertanian	
				Fasilitasi Komisi Penyuluhan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Penyusunan Programa Penyuluhan	
				Pelatihan bagi penyuluh pertanian	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pelatihan petani	
				Penilaian kelompok tani	
				Fasilitasi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	
				Pembinaan petani muda	
				Pembinaan kelembagaan petani	
				Penyuluhan pertanian ramah lingkungan	
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan sekolah lapang pertanian	
			Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	

4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Rencana Strategis (Renstra) bukan hanya berfungsi sebagai alat perencanaan internal untuk pencapaian tujuan suatu daerah, tetapi juga harus sejalan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Hal ini penting agar setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung upaya pembangunan yang lebih besar dan holistik. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra adalah bagaimana daerah memberikan dukungan terhadap kebijakan nasional, provinsi, serta kegiatan unggulan yang telah ditetapkan.

a. Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional)

   Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta sebagai implementasi atas komitmen pemerintah dalam mewujudkan delapan agenda prioritas pembangunan nasional atau Asta Cita. Salah satu agenda penting dalam Asta Cita adalah Asta Cita 2, yaitu Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

   Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian Asta Cita 2, khususnya pada aspek swasembada pangan sebagai pilar utama kemandirian bangsa dan ketahanan nasional. Dukungan tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra tahun 2025–2029, antara lain:

   1. Penguatan Produksi Pangan Lokal sebagai Basis Swasembada
      Melalui program peningkatan produksi komoditas pangan strategis, seperti padi, jagung, dan hortikultura, serta pengembangan subsektor peternakan, Dinas mendorong optimalisasi sumber daya lahan yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo. Upaya ini diarahkan untuk mencapai ketersediaan pangan yang cukup, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi lokal daerah.
   2. Peningkatan Kemandirian Pangan Masyarakat
      Dinas melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan pemanfaatan pekarangan, gerakan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, serta edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri secara pangan dan tidak bergantung pada produk luar.
   3. Penguatan Cadangan dan Distribusi Pangan Daerah
      Guna mendukung stabilitas dan ketahanan pangan, Renstra Dinas juga memuat arah kebijakan peningkatan kapasitas cadangan pangan pemerintah daerah, penguatan sistem logistik pangan, serta pengendalian inflasi komoditas pangan strategis. Kegiatan ini berperan dalam menjamin ketersediaan pangan yang merata, terutama dalam kondisi darurat atau bencana.
   4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian
      Dalam mendukung agenda kemandirian yang berkelanjutan, Dinas mendorong transformasi digital di sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem pertanian cerdas

(smart farming), akses pasar digital, serta integrasi data produksi dan distribusi pangan. Langkah ini selaras dengan semangat pengembangan ekonomi digital dalam Asta Cita 2.

5. Penguatan Ekonomi Hijau dalam Pertanian
   Penerapan praktik pertanian ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, pengendalian hama terpadu, dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), menjadi bagian dari strategi Dinas untuk mendukung ekonomi hijau. Ini juga merupakan langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pertanian serta ketahanan sumber daya alam daerah.

Melalui pelaksanaan berbagai strategi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berperan langsung dalam membangun fondasi kemandirian daerah yang kuat, terutama dalam aspek ketahanan pangan yang menjadi unsur vital dalam sistem pertahanan negara. Ketahanan pangan yang kokoh bukan hanya menjamin kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi komponen penting dalam menciptakan stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.

Dengan demikian, pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tahun 2025–2029 merupakan bentuk nyata dukungan terhadap Asta Cita 2, khususnya dalam memperkuat kemandirian bangsa melalui pencapaian swasembada pangan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkeadilan. Penetapan dukungan terhadap asta cita sebagaimana tertuang pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4.
Dukungan terhadap Asta Cita

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Pangan	DKPP
		Penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM)	Pangan	DKPP
		Penyelenggaraan Pasar Tani	Pangan	DKPP
		Penyusunan Dokumen Pemantauan Stok Bahan Pangan	Pangan	DKPP
		Penyusunan Dokumen Neraca Bahan Makanan	Pangan	DKPP
		Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Pangan	DKPP
		Penyusunan dokumen Pola Pangan Harapan (PPH)	Pangan	DKPP
		Pelatihan Pangan Lokal	Pangan	DKPP
		Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Pangan	DKPP
		Pelatihan di desa rentan rawan pangan	Pangan	DKPP
		Sosialisasi Stop Boros Pangan	Pangan	DKPP
		Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	Pangan	DKPP
		Pembinaan dan Monitoring ke Pelaku Usaha pangan segar asal tumbuhan	Pangan	DKPP
		Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Pangan	Pertanian	DKPP

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Pertanian	DKPP
		Pengadaan alat dan mesin pertanian	Pertanian	DKPP
		Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Pertanian	DKPP
		Pengembangan varietas unggul	Pertanian	DKPP
		Fasilitasi indikasi geografis komoditas pertanian	Pertanian	DKPP
		Pelatihan UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian)	Pertanian	DKPP
		Pengadaan bibit tanaman	Pertanian	DKPP
		penjaminan kelestarian sumber daya genetik kambing Kaligesing	Pertanian	DKPP
		Layanan inseminasi buatan	Pertanian	DKPP
		Kontes kambing kaligesing	Pertanian	DKPP
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Pertanian	DKPP
		penyediaan bibit ternak kepada kelompok masyarakat	Pertanian	DKPP
		Update data jaringan irigasi tersier	Pertanian	DKPP
		Update Peta LP2B	Pertanian	DKPP
		Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pertanian	DKPP
		Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	Pertanian	DKPP
		Pembangunan Air Tanah Dangkal (ATD)	Pertanian	DKPP

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	Pertanian	DKPP
		Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Puskeswan	Pertanian	DKPP
		Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH)	Pertanian	DKPP
		Pengawasan wilayah sumber bibit Kambing Kaligesing	Pertanian	DKPP
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	Pertanian	DKPP
		Pelatihan kader zoonosis	Pertanian	DKPP
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pertanian	DKPP
		Layanan jasa laboratorium kesehatan hewan	Pertanian	DKPP
		Layanan kesehatan dan vaksinasi hewan	Pertanian	DKPP
		Promosi dan preventif kesehatan hewan	Pertanian	DKPP
		Survailans/ pengamatan penyakit hewan	Pertanian	DKPP
		Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha)	Pertanian	DKPP
		Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH)	Pertanian	DKPP
		Pengawasan hewan kurban	Pertanian	DKPP
		Operasional Rumah Potong Hewan (RPH)	Pertanian	DKPP
		Pembinaan pelaku usaha peternakan	Pertanian	DKPP
		Penyediaan pestisida/ insektisida	Pertanian	DKPP
		Sekolah Lapang Agensia Hayati	Pertanian	DKPP

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	Pertanian	DKPP
		Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu	Pertanian	DKPP
		Fasilitasi Balai Penyuluhan Pertanian	Pertanian	DKPP
		Fasilitasi Komisi Penyuluhan	Pertanian	DKPP
		Pelatihan bagi penyuluh pertanian	Pertanian	DKPP
		Pelatihan petani	Pertanian	DKPP
		Pembinaan petani muda	Pertanian	DKPP
		Pembinaan kelembagaan petani	Pertanian	DKPP
		Penyelenggaraan sekolah lapang pertanian	Pertanian	DKPP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran, strategi, serta program prioritas pembangunan sektor pangan dan pertanian di daerah. Renstra ini tidak hanya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah, tetapi juga berorientasi pada pencapaian agenda nasional, termasuk Program Strategis Nasional Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, merupakan tantangan multidimensional yang berdampak pada kesejahteraan, ketahanan pangan, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo memegang peran strategis dalam mendukung upaya pemerintah daerah dan pusat dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pendekatan berbasis penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan petani dan pekebun kecil, serta peningkatan akses terhadap sumber penghidupan yang produktif. Dukungan tersebut dituangkan dalam Renstra Dinas melalui beberapa kebijakan dan program berikut:

1. Peningkatan Ketersediaan dan Aksesibilitas Pangan bagi Rumah Tangga Miskin
   Dinas melaksanakan program penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, pengendalian inflasi komoditas pangan strategis, serta fasilitasi distribusi pangan bersubsidi. Langkah ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan memastikan tidak terjadi kelangkaan atau lonjakan harga yang dapat memperparah kondisi kemiskinan, terutama di wilayah rentan.
2. Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Petani
   Melalui program bantuan sarana dan prasarana pertanian, pelatihan keterampilan, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani seperti kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), Dinas mendukung peningkatan pendapatan dan kapasitas produksi masyarakat miskin yang bergantung pada sektor pertanian.
3. Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
   Dinas mendorong pembentukan kawasan pertanian terpadu (integrated farming) dan lumbung pangan desa yang melibatkan masyarakat miskin sebagai pelaku utama. Model ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan di pedesaan.
4. Pemanfaatan Pekarangan dan Diversifikasi Sumber Pangan Keluarga
   Salah satu strategi pengurangan kemiskinan ekstrem adalah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar rumah tangga miskin. Program pemanfaatan pekarangan menjadi sarana untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan mengurangi beban pengeluaran pangan harian.
5. Sinergi dan Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem
   Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo secara aktif menjalin sinergi lintas perangkat daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta lembaga sosial masyarakat dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan, termasuk melalui program padat karya, pendampingan usaha tani, dan fasilitasi akses permodalan serta pemasaran.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 juga disusun untuk mendukung pembangunan nasional adalah melalui partisipasi aktif dalam Program Strategis Nasional terkait Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/ Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Kabupaten Purworejo sebagai salah satu lumbung pangan strategis di wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah, memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan dan stabilisasi beras nasional. Oleh karena itu, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo memuat arah kebijakan dan strategi yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat pengelolaan komoditas gabah/beras dalam negeri, sekaligus mengoptimalkan fungsi cadangan beras pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat, terutama pada saat krisis, bencana, atau gejolak harga.
Adapun bentuk dukungan Renstra Dinas terhadap program strategis nasional tersebut meliputi:

1. Penguatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Padi
   Renstra Dinas menempatkan peningkatan produksi padi sebagai salah satu prioritas utama. Melalui program intensifikasi pertanian, penyediaan benih unggul, pemanfaatan teknologi tepat guna, perbaikan jaringan irigasi pertanian, serta perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), Dinas berupaya menjaga dan meningkatkan volume produksi gabah/ beras lokal untuk mendukung pengadaan dalam negeri.
2. Sinergi dalam Pengelolaan dan Penyerapan Gabah Petani
   Dinas mendorong koordinasi antara petani, koperasi tani, Bulog, dan pelaku usaha penggilingan padi guna memperkuat sistem rantai pasok gabah. Upaya ini bertujuan agar harga gabah di tingkat petani tetap stabil dan penyerapan hasil panen oleh pemerintah atau mitra strategis dapat berjalan optimal, sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
3. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
   Sebagai bagian dari sistem cadangan pangan nasional, Dinas memiliki peran dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Renstra Dinas mengarahkan penguatan CPPD melalui pengadaan beras lokal berkualitas, pengelolaan gudang penyimpanan yang memenuhi standar, serta pemantauan berkala terhadap ketersediaan dan ketahanan stok.
4. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Kondisi Darurat dan Gejolak Harga
   Dinas berperan aktif dalam mendukung penyaluran CBP untuk intervensi pasar, bantuan bencana alam, serta bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan. Hal ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan pemutakhiran data penerima manfaat agar penyaluran CBP dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.
5. Peningkatan Sistem Informasi dan Monitoring Pangan
   Untuk mendukung pengambilan kebijakan yang responsif dan berbasis data, Dinas mengembangkan sistem informasi pangan daerah yang mencakup data produksi, konsumsi, distribusi, harga, dan stok gabah/ beras. Sistem ini menjadi landasan dalam merumuskan intervensi kebijakan dan perencanaan pengadaan serta penyaluran cadangan beras pemerintah secara efektif.

Dengan pelaksanaan program-program tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk menjadi

bagian dari solusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem secara bertahap dan berkelanjutan. Renstra ini secara konkret menunjukkan bahwa sektor pangan dan pertanian memiliki peranan sentral dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan melalui pendekatan produktif, berkeadilan, dan berbasis pemberdayaan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya pada aspek pengelolaan beras sebagai pangan pokok strategis. Peran aktif ini tidak hanya memperkuat stabilitas pasokan dan harga beras, tetapi juga menjadi bagian integral dari perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana, krisis ekonomi, maupun gejolak pasar.

Melalui optimalisasi pelaksanaan program strategis ini, diharapkan terwujud masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera, mandiri secara ekonomi, serta memiliki ketahanan pangan yang kokoh sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Penetapan dukungan terhadap Program Strategis Nasional tertuang pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5.
Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Terkait
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penanggulangan kemiskinan				
	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Tani	Pangan	DKPP
			Memantau harga dan pasokan pangan	Pangan	DKPP
			Pengadaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah	Pangan	DKPP
			Pelatihan olahan pangan lokal	Pangan	DKPP
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk desa rentan rawan pangan	Pangan	DKPP
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Penyuluhan pertanian	Pertanian	DKPP
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penyediaan jaringan irigasi tersier, air tanah dangkal, dan jalan usaha tani	Pertanian	DKPP
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Alsintan	Pertanian	DKPP
			Penyediaan bibit ternak	Pertanian	DKPP
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pelayanan kesehatan hewan	Pertanian	DKPP
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pertanian	DKPP

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Terkait
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2	Ketahanan pangan				
	a. Pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras dalam negeri	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengadaan cadangan pangan	Pangan	DKPP
	b. Penyaluran cadangan beras pemerintah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyaluran cadangan pangan	Pangan	DKPP

b. Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi)
   Dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas yang didelegasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah memasukkan agenda peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor peternakan, khususnya dalam bidang pemotongan hewan, ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.
   Salah satu bentuk nyata dari dukungan tersebut adalah pelaksanaan program pelatihan dan sertifikasi Juru Sembelih Halal (Juleha), serta pembinaan terhadap penerapan standar teknis Rumah Pemotongan Hewan (RPH) sesuai dengan ketentuan teknis dan syariat Islam. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjamin keamanan, higienitas, dan kehalalan produk pangan asal hewan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk peternakan lokal.
   Dukungan Renstra difokuskan pada beberapa hal berikut:
   1. Fasilitasi Pelatihan dan Sertifikasi Juru Sembelih Halal (Juleha)
      Dinas menyelenggarakan pelatihan teknis bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal dan instansi terkait, guna mencetak tenaga juru sembelih yang kompeten, bersertifikat, serta memahami prinsip animal welfare dan syarat-syarat penyembelihan halal.
   2. Pembinaan dan Pengawasan Rumah Pemotongan Hewan (RPH)
      Dalam rangka pemenuhan standar nasional dan syariat Islam, Dinas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan RPH yang mencakup aspek kebersihan, sanitasi, perizinan, hingga tata cara pemotongan. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian operasional RPH dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan regulasi halal.
   3. Sosialisasi dan Edukasi kepada Pelaku Usaha Peternakan dan Masyarakat
      Renstra juga mencakup kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha peternakan, pemilik RPH, serta masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal dan standar pemotongan hewan yang benar guna menjamin keamanan pangan dan perlindungan konsumen.
   4. Kolaborasi dan Sinkronisasi Program dengan Pemerintah Provinsi
      Dinas secara aktif menjalin koordinasi dan sinkronisasi program dengan Dinas Provinsi sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan desentralisasi teknis, serta memastikan kelancaran pelaksanaan program delegasi.

   Melalui dukungan ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk turut andil dalam peningkatan mutu produk hewani, menjaga nilai-nilai kehalalan dalam proses produksi pangan, serta memperkuat sistem jaminan pangan daerah yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Penetapan dukungan terhadap program delegasi provinsi sebagaimana tertuang pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6.
Dukungan Terhadap Program Delegasi Provinsi

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Pertanian	DKPP
		Pelatihan juru sembelih halal	Pertanian	DKPP

c. Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan)
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan yang menyeluruh dan berkelanjutan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah menetapkan dukungan strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah terhadap Program Unggulan Daerah: Sejahtera Wargane.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, serta penguatan sistem pengawasan keamanan pangan di seluruh rantai pasok. Beberapa bentuk konkret dukungan Renstra antara lain:
    1. Peningkatan Pengawasan dan Edukasi Keamanan Pangan
    Dinas melaksanakan program pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan dan hewan. Selain itu, dilakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai praktik keamanan pangan, sanitasi, dan higiene dalam produksi serta pengolahan pangan.
    2. Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Pangan Segar
    Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan pangan, dinas mendorong pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi seperti Prima 3, NKV (Nomor Kontrol Veteriner), dan label pangan segar. Upaya ini bertujuan meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi konsumen.
    3. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
    Untuk meningkatkan aksesibilitas pangan, khususnya saat terjadi krisis atau bencana, dinas mengelola cadangan pangan pemerintah daerah. Penguatan cadangan ini mencakup penyimpanan, rotasi stok, dan penyaluran pangan untuk penanganan rawan pangan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok.
    4. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dan Toko Tani
    Renstra juga memuat dukungan terhadap pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI) yang berperan sebagai simpul distribusi pangan murah dan sehat bagi masyarakat. Program ini diarahkan untuk memperpendek rantai distribusi dan memastikan keterjangkauan harga pangan di tingkat konsumen.
    5. Peningkatan Akses Pangan bagi Wilayah Rawan Pangan dan Rentan Gizi
    Dinas melakukan pemetaan wilayah rawan pangan dan menyusun intervensi spesifik, seperti distribusi pangan, dan pemberdayaan

kelompok tani untuk diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo juga disusun selaras dengan Program Unggulan Daerah: Ayem Petanine. Adapun bentuk dukungan strategis dalam Renstra terhadap enam fokus program unggulan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Penggunaan Alat Teknologi Pertanian (Pompa Air, Sprayer, Traktor Tangan, Sel Surya, dan Lainnya)
   Renstra memuat program fasilitasi dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani guna mendukung mekanisasi pertanian. Peningkatan penggunaan teknologi seperti pompa air untuk irigasi, sprayer untuk pengendalian hama terpadu, traktor tangan untuk olah lahan, serta pemanfaatan energi alternatif seperti sel surya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja konvensional.
2. Revitalisasi Sistem Pertanian
   Dalam rangka memperbaiki sistem produksi yang berkelanjutan, Renstra mengakomodasi kegiatan penguatan kelembagaan petani, perbaikan sistem irigasi, peningkatan kualitas input pertanian, dan pengembangan sistem pertanian terpadu. Langkah-langkah ini mendukung terciptanya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar.
3. Optimalisasi Pemakaian Pupuk Organik
   Dinas mendorong penggunaan pupuk organik melalui pelatihan pembuatan pupuk kompos dan biofertilizer, serta pemberdayaan kelompok tani organik. Upaya ini selaras dengan tujuan untuk menjaga kesuburan tanah, mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, dan menghasilkan produk pertanian yang lebih ramah lingkungan dan sehat.
4. Pengembangan Infrastruktur Pertanian dalam Arti Luas
   Renstra mengarahkan pengembangan infrastruktur pertanian yang mencakup pembangunan jalan usaha tani dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta prasarana pendukung pertanian lainnya. Infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung kelancaran proses produksi, distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses petani ke pasar.
5. Memperkuat Akses pada Informasi dan Teknologi Pertanian
   Dinas mendukung penguatan sistem penyuluhan pertanian berbasis digital dan peningkatan kapasitas penyuluh. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, petani dapat memperoleh akses terhadap data iklim, harga pasar, teknologi budidaya, dan inovasi pertanian secara cepat dan akurat.
6. Modernisasi Pertanian
   Renstra secara keseluruhan diarahkan untuk mendorong transformasi sektor pertanian menuju sistem pertanian modern melalui mekanisasi, digitalisasi, peningkatan SDM pertanian, serta pengembangan model pertanian presisi. Modernisasi ini juga didukung dengan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Melalui strategi-strategi tersebut, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo secara aktif berkontribusi dalam menciptakan sistem pangan daerah yang aman, berkelanjutan, dan inklusif serta mewujudkan sistem pertanian yang tangguh, produktif, efisien, dan

adaptif terhadap tantangan zaman. Diharapkan, dukungan ini mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman kerawanan pangan sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Penetapan dukungan terhadap Program Unggulan Daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7.
Dukungan Terhadap Program Unggulan Daerah

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Sejahtera Wargane	Memperbaiki keamanan pangan dan menambah aksesibilitas pangan bagi masyarakat.	Pengawasan keamanan pangan	Pangan	DKPP
			Pengadaan cadangan pangan pemerintah	Pangan	DKPP
2	Ayem Petanine	Menambah penggunaan alat teknologi pertanian (seperti pompa air, sprayer, traktor tangan, sel surya, dll)	Penyediaan Alsintan	Pertanian	DKPP
		Revitalisasi sistem pertanian	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian	Pertanian	DKPP
			Penyuluhan pertanian	Pertanian	DKPP
			Pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan bencana pertanian	Pertanian	DKPP
		Mengoptimalisasi pemakaian pupuk organik	Penyuluhan pertanian	Pertanian	DKPP
		Pengembangan infrastruktur pertanian dalam arti luas	Penyediaan prasarana pertanian	Pertanian	DKPP
		Memperkuat akses pada informasi dan teknologi pertanian	Penyuluhan pertanian	Pertanian	DKPP
		Modernisasi pertanian	Penyediaan Alsintan	Pertanian	DKPP
			Penyuluhan pertanian	Pertanian	DKPP
			Pelayanan inseminasi buatan	Pertanian	DKPP

4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purworejo serta menjamin tercapainya tujuan pembangunan bidang ketahanan pangan dan pertanian secara berkelanjutan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menetapkan sejumlah indikator kinerja utama (IKU) yang relevan, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Indikator-indikator tersebut mencerminkan capaian yang hendak diraih selama periode Rencana Strategis, serta menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan, evaluasi, dan pengendalian kinerja organisasi perangkat daerah. Adapun indikator kinerja dan target yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
   Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian peningkatan produksi komoditas utama tanaman pangan, seperti padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Penetapan target dilakukan berdasarkan potensi wilayah, tren historis produksi, serta dukungan program peningkatan produktivitas dan intensifikasi pertanian.
2. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura
   Indikator ini mencerminkan pertumbuhan produksi komoditas hortikultura strategis, seperti sayuran dan buah-buahan. Target ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar, potensi agroklimat, serta dukungan sarana produksi dan pengembangan kelembagaan petani hortikultura. Komoditas hortikultura yang dihitung adalah: alpukat, anggur, belimbing, duku/ langsat/ kokosan, durian, jambu air, jambu biji, jengkol, jeruk besar, jeruk, jeruk siam/ keprok, jeruk pamelo, jeruk lemon, lengkeng, mangga, manggis, markisa/ konyal, melinjo, buah naga, nangka/ cempedak, nenas, pepaya, petai, pisang, rambutan, sawo, salak, sirsak, sukun, bawang daun, bawang merah, bayam, buncis, cabai besar, cabai besar/ tw/ teropong, cabai keriting, cabai rawit, jamur, jamur lainnya, jamur tiram, kacang panjang, kangkung, mentimun, labu siam, melon, semangka, terung, tomat, dlingo/ dringo, jahe, jeruk nipis, kapulaga, kencur, kunyit, laos/ lengkuas, lempuyang, mahkota dewa, mengkudu/ pace, rimpang, serai hijau, temuireng, temukunci, dan temulawak.
3. Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan
   Indikator ini mengukur kontribusi subsektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Komoditas yang dihitung adalah: aren, cengkeh, jambu mete, jarak pagar, kakao, kapok, karet, kelapa dalam, kelapa deres, kelapa genjah, kemukus, kenanga, kopi arabika, kopi robuska, lada, pala, panili, nilam, tebu, dan tembakau. Target diarahkan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk perkebunan daerah.
4. Persentase Peningkatan Produksi Daging
   Indikator ini mencerminkan kinerja subsektor peternakan, khususnya dalam peningkatan ketersediaan protein hewani. Target pertumbuhan produksi daging ditetapkan berdasarkan strategi peningkatan populasi ternak, perbaikan manajemen pakan dan kesehatan ternak, serta dukungan pengembangan agribisnis peternakan. Komoditas yang dihitung adalah: sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras, ayam buras, itik, kelinci, burung puyuh, angsa, entog, dan merpati.
5. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/ PoU)
   Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi penduduk yang mengalami kekurangan asupan energi dari konsumsi pangan.

Penurunan angka prevalensi PoU menjadi target strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Purworejo.

6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
   Indikator ini mencerminkan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Skor PPH yang tinggi menunjukkan pola konsumsi yang lebih seimbang dan sesuai dengan anjuran gizi seimbang. Target skor ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan konsumsi pangan rumah tangga dan intervensi edukasi gizi masyarakat.
7. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
   Indikator ini mengukur akuntabilitas kinerja instansi melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Target diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan, serta implementasi manajemen kinerja berbasis hasil di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Seluruh indikator tersebut telah dirumuskan melalui pendekatan partisipatif, memperhatikan kebijakan nasional, prioritas daerah, serta analisis sumber daya dan potensi lokal. Dengan penetapan indikator dan target yang terukur dan realistis, diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan petani serta masyarakat secara umum. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8.
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	Tujuan dan Sasaran
2	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	Tujuan dan Sasaran
3	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	Tujuan dan Sasaran
4	Persentase Peningkatan Produksi Daging	&	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Tujuan dan Sasaran
5	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	12,50	11,93	11,37	10,80	10,23	9,66	Tujuan
6	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	90,73	91,70	92,00	92,50	93,00	93,50	Sasaran
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Tujuan dan Sasaran

Sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo menetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5.7/1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang menekankan pentingnya intervensi sensitif melalui sektor pangan dan pertanian.

Indikator-indikator ini dirumuskan secara terukur, relevan, dan berbasis hasil (*outcome-oriented*), sehingga mampu menjadi alat ukur pencapaian tujuan strategis pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian berkelanjutan, kesehatan hewan, dan kontribusi terhadap percepatan penurunan stunting. Adapun indikator kinerja kunci yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Persentase Ketersediaan Pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan masyarakat)
   Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan pangan pokok secara berkelanjutan, khususnya cadangan beras dan jagung sebagai komoditas utama. Ketersediaan pangan yang memadai merupakan syarat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah, menekan gejolak harga, serta mengantisipasi krisis pangan. Target ditetapkan berdasarkan proyeksi kebutuhan konsumsi masyarakat, kapasitas produksi lokal, serta kemampuan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
2. Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun
   Indikator ini mengukur kinerja sektor pertanian dalam meningkatkan efisiensi dan hasil produksi pada setiap satuan lahan usaha tani. Peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam menjamin ketersediaan pangan, peningkatan pendapatan petani, dan keberlanjutan sistem pertanian. Target produktivitas ditetapkan berdasarkan tren historis, potensi wilayah, serta intervensi program peningkatan sarana produksi, inovasi teknologi budidaya, dan penguatan penyuluhan pertanian.
3. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular
   Indikator ini mencerminkan kapasitas daerah dalam melaksanakan program kesehatan hewan dan pengendalian penyakit zoonosis yang dapat berdampak langsung pada produksi ternak dan kesehatan masyarakat. Penurunan angka kejadian penyakit hewan menular seperti PMK, antraks, dan rabies menjadi indikator penting dalam menjaga keberlanjutan subsektor peternakan dan menjamin keamanan pangan asal hewan. Target ditetapkan berdasarkan hasil surveilans, cakupan vaksinasi, serta respons cepat terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) di lapangan.
4. Ketersediaan Program Pemanfaatan Pekarangan
   Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang menjadi prioritas nasional, karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kesehatan, kecerdasan, maupun produktivitas. Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pendekatan konvergensi, yaitu keterpaduan berbagai program lintas sektor di tingkat pusat, daerah, hingga desa dan kelurahan. Dalam konteks ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo turut berkontribusi melalui penyediaan dan pelaksanaan program pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.

Program pemanfaatan pekarangan, seperti Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Pekarangan Pangan untuk Meningkatkan Pendapatan (Karang Pandan) dan budidaya tanaman sayur dan ternak skala rumah tangga, bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) di tingkat keluarga. Kegiatan ini secara langsung mendukung peningkatan asupan gizi anak dan ibu hamil, yang merupakan kelompok sasaran utama dalam intervensi penurunan stunting.

Hubungan erat antara program ini dan aksi konvergensi PPPS terletak pada aspek intervensi sensitif, yaitu intervensi yang berkontribusi terhadap penurunan stunting secara tidak langsung melalui peningkatan ketahanan pangan keluarga dan perbaikan pola konsumsi. Dengan tersedianya sumber pangan bergizi dari pekarangan, keluarga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini memperkuat partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam mendukung pencapaian indikator konvergensi stunting, khususnya pada aksi keempat (analisis situasi), aksi kelima (rencana kegiatan), dan aksi keenam (rembuk stunting) yang membutuhkan identifikasi dan pelibatan program sektoral di tingkat desa.

Lebih lanjut, keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada integrasi dengan kegiatan Posyandu, PKK, dan penyuluhan gizi yang dikoordinasikan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kecamatan dan desa. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, melalui penyuluh dan tenaga teknis, turut berperan dalam memberikan edukasi pemanfaatan pekarangan serta pembinaan keluarga penerima manfaat untuk memastikan bahwa pangan yang dihasilkan benar-benar mendukung kebutuhan gizi anak dan ibu.

Dengan demikian, penyediaan program pemanfaatan pekarangan tidak hanya menjadi instrumen ketahanan pangan lokal, tetapi juga menjadi bagian integral dalam mendukung pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting, sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari sisi gizi dan kesehatan.

5. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

   Penetapan target untuk indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/ PoU) merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/ SDGs), khususnya Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.

   Indikator ini mengukur persentase penduduk yang asupan energinya tidak mencukupi kebutuhan minimum energi harian yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sehat dan aktif. Penetapan target dilakukan berdasarkan data historis, tren prevalensi dari tahun-tahun sebelumnya, serta proyeksi kondisi sosial-ekonomi dan intervensi kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah. Selain itu, penyesuaian terhadap standar internasional yang ditetapkan oleh FAO dan ketersediaan data nasional juga menjadi pertimbangan utama.

   Target yang ditetapkan harus realistis namun ambisius, dengan mempertimbangkan potensi peningkatan akses pangan, peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengurangan kemiskinan, serta penguatan sistem distribusi pangan. Penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan secara bertahap mencerminkan

keberhasilan berbagai program pemerintah, termasuk program perlindungan sosial, perbaikan gizi, serta pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan pangan.
Dengan penetapan target ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memiliki acuan yang jelas dalam merumuskan kebijakan dan program kerja, serta memastikan sinergi lintas sektor dalam upaya menurunkan angka kelaparan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh indikator dan target kinerja ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran berbasis kinerja, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan pendekatan yang terarah dan terukur, diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh, produktif, dan inklusif, sekaligus mendukung pencapaian target nasional dalam percepatan penurunan stunting. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	Permendagri No. 18 Tahun 2020
2	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ ha	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	Permendagri No. 18 Tahun 2020
3	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-19,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	Permendagri No. 18 Tahun 2020
4	Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan	Desa	7	7	7	7	7	7	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)
5	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	12,50	11,93	11,37	10,80	10,23	9,66	IUP

BAB IV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setiap tahun.
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
d. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

Bupati Purworejo,

Ttd

Yuli Hastuti

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan tersebut sesuai amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun suatu dokumen perencanaan pembangunan yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk masa 5 (lima) tahun yang diimplementasikan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) yang disusun secara tahunan.

Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo, serta Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.

Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode 2025-2029 maka disusun RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Adapun Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 Sebagai Berikut.

a. Persiapan Penyusunan Renstra PD;
b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD;
c. Penyampaian Rancangan Awal RPJMD kepada PD;
d. Penyampaian Rancangan Renstra PD;
e. Forum Perangkat Daerah/Lintas PD;
f. Verifikasi Rancangan Renstra PD;
g. Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD;
h. Reviu APIP;
i. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;
j. Penetapan Renstra PD.

Pada tahap persiapan telah dibentuk Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang diusulkan ke Bappeda untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana terlampir. Selanjutnya Tim Penyusun Renstra menyusun Rancangan Awal Renstra Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 bersamaan dengan penyusunan Rancangan awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan Pasal 109 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, bahwa Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Tahap selanjutnya Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan untuk kemudian disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Purworejo Nomor 000.7.1.3/3980/2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tanggal 21 April 2025 dengan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana terlampir. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah tersebut sebagai bahan penyempurnaan Ranwal Renstra menjadi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029.

Renstra Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo berisi tentang strategi pembangunan bidang perindustrian, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi serta bidang energi sumber daya mineral dengan rincian tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

Adapun hubungan keterkaitan antara tahapan penyusunan RPJMD dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

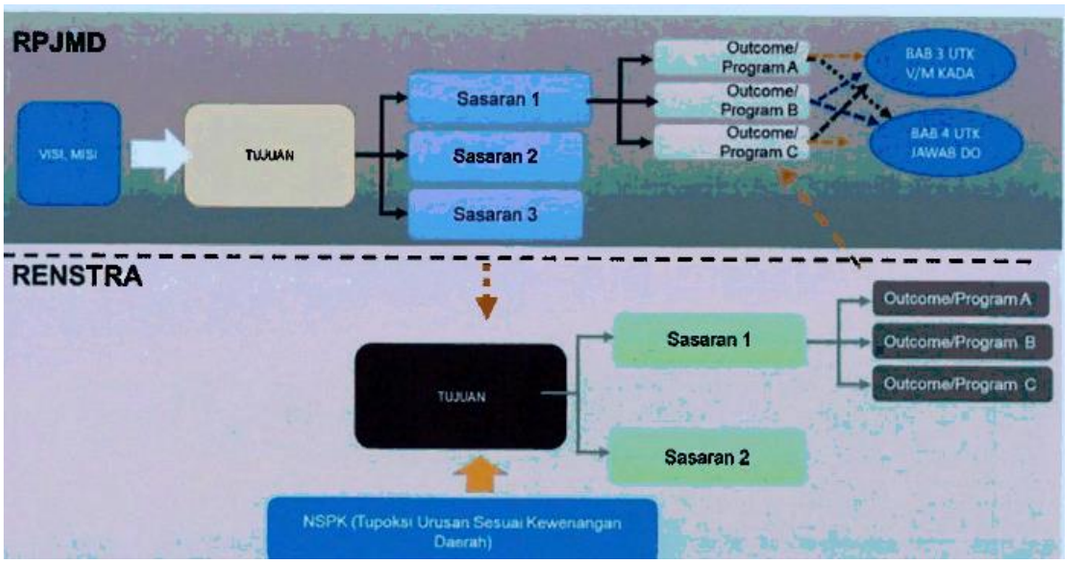

Gambar 1.1

Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo disusun berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo serta mengacu pada Renstra Kementerian Ketenagakerjaan, Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Kementrian Transmigrasi. Selain itu juga mengacu Renstra Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis Perangkat daerah merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis PD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Adapun hubungan antar dokumen perencanaan antara pusat dan daerah tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:

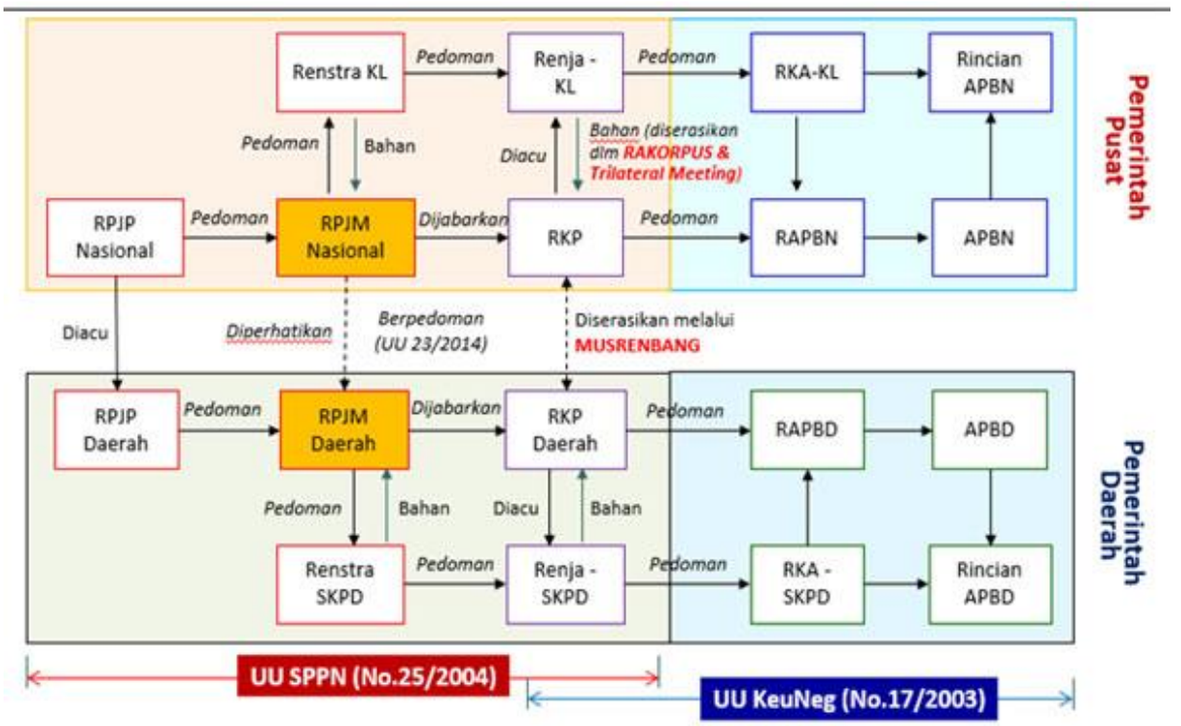

Gambar 1.2
Hubungan antar dokumen perencanaan antara pusat dan daerah

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a921;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
27. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo, serta Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberi gambaran tentang kondisi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu lima tahun yang diwujudkan dalam penyelenggaran pembangunan daerah;
2. Sebagai acuan yang terarah bagi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan pembangunan daerah;

3. Sebagai acuan dalam menyusun pertanggungjawaban atas penyelenggaran program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029;
2. Memberikan landasan dalam menyusun rencana kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam lima tahun mendatang;
3. Sebagai instrument evaluasi, pengendalian, pengawasan kegiatan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra PD.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan data-data dari informasi urusan yang menjadi tanggungjawab PD dan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta tentang gambaran pelayanan Perangkat Daerah meliputi tugas, fungsi dan Struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan Tingkat capaian kinerja perangkat daerah yang telah dihasilkan berdasarkan sasaran/target renstra perangkat daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, tantangan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi serta peluang-peluang pengembangan perangkat daerah dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada melalui renstra perangkat daerah ini, serta permasalahan dan isu strategis perangkat daerah yang menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra yang mengemukakan apa saja faktor-

faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan perangkat daerah, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini dikemukakan telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif. Kemudian uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah. Pada bab ini juga dikemukakan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah tahun 2025-2029 serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi.

Sebagai tindaklanjut dari Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peratutan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.

Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2024, Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi perindustrian, transmigrasi dan tenaga kerja.

Selanjutnya ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2024 bahwa dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian, transmigrasi, dan tenaga kerja;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, transmigrasi, dan tenaga kerja;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peindustrian, transmigrasi, dan tenaga kerja
d. Pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkugan Dinperintransnaker; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Perindustrian;
4. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

5. UPT;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

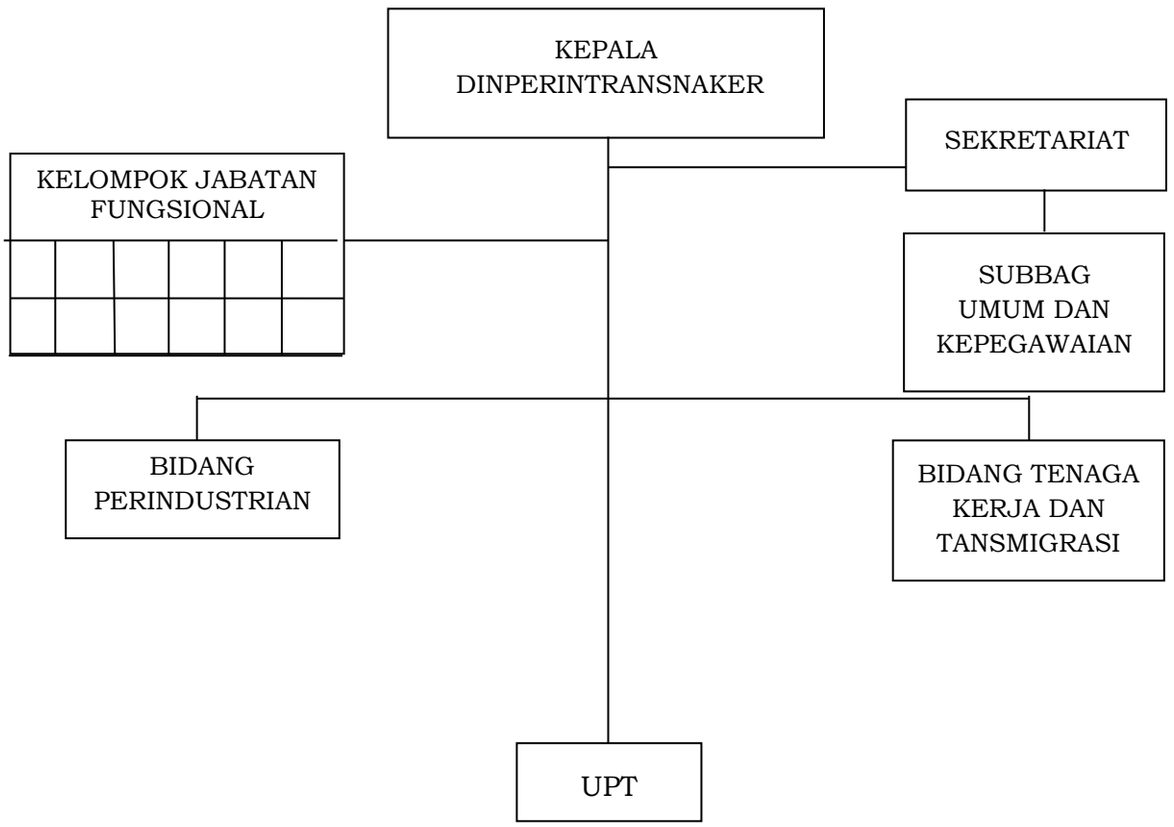

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Purworejo

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo, didukung jumlah pegawai sebanyak 61 orang (kondisi 1 Juli 2025) yang terdiri dari 36 Orang PNS, 15 PPPK orang ASN dan 10 orang tenaga pendukung kegiatan (non ASN).

Tabel 2.1
Distribusi Pegawai
Pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Purworejo

No.	Unit	PNS (orang)	PPPK (orang)	TPK (orang)
1	Kepala Dinas	1		
2	Sekretaris	0		
3	Sekretariat	2	4	
4	Sub Umum dan Kepegawaian	4	5	6
5	Bidang Tenaga Kerja	4	3	0
6	Bidang Perindustrian	3	1	1
7	UPT- BLK	22	2	3
	Jumlah	36	15	10

Sumber data : Dinperintransnaker

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasar Golongan
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Purworejo

No	Golongan	L	P	∑
1	Golongan IV	6	3	9
2	Golongan III	14	9	23
3	Golongan II	4	0	4
4	Golongan I	0	0	0
5	PPPK	11	4	15
6	Non PNS	10	0	10
	Jumlah	45	16	61

Sumber data : Dinperintransnaker

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Struktural (Eselon)
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Purworejo

No	Eselon	L	P	∑
1	II/b	0	0	0
2	II/c	2	0	2
3	II/d	2	0	2
4	III/a	1	0	1
5	III/b	7	2	9
6	III/c	0	0	0
7	III/d	6	7	13
8	IV/a	4	1	5
9	IV/b	0	1	1
10	IV/c	2	1	3
	Jumlah	24	12	36

Sumber data : Dinperintransnaker

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Teknis Fungsional
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Purworejo

No	Jabatan	L	P	∑
1	Mediator Hubungan Industrial	0	2	2
2	Instruktur Pelatihan	15	5	20
3	Pranata Komputer	1	0	1
	Jumlah	16	7	23

Sumber data : Dinperintransnaker

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai (ASN) Berdasarkan Pendidikan
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Purworejo

No	Pendidikan	ASN		PPPK		NON ASN		Σ
		L	P	L	P	L	P	
1	Doktor	1	0	0	0	0	0	1
2	Pasca Sarjana	2	2	0	0	0	0	4
3	Sarjana	13	11	0	0	1	0	25
4	Diploma	2	1	1	1	0	0	5
5	SMA/ Sederajat	6	0	8	5	9	0	28
	Jumlah	24	14	9	6	10	0	63

Sumber data : Dinperintransnaker

Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas operasional kedinasan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadahi relative diperlukan. Adapun asset (sarana dan prasarana) yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo kondisi sampai dengan Maret Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Pendukung

No.	Nama barang	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Dinas	1 unit (terdiri dari 3 gedung)	Di atas tanah 2.027 m2 (1.082 + 945)
2	Gedung UPT BLK	1 unit (terdiri dari gedung kantor, R. Workshop, aula, perumahan instruktur)	Di atas tanah 20.400 m2
3	Gedung Dekranasda	1 unit	Di atas tanah 397m2
4	Gedung Promosi Kopi	1 unit	Di atas tanah 500 m2
5	Gedung Rumah Kemasan	1 unit	Diatas tanah 9.496m2
5	Kendaraan Roda 4	5 unit	Dinas dan Blk
6	Kendaraan Roda 2	15 unit	Dinas dan Blk
7	Komputer	114 unit	Termasuk untuk praktek BLK
8	Laptop	30 buah	Dinas dan Blk
9	Notebook	2 buah	Dinas
10	Printer	52 buah	Termasuk untuk praktek BLK
11	Scanner	2 buah	
12	AC	56 unit	Dinas, BLK, Dekranasda
13	TV	6 buah	Dinas, Dekranasda BLK, Rumah Kopi
14	Telepon	3 unit	Dinas dan Blk
15	Kamera	10 buah	Dinas dan Blk
16	Proyektor	20 buah	Dinas dan Blk
17	CCTV	16 unit	Dekranasda
18	Monitor	2 unit	Dekranasda
19	Tablet	2 buah	Rumah Kopi

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini disajikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya sampai dengan Tahun 2024 (tahun 2025 masih berjalan) dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun (%)						Realisasi capaian tahun (%)						Rasio capaian pada tahun (%)					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	8	9	10			12	13	14	15			17	18	19	20		
	Tujuan PD																					
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan				3,68	5,24	5,83	6,41	7,00	7,59	3,68	3,48	5,11	4,86			100,00	66,41	87,65	75,81		
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				73,29	73,64	75,43	77,23	79,02	80,82	73,29	72,30	74,76	73,72			100,00	99,52	99,11	95,45		
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	82,50	85,00	86,66	85,10			100,00	102,40	103,66	101,30		
	Sasaran PD																					
1	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan				18,34	18,49	18,63	18,78	18,93	19,08	19,80	19,62	19,81	20,06			107,96	106,11	106,33	106,81		
2.	Tingkat Kesempatan Kerja				96,41	96,45	96,69	96,93	97,17	97,42	96,41	95,55	95,98	96,11			131,54	129,75	127,24	124,44		
	Persentase Transmigrans yang Menetap				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00		
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	82,50	85,00	86,66	85,10			100,00	102,40	103,66	101,30		

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Urusan Tenaga Kerja		2.562.905.000	2.029.095.000	2.142.400.000	2.155.820.000	2.206.378.000	-	3.326.205.864	3.269.441.680	3.517.325.873	-	-						
Peningkatan partisipasi angkatan kerja		2.420.905.000	1.927.095.000	2.030.400.000	2.040.820.000	2.091.378.000	-	3.189.399.744	3.150.641.190	3.406.212.878	-	-						
Meningkatnya kesempatan kerja		2.420.905.000	1.927.095.000	2.030.400.000	2.040.820.000	2.091.378.000	-	3.189.399.744	3.150.641.190	3.406.212.878	-	-						
Program Perencanaan Tenaga Kerja		83.000.000	60.000.000	66.000.000	17.000.000	67.000.000	-	75.423.500	28.908.100	23.769.100	-	-						
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		83.000.000	60.000.000	66.000.000	17.000.000	67.000.000	-	75.423.500	28.908.100	23.769.100	-	-						
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		83.000.000						75.423.500					90,87%	0,00%	0,00%	0,00%		-
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			60.000.000	66.000.000	17.000.000	67.000.000		0	28.908.100	23.769.100			0,00%	0,00%	48,18%	35,48%	-	
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		2.057.000.000	1.476.000.000	1.621.000.000	1.662.580.000	1.658.338.000	-	2.678.926.738	2.841.970.890	3.133.781.950	-	-						
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		1.985.032.300	1.427.500.000	1.538.650.000	1.608.415.000	1.563.756.500	-	2.618.045.738	2.807.446.790	3.073.803.850	-	-						
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		1.317.000.000	712.500.000	813.650.000	810.000.000	853.756.500		2.099.163.068	2.624.102.490	2.844.459.450			0,00%	159,39 %	368,30 %	349,59 %		
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		668.032.300	715.000.000	725.000.000	798.415.000	710.000.000		518.882.670	183.344.300	229.344.400			0,00%	77,67%	25,64%	31,63%		
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		16.991.600	16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.500	-	16.323.450	15.128.300	11.939.100	-	-						
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		16.991.600	16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.500		16.323.450	15.128.300	11.939.100			0,00%	96,07%	91,69%	65,78%		
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-		-	2.748.000	-	-						
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lemba ga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000				2.748.000			0,00%	0,00%	0,00%	27,48%		
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		19.976.100	22.000.000	24.200.000	24.200.000	26.620.000	-	19.707.500	19.395.800	25.824.000	-	-						
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		19.976.100	22.000.000	24.200.000	24.200.000	26.620.000		19.707.500	19.395.800	25.824.000			0,00%	98,66%	88,16%	106,71 %		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		25.000.000	-	30.000.000	-	36.000.000	-	24.850.050	-	19.467.000	-	-						
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas TenagaKerja		25.000.000		30.000.000		36.000.000		24.850.050	-	19.467.000			0,00%	99,40%	0,00%	64,89%		
Program Penempatan Tenaga Kerja		274.000.000	198.000.000	217.000.000	223.000.000	222.000.000	-	261.670.906	127.385.400	105.037.138	-	-						
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		144.528.800	88.500.000	95.500.000	95.500.000	95.000.000	-	141.058.956	41.420.400	56.324.638	-	-						
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		118.363.000						116.345.956					0,00%	98,30%	0,00%	0,00%		
Pelayanan antar Kerja		26.165.800	60.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000		24.713.000	37.688.700	46.574.438			0,00%	94,45%	62,81%	71,65%		
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		-		9.750.200			0,00%	0,00%	0,00%	139,29 %		
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		-	3.731.700				0,00%	0,00%	186,59 %	0,00%		
Perluasan Kesempatan Kerja			19.500.000	21.500.000	21.500.000	21.000.000		-					0,00%	0,00%	0,00%			
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		118.471.200	80.000.000	90.000.000	96.000.000	96.000.000	-	109.951.750	85.965.000	31.229.100	-	-						
Job Fair/Bursa Kerja		118.471.200	80.000.000	90.000.000	96.000.000	96.000.000		109.951.750	85.965.000	31.229.100			0,00%	92,81%	107,46 %	34,70%		
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota		11.000.000	27.500.000	29.500.000	29.500.000	29.000.000	-	10.660.200	-	17.483.400	-	-						
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)		11.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		10.660.200	-	17.483.400			0,00%	96,91%	0,00%	218,54 %		
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan			19.500.000	21.500.000	21.500.000	21.000.000		-					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-						
Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1(satu) kabupaten/kota			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		-	-	-			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Program Hubungan Industrial		6.905.000	193.095.000	126.400.000	138.240.000	144.040.000	-	173.378.600	152.376.800	143.624.690	-	-						
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		6.905.000	12.000.000	13.200.000	14.520.000	14.520.000	-	6.802.600	10.975.600	9.642.200	-	-						
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		6.905.000	4.000.000	4.400.000	4.840.000	4.840.000		6.802.600	10.975.600	9.642.200			0,00%	98,52%	274,39 %	219,14 %		
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan			4.000.000	4.400.000	4.840.000	4.840.000		-					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			4.000.000	4.400.000	4.840.000	4.840.000		-					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		-	181.095.000	113.200.000	123.720.000	129.520.000	-	166.576.000	141.401.200	133.982.490	-	-						
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.000.000	4.400.000	4.840.000	4.840.000			17.149.400	16.375.400			0,00%	0,00%	342,99 %			
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			6.000.000	4.400.000	4.840.000	4.840.000				-			0,00%	0,00%	0,00%			
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			170.095.000	100.000.000	109.200.000	115.000.000		166.576.000	124.251.800	117.607.090			0,00%	0,00%	73,05%			
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				4.400.000	4.840.000	4.840.000				-			0,00%	0,00%	0,00%			
Transmigran menetap		142.000.000	102.000.000	112.000.000	115.000.000	115.000.000	-	136.806.120	118.800.490	111.112.995	-	-						

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		142.000.000	102.000.000	112.000.000	115.000.000	115.000.000	-	136.806.120	118.800.490	111.112.995	-	-						
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		142.000.000	102.000.000	112.000.000	115.000.000	115.000.000	-	136.806.120	118.800.490	111.112.995	-	-						
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		74.500.000	20.000.000	26.000.000	28.000.000	28.000.000		81.618.720	30.546.400	42.813.315			0,00%	109,56 %	152,73 %	164,67 %		
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		67.500.000	42.000.000	46.000.000	47.000.000	47.000.000		55.187.400	40.652.200	45.923.380			0,00%	81,76%	96,79%	99,83%		
Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000			19.833.890	22.376.300			0,00%	0,00%	99,17%	111,88 %		
Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000			27.768.000				0,00%	0,00%	138,84 %	0,00%		
													0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Urusan Perindustrian		9.403.670.556	9.686.932.650	10.259.093.528	10.432.775.737	10.409.103.647	-	13.175.775.783	17.024.831.179	8.783.554.169	-	-	0,00%	140,11 %	175,75 %	85,62%		
Peningkatan Nilai tambah sektor industri pengolahan		3.908.000.000	3.960.000.000	3.965.000.000	3.968.000.000	3.910.500.000	-	5.954.081.608	10.587.879.754	2.320.894.267	-	-						
Meningkatnya proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan		3.908.000.000	3.960.000.000	3.965.000.000	3.968.000.000	3.910.500.000	-	5.954.081.608	10.587.879.754	2.320.894.267	-	-						
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		3.821.000.000	3.897.000.000	3.897.000.000	3.897.000.000	3.839.500.000	-	5.881.417.448	10.561.061.934	2.301.145.967	-	-						
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota		3.821.000.000	3.897.000.000	3.897.000.000	3.897.000.000	3.839.500.000	-	5.881.417.448	10.561.061.934	2.301.145.967	-	-						
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		103.000.000	150.000.000					102.555.300	30.663.364				0,00%	99,57%	20,44%	0,00%		
Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri			178.000.000	178.000.000	100.000.000	100.000.000		-					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		448.000.000	1.200.000.000	1.250.000.000	1.275.000.000	1.217.500.000		359.314.520	179.088.640	166.866.617			0,00%	80,20%	14,92%	13,35%		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		-	155.959.800				0,00%	0,00%	155,96 %	0,00%		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		3.270.000.000	2.169.000.000	2.269.000.000	2.322.000.000	2.322.000.000		5.419.547.628	10.195.350.130	2.134.279.350			0,00%	165,74 %	470,05 %	94,06%		
Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		-	-				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		22.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	18.000.000	-	17.164.150	6.959.820	4.778.300	-	-						
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		22.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	18.000.000	-	17.164.150	6.959.820	4.778.300	-	-						
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		22.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000		17.164.150	6.959.820	4.778.300			0,00%	78,02%	116,00 %	68,26%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		-					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		65.000.000	47.000.000	51.000.000	53.000.000	53.000.000	-	55.500.010	19.858.000	14.970.000	-	-						
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		65.000.000	47.000.000	51.000.000	53.000.000	53.000.000	-	55.500.010	19.858.000	14.970.000	-	-						

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		32.500.000	27.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		30.961.960	19.858.000	14.970.000			0,00%	95,27%	73,55%	74,85%		
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas				20.000.000	10.000.000	10.000.000		24.538.050		-			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		32.500.000	20.000.000	11.000.000	23.000.000	23.000.000		-		-			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Peningkatan Pelayanan Publik		5.495.670.556	5.726.932.650	6.294.093.528	6.464.775.737	6.498.603.647	-	7.221.694.175	6.436.951.425	6.462.659.902	-	-						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		5.495.670.556	5.726.932.650	6.294.093.528	6.464.775.737	6.498.603.647	-	7.221.694.175	6.436.951.425	6.462.659.902	-	-						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		5.495.670.556	5.726.932.650	6.294.093.528	6.464.775.737	6.498.603.647	-	7.221.694.175	6.436.951.425	6.462.659.902	-	-						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		46.400.000	49.000.000	54.100.000	58.200.000	63.300.000	-	44.592.200	39.203.100	33.734.400	-	-						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		17.000.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000		17.035.500	13.651.100	14.216.400			0,00%	100,21%	91,01%	88,85%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.000.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	3.250.000		2.046.000	2.446.200	1.311.500			0,00%	102,30%	97,85%	47,69%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.000.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	3.250.000		2.046.000	2.433.800	1.311.500			0,00%	102,30%	97,35%	47,69%		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.600.000	2.900.000		1.725.500	1.926.000	2.624.000			0,00%	101,50%	96,30%	114,09%		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.600.000	2.900.000		1.725.500	1.926.000	2.624.000			0,00%	101,50%	96,30%	114,09%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000		6.456.000	4.149.700	3.592.000			0,00%	107,60%	59,28%	44,90%		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16.000.000	18.000.000	20.000.000	21.000.000	23.000.000		13.557.700	12.670.300	8.055.000			0,00%	84,74%	70,39%	40,28%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.887.950.556	4.290.832.650	4.775.193.528	4.861.075.737	4.811.103.647	-	5.731.312.482	5.358.041.518	5.212.892.524	-	-						

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.853.250.556	4.273.632.650	4.755.493.528	4.838.875.737	4.786.403.647		5.694.664.132	5.349.028.518	5.209.477.724			0,00%	147,79 %	125,16 %	109,55 %		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		24.000.000						24.322.600					0,00%	101,34 %	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000		1.736.200		1.284.800			0,00%	102,13 %	0,00%	61,18%		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		7.000.000	9.000.000	10.000.000	11000000	12.000.000		8.357.950	9.013.000	2.130.000			0,00%	119,40 %	100,14 %	21,30%		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2.000.000	2.300.000	2.600.000	2.900.000	3.200.000		2.231.600					0,00%	111,58 %	0,00%	0,00%		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	-	-	-	-	-	-						
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000		-					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		24.000.000	53.000.000	58.000.000	63.000.000	68.000.000	-	24.751.350	6.847.000	14.872.000	-	-						
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			26.000.000	28.000.000	30.000.000	32.000.000			6.847.000				0,00%	0,00%	26,33%	0,00%		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		24.000.000	27.000.000	30.000.000	33.000.000	36.000.000		24.751.350	-	14.872.000			0,00%	103,13 %	0,00%	49,57%		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		412.900.000	439.000.000	465.100.000	491.200.000	517.300.000	-	362.928.813	295.426.038	300.314.315	-	-						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		19.000.000	21.000.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000		19.778.000	13.495.000	13.304.700			0,00%	104,09 %	64,26%	57,85%		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		27.000.000	30.000.000	33.000.000	36.000.000	39.000.000		27.383.900	25.620.800	31.401.900			0,00%	101,42 %	85,40%	95,16%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		78.000.000	83.000.000	88.000.000	93.000.000	98.000.000		71.345.400	50.916.600	63.844.200			0,00%	91,47%	61,35%	72,55%		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		44.000.000	49.000.000	54.000.000	59.000.000	64.000.000		36.783.700	36.709.200	28.202.200			0,00%	83,60%	74,92%	52,23%		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.500.000	3.800.000	4.100.000	4.400.000	4.700.000		3.492.000	3.200.000	3.612.000			0,00%	99,77%	84,21%	88,10%		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penyediaan Bahan/Material		95.000.000	100.000.000	105.000.000	110.000.000	115.000.000		87.083.400	76.264.300	53.348.900			0,00%	91,67%	76,26%	50,81%		
Fasilitasi Kunjungan Tamu		6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000		5.962.000	-	7.249.000			0,00%	99,37%	0,00%	103,56 %		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		137.000.000	142.000.000	147.000.000	152.000.000	157.000.000		107.748.913	84.841.038	96.708.015			0,00%	78,65%	59,75%	65,79%		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		3.400.000	3.700.000	4.000.000	4.300.000	4.600.000		3.351.500	4.379.100	2.643.400			0,00%	98,57%	118,35 %	66,09%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		280.000.000	-	-	-	-	-	272.088.320	-	-	-	-						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		280.000.000						272.088.320	-				0,00%	97,17%	0,00%	0,00%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		525.000.000	550.000.000	575.000.000	600.000.000	625.000.000	-	481.280.568	488.272.409	603.118.735	-	-						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		209.000.000	218.000.000	227.000.000	236.000.000	245.000.000		179.278.080	159.104.465	205.260.663			0,00%	85,78%	72,98%	90,42%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		316.000.000	332.000.000	348.000.000	364.000.000	380.000.000		302.002.488	329.167.944	397.858.072			0,00%	95,57%	99,15%	114,33 %		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		319.420.000	339.600.000	360.700.000	384.800.000	406.900.000	-	304.740.442	249.161.360	297.727.928	-	-						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		65.000.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000	85.000.000		57.266.942	80.658.360	93.440.928			0,00%	88,10%	115,23 %	124,59 %		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		93.000.000	99.000.000	100.000.000	110.000.000	120.000.000		91.878.000	47.747.000	49.342.000			0,00%	98,79%	48,23%	49,34%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		125.000.000	130.000.000	140.000.000	145.000.000	150.000.000		123.463.500	100.559.000	137.255.000			0,00%	98,77%	77,35%	98,04%		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		36.420.000	40.600.000	45.700.000	49.800.000	51.900.000		32.132.000	20.197.000	17.690.000			0,00%	88,23%	49,75%	38,71%		

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	19,55	19,8	19,62	19,81	20,06	
	Tingkat Kesempatan Kerja	95,96	96,41	95,55	95,98	96,11	
	Produktivitas Tenaga Kerja	49,2	49,0	54,2	51,4	55,1	
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	-	40,26	43,03	45,95	
	Persentase Rencana Tenaga Kerja yang disusun	0	0	100	100	100	
	Persentase pencari kerja yang memiliki kompetensi	70,07	45,34	90,44	73	84,63	
	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	0	0	1,56	3,13	4,69	
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja	24,58	48,47	49,51	67,89	67,92	
	Persentase sarana hubungan industrial dan syarat kerja	30,16	31,09	46,56	51,09	53,28	
	Persentase transmigran yang menetap	100	100	100	100	100	
	Persentase Penempatan Transmigrasi	100	100	100	100	100	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	19,55	19,8	19,62	19,81	20,06	
	PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	3645,20	3881,47	4190,37	4593,66	4975,90	
	Persentase peningkatan produktivitas IKM tiap tahunnya	-	4.76	5.41	5.56	5.52	
	Persentase Perizinan Industri kewenangan kabupaten yang memenuhi komitmen perizinan	100	100	100	100	100	
	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri	-	28.57	32.43	26.19	39.13	
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	19.55	19.8	19.62	19.81	20.06	
	Nilai Sakip Perangkat Daerah					65,26	
	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bidang Industri pada lima tahun yang akan datang dihadapkan dengan tantangan utama meliputi adaptasi tehadap industri 5.0 yang menekankan kolaborasi manusia-teknologi, kondisi ekonomi Global yang tidak stabil dan tuntutan konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan (industri hijau).

Penempatan tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja diharapkan lima tahun mendatang akan menghadapi kesenjangan keterampilan, disrupsi teknologi (AI), perubahan demografi, perlambatan ekonomi global, dan kebutuhan untuk menciptakan pasar kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Kesenjangan keterampilan antara yang dimiliki angkatan kerja dan kebutuhan industri menjadi masalah utama, sementara kemajuan teknologi dan otomatisasi mengubah jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Selain itu, perusahaan harus beradaptasi dengan generasi muda yang mendominasi angkatan kerja, mengelola potensi mereka, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang terus berkembang.

Guna terwujudnya penempatan tenaga kerja yang aman dan benar diharapkan dimasa mendatang hal-hal berikut dapat terwujud:

1. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja mematuhi peraturan yang berlaku.
2. Pencari kerja memahami mekanisme penempatan.
3. Koordinasi dengan instansi terkait secara periodik.
4. Pemberdayaan masyarakat bertumpu pada pemanfaatan potensi sumber daya alam.
5. Peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu prioritas kerja pemerintah saat ini sesuai tugas dan wewenangnya, Kementerian Ketenagakerjaan terus memberikan konstribusi nyata dan terukur, dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, salah satunya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktifitas.

Kementerian Ketenagakerjaan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan berbagai program seperti pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif, penyediaan dan perluasan lapangan kerja melalui pengembangan wirausaha dan kerjasama dengan perusahaan, serta perlindungan tenaga kerja melalui penjaminan hak-hak dasar pekerja dan keluarga. Selain itu, kementerian juga menyusun kerangka kualifikasi nasional (KKNI) untuk standar pengakuan keterampilan dan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas untuk pemerataan akses pelatihan di seluruh daerah.

Salah satu upaya adalah mengoptimalkan/ merevitalisasi UPT-BLK sebagai sebuah lembaga pelatihan pemerintah yang berada di Kabupaten Purworejo yang sangat dibutuhkan masyarakat Purworejo guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja masyarakat Purworejo dalam menghadapi era globalisasi tenaga kerja.

Revitalisasi Balai Latihan Kerja antara lain :

1. Peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) instruktur dan kapasitas management UPT-BLK antara lain:
    a. Meningkatkan kompetensi instruktur;
    b. Mengikuti Ujian Assesor;
    c. Studi banding.

2. Sinergis dengan program pusat dalam rangka mengoptimalkan sistem pelatihan kerja nasional.
    a. Optimalisasi Program Siap Kerja;
    b. Optimalisasi jejaring/ penempatan Tenaga Kerja
    c. Dana pendamping untuk kegiatan atau program
    d. Bantuan sarana usaha bagi kelompok pasca pelatihan.
3. Peningkatan kualitas pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan SKKNI (Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia):
    a. Peningkatan Sarana dan prasarana
    b. Membentuk tempat uji kompetensi
    c. Uji Kompetensi peserta pelatihan.

Hubungan industrial diharapkan lima tahun mendatang akan terjadi perubahan positif. Berikut beberapa hal yang diharapkan lima tahun mendatang :

1. Serikat pekerja telah berperan dalam menciptakan industrial harmonis;
2. Perusahaan menerima pembentukan serikat pekerja/buruh;
3. Tingginya kesadaran pekerja mandiri dan perusahaan untuk mengikut sertakan pekerjanya dalam jaminan sosial;
4. Perusahaan menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
5. Perselisihan kerja dapat diselesaikan secara bipartit;
6. Upah Minimum Kabupaten (UMK) sudah sama dengan Kebutuan Hidup Layak (KHL);
7. Perusahaan tidak melakukan relokasi ke luar negeri.
8. Meningkatnya kesejahteraan pekerja melalui fasilitas penerapan skala upah, kualitas pembuatan PP /PKB, berdirinya koperasi pekerja, meningkatnya kualitas kelembagaan SP/SB
9. Kaidah-kaidah Higiene Perusahaan, Ergonomi, dan K3 sudah diterapkan dengan baik di tempat kerja;
10. Tindakan/perlakuan diskriminatif di dunia kerja semakin sedikit;
11. Penerapan outsourcing tidak menimbulkan masalah;
12. Perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan;
13. Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Salah satu faktor tingginya angka pengangguran di Kabupaten Purworejo karena kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja. Penyelenggaraan pelatihan non institusional dan institusional akan dapat meningkatkan keterampilan para pencari kerja sehingga ada alternatif untuk berwirausaha mandiri. Adapun pembinaan desa produktif harapannya dapat lebih meningkatkan produktivitas masyarakat yang berada desa tersebut. Sedangkan pembinaan terhadap LPKS diharapkan mampu meningkatkan standar kelulusan para pencari kerja.

Dengan demikian, untuk 5 (lima) tahun mendatang, masih diperlukan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, pembinaan LPKS serta pembinaan desa produktif.

Urusan Ketransmigrasian diharapkan lima tahun mendatang akan terjadi perubahan positif.

1. Penempatan transmigran yang telah memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan daerah tujuan penempatan;
2. Meningkatnya pelayan informasi transmigrasi.

Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bidang Industri:

1. Jumlah Industri kecil menengah yang didominasi berbasis pertanian, kehutanan, dan industri rumah tangga yang cukup besar serta potensi wisata yang potensial dikembangkan menjadikan sektor industri memiliki prospek lebih baik untuk dikelola lebih profesional;
2. Di Kabupaten Purworejo sudah terdapat Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Purwodadi, Ngombol dan Grabag yang memadai;
3. Optimalisasi pemanfaatan Rumah Kemasan yang akan dibentuk UPT Rumah Kemasan dan Optimalisasi pemanfaatan Rumah Kopi dengan berkolaborasi dengan IKM Kopi Kecamatan Kaligesing.

Beberapa Peluang pada masa 5 (Lima) Tahun kedepan pada Urusan Tenaga Kerja:

1. Mengoptimalkan peran FKLPID (Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah) agar menyesuaikan Jenis Pelatihan di BLK dengan kebutuhan Industri yang ada di Kabupaten Purworejo;
2. Mengoptimalkan pegawai Mediator Hubungan Industrial;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Lembaga Pelatihan Perusahaan;
4. Meningkatkan kompetensi Instruktur;
5. Meningkatkan Jangkauan Informasi Prosedur Penempatan Tenaga Kerja hingga di Tingkat Desa/Kelurahan;
6. Mendorong Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Urusan transmigrasi di Kabupaten Purworejo merupakan kegiatan fasilitasi. Dengan demikian sepanjang kegiatan transmigrasi masih diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maka di daerah kegiatannya bersifat fasilitasi.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (DINPERINTRANSNAKER) Kabupaten Purworejo adalah pihak-pihak yang menjadi target utama dalam pemberian layanan oleh dinas ini, terutama dalam bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Target utama dalam memberikan layanan antara lain kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo telah didukung oleh:

1. Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kementerian PMI;
3. Kementerian Transmigrasi;
4. Kementerian Perindustrian;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
6. DPRD;
7. BPVP Surakarta;
8. Bagian Perekonomian,
9. Setda;
10. DINPMPTSP;
11. DINKUKMP;
12. DINPORAPAR;
13. Forum UMKM Kab Purworejo;
14. Desa dan Kecamatan di Kabupaten Purworejo
15. LPKS;
16. Lembaga Kepolisian dan TNI;
17. BKK;

18. Perusahaan;
19. BPS;
20. Serikat Pekerja;
21. P3MI
22. PMI (Pekerja Migran Indonesia);
23. BP3TK Provinsi Jateng;
24. BP3MI Provinsi Jateng.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan di Dinas Peindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi fungsi dan kualitas layanan publik serta dalam mencapai tujuan sasaran perangkat daerah. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara lain:

Pada urusan industri, sektor industri pengolahan di Purworejo memiliki potensi yang cukup bagus, namun daya saingnya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan sektor lain seperti sektor pertanian. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu:

1) Dominasi Industri Kecil dan Menengah (IKM)
   Dominasi IKM di Purworejo mencerminkan pola ekonomi lokal yang bergantung pada usaha mikro dan kecil, dengan jumlah pelaku usaha mencapai ribuan unit, tetapi mayoritas beroperasi dengan skala produksi terbatas. Industri yang skala kecil meskipun jumlahnya besar namun cenderung menghambat efisiensi, yang pada gilirannya menurunkan daya saing, sehingga sulit menarik investasi besar untuk transisi ke industri menengah.
2) Keterbatasan Pemasaran dan Jaringan
   Banyak pelaku industri di Purworejo memiliki kelemahan dalam aspek pemasaran. Mereka cenderung fokus pada pasar lokal dan belum memiliki strategi yang kuat untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kurangnya promosi, baik melalui pameran maupun platform digital, membuat produk mereka tidak dikenal secara luas, sehingga potensi pasar yang lebih besar tidak dapat dimanfaatkan. Disisi lain Purworejo memiliki potensi besar di sektor pertanian, namun keterkaitan antara sektor pertanian (sebagai pemasok bahan baku) dengan industri pengolahan (sebagai pengolah produk) belum optimal. Alih-alih mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah, sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Ini menunjukkan bahwa rantai nilai industri belum terbangun dengan kuat, yang bisa menghambat pertumbuhan dan daya saing secara keseluruhan.
3) Infrastruktur yang Belum Memadai
   Infrastruktur merupakan tulang punggung pengembangan industri, namun di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, kondisi infrastruktur yang belum memadai menjadi salah satu faktor utama yang menghambat daya saing industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang mendominasi perekonomian daerah. Keterbatasan ini mencakup akses transportasi, konektivitas digital, dan fasilitas pendukung produksi, yang secara langsung memengaruhi efisiensi, biaya, dan kemampuan IKM untuk menembus pasar yang lebih luas. Akar masalah ini berimplikasi pada rendahnya

produktivitas, kesulitan distribusi, dan minimnya investasi, sehingga menempatkan Purworejo pada posisi kurang kompetitif dibandingkan daerah lain.

4) Keterampilan Tenaga Kerja yang Terbatas
   Keterampilan tenaga kerja yang terbatas menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya daya saing sektor ini. Mayoritas tenaga kerja di IKM Purworejo memiliki pendidikan formal rendah dan kurang mendapat pelatihan keterampilan teknis serta manajerial, sehingga menghambat inovasi, efisiensi produksi, dan kemampuan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Akibatnya, produk lokal sering kalah bersaing dengan produk dari daerah lain atau impor yang lebih modern dan berkualitas tinggi. Keterbatasan tenaga kerja tersebut juga menyebabkan kualitas produk yang dihasilkan kurang baik. Banyak pelaku IKM yang belum menerapkan standar kualitas seperti *Good Manufacturing Practices* (GMP) atau memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini membuat produk mereka sulit menembus pasar yang lebih besar, apalagi pasar ekspor. Kemasan (*packaging*) yang kurang menarik juga menjadi kendala, membuat produk lokal kalah saing di mata konsumen.
5) Akses ke Permodalan yang Sulit
   Industri pengolahan di Purworejo didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM). Mereka seringkali kesulitan dalam mengakses modal yang cukup untuk mengembangkan usaha. Akibatnya, mereka terhambat untuk berinvestasi pada teknologi dan peralatan modern. Tanpa teknologi yang mutakhir, proses produksi menjadi kurang efisien dan biaya produksi menjadi lebih tinggi, membuat produk mereka sulit bersaing dengan produk dari daerah lain atau produk impor.

Sedangkan pada urusan tenaga kerja dan transmigrasi terdapat permasalahan sebagai berikut:

1) Skill tenaga kerja terbatas
   Sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Purworejo memiliki keterampilan masih terbatas. mengakibatkan rendahnya mobilitas vertikal masyarakat untuk beralih ke sektor ekonomi yang lebih produktif. Salah satu masalah mendasar pada kompetensi ini adalah kesenjangan keterampilan (skill gap) antara lulusan dan kebutuhan pasar. Meskipun ada penyerapan tenaga kerja, hal itu lebih banyak terjadi pada pekerja dengan pendidikan rendah, sementara lulusan dengan jenjang pendidikan lebih tinggi justru mengalami penurunan penyerapan. Ini menunjukkan bahwa kualifikasi yang dimiliki oleh angkatan kerja seringkali tidak sesuai dengan permintaan industri. Selain itu, sifat selektif sebagian pencari kerja dalam memilih pekerjaan juga berkontribusi pada tingginya angka pengangguran, karena mereka menunggu posisi yang ideal alih-alih mengambil kesempatan yang ada.
2) Belum optimalnya perlindungan sosial tenaga kerja
   Belum optimalnya perlindungan sosial terhadap tenaga kerja, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal, memperparah kerentanan kelompok ini terhadap risiko kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Data menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo baru mencapai sekitar 39 persen, sebagian besar disebabkan oleh kurang pahamnya manfaat dari jaminan social ketenagakerjaan pada pekerja di Kabupaten Purworejo. Permasalahan lain yang muncul adalah

pelanggaran hak-hak dasar buruh. Beberapa perusahaan diketahui membayar upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan. Selain itu, ada kasus-kasus tunggakan pembayaran gaji, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga iuran BPJS Ketenagakerjaan. Isu-isu ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pekerja. Isu perlindungan ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajiban hukum mereka kepada para pekerja.

3) Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal
   Sebagian besar penduduk Kabupaten Purworejo bekerja di sektor pertanian yang relatif lebih rendah produktivitasnya, dengan nilai tambah yang terbatas. Di samping itu, sebagian besar juga bekerja pada sector informal yang cukup rentan jika terjadi goncangan ekonomi.
4) Akses kesempatan kerja dan berusaha terbatas
   masih tingginya angka pengangguran mencerminkan belum meratanya kesempatan kerja yang tersedia. Akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan peluang berusaha masih terbatas, khusunya di Kawasan perdesaan dan wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Purworejo menghadapi tantangan dalam penciptaan lapangan kerja baru. Investasi dari luar daerah masih kurang, yang mana ini adalah salah satu cara utama untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Kurangnya investasi menyebabkan pertumbuhan sektor-sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja menjadi lambat. Selain itu, sektor pertanian yang sebelumnya menyerap banyak tenaga kerja juga mengalami penurunan penyerapan, sementara sektor manufaktur dan jasa yang sedang tumbuh belum sepenuhnya mampu menampung kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian.
5) Kurangnya daya saing masyarakat
   Di Kabupaten Purworejo, pengangguran tetap menjadi tantangan meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan penurunan menjadi 4,02% pada Agustus 2023, turun 0,43% dari tahun sebelumnya. Namun, di balik angka ini, ada masalah mendasar yang memperburuk situasi: kurangnya daya saing masyarakat, terutama dalam hal keterampilan (skill), pendidikan, dan kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja modern. Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan tuntutan industri menjadi "batu sandungan" utama, membuat banyak warga, khususnya pemuda lulusan sekolah menengah, terjebak dalam lingkaran pengangguran atau pekerjaan dengan upah rendah. Di sisi lain, daya saing masyarakat, terutama dalam mengakses peluang ekonomi yang menuntut keterampilan dan teknologi, juga masih rendah. Hal ini memperkuat siklus kemiskin an karena kelompok miskin sulit keluar dari kondisi keterbatasan pendapatan akibat hambatan struktural dan kompetensi.
6) Belum optimalnya pelaksanaan transmigrasi
   Pelaksanaan program transmigrasi yang belum optimal juga menjadi faktor pendukung belum efektifnya redistribusi penduduk dan pemerataan peluang ekonomi antar wilayah. Meskipun bukan faktor dominan, optimalisasi program ini masih diperlukan dalam jangka

panjang untuk menyeimbangkan konsentrasi penduduk dan membuka potensi ekonomi baru di wilayah transmigrasi.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam mengemban tugas dan fungsinya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Potensi sumber daya alam yang terkandung di wilayah Kabupaten Purworejo sangat potensial untuk menumbuhkan dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam sehingga diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja lokal.

Berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, maka yang menjadi permasalahan dalam pelayanan dli Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Urusan Perindustrian: Rendahnya Daya Saing Sektor Industri Pengolahan.
- Urusan Ketenagakerjaan: Rendahnya Produktivitas Tenaga kerja dan Masih adanya pengangguran.

Isu strategis Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dan analisisnya tersaji dalam Tabel 2.4

Tabel 2.4
Isu Strategis Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi 2. Kawasan Pesisir Pantai Selatan 3. Potensi Pertanian dan Pariwisata 4. Bonus Demografi	Dominasi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata	Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia	Transformasi Ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Rendahnya daya saing Sektor Industri Pengolahan
	Keterbatasan Pemasaran dan Jaringan					
	Infrastruktur yang Belum Memadai					
	Keterampilan Tenaga Kerja yang Terbatas	Distribusi kesejahteraan yang belum merata dan inklusif	Polarisasi sosial			
	Akses ke Permodalan yang Sulit					
	Skill tenaga kerja terbatas	Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aging population negara maju	Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Rendahnya Produktivitas Tenaga kerja
	Belum optimalnya perlindungan sosial tenaga kerja					
	Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal					
	Akses kesempatan kerja dan berusaha terbatas	Distribusi kesejahteraan yang belum merata dan inklusif	Polarisasi sosial	Transformasi ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Masih adanya pengangguran
	Kurangnya daya saing masyarakat					
	Belum optimalnya pelaksanaan transmigrasi					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2025-2029 yaitu:

"Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius dan Inovatif (Purworejo Berseri)"

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Unsur Visi	Penjelasan
Berdaya Saing	Masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan di masa datang.
Sejahtera	Terciptanya masyarakat adil dan makmur yang ditandai dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik.
Religius	Masyarakat yang memiliki ketaqwaan terhadap Tuhan YME, menjalani kehidupan sehari-hari berlandaskan nilai, norma, dan etika ajaran agama, dan bersikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan keberagaman, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda.
Inovatif	Pemerintah dan masyarakat dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapi dengan mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki serta mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan (meliputi elemen Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment).
Berseri	Kata Berseri merupakan akronim dari kata Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif. "Berseri" memiliki arti "Tampak Cerah" yang kemudian dimaknai sebagai pengharapan untuk menciptakan masa dengan yang cerah. "Purworejo Berseri" mempunyai makna sebagai upaya memperkuat fondasi pembangunan dengan tujuan menciptakan masa depan yang

	cerah menuju Indoensia Emas 2045. Melalu inovasi, kolaborasi, dan dedikasi, Purworejo membangunan landasan yang kokoh untuk generasi mendatang. Pemerintah bersama masyarakat memastikan kemakmuran yang berkelanjutan, harmoni dengan alam, serta kemajuan berkesinambungan di berbagai sektor kehidupan.

Guna mewujudkan Visi, rumusan Misi Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2029 antara lain:

1. Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera,
2. Misi 2: Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah,
3. Misi 3: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana,
4. Misi 4: Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ekonomi lokal, serta
5. Misi 5: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

Guna mencapai Visi Kepala Daerah Terpilih, Misi yang relevan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tercantum pada misi ke IV (empat) dan Misi ke V .

Pada misi ke IV (Empat) terdapat tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas adalah yang pertama “Peningkatan peranan industri pengolahan berbasis produk unggulan daerah” yang keberhasilannya diukur dengan dengan indikator PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB) dan didukung dengan sasaran yaitu *Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan* yang diukur melalui indikator PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB). Tujuan yang kedua “Peningkatan akses dan produktivitas kerja” yang keberhasilannya diukur oleh 3 indikator yaitu *Tingkat* Kesempatan Kerja, Produktivitas tenaga kerja dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dan didukung oleh sasaran *Meningkatnya akses dan produktivitas kerja* yang diukur melalui indicator Meningkatnya akses dan produktivitas kerja, Produktivitas tenaga kerja dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Misi ke IV (empat) memiliki tujuan untuk mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia yang diukur keberhasilannya melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan didukung sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dengan teridentifikasinya Visi, Misi dan Tujuan Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, maka selanjutnya akan timbul beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong dalam rangka mewujudkan misi dan tujuan kepala daerah tersebut.

Beberapa faktor penghambat yang dapat diidentifikasi pada urusan Perindustrian adalah Pertumbuhan industri kecil menengah sangat

lambat terkendala oleh kualitas dan desain produk serta pemasaran, sehingga kalah bersaing dengan produk luar daerah.

Pada urusan ketenagakerjaan, faktor penghambat yang dominan adalah tidak seimbangnya laju pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan lowongan kerja. Keadaan ini dikarenakan para pencari kerja belum memiliki ketrampilan berbasis kompetensi serta kecilnya penyerapan tenaga kerja. Selain itu juga belum optimalnya hubungan industrial sehingga terjadi perselisihan hubungan industrial.

Pada urusan ketransmigrasian faktor penghambat utama adalah sistem kuota transmigran dari pemerintah provinsi/pemerintah pusat. Tingginya animo transmigran tidak sebanding dengan kuota yang disediakan oleh pemerintah provinsi/pusat. Salah satu penyebabnya karena penempatan transmigran merupakan kegiatan fasilitasi.

Sementara beberapa faktor pendorong dalam rangka mewujudkan visi Bupati pada urusan Perindustrian adalah besarnya jumlah industri kecil menengah yang berbasis pertanian, kehutanan, dan bebasis rumah tangga serta potensi obyek wisata yang cukup banyak merupakan aset strategis guna mendukung visi misi Bupati.

Faktor pendorong pada urusan ketenagakerjaan dalam mewujudkan visi Bupati adalah tersedianya jaringan on line bursa kerja yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Faktor pendorong lainnya adalah dimilikinya Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja untuk menyiapkan tenaga kerja agar mampu berkompetisi dalam pasar kerja.

Pada ururusan transmigrasi, tingginya animo masyarakat yang ingin bertransmigrasi merupakan faktor pendorong dalam mewujudkan visi misi bupati.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Visi Presiden dan Wakil Preseiden Periode 2019-*2024 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045."* Tujuan utama Visi ini adalah mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis serta berdaulat melalui penguatan persatuan bangsa. Visi ini diwujudkan dalam delapan misi utama atau "Astacita," yang mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan untuk mengakomodasi perkembangan Indonesia secara inklusif.

Dengan misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi dan Hak Asasi Manusia: Prabowo-Gibran menekankan pentingnya ideologi Pancasila sebagai fondasi utama negara, yang akan diiringi dengan demokrasi kuat dan penegakan hak asasi manusia sebagai pilar harmoni nasional.
2. Kemandirian Nasional di Berbagai Sektor: Astacita kedua adalah membangun kemandirian nasional melalui swasembada di bidang pangan, energi, dan air, serta mengembangkan ekonomi kreatif, hijau, dan biru. Prabowo-Gibran bertekad meningkatkan ketahanan nasional di sektor-sektor strategis ini demi kemakmuran berkelanjutan.
3. Penciptaan Lapangan Kerja dan Kewirausahaan: Misi ketiga menargetkan peningkatan lapangan kerja berkualitas serta pengembangan industri kreatif dan kewirausahaan, termasuk melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM): Pengembangan SDM menjadi salah satu fokus utama melalui peningkatan kualitas

pendidikan, kesehatan, dan sains serta penegakan kesetaraan gender. Prabowo-Gibran juga menargetkan pemberdayaan pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas.

5. Hilirisasi dan Industrialisasi: Program hilirisasi industri ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan mengoptimalkan hasil sumber daya nasional.
6. Pengembangan Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Misi keenam menekankan pentingnya membangun dari desa dan memastikan pemerataan ekonomi, dengan upaya langsung untuk mengurangi kemiskinan melalui pengembangan ekonomi pedesaan.
7. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi: Prabowo-Gibran mengutamakan reformasi birokrasi dan politik untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan anti-korupsi, serta upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
8. Harmoni Lingkungan dan Budaya: Misi terakhir bertujuan memperkuat toleransi antar-umat beragama dan menjaga hubungan harmonis dengan alam serta budaya. Upaya ini diharapkan mampu membangun Indonesia yang sejahtera dan berbudaya.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan wakil Presiden Periode 2025-2029, Asta Cita yang relevan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tercantum pada Asta Cita yang ke III yaitu Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Dengan Arah kebijakan berupa Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam negeri. Asta Cita yang ke V Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dengan Arah kebijakan yaitu Pelatihan Gula Kelapa, Pemanfaatan makanan berbasis ketela.

Berdasarkan kondisi umum potensi permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai mewujudkan pembangunan bidang industri dan ketenagakerjaan yang berkelanjutan, mencakup peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja yang optimal, pembinaan industri, dan penciptaan lapangan kerja yang kondusif dan berdaya saing. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan akan mengarahkan, perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah " Meningkatkan akses dan produktivitas kerja, peranan industri dalam perekonomian yang disertai peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah". Tujuan dijabarkan dalam sasaran. Sasaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Adalah "Meningkatnya akses dan

produktivitas kerja", "Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan" dan "Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah". Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana Tingkat capaian (target dari masing-masing indikator dari program dan kegiatan).

Secara rinci tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Meningkatkan akses dan produktivitas kerja, peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Tingkat Kesempatan Kerja	96,89	96,90 - 97,17	97,07 - 97,37	97,16 - 97,46	97,25 - 97,55	97,34 - 97,64	
			Produktivitas Tenaga Kerja	56,80	58,60	60,40	62,20	64,20	66,10	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	40,53	41,30	42,07	42,83	43,60	44,37	
		Meningkatnya akses dan produktivitas kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	96,89	96,90 - 97,17	97,07 - 97,37	97,16 - 97,46	97,25 - 97,55	97,34 - 97,64	
			Produktivitas Tenaga Kerja	56,80	58,60	60,40	62,20	64,20	66,10	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	40,53	41,30	42,07	42,83	43,60	44,37	
	Meningkatkan akses dan produktivitas kerja, peranan sektor industri		Rasio PDRB Industri Pengolahan	20,30	20,49	20,67	20,86	21,04	21,23	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pengolahan dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah									
		Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan	PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	5.136,04	6.232,83	7.358,25	8.522,01	9.712,15	10.940,13	
	Meningkatkan akses dan produktivitas kerja, peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi perangkat daerah adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran rencana strategis. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penahapan rencana strategis Dinas Perindustriaan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo tersaji dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Penahapan Renstra

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
Penguatan fondasi untuk perluasan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Optimalisasi pelatihan kerja berbasis kompetensi dan jejaring kemitraan dengan dunia kerja / perusahaan	Perluasan akses kerja dan inovasi pasar kerja	Penguatan hubungan industrial dan peningkatan produktivitas serta kualitas kerja	Perwujudan peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja
URUSAN PERINDUSTRIAN				
Penguatan kelembagaan dan kebijakan dalam pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan	Penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung industri pengolahan	Peningkatan kapasitas, kualitas mutu, dan inovasi dalam proses produksi	Penguatan rantai nilai, efisiensi rantai pasok, dan keberlanjutan	Perwujudan daya saing sektor industri pengolahan
PENUNJANG URUSAN				
Menguatkan sistem manejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo adalah:

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
INDUSTRI				
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Penguatan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau	Penguatan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau yang dilaksanakan melalui: 1. Peningkatan produktivitas IKM tiap tahunnya 2. Peningkatan perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi ketentuan perizinan. 3. Peningkatan kepatuhan pelaporan informasi industri.	2026
2.		Peningkatan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau	Peningkatan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau yang dilaksanakan melalui: 1. Peningkatan produktivitas IKM tiap tahunnya 2. Peningkatan perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi ketentuan perizinan. 3. Peningkatan kepatuhan pelaporan informasi industri.	2027
3.		Pemantapan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau	Pemantapan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau yang dilaksanakan melalui: 1. Peningkatan produktivitas IKM tiap tahunnya 2. Peningkatan perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi ketentuan perizinan. 3. Peningkatan kepatuhan pelaporan informasi industri.	2028

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
4.		Perwujudan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau	Perwujudan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau yang dilaksanakan melalui: 1. Peningkatan produktivitas IKM tiap tahunnya 2. Peningkatan perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi ketentuan perizinan. 3. Peningkatan kepatuhan pelaporan informasi industri.	2029
5.		Peneguhan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau	Peneguhan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau yang dilaksanakan melalui: 1. Peningkatan produktivitas IKM tiap tahunnya 2. Peningkatan perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi ketentuan perizinan. 3. Peningkatan kepatuhan pelaporan informasi industri.	2030
TENAGA KERJA				
1.		Penguatan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial	Penguatan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial yang dilaksanakan melalui: 1. Peningkatan kompetensi pencari kerja dan produktivitas tenaga kerja. 2. Peningkatan sarana hubungan industrial dan syarat kerja. 3. Tersedianya rencana tenaga kerja makro dan terfasilitasinya penyusunan rencana tenaga kerja mikro oleh perusahaan. 4. Peningkatan pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja. 5. Pelayanan penempatan transmigran	2027

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
2.		Peningkatan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial	Peningkatan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial yang dilaksanakan melalui: 1. Peningkatan kompetensi pencari kerja dan produktivitas tenaga kerja. 2. Peningkatan sarana hubungan industrial dan syarat kerja. 3. Tersedianya rencana tenaga kerja makro dan terfasilitasinya penyusunan rencana tenaga kerja mikro oleh perusahaan. 4. Peningkatan pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja. 5. Pelayanan penempatan transmigran	2028
3.		Pemantapan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial	Pemantapan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial yang dilaksanakan melalui: 1. Peningkatan kompetensi pencari kerja dan produktivitas tenaga kerja. 2. Peningkatan sarana hubungan industrial dan syarat kerja. 3. Tersedianya rencana tenaga kerja makro dan terfasilitasinya penyusunan rencana tenaga kerja mikro oleh perusahaan. 4. Peningkatan pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja. 5. Pelayanan penempatan transmigran	2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
4.		Perwujudan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau	Perwujudan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau yang dilaksanakan melalui: 1. Peningkatan kompetensi pencari kerja dan produktivitas tenaga kerja. 2. Peningkatan sarana hubungan industrial dan syarat kerja. 3. Tersedianya rencana tenaga kerja makro dan terfasilitasinya penyusunan rencana tenaga kerja mikro oleh perusahaan. 4. Peningkatan pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja. 5. Pelayanan penempatan transmigran	
5.		Peneguhan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau	Peneguhan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau yang dilaksanakan melalui: 1. Peningkatan kompetensi pencari kerja dan produktivitas tenaga kerja. 2. Peningkatan sarana hubungan industrial dan syarat kerja. 3. Tersedianya rencana tenaga kerja makro dan terfasilitasinya penyusunan rencana tenaga kerja mikro oleh perusahaan. 4. Peningkatan pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja. 5. Pelayanan penempatan transmigran	
PENUNJANG URUSAN				
	SASARAN RPJMD: S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi.	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik	2026

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	
		Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	2027
		Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	2028
		Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	2030

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rekapitulasi Rencana Kerja Dan Pendanaan

Dalam mendukung terwujudnya visi misi kepala daerah yang dituangkan melalui tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan perlu didukung dengan program, kegiatandan sub kegiatan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program yang telah ditentukan.

Program dan kegiatan yang terukur dan terarah mencakup indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program yang ada dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu program urusan dan progran penunjang urusan. Program urusan berfungsi untuk mencapai tujuan dinas yang telah sinergikan dengan tujuan daerah sedangkan program penunjang urusan adalah program kesekretariatan yang berfungsi untuk melayani rumahtangga dalam rangka menunjang tujuan dinas.

Dalam rangka menyusun program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta pemutakhirannya. Adapun Program-program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Meningkatkan akses dan produktivitas kerja, peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Rasio PDRB Industri Pengolahan		
		Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan			PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)		
			Meningkatnya produktivitas IKM tiap tahunnya		Persentase Peningkatan Produktivitas Industri Kecil Menengah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Terlaksananya Layanan Pengembangan Industri Kabupaten	Jumlah IKM yang mendapatkan layanan pengembangan Industri Kabupaten	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			Meningkatnya layanan perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi ketentuan perizinan		Persentase Perizinan Industri Kewenangan Kabupaten yang Memenuhi Komitmen Perizinan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Terlaksananya Pengadministrasian dan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri	Tertib Administrasi dan pemenuhan komitmen izin usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
			Meningkatnya tingkat kepatuhan pelaporan informasi industri		Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Terlaksananya Penyediaan Data Industri yang Mutakhir dan Terpublikasi	Tersedianya data industri yang mutakhir dan terpublikasi	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Tingkat Kesempatan Kerja		
					Produktivitas Tenaga Kerja		
					Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		
		Meningkatnya akses dan produktivitas kerja			Tingkat Kesempatan Kerja		
					Produktivitas Tenaga Kerja		
					Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
			Meningkatnya pemanfaatan rencana tenaga kerja yang disusun		Persentase Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja	Rencana Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
						Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
						Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
			Meningkatnya kompetensi pencari kerja dan produktivitas tenaga kerja		Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Kompetensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
					Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja		
				Terlaksananya Layanan Pelatihan Pencari kerja di Balai Latihan Kerja	Persentase Pencari kerja yang mendapat pelayanan pelatihan Balai Latihan Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	
						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
						Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan LPKS	Persentase LPKS yang terbina	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
						Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya Konsultasi Produktivitas	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
						Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	
				Tersusunnya dokumen Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	Dokumen Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas TenagaKerja	
			Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja		Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Terlaksananya Layanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	
						Pelayanan antar Kerja	
						Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
						Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
						Perluasan Kesempatan Kerja	
				Terlaksananya Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Informasi Pasar Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
						Job Fair/Bursa Kerja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya pelatihan/ pemberdayaan CPMI/PMI	Persentase PMI (pra dan purna) yang mendapat kan pelatihan/ pemberdayaan	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	
						Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
						Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
			Meningkatnya sarana hubungan industrial dan syarat kerja		Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Terlaksananya Pengesahan dan Pendaftaran PP dan PKB yang disahkan	Persentase PP dan PKB yang disahkan dan di daftarkan	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
				Terlaksananya Pengesahan dan Pendaftaran PP dan PKB yang disahkan	Persentase PP dan PKB yang disahkan dan di daftarkan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
						Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
			Meningkatnya pelaksanaan penempatan transmigran		Persentase Penempatan Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Terlaksananya Layanan Transmigrasi	Persentase Layanan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
						Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	
						Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	
					Nilai Sakip Perangkat Daerah		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah			Nilai Sakip Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Perencana dan Evaluasi Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, serta Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi	Persentase Layanan Administrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Keuangan Perangkat Daerah	Keuangan Perangkat Daerah		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Berdasarkan perumusan diatas, berikut rencana program, kegiatan, dan subekegiatan beserta pendanaan indikatif Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja di Kabupaten Purworejo. Pendanaan indikatif adalah perkiraan kebutuhan anggaran yang telah disusun disain kegiatannya. Dengan demikian, pendanaan indikatif cenderung bersifat perkiraan atas dasar rencana out put dan out come dari suatu kegiatan. Untuk lebih lengkap dan terperinci berikut kami sajikan program, kegiatan, sub kegiatan,

indicator kinerja dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan akses dan produktivitas kerja, peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	64,34	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Tingkat Kesempatan Kerja	%	96,11	96,90 - 97,17		97,07 - 97,37		97,16 - 97,46		97,25 - 97,55		97,34 - 97,64		97,34 - 97,64			
			Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	55,11	58,6		60,4		62,2		64,2		66,1		66,1			
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	39,05	41,3		42,07		42,83		43,6		44,37		44,37			
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	20,06	20,49		20,67		20,86		21,04		21,23		21,23			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	64,34	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
3.31.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						7.918.955.251		7.998.145.000		7.916.836.000		7.916.836.000		7.916.836.000				
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	7.918.955.251	100	7.998.145.000	100	7.916.836.000	100	7.916.836.000	100	7.916.836.000	100	SEKRETARIAT	Kabupaten Purworejo	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	22	24	20.289.900	24	55.543.353	24	72.528.400	25	77.752.250	24	72.998.485	121			
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	22	15.389.200	22	48.607.653	22	65.389.200	23	70.389.200	22	65.389.200	111			
3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	22	4.900.700	22	4.900.700	22	4.900.700	22	4.900.700	22	4.900.700	110			
3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	1	2.035.000	1	2.238.500	1	2.462.350	1	2.708.585	4			
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	45	1	6.451.212.451	45	6.007.607.747	45	6.215.821.191	45	6.215.821.191	45	6.169.787.015	181			
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50	56	6.451.212.451	56	6.002.049.998	56	6.204.921.191	56	6.204.921.191	56	6.158.887.015	56			
3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.31.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0	0	44	5.557.749	44	10.900.000	44	10.900.000	44	10.900.000	176			
3.31.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0		11	5.000.000	11	5.000.000	11	5.000.000	11	5.000.000	11			
3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	11	5.000.000	11	5.000.000	11	5.000.000	11	5.000.000	55			
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	21	0		21	36.000.000	21	11.000.000	21	11.000.000	21	41.000.000	21			
3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Unit	0	0	0	60	20.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	60			
3.31.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	17	16.000.000	17	11.000.000	17	11.000.000	17	11.000.000	85			
3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	268.701.900	9	338.409.900	9	329.098.500	9	349.453.888	9	331.098.500	9			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10	17.463.500	10	17.463.500	10	17.463.500	10	17.463.500	10	17.463.500	50			
3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	17	21.420.800	17	21.420.800	17	21.420.800	17	21.420.800	17	21.420.800	85			
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	11	11	65.003.400	11	66.000.000	11	66.000.000	11	66.000.000	11	66.000.000	55			
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	8	21.286.600	8	21.286.600	8	21.286.600	8	21.286.600	8	21.286.600	40			
3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	2	3.624.000	2	3.624.000	2	3.624.000	2	3.624.000	2	3.624.000	10			
3.31.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	37	52.183.000	37	52.183.000	37	52.183.000	37	52.183.000	37	52.183.000	185			
3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	10.600.000	12	9.000.000	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	60			
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	67.432.000	1	122.432.000	1	127.432.000	1	131.475.988	1	127.432.000	5			
3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	2	9.688.600	2	25.000.000	2	9.688.600	2	25.000.000	2	9.688.600	10			
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	0	0		25	350.000.000	5	50.000.000	0		0		30			
3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	20	300.000.000	0	0	0	0	0	0	20			
3.31.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	5	50.000.000	5	50.000.000	0	0	0	0	10			
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	555.652.000	24	555.652.000	24	775.455.909	24	782.876.671	24	806.020.000	24			
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	281.020.000	12	281.020.000	12	281.020.000	12	281.020.000	12	281.020.000	60			
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	274.632.000	12	274.632.000	12	494.435.909	12	501.856.671	12	525.000.000	60			
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	4	623.099.000	4	649.932.000	4	457.932.000	4	474.932.000	4	490.932.000	4			
3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	8	85.560.000	8	95.000.000	8	100.000.000	8	110.000.000	8	120.000.000	8			
3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	129	30	63.887.000	30	62.000.000	30	64.000.000	30	70.000.000	30	75.000.000	30			
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	5	441.932.000	5	441.932.000	5	241.932.000	5	241.932.000	5	241.932.000	5			
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	60	31.720.000	60	51.000.000	60	52.000.000	60	53.000.000	60	54.000.000	60			
2	Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan		PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Miliar Rupiah	4.975,90	6.232,83		7.358,25		8.522,01		9.712,15		10.940,13		10.940,13			
3.31.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						584.313.200		813.937.000		811.234.000		811.697.000		812.167.000				
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya produktivitas IKM tiap tahunnya	Persentase peningkatan produktivitas IKM tiap tahunnya	%	6,52	8,26	555.016.200	8,4	781.937.000	8,53	781.937.000	8,63	781.937.000	8,72	781.937.000	8,72	BIDANG PERINDUSTRIAN	Kabupaten Purworejo	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Pengembangan Industri Kabupaten	Jumlah IKM yang mendapatkan layanan pengembangan Industri Kabupaten	IKM	140	120	555.016.200	130	781.937.000	140	781.937.000	150	781.937.000	160	781.937.000	840			
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	261.600.900	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	300.000.000	5			
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	1	293.415.300	1	431.937.000	1	431.937.000	1	431.937.000	1	431.937.000	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1			
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya layanan perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi ketentuan perizinan	Persentase Perizinan Industri kewenangan kabupaten yang memenuhi komitmen perizinan	%	7,84	100	9.580.000	100	10.000.000	100	9.580.000	100	9.731.000	100	9.885.000	100	BIDANG PERINDUSTRIAN	Kabupaten Purworejo	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketertiban pemenuhan izin usaha industri	Persentase ketertiban pemenuhan izin usaha industri	%	0	31	9.580.000	34	10.000.000	37	9.580.000	40	9.731.000	43	9.885.000	60			
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar keglatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SiiNas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar keglatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SiiNas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SiiNas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	1	9.580.000	1	10.000.000	1	9.580.000	1	9.731.000	1	9.885.000	5			
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya tingkat kepatuhan pelaporan informasi industri	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri	%	39,11	39,91	19.717.000	40,34	22.000.000	40,7	19.717.000	41,01	20.029.000	41,28	20.345.000	41,28	BIDANG PERINDUSTRIAN	Kabupaten Purworejo	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data industri yang mutakhir dan terpublikasi	Persentase Data Industri yang Mutakhir dan Terpublikasi	%	0	100	19.717.000	100	22.000.000	100	19.717.000	100	20.029.000	100	20.345.000	100			
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SiiNas)	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SiiNas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SiiNas)	1	1	1	19.717.000	1	22.000.000	1	19.717.000	1	20.029.000	1	20.345.000	5			
3	Meningkatnya akses dan produktivitas kerja		Tingkat Kesempatan Kerja	%	96,11	96,90 - 97,17		97,07 - 97,37		97,16 - 97,46		97,25 - 97,55		97,34 - 97,64		97,34 - 97,64			
			Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	55,11	58,6		60,4		62,2		64,2		66,1		66,1			
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	39,05	41,3		42,07		42,83		43,6		44,37		44,37			
2.07.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						2.483.905.880		2.602.653.000		2.360.531.000		2.523.152.000		2.563.018.000				
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Meningkatnya pemanfaatan rencana tenaga kerja yang disusun	Persentase Rencana Tenaga Kerja yang disusun	%	100	100	13.009.400	100	17.000.000	100	83.009.000	100	13.215.000	100	13.424.000	500	BIDANG TENAGA KERJA	Kabupaten Purworejo	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang disusun	Dokumen	0	4	13.009.400	4	17.000.000	5	83.009.000	4	13.215.000	4	13.424.000	26			
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	0	0	0	0	0	1	70.000.000	0	0	0	0	1			
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang	4	4	13.009.400	4	17.000.000	4	13.009.000	4	13.215.000	4	13.424.000	25			
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya kompetensi pencari kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki kompetensi	%	88,31	88,5	2.195.056.280	88,6	2.195.056.000	88,7	2.001.682.000	88,9	2.229.738.000	89	2.264.968.000	89	BIDANG TENAGA KERJA	Kabupaten Purworejo	
			Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	%	4,69	7,81		9,38		10,94		12,5		14,06		14,06	BIDANG TENAGA KERJA	Kabupaten Purworejo	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Layanan Pelatihan Pencari kerja di Balai Latihan Kerja	Persentase Pencari kerja yang mendapat pelayanan pelatihan Balai Latihan Kerja	%	64	64,5	2.167.401.580	65	2.167.401.300	66	1.944.027.300	66,5	2.168.137.702	67	2.164.609.092	67			
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	668	480	2.167.401.580	480	1.967.401.300	480	1.944.027.300	480	2.168.137.702	480	2.164.609.092	2.400			
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	0	0	0	20	200.000.000	0	0	0	0	0	0	20			
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan LPKS	Persentase LPKS yang terbina	%	100	100	7.942.700	100	7.942.700	100	7.942.700	100	41.888.098	100	45.076.908	100			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Meningkatnya kualitas layanan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil	Laporan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Perusahaan	10	10	19.712.000	10	19.712.000	10	19.712.000	10	19.712.200	10	55.282.000	50			
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	10	10	19.712.000	10	19.712.000	10	19.712.000	10	19.712.200	10	55.282.000	50			
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	Dokumen Produktivitas Tenaga Kerja	Dokumen	0	0		0		1	30.000.000	0		0		3			
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerjadi Tingkat Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	3			
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja	%	67,89	67,94	79.754.400	67,96	181.707.000	67,99	79.754.000	68,01	81.015.000	68,04	82.295.000	68,04	BIDANG TENAGA KERJA	Kabupaten Purworejo	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja	%	100	100	64.842.800	100	139.842.800	100	63.582.000	100	63.562.800	100	67.405.000	100			
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	2.050	2.150	50.812.800	2.175	50.812.800	2.200	49.552.000	2.225	49.532.800	2.250	53.375.000	11.000			
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	50	50	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	450			
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	0	5	7.030.000	5	7.030.000	5	7.030.000	5	7.030.000	5	7.030.000	25			
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	20	0	0	20	75.000.000	0	0	0	0	0	0	20			
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Informasi Pasar Kerja	Laporan Informasi Pasar Kerja	%	100	100	8.021.600	100	8.005.000	100	8.021.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100			
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	300	300	8.021.600	300	8.005.000	300	8.021.000	300	8.000.000	300	8.000.000	1.500			
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Laporan Pelaksanaan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Laporan	1	1	6.890.000	1	33.859.200	1	8.151.000	1	9.452.200	1	6.890.000	1			
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	50	50	6.890.000	50	33.859.200	50	8.151.000	50	9.452.200	50	6.890.000	250			
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya sarana hubungan industrial dan syarat kerja	Persentase sarana hubungan industrial dan syarat kerja	%	53,28	56,56	196.085.800	57,34	208.890.000	58,13	196.086.000	58,91	199.184.000	59,69	202.331.000	59,69	BIDANG TENAGA KERJA	Kabupaten Purworejo	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan dan Pendaftaran PP dan PKB yang disahkan	Persentase PP dan PKB yang disahkan dan di daftarkan	%	52,52	53,19	9.747.800	53,87	25.000.000	54,54	19.748.200	55,21	19.748.200	55,89	25.895.200	55,89			
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	Peraturan Perusahaan	2	2	9.747.800	2	15.000.000	2	9.748.200	2	9.748.200	2	15.895.200	10			
2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	0	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5			
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, SUSU dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	0	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5			
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja	%	100	100	186.338.000	100	183.890.000	100	176.337.800	100	179.435.800	100	176.435.800	100			
2.07.05.2.02.0002	Penyelesalan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	5	5	16.053.800	5	16.053.800	5	16.053.800	5	16.053.800	5	16.053.800	25			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	22	22	9.200.000	22	9.200.000	22	9.200.000	22	9.200.000	22	9.200.000	22			
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Lembaga	1	1	101.084.200	1	108.636.200	1	101.084.000	1	104.182.000	1	104.182.000	1			
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	0	268	60.000.000	268	50.000.000	268	50.000.000	268	50.000.000	268	47.000.000	1.340			
3.32.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						63.120.000		101.423.000		63.120.000		64.117.000		65.130.000				
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pelaksanaan penempatan transmigran	Persentase Penempatan Transmigrasi	%	100	100	63.120.000	100	101.423.000	100	63.120.000	100	64.117.000	100	65.130.000	100	BIDANG TENAGA KERJA	Kabupaten Purworejo	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Transmigrasi	Persentase Layanan Transmigrasi	%	0	100	63.120.000	100	101.423.000	100	63.120.000	100	64.117.000	100	65.130.000	100			
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	10.324.800	1	10.324.800	1	10.324.800	1	10.324.800	1	10.324.800	5			
3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala Keluarga	1	5	52.795.200	5	52.795.200	5	52.795.200	5	53.792.200	5	54.805.200	25			
3.32.03.2.01.0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Terlaksananya Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Lokasi	0	0	0	1	21.606.000	0	0	0	0	0	0	5			
3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	0	0	0	1	16.697.000	0	0	0	0	0	0	5			
Jumlah							**11.050.284.331**		**11.516.158.000**		**11.151.721.000**		**11.315.802.000**		**11.357.151.000**				

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam Renstra Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung pencapaian Program-program prioritas pembangunan daerah. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Produktivitas Industri Kecil Menengah			
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota		
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Industri Kreatif di Dalam Negeri.	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bimtek Blending Rokok, Bimtek Pelintingan Rokok, Bimtek Pengendalian Mutu Rokok, Bimtek Roasting dan Blending Kopi, Bimtek Barista Kopi, Bimtek Manajemen Wirausaha Kopi, Bimtek Pemasaran dan Digital Marketing Kopi, Fasilitasi Rumah Kemasan, Pelatihan Kemasan Produk	
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Perizinan Industri Kewenangan Kabupaten yang Memenuhi Komitmen Perizinan			
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
			Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Verifikasi Teknis Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha	
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri			
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pendataan industri melalui aplikasi sipit	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Perencanaan: Renja, Perubahan Renja, RKT, Perubahan RKT, PK, Perubahan PK, MR OPD, RKO, RKO Perubahan, KAK, KAK, KAK Perubahan, ASB, ASB Perubahan, RUP, RUP Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, GAP GBS, GAP GBS Perubahan, BA Forum PD, Renstra, Renstra Perubahan.	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Bulanan (Fisik, Keuangan, Program), Laporan Triwulanan, Dokumen LkjIP, Dokumen LKPJ, Dokumen LPPD, Laporan SPIP, Laporan SKM.	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyusunan Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan untuk ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyusunan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Penyedian Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, seperti: lampu, batu baterai, roll kabel, dsb. dalam kurun waktu satu tahun.	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga: keset, sapu, pel, sabun (bahan dan peralatan kebersihan) dalam kurun waktu satu tahun	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor: jamuan (minum) harian pegawai dalam kurun waktu satu tahun	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan/ penggandaan: stopmap, spanduk, kartu kendali, kuitansi dinas, fotokopi, dalam kurun waktu satu tahun	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dalam kurun waktu satu tahun	
			Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan bahan/ material: ATK, benda pos, dalam kurun waktu satu tahun	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu dalam kurun waktu satu tahun	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD: rapat koordinasi (internal & eksternal), konsultasi dalam dan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
				luar daerah dalam kurun waktu satu tahun.	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD.	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Laptop, PC, Printer dan Scaner	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik: pembayaran rekening telepon, internet, air, listrik, jasa tambah daya/ pemeliharaan jaringan listrik dalam kurun waktu satu tahun.	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honor untuk Jasa pelayanan umum kantor: jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan, jasa tenaga pengemudi, jasa teknis lainnya dalam kurun waktu satu tahun.	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada tahun tertentu	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan: Komputer, Laptop, Printer, Mesin Jahit, Mesin Potong Rumput.	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
				direhabilitasi: gedung kantor, rumah dinas pada tahun tertentu.	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi: AC	
5	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan rencana tenaga kerja makro	
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.	
6	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
			Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan ketrampilan berdasarkan unit kompetensi	
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelatihan	
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Sosialisasi dan Monitoring LPKS.	
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas TenagaKerja	Penyusunan Dokumen Pengukuran dan Produktivitas Tenaga Kerja	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
7	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja			
			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		
			Pelayanan antar Kerja	Pelayanan antar kerja AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKAN (Antar Kerja Antar Negara), dan Rakor BKK	
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Bimbingan konsultasi produktivitas pada Perusahaan kecil	
			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan di bidang ketenagakerjaan terkait disabilitas.	
			Perluasan Kesempatan Kerja	Pelatihan ketrampilan kerja kepada masyaarakat.	
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
			Job Fair/Bursa Kerja	Penyelenggaraan Jobfair	
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota		
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Sosialisasi Kepada CPMI Pra penempatan	
			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Pemberdayaan bagi PMI Purna	
8	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Syarat Kerja			
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
			Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Bimtek dan Pengesahan peraturan perusahaan	
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Verifikasi keanggotan serikat pekerja.	
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi lembaga kerja sama tripartit dan dewan pengupahan	
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	
9	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi			
			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi ke Provinsi dan Pusat terkait kuota dan lokasi penempatan transmigrant, Penyusunan Lokasi dan peninjauan Lokasi transmigrasi.	
			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawalan Transmigran ke Lokasi Transmigrasi	
			Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Penjajakan Lokasi Transmigrasi	
			Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Memonitoring perkembangan dan memastikan terpenuhinya hak Transmigran serta mengidentifikasi hambatan dan rekomendasi agar para transmigrant bisa mandiri dan Sejahtera.	

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo menyelaraskan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra dengan kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, serta program unggulan Kabupaten Purworejo. Keselarasan ini dimaksudkan agar pelaksanaan program perangkat daerah tidak hanya mendukung pencapaian target internal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan di berbagai tingkatan. Lebih lanjut, bentuk dukungan Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja terhadap kebijakan pembangunan tersebut dapat diuraikan ke dalam tiga bagian utama, yaitu dukungan terhadap program nasional, program provinsi, dan dukungan terhadap program kabupaten (Pitulungan). Program-program Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo pada pembangunan nasional dan provinsi melalui program-program yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini terwujud dalam:

4.2.1 Penjabaran Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional

1. Asta Cita

Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Asta Cita Kepala Daerah, dapat disampaikan bahwa program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo Tahun 2026–2030 tidak terdapat keterkaitan langsung dengan Asta Cita dimaksud. Hal ini dikarenakan program dan kegiatan Dinperintransnaker lebih bersifat mendukung urusan wajib sub-urusan kebencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dipetakan secara eksplisit ke dalam butir-butir Asta Cita. Dengan demikian, penjabaran program Renstra Dinperintransnaker yang mendukung Asta Cita adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Dukungan Program terhadap Nasional

No	Astacita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan
1.	Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam negeri	Bidang Industri
2.	Asta Cita 5:	Pelatihan Gula Kelapa,	Bidang Industri

No	Astacita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan
	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemanfaatan makanan berbasis ketela.	

2 Program Strategi Nasional

Dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional Penanggulangan Kemiskinan, khususnya optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kabupaten Purworejo melalui Dinperintransnaker melaksanakan sejumlah program dan aktivitas pendukung di periode 2026–2030. Melalui Program Program Hubungan Industrial, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Dengan demikian, penjabaran program Renstra Dinperintransnaker yang mendukung Program Strategis Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Dukungan terhadap Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026-2030
1.	Penanggulangan kemiskinan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pemberian bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar kerja AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Ke0rja Antar Daerah), AKAN (Antar Kerja Antar Negara), dan Bimtek BKK.
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi

4.2.2 Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi)

Dalam rangka melaksanakan Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah, Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo menyusun sejumlah kegiatan prioritas yang mendukung yaitu Pelatihan 1.000 Konten Kreator Desa Wisata dan Taruna Karya Mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja. Dengan demikian, penjabaran program Renstra Dinperintransnaker yang mendukung Program Dukungan Delegasi Provinsi adalah sebagai berikut:

Program Dukungan Delegasi Provinsi

No	Program Delegasi Provinsi	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026-2030
1.	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelatihan kejuruan TIK
2.	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi

4.2.3 Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pitulungan yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Purworejo, Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo telah menyelaraskan berbagai aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 4.7 Program Dukungan Terhadap Pitulungan

No	Kegiatan Unggulan	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas di 2026-2029
1.	Rame Pasare	Fasilitas akses permodalan, pemasaran, pelatihan, dll untuk usaha mikro dan kecil, terutama bagi industri rumahan yang dikelola perempuan	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam negeri
2.		Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penentuan indikator dan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo merupakan langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Indikator dan target kinerja dirumuskan secara terukur agar dapat menjadi pedoman dalam mengevaluasi capaian program dan kegiatan, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dalam penyusunannya, indikator kinerja dipilih berdasarkan relevansi dengan sasaran pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinperintransnaker. Adapun indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan Dinperintransnaker dapat dilihat pada Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinperintransnaker.

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Utama Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	Satuan	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	20.06	20,49	20,67	20,86	21,04	21,23	Tujuan PD
2	Tingkat Kesempatan Kerja	%	96,89	96,90 - 97,17	97,07 - 97,37	97,16 - 97,46	97,25 - 97,55	97,34 - 97,64	Indikator Tujuan dan Sasaran PD
3	Produktivitas Tenaga Kerja	%	56,80	58,60	60,40	62,20	64,20	66,10	Indikator Tujuan dan Sasaran PD
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	40,53	41,30	42,07	42,83	43,60	44,37	Indikator Tujuan dan Sasaran PD
5	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Indikator Tujuan PD
6	PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	%	4975.9	6.232,82	7.358,25	8.522,01	9.712,15	10.940,13	Sasaran PD
7	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Indikator Sasaran PD

Tabel 4.9
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinperintransnaker

NO.	INDIKATOR	Satuan	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	20.06	20,49	20,67	20,86	21,04	21,23	IUP
2.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	40.53	41.30	42.07	42.83	43.60	44.37	IUP
3.	Persentase Kegiatan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	100	100	100	100	100	100	Permendagri No 18 Tahun 2020
4.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	Permendagri No 18 Tahun 2020
5.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	2.03	2.18	2.34	2.50	2.65	2.81	Permendagri No 18 Tahun 2020
6.	Persentase Tenaga Kerja yang ditenpatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota.	%	67.92	67.94	67.96	67.99	68.01	68.04	Permendagri No 18 Tahun 2020
7.	Persentase Peningkatan Produktivitas Industri Kecil Menengah	%	7,29	8,26	8.40	8.53	8.63	8.72	Permendagri No 18 Tahun 2020
8.	Persentase Perizinan Industri Kewenangan Kabupaten yang Memenuhi Komitmen Perizinan	%	28	28.18	28.33	28.46	28.57	28.67	Permendagri No 18 Tahun 2020
9.	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri	%	39.90	39.91	40.34	40.70	41.01	41.28	Permendagri No 18 Tahun 2020
10.	Persentase Penempatan Transmigrasi	%	100	100	100	100	100	100	Permendagri No 18 Tahun 2020

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja setiap tahun;
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas;
c. Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja dilakukan setiap tahun selama periode renstra;
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
a. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian pada Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pambangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal tersebut setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya, maka dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo perlu menyusun dokumen perencanaan strategis yaitu dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, yang akan dicapai 5 (lima) tahun kedepan serta strategi, kebijakan, serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo terpilih.

Dokumen Renstra juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan

kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan serta penganggaran dapat lebih terpadu, terarah serta konsisten dalam mencapai tujuan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran, mencapai tujuan dan misi sehingga visi Bupati terpilih yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2025–2029. Renstra juga sebagai dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dalam prosesnya, penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Oleh karena itu penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan RPJMD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Renstra juga harus memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Renstra K/L terkait, RTRW dan KLHS.

Tahapan penyusunan Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan Renstra PD;
b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD;
c. Penyampaian Rancangan Awal RPJMD kepada PD;
d. Penyampaian RancanganRenstra PD;
e. Forum Perangkat Daerah/ Lintas PD;
f. Verifikasi Rancangan Renstra PD;
g. Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD;
h. Reviu APIP;
i. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;

j. Penetapan Renstra PD.

Adapun hubungan keterkaitan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya digambarkan dengan skema sebagaimana dalam gambar 1.1

Gambar 1.1

Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

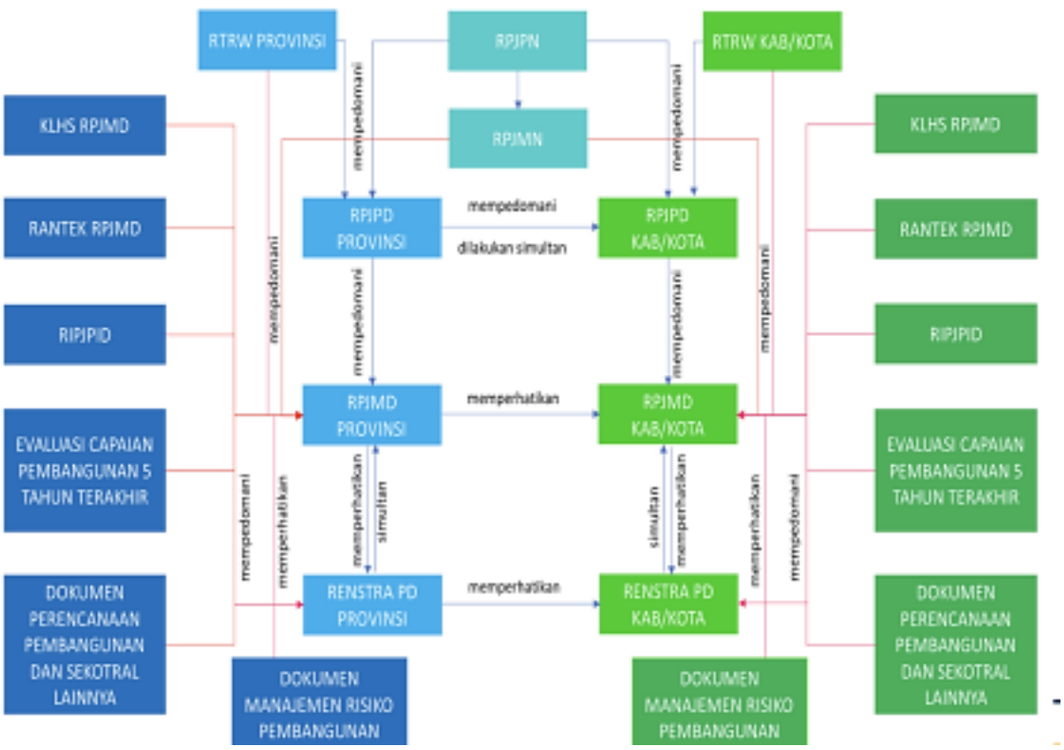

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
24. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 141 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor141);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan langkah untuk menentukan arah kebijakan Perangkat

Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
2. Memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan PD lingkup Pemerintah Kabupaten Purworejo terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Memberi pedoman bagi Sekretariat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan,

Bab ini menguraikan latar belakang, pengertian, hubungan/keterkaitan Renstra Setda dengan dokumen

perencanaan lain, landasan kebijakan, maksud, tujuan, dan sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra).

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menggambarkan tentang struktur organsiasi SekretariatDaerah Kabupaten Purworejo, seperti apa tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, serta kelompok sasaran layanan, selain itu juga berisi mengenai permasalahan pada layanan serta penentuan isu strategis;

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi penjelasan tentang tujuan dan sasaran serta strategis dan arah kebijakan sesuai tupoksi Sekretariat Daerah selama 5 (lima) tahun yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah;

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun kedepan;

Bab V Penutup,

Bab penutup ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 141 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, adalah sebagai berikut:

A. Tugas Pokok

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Pemerintah Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

C. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo terdiri atas:

1. Sekretaris Daerah, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan pelayanan administratif di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
d. pelaksanaan pelayanan administratif di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsi.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:

a. Bagian Pemerintahan;

   Bagian Pemerintahan bertugas menyiapkan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan administrasi di bidang admnistrasi tata pemerintahan dan fasilitasi kerjasama daerah.

   Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

   1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi tata pemerintahan dan fasilitasi kerjasama daerah;
   2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi tata pemerintahan dan fasilitasi kerjasama daerah;
   3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan fasilitasi kerjasama daerah;
   4) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan dan fasilitasi kerjasama daerah; dan

5) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsi.

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat bertugas menyiapkan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
4) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kesejahteraan rakyat; dan
5) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsi.

c. Bagian Hukum

Bagian Hukum bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum;
2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum;

3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum;
4) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum; dan
5) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsi.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan pelayanan administratif di bidang perekonomian dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/ jasa;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/ jasa;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/ jasa; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan dan mengoordinasikan:

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam bertugas menyiapkan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pemantauan kebijakan sumber daya alam;
2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pemantauan kebijakan sumber daya alam;
3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pemantauan kebijakan sumber daya alam; dan
4) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan terkait dengan tugas dan fungsi.

b. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan administrasi pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan administrasi pembangunan;
2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pelaksanaan administrasi pembangunan;
3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan administrasi pembangunan;
4) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pelaksanaan administrasi pembangunan; dan
5) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan terkait dengan tugas dan fungsi.

c. Bagian Pengadaan Barang/ jasa

Bagian Pengadaan Barang/ jasa, bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah dan melaksanakan pembinaan administrasi di bidang pengadaan barang/ jasa serta mengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengadaan Barang/ jasa menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/ jasa;
2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/ jasa;
3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/ jasa;
4) pengelolaan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa; dan
5) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh AsistenPerekonomian dan Pembangunan terkait dengan tugas dan fungsi.

4. Asisten Administrasi Umum, bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, melaksanakan pelayanan administratif di bidang administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

1) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;

3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
4) pelaksanaan pelayanan administratif di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
5) pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada perangkat daerah; dan
6) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait tugas dan fungsi.

Asisten Administrasi Umum membawahkan dan mengoordinasikan:

a. Bagian Umum

Bagian Umum bertugas menyiapkan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan;
2) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan; dan
3) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum terkait dengan tugas dan fungsi.

Bagian Umum membawahkan:

1) Subbagian Perencanaan, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi:
   a) menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja;
   b) menyusun perjanjian kinerja; dan
   c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang berkaitan dengan tugas jabatannya.

2) Subbagian Keuangan, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi:
   a) menyelenggarakan administrasi keuangan;
   b) menyelenggarakan administrasi keuangan dan operasional Bupati dan Wakil Bupati;
   c) merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan, dan pertanggungjawaban anggaran;
   d) menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban;
   e) melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharan, anggaran dan pertanggungjawaban;
   f) melaksanakan tugas penatausahaan keuangan;
   g) melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
   h) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
   i) melaksanakan sistem pengendalian intern;
   j) melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban; dan
   k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang berkaitan dengan tugas jabatannya.
3) Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Kepegawaian, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang Tata Usaha, Rumah Tangga dan Kepegawaian, yang meliputi:
   a) menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
   b) menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
   c) menyelenggarakan administrasi umum;
   d) menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
   e) menyediakan jasa penunjang urusan pemerintah derah;

f) menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah derah;
g) melaksanakan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat daerah;
h) melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat;
i) melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat daerah;
j) melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat daerah;
k) melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;
l) melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat daerah;
m) melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat daerah; dan
n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang berkaitan dengan tugas jabatannya.

b. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi bertugas menyiapkan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang penataan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penataan organisasi;
2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penataan organisasi;

3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penataan organisasi; dan
4) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum terkait dengan tugas dan fungsi.

c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan bertugas menyiapkan pelaksanaan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol dan komunikasi pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi;
2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi;
3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi dan dokumentasi; dan
4) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:

1) Subbagian Protokol, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang protokol, yang meliputi:
   a) memfasilitasi keprotokolan;
   b) melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
   c) menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
   d) menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;

e) menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;

f) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati; dan

g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugas jabatannya.

5. Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional.

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

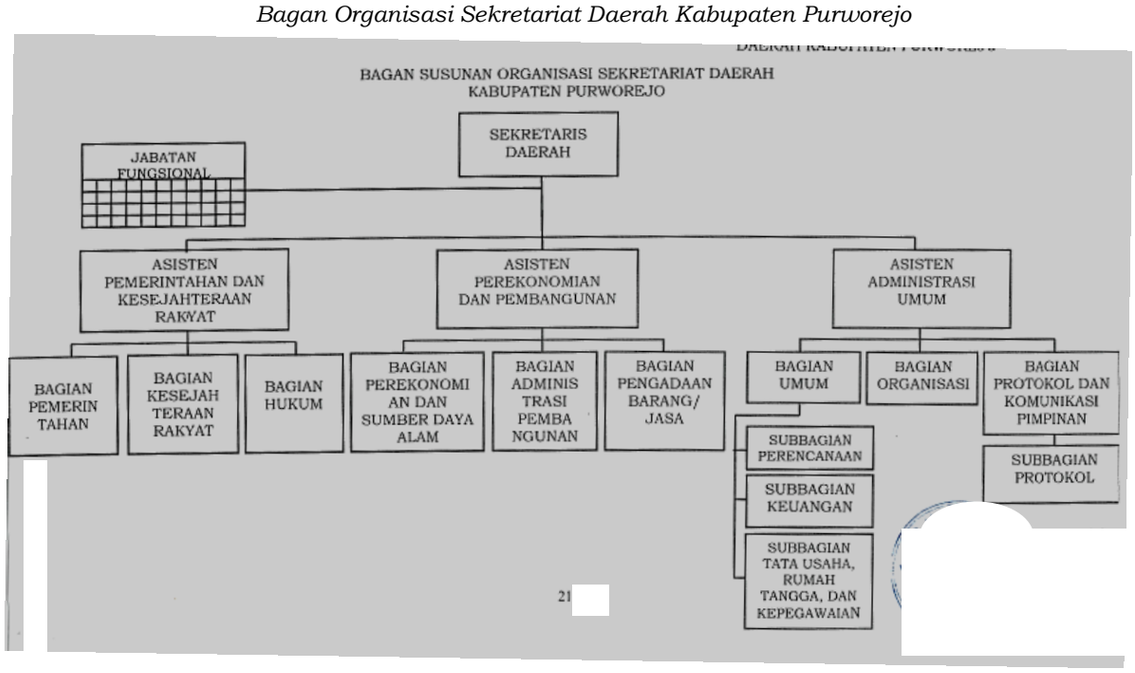

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo didukung dengan komposisi pegawai dengan jumlah karyawan/ karyawati sebanyak 164 orang yang terdiri dari 112 PNS, 14 orang PPPK dan 38 orang tenaga jasa perseorangan. Dari jumlah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Jumlah Eselon IIb sebanyak 5 orang yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, serta 3 orang Staf Ahli Bupati.
- Jumlah Eselon III dari sebanyak 8 orang yaitu Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian Organisasi.
- JumlahEselon IV sebanyak 4 orang yaitu Kepala Subbagian Perencanaan, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Kepegawaian, serta Kepala Subbagian Protokol.
- Jumlah pegawai fungsional sebanyak 109 orang dengan jumlah pegawai fungsional di Bagian Pemerintahan sebanyak 7 orang, Bagian Kesra sebanyak 5 orang, Bagian Hukum sebanyak 7 orang, Bagian Perekonomian dan SDA sebanyak 5 orang, Bagian Administrasi Pembangunan sebanyak 3 orang, Bagian Pengadaan Barang/ Jasa sebanyak 22 orang dan 1 orang PPPK, Bagian Umum sebanyak 32 orang dan 10 orang PPPK, Bagian Organisasi sebanyak 7 orang, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebanyak 8 orang dan 3 orang PPPK. Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
KondisiKepegawaianBerdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan EselonJabatan

Kriteria		Jumlah	
ASN		125	orang
Jenis Kelamin	Laki-laki	69	orang
	Perempuan	56	orang
Pendidikan Terakhir	Pasca Sarjana (S2)	18	orang
	Sarjana (S1)/ D IV	50	orang
	Sarjana Muda (D3)	19	orang
	SMA/K	28	orang
	SMP	3	orang
	SD	7	orang
Pangkat/ Golongan Ruang	Pembina Utama Muda (IV/c)	3	orang
	Pembina Tk. I (IV/b)	8	orang
	Pembina (IV/a)	2	orang
	Penata Tk. I (III/d)	16	orang
	Penata (III/c)	9	orang

Kriteria		Jumlah	
	Penata Muda Tk. I (III/b)	28	orang
	Penata Muda (III/a)	23	orang
	Pengatur Tk. I (II/d)	9	orang
	Pengatur (II/c)	6	orang
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	4	orang
	Pengatur Muda (II/a)	4	orang
	PPPK	14	orang
Jabatan	Eselon IIb	5	orang
	Eselon III	7	orang
	Eselon IV	4	orang
	Fungsional (AK)	25	orang
	Fungsional umum (Non AK)	71	orang
NON PNS		38	orang
Jenis pekerjaan	Tenaga Administrasi	3	orang
	Tenaga Kebersihan	25	orang
	Tenaga pengemudi	5	orang
	Tenaga Pramusaji	1	orang
	Tenaga Teknis Peliputan dan Data Base	3	orang
	Tenaga operator Generator / Listrik	1	orang

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah sebagaimana Tabel 2.2

Tabel 2.2

Data Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG	KET.
1	2	3	4	5
1	Tanah	5 bidang	Baik	
2	A.C. Split	59 unit	Baik	
3	A.C. Window	41 unit	Baik	
4	Alat Pemadam/Portable	12 unit	Baik	
5	Alat Pemanas Ruangan	7 unit	Baik	
6	Alat Tenis Meja	1 unit	Baik	
7	Amplifier	4 unit	Baik	
8	Antene SHF Stationary	14 unit	Baik	
9	Aquarium	1 buah	Baik	
10	Bangku Tunggu	3 buah	Baik	
11	Baskom Steinleess	6 buah	Baik	

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG	KET.
1	2	3	4	5
12	Bendera Pataka	3 buah	Baik	
13	Brandkas	17 buah	Baik	
14	Buffet Kaca	9 buah	Baik	
15	Buffet Kayu	3 buah	Baik	
16	Camera Digital	2 buah	Baik	
17	Camera Electronic	10 buah	Baik	
18	Camera Video	10 buah	Baik	
19	CCTV	5 set	Baik	
20	Coffee Maker	6 buah	Baik	
21	Compact Disc Player	2 unit	Baik	
22	CPU (Peralatan Mainframe)	16 unit	Baik	
23	Dispenser	36 buah	Baik	
24	Display	1 buah	Baik	
25	Dokar/Kuda (Kendaraan Tak Bermotor Penumpang)	1 unit	Baik	
26	Elevator /Lift	1 unit	Baik	
27	Equalizer	2 unit	Baik	
28	Exhause Fan	8 unit	Baik	
29	Facsimile	3 unit	Baik	
30	Filing Cabinet Besi	68 buah	Baik	
31	Filing Cabinet Kayu	3 buah	Baik	
32	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4 buah	Baik	
33	Gelas Kristal	2 buah	Baik	
34	Gerobak Sampah	5 unit	Baik	
35	Handy Cam	2 unit	Baik	
36	Handy Talky	7 unit	Baik	
37	Hard Disk	19 unit	Baik	
38	Intercom Unit	13 unit	Baik	
39	Jam Elektronik	26 buah	Baik	
40	Jaringan & Prifler	1 unit	Baik	
41	Kabel heat stereo	1 roll	Baik	
42	Kabel roll	1 roll	Baik	
43	Kabel snake 12 line	1 roll	Baik	
44	Kabel speaker	1 roll	Baik	
45	KabinetMinuman	1 unit	Baik	
46	Kardex Besi	6 unit	Baik	
47	Karpet	2 buah	Baik	
48	Kasur/Spring Bed	14 buah	Baik	
49	Kendaraan Bermotor Roda 2	46 unit	Baik	
50	Kendaraan Bermotor Roda 3	5 unit	Baik	

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG	KET.
1	2	3	4	5
51	Kendaraan Bermotor Roda 4	42 unit	Baik	
52	Keyboard	12 unit	Baik	
53	Kipas Angin	67 buah	Baik	
54	Kitchen Set	1 set	Baik	
55	Kompor Gas (Alat Dapur)	15 buah	Baik	
56	Korden	105 buah	Baik	
57	Kursi Besi/Metal	422 buah	Baik	
58	Kursi Biasa	84 buah	Baik	
59	Kursi Kayu	52 buah	Baik	
60	Kursi KerjaPegawai Non Struktural	32 buah	Baik	
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon I	1 buah	Baik	
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	5 buah	Baik	
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 buah	Baik	
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3 buah	Baik	
65	Kursi Kerja Pejabat lainnya	129 buah	Baik	
66	Kursi Lipat	266 buah	Baik	
67	Kursi Putar	93 buah	Baik	
68	Kursi Rapat	388 buah	Baik	
69	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	22 buah	Baik	
70	Kursi Tamu	15 buah	Baik	
71	Kursi Tamu di Ruangan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	4 buah	Baik	
72	Kursi Tamu di RuanganPejabatEselon III	1 set	Baik	
73	Lambang Garuda Pancasila	20 buah	Baik	
74	Lampu Robyong Kristal Besar	6 set	Baik	
75	Laptop	95 buah	Baik	
76	LCD Projector/Infocus	6 unit	Baik	
77	Lemari Besi/Metal	11 buah	Baik	
78	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	9 buah	Baik	
79	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	4 buah	Baik	
80	Lemari Es	11 buah	Baik	
81	Lemari Kaca	19 buah	Baik	
82	Lemari Kayu	85 buah	Baik	
83	Lemari Makan	2 buah	Baik	
84	Lemari Pakaian	4 buah	Baik	
85	Lemari Sorok	14 buah	Baik	
86	Loudspeaker	33 unit	Baik	

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG	KET.
1	2	3	4	5
87	Meja 1/2 Biro	289 buah	Baik	
88	Meja Bundar	26 buah	Baik	
89	Meja Kayu Rias	4 buah	Baik	
90	Meja KerjaBesi/Metal	4 buah	Baik	
91	Meja Kerja Kayu	14 buah	Baik	
92	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	76 buah	Baik	
93	Meja Kerja Pejabat Eselon II	4 buah	Baik	
94	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3 buah	Baik	
95	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10 buah	Baik	
96	Meja Kerja Pejabat lain-lain	26 buah	Baik	
97	Meja Komputer	82 buah	Baik	
98	Meja Makan Besi	22 buah	Baik	
99	Meja Panjang	23 buah	Baik	
100	Meja Rapat	97 buah	Baik	
101	Meja Rapat Pejabat lainnya	6 buah	Baik	
102	Meja Resepsionis	4 buah	Baik	
103	Meja Rias	3 buah	Baik	
104	Meja Tambahan	4 buah	Baik	
105	Meja Tamu Biasa	11 set	Baik	
106	Meja Telepon	9 buah	Baik	
107	Mesin Absensi	3 buah	Baik	
108	MesinCuci	6 buah	Baik	
109	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	7 buah	Baik	
110	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	3 buah	Baik	
111	Mesin Pemotong Rumput	6 buah	Baik	
112	Mesin Penghisap Debu	8 buah	Baik	
113	Microphone	35 buah	Baik	
114	Microphone Floor Stand	18 buah	Baik	
115	Microphone Table Stand	35 buah	Baik	
116	Mimbar/ Podium	6 buah	Baik	
117	Monitor	24 unit	Baik	
118	Nobel Carpet/ Sajadah Panjang	3 buah	Baik	
119	Note Book	19 buah	Baik	
120	Overhead Projector	26 buah	Baik	
121	OXONE/ Drink Jar	4 buah	Baik	
122	P.C Unit	64 unit	Baik	
123	Papan Visual	29 buah	Baik	
124	Papan Nama Instansi	1 buah	Baik	

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG	KET.
1	2	3	4	5
125	Papan Pengumuman	4 buah	Baik	
126	Papan Tulis	3 buah	Baik	
127	Partisi Ruangan	1 set	Baik	
128	Penangkal Petir	1 unit	Baik	
129	Peralatan antenna shf	9 unit	Baik	
130	Personal Komputer lainnya	83 unit	Baik	
131	Pompa Hydran	1 unit	Baik	
132	Portable Generating Set	1 unit	Baik	
133	Portable Water Pump	4 unit	Baik	
134	Power Amplifier	2 unit	Baik	
135	Power Supply	3 unit	Baik	
136	Power Supply Microphone	2 unit	Baik	
137	Printer	82 unit	Baik	
138	Radio	2 unit	Baik	
139	Rak Besi	45 buah	Baik	
140	Rak Kayu	39 buah	Baik	
141	Rak Peralatan	5 buah	Baik	
142	Rak Piring	6 buah	Baik	
143	Rak Sepatu	3 buah	Baik	
144	Rak Sound System	5 buah	Baik	
145	Rice Cooker	17 buah	Baik	
146	Rice Warmer	28 buah	Baik	
147	Roler Top	4 buah	Baik	
148	Scaffolding	4 unit	Baik	
149	Scanner	3 unit	Baik	
150	Proyektor	8 unit	Baik	
151	Seterika	1 buah	Baik	
152	Sofa	5 set	Baik	
153	Sound System	11 unit	Baik	
154	Stabilisator	1 unit	Baik	
155	Stationary Generating Set	3 unit	Baik	
156	Stationary Water Pump	8 unit	Baik	
157	Tabung Gas	7 buah	Baik	
158	Tangga Aluminium	10 buah	Baik	
159	Tape Recorder	5 unit	Baik	
160	Taplak Meja Besar	51 buah	Baik	
161	Target Drone	7 buah	Baik	
162	Telephone (PABX)	2 unit	Baik	
163	Telephone Mobile	8 unit	Baik	
164	Televisi	37 unit	Baik	

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG	KET.
1	2	3	4	5
165	Tempat Tidur Besi	2 buah	Baik	
166	Tempat Tidur Kayu	15 buah	Baik	
167	Tenda	6 set	Baik	
168	Termos Air	3 buah	Baik	
169	Tiang Pataka	3 buah	Baik	
170	Tripod Camera	1 unit	Baik	
171	Tustel	10 unit	Baik	
172	Uninterruptible Power Supply (UPS)	27 buah	Baik	
173	Unit Power Supply	9 buah	Baik	
174	Universal tester lainnya (dst)	2 buah	Baik	
175	White Board	40 buah	Baik	
176	Wireless	11 buah	Baik	
177	Wireless Amplifier	2 unit	Baik	
178	Wireless MIC	6 buah	Baik	
179	Zice	105 set	Baik	
180	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	2 unit	Baik	
181	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	1 unit	Baik	
182	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	19 unit	Baik	
183	Bangunan Gedung Kantor Permanen	14 unit	Baik	
184	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1 unit	Baik	
185	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	1 unit	Baik	
186	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1 unit	Baik	
187	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1 unit	Baik	
188	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1 unit	Baik	
189	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1 unit	Baik	
190	Hotel Permanen	2 unit	Baik	
191	Istana Peninggalan	1 unit	Baik	
192	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	2 unit	Baik	
193	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	2 unit	Baik	
194	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	2 unit	Baik	
195	Jaringan Transmisi Lain-lain	2 unit	Baik	

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG	KET.
1	2	3	4	5
196	Sumur Resapan	1 unit	Baik	
197	Alat Musik Nasional/Daerah	22 unit	Baik	
198	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	2 buah	Baik	
199	Tanaman Holtikultura	1 buah	Baik	
200	Buku Umum Lain-lain	1 buah	Baik	
201	Hukum (Buku/ Peraturan/ UU)	50 buah	Baik	

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indicator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/ atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2026 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo berdasarkan sasaran/ target Renstra Tahun2021 – 2025 menurut indicator kinerja pelayanan SKPD dan/ atau indikator lainnya disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3(T.C-23)

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah							Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah							Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	26
	Indikator Renstra 2021-2026																								
	Indikator Tujuan																								
1	Indeks Pelayanan Publik						4,15	4,20	4,25	4,30	4,35	4,09	3,86	4,51	3,59	4,33					108,67%	85,48%	101,88%	0,00 %	0,00 %
	Indikator Sararan																								
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah						83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	81,96	80,78	83,11	84,06	85,08					100,13%	100,07%	100,09%	0,00 %	0,00 %

Pada Tabel 2.3 menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dari tahun 2021 – 2024. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari seluruh pihak untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat semester II tahun 2024 terdapat 2 unsur pelayanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya dan Penanganan Pengaduan, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan di Sekretariat Daerah saat ini sudah tidak dipungut biaya apapun dan bebas pungutan liar, selain itu aduan masyarakat dapat ditangani dengan baik serta menjadi acuan bagiperbaikan pelayanan kedepannya. Sebaliknya terdapat 3 unsur pelayanan dengan nilai terendah yaitu persyaratan, waktu, serta sarana dan prasarana. Adapun kondisi permasalahan/ kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Perlunya peningkatan sosialisasi mengenai standar pelayanan Sekretariat Daerah yang telah disusun kepada pengguna layanan salah satunya dengan melaksanakan pembaruan informasi melalui Papan Informasi maupun website.
b. Peningkatkan cara berkomunikasi petugas pelayanan yang efektif, berorientasi pelayanan serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna pelayanan.
c. Waktu penyelesaian pelayaan masih dirasakan lambat oleh masyarakat karena sebagian besar masih menggunakan layanan offline.
d. Perbaikan sarana dan prasarana penunjang pelayanan baik secara *online* maupun *offline*.

Dalam melaksanakan pelayanan pada periode Renstra tahun 2021-2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo melalui pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan. Rincian anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra tahun 2021-2026 sebagai berikut

Tabel 2.4 (T.C – 24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sekretariat Daerah		34.329.433.099	32.202.290.446	35.387.545.154	36.345.677.489	36.467.600.407		40.667.320.975	35.359.624.356	34.208.540.858				118,46%	109,80%	96,67%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		23.223.433.099	24.196.290.446	26.592.545.154	27.313.677.489	27.456.600.407	-	30.039.910.733	26.596.893.656	25.577.403.645	-	-	-	129,35%	109,92%	96,18%	0,00%	0,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*115.954.800*	*115.954.800*	*115.954.800*	*115.954.800*	*115.954.800*	-	*97.502.136*	*12.514.980*	*14.828.600*	-	-		84,09%	10,79%	12,79%	0,00%	0,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		59.364.600	59.364.600	59.364.600	59.364.600	59.364.600		50.282.036	12.514.980	7.040.600				84,70%	21,08%	11,86%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		7.656.600	7.656.600	7.656.600	7.656.600	7.656.600		4.879.400	-	760.800				63,73%	0,00%	9,94%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		7.936.600	7.936.600	7.936.600	7.936.600	7.936.600		4.877.600	-	754.000				61,46%	0,00%	9,50%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		8.005.500	8.005.500	8.005.500	8.005.500	8.005.500		5.059.800	-	1.623.900				63,20%	0,00%	20,28%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		7.041.500	7.041.500	7.041.500	7.041.500	7.041.500		3.777.500	-	1.350.000				53,65%	0,00%	19,17%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		14.326.800	14.326.800	14.326.800	14.326.800	14.326.800		21.706.600	-	1.515.000				151,51%	0,00%	10,57%	0,00%	0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11.623.200	11.623.200	11.623.200	11.623.200	11.623.200		6.919.200	-	1.784.300				59,53%	0,00%	15,35%	0,00%	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	*11.993.865.452*	*12.966.722.799*	*14.312.977.507*	*16.084.109.842*	*16.227.032.760*	-	*16.155.680.273*	*16.142.982.648*	*16.091.317.811*	-	-		134,70%	124,50%	112,42%	0,00%	0,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11.874.784.752	12.847.642.099	14.193.896.807	15.965.029.142	16.107.952.060		16.106.411.473	16.142.982.648	16.082.107.811				135,64%	125,65%	113,30%	0,00%	0,00%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		18.533.800	18.533.800	18.533.800	18.533.800	18.533.800		8.816.600	-	205.000				47,57%	0,00%	1,11%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		66.381.200	66.381.200	66.381.200	66.381.200	66.381.200		9.746.800	-	2.406.900				14,68%	0,00%	3,63%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		4.860.900	4.860.900	4.860.900	4.860.900	4.860.900		8.882.700	-	1.287.200				182,74%	0,00%	26,48%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.972.900	4.972.900	4.972.900	4.972.900	4.972.900		2.846.400	-	899.400				57,24%	0,00%	18,09%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		9.881.600	9.881.600	9.881.600	9.881.600	9.881.600		3.742.400	-	336.000				37,87%	0,00%	3,40%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		9.909.400	9.909.400	9.909.400	9.909.400	9.909.400		10.163.700	-	3.714.500				102,57%	0,00%	37,48%	0,00%	0,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		4.540.900	4.540.900	4.540.900	4.540.900	4.540.900		5.070.200	-	361.000				111,66%	0,00%	7,95%	0,00%	0,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	*17.000.000*	*17.000.000*	*17.000.000*	*17.000.000*	*17.000.000*	-	-	*12.433.224*	-	-	-		0,00%	73,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		-	12.433.224					0,00%	248,66%	0,00%	0,00%	0,00%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000		-	-					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	*396.715.200*	*396.715.200*	*396.715.200*	*396.715.200*	*396.715.200*	-	*515.604.299*	*467.101.100*	*427.287.971*	-	-		129,97%	117,74%	107,71%	0,00%	0,00%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		26.196.600	26.196.600	26.196.600	26.196.600	26.196.600		6.265.600	-	-				23,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	-	-	-		-	-	-				-	-	-	-	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		36.494.600	36.494.600	36.494.600	36.494.600	36.494.600		4.188.600	-	-				11,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		24.024.000	24.024.000	24.024.000	24.024.000	24.024.000		5.345.600	-	-				22,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000		25.537.600	-	-				42,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		474.266.899	467.101.100	427.287.971				237,13%	233,55%	213,64%	0,00%	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		-	-	-				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	*2.376.277.272*	*2.376.277.272*	*2.376.277.272*	*2.376.277.272*	*2.376.277.272*	-	*3.185.706.108*	*2.674.127.110*	*2.517.082.721*	-	-		134,06%	112,53%	105,93%	0,00%	0,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		49.927.000	49.927.000	49.927.000	49.927.000	49.927.000		49.583.630	43.485.000	32.012.500				99,31%	87,10%	64,12%	0,00%	0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		9.895.000	9.895.000	9.895.000	9.895.000	9.895.000		9.886.250	20.317.440	18.825.000				99,91%	205,33%	190,25%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		57.437.000	57.437.000	57.437.000	57.437.000	57.437.000		56.572.650	53.726.300	42.336.500				98,50%	93,54%	73,71%	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		126.654.000	113.702.400	125.546.400				126,65%	113,70%	125,55 %	0,00%	0,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		59.622.672	59.622.672	59.622.672	59.622.672	59.622.672		59.664.190	66.083.150	44.881.300				100,07%	110,84%	75,28%	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		34.560.000	27.180.000	27.180.000				172,80%	135,90%	135,90 %	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan/ Material		160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000		209.907.781	64.623.250	53.174.900				131,19%	40,39%	33,23%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu		900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000		1.297.438.810	1.095.196.592	1.061.708.075				144,16%	121,69%	117,97 %	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		1.332.067.197	1.189.812.978	1.107.863.446				133,21%	118,98%	110,79 %	0,00%	0,00%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		8.485.400	8.485.400	8.485.400	8.485.400	8.485.400		7.485.400	-	3.554.600				88,22%	0,00%	41,89%	0,00%	0,00%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		10.910.200	10.910.200	10.910.200	10.910.200	10.910.200		1.886.200	-	-				17,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	*659.123.000*	*659.123.000*	*1.709.123.000*	*659.123.000*	*659.123.000*	-	*768.629.500*	-	*208.900.000*	-	-	-	116,61%	0,00%	12,22%	0,00%	0,00%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.050.000.000					-				-	-	-	0,00%	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000			-	162.500.000				0,00%	0,00%	46,43%	0,00%	0,00%
Pengadaan Mebel		80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000		40.529.000	-					50,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		118.562.800	118.562.800	118.562.800	118.562.800	118.562.800		405.728.500	-					342,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		110.560.200	110.560.200	110.560.200	110.560.200	110.560.200		322.372.000	-	46.400.000				291,58%	0,00%	41,97%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	*2.038.358.731*	*2.038.358.731*	*2.038.358.731*	*2.038.358.731*	*2.038.358.731*	-	*1.993.187.256*	*2.409.716.843*	*2.450.130.515*	-	-		97,78%	118,22%	120,20 %	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		40.056.000	40.056.000	40.056.000	40.056.000	40.056.000		35.892.804	50.632.212	-				89,61%	126,40%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		985.192.231	985.192.231	985.192.231	985.192.231	985.192.231		862.725.465	1.011.580.679	917.205.510				87,57%	102,68%	93,10%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.013.110.500	1.013.110.500	1.013.110.500	1.013.110.500	1.013.110.500		1.094.568.987	1.347.503.952	1.532.925.005				108,04%	133,01%	151,31 %	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	*1.283.997.400*	*1.283.997.400*	*1.283.997.400*	*1.283.997.400*	*1.283.997.400*	-	*2.735.385.667*	*1.519.381.103*	*1.588.267.538*	-	-		213,04%	118,33%	123,70 %	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		281.694.000	281.694.000	281.694.000	281.694.000	281.694.000		540.079.680	488.348.218	322.114.403				191,73%	173,36%	114,35 %	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		270.181.000	270.181.000	270.181.000	270.181.000	270.181.000		386.980.472	158.833.417	408.146.685				143,23%	58,79%	151,06 %	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000		1.100.000	-	-				95,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Mebel		8.899.000	8.899.000	8.899.000	8.899.000	8.899.000		20.345.000	11.910.000	8.755.000				228,62%	133,84%	98,38%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		43.975.000	43.975.000	43.975.000	43.975.000	43.975.000		54.202.500	54.974.600	59.789.000				123,26%	125,01%	135,96 %	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		499.364.400	499.364.400	499.364.400	499.364.400	499.364.400		1.537.817.265	653.125.318	522.000.000				307,95%	130,79%	104,53 %	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		128.736.000	128.736.000	128.736.000	128.736.000	128.736.000		194.860.750	152.189.550	267.462.450				151,36%	118,22%	207,76 %	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		-	-	-				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	*1.112.914.544*	*1.112.914.544*	*1.112.914.544*	*1.112.914.544*	*1.112.914.544*	-	*1.111.629.995*	*1.096.367.799*	*772.890.623*	-	-		99,88%	98,51%	69,45%	0,00%	0,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		167.929.244	167.929.244	167.929.244	167.929.244	167.929.244		166.349.968	152.364.180	86.103.148				99,06%	90,73%	51,27%	0,00%	0,00%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		324.129.000	324.129.000	324.129.000	324.129.000	324.129.000		322.947.680	329.003.619	145.061.800				99,64%	101,50%	44,75%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		20.856.300	20.856.300	20.856.300	20.856.300	20.856.300		22.882.347	15.000.000	1.725.675				109,71%	71,92%	8,27%	0,00%	0,00%
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah		600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000		599.450.000	600.000.000	540.000.000				99,91%	100,00%	90,00%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
dan Wakil Kepala Daerah																		
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	*1.842.522.000*	*1.842.522.000*	*1.842.522.000*	*1.842.522.000*	*1.842.522.000*	-	*1.914.575.889*	*1.558.504.589*	*907.347.525*	-	-		103,91%	84,59%	49,24%	0,00%	0,00%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		835.364.000	835.364.000	835.364.000	835.364.000	835.364.000		824.120.353	812.962.536	756.659.525				98,65%	97,32%	90,58%	0,00%	0,00%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		657.164.000	657.164.000	657.164.000	657.164.000	657.164.000		657.203.036	577.601.553	20.033.000				100,01%	87,89%	3,05%	0,00%	0,00%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		349.994.000	349.994.000	349.994.000	349.994.000	349.994.000		433.252.500	167.940.500	130.655.000				123,79%	47,98%	37,33%	0,00%	0,00%
Penataan Organisasi	-	*676.289.500*	*676.289.500*	*676.289.500*	*676.289.500*	*676.289.500*	-	*895.557.350*	*375.572.744*	*312.937.391*	-	-		132,42%	55,53%	46,27%	0,00%	0,00%
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		295.708.300	295.708.300	295.708.300	295.708.300	295.708.300		211.436.200	145.088.600	119.251.870				71,50%	49,06%	40,33%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		111.329.500	111.329.500	111.329.500	111.329.500	111.329.500		145.166.650	108.044.694	84.734.999				130,39%	97,05%	76,11%	0,00%	0,00%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		161.686.100	161.686.100	161.686.100	161.686.100	161.686.100		538.954.500	106.283.050	83.813.722				333,33%	65,73%	51,84%	0,00%	0,00%
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		67.565.600	67.565.600	67.565.600	67.565.600	67.565.600		-	7.991.600	18.320.000				0,00%	11,83%	27,11%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		-	8.164.800	6.816.800				0,00%	20,41%	17,04%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	*710.415.200*	*710.415.200*	*710.415.200*	*710.415.200*	*710.415.200*	-	*666.452.260*	*328.191.516*	*286.412.950*	-	-		93,81%	46,20%	40,32%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Keprotokolan		168.853.600	168.853.600	168.853.600	168.853.600	168.853.600		151.506.040	91.165.804	76.892.400				89,73%	53,99%	45,54%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		195.470.000	195.470.000	195.470.000	195.470.000	195.470.000		125.164.240	86.204.804	85.625.400				64,03%	44,10%	43,80%	0,00%	0,00%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan		346.091.600	346.091.600	346.091.600	346.091.600	346.091.600		389.781.980	150.820.908	123.895.150				112,62%	43,58%	35,80%	0,00%	0,00%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	9.403.000.000	6.778.000.000	7.446.000.000	7.647.000.000	7.629.000.000	-	8.812.254.978	8.202.047.060	8.054.049.953	-	-		93,72%	121,01%	108,17%	0,00%	0,00%
Administrasi Tata Pemerintahan	-	*950.318.700*	*550.318.700*	*550.318.700*	*550.318.700*	*550.318.700*	-	*853.498.138*	*623.496.630*	*566.113.100*	-	-		89,81%	113,30%	102,87%	0,00%	0,00%
Penataan Administrasi Pemerintahan		469.087.700	269.087.700	269.087.700	269.087.700	269.087.700		451.873.200	291.968.730	198.145.400				96,33%	108,50%	73,64%	0,00%	0,00%
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		209.371.000	109.371.000	109.371.000	109.371.000	109.371.000		189.295.200	76.538.900	43.805.800				90,41%	69,98%	40,05%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		271.860.000	171.860.000	171.860.000	171.860.000	171.860.000		212.329.738	254.989.000	324.161.900				78,10%	148,37%	188,62 %	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	*7.221.831.600*	*5.366.831.600*	*6.034.831.600*	*6.235.831.600*	*6.217.831.600*	-	*6.747.833.267*	*6.931.974.030*	*6.857.669.469*	-	-		93,44%	129,16%	113,63 %	0,00%	0,00%
FasilitasiPengelolaan Bina Mental Spiritual		6.879.422.600	5.154.422.600	5.822.422.600	6.023.422.600	6.005.422.600		6.405.432.467	6.627.629.201	6.655.220.569				93,11%	128,58%	114,30 %	0,00%	0,00%
PelaksanaanKebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		230.451.000	130.451.000	130.451.000	130.451.000	130.451.000		230.450.700	50.524.373	28.550.600				100,00%	38,73%	21,89%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		111.958.000	81.958.000	81.958.000	81.958.000	81.958.000		111.950.100	253.820.456	173.898.300				99,99%	309,70%	212,18 %	0,00%	0,00%
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	*1.090.790.100*	*720.790.100*	*720.790.100*	*720.790.100*	*720.790.100*	-	*1.079.350.673*	*583.512.900*	*590.023.684*	-	-		98,95%	80,95%	81,86%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		336.186.000	216.186.000	216.186.000	216.186.000	216.186.000		296.752.619	171.855.060	135.852.784				88,27%	79,49%	62,84%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Bantuan Hukum		462.134.900	312.134.900	312.134.900	312.134.900	312.134.900		420.499.249	349.096.640	407.948.000				90,99%	111,84%	130,70 %	0,00%	0,00%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		292.469.200	192.469.200	192.469.200	192.469.200	192.469.200		362.098.805	62.561.200	46.222.900				123,81%	32,50%	24,02%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Kerjasama Daerah	-	*140.059.600*	*140.059.600*	*140.059.600*	*140.059.600*	*140.059.600*	-	*131.572.900*	*63.063.500*	*40.243.700*	-	-	-	93,94%	45,03%	28,73%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		94.441.400	94.441.400	94.441.400	94.441.400	94.441.400		109.916.650	61.203.300	37.085.300				116,39%	64,81%	39,27%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		23.961.800	23.961.800	23.961.800	23.961.800	23.961.800		-	-	-				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Evaluasi PelaksanaanKerja Sama		21.656.400	21.656.400	21.656.400	21.656.400	21.656.400		21.656.250	1.860.200	3.158.400				100,00%	8,59%	14,58%	0,00%	0,00%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	1.703.000.000	1.228.000.000	1.349.000.000	1.385.000.000	1.382.000.000	-	1.815.155.264	560.683.640	577.087.260	-	-		106,59%	45,66%	42,78%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	*529.244.200*	*445.244.200*	*449.244.200*	*450.244.200*	*450.244.200*	-	*469.539.200*	*171.513.600*	*218.792.700*	-	-		88,72%	38,52%	48,70%	0,00%	0,00%
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		101.007.600	96.007.600	96.007.600	96.007.600	96.007.600		106.078.700	101.574.700	80.683.900				105,02%	105,80%	84,04%	0,00%	0,00%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		108.935.400	99.935.400	99.935.400	100.935.400	100.935.400		25.418.300	6.896.800	5.421.600				23,33%	6,90%	5,43%	0,00%	0,00%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		136.030.400	116.030.400	116.030.400	116.030.400	116.030.400		154.772.400	63.042.100	39.379.300				113,78%	54,33%	33,94%	0,00%	0,00%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian		183.270.800	133.270.800	137.270.800	137.270.800	137.270.800		183.269.800	-	93.307.900				100,00%	0,00%	67,97%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BUMD																		
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	*350.966.700*	*274.966.700*	*314.966.700*	*314.966.700*	*314.966.700*	-	*350.022.064*	*200.143.179*	*191.297.900*	-	-		99,73%	72,79%	60,74%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		39.065.400	39.065.400	39.065.400	39.065.400	39.065.400		39.064.000	-	18.097.300				100,00%	0,00%	46,33%	0,00%	0,00%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		148.693.900	118.693.900	118.693.900	118.693.900	118.693.900		148.676.450	112.064.978	99.360.700				99,99%	94,42%	83,71%	0,00%	0,00%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		163.207.400	117.207.400	157.207.400	157.207.400	157.207.400		162.281.614	88.078.201	73.839.900				99,43%	75,15%	46,97%	0,00%	0,00%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	*736.876.000*	*431.876.000*	*508.876.000*	*543.876.000*	*540.876.000*	-	*735.550.900*	*166.073.261*	*147.228.460*	-	-		99,82%	38,45%	28,93%	0,00%	0,00%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		265.422.800	157.422.800	191.422.800	196.422.800	193.422.800		265.347.900	77.966.600	59.286.960				99,97%	49,53%	30,97%	0,00%	0,00%
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		245.003.800	135.003.800	165.003.800	185.003.800	185.003.800		244.107.100	45.160.100	44.369.400				99,63%	33,45%	26,89%	0,00%	0,00%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		226.449.400	139.449.400	152.449.400	162.449.400	162.449.400		226.095.900	42.946.561	43.572.100				99,84%	30,80%	28,58%	0,00%	0,00%
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	*85.913.100*	*75.913.100*	*75.913.100*	*75.913.100*	*75.913.100*	-	*260.043.100*	*22.953.600*	*19.768.200*	-	-		302,68%	30,24%	26,04%	0,00%	0,00%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		64.278.700	54.278.700	54.278.700	54.278.700	54.278.700		238.453.900	12.691.000	11.665.800				370,97%	23,38%	21,49%	0,00%	0,00%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		11.219.400	11.219.400	11.219.400	11.219.400	11.219.400		11.219.200	6.355.600	4.343.200				100,00%	56,65%	38,71%	0,00%	0,00%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		10.415.000	10.415.000	10.415.000	10.415.000	10.415.000		10.370.000	3.907.000	3.759.200				99,57%	37,51%	36,09%	0,00%	0,00%

Dalam Tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran, dilakukan analisis terhadap capaian anggaran selama lima tahun terakhir, yaitu 2021 hingga 2025. Analisis capaian anggaran periode 2021-2026 bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target target yang telah ditetapkan. Anggaran tahun 2021 anggaran direncanakan sebesar Rp13.114.738.944,00 realisasi anggaran sebesar Rp12.297.307.805,00. Rasio capaian sebesar 93,77% menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target. Hal tersebut dikarenakan terkait adanya pendemi Covid-19 sehingga kegiatan tidak bisa berjalan dengan semestinya.

Meskipun anggaran telah dialokasikan dengan baik dan hampir mencapai target, dampak pandemi Covid-19 secara signifikan memengaruhi pelaksanaan kegiatan, yang pada akhirnya memengaruhi capaian anggaran.

Anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar Rp34.329.433.099,00 realisasi anggaran sebesar Rp40.667.320.975,00. Rasio capaian sebesar 118,46% menunjukkan realisasi yang melebihi target dengan peningkatan realisasi terbesar pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, hal tersebut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belanja pegawai yang menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah.

Anggaran tahun 2023, anggaran direncanakan sebesar Rp32.202.290.446,00 realisasi anggaran sebesar Rp35.359.624.356,00. Rasio capaian sebesar 109,80% menunjukkan realisasi yang melebihi target dengan peningkatan realisasi terbesar pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, hal tersebut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belanja pegawai yang menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah.

Pada tahun 2024, anggaran direncanakan sebesar Rp35.387.545.154,00 realisasi anggaran sebesar Rp34.208.540.858,00. Rasio capaian sebesar 96,67% menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target. Hal tersebut juga dikarenakan realisasi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan, selain itu terdapat beberapa kegiatan yang mengalami efisiensi dengan

memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya pada tahun 2025 anggaran direncanakan sebesar Rp36.345.677.489,00.

Dari hasil penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi penurunan rasio belanja dari tahun 2021-2024 yang berdampak langsung pada efisiensi anggaran belanja yang dapat dialihkan untuk pembiayaan yang lebih strategis di Pemerintah Daerah. Untuk capaian kinerja program dan kegiatan rata-rata keberhasilan kegiatan dengan interval nilai 100% atau kegiatan dengan capaian kinerja sangat baik. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kegiatan dengan capaian kinerja adalah:

a. Adanya peraturan/ perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yang mendukung tupoksi Sekretariat Daerah untukpengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
b. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan akan sangat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan;
c. Adanya dukungan APBD didalam pencapaian target-target indikator kinerja dan anggaran yang cukup serta pengelolaan keuangan yang efektif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
d. Ketersediaan peralatan, teknologi, dan bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan atau adanya dukungan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas;
e. Komitmen yang tinggi dari kepala perangkat daerah dalam pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan;
f. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan perangkat daerah terkaitmaupun dengan instansi vertikal dalam pelaksanaan tugas.

Dalam periodesasi Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025 – 2029 diperlukan evaluasi capaian pelaksanaan urusan pada tahun 2020 – 2024 untuk dapat menentukan target kinerja serta sebagai referensi pengambilan kebijakan yang harus dilaksanakan selanjutnya. Evaluasi capaian pelaksanaan urusan tahun 2020 – 2024 Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Indikator Tujuan Perangkat Daerah						
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0	75,76	65,66	60,90	60,90	
2	Indeks Pelayanan Publik	4,09	3,86	4,51	3,59	4,33	
3	Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	23,67	24,26	27,15	27,91	28,34	
4	Indeks Kualitas Kebijakan	0	0	0	0	56,94	
	Indikator Sasaran Perangkat Daerah						
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0	75,76	65,66	60,90	60,90	
2	Indeks Pelayanan Publik	4,09	3,86	4,51	3,59	4,33	
3	Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	23,67	24,26	27,15	27,91	28,34	
4	Indeks Kualitas Kebijakan	0	0	0	0	56,94	
	Indikator Program Perangkat Daerah						
1	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	0	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	100%	100%	100%	100%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	81,96	84,62	86,37	85,25	87,42	
4	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0	61,81	60,53	69,44	64,34	
5	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	0	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	0	100%	100%	100%	100%	
7	Indeks Reformasi Hukum	0	0	0	55,75	96,38	IUP RPJPD
8	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	0	0	0	4,93	4,93	IUP RPJPD
9	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	0	0	0	6,16	6,08	IUP RPJPD
10	Return on Asset (ROA) BUMD	0	0	0	1,56	4,52	IUP RPJPD
11	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0	34,44	34,5	67,53	70,62	
12	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam	0	100%	100%	100%	100%	
	Sasaran Daerah						
1	Indeks Reformasi Birokrasi	63,74	65,33	65,48	67,84	82,27	IUP RPJPD
	Permendagri No 18 Tahun 2020						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0,00	0,11	0,00	0,00	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	0	15,28	99,78	1226,61	86,10	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	0	50,82	50,62	51,40	100,00	
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	0	-30,71	142,36	0,43	-19,63	
	Mandatory Lain						
1	Indeks Akses Keuangan Daerah	0	0	0	0	5	
2	Indeks Zakat Nasional	0	0	0	0	0,49	

Pada tahun 2022 dan 2023 nilai SAKIP perangkat daerah mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya perubahan kodefikasi dan nomenklatur sehingga menyebabkan adanya penurunan nilai SAKIP perangkat daerah, namun untuk penilaian SAKIP Pemerintah Daerah yang ditunjukkan melalui indikator Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja secara konsisten mengalami kenaikan secara bertahap.

Terhadap hasil capaian indeks pelayanan publik mengalami progres yang fluktuatif, hal ini disebabkan karena pelaksanaan PEKPPP untuk memperoleh hasil penilaian IPP dilakukan secara sampling pada beberapa perangkat daerah yang telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri, sedangkan untuk penilaian Indeks Kualitas Kebijakan pada Kabupaten Purworejo baru mulai melaksanakan penilaian pada tahun 2024.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026, berpijak pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Perangkat Gubernur serta pelayanan administratif. Guna melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur;
5. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah

terutama dalam perumusan kebijakan daerah, selain itu sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan di Jawa Tengah. Guna memecahkan permasalahan serta menangani isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026, yaitu: 1. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah dan 2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah.

Guna mencapai hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka rumusan Sasaran yang akan di capai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah: Tujuan pertama, Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah yang dikur dengan indikator Indeks Kematangan Kebijakan memiliki satu sasaran, yaitu: Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil, yang diukur dengan 3 indikator yaitu: 1. Persentase capaian kinerjaprogram OPD lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah; 2. Persentase capaian kinerja program OPD lingkup Perekonomian dan Pelayanan PBJ; 3. Persentase capaian kinerja program OPD lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Tujuan kedua, Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi memiliki dua sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah, yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat; dan
2. Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah, yang diukur dengan indikator Nilai MRI Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan keterkaitan Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo terdapat beberapa hal yang ditemukan sebagai faktor penghambat dan pendorong bagi penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo meliputi:

1. Faktor Penghambat
   a. Ketidakseimbangan antara kompetensi, kualifikasi, kinerja dan kedisiplinan sumber daya aparatur: Masih terdapat perbedaan beban kerja pegawai dengan jabatan yang sama, serta masih terdapat pegawai yang bertugas tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi kinerjanya;
   b. Dukungan sarana prasarana kantor yang belum memadai: Terdapat sarana dan prasarana kantor dan rumah dinas yang

sudah banyak mengalami kerusakan sehingga menghambat kegiatan operasional Perangkat Daerah;

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Jumlah personil Sekretariat Daerah yang semakin berkurang menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan. Keterbatasan ini memengaruhi kecepatan dalam pemberian layanan.

2. Faktor Pendorong

a. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah: Adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar hukum yang kuat bagi Sekretariat Daerah untuk memberikan pelayanan;

b. Kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dan Instansi Vertikal: Kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah terkait, BUMD, maupun Instansi Vertikal mempermudah koordinasi dalam penanganan permasalahan di Kabupaten Purworejo;

c. Fungsi dukungan dan komitmen pimpinan dalam melaksanakan *good governance*;

d. Partisipasi Aktif Masyarakat: Kesadaran masyarakat yang meningkatkan pentingnya partisipasi dalam perumusan kebijakan, dapat membantu terciptanya kebijakan yang sesuai dengan kepentingan umum.

2.1.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (RTRW) Tahun 2021-2041 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenPurworejo Tahun 2021-2041. Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2021 tersebut, di dalam Tabel mengenai Indikasi Program Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041 dalam rangka Perwujudan Struktur Ruang dalam hal ini untuk Perwujudan Sistem Perkotaan khususnya Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal, terdapat indikasi Program Koordinasi dan Kerjasama Antar Perangkat Daerah maupun Antar Pemerintah Daerah untuk pengembangan wilayah. Terkait hal tersebut sesuai Tugas Sekretariat Daerah dalam hal membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, akan mendukung pelaksanaan RTRW melalui Fasilitasi Kerjasama Daerah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program. KLHS ini selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memerlukan hasil analisis sistematik, menyeluruh, dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah.

Dalam penyusunannya diperlukan juga masukan hasil dari analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan atau rencana program pembangunan. Tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/ atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama: mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Dari hasil telaahan KLHS, beberapa hal perlu menjadi perhatian Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas & fungsinya, dalam hal membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, harus memperhatikan adanya rekomendasi mitigasi pelaksanaan beberapa program prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagaimana pengintegrasian KLHS ke dalam Dokumen RPJMD, terdapat beberapa Program Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang direkomendasikan dan diakomodir dan terintegrasi ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, yaitu:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Program Perekonomian dan Pembangunan.

2.1.4.3 Tantangan dan Peluang

Dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan telaah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan telaah terhadap RTRW dan KLHS yang berimplikasi sebagai

tantangan bagi pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah pada lima tahun mendatang sebagai berikut:

1. Lemahnya fungsi koordinasi dan komunikasi dengan OPD, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
2. Keterlambatan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai panduan operasional dari aturan baru diatasnya;
3. Kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Daerah masih rendah;
4. Tuntutan masyarakat akan layanan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan transparan;

Sedangkan peluang untuk pengembangan pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

1. Adanya dukungan positif dari Kepala Daerah dan seluruh OPD Kabupaten dalam pelaksanaantugas;
2. Adanya kewenangan serta landasan hokum sebagai dasar perumusan kebijakan Daerah;
3. Adanya layanan konsultasi, arahan dan bimbingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten;
4. Perkembangan teknologi yang dapat mendukung kinerja pemerintah Daerah;
5. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
6. Perluasan jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal;
7. Adanya Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan potensi pengembangan BUMD;
8. Besarnya peran dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan fungsi pemerintahan;

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai koordinator Perangkat Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan sehingga disusun pedoman koordinasi perangka daerah dan BUMD. Kelompok sasaran perangkat daerah penerima layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang dibagi ke dalam tiap Asisten dan Bagian sebagai berikut

a. Kelompok Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Bagian Pemerintahan

  Secara umum seluruh perangkat daerah dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerjasama dan otonomi daerah. Secara Khusus : Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Disdukcapil, DPPPAPMD, Dinperkimtan (urusan Pertanahan), Bakesbangpol, Satpol PP Damkar, DPMPTSP (bidang PTSP), BPBD, dan Kecamatan;
- Bagian Kesejahteraan Rakyat

  Dindikbud, Dinporapar, Dinkes Daerah, DinsosdaldukKB, Dinperintransnaker (urusan tenaga kerja dan transmigrasi);
- Bagian Hukum

  Seluruh Perangkat Daerah dalam hal penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah, bantuan hukum dan HAM serta pengkajian dan dokumentasi hukum;

b. Kelompok Asisten Perekonomian dan Pembangunan
   - Bagian perekonomian dan Sumber Daya Alam

     DKPP, DKUKMP, Dinperintransnaker (urusan perindustrian dan ESDM), DPMPTSP (urusan penanaman modal), dan BUMD;
   - Bagian Administrasi Pembangunan

     Secara umum seluruh perangkat daerah dalam hal pengendalian pelaksanaan pembangunan, sarana prasarana daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Secara Khusus: DPUPR, DINHUB, Dinperkimtan (urusan perumahan dan kawasan permukiman), DLHP, BPKPAD, BAPPERIDA, Dinkominfostasandi (urusan statistik);
   - Bagian Pengadaan Barang/ Jasa

     Seluruh perangkat daerah dalam hal layanan pengadaan barang jasa serta pengelolaan sistem informasi dan pembinaan pengadaan barang dan jasa;

c. Kelompok Asisten Administrasi Umum
   - Bagian Umum

     Secara umum seluruh perangkat daerah dalam hal pelayanan tamu daerah. Secara Khusus: Lingkup Sekretariat Daerah;
   - Bagian Organisasi

     Secara umum seluruh perangkat daerah dalam hal kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah, pelayanan publik dan

tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi. Secara Khusus: BKPSDM;

- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

  Secara umum seluruh perangkat daerah dalam hal penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan. Secara Khusus: Dinpusip dan Dinkominfostasandi (urusan kominfo dan persandian);

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan pelayanan kedinasan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah bermitra dengan Staf Ahi Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Terdapat 3 bidang staf ahli sebagai berikut:

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

Staf ahli mempunyai tugas memberikan masukan, telaahan, kajian, pertimbangan, serta rekomendasi terhadap isu-isu strategis dan konsep pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemerintahan daerah kepada Bupati sesuai bidang tugasnya baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati.

2.1.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

Sekretariat Daerah selaku pembina BUMD di Kabupaten Purworejo membawahi BUMD dengan penyertaan modal 100% milik Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai berikut

Tabel 2.6
BUMD dengan Penyertaan Modal 100% Milik Pemerintah Kabupaten Purworejo

No	BUMD	Usaha
1	Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Perwitasari	Penyediaan air minum
2	Perumda Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Purworejo	- Hotel Ganesha - Hotel Puri Mandiri - Ganesha Resto & Catering - Ganesha Perdagangan dan Jasa - Ganesha Event Organizer - Ganesha Tour & Travel - Ganesha Air Minum Dalam - Kemasan

No	BUMD	Usaha
		- Sistem Resi Gudang
3	Perumda Graha Husada Medika	Penyediaan farmasi dan sarana Kesehatan (apotek)
4	Perumda Bank Purworejo (dalam likuidasi)	Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah

Untuk BUMD dengan penyertaan modalmilik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan milik Pemerintah Kabupaten Purworejo terdiri dari

Tabel 2.7
BUMD dengan Penyertaan Modal Milik
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purworejo

No	BUMD	Usaha
1	PT Bank Pembangunan Daerah (Cabang Purworejo)	Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
2	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)	Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
3	PT BKK Jateng (Cabang Purworejo)	Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah

Sekretariat Daerah berperan dalam pengoordinasian serta pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja BUMD di Kabupaten Purworejo.

2.1.8 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik, kerja sama antar daerah menjadi salah satu strategi penting yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah. Kerja sama daerah memungkinkan terjadinya sinergi lintas wilayah dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan infrastruktur, pengembangan ekonomi, serta penanganan isu-isu strategis yang bersifat lintas batas administratif. Melalui mekanisme ini, daerah dapat saling melengkapi potensi dan mengatasi keterbatasan yang dimiliki, sehingga mendorong efisiensi pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo melalui Bagian Pemerintahan bertindak selaku fasilitator kerjasama di Kabupaten Purworejo, selain itu juga terdapat kerjasama yang secara khusus terdapat di Sekretariat Daerah sebagai berikut

Tabel 2.8

Kerjasama Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun	Satuan Kerja	Bidang Kerjasama	Urusan	Tentang	Pihak I	Pihak II
2021	Bagian Pemeritahan	Transformasi Digital dan Pengembangan Teknologi Informatika untuk Mewujudkan Program Smart City di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo Prov. Jawa Tengah	Transformasi Digital dan Pengembangan Teknologi Informatika Untuk Mewujudkan Program Smart City di Lingkungan Kabupaten Purworejo	Transformasi Digital dan Pengembangan Teknologi Informatika Untuk Mewujudkan Program Smart City di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo Prov. Jawa Tengah	Bupati Purworejo	PT. Nusa Satu Inti Artha (Doku)
2021	Bagian Pemeritahan	Transformasi Digital dan Pengembangan Teknologi Informatika untuk Mewujudkan Program Smart City di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo Prov. Jawa Tengah	Transformasi Digital dan Pengembangan Teknologi Informatika Untuk Mewujudkan ProgramSmart City di Lingkungan Kabupaten Purworejo	Transformasi Digital dan Pengembangan Teknologi Informatika Untuk Mewujudkan Program Smart City di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo Prov. Jawa Tengah	Bupati Purworejo	PT. Telkom Indonesia Tbk.
2021	Bagian Hukum	Penanganan Perkara Litigasi yang Meliputi Perkara Perdata, Pidana, Dan Tata Usaha Negara, Penanganan PerkaraNon Litigasi	Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan NonLitigasi dari Pihak Ke I Kepada Masyarakat Miskin Melalui Pihak Ke II dan Pihak Ke III	Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Bupati Purworejo	Ketua LBH Sakti
2021	Bagian Hukum	Penanganan Perkara Litigasi yang Meliputi Perkara Perdata, Pidana, Dan Tata Usaha Negara, Penanganan PerkaraNon Litigasi	Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan NonLitigasi dari Pihak Ke I Kepada Masyarakat Miskin Melalui Pihak Ke II dan Pihak Ke III	Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Sekda Purworejo	Ketua LBH Sakti
2022	Bagian Hukum	Penanganan Perkara Litigasi yang Meliputi Perkara Perdata, Pidana, Dan Tata Usaha Negara, Penanganan PerkaraNon Litigasi	Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan NonLitigasi dari Pihak Ke I Kepada Masyarakat Melalui Pihak Ke II	Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Bupati Purworejo	Ketua LBH Sakti
2022	Bagian Hukum	Penanganan Perkara Litigasi yang Meliputi Perkara Perdata, Pidana, Dan Tata Usaha Negara, Penanganan PerkaraNon Litigasi	Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan NonLitigasi dari Pihak Ke I Kepada Masyarakat Melalui Pihak Ke II	Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Bupati Purworejo	Ketua Yayasan Adil Indonesia Purworejo
2022	Seluruh OPD	Bidang Hukum	Penanganan Masalah Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Yang Timbul Akibat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo dan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Baik di Tingkat Pusat Maupun Tingkat Daerah.	Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara	Bupati Purworejo	Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo
2022	Setda	Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Kabupaten Purworejo	Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Kabupaten Purworejo Untuk Mewujudkan Keadilan Bidang Peradilan Agama	Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Kabupaten Purworejo	Ketua Pengadilan Agama Purworejo Kelas Ib	Bupati Purworejo
2022	Setda	Peningkatan Fungsi	Peningkatan Fungsi	Peningkatan Fungsi	Rektor	Bupati

Tahun	Satuan Kerja	Bidang Kerjasama	Urusan	Tentang	Pihak I	Pihak II
		Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Universitas Jenderal Soedirman	Purworejo
2023	Bagian Hukum	Hukum	Hukum	Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Bupati Purworejo	Ketua Yayasan Adil Indonesia Purworejo
2023	Bagian Hukum	Hukum	Hukum	Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Sekda Purworejo	Ketua Yayasan Adil Indonesia Purworejo
2023	Bagian Hukum	Hukum	Hukum	Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Sekda Purworejo	Ketua LBH Sakti
2023	Bagian Hukum	Hukum	Hukum	Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara	Sekda Purworejo	Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo
2024	Bagian Hukum	Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pj. Sekda Purworejo	Ketua LBH Sakti
2024	Bagian Hukum	Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Bupati Purworejo	Ketua LBH Sakti
2024	Bagian Hukum	Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pj. Sekda Purworejo	Ketua Yayasan Adil Indonesia Purworejo
2024	Bagian Hukum	Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Bupati Purworejo	Ketua Yayasan Adil Indonesia Purworejo

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah diperoleh dari telaah gambaran umum dan hasil evaluasi capaian kinerja Renstra Setda Tahun 2021-2026, maka dirumuskan permasalahan pembangunan menurut tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Pembidangan permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah Setda Kabupaten Purworejo disesuaikan dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Setda Kabupaten Purworejo, yaitu fungsi pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Daerah.

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/ kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan atau kesenjangan antara yangideal dan yang belum ideal yang kemudian akan diintervensi melalui program dankegiatan Perangkat Daerah, sedangkan Isu Strategis adalah kondisi/ hal yang harus diperhatikan/ dikedepankan atau suatu permasalahan yang strategis yang akan diintervensi melalui tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.9

Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Pengukuran kinerja pemerintahan belum optimal	Implementasi capaian kinerja tidak disertai dengan bukti yang memadai
		Lemahnya tingkat koordinasi dalam upaya mengoptimalkan pencapaian kinerja OPD sesuai lingkup koordinasi masing - masing Bagian
	Pelaporan dan evaluasi kinerja belum optimal	Pengendalian internal Pemda dan Perangkat Daerah belum optimal
Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Baik	Tingkat kematangan UKPBJ belum optimal	Kinerja penyelesaian paket tender dan paket katalog elektronik belum optimal
		Realisasi paket non-tender/ non-e-purchasing perlu adanya kolaborasi dan sinergi antar Perangkat Daerah
Reformasi Hukum Belum Optimal	Pengelolaan JDIH sesuai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum belum optimal	Pengelolaan JDIH sesuai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum belum konsisten
		Belum seluruh produk hukum daerah diunggah dalam JDIH
Pelayanan publik prima belum merata	Kualitas pelayanan masyarakat rendah	Belum optimalnya penerapan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
		Pemanfaatan sistem informasi pelayanan masih rendah
		Belum lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan publik
		Ketidakseimbangan antara kompetensi, kualifikasi, kinerja dan kedisiplinan sumber daya aparatur

Dalam menjalankan fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo saat ini menghadapi tantangan dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal serta memastikan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang optimal. Kondisi ideal yang diharapkan masih belum tercapai sepenuhnya, menuntut evaluasi

mendalam terhadap berbagai aspek operasional dan dukungan. Permasalahan yang masih terjadi adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal. Kesenjangan ini bersumber dari akar masalah yaitu:
   a. Pengukuran kinerja pemerintahan belum optimal

      Permasalahan pengukuran kinerja yang belum optimal disebabkan oleh pelaksanaan implementasi capaian kinerja tidak disertai dengan bukti yang memadai, sehingga kesulitan dalam pembuktian kinerja yang telah dilaksanakan, serta lemahnya tingkat koordinasi dalam upaya mengoptimalkan pencapaian kinerja OPD sesuai lingkup koordinasi masing-masing Bagian.
   b. Pelaporan dan evaluasi kinerja belum optimal

      Belum optimalnya pelaporan dan evaluasi kinerja disebabkan karena pengendalian internal terhadap program strategis Pemda serta pengendalian Perangkat Daerah masih belum optimal yang berimplikasi pada perumusan kebijakan selanjutnya.
2. Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Baik. Kesenjangan ini bersumber dari akar masalah yaitu tingkat kematangan UKPBJ belum optimal dikarenakan kinerja penyelesaian paket tender dan paket katalog elektronik belum sepenuhnya diselesaikan oleh Perangkat Daerah sehingga tampilan pada aplikasi Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (AMEL) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat kurang optimal, selain itu realisasi paket non-tender/ non *e-purchasing* perlu adanya kolaborasi dan sinergi antar Perangkat Daerah.
3. Reformasi Hukum Belum Optimal. Kesenjangan ini bersumber dari akar masalah yaitu pengelolaan JDIH belum sesuai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang optimal, tingkat keamanan serta kelengkapan produk hukum pada JDIH juga masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, selain itu inovasi SIKUM yang terdapat pada bagian hukum agar dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat terkoneksi langsung dengan JDIH.
4. Pelayanan publik prima belum merata. Kesenjangan ini bersumber dari akar masalah yaitu kualitas pelayanan masyarakat rendah yang disebabkan oleh belum optimalnya penerapan Standar Operasional dan Prosedur, pemanfaatan sistem informasi pelayanan

masih rendah, belum lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan publik, serta ketidakseimbangan antara kompetensi, kualifikasi, kinerja dan kedisiplinan sumber daya aparatur.

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, memperhatikan lingkungan strategis, dan mempertimbangkan kriteria–kriteria penentuan permasalahan pembangunan daerah, maka permasalahan strategis yang memegang peranan penting/ strategis diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Optimalisasi pengukuran kinerja serta pelaporan dan evaluasi kinerja
	Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Baik			Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia		Optimalisasi penggunaan layanan pengadaan barang dan jasa secara digital
	Reformasi Hukum Belum Optimal					Optimalisasi pengelolaan JDIH sesuai standar pengelolaan dokumen
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Pelayanan publik prima belum merata		Cyber insecurity			Peningkatan penerapan Standar Operasional Prosedur serta pemanfaatan sistem informasi pelayanan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaah terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diperlukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan 5 (lima) misi Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompeten, Produktif, dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Lingkungan Masyarakat yang Sehat, Berbudaya, dan Sejahtera.
2. Meningkatkan Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah.
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Inklusivitas ekonomi Melalui Peran Serta dan Kontribusi Pelaku Ekonomi Lokal yang Mendukung Ketahanan Pangan.
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Inovatif berbasis Teknologi Informasi.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo turut bertanggung jawab dalam mewujudkan misi kelima yaitu 5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Inovatif berbasis Teknologi Informasi.

Sejalan dengan visi dan misi dimaksud, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai salah satu elemen dari system

penyelenggaraan pemerintahan harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purworejo. Kegiatan Sekretariat Daerah yang mendukung misi ke-5 (kelima) adalah:

1. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
3. Penataan Organisasi
4. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
5. Administrasi Tata Pemerintahan
6. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
7. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
8. Fasilitasi Kerjasama Daerah
9. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
10. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
11. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
12. Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Purworejo serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo yang mana berterkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo untuk membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purworejo sesuai dengan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Sebagaimana diuraikan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mendukung dalam pencapaian Misi kelima dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo periode 2025 – 2029 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Misi tersebut memiliki tujuan daerah untuk *Mewujudkan Purworejo berdaya saing, sejahtera, religius, dan inovatif* yang diukur dengan 5 indikator yaitu 1) PDRB Per

Kapita, 2) Tingkat Kemiskinan, 3) Rasio Gini, 4) Indeks Reformasi Birokrasi, dan 5) Penurunan Emisi GRK. Tujuan tersebut didukung oleh 5 sasaran daerah yaitu

1) Meningkatnya kualitas manusia
2) Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
4) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
5) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi

Sasaran yang terkait dengan kinerja Sekretariat Daerah adalah sasaran ke-5 yaitu *Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi* yang diukur melalui indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Indeks Reformasi Birokrasi. Berpedoman pada sasaran kelima, Sekretariat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 sebagai berikut

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
			Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,37	4,38	4,39	4,4	
			Indeks Kualitas Kebijakan	60,23	61,87	63,51	65,16	66,80	
			Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	30,93	32,22	33,51	34,81	36,10	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
		Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,37	4,38	4,39	4,4	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	60,23	61,87	63,51	65,16	66,80	
			Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	30,93	32,22	33,51	34,81	36,10	

3.2.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2025 – 2029, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menetapkan tujuan “Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kualitas Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” yang diukur melalui 3 indikator yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Indeks Pelayanan Publik, dan Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan penjabaran sebagai berikut

a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan terukur perlu dilaksanakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut ditetapkan indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang meliputi komponen penilaian Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, dan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Kondisi kinerja awal Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 sebesar 60,90 dan tahun 2025 estimasi capaian kinerja sebesar 68,02. Adapun target kinerja tujuan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah tahun 2026 sebesar 70,45, tahun 2027 sebesar 72,89, tahun 2028 sebesar 75,33, tahun 2029 sebesar 77,76, dan tahun 2030 sebesar 80,20.

b. Indeks Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa hakekat pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut ditetapkan indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang meliputi enam aspek pengukuran, yakni Aspek Kebijakan Pelayanan Publik, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, serta Aspek Inovasi Pelayanan Publik.

Kondisi kinerja awal IPP Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 sebesar 4,33 dan tahun 2025 estimasi capaian kinerja sebesar 4,34. Adapun target kinerja Tujuan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah tahun 2026 sebesar 4,35, tahun 2027 sebesar 4,37, tahun 2028 sebesar 4,38, tahun 2029 sebesar 4,39, dan tahun 2030 sebesar 4,40.

c. Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence-based*). Tujuan IKK adalah untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan pemerintah melalui metode pengukuran mandiri (*self-assessment*) yang berfokus pada dampak kebijakan.

Pengukuran kualitas kebijakan diterapkan terhadap 1 (satu) profil dan 4 (empat) dimensi, yang terdiri atas: profil, yaitu keterlibatan pejabat fungsional analis kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan; dan 4 (empat) dimensi, yang terdiri atas: (1) Perencanaan Kebijakan; (2) Implementasi Kebijakan; (3) Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan; dan (4) Transparansi dan Partisipasi Publik.

Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan publik yang mendasarinya. Kebijakan yang baik adalah prasyarat utama bagi keberhasilan program pembangunan, dan kebijakan yang baik itu bukan yang hanya bagus di atas kertas, tetapi juga oleh proses yang tepat, implementasi yang konsisten, serta dampak yang nyata bagi masyarakat.

Kondisi kinerja awal Nilai Indeks Kualitas Kebijakan pada tahun 2024 adalah sebesar 56,94. Target kinerja tujuan selama 5

(lima) tahun ke depan adalah tahun 2026 sebesar 60,23, tahun 2027 sebesar 61,87, tahun 2028 sebesar 63,51, tahun 2029 sebesar 65,16 dan tahun 2030 sebesar 66,80.

d. Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja

Pengukuran dan pelaporan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah proses vital untuk menilai pencapaian tujuan instansi, dengan pengukuran kinerja bertujuan memastikan target sesuai rencana dan pelaporan kinerja menyajikan informasi hasil untuk pertanggungjawaban publik. Pengertian kinerja menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Adapun tujuan pengukuran kinerja adalah untuk memverifikasi apakah target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (seperti Renstra dan Perjanjian Kinerja) telah tercapai. Proses pengukuran kinerja antara lain dengan:

1. Penetapan indikator: Menentukan indikator kinerja yang berorientasi hasil dan memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)
2. Pengumpulan data: Mengumpulkan data realisasi kinerja secara berkala, seperti bulanan, triwulanan, atau semesteran, dari sumber kredibel seperti BPS atau sistem internal instansi.
3. Analisis: Membandingkan data realisasi dengan target kinerja, serta membandingkan dengan target jangka menengah dan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan pelaporan kinerja mempunyai tujuan Melaporkan hasil pengukuran kinerja kepada publik dan pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel. Pada pelaporan kinerja proses yang dilaksanakan adalah:

1. Penyusunan: Mengikhtisarkan hasil pengukuran dan menganalisis pencapaian kinerja untuk kemudian dituangkan dalam Laporan.
2. Data Pendukung: Melengkapi laporan dengan data pendukung yang relevan, seperti surat keputusan, laporan kegiatan, dan

dokumentasi, untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penyampaian: Menyampaikan laporan kinerja kepada publik dan pemangku kepentingan.

Untuk target nilai SAKIP Kabupaten pada tahun 2026 sebesar 30,93, tahun 2027 sebesar 32,22, tahun 2028 sebesar 33,51, tahun 2029 sebesar 34,81 dan untuk tahun 2030 sebesar 36,10.

3.2.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2025 – 2029, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menetapkan 3 sasaran sebagai berikut

1. Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan terukur perlu dilaksanakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang meliputi komponen penilaian Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, dan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Kondisi kinerja awal Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 sebesar 60,90 dan tahun 2025 estimasi capaian kinerja sebesar 68,02.Adapun target kinerja Sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan adalah tahun 2026 sebesar 70,45, tahun 2027 sebesar 72,89, tahun 2028 sebesar 75,33, tahun 2029 sebesar 77,76, dan tahun 2030 sebesar 80,20.

2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diperoleh dari hasil pengukuran secara

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa hakekat pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut ditetapkan indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang meliputi enam aspek pengukuran, yakni Aspek Kebijakan Pelayanan Publik, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, serta Aspek Inovasi Pelayanan Publik.

Kondisi kinerja awal IPP Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 sebesar 4,33 dan tahun 2025 estimasi capaian kinerja sebesar 4,34. Adapun target kinerja Tujuan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah tahun 2026 sebesar 4,35, tahun 2027 sebesar 4,37, tahun 2028 sebesar 4,38, tahun 2029 sebesar 4,39, dan tahun 2030 sebesar 4,40.

3. Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran Sekretariat Daerah "*Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*" diukur menggunakan 2 indikator. Upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan merupakan bentuk pelindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia, dalam upaya meningkatkan kinerja diukur menggunakan 2 (dua) indikator sebagai berikut:

a. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Kondisi kinerja awal Nilai Indeks Kualitas Kebijakan pada tahun 2024 adalah sebesar 56,94. Target kinerja tujuan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah tahun 2026 sebesar 60,23, tahun 2027

sebesar 61,87, tahun 2028 sebesar 63,51, tahun 2029 sebesar 65,16 dan tahun 2030 sebesar 66,80.

b. Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja

Kondisi kinerja awal Nilai SAKIP Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 sebesar 14,17 dan tahun 2025 estimasi capaian kinerja sebesar 14,27. Adapun target kinerja Sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan adalah tahun 2026 sebesar 14,37, tahun 2027 sebesar 14,47, tahun 2028 sebesar 14,57, tahun 2029 sebesar 14,67, dan tahun 2030 sebesar 14,77.

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

3.3.1 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

Strategi merupakanrencana yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk menjacapi tujuan/ sasaran. Berikut strategi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025 – 2029

Tabel 3.2
Strategi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kualitas Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah	Meningkatkan Penguatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat, Perangkat Daerah, serta Instansi Vertikal
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Meningkatkan Penguatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah

Tercapainya strategi ini diindikasikan dengan peningkatan dalam berbagai komponen sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Untuk memastikan setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan yang ditetapkan, diperlukan sistem akuntabilitas

kinerja yang kuat dan transparan. Dokumen perencanaan kinerja disusun secara lebih berkualitas, akurat, dan relevan serta dokumen-dokumen perencanaan kinerja tersebut harus memuat indikator kinerja yang jelas, terukur, dan relevan dengan tujuan dan sasaran instansi.

Dokumen perencanaan kinerja akan menjadi acuan utama yang kemudian diterjemahkan ke dalam laporan yang akurat dan tepat waktu. Anggaran yang dialokasikan secara lebih efektif dan efisien berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Terdapat keterkaitan yang kuat antara alokasi anggaran dengan pencapaian kinerja. Proses ini akan memastikan bahwa setiap anggran yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Pengawasan yang efektif adalah kunci untuk mencegah penyimpangan. Meningkatkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan mengambil langkah korektif yang cepat. Sistem ini akan didukung oleh teknologi informasi untuk memastikan data yang gunakan akurat dan real-time.

Selanjutnya peningkatan transparansi dan partisipasi publik serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan cara mempublikasikan informasi kinerja secara luas melalui platform digital, untuk menyajikan data kinerja, anggaran, dan program kerja secara terbuka agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan serta umpan balik. Selain itu, juga membuka ruang interaksi untuk menampung masukan dan kritik, menjadikan publik sebagai mitra strategis dalam pengawasan. Peningkatan sinergi antara instansi perangkat daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah serta meningkatkan komitmen, konsistensi dan tanggungjawab untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, dimana koordinasi yang efektif yang dibangun untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan setiap kebijakan berjalan selaras.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat, Perangkat Daerah, serta Instansi Vertikal

Strategi ini mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana ketercapaian strategi ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas terhadap Aspek Kebijakan Pelayanan Publik, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, serta Aspek Inovasi Pelayanan Publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, menggunakan pengaduan masyarakat sebagai basis kebijakan pelayanan publik, terwujudnya pelayanan publik yang sederhana dan terintegrasi serta menjangkau ke seluruh elemen masyarakat.

3. Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tercapainya strategi ini mengindikasikan peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemeritahan daerah antara lain dengan adanya peningkatan kualitas kebijakan serta peningkatan pengukuran dan pelaporan kinerja.

Upaya untuk mencapai strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui 1) meningkatkan kualitas data dan pemanfaatan pendekatan berbasis bukti dalam perumusan kebijakan, optimalisasi penggunaan teknologi (TIK) dalam sistem pengisian indeks dan proses kebijakan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) analis kebijakan, serta memperkuat partisipasi publik dalam setiap tahapan kebijakan; 2) Mengintegrasikan sistem manajemen kinerja tingkat organisasi/ unit kerja dengan sistem manajemen kinerja individu/ pegawai sehingga diharapkan kesesuaian kinerja unit kerja dengan kinerja individu pegawai dapat terwujud; 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala pada setiap jenjang, dengan memberikan saran dan rekomendasi, kemudian melakukan *follow up* atas saran yang telah diberikan; 4) Mengoptimalkan pemanfaatan informasi pada Laporan Kinerja, dengan memastikan penetapan target setiap indikator kinerja telah

mempertimbangkan realisasi indikator yang sama di tahun sebelumnya dan hasil analisisnya, sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan upaya perbaikan kinerja;

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat menjadikan pemerintahan semakin transparan dan berpedoman pada kepentingan publik.

3.3.2 Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Sekretariat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menguatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Memantapkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kapabel	Meneguhkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kapabel
Menguatkan akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah yang baik	Meneguhkan akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah yang baik
Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat	Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat	Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat

Lokus pelaksanaan strategi Renstra Sekretariat Daerah diterapkan pada seluruh Perangkat Daerah yang menjadi kelompok sasaran pelayanan serta pada BUMD yang mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah.

3.3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam perencanaan jangka menengah Sekretariat Daerah, visi-misi Bupati dan Wakil Bupati diuraikan ke dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Purworejo serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Secara umum, arah kebijakan merujuk pada rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selarasdengan strategi untuk mencapai target dan sasaran pembangunan jangka menengah yang lebih terarah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsive berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan Tahun 2026		
		Penguatan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah dengan penguatan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah	Penguatan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah melalui aktivitas peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah, pelaksanaan kebijakan perekonomian, pelaksanaan adminitasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan kebijakan sumber daya alam	
		Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, serta Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	
		Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Pelayanan umum kantor dan pimpinan, serta Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	
		Arah Kebijakan Tahun 2027		
		Peningkatan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah dengan peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah	Peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksanaorganisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah melalui aktivitas peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah, pelaksanaan kebijakan perekonomian, pelaksanaan adminitasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan kebijakan sumber daya alam	
		Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, serta Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	
		Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Pelayanan umum kantor dan pimpinan, serta Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	
		Arah Kebijakan Tahun 2028		
		Pemantapan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah dengan pemantapan kualitas kebijakan	Pemantapan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraanrakyat, serta dukungan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah	ekonomi dan keuangan syariah melaluiaktivitaspeningkatankinerja dan reformasi birokrasi, administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah, pelaksanaan kebijakan perekonomian, pelaksanaan adminitasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan kebijakan sumber daya alam	
		Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, serta Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	
		Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Pelayanan umum kantor dan pimpinan, serta Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	
		Arah Kebijakan Tahun 2029		
		Perwujudan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah melalui kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah	Perwujudan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah melalui aktivitas peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah, pelaksanaan kebijakan perekonomian, pelaksanaan adminitasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan kebijakan sumber daya alam	
		Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, serta Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	
		Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Pelayanan umum kantor dan pimpinan, serta Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	
		Arah Kebijakan Tahun 2030		
		Peneguhan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah melalui kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah	Peneguhan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah melalui aktivitas peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah, pelaksanaan kebijakan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			perekonomian, pelaksanaan adminitasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan kebijakan sumber daya alam	
		Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, serta Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	
		Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Pelayanan umum kantor dan pimpinan, serta Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mencapai Visi, melaksanakan Misi, mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, harus disusun langkah operasional yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan beserta indikator dan target kinerja selama kurun waktu lima tahun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah KabupatenPurworejo.

Dalam hal ini, indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *output*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 terdiri dari rencana program yang secara langsung menunjang pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 serta mendukung prioritas pembangunan daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan.

Perumusan program merupakan tindak lanjut dari rumusan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan dalam organisasi Perangkat Daerah. Program/ kegiatan disusun

melalui analisis perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, yaitu program/ kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/ kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/ kegiatan strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta penganggarannya, mendapatkan prioritas, karena memiliki pengaruh yang luas dan memiliki urgensi yang lebih besar dalam penyelenggaraannya.

Adapun teknik dalam meruskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam Renstra Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsive berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Pelayanan Publik		
					Indeks Kualitas Kebijakan		
					Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Daerah		
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/ Material	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan		Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	
				Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
				Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Melaporkan SKM Tepat Waktu	Penataan Organisasi	
				Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah		Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun LKjIP Tepat	Penataan Organisasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Waktu		
				Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Indeks Kualitas Kebijakan		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
				Terlayaninya Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	
				Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	
				Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
				Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen fasilitasi kebijakan bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					masyarakat		
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
				Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	
				Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah		Indeks Reformasi Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
				Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
				Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	
				Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	JumlahProduk Hukum dan PengelolaanInformasi Hukum yang Didokumentasi	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Indeks Kualitas Kebijakan		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	Program Perekonomian dan Pembangunan	
					Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB		
					Return on Asset (ROA) BUMD		
				Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
				Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
				Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	
				Terlaksananya Koordinasi,	Jumlah Dokumen Hasil	Koordinasi, Sinkronisasi dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Program Perekonomian dan Pembangunan	
				Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
				Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah		Persentase Perangkat Daerah dengan Capaian Kinerja sesuai target	Program Perekonomian dan Pembangunan	
				Terlaksananya Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota,terdiri dari 13 kegiatan sebagai berikut
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi
        1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
    c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi
        1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
    d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi
        1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
    e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi
        1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
        2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    f. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi
        1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
        2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
        3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
        4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
        6) Penyediaan Bahan/ Material
        7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
        8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
        9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan meliputi
    1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    3) Pengadaan Mebel
    4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan meliputi
    1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan meliputi
    1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    3) Pemeliharaan Mebel
    4) Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya
    5) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    6) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
j. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan sub kegiatan meliputi
    1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    3) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    4) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

k. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi
    1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
    2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
l. Penataan Organisasi, dengan sub kegiatan meliputi
    1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    2) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
    3) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
m. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan sub kegiatan meliputi
    1) Fasilitasi Keprotokolan
    2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
    3) Pendokumentasian Tugas Pimpinan

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut
    a. Administrasi Tata Pemerintahan, dengan sub kegiatan meliputi
        1) Penataan Administrasi Pemerintahan
        2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
        3) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
    b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, dengan sub kegiatan meliputi
        1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
        2) Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
        3) Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
    c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan sub kegiatan meliputi
        1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
        2) Fasilitasi Bantuan Hukum
        3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
    d. Fasilitasi Kerjasama Daerah, dengan sub kegiatan meliputi
        1) Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
3. Program Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut

a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dengan sub kegiatan meliputi
    1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
    2) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
    3) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
    4) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
    5) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, dengan sub kegiatan meliputi
    1) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
    2) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
c. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan sub kegiatan meliputi
    1) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    2) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    3) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
d. Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam, dengan sub kegiatan meliputi
    1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
    2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
    3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Dalam upaya mencapai tujuan strategis dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, serta mewujudkan visi dan misi daerah, dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 ini memuat serangkaian program dan kegiatan yang terukur dan terencana. Program dan kegiatan ini merupakan penjabaran operasional dari strategi kebijakan yang telah dirumuskan, dirancang untuk memberikan dampak optimal dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas tugas, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan Kabupaten Purworejo. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 secara rinci tertuang dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	60,9	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,33	4,35		4,37		4,38		4,39		4,4		4,4			
			Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	56,94	60,23		61,87		63,51		65,16		66,8		66,8			
			Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	Angka	28,34	30,93		32,22		33,51		34,81		36,1		36,1			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	60,9	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,33	4,35		4,37		4,38		4,39		4,4		4,4			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						28.802.504.251		29.090.529.000		26.519.045.000		26.519.045.000		26.519.045.000				
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%	100	100	28.802.504.251	100	29.090.529.000	100	26.519.045.000	100	26.519.045.000	100	26.519.045.000	100	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100	Bagian Umum	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Angka	87,41	87,71		87,86		88,01		88,16		88,31		88,31	Bagian Organisasi	Kabupaten Purworejo	
			Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	64,34	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2	Bagian Organisasi	Kabupaten Purworejo	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	22	9.025.300	24	12.288.900	24	12.288.900	24	12.288.900	24	12.288.900	118			
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	22	9.025.300	22	9.025.300	22	9.025.300	22	9.025.300	23	9.025.300	111			
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	0	21	2.031.800	21	2.031.800	21	2.031.800	21	2.031.800	84			
4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	1	1.231.800	1	1.231.800	1	1.231.800	1	1.231.800	4			
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	27	45	18.627.895.014	45	17.802.885.900	45	16.065.795.300	45	17.130.921.300	45	17.014.972.300	225			
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	125	133	18.620.080.014	133	17.795.070.900	133	16.057.980.300	133	17.123.106.300	133	17.007.157.300	133			
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	26	44	7.815.000	44	7.815.000	44	7.815.000	44	7.815.000	44	7.815.000	220			
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0		11	1.157.800	11	1.157.800	11	1.157.800	11	1.157.800	44			
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	11	1.157.800	11	1.157.800	11	1.157.800	11	1.157.800	44			
4.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	0	0		16	747.200	16	747.200	16	747.200	16	747.200	64			
4.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	0	0	0	16	747.200	16	747.200	16	747.200	16	747.200	64			
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	0		18	19.272.000	18	19.272.000	18	19.272.000	18	19.272.000	72			
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	17	4.500.000	17	4.500.000	17	4.500.000	17	4.500.000	68			
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	2	14.772.000	2	14.772.000	2	14.772.000	2	14.772.000	8			
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	12	10	2.615.763.600	10	2.615.763.600	10	2.615.763.600	10	2.615.763.600	10	2.615.763.600	50			
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	32.108.700	1	32.108.700	1	32.108.700	1	32.108.700	1	32.108.700	5			
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	103.556.500	1	103.556.500	1	103.556.500	1	103.556.500	1	103.556.500	5			
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	103.118.400	1	103.118.400	1	103.118.400	1	103.118.400	1	103.118.400	5			
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	3	24.517.600	3	24.517.600	3	24.517.600	3	24.517.600	3	24.517.600	15			
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	27.194.400	1	27.194.400	1	27.194.400	1	27.194.400	1	27.194.400	5			
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	3	5	38.458.200	5	38.458.200	5	38.458.200	5	38.458.200	5	38.458.200	25			
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	1.071.250.300	12	1.071.250.300	12	1.071.250.300	12	1.071.250.300	12	1.071.250.300	60			
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	1.212.021.000	12	1.212.021.000	12	1.212.021.000	12	1.212.021.000	12	1.212.021.000	60			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	4	2	3.538.500	2	3.538.500	2	3.538.500	2	3.538.500	2	3.538.500	10			
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	5	153	162.710.000	24	1.444.583.000	13	1.139.362.000	15	74.236.000	15	190.185.000	220			
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	2	1.370.347.000	0	0	0	0	0	0	2			
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	3	997.632.000	0	0	0	0	3			
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	150	92.400.000	0	0	0	0	0	0	10	104.790.000	160			
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	22	74.236.000	0	0	15	74.236.000	0	0	37			
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	3	70.310.000	0	0	10	141.730.000	0	0	5	85.395.000	18			
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	2.902.966.600	24	2.902.966.600	24	2.373.794.200	24	2.373.794.200	24	2.373.794.200	120			
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	862.339.000	12	862.339.000	12	862.339.000	12	862.339.000	12	862.339.000	60			
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	2.040.627.600	12	2.040.627.600	12	1.511.455.200	12	1.511.455.200	12	1.511.455.200	60			
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	6	6	1.532.937.000	6	1.532.937.000	6	1.532.937.000	6	1.532.937.000	6	1.532.937.000	30			
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	9	363.450.000	9	363.450.000	9	363.450.000	9	363.450.000	9	363.450.000	45			
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	29	508.070.000	29	508.070.000	29	508.070.000	29	508.070.000	29	508.070.000	145			
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	30	8.825.000	30	8.825.000	30	8.825.000	30	8.825.000	30	8.825.000	150			
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	84	60	42.800.000	60	42.800.000	60	42.800.000	60	42.800.000	60	42.800.000	300			
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	4	5	485.737.000	5	485.737.000	5	485.737.000	5	485.737.000	5	485.737.000	25			
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	185	84	124.055.000	84	124.055.000	84	124.055.000	84	124.055.000	84	124.055.000	420			
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	4	4	1.244.831.937	4	1.051.552.200	4	1.051.552.200	4	1.051.552.200	4	1.051.552.200	20			
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	1	2	175.469.237	2	171.189.500	2	171.189.500	2	171.189.500	2	171.189.500	2			
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	2	254.062.700	2	254.062.700	2	254.062.700	2	254.062.700	2	254.062.700	10			
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	1	3	26.300.000	3	26.300.000	3	26.300.000	3	26.300.000	3	26.300.000	15			
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	1	2	789.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2			
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Laporan	2	2	1.374.212.000	2	1.374.212.000	2	1.374.212.000	2	1.374.212.000	2	1.374.212.000	10			
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	1	747.331.600	1	747.331.600	1	747.331.600	1	747.331.600	1	747.331.600	5			
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	1	626.880.400	1	626.880.400	1	626.880.400	1	626.880.400	1	626.880.400	5			
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Terlaksanannya Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Melaporkan SKM Tepat Waktu	%	100	100	186.462.900	100	186.462.900	100	186.462.900	100	186.462.900	100	186.462.900	100			
			Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun LKjIP Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100		100			
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	1	1	40.401.100	1	40.401.100	1	40.401.100	1	40.401.100	1	40.401.100	5			
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	1	1	44.986.900	1	44.986.900	1	44.986.900	1	44.986.900	1	44.986.900	5			
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	1	101.074.900	1	101.074.900	1	101.074.900	1	101.074.900	1	101.074.900	5			
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Laporan	3	3	145.699.900	3	145.699.900	3	145.699.900	3	145.699.900	3	145.699.900	15			
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	laporan	1	1	29.761.000	1	29.761.000	1	29.761.000	1	29.761.000	1	29.761.000	5			
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	laporan	1	1	46.188.000	1	46.188.000	1	46.188.000	1	46.188.000	1	46.188.000	5			
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas	laporan	1	1	69.750.900	1	69.750.900	1	69.750.900	1	69.750.900	1	69.750.900	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
			Pimpinan																
3	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	56,94	60,23		61,87		63,51		65,16		66,8		66,8			
			Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	Angka	28,34	30,93		32,22		33,51		34,81		36,1		36,1			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						15.992.962.197		12.449.310.000		12.442.490.000		12.449.310.000		12.456.238.000				
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	15.561.307.597	100	12.010.835.000	100	12.010.835.000	100	12.010.835.000	100	12.010.835.000	100	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	%	100	100		100		100		100		100		100	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,38	96,51		96,75		97,01		97,55		97,89		97,89	Bagian Hukum	Kabupaten Purworejo	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlayaninya Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	dokumen	3	6	409.061.500	6	505.168.840	6	409.061.500	6	611.254.295	6	409.061.500	30			
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1	1	270.411.100	1	311.295.930	1	270.411.100	1	376.668.075	1	270.411.100	5			
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1	1	17.831.800	1	37.604.160	1	17.831.800	1	45.501.033	1	17.831.800	5			
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	1	4	120.818.600	4	156.268.750	4	120.818.600	4	189.085.187	4	120.818.600	20			
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen fasilitasi kebijakan bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Dokumen	3	3	14.716.601.197	3	10.866.368.290	3	11.166.128.600	3	10.963.935.805	3	11.166.128.600	15			
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	1	14.397.329.597	1	10.450.294.670	1	10.750.054.980	1	10.547.862.185	1	10.750.054.980	5			
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	1	1	16.748.600	1	22.798.320	1	22.798.320	1	22.798.320	1	22.798.320	5			
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	1	1	302.523.000	1	393.275.300	1	393.275.300	1	393.275.300	1	393.275.300	5			
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Dokumen	5	6	417.179.900	6	603.113.040	6	417.179.900	6	417.179.900	6	417.179.900	30			
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	3	3	137.610.900	3	209.154.720	3	137.610.900	3	137.610.900	3	137.610.900	15			
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	27	11	244.623.000	11	309.471.120	11	244.623.000	11	244.623.000	11	244.623.000	55			
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	1	2	34.946.000	2	84.487.200	2	34.946.000	2	34.946.000	2	34.946.000	10			
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Dokumen	1	12	18.465.000	12	36.184.830	12	18.465.000	12	18.465.000	12	18.465.000	60			
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	1	12	18.465.000	12	36.184.830	12	18.465.000	12	18.465.000	12	18.465.000	60			
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Capaian Kinerja sesuai target	%	100	100	431.654.600	100	438.475.000	100	431.655.000	100	438.475.000	100	445.403.000	100	Bagian Administrasi Pembangunan	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Angka	70,62	71,5		72		72,5		73		73,5		73,5	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	4,93	5,35		5,38		5,4		5,42		5,44		5,44	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kabupaten Purworejo	
			Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	6,08	5,89		5,92		5,94		5,96		5,98		5,98	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kabupaten Purworejo	
			Return on Asset (ROA) BUMD	%	4,52	5,36		5,78		6,2		6,62		7,04		7,04	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kabupaten Purworejo	
			Persentase Kegiatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100	100		100		100		100		100		100	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kabupaten Purworejo	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dokumen	5	5	110.592.600	5	110.592.600	5	107.772.600	5	110.592.600	5	110.592.600	25			
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	dokumen	1	2	54.254.700	2	54.254.700	2	54.254.700	2	54.254.700	2	54.254.700	10			
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	1	20.603.800	1	15.603.800	1	13.783.800	1	16.603.800	1	16.603.800	5			
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	dokumen	1	1	21.378.600	1	21.378.600	1	21.378.600	1	21.378.600	1	21.378.600	5			
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	dokumen	2	1	14.355.500	1	14.355.500	1	14.355.500	1	14.355.500	1	14.355.500	5			
4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas	Dokumen	0	0	0	1	5.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
	Keuangan Daerah (TPAKD)		TPAKD																
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan	2	25	84.264.300	25	84.264.300	25	84.264.300	25	84.264.300	25	84.264.300	125			
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	5	42.133.000	5	42.133.000	5	42.133.000	5	42.133.000	5	42.133.000	25			
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	20	42.131.300	20	42.131.300	20	42.131.300	20	42.131.300	20	42.131.300	100			
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100	67.016.500	100	73.836.900	100	73.836.900	100	73.836.900	100	80.764.900	100			
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	1	1	26.670.600	1	26.670.600	1	26.670.600	1	26.670.600	1	33.598.600	5			
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	dokumen	1	1	19.345.000	1	26.165.400	1	26.165.400	1	26.165.400	1	26.165.400	5			
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	orang	23	22	21.000.900	22	21.000.900	22	21.000.900	22	21.000.900	22	21.000.900	110			
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Dokumen	3	3	169.781.200	3	169.781.200	3	165.781.200	3	169.781.200	3	169.781.200	15			
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	dokumen	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5			
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	dokumen	1	1	14.281.200	1	14.281.200	1	10.281.200	1	14.281.200	1	14.281.200	5			
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	5			
Jumlah							**44.795.466.448**		**41.539.839.000**		**38.961.535.000**		**38.968.355.000**		**38.975.283.000**				

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati didukung oleh 3 program prioritas sebagai berikut

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota memiliki 3 *outcome* yaitu Meningkatnya kualitas pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten, Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah, serta Meningkatnya kualitas pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh rumpun Asisten Administrasi Umum yang terdiri dari Bagian Umum, Bagian Organisasi, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan target indikator Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten dan Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

   Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki 3 *outcome* yaitu Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah, Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, serta Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan oleh rumpun Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Hukum dengan target indikator Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan, Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, dan Indeks Reformasi Hukum.

c. Program Perekonomian dan Pembangunan

   Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki 3 *outcome* yaitu Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah, serta Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa. Program Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan oleh rumpun Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

yang terdiri dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB, Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB, Return on Asset (ROA) BUMD, Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Persentase Perangkat Daerah dengan Capaian Kinerja sesuai target.

Daftar sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Aktivitas	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah			
		Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah			
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Koordinasi dan penyusunan daftar data perangkat daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Koordinasi dan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran perangkat daerah	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Aktivitas	Ket.
1	2	3	4	5	6
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Koordinasi dan penyusunan laporan pengelolaan retribusi daerah pada perangkat daerah	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Koordinasi dan penyusunan dokumen adminitrasi kepegawaian	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Koordinasi dan fasilitasi diklat pegawai	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan alat listrik dan penerangan kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan peralatan rumah tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan minum harian pegawai	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan barang cetak dan penggandaan dokumen	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan media cetak	
			Penyediaan Bahan/ Material	Penyediaan ATK, benda pos, plakat, bendera, dan taplak	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi tamu Bupati dan Wakil Bupati	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi rapat Sekretariat Daerah	
				Koordinasi dan konsultasi antar perangkat daerah dan pemerintah daerah	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pengelolaan arsip dinamis perangkat daerah	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan kendaraan dinas operasional atu lapangan	
			Pengadaan Mebel	Penyediaan mebel kantor dan rumah dinas	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Aktivitas	Ket.
1	2	3	4	5	6
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan listrik, air, dan jasa komunikasi kantor dan rumah dinas	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa layanan umum kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel kantor dan rumah dinas	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor dan rumah dinas	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan rumah dinas	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan rumah dinas	
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Koordinasi dan penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Koordinasi dan fasilitasi medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Koordinasi dan penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Koordinasi dan penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Koordinasi dan penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	
			Penataan Organisasi		
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan, Peta Jabatan dan Kematangan Organisasi	
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pembinaan Pelayanan Publik dan Tatalaksana	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Aktivitas	Ket.
1	2	3	4	5	6
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Penyusunan Roadmap RB	
				Penyusunan Rencana Aksi RB General dan Tematik	
				Penyusunan Kebijakan TPP	
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
			Fasilitasi Keprotokolan	Koordinasi dan fasilitasi keprotokolan pimpinan	
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi komunikasi pimpinan	
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian tugas pimpinan	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah			
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah			
			Administrasi Tata Pemerintahan		
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Koordinasi kegiatan pimpinan daerah	
				Koordinasi pemerintahan umum	
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Koordinasi dan fasilitasi penataan batas wilayah	
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelyedianaan kebijakan kesejahteraan rakyat	
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pemberian hibah kepada kemenag untuk pengajar keagamaan	
				Penyelenggaraan Haji Daerah	
				Pemberian bantuan hibah sarana peribadatan, prasarana peribadatan, dan pondok pesantren	
				Penyelenggaraan Pengajian rutin dan pengajian peringatan hari besar keagamaan	
				Penghargaan atas Suatu Prestasi Bidang Keagamaan	
			Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Koordinasi dan fasilitasi Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Tenaga kerja, Transmigrasi, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
			Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Koordinasi dan fasilitasi Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Aktivitas	Ket.
1	2	3	4	5	6
				Pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi	
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Produk Hukum Derah	
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi bantuan hukum litigasi dan non litigasi bagi masyarakat melalui LBH yang sudah terakreditasi	
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	
			Fasilitasi Kerjasama Daerah		
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Koordinasi dan fasilitasi kerja sama daerah	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam			
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah			
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa			
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Fasilitasi dalam melaksanakan koordinasi sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi TPID	
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Koordinasi, Evaluasi, Monitoring Ekonomi Mikro Kecil	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Fasilitasi dalam melaksanakan koordinasi sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD dan BLUD	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan TPAKD	
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian, koordinasi dan evaluasi program kegiatan pembangunan perangkat daerah	
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi, pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan perangkat daerah	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Fasilitasi pelaku pengadaan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Aktivitas	Ket.
1	2	3	4	5	6
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	fasilitasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Pendampingan untuk SDM pelaku Pengadaan	
			Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Fasilitasi penyusunan RKA, RKP, Mengevaluasi kegiatan dan pelaksanaan anggaran yang bersumber dari DBHCHT	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi kegiatan pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air	

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

4.2.1 Dukungan terhadap Program Nasional

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang menangani penunjang urusan pemerintahan daerah ikut serta dalam mendukung program prioritas nasional Asta Cita ke-7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” yang berfokus pada peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi.

Tabel 4.4
Dukungan terhadap Asta Cita

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Kinerja, Akuntabilitas, dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi Setda	Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah juga mendukung Program Strategis Nasional ke-3 “Kesehatan untuk Semua” yang membidangi Koordinasi dan Fasilitasi Makan Bergizi Gratis.

Tabel 4.5
Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Program Strategis Nasional 3: Kesehatan Untuk Semua Makan bergizi gratis	Koordinasi dan Fasilitasi Makan Bergizi Gratis	Koordinasi dan Fasilitasi Makan Bergizi Gratis	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Sekretariat Daerah

Dukungan terhadap prioritas utama nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah terdapat dalam Prioritas Nasional ke-2 "Penguatan faktor pendukung ekonomi digital" dan Prioritas Nasional ke-7 "Transformasi digital layanan publik prioritas" sebagai berikut

Tabel 4.6
Dukungan Terhadap Prioritas Utama Nasional

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Prioritas Nasional 2	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital	Program: Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bagian Perekonomian & SDA Setda	Sekretariat Daerah
2	Prioritas Nasional 7	Transformasi digital layanan publik prioritas	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Kegiatan: Penataan Organisasi Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi Setda	Sekretariat Daerah

4.2.2 Dukungan terhadap Program Delegasi Provinsi

Dukungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo terhadap Program Delegasi Provinsi adalah

1. Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa. Aktivitas yang dilaksanakan pada tahun 2026 adalah Peningkatan Kinerja, Akuntabilitas, dan Reformasi Birokrasi.
2. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak. Aktivitas yang dilaksanakan pada tahun 2026 adalah Fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Tabel 4.7
Dukungan terhadap Program Delegasi Provinsi

No	Program Delegasi Provinsi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Peningkatan Kinerja, Akuntabilitas, dan Reformasi Birokrasi	Bagian OrganisasiSetda	Sekretariat Daerah
2	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak	Fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Bagian Hukum Setda	Sekretariat Daerah

4.2.3 Dukungan terhadap Kegiatan Unggulan Kabupaten Purworejo

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo ikut serta dalam mendukung Program Unggulan “Pitulungan” Bupati dan Wakil Bupati Purworejo yaitu

1. Pinter Bocahe

   Kegiatan unggulan yang dilaksanakan yaitu Pembinaan dan pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi. Aktivitas yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan dan pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi.

2. Religius Masyarakate

   a) Pemberian insentif bulanan, pelatihan peningkatan kompetensi, pemberian penghargaan bagi guru agama non formal, dan masyarakat berprestasi di bidang keagamaan. Aktivitas yang akan dilaksanakan adalah Pemberian Hibah Insentif Guru Ngaji dan Pengajar Keagamaan.

   b) Memperluas kesempatan menjalankan ibadah bagi masyarakat sesuai dengan agama yang diakui negara. Aktivitas yang akan dilaksanakan adalah Pemberian perjalanan ibadah atau wisata rohani bagi masyarakat berprestasi.

   c) Fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan. Aktivitas yang akan dilaksanakan adalah Pemberian Hibah Sarana dan Prasarana Peribadatan dan pondok pesantren.

3. Sejahtera Wargane

   a) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Aktivitas yang akan dilaksanakan

adalah Peningkatan Kinerja, Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi.

b) Pemberian bantuan hukum, pendidikan, pembinaan, dan pengembangan organisasi perempuan dan difabel. Aktivitas yang akan dilaksanakan adalah Fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

4. Rame Pasare

Kegiatan unggulan yang dilaksanakan yaitu Memperbesar peluang kepada pelaku ekonomi lokal untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan pembangunan. Aktivitas yang akan dilaksanakan adalah Mendorong para pelaku usaha/ UMKM lokal untuk bisa tayang produk di Katalog.

Tabel 4.8

Dukungan terhadap Kegiatan Unggulan Kabupaten Purworejo

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas di 2026	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Pinter Bocahe	Pembinaan dan pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi	Pembinaan dan pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi	Pembinaan dan pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Sekretariat Daerah
2	Religius Masyarakate	Pemberian insentif bulanan, pelatihan peningkatan kompetensi, pemberian penghargaan bagi guru agama non formal, dan masyarakat berprestasi di bidang keagamaan	Pemberian Hibah Insentif Guru Ngaji dan Pengajar Keagamaan	Pemberian Hibah Insentif Guru Ngaji dan Pengajar Keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Sekretariat Daerah
		Memperluas kesempatan menjalankan ibadah bagi masyarakat sesuai dengan agama yang diakui negara	Pemberian perjalanan ibadah atau wisata rohani bagi masyarakat berprestasi	Pemberian perjalanan ibadah atau wisata rohani bagi masyarakat berprestasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan	Pemberian Hibah Sarana dan Prasarana Peribadatan dan pondok pesantren	Pemberian Hibah Sarana dan Prasarana Peribadatan dan pondok pesantren	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Sekretariat Daerah
3	Sejahtera Wargane	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.	Peningkatan Kinerja, Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja, Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi Setda	Sekretariat Daerah
		Pemberian bantuan hukum, pendidikan, pembinaan, dan pengembangan organisasi perempuan dan difabel	Fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Bagian Hukum Setda	Sekretariat Daerah
4	Rame Pasare	Memperbesar peluang kepada pelaku ekonomi lokal untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan pembangunan	Mendorong para pelaku usaha/ UMKM lokal untuk bisa tayang produk di Katalog	Mendorong para pelaku usaha/ UMKM lokal untuk bisa tayang produk di Katalog	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Sekretariat Daerah

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo ditetapkan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Indikator tersebut dibagi menjadi 2 yaitu Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

a. Indikator Kinerja Utama

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang berperan sebagai fungsi Penunjang Urusan Pemerintahann Daerah memiliki 4 indikator tujuan perangkat daerah dan 4 indikator sasaran yang menjadi indikator kinerja utama sebagai berikut

Tabel 4.9
Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Tujuan PD
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,34	4,35	4,37	4,38	4,39	4,40	Tujuan PD
3	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	58,58	60,23	61,87	63,51	65,16	66,80	Tujuan PD
4	Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	Angka	29,63	30,93	32,22	33,51	34,81	36,10	Tujuan PD
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Sasaran PD
6	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,34	4,35	4,37	4,38	4,39	4,40	Sasaran PD
7	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	58,58	60,23	61,87	63,51	65,16	66,80	Sasaran PD
6	Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	Angka	29,63	30,93	32,22	33,51	34,81	36,10	Sasaran PD

b. Indikator Kinerja Kunci

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, indikator kinerja kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mendukung 8 indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Target indikator kinerja kunci Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai berikut

Tabel 4.10
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Bidang Penanggung Jawab	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	10	7	8	9	10	11
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,45	96,74	96,81	96,87	96,94	97,00	Bagian Hukum	IUP RPJPD
2	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	Persen	5,33	5,35	5,38	5,40	5,42	5,44	Bagian Perekonomian dan SDA	IUP RPJPD
3	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	Persen	5,87	5,89	5,92	5,94	5,96	5,98	Bagian Perekonomian dan SDA	IUP RPJPD
4	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	4,94	5,36	5,78	6,20	6,62	7,04	Bagian Perekonomian dan SDA	IUP RPJPD
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83	83,41	83,82	84,23	84,64	85,05	Bagian Organisasi	IUP RPJPD
6	Persenta sejumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	Bagian Barjas	Permendagri No. 18 Tahun 2020
7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	Bagian Barjas	Permendagri No. 18 Tahun 2020
8	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Barjas	Permendagri No. 18 Tahun 2020
9	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	-10,00	5,00	8,00	10,00	15,00	20,00	Bagian Barjas	Permendagri No. 18 Tahun 2020
10	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	5,03	5,05	5,06	5,08	5,09	5,1	Bagian Perekonomian dan SDA	Mandatory Lain
11	Indeks Zakat Nasional	Poin Indeks	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Mandatory Lain

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Sekretariat Daerah, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah setiap tahun;
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas;
c. Sekretaris Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah dilakukan setiap tahun selama periode renstra;

b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
c. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah baik yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang, dan selanjutnya diuraikan dimasing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan dan bersifat indikatif. Renstra SKPD disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/ atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2025 – 2029 dengan melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 1.1

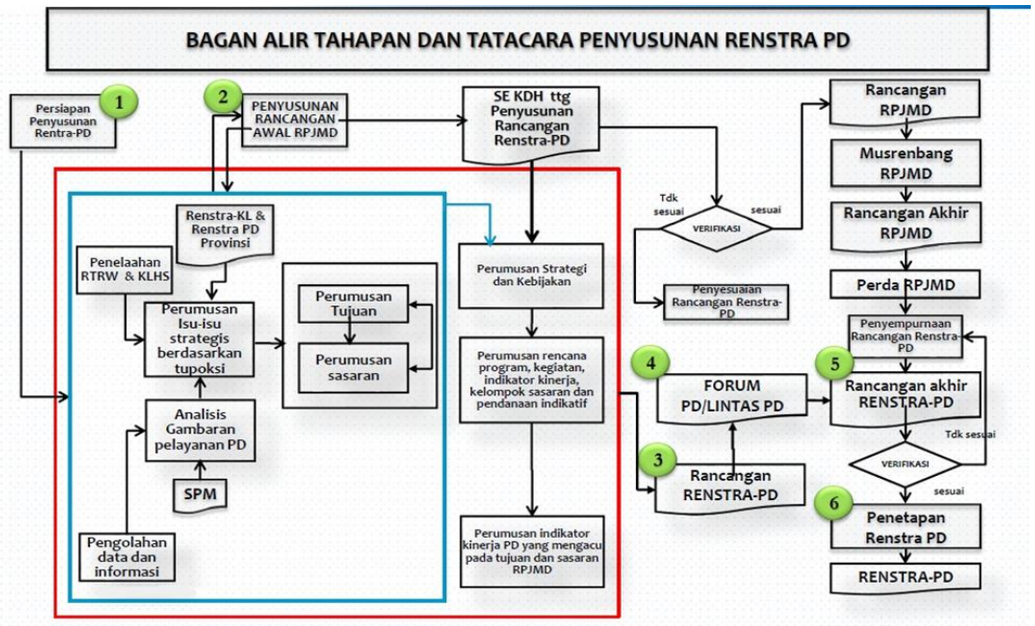

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, dengan fokusmelakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Renstra juga harus memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Renstra K/L terkait, RTRW dan KLHS.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legeslasi, serta menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan. Dengan adanya perubahan peraturan daerah dan peraturan Bupati tersebut diatas maka perlu adanya penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2029 dan telah berakhirnya Peraturan Daerah Purworejo Nomor 11 Tahun 2021, tanggal 25 Agustus 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai salah satu unsur perangkat daerah, menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan sebagai dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

a. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
p. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
t. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
u. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
v. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun

2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)

w. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).

x. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja *(performance)* Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, sehingga tercapai kinerja yang optimal dan sesuai dengan azas akuntabilitas.

3.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN
- 1 Latar Belakang
- 2 Dasar Hukum Penyusunan
- 3 Maksud dan Tujuan
- 4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH.
1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
3. Strategi dan Arah kebijakan

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta kinerja, indicator, target, dan pagu indikatif;
2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah
3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum.

Dasar Hukum Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo serta Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

2. Uraian Tupoksi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo maka Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

b. Fungsi

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Susunan organisasi

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo terdiri atas:

a. Sekretaris DPRD;
b. Bagian Umum dan Keuangan;
c. Bagian Legislasi dan Publikasi;
d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
e. Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagai mana tercantum dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi

serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris DPRD
   Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
b. Bagian Umum dan Keuangan
   Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, melaksanakan dan pengendalian di bidang umum dan keuangan, yang meliputi perencanaan dan keuangan, serta umum dan kepegawaian. Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
   1) Pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
   2) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu ;
   3) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalianadministrasi perencanaan dan keuangan;
   4) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
   5) Pengoordinasian penyelenggaraan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD
   6) Pengoordinasian penyelenggaraan layanan administrasi DPRD;
   7) Menyediakan jasa penunjang; dan
   8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi
c. Bagian Legislasi dan Publikasi
   Bagian Legislasi dan Publikasi mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Bagian Legislasi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:
   1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
   2) Peningkatan Kapasitas DPRD;
   3) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
   4) Pelaksanaan fasilitas tugas DPRD; dan
   5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi
d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
   Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
   1. Pembahasan Kebijakan Anggaran;
   2. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
   3. Penyerapan dan penghimpunan aspirasi Masyarakat
   4. Pembahasan Kerjasama Daerah; dan
   5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi.
e. Kelompok Jabatan Fungsional
   Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
   1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Sekretariat DPRD.
   2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau

Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

3) Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
6) Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerjasama secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan
7) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelakdsana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah.

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PURWOREJO

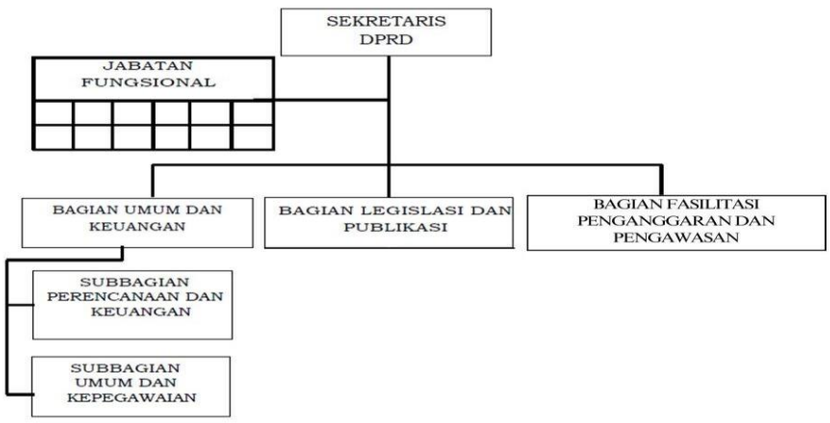

Dasar Hukum Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas sehari-harinya dibantu unsur pelaksanaan sebagai berikut:

1. *Kepegawaian :*
   a. *Berdasarkan Pendidikan*

No	Pendidikan	Jumlah		Keterangan
1	SD	-	orang	
2	SMP	2	orang	
3	SMA/SMK	11	orang	
4	D III	6	orang	
5	SARJANA (S1)	7	orang	
6	PASCA SARJANA (S2)	4	orang	
	Jumlah	30		

b. Berdasarkan Golongan :

No	Golongan	Jumlah		Keterangan
1	Golongan IV	5	orang	
2	Golongan III	20	orang	
3	Golongan II	5	orang	
4	Golongan I	0	orang	
5	Non PNS	41	orang	

c. Berdasarkan Jabatan :

No	Eselon	Jumlah		Keterangan
1	I	0	orang	
2	II	1	orang	
3	III	3	orang	
4	IV	2	orang	
5	FUNGSIONAL KHUSUS	3	orang	
6	FUNGSIONAL UMUM	21	orang	
7	Non PNS	41	orang	

2. Sarana Prasarana

a. Berdasarkan KIB

No	KIB		Jumlah		Keterangan
1	KIB A				Tanah
	1	Tanah Gedung Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD	7.252	M2	
	2	Tanah Rumah Dinas Ketua DPRD	1.414	M2	
2	KIB C				Bangunan
	1	Gedung Utama DPRD	1.817	M2	
	2	Sekretariat DPRD	220	M2	
	3	Dapur	45	M2	
	4	Pos Jaga Rumah Dinas Ketua DPRD	9	M2	
	5	Pos Jaga Depan Gedung DPRD	16	M2	
	6	Tempat Parkir Utara	45	M2	
	7	Rumha Dinas Ketua DPRD Peninggalan	420	M2	
	8	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD	200	M2	
	9	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD	120	M2	
	10	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD	120	M2	
3	KIB B		1.687	Item	Peralatan dan Mesin
4	KIB D		4	Item	Jalan, Irigasi dan Jaringan
5	KIB E		90	Buah	Aset Tetap Lainnya

b. Berdasarkan Jenis

No	Jenis	Jumlah		Keterangan
1	Gedung dan Bangunan	20	Buah	
2	Kendaraan	29	Unit	17 Roda 4 12 Roda 2
3	Peralatan dan Perlengkapan	1.687	Item	

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar kondisi saat ini pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo cukup mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

Dengan Komposisi 1 Sekretaris DPRD, 3 Kepala Bagian, 2 Kepala Sub Bagian, 3 fungsional khusus, 21 fungsional umum, dan 41 orang Non PNS serta didukung dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya, diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo mampu berhasil mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Purworejo untuk lima tahun kedepan dengan baik.

Tabel 2.1 (TC.23)

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
I	INDIKATOR SASARAN																					
I.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik																					
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)				82	83	84	85	86	87	92.22	90.53	91.93	90.53	90.5		112.46	109.07	109.44	106.51	105.23	0.00
I.2	Terselenggaranya dukungan Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD																					
	Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
II	INDIKATOR PROGRAM																					
II.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																					
	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.94	100		100.00	100.00	100.00	99.94	100.00	0.00
II.2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD																					
	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD dan RKPD				100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.8	100		100.00	100.00	100.00	99.80	100.00	0.00

Dari Tabel 2.1 (TC.23) diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) menunjukkan pencapaian yang baik, bahkan melebihi target, dimana untuk tahun 2021 – 2026 target yang ditetapkan berkisar antara 82 hingga 87. Pada Tahun 2021 merupakan puncaknya yaitu mencapai 92,22 sementara tahun – tahun selanjutnya fluktuatif antara 90,5 – 91,93.

Sedangkan untuk pencapaian sasaran Terselenggaranya dukungan Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD selalu mencapai 100%. Dalam hal ini berarti tidak ditemukan adanya kesenjangan/ gap pelayanan Perangkat Daerah. Antara target renstra perangkat daerah yang ditetapkan, realisasi capaian renstra, dan rasio capaian renstra perangkat daerah mencapai 100%. Tentu saja keberhasilan pelayanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tersedianya Sumber Daya Aparatur yang unggul, semangat dalam menyelesaikan tugas, tersedianya anggaran serta upaya untuk terus memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan SOP terhadap masyarakat dan anggota Dewan.

Tabel 2.2 (TC.24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	56	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SEKRETARIAT DPRD	45.352.375.799	51.808.860.269	55.127.443.492	65.083.915.065	61.927.599.930	62.818.247.892	44.299.510.080	49.571.267.793	54.207.196.465	58.970.724.286	30.101.822.416	0	97,68%	95,68%	98,33%	90,61%	48,61%	0,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.489.924.899	29.917.970.569	33.315.287.292	33.036.324.705	35.259.752.030	38.266.555.392	27.977.020.742	28.702.779.027	32.837.960.266	31.822.592.378	18.220.491.463	0	98,20%	95,94%	98,57%	96,33%	51,68%	0,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.314.000	11.259.400	12.362.000	24.857.500	27.872.000	20.627.200	11.127.000	11.041.300	12.346.000	24.837.000	13.500.000	0	98,35%	98,06%	99,87%	99,92%	48,44%	0,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.314.000	2.983.000	11.000.000	16.497.500	16.472.000	15.902.200	11.127.000	2.910.400	10.984.000	16.478.000	7.140.000	0	98,35%	97,57%	99,85%	99,88%	43,35%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	1.379.400	0	0	0	0	0	1.379.400	0	0	0	0	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	1.379.400	0	0	0	0	0	1.349.600	0	0	0	0	0,00%	97,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	1.379.400	0	0	0	0	0	1.349.600	0	0	0	0	0,00%	97,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	1.379.400	0	0	0	0	0	1.349.600	0	0	0	0	0,00%	97,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	1.379.400	0	0	0	0	0	1.353.100	0	0	0	0	0,00%	98,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	1.379.400	1.362.000	8.360.000	11.400.000	4.725.000		1.349.600	1.362.000	8.359.000	6.360.000	0	0,00%	97,84%	100,00%	99,99%	55,79%	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.769.426.737	3.956.698.317	3.430.554.922	3.492.650.530	3.562.516.578	4.364.273.830	3.538.595.195	3.431.150.358	3.384.231.791	3.397.281.813	1.978.934.372	0	93,88%	86,72%	98,65%	97,27%	55,55%	0,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.758.605.537	3.945.893.617	3.411.936.322	3.483.123.030	3.535.986.578	4.352.766.230	3.527.849.695	3.420.527.658	3.365.663.291	3.387.808.213	1.971.514.372	0	93,86%	86,69%	98,64%	97,26%	55,76%	0,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	6.666.500	18.618.600	9.527.500	26.530.000	11.507.600	0	6.573.900	18.568.500	9.473.600	7.420.000	0	0,00%	98,61%	99,73%	99,43%	27,97%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	1.379.400	0	0	0	0	0	1.349.600	0	0	0	0	0,00%	97,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.821.200	1.379.400	0	0	0	0	10.745.500	1.349.600	0	0	0	0	99,30%	97,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	1.379.400	0	0	0	0	0	1.349.600	0	0	0	0	0,00%	97,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	9.902.000	0	0	0	0	0	9.902.000	0	0	0	0	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	9.902.000	0	0	0	0	0	9.902.000	0	0	0	0	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.000.370	508.519.900	537.554.400	457.106.800	481.970.100	503.757.500	174.855.370	463.948.979	513.807.050	428.445.700	230.628.203	0	99,92%	91,24%	95,58%	93,73%	47,85%	0,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	20.423.000	9.907.100	11.651.000	11.651.000	11.622.500	0	20.413.400	9.717.400	10.290.800	5.156.497	0	0,00%	99,95%	98,09%	88,33%	44,26%	0,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	31.792.800	43.054.200	22.109.300	23.516.000	21.992.700	0	31.743.300	41.772.700	21.260.400	13.001.069	0	0,00%	99,84%	97,02%	96,16%	55,28%	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	57.288.000	57.288.000	69.115.200	69.112.800	69.012.000	0	55.582.500	55.160.000	62.538.000	28.449.000	0	0,00%	97,02%	96,29%	90,48%	41,16%	0,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	30.022.000	26.797.000	23.996.000	23.992.300	23.433.000	0	19.735.500	23.979.480	22.497.000	7.755.000	0	0,00%	65,74%	89,49%	93,75%	32,32%	0,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	20.628.000	19.884.000	19.884.000	22.764.000	22.764.000	0	15.948.000	16.755.000	19.404.000	12.532.000	0	0,00%	77,31%	84,26%	97,59%	55,05%	0,00%
Penyediaan Bahan /Material	0	132.865.200	132.783.500	78.805.300	81.811.000	116.312.300	0	113.718.225	122.829.800	76.412.500	46.030.700	0	0,00%	85,59%	92,50%	96,96%	56,26%	0,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	58.300.000	63.600.000	55.650.000	58.300.000	40.810.000	0	58.286.000	59.921.000	40.448.000	18.374.000	0	0,00%	99,98%	94,22%	72,68%	31,52%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.370	151.610.000	184.240.600	175.896.000	190.821.000	197.811.000	174.855.370	143.172.154	183.671.700	175.595.000	99.329.937	0	99,92%	94,43%	99,69%	99,83%	52,05%	0,00%
Pemutakhiran Arsip Dinamis pada SKPD	0	5.590.900	0	0	0	0	0	5.349.900	0	0	0	0	0,00%	95,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	628.486.000	1.154.679.900	1.376.760.400	3.719.830.200	0	0	597.455.900	1.069.074.400	1.347.545.500	3.674.140.700	0	0	95,06%	92,59%	97,85%	98,77%	0,00%	0,00%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	2.558.720.000	0	0	0	0	0	2.525.588.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	98,71%	0,00%	0,00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	9.485.000	0	0	0	0	0	7.326.000	0	0	0	0	0,00%	77,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Mebel	0	920.045.000	0	0	0	0	0	863.618.800	0	0	0	0	0,00%	93,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	26.657.000	0	172.214.000	0	0	0	25.161.000	0	168.380.000	0	0	0,00%	94,39%	0,00%	97,77%	0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	628.486.000	0	0	0	0	0	597.455.900	0	0	0	0	0	95,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	198.492.900	1.376.760.400	988.896.200	0	0	0	172.968.600	1.347.545.500	980.172.700	0	0	0,00%	87,14%	97,88%	99,12%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384.363.116	837.373.743	829.972.974	859.320.200	2.809.932.196	1.938.442.200	355.140.649	713.040.851	806.869.623	800.765.296	524.841.453	0	92,40%	85,15%	97,22%	93,19%	18,68%	0,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.502.400	0	0	0	0	0	52.681.600	0	0	0	0	0	98,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.130.316	240.978.883	342.580.614	366.124.000	366.123.796	366.124.000	169.187.033	151.014.177	325.708.688	339.704.722	210.216.959	0	87,15%	62,67%	95,08%	92,78%	57,42%	0,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.730.400	596.394.860	487.392.360	493.196.200	2.443.808.400	1.572.318.200	133.272.016	562.026.704	481.160.935	461.060.574	314.624.494	0	97,47%	94,24%	98,72%	93,48%	12,87%	0,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.014.040.700	714.528.736	545.786.000	1.001.633.000	1.590.325.000	987.375.000	998.177.535	579.821.586	493.794.753	806.248.229	532.171.098	0	98,44%	81,15%	90,47%	80,49%	33,46%	0,00%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Ratio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	475.819.600	194.417.000	177.274.000	177.700.000	177.700.000	204.850.000	471.067.027	173.524.356	158.334.901	159.548.073	132.776.457	0	99,00%	89,25%	89,32%	89,79%	74,72%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	185.149.736	200.545.000	490.640.000	1.085.110.000	465.960.000	0	166.675.360	178.517.297	331.742.530	190.297.763	0	0,00%	90,02%	89,02%	67,61%	17,54%	0,00%
Pemeliharaan Mebel	0	5.300.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0,00%	94,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	40.673.000	34.792.000	35.922.000	35.700.000	24.750.000	0	21.015.000	24.239.000	22.657.000	6.240.000	0	0,00%	51,67%	69,67%	63,07%	17,48%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	518.138.100	268.640.000	116.800.000	233.550.000	233.550.000	233.550.000	508.843.408	201.559.170	116.626.525	233.544.626	176.281.878	0	98,21%	75,03%	99,85%	100,00%	75,48%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.083.000	20.349.000	16.375.000	63.821.000	58.265.000	58.265.000	18.267.400	12.048.000	16.077.060	58.756.000	26.575.000	0	90,96%	59,21%	98,18%	92,06%	45,61%	0,00%
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**20.425.559.576**	**20.397.812.943**	**24.263.476.856**	**21.123.493.735**	**24.474.832.856**	**28.142.907.062**	**20.231.997.933**	**20.288.204.747**	**24.091.729.079**	**20.852.778.791**	**13.855.371.304**	**0**	**99,05%**	**99,46%**	**99,29%**	**98,72%**	**56,61%**	**0,00%**
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	19.915.307.776	19.845.944.583	23.359.042.496	20.358.689.235	23.789.332.496	27.546.283.702	19.800.403.633	19.803.098.747	23.331.138.279	20.110.485.791	13.855.371.304	0	99,42%	99,78%	99,88%	98,78%	58,24%	0,00%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	475.915.600	485.673.000	838.239.000	714.122.500	619.305.000	531.426.000	397.543.100	425.637.000	721.866.800	705.883.000	0	0	83,53%	87,64%	86,12%	98,85%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	34.336.200	66.195.360	66.195.360	50.682.000	66.195.360	65.195.360	34.051.200	59.469.000	38.724.000	36.410.000	0	0	99,17%	89,84%	58,50%	71,84%	0,00%	0,00%
Layanan Administrasi DPRD	**2.081.734.400**	**2.327.195.630**	**2.318.819.740**	**2.357.432.740**	**2.312.303.300**	**2.309.172.600**	**2.069.670.560**	**2.136.594.476**	**2.187.636.410**	**1.838.094.849**	**1.085.045.033**	**0**	**99,42%**	**91,81%**	**94,34%**	**77,97%**	**46,92%**	**0,00%**
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	120.000.000	230.218.290	221.842.400	260.455.400	173.813.300	171.756.600	116.288.900	155.372.400	208.674.600	253.347.700	80.933.500	0	96,91%	67,49%	94,06%	97,27%	46,56%	0,00%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.961.734.400	2.096.977.340	2.096.977.340	2.096.977.340	2.138.490.000	2.137.416.000	1.953.381.960	1.981.222.076	1.978.961.810	1.584.747.149	1.004.111.533	0	99,57%	94,48%	94,37%	75,57%	46,95%	0,00%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16.862.450.900	21.890.889.700	21.812.156.200	32.047.590.360	26.667.847.900	24.551.692.500	16.322.489.338	20.868.488.766	21.369.236.199	27.148.131.908	11.881.330.953	0	96,80%	95,33%	97,97%	84,71%	44,55%	0,00%
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**3.728.679.900**	**2.912.990.200**	**2.709.319.300**	**1.941.362.560**	**2.471.199.700**	**1.775.831.000**	**3.610.232.126**	**2.657.186.664**	**2.519.599.500**	**1.721.013.200**	**533.290.500**	**0**	**96,82%**	**91,22%**	**93,00%**	**88,65%**	**21,58%**	**0,00%**
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	0	23.100.000	3.286.300	2.760.000	27.030.000	11.130.000	0	3.130.000	3.277.500	2.110.000	5.415.000	0	0,00%	13,55%	99,73%	76,45%	20,03%	0,00%
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.728.679.900	1.512.794.200	1.393.050.000	1.213.336.560	1.189.472.200	991.473.000	3.610.232.126	1.491.014.664	1.384.290.500	1.081.766.900	513.835.500	0	96,82%	98,56%	99,37%	89,16%	43,20%	0,00%
Penyelenggaraan Kajian Pemdang- Undangan	0	506.005.000	414.209.000	252.742.000	528.480.000	261.636.000	0	358.834.000	331.227.900	175.688.100	14.040.000	0	0,00%	70,64%	79,97%	69,51%	2,66%	0,00%
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	0	869.091.000	898.774.000	472.524.000	726.217.500	511.592.000	0	804.208.000	800.803.600	461.448.200	0	0	0,00%	92,53%	89,10%	97,66%	0,00%	0,00%
Pembahasan Kebijakan Anggaran	**0**	**843.026.000**	**791.343.100**	**868.821.100**	**785.380.000**	**661.583.500**	**0**	**726.912.550**	**760.513.280**	**666.797.200**	**51.925.000**	**0**	**0,00%**	**86,23%**	**96,10%**	**76,75%**	**6,61%**	**0,00%**
Pembahasan KUA dan PPAS	0	253.771.000	197.810.100	211.693.000	211.690.000	152.319.000	0	203.119.900	197.725.340	196.675.300	0	0	0,00%	80,04%	99,96%	92,91%	0,00%	0,00%
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0	118.903.700	92.808.000	80.866.300	80.866.000	80.618.000	0	86.783.000	92.221.500	51.479.000	29.485.000	0	0,00%	72,99%	99,37%	63,64%	36,46%	0,00%
Pembahasan APBD	0	338.531.800	355.240.000	424.527.600	341.111.000	295.900.000	0	330.161.650	347.173.040	353.288.500	0	0	0,00%	97,53%	97,73%	83,22%	0,00%	0,00%
Pembahasan APBD Perubahan	0	89.535.000	135.290.000	138.114.200	138.113.000	119.146.500	0	87.568.000	113.207.000	51.784.400	9.190.000	0	0,00%	97,80%	83,68%	37,49%	6,65%	0,00%
Pembahasan Laporan Semester	0	22.990.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	0	19.293.600	10.195.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	0	19.280.000	10.186.400	13.570.000	13.250.000	0	0,00%	99,93%	99,92%	99,78%	97,43%	0,00%
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**120.011.700**	**96.872.000**	**102.630.100**	**84.070.000**	**103.844.000**	**68.646.000**	**65.368.000**	**82.130.000**	**96.238.000**	**73.434.400**	**82.152.000**	**0**	**54,47%**	**84,78%**	**93,77%**	**87,35%**	**79,11%**	**0,00%**
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	0	5.000.000	7.000.000	1.500.000	5.625.000	1.740.000	0	0	5.500.000	1.375.000	4.125.000	0	0,00%	0,00%	78,57%	91,67%	73,33%	0,00%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	120.011.700	5.000.000	7.000.000	1.625.000	5.625.000	1.740.000	65.368.000	5.000.000	7.000.000	1.375.000	5.625.000	0	54,47%	100,00%	100,00%	84,62%	100,00%	0,00%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	0	5.000.000	7.000.000	1.500.000	5.625.000	1.875.000	0	4.750.000	6.625.000	1.500.000	5.625.000	0	0,00%	95,00%	94,64%	100,00%	100,00%	0,00%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	0	5.000.000	7.000.000	1.500.000	5.625.000	1.626.000	0	4.500.000	2.500.000	500.000	3.625.000	0	0,00%	90,00%	35,71%	33,33%	64,44%	0,00%
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0	4.496.000	1.928.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	0	0	0	1.928.000	2.438.000	0	0,00%	0,00%	100,00%	99,51%	0,00%	0,00%
Pengawasan Pengelolaan Anggaran	0	4.496.000	4.723.600	-	3.400.000	0	0	0	4.707.500	0	1.590.000	0	0,00%	0,00%	99,66%	0,00%	46,76%	0,00%
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	0	67.880.000	67.978.500	75.495.000	75.494.000	59.215.000	0	67.880.000	67.977.500	66.246.400	61.562.000	0	0,00%	100,00%	100,00%	87,75%	81,55%	0,00%
Peningkatan Kapasitas DPRD	**7.704.511.800**	**2.189.273.400**	**2.192.810.200**	**2.298.041.000**	**2.821.742.500**	**3.352.409.500**	**7.424.422.612**	**1.879.553.412**	**2.023.075.109**	**1.956.664.766**	**870.404.976**	**0**	**96,36%**	**85,85%**	**92,26%**	**85,14%**	**30,85%**	**0,00%**
Orientasi DPRD	7.479.283.800	976.488.000	0	256.500.000			7.202.362.812	961.283.000	0	253.572.000	0	0	96,30%	98,44%	0,00%	98,86%	0,00%	0,00%
Pendalaman Tugas DPRD	0	0	938.700.000	772.248.000	1.539.000.000	1.026.000.000	0	0	880.000.000	701.943.412	614.400.000	0	0,00%	0,00%	93,75%	90,90%	39,92%	0,00%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0	210.000.000	845.476.200	824.943.200	563.176.800	500.601.600	0	156.440.000	754.383.000	691.144.600	77.500.000	0	0,00%	74,50%	89,23%	83,78%	13,76%	0,00%
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	0	249.983.000	143.365.000	187.725.600	283.243.200	269.045.200	0	246.276.312	132.500.000	115.000.000	137.468.976	0	0,00%	98,52%	92,41%	61,26%	48,53%	0,00%
Penyusunan Program Kerja DPRD	0	2.169.000	258.019.000	254.239.200	2.385.000	2.385.000	0	499.500	249.014.409	192.619.754	0	0	0,00%	23,03%	96,51%	75,76%	0,00%	0,00%
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	225.228.000	750.633.400	7.230.000	2.385.000	433.937.800	1.554.377.700	222.059.800	515.054.600	7.177.700	2.385.000	41.036.000	0	98,59%	68,62%	99,28%	100,00%	9,46%	0,00%
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**5.309.247.500**	**6.403.533.100**	**7.561.179.800**	**6.048.413.500**	**7.366.238.000**	**7.305.059.600**	**5.222.466.600**	**6.364.517.700**	**7.545.292.200**	**4.821.025.900**	**4.769.554.000**	**0**	**98,37%**	**99,39%**	**99,79%**	**79,71%**	**64,75%**	**0,00%**
Kunjungan Kerja dalam Daerah	0	5.250.000	1.500.000	3.125.000	0	0	0	500.000	-	3.125.000	0	0	0,00%	9,52%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Penyusunan Polosi-Polosi Pikiran DPRD	0	5.784.000	6.503.400	6.050.000	10.600.000	6.050.000	0	5.784.000	6.458.800	5.830.000	4.350.000	0	0,00%	100,00%	99,31%	96,36%	41,04%	0,00%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pelaksanaan Rapat	5.309.247.500	6.392.499.100	7.553.176.400	6.039.238.500	7.355.638.000	7.299.009.600	5.222.466.600	6.358.233.700	7.536.833.400	4.812.070.900	4.765.204.000	0	98,37%	99,46%	99,81%	79,68%	64,78%	0,00%
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	0	1.110.000	3.371.400	1.700.000	0	0	0	0	1.706.000	1.700.000	-	-	0,00%	0,00%	50,60%	100,00%	0,00%	0,00%
Penyusunan Kode Etik DPRD	0		2.496.400	1.700.000	0	0	0	0	1.706.000	1.700.000	0	0	0,00%	0,00%	68,34%	100,00%	0,00%	0,00%
Pengawasan Kode Etik DPRD	0	1.110.000	875.000		0	0	0	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Tugas DPRD	**0**	**9.444.085.000**	**8.451.502.300**	**20.805.182.200**	**13.119.443.400**	**11.388.162.900**	**0**	**9.158.188.440**	**8.422.812.110**	**17.907.496.442**	**5.574.004.477**	**0**	**0,00%**	**96,97%**	**99,66%**	**86,07%**	**42,49%**	**0,00%**
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	0	7.434.765.200	6.963.989.500	15.856.787.100	9.654.028.800	8.832.900.700	0	7.294.577.800	6.935.890.962	13.618.387.992	4.148.499.383	0	0,00%	98,11%	99,60%	85,88%	42,97%	0,00%
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	0	823.800	1.446.000	1.060.000	0	0	0	0	1.409.800	1.060.000	0	0	0,00%	0,00%	97,50%	100,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	0	14.273.000	13.306.800	19.610.000	23.320.000	17.136.000	0	9.418.000	13.285.500	16.675.000	7.860.000	0	0,00%	65,98%	99,84%	85,03%	33,70%	0,00%
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	0	1.994.223.000	1.472.760.000	4.927.725.100	3.442.094.600	2.538.126.200	0	1.854.192.640	1.472.225.848	4.271.373.450	1.417.645.094	0	0,00%	92,98%	99,96%	86,68%	41,19%	0,00%
Keterangan																		
Kolom (1) : diisi nama program dan kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021																		

Dalam Tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran, dilakukan analisis terhadap capaian anggaran selama lima tahun terakhir, yaitu 2021 hingga 2025. Analisis capaian anggaran periode 2021-2026 bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan

Anggaran tahun 2021 anggaran direncanakan sebesar Rp. 45.352.375.799,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 44.299.510.080,00. Rasio capaian sebesar 97,68% menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target. Hal tersebut dikarenakan terkait adanya pendemi Covid-19 sehingga kegiatan tidak bisa berjalan dengan semestinya meskipun anggaran telah dialokasikan dengan baik dan hampir mencapai target, dampak pandemi Covid-19 secara signifikan memengaruhi pelaksanaan kegiatan, yang pada akhirnya memengaruhi capaian anggaran.

Anggaran tahun 2022 anggaran direncanakan sebesar Rp. 51.808.860.269,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 49.571.267.793,00. Rasio capaian sebesar 95,68% juga menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target, hal tersebut dikarenakan dalam pencapaian target realisasi anggaran pada tahun 2022 menyesuaikan dengan kebutuhan maupun tagihan.

Sementara itu anggaran tahun 2023, direncanakan sebesar Rp. 55.127.443.492,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 54.207.196.465,00. Rasio capaian sebesar 98,33%. Capaian realisasi anggaran tersebut juga menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target. Hal tersebut dikarenakan pada akhir tahun 2023 efisensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.

Kemudian pada tahun 2024, anggaran direncanakan sebesar Rp. 65.083.915.065,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 58.970.724.286,00. Rasio capaian sebesar 90,61% menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target. Hal tersebut juga dikarenakan belanja/ realisasi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan atau tagihan. Selain itu terdapat beberapa kegiatan pengadaan adanya efisiensi dari hasil negosiasi harga pengadaan. Selanjutnya pada tahun 2025, anggaran direncanakan sebesar Rp. 61.927.599.930,00 dengan realisasi pada semester 1 sebesar Rp. 30.101.822.416, 00 dan rasio capaian 48,61%.

Dari hasil penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya fluktuasi capaian dari tahun 2021 ke 2024. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan dan realisasi anggaran dimana pemulihan kondisi ekonomi dan operasional setelah pandemi covid-19 berdampak langsung pada peningkatan realisasi anggaran. Dengan kondisi yang mulai normal, kegiatan-kegiatan yang tertunda pada tahun sebelumnya dapat dilaksanakan, dan penerimaan daerah juga mulai pulih. Pada tahun 2021-2023 capaian selalu diatas 95% menunjukkan kinerja yang baik. Fluktuasi kecil antara tahun-tahun ini (penurunan tipis) disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang tidak terlalu signifikan. Sementara di tahun 2024 capaian menurun menjadi 90% karena tahun pemilu sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk menghindari adanya konflik kepentingan.

Sedangkan untuk capaian kinerja program dan kegiatan rata-rata keberhasilan kegiatan dengan interval nilai 100% atau kegiatan dengan

capaian kinerja sangat baik. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kegiatan dengan capaian kinerja adalah:

a. Ketersediaan Sumber Daya
    1) Tersedianya Sumber Daya Aparatur
       Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan akan sangat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
    2) Tersedianya Anggaran
       Adanya dukungan APBD didalam pencapaian target-target indikator kinerja dan anggaran yang cukup serta pengelolaan keuangan yang efektif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
    3) Tersedianya Sumber Daya Material
       Ketersediaan peralatan, teknologi, dan bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan atau adanya dukungan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas
b. Komitmen yang tinggi dari kepala organisasi perangkat daerah yang diikuti seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di dalam pencapaian target indikator kinerja;
c. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo, partai politik dan organisasi perangkat daerah teknis terkait.

Sebagai bagian dari komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dokumen ini juga memuat Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan selama periode 2020 hingga 2024. Tabel berikut merinci indikator-indikator kinerja, target yang telah ditetapkan, dan realisasi capaian di setiap urusan. Data ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kemajuan yang telah dicapai, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan strategi perbaikan di masa mendatang. Berikut Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan selama periode 2020 hingga 2024 yang tersaji pada Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024:

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indikator Tujuan PD : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		92,22	90,53	91,93	90,53	Tujuan PD : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2	Indikator Tujuan PD : Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		100	100	100	100	Tujuan PD : Mewujudkan Sekretariat DPRD yang mampu mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD
3	Indikator Sasaran PD : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		92,22	90,53	91,93	90,53	Sasaran PD : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
4	Indikator Sasaran PD : Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD dan RKPD		100	100	100	100	Sasaran PD : Terselenggaranya dukungan Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD baik di tingkat pusat ataupun di daerah saat ini sangat dituntut untuk memiliki kinerja yang baik dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Selain penguatan dari sisi kelembagaan dan anggota Dewannya sendiri, kinerja anggota DPRD sangat didukung oleh Sekretariat DPRD. Karena kinerja Sekretariat DPRD yang baik akan sangat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Kondisi internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan, yaitu :

a. Kekuatan

Dukungan anggaran yang relatif besar. Dengan dukungan anggaran yang relatif besar, diharapkan dapat mendukung program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Adanya ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan.

Adanya Koordinasi yang cukup baik antara DPRD dengan Sekretariat DPRD

Adanya produk peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi Sekretariat DPRD. Hal ini dapat lebih mendukung peran aktif Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dikarenakan adanya dasar hukum yang melandasinya keberadaan Sekretariat DPRD.

b. Kelemahan

- Kompetensi SDM Sekretariat DPRD yang belum optimal. Hal ini, menyebabkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur menjadi tidak berjalan dengan baik yang akhirnya mengurangi kualitas kinerja pelayanan.
- Ketersediaan Sarana dan Prasarana, serta teknologi informasi yang masih kurang sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

c. Peluang

- Peningkatan standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD. Dengan adanya kebutuhan standar pelayanan yang tinggi, maka Sekretariat DPRD akan bekerja sebaik mungkin untuk memenuhi standar tersebut, yang pada akhirnya ini akan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD.
- Dukungan Sarana dan Prasarana Tekonologi Digitalisasi diharapkan dengan adanya sarana dan prasarana teknologi yang lengkap maka akan menunjang kinerja sekretariat DPRD dalam meningkatkan pelayanan tugas dan fungsi DPRD.
- Adanya potensi SDM para Anggota DPRD yang dapat dikembangkan. Dengan seringnya anggota DPRD mengikuti kegiatan bimtek, workshop atau sosialisasi. Maka diharapkan SDM anggota DPRD akan terus berkembang yang menjadikan anggota DPRD menjadi lebih berkompeten dan berwawasan. Dan hal ini diharapkan dapat ditularkan kepada aparatur Sekretariat DPRD sehingga dapat mendukung terciptanya aparatur SDM aparatur Sekretariat DPRD yang baik dan berkualitas yang dapat menunjang peningkatkan kinerja Sekretariat DPRD.
- Optimalisasi kegiatan Reses sebagai media aspirasi masyarakat, dengan adanya antusias masyarakat dalam memberikan aspirasi,

dapat mendorong kinerja Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada anggota DPRD, dimana anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang berwajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, maka Sekretariat DPRD harus memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

d. Tantangan

Dinamika kegiatan Dewan.

Profesionalitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD dengan cara Memberikan pelayanan yang professional terhadap pelaksanaan fungsi dan alat kelengkapan DPRD Perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi untuk membantu peningkatan kinerja, diharapkan output pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih maksimal.

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Optimalisasi Jaringan Komunikasi

Meningkatnya daya kritis masyarakat. Dengan semakin kritisnya masyarakat, yang menuntut pelayanan yang diberikan berjalan baik dan sempurna, walau terkadang pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, namun terus dipandang kurang.Hal ini dapat menurunkan semangat kerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau anggota DPRD

2.1.5. Kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD

Kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD adalah anggota DPRD. Sekretariat DPRD memiliki tugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Sekretariat DPRD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Sekretariat DPRD untuk lima tahun kedepan.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo serta Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, Sekretariat DPRD dituntut untuk dapat bersinergi dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD. Pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam bentuk fasilitasi-fasilitasi baik secara administratif maupun keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah :

a. Kompetensi SDM yang belum memadai.
b. Masih rendahnya kualitas administrasi
c. Adanya perubahan peraturan perundangan yang terjadi secara dinamis
d. Masih lemahnya koordinasi dengan lembaga lain
e. Rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai

2.2.2. Isu Strategis

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun hal-hal yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo :

a. Peningkatan efektivitas operasional melalui optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana, pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pengembangan sistem administrasi keuangan dan kesekretariatan yang efisien
b. Pemantauan Peraturan Perundang-undangan melalui Perluasan pemahaman terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi DPRD serta Penguatan kapasitas SDM dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan
c. Perbaikan Koordinasi dan Integrasi melalui Peningkatan kualitas koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan serta Peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan
d. Penerapan Reformasi Birokrasi melalui pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan yang berkualitas serta Peningkatan disiplin aparatur dan akuntabilitas kinerja

Tabel 2.4 Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Kompetensi SDM yang belum memadai	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas SDM melalui peningkatan kompetensi SDM Sekretariat DPRD termasuk pelatihan, pengembangan karir dan peningkatan kualitas SDM serta Penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan evaluasi kinerja secara berkala
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Masih rendahnya kualitas administrasi					Peningkatan efektivitas operasional melalui optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana, pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pengembangan sistem administrasi keuangan dan kesekretariatan yang efisien
	Adanya perubahan peraturan perundangan yang terjadi secara dinamis					Pemantauan Peraturan Perundang-undangan melalui Perluasan pemahaman terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi DPRD serta Penguatan kapasitas SDM dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan
	Masih lemahnya koordinasi dengan lembaga lain					Perbaikan Koordinasi dan Integrasi melalui Peningkatan kualitas koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan serta Peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan
	Rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai					Penerapan Reformasi Birokrasi melalui pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan yang berkualitas serta Peningkatan disiplin aparatur dan akuntabilitas kinerja

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut juga Visi Kabupaten Purworejo merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu mulai tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi Kabupaten Purworejo Tahun 2029 yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Visi dan misi Bupati Purworejo terpilih Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Purworejo tahun 2025 – 2029 adalah “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan 5 (lima) misi Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompeten, Produktif, dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Lingkungan Masyarakat yang Sehat, Berbudaya, dan Sejahtera.
2. Meningkatkan Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah.
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Inklusivitas ekonomi Melalui Peran Serta dan Kontribusi Pelaku Ekonomi Lokal yang Mendukung Ketahanan Pangan.
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Inovatif berbasis Teknologi Informasi.

Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo mengemban Misi ke-5 (kelima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Inovatif berbasis Teknologi Informasi”, yang mana berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo dalam membantu Bupati melaksanakan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Sejalan dengan visi dan misi dimaksud, Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo sebagai salah satu elemen dari sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purworejo. Kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang mendukung misi ke-5 (kelima) adalah:

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Fasilitasi Tugas DPRD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029

Berpedoman pada dokumen RPJMD 2025-2029 Kabupaten Purworejo Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2025-2029, yaitu: “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, Dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Untuk mewujudkan visi “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)” ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera.
2. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup san ketahanan bencana.
4. Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.
6. Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
8. Peningkatan pemerataan aksesibilitas dan kobektivitas infrastruktur wilayah;
9. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission;
10. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah;
11. Pemerataan dan inklusivitas perekonomian daerah;
12. Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo

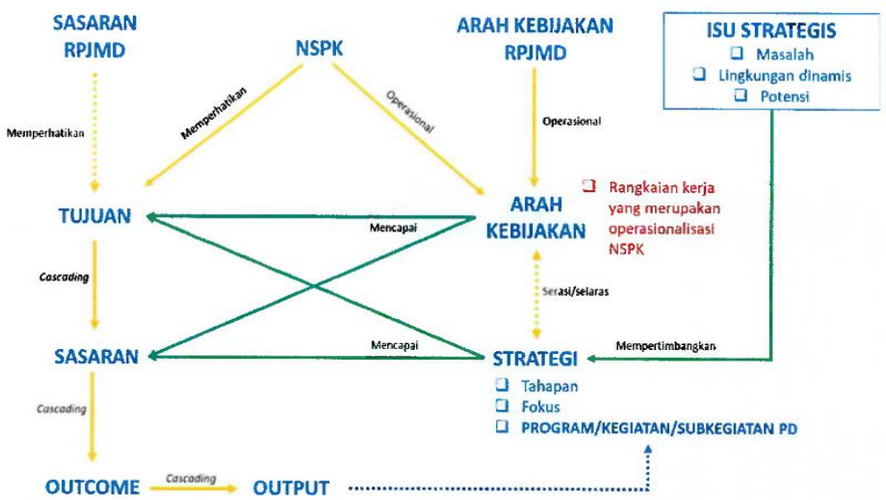

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No : 2 Tahun 2025

Maka berpedoman pada visi dan misi bupati yang sudah dituangkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dan berpedoman sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi” maka dirumuskan tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 selaras dengan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah: “ Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD dan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah “

Sementara itu sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan dan budaya literasi masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan untuk masyarakat;
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial budaya;
4. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah serta kualitas infrastruktur dasar permukiman;
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
6. Menurunnya risiko bencana;
7. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah yang berbasis pada sektor unggulan melalui peningkatan kapasitas dan ekosistem riset dan inovasi;
8. Meningkatnya kondusivitas ekosistem investasi daerah melalui kolaborasi lintas sektoral;
9. Menurunnya ketidakcukupan konsumsi pangan;
10. Meningkanya akses masyarakat terhadap lapangan kerja;
11. Menurunnya ketimpangan pengeluaran penduduk;
12. Meningkatnya pembangunan desa;
13. Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
14. Meningkatnya pelayanan publik yang responsif dan inovatif;
15. Meningkatnya kondusivitas wilayah.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

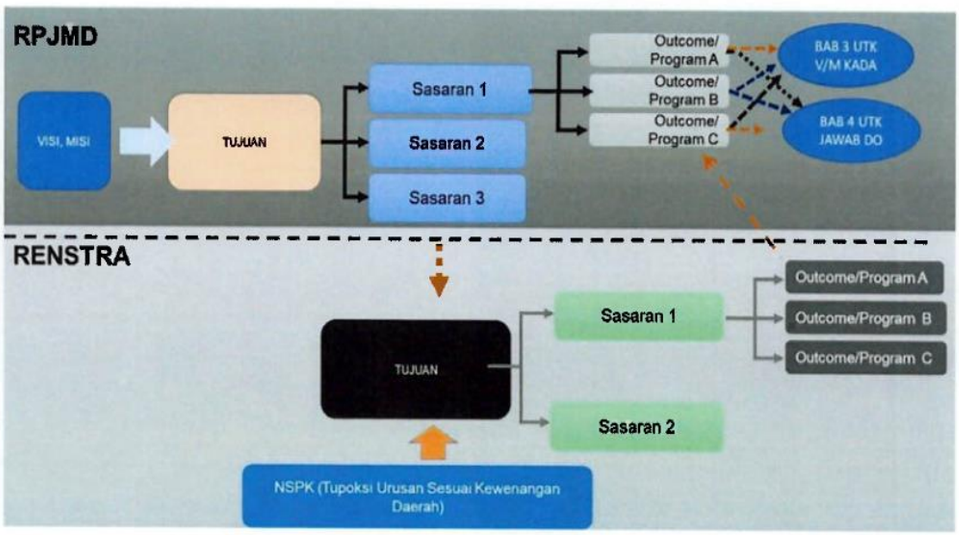

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No : 2 Tahun 2025

Dengan berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran daerah yang sudah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dan berpedoman sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD maka dirumuskan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD

Tabel 3.1 (TC. 25)
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD
Kabupaten Purworejo

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	11
S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD dan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	68.02	70.45	72.89	75.33	77.76	80.20	
			Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	80.93	81.00	81.50	82.00	82.50	83.00	
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	68.02	70.45	72.89	75.33	77.76	80.20	
		Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	80.93	81.00	81.50	82.00	82.50	83.00	

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

3.3.1. Strategi

Strategi merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif. Dalam pelaksanaannya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo berupaya meningkatkan integritas dan kredibilitas sehingga dapat bekerja secara professional dan efisien yang terkandung dalam peran strategis.

Adapun strategi yang akan dilakukan adalah memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan peraturan daerah, yaitu dengan :

a. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas SDM melalui peningkatan kompetensi SDM Sekretariat DPRD termasuk pelatihan, pengembangan karir dan peningkatan kualitas SDM serta Penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan evaluasi kinerja secara berkala
b. Meningkatkan efektivitas operasional melalui optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana, pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pengembangan sistem administrasi keuangan dan kesekretariatan yang efisien
c. Melaksanakan pemantauan Peraturan Perundang-undangan melalui Perluasan pemahaman terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi DPRD serta Penguatan kapasitas SDM dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan
d. Melaksanakan perbaikan koordinasi dan integrasi melalui peningkatan kualitas koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan serta Peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan
e. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan yang berkualitas serta Peningkatan disiplin aparatur dan akuntabilitas kinerja

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD
Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas inovasi, digitalisasi pemerintahan, dan kondusivitas wilayah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak	Meningkatkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas inovasi, digitalisasi pemerintahan, dan kondusivitas wilayah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak	Memantapkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas inovasi, digitalisasi pemerintahan, dan kondusivitas wilayah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak	Mewujudkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas inovasi, digitalisasi pemerintahan, dan kondusivitas wilayah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak	Meneguhkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas inovasi, digitalisasi pemerintahan, dan kondusivitas wilayah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak
Menguatkan sistem menejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

3.3.2. Lokus Rencana Strategis Perangkat Daerah

Lokus atau ruang lingkup Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 mencakup wilayah kerja dan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Penentuan lokus ini penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

Adapun lokus pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo diterapkan pada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo yang menjadi kelompok sasaran pelayanan serta pada pihak ekternal terkait yang mendukung pencapaian kinerja Sekretariat DPRD.

3.3.3 Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan rangkaian konsep dan dasar rencana yang telah disepakati pihak terkait dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan pada organisasi / Perangkat Daerah, atau petunjuk bagi setiap usaha agar tercapai kelancaran dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Adapun kebijakan pada Sekretariat DPRD adalah mengoptimalkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui peningkatan kualitas fasilitasi terhadap alat kelengkapan, yaitu dengan :

a. Meningkatan kompetensi SDM Sekretariat DPRD termasuk pelatihan, pengembangan karir dan peningkatan kualitas SDM
b. Menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan evaluasi kinerja secara berkala
c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana, pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pengembangan sistem administrasi keuangan dan kesekretariatan yang efisien
d. Melaksanakan perluasan pemahaman terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi DPRD
e. Melaksanakan penguatan kapasitas SDM dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan
f. Meningkatkan kualitas koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan serta meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan
g. Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan yang berkualitas serta meningkatkan disiplin aparatur dan akuntabilitas kinerja

Rumusan arah kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan 2026 : Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2026 yang dilaksanakan melalui aktifitas : Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas penguatan kualitas layanan penyelenggaraan fungsi DPRD dan Penguatan akuntabilitasi kinerja Perangkat Daerah	
		Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2027 yang dilaksanakan melalui aktifitas : Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas penguatan kualitas layanan penyelenggaraan fungsi DPRD dan Penguatan akuntabilitasi kinerja Perangkat Daerah	
		Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2028 yang dilaksanakan melalui aktifitas : Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas penguatan kualitas layanan penyelenggaraan fungsi DPRD dan Penguatan akuntabilitasi kinerja Perangkat Daerah	
		Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2029 yang dilaksanakan melalui aktifitas : Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas penguatan kualitas layanan penyelenggaraan fungsi DPRD dan Penguatan akuntabilitasi kinerja Perangkat Daerah	
		Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Arah Kebijakan 2030 yang dilaksanakan melalui aktifitas : Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas penguatan kualitas layanan penyelenggaraan fungsi DPRD dan Penguatan akuntabilitasi kinerja Perangkat Daerah	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka di Sekretariat DPRD terdiri
dari 2 program dan 18 kegiatan. Program yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran.

Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dan program yang tidak mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD

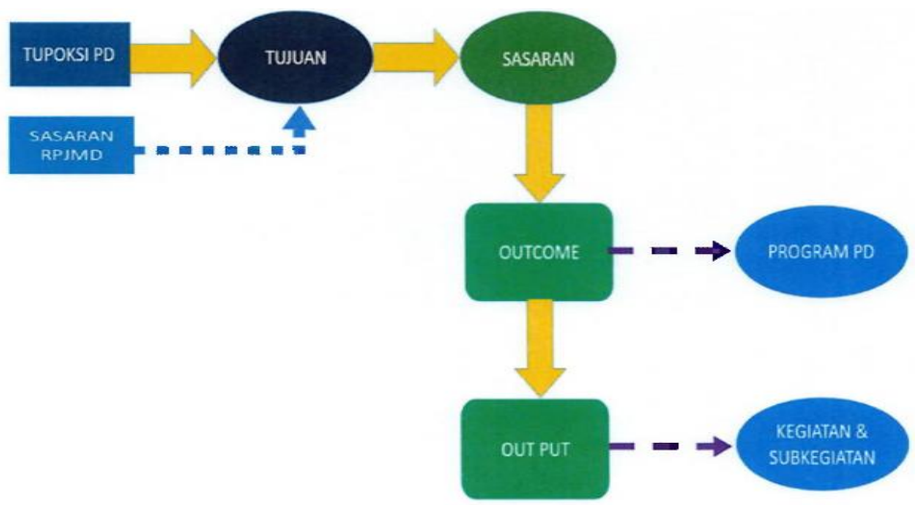

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No : 2 Tahun 2025

Adapun teknik merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	**Meningkatkan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Fungsi DPRD dan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**				**Nilai Sakip Perangkat Daerah**		
					Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD		
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			**Nilai Sakip Perangkat Daerah**		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja,pelayanan umum, kepegwaian, serta keuangan perangkat daerah		**Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
				Hasil : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Keluaran :Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Hasil : Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Keluaran : Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Hasil : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Hasil : Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Hasil : Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
						Penyediaan Bahan/Material	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Hasil : Diadakannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Keluaran : Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Hasil : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Keluaran :Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Hasil : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Keluaran : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Hasil : Terlayaninya Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Keluaran : Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	
						Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
						Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
				Hasil : Terlayaninya Administrasi DPRD	**Keluaran : Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD**	**Layanan Administrasi DPRD**	
						Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
		Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan fungsi DPRD			**Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD**		
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		**Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	
					Persentase Penetapan Ranperda Tahun N		
					Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
				Hasil : Terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	
						Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
						Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
						Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
						Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	
						Penyusunan Tata Tertib DPRD	
				Hasil : Terbahasnya Kebijakan Anggaran	**Keluaran : Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Kebijakan**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	
						Pembahasan KUA dan PPAS	
						Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
						Pembahasan APBD	
						Pembahasan APBD Perubahan	
						Pembahasan Laporan Semester	
						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
				Hasil : Terawasinya Penyelenggaraan Pemerintahan	**Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
						Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
						Pengawasan Penggunaan Anggaran	
						Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Hasil : Meningkatnya Kapasitas DPRD	**Keluaran : Jumlah Dokumen hasil Peningkatan Kapasitas**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	
						Orientasi DPRD	
						Pendalaman Tugas DPRD	
						Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
						Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
						Penyusunan Program Kerja DPRD	
						Publikasi dan Dokumentasi Dewan	
				Hasil : Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat	**Keluaran : Jumlah Dokumen hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	
						Kunjungan Kerja dalam Daerah	
						Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
						Pelaksanaan Reses	
				Hasil : Terlaksana dan Terawasinya Kode Etik DPRD	**Keluaran : Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	
						Penyusunan Kode Etik DPRD	
						Pengawasan Kode Etik DPRD	
				Hasil : Terbahasnya Kerja Sama Daerah	**Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kerja Sama**	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	
						Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	
						Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	
				Hasil : Terfasilitasinya Tugas DPRD	**Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	
						Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
						Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
						Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	

Adapun uraian SubKegiatan pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 4.2 (TC.27) berikut:

Tabel 4.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD	Angka	0	81		81,5		82		82,5		83		83			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
4.02	SEKRETARIAT DPRD						40.432.428.692		39.560.443.000		35.259.752.000		35.259.752.000		35.259.752.000				
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	40.432.428.692	100	39.560.443.000	100	35.259.752.000	100	35.259.752.000	100	35.259.752.000	100	Bagian Umum dan Keuangan	Kabupaten Purworejo	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	24	20.627.200	24	33.397.310	24	35.067.176	24	36.820.534	24	38.661.561	120			
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	15.902.200	22	16.697.310	22	17.532.176	22	18.408.784	22	19.329.223	103			
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	24	4.725.000	24	11.400.000	24	11.970.000	24	12.568.500	24	13.196.925	102			
4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	1	5.300.000	1	5.565.000	1	5.843.250	1	6.135.413	4			
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	45	45	4.183.825.543	45	3.987.314.055	45	4.186.679.758	45	4.396.013.746	45	4.615.814.433	45			
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Or/bln	35	32	4.155.979.543	32	3.958.075.755	32	4.155.979.543	32	4.363.778.520	32	4.581.967.446	160			
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	44	27.846.000	44	29.238.300	44	30.700.215	44	32.235.226	44	33.846.987	176			
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	11		11		11		11		11		55			
4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	0		21	39.750.000	21	43.725.000	21	48.097.500	21	52.907.250	84			
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	50	39.750.000	50	43.725.000	50	48.097.500	50	52.907.250	150			
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	359.857.500	8	399.050.375	8	419.002.895	8	439.953.039	8	461.950.689	8			
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	11.622.500	1	12.203.625	1	12.813.806	1	13.454.497	1	14.127.221	5			
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	21.992.700	1	23.092.335	1	24.246.952	1	25.459.299	1	26.732.264	5			
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	69.012.000	1	72.462.600	1	76.085.730	1	79.890.017	1	83.884.517	5			
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	23.433.000	1	24.604.650	1	25.834.883	1	27.126.627	1	28.482.958	5			
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	22.764.000	3	23.902.200	3	25.097.310	3	26.352.176	3	27.669.784	16			
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	46.312.300	1	48.627.915	1	51.059.311	1	53.612.276	1	56.292.890	5			
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	40.810.000	12	42.850.500	12	44.993.025	12	47.242.676	12	49.604.810	60			
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	123.911.000	12	130.106.550	12	136.611.878	12	143.442.471	12	150.614.595	60			
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	0	0	0	2	21.200.000	2	22.260.000	2	23.373.000	2	24.541.650	8			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diadakannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	unit	11	0		6	146.034.900	6	146.034.900	6	2.811.214.900	12	252.494.900	30			
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	4	2.558.720.000	0	0	4			
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	1	106.460.000	1	106.460.000	1			
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	1	146.034.900	1	146.034.900	1	146.034.900	1	146.034.900	21			
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	24	2.809.932.196	24	2.950.428.806	24	3.097.950.246	24	3.252.847.759	24	3.415.490.146	120			
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	366.124.000	12	384.430.200	12	403.651.710	12	423.834.296	12	445.026.010	60			
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	2.443.808.196	12	2.565.998.606	12	2.694.298.536	12	2.829.013.463	12	2.970.464.136	60			
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	9	1.010.405.000	9	1.060.925.250	9	1.113.971.513	9	1.169.670.089	9	1.228.153.593	50			
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	5	204.850.000	5	215.092.500	5	225.847.125	5	237.139.481	5	248.996.455	25			
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	25	488.990.000	25	513.439.500	25	539.111.475	25	566.067.049	25	594.370.401	125			
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38	50	24.750.000	50	25.987.500	50	27.286.875	50	28.651.219	50	30.083.780	250			
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	7	233.550.000	7	245.227.500	7	257.488.875	7	270.363.319	7	283.881.485	35			
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	28	58.265.000	28	61.178.250	28	64.237.163	28	67.449.021	28	70.821.472	140			
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlayaninya Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Laporan	3	3	29.676.737.853	3	28.566.161.074	3	23.721.070.220	3	20.484.071.627	3	22.442.163.481	24			
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Or / Bln	45	45	29.080.114.493	45	27.939.706.546	45	23.063.292.966	45	19.793.405.509	45	21.716.964.058	225			
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	1	1	531.428.000	1	557.999.400	1	585.899.370	1	615.194.339	1	645.954.055	5			
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	28	45	65.195.360	45	68.455.128	45	71.877.884	45	75.471.779	45	79.245.368	225			
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Terlayaninya Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD	Laporan	13	13	2.371.043.400	13	2.377.381.230	13	2.496.250.292	13	2.621.062.806	13	2.752.115.947	78			
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	1	1	126.756.600	1	133.094.430	1	139.749.152	1	146.736.609	1	154.073.440	5			
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	4	4	2.244.286.800	4	2.244.286.800	4	2.356.501.140	4	2.474.326.197	4	2.598.042.507	20			
2	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD		Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD	Angka	0	81		81,5		82		82,5		83		83			
4.02	SEKRETARIAT DPRD						22.447.872.500		22.589.724.000		22.447.873.000		22.802.549.000		28.162.829.000				
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	0	100	22.447.872.500	100	22.589.724.000	100	22.447.873.000	100	22.802.549.000	100	28.162.829.000	100	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian perundang - undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100		100		100		100		100		100	Bagian Legislasi dan Publikasi	Kabupaten Purworejo	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
			Persentase Penetapan Raperda Tahun N	%	100	100		100		100		100		100		100	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Kabupaten Purworejo	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	dokumen	25	26	1.803.122.000	26	1.893.278.100	26	1.987.942.006	26	2.087.339.106	26	2.191.706.061	130			
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	dokumen	1	1	11.130.000	1	11.686.500	1	12.270.825	1	12.884.366	1	13.528.585	5			
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	dokumen	12	15	991.473.000	15	1.041.046.650	15	1.093.098.983	15	1.147.753.932	15	1.205.141.628	75			
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	dokumen	5	5	282.977.000	5	297.125.850	5	311.982.143	5	327.581.250	5	343.960.312	25			
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dokumen	7	5	517.542.000	5	543.419.100	5	570.590.055	5	599.119.558	5	629.075.536	25			
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terbahasnya Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	dokumen	5	6	622.028.000	6	653.129.400	6	685.785.871	6	720.075.164	6	756.078.921	30			
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	dokumen	1	1	144.519.000	1	151.744.950	1	159.332.198	1	167.298.807	1	175.663.748	5			
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	dokumen	1	1	80.625.000	1	84.656.250	1	88.889.063	1	93.333.516	1	98.000.191	5			
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen	1	1	295.900.000	1	310.695.000	1	326.229.750	1	342.541.238	1	359.668.299	5			
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	dokumen	1	1	87.384.000	1	91.753.200	1	96.340.860	1	101.157.903	1	106.215.798	5			
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	dokumen	1	1	13.600.000	1	14.280.000	1	14.994.000	1	15.743.700	1	16.530.885	5			
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terawasinya Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	dokumen	7	7	68.665.000	7	75.498.250	7	79.273.164	7	83.236.821	7	87.398.662	35			
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	1	1	1.750.000	1	1.837.500	1	1.929.375	1	2.025.844	1	2.127.136	5			
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	1.750.000	1	1.837.500	1	1.929.375	1	2.025.844	1	2.127.136	5			
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1	1	1.875.000	1	1.968.750	1	2.067.188	1	2.170.547	1	2.279.074	5			
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	1	1	1.625.000	1	1.706.250	1	1.791.563	1	1.881.141	1	1.975.198	5			
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	1	2.450.000	1	2.572.500	1	2.701.125	1	2.836.181	1	2.977.990	5			
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1	0	0	1	3.400.000	1	3.570.000	1	3.748.500	1	3.935.925	5			
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	1	59.215.000	1	62.175.750	1	65.284.538	1	68.548.764	1	71.976.203	5			
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Meningkatnya Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen hasil Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen	5	5	1.842.249.000	5	2.768.137.810	5	2.906.544.701	6	3.334.021.936	5	3.204.465.532	26			
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	282.150.000	0	0	1			
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	1	1	1.026.000.000	1	1.077.300.000	1	1.131.165.000	1	1.187.723.250	1	1.247.109.413	5			
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	53	50	198.154.800	50	563.176.800	50	591.335.640	50	620.902.422	50	651.947.543	250			
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	84	84	287.461.200	84	301.834.260	84	316.925.973	84	332.772.272	84	349.410.885	420			
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	1	2.491.000	1	2.615.550	1	2.746.328	1	2.883.644	1	3.027.826	5			
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	1	1	328.142.000	1	823.211.200	1	864.371.760	1	907.590.348	1	952.969.865	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen	3	3	7.361.892.800	3	7.382.070.300	3	7.383.381.675	3	7.384.758.619	3	7.386.204.410	15			
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	1	0	0	1	19.875.000	1	20.868.750	1	21.912.188	1	23.007.797	3			
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	1	6.050.000	1	6.352.500	1	6.670.125	1	7.003.631	1	7.353.813	5			
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	3	7.355.842.800	3	7.355.842.800	3	7.355.842.800	3	7.355.842.800	3	7.355.842.800	15			
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksana dan Terawasinya Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	3	0		2	5.275.000	2	5.538.750	2	5.815.688	2	6.106.472	10			
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	0	0	1	2.650.000	1	2.782.500	1	2.921.625	1	3.067.706	3			
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	0	0	1	2.625.000	1	2.756.250	1	2.894.063	1	3.038.766	3			
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terbahasnya Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah	Dokumen	0	0		0		0		0		0		0			
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen	4	4	10.749.915.700	4	9.812.335.140	4	9.399.406.833	4	9.187.301.666	4	14.530.868.942	20			
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	1	1	8.284.033.700	1	7.342.416.340	1	6.928.429.393	1	6.715.212.654	1	10.284.033.700	5			
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	0	0	1	3.180.000	1	3.339.000	1	3.505.950	1	3.681.248	3			
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	1	1	17.136.000	1	17.992.800	1	18.892.440	1	19.837.062	1	20.828.915	5			
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	1	1	2.448.746.000	1	2.448.746.000	1	2.448.746.000	1	2.448.746.000	1	4.222.325.079	5			
Jumlah							**62.880.301.192**		**62.150.167.000**		**57.707.625.000**		**58.062.301.000**		**63.422.581.000**				

Selanjutnya untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah tidak dapat dilakukan tanpa dukungan yang kuat dari berbagai sektor. Oleh karena itu, implementasi kegiatan pendukung prioritas pembangunan dirancang secara strategis untuk mendukung pencapaian setiap target untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan secara keseluruhan. Berikut subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	
			Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Koordinasi dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
			Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Koordinasi dan penyusunan daftar data perangkat daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Koordinasi dan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
			Pelaksanaan penatausahaan dan penguijian/verifikasi Keuangan SKPD	Koordinasi dan penatausahaan dan penguijian/verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran perangkat daerah	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Pengadaan alat listrik dan penerangan kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan peralatan rumah tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan minum harian pegawai	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan barang cetak dan penggandaan dokumen	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan bahan bacaan media cetak	
			Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan ATK, benda pos, dan plakat	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi tamu DPRD	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi antar perangkat daerah dan pemerintah daerah	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pengelolaan arsip dinamis perangkat daerah	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan kendaraan dinas operasional atu lapangan	
			Pengadaan Mebel	Penyediaan mebel kantor dan rumah dinas	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan listrik, air, dan jasa komunikasi kantor dan rumah dinas	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa layanan umum kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel kantor dan rumah dinas Pimpinan DPRD	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor dan rumah dinas Pimpinan DPRD	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan rumah dinas Pimpinan DPRD	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan rumah dinas Pimpinan DPRD	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan rumah dinas Pimpinan DPRD	
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
			Layanan Administrasi DPRD		
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian perundang - undangan**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Menyusun dan membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah	
		Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Membahas Rancangan Peraturan Daerah	
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Menyelenggarakan Kajian Perundang-	
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Memfasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah	
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Menyusunan Tata Tertib DPRD	
			Pembahasan Kebijakan Anggaran		
			Pembahasan KUA dan PPAS	Membahas KUA dan PPAS	
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Membahas Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Pembahasan APBD	Membahasan APBD	
			Pembahasan APBD Perubahan	Membahas APBD Perubahan	
			Pembahasan Laporan Semester	Membahas Laporan Semester	
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Membahas Pertanggungjawaban APBD	
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Melaksanakan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Melaksanakan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Melaksanakan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Melaksanakan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber	Melaksanakan Pengawasan Urusan	
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Melaksanakan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	Melaksanakan Pengawasan Penggunaan	
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Melaksanakan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
			Peningkatan Kapasitas DPRD		
			Orientasi DPRD	Orientasi DPRD	
			Pendalaman Tugas DPRD	Workshop/Bimtek	
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Menyediakan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Menyediakan Tenaga Ahli Fraksi	
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Menyelenggarakan Hubungan Masyarakat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Menyusun Program Kerja DPRD	
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi		
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Melaksanakan pengawasan dalam Daerah	
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
			Pelaksanaan Reses	Melaksanakan Reses	
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		
			Penyusunan Kode Etik DPRD	Menyusun Kode Etik DPRD	
			Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	
			Pembahasan Kerja Sama Daerah		
			Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Memfasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	
			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Menyusun Bahan Komunikasi dan Publikasi	
			Fasilitasi Tugas DPRD		
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Menyusun Laporan Kinerja DPRD	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan	
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Memfasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	

4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis yang tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga turut mendukung visi pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk menyelaraskan program dan kegiatan dengan kebijakan strategis pusat dan provinsi, serta memberikan dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Lebih dari itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo berpartisipasi dan berkontribusi pada kegiatan unggulan daerah yang bertujuan untuk memajukan Kabupaten Purworejo, serta memastikan bahwa setiap upaya selaras dengan tujuan pembangunan yang terintegrasi, dengan memberikan dukungan terhadap Asta Cita Presiden, Program Delegasi Provinsi dan Program Prioritas Bupati melalui beberapa poin sebagai berikut:

a. Penjabaran Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional)

Tabel 4.4
Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita)

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
7	Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Set. DPRD	Set. DPRD

b. Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi)

Tabel 4.5
Program yang Mendukung Program Program Provinsi
(Program Delegasi Provinsi)

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026
13	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Peningkatan kinerja DPRD melalui peningkatan kapasitas DPRD	Set. DPRD	Set. DPRD	Peningkatan kinerja DPRD melalui peningkatan kapasitas DPRD

4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja utama (IKU) diperlukan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Berikut Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Dpr Kabupaten Purworejo

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
	Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD	Angka	80,93	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
	Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD	Angka	80,93	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD

Sementara itu Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah yang menggambarkan keberhasilan kinerja suatu perangkat daerah yang diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator kinerja lainnya yang digunakan yang diintegrasikan dalam rumusan yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Rumusan indikator kinerja disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja. Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo tidak mengemban Indikator Kinerja Kunci (nihil).

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Sekretariat Dpr Kabupaten Purworejo

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10
	NIHIL								

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap tahun.
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD dilakukan setiap tahun selama periode renstra.

b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
d. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan tersebut, Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode rencana.

Penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang selaras dengan dinamika pembangunan daerah, nasional, dan global, serta memperkuat integrasi perencanaan berbasis data, riset, dan inovasi. Bapperida memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara efektif, efisien, responsif, dan berbasis bukti, sehingga dokumen Renstra harus mampu memberikan arah yang jelas terhadap pengembangan fungsi perencanaan, penelitian, dan inovasi daerah.

Selain itu, penyusunan Renstra ini juga didasarkan pada visi Kepala Daerah Kabupaten Purworejo, yaitu Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri), khususnya kontribusi Bapperida dalam Misi ke-5, yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi; dan Mengembangkan riset dan inovasi untuk memperkuat daya saing daerah.

Renstra Bapperida 2025–2029 menjadi penting untuk menjamin kesinambungan arah pembangunan daerah, menyediakan acuan perencanaan bagi seluruh program dan kegiatan Bapperida, mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo, menyesuaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan riset terhadap perubahan kebijakan pusat termasuk transformasi digital, tata kelola pemerintahan, dan inovasi daerah, serta menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapperida setiap tahun dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dengan demikian, penyusunan Renstra Bapperida 2025–2029 merupakan kebutuhan strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, perencanaan yang berkualitas, dan riset yang berorientasi pada pemecahan masalah daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
24. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2024 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Bapperida 2025–2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Purworejo, serta memastikan konsistensi perencanaan

pembangunan daerah dengan arah kebijakan Kepala Daerah, RPJMD Kabupaten Purworejo, dan regulasi nasional.

2. Tujuan

Renstra ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menetapkan arah pembangunan Bapperida dalam lima tahun ke depan;
2. Menyusun tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
3. Menyediakan dasar perumusan program dan kegiatan yang efektif, terukur, dan berbasis kinerja;
4. Menjamin sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah;
5. Memperkuat perencanaan berbasis data, riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. BAB I PENDAHULUAN, yang memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan;
II. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, yang memaparkan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah meliputi Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah, serta Kelompok Sasaran Layanan, dan juga memuat Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, termasuk Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis;
III. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN, yang berisi Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, serta Strategi dan Arah Kebijakan;
IV. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, yang mencakup Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Dukungan terhadap Program Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah, serta Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
V. BAB V PENUTUP, yang memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bapperida Kabupaten Purworejo merupakan perangkat daerah yang melaksanakan dua urusan pemerintahan sekaligus, yaitu urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah serta urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi daerah. Pelaksanaan kedua urusan tersebut berlandaskan pada sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Bapperida. Melalui dasar hukum tersebut, Bapperida memperoleh mandat strategis untuk mengoordinasikan proses perencanaan pembangunan, mengintegrasikan perencanaan berbasis data, memfasilitasi penyusunan kebijakan pembangunan, mengembangkan inovasi daerah, serta melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

Sebagai institusi perencana dan motor penggerak inovasi daerah, Bapperida berperan penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo berjalan secara sistematis, terarah, efektif, dan berbasis bukti. Pelayanan yang diberikan mencakup penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan; koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah; pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral; fasilitasi riset dan pengembangan kebijakan; serta pembinaan ekosistem inovasi perangkat daerah dan masyarakat.

Gambaran pelayanan dalam bab ini disusun berdasarkan evaluasi kinerja lima tahun terakhir (2020–2024), analisis diagnostik, ketersediaan sumber daya, serta tinjauan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perencanaan, riset, dan inovasi daerah. Seluruh data dan informasi disajikan secara analitis melalui tabel, grafik, dan uraian yang merangkum temuan utama, sehingga tidak hanya memaparkan angka tetapi memberikan makna terhadap capaian dan ruang perbaikan yang perlu menjadi perhatian dalam periode Renstra 2025–2029. Selanjutnya, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kapasitas kelembagaan, subbab berikutnya

menguraikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi Bapperida Kabupaten Purworejo.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2024 Tanggal 29 november 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo menetapkan bahwa Bapperida Kabupaten Purworejo bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bapperida Kabupaten Purworejo mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Bapperida Kabupaten Purworejo terdiri atas :

1. Kepala Bapperida;
2. Sekretariat;
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
4. Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;
6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Tugas dan fungsi menurut struktur dan susunan organisasi Bapperida Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

   Kepala Bapperida bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida

2. Sekretariat

   Sekretariat bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bapperida

   Fungsi sekretariat adalah sebagai berikut :

   a. Pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
   b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
   c. Pengoordinasian pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
   d. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
   e. Pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi;
   f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah; dan
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bapperida sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi bagian Sekretariat Bapperida Kabupaten Purworejo dibantu oleh 1 (satu) Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

   a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
   b. Memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
   c. Melakukan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi; dan
   d. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah.

      Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

      a. Menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
      b. Menyelenggarakan administrasi umum;
      c. Menyelenggarakan pengadaaan barang milik Daerah;
      d. Menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
      e. Menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;

f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

g. Menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan dan hukum;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bertugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, sistem informasi pembangunan Daerah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, sistem informasi pembangunan Daerah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pendanaan ,analisa data dan informasi, sistem informasi pembangunan Daerah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapperida sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastuktur dan Kewilayahan

Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan bertugas melaksanakan penyiapan bahan program

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan.

Fungsi Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan sebagai berikut:

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;
d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bapperida sesuai dengan tugas dan fungsi.

5. Bidang Ridet dan Inovasi Daerah

Bidang riset dan Inovasi Daerah bertugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Invensi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut :

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Invensi dan Inovasi;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Invensi dan Inovasi ;
c. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan

teknologi di Daerah sebagai landasan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta lnvensi dan Inovasi di Daerah;

e. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Invensi dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;

f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;

g. Penyelenggaraan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;

h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Invensi dan Inovasi;

i. Pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapperida sesuai dengan tugas dan fungsi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Bagan struktur organisasi Bapperida Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1

Struktur organisasi Bapperida Kab. Purworejo

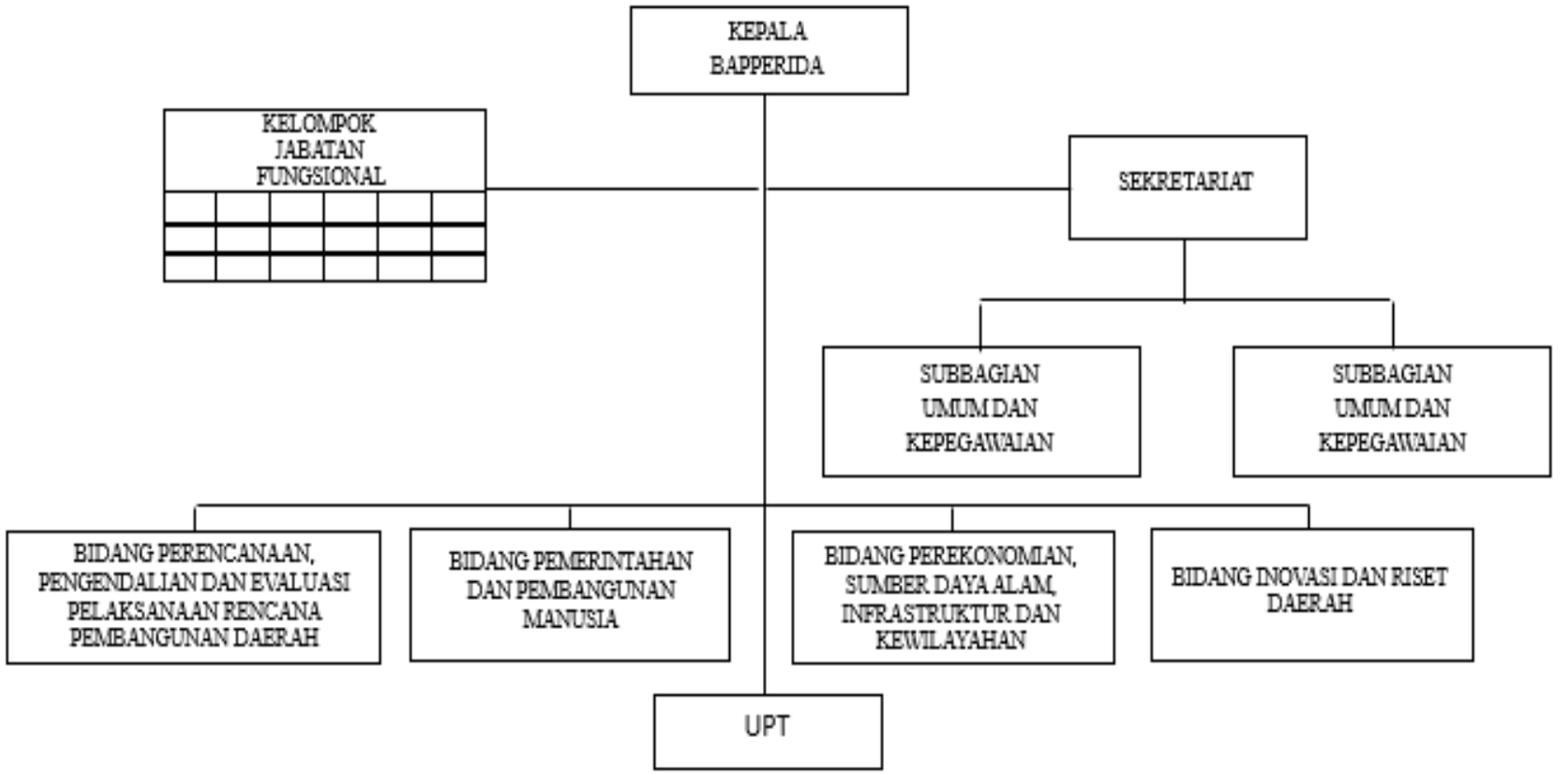

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Kondisi Kepegawaian

Kondisi kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo menunjukkan komposisi sumber daya manusia yang relatif proporsional dengan tugas dan fungsi kelembagaan. Secara keseluruhan terdapat 30 orang pegawai yang tersebar di lima bidang, yaitu Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah. Jumlah pegawai terbanyak berada di Sekretariat sebanyak 10 orang, disusul oleh Bidang Perencanaan sebanyak 7 orang, sedangkan bidang lainnya masing-masing memiliki antara 4–5 orang pegawai. Secara umum, jumlah pegawai ini masih terbatas, namun sudah mampu mendukung pelaksanaan fungsi strategis perencanaan, evaluasi, serta riset dan inovasi daerah.

Dari sisi kualifikasi pendidikan, sebanyak 10 orang (33%) pegawai berpendidikan S2, menunjukkan kapasitas akademik yang memadai dalam mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Sebanyak 9 orang (30%) berpendidikan S1, yang berperan penting dalam pelaksanaan teknis dan penyusunan dokumen perencanaan. Pegawai berpendidikan D3 berjumlah 4 orang (13%), dengan fungsi utama mendukung operasional teknis dan administrasi, sedangkan pegawai dengan pendidikan SMA berjumlah 7 orang (23%) dan berperan dalam pelayanan umum serta dukungan administratif. Proporsi ini menunjukkan bahwa kompetensi akademik Bapperida tergolong kuat, meskipun masih terdapat ketergantungan terhadap tenaga administrasi non-akademik tinggi.

Dari sisi jenis kelamin, terdapat 13 orang laki-laki (43%) dan 17 orang perempuan (57%). Distribusi ini menunjukkan keterlibatan perempuan yang cukup dominan, khususnya pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta Bidang SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan. Sementara itu, Sekretariat lebih banyak diisi oleh pegawai laki-laki, dan Bidang Perencanaan relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini menjadi modal penting bagi Bapperida untuk mewujudkan tata kelola dan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif gender.

Jika dilihat berdasarkan golongan kepangkatan, mayoritas pegawai berada pada Golongan III sebanyak 17 orang (57%), yang umumnya menduduki posisi fungsional dan pelaksana teknis dengan kompetensi profesional. Selanjutnya, Golongan IV berjumlah 8 orang (27%), didominasi oleh pejabat

dengan pengalaman dan peran strategis dalam pengambilan keputusan. Pegawai Golongan II berjumlah 4 orang (13%), sebagian besar mendukung pekerjaan teknis dan administratif. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur kepegawaian Bapperida solid di level menengah dan atas, mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta riset dan inovasi daerah.

Berdasarkan jabatan dan eselonisasi, Bapperida Kabupaten Purworejo memiliki struktur organisasi yang lengkap mulai dari pimpinan hingga staf pendukung. Terdapat 1 orang pejabat eselon II sebagai pimpinan tertinggi, didukung oleh 5 orang pejabat eselon III yang memimpin masing-masing bidang. Saat ini tidak terdapat pejabat eselon IV, sejalan dengan restrukturisasi birokrasi yang mendorong perampingan jabatan struktural. Dari sisi jabatan fungsional, terdapat 15 orang pejabat fungsional tertentu (JFT) sebagai pelaksana teknis utama, terutama di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, riset, dan inovasi. Selain itu, terdapat 9 staf pelaksana administrasi yang memastikan kelancaran operasional sehari-hari. Komposisi ini mencerminkan keseimbangan antara peran strategis, teknis, dan administratif, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Secara umum, struktur SDM Bapperida Kabupaten Purworejo didominasi oleh tenaga profesional berpendidikan tinggi dengan pengalaman kerja memadai. Hal ini menjadi potensi besar dalam mendorong transformasi kelembagaan menuju tata kelola perencanaan dan riset yang lebih adaptif, inovatif, dan kolaboratif di masa mendatang. Kondisi kepegawaian tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Bapperida Kabupaten Purworejo

No	Bidang	Tingkat Pendidikan				Jenis Kelamin		Golongan			Esselon/Jabatan					Jlh
		S2	S1	D3	SMA	L	P	II	III	IV	II	III	IV	JFT	STAF	
1	Sekretariat	3	2	1	4	7	3	3	4	3	1	1		2	6	10
2	Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3	2	1	1	3	3		4	3		1		5	1	7
3	Pemerintahan, Pembangunan Manusia	1	3		1	1	4		4	1		1		3	1	5
4	Sumber Daya Alam, Infrastruktur Kewilayahan	2	2			0	4		3			1		3		4
5	Riset dan Inovasi Daerah	1		2	1	2	3	1	2	1		1		2	1	4
Jumlah		10	9	4	7	13	17	4	17	8	1	5	0	15	9	30
Presentase		33 %	30 %	13 %	23 %	43 %	57 %	13 %	57 %	27 %						

Struktur SDM yang kuat di level menengah dan profesional ini menjadi potensi besar dalam mendorong transformasi Bapperida menuju perencanaan dan riset yang lebih adaptif, inovatif, dan kolaboratif

b. Aset Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bapperida Kabupaten Purworejo tidak hanya bergantung pada kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang baik berperan penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi, riset, dan inovasi daerah, serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bapperida.

Data inventaris sarana dan prasarana Bapperida Kabupaten Purworejo disajikan pada Tabel 2.2, yang mencakup peralatan kantor, kendaraan operasional, perangkat teknologi informasi, serta peralatan pendukung kegiatan administrasi dan riset. Secara umum, Bapperida memiliki 57 jenis aset barang dengan total lebih dari 300 unit peralatan, meliputi komputer, laptop, printer, AC, kendaraan dinas, hingga perangkat komunikasi dan multimedia.

Tabel 2.2. Data Inventaris Bapperida Kabupaten Purworejo

No	Nama Barang	Banyak	Kondisi Barang
1	Portable Generator Set	2	Baik
2	Stationary Water Pump	1	Baik
3	Mobil	5	Baik
4	Sepeda Motor	18	15 kondisi Baik, 3 Rusak berat
5	GPS	1	Baik
6	Scanner	4	Baik
7	Rak Penyimpanan	1	Baik
8	Lemari Besi/Metal	29	Baik
9	Lemari Kayu	12	Baik
10	Rak Besi	10	Baik
11	Rak Kayu	1	Baik
12	Filling Kabinet Besi	15	Baik
13	Peti Uang/Cash Box/Peti Box	1	Baik
14	Kardex Kayu	1	Baik
15	White Board	3	Baik
16	Mesin Absensi	1	Rusak Berat
17	Over Head Projector	1	Baik

No	Nama Barang	Banyak	Kondisi Barang
18	Tiang Lampu	1	Baik
19	Splitter	1	Rusak Berat
20	Kursi besi/metal	1	Baik
21	Sice	7	6 Baik, 1 Rusak Berat
22	Meja Rapat	17	Baik
23	Meja ½ Biro	45	40 Baik, 5 rusak Berat
24	Kursi Rapat	80	Baik
25	Kursi Tamu	4	Baik
26	Kursi Putar	12	10 Baik, 2 Rusak Berat
27	Kursi Lipat	55	Baik
28	Meja Komputer	5	Baik
29	Jam Elektronik	2	Baik
30	AC	15	Baik
31	Kompor Gas	1	Rusak Berat
32	Tabung Gas	1	Baik
33	Televisi	5	4 Baik, 1 Rusak Berat
34	Tape Recorder	1	Baik
35	Sound Sistem	3	Baik
36	Tustel	2	Baik
37	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik
38	Gambar presiden/wakil presiden	2	Baik
39	Tangga Alumunium	1	Baik
40	Mimbar/podium	1	Baik
41	Korden	1	Baik
42	Buffet Kayu	1	Baik
43	Facsimile	1	Baik
44	Alat Komunikasi Telephone lainnya	1	Baik
45	Wireless Amplifier	1	Baik
46	Alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya	1	Baik
47	Layar	2	Baik
48	PC Unit	4	Baik
49	Laptop	47	45 Baik, 2 Rusak Berat
50	Notebook	1	1 Baik, 1 Rusak Berat
51	Hard Disk	6	5 Baik, 1 Rusak Berat
52	CPU	1	Baik

No	Nama Barang	Banyak	Kondisi Barang
53	Printer	23	22 Baik, 1 Rusak Berat
54	Smartphone	5	Baik
55	Screen Projector	3	Baik
56	Microphone Wireless	2	Baik
57	CCTV	10	Baik

Berdasarkan tabel tersebut, mayoritas aset Bapperida dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi, riset, dan inovasi. Beberapa aset yang mengalami kerusakan berat antara lain sepeda motor (3 unit), kursi putar (2 unit), meja ½ biro (5 unit), mesin absensi (1 unit), kompor gas (1 unit), dan televisi (1 unit).

Meskipun proporsi barang rusak relatif kecil, namun perlu dilakukan perawatan rutin dan pembaruan berkala terhadap sarana dan prasarana yang sudah menurun kondisinya, terutama peralatan elektronik dan kendaraan dinas yang menjadi penunjang kegiatan lapangan. Selain itu, optimalisasi penggunaan perangkat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) menjadi penting untuk mendukung digitalisasi sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (2020–2024)

Kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2024 menunjukkan perkembangan positif sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.3 yang memuat pencapaian indikator tujuan, sasaran, dan program. Secara umum, sebagian besar indikator tujuan dan sasaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, khususnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang consistently melampaui target dengan capaian 103% pada tahun 2024. Sementara itu, nilai SAKIP memperlihatkan tren perbaikan bertahap, meskipun belum mencapai target penuh pada tahun 2024. Pada indikator pemanfaatan hasil penelitian atau pengembangan, capaian meningkat signifikan dari target 33% menjadi realisasi 44% di tahun 2024, menunjukkan penguatan orientasi pada kebijakan berbasis riset. Secara keseluruhan, Tabel 2.3 menegaskan bahwa kualitas pelayanan perencanaan, pengendalian, evaluasi, riset, dan inovasi semakin membaik, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan terutama pada konsistensi integrasi perencanaan dan tata kelola inovasi.

Selain indikator utama, Tabel 2.3 juga menunjukkan keberhasilan pada indikator sasaran perangkat daerah yang sebagian besar mencapai atau bahkan melampaui target. Indeks Perencanaan Pembangunan menunjukkan capaian di atas 99% setiap tahun, menunjukkan efektivitas penyusunan dokumen

perencanaan dan pemanfaatannya dalam kebijakan daerah. Demikian pula persentase peningkatan jumlah penelitian yang disampaikan kepada masyarakat mencapai capaian di atas 100% dari target, menunjukkan adanya penguatan diseminasi pengetahuan dan hasil riset. Indikator lain seperti kualitas dokumen sektoral pada berbagai bidang pembangunan tetap konsisten pada capaian 100%, menandakan bahwa fungsi-fungsi dasar perencanaan telah dijalankan secara optimal. Meskipun demikian, indikator berbasis riset seperti penyusunan kebijakan berbasis hasil penelitian, pemanfaatan HKI, dan jumlah inovasi masih menunjukkan capaian awal yang perlu diperkuat dalam periode Renstra mendatang.

Selanjutnya, Tabel 2.3 juga memperlihatkan bahwa beberapa indikator masih membutuhkan perhatian serius. Misalnya, nilai SAKIP Komponen Perencanaan yang hanya meningkat secara perlahan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kualitas perencanaan belum berkembang secara signifikan. Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti baru tercapai 39% pada 2024 setelah tidak terukur pada tahun-tahun sebelumnya, menggambarkan bahwa ekosistem pemanfaatan riset dalam kebijakan publik belum berjalan optimal. Dengan demikian, meskipun kinerja umum menunjukkan tren positif, masih terdapat ruang untuk memperkuat transformasi menuju perencanaan berbasis data dan inovasi yang lebih sistematis.

Tabel 2.3 . Pencapaian Kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
I	Tujuan PD																					
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				82,33	82,5	82,8	83	83.20	83.50		83	83	85				101%	103%	103%		
2.	Nilai SAKIP						65	67	68	79			64,47	65,58					99%	83%		
3.	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian atau pengembangan yang dijadikan rekomendasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah				22%	25%	28%	33%	35%	36%	22%	40%	28%	39%			100%	160%	100%	118%		
II	Sasaran																					
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				82,33	82,5	82,8	83	83.20	83.50		83	83	85				101%	103%	102%		
2.	Indeks Perencanaan Pembangunan						92%	93%	94%	95%			99,23%	99,27%					108%	107%		
3.	Peningkatan Jumlah Penelitian atau Pengembangan yang Disampaikan pada Masyarakat				87%	91%	92%	93,30%	94%	94,44%	87%	91,10%	92,85%	100%				106%	101%	107%		

Sementara itu, efektivitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program dapat dilihat dari Tabel 2.4, yang menampilkan data anggaran, realisasi, serta rasio capaian pada seluruh program Bapperida sepanjang 2021–2026. Secara umum, tingkat serapan anggaran menunjukkan performa yang sangat baik, dengan rata-rata realisasi berada di atas 95%. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta disiplin dalam manajemen anggaran. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah misalnya, menunjukkan tingkat serapan yang stabil antara 90—97%, menandakan pengelolaan administrasi, keuangan, dan sarana prasarana berjalan secara konsisten dan efisien.

Pada Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tabel menunjukkan capaian realisasi yang sangat tinggi, yakni berkisar antara 98–100% setiap tahun. Capaian ini menggambarkan bahwa program inti Bapperida dalam menghasilkan dokumen perencanaan, melakukan evaluasi, serta menyelaraskan pembangunan berjalan sangat baik dan sesuai target. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah juga menunjukkan konsistensi capaian hampir sempurna dengan rasio realisasi 98—100% tiap tahun, menandakan bahwa koordinasi lintas bidang pemerintahan telah dilakukan secara efektif, terutama pada bidang pemerintahan, sosial, perekonomian, SDA, dan infrastruktur kewilayahan.

Adapun Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, meskipun menunjukkan capaian realisasi yang baik (91–99%), tetap memerlukan peningkatan terutama pada pemanfaatan hasil riset. Tabel memperlihatkan bahwa subkegiatan penelitian di berbagai bidang telah terlaksana sesuai rencana, namun integrasi rekomendasi penelitian ke dalam kebijakan masih belum optimal. Konsistensi capaian anggaran pada program litbang ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap kegiatan riset dan inovasi telah berjalan baik, tetapi dampaknya terhadap penyusunan kebijakan memerlukan penguatan. Secara keseluruhan, Tabel 2.4 menegaskan bahwa tata kelola anggaran Bapperida berjalan efektif, efisien, dan mendukung tercapainya kinerja pelayanan.

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	442.534.081	6.003.593.601	4.465.331.886	4.512.822.727	4.368.949.786	4.999.175.918	399.102.272	5.816.803.289	4.240.025.196	4.333.450.728			90%	97%	95%	96%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.579.400	49.881.000	31.897.500	18.317.400	13.479.200	6.778.000	9.573.700	45.035.100	31.895.600	17.382.600			100%	90%	100%	95%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.590.700	3.945.301.474	3.693.710.330	3.791.648.255	3.476.311.470	3.937.428.108	11.590.400	3.817.503.381	3.489.045.052	3.631.314.389			100%	97%	94%	96%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		33.708.000	4.926.500	1.523.400	6.753.600	4.028.200		9.108.800	4.871.000	1.507.000				27%	99%	99%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.749.200	338.566.200	181.726.200	177.340.700	229.405.700	183.795.800	104.798.351	338.323.109	181.591.800	171.475.632			97%	100%	100%	97%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.035.696.800		38.004.400		355.262.000		1.027.341.534		35.880.000				99%		94%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.338.981	170.676.127	183.417.340	172.667.572	162.281.816	160.261.810	144.720.423	150.708.448	163.495.182	163.000.520			79%	88%	89%	94%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.275.800	429.764.000	369.654.016	313.321.000	480.718.000	351.622.000	128.419.398	428.782.917	369.126.562	312.890.587			99%	100%	100%	100%		
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	315.804.700	833.943.200	955.630.100	743.183.250	1.121.233.700	528.049.200	314.653.960	819.939.130	932.237.421	736.836.100			100%	98%	98%	99%		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	284.432.300	347.942.000	565.368.100	518.375.750	836.781.500	317.132.000	283.303.760	335.974.650	530.667.500	513.603.000			100%	97%	94%	99%		
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		150.730.000	118.452.200	95.356.100	128.452.200	67.809.800		150.301.100	115.956.621	94.915.900				100%	98%	100%		
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	31.372.400	335.271.200	271.809.800	129.451.400	156.000.000	143.107.400	31.350.200	333.663.380	285.613.300	128.317.200			100%	100%	105%	99%		
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	300.688.200	943.545.510	485.122.500	469.829.500	1.148.599.200	539.624.700	297.186.812	921.411.248	483.503.171	463.604.000			99%	98%	100%	99%		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	125.677.000	263.970.600	184.739.000	212.741.400	356.773.200	269.778.500	122.383.692	258.564.981	184.689.850	208.110.800			97%	98%	100%	98%		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	40.011.200	160.849.010	114.571.800	92.518.900	257.385.000	112.601.000	39.823.900	157.329.276	114.277.240	91.455.500			100%	98%	100%	99%		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	135.000.000	518.725.900	185.811.700	164.569.200	534.441.000	157.245.200	134.979.220	505.516.991	184.536.081	164.037.700			100%	97%	99%	100%		

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	159.355.000	1.099.735.800	1.324.816.000	1.166.516.500	1.181.708.400		159.312.310	1.088.663.315	1.210.953.862	1.147.625.740			100%	99%	91%	98%		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		31.405.200	81.066.000	184.251.700	208.202.600			26.150.800	68.397.150	181.751.950				83%	84%	99%		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		276.925.000	371.050.000	276.130.700	96.316.900			276.003.460	342.746.100	272.355.500				100%	92%	99%		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		218.210.200	280.700.000	374.567.600	481.584.500			218.155.990	256.628.600	368.370.600				100%	91%	98%		
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	159.355.000	573.195.400	592.000.000	331.566.500	395.604.400		159.312.310	568.353.065	543.182.012	325.147.690			100%	99%	92%	98%		
	Jumlah	1.218.381.981	8.907.143.219	7.230.900.486	6.892.351.977	7.820.491.086	6.066.849.818	1.170.255.354		6.866.719.650	6.681.516.568			96%		95%	97%		

Tabel 2.5 menyajikan evaluasi capaian pelaksanaan urusan Bapperida pada periode 2020–2024, yang menunjukkan tren perbaikan pada sebagian besar indikator strategis. Nilai SAKIP Perangkat Daerah meningkat dari 62,3 pada tahun 2020 menjadi 68 pada tahun 2024, mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja. Demikian pula nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja mengalami peningkatan meskipun berjalan lambat, dari 20,3 menjadi 21,1. Pada sisi inovasi, nilai Kapabilitas Inovasi meningkat secara konsisten mulai tahun 2021 hingga mencapai 3,08 pada tahun 2024, menunjukkan perkembangan ekosistem inovasi dan ruang kreatif di lingkungan Bapperida.

Pada indikator sasaran perangkat daerah, tabel menunjukkan capaian penuh pada sejumlah variabel seperti kualitas dokumen perencanaan daerah dan dokumen sektoral, yang semuanya konsisten berada pada angka 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa Bapperida mampu menjalankan fungsi teknokratis perencanaan secara efektif dan sesuai standar. Namun demikian, indikator berbasis riset dan inovasi seperti persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, pemanfaatan HKI, dan jumlah inovasi daerah baru menunjukkan capaian pada tahun 2024. Walaupun capaian tersebut merupakan langkah awal yang positif, tingkat adopsinya masih rendah dan perlu diperkuat dengan mekanisme tindak lanjut yang lebih sistematis.

Evaluasi pada Tabel 2.5 juga menegaskan adanya beberapa tantangan strategis yang harus diatasi dalam periode Renstra berikutnya. Rendahnya capaian pada indikator riset dan inovasi menunjukkan bahwa transformasi menuju tata kelola berbasis data belum sepenuhnya terstruktur. Selain itu, meskipun capaian program penunjang dan perencanaan daerah sangat kuat, integrasi hasil penelitian ke dalam dokumen kebijakan masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Temuan ini menjadi dasar penting untuk merumuskan strategi, arah kebijakan, dan penguatan program pada bab selanjutnya agar kinerja Bapperida semakin responsif, adaptif, dan berbasis bukti.

Tabel 2.5. Evaluasi Capaian Pelakasanaan Urusan Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Indikator Tujuan PD						
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	62,3	63,1	64,5	65,6	68	Tahun 2020 nilai SAKIP berada pada angka 62,3, kemudian naik menjadi 63,1 di tahun 2021. Peningkatan berlanjut dengan capaian 64,5

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
							pada tahun 2022, 65,6 pada tahun 2023, dan mencapai 68 pada tahun 2024. Kenaikan nilai ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, termasuk perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja.
2	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	20,3	20,5	20,6	20,8	21,1	Ada tren naik, meskipun sangat lambat. Artinya aspek perencanaan kinerja masih stagnan dan memerlukan inovasi atau perbaikan substansi perencanaan agar lebih progresif.
3	Kapalitas Inovasi	-		1,54	2,23	3,08	Kapabilitas Inovasi menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 nilai capaian berada pada angka 1,54, kemudian meningkat menjadi 2,23 pada tahun 2022, dan terus mengalami kenaikan hingga 3,08 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perkembangan yang konsisten dalam penguatan kapasitas inovasi perangkat daerah, baik melalui pengembangan riset, fasilitasi hak kekayaan intelektual, maupun dukungan terhadap ekosistem inovasi daerah.
	Indikator Sasaran PD						
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah	62,3	63,1	64,5	65,6	68	Tahun 2020 nilai SAKIP berada pada angka 62,3, kemudian naik menjadi 63,1 di tahun 2021. Peningkatan berlanjut dengan capaian 64,5 pada tahun 2022, 65,6 pada tahun 2023, dan mencapai 68 pada tahun 2024. Kenaikan nilai ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, termasuk perencanaan,

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
							pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja.
5	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	20,3	20,5	20,6	20,8	21,1	Ada tren naik, meskipun sangat lambat. Artinya aspek perencanaan kinerja masih stagnan dan memerlukan inovasi atau perbaikan substansi perencanaan agar lebih progresif.
6	Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti	0	0	0	0	39	Dari 2020 hingga 2023 capaian belum terukur, sedangkan pada tahun 2024 indikator ini mulai terealisasi dengan capaian 39%. Ini menandakan bahwa sebagian rekomendasi berbasis riset telah direspons dalam kebijakan, namun tingkat tindak lanjut masih relatif rendah dan perlu diperkuat pada tahun-tahun berikutnya.
7	Indeks Inovasi Daerah	-	47,7	56	48,8	61,7	Meskipun ada fluktuasi, tren jangka menengahnya positif. Hal ini menunjukkan adanya upaya penguatan inovasi, tetapi masih perlu konsistensi dan keberlanjutan program agar tidak terjadi penurunan di tahun-tahun tertentu.
	Indikator Program						
7	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	100	100	100	100	Capaian konsisten 100% pada 2020–2024 menunjukkan dukungan operasional pemerintahan berjalan optimal.
8	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Daerah	100	100	100	100	100	Hasil 100% tiap tahun menggambarkan dokumen telah sesuai standar dan dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.
9	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	100	100	Konsistensi capaian 100% menunjukkan perencanaan sektor-sektor strategis ini berjalan sesuai target dan mendukung pembangunan ekonomi serta pengelolaan wilayah.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
10	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan	100	100	100	100	100	Indikator ini baru terealisasi penuh sejak 2022 dengan capaian 100% pada 2022–2024, yang menandakan adanya penguatan fasilitasi inovasi di daerah.
	Persentase penyusunan Kebijakan berbasis hasil riset	0	0	0	0	39	Persentase penyusunan kebijakan berbasis hasil riset mencapai 39%, yang menggambarkan mulai terbangunnya budaya perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data serta hasil penelitian
	Tingkat Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	3,06	Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tercatat sebesar 3,06%, yang menunjukkan adanya pemanfaatan awal inovasi dan kekayaan intelektual sebagai bagian dari penguatan daya saing daerah
	Jumlah inovasi yang dimiliki daerah	0	0	0	0	175	Jumlah inovasi yang dimiliki daerah mencapai 175 inovasi, menjadi capaian penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi daerah, serta mendukung pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan, Bapperida Kabupaten Purworejo menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensi, baik dari aspek kelembagaan, tata kelola, maupun inovasi kebijakan. Tantangan utama terletak pada konsistensi kinerja organisasi, khususnya dalam menjaga stabilitas dan peningkatan nilai SAKIP. Meskipun terjadi peningkatan nilai dari 62,3 pada tahun 2020 menjadi 68 pada tahun 2024, fluktuasi antar tahun menunjukkan bahwa integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan belum sepenuhnya solid. Kondisi ini menandakan perlunya penguatan sistem manajemen kinerja secara menyeluruh melalui penerapan perencanaan berbasis hasil (result-based planning),

monitoring yang lebih sistematis, serta evaluasi kinerja berkelanjutan yang mampu mendorong konsistensi mutu tata kelola.

Tantangan lain yang menonjol adalah masih lemahnya kapabilitas inovasi dan pemanfaatan riset dalam kebijakan pembangunan daerah. Indikator litbang dan inovasi baru menunjukkan capaian pada tahun 2024, dengan tingkat tindak lanjut rekomendasi kebijakan berbasis riset sebesar 39%. Sebelumnya, selama 2020–2023, indikator ini belum terukur secara sistematis. Begitu pula indikator pemanfaatan hak kekayaan intelektual (HKI) dan jumlah inovasi daerah yang belum menunjukkan perkembangan berarti. Kondisi ini menggambarkan bahwa ekosistem inovasi daerah masih berada pada tahap awal dan membutuhkan dukungan kelembagaan, regulasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk memperkuat budaya evidence-based policy dan menjadikan riset sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan publik.

Di sisi lain, Bapperida juga memiliki peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan perencanaan dan riset. Konsistensi capaian 100% pada indikator program seperti pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan dan kualitas dokumen perencanaan menunjukkan bahwa proses dan standar pelayanan teknokratis telah berjalan dengan baik. Kondisi ini menjadi modal institusional untuk memperkuat integrasi antara perencanaan pembangunan, penelitian, dan inovasi. Selain itu, peningkatan Indeks Inovasi Daerah dari 47,7 pada tahun 2021 menjadi 61,7 pada tahun 2024 menunjukkan adanya kemajuan yang dapat diperluas melalui program inovasi yang lebih terstruktur, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

Tantangan berikutnya adalah lambatnya peningkatan kualitas perencanaan kinerja. Meskipun nilai komponen Perencanaan SAKIP meningkat dari 20,3 menjadi 21,1, laju perbaikannya masih rendah. Hal ini menandakan perlunya pembaruan pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan agar lebih adaptif terhadap isu-isu strategis pembangunan, keselarasan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta kontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Meski demikian, meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya kebijakan berbasis data menjadi peluang besar bagi Bapperida untuk memperkuat perannya sebagai think tank daerah yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah pengembangan pelayanan Bapperida ke depan perlu difokuskan pada tiga aspek strategis utama. Pertama, penguatan kelembagaan dan sistem manajemen kinerja yang mencakup integrasi perencanaan–penganggaran–pelaporan secara menyeluruh. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana, peneliti, dan inovator

daerah melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan fungsional, dan peningkatan kompetensi analitis. Ketiga, pengintegrasian sistem informasi pembangunan dan riset daerah untuk mendukung tata kelola data yang terbuka, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola perencanaan dan riset daerah yang lebih efektif, inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan Kabupaten Purworejo yang adaptif terhadap perubahan global dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Sebagai tindak lanjut dari capaian kinerja serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, Bapperida Kabupaten Purworejo memiliki kelompok sasaran layanan yang mencakup para pemangku kepentingan strategis, baik internal maupun eksternal, yang berperan dalam keseluruhan proses perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta penelitian dan pengembangan daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini penting untuk memastikan bahwa seluruh layanan Bapperida tersampaikan secara tepat, efektif, dan mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu, inovatif, dan berbasis bukti.

Pertama, kelompok sasaran utama adalah Pemerintah Daerah internal, yang meliputi Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Kelompok ini merupakan pengguna utama hasil layanan perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta kajian riset dan inovasi yang disusun oleh Bapperida. Layanan tersebut mencakup penyediaan dokumen strategis seperti RPJMD, Renstra PD, Renja PD, RKPD, laporan evaluasi kinerja, hingga rekomendasi kebijakan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan program pembangunan daerah. Dengan demikian, kualitas kolaborasi internal antardinas menjadi faktor penting dalam efektivitas pelayanan Bapperida.

Kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat menjadi sasaran layanan dalam konteks koordinasi vertikal dan penyelarasan dokumen perencanaan. Melalui Bapperida, dilakukan fasilitasi integrasi antara perencanaan daerah dengan kebijakan nasional maupun provinsi, termasuk dalam penyusunan RKPD, RKP, dan dokumen tematik lainnya. Sinergi ini krusial untuk menjaga konsistensi arah pembangunan daerah sekaligus memastikan Kabupaten Purworejo berada dalam koridor kebijakan pembangunan jangka menengah dan panjang tingkat provinsi maupun nasional.

Ketiga, masyarakat umum menjadi kelompok sasaran yang memperoleh manfaat tidak langsung dari peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta hasil riset dan inovasi

yang dilaksanakan oleh Bapperida. Masyarakat merasakan dampak dari kebijakan yang dirancang secara partisipatif, inklusif, dan berbasis data, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun penguatan daya saing ekonomi daerah. Dalam konteks ini, masyarakat juga menjadi sumber umpan balik dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan, khususnya melalui mekanisme partisipasi publik dalam Musrenbang, survei kepuasan masyarakat, dan forum konsultasi publik.

Keempat, mitra pembangunan dan dunia usaha—meliputi perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku industri, komunitas inovasi, dan investor—juga merupakan kelompok sasaran penting. Mitra ini berperan dalam mendukung ekosistem riset dan inovasi daerah melalui kolaborasi multipihak (pentahelix collaboration). Bapperida memfasilitasi kerja sama dalam pemanfaatan hasil kajian, pengembangan teknologi, hingga hilirisasi inovasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Bapperida Kabupaten Purworejo mencerminkan prinsip kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan unsur pendukung lainnya. Penetapan kelompok sasaran ini memperkuat relevansi layanan Bapperida dengan tuntutan pembangunan yang efektif, inklusif, inovatif, dan berorientasi hasil, sekaligus menjadi dasar bagi penguatan peran Bapperida dalam pembangunan daerah pada periode perencanaan berikutnya.

2.1. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja serta analisis pelayanan yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya, terdapat sejumlah permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan pelayanan Bapperida Kabupaten Purworejo yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan periode 2025–2029. Permasalahan ini terutama terkait aspek akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Pertama, akuntabilitas kinerja perangkat daerah masih menghadapi tantangan. Meskipun nilai SAKIP terus menunjukkan tren peningkatan dari 62,3 pada tahun 2020 menjadi 68 pada tahun 2024, fluktuasi capaian antar tahun mencerminkan belum stabilnya integrasi sistem manajemen kinerja. Ketidakterpaduan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi membuat peningkatan kinerja tidak terjadi secara konsisten. Kondisi ini menegaskan perlunya perbaikan menyeluruh dalam kerangka manajemen kinerja berbasis hasil (result-based management).

Kedua, kualitas perencanaan pembangunan daerah masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Meskipun tingkat penyelesaian dokumen perencanaan selalu mencapai 100% setiap tahun, substansinya masih cenderung administratif dan belum optimal berbasis analisis data, hasil evaluasi mendalam, maupun indikator pembangunan strategis seperti SDGs dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini menuntut peningkatan kapasitas aparatur perencana dalam menyusun dokumen yang lebih integratif, responsif terhadap isu strategis, dan benar-benar berorientasi hasil.

Ketiga, pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah dalam perumusan kebijakan publik belum berjalan optimal. Persentase rekomendasi kebijakan berbasis riset yang ditindaklanjuti baru mencapai 39% pada tahun 2024, sementara indikator lain seperti penyusunan kebijakan berbasis riset dan pemanfaatan HKI belum mengalami kemajuan berarti selama 2020–2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil penelitian belum terintegrasi secara sistematis ke dalam siklus perencanaan pembangunan, sehingga memerlukan strategi peningkatan riset terapan, optimalisasi diseminasi hasil kajian, dan perluasan kolaborasi lintas sektor.

Keempat, kapabilitas inovasi daerah masih tergolong rendah dan baru mulai menunjukkan perkembangan pada tahun 2024 dengan nilai 3,08. Rendahnya hilirisasi hasil riset, minimnya kolaborasi multipihak, serta terbatasnya ekosistem inovasi yang kondusif menjadi faktor penghambat yang perlu segera ditangani. Kapabilitas inovasi yang kuat sangat diperlukan agar Purworejo mampu mendorong efisiensi pembangunan, peningkatan daya saing daerah, serta penciptaan kebijakan publik yang lebih kreatif, adaptif, dan berbasis bukti.

2.2.2. Isu strategis

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2020–2024, analisis tantangan dan peluang pemgembangan pelayanan, serta identifikasi permasalahan pada subbab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah isu strategis yang akan menjadi dasar penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam Renstra Bapperida 2025–2029. Isu strategis ini disusun dengan memperhatikan potensi kelembagaan, permasalahan aktual, isu KLHS yang relevan, serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.6.

Secara umum, capaian kinerja Bapperida menunjukkan tren positif, terutama pada aspek akuntabilitas dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan. Namun demikian, beberapa indikator menunjukkan perlunya transformasi tata kelola agar pelayanan perencanaan, riset, dan inovasi mampu menjawab tantangan pembangunan masa depan. Hal ini meliputi kebutuhan penguatan perencanaan berbasis data, peningkatan kualitas riset terapan,

konsistensi integrasi perencanaan–penganggaran–pelaporan, serta percepatan pengembangan ekosistem inovasi daerah.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat lima isu strategis utama yang menjadi fokus pengembangan Bapperida Kabupaten Purworejo untuk periode perencanaan 2025–2029.

1. Kualitas perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berbasis data terintegrasi.
   Permasalahan ini muncul karena proses perencanaan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi pembangunan serta integrasi data sektoral. Dari perspektif keberlanjutan, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi masih perlu diperkuat. Sementara itu, dinamika global dan nasional terus mendorong transformasi tata kelola yang adaptif, responsif, dan digital. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, dan selaras dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan daerah menjadi isu strategis yang harus ditangani.
2. Pemanfaatan hasil riset dalam kebijakan publik masih terbatas.
   Kapabilitas riset dan inovasi masih rendah, dengan hilirisasi yang belum optimal. Hal ini terlihat dari tingkat tindak lanjut rekomendasi kebijakan berbasis riset yang baru mencapai 39% pada tahun 2024. Meskipun jejaring kerja sama telah tersedia, mekanisme pemanfaatan hasil kajian belum berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola riset, peningkatan kapasitas sumber daya manusia peneliti dan inovator daerah, serta percepatan pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.
3. Kapasitas inovasi daerah belum stabil dan belum berkelanjutan.
   Fluktuasi Indeks Inovasi Daerah selama periode 2021–2024 menunjukkan bahwa inovasi masih bersifat sporadis. Keterbatasan anggaran riset, rendahnya hilirisasi, serta koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal menjadi faktor penghambat. Sementara itu, tuntutan inovasi sektor publik semakin meningkat dalam dinamika nasional dan regional. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan ekosistem inovasi berbasis kolaborasi multipihak (pentahelix) serta peningkatan kapasitas inovator daerah.
4. Integrasi sistem informasi pembangunan dan pengelolaan data belum optimal.
   Walaupun telah tersedia sistem informasi pembangunan dan walidata sektoral, pemanfaatannya belum maksimal karena pembaruan data yang belum konsisten, sinkronisasi antarperangkat daerah yang masih lemah, serta keterbatasan kapasitas fiskal. Di tengah era digitalisasi pemerintahan, perencanaan membutuhkan data yang lebih akurat, mutakhir, dan mudah diakses. Oleh karena itu, optimalisasi integrasi data sektoral, penguatan fungsi walidata, dan pemanfaatan sistem

informasi pembangunan menjadi isu strategis penting untuk mendukung perencanaan berbasis bukti.

5. Kapasitas sumber daya manusia perencana, peneliti, dan inovator masih perlu ditingkatkan.
   Meskipun telah tersedia aparatur fungsional perencana dan peneliti, kompetensi teknis dan kemampuan inovasi masih perlu diperkuat untuk menjawab tuntutan birokrasi digital dan tata kelola berbasis kinerja. Transformasi digital menuntut SDM pemerintah yang adaptif, kolaboratif, dan memiliki kemampuan analitis yang kuat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia perencana, peneliti, dan inovator merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan transformasi kelembagaan yang efektif.

Kelima isu strategis tersebut menjadi dasar perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Bapperida Kabupaten Purworejo dalam periode Renstra 2025–2029.

Kelima isu strategis tersebut menjadi kerangka dasar yang akan menentukan arah kebijakan Bapperida Kabupaten Purworejo dalam periode Renstra 2025–2029 dan dituangkan secara rinci dalam Tabel 2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah.

Tabel 2.6. Isu Strategis Bapperida Kabupaten Purworejo

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kedudukan Bapperida sebagai koordinator perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah.	Kualitas perencanaan belum sepenuhnya berbasis data terintegrasi.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif.	Perlu peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, serta selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah
Tersedianya aparatur perencana dan fungsional peneliti/inovasi.	Kapabilitas riset dan inovasi masih terbatas, hilirisasi rendah.					Diperlukan penguatan tata kelola riset, peningkatan kapasitas SDM peneliti dan inovator daerah, serta pemanfaatan hasil kajian untuk mendukung kebijakan publik.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Regulasi perencanaan pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional.	Akuntabilitas kinerja PD masih menghadapi tantangan dalam konsistensi perencanaan–penganggaran–pelaporan.					Diperlukan penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan untuk mendukung efektivitas pembangunan.
Sistem informasi pembangunan daerah dan walidata sektoral yang mulai berkembang.	Keterbatasan kapasitas fiskal untuk mendukung riset dan inovasi.					Perlu optimalisasi sistem informasi pembangunan dan penguatan data sektoral agar menjadi dasar perencanaan berbasis bukti (data-driven planning).
Dukungan jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan komunitas inovasi.	Koordinasi dan sinkronisasi antar-OPD belum optimal.					Perlu memperluas jejaring dan kolaborasi multipihak (pentahelix) untuk memperkuat ekosistem inovasi dan mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
						Perlu penguatan kapasitas sumber daya manusia perencana, peneliti, dan inovator daerah guna menghadapi tuntutan birokrasi digital dan tata kelola pembangunan berbasis kinerja.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam dokumen ini disusun berdasarkan hasil analisis menyeluruh terhadap kondisi pelayanan, capaian kinerja, serta tantangan dan peluang pengembangan perencanaan, penelitian, dan inovasi daerah. Seluruh hasil kajian sebelumnya memberikan gambaran komprehensif mengenai kebutuhan penguatan tata kelola perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas riset dan inovasi, serta perbaikan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi. Oleh karena itu, arah kebijakan jangka menengah Bapperida dirancang untuk menjawab kebutuhan transformasi tersebut secara sistematis dan terukur.

Analisis terhadap capaian lima tahun terakhir menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian, antara lain perlunya pemanfaatan data yang lebih optimal dalam perencanaan, peningkatan kapasitas penerapan hasil riset dalam kebijakan publik, penguatan ekosistem inovasi daerah, serta peningkatan kompetensi aparatur perencana, peneliti, dan inovator. Isu-isu tersebut menjadi landasan utama dalam menetapkan tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai pada periode 2025–2029, sehingga arah pembangunan yang dirancang dapat lebih responsif terhadap dinamika internal maupun eksternal.

Dengan dasar tersebut, bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pembangunan, didukung oleh strategi dan arah kebijakan yang konkret dan operasional. Rumusan ini diharapkan menjadi pedoman strategis bagi Bapperida dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi, riset, dan inovasi secara lebih efektif, adaptif, dan kolaboratif, sehingga kontribusinya terhadap pembangunan daerah dapat meningkat secara signifikan dalam lima tahun mendatang.

3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029. Visi Kepala Daerah adalah “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri).” Visi tersebut menggambarkan tekad Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, masyarakat yang sejahtera dan berakhlak, serta daerah yang adaptif terhadap tantangan global melalui inovasi dan kolaborasi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, terdapat sejumlah misi pembangunan daerah, di antaranya: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif,

dan berkeadilan; Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi; Memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan; dan Mengembangkan riset dan inovasi untuk memperkuat daya saing daerah. Dari kelima misi tersebut, Bapperida memiliki keterkaitan langsung dengan Misi ke-3 dan Misi ke-5, yakni: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi; dan Mengembangkan riset dan inovasi untuk memperkuat daya saing daerah.

Peran Bapperida sangat strategis dalam mendukung kedua misi tersebut karena berfungsi sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, riset, dan inovasi daerah. Melalui fungsi perencanaan, Bapperida memastikan setiap program pembangunan tersusun secara terukur, terarah, dan berbasis data. Melalui fungsi riset dan inovasi, Bapperida mendorong lahirnya kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) serta memperkuat ekosistem inovasi daerah.

Selain itu, Bapperida bertanggung jawab terhadap sinkronisasi perencanaan pembangunan antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah melalui penyusunan dokumen RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Keterpaduan dokumen ini menjadi instrumen utama dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam mendukung transformasi birokrasi menuju pemerintahan digital, Bapperida juga mengelola sistem informasi pembangunan daerah dan data sektoral. Penguatan sistem ini memastikan tersedianya data yang valid, mutakhir, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan.

Sementara dalam bidang riset dan inovasi, Bapperida berperan dalam Fasilitasi penelitian dan kajian strategis daerah; Pengembangan dan hilirisasi hasil riset; Pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat; Fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); serta Kolaborasi riset dan inovasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix. Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi Bapperida dalam Renstra 2025–2029 merupakan bentuk konkret dukungan terhadap visi “Purworejo Berseri”. Bapperida berkomitmen menjadi institusi perencana yang tangguh, adaptif, inovatif, serta menjadi katalisator pembangunan daerah yang berbasis data, riset, dan kolaborasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 adalah “Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.” Tujuan tersebut dirumuskan dengan

mempertimbangkan peran strategis Bapperida sebagai motor penggerak perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, sekaligus sebagai institusi yang bertugas mengembangkan riset dan inovasi untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Tujuan ini tidak hanya berorientasi pada penyusunan dokumen perencanaan secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap rencana pembangunan tersusun secara berkualitas, adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta konsisten dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Selain itu, tujuan ini menekankan pentingnya penguatan inovasi daerah sebagai instrumen dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, sekaligus memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, akuntabel, dan berdaya saing.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan tersebut, Bapperida menetapkan tiga indikator utama:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, sebagai ukuran tingkat akuntabilitas kinerja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan.
2. Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, sebagai ukuran kualitas dokumen perencanaan dari aspek konsistensi, relevansi, dan keselarasan antar-dokumen.
3. Kapabilitas Inovasi, sebagai ukuran kemampuan kelembagaan dalam mengembangkan ekosistem riset dan inovasi yang berdaya guna dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Bapperida Kabupaten Purworejo menetapkan beberapa sasaran strategis yang bersifat lebih terukur dan operasional. Sasaran ini merupakan hasil penjabaran dari tujuan lembaga dan menggambarkan hasil antara yang ingin dicapai selama periode Renstra 2025–2029.

1. Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
   Sasaran ini diukur melalui indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Fokusnya adalah memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan kinerja – mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan – dilakukan secara konsisten, transparan, dan akuntabel.
2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
   Diukur melalui Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, sasaran ini menitikberatkan pada penyusunan dokumen perencanaan yang selaras antara RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renja. Kualitas perencanaan yang baik diharapkan menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berbasis data dan analisis yang komprehensif.
3. Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas dan Kemanfaatan Riset serta Inovasi Daerah

Sasaran ini diukur melalui dua indikator: Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti dan Indeks Inovasi Daerah. Fokusnya adalah memastikan hasil riset dan inovasi benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan publik serta berkontribusi terhadap peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Bapperida Kabupaten Purworejo selama tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 tersaji dalam tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapperida Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,62	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20
			Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21,56	22,07	22,58	23,08	23,59	23,59
			Kapabilitas Inovasi	3,11	3,16	3,21	3,26	3,31	3,36
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,62	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21,56	22,07	22,58	23,08	23,59	23,59
		Meningkatnya kualitas serta kemanfaatan riset dan inovasi	Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti	40	45	50	60	70	75
			Indeks Inovasi Daerah	63,1	64,48	65,86	67,24	68,62	68,62

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, Bapperida Kabupaten Purworejo merumuskan sejumlah strategi utama yang diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Strategi ini merupakan bentuk operasionalisasi dari visi dan misi Kepala Daerah serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada periode 2025–2029.

Strategi tersebut disusun untuk mendukung tiga tujuan strategis utama Bapperida, yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, Meningkatkan kualitas serta kemanfaatan riset dan inovasi daerah. Ketiga tujuan tersebut diimplementasikan melalui tahapan pelaksanaan Renstra sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2026-2030

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meneguhkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Menguatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Memantapkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meneguhkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
Menguatkan kualitas serta pemanfaatan Riset dan Inovasi	Meningkatkan kualitas serta pemanfaatan Riset dan Inovasi	Memantapkan kualitas serta pemanfaatan Riset dan Inovasi	Mewujudkan kualitas serta pemanfaatan Riset dan Inovasi	Meneguhkan kualitas serta pemanfaatan Riset dan Inovasi

Pelaksanaan Renstra Bapperida dibagi menjadi lima tahap pengembangan, selaras dengan dinamika pembangunan daerah dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2030, sebagai berikut:

Tahap I (Tahun 2026): Penguatan Fondasi Difokuskan pada penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Pendekatan perencanaan berbasis data dan analisis kebutuhan diterapkan secara sistematis. Pemanfaatan riset dan inovasi mulai dioptimalkan dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi pembangunan agar hasil pembangunan lebih adaptif dan berdampak nyata.

Tahap II (Tahun 2027): Peningkatan Kualitas dan Integrasi Difokuskan pada peningkatan efektivitas dan transparansi pelaksanaan program. Kualitas perencanaan ditingkatkan melalui integrasi antarperangkat daerah dan pemanfaatan data yang lebih akurat. Pemanfaatan riset dan inovasi difokuskan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan solusi inovatif terhadap isu pembangunan daerah.

Tahap III (Tahun 2028): Pemantapan Tata Kelola dan Sistem Kinerja. Menekankan pada pemantapan akuntabilitas kinerja dengan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator yang komprehensif. Perencanaan diperkuat melalui harmonisasi antara rencana jangka menengah dan tahunan. Pemanfaatan riset diarahkan untuk mendukung kebijakan publik dan peningkatan layanan berbasis inovasi.

Tahap IV (Tahun 2029): Perwujudan Tata Kelola Berkinerja Tinggi. Difokuskan pada perwujudan akuntabilitas kinerja yang nyata melalui pelaksanaan program pembangunan yang terukur dan berdampak. Kualitas perencanaan diwujudkan melalui integrasi lintas perangkat daerah dan sinkronisasi antarlevel pemerintahan. Riset dan inovasi dijadikan dasar pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan daerah.

Tahap V (Tahun 2030): Peneguhan dan Keberlanjutan Tahap akhir ini meneguhkan seluruh capaian hasil pembangunan yang telah diraih. Akuntabilitas, perencanaan berbasis data, dan inovasi daerah diteguhkan menjadi budaya kerja kelembagaan. Sistem perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja difungsikan sebagai instrumen utama dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi hasil.

Arah kebijakan Bapperida Kabupaten Purworejo untuk periode 2026–2030 disusun secara bertahap dan berkesinambungan, mengacu pada prinsip good governance serta mendukung visi daerah “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Arah kebijakan ini menggambarkan penajaman fokus kerja setiap tahun untuk memastikan peningkatan kualitas kinerja kelembagaan, efektivitas perencanaan, serta optimalisasi riset dan inovasi daerah.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra
Bapperida Kabupaten Purworejo

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan,	Arah Kebijakan 2026 : Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Arah Kebijakan 2026: Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	responsif berbasis teknologi informasi	dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penguatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset	Penguatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui penyusunan rencana pembangunan, pengelolaan manajemen risiko, analisis dan pemanfaatan data, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	
			Penguatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui sinkronisasi serta harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Penguatan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui pelaksanaan riset unggulan daerah, penyusunan indeks daya saing, penerbitan jurnal integral dan policy brief, fasilitasi hak kekayaan intelektual, pengembangan surprise, serta pelaksanaan kompetisi dan pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat.	
		Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Arah Kebijakan 2026: Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Peningkatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset	Peningkatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui penyusunan rencana pembangunan, pengelolaan manajemen risiko, analisis dan pemanfaatan data, serta pengendalian	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			dan evaluasi pembangunan daerah.	
			Peningkatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui sinkronisasi serta harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan.	
		Peningkatan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peningkatan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui pelaksanaan riset unggulan daerah, penyusunan indeks daya saing, penerbitan jurnal integral dan policy brief, fasilitasi hak kekayaan intelektual, pengembangan surprise, serta pelaksanaan kompetisi dan pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat.	
		Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Arah Kebijakan 2026: Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Pemantapan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset	Pemantapan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui penyusunan rencana pembangunan, pengelolaan manajemen risiko, analisis dan pemanfaatan data, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	
			Pemantapan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui sinkronisasi serta harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan.	
		Pemantapan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Pemantapan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui pelaksanaan riset unggulan daerah, penyusunan indeks daya saing, penerbitan jurnal integral dan policy brief, fasilitasi	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			hak kekayaan intelektual, pengembangan surprise, serta pelaksanaan kompetisi dan pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat.	
		Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Arah Kebijakan 2026: Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Perwujudan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset	Perwujudan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui penyusunan rencana pembangunan, pengelolaan manajemen risiko, analisis dan pemanfaatan data, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	
			Perwujudan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui sinkronisasi serta	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan.	
		Perwujudan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui pelaksanaan riset unggulan daerah, penyusunan indeks daya saing, penerbitan jurnal integral dan policy brief, fasilitasi hak kekayaan intelektual, pengembangan surprise, serta pelaksanaan kompetisi dan pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat.	
		Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Arah Kebijakan 2026: Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Peneguhan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset	Peneguhan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui penyusunan rencana pembangunan, pengelolaan manajemen risiko, analisis dan pemanfaatan data, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	
			Peneguhan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui sinkronisasi serta harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan.	
		Peneguhan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui pelaksanaan riset unggulan daerah, penyusunan indeks daya saing, penerbitan jurnal integral dan policy brief, fasilitasi hak kekayaan intelektual, pengembangan surprise, serta pelaksanaan kompetisi dan pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat.	

Arah kebijakan Bapperida Kabupaten Purworejo untuk periode 2026–2030 disusun secara bertahap dan berkesinambungan, sejalan dengan visi, misi, serta arah pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029. Seluruh arah kebijakan dirancang dengan mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan nilai-nilai inovasi birokrasi. Pendekatan bertahap ini meliputi lima fase utama, yaitu penguatan, peningkatan, pemantapan, perwujudan, dan peneguhan kinerja kelembagaan.

Tahapan tersebut diarahkan untuk memperkokoh peran Bapperida sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan berbasis data, riset, dan inovasi, sekaligus menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah.

Tahun 2026 – Tahap Penguatan Fondasi Tata Kelola. Pada tahun 2026, arah kebijakan difokuskan pada penguatan fondasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, kepegawaian, dan pemanfaatan barang milik daerah secara tertib dan efisien. Selain itu, dilakukan penguatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja berbasis kinerja, risiko, dan riset melalui penyusunan rencana pembangunan yang terintegrasi serta pengendalian dan evaluasi pembangunan yang sistematis. Koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah diperkuat melalui harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Pada saat yang sama, dilakukan penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi publik melalui riset unggulan daerah, penyusunan indeks daya saing daerah, penerbitan jurnal dan policy brief, serta fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Tahun 2027 – Tahap Peningkatan Kualitas dan Integrasi Tata Kelola. Arah kebijakan tahun 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola yang telah dibangun pada tahap sebelumnya. Fokus peningkatan dilakukan terhadap efektivitas sistem akuntabilitas kinerja, efisiensi pengelolaan keuangan dan kepegawaian, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Sistem perencanaan dan pengukuran kinerja diperkuat melalui pemanfaatan data pembangunan yang lebih komprehensif, analisis risiko yang presisi, serta evaluasi pembangunan yang terukur.

Sinkronisasi program lintas bidang diperkuat untuk menjawab isu-isu strategis di bidang pembangunan manusia, perekonomian, infrastruktur, dan kewilayahan. Inovasi daerah dikembangkan melalui pelaksanaan riset unggulan daerah, pengembangan Sistem Riset, Pengembangan, dan Inovasi Daerah

(SuRPRISE), serta pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat agar semakin partisipatif dan berkelanjutan.

Tahun 2028 – Tahap Pemantapan Tata Kelola dan Inovasi. Pada tahun 2028, arah kebijakan difokuskan pada pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan menegakkan konsistensi dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang akuntabel dan transparan. Sistem perencanaan dan pengukuran kinerja dimantapkan melalui pemanfaatan data terintegrasi, manajemen risiko yang matang, dan evaluasi pembangunan berkelanjutan. Sinkronisasi lintas sektor dimantapkan untuk memastikan pembangunan di bidang pemerintahan, sumber daya manusia, ekonomi, sumber daya alam, dan infrastruktur berjalan selaras. Pemantapan inovasi dilakukan melalui penerapan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), penerbitan Jurnal Integral, serta penguatan kapasitas riset dan inovasi perangkat daerah guna memperkuat daya saing Purworejo di tingkat provinsi dan nasional.

Tahun 2029 – Tahap Perwujudan Akuntabilitas dan Inovasi Daerah. Arah kebijakan tahun 2029 diarahkan pada perwujudan akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara nyata dan menyeluruh. Tahap ini menandai implementasi penuh sistem tata kelola yang transparan, berorientasi hasil, dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Sistem perencanaan dan pengukuran kinerja berbasis kinerja, risiko, dan riset diwujudkan melalui penerapan penuh mekanisme penyusunan rencana pembangunan, pengelolaan data sektoral, serta evaluasi berbasis hasil. Perwujudan inovasi daerah diwujudkan melalui peningkatan pemanfaatan hasil riset dalam kebijakan publik (evidence-based policy), serta pembentukan ekosistem inovasi daerah yang melibatkan perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Tahun 2030 – Tahap Peneguhan dan Keberlanjutan Kinerja. Pada tahun 2030, arah kebijakan difokuskan pada peneguhan hasil dan keberlanjutan capaian yang telah diraih selama lima tahun. Tahapan ini memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik menjadi budaya organisasi di seluruh perangkat daerah. Sistem perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, dan pengendalian pembangunan diteguhkan sebagai instrumen utama pengambilan keputusan berbasis data, risiko, dan riset. Harmonisasi lintas sektor dan kewilayahan diteguhkan sebagai prinsip kolaboratif pembangunan daerah. Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, dan keterbukaan informasi publik diwujudkan melalui keberlanjutan riset unggulan daerah, peningkatan indeks daya saing yang kompetitif, serta penguatan kapasitas inovasi masyarakat Purworejo agar berdaya saing nasional dan global.

Strategi dan arah kebijakan sebagaimana dirumuskan dalam Tabel 3.3 merupakan penjabaran operasional dari isu strategis prioritas Bapperida yang diidentifikasi dalam Bab II. Melalui pelaksanaan strategi penguatan perencanaan berbasis data, peningkatan riset dan inovasi daerah, serta peneguhan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Bapperida diharapkan mampu menjawab tantangan kelembagaan dan memperkuat posisi Purworejo sebagai daerah yang berdaya saing, adaptif, dan inovatif.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN , DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Bapperida Kabupaten Purworejo memiliki tugas strategis dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan melalui dua unsur urusan penunjang, yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Kedua urusan ini merupakan tulang punggung dalam pengambilan keputusan pembangunan berbasis data dan inovasi, serta menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan. Untuk mengoperasionalkan kedua urusan tersebut, program Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 melaksanakan empat program utama, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Riset Dan Inovasi Daerah

Bapperida Kabupaten Purworejo sesuai Renstra 2025–2029 yang mencakup total 15 kegiatan dalam 4 program utama:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Jumlah kegiatan sebanyak 7 yaitu sebagai berikut :

   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, termasuk evaluasi capaian kinerja dan pemantauan pelaksanaan program, serta sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahunan.

   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Meliputi pengelolaan anggaran, pembukuan, verifikasi dokumen keuangan, dan pelaporan keuangan guna mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran Bapperida.

   3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

      Berfokus pada pengelolaan data pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, evaluasi kinerja ASN, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Mengelola surat-menyurat, arsip, penyediaan ATK, serta pengaturan layanan kesekretariatan dan ketatausahaan lainnya untuk mendukung operasional perangkat daerah.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan pengadaan sarana prasarana seperti peralatan kantor, kendaraan dinas, serta barang habis pakai lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Meliputi penyediaan jasa listrik, air, internet, telekomunikasi, dan layanan kebersihan untuk menunjang kenyamanan dan efisiensi kerja.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Fokus pada kegiatan pemeliharaan bangunan kantor, peralatan, dan aset lainnya agar tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara optimal.

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

   Jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan

   1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

      Menyusun dokumen perencanaan jangka pendek hingga menengah seperti RKPD, Renstra, Renja, termasuk proyeksi pendanaan sesuai prioritas pembangunan daerah.

   2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

      Mengelola basis data perencanaan dan melakukan analisis data sektoral sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

   3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

      Melaksanakan pemantauan, evaluasi kinerja program dan kegiatan, serta penyusunan laporan pembangunan untuk akuntabilitas dan perbaikan kebijakan.

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

   Jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan

   1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

      Meningkatkan sinergi antar-perangkat daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemerintahan umum, serta mendorong integrasi program prioritas.

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

   Fokus pada sinkronisasi rencana sektor ekonomi, pertanian, pariwisata, dan pengelolaan sumber daya alam, agar selaras dengan kebijakan pusat dan provinsi.

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

   Menyelaraskan perencanaan infrastruktur wilayah seperti jalan, drainase, pemukiman, serta pengembangan kawasan dan tata ruang berbasis data spasial.

4. Program Riset Dan Inovasi Daerah

Jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan

1. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

   Kegiatan litbang yang mendukung penyusunan kebijakan berbasis evidence, kajian tematik sektoral, serta pengembangan model perencanaan berbasis inovasi.

2. Invensi dan Inovasi

   Bertujuan mendorong pengembangan inovasi daerah, baik dari ASN, masyarakat, maupun pelaku usaha, termasuk fasilitasi lomba inovasi, inkubasi ide, dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo dalam 4 program, 15 kegiatan dan 40 subkegiatan sampai dengan tahun 2029 yang tersaji dalam Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bapperida Kabupaten Purworejo.

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi, Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, serta Keuangan		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum Kpegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegwaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersediany a Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah yang disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksana nya Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					yang Dipelihara		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Komponen Perangkat Daerah		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah			Nilai SAKIP Komponen Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangu	Jumlah Dokumen Analisis Data Untuk Penyusunan Kebijakan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				nan daerah yang valid dan termutakhirkan	Perencenaan Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia		Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.	Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian SDA	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Berkualitas	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
			Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Berkualitas	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Kapabilitas Inovasi		
		Meningkatnya kualitas serta kemanfaatan riset dan inovasi			Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti		
					Indeks Inovasi Daerah		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil riset, inovasi, dan HKI dalam mendukung penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah		Persentase penyusunan Kebijakan berbasis hasil riset	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
					Persentase Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual		
					Jumlah inovasi yang dimiliki daerah		
				Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Dukungan Layanan Sub Sistem Inovasi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	Invensi dan Inovasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Inovasi dan Invensi		
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
					Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
					Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	

Tabel 4.2 menyajikan rencana program, kegiatan, dan sub-kegiatan beserta alokasi pendanaan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah. Rencana ini disusun untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara sistematis,

terukur, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Setiap sub-kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang jelas, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi pencapaian hasil.

Alokasi pendanaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kegiatan dan bersumber dari APBD. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran, mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan riset dan inovasi, digitalisasi pemerintahan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak. Dengan demikian, rencana program dan kegiatan ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tabel 4.2.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Angka	21,05	22,07		22,58		23,08		23,59		24,1		24,1			
			Kapabilitas Inovasi	Angka	3,06	3,16		3,21		3,26		3,31		3,36		3,36			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
5.01	PERENCANAAN						4.999.185.918		5.230.071.000		4.368.950.000		4.368.950.000		4.368.950.000				
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi, Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, serta Keuangan	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	4.999.185.918	100	5.230.071.000	100	4.368.950.000	100	4.368.950.000	100	4.368.950.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	24	6.788.000	24	13.729.500	24	13.729.500	24	10.787.500	24	10.787.500	120			
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	4.818.800	22	7.033.900	22	7.033.900	22	7.033.900	22	7.033.900	110			
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	22	1.876.800	22	1.876.800	22	1.876.800	22	1.876.800	22	1.876.800	110			
5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	1	92.400	1	4.818.800	1	4.818.800	1	1.876.800	1	1.876.800	5			
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat	Laporan	25	44	3.937.428.108	44	3.937.428.108	44	3.884.809.530	44	3.871.714.473	44	3.858.473.711	220			
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	33	29	3.935.543.308	28	3.935.543.308	27	3.882.924.730	26	3.869.829.673	23	3.856.588.911	23			
5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	82	44	1.884.800	44	1.884.800	44	1.884.800	44	1.884.800	44	1.884.800	220			
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	17	17	4.028.200	17	4.028.200	17	4.028.200	17	4.028.200	17	4.028.200	17			
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	17	4.028.200	17	4.028.200	17	4.028.200	17	4.028.200	17	4.028.200	85			
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	183.795.800	8	135.759.200	8	131.759.200	8	135.759.200	8	135.759.200	40			
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	5.160.200	4	5.160.200	4	4.160.200	4	5.160.200	4	5.160.200	4			
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	1.453.100	4	1.453.100	4	1.453.100	4	1.453.100	4	1.453.100	4			
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	38.220.000	12	38.220.000	12	38.220.000	12	38.220.000	12	38.220.000	12			
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	1	6.770.800	1	6.770.800	1	5.770.800	1	6.770.800	1	6.770.800	1			
5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	4	12.530.400	4	12.530.400	4	10.530.400	4	12.530.400	4	12.530.400	4			
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48	1	3.975.000	1	3.975.000	1	3.975.000	1	3.975.000	1	3.975.000	1			
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	1	108.818.600	1	60.782.000	1	60.782.000	1	60.782.000	1	60.782.000	1			
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	15	1	6.867.700	1	6.867.700	1	6.867.700	1	6.867.700	1	6.867.700	1			
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	4	2	355.262.000	71	618.076.201	0		0		0		73			
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	Unit	0	0	0	1	320.216.201	0	0	0	0	0	0	1			
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Unit	0	0	0	60	253.870.000	0		0		0		60			
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	9.262.000	10	43.990.000	0	0	0	0	0	0	11			
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	1	346.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	24	160.261.810	24	170.209.791	24	181.152.570	24	193.189.627	24	206.430.389	120			
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	12	99.479.810	12	109.427.791	12	120.370.570	12	132.407.627	12	145.648.389	12			
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	12	60.782.000	12	60.782.000	12	60.782.000	12	60.782.000	12	60.782.000	12			
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	5	351.622.000	5	350.840.000	5	153.471.000	5	153.471.000	5	153.471.000	25			
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	39.950.000	1	39.950.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5			
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	70	4	144.140.000	4	143.358.000	4	93.000.000	4	93.000.000	4	93.000.000	4			
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	37.810.000	1	37.810.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1			
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1	109.251.000	1	109.251.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1			
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	13	20.471.000	13	20.471.000	13	20.471.000	13	20.471.000	13	20.471.000	13			
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Angka	21,05	22,07		22,58		23,08		23,59		24,1		24,1			
5.01	PERENCANAAN						1.067.673.900		1.413.659.000		1.067.674.000		1.670.212.000		1.696.602.000				
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Daerah	%	100	100	528.049.200	100	528.698.000	100	528.049.000	100	757.066.000	100	769.028.000	100	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Kabupaten Purworejo	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	14	4	317.132.000	4	317.780.800	4	317.132.000	6	517.132.000	5	537.132.000	5			
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	5	2	71.650.000	2	71.650.000	2	71.650.000	4	271.650.000	2	71.650.000	2			
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	8	2	245.482.000	2	246.130.800	2	245.482.000	2	245.482.000	3	465.482.000	3			
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang valid dan termutakhirkan	Jumlah Dokumen Analisis Data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencenaan Pembangunan Daerah	Dokumen	3	4	67.809.800	4	67.809.800	4	67.810.000	4	77.809.800	4	67.809.800	4			
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	3	3	23.704.700	3	23.704.700	3	23.704.700	3	33.704.700	3	23.704.700	3			
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	123	86	44.105.100	86	44.105.100	86	44.105.300	86	44.105.100	86	44.105.100	86			
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	9	14	143.107.400	14	143.107.400	14	143.107.000	14	162.124.200	16	164.086.200	16			
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	19	14	143.107.400	14	143.107.400	14	143.107.000	14	162.124.200	16	164.086.200	16			
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	539.624.700	100	884.961.000	100	539.625.000	100	913.146.000	100	927.574.000	100	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan	%	100	100		100		100		100		100		100	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan	Kabupaten Purworejo	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.	Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan	8	2	269.778.500	2	442.424.900	2	269.778.600	2	456.515.600	2	463.728.700	10			
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	1	67.806.200	1	111.199.200	1	67.806.200	1	114.740.700	1	116.553.700	5			
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	1	201.972.300	1	331.225.700	1	201.972.400	1	341.774.900	1	347.175.000	5			
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian SDA	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Berkualitas	Laporan	8	2	112.601.000	2	162.601.000	2	112.601.400	2	167.601.000	2	177.601.000	10			
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2	1	67.755.400	1	92.755.400	1	67.755.800	1	92.755.400	1	97.755.400	5			
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2	1	44.845.600	1	69.845.600	1	44.845.600	1	74.845.600	1	79.845.600	5			
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Berkualitas	Laporan	8	2	157.245.200	2	279.935.100	2	157.245.000	2	289.029.400	2	286.244.300	10			
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	1	96.780.200	1	219.470.100	1	96.780.000	1	228.564.400	1	225.779.300	5			
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	3	1	60.465.000	1	60.465.000	1	60.465.000	1	60.465.000	1	60.465.000	5			
3	Meningkatnya kualitas serta kemanfaatan riset dan inovasi		Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti	%	39	45		50		60		70		75		75			
			Indeks Inovasi Daerah	Angka	61,72	65,5		65,75		66		66,5		66,75		66,75			
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						797.956.200		850.000.000		797.956.000		810.564.000		823.371.000				
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset, inovasi, dan HKI dalam mendukung penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	%	39	45	797.956.200	50	850.000.000	60	797.956.000	70	810.564.000	75	823.371.000	75	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Kabupaten Purworejo	
			Tingkat Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	%	3,06	3,16		3,21		3,26		3,31		3,36		3,36	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Kabupaten Purworejo	
			Jumlah inovasi yang dimiliki daerah	Inovasi	175	215		235		255		275		295		295	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Kabupaten Purworejo	
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah dokumen kebijakan berbasis hasil riset	Dokumen	0	5	543.030.200	5	595.074.000	5	493.030.000	5	505.638.000	5	518.445.000	25			
5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah	0	7	518.906.200	7	570.950.000	7	468.906.000	7	481.514.000	7	494.321.000	35			
5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	0	1	24.124.000	1	24.124.000	1	24.124.000	1	24.124.000	1	24.124.000	5			
5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	Terlaksananya Dukungan Layanan Sub Sistem Inovasi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Invensi dan Inovasi	Dokumen	0	5	254.926.000	5	254.926.000	5	304.926.000	5	304.926.000	5	304.926.000	25			
5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Laporan	0	1	26.114.000	1	26.114.000	1	26.114.000	1	26.114.000	1	26.114.000	5			
5.05.03.2.02.0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Laporan	0	1	16.174.000	1	16.174.000	1	16.174.000	1	16.174.000	1	16.174.000	5			
5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan	0	1	145.014.000	1	145.014.000	1	145.014.000	1	145.014.000	1	145.014.000	5			
5.05.03.2.02.0013	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Sistem Informasi	0	1	44.024.000	1	44.024.000	1	44.024.000	1	44.024.000	1	44.024.000	1			
5.05.03.2.02.0018	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Pelatihan	0	2	23.600.000	2	23.600.000	2	23.600.000	2	23.600.000	2	23.600.000	2			
5.05.03.2.02.0020	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Laporan	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3			
Jumlah							**6.864.816.018**		**7.493.730.000**		**6.234.580.000**		**6.849.726.000**		**6.888.923.000**				

Tabel 4.3 menyajikan daftar subkegiatan prioritas yang diprioritaskan dalam mendukung pencapaian program pembangunan daerah. Subkegiatan ini dipilih berdasarkan urgensi, dampak, dan kontribusinya terhadap sasaran strategis pembangunan, sehingga menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program oleh perangkat daerah.

Penyusunan subkegiatan prioritas ini mempertimbangkan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Renstra, Renja, dan RKPD, serta menekankan sinergi antar perangkat daerah, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, daftar subkegiatan prioritas ini menjadi pedoman operasional untuk memastikan implementasi program pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Priorotas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah Bapperida Kabupaten Purworejo

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PERENCANAAN				
1.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah			
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Menyusun dokumen RKPD Rancangan Awal RPJMD 2029-2034	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik RKPD yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Forum Konsultasi Publik.	
				Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, menghasilkan Berita Acara Forum PD/Lintas PD.	
				Melaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan, dituangkan dalam BA Musrenbang Kecamatan.	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
				Melaksanakan Musrenbang Kabupaten, dituangkan dalam BA Musrenbang Kabupaten.	
				Menyusun Peraturan Bupati (Perbup) RKPD 2026 sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan tahunan.	
				Menyusun Peraturan Bupati Perubahan RKPD 2025 sebagai tindak lanjut penyesuaian kebijakan tahunan.	
				Menyusun Peraturan Daerah (Perda) RPJMD 2025–2029 sebagai pedoman pembangunan jangka menengah daerah.	
				Menyusun Dokumen Manajemen Risiko (MR) 2025–2029 untuk mendukung mitigasi risiko pembangunan daerah.	
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Membina dan meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan peningkatan pemahaman pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pembangunan, dengan indikator jumlah orang yang dibina.	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Menyusun Berita Acara Daftar Data untuk memperkuat basis data pembangunan daerah.	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	Mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi perencanaan agar berjalan sesuai kebutuhan dan	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Pembangunan Daerah	perkembangan peraturan yang berlaku.	
				Melaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan guna mendukung penguatan kapasitas pemangku kepentingan.	
				Menyusun Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi (PE) Perumusan Kebijakan RKPD 2027 serta laporan PE pelaksanaan RPJMD 2025–2029.	
				Menyusun Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi (PE) Perubahan RKPD 2026.	
				Menyusun Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi (PE) Pelaksanaan RKPD 2026.	
				Menyusun Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD untuk menilai capaian tahunan pembangunan.	
				Menyusun Laporan Evaluasi Rencana Tindak Pengelolaan (RTP) Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.	
				Menyusun Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi antar pemangku kepentingan pembangunan daerah.	
2.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia			
		Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan			
			Koordinasi Perencanaan		

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Manusia	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	pembangunan bidang Kewilayahan	
	URUSAN PENELITIAN PENGEMBANGAN				
3.	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset, inovasi, dan HKI dalam mendukung penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah			
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan		
			Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah	
				Penyusunan Analisis Indeks Daya Saing Daerah	
				Penerbitan Jurnal integral	
				Penyusunan Policy Brief	
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Koordinasi Forum Komunikasi Riset dan Inovasi	
			Invensi dan Inovasi		
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Koordinasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
			Fasilitasi dan Pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Fasilitasi dan Pembinaan Inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil		

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.		
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah	
				Lomba Inovasi Daerah melalui Innovative Government Award (IGA)	
				Pelaksanaan Lomba Kreativitas Inovasi Masyarakat (Krenova) Kabupaten	
			Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Pengembangan Sistem Informasi Untuk Risert, Pengembangan Risert dan Inovasi daerah (Surprise)	
			Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Pengelolaan Kebun Raya Daerah	

4.2. Dukungan Terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah

Bapperida Kabupaten Purworejo memberikan kontribusi nyata melalui pelaksanaan Program Riset dan Inovasi Daerah yang selaras dengan Prioritas Nasional 4 Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi serta Prioritas Nasional 2 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada penguatan kapasitas riset dan inovasi, tetapi juga pada peningkatan pemanfaatannya secara langsung bagi pembangunan daerah.

Pada Prioritas Nasional 4, Bapperida berperan melalui kegiatan-kegiatan strategis seperti fasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, pembinaan praktik baik kepada pelaku inovasi, serta diseminasi hasil riset agar lebih aplikatif dan berdampak. Selain itu, pengelolaan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, bimbingan teknis serta kemitraan invensi

dan inovasi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung intermediasi IPTEK di daerah. Melalui aktivitas ini, Bapperida memperkuat jembatan antara hasil riset dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, serta pemerintahan.

Sementara itu, dalam mendukung Prioritas Nasional 2 tentang Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi, Bapperida mengimplementasikan kegiatan yang diarahkan untuk mendorong lahirnya talenta riset unggul di daerah. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain fasilitasi perlindungan HKI, pembinaan inovator daerah, pelaksanaan sistem informasi riset, serta penyediaan wadah apresiasi prestasi inovasi. Upaya ini diharapkan tidak hanya menumbuhkan budaya riset dan inovasi, tetapi juga menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Dengan dukungan terhadap dua prioritas nasional tersebut, Bapperida Kabupaten Purworejo memperlihatkan perannya sebagai penghubung antara arah kebijakan pembangunan nasional dengan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Sinergi ini memastikan bahwa riset dan inovasi tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong terciptanya ekosistem pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2. Dukungan Bapperida Terhadap Nasional.

Tabel 4.2 Dukungan Bapperida Kabupaten Purworejo Terhadap Nasional

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Prioritas Nasional 4	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	Program: PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Kegiatan: Invensi dan Inovasi Sub Kegiatan 1. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual 2. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan	Litbang	Bapperida

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
			diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. 3. Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi 4. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah 5. Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi 6. Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah)		
2		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi	Program: PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Kegiatan: Invensi dan Inovasi Sub Kegiatan 1. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual 2. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi	Litbang	Bapperida

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
			kepada pelaku inovasi. 3. Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi 4. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah 5. Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi 6. Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah)		

Bapperida Kabupaten Purworejo memiliki peran penting dalam mendukung implementasi Program Pitulungan, khususnya melalui penguatan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang terintegrasi dengan program unggulan daerah, yaitu Sejahtera Wargane dan Rame Pasare, yang secara substansi selaras dengan semangat Pitulungan: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pada Program Unggulan Sejahtera Wargane, Bapperida memberikan kontribusi melalui kegiatan pengembangan inovasi dan kompetensi teknologi informasi bagi ASN serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis riset dan teknologi informasi. Aktivitas seperti Seleksi Riset Unggulan Daerah, Analisis Indeks Daya Saing Daerah, Penyusunan Policy Brief, serta Forum Komunikasi Riset dan Inovasi diarahkan untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, responsif, dan berbasis data. Dukungan ini memastikan kebijakan daerah yang dihasilkan lebih tepat sasaran, berbasis bukti, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat dan akuntabel.

Sementara itu, melalui Program Unggulan Rame Pasare, Bapperida mendukung Pitulungan dalam aspek penguatan ekosistem inovasi dan hilirisasi riset untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Koordinasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Workshop Drafting Paten, Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah, Innovative Government Award (IGA), hingga Lomba Krenova Kabupaten. Aktivitas ini tidak hanya memfasilitasi tumbuhnya inovasi di masyarakat, tetapi juga memberikan apresiasi dan perlindungan hukum bagi hasil riset dan karya inovatif daerah. Selain itu, program hilirisasi diwujudkan melalui diseminasi hasil riset, kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi, serta pengelolaan Kebun Raya Daerah sebagai pusat konservasi, edukasi, dan hilirisasi teknologi tepat guna. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3. Dukungan Bapperida Terhadap Pitulungan.

Tabel 4.3 Dukungan Bapperida Kabupaten Purworejo Terhadap Pitulungan

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas di 2026	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Sejahtera Wargane	Pengembangan inovasi dan kompetensi teknologi informasi bagi ASN	Seleksi Riset Unggulan Daerah untuk menentukan prioritas riset yang mendukung peningkatan kapasitas ASN	Seleksi Riset Unggulan Daerah untuk menentukan prioritas riset yang mendukung peningkatan kapasitas ASN	Litbang	Bapperida
			Analisis Indeks Daya Saing Daerah sebagai bahan pengembangan kompetensi berbasis data.	Analisis Indeks Daya Saing Daerah sebagai bahan pengembangan kompetensi berbasis data.	Litbang	Bapperida
			Penerbitan Jurnal Integral sebagai sarana publikasi hasil riset ASN dan kolaborasi daerah.	Penerbitan Jurnal Integral sebagai sarana publikasi hasil riset ASN dan kolaborasi daerah.	Litbang	Bapperida
			Workshop/Bimtek teknologi informasi untuk ASN dengan integrasi sistem informasi pembangunan.	Workshop/Bimtek teknologi informasi untuk ASN dengan integrasi sistem informasi pembangunan.	Litbang	Bapperida
		Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih,	Penyusunan Policy Brief berbasis hasil riset untuk mendukung pengambilan keputusan	Penyusunan Policy Brief berbasis hasil riset untuk mendukung pengambilan keputusan	Litbang	Bapperida

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas di 2026	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
		berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.	Forum Komunikasi Riset dan Inovasi sebagai wadah koordinasi antar pemangku kepentingan	Forum Komunikasi Riset dan Inovasi sebagai wadah koordinasi antar pemangku kepentingan		
			Pengembangan Rancang Bangun Inovasi (Sistem Informasi Riset, Pengembangan, dan Inovasi Daerah) untuk mendukung tata kelola pemerintahan digital	Pengembangan Rancang Bangun Inovasi (Sistem Informasi Riset, Pengembangan, dan Inovasi Daerah) untuk mendukung tata kelola pemerintahan digital	Litbang	Bapperida
			Monitoring dan evaluasi riset dan inovasi untuk menjamin keberlanjutan implementasi.	Monitoring dan evaluasi riset dan inovasi untuk menjamin keberlanjutan implementasi.	Litbang	Bapperida
			Dukungan layanan sistem inovasi daerah guna memperkuat data dan informasi berbasis iptek.	Dukungan layanan sistem inovasi daerah guna memperkuat data dan informasi berbasis iptek.	Litbang	Bapperida
2	Rame Pasare	Penguatan kapabilitas inovasi dan riset daerah yang mendukung ekosistem yang berkualitas	Koordinasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk memperkuat perlindungan inovasi daerah	Koordinasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk memperkuat perlindungan inovasi daerah	Litbang	Bapperida
			Workshop Drafting Paten (pendampingan penyusunan proposal paten) untuk inovator daerah.	Workshop Drafting Paten (pendampingan penyusunan proposal paten) untuk inovator daerah.	Litbang	Bapperida
			Pendaftaran HKI hasil riset dan inovasi daerah.	Pendaftaran HKI hasil riset dan inovasi daerah.	Litbang	Bapperida
			Fasilitasi dan pembinaan inovasi bagi pelaku masyarakat, akademisi, maupun perangkat daerah.	Fasilitasi dan pembinaan inovasi bagi pelaku masyarakat, akademisi, maupun perangkat daerah.	Litbang	Bapperida

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas di 2026	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
			Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah untuk mendorong budaya inovasi birokrasi.	Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah untuk mendorong budaya inovasi birokrasi.	Litbang	Bapperida
			Innovative Government Award (IGA) untuk apresiasi pemerintah daerah yang inovatif.	Innovative Government Award (IGA) untuk apresiasi pemerintah daerah yang inovatif.	Litbang	Bapperida
			Lomba Krenova Kabupaten untuk menjaring inovasi masyarakat dan pelajar.	Lomba Krenova Kabupaten untuk menjaring inovasi masyarakat dan pelajar.	Litbang	Bapperida
		Hilirisasi hasil penelitian/ penerapan teknologi tepat guna	Diseminasi hasil riset untuk dimanfaatkan oleh pelaku inovasi dan masyarakat	Diseminasi hasil riset untuk dimanfaatkan oleh pelaku inovasi dan masyarakat	Litbang	Bapperida
			Kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas dalam penerapan teknologi tepat guna.	Kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas dalam penerapan teknologi tepat guna.	Litbang	Bapperida
			Pengelolaan Kebun Raya Daerah sebagai pusat konservasi, riset, edukasi, dan hilirisasi hasil inovasi berbasis sumber daya lokal.	Pengelolaan Kebun Raya Daerah sebagai pusat konservasi, riset, edukasi, dan hilirisasi hasil inovasi berbasis sumber daya lokal.	Litbang	Bapperida

4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penentuan indikator kinerja perangkat daerah dilakukan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga setiap capaian kinerja dapat terukur, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Indikator yang digunakan meliputi aspek perencanaan, akuntabilitas, dan inovasi, yang menjadi tolok ukur efektivitas dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah.

Beberapa indikator kinerja yang ditetapkan antara lain nilai SAKIP perangkat daerah dan komponen perencanaan kinerja, kapabilitas inovasi, persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, serta indeks inovasi daerah. Setiap indikator memiliki satuan dan target tahunan yang jelas untuk periode 2025 hingga 2030, sehingga memudahkan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut kebijakan. Penetapan target kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, memperkuat kapabilitas inovasi, dan memastikan bahwa perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Indikator kinerja yang akan dicapai oleh Bapperida Kabupaten Purworejo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029 adalah sebagaimana Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Bapperida Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,6	70,5	72,9	75,3	77,8	80,2	Tujuan PD
2	Nilai SAKIP Komponen perencanaan kinerja	Angka	21,56	22,07	22,58	23,08	23,59	24,10	Tujuan PD
3	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,11	3,16	3,21	3,26	3,31	3,36	Tujuan PD
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,6	70,5	72,9	75,3	77,8	80,2	Sasaran PD
2	Nilai SAKIP Komponen perencanaan kinerja	Angka	21,56	22,07	22,58	23,08	23,59	24,10	Sasaran PD
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti	%	40	45	50	60	70	75	Sasaran PD
4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63,10	65,50	65,8	66,00	66,50	66,8	Sasaran PD

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur tujuan Bapperida berfokus pada tiga aspek penting, yakni akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, dan kapabilitas inovasi. Nilai SAKIP Perangkat Daerah menjadi indikator pertama yang mencerminkan kinerja keseluruhan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta akuntabilitas program pembangunan. Target peningkatan dari 68,6 pada tahun 2025 hingga mencapai 80,2 pada

tahun 2030 menunjukkan komitmen Bapperida dalam memperbaiki tata kelola manajemen kinerja secara bertahap. Upaya pencapaian indikator ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan dokumen perencanaan berbasis bukti, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja.

Selanjutnya, indikator kedua adalah Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja yang menilai kualitas integrasi antara rencana kerja, anggaran, dan capaian kinerja. Peningkatan target dari 21,56 pada 2025 menjadi 24,10 pada 2030 menunjukkan arah perbaikan yang konsisten dalam membangun perencanaan yang lebih sinkron dan realistis. Strategi pencapaian indikator ini ditempuh melalui perbaikan prosedur penyusunan perencanaan, penyelarasan antara Renstra, Renja, dan RKPD, serta penerapan sistem informasi manajemen kinerja yang lebih efektif dan terintegrasi.

Indikator ketiga adalah Kapabilitas Inovasi, yang menilai kemampuan Bapperida dalam menghasilkan serta memanfaatkan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah. Target peningkatan dari 3,11 pada 2025 hingga mencapai 3,36 pada 2030 menunjukkan arah penguatan peran Bapperida sebagai penggerak ekosistem inovasi daerah. Pencapaiannya didukung melalui penguatan laboratorium inovasi, fasilitasi penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan workshop inovasi, serta perluasan kolaborasi dengan akademisi dan sektor swasta untuk menghasilkan solusi kreatif yang aplikatif.

Sementara itu, dalam kerangka sasaran perangkat daerah, indikator yang digunakan lebih menekankan pada tindak lanjut kebijakan dan peningkatan indeks inovasi daerah. Selain tetap menggunakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja sebagai acuan, Bapperida juga menetapkan indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti. Target indikator ini meningkat signifikan dari 40% pada 2025 hingga 75% pada 2030, yang mencerminkan efektivitas riset, kajian, dan evaluasi dalam memengaruhi pengambilan keputusan. Strateginya ditempuh melalui penyusunan mekanisme tindak lanjut rekomendasi, rapat koordinasi antar perangkat daerah, serta monitoring implementasi kebijakan secara berkala. Selain itu, Indeks Inovasi Daerah ditetapkan sebagai indikator kunci dengan target peningkatan dari 63,10 pada 2025 menjadi 66,8 pada 2030. Pencapaiannya dilakukan melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi layanan, penyediaan pendanaan riset inovatif, dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem inovasi di Kabupaten Purworejo.

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Bapperida Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Penanggung Jawab	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,11	3,16	3,21	3,26	3,31	3,36	Bidang Riset dan Inovasi	IUP

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapperida yang tercantum dalam Tabel 4.5 adalah Kapabilitas Inovasi, yang diukur dalam satuan angka. Indikator ini menggambarkan sejauh mana perangkat daerah, khususnya melalui fungsi riset dan inovasi, mampu mengembangkan serta memanfaatkan inovasi untuk

mendukung pembangunan daerah. Kapabilitas inovasi tidak hanya diartikan sebagai kemampuan menghasilkan gagasan baru, tetapi juga mencakup proses penerapan, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi untuk menjawab kebutuhan pembangunan.

Target capaian Kapabilitas Inovasi dirumuskan secara bertahap dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Pada tahun 2025, target awal ditetapkan sebesar 3,11, kemudian meningkat secara berjenjang setiap tahun: 3,16 pada 2026, 3,21 pada 2027, 3,26 pada 2028, 3,31 pada 2029, hingga mencapai 3,36 pada tahun 2030. Kenaikan bertahap ini mencerminkan komitmen Bapperida untuk menjaga konsistensi peningkatan kapasitas inovasi, meskipun dengan skala yang terukur dan realistis.

Bidang yang bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator ini adalah Bidang Riset dan Inovasi, yang memiliki mandat untuk melaksanakan fasilitasi penelitian, pembinaan inovasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta pengembangan ekosistem inovasi daerah. Keterlibatan bidang ini menjadi kunci dalam memastikan inovasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Keterangan dalam tabel menunjukkan bahwa indikator ini termasuk dalam kategori Indikator Urusan Pemerintahan (IUP), sehingga bersifat wajib dan strategis bagi Bapperida. Hal ini menegaskan bahwa penguatan kapabilitas inovasi merupakan bagian dari tugas dalam mendukung visi pembangunan daerah yang berdaya saing, sejahtera, religius, dan inovatif

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah setiap tahun.

b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.

c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dilakukan setiap tahun selama periode renstra.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

a. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka penyusunan dokumen perencanaan daerah disusun dalam periode jangka menengah maupun jangka panjang, dan selanjutnya diuraikan di masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun yang memuat strategi kebijakan program dan kegiatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan Perangkat Daerah Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 5 tahun (jangka menengah) sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan dokumen Renja Perangkat Daerah sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan dokumen Renja Perangkat Daerah

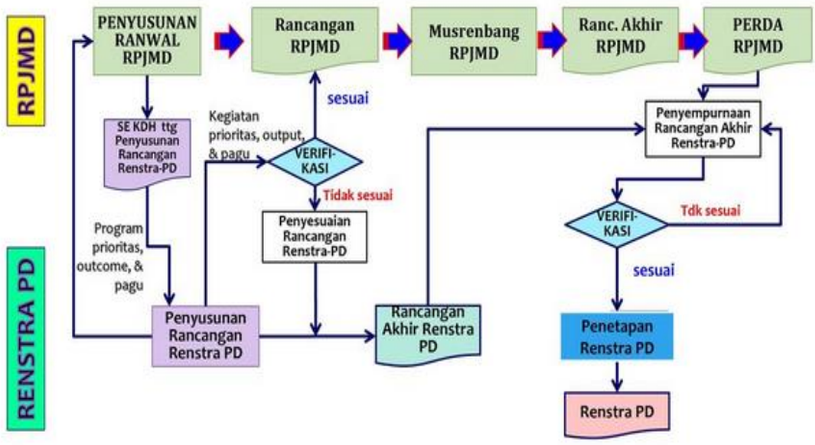

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dalam rangka penyusunan Renstra PD telah dilakukan tahapan-tahapan penyusunan renstra sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra

   Persiapan Penyusunan Renstra meliputi:

   a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah.
   b) orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah.
   c) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
   d) penyiapan data dan informasi Perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra

   Rancangan awal renstra disusun setelah diterimanya surat Sekretaris Daerah perihal penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Nomor 000.7.2/2202/2025 tanggal 21 Februari 2025. Rancangan awal Renstra memuat perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; Dalam penyusunan rancangan awal Renstra dilaksanakan:

   a. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah guna mencapai tujuan dan sasaran dan target kinerja perangkat daerah.
   b. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan

strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

3. Penyusunan Rancangan Renstra

   Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara Forum Perangkat Daerah.

4. Forum Penyusunan Renstra PD

   Forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan renstra Perangkat daerah adalah forum para pemangku kepentingan pelayanan perangkat daerah untuk membahas rancangan renstra perangkat daerah dibawah koordinasi Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah. Kesepakatan yang dihasilkan oleh Forum tersebut menjadi acuan perangkat daerah dalam penyempurnaan materi rancangan Renstra PD.

5. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD

   Rancangan Akhir renstra PD merupakan merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penyempurnaan rancangan renstra PD bertujuan untuk dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

   Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat

Daerah kepada Kepala BAPPERIDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

BAPPERIDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renstra PD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo yaitu:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 102 Tahun 2021 Seri D Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang *(sustainability development)* dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Purworejo sebagaimana tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra PD adalah:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah tahun 2025-2029 sesuai dengan fungsi unsur penunjang urusan bidang keuangan.
2. Sebagai pedoman bagi penyusunan rencana kerja antara tahun 2025-2029, termasuk di dalam menentukan program-program prioritas.
3. Sebagai tolok ukur di dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah selama periode tahun 2025-2029.
4. Sebagai instrumen untuk memudahkan mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Sebagai instrumen dasar implementasi kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
  - II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - II.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
- II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - II.2.2 Isu Strategis

III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
III.1 Tujuan
III.2 Sasaran
III.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah Tahun 2025 – 2029
III.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah Tahun 2025 - 2029
IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Uraian Program
4.2 Uraian Kegiatan
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
4.4 Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
4.5 Target keberhasila pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator kinerja utama (IKU) Perangkat daerah
4.6 Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci
V. PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 terdapat perubahan nomenklatur organisasi yang mengatur tentang tugas dan Fungsi organisasi yang menangani urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) mencabut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

Tugas dan fungsi BPKPAD dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 sebagai berikut :

I. Tugas

BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan
c. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
d. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
e. melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
f. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
g. melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
h. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
i. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

II. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya BPKPAD menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Perbendaharaan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Pajak Daerah;
b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja Perencanaan Anggaran Daerah, Perbendaharaan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Pajak Daerah;
c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Perbendaharaan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Pajak Daerah;
d. melaksanakan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Perbendaharaan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Pajak Daerah;
e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Perbendaharaan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Pajak Daerah;
f. pembinaan UPT dalam lingkup Pengelolaan keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
g. penyelenggaraan kesekretariatan BPKPAD; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

III. Struktur Organisasi BPKPAD

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo terdiri dari :

a. Kepala BPKPAD;

b. Sekretariat;
c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
d. Bidang Perbendaharaan Daerah;
e. Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah;
f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
h. Bidang Pajak Daerah;
i. UPT; danJabatan Fungsional.

Gambar 2. 1 Rancangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPKPAD

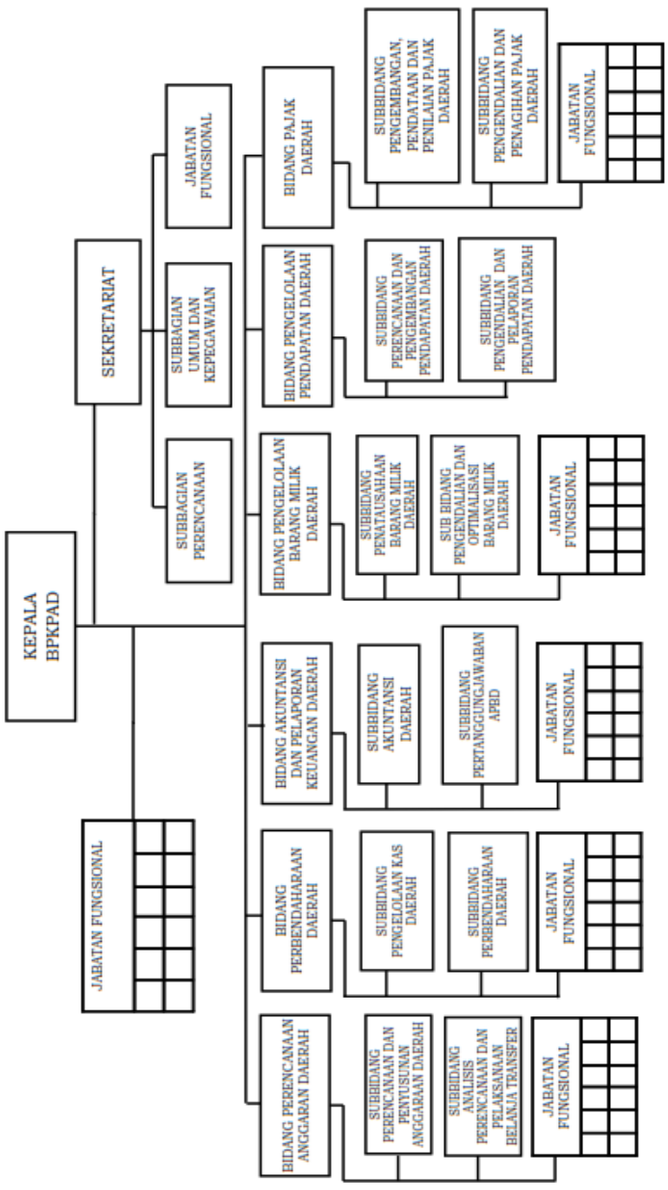

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

I. Sumber Daya Manuasia

Sumber Daya Manusia pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Agustus 2024 berjumlah 96 orang dengan perincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawai BPPKAD adalah 73 orang Pegawai yang dikelompokkan dalam 5 (lima) tingkat pendidikan.

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai BPPKAD berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	32
2	SLTA Kejuruan	11
3	Diploma III/Sarjana Muda	15
4	S-1/Sarjana	25
5	S-2	13
	Total	96

Sumber: Data Kepegawaian BPPKAD Tahun 2025

Gambar 2. 2 Komposisi pegawai BPPKAD berdasarkan tingkat Pendidikan

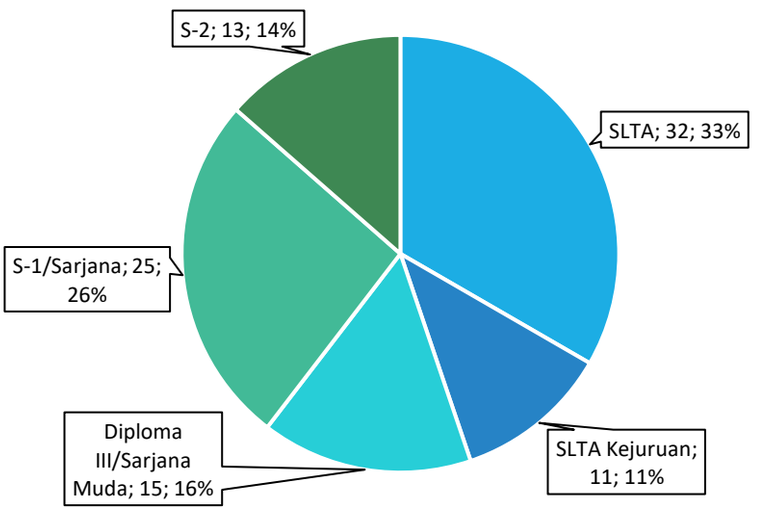

Sumber: Data Kepegawaian BPKPAD Tahun 2025

b. Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Tingkat kepangkatan dan golongan pegawai BPPKAD dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut;

Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai BPPKAD
Berdasarkan Tingkat Golongan

No	GOLONGAN	JUMLAH
1	PNS - IV/c	1
2	PNS - IV/a	7
3	PNS - III/d	13
4	PNS - III/c	6
5	PNS - III/b	19
6	PNS - III/a	5
7	PNS - II/d	8
8	PNS - II/c	8
9	PPPK - V	25
10	PPPK - VII	1
11	PPPK - IX	3
Total		96

Sumber: Data Kepegawaian BPPKAD Tahun 2025

Gambar 2. 3 Komposisi pegawai BPPKAD berdasarkan tingkat kepangkatan dan golongan

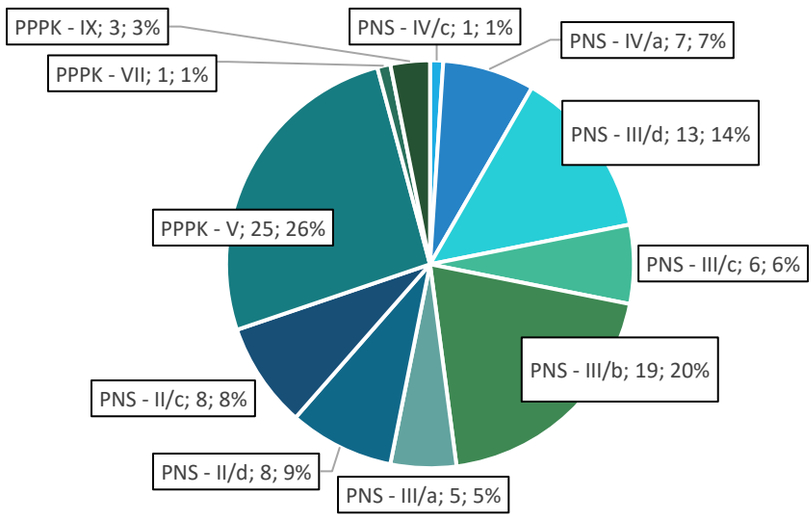

Sumber: Data Kepegawaian BPPKAD Tahun 2025

c. Berdasarkan Jenis Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tatakerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten terdapat 28 jabatan yang terdiri dari 4 Eselon sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2. 3 Komposisi Pegawai BPPKAD berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	19
2	Jabatan Fungsional Tertentu	4
3	Jabatan Fungsional Umum	73
	Total	96

Sumber: Data Kepegawaian BPPKAD Tahun 2025

II. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki BPPKAD berdasarkan laporan barang inventaris (By Simda BMD) Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 4 Daftar sarana dan prasarana BPPKAD Kab. Purworejo

No	KODE BARANG	JENIS BARANG	JUMLAH
1	02.02.01.01.003	Station Wagon	8
2	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	37
3	02.02.01.06.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1
4	02.02.02.01.001	Gerobak Tarik	2
5	02.03.01.01.024	Mesin Pelubang (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	1
6	02.03.03.01.072	Global Positioning System	6
7	02.03.03.07.010	Scanner (Universal Tester)	6
8	02.03.03.09.018	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	43
9	02.03.03.21.001	alat ukur lainnya lainnya (dst)	108
10	02.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1
11	02.05.01.01.003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1
12	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	27
13	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	17
14	02.05.01.04.003	Rak Besi	210
15	02.05.01.04.004	Rak Kayu	30
16	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	19
17	02.05.01.04.007	Brandkas	9
18	02.05.01.04.010	Kardex Kayu	1
19	02.05.01.04.025	Lemari Katalog	1
20	02.05.01.04.027	Lemari Kaca	8
21	02.05.01.05.005	White Board	4
22	02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	1
23	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	2
24	02.05.01.05.021	Perforator Besar	2
25	02.05.01.05.023	Overhead Projector	8
26	02.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	2
27	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	8
28	02.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2
29	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	67
30	02.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	59
31	02.05.02.01.004	Kursi Kayu	13
32	02.05.02.01.005	Sice	13
33	02.05.02.01.008	Meja Rapat	29
34	02.05.02.01.011	Meja Ketik	5
35	02.05.02.01.012	Meja Telepon	5
36	02.05.02.01.014	Meja Resepsionis	17
37	02.05.02.01.016	Meja Tambahan	1
38	02.05.02.01.017	Meja Panjang	1

No	KODE BARANG	JENIS BARANG	JUMLAH
39	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	114
40	02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	4
41	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	166
42	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	5
43	02.05.02.01.032	Kursi Putar	8
44	02.05.02.01.033	Kursi Biasa	44
45	02.05.02.01.035	Bangku Tunggu	13
46	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	66
47	02.05.02.01.039	Meja Komputer	38
48	02.05.02.01.048	Sofa	5
49	02.05.02.01.050	Meubeleur lainnya	2
50	02.05.02.04.001	Lemari Es	2
51	02.05.02.04.003	A.C. Window	26
52	02.05.02.04.004	A.C. Split	33
53	02.05.02.04.006	Kipas Angin	3
54	02.05.02.05.009	Tabung Gas	2
55	02.05.02.06.002	Televisi	2
56	02.05.02.06.004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1
57	02.05.02.06.008	Sound System	1
58	02.05.02.06.018	Unit Power Supply	18
59	02.05.02.06.020	Stabilisator	2
60	02.05.02.06.023	Tustel	15
61	02.05.02.06.038	Dispenser	6
62	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4
63	02.05.02.07.001	Alat Pemadam/Portable	6
64	02.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
65	02.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2
66	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
67	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4
68	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2
69	02.05.03.07.004	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1
70	02.05.03.07.006	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1
71	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	9
72	02.05.03.07.008	Buffet Kayu	3
73	02.05.03.07.009	Buffet Kaca	4
74	02.06.01.01.059	Power Amplifier	2
75	02.06.01.02.003	Camera Electronic	1
76	02.06.01.05.023	Kompas Geologi	2
77	02.06.01.05.035	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1
78	02.06.02.01.001	Telephone (PABX)	1
79	02.06.02.01.010	Facsimile	1
80	02.06.03.10.002	Antene SHF Transportable	1
81	02.07.01.02.135	alat kedokteran gigi lainnya (dst)	1
82	02.08.01.12.024	Stabilizer	1
83	02.08.01.41.004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1
84	02.09.02.01.011	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	3
85	02.10.01.02.001	P.C Unit	83
86	02.10.01.02.002	Lap Top	49
87	02.10.01.02.003	Note Book	2
88	02.10.01.02.010	Personal Komputer lainnya	63
89	02.10.02.01.006	CPU (Peralatan Mainframe)	8
90	02.10.02.01.012	Hard Disk	3
91	02.10.02.01.013	Keyboard (Peralatan Mainframe)	10
92	02.10.02.02.006	CPU (Peralatan Mini Komputer)	1
93	02.10.02.02.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2
94	02.10.02.02.013	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	3
95	02.10.02.03.002	Monitor	10
96	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	61
97	02.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5
98	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	1
99	02.10.02.04.001	Server	10
100	02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	4
101	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	5
	JUMLAH		1724

Sumber: Simda BMD Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPPKAD telah menetapkan target sasaran dan program yang selaras dengan tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo dan disusun dalam Rencana Strategis BPPKAD Tahun 2025-2030 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja BPPKAD secara tahunan. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah periode 2025 sampai dengan 2029 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKPAD
Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1				79,58	68,78	78,71	83,84	84,20	84,56	79,58	68,78	78,71	83,84			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	Tertib Pengelolaan Kas Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	Persentase Realisasi Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Bantuan Keuangan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%			100,00%	100,00%	100,00%	93,71%		
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah				19.136	15.109	16.830	17.960	20.082	21.571	19.136	15.109	16.830	17.960			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	Rasio Pajak terhadap PDRB				0,43%	0,47%	0,44%	0,45%	0,73%	0,73%	0,43%	0,47%	0,44%	0,45%			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%			100%	100%	100%	97%		
	Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah									100%												
	Nilai Sakip Perangkat Daerah				68,00	68,50	69,00	69,50	70,00	70,50	68,00	68,50	69,00	69,50			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
BPKPAD Kabupaten Purworejo

Uraian		Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
5	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	-						-	-	-	-	-							
5.02	KEUANGAN	20.971.016.863	561.200.281.280	558.736.237.004	560.671.489.369	561.253.481.860	561.304.235.049	19.587.219.135	544.409.290.019	571.856.848.025	588.635.120.985	115.917.474.927		93,40%	97,00%	102,34%	104,98%		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.440.641.400	543.848.000.001	542.539.000.000	542.872.000.001	542.972.000.001	542.962.999.999	1.412.639.041	521.847.581.660	552.979.913.588	570.624.004.431	104.998.126.164		98,06%	95,95%	101,92%	105,11%		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	841.128.800	1.160.539.764	1.156.346.606	1.157.056.349	1.157.269.486	1.157.250.303	837.339.792	1.099.625.284	598.485.292	707.479.113	240.959.981		99,55%	94,75%	51,76%	61,14%		
5.02.02.2.01.0 001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	-	219.051.997	218.524.756	218.658.882	218.699.160	218.695.535	-	128.682.675	51.337.700	53.075.800	9.340.497			58,75%	23,49%	24,27%		
5.02.02.2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	57.005.695	56.868.487	56.903.392	56.913.874	56.912.930	-	88.100.200	30.195.400	50.991.500	42.573.341			154,55%	53,10%	89,61%		
5.02.02.2.01.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	616.298.000	283.548.017	282.865.539	283.039.157	283.091.294	283.086.602	613.464.692	271.007.460	134.441.236	222.241.164	57.877.026		99,54%	95,58%	47,53%	78,52%		
5.02.02.2.01.0 008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	279.824.862	279.151.345	279.322.683	279.374.135	279.369.505	-	271.757.606	218.832.008	217.136.665	68.041.875			97,12%	78,39%	77,74%		
5.02.02.2.01.0 009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	224.830.800	165.239.293	164.841.574	164.942.751	164.973.134	164.970.400	223.875.100	163.536.587	40.067.400	47.810.800	7.444.995		99,57%	98,97%	24,31%	28,99%		
5.02.02.2.01.0 011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-	155.869.900	154.094.905	154.189.485	154.217.888	154.215.331	-	176.540.756	123.611.548	116.223.184	55.682.247			113,26%	80,22%	75,38%		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	258.078.200	496.500.321	495.305.283	495.609.292	495.700.586	495.692.369	242.696.770	501.481.833	302.567.142	206.499.259	108.257.150		94,04%	101,00%	61,09%	41,67%		
5.02.02.2.02.0 001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	53.230.000	115.596.083	64.841.407	64.881.206	64.893.157	64.892.081	52.541.248	84.056.900	55.664.942	31.285.029	13.750.000		98,71%	72,72%	85,85%	48,22%		
5.02.02.2.02.0 003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	204.848.200	-	20.190.578	20.202.970	20.206.692	20.206.357	190.155.522	-	-	-	90.000		92,83%		0,00%	0,00%		
5.02.02.2.02.0 004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	-	-	10.095.289	10.101.485	10.103.346	10.103.179	-	-	-	-	-				0,00%	0,00%		
5.02.02.2.02.0 005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-	83.304.059	52.817.686	52.850.104	52.859.839	52.858.963	-	82.090.273	81.100.000	36.039.930	10.072.400			98,54%	153,55%	68,19%		
5.02.02.2.02.0 006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan	-	-	-	-	-	-	-	-	17.588.600	8.127.000	1.570.000							

Uraian		Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
5.02.02.2.02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.762.200							
5.02.02.2.02.0 008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-	76.115.027	75.931.824	75.978.430	75.992.425	75.991.166	-	75.898.360	7.212.800	15.931.200	2.330.000			99,72%	9,50%	20,97%		
5.02.02.2.02.0 009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	-	80.617.425	80.423.385	80.472.747	80.487.571	80.486.237	-	133.230.400	68.970.500	53.538.400	45.037.150			165,26%	85,76%	66,53%		
5.02.02.2.02.0 010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-	-	50.476.445	50.507.426	50.516.730	50.515.893	-	-	30.983.500	40.045.700	15.609.400				61,38%	79,29%		
5.02.02.2.02.0 011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	50.015.526	49.895.142	49.925.767	49.934.963	49.934.136	-	58.399.400	41.046.800	21.532.000	14.036.000			116,76%	82,27%	43,13%		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	218.840.000	519.381.524	518.131.412	518.449.432	518.544.933	518.536.338	216.350.403	424.050.618	327.379.674	188.537.300	120.549.012		98,86%	81,65%	63,18%	36,37%		
5.02.02.2.03.0 001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	35.977.400	20.006.210	-	-	-	-	35.539.943	-	-	-	-		98,78%	0,00%				
5.02.02.2.03.0 002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	-	-	19.958.057	19.970.307	19.973.985	19.973.654	-	-	-	-	6.095.000				0,00%	0,00%		
5.02.02.2.03.0 003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	182.862.600	36.719.798	36.631.417	36.653.900	36.660.652	36.660.044	180.810.460	36.668.400	27.929.500	8.149.800	5.300.000		98,88%	99,86%	76,24%	22,23%		

Uraian		Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
5.02.02.2.03.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	248.512.842	172.200.024	172.305.717	172.337.456	172.334.600	-	-	162.719.074	101.584.300	82.736.412			0,00%	94,49%	58,96%		
5.02.02.2.03.0 006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	43.549.318	33.349.210	33.369.679	33.375.826	33.375.272	-	-	-	-	1.590.000			0,00%	0,00%	0,00%		
5.02.02.2.03.0 007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-	80.024.841	79.832.227	79.881.227	79.895.941	79.894.617	-	77.995.671	32.998.000	37.298.000	-			97,46%	41,33%	46,69%		
5.02.02.2.03.0 008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	10.095.289	10.101.485	10.103.346	10.103.179	-	-	-	2.650.000	-				0,00%	26,23%		
5.02.02.2.03.0 010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	43.204.611	43.100.621	43.127.076	43.135.020	43.134.305	-	22.210.900	39.182.800	-	3.637.600			51,41%	90,91%	0,00%		
5.02.02.2.03.0 011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
5.02.02.2.03.0 012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	-	47.363.902	47.249.901	47.278.902	47.287.611	47.286.827	-	51.466.880	31.734.400	21.267.000	9.010.000			108,66%	67,16%	44,98%		
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	122.594.400	541.584.032.216	540.281.881.240	540.613.495.864	540.713.079.835	540.704.117.277	116.252.076	519.769.839.325	551.723.450.488	569.500.889.559	104.523.645.021		94,83%	95,97%	102,12%	105,34%		
5.02.02.2.04.0 001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	-	90.506.094	90.288.253	90.343.670	90.360.312	90.358.814	-	-	-	-	-			0,00%	0,00%	0,00%		
5.02.02.2.04.0 004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	243.496.496	173.234.168	-	-			24,35%	17,32%	0,00%		
5.02.02.2.04.0 008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	122.594.400	529.348.257.083	525.070.742.824	525.396.090.048	525.493.791.917	525.484.998.749	116.252.076	499.935.018.429	539.594.245.102	556.755.560.777	104.523.645.021		94,83%	94,44%	102,77%	105,97%		
5.02.02.2.04.0 009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	-	-	-			0,00%	0,00%	0,00%		
5.02.02.2.04.0 010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	-	10.145.269.039	12.120.850.162	12.127.062.145	12.128.927.605	12.128.759.714	-	19.591.324.400	11.955.971.218	12.745.328.782	-			193,11%	98,64%	105,10%		

Uraian		Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	87.546.176	87.335.459	87.389.064	87.405.161	87.403.712	-	52.584.600	28.030.992	20.599.200	4.715.000			60,06%	32,10%	23,57%		
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-	87.546.176	87.335.459	87.389.064	87.405.161	87.403.712	-	52.584.600	28.030.992	20.599.200	4.715.000			60,06%	32,10%	23,57%		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	694.964.100	1.729.999.999	1.247.000.000	1.369.999.999	1.406.999.999	1.404.000.001	623.423.660	2.020.551.060	1.000.212.472	871.031.452	267.342.513		89,71%	116,79%	80,21%	63,58%		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	694.964.100	1.729.999.999	1.247.000.000	1.369.999.999	1.406.999.999	1.404.000.001	623.423.660	2.020.551.060	1.000.212.472	871.031.452	267.342.513		89,71%	116,79%	80,21%	63,58%		
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	-	181.090.136	130.531.445	143.406.639	147.279.665	146.965.636	-	196.702.088	103.213.000	81.501.000	9.601.300			108,62%	79,07%	56,83%		
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	34.089.666	37.452.160	38.463.641	38.381.629	-	-	-	-	-				0,00%	0,00%		
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	13.538.358	9.758.573	10.721.127	11.010.676	10.987.199	-	20.159.500	1.640.900	5.812.800	3.117.800			148,91%	16,81%	54,22%		
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	35.604.977	25.664.397	28.195.849	28.957.343	28.895.600	-	75.651.800	-	-	-			212,48%	0,00%	0,00%		
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	55.765.000	238.625.847	103.824.385	114.065.282	117.145.877	116.896.100	55.579.792	172.129.464	260.343.775	71.289.456	43.153.764		99,67%	72,13%	250,75%	62,50%		
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	-	-	68.179.333	74.904.319	76.927.283	76.763.259	-	-	25.203.600	155.013.700	43.894.800				36,97%	206,95%		
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	442.026.600	973.236.116	558.340.994	613.413.923	629.980.577	628.637.335	382.798.984	1.497.847.132	554.058.852	539.823.296	167.274.849		86,60%	153,90%	99,23%	88,00%		
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	-	174.371.236	125.688.400	138.085.892	141.815.219	141.512.841	-	3.297.800	3.619.800	-	-			1,89%	2,88%	0,00%		
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	177.202.500	55.146.979	39.750.453	43.671.307	44.850.751	44.755.121	165.894.784	36.339.288	5.362.800	2.452.800	-		93,62%	65,90%	13,49%	5,62%		
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	19.970.000	28.017.877	88.374.878	97.091.887	99.714.076	99.501.466	19.150.100	-	26.380.745	5.410.800	-		95,89%	0,00%	29,85%	5,57%		
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	-	20.453.800	22.471.296	23.078.185	23.028.978	-	-	9.454.800	3.399.400	100.000				46,23%	15,13%		
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	30.368.473	21.889.876	24.049.022	24.698.521	24.645.859	-	18.423.988	5.448.000	3.913.000	100.000			60,67%	24,89%	16,27%		
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	20.453.800	22.471.296	23.078.185	23.028.978	-	-	5.486.200	2.415.200	100.000				26,82%	10,75%		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.748.266.918	4.123.000.001	2.971.999.999	3.265.000.000	3.352.999.999	3.345.000.001	3.696.739.832	5.677.953.619	4.365.853.789	3.936.503.899	1.947.597.361		98,63%	137,71%	146,90%	120,57%		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.748.266.918	4.123.000.001	2.971.999.999	3.265.000.000	3.352.999.999	3.345.000.001	3.696.739.832	5.677.953.619	4.365.853.789	3.936.503.899	1.947.597.361		98,63%	137,71%	146,90%	120,57%		

Uraian		Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
5.02.04.2.01.0 001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	-	18.621.424	13.422.962	14.746.289	15.143.739	15.107.607	-	-	-	-	-			0,00%	0,00%	0,00%		
5.02.04.2.01.0 002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	208.892.450	110.936.627	79.966.931	87.850.615	90.218.411	90.003.157	207.146.400	-	226.481.418	64.573.419	19.733.600		99,16%	0,00%	283,22%	73,50%		
5.02.04.2.01.0 003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		429.336.268	309.480.327	339.991.005	349.154.622	348.321.566	-	408.835.016	487.082.244	319.222.635	253.319.775			95,22%	157,39%	93,89%		
5.02.04.2.01.0 004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	275.473.017	198.570.411	218.146.835	224.026.443	223.491.933	-	1.273.627.515	227.269.950	123.347.300	273.717.645			462,34%	114,45%	56,54%		
5.02.04.2.01.0 005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	712.954.000	919.526.170	599.049.219	600.107.571	650.845.233	640.232.718	708.545.468	811.790.068	328.246.181	499.485.718	97.175.983		99,38%	88,28%	54,79%	83,23%		
5.02.04.2.01.0 007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	128.571.948	92.679.076	101.816.011	104.560.209	104.310.737	-	103.917.442	86.753.131	26.212.728	16.066.144			80,82%	93,61%	25,75%		
5.02.04.2.01.0 008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	-	209.113.593	150.736.259	165.596.866	170.060.120	169.654.370	-	185.272.300	195.857.760	185.622.560	9.102.400			88,60%	129,93%	112,09%		
5.02.04.2.01.0 009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	681.154.200	453.594.716	326.966.649	359.201.248	368.882.630	368.002.504	660.983.768	453.393.906	270.934.974	249.496.617	93.189.024		97,04%	99,96%	82,86%	69,46%		
5.02.04.2.01.0 011	Penagihan Pajak Daerah	2.010.013.668	1.318.278.704	950.260.564	1.043.943.722	1.072.080.643	1.069.522.742	1.985.916.696	1.876.586.962	2.327.955.921	2.270.394.402	1.108.487.952		98,80%	142,35%	244,98%	217,48%		
5.02.04.2.01.0 012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-	-	31.888.412	35.032.189	35.976.395	35.890.558	-	-	-	-	7.485.299				0,00%	0,00%		
5.02.04.2.01.0 013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	135.252.600	45.628.512	64.779.011	71.165.367	73.083.453	72.909.082	134.147.500	88.349.900	75.914.700	25.837.000	22.312.398		99,18%	193,63%	117,19%	36,31%		
5.02.04.2.01.0 014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	213.919.022	154.200.178	169.402.282	173.968.101	173.553.027	-	-	139.357.510	144.418.320	43.827.141			0,00%	90,37%	85,25%		
5.02.04.2.01.0 015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	-	-	58.000.000	25.000.000	34.000.000	-	-	-	-	3.180.000					0,00%		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.087.144.445	11.499.281.279	11.978.237.005	13.164.489.369	13.521.481.861	13.592.235.048	13.854.416.602	14.863.203.680	13.510.868.176	13.203.581.203	8.704.408.889		91,83%	128,76%	112,34%	99,89%		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.228.892	107.741.786	112.255.220	123.372.298	126.717.888	127.380.962	97.013.792	132.257.852	111.161.479	59.253.128	39.092.444		98,76%	122,75%	99,03%	48,03%		
5.02.01.2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.249.892	54.571.028	56.857.075	62.487.855	64.182.391	64.518.234	89.449.792	76.109.652	68.776.779	39.162.128	23.413.544		99,11%	139,47%	120,96%	62,67%		
5.02.01.2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	3.701.806	3.856.879	4.238.841	4.353.790	4.376.572	-	5.296.000	2.701.800	3.367.000	1.736.600			143,07%	70,05%	79,43%		
5.02.01.2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	2.691.079	2.803.811	3.081.484	3.165.047	3.181.615	-	-	-	-	1.736.600			0,00%	0,00%	0,00%		

Uraian		Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
5.02.01.2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	3.362.101	3.502.944	3.849.854	3.954.254	3.974.945	-	-	1.519.600	3.992.000	1.736.600			0,00%	43,38%	103,69%		
5.02.01.2.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	4.258.196	4.436.577	4.875.948	5.008.173	5.034.380	-	-	3.428.800	-	1.736.600			0,00%	77,28%	0,00%		
5.02.01.2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	24.858.440	25.899.790	28.464.749	29.236.651	29.389.637	-	30.848.200	23.854.500	8.319.000	6.000.000			124,10%	92,10%	29,23%		
5.02.01.2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.979.000	14.299.136	14.898.143	16.373.566	16.817.581	16.905.582	7.564.000	13.912.500	10.880.000	4.413.000	2.732.500		94,80%	97,30%	73,03%	26,95%		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.017.314.243	10.303.532.694	10.735.159.985	11.798.305.499	12.118.250.038	12.181.660.600	12.834.357.001	12.884.476.021	12.271.206.563	11.841.059.346	7.947.715.016		91,56%	125,05%	114,31%	100,36%		
5.02.01.2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.967.084.143	10.242.049.228	10.671.100.903	11.727.902.392	12.045.937.751	12.108.969.928	12.785.434.901	12.827.580.387	12.213.351.956	11.802.092.290	7.923.867.764		91,54%	125,24%	114,45%	100,63%		
5.02.01.2.02.0 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	13.322.588	13.880.688	15.255.347	15.669.039	15.751.030	-	-	-	-	-			0,00%	0,00%	0,00%		
5.02.01.2.02.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	9.399.624	9.793.386	10.763.264	11.055.140	11.112.988	-	10.072.800	13.447.600	6.712.000	4.807.600			107,16%	137,31%	62,36%		
5.02.01.2.02.0 006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	2.806.411	2.923.975	3.213.548	3.300.692	3.317.964	-	-	-	-	-			0,00%	0,00%	0,00%		
5.02.01.2.02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	50.230.100	33.063.855	34.448.939	37.860.554	38.887.251	39.090.734	48.922.100	-	44.407.007	32.255.056	19.039.652		97,40%	0,00%	128,91%	85,19%		
5.02.01.2.02.0 008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	2.890.988	3.012.095	3.310.394	3.400.165	3.417.957	-	-	-	-	-			0,00%	0,00%	0,00%		
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	18.695.660	16.715.940	18.371.386	18.869.578	18.968.316	-	25.103.852	17.725.516	23.059.128	11.579.480			134,28%	106,04%	125,52%		
5.02.01.2.03.0 006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	18.695.660	16.715.940	18.371.386	18.869.578	18.968.316	-	25.103.852	17.725.516	23.059.128	11.579.480			134,28%	106,04%	125,52%		
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	27.392.645	9.345.000	-	-							
5.02.01.2.05.0 005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	6.343.957	9.372.616	10.300.823	10.580.159	10.635.521	-	4.338.000	-	-	-			68,38%	0,00%	0,00%		
5.02.01.2.05.0 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	37.382.932	38.948.947	42.806.216	43.967.028	44.197.092	-	23.054.645	9.345.000	-	-			61,67%	23,99%	0,00%		
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	281.646.190	387.997.112	404.250.774	444.285.334	456.333.391	458.721.224	280.112.414	559.376.397	444.776.580	348.688.718	152.382.302		99,46%	144,17%	110,02%	78,48%		
5.02.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
5.02.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	13.193.347	13.746.032	15.107.356	15.517.035	15.598.230	-	5.763.000	-	-	-			43,68%	0,00%	0,00%		
5.02.01.2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	33.373.503	34.771.559	38.215.125	39.251.436	39.456.826	-	38.135.800	33.586.400	23.319.000	22.519.826			114,27%	96,59%	61,02%		

Uraian		Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
5.02.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	106.566.728	111.030.935	122.026.770	125.335.872	125.991.711	-	151.578.000	127.197.000	140.301.000	40.585.500			142,24%	114,56%	114,98%		
5.02.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	30.577.787	31.858.727	35.013.823	35.963.322	36.151.506	-	41.326.200	31.465.400	13.370.800	9.636.308			135,15%	98,77%	38,19%		
5.02.01.2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	931.043	970.046	1.066.113	1.095.024	1.100.754	-	1.320.000	1.320.000	1.320.000	770.000			141,78%	136,08%	123,81%		
5.02.01.2.06.0 007	Penyediaan Bahan/Material	-	26.748.766	27.869.304	30.629.311	31.459.912	31.624.531	-	34.967.400	29.871.100	12.468.300	10.316.700			130,73%	107,18%	40,71%		
5.02.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.646.190	107.200.005	111.690.741	122.751.919	126.080.686	126.740.422	280.112.414	194.092.933	155.978.836	105.347.262	37.476.868		99,46%	181,06%	139,65%	85,82%		
5.02.01.2.06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	52.057.210	51.475.046	56.572.824	58.106.957	58.411.010	-	77.068.064	55.213.444	42.546.056	20.955.774			148,04%	107,26%	75,21%		
5.02.01.2.06.0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	3.369.091	6.273.130	6.894.383	7.081.343	7.118.397	-	-	-	-	-			0,00%	0,00%	0,00%		
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	159.341.233	166.016.228	182.457.474	187.405.326	188.385.953	-	374.589.600	-	-	-			235,09%	0,00%	0,00%		
5.02.01.2.07.0 001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
5.02.01.2.07.0 002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
5.02.01.2.07.0 005	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
5.02.01.2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	89.443.078	93.189.955	102.418.926	105.196.306	105.746.762	-	176.376.900	-	-	-			197,19%	0,00%	0,00%		
5.02.01.2.07.0 008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
5.02.01.2.07.0 009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
5.02.01.2.07.0 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
5.02.01.2.07.0 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	69.898.155	72.826.273	80.038.548	82.209.020	82.639.191	-	198.212.700	-	-	-			283,57%	0,00%	0,00%		
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.363.320	237.808.833	247.770.929	272.308.667	279.693.090	281.156.626	429.169.615	300.820.373	378.579.975	700.433.047	441.044.665		91,44%	126,50%	152,79%	257,22%		
5.02.01.2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	113.618.272	11.714.581	12.205.319	13.414.060	13.777.821	13.849.915	108.787.772	44.500	68.500	-	-		95,75%	0,38%	0,56%	0,00%		
5.02.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	278.518.000	173.347.426	180.609.156	198.495.598	203.878.370	204.945.194	243.351.011	236.675.701	296.131.349	280.673.191	153.098.132		87,37%	136,53%	163,96%	141,40%		
5.02.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.227.048	52.746.826	54.956.453	60.399.009	62.036.900	62.361.517	77.030.832	64.100.172	82.380.126	419.759.856	287.946.533		99,75%	121,52%	149,90%	694,98%		
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.591.800	284.163.961	296.067.929	325.388.711	334.212.550	335.961.367	213.763.780	559.186.940	278.073.063	231.087.836	112.594.982		96,90%	196,78%	93,92%	71,02%		

Uraian		Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
5.02.01.2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	124.285.600	19.874.842	20.707.422	22.758.161	23.375.313	23.497.628	124.188.280	-	23.123.877	34.799.901	16.518.921		99,92%	0,00%	111,67%	152,91%		
5.02.01.2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	78.357.929	81.640.436	89.725.613	92.158.778	92.641.012	-	-	82.260.900	93.447.935	63.970.561			0,00%	100,76%	104,15%		
5.02.01.2.09.0 005	Pemeliharaan Mebel	-	6.465.579	6.736.430	7.403.566	7.604.334	7.644.125	-	-	-	-	-			0,00%	0,00%	0,00%		
5.02.01.2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	34.204.662	35.637.537	39.166.863	40.228.984	40.439.488	-	71.420.000	38.764.000	31.020.000	-			208,80%	108,77%	79,20%		
5.02.01.2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.879.200	95.403.992	99.400.580	109.244.614	112.207.091	112.794.232	12.715.000	284.510.000	93.278.586	23.324.000	23.158.000		98,73%	298,22%	93,84%	21,35%		
5.02.01.2.09.0 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.427.000	49.856.956	51.945.524	57.089.895	58.638.050	58.944.882	76.860.500	62.720.000	40.645.700	48.496.000	8.947.500		92,13%	125,80%	78,25%	84,95%		

Tabel 2. 7 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024
BPKPAD Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1	77.628	79.583	68.775	78.713	83.839	Tujuan Perangkat Dearah : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sasaran Perangkat Daerah : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
	1. Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	100%	100%	100%	100%	100%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	2. Tertib Pengelolaan Kas Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
	3. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
	4. Persentase Realisasi Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Bantuan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	
	5. Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	93,71%	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	- Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah -Rasio Pajak terhadap PDRB						Sasaran Perangkat Daerah : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
	Persentase Tertib Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	99,95%	97,28%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Nilai Sakip Perangkat Daerah	68,00	68,00	68,50	69,00	69,50	Sasaran Perangkat Daerah : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan utama dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah berakar pada masalah internal dan eksternal. Secara internal, terdapat kendala signifikan dalam tata kelola keuangan, pengelolaan aset, dan sumber daya manusia (SDM).

a) Tata Kelola Keuangan dan Aset: Pengelolaan keuangan daerah masih terhambat oleh kurangnya disiplin anggaran di tingkat OPD, inefektivitas sistem pengendalian internal, dan koordinasi yang lemah. Selain itu, implementasi sistem informasi terpadu seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) masih belum optimal, menyebabkan inkonsistensi data, keterlambatan pelaporan, dan kesalahan input. Dalam hal aset, penatausahaan dan legalitas aset (seperti sertifikasi tanah) belum sepenuhnya tertib. Hal ini menghambat optimalisasi aset sebagai sumber pendapatan daerah.

b) Sumber Daya Manusia: Kapasitas dan disiplin pengelola keuangan di tingkat OPD masih perlu ditingkatkan. Masih banyak kendala yang dihadapi, seperti keterlambatan pencatatan dan kurangnya pemahaman tentang regulasi baru.

c) Layanan Berbasis Teknologi: Layanan perpajakan bagi masyarakat masih belum didukung secara memadai oleh sarana teknologi. Pemutakhiran basis data PBB berjalan lambat karena keterbatasan tenaga dan jumlah objek pajak yang besar. Hal ini berdampak langsung pada kecepatan dan akurasi layanan.

Di balik tantangan tersebut, terdapat berbagai peluang untuk perbaikan dan pengembangan pelayanan perangkat daerah.

a) Optimalisasi Pendapatan Daerah: Meskipun kontribusi PAD masih rendah, tren pertumbuhan pendapatan daerah yang positif menunjukkan adanya potensi yang belum tergali. Peluang ini dapat dimanfaatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, misalnya dengan mengidentifikasi sumber-sumber pajak dan retribusi baru, serta memperbaiki tata kelola administrasi pendapatan.

b) Pemanfaatan Teknologi: Implementasi aplikasi SIPD yang terintegrasi menjadi peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Jika diterapkan secara optimal, SIPD dapat menyinkronkan perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, dan pelaporan keuangan. Ini akan mengurangi kesalahan, mempercepat proses, dan meningkatkan transparansi.

c) Peningkatan Kapasitas SDM: Dengan adanya regulasi baru, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola keuangan dan aset di seluruh OPD menjadi suatu keharusan. BPKPAD dapat mengambil peran sentral dalam memfasilitasi program-program ini untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan.

d) Peningkatan Pengelolaan Aset: Adanya program sertifikasi aset tanah secara bertahap merupakan langkah positif untuk mewujudkan tertib hukum dan administrasi aset. Upaya ini dapat dilanjutkan dan dipercepat, termasuk dengan memperbarui dokumen kerja sama pemanfaatan aset, sehingga aset daerah dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh BPKPAD Purworejo dapat diubah menjadi peluang dengan pendekatan strategis yang fokus pada perbaikan sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi secara menyeluruh. Hal ini akan memperkuat kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan di BPKPAD dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Daftar Kelompok Sasaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan di BPKPAD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Aparatur
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Aparatur
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Aparatur
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Aparatur
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Aparatur
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Aparatur
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Aparatur
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Aparatur
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Aparatur

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Aparatur
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Aparatur
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Aparatur
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Aparatur
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Aparatur
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Aparatur
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Aparatur
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Aparatur
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Aparatur
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Aparatur
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Aparatur
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Aparatur
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Aparatur
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Aparatur
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Aparatur
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Aparatur
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Aparatur
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Aparatur
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Aparatur
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Aparatur
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Aparatur
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Aparatur
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Aparatur
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Aparatur
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Aparatur
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Aparatur
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Aparatur
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Aparatur
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Aparatur
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Aparatur
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Aparatur
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Aparatur dan Masyarakat
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Aparatur dan Masyarakat
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Aparatur dan Masyarakat
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Aparatur dan Masyarakat
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Aparatur dan Masyarakat
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Aparatur dan Masyarakat
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Aparatur dan Masyarakat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Aparatur dan Masyarakat
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Aparatur dan Masyarakat
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Aparatur dan Masyarakat
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Aparatur dan Masyarakat
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Aparatur dan Masyarakat
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aparatur
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aparatur
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Aparatur
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Aparatur
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Aparatur
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Aparatur
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Aparatur
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Aparatur
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aparatur
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Aparatur
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Aparatur
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Aparatur
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Aparatur
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Aparatur
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Aparatur
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Aparatur

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purworejo juga muncul dalam bentuk akuntabilitas keuangan yang belum disertai dengan kemandirian keuangan daerah. Meskipun telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam sepuluh tahun terakhir, Kabupaten Purworejo masih belum menjadi daerah yang mandiri karena masih tergantung pada dana transfer dari pusat. Masalah ini terjadi karena beberapa hal, antara lain pengelolaan penerimaan daerah yang belum optimal dan pemanfaatan aset daerah yang belum maksimal. Kemampuan keuangan daerah yang masih rendah juga diindikasikan oleh kurangnya upaya untuk menggali sumber pendanaan lainnya di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada akar masalah pengelolaan penerimaan daerah yang belum optimal, terdapat permasalahan yang lebih rinci seperti kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang perlu ditingkatkan serta pengelolaan dan pemungutan retribusi yang belum optimal. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang rendah mengindikasikan bahwa masih banyak potensi penerimaan daerah yang belum tergali sepenuhnya. Selain itu, mekanisme pengelolaan dan pemungutan retribusi yang belum efektif juga berkontribusi pada rendahnya penerimaan daerah dari sektor ini.

Mengenai pemanfaatan aset daerah yang belum optimal, masalah ini disebabkan oleh belum maksimalnya utilisasi aset daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih perlu ditingkatkan. Utilisasi aset daerah yang belum optimal mengakibatkan aset-aset yang dimiliki tidak memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah. Selain itu, pengelolaan BUMD yang belum efektif juga menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor ini. Hasil identifikasi permasalahan sesuai tugas dan Fungsi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 9 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	2	3	4
Belum memuaskannya implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Purworejo	Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah	Kemampuan keuangan daerah masih rendah	Ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi
			Kurangnya upaya untuk menggali sumber pendanaan lainnya (non APBD)
		Pengelolaan penerimaan daerah belum optimal	Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak perlu ditingkatkan
			Pengelolaan dan pemungutan retribusi belum optimal
		Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah	Belum optimalnya utilisasi aset daerah
			Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Berdasarkan hal tersebut dilakukan Identifikasi permasalahan dalam pelaksananaan urusan penunjang unsur keuangan yaitu ”Belum optimalnya tata kelola keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi”.

2.2.2 Isu Strategis

Analisis isu strategis dimulai dari penelaahan permasalahan, pengkajian lingkungan strategis baik internal maupun eksternal pada semua pada tugas dan fungsi BPKPAD dan perumusan kriteria strategis berdasarkan tujuan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan pembobotannya . Permasalahan Penyelenggaraan Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan adalah ”Belum optimalnya tata kelola keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi”.

Identifikasi dilakukan terhadap isu sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo 2025-2045, dan Dokumen KLHS RPJMD.

Tabel 2. 10 (Tabel 2.4) Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI WEWENANG	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah
	Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Baik			Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia		
	Reformasi Hukum Belum Optimal					
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Pelayanan publik prima belum merata		Cyber insecurity			
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Belum Optimal		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			
	Belum Optimalnya Implementasi Kualitas Kebijakan					

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

c.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada dokumen RPJMD 2025-2029 Kabupaten Purworejo Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2025-2029, yaitu: “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, Dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Untuk mewujudkan visi “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)” ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera.
2. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup san ketahanan bencana.
3. Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

c.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah ”Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif”

Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah

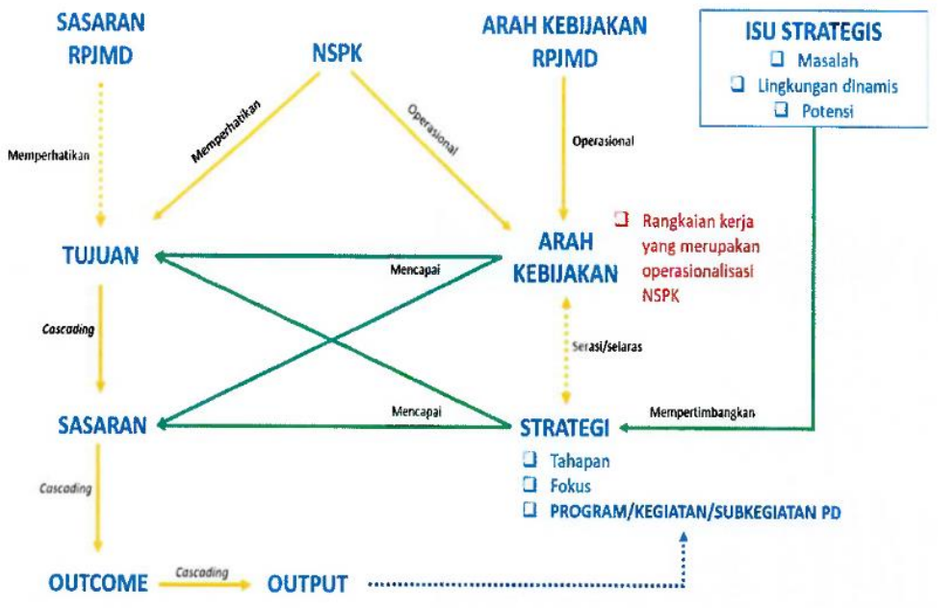

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No : 2 Tahun 2025

Selanjutnya, sasaran yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas manusia
2. Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi

Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

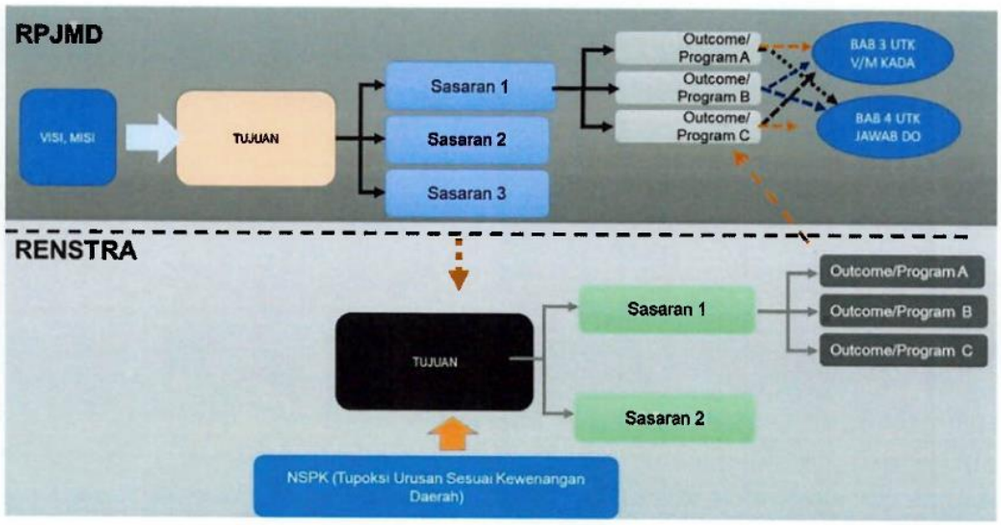

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No : 2 Tahun 2025

Maka berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran daerah yang sudah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dan berpedoman sesuai dengan tugas dan fungsi BPKPAD maka dirumuskan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						KETERANGAN
				2025*	2026	2027	2028	2029	2030	
Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi										
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	68.02	70.45	72.89	75.33	77.76	80.20	
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	68.02	70.45	72.89	75.33	77.76	80.20	
			Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	20,08%	21,57%	23,14%	24,78%	26,51%	26,51%	
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,71%	0,74%	0,76%	0,79%	0,82%	0,82%	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	20,08%	21,57%	23,14%	24,78%	26,51%	26,51%	
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,71%	0,74%	0,76%	0,79%	0,82%	0,82%	

c.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2029 merupakan sebuah rumusan perencanaan yang lebih komprehensif sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Strategi perangkat daerah perlu disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat yang sudah ditetapkan. Strategi ini merujuk pada rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan. Strategi perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat di tuangkan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra BPKPAD Kab.Purworejo

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Menguatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Memantapkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meneguhkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Menguatkan Kualitas Tata Kelola Pendapatan Daerah	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pendapatan Daerah	Memantapkan Kualitas Tata Kelola Pendapatan Daerah	Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pendapatan Daerah	Meneguhkan Kualitas Tata Kelola Pendapatan Daerah
Menguatkan sistem menejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Lokus Rencana Strategis mengacu pada bidang-bidang fokus utama yang menjadi prioritas Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo dalam Rencana Strategis 2025-2029. Lokus ini dirumuskan dari analisis masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPAD. Berikut adalah lokus atau fokus utama dari Rencana Strategis BPKPAD Kabupaten Purworejo

A. Keuangan Daerah

Lokus strategis di bidang keuangan daerah adalah optimalisasi pendapatan dan tata kelola keuangan yang tertib. BPKPAD berencana fokus pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ini termasuk peningkatan penerimaan pajak daerah melalui perbaikan administrasi dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, lokus ini juga mencakup penyesuaian tata kelola keuangan

daerah sesuai regulasi baru, seperti UU No. 1 Tahun 2022 dan Permendagri No. 90 Tahun 2020. Upaya ini akan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, termasuk optimalisasi penggunaan aplikasi SIPD.

B. Aset Daerah

Lokus strategis di bidang aset daerah adalah penertiban dan optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD). Fokus utamanya adalah memastikan tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik atas seluruh aset milik pemerintah daerah. Ini mencakup percepatan sertifikasi tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan, perbaikan administrasi kerja sama pemanfaatan aset, dan penataan ulang pencatatan aset. Tujuan akhirnya adalah agar aset daerah dapat dikelola secara efektif dan efisien, serta berkontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.

C. Pelayanan Publik

Lokus strategis di bidang pelayanan publik adalah peningkatan kualitas layanan perpajakan berbasis teknologi. BPKPAD akan memfokuskan upaya pada penyediaan sarana teknologi yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Ini termasuk pemutakhiran basis data pajak yang akurat, penyederhanaan proses bisnis, serta penambahan kanal pembayaran dan pelaporan elektronik.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 merupakan sebuah instrumen perencanaan yang berfungsi untuk memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan. Arah kebijakan ini merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan guna menyelesaikan isu dan permasalahan yang berkembang dengan memperhatikan sasaran strategis dalam tahapan waktu tertentu.

Prioritas pembangunan yang ditentukan pada setiap tahunnya memiliki kesinambungan satu sama lain yang dirangkai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Penetapan tema

atau fokus pembangunan tahunan bukan berarti mengabaikan kondisi rutin yang memang harus dikerjakan setiap tahunnya. Alokasi program rutin dan penyelenggaraan pelayanan publik harus terus menerus dilaksanakan dan diberikan alokasi pendanaan.

Prinsip perencanaan strategis dan perencanaan operasional harus berjalan secara seimbang dengan melaksanakan segala program yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi. Seperti halnya visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan melalui :

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	2	3	4	5
		Tahun 2026 Penguatan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB	Penguatan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB melalui aktivitas sebagai berikut : a. Koordinasi dan Penyusunan dokumen Anggaran Daerah b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah d. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah e. Koordinasi Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah f. Pengelolaan Barang Milik Daerah g. Pengelolaan Pajak Daerah h. Pengelolaan pendapatan Daerah (penatausahaan pendapatan transfer, pengelolaan retribusi, penyusunan data potensi PAD)	
		Tahun 2027 Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB	Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB melalui aktivitas sebagai berikut : a. Koordinasi dan Penyusunan dokumen Anggaran Daerah b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah d. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah e. Koordinasi Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah f. Pengelolaan Barang Milik Daerah g. Pengelolaan Pajak Daerah h. Pengelolaan pendapatan Daerah (penatausahaan pendapatan transfer, pengelolaan retribusi, penyusunan data potensi PAD)	
		Tahun 2028 Pemantapan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB	Pemantapan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB melalui aktivitas sebagai berikut : a. Koordinasi dan Penyusunan dokumen Anggaran Daerah b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah d. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	2	3	4	5
			e. Koordinasi Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah f. Pengelolaan Barang Milik Daerah g. Pengelolaan Pajak Daerah h. Pengelolaan pendapatan Daerah (penatausahaan pendapatan transfer, pengelolaan retribusi, penyusunan data potensi PAD)	
		Tshun 2029 Perwujudan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB	Perwujudan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB melalui aktivitas sebagai berikut : a. Koordinasi dan Penyusunan dokumen Anggaran Daerah b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah d. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah e. Koordinasi Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah f. Pengelolaan Barang Milik Daerah g. Pengelolaan Pajak Daerah h. Pengelolaan pendapatan Daerah (penatausahaan pendapatan transfer, pengelolaan retribusi, penyusunan data potensi PAD)	
		Tshun 2030 Peneguhan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB	Peneguhan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB melalui aktivitas sebagai berikut : a. Koordinasi dan Penyusunan dokumen Anggaran Daerah b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah d. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah e. Koordinasi Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah f. Pengelolaan Barang Milik Daerah g. Pengelolaan Pajak Daerah h. Pengelolaan pendapatan Daerah (penatausahaan pendapatan transfer, pengelolaan retribusi, penyusunan data potensi PAD)	
		Tahun 2026 Menguatkan sistem menejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Menguatkan sistem menejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah melalui aktivitas sebagai berikut : a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Tahun 2027 Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah melalui aktivitas sebagai berikut : a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Tahun 2028 Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam	Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah melalui aktivitas sebagai berikut :	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	2	3	4	5
		mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Tahun 2029 Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah melalui aktivitas sebagai berikut : a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Tahun 2030 Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah melalui aktivitas sebagai berikut : a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

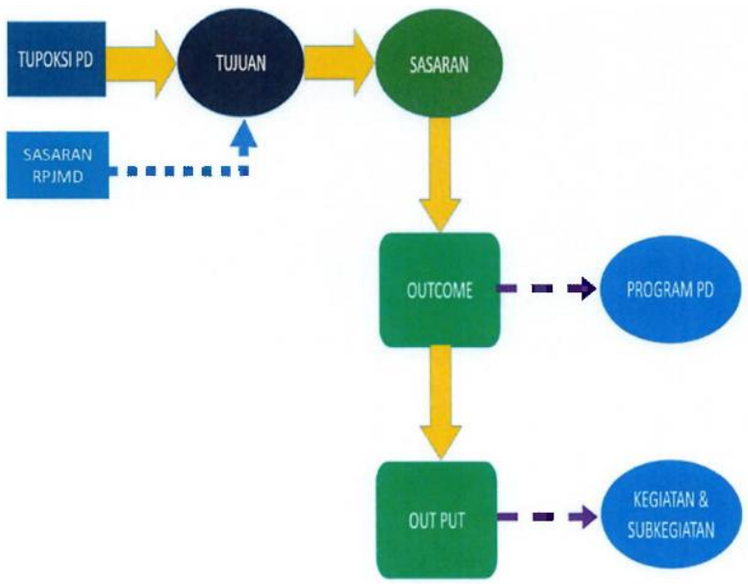

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No : 2 Tahun 2025

4.1.1 Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi kumpulan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rencana program prioritas perangkat daerah didasarkan pada kerangka pendanaan pembangunan pendanaan daerah dan dilaksanakan pada kurun waktu Tahun 2025-2030. Program prioritas perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD adalah :

I. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program ini diarahkan pada koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, coordinating dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.

II. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada pengelolaan barang milik daerah. Indikator kinerja program ini adalah persentase tertib pengelolaan Barang Milik Daerah.

III. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada pengelolaan pendapatan daerah. Indikator kinerja program ini adalah persentase tertib pengelolaan pendapatan daerah.

IV. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Program ini diarahkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

4.1.2 Kegiatan

Kegiatan Perangkat Daerah adalah bagian dari Program yang dilaksanakan perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Kinerja yang dihasilkan menunjukkan keberhasilan pelaksanaan suatu program dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas dan fungsi. Penentuan Program dan Kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

4.1.3 Sub Kegiatan

Uraian Sub Kegiatan pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1		Tujuan
		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah			Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)		Sasaran
			Meningkatnya tata kelola anggaran daerah		Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Program
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kegiatan
						Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Sub Kegiatan
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sub Kegiatan
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Sub Kegiatan
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Sub Kegiatan
						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Sub Kegiatan
					Persentase Realisasi Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Bantuan Keuangan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Program
				Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan
						Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan
						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sub Kegiatan
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Sub Kegiatan
						Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
			Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan daerah		Tertib Pengelolaan Kas Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Program
				Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Sub Kegiatan
						Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Sub Kegiatan
						Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Sub Kegiatan
						Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Sub Kegiatan
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Sub Kegiatan
						Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Sub Kegiatan
						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Sub Kegiatan
						Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
						Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
			Meningkatnya tata kelola akutansi daerah		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Program
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyelenggaraan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kegiatan
						Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Sub Kegiatan
						Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Sub Kegiatan
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
						Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Sub Kegiatan
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Sub Kegiatan
						Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan
						Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
					Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Program
				Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kegiatan
						Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Sub Kegiatan
			Meningkatnya tata kelola aset daerah		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Program
				Terlaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan
						Penyusunan Standar Harga	Sub Kegiatan
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan
						Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan
						Inventarisasi Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan
						Pengamanan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan
						Penilaian Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan
						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan
						Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan
						Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		Sasaran
			Meningkatnya tata kelola pajak daerah		Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Program
				Telaksananya pengelolaan pajak daerah	Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Sub Kegiatan
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sub Kegiatan
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sub Kegiatan
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Sub Kegiatan
						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Sub Kegiatan
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	Sub Kegiatan
						Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Sub Kegiatan
						Penagihan Pajak Daerah	Sub Kegiatan
						Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Sub Kegiatan
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Sub Kegiatan
					Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		Sasaran
			Meningkatnya tata kelola pendapatan daerah		Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Program
				Telaksananya pengelolaan pendapatan asli daerah	Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kegiatan
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sub Kegiatan
						Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai Sakip Perangkat Daerah		Sasaran
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Kegiatan
						Penyediaan Bahan/Material	Sub Kegiatan
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan

Tabel 4. 2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	83,84	84,56		84,92		85,28		85,65		86,01		86,01			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	69,38		70,77		72,18		73,63		75,1		75,1			
5.02	KEUANGAN						21.539.057.796		20.564.961.000		18.442.898.000		18.442.898.000		18.442.898.000				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	21.539.057.796	100	20.564.961.000	100	18.442.898.000	100	18.442.898.000	100	18.442.898.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	7	24	19.651.700	24	20.634.285	24	21.666.000	24	22.749.299	24	23.886.765	24			
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	13.241.800	22	13.903.890	22	14.599.085	22	15.329.039	22	16.095.491	110			
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	22	6.409.900	22	6.730.395	22	7.066.915	22	7.420.260	22	7.791.274	110			
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	20.170.717.096	100	19.128.203.265	100	16.934.302.375	100	16.858.872.597	100	16.779.671.327	100			
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/	80	96	20.159.590.396	96	19.116.520.230	96	16.922.035.188	96	16.845.992.051	96	16.766.146.754	480			
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	44	11.126.700	44	11.683.035	44	12.267.187	44	12.880.546	44	13.524.573	220			
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	%	100	100	898.400	100	943.320	100	990.486	100	1.040.010	100	1.092.011	100			
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	11	898.400	11	943.320	11	990.486	11	1.040.010	11	1.092.011	55			
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	223.608.000	100	234.788.400	100	246.527.821	100	258.854.211	100	271.796.921	100			
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	8.745.500	1	9.182.775	1	9.641.914	1	10.124.009	1	10.630.210	5			
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	22.535.400	1	23.662.170	1	24.845.279	1	26.087.542	1	27.391.920	5			
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	109.153.800	1	114.611.490	1	120.342.065	1	126.359.168	1	132.677.126	5			
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	11.847.600	1	12.439.980	1	13.061.979	1	13.715.078	1	14.400.832	5			
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	1.332.000	12	1.398.600	12	1.468.530	12	1.541.957	12	1.619.054	60			
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	8.683.300	1	9.117.465	1	9.573.338	1	10.052.005	1	10.554.605	5			
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	48.026.000	1	50.427.300	1	52.948.665	1	55.596.098	1	58.375.903	5			
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	13.284.400	1	13.948.620	1	14.646.051	1	15.378.354	1	16.147.271	5			
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Laporan	3	36	753.170.600	36	790.829.130	36	830.370.587	36	871.889.116	36	915.483.571	36			
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	305.586.600	12	320.865.930	12	336.909.227	12	353.754.688	12	371.442.422	60			
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	447.584.000	12	469.963.200	12	493.461.360	12	518.134.428	12	544.041.149	60			
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis	5	6	371.012.000	6	389.562.600	6	409.040.731	6	429.492.767	6	450.967.405	6			
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	39.950.000	1	41.947.500	1	44.044.875	1	46.247.119	1	48.559.475	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	47	233.650.000	47	245.332.500	47	257.599.125	47	270.479.081	47	284.003.035	235			
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	44	44	29.200.000	44	30.660.000	44	32.193.000	44	33.802.650	44	35.492.783	220			
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	23.355.000	2	24.522.750	2	25.748.888	2	27.036.332	2	28.388.148	10			
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	29	42	44.857.000	42	47.099.850	42	49.454.843	42	51.927.585	42	54.523.964	210			
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		Opini Badan Pemeriksa Keuangan	%	100	100		100		100		100		100		100			
5.02	KEUANGAN						574.564.563.002		574.627.207.000		574.564.563.000		583.642.683.000		592.864.237.000				
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola akutansi daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%	100	100	573.923.272.402	100	573.923.272.000	100	573.923.272.000	100	582.991.260.000	100	592.202.522.000	100	Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kabupaten Purworejo	
			Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100	Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya tata kelola anggaran daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	%	100	100		100		100		100		100		100	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Kabupaten Purworejo	
			Persentase Realisasi Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Bantuan Keuangan	%	100	100		100		100		100		100		100	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan daerah	Tertib Pengelolaan Kas Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100	Bidang Perbendaharaan Daerah	Kabupaten Purworejo	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	%	100	100	519.014.300	100	544.965.015	100	572.213.266	100	600.823.929	100	630.865.125	100			
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	61.877.200	2	64.971.060	2	68.219.613	2	71.630.594	2	75.212.123	10			
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	55.421.700	2	58.192.785	2	61.102.424	2	64.157.545	2	67.365.423	10			
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	3	3	188.502.100	3	197.927.205	3	207.823.565	3	218.214.744	3	229.125.481	15			
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	3	3	180.424.300	3	189.445.515	3	198.917.791	3	208.863.680	3	219.306.864	15			
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2	1	32.789.000	1	34.428.450	1	36.149.873	1	37.957.366	1	39.855.234	5			
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%	100	100	255.368.600	100	268.137.030	100	281.543.882	100	295.621.077	100	310.402.129	100			
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	24	24	25.734.000	24	27.020.700	24	28.371.735	24	29.790.322	24	31.279.838	120			
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	0	16	7.553.800	16	7.931.490	16	8.328.065	16	8.744.468	16	9.181.691	80			
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	18	18	28.328.000	18	29.744.400	18	31.231.620	18	32.793.201	18	34.432.861	90			
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	4	4	9.430.000	4	9.901.500	4	10.396.575	4	10.916.404	4	11.462.224	20			
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	0	42	13.438.000	42	14.109.900	42	14.815.395	42	15.556.165	42	16.333.973	210			
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis	Dokumen	4	4	34.688.000	4	36.422.400	4	38.243.520	4	40.155.696	4	42.163.481	20			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
	Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	12	64.492.700	12	67.717.335	12	71.103.202	12	74.658.362	12	78.391.280	60			
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	1	46.352.100	1	48.669.705	1	51.103.190	1	53.658.350	1	56.341.267	5			
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	84	84	25.352.000	84	26.619.600	84	27.950.580	84	29.348.109	84	30.815.514	420			
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyelenggaraan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	%	100	100	232.385.100	100	244.004.355	100	256.204.573	100	269.014.802	100	282.465.542	100			
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	15	15	7.820.000	15	8.211.000	15	8.621.550	15	9.052.628	15	9.505.259	75			
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	18	18	16.541.900	18	17.368.995	18	18.237.445	18	19.149.317	18	20.106.783	90			
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	99.434.000	4	104.405.700	4	109.625.985	4	115.107.284	4	120.862.648	20			
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1	6.093.600	1	6.398.280	1	6.718.194	1	7.054.104	1	7.406.809	5			
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1	1	24.474.500	1	25.698.225	1	26.983.136	1	28.332.293	1	29.748.908	5			
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1	2.861.700	1	3.004.785	1	3.155.024	1	3.312.775	1	3.478.414	5			
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	0	1	18.788.400	1	19.727.820	1	20.714.211	1	21.749.922	1	22.837.418	5			
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	0	42	35.934.000	42	37.730.700	42	39.617.235	42	41.598.097	42	43.678.002	210			
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	29	29	20.437.000	29	21.458.850	29	22.531.793	29	23.658.382	29	24.841.301	145			
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	572.902.927.402	100	572.851.909.750	100	572.798.341.636	100	581.810.083.117	100	590.962.286.276	100			
5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5			
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	1	546.302.927.402	1	544.926.909.750	1	543.482.091.636	1	551.033.020.617	1	558.651.370.651	5			
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	1	4.500.000.000	1	4.725.000.000	1	4.961.250.000	1	5.209.312.500	1	5.469.778.125	5			
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	22.000.000.000	1	23.100.000.000	1	24.255.000.000	1	25.467.750.000	1	26.741.137.500	5			
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%	100	100	13.577.000	100	14.255.850	100	14.968.643	100	15.717.075	100	16.502.928	100			
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	1	13.577.000	1	14.255.850	1	14.968.643	1	15.717.075	1	16.502.928	5			
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	93,71	100	641.290.600	100	703.935.000	100	641.291.000	100	651.423.000	100	661.715.000	100	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Purworejo	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	93,71	100	641.290.600	100	703.935.000	100	641.291.000	100	651.423.000	100	661.715.000	100			
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	1	64.154.400	1	70.421.300	1	64.154.400	1	65.168.000	1	66.197.600	5			
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	5.603.800	1	6.151.200	1	5.603.800	1	5.692.400	1	5.782.300	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	0	1	17.510.800	1	19.221.400	1	17.510.800	1	17.787.500	1	18.068.500	5			
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	33.999.500	1	37.320.700	1	33.999.500	1	34.536.600	1	35.082.300	5			
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	2	104.982.400	2	115.237.600	2	104.982.400	2	106.641.100	2	108.326.000	10			
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	343.418.600	1	376.965.400	1	343.418.800	1	348.844.600	1	354.356.100	5			
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	0	1	52.284.400	1	57.391.700	1	52.284.400	1	53.110.400	1	53.949.600	5			
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	2	5.027.600	2	5.518.800	2	5.027.800	2	5.107.300	2	5.187.700	10			
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	5	4.815.600	5	5.286.100	5	4.815.600	5	4.891.700	5	4.969.000	25			
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	2	2.945.700	2	3.233.400	2	2.945.700	2	2.992.200	2	3.039.500	10			
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	4.069.900	1	4.467.500	1	4.069.900	1	4.134.200	1	4.199.600	5			
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	40	40	2.477.900	40	2.719.900	40	2.477.900	40	2.517.000	40	2.556.800	200			
3	Meningkatnya pendapatan asli daerah		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	20,57	21,83		22,79		23,93		25,06		26,24		26,24			
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,65	0,73		0,72		0,72		0,72		0,72		0,72			
5.02	KEUANGAN						3.933.074.360		3.995.217.000		3.933.074.000		3.995.217.000		4.058.341.000				
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola pajak daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah	%	0	100	3.933.074.360	100	3.995.217.000	100	3.933.074.000	100	3.995.217.000	100	4.058.341.000	100	Bidang Pajak Daerah	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya tata kelola pendapatan daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	%	0	100		100		100		100		100		100	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Purworejo	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Telaksananya pengelolaan pajak daerah	Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah	%	0	100	3.933.074.360	100	3.995.217.000	100	3.933.074.000	100	3.995.217.000	100	4.058.341.000	100			
		Telaksananya pengelolaan pendapatan asli daerah	Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	%	0	100		100		100		100		100		100			
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	0	1	13.863.160	1	13.414.000	1	12.578.500	1	12.171.000	1	11.776.100	5			
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	1	556.155.500	1	565.037.600	1	556.337.800	1	565.214.000	1	574.227.700	5			
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	3	3	409.700.000	3	416.243.200	3	409.834.300	3	416.373.100	3	423.013.100	15			
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	319.218.300	1	324.316.400	1	319.322.900	1	324.417.600	1	329.591.200	5			
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	75.000	75.000	33.897.400	75.000	34.438.700	75.000	33.908.500	75.000	34.449.500	75.000	34.998.800	375.000			
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	10.041.001	1.004.100	176.489.800	1.004.100	179.308.400	1.004.100	176.547.600	1.004.100	179.364.400	1.004.100	182.224.800	5.020.500			
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	1	1	111.665.500	1	113.448.800	1	111.702.100	1	113.484.200	1	115.294.000	5			
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	2.046.168.800	12	2.078.847.200	12	2.046.839.300	12	2.079.496.300	12	2.112.658.600	60			
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	19.108.200	1	19.413.400	1	19.114.500	1	19.419.400	1	19.729.100	5			
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	2	2	58.983.700	2	59.925.700	2	59.003.000	2	59.944.400	2	60.900.400	10			
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	60	30	98.138.400	30	99.705.700	30	98.170.500	30	99.736.800	30	101.327.300	150			
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	0	10	89.685.600	10	91.117.900	10	89.715.000	10	91.146.300	10	92.599.900	50			
Jumlah							**600.036.695.158**		**599.187.385.000**		**596.940.535.000**		**606.080.798.000**		**615.365.476.000**				

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	AKTIFITAS	Ket
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran daerah			
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
			Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan daerah			
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola akutansi daerah			
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	AKTIFITAS	Ket
1	2	3	4	5	6
				Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah			
			Pengelolaan Barang Milik Daerah		
			Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Standar Harga	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	
			Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola pendapatan daerah			
			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola pajak daerah			
			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	AKTIFITAS	Ket
1	2	3	4	5	6
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Selain menetapkan arah kebijakan, program prioritas perlu disusun guna tercapainya visi-misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo. Program prioritas merujuk pada program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut adalah sub kegiatan pada renstra perangkat daerah yang mendukung program prioritas yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029.

Dukungan Terhadap Asta Cita

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan
1	2	3	4	5
7	Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keuangan
		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan

Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026	Aktivitas Pendukung di 2026-2030	Bidang Urusan
1	2	3	4	5	6
1	c. Pembangunan 3 juta rumah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Penilaian Objek Yang Dikecualikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Penilaian Objek Yang Dikecualikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Keuangan

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja utama (IKU) diperlukan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Kinerja Indikator Utama pada BPKPAD Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama BPKPAD Kab.Purworejo

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Indikator Tujuan : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1	Angka	84,20	84,56	84,92	85,28	85,65	86,01	Tujuan : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
	Indikator Tujuan/Sasaran: Nilai Sakip Perangkat Daerah	Angka	68.02	70.45	72.89	75.33	77.76	80.20	
	Indikator Tujuan/Sasaran: Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	%	100	100	100	100	100	100	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
	Indikator Tujuan/Sasaran: Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	21,70 %	21,83 %	22,79 %	23,93 %	25,06 %	26,24 %	Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
	Indikator Tujuan/Sasaran: Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,73%	0,73%	0,73%	0,72%	0,72%	0,72%	Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan dan pengukuran indikator kinerja kunci/utama (IKK/IKU). Perumusan indikator kinerja adalah yang menggambarkan keberhasilan kinerja suatu perangkat daerah yang diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator kinerja lainnya yang digunakan dan diintegrasikan dalam rumusan yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Rumusan indikator kinerja disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja. Berikut Indikator Kinerja Kunci BPKPAD Kabupaten Purworejo:

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci PD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Bidang Penanggungjawab	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
IKK										
4)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
a)	Perencanaan dan Keuangan									
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	8.09	9.61	8.69	8.66	8.63	8.59	BPKPAD	Permendagri No. 18 Tahun 2020
2	Rasio PAD	%	21.86	22.27	22.42	23.39	24.36	25.33	BPKPAD	Permendagri No. 18 Tahun 2020
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	65,26	68,02	72,91	76,58	80,25	83,92	BPKPAD	Permendagri No. 18 Tahun 2020
4	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPAD	Permendagri No. 18 Tahun 2020
b)	Manajemen Keuangan									
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	BPKPAD	Permendagri No. 18 Tahun 2020
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	BPKPAD	Permendagri No. 18 Tahun 2020
3	Manajemen Aset	Angka	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	BPKPAD	Permendagri No. 18 Tahun 2020
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3.67	3.49	0.17	0.00	0.00	0.00	BPKPAD	Permendagri No. 18 Tahun 2020
c)	Transparansi dan Partisipasi Publik									
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	BPKPAD	Permendagri No. 18 Tahun 2020
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	BPKPAD	Permendagri No. 18 Tahun 2020
IUP										
1	Indikator Sasaran: Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	21,70	21,83	22,79	23,93	25,06	26,24	BPKPAD	IUP
2	Indikator Sasaran: Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	BPKPAD	IUP

BAB V
PENUTUP

V.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah setiap tahunnya.

V.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo setiap tahun.
b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

V.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renstra PD dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 1.1

Gambar 1.1

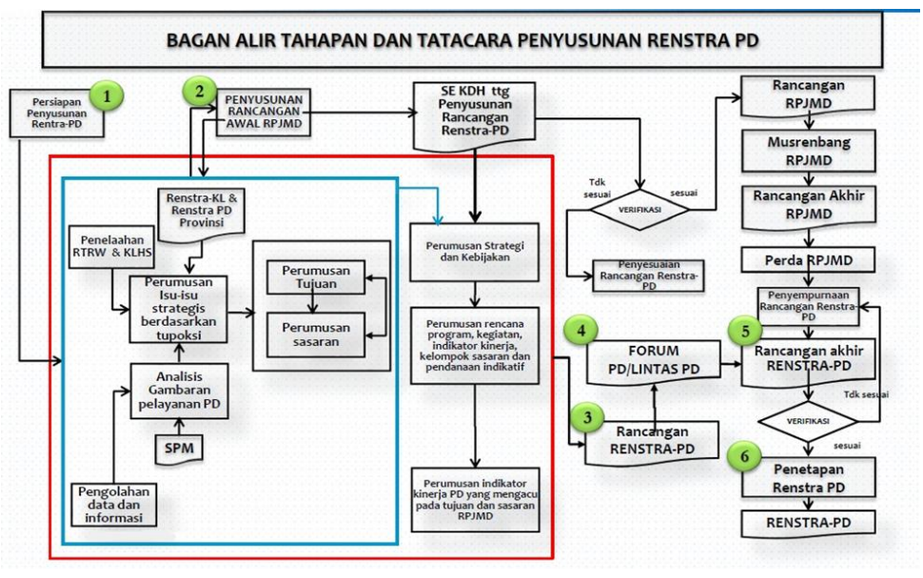

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renstra PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renstra PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Dalam penyusunan Renstra juga harus memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Renstra K/L (BKN, Kemendagri, LAN dan Kemenpan), RTRW dan KLHS. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomot 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 66 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah:(9-221/2024))
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 seri E Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 137 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 137);

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, adalah:

a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo
b. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
c. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.
d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan PD lingkup Pemerintah Kabupaten Purworejo terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, adalah:

a. Sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan
b. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang (pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan dengan Renstra PD), dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029;

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian kinerja pelayanan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan PD lima tahun kedepan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.

Bab ini menguraikan tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo serta startegi dan kebijakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo

Bab V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas BKPSDM Kabupaten Purworejo

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 137 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kewenangan Daerah.

2.1.1.2 Fungsi BKPSDM Kabupaten Purworejo

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Melaksanakan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan melaksanakan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di lingkup bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Purworejo

Tugas setiap unit kerja/unit organisasi yang ada di BKPSDM Kabupaten Purworejo sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 137 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo.

Susunan Organisasi BKPSDM terdiri atas:

a. Kepala BKPSDM
b. Sekretaris
c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, informasi dan Penilaian Kinerja Aparatur
d. Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi ASN
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
f. Jabatan Fungsional

Untuk penjabaran masing–masing susunan organisasi Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo dapat diuraikan berikut ini:

a. Kepala BKPSDM

Kepala BKPSDM bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKPSDM. Sekretariat bertugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan BKPSDM.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis
2. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu
3. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan.
4. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian.
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BKPSDM sesuai dengan tugas fungsi.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Perencanaan dan Keuangan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan yang meliputi:

1. merencanakan, menganggarkan dan mengevaluasi kinerja
2. menyusun perjanjian kinerja
3. menyelenggarakan administrasi keuangan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan jabatannya

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian yang meliputi;

1. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah
2. menyelenggarakan administrasi umum
3. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah
4. menyediakan jasa penunjang urusan
5. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah
6. menyelenggarak administrasi kepegawaian
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan jabatannya

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Penilaian Kinerja Aparatur

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Penilaian Kinerja Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKPSDM dengan tugas yaitu mengelola kepegawaian daerah. Dalam rangka melaksanakan tugasnya Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Penilaian Kinerja Aparatur menyelenggarakan fungsi:

1. pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN
2. penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BKPSDM sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi ASN
Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi ASN dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKPSDM dengan tugas yaitu mengelola kepegawaian. Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan mutasi dan promosi
2. pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BKPSDM sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi;

1. pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis
2. pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BKPSDM sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Jabatan Fungsional
Jabatan fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada BKPSDM di bawah dan bertanggungjawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Kedudukan jabatan fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerjayang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pembinaan jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWOREJO

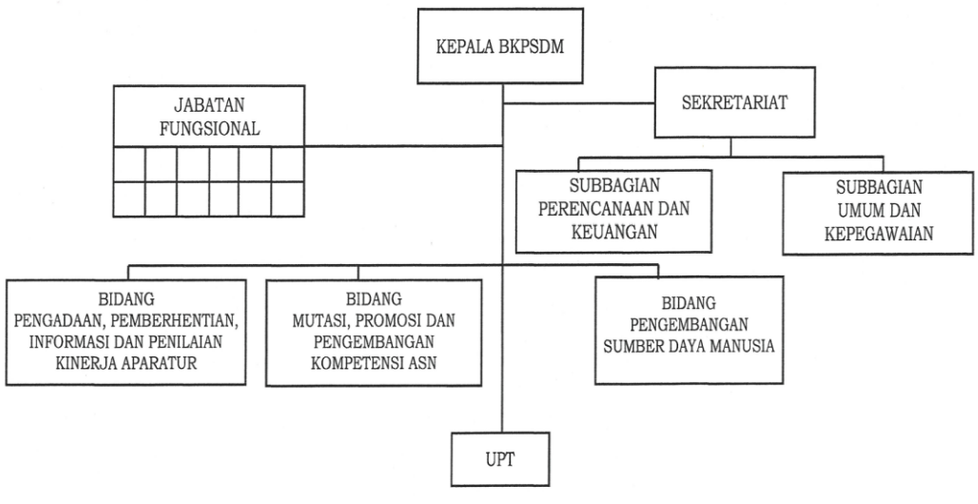

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Purworejo secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta sarana dan prasarana memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas.

a). Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Purworejo.

Jumlah pegawai BKPSDM Kabupaten Purworejo sampai dengan Januari 2025, tercatat sebanyak 32 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jabatan, golongan dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai BKPSDM Kabupaten Purworejo Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Badan (eselon II)	1	-	1
2	Sekretaris (eselon III.a)	-	1	1
3	Kepala Bidang (eselon III.b)	1	2	3
4	Kepala Subbag/Subbid (eselon IV.a)	1	1	2
5	Fungsional umum	8	2	10
6	Fungsional tertentu	8	7	15
	Total	19	13	32

Dari tabel di atas diperoleh data bahwa jabatan tertentu merupakan jabatan yang paling banyak dengan jumlah 15 orang atau persentase sebanyak 46,86%

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai BKPSDM Kabupaten Purworejo Menurut Golongan

Jenis kelamin	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Laki-laki	1	12	4	-	17
Perempuan	3	6	6	-	15
Jumlah	4	18	10		32

Tabel di atas menunjukkan bahwa golongan III adalah yang mendominasi dengan jumlah 18 orang atau sebanyak 56,25%

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai BKPSDM Kabupaten Purworejo Menurut Tingkat Pendidikan

Uraian	Tingkat Pendidikan								Jumlah
	S3	S2	S1/DIV	DIII	D2/D1	SLTA	SLTP	SD	
Laki-laki	-	1	6	7	-	5	-	-	19
Perempuan	-	3	5	3	-	2	-	-	13
Jumlah	-	4	11	10	-	7	-	-	32

Komposisi pegawai BKPSDM apabila dilihat dari tingkat pendidikan yang paling banyak adalah pada pendidikan tingkat S1/DIV dengan jumlah 11 orang atau 34,38%.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai BKPSDM Kabupaten Purworejo Menurut status kepegawaian

No	Status kepegawaian	Jumlah (orang)
1	CPNS	0
2	PNS	32
Jumlah		32

Berdasarkan Tabel tersebut, diperoleh gambaran bahwa dari 32 pegawai BKPSDM Kabupaten Purworejo merupanan Pegawai Negeri Sipil semua.

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai BKPSDM Kabupaten Purworejo Menurut Jenis Kelamin

No	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	19	13	32

Berdasarkan Tabel tersebut, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan sebanyak 59,38%.

b). Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Purworejo per Januari 2025 adalah sebagai berikut:

a. Gedung

Jumlah gedung BKPSDM Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.6
Luas Gedung BKPSDM dan Pusdiklat

No	Jenis	Status	Luas Tanah (m^2)	Luas Bangunan (m^2)
1	Gedung Kantor BKPSDM	Milik Pemerintah	1.436	570
2	Gedung Pusdiklat Kutoarjo	Milik Pemerintah	1.880	1.337

b. Sarana dan Prasarana Kantor

Sarana dan Prasarana Kantor BKPSDM Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.7
Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan dinas roda empat	3 unit	
2	Kendaraan dinas roda dua	7 unit	
3	Komputer/PC	16 unit	
4	Laptop	36 unit	
5	Printer	29 buah	
6	LCD/Proyektor	6 buah	
7	Sound system	5 set	
8	Mesin ketik	1 buah	
9	AC Unit	28 unit	
10	Roll O Pack	2 unit	
11	Meja kerja kayu	75 buah	
12	Kursi biasa	213 buah	
13	Meja rapat	20 buah	
14	Kursi rapat	44 buah	
15	Kursi tamu	2 set	
16	Mesin fax	1 buah	
17	Pesawat telephone	2 buah	
18	Genset	1 unit	
19	Telephone Mobile	16 buah	
20	Note Book	5 buah	
21	Tablet PC	1 buah	

2.1.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan wujud pengukuran terhadap tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja dan pelayanan publik, yang dinilai melalui sejumlah indikator, seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penilaian ini menjadi bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang bertujuan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar, target, dan arah pembangunan daerah.

BKPSDM Kabupaten Purworejo, indikator kinerja pelayanan telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026. Dalam dokumen tersebut, BKPSDM menetapkan tujuan jangka menengah yang

ingin dicapai, yaitu: “Birokrasi yang Kapabel” Indikator keberhasilan tujuan ini tercermin dalam Indeks Profesionalitas ASN serta peningkatan IKM Perangkat Daerah sebagai ukuran kualitas pelayanan publik.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, BKPSDM menetapkan sasaran utama: “Terwujudnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN”; yang diukur melalui Indeks Sistem Merit. Capaian terhadap tujuan dan sasaran tersebut didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 14 kegiatan strategis selama periode 2021–2026.

Informasi rinci mengenai hasil capaian kinerja BKPSDM dalam kurun waktu tersebut disajikan pada Tabel 2.8: Pencapaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026. Capaian kinerja pelayanan BKPSDM berdasarkan realisasi capaian indikator sasaran dapat dilihat selengkapnya pada tabel 2.8 (TC.23) berikut:

Tabel 2.8: (T-C.23)

Pencapaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1	**Indikator tujuan I : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				86,6	87,1	87,6	88,1	88,6	89,1	86,65	87,18	87,69	88,41			100%	100%	100%	100%		
	Indikator tujuan II : Indeks Profesionalitas ASN				80,0	80,10	80,20	80,30	80,40	80,50	44,03	52,88	75,36	82,25			55,04	66,02	93,97	102,43		
2	**Indikator sasaran I: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**				86,6	87,1	87,6	88,1	88,6	89,1	86,65	87,18	87,69	88,41			100%	100%	100%	100%		
	Indikator sasaran II: Indeks Sistem Merit				0,55	0,62	0,64	0,66	0,68	0,7	0,7	0,72	0,76	0,76			127%	116%	119%	115%		
3	**Indikator Program I: Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten**				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
	Indikator Program II: Persentase Penyelenggaraan Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Penilaian Kinerja Aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
	Indikator Program III: Persentase Penyelenggaraan Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi ASN				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
	Indikator Program IV: Rata - Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan				15	16	17	18	19	20	15	17,90	33,46	35,25			100%	111,88%	196,82%	195,83%		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja BKPSDM Kabupaten Purworejo selama periode 2021-2026 menunjukkan kinerja yang baik. Target indikator sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sampai dengan Tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen dari BKPSDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Purworejo.

Dari sisi program, pada Program Sumber Daya Manusia merupakan alokasi terbesar secara total pagu anggaran di Renstra 2021-2026 yang berfokus pada pemenuhan pengembangan kompetensi bagi ASN minimal 20 JP pertahun dan pemenuhan kompetensi manajerial bagi ASN yang menduduki jabatan struktural. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan pagu anggaran kedua setelah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang difokuskan pada administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Sementara itu untuk Program Kepegawaian Daerah total pagu anggaran di Renstra 2021-2026 mendapatkan pagu anggaran urutan ketiga yang berfokus pada pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi, pengembangan kompetensi ASN, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.

Secara umum, anggaran dalam program yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Purworejo terealisasi baik. Selama kurun waktu lima tahun, melihat dari rasio antara realisasi dan anggaran dapat dilihat bahwa keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Berikut Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM seperti tabel 2.9 (TC 24) berikut:

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	8.332.303.584	14.075.794.535	11.447.612.829	12.577.893.977	12.917.772.106	12.932.720.189	6.951.391.051	15.714.747.605	9.332.787.748	6.241.451.624	-	-	83,43	112	81,53	50	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.356.041.384	4.053.794.535	4.223.612.829	4.641.893.977	4.767.772.106	4.792.720.189	5.247.369.736	5.274.443.274	4.332.063.704	4.008.433.760	-	-	*97,97*	*130*	*102,57*	*86*	-	-
	5.356.041.384	4.053.794.535	4.223.612.829	4.641.893.977	4.767.772.106	4.792.720.189	5.247.369.736	5.274.443.274	4.332.063.704	4.008.433.760	-	-	*97,97*	*130*	*102,57*	*86*	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.297.000	55.850.000	58.083.900	60.406.900	62.217.000	62.527.600	39.171.800	54.584.400	39.853.900	15.588.600			*97,21*	*98*	*68,61*	*26*	-	-
	40.297.000	55.850.000	58.083.900	60.406.900	62.217.000	62.527.600	39.171.800	54.584.400	39.853.900	15.588.600			*97,21*	*98*	*68,61*	*26*	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.081.000	19.751.000	20.541.000	21.362.600	22.003.000	22.113.000	34.093.000	19.281.750	15.926.100	5.343.900			*97,18*	*98*	*77,53*	*25*	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3.675.000	3.822.000	3.974.800	4.094.000	4.114.400		3.561.200	1.836.400	504.000				*97*	*48,05*	*13*	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3.675.000	3.822.000	3.974.800	4.094.000	4.114.400		3.561.200	1.587.200	962.800				*97*	*41,53*	*24*	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2.600.000	2.704.000	2.812.100	2.896.000	2.910.400		2.586.600	1.325.500	1.199.100				*99*	*49,02*	*43*	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		2.600.000	2.704.000	2.812.100	2.896.000	2.910.400		2.586.600	1.606.100	1.190.700		-		*99*	*59,40*	*42*	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10.070.000	10.472.800	10.891.700	11.218.000	11.274.000		9.787.600	8.210.000	2.674.600				*97*	*78,39*	*25*	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.216.000	13.479.000	14.018.100	14.578.800	15.016.000	15.091.000	5.078.800	13.219.450	9.362.600	3.713.500			*97,37*	*98*	*66,79*	*25*	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.793.025.384	3.349.355.835	3.483.165.329	3.621.032.377	3.729.651.606	3.799.880.689	4.738.665.668	4.520.021.143	3.842.514.271	3.469.886.994	-	-	*98,87*	*135*	*110,32*	*96*	-	-
	4.793.025.384	3.349.355.835	3.483.165.329	3.621.032.377	3.729.651.606	3.799.880.689	4.738.665.668	4.520.021.143	3.842.514.271	3.469.886.994			*98,87*	*135*	*110,32*	*96*	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.768.252.384	3.327.593.935	3.460.533.129	3.597.495.077	3.705.411.606	3.775.519.689	4.715.034.568	4.499.457.743	3.821.637.271	3.454.026.594			*98,88*	*135*	*110,43*	*96*	-	-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12.801.100	13.313.100	13.845.600	14.260.000	14.331.300		11.869.900	11.761.900					*93*	*88,35*	-	-	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1.223.900	1.272.800	1.323.700	1.363.000	1.369.800		1.186.000	1.265.200			-		*97*	*99,40*	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.690.000	2.797.600	2.909.500	2.996.000	3.010.900		2.573.000	2.759.000	1.181.200				*96*	*98,62*	*41*	-	-
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24.773.000	4.173.000	4.339.900	4.513.400	4.648.000	4.671.200	23.631.100	4.097.000	4.187.900	7.339.600			*95,39*	*98*	*96,50*	*163*	-	-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		873.900	908.800	945.100	973.000	977.800		837.500	903.000					*96*	*99,36*	-	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	4.261.000	4.431.400	4.608.500	4.821.000	4.845.000	-	4.086.650	3.336.700	-				*96*	*75,30*	-	-	-
	-	4.261.000	4.431.400	4.608.500	4.821.000	4.845.000	-	4.086.650	3.336.700	-				*96*	*75,30*	-	-	-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		995.000	1.034.800	1.076.100	1.183.000	1.188.900		990.150	-					*100*	-	-	-	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		3.266.000	3.396.600	3.532.400	3.638.000	3.656.100		3.096.500	3.336.700					*95*	*98,24*	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	29.345.500	30.519.200	31.739.800	32.690.000	32.853.400	-	28.845.900	17.712.000	1.536.300				*98*	*58,04*	*5*	-	-
	-	29.345.500	30.519.200	31.739.800	32.690.000	32.853.400	-	28.845.900	17.712.000	1.536.300	-	-		*98*	*58,04*	*5*	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1.481.300	1.540.500	1.602.100	1.650.000	1.658.250		1.323.600	1.490.700	1.536.300				*89*	*96,77*	*96*	-	-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		6.975.000	7.254.000	7.544.100	7.770.000	7.808.850		6.886.600	4.994.400					*99*	*68,85*	-	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		11.729.200	12.198.300	12.686.200	13.066.000	13.131.300		11.720.700	6.927.600		-	-		*100*	*56,79*	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		9.160.000	9.526.400	9.907.400	10.204.000	10.255.000		8.915.000	5.790.000		-	-		*97*	*60,78*	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.828.000	159.732.200	166.121.000	172.765.300	177.944.000	178.833.300	82.759.060	153.345.198	104.144.459	118.668.815			*99,92*	*96*	*62,69*	*69*	-	-
	82.828.000	159.732.200	166.121.000	172.765.300	177.944.000	178.833.300	82.759.060	153.345.198	104.144.459	118.668.815	-	-	*99,92*	*96*	*62,69*	*69*	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.992.000	4.151.600	4.317.600	4.447.000	4.469.200		3.992.000	1.871.000	4.060.000				*100*	*45,07*	*94*	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.024.000	1.064.900	1.107.400	1.140.000	1.145.700		1.024.000	1.325.000	1.042.000				*100*	*124,42*	*94*	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		14.468.300	15.047.000	15.648.800	16.118.000	16.198.500		14.342.300	8.201.000	12.136.200				*99*	*54,50*	*78*	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		55.301.400	57.513.400	59.813.900	61.608.000	61.916.000		51.357.600	38.068.800	37.808.400				*93*	*66,19*	*63*	-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		6.580.000	6.843.200	7.116.900	7.330.000	7.366.600		6.580.000	3.179.000	6.114.700				*100*	*46,45*	*86*	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.756.000	3.906.200	4.062.400	4.184.000	4.204.900		2.100.000	2.200.000	2.290.000				*56*	*56,32*	*56*	-	-
Penyediaan Bahan/Material		5.239.500	5.449.000	5.666.900	5.836.000	5.865.100		4.899.000	4.721.700	3.226.300				*94*	*86,65*	*57*	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.828.000	56.197.000	58.444.800	60.782.500	62.605.000	62.918.000	82.759.060	56.037.798	39.997.859	47.099.315			*99,92*	*100*	*68,44*	*77*	-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		13.174.000	13.700.900	14.248.900	14.676.000	14.749.300		13.012.500	4.580.100	4.891.900				*99*	*33,43*	*34*	-	-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.499.000	105.044.000	112.261.700	362.252.100	352.891.000	294.035.500	64.660.000	182.613.600	-	-			*90,43*	*174*	-	-	-	-
	71.499.000	105.044.000	112.261.700	362.252.100	352.891.000	294.035.500	64.660.000	182.613.600	-	-	-	-	*90,43*	*174*	-			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
Pengadaan Alat Besar																		
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
Pengadaan Mebel				182.500.000	50.641.000	53.173.000												
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.499.000	105.044.000	112.261.700	116.752.100	172.250.000	180.862.500	64.660.000	159.209.000					*90,43*	*152*				
Pengadaan Aset Tetap Lainnya											-	-						
Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		*23.554.000	*50.000.000	63.000.000	130.000.000	60.000.000		23.404.600										
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						-												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.540.800	175.872.000	182.906.800	190.223.000	195.929.000	196.908.500	151.506.372	160.087.314	180.532.802	180.822.771			*76,70*	*91*	*98,70*	*95*	-	-
	197.540.800	175.872.000	182.906.800	190.223.000	195.929.000	196.908.500	151.506.372	160.087.314	180.532.802	180.822.771			*76,70*	*91*	*98,70*	*95*	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.120.000		-			-	18.098.500						*81,82*					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.708.000	114.912.000	119.508.400	124.288.700	128.017.000	128.657.000	90.054.096	98.591.054	106.252.784	119.880.839,00			*68,37*	*86*	*88,91*	*96*	-	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	-	-	-												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.712.800	60.960.000	63.398.400	65.934.300	67.912.000	68.251.500	43.353.776	61.496.260	74.280.018	60.941.932,00			*99,18*	*101*	*117,16*	*92*	-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.851.200	174.334.000	186.123.500	198.866.000	211.628.500	222.836.200	170.606.836	170.859.069	143.969.572	221.930.280			*99,86*	*98*	*77,35*	*112*	-	-
	170.851.200	174.334.000	186.123.500	198.866.000	211.628.500	222.836.200	170.606.836	170.859.069	143.969.572	221.930.280			*99,86*	*98*	*77,35*	*112*	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.500.000	10.429.000	10.846.100	11.279.900	11.618.000	11.676.000	40.403.399	10.428.101	10.285.900	34.737.558			*99,76*	*100*	*94,84*	*308*	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		31.806.000	33.078.200	34.401.300	35.433.000	35.610.100		31.184.300	25.346.703	44.060.610				*98*	*76,63*	*128*	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
Pemeliharaan Mebel		5.550.000	5.772.000	6.002.800	6.182.000	6.212.900		5.550.000	5.520.000	2.119.500				*100*	*95,63*	*35*	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		33.095.000	34.418.800	35.795.500	36.869.000	37.053.300		33.080.250	29.920.000	19.736.000				*100*	*86,93*	*55*	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.444.200	77.515.000	85.266.500	93.793.100	103.172.400	113.489.600	88.302.877	75.329.818	57.954.300	111.172.012			*99,84*	*97*	*67,97*	*119*	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		13.183.000	13.710.300	14.258.700	14.686.000	14.759.400		12.583.000	11.686.875	7.843.600				*95*	*85,24*	*55*	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.907.000	2.756.000	3.031.600	3.334.700	3.668.100	4.034.900	41.900.560	2.703.600	3.255.794	2.261.000			*99,98*	*98*	*107,40*	*68*	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
KEPEGAWAIAN	2.413.335.200	4.412.000.000	3.180.000.000	3.494.000.000	3.588.000.000	3.588.000.000	1.150.713.913	3.925.155.589	1.845.025.508	789.694.481			*47,68*	*89*	*58,02*	*23*	-	-
Program Kepegawaian	2.413.335.200	4.412.000.000	3.180.000.000	3.494.000.000	3.588.000.000	3.588.000.000	1.150.713.913	3.925.155.589	1.845.025.508	789.694.481			*47,68*	*89*	*58,02*	*23*	-	-
Pengadaan,	1.324.331.000	1.935.054.200	1.059.592.000	1.352.395.000	1.382.153.000	1.382.153.000	109.999.652	822.560.064	523.503.481	536.934.716			*8,31*	*43*	*49,41*	*40*	-	-
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		3.200.000	3.200.000	3.232.000	3.328.000	3.328.000		3165700	11596800					*99*	*362,40*	-	-	-
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.212.681.000	46.800.000	46.800.000	47.268.000	48.686.000	48.686.000	998.379.749	46.233.180	33.690.416				*82,33*	*99*	*71,99*	-	-	-
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1.596.929.200	721.452.000	1.010.876.000	1.030.393.000	1.030.393.000		498.642.959	330.748.681	456.083.290,00				*31*	*45,84*	*45*	-	-
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		3.125.000	3.125.000	3.156.000	3.250.000	3.250.000		3.120.000	3.206.200					*100*	*102,60*	-	-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN		4.060.200	4.065.000	4.105.000	4.228.000	4.228.000		4.058.500	4.089.700					*100*	*100,61*	-	-	-
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		59.539.800	59.540.000	60.135.000	61.939.000	61.939.000		58.817.731	42.365.971	20.315.300,00				*99*	*71,16*	*34*	-	-
Evaluasi Pemberhentian ASN		11.400.000	11.400.000	11.514.000	11.859.000	11.859.000		11.085.000	8.292.400					*97*	*72,74*	-	-	-
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		1.770.300	1.775.000	1.792.000	1.845.000	1.845.000		1.671.900	1.750.200					*94*	*98,60*	-	-	-
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000	130.312.400	130.315.000	131.618.000	135.566.000	135.566.000	49.119.750	124.286.886	51.910.243	60.536.126,00			*98,24*	*95*	*39,83*	*46*	-	-
Pengelolaan Data Kepegawaian	61.650.000	75.000.000	75.000.000	75.750.000	78.022.000	78.022.000	60.879.902	71.822.508	44.832.770	26..589.319,00			*98,75*	*96*	*59,78*		-	-
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		2.917.300	2.920.000	2.949.000	3.037.000	3.037.000		2.821.400	2.616.900					*97*	*89,62*		-	-
Mutasi dan Promosi ASN	1.044.455.600	1.167.955.900	527.910.000	533.189.000	549.184.000	549.184.000	997.074.661	1.489.666.669	466.618.055	228.084.965			*95,46*	*128*	*88,39*	*43*	-	-
	1.044.455.600	1.167.955.900	527.910.000	533.189.000	549.184.000	549.184.000	997.074.661	1.489.666.669	466.618.055	228.084.965			*95,46*	*128*	*88,39*	*43*	-	-
Pengelolaan Mutasi ASN	77.528.000	60.000.000	356.876.400	360.445.000	371.258.350	371.258.350	77.007.000	59.058.509	317.772.327	150.335.639			*99,33*	*98*	*89,04*	*42*	-	-
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	65.932.600	150.000.000	165.000.000	166.650.000	171.649.000	171.649.000	63.833.585	181.433.068	144.628.428	77.749.326			*96,82*	*121*	*87,65*	*47*	-	-
Pengelolaan Promosi ASN	900.995.000	957.955.900	6.033.600	6.094.000	6.276.650	6.276.650	856.234.076	1.249.175.092	4.217.300	2..949.000,00			*95,03*	*130*	*69,90*		-	-
Pengembangan	-	995.137.200	1.278.627.000	1.291.411.000	1.330.151.000	1.330.151.000	-	1.276.680.045	660.033.424	24.674.800				*128*	*51,62*	*2*	-	-
	-	995.137.200	1.278.627.000	1.291.411.000	1.330.151.000	1.330.151.000	-	1.276.680.045	660.033.424	24.674.800				*128*	*51,62*	*2*	-	-
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		2.910.000						2.869.500						*99*				
Pengelolaan Assessment Center		835.212.000	973.050.000	982.780.000	1.012.263.000	1.012.263.000		1.139.380.400	467.084.182					*136*	*48,00*	-	-	-
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		52.617.600	52.620.000	53.146.000	54.740.000	54.740.000		34.491.700	29.853.200	24.674.800,00				*66*	*56,73*	*46*	-	-
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat				-	-													
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN				-	-													
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				-	-													
Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				-	-													
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				-	-													
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN					-													
Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional					-													
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		47.335.600	47.340.000	47.813.000	49.247.000	49.247.000		45.609.329	38.612.576					*96*	*81,56*	-	-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		54.051.600	54.052.000	54.592.000	56.229.000	56.229.000		51.372.866	51.658.301					*95*	*95,57*	-	-	-
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		1.446.000	150.000.000	151.500.000	156.045.000	156.045.000		1.429.750	72.302.165					*99*	*48,20*	-	-	-
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		1.564.400	1.565.000	1.580.000	1.627.000	1.627.000		1.526.500	523.000									
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	44.548.600	313.852.700	313.871.000	317.005.000	326.512.000	326.512.000	43.639.600	336.248.811	194.870.548	-			*97,96*	*107*	*62,09*	-	-	-
	44.548.600	313.852.700	313.871.000	317.005.000	326.512.000	326.512.000	43.639.600	336.248.811	194.870.548	-			*97,96*	*107*	*62,09*	-	-	-
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		5.290.500	5.295.000	5.347.000	5.507.000	5.507.000		5.217.250	38.852.248					*99*	*733,75*	-	-	-
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		75.520.800	75.525.000	76.280.000	78.568.000	78.568.000		122.012.500	17.526.100					*162*	*23,21*	-	-	-
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		3.678.200	3.680.000	3.716.000	3.827.000	3.827.000		3.515.000	3.534.000					*96*	*96,03*	-	-	-
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		50.000.000	50.000.000	50.500.000	52.015.000	52.015.000		48.752.350						*98*	-	-	-	-
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		40.130.600	40.135.000	40.536.000	41.752.000	41.752.000		35.117.047	25.691.700					*88*	*64,01*	-	-	-
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		2.989.300	2.990.000	3.019.000	3.109.000	3.109.000		2.920.700	2.881.100					*98*	*96,36*	-	-	-
Pembinaan Disiplin ASN	44.548.600	20.000.000	20.000.000	20.200.000	20.806.000	20.806.000	43.639.600	19.292.814	59.233.500				*97,96*	*96*	*296,17*	-	-	-
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		84.161.000	84.161.000	85.002.000	87.552.000	87.552.000		82.656.900	31.185.600					*98*	*37,05*	-	-	-
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		14.648.500	14.650.000	14.796.000	15.239.000	15.239.000		14.038.250	10.843.900					*96*	*74,02*	-	-	-
Evaluasi Disiplin ASN		17.433.800	17.435.000	17.609.000	18.137.000	18.137.000		2.726.000	5.122.400					*16*	*29,38*	-	-	-
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	562.927.000	5.610.000.000	4.044.000.000	4.442.000.000	4.562.000.000	4.552.000.000	553.307.402	6.515.148.742	3.155.698.536	1.443.323.383			*98,29*	*116*	*78,03*	*32*	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	562.927.000	5.610.000.000	4.044.000.000	4.442.000.000	4.562.000.000	4.552.000.000	553.307.402	6.515.148.742	3.155.698.536	1.443.323.383			*98,29*	*116*	*78,03*	*32*	-	-
	562.927.000	5.610.000.000					553.307.402	6.515.148.742	3.155.698.536	1.443.323.383			*98,29*	*116*				
Pengembangan Kompetensi Teknis	375.000.000	1.090.336.000	1.090.336.000	1.090.336.000	1.090.336.000	1.090.336.000	365.783.200	1.700.696.786	1.015.587.103	1.395.145.883			*97,54*	*156*	*93,14*	*128*	-	-
	375.000.000	1.090.336.000	1.090.336.000	1.090.336.000	1.090.336.000	1.090.336.000	365.783.200	1.700.696.786	1.015.587.103	1.395.145.883			*97,54*	*156*	*93,14*	*128*	-	-
Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000		34.045.200	33.776.006					*97*	*96,50*	-	-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum																		
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	375.000.000	1.030.336.000	1.030.336.000	1.030.336.000	1.030.336.000	1.030.336.000	365.783.200	1.641.963.380	957.917.397	1.395.145.883,00			*97,54*	*159*	*92,97*	*135*	-	-
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000		24.688.206	23.893.700					*99*	*95,57*	-	-	-
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	187.927.000	4.519.664.000	2.953.664.000	3.351.664.000	3.471.664.000	3.461.664.000	187.524.202	4.814.451.956	2.140.111.433	48.177.500			*99,79*	*107*	*72,46*	*1*	-	-
	187.927.000	4.519.664.000	2.953.664.000	3.351.664.000	3.471.664.000	3.461.664.000	187.524.202	4.814.451.956	2.140.111.433	48.177.500			*99,79*	*107*	*72,46*	*1*	-	-
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		2.845.250	2.973.600					*95*	*99,12*	-	-	-
Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota																		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000		11.972.750	11.885.620					*100*	*99,05*	-	-	-
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar																		
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga		9.058.000	9.058.000	9.058.000	9.058.000	9.058.000		9.051.250	8.825.000					*100*	*97,43*	-	-	-
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional																		
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	187.927.000	4.474.996.000	2.908.996.000	3.306.996.000	3.426.996.000	3.416.996.000	187.524.202	4.770.193.050	2.095.881.113	48.177.500,00			*99,79*	*107*	*72,05*	*1*	-	-
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama		20.610.000	20.610.000	20.610.000	20.610.000	20.610.000		20.389.656	20.546.100					*99*	*99,69*	-	-	-

BKPSDM Purworejo juga melakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan urusan dengan interval waktu 2020 sampai dengan 2024. Berikut tabel 2.3 yang terkait dengan hal tersebut:

Table 2.10
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Indeks Profesionalitas ASN	79,70	44.03	52,88	75,36	82,25	Tujuan – Sasaran PD
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0,00	75,42	79,41	69,36	65,10	Tujuan – Sasaran PD
3	Indikator Program PD:						
	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kepegawaian	90,00	90,00	95,00	95,00	100,00	
	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	
	Persentase Pegawai Yang Dipetakan Kompetensinya	0,00	50,00	90,00	96,00	100,00	
	Persentase ASN Berkinerja Baik	95,00	95,00	95,00	95,00	96,00	
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi teknis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Gambaran potensi dan permasalahan permasalahan pendanaan pelayanan yang ditunjukkan dengan rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya. Untuk realisasi anggaran BKPSDM Kabupaten Purworejo selalu dilakukan upaya perbaikan, dengan optimalisasi pengendalian kegiatan dan perencanaan operasional pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.

Kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan BKPSDM Kabupaten Purworejo sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan. BKPSDM Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai regulasi yang berlaku di bidang kepegawaian sangat dipengaruhi oleh banyak kebijakan khususnya kebijakan di tingkat pusat, antara lain seperti pengadaan CPNS dan PPPK termasuk alokasi formasi di dalamnya dan integrasi data kepegawaian pusat dan daerah. Namun secara umum, efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 sudah baik.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Purworejo kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. BKPSDM Kabupaten

Purworejo pada tahun 2025-2029 menghadapi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan antara lain:

1. Tantangan pengembangan pelayanan BKPSDM Kabupaten Purworejo:
   a. Jumlah pegawai yang pensiun lebih besar dari pada jumlah pengadaan pegawai.
   b. Kesadaran ASN atas pemutakhiran data mandiri masih rendah.
   c. Masih terdapatnya *mismatch* dalam penempatan pegawai karena belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;
   d. Kompetensi aparatur yang belum memadai dibandingkan dengan kompleksitas regulasi dan tuntutan pekerjaan yang dinamis, dan mindset aparatur yang belum sepenuhnya menerima sistem merit sebagai dasar dalam manajemen ASN.
   e. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
   f. Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja dan profesionalisme pegawai, serta Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses pelayanan kepegawaian dan implementasinya.

2. Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Purworejo:
   a. Pengajuan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menyesuaikan alokasi formasi dari pemerintah pusat berdasarkan pada analisis kebutuhan;
   b. Penerapan pengembangan evaluasi kinerja berbasis online yang akan terintegrasi dengan sistem tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem rewards and punishment;
   c. Regulasi mengenai manajemen ASN yang mengarah pada sistem merit telah tersedia;
   d. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutasi jabatan dengan prinsip *The Right Man on The Right Job* melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan assessment center;
   e. Komitmen para pemangku kepentingan dalam mewujudkan reformasi birokrasi, khususnya reformasi birokrasi bidang aparatur
   f. Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
   g. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
   h. Gedung kantor yang representatif;
   i. Keterpaduan koordinasi dan konsultasi antar kabupaten, provinsi, pusat, maupun Lembaga diklat

Dari tantangan dan peluang tersebut, maka jenis pelayanan yang dibutuhkan untuk dikembangkan antara lain adalah:

1. Penyusunan dan pengajuan formasi kebutuhan pegawai mempertimbangkan kondisi eksisting dan prediksi kebutuhan pegawai dan pensiun 5 tahun ke depan dan penyiapan fasilitasi pengadaan CPNS dan PPPK;
2. Penguatan Assessment Center dan Pemetaan Kompetensi ASN;
3. Penyusunan konsep manajemen talenta;

4. Seleksi dan promosi terbuka;
5. Penataan PNS sesuai formasi dalam peta dan kelas jabatan, dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja untuk memenuhi kebutuhan SDM mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah;
6. Pengembangan e-Kinerja yang terintegrasi dengan sistem tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem rewards and punishment;
7. Pembinaan dan penanganan kasus pelanggaran disiplin/kode etik dan perilaku kepegawaian;
8. Pengembangan fasilitasi dan otomatisasi layanan adiministrasi kepegawaian yang inovatif berbasis online system (antara lain: cuti, ujian kedinasan, ujian penyesuaian ijasah, ijin belajar, satya lencana, file kepegawaian, presensi online) dan layanan administrasi kepegawaian lainnya);

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memberikan layanan terhadap semua pegawai yang ada di Kabupaten Purworejo dalam bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan BKPSDM merupakan gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja pelayanan PD yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan dalam pelayanan PD pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang belum diantisipasi.

Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada tahun sebelumnya sesuai kewenangan yang dimiliki. Permasalahan yang ada merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan langsung dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan ASN Pemerintah Kabupaten Purworejo yang handal, memiliki integritas, profesional, dan netral serta bebas dari intervensi politik serta praktik KKN. Untuk mencapai hal tersebut masih terdapat permasalahan pokok yaitu “belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN”.

2.2.2 Isu Strategis

Merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan strategis karena dampaknya yang signifikan bagi pelayanan Perangkat Daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan di 5 (lima) tahun mendatang.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi PD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi PD di masa lima tahun mendatang. Untuk isu strategis BKPSDM dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut ini:

Tabel 2.11
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal profesionalitas ASN	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel	Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Belum Optimalnya Profesionalitas ASN

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaah terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diperlukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”.

Guna mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
2. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
4. Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan BKPSDM Kabupaten Purworejo turut bertanggung jawab dalam mewujudkan misi kelima yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dalam rangka menjalankan misi ke 5 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo menetapkan tujuan selama periode 2025 – 2029 yaitu “Meningkatkan profesionalitas ASN serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah”, dengan target sasaran adalah 1). Meningkatnya profesionalitas ASN, 2). Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo tercantum dalam tabel 3.1 (TC-25) sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan profesionalitas ASN serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Profesionalitas ASN	82,25	82,26	82,27	82,28	82,29	82,30	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	82,25	82,26	82,27	82,28	82,29	82,30	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
Bagi pegawai yang diukur, IP ASN merupakan area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai Pegawai ASN. Bagi instansi pemerintah, pengukuran ini digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional. Sedangkan bagi masyarakat, merupakan instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Terdapat 4 dimensi dalam IP ASN:

1. Dimensi Kualifikasi
   Dimensi kualifikasi menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperolah suatu pengetahuan dan atau keahlian khusus, sehingga seseorang mengetahui, memahami dan mampu melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai profesinya.

2. Dimensi Kompetensi
   Dimensi kompetensi menggambarkan mampunya seseorang yang merupakan kombinasi dari keterampilan *(skill),* pengetahuan *(knowledge)* dan sikap *(attitude)* yang didukung oleh rencana pengembangan kompetensi berkesinambungan.

3. Dimensi Kinerja
   Dimensi kinerja merupakan penggambaran capaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan pada perencanaan kierja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan capaian, target, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN yang bersangkutan.

4. Dimensi Disiplin
   Dimensi disiplin merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan, apabila dimensi disiplin dilanggar atau tidak ditaati maka ASN yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin.

Berikut merupakan kategori tingkat IP ASN :

Nilai	Tingkat Profesionalitas
91-100	Sangat Tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
≤ 60	Sangat Rendah

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD.

Penahapan Renstra BKPSDM merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah. Berikut ini penahapan renstra BKPSDM (Tabel 3.3.1):

Tabel 3.2
Penahapan Renstra 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Menguatkan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi	Meningkatkan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi	Memantapkan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi	Mewujudkan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi	Meneguhkan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi
Menguatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Adapun arah kebijakan renstra BKPSDM dapat dilihat pada tabel arah kebijakan renstra PD (tabel 3.3.2) berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1	S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan 2026: Penguatan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi	Arah kebijakan 2026: Penguatan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi yang dilaksanakan melalui aktivitas: - Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan ASN	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			- Koordinasi dan fasilitasi Pemberhentian ASN - Pengembangan sistem informasi kepegawaian - Pengelolaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah - Pengelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara - Pelaksanaan Assesment bagi Aparatur Sipil Negara - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan bagi Aparatur Sipil Negara - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara - Pembinaan Disiplin ASN - Pengembangan kompetensi teknis bagi Aparatur Sipil Negara - Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Diklat Prajabatan - Pembinaan Disiplin ASN	
		Arah Kebijakan 2027: Peningkatan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi	Arah kebijakan 2027: Peningkatan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi yang dilaksanakan melalui aktivitas: - Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan ASN - Koordinasi dan fasilitasi Pemberhentian ASN - Pengembangan sistem informasi kepegawaian - Pengelolaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah - Pengelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara - Pelaksanaan Assesment bagi Aparatur Sipil Negara - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan bagi Aparatur Sipil Negara - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			- Pembinaan Disiplin ASN - Pengembangan kompetensi teknis bagi Aparatur Sipil Negara - Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Diklat Prajabatan Pembinaan Disiplin ASN	
		Arah Kebijakan 2028:Pemantapan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi	Arah kebijakan 2028 Pemantapan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi yang dilaksanakan melalui aktivitas: - Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan ASN - Koordinasi dan fasilitasi Pemberhentian ASN - Pengembangan sistem informasi kepegawaian - Pengelolaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah - Pengelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara - Pelaksanaan Assesment bagi Aparatur Sipil Negara - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan bagi Aparatur Sipil Negara - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara - Pembinaan Disiplin ASN - Pengembangan kompetensi teknis bagi Aparatur Sipil Negara - Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Diklat Prajabatan Pembinaan Disiplin ASN	
		Arah Kebijakan 2029: Perwujudan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi	Arah kebijakan 2029: Perwujudan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi yang dilaksanakan melalui aktivitas: - Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan ASN - Koordinasi dan fasilitasi Pemberhentian ASN - Pengembangan sistem informasi kepegawaian - Pengelolaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			- Pengelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara - Pelaksanaan Assesment bagi Aparatur Sipil Negara - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan bagi Aparatur Sipil Negara - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara - Pembinaan Disiplin ASN - Pengembangan kompetensi teknis bagi Aparatur Sipil Negara - Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Diklat Prajabatan - Pembinaan Disiplin ASN	
		Arah Kebijakan 2030: Peneguhan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi	Arah kebijakan 2030: Peneguhan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi yang dilaksanakan melalui aktivitas: - Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan ASN - Koordinasi dan fasilitasi Pemberhentian ASN - Pengembangan sistem informasi kepegawaian - Pengelolaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah - Pengelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara - Pelaksanaan Assesment bagi Aparatur Sipil Negara - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan bagi Aparatur Sipil Negara - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara - Pembinaan Disiplin ASN - Pengembangan kompetensi teknis bagi Aparatur Sipil Negara - Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Diklat Prajabatan - Pembinaan Disiplin ASN	
2	S5, Meningkatnya tata	Arah Kebijakan 2026:	Arah Kebijakan 2026:	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Arah Kebijakan 2027: Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Arah Kebijakan 2027: Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Arah Kebijakan 2028: Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Arah Kebijakan 2028: Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Arah Kebijakan 2029: Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Arah Kebijakan 2029: Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Arah Kebijakan 2030: Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Arah Kebijakan 2030 yang dilaksanakan melalui aktivitas Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan sasarannya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai.

Adapun perlu mencantumkan indikator kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *output*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu sebagai bagian dari instrumen arah kebijakan, yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai sasaran dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Perumusan program merupakan tindak lanjut dari rumusan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan dalam organisasi Perangkat Daerah. Program/kegiatan disusun melalui analisis perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta penganggarannya, mendapatkan prioritas, karena memiliki pengaruh yang luas dan urgent untuk diselenggarakannya.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka BKPSDM Kabupaten Purworejo menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota dengan indikator: Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.
2. Program kepegawaian daerah dengan indikator: a).Persentase Pegawai Yang Dipetakan Kompetensinya, b).Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya, c).Persentase ASN Berkinerja Baik, d).Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kepegawaian.
3. Program Pengembanan Sumber Daya Manusia dengan indikator: a).Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional b).Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi teknis.

Kegiatan yang akan dilakukan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan indikator dengan indikator Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
9. Mutasi dan Promosi ASN dengan indikator Dokumen Penegembangan Karir
10. Pengembangan Kompetensi ASN dengan indikator Dokumen Hasil Assessment, Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
11. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan indikator Dokumen Penilaian Kinerja ASN
12. Pengembangan Kompetensi Teknis dengan indikator Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN
13. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan indikator Dokumen Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
14. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri dengan indikator Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri

Untuk program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan profesionalitas ASN serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Indeks Profesionalitas ASN		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Derah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Peralatan dan Mesin Lainnya	Lainnya yang Dipelihara	Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						KEPEGAWAIAN	
		Meningkatnya profesionalitas ASN			Indeks Profesionalitas ASN		
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Kepegawaian	Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
				Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya	Dokumen Penegembangan Karir	Mutasi dan Promosi ASN	
				Terlaksananya Mutasi ASN yang	Jumlah Dokumen Hasil	Pengelolaan Mutasi ASN	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		
				Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
				Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	
				Terlaksananya Pemetaan Kompetensi Pegawai	Dokumen Hasil Assessment, Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	
				Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Pengelolaan Assessment Center	
				Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
				Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	
				ASN Berkinerja Baik	Dokumen Penilaian Kinerja ASN	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	
				Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Pembinaan Disiplin ASN	
						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar. kader. manajerial. dan fungsional		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi teknis	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
					Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial		

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					dan Fungsional		
				Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis bagi ASN	Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN	Pengembangan Kompetensi Teknis	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional bagi ASN	Dokumen Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
				Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
				Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi ASN	Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
				Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 4.2 (T-C.2.7) berikut:

Tabel 4.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan profesionalitas ASN serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	65,1	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Profesionalitas ASN	Angka	82,25	82,26		82,27		82,28		82,29		82,3		82,3			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	65,1	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
5.03	KEPEGAWAIAN						4.402.313.784		4.446.337.000		4.145.163.000		4.145.163.000		4.145.163.000				
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	4.402.313.784	100	4.446.337.000	100	4.145.163.000	100	4.145.163.000	100	4.145.163.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	7	24	9.687.600	24	11.971.980	24	12.570.569	24	12.570.569	24	12.570.569	120			
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	7.356.800	22	7.724.640	22	8.110.862	22	8.110.862	22	8.110.862	110			
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	26	22	2.330.800	22	2.447.340	22	2.569.707	22	2.569.707	22	2.569.707	110			
5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	dokumen	0	0	0	1	1.800.000	1	1.890.000	1	1.890.000	1	1.890.000	0			
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	100	45	3.915.072.653	45	3.617.933.812	45	3.605.021.843	45	3.617.471.784	45	3.617.471.784	45			
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	35	34	3.910.672.653	34	3.613.313.812	34	3.600.170.843	34	3.612.620.784	34	3.612.620.784	170			
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	44	4.400.000	44	4.620.000	44	4.851.000	44	4.851.000	44	4.851.000	220			
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	100	21	1.609.500	21	1.689.975	21	1.774.474	21	1.774.474	21	1.774.474	21			
5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	17	1.609.500	17	1.689.975	17	1.774.474	17	1.774.474	17	1.774.474	17			
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	100	8	86.199.650	8	90.509.633	8	95.035.114	8	95.035.114	8	95.035.114	8			
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	4.317.600	2	4.533.480	2	4.760.154	2	4.760.154	2	4.760.154	10			
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	7.000.000	4	7.350.000	4	7.717.500	4	7.717.500	4	7.717.500	20			
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	38.240.850	12	40.152.893	12	42.160.537	12	42.160.537	12	42.160.537	60			
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	6.322.900	4	6.639.045	4	6.970.997	4	6.970.997	4	6.970.997	20			
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	2.292.000	1	2.406.600	1	2.526.930	1	2.526.930	1	2.526.930	5			
5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	2	4.725.600	2	4.961.880	2	5.209.974	2	5.209.974	2	5.209.974	10			
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	18.935.200	12	19.881.960	12	20.876.058	12	20.876.058	12	20.876.058	60			
5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	2	4.365.500	2	4.583.775	2	4.812.964	2	4.812.964	2	4.812.964	10			
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	0	0		3	315.000.000	4	59.750.000	2	36.750.000	2	36.750.000	5			
5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	280.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	25.000.000	1	26.250.000	1	26.250.000	1	26.250.000	4			
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	5	15.000.000	0	0	0	0	5			
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	0	0	0	2	10.000.000	2	8.500.000	2	10.500.000	2	10.500.000	8			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
			Disediakan															
5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	4	10.000.000	0	0	0	0	4			
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	24	179.470.381	24	188.443.900	24	154.221.464	24	154.221.464	24	154.221.464	120			
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	117.440.000	12	123.312.000	12	96.935.350	12	96.935.350	12	96.935.350	60			
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	62.030.381	12	65.131.900	12	57.286.114	12	57.286.114	12	57.286.114	60			
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	7	9	210.274.000	9	220.787.700	9	216.789.536	9	227.339.595	9	227.339.595	45			
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	39.950.000	1	41.947.500	1	44.044.875	1	44.044.875	1	44.044.875	5			
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	46.730.000	9	49.066.500	9	51.519.825	9	51.519.825	9	51.519.825	45			
5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	75	75	2.160.000	75	2.268.000	75	2.381.400	75	2.381.400	75	2.381.400	375			
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	29	29	22.920.000	29	24.066.000	29	25.269.300	29	25.269.300	29	25.269.300	145			
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1	85.476.000	1	89.749.800	1	79.199.741	1	89.749.800	1	89.749.800	1			
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	13	9.150.000	13	9.607.500	13	10.087.875	13	10.087.875	13	10.087.875	65			
5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	3.888.000	2	4.082.400	2	4.286.520	2	4.286.520	2	4.286.520	10			
2	Meningkatnya profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	82,25	82,26		82,27		82,28		82,29		82,3		82,3			
5.03	KEPEGAWAIAN						943.811.650		1.813.334.000		943.812.000		958.724.000		973.872.000				
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kepegawaian	%	100	100	943.811.650	100	1.813.334.000	100	943.812.000	100	958.724.000	100	973.872.000	100	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Dan Penilaian Kinerja Aparatur	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir dan kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	%	94	95		95,5		96		96,5		97		97	Bidang Mutasi, Promosi Dan Pengembangan Kompetensi ASN	Kabupaten Purworejo	
			Persentase Pegawai Yang Dipetakan Kompetensinya	%	100	100		100		100		100		100		100	Bidang Mutasi, Promosi Dan Pengembangan Kompetensi ASN	Kabupaten Purworejo	
			Persentase ASN Berkinerja Baik	%	96	97		97,5		98		98,5		99		99	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Dan Penilaian Kinerja Aparatur	Kabupaten Purworejo	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kepegawaian	Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Dokumen	3	3	301.843.600	3	501.843.600	3	301.843.950	3	316.755.950	3	331.903.950	15			
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	1	229.703.400	1	429.703.400	1	229.703.750	1	244.615.750	1	259.763.750	5			
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	12	12	21.219.200	12	21.219.200	12	21.219.200	12	21.219.200	12	21.219.200	60			
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	50.921.000	1	50.921.000	1	50.921.000	1	50.921.000	1	50.921.000	5			
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya	Dokumen Pengembangan Karir	Dokumen	1	1	195.996.750	1	343.187.333	1	195.996.750	1	195.996.750	1	195.996.750	5			
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	1	1	150.669.650	1	297.860.233	1	150.669.650	1	150.669.650	1	150.669.650	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	800	800	43.630.300	800	43.630.300	800	43.630.300	800	43.630.300	800	43.630.300	4.000			
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	1	1.696.800	1	1.696.800	1	1.696.800	1	1.696.800	1	1.696.800	5			
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pemetaan Kompetensi Pegawai	Dokumen hasil Assessment, Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Dokumen	1	1	328.045.000	1	850.376.767	1	328.045.000	1	328.045.000	1	328.045.000	5			
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	1	1	288.953.600	1	811.285.367	1	288.953.600	1	288.953.600	1	288.953.600	5			
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	150	150	20.150.900	150	20.150.900	150	20.150.900	150	20.150.900	150	20.150.900	750			
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	250	250	18.940.500	250	18.940.500	250	18.940.500	250	18.940.500	250	18.940.500	1.250			
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	ASN Berkinerja Baik	Dokumen Penilaian Kinerja ASN	Dokumen	1	1	117.926.300	1	117.926.300	1	117.926.300	1	117.926.300	1	117.926.300	5			
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	1	35.677.600	1	35.677.600	1	35.677.600	1	35.677.600	1	35.677.600	5			
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	dokumen	6	6	46.761.100	6	46.761.100	6	46.761.100	6	46.761.100	6	46.761.100	30			
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	orang	30	30	35.487.600	30	35.487.600	30	35.487.600	30	35.487.600	30	35.487.600	150			
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1.050.389.780		1.963.281.000		1.050.390.000		1.066.986.000		1.083.844.000				
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan komperensi dasar. kader. manajerial. dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi teknis	%	100	100	1.050.389.780	100	1.963.281.000	100	1.050.390.000	100	1.066.986.000	100	1.083.844.000	100	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Purworejo	
			Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manejerial, dan Fungsional	%	100	100		100		100		100		100		100	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Purworejo	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis bagi ASN	Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	Dokumen	1	1	788.923.500	1	1.223.741.406	1	788.923.500	1	788.923.500	1	744.304.175	5			
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	700	700	788.923.500	700	1.223.741.406	700	788.923.500	700	788.923.500	700	744.304.175	3.500			
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional bagi ASN	Dokumen Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Dokumen	1	1	196.466.280	1	674.539.594	1	196.466.500	1	213.062.500	1	274.539.825	5			
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	1	1	196.466.280	1	674.539.594	1	196.466.500	1	213.062.500	1	274.539.825	5			
5.04.02.2.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi ASN	Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Dokumen	0	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	5			
5.04.02.2.03.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang	0	10	65.000.000	10	65.000.000	10	65.000.000	10	65.000.000	10	65.000.000	50			
Jumlah							**6.396.515.214**		**8.222.952.000**		**6.139.365.000**		**6.170.873.000**		**6.202.879.000**				

Berikut ini merupakan Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah seperti tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyusunan Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyusunan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Paket Peralatan Rumah Tangga Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang	Penyediaan Paket	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kantor	
			Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Paket Bahan/Material Kantor	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penyusunan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Mebel	Pengadaan Paket Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pembayarn Pajak dan Perizinannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel Kantor	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian			
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pelaksanaan seleksi CASN	
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pelaksanaan penanganan pemberhentian ASN	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengembangan aplikasi SIMPEG	
			Mutasi dan Promosi ASN		
			Pengelolaan Mutasi ASN	Pelaksanaan pengelolaan mutasi ASN	
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pelaksanaan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			Pengelolaan Promosi ASN	Pelaksanaan Pengelolaan Promosi ASN	
			Pengembangan Kompetensi ASN		
			Pengelolaan Assessment Center	Pelaksanaan Pengelolaan Assessment Center	
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pelaksanaan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	
			Pembinaan Disiplin ASN	Pelaksanaan Pembinaan Disiplin ASN	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan komperensi dasar. kader. manajerial. dan fungsional			
			Pengembangan Kompetensi Teknis		
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
			Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri		
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	

4.2. Dukungan Terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

BKPSDM Kabupaten Purworejo mendukung astacita “memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan narkoba” dan juga mendukung salah satu dari 17 Program Prioritas Nasional “reformasi politik, birokrasi, dan hukum”. Selain itu BKPSDM Kabupaten Purworejo juga mendukung salah satu dari 35 delegasi Provinsi yaitu “Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government dan Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa”, hal tersebut selaras dengan program prioritas Bupati Kabupaten Purworejo “Pengembangan inovasi dan kompetensi teknologi informasi bagi ASN”. Hal yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Purworejo untuk mendukung hal tersebut yaitu melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi di setiap layanan kepegawaian misalnya di perencanaan kebutuhan, pengadaan, kenaikan pangkat, penilaian kinerja, pengembangan karir, pengembangan kompetensi, mutasi dan promosi, disiplin, penghargaan, pemberhentian [misalnya dengan aplikasi Simega, Simantan, Sifika, Sirida, Simpeg/SIMASN, ASNDIGITAL, SSCASN, Sinergi (Merdeka Bangkom, Bakwan Ikan, Ngopi Besti, Click BKPSDM)

a. Penjabaran Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional)

Tabel 4.4
Program yang Mendukung Program Nasional

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Prioritas Nasional 7	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	Program: Program Kepegawaian Daerah Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai; Pembinaan Disiplin ASN	Kepegawaian	BKPSDM

b. Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi)

Tabel 4.5
Program yang Mendukung Program Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi)

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Peningkatan profesionalitas dan kualitas ASN dengan penerapan sistem merit	Kepegawaian	BKPSDM

c. Penjabaran Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan)
d.

Tabel 4.6
Program yang Mendukung Program Program Kabupaten (Pitulungan)

Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas di 2026	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
Sejahtera Wargane	Pengembangan inovasi dan kompetensi teknologi informasi bagi ASN.	Pelatihan Konten creator	Pelatihan Konten Kreator	Diklat	BKPSDM
	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.	Peningkatan profesionalitas dan kualitas ASN dengan penerapan sistem merit	Peningkatan profesionalitas dan kualitas ASN dengan penerapan sistem merit	Kepegawaian	BKPSDM

4.3 Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan BKPSDM Kabupaten Purworejo yang akan dicapai menurut Renstra 2025-2029 adalah “meningkatkan profesionalitas ASN serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah” dengan indikatornya Indeks Profesionalitas ASN. Terdapat 4 dimensi di dalam IPASN yang meliputi: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Pada tahun 2026, target IPASN sebesar 82,26. Untuk sasaran BKPSDM yaitu: “meningkatnya profesionalitas

ASN" dengan indikator sama dengan tujuan yang akan dicapai oleh BKPSDM yaitu Indeks Profesionalitas ASN. Selain itu terdapat juga Indikator Kinerja Kunci yang meliputi: Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan), Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) dan Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan). Berikut untuk tabel 4.7 terkait dengan hal tersebut:

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci PD

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah								
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,25	82,26	82,27	82,28	82,29	82,30	Tujuan PD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Tujuan PD
2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,25	82,26	82,27	82,28	82,29	82,30	Sasaran PD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Sasaran PD
	Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat Daerah								
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persentase	61,10	61,11	61,12	61,13	61,14	61,15	Permendagri No.18 Tahun 2020
2.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persentase	16,86	16,87	16,88	16,89	16,90	16,91	Permendagri No.18 Tahun 2020
3.	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persentase	33,45	33,46	33,47	33,48	33,49	33,50	Permendagri No.18 Tahun 2020

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setiap tahun.
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh perlunya perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan guna mewujudkan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah terpilih periode 2025–2029. Perangkat daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah memegang peranan penting dalam pencapaian visi misi tersebut. Oleh karena itu, perangkat daerah perlu menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang mampu mengintegrasikan kebijakan nasional, provinsi dan daerah ke dalam program dan kegiatan yang operasional dan implementatif. Di sisi lain perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta kemajuan teknologi yang terus berkembang, menuntut respons cepat dan adaptif dari seluruh perangkat daerah. Berbagai permasalahan dan tantangan perwujudan visi misi seperti kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, serta kebutuhan peningkatan kualitas layanan publik memerlukan strategi pembangunan yang komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama periode lima tahun, juga memberikan nilai strategis lain bagi perangkat daerah, yaitu:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga memastikan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran.
2. Menjadi dasar dalam pengukuran kinerja perangkat daerah melalui indikator yang jelas dan terukur, serta menjadi bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan stakeholders.
3. Membantu sinkronisasi antara kebijakan perangkat daerah dengan rencana pembangunan daerah dan nasional, serta menjadi alat koordinasi antarsektor dan antarwilayah.
4. Bentuk Komitmen perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dan akuntabel untuk memberikan pelayanan publik yang optimal

Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, maka penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah menjadi sangat penting. Melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029, arah kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan Inspektorat Daerah selama periode lima tahun ke depan menjadi lebih terarah dan jelas serta selaras mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 70 Seri D Nomor 2);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Renstra ini juga dimaksudkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi kinerja Inspektorat Daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan landasan strategis bagi Inspektorat Daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.
2. Mewujudkan keterpaduan dan sinergi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan kinerja Inspektorat Daerah.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Inspektorat Daerah
4. Mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Daerah melalui penguatan pengelolaan yang berbasis hasil *(outcome-based management).*

5. Memastikan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan, serta sebagai dasar dalam pengukuran kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat rumusan latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan yang relevan, maksud dan tujuan penyusunan, serta menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat data informasi gambaran pelayanan perangkat meliputi tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dan kelompok sasaran layanan perangkat daerah serta memuat permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat telaah visi misi kepala daerah terpilih, tujuan dan sasaran perangkat daerah, dan uraian mengenai strategi, pentahapan serta arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat uraian rencana program, kegiatan dan subkegiatan beserta indikator, target kinerja dan rencana pendanaan serta dukungan terhadap program prioritas nasional, provinsi dan kegiatan unggulan daerah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memiliki fungsi strategis dalam menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat menjalankan peran dan layanan untuk :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah berorientasi pada pencegahan, pembinaan, dan penguatan integritas aparatur pemerintah daerah. Melalui pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta pemberian konsultasi dan pendampingan, Inspektorat berupaya untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mendorong perbaikan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo.

1. Kedudukan
   Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Inspektur.
2. Tugas
   Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi
   Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
   b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kineria dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
   d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
   e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. Pelaksanaan pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan;
h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

a. Inspektur

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi lnspektorat Daerah.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

c. Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V

Mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan dan/atau unsur pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi :

1. Inspektur Pembantu I
   a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;
   b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
   c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, meliputi urusan:
      1. pendidikan;
      2. kebudayaan;
      3. kepemudaan dan olahraga;
      4. pariwisata;
      5. komunikasi dan informatika;
      6. statistik;
      7. persandian;
      8. perpustakaan; dan
      9. kearsipan;
   d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi unsur :
      1. perencanaan;
      2. penelitian dan pengembangan;
   e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur pengawasan;
   f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur kewilayahan;

g. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
h. pelaksanaan pengawasan desa;
i. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
j. pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah;
k. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
l. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
m. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
n. penyusunan laporan hasil pengawasan;
o. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Inspektur Pembantu II
   a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;
   b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
   c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, meliputi urusan:
      1. kesehatan;
      2. sosial;
      3. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
      4. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
      5. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
      6. pemberdayaan masyarakat dan desa.
   d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat DPRD;
   e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan;
   f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur kewilayahan;
   g. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
   h. pengoordinasian pelaksanaan reviu laporan keuangan;
   i. pengoordinasian dan pelaksanakan pengawasan desa;
   j. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
   k. pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah;
   l. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;

m. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
n. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
o. penyusunan laporan hasil pengawasan;
p. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Inspektur Pembantu III
   a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;
   b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
   c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, meliputi urusan:
      1. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
      2. penanaman modal;
      3. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
      4. perdagangan;
      5. perindustrian;
      6. transmigrasi; dan
      7. tenaga kerja;
   d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat Daerah;
   e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur pemerintahan umum urusan kesatuan bangsa dan politik;
   f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur kewilayahan;
   g. pengoordinasian pelaksanaan reviu laporan kinerja;
   h. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu;
   i. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pembinaan usaha mikro; dan
   j. pelaksanaan koordinasi pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
   k. pelaksanaan pengawasan desa;
   l. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
   m. pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah;
   n. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
   o. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;

p. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
q. penyusunan laporan hasil pengawasan;
r. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Inspektur Pembantu IV
   a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;
   b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
   c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, meliputi urusan:
      1. pekerjaan umum dan penataan ruang;
      2. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
      3. pangan;
      4. pertanahan;
      5. lingkungan hidup;
      6. perhubungan;
      7. pertanian; dan
      8. kelautan dan perikanan.
   d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi unsur :
      1. kepegawaian;
      2. pendidikan dan pelatihan;
   e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur kewilayahan;
   f. pengoordinasian dan pelaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu;
   g. pengoordinasian dan pelaksanakan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah;
   h. pelaksanaan pengawasan desa;
   i. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
   j. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
   k. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
   l. penyusunan laporan hasil pengawasan;
   m. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
   n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Inspektur Pembantu V
   a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu;

b. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
c. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama pengawasan internal dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya dan aparat penegak hukum;
d. pelaksanaan pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
e. pelaksanaan penanganan penyelesaian kerugian negara/Daerah;
f. pelaksanaan koordinasi, pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
g. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
j. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok jabatan fungsional sebagai pelaksana teknis fungsional pada Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut :

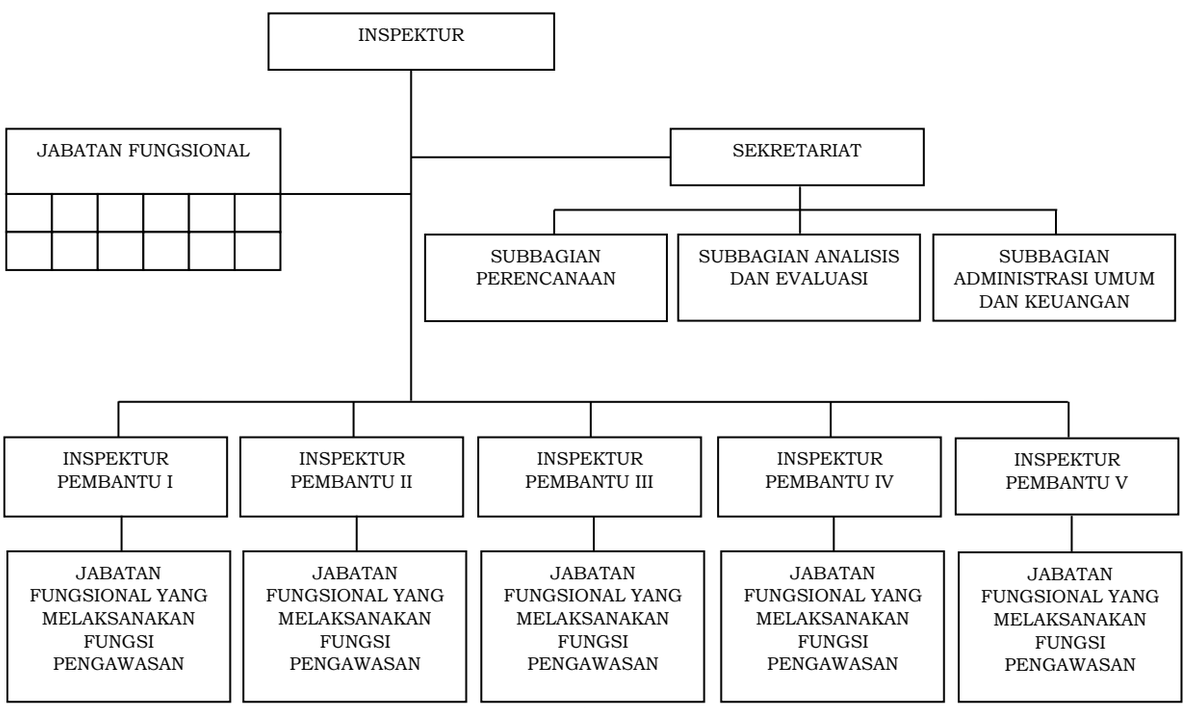

Gambar.2.1.Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo

Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 70 Tahun 2024

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 64 pegawai dengan rincian berdasarkan jabatan, jabatan fungsional, jenjang pendidikan formal dan sebagai berikut :

a. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Personil			
		Perempuan	Laki-Laki	Jumlah	Ket
1	Pejabat Struktural	2	8	10	
2	Fungsional Umum	4	9	13	
3	Fungsional Auditor	15	13	28	
4	Fungsional PPUPD	8	5	13	

b. Data Pejabat Fungsional Pengawasan

No	Jabatan Fungsional	Jumlah Personil			
		Perempuan	Laki-Laki	Jumlah	Ket
I	Fungsional Auditor				
1	Auditor Ahli Utama	0	0	0	
2	Auditor Ahli Madya	3	2	5	
3	Auditor Ahli Muda	3	5	8	
4	Auditor Ahli Pertama	9	5	14	
5	Auditor Penyelia	0	0	0	
6	Auditor Mahir	0	1	1	
7	Auditor Terampil	0	0	0	
II	Fungsional PPUPD				
1	PPUPD Ahli Madya	4	2	6	
2	PPUPD Ahli Muda	4	2	6	
3	PPUPD Ahli Pertama	0	1	1	

c. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Personil			
		Perempuan	Laki-Laki	Jumlah	Ket
1	S2	7	7	14	
2	S1	22	17	39	
3	D3	2	2	4	
4	DI/DII	0	0	0	
5	SLTA	0	7	7	

d. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Sertifikasi

No	Sertifikasi Keahlian	Jumlah	Ket
1	CGCAE	3	
2	CRGP	0	
3	CFrA	1	
4.	CGAA	1	
5.	CPRM	1	
6	CRMO	0	
7.	CertDA	1	
8.	Penyuluh Anti Korupsi	3	

No	Sertifikasi Keahlian	Jumlah	Ket
9.	Pengadaan Barang dan Jasa	22	

2. Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan dinas roda 4	4 unit	Baik
2	Kendaraan dinas roda 2	7 unit	Baik
3	Komputer PC	8 unit	Baik
4	Laptop	45 unit	Baik
5	Printer	40 unit	Baik
6	LCD Proyektor	11 unit	Baik
7	Layar Proyektor	7 unit	Baik
8	Scanner	14 unit	Baik
9	Kamera	5 unit	Baik
10	Kursi rapat	90 unit	Baik
11	Meja rapat	34 unit	Baik
12	Kursi kerja	75 unit	Baik
13	Meja kerja	75 unit	Baik
14	Kursi tamu	12 unit	Baik
15	Televsi	2 unit	Baik
16	Almari Arsip	25 unit	Baik
17	Rak Arsip	20 unit	Baik
18	AC Ruangan	24 unit	Baik
19	Mesin Generator Set	2 unit	Baik
20	Pompa air	1 unit	Baik
21	Sound system	1 unit	Baik
22	Wireless TOA	1 unit	Baik
23	Speaker ruangan	5 unit	Baik
24	CCTV	12 Unit	Baik
25	Alat Pemadam Api Ringan	4 Unit	Baik
26	Penghancur Kertas	6 Unit	Baik
27	Alat Penguji Kekerasan	4 Unit	Baik
28	Kaliper	4 Unit	Baik
29	Alat Ukur (rol meter 8, meteran roda 16, meteran digital 6)	30 Unit	Baik
30	Mesin Absensi	2 Unit	Baik
31	Gedung perkantoran	4242 m2	Baik

2.1.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan wujud pengukuran terhadap tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja dan pelayanan publik, yang dinilai melalui sejumlah indikator, seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penilaian ini menjadi bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang bertujuan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar, target, dan arah pembangunan daerah.

Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, indikator kinerja pelayanan telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026. Dalam dokumen tersebut, Inspektorat menetapkan tujuan

jangka menengah yang ingin dicapai, yaitu: “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih melalui pengawasan internal yang berkualitas.” Indikator keberhasilan tujuan ini tercermin dalam nilai Area Penguatan Pengawasan serta peningkatan IKM Perangkat Daerah sebagai ukuran kualitas pelayanan publik.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Inspektorat menetapkan dua sasaran utama: pertama, “Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern” dengan indikator Tingkat Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah); dan kedua, “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” yang diukur melalui IKM Perangkat Daerah. Capaian terhadap tujuan dan sasaran tersebut didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 12 kegiatan strategis selama periode 2021–2026.

Informasi rinci mengenai hasil capaian kinerja Inspektorat dalam kurun waktu tersebut disajikan pada Tabel 2.1: Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026.

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1	Nilai Area Penguatan Pengawasan	-	-	-	2,85	2,87	2,9	3,1	3,12	3,19	2,85	2,35	3,0885	3,155	*	*	100%	82%	107%	102%	*	*
2	Tingkat Maturitas SPIP	-	-	-	3	3,075	3,1	3,31	3,325	3,5	3,023	3,0012	3,309	3,317	*	*	101%	98%	107%	100%	*	*
3	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*	*	100%	100%	100%	100%	*	*
4	Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*	*	100%	100%	100%	100%	*	*
5	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*	*	100%	100%	100%	100%	*	*
6	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*	*	100%	100%	100%	100%	*	*
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-	-	-	80,93	81,5	82,7	83,5	84	84,5	82,86	83,02	84,33	83,97	*	*	102%	102%	102%	101%	*	*
8	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*	*	100%	100%	100%	100%	*	*

Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo selama periode 2021-2026 menunjukkan kinerja yang baik. Target indikator sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sampai dengan Tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen dari Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Purworejo.

Pada Indikator sasaran Tingkat Maturitas SPIP menunjukkan capaian tiap tahun telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) yang memiliki arti :

1) Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dibangun dan terdokumentasi dengan baik. Proses, kebijakan, dan prosedur pengendalian telah disusun secara sistematis dan tertulis, serta terdokumentasi dengan rapi.
2) Proses pengendalian telah diterapkan secara konsisten. Kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan tidak hanya ada di dokumen, tetapi juga sudah diterapkan dalam aktivitas sehari-hari organisasi.
3) Kepatuhan pada SPI dapat dipastikan. Unit kerja dan individu di dalam organisasi mematuhi sistem yang telah dirancang sesuai aturan yang berlaku.
4) Kesadaran dan pemahaman SPI cukup baik. Pimpinan dan pegawai di organisasi memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.
5) Evaluasi dan perbaikan mulai dilakukan. Proses pengendalian yang diterapkan dipantau secara rutin, dan jika ditemukan kelemahan atau masalah, perbaikan dilakukan secara bertahap.

Sedangkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah berdasar hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kepada Mitra pengawasan menunjukkan indeks kepuasan masyarakat mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2023 namun pada tahun 2024 mengalami penurunan walaupun secara target tahunan masih melampaui target. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun tersebut terjadi penurunan kinerja pelayanan yang perlu mendapatkan perhatian dari Inspektorat Daerah. Beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan sesuai hasi survei antara lain kualitas sarana dan prasarana, kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan serta sistem, mekanisme, prosedur serta kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya dan kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.

Pencapaian kinerja pelayanan yang telah dicapai oleh Inspektorat Daerah tidak terlepas dari dukungan pendanaan pelayanan selama tahun 2021-2026. Rencana Anggaran dan realisasi pendanaan selama periode 2021-2025 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Urusan Pengawasan	10.359.799.735	9.764.004.667	9.156.319.180	10.061.912.233	10.333.730.884	10.390.609.376	10.005.395.985	15.944.336.406	13.938.923.401	14.251.897.637	12.303.443.662	14.839.965.400	97%	163%	152%	142%	119%	143%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.883.507.414	1.942.455.000	1.400.000.000	1.538.000.000	1.579.000.000	1.576.000.000	985.146.146	1.697.284.208	1.379.829.250	1.450.800.321	810.715.300	558.091.300	52%	87%	99%	94%	51%	35%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	853.272.407	1.718.565.800	1.170.000.000	1.308.000.000	1.349.000.000	1.346.000.000	823.410.581	1.420.030.243	1.135.553.538	1.204.710.734	536.596.600	335.426.800	97%	83%	97%	92%	40%	25%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	170.368.000	328.840.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	166.794.615	264.828.350	176.224.650	163.123.740	70.704.800	38.050.600	98%	81%	88%	65%	28%	15%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	255.100.900	182.174.800	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	238.734.304	184.354.300	109.746.950	211.556.680	72.792.700	36.377.700	94%	101%	44%	85%	29%	15%
Reviu Laporan Kinerja	11.332.000	30.800.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	10.246.500	4.434.600	34.871.700	20.823.800	5.335.000	3.235.000	90%	14%	116%	69%	18%	11%
Reviu Laporan Keuangan	33.644.000	114.263.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	32.040.000	92.870.800	100.300.400	99.096.250	32.944.400	24.844.400	95%	81%	87%	86%	29%	22%
Pengawasan Desa	135.044.709	188.388.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	129.975.444	138.094.132	186.414.782	257.545.561	79.044.200	44.419.200	96%	73%	138%	191%	59%	33%
Kerja Sama Pengawasan Internal	22.016.000	45.100.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	21.526.000	43.883.843	12.009.439	34.340.350	23.962.900	60.280.700	98%	97%	30%	86%	60%	151%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	225.766.798	829.000.000	400.000.000	488.000.000	529.000.000	526.000.000	224.093.718	691.564.218	515.985.617	418.224.353	251.812.600	128.219.200	99%	83%	129%	86%	48%	24%
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	176.962.600	223.889.200	230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	161.735.565	277.253.965	244.275.712	246.089.587	274.118.700	222.664.500	91%	124%	106%	107%	119%	97%
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	76.824.000	87.610.200	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	72.544.475	75.630.815	29.469.900	36.538.300	31.912.900	23.162.700	94%	86%	33%	41%	35%	26%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100.138.600	136.279.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	89.191.090	201.623.150	214.805.812	209.551.287	242.205.800	199.501.800	89%	148%	153%	150%	173%	143%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	749.539.400	1.225.545.000	884.000.000	971.000.000	997.000.000	995.000.000	710.459.525	1.315.923.197	1.087.626.765	1.327.971.095	454.940.900	204.691.600	95%	107%	123%	137%	46%	21%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	27.516.000	744.198.000	545.000.000	595.000.000	610.000.000	610.000.000	25.655.876	726.326.476	69.171.000	68.593.250	12.672.800	12.504.100	93%	98%	13%	12%	2%	2%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	8.138.800	65.698.000	45.000.000	45.000.000	50.000.000	50.000.000	7.675.736	53.275.200	59.718.100	59.703.500	10.512.800	10.511.400	94%	81%	133%	133%	21%	21%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	19.377.200	678.500.000	500.000.000	550.000.000	560.000.000	560.000.000	17.980.140	673.051.276	9.452.900	8.889.750	2.160.000	1.992.700	93%	99%	2%	2%	0%	0%
Pendampingan dan Asistensi	694.507.400	481.347.000	339.000.000	376.000.000	387.000.000	385.000.000	684.803.649	589.596.721	1.018.455.765	1.259.377.845	442.268.100	192.187.500	99%	122%	300%	335%	114%	50%
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	30.326.000	35.000.000	35.000.000	37.000.000	35.000.000	-	10.618.400	11.709.000	7.528.850	6.319.800	4.669.700	0%	35%	33%	22%	17%	13%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	26.808.000	85.671.000	85.000.000	85.000.000	90.000.000	90.000.000	26.300.900	37.203.581	215.446.732	348.166.176	116.351.000	80.374.800	98%	43%	253%	410%	129%	89%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	651.912.400	293.676.000	150.000.000	187.000.000	190.000.000	190.000.000	643.078.075	479.344.270	662.188.676	763.916.260	272.084.900	71.037.500	99%	163%	441%	409%	143%	37%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15.787.000	71.674.000	69.000.000	69.000.000	70.000.000	70.000.000	15.424.674	62.430.470	129.111.357	139.766.559	47.512.400	36.105.500	98%	87%	187%	203%	68%	52%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.215.082.656	6.596.004.667	6.872.319.180	7.552.912.233	7.757.730.884	7.819.609.376	8.309.790.314	12.931.129.001	11.471.467.386	11.473.126.221	11.037.787.462	14.077.182.500	48%	196%	167%	152%	142%	180%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.404.400	75.710.000	75.710.000	83.355.000	91.000.000	98.645.000	9.375.500	70.473.700	47.955.900	27.072.650	19.524.900	17.636.800	100%	93%	63%	32%	21%	18%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.404.400	40.475.000	40.475.000	55.470.000	60.565.000	65.660.000	9.375.500	34.910.400	20.398.450	21.977.400	16.692.700	15.200.000	100%	86%	50%	40%	28%	23%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen													0%	119%	62%	0%	0%	0%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
RKA-SKPD	-	2.600.000	2.600.000	-	-	-		3.086.350	1.608.450	-	-	-						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	2.350.000	2.350.000	-	-	-		2.346.550	2.423.150	-	-	-	0%	100%	103%	0%	0%	0%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	2.600.000	2.600.000	-	-	-		2.596.350	2.143.000	-	-	-	0%	100%	82%	0%	0%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	2.350.000	2.350.000	-	-	-		2.346.550	2.620.750	-	-	-	0%	100%	112%	0%	0%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	3.335.000	3.335.000	3.685.000	4.035.000	4.385.000		3.330.500	5.723.100	804.500	395.400	-	0%	100%	172%	22%	10%	0%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	22.000.000	22.000.000	24.200.000	26.400.000	28.600.000		21.857.000	13.039.000	4.290.750	2.436.800	2.436.800	0%	99%	59%	18%	9%	9%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.598.048.470	4.743.382.267	5.247.678.940	5.767.411.893	5.863.457.444	5.792.029.476	7.332.875.347	8.729.712.969	9.069.119.344	9.140.540.175	9.417.347.600	12.461.892.100	97%	184%	173%	158%	161%	215%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.593.948.470	4.732.263.267	5.235.439.140	5.754.069.093	5.849.002.744	5.776.462.876	7.328.786.497	8.718.681.369	9.054.718.944	9.135.590.675	9.414.159.100	12.460.109.000	97%	184%	173%	159%	161%	216%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	6.000.000	6.600.000	7.200.000	7.800.000	8.400.000		5.976.600	7.137.300	2.277.700	1.405.400	-	0%	100%	108%	32%	18%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2.619.000	2.889.800	3.142.800	3.404.700	3.666.600		2.562.600	3.958.200	2.181.800	1.521.100	-	0%	98%	137%	69%	45%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.100.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	3.250.000	3.500.000	4.088.850	2.492.400	3.304.900	490.000	262.000	1.783.100	100%	100%	120%	16%	8%	51%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	3.978.000	4.375.800	6.688.800	9.001.800	11.314.800	-	3.232.200	5.353.475	3.449.850	2.232.800	912.600	0%	81%	122%	52%	25%	8%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	2.128.000	2.340.800	4.468.800	6.596.800	8.724.800	-	2.116.200	2.464.175	1.403.050	701.600	-	0%	99%	105%	31%	11%	0%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1.850.000	2.035.000	2.220.000	2.405.000	2.590.000	-	1.116.000	2.889.300	2.046.800	1.531.200	912.600	0%	60%	142%	92%	64%	35%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	561.835.400	836.319.000	798.533.000	839.816.000	878.634.000	924.452.000	536.342.195	1.296.652.333	1.207.173.241	1.479.645.679	749.498.400	689.097.800	95%	155%	151%	176%	85%	75%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	50.665.000	-	-	-	-	-	50.029.004	-	-	-	-	0%	99%	0%	0%	0%	0%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	3.939.000	-	-	-	-	-	3.875.500	-	-	-	11.898.600	0%	98%	0%	0%	0%	100%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	43.372.000	141.000.000	155.100.000	169.200.000	183.300.000	197.400.000	43.200.839	119.569.016	118.218.280	54.692.786	12.205.000	-	100%	85%	76%	32%	7%	0%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	518.463.400	578.500.000	578.500.000	600.000.000	620.000.000	645.000.000	493.141.356	1.045.421.033	1.059.267.236	1.393.739.193	734.473.400	674.379.200	95%	181%	183%	232%	118%	105%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	35.035.000	35.035.000	38.000.000	40.000.000	44.000.000	-	12.826.780	13.430.600	15.156.750	2.820.000	2.820.000	0%	37%	38%	40%	7%	6%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	27.180.000	29.898.000	32.616.000	35.334.000	38.052.000	-	64.931.000	16.257.125	16.056.950	-	-	0%	239%	54%	49%	0%	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.264.000	286.173.000	314.789.940	365.301.540	408.890.240	425.378.100	155.729.512	321.335.274	319.475.912	236.314.356	197.336.600	168.462.100	100%	112%	101%	65%	48%	40%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	14.752.000	16.227.200	17.702.400	19.177.600	20.652.800	-	6.898.000	14.651.200	8.873.300	2.336.500	4.105.000	0%	47%	90%	50%	12%	20%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	1.786.000	1.964.600	2.143.200	2.321.800	2.410.400	-	1.725.000	1.791.000	11.295.000	-	-	0%	97%	91%	527%	0%	0%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	13.390.000	14.729.000	16.068.600	17.407.600	18.746.600	-	12.183.127	11.258.702	10.768.300	14.747.500	13.107.800	0%	91%	76%	67%	85%	70%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	65.780.400	72.358.440	72.358.440	72.358.440	72.358.440	-	65.778.600	65.864.000	49.630.500	49.633.500	49.631.400	0%	100%	91%	69%	69%	69%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	34.370.000	37.807.000	72.177.000	106.547.000	106.547.000	-	35.018.350	33.812.300	20.089.000	24.186.800	20.905.600	0%	102%	89%	28%	23%	20%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	2.796.000	3.075.300	3.354.900	3.634.500	3.644.100	-	2.796.000	2.781.000	1.320.000	1.332.000	-	0%	100%	90%	39%	37%	0%
Penyediaan Bahan/Material	-	11.451.000	12.596.100	13.741.200	14.886.300	16.031.400	-	11.325.000	19.841.200	19.146.200	9.768.000	10.183.700	0%	99%	158%	139%	66%	64%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	14.040.000	15.444.000	16.484.000	18.252.000	19.656.000	-	14.034.500	8.468.000	16.161.000	8.215.000	6.625.000	0%	100%	55%	98%	45%	34%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.264.000	106.463.600	117.109.900	127.755.400	130.408.600	141.054.960	155.729.512	150.320.297	142.419.860	80.847.006	77.836.600	54.623.000	100%	141%	122%	63%	60%	39%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	17.544.000	19.298.400	19.298.400	19.298.400	19.298.400	-	17.461.400	14.967.750	16.740.050	6.810.700	6.810.600	0%	100%	78%	87%	35%	35%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	3.800.000	4.180.000	4.218.000	4.598.000	4.978.000	-	3.795.000	3.620.900	1.444.000	2.470.000	2.470.000	0%	100%	87%	34%	54%	50%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	19.350.000	16.500.000	18.150.000	-	1.935.240.228	198.270.000	114.350.000	72.712.600	216.424.000	0%	100%	100%	591%	441%	1192%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	418.000.000	-	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	919.500.000	-	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Pengadaan Mebel	-	-	-	4.350.000	-		-	90.503.744	-	3.950.000	4.078.600	24.632.000	0%	100%	0%	91%	100%	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	15.000.000	16.500.000	18.150.000	-	347.742.137	159.450.000	93.000.000	-	167.863.000	0%	100%	100%	620%	0%	100%
Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	159.494.347	38.820.000	17.400.000	68.634.000	23.929.000	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.825.058	158.600.000	174.460.000	184.420.000	190.380.000	200.340.000	161.495.707	124.727.053	142.141.895	160.716.990	189.659.562	203.529.100	96%	79%	81%	87%	100%	102%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.704.200	600.000	660.000	720.000	780.000	840.000	16.378.165	127.000	212.500	142.000	300.000	300.000	98%	21%	32%	20%	38%	36%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.639.458	99.000.000	108.900.000	118.800.000	118.800.000	128.700.000	86.280.567	77.414.049	92.661.867	112.540.766	141.247.562	153.561.100	94%					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.481.400	59.000.000	64.900.000	64.900.000	70.800.000	70.800.000	58.836.975	47.186.004	49.267.528	48.034.224	48.112.000	49.668.000	99%	80%	76%	74%	68%	70%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.164.000	491.842.400	256.771.500	286.569.000	316.367.400	346.165.000	113.972.053	449.755.244	481.977.619	311.036.521	389.475.000	319.228.000	100%	91%	188%	109%	123%	92%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.425.963	10.397.049	10.417.224	27.794.017	39.950.000	39.950.000	100%	104%	104%	278%	400%	400%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	40.500.000	44.500.000	49.000.000	53.500.000	58.000.000	-	42.234.500	31.683.857	71.974.788	77.660.000	77.660.000	0%	104%	71%	147%	145%	134%
Pemeliharaan Mebel	-	19.350.000	-	-	-	-	-	2.100.000	-	-	-	-	0%	11%	0%	0%	0%	0%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	49.355.000	54.290.500	59.226.000	64.161.500	69.097.000	-	43.503.000	45.148.700	47.868.000	48.400.000	48.200.000	0%	88%	83%	81%	75%	70%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.553.000	359.017.500	133.000.000	152.000.000	171.000.000	190.000.000	20.443.090	337.334.695	376.150.838	141.804.716	202.245.000	130.368.000	99%	94%	283%	93%	118%	69%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	13.619.900	14.981.000	16.343.000	17.705.900	19.068.000	-	14.186.000	18.577.000	21.595.000	21.220.000	23.050.000	0%	104%	124%	132%	120%	121%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.111.000	-	-	-	-	-	53.103.000	-	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%

Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa realisasi pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo setiap tahunnya melebihi anggaran yang sudah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026, namun apabila diperbandingkan antar tahun realisasi pendanaan selam lima tahun mengalami fluktuatif naik turun. Realisasi pendanan yang tidak konsisten ini dipengaruhi oleh kondisi dan kemampuan keuangan daerah pada tahun-tahun tersebut. Adapun peningkatan anggaran dinading perencanaan pada renstra dikarenakan mulai tahun 2022 terdapat kebijakan penguatan APIP yang mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi kegiatan pengawasan, peningkatan kapabilitas APIP, sarana dan prasarana pengawasan dan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya *clean government.*

Penguatan APIP ini dipertegas lagi dengan adanya Surat Edaran Bersama Mendagri, Ketua KPK dan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.1/3013/SJ dan Nomor HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah meliputi :

1. Penguatan Aspek Anggaran Pengawasan meliputi alokasi dan penggunaan anggaran pengawasan, alokasi anggaran pendidikan pelatihan berkelanjutan, anggaran TPP
2. Penguatan Aspek Sumber daya manusia meliputi pemenuhan JFA dan JF PPUPD, dan kualitas SDM, Pemenuhan target 120 jam pelatihan bagi SDM APIP.
3. Penguatan Aspek Independensi dan Obyektifitas meliputi pemberian akses, kebebasan dari intervensi pihak manapun, penguatan kelembagaan, pembentukan Irban Investigasi,
4. Penguatan Aspek peran dan layanan meliputi penguatan pelaksanaan pengawasan, pembinaan berorientasi pencegahan/*early warning system,* penanganan pengaduan Masyarakat, TL rekomendasi hasil pengawasan, pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah.

Penguatan aspek anggaran sesuai Permendari tentang pedoman penyusunan APBD menyebutkan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasn yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan dan alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud tidak termasuk gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD inspektorat. Apabila ketentuan pemenuhan kecukupan anggaran pengawasan tidak dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan tersebut diatas, Gubernur agar melaporkan kepada Mendagri dan tidak menerbitkan nomor registrasi terhadap hasil evaluasi APBD, pelaporan ditembuskan kepada KPK serta BPKP.

Merujuk kepada ketentuan yang ada maka Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan total belanja APBD diatas Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) harus mengalokasikan anggaran pengawasan sebesar 0,5% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,-. Berdasarkan realisasi tabel 2.2 terlihat bahwa meskipun realisai pendanaan setiap tahun melebihi penganggaran dalam renstra namun anggaran pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo selama lima tahun masih belum memenuhi *mandatory spending* pengawasan yang telah ditentukan. Hal ini perlu menjadi perhatian lebih lanjut bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.

Dalam menilai kinerja pelayanan perangkat daerah juga dilakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan urusan untuk mengetahui sejauh mana kinerja pelaksanaan pelayanan atas urusan yang menjadi tanggungjawabperangkat daerah. Evaluasi capaian pelaksanaan urusan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Indikator Tujuan PD						
	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,023	3,023	3,001	3,309	3,317	Terjadi penurunan capaian diawal periode, namun capaian terus membaik. Perlu komitmen bersama dan konsistensi kinerja untuk perbaikan area yang masih kurang bagus agar nilai meningkat
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,61	0	0	70	0	Terjadi penurunan nilai capaian. Perlu komitmen bersama dalam penguatan dan perbaikan komponen akuntabilitas yang menurun agar nilai dapat naik
2	Indikator Sasaran PD						
	Nilai Kapabilitas APIP	3,000	3,000	3,000	3,050	3,11	Capaian terus meningkat. Hal ini menunjukkan komitmen PD dalam upaya penguatan kapabilitas APIP, tetapi masih perlu konsistensi dan keberlanjutan agar nilai terus meningkat.
	Nilai Manajemen Risiko Indeks	0	0	2,890	3,031	3,098	Capaian terus meningkat. Hal ini menunjukkan komitmen PD dalam upaya penguatan Manajemen Risiko, tetapi masih perlu konsistensi dan keberlanjutan agar nilai terus meningkat.
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	0	2,27	2,930	2,960	3,096	Capaian terus meningkat. Hal ini menunjukkan komitmen PD dalam upaya penguatan pengendalian korupsi, tetapi masih perlu konsistensi dan keberlanjutan agar nilai terus meningkat.
	Indeks Integritas Nasional	0	74,4	77,9	74,98	76,61	Terjadi fluktuasi capaian namun kembali membaik. Perlu konsistensi dan upaya yang berkelanjutan dalam pemahaman pentingnya integritas dan bahaya korupsi
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,61	0	0	70	0	Terjadi penurunan nilai capaian. Perlu komitmen bersama dalam penguatan dan perbaikan komponen akuntabilitas yang menurun agar nilai dapat naik
3	Indikator Program PD						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	0	0	0	0	82,17	Persentase tindak lanjut yang masih kurang dari 100 memerlukan penguatan komitmen bersama dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan APIP

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Persentase Laporan Pengawasan yang Diterbitkan	100	100	100	100	100	Hasil 100% tiap tahun menggambarkan komitmen PD dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan optimal sesuai program kerja pengawasan
	Persentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat	100	100	100	100	100	Hasil 100% tiap tahun menggambarkan komitmen PD dalam layanan penanganan aduan masyarakat telah berjalan optimal
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
	Persentase Kebijakan Teknis dan Fasilitasi Pengawasan yang Ditetapkan	0	0	100	100	100	Hasil 100% tiap tahun menggambarkan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pengawasan tercukupi sesuai penugasan pengawasan
	Persentase Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan/ Asistensi/ Evaluasi	0	0	100	100	100	Hasil 100% tiap tahun menggambarkan komitmen PD dalam pendampingan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik telah berjalan optimal
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	100	100	100	100	Capaian konsisten 100% pada 2020–2024 menunjukkan dukungan operasional pemerintahan berjalan optimal.
4	IUP						
	Indeks Integritas Nasional	0	74,4	77,9	74,98	76,61	Terjadi fluktuasi capaian namun kembali membaik. Perlu konsistensi dan upaya yang berkelanjutan dalam pemahaman pentingnya integritas dan bahaya korupsi
5	Permendagri 18 2020						
	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,023	3,023	3,001	3,309	3,317	Terjadi penurunan capaian diawal periode, namun capaian terus membaik. Perlu komitmen bersama dan konsistensi kinerja untuk perbaikan area yang masih kurang bagus agar nilai meningkat
	Nilai Kapabilitas APIP	3,000	3,000	3,000	3,050	3,11	Capaian terus meningkat. Hal ini menunjukkan komitmen PD dalam upaya penguatan kapabilitas APIP, tetapi masih perlu konsistensi dan keberlanjutan agar tidak nilai terus meningkat.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis dan telaahan terhadap dokumen Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah provinsi, RTRW, KLHS dan isu-isu yang berkembang di masyarakat, dapat diidentifikasikan tantangan dan peluang yang harus dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Tantangan Inspektorat Daerah dalam pengembangan layanan kedepan antara lain :

1. Perkembangan dinamika kebijakan nasional menuntut birokrasi yang agile dan responsif.

2. Tuntutan peningkatan peran Inspektorat Daerah sebagai APIP Daerah dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat antara lain KPK, BPK, LKPP maupun kementerian dan lembaga teknis lainnya.
3. Tuntutan tindaklanjut atas partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang cenderung meningkat.
4. Perkembangan kemajuan teknologi yang semakin cepat dan meningkatnya tuntutan transparansi dan akses publik terhadap informasi pengawasan yang dapat dipublikasikan

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dalam 5 tahun ke depan, yaitu:

1. Perkembangan paradigma penyelenggaraan kepemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
2. Dukungan kebijakan nasional, provinsi dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
3. Dukungan kebijakan penguatan APIP dalam penganggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemenuhan prasarana pendukung pengawasan.
4. Nota kesepahaman kerjasama pengawasan internal antara APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Pemanfaatan teknologi melalui pengawasan berbasis sistem informasi.
6. Semakin meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

2.1.5. Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo sesuai Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2020 meliputi Perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan Badan Usaha Milik Daerah, Inspektorat. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada kelompok sasaran tersebut Inspektorat Daerah juga bermitra dan melakukan kerjasama internal pengawasan dengan berbagai pihak terkait pengawasan seperti Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kelompok sasaran layanan lainnya yang menjadi mitra Inspektorat Daerah adalah masyarakat Kabupaten Purworejo. Masyarakat dapat melakukan pengaduan atas penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Purworejo.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 tahun lalu dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Inspektorat, yaitu :

a. Masih lemahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
b. Masih terdapat temuan hasil pemeriksaan yang berulang pada pengawasan Perangkat Daerah, BUMD dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

c. Belum optimalnya pelaksanaan kendali mutu dalam pelaksanaan pengawasan internal.
d. Keterlambatan penyelesaian dan penyampaian laporan hasil pengawasa.
e. Belum maksimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan aduan masyarakat berkadar pengawasan.
f. Pemerintahan desa kurang responsif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan desa.
g. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan aparat pengawasan internal lain dan aparat penegak hukum
h. Belum optimalnya peran APIP sebagai *consultant dan catalyst* di lingkungan lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
i. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan.
j. Kapasitas dan kompetensi SDM belum merata pada semua tim pemeriksa.
k. Tidak optimalnya pengembangan inovasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.
l. Penerapaan perencanaan pengawasan berbasis risiko belum dilakukan pada semua pengawasn yang dilakukan.

2.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan analisis terhadap potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, permasalahan yang dihadapi, isu-isu strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional yang relevan, dapat disimpulkan bahwa isu strategis utama pada Inspektorat Daerah adalah "Belum optimalnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah.".

Tabel 2.4 Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Belum optimalnya peran APIP dalam pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Baik					
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Pelayanan publik prima belum merata					
	Belum Optimalnya Implementasi Kualitas Kebijakan					

Isu strategis perangkat daerah dalam tabel 2.4 menunjukkan bahwa peran pengawasan internal masih lemah, dan peningkatannya menjadi strategi penting untuk mendorong akuntabilitas dan efektivitas pelayanan publik. Isu ini muncul dari adanya potensi aparatur pemerintah yang kompeten serta upaya peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti rendahnya akuntabilitas kinerja, kurang optimalnya tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta belum meratanya pelayanan publik. Selain itu, implementasi kebijakan yang belum berkualitas dan lemahnya integrasi sistem informasi turut memperkuat urgensi peningkatan peran APIP.

Dalam konteks dinamika global, nasional, dan regional, kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan adaptif menjadi semakin penting. Oleh karena itu, optimalisasi peran APIP sebagai bagian dari sistem pengawasan internal merupakan isu strategis yang harus menjadi fokus utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Isu strategis ini menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan, strategi, serta program penguatan fungsi pengawasan internal daerah lima tahun ke depan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo untuk periode tahun 2025–2029 adalah "Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (PURWOREJO BERSERI)". Visi ini menjadi arah pembangunan jangka menengah daerah yang menekankan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui daya saing, kesejahteraan, nilai-nilai religiusitas, serta inovasi dalam berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan telaah terhadap misi yang ditetapkan, Inspektorat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, memegang peran strategis dalam mendukung pencapaian Misi Kelima, yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif, Berbasis Teknologi Informasi" khususnya pelaksanaan Program Ketiga yaitu "Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, berkeadilan, responsif, dan inovatif berbasis teknologi informasi." Melalui pengawasan, pendampingan, dan asistensi yang efektif dan sistematis, Inspektorat Daerah diharapkan berkontribusi dalam mendorong terciptanya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Kabupaten Purworejo.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Inspektorat Daerah sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas dalam pembinaan dan pengawasan, serta membantu Bupati Purworejo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan, dituntut untuk mampu menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas, akurat, dan bermanfaat. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, penetapan tujuan menjadi langkah strategis yang penting dan umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan ini akan menjadi dasar dalam perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan, serta menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 adalah "Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah". Penetapan tujuan ini didasari isu strategis Inspektorat Daerah yaitu belum optimalnya peran APIP dalam pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang sudah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo sampai dengan saat ini belum memberikan dampak besar dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran sebagai target yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran perangkat daerah mencerminkan hal-hal yang perlu diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai tindakan, program, dan kegiatan yang terarah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Inspektorat Daerah adalah "Meningkatnya Kualitas Pengawasan" dan "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah." Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, telah dirancang indikator sasaran yang menjadi alat ukur capaian kinerja, lengkap dengan target yang harus

dicapai melalui implementasi program dan kegiatan.

Secara rinci, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan pengendalian internal pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,325	3,333	3,341	3,349	3,357	3,365	
			Nilai SAKIP perangkat daerah	71,50	72,24	72,93	75,33	77,76	80,20	
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP	3,163	3,218	3,273	3,328	3,383	3,438	
			Nilai Manajemen Risiko Indeks	3,165	3,232	3,299	3,366	3,433	3,500	
			Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	3,130	3,164	3,198	3,232	3,266	3,300	
			Indeks Integritas Nasional	77,42	78,24	79,05	79,87	80,68	81,49	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	71,50	72,24	72,93	75,33	77,76	80,20	

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang bersifat komprehensif, yang dirancang untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis dan menjamin tercapainya tujuan serta sasaran perangkat daerah secara efektif dan efisien. Strategi ini mencakup berbagai langkah dan upaya yang terstruktur, antara lain optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penentuan tahapan pelaksanaan, penetapan fokus prioritas, serta pemilihan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tepat. Seluruh elemen strategi tersebut disusun secara sistematis agar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara berkelanjutan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Inspektorat Daerah telah menetapkan strategi yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Purworejo. Strategi yang ditetapkan mencakup dua hal utama, yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah serta peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah. Kedua strategi ini menjadi landasan dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan berintegritas.

Untuk mempermudah pencapaian target yang telah direncanakan, dilakukan penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan. Penahapan ini merupakan bentuk prioritas pembangunan tahunan yang dirancang secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran perangkat daerah secara efektif. Rincian penahapan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Menguatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah	Memantapkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah	Mewujudkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah	Meneguhkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah

Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Arah kebijakan ini disusun agar selaras dengan kebijakan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah secara terukur dan terarah.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mengembangkan serta melaksanakan program dan kegiatan. Keberadaan kebijakan ini penting untuk memastikan terciptanya kelancaran, sinergi, dan konsistensi dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Dalam konteks ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas selama periode Renstra 2025–2029. Adapun kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Berdasar uraian di atas Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kabijakan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan 2026: Penguatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi	Arah Kebijakan 2026 : Penguatan pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan melalui aktivitas penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan pengawasan, serta pendampingan dan asistensi untuk perangkat daerah	
		Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui aktifitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Arah Kebijakan 2027: Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi	Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan pengendalian internal dan pencegahan korupsi yang dilaksanakan melalui aktivitas penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan pengawasan, serta pendampingan dan asistensi untuk perangkat daerah	
		Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui aktifitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Arah Kebijakan 2028: Pemantapan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi.	Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan melalui aktivitas penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan pengawasan, serta pendampingan dan asistensi untuk perangkat daerah	
		Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui aktifitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Arah Kebijakan 2029: Perwujudan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korups	Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan melalui aktivitas penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan pengawasan, serta pendampingan dan asistensi untuk perangkat daerah	
		Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui aktifitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Arah Kebijakan 2030: Peneguhan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi	Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan melalui aktivitas penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan pengawasan, serta pendampingan dan asistensi untuk perangkat daerah	
		Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui aktifitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Tabel 3.3 menggambarkan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dalam rentang waktu 2025-2029 yang selaras dengan arahan Kebijakan RPJMD dan operasionalisasi NSPK. Setiap tahunnya, arah kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, dan responsif berbasis teknologi informasi.

Pada tahun 2026, Renstra Inspektorat Daerah menitikberatkan pada penguatan pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi melalui pelaksanaan aktivitas pengawasan internal serta pengawasan dengan tujuan tertentu. Kegiatan ini didukung oleh perumusan kebijakan pengawasan yang jelas dan sistematis, serta pendampingan dan asistensi

yang intensif kepada perangkat daerah untuk memastikan penerapan pengawasan berjalan efektif dan sesuai standar. Selain itu, penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi fokus utama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui aktivitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, serta pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum yang terintegrasi, Renstra ini berupaya meningkatkan kualitas kinerja dan transparansi. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah juga dikelola secara profesional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Pada tahun 2027, Renstra Inspektorat Daerah diarahkan pada peningkatan pengendalian internal dan pencegahan korupsi sebagai tindak lanjut dari upaya penguatan di tahun sebelumnya. Aktivitas pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu dilaksanakan dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang lebih strategis. Perumusan kebijakan pengawasan terus ditingkatkan kualitasnya agar selaras dengan kebutuhan organisasi dan tantangan pengelolaan pemerintahan yang dinamis. Pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah diperluas untuk memastikan penerapan pengawasan internal dapat berjalan secara konsisten dan terukur. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi langkah krusial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Upaya ini diwujudkan melalui penyempurnaan proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang lebih berbasis hasil. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel, mendukung efisiensi kerja dan pengambilan keputusan yang tepat. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan jasa penunjang pemerintahan juga ditingkatkan untuk memperkuat dukungan operasional dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. Melalui arah kebijakan ini, tahun 2027 menjadi fase peningkatan kapasitas kelembagaan yang berorientasi pada integritas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2028, fokus utama Renstra Inspektorat Daerah diarahkan pada pemantapan pengendalian internal dan pencegahan korupsi yang telah menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Aktivitas penyelenggaraan pengawasan internal serta pengawasan dengan tujuan tertentu dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh, didukung oleh perumusan kebijakan pengawasan yang lebih terstruktur dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pemerintahan. Pendampingan dan asistensi teknis kepada perangkat daerah semakin ditingkatkan guna memastikan penerapan prinsip-prinsip pengawasan berjalan optimal dan efektif, sehingga risiko penyimpangan dapat diminimalisir secara signifikan. Selain itu, pemantapan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi prioritas strategis dalam mewujudkan good governance. Berbagai aktivitas penting seperti perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat sasaran, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan secara profesional dan transparan, mendukung terciptanya tata kelola yang akuntabel. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah juga dioptimalkan untuk memastikan tersedianya sarana prasarana yang memadai dalam

menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Melalui pemantapan ini, Renstra 2028 menegaskan komitmen untuk memperkokoh tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Pada tahun 2029, Renstra Inspektorat Daerah menitikberatkan pada perwujudan pengendalian internal dan pencegahan korupsi sebagai implementasi nyata dari komitmen pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu dijalankan secara menyeluruh dan konsisten, dengan dukungan perumusan kebijakan pengawasan yang matang serta pendampingan dan asistensi yang berkelanjutan kepada perangkat daerah. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa setiap unit kerja dapat mengimplementasikan pengawasan secara efektif untuk mencegah dan menangani potensi penyimpangan. Selain itu, perwujudan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi fokus utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berbagai aktivitas strategis, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum diperkuat untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dijalankan secara efisien dan akuntabel guna mendukung kelancaran operasional dan pelayanan publik. Melalui tahapan perwujudan ini, Renstra 2029 menegaskan komitmen kuat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pengendalian dan akuntabilitas sebagai landasan utama tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2030, Renstra Inspektorat Daerah meneguhkan pengendalian internal dan pencegahan korupsi sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Aktivitas pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, didukung oleh perumusan kebijakan pengawasan yang kokoh serta pendampingan dan asistensi intensif kepada perangkat daerah. Peneguhan ini bertujuan memastikan pengawasan yang efektif dalam mencegah penyimpangan dan meningkatkan integritas lembaga. Di sisi lain, peneguhan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi fokus untuk mewujudkan good governance melalui penguatan aktivitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi. Administrasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum dikelola secara profesional dan transparan, sementara pengadaan, pemeliharaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang pemerintahan dioptimalkan guna mendukung kelancaran operasional pemerintahan. Dengan peneguhan ini, diharapkan tata kelola pemerintahan daerah semakin kokoh, efektif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Secara keseluruhan, arah kebijakan Renstra PD ini menunjukkan penekanan yang konsisten pada pengembangan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah yang berorientasi pada pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas. Pendekatan ini menegaskan komitmen Inspektorat Daerah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berupa program, kegiatan, dan subkegiatan yang secara nyata menghasilkan *output* dan keluaran yang mendukung pencapaian indikator target visi dan misi Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029. Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 didasarkan pada hasil cascading dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* yang harus dicapai dalam lima tahun ke depan, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029. Dalam proses penyusunannya, pemilihan program, kegiatan, dan subkegiatan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbarui melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan pengendalian internal pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Meningkatnya kualitas pengawasan			Nilai Kapabilitas APIP		
					Nilai Manajemen Risiko Indeks		
					Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi		
					Indeks Integritas Nasional		
			Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
			Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur		Persentase Laporan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang Diterbitkan		
			Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang		Persentase Laporan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kesejahteraan Rakyat		Diterbitkan		
			Meningkatnya kualitas pengawasanBidang Perekonomian dan Pembangunan		Persentase Laporan Pengawasan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Diterbitkan		
			Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi		Persentase Laporan Pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang Diterbitkan		
			Meningkatnya efektivitas tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan		Persentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat berkadar pengawasan		
				Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang Kesejahteraan Rakyat		
				Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
				Tersusunnya kesepakatan, kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Kesepakatan Kerja Sama Pengawasan Internal		
				Tersusunnya Laporan Hasil Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
						Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
						Reviu Laporan Kinerja	
						Reviu Laporan Keuangan	
						Pengawasan Desa	
						Kerja Sama Pengawasan Internal	
						Monitoring dan Evaluasi Tindak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Kesejahteraan Rakyat	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
				Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Pemerintahan dan Aparatur		
				Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
				Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi		
				Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Kesejahteraan Rakyat		
						Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
						Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Meningkatnya kualitas kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan		Persentase kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
			Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatur		Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur		
			Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat		Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat		
			Meningkatnya		Persentase		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		pendampingan/ asistensi/ evaluasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
			Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi		Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi		
				Tersusunnya rekomendasi hasil penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Pendampingan dan Asistensi	
				Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat		
				Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
				Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi		
						Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Reformasi Birokrasi	
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausaha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						an Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Aset Tak Berwujud	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Pelaksanaan berbagai aktivitas dalam rangka pencapaian output dan keluaran dari program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan indikator target yang telah ditetapkan memerlukan perencanaan pendanaan yang matang dan terukur. Rencana pendanaan tersebut disusun untuk jangka waktu lima tahun, dengan mempertimbangkan kondisi serta kemampuan keuangan daerah secara efisien dan berkelanjutan. Rencana pendanaan ini menjadi bagian integral dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 sebagai dasar penganggaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Adapun rencana pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan pengendalian internal pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70	72,24		72,93		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Angka	3,317	3,333		3,341		3,349		3,357		3,365		3,365			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70	72,24		72,93		75,33		77,76		80,2		80,2			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH						14.237.267.100		14.379.640.000		12.307.173.000		12.307.173.000		12.307.173.000				
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	14.237.267.100	100	14.379.640.000	100	12.307.173.000	100	12.307.173.000	100	12.307.173.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24	45	17.636.800	45	19.043.600	45	19.995.700	45	20.995.600	45	22.045.200	225			
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	19	22	15.200.000	22	15.960.000	22	16.758.000	22	17.595.900	22	18.475.600	110			
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	22	2.436.800	22	2.558.600	22	2.686.500	22	2.820.900	22	2.961.900	110			
6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	1	525.000	1	551.200	1	578.800	1	607.700	5			
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	27	45	12.621.976.700	45	12.276.064.000	45	10.168.653.700	45	10.190.907.600	45	10.070.909.300	225			
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bl	65	63	12.620.193.600	63	12.274.191.800	63	10.166.687.900	63	10.188.843.500	63	10.068.742.000	315			
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	26	44	1.783.100	44	1.872.200	44	1.965.800	44	2.064.100	44	2.167.300	220			
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	11	912.600	11	958.200	11	1.006.100	11	1.056.400	11	1.109.200	55			
6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	11	912.600	11	958.200	11	1.006.100	11	1.056.400	11	1.109.200	55			
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	3	21	689.097.800	21	743.605.200	21	832.005.400	21	819.824.700	21	860.815.900	105			
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	1	51.220.000	0	0	0	0	1			
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	17	11.898.600	17	12.493.500	17	13.118.200	17	13.774.100	17	14.462.800	85			
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	120	63	674.379.200	63	708.098.100	63	743.503.000	63	780.678.200	63	819.712.100	315			
6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	130	63	2.820.000	63	2.961.000	63	3.109.000	63	3.264.500	63	3.427.700	315			
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	0	0	63	20.052.600	63	21.055.200	63	22.107.900	63	23.213.300	315			
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	10	9	168.462.100	9	184.030.700	9	193.232.300	9	230.088.000	9	240.232.700	45			
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2	4.105.000	2	4.310.200	2	4.525.700	2	4.752.000	2	4.989.600	10			
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	26	13.107.800	27	16.658.100	26	17.491.100	26	18.365.600	26	19.283.900	131			
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	49.631.400	12	52.112.900	12	54.718.600	12	57.454.500	12	60.327.200	60			
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5	20.905.600	5	21.950.800	5	23.048.400	5	24.200.800	5	25.410.800	25			
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	1	27.194.000	1	27.194.000	2			
6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	27	10.183.700	27	14.943.800	27	15.691.000	27	16.475.600	27	17.299.400	135			
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	6.625.000	12	6.956.200	12	7.304.000	12	7.669.200	12	8.052.700	60			
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Laporan	12	12	54.623.000	12	57.354.100	12	60.221.800	12	63.232.900	12	66.394.500	60			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	2	6.810.600	2	7.151.100	2	7.508.600	2	7.884.100	2	8.278.300	10			
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2	2.470.000	2	2.593.500	2	2.723.100	2	2.859.300	2	3.002.300	10			
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	10	44	216.424.000	44	604.292.800	44	515.941.000	44	436.259.000	44	473.619.000	220			
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	10	338.150.000	10	338.150.000	10	338.150.000	11	371.965.000	41			
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	26	24.632.000	2	8.110.000	3	10.162.000	1	4.055.000	1	4.055.000	33			
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	15	167.863.000	12	163.859.800	10	153.456.000	7	94.054.000	7	83.426.000	51			
6.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	80.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	3	23.929.000	1	14.173.000	1	14.173.000	0	0	1	14.173.000	6			
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	36	36	203.529.100	36	213.706.100	36	224.390.100	36	235.608.100	36	247.386.400	180			
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	300.000	12	315.000	12	330.000	12	345.000	12	360.000	60			
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	153.561.100	12	161.239.100	12	169.301.100	12	177.766.100	12	186.654.400	60			
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	49.668.000	12	52.152.000	12	54.759.000	12	57.497.000	12	60.372.000	60			
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	5	319.228.000	6	337.939.400	5	351.948.700	6	372.433.600	5	391.055.300	27			
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	39.950.000	1	41.947.500	1	44.044.800	1	46.247.100	1	48.559.400	5			
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	4	77.660.000	4	81.543.000	4	85.620.100	4	89.901.100	4	94.396.200	20			
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	10	2.750.000	0	0	10	2.887.500	10	3.031.800	30			
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	68	68	48.200.000	68	50.610.000	68	53.140.500	68	55.797.500	68	58.587.400	340			
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	130.368.000	1	136.886.400	1	143.730.700	1	150.917.200	1	158.463.100	5			
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	26	19	23.050.000	19	24.202.500	19	25.412.600	19	26.683.200	19	28.017.400	95			
2	Meningkatnya kualitas pengawasan		Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,11	3,218		3,273		3,328		3,383		3,438		3,438			
			Nilai Manajemen Risiko Indeks	Angka	3,098	3,232		3,299		3,366		3,433		3,5		3,5			
			Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Angka	3,096	3,164		3,198		3,232		3,266		3,3		3,3			
			Indeks Integritas Nasional	Angka	76,61	78,24		79,05		79,87		80,68		81,49		81,49			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH						762.782.900		800.922.000		762.783.000		774.835.000		787.077.000				
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya efektivitas tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat berkadar pengawasan	%	100	100	558.091.300	100	585.996.000	100	558.091.000	100	566.909.000	100	575.866.000	100	Inspektur Pembantu V	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	%	82,17	82,74		83,3		83,87		84,43		85		85	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Persentase Laporan Pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang Diterbitkan	%	100	100		100		100		100		100		100	Inspektur Pembantu V	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Laporan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diterbitkan	%	100	100		100		100		100		100		100	Inspektur Pembantu III	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Laporan Pengawasan	%	100	100		100		100		100		100		100	Inspektur	Kabupaten	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
		Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang Diterbitkan														Pembantu I	Purworejo	
		Meningkatnya kualitas pengawasanBidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Laporan Pengawasan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Diterbitkan	%	100	100		100		100		100		100		100	Inspektur Pembantu IV	Kabupaten Purworejo	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Laporan	1	1	335.426.800	1	352.198.300	1	335.426.800	1	340.726.600	1	346.109.900	5			
		Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1	1		1		1		1		1		5			
		Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Laporan	1	1		1		1		1		1		5			
		Tersusunnya kesepakatan, kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Kesepakatan Kerja Sama Pengawasan Internal	Laporan	1	1		1		1		1		1		5			
		Tersusunnya Laporan Hasil Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan	1	1		1		1		1		1		5			
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	120	52	38.050.600	52	39.953.100	52	38.050.500	52	38.651.700	52	39.262.400	260			
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	192	60	36.377.700	60	38.196.500	60	36.377.600	60	36.952.400	60	37.536.200	300			
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	3	1	3.235.000	1	3.396.700	1	3.234.900	1	3.286.100	1	3.338.000	5			
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	71	28	24.844.400	28	26.086.600	28	24.844.300	28	25.236.900	28	25.635.600	140			
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	85	29	44.419.200	29	46.640.100	29	44.419.100	29	45.121.000	29	45.833.900	145			
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	4	1	60.280.700	1	63.294.700	1	60.280.600	1	61.233.100	1	62.200.500	5			
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan	6	6	128.219.200	6	134.630.600	6	128.219.800	6	130.245.400	6	132.303.300	30			
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1	1	222.664.500	1	233.797.700	1	222.664.200	1	226.182.400	1	229.756.100	5			
		Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Laporan	1	1		1		1		1		1		5			
		Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Laporan	1	1		1		1		1		1		5			
		Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1		1		1		1		1		5			
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2	2	23.162.700	2	24.320.800	2	23.162.600	2	23.528.600	2	23.900.400	10			
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	153	99	199.501.800	99	209.476.900	99	199.501.600	99	202.653.800	99	205.855.700	495			
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	%	100	100	204.691.600	100	214.926.000	100	204.692.000	100	207.926.000	100	211.211.000	100	Inspektur Pembantu V	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	100	100		100		100		100		100		100	Inspektur Pembantu III	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur	%	100	100		100		100		100		100		100	Inspektur Pembantu I	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan	%	100	100		100		100		100		100		100	Inspektur Pembantu IV	Kabupaten Purworejo	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
			Pembangunan															
		Meningkatnya kualitas kebijakan teknik dan fasilitasi pengawasan	Persentase kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	%	100	100		100		100		100		100		100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya rekomendasi hasil penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Rekomendasi	2	2	12.504.100	2	13.129.500	2	12.504.300	2	12.701.900	2	12.902.500	10			
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	3	3	10.511.400	3	11.036.900	3	10.511.400	3	10.677.400	3	10.846.100	15			
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	3	1.992.700	3	2.092.600	3	1.992.900	3	2.024.500	3	2.056.400	15			
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Laporan	1	1	192.187.500	1	201.796.500	1	192.187.700	1	195.224.100	1	198.308.500	5			
		Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1	1		1		1		1		1		5			
		Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Laporan	1	1		1		1		1		1		5			
		Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1		1		1		1		1		5			
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	PD	6	6	4.669.700	6	4.903.100	6	4.669.700	6	4.743.400	6	4.818.400	30			
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD	212	168	80.374.800	168	84.393.400	168	80.374.900	168	81.644.800	168	82.934.700	840			
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	3	2	71.037.500	2	74.589.300	2	71.037.600	2	72.159.900	2	73.300.000	10			
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD	165	165	36.105.500	165	37.910.700	165	36.105.500	165	36.676.000	165	37.255.400	825			
Jumlah							**15.000.050.000**		**15.180.562.000**		**13.069.956.000**		**13.082.008.000**		**13.094.250.000**				

Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dan diarahkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas pembangunan daerah. Penyusunan daftar subkegiatan prioritas ini bertujuan agar seluruh aktivitas yang dilaksanakan selaras dengan tujuan strategis daerah serta memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan program pembangunan. Daftar subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan			
		Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur			
		Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat			
		Meningkatnya kualitas pengawasanBidang Perekonomian dan Pembangunan			
		Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi			
		Meningkatnya efektivitas tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan			
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan pengawasan internal	
			Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah	Audit Evran Berbasis Gender, Audit Ketaatan, Audit SPBE, Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan Pelayanan Publik, Pemeriksaan Tata Kelola BLUD, Pengawasan BUMD, Reviu Pengelolaan BMD, Reviu Renja, Reviu Renstra, Reviu RKPD, Reviu RPJMD	
			Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah	Audit Hibah, Audit Bantuan Keuangan, Audit Bansos, Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengawasan Keuangan Sekolah, Reviu DAK, Reviu DAU, Reviu KUA PPAS, Reviu Belanja Pegawai PPPK, Reviu RKA	
			Reviu Laporan Kinerja	Reviu LPPD	
			Reviu Laporan Keuangan	Reviu LK BLUD, Reviu LKPD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Pengawasan Desa	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa, Penyusunan Data Siswaskeudes	
			Kerja Sama Pengawasan Internal	Koordinasi APIP-APH, Koordinasi Joint Audit, Operasionalisasi Satgas Perizinan	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah, Koordinasi TL Hasil Pemeriksaan BPK RI, Koordinasi TL Hasil Pengawasan APIP	
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Koordinasi Pemeriksaan Kasus/ Investigasi/ PKKN dengan APH	
			Pengawasan dengan Tujuan Tetentu	Klarifikasi Kasus Aduan, Penanganan Kasus/ Investigasi, Pengawasan Pengadaan ASN/ PPPK, Probity Audit, Reviu HPS, Reviu ASB HSPK, Reviu SHS, Reviu Manajemen ASN. Reviu P3DN, Pemeriksaan PBJ	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Meningkatnya kualitas kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan			
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatur			
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat			
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan			
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi			
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan kebijakan pengawasan	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Penyusunan Perbup Renbinwas dan Keputusan Bupati tentang PKPT	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Penyusunan Kebijakan/ Pedoman Pengawasan	
			Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan asistensi untuk perangkat daerah	
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pemantauan dan Pendampingan Penerapan SPM	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Penjaminan Kualitas PM Maturitas SPIP, Evaluasi Implementasi SAKIP, Evaluasi Manajemen Risiko, Evaluasi PMPRB, Penilaian Zona Integritas	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pelaksanaan Kegiatan Desa Anti Korupsi, Koordinasi Tindak Lanjut MCP	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Koordinasi dan Pelaporan UPG, Koordinasi dan Pelporan LHKPN/ LHKAN, Koordinasi SPI, Sosialisasi UPG	

4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Program-program Inspektorat Daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional, provinsi, serta kegiatan unggulan daerah. Dua program utama yang menjadi fokus Inspektorat Daerah adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi. Kedua program ini merupakan bagian integral dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Melalui pelaksanaan program-program tersebut, diharapkan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program, serta pengelolaan anggaran dan sumber daya dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program ini mengedepankan pembinaan dan pengawasan yang terencana dan sistematis untuk mendeteksi secara dini potensi penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Pengawasan dilaksanakan dengan pendekatan preventif dan represif melalui pengawasan internal, audit kinerja, audit keuangan, reviu, evaluasi, dan pemantauan. Selain kegiatan pengawasan, dilakukan pula pendampingan untuk mendukung penerapan kebijakan pengawasan di seluruh unit kerja dengan meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan keterampilan aparatur dalam sistem pengendalian intern, penegakan integritas, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Program Penyelenggaraan Pengawasan difokuskan pada penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu, meliputi pengawasan kinerja pemerintah daerah, pengawasan keuangan, reviu laporan kinerja dan keuangan, pengawasan desa, kerja sama pengawasan internal, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil

pemeriksaan BPK RI dan APIP, penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya.

Sementara itu, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi diarahkan pada penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, serta pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah. Program ini juga mencakup verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi, koordinasi, monitoring, evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta pendampingan dan asistensi penegakan integritas.

Pelaksanaan kedua program tersebut mendukung Asta Cita ketujuh, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Hal ini secara khusus terefleksikan dalam program prioritas ketiga tentang Reformasi Hukum, Politik, dan Birokrasi serta program prioritas keempat terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagaimana dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.4.a berikut:

Tabel 4.4.a. Dukungan Program terhadap Nasional

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
7	Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Pengawasan	Inspektorat Daerah

Program-program yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program delegasi provinsi yang ketiga, yaitu Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001. Program ini ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Pemerintah Desa, yang dilaksanakan secara kolaboratif bersama Aparat Penegak Hukum, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tabel 4.4.b. Dukungan Program terhadap Program Provinsi

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK & KPK	Pendampingan desa anti korupsi	Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Sosialisasi anti korupsi kepada ASN, perangkat desa, dan pelajar	Pengawasan	Inspektorat Daerah

Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Misi Kelima Bupati Purworejo, khususnya pada program prioritas ketiga, yaitu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif, dan inovatif berbasis teknologi informasi. Pelaksanaan program ini juga secara langsung mendukung Program Unggulan Bupati, yaitu Pitulungan dalam program unggulan Sejahtera Wargane. Melalui pengawasan internal yang ketat, program ini berperan dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan Pitulungan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dukungan program terhadap kegiatan unggulan daerah tersebut dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut:

Tabel 4.4.c. Dukungan Program terhadap Program Kabupaten

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
4	Sejahtera Wargane	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan tujuan tertentu 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 3. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 5. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Pengawasan	Inspektorat Daerah

4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang

Urusan

Penentuan target keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dilakukan melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berfungsi sebagai alat ukur yang menggambarkan sejauh mana capaian kinerja telah sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Indikator yang disajikan merupakan hasil seleksi yang cermat, dengan mempertimbangkan relevansi, keterukuran, dan kemampuannya dalam merepresentasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Pemilihan indikator ini juga memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan outcome yang ingin dicapai, sehingga setiap indikator memiliki bobot strategis dalam mendukung arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, IKU tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan dan pengendalian kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Angka	3,325	3,333	3,341	3,349	3,357	3,365	Tujuan PD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	71,55	72,24	72,93	75,33	77,76	80,20	
2	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,163	3,218	3,273	3,328	3,383	3,438	Sasaran PD
	Nilai Manajemen Risiko Indeks	Angka	3,165	3,232	3,299	3,366	3,433	3,500	
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Angka	3,130	3,164	3,198	3,232	3,266	3,300	
	Indeks Integritas Nasional	Angka	77,42	78,24	79,05	79,87	80,68	81,49	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	71,55	72,24	72,93	75,33	77,76	80,20	

Disamping indikator kinerja utama, penentuan target dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah juga dilakukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dirancang untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan setiap urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. IKK berperan sebagai parameter utama yang menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan, khususnya dalam konteks pencapaian hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan. Indikator ini disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan standar pelayanan minimal maupun capaian pembangunan yang telah ditetapkan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Melalui IKK, perangkat daerah dapat memantau dan mengevaluasi capaian kinerja secara obyektif, sekaligus menjadikannya sebagai acuan dalam menetapkan target tahunan yang realistis dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, IKK menjadi instrumen penting dalam memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan berjalan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Integritas Nasional	Angka	77,42	78,24	79,05	79,87	80,68	81,49	Inspektorat Daerah	IUP
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,325	3,333	3,341	3,349	3,357	3,365	Inspektorat Daerah	Permendagri No. 18 Tahun 2020
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,163	3,218	3,273	3,328	3,383	3,438	Inspektorat Daerah	

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo setiap tahun.
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
d. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Birokrasi pemerintah dihadapkan pada perkembangan yang sangat cepat dan komplek baik karena perubahan-perubahan ekologis maupun berkembangnya teknologi informasi dan tuntutan masyarakat yang harus diakomodasi dan diadopsi. Agenda reformasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan agenda pemerintah yang harus direalisasikan.

sistem penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah perubahan sistem pemerintahan daerah sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut telah menyebabkan pergeseran paradigma pelayanan, dari yang bersifat sentralistis ke desentralistis dan mendekatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Good governance merupakan upaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Cita-cita yang ingin dicapai dalam reformasi birokrasi adalah pemerintahan yang bersih (clean government) serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi birokrasi berfokus pada perubahan dalam aspek kelembagaan, sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, serta pelayanan publik. Hal yang tidak kalah penting adalah perubahan pola pikir (mindset) dan pengembangan budaya kerja agar tercipta pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Gambar 1.1.
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain

Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003

Indeks Ketahanan Nasional (IKN) merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk mengukur tingkat ketangguhan bangsa dalam menghadapi dinamika, tantangan, dan potensi ancaman di berbagai sektor kehidupan. Melalui dimensi ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya, pemerintah daerah, khususnya Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat melakukan pengukuran yang relevan dengan kewenangan otonomi daerah. Sementara itu, aspek geografi, demografi, sumber daya alam menjadi ranah perangkat daerah lain, serta pertahanan dan keamanan tetap menjadi ranah pemerintah pusat, sehingga fokus pengukuran daerah lebih diarahkan pada aspek pembangunan yang nyata dan dapat dikendalikan secara langsung.

IKN menggambarkan faktual yang penting untuk evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan. Pemetaan ketahanan daerah melalui IKN membantu mengidentifikasi sektor yang sudah kuat maupun sektor yang masih rentan, sehingga kebijakan dapat dirancang lebih tepat sasaran, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penerapan IKN di tingkat daerah menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ketahanan bangsa.

Sebagai unsur pendukung Kepala Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Purworejo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, memiliki peran dan kedudukan yang strategis.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, Bakesbangpol Kabupaten Purworejo perlu menyusun perencanaan strategis yang terangkum dalam dokumen Renstra Tahun 2025 – 2029 yang menggambarkan arah pembangunan Bakesbangpol Kabupaten Purworejo yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dalam dokumen Renstra disusun secara jelas rumusan visi, misi, tujuan sasaran jangka menengah (lima tahun) dan tahunan.

Proses penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan arah, pedoman, dan strategi dalam penyelenggaraan tugas serta fungsi Bakesbangpol untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah dalam periode lima tahun.

b. Tujuan

1. Mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah menjadi kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan
2. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal dalam melaksanakan program dan kegiatan
3. Sebagai bentuk perencanaan dan pertanggungjawaban dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat
4. Mengintegrasikan program perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
5. Renstra menjadi acuan bagi Bakesbangpol dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bakesbangpol Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini merumuskan latar belakang penyusunan berupa gambaran kondisi dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra dan sitematika penulisan Renstra

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan lima tahun terakhir dan data-data lainnya yang relevan, Penyajian hasil evaluasi pencapaian pelaksanaan urusan, diutamakan berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).
Penyajian tentang; Tugas fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran pelayanan perangkat dan mitra perangkat daerah dalam memberikan pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan. Mengidentifikasi isu strategis, isu global isu nasional dan isu regional yang dapat mempengaruhi perangkat daerah.

Bab III TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan. Memuat kondisi saat ini dan dapat diukur harapan untuk jangka waktu lima tahun mendatang. Petahapan tiap tahun atas rencana pencapaian yang akan ditempuh serta penyajian lokus berdasarkan kecamatan atau wilayah pengembangan atau berdasar hal hal tertentu sesuai kewenangannya.

Bab IV PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat uraian program, kegiatan, sub kegiatan. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator kinrtja, target dan pagu

indikatif. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui indikator Kinerja Utama (IKU). Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui indikator Kinerja Kunci (IKK).
Penyajian rencana kerja jangka waktu tahun 2025 – 2030 dimana rencana kerja tahun 20230 merupakan bagian dari upaya kesinambungan perencanaan. Didalamnya memuat indikator dan target yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan.

Bab V PENUTUP

Bab ini menyimpulkan bahwa Rencana Strategis merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja selama lima tahun, Kaidah pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan agar tujuan sasaran dan target kinerja dapat tercapai serta pedoman dalam pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pembangunan Pemerintah Daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bakesbangpol merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan stabilitas wilayah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Setiap perangkat daerah dibentuk dengan tugas dan fungsi yang spesifik sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didukung oleh struktur organisasi yang tertata untuk memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat daerah memanfaatkan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia yang profesional, anggaran, teknologi informasi, maupun sarana dan prasarana pendukung. Kinerja pelayanan terus diupayakan untuk ditingkatkan melalui evaluasi, inovasi, serta pendekatan partisipatif yang berorientasi pada hasil. Kelompok sasaran layanan meliputi masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, partai politik, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, perangkat daerah juga bekerja sama dengan berbagai mitra, seperti instansi vertikal, swasta, dan organisasi masyarakat, guna memperkuat sinergi dan efektivitas dalam menciptakan kondusivitas wilayah dan peningkatan pelayanan publik.

Terciptanya stabilitas politik dan keamanan wilayah memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik yang demokratis, serta meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa, yang keseluruhannya dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung tujuan pemerintah daerah untuk mewujudkan kondisi sosial yang harmonis, memperkuat persatuan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kondisi ini didukung dengan potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan pelayanan publik

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kementerian Dalam Negeri menetapkan Keputusan Nomor 100-441 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Nomor 050-3708 Tahun 2020 mengklasifikasikan Bakesbangpol sebagai bagian dari unsur pemerintahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 menetapkan perubahan nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesbangpol. Sebagai badan daerah dengan intensitas sedang, lembaga ini melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bakesbangpol memiliki tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Tugas tersebut mencakup aspek kesatuan bangsa, politik dalam negeri, serta organisasi kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bakesbangpol menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
3. Pembinaan dan pengendalian teknis bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
5. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Bakesbangpol
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Susunan organisasi Bakesbangpol Kabupaten Purworejo sebagaimana Peraturan Bupati nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo terdiri atas:

a. Kepala Bakesbangpol
b. Sekretariat
c. Bidang Kesatuan Bangsa
d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
e. UPT
f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat Badan bertugas mengoordinasikan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum, serta keuangan dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bakesbangpol sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi:

a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja;
b. menyusun perjanjian kinerja;
c. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
b. menyelenggarakan administrasi umum;
c. menyelenggarakan pengadaaan barang milik daerah;
d. menyediakan jasa;
e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan Bangsa Dan Politik. Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang Kesatuan Bangsa, yang meliputi ideologi, wawasan kebangsaaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang ideologi, wawasan kebangsaaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik; dan
c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bakesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari Subkoordinator Ideologi, Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik. Subkoordinator masing-masing dijabat oleh seorang pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Subkoordinator Ideologi, Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, yang meliputi:

a. merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, yang meliputi :
    1. menyusun program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
    2. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
    3. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

4. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
5. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

b. merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, yang meliputi :
1. menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
2. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah ;
3. melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
4. melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
5. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah; dan

c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan tugas jabatannya.

Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik, yang meliputi:

a. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
c. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
d. melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar

negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
f. melaksanakan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan tugas jabatannya

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan di pimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakesbangpol. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan dan mengendalikan bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang meliputi politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang politik dalam negeri;
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang organisasi kemasyarakatan; dan
c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bakesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan Subkoordinator Politik Dalam Negeri dan Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan. Subkoordinator masing-masing dijabat oleh seorang pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Subkoordinator Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Politik Dalam Negeri, yang meliputi:

a. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
c. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;

d. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

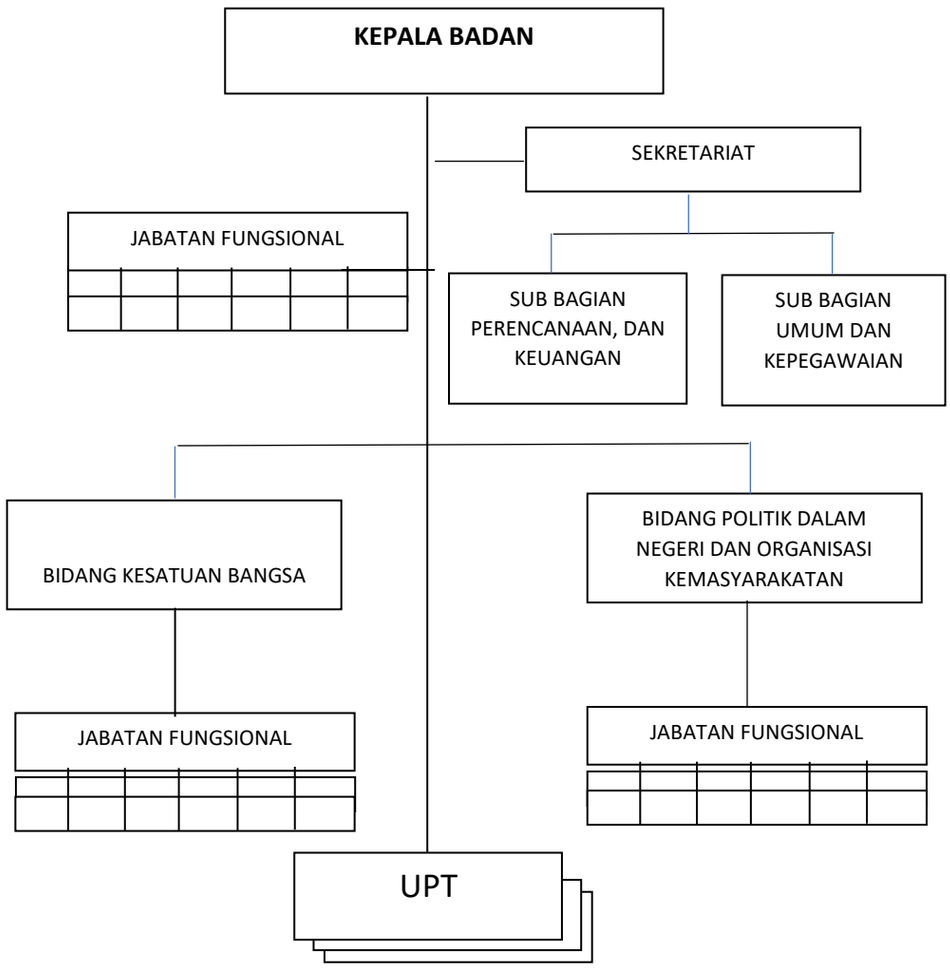

.

a. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah; dan
b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas jabatannya.

Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang organisasi kemasyarakatan, yang meliputi:

a. menyusun program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;

b. menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
c. melaksanakan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
d. melaksanakan koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
e. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas jabatannya.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada di Bakesbangpol berjumlah 22 orang terdiri dari ASN dan Non-ASN. Menurut Golongan dan Eselon sumber daya manusia yang ada di Bakesbangpol didominasi Golongan III/d dan menurut eselon didominasi eselon IV/a dan III/b, sedangkan bila dirinci menurut tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Bakesbangpol Kabupaten Purworejo

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	S-2 (Sarjana Strata 2)	4	19%
2	S-1 (Sarjana Strata 1)	4	27%
3	D-3 (Diploma III)	6	18%
4	SMA/SMK atau Sederajat	8	36%
5	SLTP	0	0%
	Jumlah	22	100%

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Purworejo (Agustus 2025)

Berdasarkan data tingkat pendidikan, mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan menengah atas (SMA/SMK atau sederajat) sebanyak 8 orang atau 36 persen dari total 22 pegawai. Selanjutnya, terdapat 6 orang atau 18 persen lulusan Diploma III, serta masing-masing 4 orang lulusan Sarjana Strata 1 (27 persen) dan Sarjana Strata 2 (19 persen). Sementara itu, tidak terdapat pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTP. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi pendidikan menengah, disusul dengan lulusan perguruan tinggi yang cukup signifikan, sehingga memberikan potensi pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang lebih optimal melalui peningkatan kompetensi dan pendidikan lanjutan

Tabel 2.2.

Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Bakesbangpol Kabupaten Purworejo

No	Jenis Kelamin	Jumlah		Prosentase
1	Laki-laki	16	Orang	72,7%
2	Wanita	6	Orang	27,3%
	JUMLAH	22	Orang	100%

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Purworejo (Agustus 2025)

Berdasarkan data jenis kelamin, dari total 22 pegawai yang ada, mayoritas didominasi oleh laki-laki sebanyak 16 orang atau 72,7 persen, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 6 orang atau 27,3 persen. Proporsi ini menggambarkan bahwa peran laki-laki masih lebih besar dalam struktur pegawai, meskipun keberadaan perempuan juga cukup signifikan dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Kehadiran pegawai perempuan memberi warna tersendiri karena selain mampu menjalankan fungsi administratif dan teknis, juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang lebih dinamis, kolaboratif, dan inklusif. Dengan komposisi gender seperti ini, organisasi memiliki peluang untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing pegawai, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga tercapai keseimbangan peran dan kontribusi dalam mendukung visi serta misi lembaga.

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah terbesar terdapat pada Golongan III dengan 11 orang, terdiri dari 7 orang pada Golongan III/b, 2 orang pada Golongan III/d, serta masing-masing 1 orang pada Golongan III/a yang terbagi dalam jabatan fungsional umum dan tertentu. Selanjutnya, terdapat 5 orang pada Golongan IV, masing-masing 1 orang pada Golongan IV/c dan 4 orang pada Golongan IV/a dengan jabatan eselon III dan IV. Di sisi lain, Golongan II hanya berjumlah 1 orang pada Golongan II/d, sementara pegawai Golongan V (PPPK) sebanyak 2 orang dan pegawai non-ASN sebanyak 3 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur pegawai didominasi oleh golongan menengah dengan dukungan dari pegawai golongan atas dan non-ASN, sehingga memberikan keseimbangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan sekaligus ruang bagi pengembangan kapasitas aparatur.

Tabel 2.3.
Pegawai Menurut Golongan dan Eselon
Bakesbangpol Kabupaten Purworejo

GOL/RUANG	ESELON			NON ESELON		JUMLAH
	II	III	IV	JFT	JFU	
Golongan IV/c	1					1
Golongan IV/b						0
Golongan IV/a		2	2			4
JUMLAH GOLONGAN IV						5
Golongan III/d		1			1	2
Golongan III/c					0	0

GOL/RUANG	ESELON			NON ESELON		JUMLAH
	II	III	IV	JFT	JFU	
Golongan III/b					7	7
Golongan III/a				1	1	2
JUMLAH GOLONGAN III						11
Golongan II/d					1	1
Golongan II/c						
JUMLAH GOLONGAN II						1
Golongan V (PPPK)					2	2
Golongan V (PPPK)						2
JUMLAH Non ASN						3
TOTAL						22

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Purworejo (Agustus 2025)

b. Sumber Daya Aset

Sumber Daya Aset pada Kesbangpol meliputi seluruh sarana, prasarana, dan perlengkapan operasional yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol, termasuk di dalamnya aset berupa gedung, kendaraan dinas, perangkat teknologi, serta dokumen penunjang.

Berdasarkan data sumber daya aset yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terlihat bahwa secara umum sarana dan prasarana telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Aset utama berupa tanah dan bangunan kantor berjumlah 1 unit dalam kondisi baik, serta didukung kendaraan operasional roda 4 sebanyak 2 unit dan roda 2 sebanyak 11 unit, meskipun terdapat 3 unit kendaraan roda 2 yang tidak dalam kondisi baik. Selain itu, fasilitas penunjang seperti AC, kipas angin, alat pemadam (APAR), komputer, laptop, printer, proyektor, serta sarana kearsipan juga tersedia, meski sebagian komputer dan lemari arsip tercatat dalam kondisi kurang baik. Adapun furnitur kerja seperti meja, kursi, serta perlengkapan pertemuan relatif memadai dengan jumlah yang cukup dan sebagian besar dalam kondisi baik. Komposisi ini menunjukkan bahwa secara umum aset yang ada dapat digunakan secara optimal, namun tetap diperlukan upaya pemeliharaan, peremajaan, dan pengadaan baru pada beberapa jenis aset yang kondisinya tidak lagi layak agar kualitas pelayanan dan operasional Kesbangpol tetap terjaga.Namun sebagai perangkat daerah yang berbentuk Badan, Bakesbangpol belum memiliki ruangan yang representatif untuk penyelenggaraan rapat serta ruangan yang sempit menjadikan kinerja dan pelayanan public kurang optimal.

Tabel 2.4.
Sumber Daya Aset Utama
Bakesbangpol Kabupaten Purworejo

No	Jenis Aset	Jml	Kondisi	
			Baik	Tidak Baik
1	Tanah dan Bangunan kantor	1	1	
2	Kendaraan Dinas / Ops Roda 4	2	2	

3	Kendaraan Dinas / Ops Roda 2	11	8	3
4	AC	6	6	
5	Kipas angin	1	1	
6	Alat pemadan/apar	3	3	
7	Komputer (PC)	20	7	6
8	Notebook (Laptop)	7	7	
9	Printer	8	7	1
10	Scaner	2	2	
11	Proyrktor	2	2	
12	Filing Cabinet	8	8	
12	Rak Arsip	6	6	
13	Lemari Arsip	11	4	7
14	Meja Tamu	2	2	
15	Meja Kerja	23	23	
16	Meja Panjang	2	2	
17	Kursi Kerja	31	25	6
18	Kursi Pertemuan	30	30	

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Purworejo (Juni 2025)

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bakesbangpol Kabupaten Purworejo memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati Purworejo dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Daerah urusan bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional dan politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi. Bakesbangpol memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan kesatuan bangsa serta keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 alinea IV yakni Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia, khususnya dalam hal menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, damai, dan rukun. Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dari luar negeri dan gangguan dari dalam negeri. Aman mencerminkan keadaan tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir. Adapun damai mengandung arti tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan, keadaan tidak bermusuhan dan rukun dalam sistem negara hukum.

Kinerja Pelayanan pada Bakesbangpol Kabupaten Purworejo dapat dijabarkan dalam 2 aspek penilaian terdiri dari Kondusifitas Wilayah, Stabilitas Politik dan Demokrasi dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Kondusifitas Wilayah
   Secara umum situasi daerah-daerah di Kabupaten Purworejo selama kurun waktu 2021-2024 aman dan tertib. Meskipun masih terjadi beberapa kali ganguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain unjuk rasa dan tindak pidana. Kejadian unjuk rasa mengalami fluktuasi, pada tahun 2021 s/d 2024, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya serta masih adanya paham keagamaan radikal dan aliran sesat di masyarakat. Gejolak masyaraka atas pembangunan Bendung Bener juga harus menjadi perhatian agar gejolak sosial tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum.
b. Stabilitas Politik dan Demokrasi

Kondisi politik di Kabupaten Purworejo dapat digambarkan melalui pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pemilihan kepala daerah yang berjalan demokratis dan tertib tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Ketiga pemilihan tersebut dapat menjadi barometer bahwa stabilitas politik dan demokrasi di Kabuaten Purworejo dapat terkendali.

Capaian kinerja pelayanan daerah menggambarkan capaian atas sasaran/target pada periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah digratifikasi oleh pemerintah. Capaian kinerja pelayanan terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 2.5. (TC 23)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
Bakesbangpol Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
	Indikator Tujuan :																					
1	Persentase pengendalian konflik sosial, sara, dan politik	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	100	100	100	-	-
	Indikator Sasaran :																					
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-	-	-	-	83	83,5	84,5	84,5	85	-	80,44	83,99	85,05	-	-	-	96,9	100,6	101	-	-
3	Persentase kesadaran dan pemahaman kehidupan berpolitik masyarakat	-	-	-	-	0,13%	0,34%	0,54%	0,75%	0,96%	-	0,21%	0,53%	0,87%	-	-	-	159	156,9	161	-	-
4	Persentase pemahaman wawasan kebangsaan dan kesatuan bangsa	-	-	-	-	0,18%	0,39%	0,59%	0,80%	1,00%	-	0,2%	0,6%	0,012	-	-	-	132	160,6	204	-	-
	Indikator Program :																					
5	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	78,47%	95%	-	-	-	100	78,47	95	-	-
6	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	99,94%	100%	100%	-	-	-	99,9	100	100	-	-
7	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	100	100	100	-	-
8	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	96,43%	-	-	-	100	100	96,4	-	-
9	Persentase Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	95,83%	96,43%	-	-	-	100	95,83	96,4	-	-
10	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	100	100	100	-	-

Pada tahun 2023 dan 2024, pelaksanaan pemberian hibah kepada pemerintah pusat, lembaga, organisasi kemasyarakatan, forum yang dibentuk pemerintah, penyelenggaraan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), serta fasilitasi Forum Pimpinan Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hibah telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan regulasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan yang diberikan menunjukkan capaian di atas target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan yang dilaksanakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, serta meningkatkan partisipasi dan apresiasi masyarakat terhadap layanan Bakesbangpol.

Berdasarkan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Bakesbangpol berada dalam kategori baik, dengan potensi yang besar untuk terus ditingkatkan. Keberhasilan tersebut menjadi landasan untuk memperkuat strategi pelayanan di masa mendatang, dengan tetap mengutamakan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pemerataan penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Tabel 2.6. (TC 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Bakesbangpol Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Anggaran Belanja	3.089.472.937	5.321.911.996	28.221.025.071	41.653.158.316	*13.174.924.736*		3.043.635.123	5.134.803.398	27.127.424.562	40.772.807.528	*4.026.242.640*							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.493.778.005	1.893.549.134	2.709.693.809	2.781.043.759	2.917.607.644		1.474.035.299	1.844.644.015	2.576.164.743	2.687.519.029	2.689.809.776		98,68%	97,42%	95,07%	96,64%	92,19%	
a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	29.087.468	40.229.868	21.602.600	46.229.000		23.532.892	27.384.089	32.243.316	20.989.200	15.692.750		94,13%	94,14%	80,15%	97,16%	33,95%	
b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.322.332.405	1.526.502.894	2.192.665.205	2.339.580.299	2.367.633.044		1.315.598.811	1.494.874.943	2.116.903.925	2.287.745.986	2.518.468.300		99,49%	97,93%	96,54%	97,78%	106,37%	
c	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	4.432.700	1.812.400	3.105.000		0	0	2.410.000	1.812.400	0		0,00%	0,00%	54,37%	100,00%	0,00%	
d	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	860.000	2.260.000	4.387.200	1.038.200	2.492.000		720.000	1.620.000	1.082.000	1.038.200	0		83,72%	71,68%	24,66%	100,00%	0,00%	
e	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.390.600	101.978.100	198.430.300	144.678.700	185.306.600		42.760.400	95.871.140	159.770.369	123.890.530	30.957.788		94,21%	94,01%	80,52%	85,63%	16,71%	
f	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	0	54.631.000	58.493.000	56.935.200	0		0	53.480.000	57.956.000	56.680.000			0,00%	97,89%	99,08%	99,55%	0,00%	
g	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.265.000	66.756.672	65.358.336	95.103.360	106.812.000		56.104.320	59.764.343	63.745.683	79.799.022	38.701.768		87,30%	89,53%	97,53%	83,91%	36,23%	
h	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.930.000	112.333.000	145.697.200	120.293.000	206.030.000		35.318.876	111.649.500	142.053.450	115.563.691	85.989.170		98,30%	99,39%	97,50%	96,07%	41,74%	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER	36.680.000	76.106.400	601.967.700	1.643.439.300	2.216.027.200		35.023.900	68.289.100	216.908.608	1.297.191.352	348.951.320		95,49%	89,73%	36,03%	78,93%	15,75%	
a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi	36.680.000	76.106.400	601.967.700	1.643.439.300	2.216.027.200		35.023.900	68.289.100	216.908.608	1.297.191.352	348.951.320		95,49%	89,73%	36,03%	78,93%	15,75%	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.162.620.932	1.262.698.762	20.658.828.762	32.212.154.157	1.999.242.900		1.160.846.232	1.247.644.162	20.593.066.370	32.198.573.137	106.162.944		99,85%	98,81%	99,68%	99,96%	5,31%	
a	Kegiatan Perumusan Kebijakan	1.162.620.932	1.262.698.762	20.658.828.762	32.212.154.157	1.999.242.900		1.160.846.232	1.247.644.162	20.593.066.370	32.198.573.137	106.162.944		99,85%	98,81%	99,68%	99,96%	5,31%	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	4.489.000	1.204.029.100	2.655.616.300	3.796.077.700	3.872.392.592		3.759.000	1.192.756.800	2.619.969.619	3.718.221.290	485.614.600		83,74%	99,06%	98,66%	97,95%	12,54%	
a	Kegiatan Perumusan Kebijakan	4.489.000	1.204.029.100	2.655.616.300	3.796.077.700	3.872.392.592		3.759.000	1.192.756.800	2.619.969.619	3.718.221.290	485.614.600		83,74%	99,06%	98,66%	97,95%	12,54%	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN	80.566.000	440.667.400	478.563.400	383.576.500	572.718.600		70.827.000	400.129.528	399.111.600	287.244.050	25.205.000		87,91%	90,80%	83,40%	74,89%	4,40%	
a	Kegiatan Perumusan Kebijakan	80.566.000	440.667.400	478.563.400	383.576.500	572.718.600		70.827.000	400.129.528	399.111.600	287.244.050	25.205.000		87,91%	90,80%	83,40%	74,89%	4,40%	
6	PROGRAM PENINGKATAN	311339000	444861200	1116355100	836.866.900	1.596.935.800		299.143.692	381.339.793	722.203.622	584.058.670	370.499.000		96,08%	85,72%	64,69%	69,79%	23,20%	
a	Sub Kegiatan Kegiatan Perumusan	311.339.000	444.861.200	1.116.355.100	836.866.900	1.596.935.800		299.143.692	381.339.793	722.203.622	584.058.670	370.499.000		96,08%	85,72%	64,69%	69,79%	23,20%	

Catatan : Tahun 2025 Realisasi anggaran semester I/2025

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran, laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan telah memanfaatkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, sehingga akurasi, ketepatan waktu, dan transparansi data keuangan dapat terjaga. Dengan penggunaan sistem ini, seluruh transaksi keuangan dapat terekam secara real-time, memudahkan monitoring serta mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Meskipun terdapat beberapa pos anggaran yang tidak mencapai tingkat serapan 100%, hal tersebut tidak mengurangi capaian kinerja yang telah ditetapkan. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memenuhi Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran) dan Indikator Kinerja Program, kegiatan yang direncanakan. Dengan demikian, efisiensi dalam penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, kinerja tetap optimal meskipun dana yang digunakan lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Begitu pula, terdapat juga capaian kinerja fisik yang tidak maksimal sehingga anggaran juga tidak dicairkan pada beberapa kegiatan. Keterbatasan dalam penyerapan anggaran ini berimplikasi langsung pada pelaksanaan kegiatan fisik yang pada akhirnya tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target kinerja. Hal ini disebabkan antara lain oleh dinamika pelayanan dan skala prioritas.

Dinamika dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, ditambah dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), turut mempengaruhi pencapaian target kinerja. Beban kerja yang tinggi serta kebutuhan adaptasi terhadap perubahan kebijakan dan prosedur menyebabkan beberapa target kinerja, baik fisik maupun keuangan, tidak dapat direalisasikan sepenuhnya. Kondisi ini menjadi perhatian untuk penguatan kapasitas organisasi dimasa yang akan datang.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, evaluasi atas pelaksanaan kegiatan menjadi landasan dalam perencanaan ke depan. Diperlukan langkah strategis berupa penguatan manajemen SDM, penyempurnaan sistem informasi keuangan, serta peningkatan ketepatan perencanaan program dan anggaran. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan anggaran dan pencapaian kinerja pada periode mendatang dapat lebih efektif, efisien, dan akuntabel

Indikator kinerja yang digunakan dalam dokumen perencanaan lima tahun ke depan berbeda dengan indikator yang dipakai pada periode lima tahun sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi capaian pelaksanaan urusan tahun 2020–2024 disajikan dengan menggunakan angka-angka capaian kinerja lima tahun lalu sebagai gambaran awal. Dalam penyajiannya, terdapat beberapa indikator yang bernilai nol, baik karena memang tidak tersedia data kinerja pada periode tersebut maupun karena selama lima tahun terakhir indikator tersebut belum diukur. Hal ini menjadi catatan penting agar pada periode perencanaan mendatang, seluruh indikator dapat memiliki data capaian yang terukur dan terdokumentasi dengan baik

Evaluasi capaian pelaksanaan urusan tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa kinerja lima tahun terakhir masih menghadapi keterbatasan data pada beberapa indikator utama, seperti Indeks Ketahanan Ideologi dan nilai SAKIP Perangkat Daerah. Meski demikian, capaian positif terlihat pada indikator program, khususnya dalam penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan serta

pendidikan politik masyarakat yang menunjukkan tren peningkatan setiap tahun.

Tabel 2.7.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 -2024
Bakesbangpol Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun (dalam %)					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Indikator Tujuan Bakesbangpol						
a	Indek Ketahanan Ipoleksosbud	-	-	-	-	-	Belum pernah ada indek ini
b	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	Belum pernah ada nilai SAKIP OPD
2	Indikator Sasaran PD						
a	Indek Ketahanan Ipoleksosbud	-	-	-	-	-	Belum pernah ada indek ini
b	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	Belum pernah ada nilai SAKIP OPD
3	Indikator Program Bakesbangpol						
a	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	-	0,048%	0,048%	0,097%	0,079%	Orang yang mendapatkan penguatan ideologi terhadap jumlah penduduk usia 5 - 59 tahun (621.142 orang)
b	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	-	100%	100%	100%	seluruh konflik sosial tertangani pemerintah
c	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	-	0,065%	0,315%	0,499%	0,513%	Orang yang mendapatkandikpol terhadap jumlah penduduk usia 15 - 59 tahun (506.840 orang)
d	Pesentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	0%	0%	0%	0%	0%	N/A
e	Persentase peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya di wilayah	0,00	0,00	100%	100%	100%	jumlah dialog terhadap rencana dialog ketahanan esosbud
f	Persentase ketercapaian kinerja, pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Seluruh rencana kinerja dapat terealisasikan
4	Jumlah kejadian konflik SARA (IUP)	-	-	-	-	-	tidak ada kejadian konflik SARA
5	SPM	-	-	-	-	-	
6	IKK outcome Permendagri 18 2020	-	-	-	-	-	
7	Mandatory Lain	-	-	-	-	-	

Catatan :
Tahun 2020 dan 2021 nama OPD adalah Kantor Kesbangpol dan tahun 2022 – sekarang menjadi BADAN

Selain itu, capaian penanganan konflik sosial selama periode evaluasi selalu mencapai 100% yang artinya semua konflik sosial dapat tertangani, sementara jumlah konflik SARA tercatat nihil, sehingga menegaskan kondisi sosial masyarakat yang relatif kondusif. Meskipun demikian, beberapa indikator seperti persentase organisasi kemasyarakatan aktif belum memiliki data capaian, sehingga menjadi catatan penting untuk diperkuat ke depan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi penyusunan Renstra 2025–2029, dengan fokus pada peningkatan kualitas pengukuran kinerja, penguatan kelembagaan, serta pemantapan peran Bakesbangpol dalam menjaga stabilitas sosial politik dan ketahanan ideologi di daerah.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Bakesbangpol Kabupaten Purworejo dihadapkan pada sejumlah tantangan strategis. Dari sisi internal, keterbatasan sumber daya manusia baik secara jumlah maupun kualitas kompetensi menjadi kendala utama dalam optimalisasi kinerja. Komposisi aparatur masih didominasi oleh pejabat pelaksana dengan jenjang kepangkatan menengah, sementara kebutuhan akan tenaga kompeten dengan keahlian khusus dalam bidang intelijen daerah, politik, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, serta pengendalian konflik semakin meningkat. Keterbatasan sarana prasarana dan dukungan anggaran juga menjadi faktor yang membatasi ruang gerak dalam melaksanakan program yang inovatif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Dari sisi eksternal, tantangan muncul dalam bentuk menurunnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, potensi disintegrasi sosial, serta masih adanya kelompok atau organisasi yang bersikap intoleran terhadap ideologi negara. Di samping itu, fenomena dekadensi moral di kalangan generasi muda, penyalahgunaan narkotika, serta angka golongan

putih (golput) dalam pemilu menjadi persoalan serius yang menuntut penanganan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Di balik tantangan tersebut, Bakesbangpol Kabupaten Purworejo memiliki peluang besar untuk mengembangkan pelayanan publik di bidang kesatuan bangsa dan politik. Perkembangan teknologi informasi memberikan ruang untuk memperkuat sistem pencegahan dini dan deteksi dini melalui pemanfaatan aplikasi dan jaringan komunikasi yang lebih cepat serta akurat. Dukungan regulasi dari pemerintah pusat maupun provinsi juga membuka peluang penguatan peran Bakesbangpol dalam konteks reformasi birokrasi, penyelenggaraan pemilu yang demokratis, serta pembinaan ideologi Pancasila.

Selain itu, keberadaan mitra kerja strategis seperti Forkopimda, TNI, Polri, KPU, Bawaslu, BNN, dan organisasi kemasyarakatan memberikan potensi sinergi dalam membangun kondusifitas daerah. Kerjasama lintas sektor dapat diperluas untuk memperkuat kewaspadaan dini, menumbuhkan kesadaran politik, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah. Tidak kalah penting, meningkatnya partisipasi pemuda melalui wadah Paskibraka maupun organisasi kepemudaan menjadi modal sosial yang berharga dalam pembinaan nilai kebangsaan dan penguatan nasionalisme di tingkat lokal.

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Bakesbangpol memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta membina kehidupan politik dan sosial masyarakat yang berperan penting dalam mendukung tercapainya stabilitas politik, keamanan, dan ketahanan bangsa. Kelompok tersebut meliputi organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), badan dan lembaga bentukan pemerintah, serta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Seluruh unsur ini dibina dan difasilitasi agar mampu memperkuat nilai kebangsaan, menumbuhkan kehidupan politik yang demokratis, serta meningkatkan partisipasi masyarakat secara sehat dan konstruktif.

Bakesbangpol juga menjalin kemitraan strategis dengan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, unsur intelijen dari berbagai instansi, TNI dan Polri, BNN, serta Kantor Imigrasi. Kolaborasi ini meliputi aspek pembinaan politik, pengawasan dan pengamanan pemilu, deteksi dini potensi konflik, pengawasan orang asing, hingga pencegahan penyalahgunaan narkoba. Melalui sinergi ini, Bakesbangpol dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial-politik, serta memastikan terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif di masyarakat.

Bakesbangpol bekerja sama dengan perangkat daerah teknis seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, serta Satuan Polisi Pamong Praja serta perangkat daerah lainnya. Kemitraan ini mendukung pelaksanaan program-program pembinaan wawasan kebangsaan, penanganan kelompok rentan, literasi politik, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan keterlibatan seluruh kelompok sasaran dan mitra tersebut, Bakesbangpol tidak hanya lebih optimal dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, tetapi juga mampu membangun ketahanan nasional yang kokoh dan berkelanjutan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan perangkat daerah yang dihadapi Bakesbangpol Kabupaten Purworejo tidak terlepas dari dinamika sosial politik yang berkembang di Jawa Tengah, baik dalam bentuk isu internal maupun eksternal, mulai dari keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, hingga tantangan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai demokrasi dan kebangsaan. Berangkat dari kondisi tersebut, dirumuskan isu-isu strategis yang mencakup aspek keamanan dan ketertiban wilayah, penguatan ideologi Pancasila, peningkatan nasionalisme, penguatan toleransi antarumat beragama, kualitas demokrasi, pembinaan organisasi kemasyarakatan, hingga tata kelola pelayanan perangkat daerah. Seluruh isu strategis ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas SDM aparatur, optimalisasi anggaran, serta sinergi lintas sektor agar Bakesbangpol dapat lebih efektif mendukung stabilitas wilayah, memperkokoh ketahanan bangsa, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Jawa Tengah pada umumnya, dan Kabupaten Purworejo pada khususnya, permasalahan yang dihadapi Bakesbangpol Kabupaten Purworejo adalah belum kondusifnya stabilitas ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat disebabkan oleh masih adanya potensi konflik sosial di masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi dua faktor, yaitu potensi terjadinya konflik yang berlatar belakang Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), serta rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.

Potensi konflik SARA yang belum sepenuhnya terkelola dengan baik dapat menimbulkan ketegangan sosial di tingkat lokal, sedangkan rendahnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat menyebabkan lemahnya peran aktif warga dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung proses pembangunan yang inklusif. Kedua faktor tersebut menjadi penyebab utama belum optimalnya situasi ketentraman dan ketertiban umum di daerah.

2.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol, telaah visi misi Kepala Daerah, visi misi Kementerian Dalam Negeri, telaah pemerintah provinsi maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi perangkat daerah adalah kurangnya pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila di tengah masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar kebangsaan belum sepenuhnya tertanam dalam kehidupan sosial. Akibatnya, muncul gejala menurunnya rasa nasionalisme, melemahnya semangat persatuan, dan semakin maraknya perilaku intoleran. Kondisi ini menjadi tantangan serius karena ideologi Pancasila seharusnya menjadi pedoman dan arah pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkarakter.

Permasalahan tersebut semakin diperparah oleh minimnya pendidikan karakter dan kebangsaan, baik di lingkungan pendidikan formal maupun nonformal. Kurangnya program pembinaan nilai moral dan etika menyebabkan generasi muda cenderung lebih terpengaruh oleh budaya luar yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai luhur

bangsa. Tanpa penguatan karakter sejak dini, daerah akan kesulitan membangun sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial tinggi.

Selain itu, perangkat daerah juga menghadapi belum optimalnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Banyak organisasi masyarakat yang belum berfungsi secara efektif sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan sosial. Sebagian ormas bahkan belum memiliki arah kegiatan yang jelas atau cenderung bergerak tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah. Lemahnya pengawasan ini dapat menimbulkan potensi konflik sosial dan penyalahgunaan peran ormas di tengah masyarakat.

Permasalahan lain yang juga penting adalah lemahnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Ketahanan masyarakat terhadap perubahan global dan tekanan ekonomi masih tergolong rendah. Masih banyak kelompok masyarakat yang belum berdaya secara ekonomi dan budaya, sehingga mudah terpengaruh oleh isu-isu negatif. Lemahnya pembinaan ini berdampak pada rendahnya tingkat keterpaduan, persatuan, dan rasa kebersamaan dalam suatu masyarakat dan meningkatnya kerentanan terhadap krisis ekonomi maupun moral.

Kondisi tersebut diperburuk oleh lemahnya kewaspadaan dini dan kualitas penanganan konflik sosial. Perangkat daerah sering kali belum memiliki sistem deteksi dini yang memadai untuk mengidentifikasi potensi konflik di masyarakat. Akibatnya, konflik sosial sering kali baru ditangani setelah terjadi eskalasi. Hal ini menandakan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor dan penguatan kapasitas aparatur dalam mengelola kerawanan sosial serta membangun sistem peringatan dini yang efektif.

Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak warga yang belum memahami pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi, baik dalam pemilu maupun dalam pengawasan kebijakan publik. Pendidikan politik yang belum menyeluruh menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh disinformasi dan kepentingan jangka pendek. Akibatnya, kualitas demokrasi di tingkat daerah belum berkembang secara optimal.

Dari sisi internal pemerintahan, akuntabilitas kinerja pemerintahan yang belum optimal menjadi hambatan serius dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Masih ditemukan praktik birokrasi yang tidak efisien, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, serta rendahnya komitmen terhadap transparansi. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah yang belum sepenuhnya akuntabel menimbulkan risiko ketidaktepatan dalam penggunaan anggaran dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Permasalahan terakhir yang tak kalah penting adalah pelayanan publik prima yang belum merata. Kualitas pelayanan antarwilayah masih timpang, baik dari segi kecepatan, aksesibilitas, maupun profesionalisme aparatur. Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan kepuasan masyarakat dan memperlemah citra pemerintah daerah di mata publik. Untuk mengatasinya, diperlukan komitmen kuat dalam reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi secara merata di semua sektor pelayanan publik

Isu adanya potensi kejadian konflik SARA muncul sebagai konsekuensi dari masih rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, lemahnya pembinaan terhadap

organisasi kemasyarakatan, serta belum optimalnya sistem kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial. Kondisi tersebut menunjukkan belum kokohnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat dalam menghadapi dinamika keberagaman. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan karakter kebangsaan dan jati diri masyarakat melalui pendidikan ideologis, penguatan peran lembaga sosial, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan sistem deteksi dini dan mekanisme penanganan konflik yang komprehensif, serta memperluas koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan keamanan wilayah.

Isu rendahnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat berimplikasi langsung terhadap kualitas demokrasi daerah. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya pendidikan politik serta masih lemahnya pengembangan etika dan budaya politik yang sehat di tengah masyarakat. Dampaknya, partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan maupun dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan literasi politik masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan politik berkelanjutan, dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Penguatan peran lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan media juga diperlukan untuk menumbuhkan budaya politik yang santun, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Isu tentang tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, serta belum meratanya kualitas pelayanan publik menunjukkan perlunya transformasi tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan sistem manajemen pemerintahan yang tangkas, adaptif terhadap perubahan, serta akuntabel dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan. Reformasi birokrasi perlu diarahkan pada penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance), berbasis data dan teknologi informasi, serta memperkuat mekanisme kolaborasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kecepatan pelayanan publik, sehingga tercipta pemerintahan yang berintegritas, responsif, dan dipercaya oleh Masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, isu strategis perangkat daerah dapat dirangkum ke dalam tiga hal berikut :

1. Adanya potensi kejadian konflik SARA
2. Rendahnya kesadaran dan partisipasi politik
3. Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaborati

Tabel 2.8.
Isu Strategis Perangkat Daerah
Bakesbangpol Kabupaten Purworejo

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bonus Demografi	• Kurangnya Pemahaman dan Pengamalan Ideologi Pancasila • Minimnya pendidikan karakter dan Kebangsaan • Belum optimalnya Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan • Lemahnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya • Lemahnya Kewaspadaan Dini dan Kualitas penanganan konflik Sosial	Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dampak buruk teknologi AI	• Transformasi sosial • Ketahanan sosial, budaya dan ekologi	• Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia • Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat	Adanya potensi kejadian konflik SARA
		Pendidikan Poltik dan pengembangan etika serta budaya politik belum menyeluruh dan optimal					Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Politik

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimal-nya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	• Misinformasi dan disinformasi • Sinkronisasi kebijakan makro dan sectoral	Transformasi tata kelola	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif
3	Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Pelayanan publik prima belum merata					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi adalah gambaran tentang kondisi atau tujuan ideal yang ingin dicapai di masa depan, yang berfungsi sebagai arah dan panduan dalam perencanaan serta pengambilan keputusan di pemerintahan. Berdasarkan perkembangan dan kondisi pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Purworejo 5 (lima) tahun yang akan datang, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasi permasalahan yang terjadi

Rumusan visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah "*Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)*". Untuk mewujudkan visi ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut.:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera

Misi 2 : Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah

Misi 3 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Misi 4 : Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal

Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi

Rumusan visi *"Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)"* menegaskan pentingnya arah pembangunan daerah yang menyeluruh dan berkelanjutan. Visi ini mencerminkan komitmen untuk tidak hanya membangun kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi dan sosial, tetapi juga mengutamakan nilai religius, daya saing, serta inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Dalam kurun lima tahun mendatang, Kabupaten Purworejo perlu menjawab berbagai dinamika pembangunan, termasuk tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik, pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi, serta kebutuhan akan tata kelola yang adaptif, transparan, dan responsif.

Dalam kerangka pencapaian visi tersebut, salah satu fokus penting adalah membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan inovatif. Pemerintahan yang responsif, berbasis teknologi, dan berorientasi pada hasil akan menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Upaya ini akan mendorong terwujudnya birokrasi yang lebih profesional, efisien, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor. Dengan demikian, arah pembangunan Kabupaten Purworejo lima tahun ke depan tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik maupun ekonomi, tetapi juga pada transformasi tata kelola pemerintahan sebagai fondasi utama pencapaian visi *Purworejo Berseri*.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sementara misi merupakan rumusan umum mengenai upay-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan tujuan atau strategi utama (goals) serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai beserta indikator pengukurnya.

Tujuan adalah pernyatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode tahun 2025-2029. Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi ke 5 pembangunan lima tahun ke depan Kabupaten Purworejo. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi ke 5, maka Bakesbangpol Kabupaten Purworejo dalam kurun tahun 2025 – 2029 menetapkan tujuan, yaitu meningkatkan stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Gambar 3.1.
Konsep Renstra Perangkat Daerah

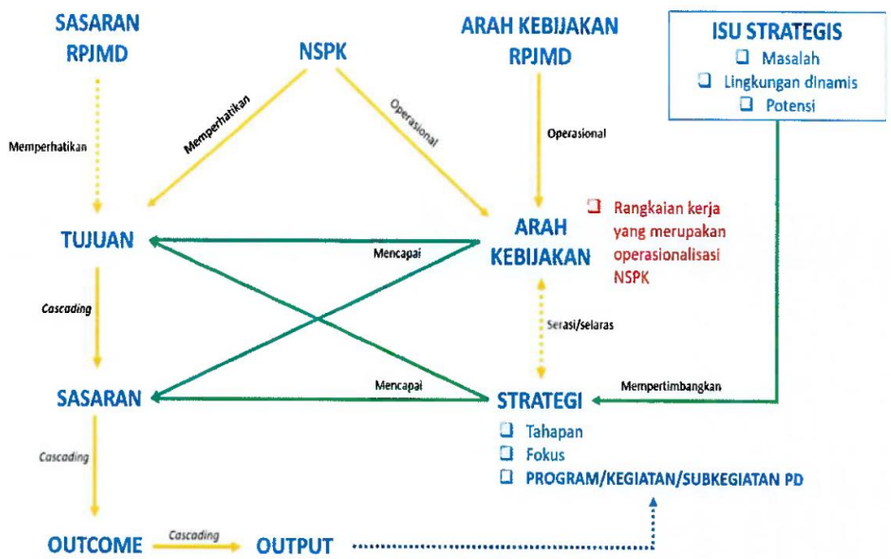

Sumber : Permendagri 2/2025

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam rangka mewujudkan Misi ke-5 Pemerintah Daerah, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong transformasi birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan sistem informasi

secara menyeluruh, serta pengembangan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien melalui inovasi digital.

Sebagai turunan dari misi tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya stabilitas wilayah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, dan responsif berbasis teknologi informasi. Tujuan ini menjadi pijakan dalam menyusun berbagai kebijakan dan program kerja yang mendukung penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran utama yang ditetapkan adalah meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahan daerah. Sasaran ini mencerminkan pentingnya integritas dan kompetensi aparatur, disertai dengan sistem pengukuran kinerja yang objektif dan transparan, guna menciptakan pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.

Berdasarkan sasaran pemerintah daerah diatas, dan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Bakesbangpol Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun 2025 – 2029, menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkannya stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Bakesbangpol Kabupaten Purworejo beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. (TC 25)
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Bakesbangpol Kabupaten Purworejo

NSPK DA SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*							
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indek Ketahanan Ipoleksosbud	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68.02	70.45	72.89	75.33	77.76	80.20	
		Meningkatkannya stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud	Indek Ketahanan Ipoleksosbud	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68.02	70.45	72.89	75.33	77.76	80.20	

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah yang akan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran

Penahapan dari tahun ke tahun sangat diperlukan dalam perencanaan guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu karena adanya keterbatasan sumber daya seperti anggaran, waktu, dan kapasitas pelaksana. Dengan membagi pencapaian sasaran ke dalam tahapan, proses pelaksanaan dapat dilakukan secara bertahap, terukur, dan realistis. Ini juga membantu dalam mengelola kompleksitas kegiatan agar masing-masing tahap saling mendukung dan membentuk dasar yang kuat bagi tahap berikutnya. Selain itu, penahapan memungkinkan proses evaluasi dan koreksi secara berkala sehingga kebijakan dan strategi tetap adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan yang berkembang.

Selain alasan teknis dan efisiensi, penahapan juga berperan penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang sejalan dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD. Dengan perencanaan bertahap, setiap kegiatan dapat disesuaikan dengan prioritas tahunan pemerintah daerah serta mendukung pencapaian visi jangka menengah dan jangka panjang. Penahapan ini juga menjadi alat untuk memastikan bahwa hasil pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi berdampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Strategi yang dirumuskan Bakesbangpol dalam mencapai tujuan memiliki lokus di setiap wilayah kecamatan terutama dalam rangka mewujudkan kondusifitas wilayah terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Secara khusus yang menjadi lokus antara lain ormas, parpol, kelompok pemilih pemula, penggiat budaya dan pendidikan kebangsaan dan sejenisnya. Strategi dalam lima tahun mendatang berdasarkan tujuan dan sasaran adalah:

1. Mengembangkan sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
2. Mendorong internalisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatkan solidaritas dan harmoni sosial melalui pendekatan budaya dan pendidikan kebangsaan.
4. Mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat dan penguatan kelembagaan demokrasi.
5. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan agar berkontribusi positif dalam pembangunan.
6. Peningkatan kapasitas dan tata kelola internal perangkat daerah untuk memperkuat akuntabilitas kinerja

Arah kebijakan merupakan panduan yang menjabarkan bagaimana suatu tujuan dan sasaran akan dicapai melalui serangkaian langkah yang sistematis dan terencana. Arah kebijakan berfungsi sebagai bentuk operasionalisasi dari tujuan dan sasaran, yang kemudian diterjemahkan ke dalam langkah-langkah kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi atau pelaksana kegiatan. Dengan adanya arah kebijakan, setiap unit kerja memiliki acuan yang jelas dalam menyusun melaksanakan program dan kegiatan yang relevan, efektif, dan selaras dengan tujuan dan sasaran.

Tabel 3.2.
Penahapan Rencana Kerja Strategis
Bakesbangpol Kabupaten Purworejo

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mengutkan deteksi dini gangguan keamanan, pembudayaan nilai Pancasila, peningkatan harmoni sosial, partisipasi politik, pembinaan organisasi kemasyarakata, serta penguatan kapasitas dan tata kelola perangkat daerah secara akuntabel.	Meningkatkan deteksi dini gangguan keamanan, pembudayaan nilai Pancasila, peningkatan harmoni sosial, partisipasi politik, pembinaan organisasi kemasyarakata, serta penguatan kapasitas dan tata kelola perangkat daerah secara akuntabel.	Memantapkan deteksi dini gangguan keamanan, pembudayaan nilai Pancasila, peningkatan harmoni sosial, partisipasi politik, pembinaan organisasi kemasyarakata, serta penguatan kapasitas dan tata kelola perangkat daerah secara akuntabel.	Mewujudkan deteksi dini gangguan keamanan, pembudayaan nilai Pancasila, peningkatan harmoni sosial, partisipasi politik, pembinaan organisasi kemasyarakata, serta penguatan kapasitas dan tata kelola perangkat daerah secara akuntabel.	Mengukuhkan deteksi dini gangguan keamanan, pembudayaan nilai Pancasila, peningkatan harmoni sosial, partisipasi politik, pembinaan organisasi kemasyarakata, serta penguatan kapasitas dan tata kelola perangkat daerah secara akuntabel.
Menguatkan sistem menejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Lebih dari sekadar pedoman teknis, arah kebijakan juga mencerminkan prioritas dan respon terhadap dinamika permasalahan serta kebutuhan masyarakat. Melalui arah kebijakan yang tepat dan terukur, dapat dipastikan bahwa setiap aktivitas berjalan dalam satu kesatuan yang harmonis dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap. Arah kebijakan juga menjadi dasar dalam proses evaluasi, karena didalamnya termuat indikator keberhasilan yang memungkinkan pengukuran capaian secara objektif. Dengan demikian, arah kebijakan memainkan peran penting dalam menjembatani antara perencanaan strategis dan implementasi nyata di lapangan

Mengacu pada strategi sebagaimana tersebut diatas, dapat dirumuskan Arah Kebijakan, sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Rencana Strategis
Bakesbangpol Kabupaten Purworejo

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah kebijakan 2026: Penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi	Penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi melalui aktivitas: - Pendidikan Bela Negara Bagi Pelajar Melalui Pelatihan Paskibra Tingkat Kecamatan - Dialog Forum Pembauran Kebangsaan - Dialog Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa - Rakor Forum Pembauran Kebangsaan - Pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka - Pendidikan Politik Bagi Masyarakat - Penyaluran Hibah Bantuan Keuangan Parpol - Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Dan Pemantauan Situasi Politik Daerah
		Penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan	Penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan melalui aktivitas: - Dialog Pemberdayaan Ormas - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas - Penyaluran Hibah Kepada Ormas / Lembaga - Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan - Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kerpercayaan - Dialog Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya - Sosialisasi Bahaya Narkoba - Koordinasi Pencegahan Peredaran Narkoba - Koordinasi Kerjasama Inteligen Daerah - Koordinasi Forkopimda Kabupaten - Dialog Kewaspadaan Dini Masyarakat - Rakor Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM)
		Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Arah kebijakan 2027: Peningkatan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi	Peningkatan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi melalui aktivitas: - Pendidikan Bela Negara Bagi Pelajar Melalui Pelatihan Paskibra Tingkat Kecamatan - Dialog Forum Pembauran Kebangsaan - Dialog Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa - Rakor Forum Pembauran Kebangsaan - Pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka - Pendidikan Politik Bagi Masyarakat - Penyaluran Hibah Bantuan Keuangan Parpol - Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Dan Pemantauan Situasi Politik Daerah
		Peningkatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan	Peningkatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan melalui aktivitas: - Dialog Pemberdayaan Ormas - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas - Penyaluran Hibah Kepada Ormas / Lembaga - Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan - Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kerpercayaan - Dialog Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya - Sosialisasi Bahaya Narkoba - Koordinasi Pencegahan Peredaran Narkoba - Koordinasi Kerjasama Inteligen Daerah - Koordinasi Forkopimda Kabupaten - Dialog Kewaspadaan Dini Masyarakat - Rakor Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM)
		Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Arah kebijakan 2028: Pemantapan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi	Pemantapan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi melalui aktivitas: - Pendidikan Bela Negara Bagi Pelajar Melalui Pelatihan Paskibra Tingkat Kecamatan - Dialog Forum Pembauran Kebangsaan - Dialog Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa - Rakor Forum Pembauran Kebangsaan - Pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka - Pendidikan Politik Bagi Masyarakat - Penyaluran Hibah Bantuan Keuangan Parpol - Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Dan Pemantauan Situasi Politik Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pemantapan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan	Pemantapan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan melalui aktivitas: - Dialog Pemberdayaan Ormas - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas - Penyaluran Hibah Kepada Ormas / Lembaga - Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan - Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kerpercayaan - Dialog Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya - Sosialisasi Bahaya Narkoba - Koordinasi Pencegahan Peredaran Narkoba - Koordinasi Kerjasama Inteligen Daerah - Koordinasi Forkopimda Kabupaten - Dialog Kewaspadaan Dini Masyarakat - Rakor Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM)
		Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Arah kebijakan 2029: Perwujudan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi	Perwujudan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi melalui aktivitas: - Pendidikan Bela Negara Bagi Pelajar Melalui Pelatihan Paskibra Tingkat Kecamatan - Dialog Forum Pembauran Kebangsaan - Dialog Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa - Rakor Forum Pembauran Kebangsaan - Pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka - Pendidikan Politik Bagi Masyarakat - Penyaluran Hibah Bantuan Keuangan Parpol - Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Dan Pemantauan Situasi Politik Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perwujudan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan	Perwujudan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan melalui aktivitas: - Dialog Pemberdayaan Ormas - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas - Penyaluran Hibah Kepada Ormas / Lembaga - Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan - Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kerpercayaan - Dialog Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya - Sosialisasi Bahaya Narkoba - Koordinasi Pencegahan Peredaran Narkoba - Koordinasi Kerjasama Inteligen Daerah - Koordinasi Forkopimda Kabupaten - Dialog Kewaspadaan Dini Masyarakat - Rakor Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM)
		Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Arah kebijakan 2030: Peneguhan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi	Peneguhan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi melalui aktivitas: - Pendidikan Bela Negara Bagi Pelajar Melalui Pelatihan Paskibra Tingkat Kecamatan - Dialog Forum Pembauran Kebangsaan - Dialog Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa - Rakor Forum Pembauran Kebangsaan - Pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka - Pendidikan Politik Bagi Masyarakat - Penyaluran Hibah Bantuan Keuangan Parpol - Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Dan Pemantauan Situasi Politik Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Peneguhan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan	Peneguhan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan melalui aktivitas: - Dialog Pemberdayaan Ormas - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas - Penyaluran Hibah Kepada Ormas / Lembaga - Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan - Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kerpercayaan - Dialog Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya - Sosialisasi Bahaya Narkoba - Koordinasi Pencegahan Peredaran Narkoba - Koordinasi Kerjasama Inteligen Daerah - Koordinasi Forkopimda Kabupaten - Dialog Kewaspadaan Dini Masyarakat - Rakor Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM)
		Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah disusun secara selaras dan terintegrasi dengan Arah Kebijakan Pemerintah Daerah. Keselarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah menjadi instrumen operasional yang menjabarkan kebijakan makro Pemerintah Daerah ke dalam langkah-langkah implementatif yang terukur, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Arah kebijakan pertama adalah penguatan/peningkatan/ pemantapan/perwujudan dan peneguhan ideologi Pancasila dan demokrasi, serta peningkatan kapasitas, integritas, dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi. Pemerintah Daerah menempatkan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi sebagai fondasi dalam menjaga keutuhan dan stabilitas sosial politik di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah diterjemahkan ke dalam berbagai aktivitas seperti pendidikan bela negara bagi pelajar melalui pelatihan Paskibra, dialog pembauran kebangsaan, serta pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat. Selain itu, penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik dan koordinasi dalam bidang pendidikan politik juga menjadi bagian integral untuk memperkuat fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi. Aktivitas-aktivitas ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa, memperkuat nilai toleransi, serta menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi yang sehat.

Arah kebijakan kedua berfokus pada penguatan/ peningkatan/pemantapan/perwujudan dan peneguhan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, serta penguatan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan. Pemerintah Daerah berkomitmen menciptakan kondisi sosial yang aman dan harmonis melalui kolaborasi lintas sektor, baik antar lembaga pemerintahan, aparat keamanan, maupun organisasi masyarakat. Renstra Perangkat Daerah mendukung kebijakan ini melalui berbagai aktivitas seperti dialog pemberdayaan ormas, koordinasi pengawasan ormas, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, serta sosialisasi bahaya narkoba dan kewaspadaan dini masyarakat. Aktivitas tersebut tidak hanya memperkuat hubungan antarelemen masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya toleransi dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arah kebijakan ketiga diarahkan untuk penguatan/ peningkatan/pemantapan/perwujudan dan peneguhan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah Daerah menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Dalam hal ini, Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah dijabarkan melalui aktivitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; administrasi keuangan dan kepegawaian; penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; serta pemeliharaan barang milik daerah. Pelaksanaan arah kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan pemerintahan yang tangkas, adaptif terhadap perubahan, serta kolaboratif lintas sektor dalam

mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang profesional dan terpercaya.

Secara keseluruhan, ketiga arah kebijakan tersebut menunjukkan keterpaduan yang kuat antara visi Pemerintah Daerah dan strategi operasional Perangkat Daerah. Kokohnya ideologi dan demokrasi berfungsi sebagai landasan nilai, terciptanya sinergi dan moderasi beragama menjadi jaminan stabilitas sosial, sedangkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik memastikan efektivitas penyelenggaraan pembangunan. Keselarasan ini menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berkarakter, harmonis, dan berdaya saing, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah merupakan instrumen penting dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang terukur, terarah, dan berkesinambungan. Program-program yang dirancang tidak hanya berfungsi sebagai penjabaran teknis dari kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam memperkuat ideologi kebangsaan, meningkatkan kewaspadaan nasional, mengembangkan demokrasi politik, serta memperkokoh ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Struktur program yang disusun secara sistematis mencakup berbagai aspek strategis, antara lain penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, fasilitasi penanganan potensi konflik sosial, pembinaan partai politik dan pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta peningkatan ketahanan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Setiap kegiatan dan sub kegiatan merupakan turunan yang saling mendukung untuk memastikan efektivitas pencapaian tujuan, baik melalui pendekatan kebijakan, koordinasi lintas sektor, maupun fasilitasi langsung kepada masyarakat. Dengan rancangan tersebut, diharapkan terbentuk ekosistem pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Guna menjamin kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan program, disusun pula kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang meliputi aspek perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, administrasi kepegawaian, hingga penyediaan sarana prasarana dan jasa pendukung. Dukungan kegiatan penunjang ini memiliki peranan fundamental dalam memperkuat kapasitas birokrasi, sehingga implementasi program dapat berjalan sesuai ketentuan, terukur kinerjanya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan landasan perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi ini, diharapkan Bakesbangpol mampu berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan visi misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Program-program yang dirumuskan dalam dokumen ini disusun secara hierarkis mulai dari tingkat program, kegiatan, hingga sub kegiatan. Setiap bagian memiliki fungsi dan peranan yang saling melengkapi untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah sesuai bidang kewenangan. Dengan pengelompokan ini, Bakesbangpol memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan urusan pemerintahan, baik yang bersifat substantif maupun penunjang.

Secara garis besar, terdapat enam program utama yang menjadi fokus pelaksanaan, yakni: (I) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; (II) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial; (III) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik; (IV) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; (V) Program Pembinaan dan

Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; serta (VI) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Masing-masing program tersebut akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat operasional, disertai penekanan pada peran strategis, ruang lingkup, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, uraian teknis yang disajikan selanjutnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai arah kebijakan, langkah implementasi, serta hasil yang dituju dari setiap program yang telah ditetapkan.

Tabel 4.1.
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah
Bakesbangpol Kabupaten Purworejo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Indek Ketahanan Ipoleksosbud		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Meningkatkannya stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Indek Ketahanan Ipoleksosbud		
			Sasaran Program Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	1.Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
				Sasarn Kegiatan Tersusunnya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan bidang ideologi dan karakter kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
						Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
						Sub Kegiatan Pembenrukan Paskibraka	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		Persentase konflik sosial yang ditangani	2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
				Tersusunnya kebijakan teknis pemantapan kewaspadaan dan penenganan konflik sosial	Jumlah dokumen kebijakan teknis/pedoman kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang disusun	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatanya etika dan budaya politik		Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	
				Tersusunnya kebijakan teknis bidang etika, budaya politik dan demokrasi	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan		Pesentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				Tersedianya database Ormas yang mutakhir	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat		Persentase peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya di wilayah	5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
				Tersusunnya kebijakan teknis tentang penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya daerah	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepagawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase ketercapaian kinerja, pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan wali data pendukun statistik sektoral daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keungan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	
				Tersusunnya inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi dan layanan kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Tersusunnya laporan penyelenggaraan administrasi umum	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpemeliharanya Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Catatan :

a) Kolom 1 : NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN diisi dengan Sasaran Pemda
b) Kolom 2-3 : Tujuan dan Sasaran PD
c) Kolom 4 : Outcome diisi dengan Sasaran Program
d) Kolom 5 : Output diisi dengan Sasaran Kegiatan
e) Kolom 6 : Indikator Tujuan, Sasaran PD, Outcome

Renstra Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan jangka menengah yang selaras dengan visi, misi, tujuan, serta prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh program, kegiatan, hingga sub kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun. Penyusunan Renstra tidak hanya berorientasi pada pencapaian target jangka menengah, tetapi juga memperhatikan kesinambungan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya serta antisipasi terhadap dinamika kebutuhan di masa yang akan datang.

Meskipun periode Renstra ditetapkan selama lima tahun, dalam dokumen ini juga disajikan rencana program hingga tahun 2030. Hal tersebut dimaksudkan agar arah pembangunan tidak berhenti pada akhir periode perencanaan, tetapi tetap berlanjut secara terarah pada tahun berikutnya. Dengan demikian, kesinambungan program pembangunan daerah dapat lebih terjamin, baik dari sisi konsistensi pelaksanaan maupun dalam menjaga keterpaduan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi.

Penyajian rencana program tahun 2030 tidak dimaksudkan untuk memperpanjang masa berlaku Renstra 2025–2029. Keberadaannya sebagai langkah antisipatif dan strategis untuk memastikan agar pembangunan daerah tidak mengalami kevakuman arah ketika memasuki periode transisi menuju perencanaan baru. Dengan cara ini, merupakan upaya menegaskan pentingnya kesinambungan kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan.

Rencana program tahun 2030 juga memiliki fungsi strategis sebagai pijakan awal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2030. Selain itu, program tersebut menjadi jembatan yang menghubungkan Renstra 2025–2029 dengan Renstra periode berikutnya. Posisi transisional ini sangat penting agar pencapaian target pembangunan tidak terputus, tetapi tetap berkesinambungan, terukur, dan sesuai dengan kerangka perencanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian, keberadaan rencana tahun 2030 dalam dokumen ini berfungsi untuk menjamin konsistensi pelaksanaan program prioritas, memperkuat kesinambungan pembangunan, serta memastikan setiap tahapan kebijakan berjalan selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Melalui penyajian yang lebih komprehensif, Renstra ini tidak hanya menjadi instrumen perencanaan lima tahunan, melainkan juga instrumen strategis yang memberikan arah bagi pembangunan daerah hingga satu dekade mendatang

Tabel 4.2.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Ketahanan Ipoleksosbud	Angka	0	2,7		2,8		2,9		3		3,1		3,1			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						2.766.139.772		2.793.801.000		2.766.140.000		2.766.140.000		2.766.140.000				
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepagawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	2.766.139.772	100	2.793.801.000	100	2.766.140.000	100	2.766.140.000	100	2.766.140.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	29.485.000	7	29.485.000	7	29.485.000	7	29.485.000	7	29.485.000	35			
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	22	22	19.895.000	22	19.895.000	22	19.895.000	22	19.895.000	22	19.895.000	110			
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	22	22	2.430.000	22	2.430.000	22	2.430.000	22	2.430.000	22	2.430.000	110			
8.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	1	7.160.000	1	7.160.000	1	7.160.000	1	7.160.000	1	7.160.000	5			
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	2.337.780.772	100	2.338.243.000	100	2.338.243.000	100	2.338.243.000	100	2.338.243.000	100			
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	22	22	2.335.745.772	22	2.336.208.000	23	2.336.208.000	23	2.336.208.000	23	2.336.208.000	23			
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	44	44	2.035.000	44	2.035.000	44	2.035.000	44	2.035.000	44	2.035.000	220			
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	11	11	1.210.000	11	1.210.000	11	1.210.000	11	1.210.000	11	1.210.000	55			
8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	11	11	1.210.000	11	1.210.000	11	1.210.000	11	1.210.000	11	1.210.000	55			
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan layanan kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	1.242.000	100	1.242.000	100	1.242.000	100	1.242.000	100	1.242.000	100			
8.01.01.2.05.0002	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	17	17	1.242.000	17	1.242.000	17	1.242.000	17	1.242.000	17	1.242.000	85			
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penyelenggaraan administrasi umum	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	102.830.000	100	102.830.000	100	102.830.000	100	102.830.000	100	102.830.000	100			
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	3.565.000	12	3.565.000	12	3.565.000	12	3.565.000	12	3.565.000	60			
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	3.050.000	12	3.050.000	12	3.050.000	12	3.050.000	12	3.050.000	60			
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	28.830.000	12	28.830.000	12	28.830.000	12	28.830.000	12	28.830.000	60			
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	8.248.000	4	8.248.000	4	8.248.000	4	8.248.000	4	8.248.000	20			
8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	20	20	6.185.000	20	6.185.000	20	6.185.000	20	6.185.000	20	6.185.000	100			
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	60			
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	47.202.000	12	47.202.000	12	47.202.000	12	47.202.000	12	47.202.000	60			
8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	3.950.000	2	3.950.000	2	3.950.000	2	3.950.000	2	3.950.000	10			
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	52	52	22.962.000	38	50.161.000	6	22.500.000	7	22.500.000	7	22.500.000	103			
8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	0	0	2	50.161.000	0	0	0	0	0	0	2			
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	0	0	0	0	50	22.500.000	0	0	0	0	50			
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	2	22.962.000	0	0	0	0	2	22.500.000	0	0	4			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	22.500.000	6			
8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Laporan	2	2	81.060.000	2	81.060.000	2	81.060.000	2	81.060.000	2	81.060.000	10			
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	29.460.000	12	29.460.000	12	29.460.000	12	29.460.000	12	29.460.000	60			
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	51.600.000	12	51.600.000	12	51.600.000	12	51.600.000	12	51.600.000	60			
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpemeliharanya Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jenis	5	5	189.570.000	5	189.570.000	5	189.570.000	5	189.570.000	5	189.570.000	25			
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	39.950.000	1	39.950.000	1	39.950.000	1	39.950.000	1	39.950.000	5			
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	58.580.000	9	58.580.000	9	58.580.000	9	58.580.000	9	58.580.000	9			
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	19.480.000	12	19.480.000	12	19.480.000	12	19.480.000	12	19.480.000	12			
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	67.900.000	1	67.900.000	1	67.900.000	1	67.900.000	1	67.900.000	1			
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	6	3.660.000	6	3.660.000	6	3.660.000	6	3.660.000	6	3.660.000	6			
2	Meningkatnya stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud		Indeks Ketahanan Ipoleksosbud	Angka	0	2,7		2,8		2,9		3		3,1		3,1			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						7.397.703.600		8.012.817.000		31.397.704.000		43.503.268.000		7.621.821.000				
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	0,23	0,47	1.459.360.600	0,7	1.548.888.000	0,93	1.459.361.000	1,17	1.482.418.000	1,4	1.505.841.000	1,4	Bidang Kesatuan Bangsa	Kabupaten Purworejo	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tersusunnya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan bidang ideologi dan karakter kebangsaan.	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	1.459.360.600	100	1.548.888.000	100	1.459.361.000	100	1.482.418.000	100	1.505.841.000	100			
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1.320	1.320	417.378.600	1.320	488.888.000	1.320	417.379.000	1.320	422.418.000	1.320	445.841.000	6.600			
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	100	100	60.000.000	100	65.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	500			
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	30	30	981.982.000	30	995.000.000	30	981.982.000	30	995.000.000	30	995.000.000	150			
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatanya etika dan budaya politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	%	2,86	2,96	1.979.288.900	3,16	1.999.243.000	3,55	25.979.289.000	3,94	37.999.243.000	4,14	2.030.831.000	4,14	Bidang Poldagri Dan Ormas	Kabupaten Purworejo	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tersusunnya kebijakan teknis bidang etika, budaya politik dan demokrasi	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	%	100	100	1.979.288.900	100	1.999.243.000	100	25.979.289.000	100	37.999.243.000	100	2.030.831.000	100			
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Orang	3.400	3.400	1.883.635.300	3.400	1.899.243.000	3.400	25.859.289.000	3.400	37.849.243.000	3.400	1.910.831.000	17.000			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	100	100	95.653.600	100	100.000.000	100	120.000.000	100	150.000.000	100	120.000.000	500			
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	20	25	2.308.938.700	30	2.500.000.000	35	2.308.939.000	40	2.345.420.000	45	2.382.478.000	45	Bidang Poldagri Dan Ormas	Kabupaten Purworejo	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tersedianya database Ormas yang mutakhir	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100	100	2.308.938.700	100	2.500.000.000	100	2.308.939.000	100	2.345.420.000	100	2.382.478.000	100			
8.01.04.2.01.0001	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1.000	1.000	2.198.740.000	1.000	2.389.800.000	1.000	2.198.739.000	1.000	2.230.420.000	1.000	2.267.478.000	5.000			
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100	100	110.198.700	100	110.200.000	100	110.200.000	100	115.000.000	100	115.000.000	500			
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Wilayah	%	0	100	621.403.200	100	621.403.000	100	621.403.000	100	631.221.000	100	641.195.000	100	Bidang Kesatuan Bangsa	Kabupaten Purworejo	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tersusunnya kebijakan teknis tentang penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya daerah	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	100	621.403.200	100	621.403.000	100	621.403.000	100	631.221.000	100	641.195.000	100			
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1.000	1.000	558.102.900	1.000	558.103.000	1.000	558.103.000	1.000	566.221.000	1.000	576.195.000	5.000			
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	100	100	63.300.300	100	63.300.000	100	63.300.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100			
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik sosial yang ditangani	%	100	100	1.028.712.200	100	1.343.283.000	100	1.028.712.000	100	1.044.966.000	100	1.061.476.000	100	Bidang Kesatuan Bangsa	Kabupaten Purworejo	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tersusunnya kebijakan teknis pemantapan kewaspadaan dan penenganan konflik sosial	Jumlah dokumen kebijakan teknis/pedoman kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang disusun	Dokumen	2	2	1.028.712.200	2	1.343.283.000	2	1.028.712.000	2	1.044.966.000	2	1.061.476.000	10			
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daera	Orang	500	500	377.023.800	500	691.283.000	500	376.712.000	500	392.966.000	500	401.476.000	2.500			
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	651.688.400	12	652.000.000	12	652.000.000	12	652.000.000	12	660.000.000	60			
Jumlah						**10.163.843.372**		**10.806.618.000**		**34.163.844.000**		**46.269.408.000**		**10.387.961.000**					

Tabel 4.3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Bakesbangpol Kabupaten Purworejo

NO	PROGRAM PRIORITA	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Dialog forum pembauran kebangcaan. Dialog wabang dan karakter bangsa. Pendidikan bela negara.	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Koordinasi Bidang ideologi wasbang. Rakor forum pembauran kebangsaan.	
			Pembenrukan Paskibraka	Pembentukan panitia, Rekrut dan seleksi, Pusdiklat, Pengukuhan, Sosialisasi, pelaksanaan tugas paskibraka. Penyelenggaran upacara 17 agustus dan 1 Juni. Studi kepemimpinan paskibraka. Studi lintas Nusa Paskibraka	
2	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAY**	**Meningkatanya etika dan budaya politik**			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bintek pengelolaan bantuan parpol. Koordinasi bidang pendidikan politik dan pemantauan situasi politik daerah	

NO	PROGRAM PRIORITA	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI**	**Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan**			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	Dialog pemberdayaan ormas. Hidah kepada ormas dan lembaga.	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	Koordinasi pengendalian hibah ormas, lebaga. Koordinasi pemberdayaan dan pengawasan ormas	
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,**	**Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat**			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dialog ketahana ekonomi sosial budaya. Sosialisasi pencegahan peredaran narkoba. Fasilitasi FKUB dan penghayat kepercayaan.	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Koordinasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. Koordinasi ketahanan ekonomi soaial budaya. Koordniasi pencegahan peredaran narkoba	
5	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan**			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dialog kewaspadaan dini masyarakat Koordinasi penanganan konflik sosial. Pemantauan orang, tenaga kerja asing dan lebaga asing. Rakor forum kewaspadaan dini masyarakat. Rakor kewaspadaan dini peerintah daeraah. Koordinasi kerjasama intelejen daerah	

NO	PROGRAM PRIORITA	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi forkpimda kabupaten.	
6	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepagawaian, serta keuangan perangkat daerah**			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peyelenggaraan forum OPD. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Koordinasi penyelenggaraan wali data pendukung statistik sektoral	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belaja jamuan tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Penyelenggaran rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penata usahaan arsip pada SKPD. Bimtek Srikandi	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan kendaraan roda 4 jabatam	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Pengadaan kendaraan roda 4 operasional	

NO	PROGRAM PRIORITA	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET
1	2	3	4	5	6
			Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Penyediaan jasa komunikasi, suber daya air dan listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayananumum kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2. Dukungan Terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Dukungan Pemerintah Daerah terhadap program nasional, program provinsi, maupun program prioritas daerah (Program Pitulungan) merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang selaras, terpadu, dan berkelanjutan. Bakesbangpol sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang ideologi, politik, dan kewaspadaan nasional turut berperan aktif dalam mendukung implementasi program-program tersebut. Meskipun tidak selalu tertuang secara eksplisit dalam nomenklatur kegiatan maupun sub kegiatan, namun terdapat aktivitas yang relevan dan mendukung pencapaian program strategis, khususnya yang berkaitan dengan Asta Cita, Program Delegasi Provinsi dan Program Pitulungan.

Dalam konteks Asta Cita 1, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), dukungan Bakesbangpol melalui pelaksanaan pendidikan bela negara. Aktivitas ini ditujukan bagi pelajar maupun masyarakat dalaam rangka menanamkan semangat kebangsaan, meningkatkan kesadaran bela negara, serta menumbuhkan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Melalui aktivitas ini, diharapkan terbangun ketahanan ideologi di tingkat lokal yang mampu menghadapi berbagai tantangan disintegrasi maupun infiltrasi ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Dukungan terhadap Asta Cita 2 yang menekankan pada pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara serta kemandirian bangsa diwujudkan melalui fasilitasi dan koordinasi kewaspadaan serta penanganan konflik sosial. Bakesbangpol memfasilitasi berbagai pihak untuk mencegah potensi konflik di masyarakat sekaligus mengkoordinasikan langkah-langkah strategis apabila terjadi gesekan sosial. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya menjadi respons terhadap konflik yang muncul, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan, Bakesbangpol berkontribusi melalui pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat. Aktivitas ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran politik, pemahaman demokrasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah dan nasional. Dengan pendidikan politik yang baik, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga mampu mengawasi jalannya pemerintahan serta menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif yang dapat merusak tatanan politik dan hukum.

Dukungan terhadap Asta Cita 8 diwujudkan melalui fasilitasi dan koordinasi kerukunan umat beragama serta penghayat kepercayaan. Aktivitas ini bertujuan memperkuat toleransi antarumat beragama, membangun keharmonisan sosial, serta menjaga warisan budaya lokal. Dengan adanya ruang dialog, koordinasi, dan fasilitasi, Bakesbangpol membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, serta menjunjung tinggi nilai keberagaman. Hal ini selaras dengan cita-cita terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan semangat kebersamaan

Dalam kerangka mendukung Program Delegasi Provinsi, Bakesbangpol berperan aktif mendukung Delegasi ke-27, yaitu Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan. Aktivitas yang dilakukan meliputi pendidikan bela negara bagi pelajar dan masyarakat, yang bertujuan menanamkan

semangat nasionalisme serta memperkokoh karakter kebangsaan. Melalui aktivitas ini, diharapkan generasi muda dan masyarakat memiliki pemahaman yang kuat terhadap Pancasila serta kesadaran untuk menjaga persatuan dan ketahanan ideologi bangsa.

Bakesbangpol juga menyelenggarakan dialog wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, serta dialog forum pembauran kebangsaan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana edukasi, media interaksi dan komunikasi untuk memperkuat toleransi, solidaritas, dan keharmonisan sosial. Dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan sikap moderasi beragama, meningkatkan penghormatan terhadap keberagaman, serta membangun kehidupan bersama yang damai dan guyub rukun.

Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Prioritas Daerah (Program Pitulungan) merupakan bagian penting dalam penyelarasan dengan rencana strategis. Meskipun tidak selalu tercantum secara tertulis dalam kegiatan atau sub kegiatan, namun di dalam sub kegiatan terdapat aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah. Hal ini menjadi bukti bahwa Bakesbangpol berperan aktif dalam memastikan sinkronisasi dukungan terhadap Program Pitulungan.

Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui Program Pitulungan ke-2, yaitu Religius Masyarakate. Dalam program unggulan ini, Bakesbangpol melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kerukunan umat beragama serta penghayat kepercayaan, yang dimotori oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah, FKUB memperoleh dukungan operasional dari pemerintah daerah, baik melalui fasilitasi kegiatan maupun pemberian hibah dalam bentuk uang. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan FKUB dapat berfungsi optimal dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan keberagaman kepercayaan, sehingga tercipta masyarakat yang religius, harmonis, dan rukun.

Tabel 4.4
Dukungan Terhadap Program Nasional / Asta Cita

NO	PROGRAM NASIONAL / ASTA CITA (AC)	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). (AC1)	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pendidikan bela negara bagi pelajar dan masyarakat,
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. (AC2)	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Fasilitasi dan koordinasi kewaspadaan dan konfilik sosial
3	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. (AC8)	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitasi dan koordinasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan

Tabel 4.5
Dukungan Terhadap Program Delegasi Provinsi

NO	PROGRAM PROVINSI / DELEGASI PROVINSI (DP)	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS
1	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan. (DP27)	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pendidikan bela negara bagi pelajar dan masyarakat
			Dialog wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
			Dialog forum pembauran kebangsaan
2	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan. (DP28)	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Koordinasi kerukunan umat beragama dan penghayat kerpercayaan dan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sampai tingkat kecamatan

Tabel 4.6
Dukungan Terhadap Program Unggulan Daerah

NO	PROGRAM UNGGULAN DAERAH (UD)	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS
1	Religius Masyarakate. (UD)	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitasi dan koordinasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan

4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran, penentuan target keberhasilan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Salah satu cara yang efektif untuk memastikan tujuan dan sasaran tersebut tercapai adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya IKU, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilakukan secara objektif dan terukur.

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Untuk memastikan tujuan tersebut dapat tercapai, dua indikator tujuan dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Ketahanan Ipoleksosbud, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Indeks Ketahanan Ipoleksosbud akan mengukur sejauh mana stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya dapat terjaga. Sedangkan, Nilai SAKIP akan mengukur tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja perencanaan, penganggaran, pelayanan umum dan kepegawaian.

Dalam konteks sasaran yang lebih spesifik, Sasaran 1 adalah untuk meningkatkan stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud, yang akan diukur menggunakan Indeks Ketahanan Ipoleksosbud sebagai indikator. Indeks ini akan mengacu pada berbagai variabel yang mencerminkan keadaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang ada di daerah tersebut, dengan tujuan untuk memastikan bahwa wilayah tersebut tetap aman, damai, dan memiliki ketahanan yang cukup dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Penentuan target untuk indeks ini akan dilakukan berdasarkan analisis kondisi terkini dan potensi ancaman yang dapat memengaruhi ketahanan tersebut.

Secara keseluruhan, penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui IKU ini sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sudah sesuai dengan perencanaan dan kinerja yang diharapkan. Dengan pengukuran yang jelas dan terstruktur, pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dapat dievaluasi secara akurat, yang pada gilirannya akan memberikan dasar yang kuat bagi peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik di daerah.

Tabel 4.7.
Indikator Kinerja Utama
Bakesbangpol Kabupaten Purworejo

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHU						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Indek Ketahanan Ipoleksosbud	Angka	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	Tujuan dan sasaran PD
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68.02	70.45	72.89	75.33	77.76	80.20	Tujuan dan sasaran PD

Salah satu Indikator Utama Pembangunan (IUP) pemerintah daerah adalah terjaganya kondusivitas masyarakat melalui nihilnya kejadian konflik yang berlatar belakang Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) selama lima tahun mendatang. Target ini menjadi perhatian serius karena stabilitas sosial merupakan fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah pada berbagai

bidang, baik ekonomi, politik, maupun budaya. Dengan terjaganya kerukunan antarwarga, diharapkan proses pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa terganggu oleh potensi konflik horizontal.

Tabel 4.8.
Indikator Kinerja Kunci
Bakesbangpol Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah kejadian konflik SARA	Kasus	0	0	0	0	0	0	IUP

Upaya pencapaian indikator ini didukung oleh berbagai program strategis, khususnya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional serta Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial. Program ini diarahkan untuk memperkuat sistem deteksi dini, memperluas ruang dialog antarwarga, serta meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan menangani potensi konflik. Keberadaan lembaga/organisasi seperti Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan menjadi wadah penting dalam membangun komunikasi lintas golongan, memperkokoh toleransi, dan menumbuhkan semangat kebangsaan di masyarakat.

Dukungan dari organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta instansi pemerintah vertikal seperti TNI, POLRI, Kementerian Agama, dan lembaga lainnya turut menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga harmoni sosial. Kolaborasi multipihak ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang tanggap terhadap potensi konflik sekaligus memperkuat nilai-nilai persatuan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, pemerintah daerah menargetkan terwujudnya kondisi masyarakat yang rukun, damai, dan berdaya tahan terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Bakesbangpol Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Bakesbangpol yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Bakesbangpol Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Bakesbangpol, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bakesbangpol setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Bakesbangpol Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Bakesbangpol sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Bakesbangpol setiap tahun.
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c. Kepala Bakesbangpol wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Bakesbangpol Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Bakesbangpol Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Bakesbangpol dilakukan setiap tahun selama periode renstra.

b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya ditandai dengan pelaksanaan pembangunan, sewajarnya diawali dengan proses perencanaan yang matang. Salah satu kebutuhan perencanaan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan OPD Kecamatan Grabag menyusun Renstra Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Purworejo.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Grabag merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Grabag serta ancaman dan peluang yang mempengaruhi Kecamatan Grabag.

Penyusunan Renstra Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :

a. Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra PD.
c. Tahapan penetapan Renstra PD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Grabag selaku Kepala PD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo.

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan hierarki Rencana Strategis PD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu Renstra Kecamatan Grabag Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Purworejo untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, landasan hukum tersebut sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)

23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan rencana Strategis Kecamatan Grabag Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Maksud
   a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas / program /kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemsyarakatan.
   b. Memberikan gambaran rencana program untuk lima tahun ke depan (2025-2029) yang terukur dan terarah dalam melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik sekaligus menjadi acuan bagi Kecamatan Grabag untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Purworejo.
   c. Menjabarkan visi misi RPJMD

2. Tujuan
   a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan sekala prioritas pada kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
   b. Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat.
   c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

d. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Grabag sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rrencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kecamatan sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra PD, Proses Penyusunan renstra PD, Keterkaitan Renstra PD denga dokumen perencanaan lainnya, Landasan hukum penyusunan Renstra PD, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan.

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjabarkan tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Grabag, kondisi sumber daya PD, Kinerja Pelayanan beserta data pendukungnya. Selain itu juga dipaparkan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD Kecamatan Grabag. Pada bagian ini juga menjabarkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD sebagai dasar perumusan isu strategis, Renstra terkait dengan tugas dan fungsi Pelayanan PD, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Penetuan isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan PD Kecamatan Grabag

Bab III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjabarkan visi dan misi Kecamatan Grabag serta sasaran dan target yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun ke depan. Bab ini juga menjabarkan beberapa tujuan strategis dan sasaran, target yang berkorelasi dengan tujuan tersebut. Bab ini menjabarkan arah kebijakan sesuai dengan kebutuhan dalam periode Renstra

Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjabarkan matriks rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Bab V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

Camat bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemeritahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat.

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanan, Kecamatan Grabag memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dan sub bagian.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi PD

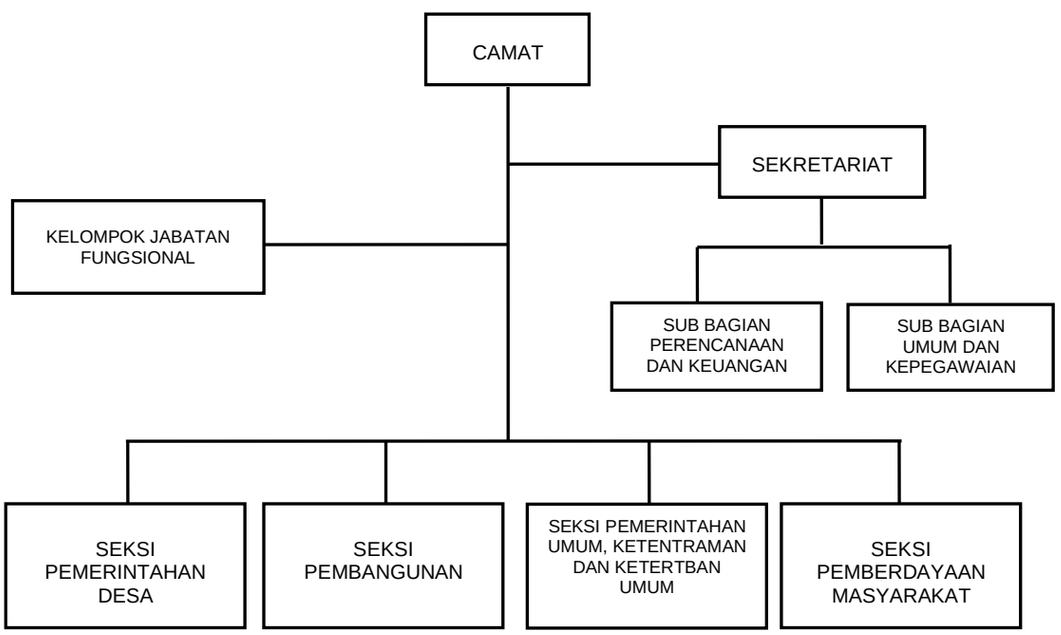

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit keija baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program keija dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah keija Kecamatan;
c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit keija pemerintah maupun swasta;
d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah keija Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; dan

Cmelaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;dan
d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan, meliputi:

a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau perangkat kelurahan;
e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

a. Camat;
b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian
c. Seksi Pemerintahan Desa;
d. Seksi Pembangunan;
e. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Camat

Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan

Sekretariat

(1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat tugas dan sesuai dengan fungsi.

Sekretariat Kecamatan, membawahkan:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi:

a. merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja;
b. melaksanakan pengadministrasian keuangan;
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

a. melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
b. melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
c. melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
d. melaksanakan penyediaaan jasa penunjang;
e. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;

f. melaksanakan pengadministrasian kepegawaian pada lingkungan kecamatan; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai sesuai tugas dan jabatannya.

Seksi Pemerintahan Desa

Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa , yang meliputi:

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
h. melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
j. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
m. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n. melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

o. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
p. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
q. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
r. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
    1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
    2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;
    3. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
b. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
    1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
    2. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
    1. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;

2. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
3. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang meliputi:

a. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi;
   1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;
   2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
b. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
c. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:
   1. Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
   2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
4. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
   1. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
   2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi;
   1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
   2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
   3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai Kecamatan dan Sekretaris Desa PNS berdasarkan Golongan, Jabatan / Eselonering dan Pendidikan sebanyak 19 pegawai Kecamatan PNS ditambah dengan 1 orang tenaga kontrak. Adapun rincian pegawai berdasarkan golongan kepangkatan yaitu :

a. Berdasarkan Golongan :

- Golongan IV : 2 orang
- Golongan III : 11 orang
- Golongan II : 3 orang
- P3K Golongan VII : 3 orang
- Tenaga Kontrak : 1 orang (tenaga kebersihan)

Jumlah : 19 orang

b. Berdasarkan Jabatan / Eselonering :

- Eselon III/A : 1 orang
- Eselon III/B : 1 orang
- Eselon IV/A : 4 orang
- Eselon IV/B : 1 orang

c. Berdasarkan Pendidikan :

- Sarjana Strata 2 : 2 orang
- Sarjana Strata 1 : 8 orang
- Diploma : 3 orang
- SMU/Sederajat : 6 orang

Kepemilikan Aset BMD tahun 2025 :

KIB A : Tanah

Luas tanah , bangunan Kecamatan Grabag : 35.588

KIB B : Peralatan dan Mesin

Jumlah aset :

Mobil dinas : 1 unit

Motor dinas : 6 unit

AC : 10 unit

PC unit : 7 unit

Laptop : 9 unit

Printer : 7 unit

Scanner : 1 unit

Televisi : 2 unit

Lemari besi : 2 unit

Rak Besi : 5 unit

Filling besi : 7 unit

Lemari Kaca : 1 unit

Lemari Kayu : 6 unit

Rak Kayu : 3 unit

Kursi kayu / kerja : 16 unit

Zice : 4 unit

Meja Rapat : 6 unit

Meja tulis : 30 unit

KIB C : Gedung dan Bangunan

Luas tanah kantor dan bangunan Kecamatan Grabag adalah 426 m2, dan memiliki 1 rumah dinas.

KIB D : Jalan, irigasi dan Jaringan

Jaringan distribusi lain – lain (instalasi listrik) : 1 paket

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat keadaan yang menonjol atau trend yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang telah dijalani. Dengan melihat keadaan tersebut dapat diproyeksikan rencana apa yang akan dibuat untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja kecamatan Grabag berdasarkan sasaran/target renstra PD 2025-2029 atau Renstra sebelumnya. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan PD mengacu pada hasil kerja periode Renstra sebelumnya . Untuk menjelaskan kinerja pelayanan perangkat daerah, maka kami sajikan Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Grabag

Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
	Tujuan																					
1	Indeks kepuasan masyarakat				79,89	85	86,5	87	87,5	88	79,89	79,44	79,44	84,32	87,44	NA	100%	93,45	91,83	96,91	99,93	NA
	Sasaran																					
2	Indeks kepuasan masyarakat				79,89	85	86,5	87	87,5	88	79,89	79,44	79,44	84,32	87,44	NA	100%	93,45	91,83	96,91	99,93	NA
3	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publiik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TC-24

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Grabag
Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.362.349.168	1.876.085.313	2.352.599.269	3.044.351.000	2.183.045.553	2.149.816.237	2.336.792.618	2.267.052.378	2.515.749.019	2.359.136.466	0	0	99	121	107	77	0	NA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.652.600	18.706.000	20.576.600	24.500.000	26.950.000	26.950.000	4.652.400	20.703.400	19.651.400	11.853.000			100	111	96	48	0	NA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.163.596.768	1.583.449.913	1.650.700.329	2.507.210.000	1.835.190.453	1.811.147.137	2.110.918.780	2.008.913.298	1.993.894.383	2.040.265.009			98	127	121	81	0	NA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		15.186.000	16.704.600	0	0	0	0	0	0	0			NA	NA	NA	NA	NA	NA
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							0	0	2.000.000	1.000.000			NA	NA	NA	NA	NA	NA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.885.000	115.059.600	126.565.560	62.120.000	68.332.000	68.332.000	55.587.000	88.961.096	74.736.400	98.034.000			96	77	59	158	0	NA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	18.035.000	399.838.500	284.822.000	70.304.200	60.304.200		17.708.900	272.025.000	15.210.000			#DIV/0!	98	68	5	0	NA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.914.000	52.612.800	57.874.080	32.260.000	35.486.000	36.300.000	77.361.056	43.192.841	68.535.728	64.014.457			161	82	118	198	0	NA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.300.800	73.036.000	80.339.600	133.439.000	146.782.900	146.782.900	88.273.382	87.572.843	84.906.108	128.760.000			100	120	106	96	0	NA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	180.091.000	220.799.800	198.183.380	199.548.600	202.048.600	202.048.600	172.391.000	51.358.600	47.749.900	12.417.700	0	0	96	23	24	6	0	NA
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	174.548.600	174.548.600	174.548.600	174.548.600	174.548.600	174.548.600	169.848.600	15.000.000	3.377.000	10.417.700			97	9	2	6	0	NA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.542.400	46.251.200	23.634.780	25.000.000	27.500.000	27.500.000	2.542.400	36.358.600	44.372.900	2.000.000			46	79	188	8	0	NA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	83.877.400	60.646.400	10.000.000	11.000.000	11.000.000	0	65.361.200	47.005.000	88.772.400	0	0		78	78	888	0	NA
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	83.877.400	60.646.400	10.000.000	11.000.000	11.000.000		65.361.200	47.005.000	88.772.400				78	78	888	0	NA

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000	30.000.000	44.358.600	30.000.000	25.051.000	24.898.900	49.999.700	21.879.650	16.165.000	18.795.800	0	0	100	73	36	63	0	NA
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000	30.000.000	44.358.600	30.000.000	25.051.000	24.898.900	49.999.700	21.879.650	16.165.000	18.795.800			100	73	36	63	0	NA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.300.000	19.500.000	21.326.900	18.150.000	1.815.000	18.150.000	0	0	16.546.700	31.070.000	0	0	0	0	78	171	0	NA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.300.000	19.500.000	21.326.900	18.150.000	1.815.000	18.150.000			16.546.700	31.070.000			0	0	78	171	0	NA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	220.319.800	344.880.680	309.010.100	336.440.000	300.784.000	300.784.000	227.019.500	152.441.100	132.200.500	85.970.000	0	0	103	44	43	26	0	NA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	220.319.800	344.880.680	309.010.100	336.440.000	300.784.000	300.784.000	227.019.500	152.441.100	132.200.500	85.970.000			103	44	43	26	0	NA

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Grabag
Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA	NA	
	Nilai Sakip Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA	NA	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	81,25	79,89	79,44	79,44	84,32	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	81,25	79,89	79,44	79,44	84,32	

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, PD Kecamatan Grabag sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

1) Tuntutan dan harapan warga masyarakat terhadap perwujudan *Good Governance dan Good Government* merupakan peluang pada PD Kecamatan Grabag untuk selalu meningkatkan kinerja.
2) Kecamatan Grabag merupakan Eks. Ibukota Kawedanan (Pembantu Bupati untuk wilayah Grabag) banyak peninggalan sarana dan prasarana gedung yang digunakan untuk pemerintahan maupun instansi lain.
3) Kepedulian dan kebersamaan pihak swasta dalam mendukung program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan.
4) Adanya moratorium PNS berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur terhadap pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing dan adanya regulasi yang terus mengalami perubahan.
5) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempangaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
6) Para penyelenggara Pemerintah Desa belum secara optimal memahami regulasi tentang pemerintahan desa yang cenderung berubah.
7) Adanya tambahan penghasilan meningkatkan kinerja sumberdaya pegawai.
8) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana maupun pengembangan potensi alam.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Faktor pendorong pelayanan perangkat daerah :

1. Pegawai yang mengerti dan melaksanakan tupoksi dengan baik
2. Koordinasi dari atas hingga bawah yang mengakomodir segala masalah yang timbul
3. Tindak lanjut masalah yang cepat dan efektif

Faktor penghambat pelayanan peramgkat daerah :

4. Jumlah desa yang banyak yang membutuhkan koordinasi yang lebih lama.
5. Daerah yang sejumlah besar daerah pegunugan menjadi hambatan tersendiri untuk menjangkau daerah yang tinggi
6. SDM kecamatan dan desa yang belum semua memiliki kualitas yang sesuai dengan perkembangan jaman.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Beberapa Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis akan disampaikan dibawah ini :

1. Pembangunan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) di Wilayah Grabag – Pituruh
2. Pembangunan PPL (Pusat Kegiatan Lokal) di Desa Winong Kecamatan Grabag
3. Pembangunan terminal Type C di kawasan Kecamatan Grabag.
4. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di wilayah Kecamatan Grabag
5. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM di wilayah Kecamatan Grabag.
6. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), tersebar di seluruh kecamatan;
7. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM), tersebar di seluruh kecamatan.
8. Jaringan tetap lokal, merupakan jaringan telekomunikasi untuk pelayanan dalam lingkup wilayah Kabupaten, terdapat di seluruh Kecamatan

9. Jaringan tetap Saluran Langsung Jarak Jauh (SLJJ), merupakan jaringan telekomunikasi untuk pelayanan antar daerah di dalam negeri, terdapat di seluruh Kecamatan;
10. Jaringan tetap Saluran Langsung Internasional (SLI), merupakan jaringan telekomunikasi untuk pelayanan antar negara, terdapat di seluruh Kecamatan;
11. Jaringan tetap tertutup fiber optik Pemerintah Kabupaten terdapat di seluruh kecamatan.
12. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) di Kecamatan Grabag;
13. Kawasan pertambangan batu termasuk ada di wilayah Kecamatan Grabag.
14. Rencana pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), meliputi: salah satunya ada di Kecamatan Grabag.

2.1.5 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Grabag meliputi internal Aparatur dan Masyarakat.

Seluruh pembiayaan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan di Kecamatan Grabag bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo.

Untuk menampilkan Rencana Program dan Kegiatan periode Renstra 2025 – 2029 akan disajikan sebagai berikut :

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strength*, *Weakness,Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strength)
    1. Sumber Daya Manusia (pegawai) yang mempunyai pendidikan memadai serta semangat untuk belajar terhadap tugas pokok dan fungsinya.
    2. Tersedianya sarana / prasarana dan dan dukungan dana / pembiayaan sangat membantu kelancaran dalam melayani dan memfasilitasi pemerintah Desa dan memperlancar kegiatan di Kecamatan.
    3. Sistem kekeluargaan yang telah terbangun, hubungan koordinasi dan konsultasi yang berjalan baik bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat baik bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
b. Faktor Kelemahan (Weakness)

    Kurangnya jumlah pegawai di Sekretariat kecamatan yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

    1. Perkembangan teknologi informasi tidak diimbangi semangat untuk belajar dari sebagian besar pegawai yang ada.
    2. Belum ada pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan.
    3. Belum tersedia data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam merencanakan pembangunan yang komprehensif dan berkesinambungan.
    4. Belum adanya sumber daya perencana yang berkualitas dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

5. Pelaksanaan musyawarah pembangunan (musrenbang) masih sekedar formalitas hasilnya belum sesuai yang diusulkan peserta.

Analisis Lingkungan Eksternal

c. Faktor Peluang (Opportunity)

1. Kepemimpinan yang punya jangkauan kedepan (Visioner), berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yang berpartisipatif.
2. Adanya program-program pemerintah di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Grabag
3. Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purworejo yang sudah mulai tertata.
4. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
5. Hubungan yang harmonis dengan instansi yang lain dan juga dengan para pemangku kepentingan.

d. Faktor Ancaman (Threat)

1. Perkembangan tehnologi, berlakunya kawasan Masyarakat Ekonomi Asean / MEA serta tuntutan yang semakin beraneka ragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangn dan hal tersebut harus ditampung, diperhatikan dan dilayani.
2. Kondisi masyarakat yang tidak sama baik tingkat sosial ekonomi, pendidikan dan hal-hal yang lain berpengaruh terhadap cara pandang pola pikir.
3. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan secara partisipatif.
4. Kebijakan pemerintah yang kurang sosialisasi, akan berakibat bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat.

2.2.2 Isu Strategis

Selama dekade waktu 5 (lima) tahun kedepan PD Kecamatan Grabag Kecamatan Grabag dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, nasional dan regional dan dunia internasional. Era globalisasi mau tidak mau, siap atau tidak siap sudah di depan mata, oleh sebab itu Perencanaan Pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemrintahan Kecamatan Grabag menuju *good goverance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Kondisi aktual yang menjadi fokus tahun 2026-2029 berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif
2. Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal
3. Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah.
4. Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan.
5. Pelayanan publik prima belum merata.
6. Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif

Isu–isu dan permasalahan tersebut diatas perlu penanganan secara Komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Grabag sebagai berikut :

1. Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten.
2. Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahant.

Tabel 2.1 Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif
	Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah			Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia		
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan		Cyber insecurity			
	Pelayanan publik prima belum merata		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			
	Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2025-2029, yaitu “PURWOREJO BERDAYA SAING, SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN INOVATIF (PURWOREJO BERSERI)”. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan Misi ke 5 Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagai berikut : “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi“.

OPD Kecamatan Grabag menjadi OPD yang mendukung Misi 5 Bupati Purworejo.Tupoksi Kecamatan Grabag dilaksakan untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Kecamatan Grabag sebagai fasilitasi desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu periode perencanaan.

Tujuan Perencanaan Strategis PD Kecamatan Grabag :

1. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sedangkan yang menjadi Sasaran Perencanaan Strategis PD Kecamatan Grabag adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah dan dikemukakan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	87,56	88,1	88,20	88,30	88,40	88,50	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	87,56	88,1	88,20	88,30	88,40	88,50	

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra 2025-2029 Perangkat Daerah Kecamatan Grabag :

1. Pengembangan wilayah Kecamatan Grabag dari Berbagai Bidang
2. Optimalisasi Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Musrenbang Kecamatan.
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Kecamatan
4. Pendampingan , Fasilitasi Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Arah Kebijakan Renstra 2025-2029 Perangkat Daerah Kecamatan Grabag :

1. Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa.

Tabel 3.4. Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat	Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat	Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat
Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel 3.5. Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan RPJMD 2026	Arah Kebijakan RENSTRA 2026	
		Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2027	Arah Kebijakan RENSTRA 2027	

	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
	Arah Kebijakan RPJMD 2028	Arah Kebijakan RENSTRA 2028	

	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
	Arah Kebijakan RPJMD 2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2029	

	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
	Arah Kebijakan RPJMD 2030	Arah Kebijakan RENSTRA 2030	

	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rencana pelaksanaan rutin setiap bulan , dan disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Rencana pelaksanaan rutin setiap bulan pada pembayaran gaji, dan laporan bulanan juga dilakukan setiap bulan .

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

f. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan Bahan/Material
6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.

2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

4) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

6) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
			Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

Tabel 4.2.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GRABAG
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	84,32	88,1		88,2		88,3		88,4		88,5		88,5			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
7.01.00	KECAMATAN						2.463.676.443		2.488.313.000		2.463.676.000		2.463.676.000		2.463.676.000				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	2.463.676.443	100	2.488.313.000	100	2.463.676.000	100	2.463.676.000	100	2.463.676.000	100	SEKRETARIAT	Kecamatan Grabag	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	23	29	8.675.500	46	9.675.500	46	9.675.500	46	9.675.500	46	9.675.500	213			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17	23	7.720.500	23	7.720.500	23	7.720.500	23	7.720.500	23	7.720.500	115			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	955.000	22	955.000	22	955.000	22	955.000	22	955.000	94			
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	33	33	2.213.381.643	45	2.217.959.700	45	2.203.822.600	45	2.204.822.600	45	2.204.822.600	213			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20	20	2.211.233.443	20	2.216.516.500	20	2.202.379.400	20	2.203.379.400	20	2.203.379.400	20			
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	6	705.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	26	1.443.200	44	1.443.200	44	1.443.200	44	1.443.200	44	1.443.200	202			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0		11	3.000.000	11	3.500.000	11	3.500.000	11	3.500.000	44			
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	11	3.000.000	11	3.500.000	11	3.500.000	11	3.500.000	44			
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	1	2.441.400	16	1.500.000	16	1.500.000	16	1.500.000	16	1.500.000	65			
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	1	2.441.400	16	1.500.000	16	1.500.000	16	1.500.000	16	1.500.000	65			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	0		17	1.500.000	17	1.500.000	17	1.500.000	17	1.500.000	68			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	17	1.500.000	17	1.500.000	17	1.500.000	17	1.500.000	68			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	6	7	77.153.500	8	80.653.400	8	80.653.500	8	80.653.500	8	80.653.500	39			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	5.500.100	15	5.500.000	15	5.500.100	15	5.500.100	15	5.500.100	61			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	7.991.400	20	7.991.400	20	7.991.400	20	7.991.400	20	7.991.400	81			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	20.500.000	12	20.500.000	12	20.500.000	12	20.500.000	12	20.500.000	49			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	6.712.000	4	6.712.000	4	6.712.000	4	6.712.000	4	6.712.000	17			
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	18.500.000	25	18.500.000	25	18.500.000	25	18.500.000	25	18.500.000	101			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	48			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	14.950.000	12	14.950.000	12	14.950.000	12	14.950.000	12	14.950.000	49			
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	1	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	9			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	6	0		20	12.000.000	3	1.000.000	0		0		23			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	10	3.000.000	3	1.000.000	0	0	0	0	13			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	0	0	4	3.000.000	0	0	0	0	0	0	4			
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	3	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	3	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	2	65.039.300	24	65.039.300	24	65.039.300	24	65.039.300	24	65.039.300	98			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	33.335.300	12	33.335.300	12	33.335.300	12	33.335.300	12	33.335.300	49			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	31.704.000	12	31.704.000	12	31.704.000	12	31.704.000	12	31.704.000	49			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	5	96.985.000	5	96.985.000	5	96.985.000	5	96.985.000	5	96.985.000	25			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	3	11.850.000	6	11.850.000	6	11.850.000	6	11.850.000	6	11.850.000	6			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	19.295.000	20	19.295.000	20	19.295.000	20	19.295.000	20	19.295.000	20			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	24.250.000	1	24.250.000	1	24.250.000	1	24.250.000	1	24.250.000	1			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	10	6.710.000	10	6.710.000	10	6.710.000	10	6.710.000	10	6.710.000	10			
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	84,32	88,1		88,2		88,3		88,4		88,5		88,5			
7.01.00	KECAMATAN						145.250.500		280.809.000		145.251.000		147.545.000		149.877.000				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	12.977.800	100	17.471.000	100	12.978.000	100	13.183.000	100	13.391.000	100	SEKSI PEMBANGUNAN	Kecamatan Grabag	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayan Pada Masyarakat	Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	0	1	8.943.000	0		0		0		0		0			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	8.943.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen	1	3	1.249.800	3	11.471.000	3	10.193.000	3	10.398.000	3	10.606.000	15			
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	0	2	8.471.000	2	8.943.000	2	9.148.000	2	9.356.000	10			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	1.249.800	1	3.000.000	1	1.250.000	1	1.250.000	1	1.250.000	5			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen	0	1	2.785.000	1	6.000.000	1	2.785.000	1	2.785.000	1	2.785.000	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	0	1	2.785.000	1	6.000.000	1	2.785.000	1	2.785.000	1	2.785.000	5			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100	100	44.167.500	100	102.810.000	100	44.168.000	100	44.865.000	100	45.574.000	100	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Grabag	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen	4	2	44.167.500	2	102.810.000	2	44.168.000	2	44.865.000	2	45.574.000	10			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	4	4	11.058.300	4	30.000.000	4	11.058.000	4	11.755.000	4	12.464.000	20			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	1	33.109.200	1	72.810.000	1	33.110.000	1	33.110.000	1	33.110.000	5			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	13.369.000	100	22.388.000	100	13.369.000	100	13.580.000	100	13.795.000	100	SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Grabag	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	5	5	13.369.000	5	22.388.000	5	13.369.000	5	13.580.000	5	13.795.000	25			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	4	10.298.000	4	17.388.000	4	10.298.000	4	10.509.000	4	10.724.000	20			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	0	1	3.071.000	1	5.000.000	1	3.071.000	1	3.071.000	1	3.071.000	5			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	16.915.000	100	31.320.000	100	16.915.000	100	17.182.000	100	17.454.000	100	SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Grabag	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	1	1	16.915.000	2	31.320.000	1	16.915.000	1	17.182.000	1	17.454.000	6			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	0	0	0	100	14.405.000	0	0	0	0	0	0	100			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	16.915.000	1	16.915.000	1	16.915.000	1	17.182.000	1	17.454.000	5			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	57.821.200	100	106.820.000	100	57.821.000	100	58.735.000	100	59.663.000	100	SEKSI PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Grabag	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	10	11	57.821.200	12	106.820.000	11	57.821.000	11	58.735.000	11	59.663.000	56			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	0	0	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	6	6	17.400.000	6	17.400.000	6	17.400.000	6	18.314.000	6	18.314.000	30			
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	2	2	33.559.800	2	28.538.600	2	33.559.600	2	33.559.600	2	34.487.600	10			
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	1	2.980.000	1	55.000.000	1	2.980.000	1	2.980.000	1	2.980.000	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	0	1	1.866.400	1	1.866.400	1	1.866.400	1	1.866.400	1	1.866.400	5			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	1	2.015.000	1	2.015.000	1	2.015.000	1	2.015.000	1	2.015.000	5			
Jumlah							**2.608.926.943**		**2.788.122.000**		**2.608.927.000**		**2.611.221.000**		**2.813.553.000**				

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas)	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi intensifikasi PBB	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan	

			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi keagamaan	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		

			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Forkopimcam	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP)	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades dan Sekdes	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pilkades	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah		Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026
Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Fasilitasi pemberdayaan perempuan	Kecamatan	Kecamatan		Fasilitasi pemberdayaan perempuan
	Fasilitasi perlindungan anak	Kecamatan	Kecamatan		Fasilitasi perlindungan anak
	Fasilitasi penurunan stunting	Kecamatan	Kecamatan		Fasilitasi penurunan stunting
	Fasilitasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan	Kecamatan		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan
	Fasilitasi pendidikan	Kecamatan	Kecamatan		Fasilitasi pendidikan
	Fasilitasi perlindungan lansia	Kecamatan	Kecamatan		Fasilitasi perlindungan lansia
	Fasilitasi pemberdayaan disabilitas	Kecamatan	Kecamatan		Fasilitasi pemberdayaan disabilitas
	Fasilitasi tenologi tepat guna	Kecamatan	Kecamatan		Fasilitasi tenologi tepat guna
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan	Kecamatan	Kecamatan		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan
	Fasilitasi dan pembinaan UMKM	Kecamatan	Kecamatan		Fasilitasi dan pembinaan UMKM
	Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat	Kecamatan	Kecamatan		Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat
	Fasilitasi pelestaian lingkungan	Kecamatan	Kecamatan		Fasilitasi pelestaian lingkungan
	Fasilitasi desa wisata	Kecamatan	Kecamatan		Fasilitasi desa wisata
	Fasilitasi dan pembinaan PKK	Kecamatan	Kecamatan		Fasilitasi dan pembinaan PKK
	Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna	Kecamatan	Kecamatan		Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna
	Fasilitasi BUMDes	Kecamatan	Kecamatan		Fasilitasi BUMDes

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Perangkat Kecamatan Grabag untuk pencapaian tujuan dan sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Tujuan dan Sasaran PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	87,56	88,1	88,20	88,30	88,40	88,50	Tujuan dan Sasaran PD

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Grabag yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Grabag Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Grabag, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Grabag setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Rencana Strategis Kecamatan Grabag sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Grabag setiap tahun.
b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c) Camat Grabag wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Grabag dilakukan setiap tahun selama periode renstra.

b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2025—2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025—2029. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029. Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngombol Tahun 2025—2029. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Ngombol yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngombol yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Ngombol sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Purworejo, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Ngombol juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Purworejo, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, serta RPJM Nasional. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan alur dan tata cara penyusunan Renstra

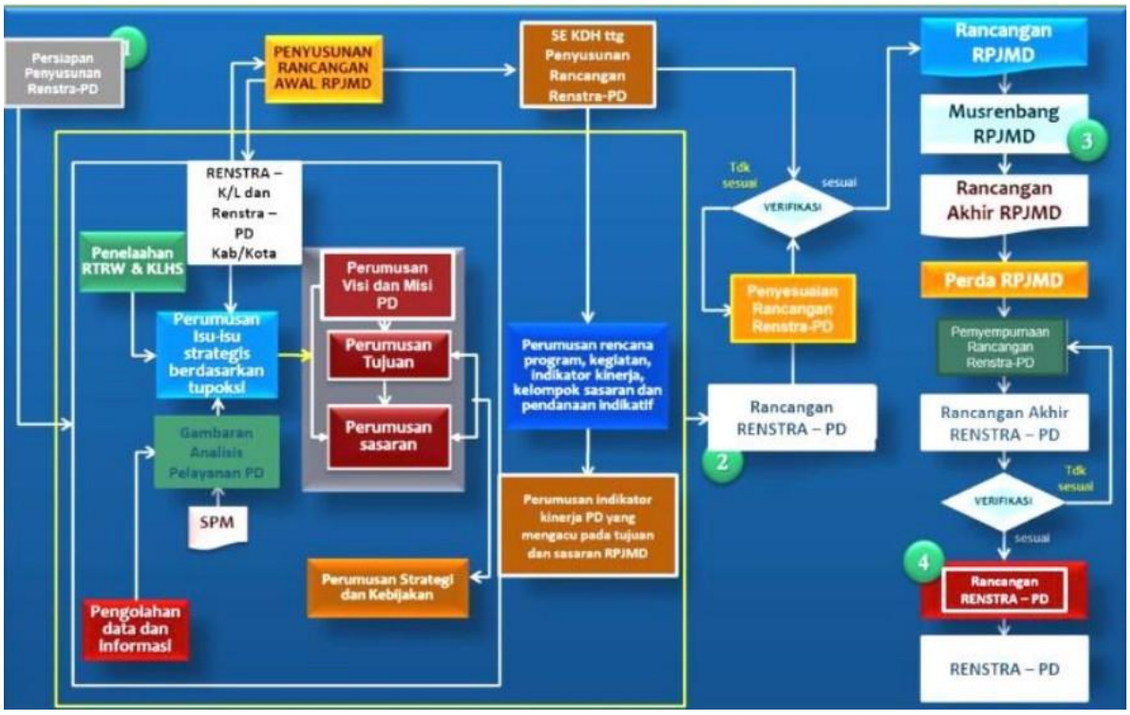

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Ngombol yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purworejo dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngombol. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ngombol dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purworejo;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Ngombol Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Ngombol Tahun 2025—2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025—2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Ngombol ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngombol sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Purworejo.

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV ROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah
- 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo, Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo

Tugas Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan Kecamatan;

a. melakukan pembinaan dan pengawasanl terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
b. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
c. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
d. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemetharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang kegiatan;
c. melakukan evaluasi kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan, meliputi:

a. melakukan administrasi dan pengawasan tertib desa dan/ atau kelurahan;
b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi kelurahan;
c. melakukan administrasi desa dan/atau pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau perangkat kelurahan;
e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat Kecamatan;
f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. pengkordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengkoordinasin upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/ kelurahan;
h. pelaksanaan Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat selain menyelenggarakan fungsi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Camat dalam menyelenggarakan fungsi dan dalam melaksanakan tugas urusan umum :

a. membentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan keanggotaan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan meliputi: Camat sebagai Ketua; pimpinan Kepala Kepolisian Negara Republik di Kecamatan

sebagai anggota; dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, di Kecamatan sebagai Anggota.

b. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang di bahas.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat Daerah sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya yang meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan meliputi anggaran, tenaga, dan sarana prasarana.

a. Sumber Daya Manusia

Total Aparatur Spil Negara Kecamatan Ngombol berjumlah 16 orang di Kecamatan Ngombol keadaan Bulan Juli 2025 berjumlah : 16 orang, terdiri dari :

- Golongan IV : 4 orang
- Golongan III : 4 orang
- Golongan II : 7 orang
- PPPK : 1 orang

a. Menurut jenjang pendidikan terakhir, terdiri atas :

- Magister : 4 orang
- Sarjana : 4 orang
- Sarjana Muda : - orang
- SLTA : 7 orang
- SLTP : 1 orang

b. Sementara menurut jenis kelamin, meliputi :

- Laki – laki : 14 orang
- Perempuan : 2 orang

Melihat data diatas meskipun untuk Kecamatan Ngombol sudah memiliki 16 ASN, namun masih kurang personil diantaranya Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum hanya mempunyai 1 staf dan tidak ada Kepala Seksi, sedangkan Seksi Pembangunan hanya mempunyai 1 Staf ASN.

Berikut Bagan Struktur Organisasi Pada Kantor Kecamatan Ngombol:

Gambar 2
Bagan Struktur Organisasi PD

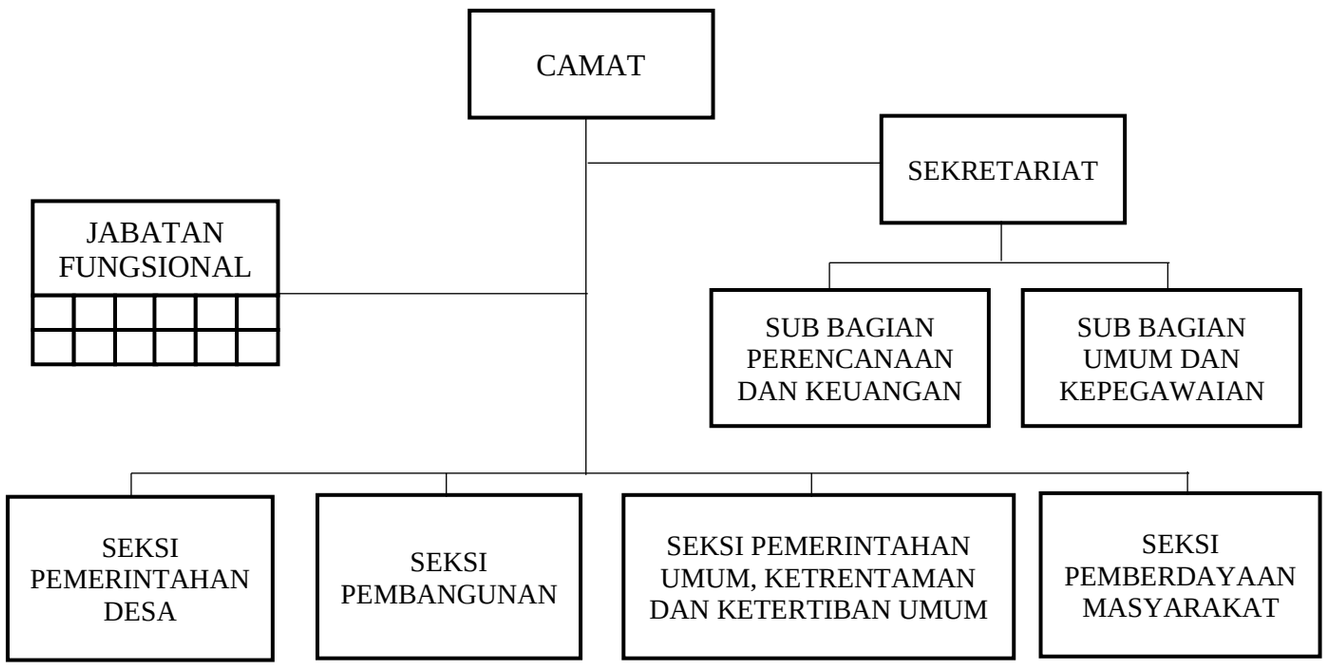

b. Sumber Daya Anggaran Kecamatan Ngombol

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, telah di alokasikan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Purworejo sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.

2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat keadaan yang menonjol atau trend yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang telah dijalani. Dengan melihat keadaan tersebut dapat diproyeksikan rencana apa yang akan dibuat untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja kecamatan Ngombol berdasarkan sasaran/target renstra PD 2021-2026 atau Renstra sebelumnya. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan PD mengacu pada hasil kerja periode Renstra sebelumnya . Untuk menjelaskan kinerja pelayanan perangkat daerah, maka kami sajikan Tabel 2.1 dibawah ini

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1	Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	-	-	-	84,20	85,4	85,5	85,6	86,25	86,5	84,30	86,22	85,76	86,14	-	-	100,1	101	100,3	100,6	-	-
2	Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	-	-	-	84,20	85,4	85,5	85,6	86,25	86,5	84,30	86,22	85,76	86,14	-	-	100,1	101	100,3	100,6	-	-
3	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
5	Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
6	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-

Melihat tabel diatas Kecamatan Ngombol menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang sangat baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai target penuh, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 100%, serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi Program seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencapai target 100%. Secara keseluruhan, Kecamatan Ngombol telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

a) Faktor Pendorong :

Antisipasi dan dukungan terhadap penghambat terwujudnya pelayanan sebagaimana diatas:

a. Mengupayakan kerjasama dengan dinas instansi terkait dengan lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk meningkatkan kualitas kualitas pelayanan dan potensi;
b. Pengembangan Potensi di Wilayah Kecamatan Ngombol;
c. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan Kecamatan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan mulai dari Desa hingga Perangkat Daerah yakni dalam Musrenbang;
d. Memfasilitasi dan mengupayakan pemenuhan sarana prasarana wilayah, peningkatan perekonomian rakyat sesuai dengan potensi masyarakat.

b) Faktor Penghambat

Faktor – faktor penghambat dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Ngombol sebagai berikut :

1) Kurang berkembangnya pemantapan wilayah di berbagai bidang seperti lingkungan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam usulan Musrenbang.
2) Kurang maksimalnya prasarana penunjang pelaksanaan tugas kegiatan pemerintahan sehingga berdampak tidak optimalnya dalam pelayanan.
3) Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah kecamatan sehingga memerlukan langkah-langkah efisiensi walaupun dananya terbatas dan dengan efektifitas penggunaan dananya diharapkan dapat bekerja lebih optimal.
4) Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga fungsional yang ada karena purna tugas/pindah tugas, sehingga beban pekerjaan tertumpu pada seseorang saja (selain tugas pokok juga).

Tabel 2.2

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamtan Ngombol

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*
KECAMATAN	**3.248.338.136,00**	**2.730.492.323 ,00**	**2.645.389.383,00**	**2.718.366.852,00**			**3.125.614.813,00**	**2.595.365.319 ,00**	**2.586.155.544,00**	**2.497.202.723,00**		**-**	**96,22**	**95,05**	**97,76**	**91,86**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**2.772.475.136,00**	**2.385.495.223,00**	**2.303.457.283,00**	**2.366.975.552,00**	**-**	**-**	**2.611.951.813,00**	**2.261.068.219,00**	**2.256.248.544,00**	**2.119.531.423,00**	**-**	**-**	**95.94**	**94.78**	**97,95**	**90,66**	**-**	**-**
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**6.236.000,00**	**6.236.000,00**	**25.258.668,00**	**28.866.400,00**	**-**	**-**	**6.236.000,00**	**6.236.000,00**	**23.190.268,00**	**20.322.960,00**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**	**91,81**	**70,40**	**-**	**-**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.362.000,00	3.825.500,00	21.523.268,00	25.507.400,00	-	-	4.362.000,00	3.825.500,00	20.853.068,00	16.963.960,00	-	-	100,00	100,00	96,89	66,51	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	-	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00		-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	-	218.000,00	218.000,00	-	-	-	-	218.000,00	218.000,00		-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	-	400.000,00	400.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,04	511.000,05	511.000,00	-	-	-	100,00	0,00	100	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	-	352.000,00	352.000,00	-	-	-	-	352.000,00	352.000,00		-	-	-	100,00	100,00		-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,04	2.000.000,05	2.000.000,00	-	-	-	100,00	100,00	100	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.874.000,00	1.200.000,00	2.061.400,00	848.000,00	-	-	1.874.000,00	1.200.000,00	1.063.200,00	848.000,00	-	-	100,00	100,00	51,58	100	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.197.087.836,00**	**2.083.948.489,00**	**1.804.734.811,00**	**2.044.376.130,00**	**-**	**-**	**2.092.598.329,00**	**1.967.931.285,00**	**1.777.185.182,00**	**1.837.598.115,00**	**-**	**-**	**95,24**	**94,43**	**98,47**	**89,89**	**-**	**-**

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.193.241.836,00	2.079.640.489,00	1.800.426.811,00	2.038.256.930,00	-	-	2.088.752.329,00	2.088.752.329,00	1.775.004.182,00	1.832.326.915,00	-	-	95,24	94,42	98,59	89,90	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2.808.000,00	2.808.000,00	2.568.000,00	-	-	-	2.808.000,00	806.000,00	2.144.000,00	-	-		100,00	28,7	83,49	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kuangangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	3.846.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.551.200,00	-	-	3.846.000,00	1.500.000,00	1.375.000,00	3.127.200,00	-	-	100.00	100.00	91,67	88,06	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**30.729.000,00**	**94.755.800,00**	**87.377.200,00**	**103.930.100**	**103.930.101**	**103.930.102**	**103.930.103**	**103.930.104**	**103.930.105**	**103.930.100**	**-**	**-**	**103.930.109**	**103.930.110**	**103.930.111**	**100**	**-**	**-**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	2.742.000,00	2.738.500,00	1.552.500,00	-	-	-	2.742.000,00	2.738.500,00	1.552.500,00	-	-	-	100,00	100,00	100	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	4.425.600,00	4.426.100,00	4.646.200,00	-	-	-	4.425.600,00	4.426.100,00	4.646.200,00	-	-	-	100,00	100,00	100	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	21.873.600,00	20.088.600,00	17.085.600,00	-	-	-	19.110.000,00	16.249.600,00	17.085.600,00	-	-	-	87,37	80,89	100	-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	12.130.800,00	11.780.000,00	13.965.000,00	-	-	-	12.130.800,00	10.660.500,00	13.965.000,00	-	-	-	100,00	90,5	100	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	1.257.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
Penyediaan Bahan/Material	-	14.529.800,00	13.540.000,00	13.501.300,00	-	-	-	1.257.000,00	-	13.501.300,00	-	-	-	100,00		100	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.729.000,00	37.797.000,00	34.804.000,00	53.179.500,00	-	-	30.729.000,00	37.742.000,00	34.341.000,00	53.179.500,00	-	-	100.00	99.85	98,67	100	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**-**	**35.445.000,00**	**255.122.500,00**	**26.659.000,00**	**-**	**-**	**-**	**35.076.000,00**	**254.300.000,00**	**26.280.000,00**	**-**	**-**	**-**	**98,96**	**99,68**	**98,58**	**-**	**-**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	35.445.000,00	255.122.500,00	26.659.000,00	-	-	-	35.076.000,00	254.300.000,00	26.280.000,00	-	-	-	98,96	99,68	98,58	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**69.761.700,00**	**55.785.562,00**	**49.157.104,00**	**57.453.922,00**	**-**	**-**	**67.283.302,00**	**50.565.254,00**	**48.960.144,00**	**51.990.248,00**	**-**	**-**	**96.44**	**90.64**	**99,6**	**90,49**	**-**	**-**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.047.000,00	-	-	-	-	-	19.047.000,00				-	-	100,00				-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	16.948.516,00	19.955.562,00	15.120.000,00	23.221.522,00	-	-	14.470.118,00	14.744.507,00	14.923.040,00	17.775.968,00	-	-	85.38	73.89	98,7	76,55	-	-
Penyediaan Jasa Layanan Umum kantor	33.766.184,00	35.830.000,00	34.037.104,00	34.232.400,00	-	-	33.766.184,00	35.820.747,00	34.037.104,00	34.214.280,00	-	-	100.00	99.97	100	99,95	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**418.660.000,00**	**108.860.872,00**	**81.807.000,00**	**105.690.000,00**	**-**	**-**	**415.104.582,00**	**108.858.980,00**	**70.787.250,00**	**105.690.000,00**	**-**	**-**	**99.15**	**99.99**	**86,53**	**100,00**	**-**	**-**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.900.000,00	-	10.429.000,00	34.880.000,00	-	-	41.784.000,00	-	3.184.250,00	34.880.000,00	-	-	99.72		30,53	100,00	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	-	47.640.872,00	22.152.000,00	23.700.000,00	-	-	-	47.638.980,00	22.152.000,00	23.700.000,00	-	-	-	99.99	100	100,00	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	11.977.000,00	14.568.000,00	11.440.000,00	-	-	-	11.977.000,00	12.103.000,00	11.440.000,00	-	-		100,00	83,08	100,00	-	-
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	373.868.000,00	44.968.000,00	30.368.000,00	32.010.000,00	-	-	370.428.582,00	44.968.000,00	30.368.000,00	32.010.000,00	-	-	99,01	100,00	100,00	100,00	-	-
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.892.000,00	4.275.000,00	4.290.000,00	3.660.000,00	-	-	2.892.000,00	4.275.000,00	2.980.000,00	3.660.000,00	-	-	100.00	100	69,46	100,00	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**223.007.000,00**	**29.887.000,00**	**26.163.600,00**	**27.727.800,00**	**-**	**-**	**213.407.000,00**	**29.887.000,00**	**23.880.800,00**	**27.727.800,00**	**-**	**-**	**95.70**	**100**	**91,27**	**100,00**	**-**	**-**

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	**221.375.000,00**	**10.462.000,00**	**11.451.400,00**	**12.830.000,00**	**-**	**-**	**213.407.000,00**	**10.462.000,00**	**10.511.400,00**	**12.830.000,00**	**-**	**-**	**95,70**	**100,00**	**91,79**	**100,00**	**-**	**-**
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	5.776.000,00	11.451.400,00		-	-	-	5.776.000,00	10.511.400,00	-	-	-	-	100,00	91,79	-	-	-
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	221.375.000,00	4.686.000,00	0,00	12.830.000,00	-	-	211.775.000,00	4.686.000,00	0,00	12.830.000,00	-	-	95.66	100	100	100,00	-	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**1.632.000,00**	**4.376.000,00**	**6.203.400,00**	**8.919.800,00**	**-**	**-**	**1.632.000,00**	**4.376.000,00**	**4.860.600,00**	**8.919.800,00**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**	**78,35**	**100,00**	**-**	**-**
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	-	1.512.000,00	3.101.600,00	3.218.000,00	-	-		1.512.000,00	2.316.400,00	3.218.000,00	-	-		100,00	74,68	100,00	-	-
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.632.000,00	2.864.000,00	3.101.800,00	5.701.800,00	-	-	1.632.000,00	2.864.000,00	2.544.200,00	5.701.800,00	-	-	100.00	100	82,02	100,00	-	-
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**-**	**11.542.000,00**	**4.275.000,00**	**5.978.000,00**	**-**	**-**	**-**	**11.542.000,00**	**4.275.000,00**	**5.978.000,00**	**-**	**-**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkai dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	-	11.542.000,00	4.275.000,00	5.978.000,00	5.978.000,00	5.978.000,00	5.978.000,00	5.978.000,00	5.978.000,00	5.978.000,00	-	-		100,00	100,00	100,00	-	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**-**	**3.507.000,00**	**4.233.800,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.507.000,00**	**4.233.800,00**	**-**	**-**	**-**		**100**	**100,00**		**-**	**-**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kemwenangan lain yang dilimpahkan	-	3.507.000,00	4.233.800,00	-	-	-	-	3.507.000,00	4.233.800,00	-	-	-		100,00	100,00		-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**3.900.000,00**	**89.168.100,00**	**84.017.900,00**	**136.158.700,00**	**-**	**-**	**3.900.000,00**	**85.468.100,00**	**81.453.700,00**	**136.158.700,00**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**	**96,95**	**100,00**	**-**	**-**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**3.900.000,00**	**89.168.100,00**	**84.017.900,00**	**136.158.700,00**	**-**	**-**	**3.900.000,00**	**85.468.100,00**	**81.453.700,00**	**136.158.700,00**	**-**	**-**	**100,00**	**95,85**	**96,95**	**100,00**	**-**	**-**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	15.752.000,00	19.308.000,00	-	-	-	-	15.752.000,00	19.308.000,00	-	-			100	100,00	-	-
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.900.000,00	89.168.100,00	68.265.900,00	116.850.700,00	-	-	3.900.000,00	85.468.100,00	65.701.700,00	116.850.700,00	-	-	100.00	95.85	96,24	100,00	-	-
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**50.000.000,00**	**4.546.800,00**	**10.215.000,00**	**28.141.600,00**	**-**	**-**	**50.000.000,00**	**4.546.800,00**	**9.600.000,00**	**28.141.600,00**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**	**93,98**	**100,00**	**-**	**-**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**50.000.000,00**	**4.546.800,00**	**10.215.000,00**	**28.141.600,00**	**-**	**-**	**50.000.000,00**	**4.546.800,00**	**9.600.000,00**	**28.141.600,00**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**	**93,98**	**100,00**	**-**	**-**

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*
Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00	4.546.800,00	10.215.000,00	17.702.000,00	-	-	50.000.000,00	4.546.800,00	9.600.000,00	17.702.000,00	-	-	100,00	100,00	93,98	100,00	-	-
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	-	-	-	10.439.600,00	-	-	-	-	-	10.439.600,00	-	-				100,00	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**-**	**10.397.600,00**	**37.476.500,00**	**52.991.200,00**	**-**	**-**	**-**	**10.397.600,00**	**37.101.500,00**	**52.991.200,00**	**-**	**-**		**100,00**	**99**	**100,00**	**-**	**-**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**-**	**10.397.600,00**	**37.476.500,00**	**52.991.200,00**	**-**	**-**	**-**	**10.397.600,00**	**37.101.500,00**	**52.991.200,00**	**-**	**-**		**100,00**	**99**	**100,00**	**-**	**-**
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	5.192.000,00	-	5.985.000,00	-	-	-	5.192.000,00	-	5.985.000,00	-	-		100,00		100,00	-	-
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	5.205.600,00	37.476.500,00	36.432.000,00	-	-	-	5.205.600,00	37.101.500,00	36.432.000	-	-		100,00	99	100,00	-	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**248.956.000,00**	**210.997.600,00**	**184.059.100,00**	**106.372.000,00**	**-**	**-**	**246.356.000,00**	**203.997.600,00**	**177.871.000,00**	**106.372.000,00**	**-**	**-**	**98.96**	**96.98**	**96,64**	**100,00**	**-**	**-**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	**248.956.000,00**	**210.997.600,00**	**184.059.100,00**	**106.372.000,00**	**-**	**-**	**246.356.000,00**	**203.997.600,00**	**177.871.000,00**	**106.372.000,00**	**-**	**-**	**98,96**	**96,98**	**96,64**	**100,00**	**-**	**-**
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan	-	38.039.000,00	7.742.800,00	6.540.000,00	-	-	-	38.039.000,00	7.742.800,00	6.540.000,00	-	-		100,00	100	100,00	-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*
Peraturan Kepala Desa																		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	8.379.000,00	3.821.800,00	5.098.000,00	-	-	-	8.379.000,00	3.821.800,00	5.098.000,00	-	-		100,00	100,00	100,00	-	-
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	44.651.000,00	27.806.800,00	18.850.000,00	-	-	-	44.651.000,00	27.306.800,00	18.850.000,00	-	-		100,00	98,2	100,00	-	-
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	112.166.600,00	108.943.500,00	61.880.000,00	-	-	-	105.166.600,00	103.255.400,00	61.880.000,00	-	-		93,76	94,78	100,00	-	-
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		25.880.200,00		-	-	-		25.880.200,00		-	-			100		-	-
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	2.952.000,00	3.133.00000	6.970.000,00	-	-	-	2.952.000,00	3.133.000,00	6.970.000,00	-	-		100,00	100,00	100,00	-	-
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	4.810.000,00	2.488.000,00	2.854.000,00	-	-	-	4.810.000,00	2.488.000,00	2.854.000,00	-	-		100,00	100,00	100,00	-	-
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-	-	4.243.000,00	4.180.000,00	-	-	-	-	4.243.000,00	4.180.000,00	-	-			98.6	100,00	-	-
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	45.422.400,00	-	-	-	-	-	45.422.400,00	-	-	-	-	-	100				-	-
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.504.000,00	-	-	-	-	-	17.504.000,00	-	-	-	-	-	100				-	-
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	186.029.600,00	186.029.600,00	-	-	-	-	183.429.600,00	183.429.600,00	-	-	-	-	98.6	98.6			-	-

Tabel 2.2 menampilkan data anggaran dan realisasi Kecamatan Ngombol tahun 2021 hingga 2024. Secara umum anggaran antara Tahun 2021 – 2024 setiap tahun mengalami kenaikan, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, dan konsisten di atas 91%.

Secara keseluruhan, Kecamatan Ngombol menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	
1	Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	84,30	86,22	85,76	86,14	
2	Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	84,30	86,22	85,76	86,14	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	81,25	85,5	83,27	85,97	
5	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	
10	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	

Dilihat dari tabel 2.1, bahwa target dan realisasi Tahun 2021 – 2024 hampir secara keseluruhan tercapai 100 %, untuk yang belum 100 % dikarenakan Tahun 2025 masih berjalan sampai Bulan Juli, dan diperkirakan sampai akhir tahun akan teralisasi dan tercapai.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ngombol sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

1) Tuntutan dan harapan warga masyarakat terhadap perwujudan *Good Government* merupakan peluang pada Kecamatan Ngombol untuk selalu meningkatkan kinerja.
2) Kepedulian dan kebersamaan pihak swasta dalam mendukung program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan.
3) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4) Para penyelenggara Pemerintah Desa belum secara optimal memahami regulasi tentang pemerintahan desa yang cenderung berubah.
5) Adanya tambahan penghasilan meningkatkan kinerja sumberdaya pegawai.
6) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana maupun pengembangan potensi alam

Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi serta identifikasinya dapat diuraikan menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isu – isu dan permasalahan berikut perlu penanganan secara komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngombol sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur Kecamatan;
2. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
3. Kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi antar instansi terkait.
4. Perlu adanya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pelayanan internal.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Ngombol.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

1) Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan: Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
2) Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
3) Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
4) Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
5) Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
6) Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkahlangkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngombol dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Isu strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif
	Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Baik			Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia		
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan		*Cyber insecurity*			
	Pelayanan publik prima belum merata		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			
	Belum Optimalnya Implementasi Kualitas Kebijakan					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah gambaran tentang kondisi atau tujuan ideal yang ingin dicapai di masa depan, yang berfungsi sebagai arah dan panduan dalam perencanaan serta pengambilan keputusan di pemerintahan.

visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah " Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, Dan Inovatif (Purworejo Berseri) ".

Guna mencapai visi tersebut langkah-langkah strategis atau upaya yang dilakukan dalam 5 tahun kedepan yang dituangkan dalam misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
2. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
4. Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi
6. Untuk mewujudkan tujuan daerah "Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif" maka Kecamatan Ngombol dirumuskan dengan visi Ke-5 yakni: "Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi" Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Ngombol Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Purworejo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan Kecamatan Ngombol menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah . Tujuan tersebut selaras dengan Misi 5 RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, yaitu: "Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi". Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngombol, dalam hal ini Kecamatan Ngombol

Kabupaten Purworejo diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Purworejo dapat tercapai.
Secara rinci tujuan dan sasaran Kecamatan Ngombol sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ngombol

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	86,25	86,50	86,54	86,58	86,62	86,66	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	86,25	86,50	86,54	86,58	86,62	86,66	

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi. Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngombol. Penahapan Renstra Kecamatan Ngombol dapat disajikan seperti tabel di bawah.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Ngombol

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat	Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat	Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat
Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Purworejo, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Purworejo. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purworejo secara efektif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tercantum pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Ngombol

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan RPJMD 2026	Arah Kebijakan RENSTRA 2026	
		Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana Desa, Pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Fasilitasi pengelolaan batas desa, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2027	Arah Kebijakan RENSTRA 2027	
		Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana, Pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Fasilitasi pengelolaan batas desa, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
		Arah Kebijakan RPJMD 2028	Arah Kebijakan RENSTRA 2028	
		Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana desa, Pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Fasilitasi pengelolaan batas desa, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2029	
		Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana desa, Pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Fasilitasi pengelolaan batas desa, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
		Arah Kebijakan RPJMD 2030	Arah Kebijakan RENSTRA 2030	
		Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana desa, Pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Fasilitasi pengelolaan batas desa, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Ngombol

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Ngombol ditentukanlah program, dan kegiatan dan subkegiatan yang dimiliki Kecamatan Ngombol adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan internal berjalan dengan baik. Adapaun kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.
   a. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat
      1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
   e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      5) Penyediaan Bahan/Material
      6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
      7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      3) Pengadaan Mebel
      4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
2) Penyediaan Pelayanan Umum Kantor

i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Mebel
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD), berikut kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Ngombol :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum
1) Koordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum

d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan dampak inisiatif pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Ngombol selain itu tujuan program ini adalah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, sehingga program sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal selain itu juga, memampukan

masyarakat untuk mengelola sumber daya secara mandiri dan mengembangkan lembaga masyarakat yang terorganisir dan produktif, serta mendukung usaha ekonomi seperti UMKM untuk memperkuat perekonomian lokal Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan diantaranya yakni:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat dan menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan mendukung kesejahteraan masyarakat serta Kamtibum memfasilitasi sinergi antara pemerintah kecamatan, polisi, TNI, dan organisasi masyarakat untuk menangani isu-isu ketentraman secara efektif dan Mendukung ketertiban, keamanan, dan kondusivitas wilayah melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat , Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
    2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tujuannya untuk memastikan sinergi antara pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, dan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
    3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa, Adapun kegaitan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan sebagai berikut:

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
7) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Ngombol merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Ngombol juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Ngombol serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Ngombol dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
Renstra Kecamatan Ngombol

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Pemerintahan Daerah			
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
			Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Tersusunnya Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Koordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

Tabel 4.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN NGOMBOL
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	86,25	86,5		86,54		86,58		86,62		86,66		86,66			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
7.01.00	KECAMATAN						2.258.915.945		2.281.505.000		2.157.069.000		2.157.069.000		2.157.069.000				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	2.258.915.945	100	2.281.505.000	100	2.157.069.000	100	2.157.069.000	100	2.157.069.000	100	SEKRETARIAT	Kecamatan Ngombol	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	21	2	4.322.200	2	4.754.420	2	4.322.200	2	4.322.200	2	4.322.200	10			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	2.915.400	22	3.206.940	22	2.915.400	22	2.915.400	22	2.915.400	110			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	24	1.406.800	24	1.547.480	24	1.406.800	24	1.406.800	24	1.406.800	120			
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	27	100	2.067.935.745	100	2.071.246.360	100	1.965.106.600	100	1.965.106.600	100	1.965.106.600	100			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	18	22	2.065.953.545	22	2.069.246.360	22	1.964.106.600	22	1.964.106.600	22	1.964.106.600	110			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	44	1.982.200	44	2.000.000	44	1.000.000	44	1.000.000	44	1.000.000	220			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0		11	180.420	11	982.200	11	982.200	11	982.200	44			
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	11	180.420	11	982.200	11	982.200	11	982.200	55			
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	12	12	1.151.600	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	60			
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	12	1.151.600	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	60			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	22		22	266.760	22	151.600	22	151.600	22	151.600	110			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	22	0	22	266.760	22	151.600	22	151.600	22	151.600	110			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	7	8	56.260.400	8	60.837.540	8	55.734.800	8	56.761.400	8	56.434.800	40			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	1.272.600	3	1.399.860	3	1.272.600	3	1.272.600	3	1.272.600	15			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	2	5.326.600	2	5.859.260	2	5.000.000	2	5.326.600	2	5.000.000	10			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	14.700.000	12	15.170.000	12	14.000.000	12	14.700.000	12	14.700.000	60			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	7.390.000	12	8.129.000	12	7.390.000	12	7.390.000	12	7.390.000	60			
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	12.571.200	12	13.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	60			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	12	828.320	12	571.200	12	571.200	12	571.200	60			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	60			
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	4	451.100	4	501.000	4	501.000	4	501.000	20			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	5	0		1		12		0		1		14			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	12	50.988.500	2	54.470.900	2	50.988.500	2	50.988.500	2	50.988.500	20			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	16.164.500	12	16.164.500	12	16.164.500	12	16.164.500	12	16.164.500	60			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	34.824.000	12	38.306.400	12	34.824.000	12	34.824.000	12	34.824.000	60			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	5	78.257.500	5	88.748.600	5	78.783.100	5	77.756.500	5	78.083.100	25			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	34.880.000	1	38.368.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	5			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	13.861.500	3	15.247.650	3	13.861.500	3	13.861.500	3	13.861.500	15			
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	9.491.000	10	13.105.450	10	10.016.500	10	8.990.000	10	9.316.500	50			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	15.975.000	2	18.672.500	2	15.975.000	2	15.975.000	2	15.975.000	10			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	8	3.050.000	8	3.355.000	8	3.050.000	8	3.050.000	8	3.050.000	40			
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	86,25	86,5		86,54		86,58		86,62		86,66		86,66			
7.01.00	KECAMATAN						148.435.600		369.061.000		148.436.000		150.781.000		153.164.000				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	100	100	18.690.800	100	59.412.000	100	18.691.000	100	18.986.000	100	19.286.000	100	SEKSI PEMBANGUNAN	Kecamatan Ngombol	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	11.475.000	2	25.573.207	2	8.875.000	2	9.070.000	2	9.270.000	10			
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	9.305.000	1	16.710.854	1	7.205.000	1	7.105.000	1	7.305.000	5			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	2.170.000	1	8.862.353	1	1.670.000	1	1.965.000	1	1.965.000	5			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Dokumen	2	2	4.767.000	2	24.669.760	2	7.868.000	2	7.968.000	2	8.068.000	10			
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan Pelayanan	Dokumen	1	1	2.117.000	1	8.804.053	1	1.618.000	1	1.618.000	1	1.618.000	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	0	1	12.950.707	1	4.100.000	1	4.200.000	1	4.300.000	1			
7.01.02.2.02.0005	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	2.650.000	1	2.915.000	1	2.150.000	1	2.150.000	1	2.150.000	5			
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	1	2.448.800	0	9.169.033	1	1.948.000	1	1.948.000	1	1.948.000	4			
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	1	2.448.800	1	9.169.033	1	1.948.000	1	1.948.000	1	1.948.000	5			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen	0	0		0		0		0		0		0			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	%	100	100	46.524.800	100	137.236.000	100	46.525.000	100	47.260.000	100	48.007.000	100	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Ngombol	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen	2	2	46.524.800	2	137.236.000	2	46.525.000	2	47.260.000	2	48.007.000	10			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Lembaga Kemasyarakatan	5	5	14.397.200	5	15.836.920	5	14.398.000	5	15.133.000	5	15.133.000	25			
7.01.03.2.01.0005	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	6	32.127.600	6	121.399.080	6	32.127.000	6	32.127.000	6	32.874.000	30			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	10.829.800	100	21.277.000	100	10.830.000	100	11.001.000	100	11.175.000	100	SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Ngombol	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	2	10.829.800	2	21.277.000	2	10.830.000	2	11.001.000	2	11.175.000	10			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	4.272.000	1	9.381.310	1	4.272.000	1	4.443.000	1	4.617.000	5			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	6.557.800	1	11.895.690	1	6.558.000	1	6.558.000	1	6.558.000	5			
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	0	0		0		0		0		0		0			
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	19.981.400	100	48.249.000	100	19.981.000	100	20.297.000	100	20.618.000	100	SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Ngombol	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	8	3	19.981.400	2	48.249.000	2	19.981.000	2	20.297.000	2	20.618.000	11			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	21	21	2.851.600	21	11.893.247	21	2.851.200	21	3.167.200	21	3.488.200	105			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	Orang	57	57	4.025.000	57	13.183.987	57	4.025.000	57	4.025.000	57	4.025.000	285			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Dokumen	6	6	13.104.800	6	23.171.766	6	13.104.800	6	13.104.800	6	13.104.800	30			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	52.408.800	100	102.887.000	100	52.409.000	100	53.237.000	100	54.078.000	100	SEKSI PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Ngombol	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	17	7	52.408.800	7	102.887.000	7	52.409.000	7	53.237.000	7	54.078.000	35			
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	5	5	6.449.600	5	7.094.560	5	6.449.600	5	6.449.600	5	6.449.600	25			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	4.258.400	1	4.684.240	1	4.258.400	1	4.258.400	1	4.258.400	5			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	6	6	14.450.000	6	15.895.000	6	14.450.000	6	14.450.000	6	14.450.000	30			
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Dokumen	2	2	19.131.000	2	21.044.100	2	19.132.000	2	19.960.000	2	20.801.000	10			
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	0	0	1	45.237.320	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	1	3.234.800	1	3.558.280	1	3.234.000	1	3.234.000	1	3.234.000	5			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	1	1.310.000	1	1.441.000	1	1.310.000	1	1.310.000	1	1.310.000	5			
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	1	3.575.000	1	3.932.500	1	3.575.000	1	3.575.000	1	3.575.000	5			
Jumlah							2.407.351.545		2.850.586.000		2.305.505.000		2.307.850.000		2.310.233.000				

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Monitoring Pembangunan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas)	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi intensifikasi PBB	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi keagamaan	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka	
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Forkopimcam	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP)	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades dan Sekdes	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pilkades	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi	

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, provinsi, dan kegiatan unggulan daerah, Kecamatan Ngombol mengimplementasikan program Pembentukan Kecamatan Berdaya. Program ini menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi bagi kelompok difabel, perempuan, pelaku ekonomi kreatif, serta pengembangan sport center.

Sejalan dengan agenda nasional, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata pada upaya penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, penguatan pendidikan, serta perlindungan kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan lansia. Dukungan ini diwujudkan melalui fasilitasi langsung, koordinasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.

Pada tataran Kabupaten, Kecamatan Ngombol berperan aktif dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pelestarian lingkungan. Melalui koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan, Kecamatan Ngombol berupaya mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing wilayah. Dengan berbagai kegiatan tersebut, Kecamatan Ngombol berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan kolaboratif, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Dukungan Program Delegasi dan Aktivitas Kecamatan

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Fasilitasi pemberdayaan perempuan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi perlindungan anak	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi penurunan stunting	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi pendidikan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi perlindungan lansia	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi pemberdayaan disabilitas	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi tenologi tepat guna	Kecamatan	Kecamatan
		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi dan pembinaan UMKM	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi pelestaian lingkungan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi desa wisata	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi dan pembinaan PKK	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi BUMDes	Kecamatan	Kecamatan

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngombolsebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngombol

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	86,25	86,50	86,54	86,58	86,62	86,66	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Ngombol sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									IUP
									SPM
			NIHIL						Permendagri No. 18 Tahun 2020
									Mandatory lain

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Ngombol yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Ngombol Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Ngombol, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngombol setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Kecamatan Ngombol sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Ngombol setiap tahun.
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c. Camat Ngombol wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Ngombol dilakukan setiap tahun selama periode renstra.

b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

YULI HASTUTI

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya ditandai dengan pelaksanaan pembangunan, sewajarnya diawali dengan proses perencanaan yang matang . Salah satu kebutuhan perencanaan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan OPD Kecamatan Purwodadi menyusun Renstra Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Purworejo.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Purwodadi serta ancaman dan peluang yang mempengaruhi Kecamatan Purwodadi.

Penyusunan Renstra Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :

a. Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra PD.
c. Tahapan penetapan Renstra PD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Purwodadi selaku Kepala PD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Purworejo.

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan hierarki Rencana Strategis PD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu Renstra Kecamatan Purwodadi Tahun 2025-2030 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Purworejo untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Maksud
   a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program /kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemsyarakatan.
   b. Memberikan gambaran rencana program untuk lima tahun ke depan (2025-2029) yang terukur dan terarah dalam melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik sekaligus menjadi acuan bagi Kecamatan Purwodadi untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Purworejo.
   c. Menjabarkan visi misi RPJMD

2. Tujuan
   a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan sekala prioritas pada kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
   b. Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat.
   c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
   d. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Purwodadi sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rrencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kecamatan Purwodadi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan

Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah serta Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 serta Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dukungan terhadap nasional provinsi dan kegiatan unggulan daerah serta indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Susunan Organisasi Kecamatan Purwodadi terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretariat, membawahi
   a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan Desa
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi PD

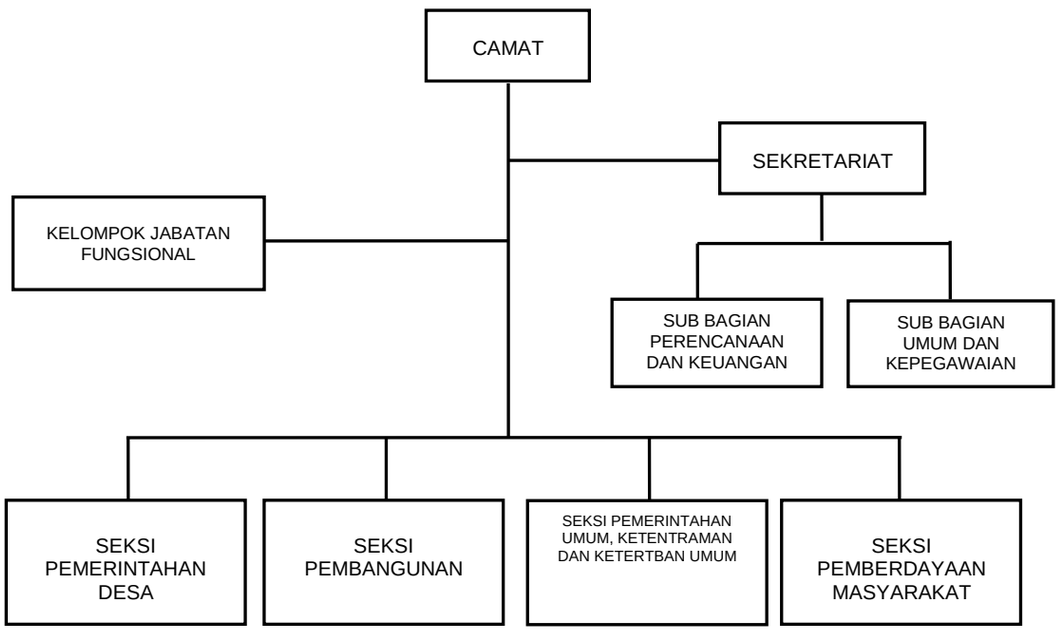

Dalam pelaksanaan pelayanan, Kecamatan Purwodadi memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dan sub bagian.

1. Camat mempunyai tugas pokok:
   a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
   b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
   d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
   e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Selain melaksanakan tugas, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan.

Tugas Camat dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum yaitu membentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Susunan pimpinan dan anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan adalah sebagai berikut:

(1) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud diketuai oleh Camat;
(2) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
(3) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa meliputi:

a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;
e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Camat

Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan

Sekretariat

(1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi

secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat tugas dan sesuai dengan fungsi.

Sekretariat Kecamatan, membawahkan:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi:

a. merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja;
b. melaksanakan pengadministrasian keuangan;
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

a. melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
b. melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
c. melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
d. melaksanakan penyediaaan jasa penunjang;
e. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
f. melaksanakan pengadministrasian kepegawaian pada lingkungan kecamatan; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai sesuai tugas dan jabatannya.

Seksi Pemerintahan Desa

Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa , yang meliputi:

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
h. melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
j. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
m. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n. melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
o. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
p. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
q. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
r. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
   1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
   2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;
   3. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
b. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
   1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
   2. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
   1. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;

2. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
3. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;
4. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang meliputi:

a. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi;
   1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;
   2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
b. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
c. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:
   1. Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
   2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   3. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
   4. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   5. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
   8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
   1. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
   2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi;
   1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
   2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
   3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai Kecamatan dan Sekretaris Desa PNS berdasarkan Golongan, Jabatan / Eselonering dan Pendidikan sebanyak 14 pegawai Kecamatan ASN ditambah dengan 3 orang tenaga kontrak. Adapun rincian pegawai berdasarkan golongan kepangkatan yaitu :

a. Berdasarkan Golongan :
- Golongan IV : 2 orang
- Golongan III : 6 orang
- Golongan II : 5 orang
- PPPK Golongan VII : 1 orang

Jumlah : 14 orang

b. Berdasarkan Jabatan / Eselonering :
- Eselon III/A : 1 orang
- Eselon III/B : 1 orang
- Eselon IV/A : 4 orang
- Eselon IV/B : 1 orang

c. Berdasarkan Pendidikan :
- Sarjana Strata 2 : 1 orang
- Sarjana Strata 1 : 5 orang
- Diploma : 2 orang
- SMU/Sederajat : 6 orang

Kepemilikan Aset BMD tahun 2025 :
KIB A : Tanah
Luas tanah , bangunan Kecamatan Purwodadi : 35.588
KIB B : Peralatan dan Mesin
Jumlah aset :
Genset : 1 unit
Mobil dinas : 1 unit
Motor dinas : 8 unit
AC : 2 unit
PC unit : 6 unit
Laptop : 8 unit

Netbook : 2 unit
Printer : 8 unit
Televisi : 2 unit
Lemari besi : 2 unit
Rak Besi : 5 unit
Filling besi : 7 unit
Lemari Kaca : 1 unit
Lemari Kayu : 6 unit
Rak Kayu : 3 unit
Kursi kayu / kerja : 16 unit
Zice : 4 unit
Meja Rapat : 6 unit
Meja tulis : 30 unit

KIB C : Gedung dan Bangunan

Luas tanah kantor dan bangunan Kecamatan Purwodadi adalah 426 m2, dan memiliki 1 rumah dinas.

KIB D : Jalan, irigasi dan Jaringan

Jaringan distribusi lain – lain (instalasi listrik) : 1 paket

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*	*(23)*
1	Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				87.70	88.00	88.30	88.50	89.00	89.50	85.25	86.06	90.31	91.94			1.03	1.02	0.98	0.96		
2	Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				87.70	88.00	88.30	88.50	89.00	89.50	85.25	86.06	90.31	91.94			1.03	1.02	0.98	0.96		
3	Program : Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100		
4	Program : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100		
5	Program : Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100		
6	Program : Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100		
7	Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100		
8	Program : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100		

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.571.115.719	2.665.759.249	2.810.663.088	2.197.657.211	2.121.042.480	3.058.083.010	2.440.146.717	2.493.332.557	2.470.979.054	2.167.962.069			95%	94%	88%	99%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.955.000	26.508.468	11.625.000	5.750.000	6.200.000	750.000	18.890.792	26.375.592	8.875.000	5.750.000			100%	99%	76%	100%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penrangkat Daerah	13.721.000	19.338.468	3.625.000	1.250.000	500.000	375.000	13.718.792	19.205.592	3.000.000	1.250.000			100%	99%	83%	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		500.000	500.000	750.000	125.000			500.000	250.000	750.000				100%	50%	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD		510.000	750.000	750.000	125.000			510.000	750.000	750.000				100%	100%	100%		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		500.000	500.000	750.000	125.000			500.000	-	750.000				100%	0%	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		500.000	1.125.000	750.000	125.000			500.000	625.000	750.000				100%	56%	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kenerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		2.000.000	2.500.000	750.000	250.000			2.000.000	2.125.000	750.000				100%	85%	100%		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.234.000	3.160.000	2.625.000	750.000	250.000	250.000	5.172.000	3.160.000	2.125.000	750.000			99%	100%	81%	100%		
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						125.000												

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.384.864.511	2.324.717.437	2.254.590.420	1.885.966.127	1.822.003.780	2.790.456.510	2.255.141.538	2.159.556.078	1.929.376.675	1.874.454.821			95%	93%	86%	99%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.384.864.511	2.321.792.437	2.251.590.420	1.884.966.127	1.822.700.167	2.790.456.510	2.255.141.538	2.156.631.078	1.928.126.675	1.873.454.821			95%	93%	86%	99%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.100.000	1.500.000	250.000		125.000		1.100.000	-	250.000				100%	0%	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1.825.000	1.500.000	750.000	1.000.000	125.000		1.825.000	1.250.000	750.000				100%	83%	100%		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.000.000	750.000	750.000	125.000			1.375.000	750.000					69%	100%		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			2.000.000	750.000	750.000	125.000			1.375.000	750.000					69%	100%		
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			2.000.000	1.250.000	625.000	125.000			2.000.000	1.250.000					100%	100%		
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			2.000.000	1.250.000	625.000	125.000			2.000.000	1.250.000					100%	100%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.718.400	5.930.000	1.750.000	125.000			3.718.400	5.930.000					100%	100%		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			3.718.400	5.930.000	1.750.000	125.000			3.718.400	5.930.000					100%	100%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.545.000	96.512.900	85.202.600	89.442.060	63.406.400	49.291.000	37.545.000	96.372.900	80.977.600	89.440.900			100%	100%	95%	100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		810.000	2.562.800	3.514.500	3.509.000	993.600		810.000	2.545.200	3.514.500				100%	99%	100%		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3.570.000	5.891.700	5.293.500	3.442.000	1.384.200		3.570.000	5.886.900	5.293.500				100%	100%	100%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		13.710.000	14.460.600	20.328.000	18.478.800	19.152.000		13.710.000	13.146.000	20.327.400				100%	91%	100%		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		10.262.000	12.108.200	16.076.000	8.983.600	10.690.100		10.262.000	12.108.200	16.076.000				100%	100%	100%		

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.564.000	1.600.000	1.332.000	1.332.000			1.564.000	1.356.000	1.332.000				100%	85%	100%		
Penyediaan Bahan/Material		17.876.900	17.876.900	17.971.500	17.207.700	10.659.100		17.876.900	17.876.900	17.971.500				100%	100%	100%		
Fasilitasi Kunjungan Tamu			6.160.000	1.500.000		750.000			4.125.000	1.500.000					67%	100%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.545.000	810.000	2.562.800	3.514.500	10.203.300	5.537.000	37.545.000	48.580.000	22.967.200	21.476.000			100%	5998%	896%	611%		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			966.200	1.950.000	250.000	125.000			966.200	1.950.000					100%	100%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		92.118.000	250.822.500	26.588.100	19.904.500			89.732.000	250.000.000	26.400.000				97%	100%	99%		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			250.822.500						250.000.000						100%			
Pengadaan Mebel		27.880.000		26.588.100	19.904.500			26.174.000		26.400.000				94%		99%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		64.238.000						63.558.000						99%				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.185.208	50.014.644	73.093.768	95.446.924	134.339.800	130.735.500	65.185.208	45.408.328	70.183.379	77.452.574			100%	91%	96%	81%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.003.600						18.003.600						100%					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.028.000	37.703.976	42.894.616	51.536.468	48.919.200	48.067.500	31.872.295	33.230.536	40.554.118	44.215.294			97%	88%	95%	86%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.153.608	12.310.668	30.199.152	43.910.456	82.614.000	82.668.000	14.153.608	12.177.792	29.629.261	33.237.280			100%	99%	98%	76%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.566.000	75.887.800	75.887.800	86.534.000	72.063.000	86.475.000	64.566.000	75.887.659	124.473.000	86.533.774			100%	100%	164%	100%		

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.800.000	43.055.000	43.055.000	34.794.000	38.220.000	34.880.000	26.800.000	43.054.859	25.475.800	34.793.774			100%	100%	59%	100%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4.692.000	11.850.000	10.540.000	15.800.000			4.516.000	11.850.000					96%	100%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		14.378.000	9.684.000	6.410.000	6.410.000	10.670.000		14.378.000	9.684.000	6.410.000				100%	100%	100%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.868.000	18.454.800	82.811.200	31.040.000	14.453.000	20.855.000	23.868.000	18.454.800	82.811.200	31.040.000			100%	100%	100%	100%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.898.000		1.986.000	2.440.000	2.440.000	4.270.000	13.898.000		1.986.000	2.440.000			100%		100%	100%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	132.441.000	75.656.600	67.881.400	54.130.000	12.955.000	4.200.000	129.881.000	75.656.600	66.385.900	54.130.000			98%	100%	98%	100%		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	131.441.000	28.495.000	26.991.000	9.835.000	5.575.000		128.881.000	28.495.000	26.904.200	9.835.000			98%	100%	100%	100%		
Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan kegiatanPemerintahan dengan perangkat Daerah yang ada di kecamatan		17.350.000	25.063.000	4.950.000	2.925.000			17.350.000	25.063.000	4.950.000				100%	100%	100%		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	131.441.000	11.145.000	1.928.000	4.885.000	2.650.000		128.881.000	11.145.000	1.841.200	4.885.000			98%	100%	95%	100%		

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.000.000	27.266.400	25.780.400	34.690.000	6.975.000	3.000.000	1.000.000	27.266.400	25.736.700	34.690.000			100%	100%	100%	100%		
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		24.600.700	22.852.400	26.105.000	4.325.000	600.000		24.600.700	22.808.700	26.105.000				100%	100%	100%		
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						1.800.000												
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.000.000	2.665.700	2.928.000	8.585.000	2.650.000	600.000	1.000.000	2.665.700	2.928.000	8.585.000			100%	100%	100%	100%		
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		6.500.000	4.878.000	1.850.000				6.500.000	3.528.000	1.850.000				100%	72%	100%		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		6.500.000	4.878.000	1.850.000				6.500.000	3.528.000	1.850.000				100%	72%	100%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		13.395.200	10.232.000	7.755.000	405.000	1.200.000		13.395.200	10.217.000	7.755.000				100%	100%	100%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan			964.000	1.375.000					964.000	1.375.000					100%	100%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		13.395.200	9.268.000	6.380.000	405.000	1.200.000		13.395.200	9.253.000	6.380.000				100%	100%	100%		

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.800.000	61.940.000	81.095.800	153.920.600	91.264.000	5.370.717.300	1.800.000	61.840.000	81.064.800	153.920.600			100%	100%	100%	100%		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.800.000	61.940.000	81.095.800	153.920.600	91.264.000	5.370.717.300	1.800.000	61.840.000	81.064.800	153.920.600			100%	100%	100%	100%		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			14.188.000	21.550.600	21.463.000	17.317.300			14.188.000	21.550.600					100%	100%		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.800.000	61.940.000	66.907.800	132.370.000	69.801.000	5.353.400.000	1.800.000	61.840.000	66.876.800	132.370.000			100%	100%	100%	100%		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34.030.000	38.400.000	22.377.800	38.855.000	10.291.000	3.000.000	34.030.000	38.400.000	22.377.800	38.855.000			100%	100%	100%	100%		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	34.030.000	38.400.000	22.377.800	34.795.000	10.291.000	3.000.000	34.030.000	38.400.000	22.377.800	34.795.000			100%	100%	100%	100%		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	34.030.000	38.400.000	20.257.000	17.385.000	3.190.000	1.500.000	34.030.000	38.400.000	20.257.000	17.385.000			100%	100%	100%	100%		
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			2.120.800	17.410.000	7.101.000	1.500.000			2.120.800	17.410.000					100%	100%		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4.060.000						4.060.000						100%		

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4.060.000						4.060.000						100%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		20.850.000	36.737.000	33.320.000	17.050.000	24.300.000		20.850.000	36.737.000	33.320.000				100%	100%	100%		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		20.850.000	36.737.000	33.320.000	17.050.000	24.300.000		20.850.000	36.737.000	33.320.000				100%	100%	100%		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						11.900.000												
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		13.940.000	3.719.000	6.260.000	3.710.000			13.940.000	3.719.000	6.260.000				100%	100%	100%		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		6.910.000	33.018.000	27.060.000	13.340.000	12.400.000		6.910.000	33.018.000	27.060.000				100%	100%	100%		

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	228.321.000	228.474.900	122.805.500	95.185.000	37.595.000	12.600.000	228.321.000	228.354.900	122.757.400	95.165.000			100%	100%	100%	100%		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	228.321.000	228.474.900	122.805.500	95.185.000	37.595.000	12.600.000	228.321.000	228.354.900	122.757.400	95.165.000			100%	100%	100%	100%		
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		32.114.000	4.424.700	6.510.000	2.385.000	600.000		32.114.000	4.388.000	6.510.000				100%	99%	100%		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		16.973.000	3.125.000	9.580.000	3.985.000	1.500.000		16.953.000	3.125.000	9.580.000				100%	100%	100%		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		50.141.000	2.794.000	8.330.000	2.120.000	1.500.000		50.041.000	2.794.000	8.330.000				100%	100%	100%		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		104.800.900	82.276.600	43.760.000	20.750.000	7.200.000		104.800.900	82.265.200	43.760.000				100%	100%	100%		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			17.994.800			600.000			17.994.800						100%			
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		11.920.000	2.756.400	18.200.000	4.240.000	1.200.000		11.920.000	2.756.400	18.180.000				100%	100%	100%		
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		12.526.000	2.277.000	1.700.000				12.526.000	2.277.000	1.700.000				100%	100%	100%		
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	31.060.000		4.575.000	4.155.000	1.200.000		30.260.000		4.575.000	4.155.000			97%		100%	100%		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga			1.291.000	975.000	1.590.000				1.291.000	975.000					100%	100%		

Kemasyarakatan																		
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			1.291.000	1.975.000	1.325.000				1.291.000	1.975.000					100%	100%		
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.630.000		1.291.000	1.975.000			17.630.000						100%					
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	179.631.000		1.291.000	1.975.000			176.421.300						98%					

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Tujuan:						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	85,25	85,25	86,06	90,31	91,94	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	76,13	-	-	66,51	
2	Sasaran						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	85,25	85,25	86,06	90,31	91,94	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	76,13	-	-	66,51	
3	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	
5	Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100	100	100	100	100	
6	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengembangan pelayanan perangkat daerah di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo pada lima tahun mendatang menghadapi sejumlah tantangan sekaligus membuka berbagai peluang strategis. Hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Purworejo, serta KLHS menunjukkan bahwa dinamika pembangunan daerah menuntut pelayanan publik yang semakin adaptif, responsif, dan inovatif.

Dari sisi tantangan, Kecamatan Purwodadi masih menghadapi kesenjangan kualitas sumber daya manusia aparatur, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi dan kemampuan analisis pelayanan berbasis data. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk aksesibilitas di beberapa wilayah pedesaan, menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan layanan. Telaahan terhadap RTRW Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa perkembangan tata ruang dan pertumbuhan wilayah menuntut perangkat daerah lebih adaptif dalam mengantisipasi kebutuhan pelayanan, misalnya terkait peningkatan mobilitas masyarakat, perubahan fungsi lahan, serta perkembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari hasil analisis KLHS, isu lingkungan seperti kerentanan bencana alam (banjir, tanah longsor), degradasi lingkungan, dan keterbatasan daya dukung lahan menjadi tantangan tambahan bagi pelayanan publik, terutama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

Meski demikian, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Purwodadi. Pertama, arah kebijakan nasional dan provinsi yang menekankan pada transformasi digital pelayanan publik menjadi momentum untuk memperkuat inovasi

layanan berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat secara daring. Kedua, potensi pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Purworejo, termasuk adanya proyek infrastruktur regional dan konektivitas dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, membuka kesempatan bagi Kecamatan Purwodadi untuk mengembangkan pelayanan yang mendukung aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Ketiga, dukungan masyarakat serta meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas mendorong perangkat daerah untuk membangun layanan yang lebih partisipatif dan responsif. Selain itu, hasil analisis KLHS menunjukkan adanya peluang penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat diintegrasikan dalam inovasi pelayanan publik ramah lingkungan.

Dengan mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, Kecamatan Purwodadi diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo mencakup seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan yang berada dalam wilayah administrasi kecamatan. Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Purwodadi memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kelompok sasaran memperoleh pelayanan yang adil, mudah diakses, dan berkualitas.

Sasaran utama pelayanan adalah masyarakat umum, yaitu seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Purwodadi. Mereka menjadi penerima layanan administrasi pemerintahan, kependudukan, perizinan sederhana, serta berbagai fasilitasi program pembangunan. Selain itu, pemerintah desa beserta perangkatnya menjadi kelompok sasaran penting mengingat peran desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kecamatan hadir untuk memberikan pembinaan, pendampingan, serta koordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Kelompok lain yang menjadi perhatian adalah masyarakat rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. Mereka memerlukan layanan publik yang inklusif, perlindungan sosial, serta akses yang lebih mudah terhadap program-program pemerintah. Di sisi lain, pelaku ekonomi lokal seperti petani, pedagang, dan pelaku UMKM juga menjadi sasaran layanan melalui fasilitasi perizinan, penguatan kapasitas usaha, dan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selain itu, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kelompok kepemudaan juga menjadi kelompok sasaran layanan yang penting. Mereka memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat kecamatan maupun desa. Sementara itu, dari sisi internal pemerintahan, aparatur sipil negara dan perangkat

daerah lain juga menjadi kelompok sasaran dalam rangka koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan lintas sektor di tingkat kecamatan.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Purwodadi tidak hanya berfokus pada masyarakat secara umum, tetapi juga mencakup kelompok rentan, pelaku usaha, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga aparatur pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan kecamatan bersifat menyeluruh dan inklusif, guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Purwodadi

2.2 Permasalahan dan Isu Stategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi dari Bab II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029, Laporan KLHS RPJMD 2025–2029, serta penjaringan aspirasi masyarakat melalui perangkat daerah, dapat dirumuskan beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Purwodadi. Permasalahan tersebut muncul sebagai refleksi adanya kesenjangan antara kondisi ideal pelayanan publik yang diharapkan dengan realitas capaian pembangunan yang ada saat ini.

Permasalahan dominan yang dihadapi antara lain:

1. Kualitas dan pemerataan pelayanan publik yang belum optimal, terutama dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, maupun keterjangkauan layanan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya mendukung terwujudnya layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan.
3. Kapasitas sumber daya manusia aparatur yang belum merata, baik dari segi kompetensi teknis maupun manajerial, sehingga berdampak pada kualitas layanan yang diselenggarakan perangkat daerah.
4. Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu yang membutuhkan integrasi lintas sektor.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan yang menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat dalam mengakses layanan, serta belum mendukung pelayanan prima.
6. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pelayanan masih rendah, sehingga aspirasi yang muncul belum sepenuhnya terakomodasi secara sistematis.

Dengan memperhatikan permasalahan dominan tersebut, terlihat adanya kebutuhan untuk memperkuat kualitas, pemerataan, dan inovasi pelayanan perangkat daerah agar dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah lima tahun ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, serta keterkaitannya dengan isu KLHS RPJMD 2025–2029 dan dinamika lingkungan global, nasional, maupun regional, maka dapat dirumuskan isu strategis perangkat daerah sebagai berikut

Tabel 2.1 Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif
	Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah			Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia		
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan		Cyber insecurity			
	Pelayanan publik prima belum merata		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			
	Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif					

Isu utama yang perlu mendapat perhatian meliputi: penguatan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif untuk menjawab tantangan rendahnya akuntabilitas kinerja; peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah guna memperkuat stabilitas dan daya saing; percepatan transformasi digital pelayanan publik sebagai respon atas tuntutan era digital dan ancaman keamanan siber; pemerataan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah; serta penguatan stabilitas, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat agar tercipta lingkungan yang kondusif dalam mendukung pembangunan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2025-2030 yaitu :

"Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)"

Visi ini merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021 – 2026.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi. Misi merupakan sebuah komitmen bersama yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan guna mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri) 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2030 diwujudkan dalam "Purworejo Berseri".

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Kecamatan Purwodadi mendukung Misi ke 5, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif, serta berbasis teknologi informasi, maka ditetapkan tujuan strategis perangkat daerah Kecamatan Purwodadi yaitu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih terukur, yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang ditunjukkan melalui peningkatan Nilai SAKIP perangkat daerah.
2. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perangkat daerah.

Dengan demikian, indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan ini adalah:

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan tersebut didukung oleh 4 (empat) faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi dan sarana serta prasarana kerja, faktor-faktor ini sangatlah berpengaruh terhadap tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perangkat daerah dimana apabila salah satu factor tersebut tidak ada maka dapat berpengaruh signifikan terhadap tercapainya tujuan perangkat daerah.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi sebagai langkah pemfokusan dalam Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi adalah "Meningkatkan kualitas

layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah".

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi adalah "Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat ".

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi beserta indikator dan targetnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	92,00	92,15	92,30	92,45	92,60	92,75	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	92,00	92,15	92,30	92,45	92,60	92,75	

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan arah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan bagaimana penyelesaian isu strategis pembangunan daerah.

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kecamatan Purwodadi pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat	Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat	Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat
Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan RPJMD 2026	Arah Kebijakan RENSTRA 2026	
		Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2027	Arah Kebijakan RENSTRA 2027	
		Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2028	Arah Kebijakan RENSTRA 2028	
		Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi	

		informasi dan layanan publik	musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2029	
		Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2030	Arah Kebijakan RENSTRA 2030	
		Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
      1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
   e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      5) Penyediaan Bahan/Material
      6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
      7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      2) Pengadaan Mebel
      3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
      5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   3) Pemeliharaan Mebel
   4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
      1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.
      2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
      3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
      2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
      2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
   b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
      1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
      1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
      2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
      5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
      6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
      7) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
      8) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
      9) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dari uraian tersebut di atas secara rinci rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan hingga aktivitas sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 berikut ini :

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
			Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	

					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	

Tabel 4.2.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	66,51	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	91,94	92,15		92,3		92,45		92,6		92,75		92,75			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	66,51	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
7.01.00	KECAMATAN						3.058.333.010		3.088.916.000		2.189.224.000		2.189.224.000		2.189.224.000				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	3.058.333.010	100	3.088.916.000	100	2.189.224.000	100	2.189.224.000	100	2.189.224.000	100	Sekretariat	Kecamatan Purwodadi	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	3	750.000	3	750.000	3	750.000	3	750.000	3	750.000	15			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	15	375.000	20	375.000	20	375.000	20	375.000	20	375.000	95			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	16	250.000	16	250.000	16	250.000	16	250.000	16	250.000	80			
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	5			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	1	2.790.706.510	1	2.803.026.500	1	1.921.597.500	1	1.921.597.500	1	1.921.597.500	5			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20	18	2.790.456.510	18	2.802.776.500	18	1.921.347.500	18	1.921.347.500	18	1.921.347.500	18			
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	6	12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	60			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	5			
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	5			
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	5			
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	4	125.000	4	125.000	4	125.000	4	125.000	4	125.000	20			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	5			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	5			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	49.291.000	1	49.378.000	1	49.291.000	1	49.291.000	1	49.291.000	5			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	993.600	1	993.600	1	993.600	1	993.600	1	993.600	1			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1.384.200	1	1.460.800	1	1.384.200	1	1.384.200	1	1.384.200	1			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	19.152.000	1	19.152.000	1	19.152.000	1	19.152.000	1	19.152.000	1			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	10.690.100	1	10.690.100	1	10.690.100	1	10.690.100	1	10.690.100	1			
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	10.659.100	1	10.669.500	1	10.659.100	1	10.659.100	1	10.659.100	1			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	1	750.000	1	750.000	1	750.000	1	750.000	1	750.000	1			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1	5.537.000	1	5.537.000	1	5.537.000	1	5.537.000	1	5.537.000	1			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	2	0		4	18.176.000	0		0		0		4			
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	0	0	4	18.176.000	0	0	0	0	0	0	4			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	130.735.500	24	130.735.500	24	130.735.500	24	130.735.500	24	130.735.500	120			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	48.067.500	12	48.067.500	12	48.067.500	12	48.067.500	12	48.067.500	60			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	82.668.000	12	82.668.000	12	82.668.000	12	82.668.000	12	82.668.000	60			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	5	86.475.000	5	86.475.000	6	86.475.000	5	86.475.000	5	86.475.000	26			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	15.800.000	7	15.800.000	5	15.000.000	5	15.800.000	5	15.800.000	5			
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	5	800.000	0	0	0	0	5			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9	12	10.670.000	12	10.670.000	8	10.670.000	8	10.670.000	8	10.670.000	8			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	20.855.000	2	20.855.000	1	20.855.000	1	20.855.000	1	20.855.000	1			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	7	4.270.000	7	4.270.000	6	4.270.000	6	4.270.000	6	4.270.000	6			
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	91,94	92,15		92,3		92,45		92,6		92,75		92,75			
7.01.00	KECAMATAN						114.817.300		313.850.000		114.817.000		116.631.000		118.475.000				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	4.200.000	100	10.605.000	100	4.200.000	100	4.266.000	100	4.334.000	100	Seksi Pembangunan	Kecamatan Purwodadi	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen	2	3	3.000.000	3	7.380.000	3	3.000.000	3	3.066.000	3	3.120.000	3			
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	1	600.000	1	840.000	1	600.000	1	636.000	1	600.000	1			
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	1	1.800.000	1	5.895.000	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.920.000	1			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	600.000	1	645.000	1	600.000	1	630.000	1	600.000	1			
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	0		0		0		0		0		0			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen	1	1	1.200.000	1	3.225.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.214.000	1			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	1.200.000	1	3.225.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.214.000	1			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100	100	70.717.300	100	153.833.000	100	70.717.000	100	71.835.000	100	72.970.000	100	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Purwodadi	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen	2	1	70.717.300	1	153.833.000	1	70.717.000	1	71.835.000	1	72.970.000	1			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	5	5	17.317.300	5	22.583.000	5	17.467.000	5	17.325.000	5	17.328.000	5			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	53.400.000	1	131.250.000	1	53.250.000	1	54.510.000	1	55.642.000	1			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	3.000.000	100	31.519.000	100	3.000.000	100	3.047.000	100	3.096.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Purwodadi	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	2	3.000.000	2	31.519.000	2	3.000.000	2	3.047.000	2	3.096.000	2			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	1.500.000	1	19.880.000	1	1.500.000	1	1.547.000	1	1.560.000	1			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	1.500.000	1	11.639.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.535.000	1			
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	1	0		0		0		0		0		0			
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	24.300.000	100	33.320.000	100	24.300.000	100	24.684.000	100	25.074.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Purwodadi	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	1	2	24.300.000	2	33.320.000	2	24.300.000	2	24.684.000	2	25.074.000	2			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	0	50	11.900.000	50	17.580.000	50	11.900.000	50	12.284.000	50	12.660.000	50			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	12.400.000	1	15.740.000	1	12.400.000	1	12.400.000	1	12.414.000	1			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	12.600.000	100	84.573.000	100	12.600.000	100	12.799.000	100	13.001.000	100	Seksi Pemerintahan Desa	Kecamatan Purwodadi	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	9	9	12.600.000	9	84.573.000	9	12.600.000	9	12.799.000	9	13.001.000	9			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	1	600.000	1	3.293.000	1	640.000	1	639.000	1	671.000	1			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	1.500.000	1	7.370.000	1	1.530.000	1	1.530.000	1	1.560.000	1			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	1	1.500.000	1	8.520.000	1	1.530.000	1	1.530.000	1	1.560.000	1			
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	1	7.200.000	1	26.390.000	1	7.200.000	1	7.200.000	1	6.600.000	1			
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	1	600.000	1	28.890.000	0	0	0	0	1	650.000	1			
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	1	1.200.000	1	8.860.000	1	1.200.000	1	1.275.000	1	1.200.000	1			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	0	0	1	1.250.000	1	500.000	1	625.000	1	750.000	1			
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Jumlah							3.173.150.310		3.402.788.000		2.304.041.000		2.305.855.000		2.307.699.000				

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas)	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi intensifikasi PBB	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi keagamaan	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Forkopimcam	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			

			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP)	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades dan Sekdes	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pilkades	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi	
			Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Penyusunan Masterplan Desa, Penyusunan Website Desa	

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diarahkan pada Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa; Peningkatan Partisipasi masyarakat meliputi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purwodadi. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Dimana mereka ikut ambil bagian dalam kegiatan persebut. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan keluharan juga diarahkan pada Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan; Gerakan sayang ibu dan anak, Kecamatan layak Anak, Pembinaan Karang Taruna, Pembinaan BUMDes/BUMDesma, Pembinaan dan Fasilitasi UMKM serta Pendampingan Koperasi Merah Putih dimana Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAK Asasi Manusia (HAM), Membangun Desa dari Bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas serta Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum diarahkan pada Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan; Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. Sedangkan Program Delegasi Provinsi yang didukung yaitu Mendorong Penguatan Forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan. Serta Mendukung Program Pitulungan Bupati Purworejo Religius Masyarakate.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diarahkan pada Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Penyelenggaraan HUT RI serta Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan. Program ini mendukung Program Nasional Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAK Asasi Manusia (HAM) serta mendukung Program Delegasi Provinsi Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa diarahkan pada Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa; Penyelenggaraan fasilitasi Penyusunan APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP. Program ini mendukung Program Nasional Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan. Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga diarahkan pada Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Sekretaris Desa; Kegiatan Konferensi Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Dimana program ini mendukung Delegasi Provinsi Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa.

Tabel 4.4. Program Delegasi Provinsi

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Fasilitasi pemberdayaan perempuan	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi pemberdayaan perempuan
		Fasilitasi perlindungan anak	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi perlindungan anak
		Fasilitasi penurunan stunting	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi penurunan stunting
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi penanggulangan kemiskinan
		Fasilitasi pendidikan	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi pendidikan
		Fasilitasi perlindungan lansia	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi perlindungan lansia
		Fasilitasi pemberdayaan disabilitas	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi pemberdayaan disabilitas
		Fasilitasi tenologi tepat guna	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi tenologi tepat guna
		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan	Kecamatan	Kecamatan	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan
		Fasilitasi dan pembinaan UMKM	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi dan pembinaan UMKM
		Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat
		Fasilitasi pelestaian lingkungan	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi pelestaian lingkungan
		Fasilitasi desa wisata	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi desa wisata
		Fasilitasi dan pembinaan PKK	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi dan pembinaan PKK
		Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna
		Fasilitasi BUMDes	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi BUMDes

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian

tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwodadi sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Tujuan dan Sasaran PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	92,00	92,15	92,30	92,45	92,60	92,75	Tujuan dan Sasaran PD

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Purwodadi yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Purwodadi, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi setiap tahun.
b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c) Camat Purwodadi wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Purwodadi dilakukan setiap tahun selama periode renstra.

b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Bagelen disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah kabupaten.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Bagelen disusun juga memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor : 14 Tahun 2023, tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo.

Renstra Kecamatan Bagelen disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Bagelen dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Akhir Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Renstra, hingga penetapan Renstra. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 1.1

Gambar 1.1

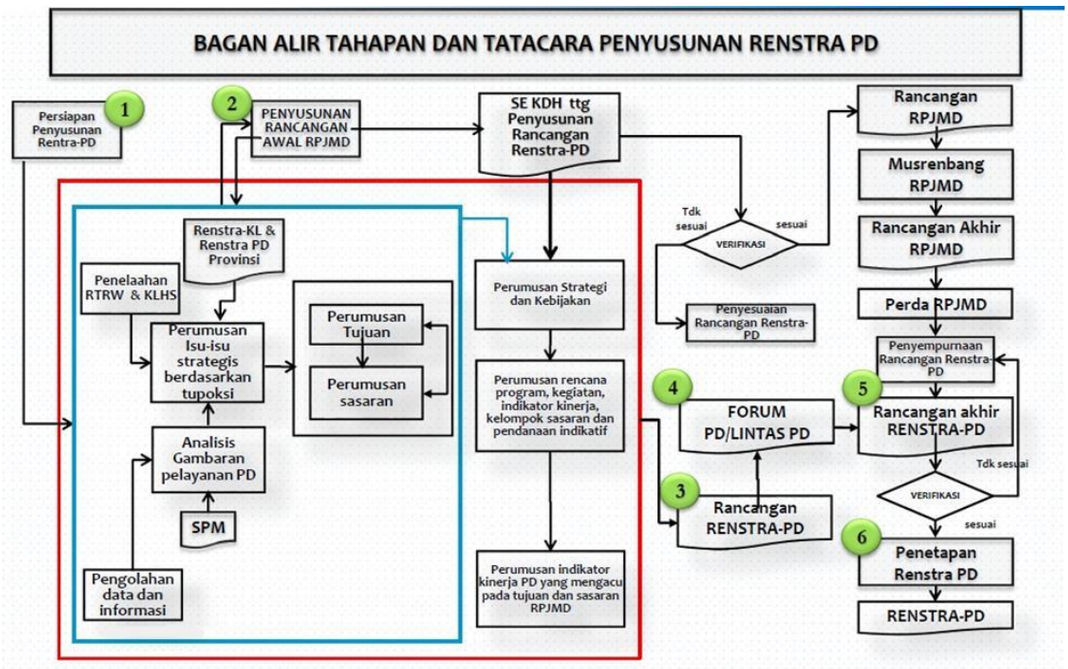

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan Bagelen pada dasarnya melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.

1. Hubungan RPJMD dengan Renstra

   RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih pasangan Hj Yuli Hastuti, S.H. dan Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom., M.Si . periode 2025-2030.

   RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Bagelen karena Renstra merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

2. Hubungan Renstra dengan RKPD

   Pelaksanaan Renstra 2025-2029, setiap tahun dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagi suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun. RKPD sebagai pedoman dalam

menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafont Anggaran Sementara.

3. Hubungan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah

Setelah Peraturan Bupati Purworejo tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ditetapkan, Perangkat Daerah segera menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk tahun berkenaan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran dan Belanja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan, yang sebelumnya didahului dengan penetapan KUA dan PPAS.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purworejo

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Tahun
2025-2029 sebagai berikut :

a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas, program, kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
b. Memberikan gambaran rencana program untuk lima tahun ke depan (2025-2029) yang terukur dan terarah dalam melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik sekaligus menjadi acuan bagi Kecamatan Bagelen untuk mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.
c. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Bagelen yang mencerminkan penyelenggraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Tahun 2025-2029 sebagai berikut

A Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Bagelen

dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

B Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Kecamatan Bagelen dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

C Meningkatnya kinerja Kecamatan Bagelen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung Program Bupati Purworejo.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Bagelen Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan,hubungan Renstra Kecamatan Bagelen dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bagelen terdiri dari: struktur organisasi; susunan kepegawaian dan kelengkapan; tugas pokok dan fungsi, dan Pelayanan Kecamatan Bagelen terdiri keadaan lima tahun yang lalu dan keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang. Penjelasan kondisi bidang tugas Kecamatan Bagelen saat ini yaitu berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki/dihadapi saat ini dan lima tahun kedepan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Terdiri dari visi, misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Bagelen dan penjelasannya

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang penjelasan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif beserta sumbernya dalam periode 5 tahun dan tahunan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada sub bab ini menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Bagelen disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Bagelen 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU)

2.1.1 Tugas. Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan di atur dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

Adapun tugas Pokok dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Camat

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat kecamatan;
6. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan

Tugas Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan Kecamatan;
b. melakukan pembinaan dan pengawas terhadap keseluruhan unit ke{a baik pemerintah maupun swasta yang program kerja dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
c melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan
d melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan, meliputi:

a melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan
b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan / atau Kelurahan;
c melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala

Desa dan/ atau Lurah;

d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/ atau Kelurahan;
e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

B. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam bertugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan dan penyelenggaraan tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

a pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
b pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
c pengorordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;dan
e pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

B.1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi:

a. merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja
b. melaksanakan pengadministrasian keuangan;
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

B.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

a. melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
b. melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
c. melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
d. melaksanakan penyediaaan jasa penunjang;
e. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
g. menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

C. Seksi Pemerintahan Desa

Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa, yang meliputi :

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
h. melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi prencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;

j. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
m. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n. melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
o. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
p. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
q. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
r. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

D. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
   1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
   2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar peayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan; dan
   3. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
b. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
   1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;dan
   2. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
   1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
   2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;dan
   3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

E. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang meliputi:

a. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi;
    1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;dan
    2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
b. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
c. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati, yang meliputi:
    1. Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
    2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    3. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi,konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
    4. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
    5. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
    6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
    8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya

F. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
   1. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
   2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi;
   1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
   2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;dan
   3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

G. Jabatan Fungsional :

Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Kecamatan..

Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yerng memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional.

Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.

Sesuai Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

a. Camat;
b. Sekretariat, membawahkan:
   1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian

c. Seksi Pemerintahan Desa;
d. Seksi Pembangunan;
e. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

Adapun struktur organisasi Kecamatan Bagelen adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.1 berikut ini :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN BAGELEN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2023

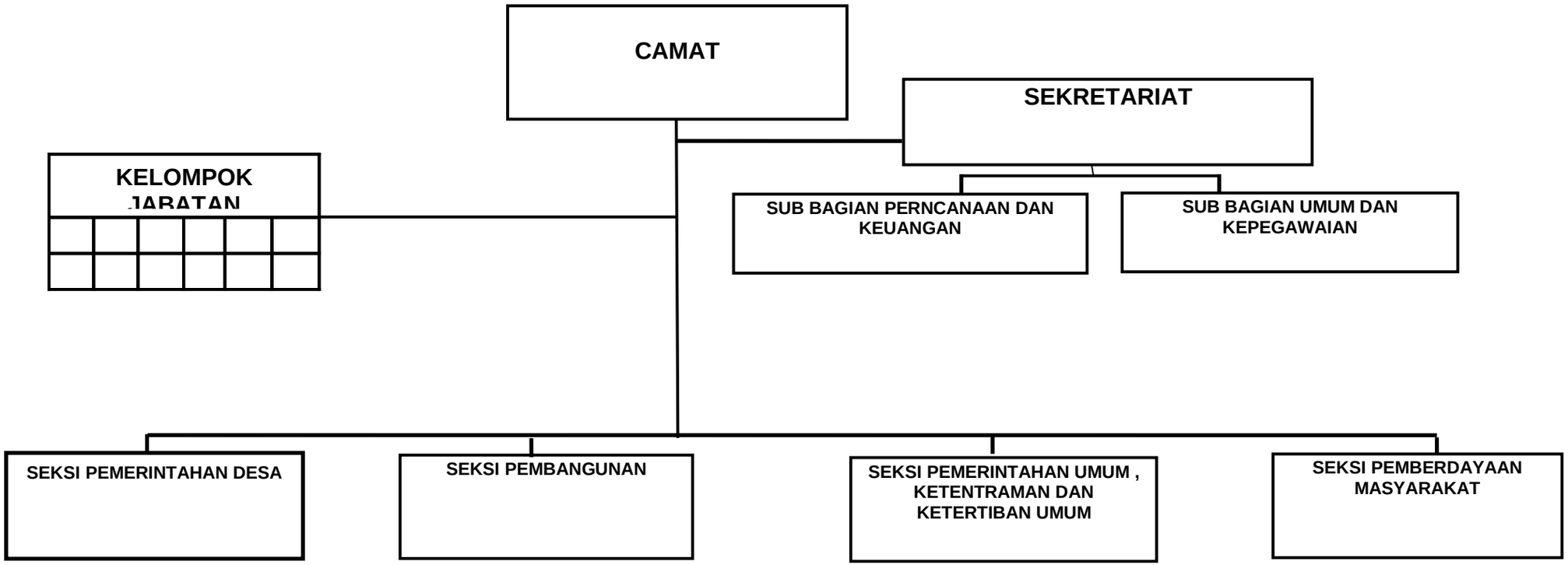

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Kecamatan Bagelen keadaan Bulan Agustus Tahun 2025 saat ini berjumlah 13 orang, yang terdiri dari :

- Golongan IV : 1 Orang
- Golongan III : 8 Orang
- Golongan II : 2 Orang
- PPPK : 2 Orang

Menurut jenjang pendidikan terakhir, terdiri atas :

- Pasca Sarjana : 1 Orang
- Sarjana : 3 Orang
- D.III : 4 Orang
- SLTA : 5 Orang

Menurut Jenis Kelamin, terdiri atas :

- Laki-laki : 11 Orang
- Perempuan : 2 Orang

2.1.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Jumlah Aset Tetap berdasarkan saldo aset tetap per 31 Desember 2024 adalah Rp. 1.787.881.157.75 dengan rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Aset Tetap

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah	31.342.650,00
2	Peralatan dan Mesin	939.992.355,00
3	Gedung dan Bangunan	1.933.231.028,75
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.622.900
5	Aset Tetap Lainnya	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0
7	Akumukasi Penyusutan Aset Tetap	(1.127.307.776.79)
	Jumlah	1.787.881.157.75

Tabel 2.2
Aset

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Station Wagon	1
2	Sepeda Motor	10
3	Lemari Besi/Metal	7
4	Lemari Kayu	6
5	Rak Besi	11
6	Rak Kayu	1
7	Filing Cabinet Besi	10

8	Brandkas	1
9	Kardex Besi	1
10	Papan Visual/Papan Nama	2
11	White Board	3
12	Display	1
13	Papan Nama Instansi	1
14	Alat Kantor Lainnya	2
15	Meja Kerja Besi/Meta	2
16	Sice	3
17	Meja Rapat	2
18	Tempat Tidur Kayu	1
19	Meja Resepsionis	1
20	Meja 1/2 Biro	53
21	Kasur/Spring Bed	1
22	Kursi Fiber Glas/Plastik	17
23	Kursi Rapat	50
24	Kursi Biasa	39
25	Bangku Tunggu	12
26	Kursi Lipat	1
27	Lemari Es	1
28	A.C. Window	1
29	A.C. SpliT	1
30	A.C. Split	2
31	Kipas Angin	8
32	Televisi	2
33	Amplifier	1
34	Loudspeaker	2
35	Dispenser	2
36	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4
37	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8
39	Kursi Kerja Pegawai Non	1
40	Camera Electronic	1
41	Layar Film/Projector	1
42	Telephone (PABX)	1
43	Pesawat Telephone	16
44	P.C Unit	6
45	Lap Top	8
46	Note Book	1
47	Printer	10

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Bagelen berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Bagelen tahun 2025 - 2029 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.2 berikut ;

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*	*(23)*
	Indikator Renstr 2021-2026			Indeks Kepuasan Masyrakat	81,00	82,00	83,00	84,00	90,83	90,86	81.43	81,56	82,68	84,24								

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Peningkatan nilai IKM dari tahun ke tahun mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola pelayanan, kecepatan, ketepatan, serta kenyamanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Anggaran adalah sebuah rencana keuangan yang terperinci dan sistematis yang dibuat untuk periode waktu tertentu di masa depan, dalam jangka waktu tertentu . Anggaran memuat estimasi atau perkiraan tentang pendapatan dan belanja yang akan diterima dan pengeluaran yang akan dikeluarkan.

Secara sederhana, anggaran adalah "rencana di atas kertas" yang berfungsi sebagai panduan, alat kontrol, dan patokan untuk mengukur kinerja keuangan. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut kami sajikan data anggaran serta realisasi pendanaan guna mendukung efektifitas pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan belanja guna pelayanan diharapkan mampu mendorong kinerja perangkat daerah sehingga dapat maksimal dalam pelayanan. Berikut tabel anggaran serta realisasi dari Tahun 2021-2026

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4		7			8	9	10	11	12	13	14	1500%	1600%	1700,00%	18	19
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.228.563.080	2.420.919.290		2,274,522,736	1.989.465.617	2.255.695.035	2.125.707.749	2.256.897.253		2,194,591,149			95,38%	93%		96,49%		
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.172.000	7,518,300		4,875,000	1.500.000	625.000	26.162.592	7,518,300		4,875,000			99,96%	100%		100,00%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.344.000	1,361,300	1.875.000	1,750,000	625.000	500.000	22.334.592	1,361,300	1.875.000	1,750,000			99,96%	100%	100,00%	100,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		342,200	625.000	Rp 500,000	125.000			342,200	625.000	Rp500,00				100%	100,00%	100,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1,865,200	625.000	Rp 500.000	125.000			1,865,200	625.000	Rp500,00				100%	100,00%	100,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		69,000	695.800	500.000	125.000			69,000	320.800	Rp500,00				100%	46,11%	100,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2,411,200	695.800	500.000	125.000			2,411,200	695.800	Rp500,00				100.00%	100,00%	100,00%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		736,500	625.000	625.000	250.000			736,500	375.000	Rp625,00				100.00%	60,00%	100,00%		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.828.000	732,900	625.000	500.000	125.000	125.000	3.828.000	732,900	625.000	Rp500,00			100,00%	100.00%	100,00%	100,00%		
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.056.145.480	2,118,766,286		1,999,773,062	1.768.528.667	2.071.105.235	1.956.076.441	1,964,399,302		1,920,789,549			95,13%	97.56%		96,05%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.056.145.480	2,105,023,586	2.079.812.755	1,996,318,662	1.767.778.667	2.070.730.235	1.954.103.841	1,950,656,602	1.847.988.087	1,917,335,149			95,04%	92.67%	88,85%	96,04%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	1.972.600	2,802,700	1.250.000	1,250,000	500.000	250.000	1.972.600	2,802,700	1.250.000	1,250,000			100,00%	100.00%	100,00%	100,00%		

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		10,940,000	1.000.000	2,204,400	250.000	125.000		10,940,000	1.000.000	2,204,400				100.00%	100,00%	100,00%		
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1,250,000	500.000	125.000				1,250,000						100,00%		
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			1.500.000	1,250,000	500.000	125.000			1.125.000	1,250,000					75,00%	100,00%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5,655,000	250.000	125.000				5,655,000						100,00%		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			2.500.000	5,655,000	250.000	125.000			1.875.000	5,655,000					75,00%	100,00%		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.200.000	131,198,100		76,094,346	45.140.500	29.676.500	33.944.000	126,366,300		75,772,300			99,25%	81.47%		99,58%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7,500,000	3.292.700	2,580,100	2.575.600	2.596.400		7,500,000	3.288.800	2,548,000				100.00%	99,88%	98,76%		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		13,242,400	3.282.900	2,726,100	1.149.000	2.717.000		12,563,400	3.224.400	2,591,000				94.87%	98,22%	95,04%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		21,159,600	20.542.200	18,375,000	18.374.400	10.109.400		21,159,600	17.770.200	18,375,000			#DIV/0!	100.00%	86,51%	100,00%		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		10,803,600	8.506.000	9,745,400	3.644.400	2.652.400		10,803,600	5.773.200	9,745,400				100.00%	67,87%	100,00%		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1,332,000	1.332.000	1,221,000	1.332.000	1.332.000		1,142,900	1.200.000	1,140,000				85.80%	90,09%	93,37%		
Penyediaan Bahan/Material		36,600,500	21.617.800	14,043,066	8.195.000	6.555.300		32,811,800	18.527.900	14,042,900				89.65%	85,71%	100,00%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.200.000	40,560,000	32.330.000	26,778,680	9.620.100	3.589.000	33.944.000	40,385,000	31.795.000	26,705,000			99,25%	99.57%	98,35%	99,72%		
Penatausahaan Arsip Dinamis				625.000	250.000	125.000				Rp625,00						100,00%		
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20,984,000	251.182.500		12.771.900			20,366,000	250.360.000					97.05%	99,67%			
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	58.180.400	56,772,004		88,005,328			57.566.124	56,048,251		87,919,489			98,94%	98.30%		99,90%		

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.359.600				88.979.550	85.450.300	10.358.600						99,99%					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.791.800	21,100,000	25.280.700	27,599,728	27.599.550	23.854.300	23.197.340	20,393,923	22235484	27,542,977			97,50%	97%	87,95%	99,79%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.029.000	35,672,004	63.116.372	60,405,600	61.380.000	61.596.000	24.010.184	35,654,328	61.264.464	60,376,512			99,92%	99.95%	97,07%	99,95%		
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	53.865.200	85,680,600		98,870,000	71.795.000	68.588.000	51.958.592	82,199,100		98,329,811			96,46%	97,99%		99,45%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						34.880.000												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.124.000	43,329,000	53.752.900	74,380,000	59.300.000	15.800.000	38.233.992	39,857,500	43.876.380	73,891,811			95,29%	91,99%	81,63%	99,34%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		15,112,000	15.112.000	17,200,000	6.410.000	9.980.000		15,112,000	11.460.000	17,200,000				100%	75,83%	99,01%		
Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.884.200	25,929,600	15.768.000	4,850,000	2.425.000	4.268.000	8.878.600	25,919,600	15.768.000	4,802,000			99,94%	100%	100,00%	99,84%		
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.857.000	1,310,000	2.620.000	2,440,000	3.660.000	3.660.000	4.846.000	1,310,000	2.600.000	2,436,000			99,77%	100.00%	99,24%	99,84%		
Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	168.020.800	64,787,036		35,930,000	20.902.000	23.315.000	151.087.792	63,774,626		35,930,000			89,92%	99.36%		100,00%		
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	150.461.000	46,739,500		35,930,000	20.902.000	23.315.000	133.537.400	45,733,250		35,930,000			88,75%	98,77%		100,00%		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		40,567,200	42.749.700	30,000,000	17.665.000	9.795.000		39,560,950	42.749.700	30,000,000				97.52%	100,00%	100,00%		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	150.461.000	6,172,300	6.362.000	5,930,000	3.237.000	13.520.000	133.537.400	6,172,300	6.352.000	5,930,000			88,75%	100%	99,84%	99,98%		

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	17.559.800	18,047,536			57.158.900	37.207.600	17.550.392	18,041,376					99,95%	99,97%				
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.559.800	18,047,536	3.600.000		57.158.900	37.207.600	17.550.392	18,041,376	3.600.000				99,95%	99,97%	100,00%			
Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.893.000	76,035,000		176,203,200	42.991.300	27.601.300	2.893.000	74,735,000		176,171,200			100,00%	98,29%		99,98%		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					14.167.600	9.606.300												
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.893.000	76,035,000		176,203,200	42.991.300	27.601.300	2.893.000	74,735,000		176,171,200			100,00%	98,29%		99,98%		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.893.000	76,035,000	62.264.000	176,203,200	42.991.300	27.601.300	2.893.000	74,735,000	49.437.000	176,171,200			100,00%	98,29%	79,40%	99,98%		
Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	31.885.200	54,588,000		13,505,000	6.437.000	4.006.000	31.875.000	54,588,000		13,505,000			99,97%	100%		100,00%		
Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	31.885.200	54,588,000		13,505,000	6.437.000	4.006.000	31.875.000	54,588,000		13,505,000			99,97%	100%		100,00%		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indoesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	31.885.200	54,588,000	23.292.000	13,505,000	6.437.000	4.006.000	31.875.000	54,588,000	21.497.000	13,505,000			99,97%	100%	92,29%	100,00%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				59,451,400	37.773.400	31.597.100				59,451,400						100,00%		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				59,451,400	37.773.400	31.597.100				59,451,400						100,00%		

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Pundang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Poemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Rebulik Indonesia				39,001,400	21.095.400	12.057.100				39,001,400						100,00%		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			23.480.000	20,450,000	16.678.000	19.540.000			19.275.000	20,450,000			#DIV/0!		82,09%	100,00%		
Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	198.256.200	141,183,800		42,625,000	18.836.000	27.777.000	24.373.600	14,524,200		35,525,000			12,29%	99,73%	#DIV/0!	83,34%		
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	198.256.200	141,183,800		42,625,000	18.836.000	27.777.000	188.054.200	132,039,100		35,525,000			94,85%	99,73%		83,34%		
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						620.000												
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		14,901,600	11.400.000	7,500,000	2.975.000	620.000		14,861,600	10.800.000	7,500,000				99,73%	94,74%	100,00%		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						8.251.000												
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		103,516,000	70.781.200	32,750,000	14.986.000	2.850.000		94,411,300	64.378.000	25,650,000				91,20%	90,95%	78,32%		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						13.960.000												
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						1.166.000												
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		8,242,000	1.440.000	2,375,000	875.000	310.000		8,242,000	610.000	2,375,000				100%	42,36%	100,00%		

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		14,524,200						14,524,200						100%				
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24.373.600						24.373.600						100,00%					
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.663.200						11.663.200						100,00%					
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	162.219.400						152.017.400						93,71%					
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	162.219.400						152.017.400						93,71%					

Secara umum, anggaran dalam program yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo terealisasi baik. Selama kurun waktu lima tahun, melihat dari rasio antara realisasi dan anggaran dapat dilihat bahwa keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Gambaran potensi dan permasalahan-permasalahan pendanaan pelayanan yang ditunjukkan dengan rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya. Untuk realisasi anggaran Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo selalu dilakukan upaya perbaikan, dengan optimalisasi pengendalian kegiatan dan perencanaan operasional pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.

Dari tabel 2.4 diatas serta narasi yang telah disampaikan kemudian kita lihat evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun kebelakang yaitu dari Tahun 2020 hingga 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	30,00	-	-	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	86,75	81,43	81,67	82,33	90,81	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	86,75	81,43	81,67	82,33	90,81	
3	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						
4	IUP	-	-	-	-	-	
5	SPM	-	-	-	-	-	
6	IKK outcome Permendagri 18 2020	-	-	-	-	-	
7	Mandatory Lain	-	-	-	-	-	

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Bagelen.Tantangan merupakan hambatan, kesulitan atau situasi rumit yang membutuhkan upaya untuk diatasi, yang dapat mendorong perkembangan organisasi. Berikut adalah beberapa tantangan yang ada di Kecamatan Bagelen, yaitu :

1. Tuntutan masyarakat terhadap peran kecamatan masih cukup tinggi, terutama berkaitan dengan pelayanan publik yang dapat diselenggarakan oleh kecamatan;
2. Terbatasnya Personil Kecamatan Bagelen, sehingga terjadi rangkap jabatan, hal ini mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat;

3. Beberapa wilayah Kecamatan Bagelen rawan bencana, hampir setiap tahun pada musim hujan terjadi bencana banjir dan kekeringan di musim kemarau;
4. Kecamatan Bagelen merupakan Jalur lintas provinsi, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulonprogo;

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah/birokrasi pada tingkatan kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat,yaitu:

1 Suasana kerja yang kondusif, melalui hubugan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis, sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas individual maupun kelompok (team work);
2. Potensi perkembangan Ekonomi karena berbatasan langsung dengan Bandara Yogyakarta International Airport;
4 Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan;
5 Terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif baik pertanian, pariwisata maupun UMKM.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, kecamatan sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai unit pelayanan terdepan, kecamatan berfungsi sebagai simpul koordinasi pemerintahan sekaligus pusat pelayanan administrasi bagi masyarakat.

Kelompok sasaran layanan kecamatan pada periode perencanaan strategis ini meliputi:

1. Masyarakat umum
   Seluruh warga yang membutuhkan pelayanan administrasi pemerintahan, seperti kependudukan, perizinan tertentu, dan layanan sosial kemasyarakatan.
2. Pemerintahan desa/kelurahan
   Aparat desa/kelurahan sebagai mitra utama kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok rentan dan khusus
   Masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, dan anak-anak yang membutuhkan layanan inklusif dan berkeadilan.
4. Pelaku usaha dan dunia kerja
   Pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pelaku usaha lokal yang memerlukan fasilitasi, pendampingan, maupun kemudahan akses layanan perizinan dan pemberdayaan ekonomi.
5. Lembaga kemasyarakatan
   Organisasi sosial, tokoh masyarakat, dan lembaga adat yang menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong partisipasi pembangunan.

Dengan identifikasi kelompok sasaran tersebut, kecamatan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Pemetaan sasaran layanan ini juga menjadi dasar bagi penyusunan program dan kegiatan kecamatan dalam RENSTRA, sehingga setiap kebijakan yang dilaksanakan dapat tepat guna, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kecamatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan sistem kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses, yang seharusnya difokuskan pada penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Purworejo sampai dengan Kecamatan beserta Standar Operasional Pelaksanaan, yang bersifat inter organisasi maupun atas organisasi.

Tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan aparatur yang berkualitas sebagai pelayanan publik yang memiliki kualitas, profesionalisme, serta akuntabilitas kinerja yang mumpuni, juga peningkatan kompentensi aparatur sesuai dengan formasi jabatannya. Penguatan kelembagaan yang efektif dan efisien mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan pemerintah kabupaten menjadi salah satu kunci keberhasilan tata kelola kelembagaan yang baik.

Adanya perkembangan jaman bergerak secara dinamis, juga adanya tantangan ekonomi global, diperlukan sistem birokkrasi dan dan kelembagaan yang secara cepat mampu menyesuaikan dengan keadaan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan sistem elektronik

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo, Isu strategis yang akan diselesaikan dengan program pembangunan Kecamatan Bagelen 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Isu Strategis Kecamatan Bagelen

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif
	Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah			Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia		
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan		Cyber insecurity			
	Pelayanan publik prima belum merata		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			
	Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif					

Dari tabel diatas bias disimpulkan bahwa Kecamatan Bagelen menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan. Dari sisi pemerintahan, meskipun potensi aparatur yang kompeten sudah dimiliki, namun akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal. Hal ini sejalan dengan permasalahan akuntabilitas keuangan yang belum sepenuhnya disertai dengan kemandirian keuangan daerah, sehingga transformasi tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan yang mendesak.

Selain itu, pelayanan publik di Kecamatan Bagelen masih menghadapi tantangan, di antaranya transformasi digital yang belum sepenuhnya terwujud dan pelayanan prima yang belum merata. Kondisi ini menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif dan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara lebih maksimal.

Dari sisi ketentraman dan ketertiban masyarakat, stabilitas lingkungan sosial belum sepenuhnya kondusif. Isu misinformasi, disinformasi, hingga ancaman *cyber insecurity* juga berpotensi mengganggu stabilitas dan menurunkan kualitas pelayanan publik maupun pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang menekankan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, serta kolaboratif, sekaligus memperkuat stabilitas ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.1.1 Visi

Visi adalah gambaran tentang kondisi atau tujuan ideal yang ingin dicapai di masa depan, yang berfungsi sebagai arah dan panduan dalam perencanaan serta pengambilan keputusan di pemerintahan. Berdasarkan perkembangan dan kondisi pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Purworejo 5 (lima) tahun yang akan datang, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada dalam menciptakan Kabupaten Purworejo sebagaimana yang dicita-citakan.Rumusan visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

"Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
(PURWOREJO BERSERI)"

3.1.2 Misi

Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Rumusan menjadi kerangka bagian tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh guna mencapai visi pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan visi "Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)" ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif,dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera.
2. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
4. Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bagelen Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi Perangkat Daerah. Tujuan juga merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Pernyataan tujuan strategis yang ingin dicapai Kecamatan Bagelen dalam jangka waktu 5 tahun kedepan sesuai dengan tujuan jangka menengah Kabupaten Purworejo dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah ” Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan. Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan, Pernyataan sasaran strategis yang ingin dicapai Kecamatan Bagelen pada Tahun 2025-2029 adalah: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus sinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta menjabarkan target – target sasaran pokok pembangunan nasional ke dalam kontribusi Kabupaten Purworejo dalam pencapaian target–target nasional tersebut .

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bagelen

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	90,83	90,86	90,90	90,92	90,94	90,96	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	90,83	90,86	90,90	90,92	90,94	90,96	

3.3 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Bagelen adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan akhir RPJMD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Bagelen menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Bagelen mencapai tujuan, sasaran jangka menengah , dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi . Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bagelen

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo dapat dijabarkan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Bagelen

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat	Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat	Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat
Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bagelen dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra. Berikut kami sajikan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bagelen

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bagelen

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN BAGELEN	KET.
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan RPJMD 2026	Arah Kebijakan RENSTRA 2026	
		Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2027	Arah Kebijakan RENSTRA 2027 integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan	

			Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2028	Arah Kebijakan RENSTRA 2028 Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan	

			pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2029 Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/	

			kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2030	Arah Kebijakan RENSTRA 2030 Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa /kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/	

			kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa /kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program. Kegiatan ,dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.

Program-program Kecamatan Bagelen adalah sebagai berikut:

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari beberapa program diatas kemudian di jabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana ada pada tabel dibawah ini

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bagelen

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
			Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	

					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	

Dari gambar pada tabel diatas jelas telah dijabarkan tentang Program.Kegiatan dan Sub Kegiatam yang ada pada Pemerintah Kecamatan Bagelen termasuk didalamnya ada tujuan , sasaran, outcome , output serta indikator.

Outcome adalah hasil akhir, akibat, atau manfaat nyata yang diperoleh dari suatu proses atau aktivitas, yang menunjukkan dampak atau nilai tambah aktual bagi penerima manfaat atau kelompok sasaran. Output adalah hasil akhir atau keluaran dari suatu proses, yang bisa berupa barang, jasa, data, atau informasi. Sedangkan Indikator adalah petunjuk, alat ukur, atau parameter yang digunakan untuk memberikan keterangan mengenai suatu kondisi, fakta, atau pencapaian tujuan, serta dapat memudahkan evaluasi dan pengukuran terhadap suatu program/kegiatan.

Untuk Rencana lima Tahun kedepan berikut disajikan data Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan yaitu ada pada Tabel 4.2 berikut

Tabel 4.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	90,81	90,86		90,9		90,92		90,94		90,96		90,96			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
7.01.00	KECAMATAN						2.283.465.235		2.306.300.000		2.164.918.000		2.164.918.000		2.164.918.000				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	2.283.465.235	100	2.306.300.000	100	2.164.918.000	100	2.164.918.000	100	2.164.918.000	100	Sekretariat	Kecamatan Bagelen	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	41	41	4.875.000	45	9.862.500	45	9.917.500	45	9.978.000	45	10.044.550	221			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	15	1.750.000	22	4.812.500	22	4.812.500	22	4.812.500	22	4.812.500	103			
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	16	625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	500.000	22	550.000	22	605.000	22	665.500	22	732.050	94			
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000	4			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	33	33	1.907.832.046	45	1.927.699.281	45	1.859.043.656	45	1.859.043.656	45	1.859.043.656	213			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	22	22	1.905.832.046	22	1.925.499.281	22	1.856.843.656	22	1.856.843.656	22	1.856.843.656	22			
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	6	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	26	750.000	44	2.200.000	44	2.200.000	44	2.200.000	44	2.200.000	202			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0		11	5.550.000	11	6.105.000	11	6.715.500	11	7.387.050	44			
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	11	5.550.000	11	6.105.000	11	6.715.500	11	7.387.050	44			
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	16	1.500.000	16	1.650.000	16	1.815.000	16	1.995.500	16	2.196.150	80			
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	16	1.500.000	16	1.650.000	16	1.815.000	16	1.995.500	16	2.196.150	80			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	5.655.000	1	11.770.500	1	11.770.500	1	11.770.500	1	11.770.500	5			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	17	5.550.000	17	5.550.000	17	5.550.000	17	5.550.000	68			
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	5.655.000	1	6.220.500	1	6.220.500	1	6.220.500	1	6.220.500	5			
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada tahun tertentu	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	101.938.189	9	109.445.219	9	91.959.624	9	92.773.276	9	93.668.294	44			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	3.801.389	2	3.801.389	2	3.141.644	2	3.455.808	2	3.801.389	10			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan da Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	9.171.000	2	8.838.810	2	2.626.910	2	2.889.601	2	3.178.561	10			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	17.740.800	12	17.740.800	12	17.740.800	12	17.740.800	12	17.740.800	60			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	1	10.602.800	1	13.630.800	1	8.363.080	1	8.363.080	1	8.363.080	5			
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1.332.000	1	1.465.200	1	1.611.720	1	1.772.892	1	1.950.181	5			
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan bahan/material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	5	15.575.200	6	18.233.820	6	18.233.820	6	18.233.820	6	18.233.820	30			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	2	4.875.000	2	4.875.000	2	4.875.000	2	4.875.000	8			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1	41.464.000	1	39.610.400	1	34.610.400	1	34.610.400	1	34.610.400	5			
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	1	1.250.000	1	1.250.000	1	756.250	1	831.875	1	915.063	5			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	0	5	61.971.000	5	68.168.100	5	25.200.000	5	25.200.000	5	25.200.000	25			
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	5	61.971.000	5	68.168.100	5	25.200.000	5	25.200.000	5	25.200.000	25			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	2	89.294.000	2	98.223.400	2	101.270.180	2	101.270.180	2	101.270.180	10			
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1	27.698.000	1	30.467.800	1	33.514.580	1	33.514.580	1	33.514.580	5			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1	61.596.000	1	67.755.600	1	67.755.600	1	67.755.600	1	67.755.600	5			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	4	110.400.000	4	73.980.000	4	57.836.540	4	56.170.388	4	54.337.620	20			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11	74.380.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	15			
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	24	17.200.000	24	17.200.000	24	10.136.540	24	8.470.388	24	6.637.620	120			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	14.550.000	1	14.550.000	1	8.550.000	1	8.550.000	1	8.550.000	5			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	7	4.270.000	10	7.300.000	10	4.270.000	10	4.270.000	10	4.270.000	47			
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	90,81	90,86		90,9		90,92		90,94		90,96		90,96			
7.01.00	KECAMATAN						123.902.700		253.498.000		123.903.000		125.859.000		127.850.000				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	23.315.000	100	35.895.000	100	23.315.000	100	23.683.000	100	24.058.000	100	Seksi Pembangunan	Kecamatan Bagelen	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	2	23.315.000	3	35.895.000	3	21.315.000	3	21.683.000	3	22.058.000	14			
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	3	1	11.560.000	1	12.716.000	1	11.560.000	1	11.560.000	1	11.560.000	5			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	11.755.000	1	21.179.000	1	9.755.000	1	10.123.000	1	10.498.000	5			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen	0	0		0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0			
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4			
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen	0	0		0		0		0		0		0			
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen	0	0		0		0		0		0		0			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100	100	37.207.600	100	117.263.000	100	37.208.000	100	37.795.000	100	38.393.000	100	Seksi Pemberdayaan	Kecamatan Bagelen	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen	1	4	37.207.600	4	117.263.000	4	37.208.000	4	37.795.000	4	38.393.000	20			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	0	3	14.901.600	3	20.391.760	3	14.902.000	3	14.902.000	3	14.902.000	15			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	1	22.306.000	1	96.871.240	1	22.306.000	1	22.893.000	1	23.491.000	5			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	4.006.000	100	12.970.000	100	4.006.000	100	4.069.000	100	4.134.000	100	Seksi TRANTIBUM	Kecamatan Bagelen	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	4	1	4.006.000	1	12.970.000	1	4.006.000	1	4.069.000	1	4.134.000	5			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	1	4.006.000	1	12.970.000	1	4.006.000	1	4.069.000	1	4.134.000	5			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Mayarakat	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	0	0		0		0		0		0		0			
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	31.597.100	100	53.585.000	100	31.597.000	100	32.096.000	100	32.603.000	100	Seksi TRANTIBUM	Kecamatan Bagelen	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	6	2	31.597.100	2	53.585.000	2	31.597.000	2	32.096.000	2	32.603.000	10			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	300	135	22.727.800	135	35.000.580	135	21.154.138	135	21.268.852	135	20.693.137	675			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	1	8.869.300	1	18.584.420	1	10.442.862	1	10.827.148	1	11.909.863	5			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	27.777.000	100	33.785.000	100	27.777.000	100	28.216.000	100	28.662.000	100	Seksi Pemerintahan Desa	Kecamatan Bagelen	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	15	7	27.777.000	7	33.785.000	7	27.777.000	7	28.216.000	7	28.662.000	35			
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	0	1	1.345.000	1	2.479.500	1	1.345.000	1	1.345.000	1	1.345.000	5			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	1	2.500.000	1	7.750.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	5			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	0	1	1.320.000	1	2.682.300	1	1.320.000	1	1.320.000	1	1.766.000	5			
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	12	1	13.910.000	1	10.301.000	1	10.910.000	1	10.910.000	1	10.910.000	5			
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	1	4.857.833	1	5.343.615	1	4.857.833	1	5.296.833	1	5.296.833	5			
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	0	1	2.656.667	1	2.022.334	1	2.656.667	1	2.656.667	1	2.656.667	5			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	1	1.187.500	1	3.206.250	1	1.187.500	1	1.187.500	1	1.187.500	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Jumlah							2.407.387.935		2.559.798.000		2.288.821.000		2.290.777.000		2.292.768.000				

Dari Program dan Kegiatan serta pendanaan 5 (lima) tahun kedepan berikut kami sampaikan pula Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Monitoring Pembangunan	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas)	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi intensifikasi PBB	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		

			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi keagamaan	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka	
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Forkopimcam	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP)	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades dan Sekdes	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pilkades	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	

			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi	
			Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Penyusunan Masterplan Desa, Penyusunan Website Desa	

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah provinsi, kecamatan berperan aktif melaksanakan program delegasi provinsi melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Program-program tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Perempuan
   Kecamatan melaksanakan kegiatan fasilitasi pemberdayaan perempuan yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan peran aktif perempuan dalam pembangunan. Program ini mendukung agenda provinsi dalam mewujudkan kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan

2. Perlindungan Anak
   Melalui kegiatan fasilitasi perlindungan anak, kecamatan mendukung upaya provinsi dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan melindungi hak-hak anak. Hal ini mencakup pencegahan kekerasan, pemenuhan hak dasar, serta peningkatan kesejahteraan anak.

3. Penurunan Stunting
   Kecamatan berperan dalam fasilitasi penurunan stunting melalui koordinasi lintas sektor di tingkat desa/kelurahan. Program ini merupakan wujud dukungan terhadap target provinsi dalam menurunkan angka stunting secara signifikan pada periode 2026–2030.

4. Penanggulangan Kemiskinan
   Kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan memperkuat koordinasi program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses layanan dasar. Upaya ini selaras dengan prioritas provinsi dalam mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan
5. Pendidikan
   Dukungan kecamatan dalam fasilitasi pendidikan diarahkan pada penguatan akses dan mutu layanan pendidikan, khususnya pada jenjang dasar. Program ini menjadi bagian integral dari strategi provinsi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. IKU dirumuskan secara terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan strategis, sehingga setiap capaian dapat dievaluasi secara obyektif. Melalui IKU, pencapaian sasaran pembangunan dapat dilihat secara lebih jelas karena indikator yang digunakan menggambarkan hasil nyata (outcome) yang ingin dicapai, bukan hanya keluaran (output) semata.

Dalam prosesnya, penetapan IKU memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, kebijakan nasional maupun provinsi, serta kebutuhan riil masyarakat. Target yang ditetapkan pada setiap IKU menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merencanakan program dan kegiatan, sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja. Dengan demikian, IKU tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur keberhasilan, tetapi juga sebagai instrumen pengendali agar pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang ditetapkan.

Melalui pendekatan ini, diharapkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilakukan secara konsisten, terarah, dan akuntabel. Selain itu, keberadaan IKU juga memperkuat transparansi serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bagelen

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Tujuan dan Sasaran PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	90,83	90,86	90,90	90,92	90,94	90,96	Tujuan dan Sasaran PD

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bagelen yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bagelen Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Bagelen, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bagelen setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Rencana Strategis Kecamatan Bagelen sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bagelen setiap tahun.
b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c) Camat Bagelen wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Bagelen dilakukan setiap tahun selama periode renstra.

b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Kecamatan Kaligesing disusun mengacu pada Rankhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah kabupaten.

Berdasarkan pasal 272 ayat (1) Undang undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rankhir RPJMD. Sesuai pasal 272 ayat (2), Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Kaligesing disusun juga memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor : 87 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo.

Renstra Kecamatan Kaligesing disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rankhir Renstra Kecamatan Kaligesing dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Renstra, hingga penetapan Renstra. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 1.1

Gambar 1.1

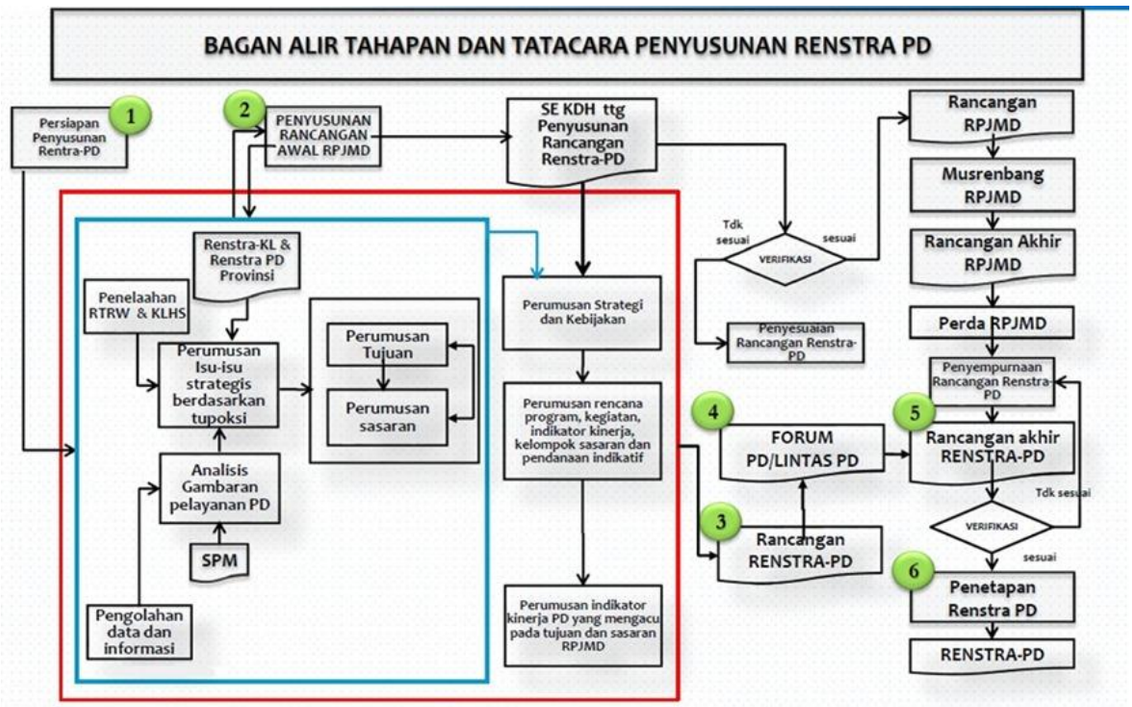

Dalam prosesnya, penyusunan Renstra Kecamatan Kaligesing pada dasarnya melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029.

1. Hubungan RPJMD dengan Renstra

   RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih pasangan Yuli Hastuti, SH dan Dion Agasi,S.I.Kom, MM. periode 2025-2029 yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia.

   RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kaligesing karena Renstra merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

2. Hubungan Renstra dengan RKPD

   Pelaksanaan Renstra 2025-2029, setiap tahun dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagi suatu dokumen perencanaan

tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun.RKPD sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafont Anggaran Sementara.

3. Hubungan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah

Setelah Peraturan Bupati Purworejo tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ditetapkan, Perangkat Daerah segera menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk tahun berkenaan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran dan Belanja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan, yang sebelumnya didahului dengan penetapan KUA dan PPAS.

1.2 LANDASAN HUKUM

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);

9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);

11 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;

13 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13 Seri E Nomor 7);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029;

15 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kaligesing, penguatan peran serta *stakeholders*

dalam pelaksanaan rencana kerja dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

1.3.2 Tujuan

Meningkatkan kinerja Kecamatan Kaligesing dalam melaksanakan tugas pokokdan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung Program Bupati Purworejo.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Kaligesing Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang,landasan hukum, maksud dan tujuan,hubungan Renstra Kecamatan Kaligesingdengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEANGKAT DAERAH

Berisi tentang gambaran pelaynan perangkat derah yang menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah, serta Kelompok sasaran layanan. Dalam bab ini juga diuraikan tentang permasalahan dan isu stratetis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEG DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi telaah Vs dan Misi Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih, tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, strategi dan arah kebijakan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Terdiri dari program kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam perangkat daerah, dukungan terhadap nasional, porvinsi dan kegiatan unggulan daerah serta penentuan indikator dan target knerja penyelenggaraan bidan urusan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kaligesing merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Purworejo yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, khususnya dalam urusan pemerintahan umum, pelayanan administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian pembangunan, serta fungsi-fungsi koordinasi lintas sektor.

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2021–2024), Kecamatan Kaligesing menghadapi dinamika pembangunan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah pegunungan, pandemi COVID-19, perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Berikut ini adalah gambaran capaian IKU Kecamatan Kaligesing:

Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Keterangan
2020	81,25	Baik
2021	79,50	Baik
2022	82,81	Baik
2023	82,75	Baik
2024	88,61	Sangat Baik

Selama periode 2021–2024, Kecamatan Kaligesing berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik yang tercermin dari naiknya Indeks Kepuasan Masyarakat dan efektivitas penyelesaian urusan pemerintahan. Digitalisasi layanan dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan, meskipun tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi faktor penghambat.

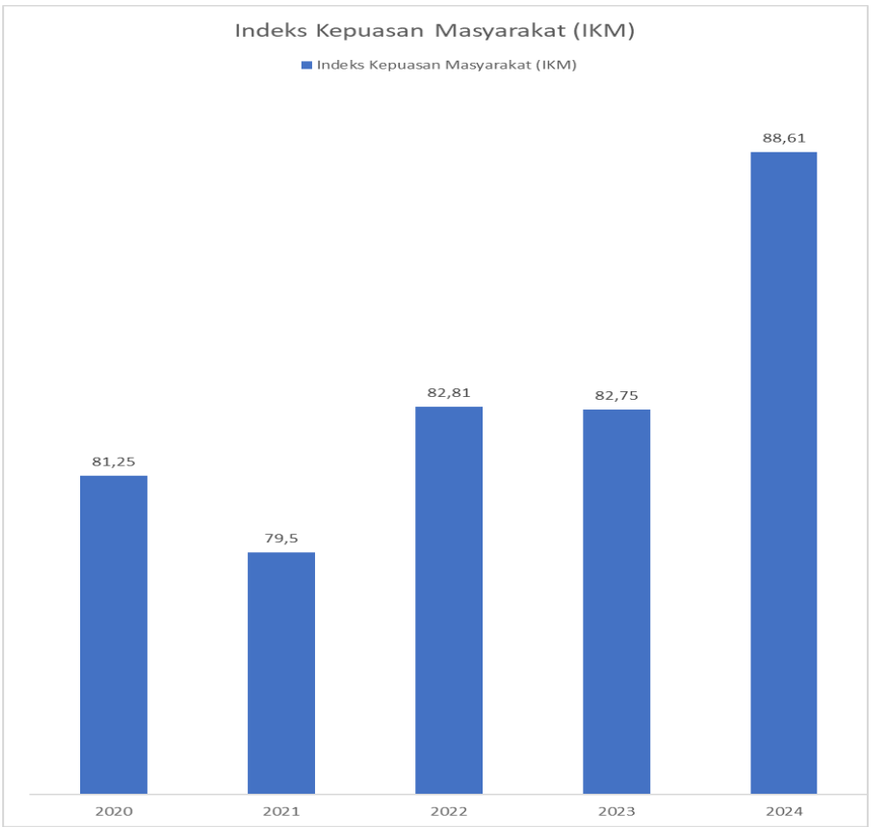

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sebagai Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Kecamatan Kaligesing memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan kepada kecamatan. Adapun secara terinci tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana di atur dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Camat Kaligesing sebagai pimpinan OPD Kecamatan Kaligesing adalah sebagai berikut :

a. Camat

Tugas pokok:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
10. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai dengan nomor 9 di atas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok:

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum, serta keuangan dan kepegawaian.

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum

Tugas Pokok dan Fungsi :

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan.

d. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Tugas Pokok dan Fungsi :

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidangkeuangan dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi, pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat serta organisasi dan tatalaksana, di lingkungan Kecamatan.

e. Seksi Tata Pemerintahan:

Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan pola maksimal dan minimal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, Desa dan/ atau Kelurahan dan kependudukan, yang meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
2. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
3. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
4. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
5. Menyiapkan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
6. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan:

Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan pola masksimal dan minimal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup, yang meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
2. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
3. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan

teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.

4. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
5. Menyiapkan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum:

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan pola maksimal dan pola minimal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, yang meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
2. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum.
3. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi danteknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
4. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang ketentraman dan ketertiban umum.
5. Menyiapkan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
6. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

h. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan pola minimal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita,kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat yang meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja

dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;

2. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
3. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
4. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
5. Menyiapkan bahan perizinan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat;
6. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo, susunan organisasi Kecamatan Kaligesing adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Adapun struktur organisasi Kecamatan Kaligesing adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.1 berikut ini :

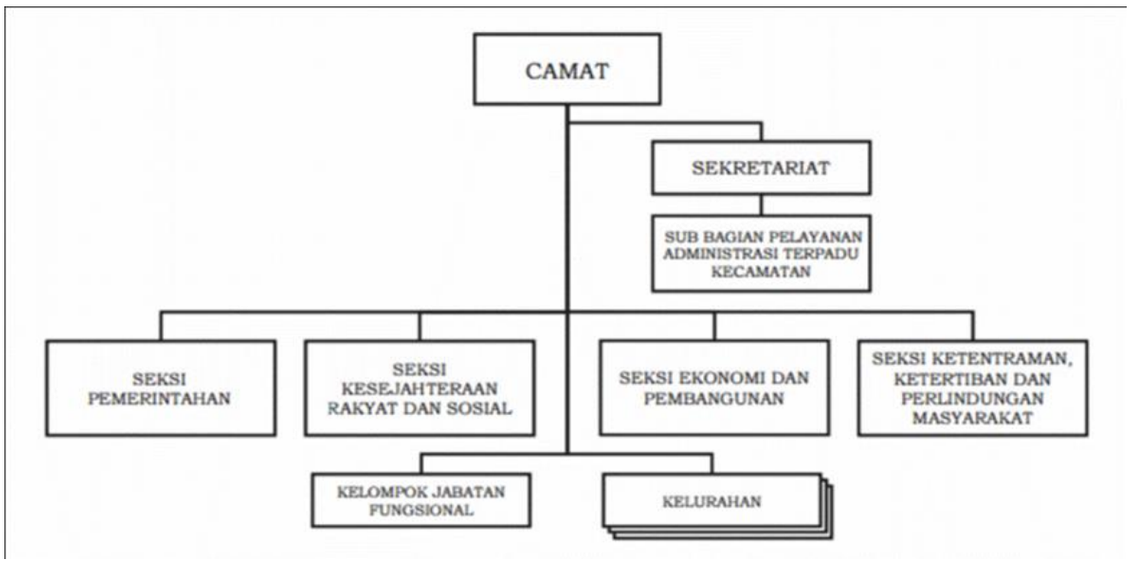

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Kecamatan Kaligesingkeadaan Bulan Agustus Tahun 2021saat ini berjumlah15 orang, yang terdiri dari :

-Golongan IV : 2 Orang
-Golongan III : 7 Orang
-Golongan II : 4 Orang
-Golongan I : - Orang
-PPPK : 2 orang

Menurut jenjang pendidikan terakhir, terdiri atas :

-Sarjana : 5 Orang
-D.IV : 0 Orang
-D.III : 4 Orang
-SLTA : 6 Orang
-SD : - Orang

Menurut Jenis Kelamin, terdiri atas :

- Laki-laki : 14 Orang
- Perempuan : 1 Orang

2.1.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Jumlah Aset berdasarkan saldo aset tetap per 31 Desember 2024 adalah Rp. 2.754.016.993,75 dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Aset

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah	30.508.000
2	Peralatan dan Mesin	779.655.065
3	Gedung dan Bangunan	1.933.231.028,75
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.622.900
5	Aset Tetap Lainnya	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
	Jumlah	2.754.016.993,75

Tabel 2.2
Aset

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Station Wagon	1
2	Sepeda Motor	7
3	Lemari Besi/Metal	7
4	Lemari Kayu	6
5	Rak Besi	7
6	Rak Kayu	1
7	Filing Cabinet Besi	10
8	Brandkas	0
9	Kardex Besi	1
10	Papan Visual/Papan Nama	2
11	White Board	1
12	Display	1
13	Papan Nama Instansi	1
14	Alat Kantor Lainnya	2
15	Meja Kerja Besi/Meta	2
16	Sice	3
17	Meja Rapat	2
18	Tempat Tidur Kayu	1
19	Meja Resepsionis	1
20	Meja 1/2 Biro	53
21	Kasur/Spring Bed	1
22	Kursi Fiber Glas/Plastik	17
23	Kursi Rapat	50
24	Kursi Biasa	39
25	Bangku Tunggu	12
26	Kursi Lipat	0
27	Lemari Es	1
28	A.C. Window	0
29	A.C. SpliT	0
30	A.C. Split	6
31	Kipas Angin	2
32	Televisi	2
33	Amplifier	1
34	Loudspeaker	2

35	Dispenser	0
36	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4
37	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8
39	Kursi Kerja Pegawai Non	1
40	Camera Electronic	1
41	Layar Film/Projector	2
42	Telephone (PABX)	0
43	Pesawat Telephone	0
44	P.C Unit	2
45	Lap Top	8
46	Note Book	-
47	Printer	6

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Kaligesing berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Kaligesing tahun 2016-2021 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.2 (TC.23) berikut:

Tabel TC-23
Pencapaian Kinerja Kecamatan Kaligesing
Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	-	-	79	88	88,3	88,5	89	90	79,5	82,81	86,8	88,61	89,71	-	1,006	0,941	0,983	1,001	1,008	-
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				79	88	88,3	88,5	89	90	79,5	82,81	86,8	88,61	89,71	-	1,006	0,941	0,983	1,001	1,008	-

Kinerja pelayanan PD Kecamatan Kaligesing yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Kinerja pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini sangat berguna bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.Secara umum gambaran potensi dan permasalahan pelayanan Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya tahun 2021-2025, yaitu dari hasil pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi pendanaan sebagaimana tersebut pada kedua tabel di atas terlihat bahwa peningkatan kualitas pelayanan masih memerlukan perhatian untuk ditingkatkan, khususnya untuk pengadaan pegawai dan pengembangan kompetensi (teknis, fungsional maupun manajerial) ASN. Selain itu dukungan sarana prasarana IT ke depan sangat dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kualitas pelayanan yang lebih baik.

Adapun faktor penghambat capaian kinerja Renstra Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025 adalah :

1. Jumlah pengadaan pegawai tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang pensiun, sehingga jumlah peggawai semakin berkurang dari tahun ke tahun
2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang mampu terutama dalam pemanfaatan IT, dapat dioptimalkan dengan diadakannya pelatihan IT / penggunaan komputer dan penambahan jumlah staf yang mampu dalam pengelolaan IT.
3. Pada perencanaan sudah sesuai dengan SSH dari Bupati, adapun harga barang dipasar tidak sama SSH dari Bupati. Untuk pembelian barang dengan spesifikasi dan merk yang sama menyesuaikan harga pasar.
4. Kebutuhan administrasi perkantoran terutama jasa komunikasi dan listrik realisasinya fluktuatif, kadang-kadang melebihi anggaran, dan terkadang sisa berlebih.

Sedangkan faktor pendorong capaian kinerja Renstra Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025 antara lain :

1. Adanya koordinasi yang baik antara Tim Anggaran Kecamatan dengan PPTK, pelaksana dan Pemerintah Desa sehingga anggaran kegiatan sesuai dengan yang direncanakan
2. Komitmen pimpinan untuk memberikan kepastian pelayanan;
3. Sarana dan Prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja;

Dalam melaksanakan pelayanan periode Renstra 2021-2025, Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo menggunakan anggaran yang

sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo. Rincian pendanaan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut (T-C24) :

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Kaligesing

Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah					Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*		*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.665.890.974	1.707.950.029	1.597.946.917	1.589.965.492	2.238.573.774		1.462.471.833	1.483.881.351	1.465.528.892	1.501.714.184			0,88	0,87	0,92	0,94	
Belanja Pegawai	1.665.890.974	1.707.950.029	1.597.946.917	1.589.965.492	2.238.573.774		1.462.471.833	1.483.881.351	1.465.528.892	1.501.714.184			0,88	0,87	0,92	0,94	
BELANJA LANGSUNG	184.168.640	184.168.640	558.407.120	845.242.845	956.257.603		184.168.640	537.067.021	443.719.690	693.417.017			1,00	2,92	0,79	0,82	
Belanja Langsung	184.168.640	1.205.563.402	558.407.120	845.242.845	956.257.603		184.168.640	537.067.021	443.719.690	693.417.017			1,00	0,45	0,79	0,82	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.630.470.200	2.957.328.234	1.908.642.497	327.002.100	2.806.384.677		2.421.747.031	1.661.141.584	1.928.730.059	1.808.690.659			0,92	0,56	1,01	5,53	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	90.600.000	77.992.488	79.932.936	33.168.500	40.148.000		90.180.400	35.564.500	15.724.100	33.110.100			1,00	0,46	0,20	1,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.122.960	158.941.500	111.976.400	33.831.000	180.935.300		28.446.620	111.851.900	105.072.400	33.831.000			0,94	0,70	0,94	1,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.599.000	32.783.400	36830000	13.373.000	33.348.800		33.449.600	36.825.000	14.148.400	13.336.000			1,00	1,12	0,38	1,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53800000	7.989.800	0	30.911.000	28.184.400		52774250	0	30.642.200	30.900.000			0,98	0,00	0,00	1,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	248.125.000	205.248.800	119.789.600	29.845.000	105.830.200		216.123.800	119.464.800	77.598.000	29.845.000			0,87	0,58	0,65	1,00	

Secara umum, anggaran dalam program yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo terealisasi baik. Selama kurun waktu lima tahun, melihat dari rasio antara realisasi dan anggaran dapat dilihat bahwa keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Gambaran potensi dan permasalahan-permasalahan pendanaan pelayanan yang ditunjukkan dengan rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya. Untuk realisasi anggaran Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo selalu dilakukan upaya perbaikan, dengan optimalisasi pengendalian kegiatan dan perencanaan operasional pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.

Berdasarkan data realisasi anggaran Renstra Kecamatan Kaligesing tahun 2021–2025, dapat dilihat bahwa rata-rata rasio antara realisasi dan pagu anggaran selalu berada di atas 95%. Secara umum, hal ini menunjukkan kinerja pengelolaan pendanaan yang baik dan disiplin. Namun, jika dilihat lebih rinci, terdapat variasi antar tahun dan antar sub kegiatan yang menunjukkan perbedaan kualitas pelaksanaan.

Pada tahun 2021, rasio realisasi anggaran untuk sebagian besar program berada pada kisaran 96%. Kondisi ini masih dapat dikategorikan baik, namun relatif lebih rendah dibanding tahun-tahun berikutnya. Hal ini disebabkan oleh masih adanya adaptasi mekanisme kerja pasca pandemi COVID-19, sehingga beberapa kegiatan seperti fasilitasi pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara penuh.

Pada tahun 2022 dan 2023, rasio realisasi meningkat dengan konsistensi di atas 96–97%. Kinerja pendanaan pada periode ini dapat dikatakan baik karena hampir seluruh program dapat dijalankan sesuai rencana, termasuk pelayanan administrasi umum kecamatan dan pelayanan kependudukan. Faktor pendorong utamanya adalah meningkatnya koordinasi lintas perangkat daerah

serta semakin lancarnya mekanisme penyaluran dan pencairan anggaran.

Pada tahun 2024, rasio realisasi kembali menunjukkan tren sangat baik dengan capaian rata-rata di atas 97,5%. Capaian ini menandakan bahwa pengelolaan pendanaan semakin efektif, ditunjukkan oleh semakin sedikitnya selisih antara pagu dan realisasi. Hal ini ditopang oleh optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang berbasis kinerja, serta adanya inovasi pelayanan yang memudahkan pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan untuk tahun 2025, berdasarkan proyeksi, rasio realisasi diperkirakan tetap tinggi, sekitar 97–98%. Hal ini menunjukkan tren konsistensi pengelolaan pendanaan yang semakin matang, dengan tingkat efisiensi yang lebih terjaga.

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan						
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	79,5	82,81	82,75	88,61	
4	IUP						
5	SPM						
6	IKK outcome Permendagri 18 2020						
7	Mandatory Lain						

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Kaligesing, sebagai berikut:

A. Tantangan

Tidak mudah menyarikan tantangan yang ada terhadap birokrasi terutama pada jajaran kecamatan, namun beberapa hal dapat dijadikan pertimbangan sebagai tantangan, yaitu :

1. Tuntutan masyarakat terhadap peran kecamatan masih

cukup tinggi, terutama berkaitan dengan pelayanan publik yang dapat diselenggarakan oleh kecamatan;

2. Terbatasnya Personil Kecamatan Kaligesing, sehingga terjadi rangkap jabatan, hal ini mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
3. Beberapa wilayah Kecamatan Kaligesing rawan banjir, hampir setiap tahun pada musim hujan terjadi bencana banjir di beberapa titik desa;
4. Kecamatan Kaligesing merupakan Jalur lintas provinsi, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulonprogo;

B. Peluang

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah/birokrasi pada tingkatan kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani mbbasyarakat, yaitu:

1. Suasana kerja yang kondusif, melalui hubugan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis, sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas individual maupun kelompok (team work);
2. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;
3. Adanya kesempatan untuk megikuti berbagai pendidikan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kaligesing2021-2016 pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
4. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan;
5. Terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif baikpertanian, pariwisatamaupun UMKM.

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Kaligesing meliputi seluruh masyarakat yang berada di wilayah kecamatan, baik individu maupun

kelompok, serta pemangku kepentingan lainnya. Sasaran layanan ini mencakup:

1. Masyarakat umum, yang membutuhkan pelayanan administrasi pemerintahan, pelayanan kependudukan, serta layanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan.
2. Pemerintah desa, yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan dalam tata kelola pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan afirmatif dan akses yang lebih mudah dalam pelayanan publik.
4. Pelaku ekonomi lokal, seperti UMKM, petani, peternak, serta pelaku pariwisata yang menjadi bagian penting dari pengembangan potensi ekonomi Kecamatan Kaligesing.

1) Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kecamatan Kaligesing menjalin sinergi dengan berbagai perangkat daerah di Kabupaten Purworejo. Beberapa mitra yang berperan penting antara lain:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida), khususnya dalam perencanaan pembangunan serta sebagai bagian dari Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan.
2. Inspektorat Daerah, yang memberikan dukungan dalam pembinaan pengawasan internal dan pengendalian gratifikasi.
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terkait pelayanan perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat miskin, lansia, dan kelompok rentan.
4. Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pemerintahan Setda, dalam mendukung koordinasi pemerintahan desa serta pembangunan wilayah.

2) Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Kaligesing juga didukung oleh keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Purworejo yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik, khususnya dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya:

a. BUMD Perbankan Daerah (Bank Purworejo atau kerja sama dengan BPD DIY), yang membantu akses permodalan bagi UMKM dan pelaku usaha kecil di Kaligesing.
b. Bagian Perekonomian Setda, yang berperan dalam pembinaan BUMD dan mendorong sinergi program kerja untuk mendukung masyarakat di tingkat kecamatan.

3) Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kecamatan Kaligesing menjalin beberapa bentuk kerja sama, baik dengan pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat, antara lain:

a. Kerja sama antar kecamatan dan desa, khususnya dalam pengembangan potensi wisata alam, budaya, dan ekonomi kreatif yang banyak terdapat di wilayah perbukitan Kaligesing.
b. Kemitraan dengan pihak swasta/CSR, misalnya perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang diarahkan untuk pembangunan sarana prasarana masyarakat.
c. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat, dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, serta program sosial kemasyarakatan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan sistem kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses, yang seharusnya difokuskan pada penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Purworejo sampai dengan Kecamatan beserta Standar Operasional Pelaksanaan, yang bersifat inter organisasi maupun atas organisasi.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kaligesing lima tahun terakhir (2020–2024), rancangan awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025–2029, serta hasil penjaringan aspirasi masyarakat, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang bersifat dominan dalam penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah di Kecamatan Kaligesing, sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah dan kualitas aparatur di Kecamatan Kaligesing masih terbatas, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi serta kemampuan analisis kebijakan. Hal ini berdampak pada keterbatasan kapasitas pelayanan berbasis digital maupun inovasi pelayanan publik.
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan. Sebagian besar fasilitas pelayanan publik, termasuk infrastruktur pendukung di kantor kecamatan maupun pelayanan keliling di desa, belum sepenuhnya memadai. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan pelayanan ideal dengan fasilitas yang tersedia.
3. Kesenjangan Akses Pelayanan pada Kelompok Rentan. Layanan bagi masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di wilayah perbukitan Kaligesing masih menghadapi hambatan aksesibilitas. Kondisi geografis yang sulit dijangkau turut memperbesar kesenjangan ini.
4. Keterbatasan Pendanaan dan Efisiensi Anggaran. Rasio realisasi anggaran terhadap target masih menunjukkan fluktuasi. Beberapa program prioritas belum dapat dilaksanakan secara optimal akibat keterbatasan pendanaan maupun mekanisme

penganggaran yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan lapangan.

5. Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga yang Belum Optimal. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, koordinasi antara kecamatan, perangkat daerah kabupaten, pemerintah desa, maupun mitra lainnya belum sepenuhnya efektif. Hal ini mengakibatkan keterlambatan atau tumpang tindih dalam pelaksanaan pelayanan.
6. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi Layanan. Meskipun aspirasi masyarakat telah dijaring melalui musrenbang dan forum konsultasi publik, namun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan maupun penciptaan inovasi pelayanan masih rendah, sehingga potensi kolaborasi pelayanan belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Kecamatan Kaligesingadalah :

1. Adanya multi interprestasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Kades yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah belum sepenuhnya didukung dengan personil, pembiayaan dan prasarana.

2.2.2. Isu Strategis.

Berdasarkan hasil telaah terhadap lingkungan dinamis, terdapat sejumlah isu strategis yang berpotensi mempengaruhi pelayanan Kecamatan Kaligesing, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Isu Global
    a. Perkembangan teknologi digital yang menuntut percepatan transformasi pelayanan publik berbasis elektronik.
    b. Perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan, potensi bencana, dan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan.

c. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas global dalam tata kelola pemerintahan, termasuk implementasi prinsip good governance.

2. Isu Nasional (RPJMN 2025–2029 dan Renstra K/L)
   a. Penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
   b. Pengentasan kemiskinan ekstrem serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal.
   c. Peningkatan ketahanan sosial melalui layanan perlindungan disabilitas, lansia, dan kelompok rentan.
   d. Digitalisasi pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kecamatan untuk memperkuat efisiensi birokrasi.
3. Isu Regional/Daerah (Kabupaten Purworejo dan Kaligesing)
   a. Keterbatasan aksesibilitas layanan publik di wilayah perbukitan.
   b. Potensi besar sektor pariwisata berbasis alam dan budaya yang belum optimal dikembangkan.
   c. Kesenjangan kualitas SDM aparatur antar wilayah dalam memberikan pelayanan.
   d. Perlu penguatan sinergi lintas perangkat daerah dalam mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Tabel 2.1. Isu Strategis Perangkat Daerah

<table>
<tr><th rowspan="2">POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD</th><th rowspan="2">PERMASALAHAN PD</th><th rowspan="2">ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD</th><th colspan="3">ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD</th><th rowspan="2">ISU STRATEGIS PD</th></tr>
<tr><th>GLOBAL</th><th>NASIONAL</th><th>REGIONAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten</td><td>Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal</td><td rowspan="3">Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi</td><td>Misinformasi dan disinformasi</td><td>Transformasi tata kelola</td><td rowspan="3">Tata kelola pemerintahan yang dinamis</td><td rowspan="3">Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif</td></tr>
<tr><td></td><td>Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah</td><td></td><td rowspan="2">Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia</td></tr>
<tr><td>Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan</td><td>Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan</td><td>Cyber insecurity</td></tr>
</table>

	Pelayanan publik prima belum merata		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			
	Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Kecamatan Kaligesing sebagai perangkat daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan. Fungsi utama yang dijalankan meliputi: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan administrasi kependudukan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Visi Kabupaten Purworejo untuk periode 2025–2029 dirumuskan sebagai *"Purworejo Berseri",* yakni *“Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif”*

Dalam kaitannya dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo terpilih periode 2025–2029, Kecamatan Kaligesing berperan strategis sebagai garda terdepan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, inklusif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tugas dan fungsi kecamatan diarahkan untuk mendukung pencapaian misi pembangunan, antara lain melalui:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan penerapan standar pelayanan minimal, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas aparatur.
2. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi UMKM, pengembangan potensi wisata, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
3. Menguatkan pembangunan sosial dengan memperhatikan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin di wilayah perbukitan.
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kolaboratif dengan meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintah desa, BUMD, dan pihak swasta.
5. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum melalui

pembinaan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pencegahan potensi konflik sosial.

Dengan demikian, Kecamatan Kaligesing memiliki peran penting tidak hanya sebagai pelaksana urusan pemerintahan tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan di tingkat wilayah. Tugas dan fungsi tersebut selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, masyarakat yang sejahtera, serta pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Perangkat Daerah tingkat kecamatan, seperti Kecamatan Kaligesing, memainkan peran vital dalam mencapai visi "Purworejo Berseri". Berikut adalah keterkaitan antara tugas dan fungsi kecamatan dengan elemen visi tersebut:

1. Berdaya Saing

   Kecamatan Kaligesing berperan sebagai ujung tombak layanan administrasi, menyederhanakan prosedur, dan mempercepat pengurusan administrasi kependudukan. Ini sejalan dengan visi daya saing melalui pelayanan publik yang efisien dan responsif.

2. Sejahtera

   Fungsi pemberdayaan masyarakat dan pemberian layanan inklusif, terutama kepada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin, mendukung misi kesejahteraan yang inklusif dan merata.

3. Religius

   Menyediakan layanan yang adil dan menyentuh nilai-nilai keadilan sosial menjadi wajah konkret visi religius, di mana pelayanan dilandasi nilai kepedulian dan keberpihakan terhadap kaum rentan.

4. Inovatif

   Kecamatan Kaligesing menerapkan digitalisasi layanan, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan mengembangkan inovasi pelayanan publik—nilai yang sejalan dengan visi inovatif, memperbarui sistem pelayanan publik melalui pendekatan kreatif dan teknologi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Kecamatan Kaligesing Tahun 2025–2029 diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, inklusif, dan akuntabel dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kabupaten Purworejo yang *Berseri* (Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif). Tujuan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari Pemerintah Pusat, sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029, serta kondisi aktual perangkat daerah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Kaligesing merumuskan beberapa sasaran strategis. Pertama, meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan, yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hingga mencapai kategori “Baik” pada tahun 2029. Kedua, Kecamatan Kaligesing juga menargetkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi, dengan capaian nilai SAKIP minimal “BB” pada akhir periode Renstra. Terakhir, dirumuskan sasaran peningkatan akses dan mutu layanan publik yang inklusif bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marginal, dengan target seluruh layanan publik di kecamatan telah ramah dan inklusif pada tahun 2029.

Dengan tujuan dan sasaran tersebut, Kecamatan Kaligesing diharapkan dapat menghadirkan pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada kecepatan dan transparansi, tetapi juga berkeadilan, partisipatif, dan inklusif, sehingga mampu mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus sinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta menjabarkan target – target sasaran pokok pembangunan nasional ke dalam kontribusi Kabupaten Purworejo dalam pencapaian target – target nasional tersebut.

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah							
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)							
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	89,00	89,20	89,40	89,60	89,80	90,00	

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra Kecamatan Kaligesing Tahun 2025–2029 diarahkan pada optimalisasi seluruh sumber daya yang dimiliki, baik aparatur, keuangan, maupun sarana prasarana, untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas aparatur melalui penguatan kompetensi dan pemanfaatan teknologi digital, penataan tahapan kerja yang lebih sistematis berbasis perencanaan kinerja, serta fokus pada penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Program dan kegiatan/sub kegiatan dirancang untuk memperkuat fungsi kecamatan sebagai pusat koordinasi pemerintahan, fasilitasi pembangunan desa, serta pelayanan administrasi masyarakat. Selain itu, strategi ini juga menekankan adaptasi terhadap dinamika lingkungan global, nasional, dan regional, seperti perkembangan transformasi digital, tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, strategi Renstra ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintahan yang responsif, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029.

Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat	Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat	Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat
Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan RPJMD 2026	Arah Kebijakan RENSTRA 2026	
		Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2027	Arah Kebijakan RENSTRA 2027	

		Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2028	Arah Kebijakan RENSTRA 2028	
		Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2029	

		Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2030	Arah Kebijakan RENSTRA 2030	
		Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Setiap sasaran dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

A. PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.

Program-program Kecamatan Kaligesing adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan

B. KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan instansi pemerintah/PD sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kaligesing adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari kegiatan:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Alat Besar
- Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- Pengadaan Aset Tak Berwujud
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
   - Pemeliharaan Mebel
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
   - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, terdiri dari kegiatan :

   a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari sub kegiatan :
      - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
      - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

   b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, terdiri dari sub kegiatan:
      - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
      - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, terdiri dari

kegiatan:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terdiri dari sub kegiatan :
   - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, terdiri dari kegiatan :

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari sub kegiatan :
   - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
   - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari kegiatan :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sub kegatan :
   - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
   - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
   - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
   - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
   - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
   - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
   - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
			Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	

					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	

Adapun secara lebih jelasnya, program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kaligesing dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 kami sajikan pada Tabel 6.1 (TC.27):

Tabel 4.2.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KALIGESING
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	88,5	89,2		89,4		89,6		89,8		90		90			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
7.01.00	KECAMATAN						2.158.042.880		1.897.995.000		1.875.124.000		1.875.124.000		1.875.124.000				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	2.158.042.880	100	1.897.995.000	100	1.875.124.000	100	1.875.124.000	100	1.875.124.000	100	Sekretariat	Kecamatan Kaligesing	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	41	46	800.000	45	800.000	45	800.000	45	800.000	45	800.000	226			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	23	250.000	22	250.000	22	250.000	22	250.000	22	250.000	111			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	26	22	300.000	22	300.000	22	300.000	22	300.000	22	300.000	110			
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	5			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	45	45	1.988.955.880	45	1.686.707.650	45	1.648.683.215	45	1.621.226.836	45	1.583.473.120	225			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	22	22	1.988.705.880	22	1.686.457.650	22	1.648.433.215	22	1.620.976.836	22	1.583.223.120	22			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	44	44	250.000	44	250.000	44	250.000	44	250.000	44	250.000	220			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	2	250.000	2	250.000	2	250.000	2	250.000	2	250.000	10			
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	250.000	2	250.000	2	250.000	2	250.000	2	250.000	10			
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	16	16	250.000	16	250.000	16	250.000	16	250.000	16	250.000	80			
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	16	16	250.000	16	250.000	16	250.000	16	250.000	16	250.000	80			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	1		1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	5			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	0	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	5			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	6	7	46.746.100	8	60.403.000	8	66.083.000	8	84.354.600	8	102.605.060	39			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	4.834.000	1	11.800.000	1	12.980.000	1	14.278.000	1	15.705.800	5			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	8.104.700	1	8.000.000	1	8.000.000	1	11.597.850	1	12.757.635	5			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	16.262.400	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	5			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	2.912.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	5			
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	9.253.000	1	9.253.000	1	9.253.000	1	21.628.750	1	23.791.625	5			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	12	1.000.000	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.000.000	48			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	12	5.380.000	12	8.350.000	12	8.350.000	12	8.350.000	12	8.350.000	60			
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	2	1.500.000	2	2.000.000	2	2.500.000	2	15.500.000	8			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	63	0		76	12.800.000	2	14.060.000	2	15.310.000	2	17.185.000	8			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	60	0	0	75	12.800.000	0	0	0	0	0	0	75			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	0	0	0	1	14.060.000	1	15.310.000	1	17.185.000	3			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	54.208.900	24	59.598.350	24	62.348.185	24	65.373.004	24	76.600.304	120			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	24.998.500	12	27.498.350	12	30.248.185	12	33.273.004	12	36.600.304	60			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	29.210.400	12	32.100.000	12	32.100.000	12	32.100.000	12	40.000.000	60			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	5	66.832.000	5	76.936.000	5	82.399.600	5	87.309.560	5	93.710.516	25			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	0	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	1	46.585.000	5			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	0	42.780.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	32			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	8.760.000	15	9.636.000	15	10.599.600	15	11.659.560	15	12.825.516	75			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	8.650.000	1	10.300.000	1	10.300.000	1	10.300.000	1	10.300.000	5			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	11	6.642.000	11	7.000.000	11	8.000.000	11	8.000.000	11	9.000.000	55			
2	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	88,5	89,2		89,4		89,6		89,8		90		90			
7.01.00	KECAMATAN						85.714.900		151.550.000		85.715.000		87.069.000		88.446.000				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan pubik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	10.190.000	100	13.460.000	100	10.190.000	100	10.351.000	100	10.515.000	100	Seksi Pembangunan	Kecamatan Kaligesing	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	6.265.000	1	6.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5			
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	6.265.000	1	6.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen	1	1	3.925.000	1	7.460.000	1	5.190.000	1	5.351.000	1	5.515.000	5			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	3.925.000	1	7.460.000	1	5.190.000	1	5.351.000	1	5.515.000	5			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100	100	33.105.900	100	68.787.000	100	33.106.000	100	33.629.000	100	34.160.000	100	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Kaligesing	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen	2	2	33.105.900	2	68.787.000	2	33.106.000	2	33.629.000	2	34.160.000	10			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	4	4	10.705.900	4	13.905.900	4	10.705.900	4	10.705.900	4	10.800.000	20			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	22.400.000	1	54.881.100	1	22.400.100	1	22.923.100	1	23.360.000	5			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	13.863.000	100	13.863.000	100	13.863.000	100	14.082.000	100	14.305.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kaligesing	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	2	13.863.000	2	13.863.000	2	13.863.000	2	14.082.000	2	14.305.000	10			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	8.943.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	4.920.000	1	8.363.000	1	8.363.000	1	8.582.000	1	8.805.000	5			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	14.560.000	100	14.790.000	100	14.560.000	100	14.790.000	100	15.024.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kalgesing	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	1	1	14.560.000	1	14.790.000	1	14.560.000	1	14.790.000	1	15.024.000	5			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	14.560.000	1	14.790.000	1	14.560.000	1	14.790.000	1	15.024.000	5			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	13.996.000	100	40.650.000	100	13.996.000	100	14.217.000	100	14.442.000	100	Seksi Pemerintahan Desa	Kecamatan Kalgesing	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	6	6	13.996.000	6	40.650.000	6	13.996.000	6	14.217.000	6	14.442.000	30			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	1.375.000	1	2.760.000	1	540.000	1	540.000	1	540.000	5			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	1	2.250.000	1	2.760.000	1	540.000	1	540.000	1	540.000	5			
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	1	5.400.000	1	26.120.000	1	9.626.000	1	9.847.000	1	10.072.000	5			
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	1	2.250.000	1	3.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	5			
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	1	1.596.000	1	1.760.000	1	790.000	1	790.000	1	790.000	5			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	1	1.125.000	1	3.750.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5			
Jumlah							2.243.767.780		2.049.646.000		1.960.839.000		1.962.193.000		1.963.670.000				

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Monitoring Pembangunan	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan	

			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda	

			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi keagamaan	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Forkopimcam	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP)	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades dan Sekdes	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pilkades	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	

4.2. Dukungan terhadap Program Nasional, Provisi dan Kegiatan Unggulan Daerah

a. Dukungan terhadap Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional)

Kecamatan Kaligesing mendukung pencapaian Asta Cita dan Program Strategis Nasional melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Program pelayanan administrasi kependudukan, penguatan sistem pengaduan masyarakat, serta fasilitasi pembangunan infrastruktur dasar menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung target nasional terutama terkait peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan.

b. Dukungan terhadap Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi)

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di tingkat kecamatan, Kaligesing turut mendukung Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah, antara lain dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan potensi wisata dan pertanian. Dukungan tersebut diwujudkan melalui fasilitasi pendampingan kelompok tani, promosi produk lokal unggulan, serta partisipasi dalam program-program provinsi yang diturunkan ke tingkat kabupaten/kecamatan.

c. Dukungan terhadap Program Kabupaten (Pitulungan)

Dalam rangka mendukung Program Unggulan Kabupaten Purworejo yaitu *Pitulungan*, Kecamatan Kaligesing fokus pada upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Program ini diimplementasikan melalui pelayanan administrasi yang cepat dan mudah, peningkatan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), penguatan kelembagaan desa, serta fasilitasi

kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat agar tercipta pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

4.3. Penentuan Indkator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator tersebut merupakan indikator yang telah diseleksi secara cermat sehingga benar-benar merepresentasikan keberhasilan pencapaian tujuan strategis dan dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah juga ditentukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian target program dan kegiatan secara lebih operasional. Baik IKU maupun IKK ditetapkan untuk menjadi pedoman pengukuran kinerja sejak tahun 2025 hingga tahun 2030, sehingga terdapat konsistensi dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah secara berkesinambungan.

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Tujuan dan Sasaran PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	89,00	89,20	89,40	89,60	89,80	90,00	Tujuan dan Sasaran PD

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kaligesing yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kaligesing Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Kaligesing, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kaligesing setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Rencana Strategis Kecamatan Kaligesing sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kaligesing setiap tahun.
b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c) Camat Kaligesing wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Kaligesing dilakukan setiap tahun selama periode renstra.

b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Satuan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Renstra Kecamatan Purworejo disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025 s/d 2029, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah kabupaten.

Dengan telah ditetapkanya RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 menjadi kewajiban semua Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :

a. Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian Renstra Perangkat Daerah.
c. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Purworejo selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bapperida Kabupaten Purworejo.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum tersebut sebagai dasar hukum dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Purworejo Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Maksud
   a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas / program / kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan.
   b. Memberikan gambaran rencana program untuk lima tahun ke depan (2025-2029) yang terukur dan terarah dalam melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik sekaligus menjadi acuan bagi Kecamatan Purworejo untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Purworejo.
   c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.
   d. Menjabarkan visi misi RPJMD
2. Tujuan
   a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
   b. Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat.
   c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
   d. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Purworejo sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali;
   e. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Purworejo sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.5 Kelompok sasaran layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah
4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan di atur dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

Adapun tugas Pokok dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Camat

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas pokok:

1. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
8. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-

undangan;
b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan, meliputi:
a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;
e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

b. Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian.
Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan koordinasi menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
c. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
d. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkanbahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi:

a. merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja;
b. melaksanakan pengadministrasian keuangan;
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

d. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

a. melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
b. melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
c. melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
d. melaksanakan penyediaaan jasa penunjang;
e. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
f. melaksanakan pengadministrasian kepegawaian pada lingkungan kecamatan; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai sesuai tugas dan jabatannya.

e. Kepala Seksi Pemerintahan Desa.

Kepala seksi Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa , yang meliputi:

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
h. melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
j. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
m. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
o. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
p. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
q. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
r. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

f. Kepala Seksi Pembangunan.

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
   1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
   2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;
   3. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
b. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
   1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
   2. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
   1. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;

2. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
3. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

g. Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang meliputi:

a. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi;
   1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;
   2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
b. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
c. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:
   1. Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
   2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   3. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
   4. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   5. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasukur, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
   8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya

h. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
   1. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
   2. Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi;
   1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
   2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
   3. Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

i. Kelompok Jabatan Fungsional :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

a. Camat;
b. Sekretariat, membawahkan:
   1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
   2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian
c. Seksi Pemerintahan Desa;
d. Seksi Pembangunan;
e. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Kelurahan

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWOREJO

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Purworejo

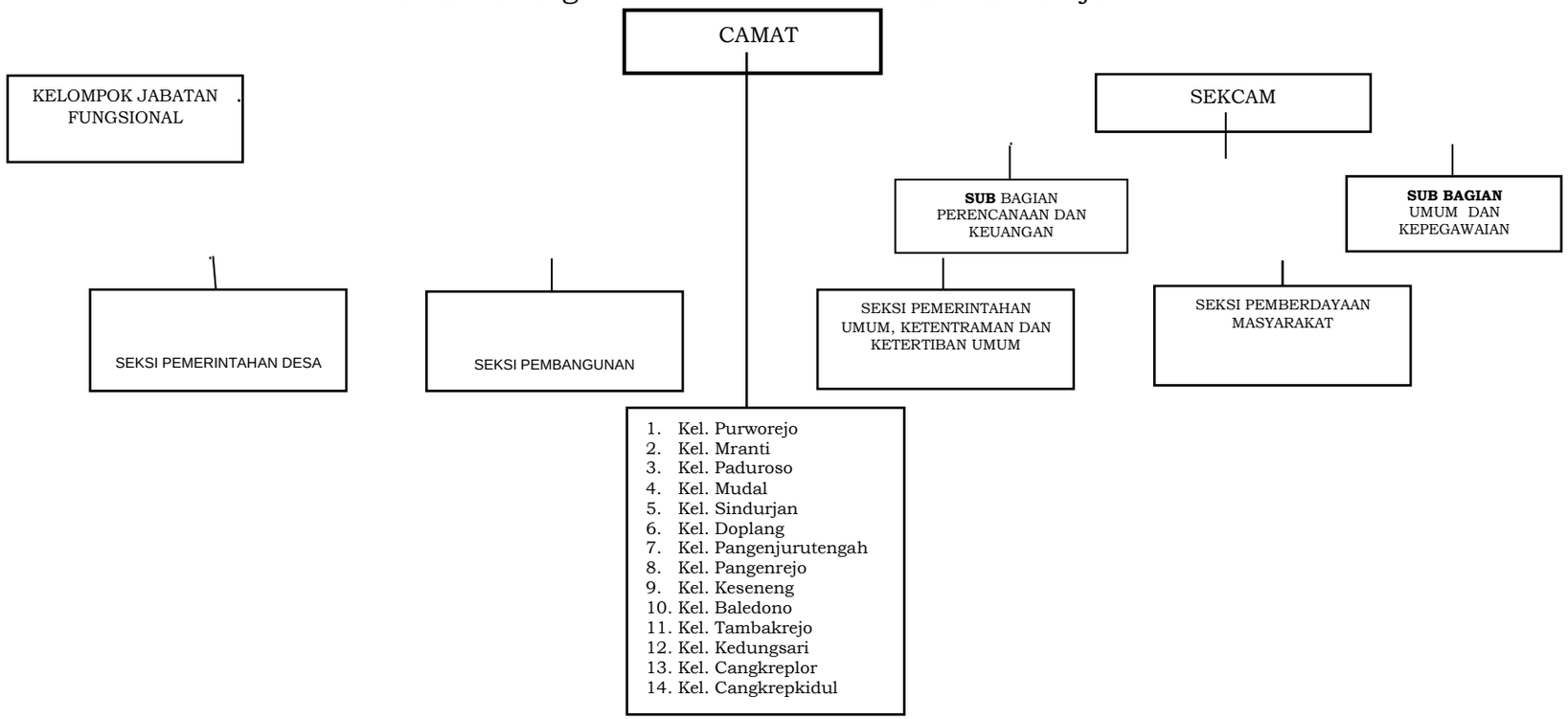

Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kecamatan Purworejo sebagai organisasi kecamatan dengan pola maksimal terdiri dari :

a. Camat ;
b. Sekretariat, membawahkan :
   1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Seksi Pembangunan;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
e. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
f. Seksi Pemerintahan Desa;
g. Kelurahan

Pegawai Kecamatan Purworejo termasuk 14 Kelurahan berdasarkan Golongan, Jabatan / Eselon dan Pendidikan sebanyak 97 orang terdiri dari 93 PNS dan 4 PPPK, selain itu juga ada Non ASN 37 orang. Adapun rincian pegawai berdasarkan golongan kepangkatan yaitu :

a. Berdasarkan Golongan :
   - Golongan IV : 6 orang
   - Golongan III : 66 orang
   - Golongan II : 21 orang
   - Golongan I : 0 orang
   - Tenaga Non ASN : 35 orang

   Jumlah : 132 orang

b. Berdasarkan Jabatan / Eselonering :
   - Eselon III/A : 1 orang
   - Eselon III/B : 1 orang
   - Eselon IV/A : 15 orang
   - Eselon IV/B : 49 orang

c. Berdasarkan Pendidikan :
   - Pasca Sarjana : 6 orang
   - Sarjana Strata 1 : 51 oramg
   - Diploma : 25 orang
   - SMU/Sederajat : 11 orang
   - SLTP/Sederajat : 2 orang

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Sedangkan yang dimaksud Perangkat Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Tabel 2.2
Sarana Kerja
Kecamatan Purworejo

NO	SARANA KERJA	JUMLAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)

1	Mebelair	22 set	Baik
2	Komputer	36 unit	Baik
3	Laptop	69 unit	Baik
4	Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit	Baik
5	Kendaraan Dinas Roda 2	37 unit	Baik
6	Kipas angin	32 unit	Baik
7	LCD	15 unit	Baik
8	Meja Rapat	123 unit	Baik
9	Kursi Rapat	1546 unit	Baik
10	Kursi Tamu	35 unit	Baik

Sumber : Pengurus Barang Kecamatan Kecamatan Purworejo

Tabel 2.3
Prasarana Kerja
Kecamatan Purworejo

NO	SARANA KERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1	Ruang Camat	ADA
2	Ruang Sekcam Dan 5 Kasi	ADA
3	Ruang Kasubag (Sekretariat)	ADA
4	Gudang Arsip	ADA
5	Ruang Pelayanan Paten Tempat Parkir	ADA
6	Parkir	ADA
7	Aula Rapat	ADA
8	Rumah Dinas	ADA
9	Ruang Perekaman Ktp	ADA
10	Musholla	ADA

Sumber : Pengurus Barang Kecamatan Kecamatan Purworejo

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat keadaan yang menonjol atau trend yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang telah dijalani. Dengan melihat keadaan tersebut dapat diproyeksikan rencana apa yang akan dibuat untuk 5 (lima) tahun kedepan.

2.3.1 Tujuan :

a. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan birokrasi
b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

Indikator tujuan :

a. Indeks kepuasan masyarakat
b. Nilai akuntabilitas kinerja intsansi pemerintah daerah

2.3.2 Sasaran

a. Optimalisasi fungsi Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa
b. Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah

Indikator sasaran :

a. Prosentase penyelesaiaan permasalahan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan
b. Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah

Adapun evaluasi hasil kinerja periode sebelumnya sebagai gambaran pencapaian kinerja perangkat daerah kami sajikan Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*			*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					82,35	83,25	84,25	86,00	86,25	83,94	86,10	78,71	85,26								
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					82,35	83,25	84,25	85,25	86,25	83,94	86,10	78,71	85,26								
	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			100%	100%	100%	100%		
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			100%	100%	100%	100%		
	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			100%	100%	100%	100%		
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			100%	100%	100%	100%		
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			100%	100%	100%	100%		
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			100%	100%	100%	100%		

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio target kinerja Renstra tahun 2021- 2026 dapat tercapai 100 % untuk masing masing sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Purworejo. keberhasilan tersebut dapat tercapai berkat dukungan dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan di Kecamatan Purworejo, segenap komponen masyarakat Purworejo, serta komitmen kerja keras segenap Pimpinan Staf dan Pegawai Kecamatan Purworejo, dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncakan. Selanjutnya kami sajikan Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.107.589.070	8.452.805.659	9.292.087.953	9.543.944.212	9.124.260.379	-	13.803.051.750	11.886.736.836	12.301.844.334	-	-	-	140	367	265	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.000.000	25.249.993	25.500.003	98.000.002	98.000.002	-	37.249.988	115.636.593	105.538.626	-	-	-	11	37	34	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.750.000	3.787.493	3.825.003	15.900.002	15.900.002		21.278.988	25.365.379	34.030.990				567 %	670%	890 %		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.000.000	5.050.000	5.100.000	15.200.000	15.200.000		2.971.000	9.159.800	6.232.050				59%	181%	122 %		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3.750.000	3.787.500	3.825.000	13.900.000	13.900.000		2.000.000	10.200.000	3.805.950				53%	269%	100 %		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		3.750.000	3.787.500	3.825.000	13.900.000	13.900.000		3.000.000	11.159.900	6.056.050				80%	295%	158 %		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		3.750.000	3.787.500	3.825.000	13.900.000	13.900.000		2.000.000	8.659.900	1.379.950				53%	229%	36%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2.500.000	2.525.000	2.550.000	12.600.000	12.600.000		3.000.000	41.931.614	48.295.636				120 %	1661 %	1894 %		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.500.000	2.525.000	2.550.000	12.600.000	12.600.000		3.000.000	9.160.000	5.738.000				120 %	363%	225 %		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.867.089.070	8.141.575.666	8.962.542.950	9.131.824.210	8.781.840.377	-	11.077.086.754	9.942.062.059	10.664.678.075	-	-	-	4	3	3		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7.836.089.070	8.109.975.666	8.930.592.950	9.099.824.210	8.749.840.377		11.000.170.386	9.885.201.445	10.607.521.639				140 %	122%	119 %		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000								0%	0%	0%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		30.000.000	30.500.000	30.750.000	31.000.000	31.000.000		76.916.368	56.860.614	57.156.436				256 %	186%	186 %		
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				720.000	720.000	720.000	0	0	720.000	720.000	0	0	0	0	1	1		
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			720.000	720.000	720.000	720.000			720.000	720.000					100%	100 %		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	950.000	1.100.000	1.250.000	1.400.000	0	0	0	3.840.000	0	0	0	0	0	13		

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		-	250.000	300.000	350.000	400.000				3.840.000					0%	1280 %		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			700.000	800.000	900.000	1.000.000									0%	0%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		48.900.000	68.850.000	70.075.000	75.900.000	76.800.000	-	354.626.600	380.386.300	517.349.400	-	-	-	44	57	78		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7.500.000	10.000.000	10.150.000	14.400.000	14.400.000		17.493.700	31.849.800	26.079.900				233 %	318%	257 %		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11.400.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000				47.559.000				0%	0%	2265 %		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.150.000			56.241.100						2812 %	0%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-	10.000.000	9.000.000	9.100.000	9.150.000			100.597.600	123.883.200					1006 %	1376 %		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		16.875.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	12.500.000		50.729.500	66.624.500	66.840.600				301 %	666%	608 %		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5.625.000	10.650.000	10.725.000	10.800.000	10.800.000		15.355.000	14.245.000	12.520.000				273 %	134%	117 %		
Penyediaan Bahan/Material		-	5.000.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000				131.187.700					0%	2385 %		
Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000									0%	0%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		7.500.000	14.200.000	14.300.000	14.400.000	14.400.000		271.048.400	110.828.300	109.279.000				3614 %	780%	764 %		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			3.000.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000									0%	0%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		50.000.000	66.530.000	78.300.000	81.000.000	9.750.000	-	879.100.410	477.969.900	96.880.000	-	-	-	22	95	36		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	46.930.000	-	-	-			253.019.900						539%			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000				34.480.000					0%	3448 %		
Pengadaan Mebel		15.000.000	5.000.000	20.700.000	21.450.000			107.412.500		6.720.000				716 %	0%	32%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		35.000.000	5.500.000	48.300.000	50.050.000			527.580.900		55.680.000				1507 %	0%	115 %		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.600.000									0%	0%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000									0%	0%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.500.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000		244.107.010	224.950.000						8998 %	0%		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		59.000.000	71.000.000	71.500.000	71.750.000	71.750.000	-	546.173.902	548.745.627	410.082.497	-	-	-	25	21	15		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		17.700.000	21.300.000	21.450.000	21.525.000	21.525.000		107.706.200	133.029.000					609 %	625%	0%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		14.750.000	17.750.000	17.875.000	17.937.500	17.937.500		82.580.596	73.046.334	81.182.189				560 %	412%	454 %		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		26.550.000	31.950.000	32.175.000	32.287.500	32.287.500		355.887.106	342.670.293	328.900.308				1340 %	1073 %	1022 %		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		57.600.000	78.650.000	82.350.000	83.500.000	84.000.000	-	908.814.096	421.216.357	502.755.736	-	-	-	34	153	86		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		5.000.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000								0%	0%	0%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	700.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000		88.255.896	91.475.507	165.559.816					1306 8%	6368 %		
Pemeliharaan Mebel			1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000									0%	0%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	500.000	750.000	800.000	850.000									0%	0%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		14.500.000	17.625.000	17.750.000	17.875.000	17.000.000		172.826.000	255.045.850	244.851.920				1192 %	1447 %	1379 %		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	10.000.000	11.000.000	11.500.000	11.750.000		68.707.000	74.695.000	92.344.000					747%	839 %		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		26.100.000	31.725.000	31.950.000	32.175.000	33.000.000		579.025.200						2218 %	0%	0%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000		12.000.000						100 %	0%	0%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		183.668.700	70.861.300	75.265.400	77.147.700	76.758.400	-	25.630.699.640	20.380.575.290	21.148.248.130	-	-	-	13	59	32		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		142.668.700	33.161.300	39.965.400	40.247.700	37.258.400	-	12.892.369.320	10.286.099.195	10.606.341.740	-	-	-	9	35	17		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		127.668.700	17.050.000	20.600.000	20.696.000	15.000.000		31.846.900	36.230.000	47.951.550				25%	212%	233 %		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		15.000.000	16.111.300	19.365.400	19.551.700	22.258.400		20.096.700	23.559.400	16.483.800				134 %	146%	85%		

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		40.000.000	34.000.000	34.000.000	35.500.000	38.000.000	-	12.738.330.320	10.094.476.095	10.541.906.390	-	-	-	4	24	14		
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		28.000.000	17.000.000	17.000.000	18.000.000	20.000.000		102.095.400	131.833.700					365 %	775%	0%		
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12.000.000	17.000.000	17.000.000	17.500.000	18.000.000								0%	0%	0%		
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		2.000.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		2.000.000	2.500.000											0%	0%			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000								0%	0%	0%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	9.226.986.400	10.134.302.600	10.408.266.000	10.342.481.000	-	12.636.234.920	9.962.642.395	10.541.906.390	-	-	-	-	16	14		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	43.500.000	45.000.000	46.500.000	48.500.000	-	341.350.800	302.995.900	107.090.700	-	-	-	-	14	5		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			22.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000		197.604.000							0%	0%		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			21.500.000	22.000.000	22.500.000	23.500.000		143.746.800	302.995.900	107.090.700					1409 %	487 %		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-	9.183.486.400	10.089.302.600	10.361.766.000	10.293.981.000	-	12.294.884.120	9.659.646.495	10.434.815.690	-	-	-	-	2	9		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		40.732.900		72.719.150					0%	727 %		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			6.816.486.400	7.263.802.600	7.336.266.000	7.336.266.000		10.339.290.920	7.626.989.995	7.519.611.840					112%	104 %		

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.361.000.000	2.815.500.000	3.015.500.000	2.947.715.000		1.914.860.300	2.032.656.500	2.842.484.700					86%	101%		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		44.025.000	22.905.300	25.176.900	25.871.000	25.807.900	-	6.754.097.200	6.729.431.100	5.514.643.950	-	-	-	358	561	845		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		42.025.000	20.805.300	22.976.900	23.571.000	23.407.900	-	3.383.472.400	3.387.861.700	2.768.331.450	-	-	-	180	288	428		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		13.207.500	6.871.000	7.553.000	7.761.000	7.761.000		29.566.800	31.134.000	5.400.000				224%	453%	71%		
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		28.817.500	13.934.300	15.423.900	15.810.000	15.646.900		12.679.600	4.951.500	5.300.000				44%	36%	34%		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	-	1.826.428.200	1.820.452.500	1.498.623.700	-	-	-	97	149	233		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000								0%	0%	0%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		23.858.000	4.984.900	5.426.600	5.615.900	5.552.800	-	995.260.200	984.361.800	824.659.200	-	-	-	52	79	122		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		23.858.000	4.984.900	5.426.600	5.615.900	5.552.800	-	506.690.000	500.669.600	412.329.600	-	-	-	26	40	61		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		7.314.800	2.990.000	2.000.000	2.100.000	1.952.800		12.847.600	46.292.300	22.018.950				176%	1548%	1101%		
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		7.000.000	1.000.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000		11.000.000						157%	0%	0%		

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		9.543.200	994.900	1.326.600	1.315.900	1.400.000				25.560.000				0%	0%	1927 %		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		195.526.771	140.018.900	153.774.700	157.939.300	142.960.700	-	300.630.400	289.128.800	214.055.950	-	-	-	14	16	19		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		195.526.771	140.018.900	153.774.700	157.939.300	142.960.700	-	154.624.200	144.564.400	107.543.700	-	-	-	8	8	9		
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		19.552.601	14.000.000	15.377.500	15.793.000	15.793.000		9.468.000	3.706.700	43.151.000				48%	26%	281 %		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		39.105.000	28.000.000	30.755.000	31.587.000	31.587.000		18.119.800	16.977.400					46%	61%	0%		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		29.329.000	21.000.000	23.066.000	23.690.000	23.690.000		12.634.000	9.554.000	20.683.600				43%	45%	90%		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		19.552.600	21.000.000	7.100.000	7.200.000	7.200.000		100.364.400	100.799.700	35.950.500				513 %	480%	506 %		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		-	7.000.000	26.498.700	27.675.300	12.196.700			9.549.800						136%	0%		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		19.552.600	14.000.000	15.377.500	15.794.000	15.794.000		5.420.000	3.976.800	6.727.150				28%	28%	44%		
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		9.776.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.200.000		8.618.000		1.031.450				88%	0%	25%		
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000									0%	0%		
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000									0%	0%		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			7.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000									0%	0%		
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		29.329.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000		6.500.000	6.782.900	6.818.300				22%	97%	96%		
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		29.329.970	7.018.900	7.100.000	7.200.000	7.300.000		12.534.900	5.528.100	17.735.400				43%	79%	250 %		
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			7.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000									0%	0%		
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			7.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000									0%	0%		

		8.554.667.541	17.918.562.459	19.686.034.153	20.218.784.112	19.717.821.179	-	60.119.974.110	50.232.876.221	50.545.357.954	-	-	-	577	1.097	1.298	-	-

Pada Tabel 2.2 diatas bahwa Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah ada yang baik dan kurang baik, salah satu penyebabnya dikarenakan menyesuaikan anggaran Daerah.

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83,94	86,1	78,71	85,26	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83,94	86,1	78,71	85,26	
3	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Purworejo sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

1) Tuntutan dan harapan warga masyarakat terhadap perwujudan *Good Governance dan Good Government* merupakan peluang pada PD Kecamatan Purworejo untuk selalu meningkatkan kinerja.
2) Kecamatan Purworejo merupakan Eks. Ibukota Kawedanan (Pembantu Bupati untuk wilayah Purworejo) banyak peninggalan sarana dan prasarana gedung yang digunakan untuk pemerintahan maupun instansi lain.
3) Kepedulian dan kebersamaan pihak swasta dalam mendukung program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan.
4) Adanya moratorium PNS berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur terhadap pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing dan adanya regulasi yang terus mengalami perubahan.
5) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
6) Para penyelenggara Pemerintah Desa belum secara optimal memahami regulasi tentang pemerintahan desa yang cenderung berubah.
7) Adanya tambahan penghasilan meningkatkan kinerja sumberdaya pegawai.
8) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana maupun pengembangan potensi alam.

Tantangan :

1) Memberikan prioritas pada rencana kerja adanya pengembangan Paten secara maksimal ;
2) Memberikan peluang perbaikan sarana dan prasarana bagi pengembangan paten ;
3) Meningkatkan kesadaran warga terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4) Memberikan dukungan secara maksimal kepada desa yang mendapatkan prioritas pembangunan;

Peluang :

1) Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders);
2) Memberikan kemungkinan peningkatan Pendapatan, dengan meningkatkan kesadaran warga terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3) Memberikan dukungan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan , Keberadaan organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan dalam pembangunan merupakan peluang perencanaan pembangunan melalui koordinasi dalam program pembangunan.

Faktor Ancaman (Threat) :

1) Perkembangan tehnologi, berlakunya kawasan Masyarakat Ekonomi Asean / MEA serta tuntutan yang semakin beraneka ragam dengan berbagai kepentingan

yang seringkali saling bertentangn dan hal tersebut harus ditampung, diperhatikan dan dilayani.

2) Kondisi masyarakat yang tidak sama baik tingkat sosial ekonomi, pendidikan dan hal-hal yang lain berpengaruh terhadap cara pandang pola pikir.
3) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan secara partisipatif.
4) Kebijakan pemerintah yang kurang sosialisasi, akan berakibat bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyrakat.

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purworejo meliputi internal Sekretariat Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan, Instansi vertikal TNI/Polri, KUA dan elemen masyarakat umum

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan dari masing-masing unit di Kecamatan Purworejo dapat dilihat sebagai berikut:

Identifikasi Permasalahan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yan mempengar	
			Internal	E
Tata kelola organisasi dan Profesionalitas/ manajemen ASN	Masih perlunya optimalisasi aparatur pelayanan publik dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Peraturan tentang Tata kelola organisasi dan manajemen ASN yang Akuntabel, Profesional dan Kredibel	Belum maksimalnya tata kelola organisasi dan Profesionalitas/ manajemen ASN yang Akuntabel, Profesional dan Kredibel	A tu m a fa p p y ti b b
Pelayanan Publik yang mudah diakses	Standar Pelayanan, SOP, Media Informasi dan Layanan Terpasang dan mudah diakses Masyarakat (media sosial) di Ruang Pelayanan Kecamatan	Peraturan tentang pelayanan publik, SOP, Standar Pelayanan	Pemahaman terhadap SOP, Standar Pelayanan belum optimal, tempat layanan tidak mudah diakses publik	A tu m a fa p p y ti
Peningkatan kualitas Pembangunan dan	Sarana dan prasarana yang rusak, belum maksimalnya	Peraturan tentang Pembangunan dan	Kapasitas SDM pemberdayaan masyarakat	T m a p

	pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	belum optimal	s d m p y M a d ra
	Kondusifitas dan intensifitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan kota	Banyaknya gangguan dan ketertiban umum dan kurang kesadaran dan tenaga pengamanan wilayah/ lingkungan	Peraturan tentang keamanan dan ketertiban di wilayah	Kapasitas SDM keamanan, ketertiban umum belum optimal	K m a k u
	Kelembagaan Pemerintahan dan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa yang profesional	Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan, keterampilan aparatur pemerintahan desa	Peraturan tentang Kelembagaan Pemerintahan Desa	Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintahan desa	A tu m a te n d m p p D

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal,
2. Akuntabilitas keuangan belum disertai sumber daya manusia yang kompeten,
3. Pelayanan publik prima belum maksimal,
4. Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan,
5. Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif.

2.2.2. Isu Strategis

Kecamatan Purworejo memiliki potensi aparatur pemerintahan yang kompeten dan peluang peningkatan pelayanan publik yang semakin luas. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan utama yang perlu diatasi, antara lain akuntabilitas kinerja pemerintahan yang belum optimal, transformasi digital yang belum sepenuhnya terimplementasi, pelayanan publik yang belum merata, serta kondisi ketenteraman dan perlindungan masyarakat yang belum sepenuhnya kondusif.

Isu ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi. Dalam konteks

lingkungan global, muncul tantangan berupa maraknya misinformasi dan disinformasi, ancaman keamanan siber, serta kebutuhan sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral. Sementara itu, pada level nasional, agenda besar transformasi tata kelola, penegakan supremasi hukum, serta penguatan stabilitas dan kepemimpinan Indonesia menjadi faktor penting yang harus direspon di tingkat daerah. Adapun pada tataran regional, dinamika tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif dan dinamis menuntut peran aktif kecamatan dalam menyesuaikan diri. Isu Strategis kecamatan Purworejo dapat disajikan dalam Tabel 2.1 berkut ini :

Tabel 2.1 Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif
				Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia		
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan		Cyber insecurity			
	Pelayanan publik prima belum merata		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			
	Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif					

Dapat disimpulkan , isu strategis bagi Kecamatan Purworejo adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif, sehingga mampu menghadapi tantangan global, nasional, maupun regional sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik, stabilitas sosial, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Purworejo :

" Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)"

Visi ini merupakan berkelanjutan dari cita cita pembangunan dalam mencapai tujuan jangka Panjang Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029. Adapun terkandung makna yang terkandung dalam visi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

a. Purworejo
   Kata Purworejo menunjuk pada Kabupaten Purworejo secara keselurahan baik mencakup kewilyahan pemerintahan dan masyarakatnya.
b. Berdaya saing
   Berdaya Saing berarti bahwa kondisi Kabupaten Purworejo yang memiliki kekuatan dan keunggulan produktivitas wilayah (ekosistem inovasi, enabling environment, sumber daya manusia, dan market.
c. Sejahtera
   Sejahtera berarti bahwa Kabupaten Purworejo memiliki kondisi masyarakat yang sehat, cerdas, berbudaya, serta tercukupi kebutuhan dasarnya bagi semua kalangan.
d. Religius
   Masyarakat yang memiliki ketaqwaan terhadap Tuhan YME, menjalani kehidupan sehari-hari berlandaskan nilai, norma, dan etika ajaran agama, dan bersikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan keberagaman, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda.
e. Inovatif
   Pemerintah dan masyarakatnya dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapi dengan mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki serta mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan (meliputi elemen Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment).

Untuk mencapai visi tersebut diatas telah dirumuskan dengan Misi sejumlah lima (5) Misi yaitu:

1. Bidang Sumber Daya Manusia, Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya dan sejahtera;
2. Bidang Infrastruktur, Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah;
3. Bidang Lingkungan Hidup, Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
4. Bidang Ekonomi & Pariwisata, Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal;

5. Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

Yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Purworejo adalah Misi ke 5 yaitu Bidang Tata Kelola Pemerintahan , Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

1. Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu periode perencanaan. Tujuan Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Purworejo Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator tujuan Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah).
2. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Purworejoada dua yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan Indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat dengan Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah).
3. Untuk itu, tujuan dan sasaran Kecamatan Purworejo jangka menengah dalam lima tahun kedepan adalah sebagaimana tercantum dalam table 4.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Purworejo
Kabupaten Purworejo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	86,00	86,25	87,00	87,75	88,50	89,25	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
		Meningkatnya kualitas layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	86,25	87,00	87,75	88,50	89,25	

		kepada masyarakat	(Perangkat Daerah)							

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan, diperlukan arah kebijakan dan langkah-langkah strategis yang jelas untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai serta bagaimana penyelesaian isu strategis pembangunan daerah dilakukan.

Arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih fokus dan terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian, arah kebijakan mampu merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus yang tepat sekaligus sesuai dengan pengaturan dalam pelaksanaannya. Selain itu, arah kebijakan juga berguna untuk membantu menghubungkan setiap strategi dengan sasaran pembangunan secara lebih rasional serta menjadi tema pembangunan tahunan dalam RKPD.

Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Purworejo pada 5 (lima) tahun mendatang diarahkan pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif. Strategi tersebut mencakup peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, pemerataan pelayanan yang berkualitas, serta penguatan stabilitas dan perlindungan masyarakat. Dengan strategi dan arah kebijakan ini, Kecamatan Purworejo diharapkan mampu menghadapi dinamika lingkungan global, nasional, dan regional sekaligus memberikan pelayanan yang semakin dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Purworejo secara lebih rinci dituangkan dalam Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 sebagai pedoman pembangunan pada periode lima tahun mendatang.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat	Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat	Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat
Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Dengan tahapan kebijakan yang terstruktur tersebut, Kecamatan Purworejo berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus menjaga akuntabilitas kinerja pemerintahan secara berkelanjutan.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
2	3	4	5
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan RPJMD 2026	Arah Kebijakan RENSTRA 2026	
	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

	Arah Kebijakan RPJMD 2027	Arah Kebijakan RENSTRA 2027	
	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
	Arah Kebijakan RPJMD 2028	Arah Kebijakan RENSTRA 2028	
	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

	Arah Kebijakan RPJMD 2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2029	
	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
	Arah Kebijakan RPJMD 2030	Arah Kebijakan RENSTRA 2030	
	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk Untuk mengimplementasikan mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Berikut rencana dan program Kecamatan Purworejo:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Purworejo tercantum dalam tabel 4.1 dibawah ini dengan Jumlah sbb :

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
			Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	

Tabel 4.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PURWOREJO

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	85,26	86,25		87		87,75		88,5		89,25		89,25			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
07.01	KECAMATAN						13.184.812.496		13.316.661.080		12.243.951.000		12.243.951.000		12.243.951.000				
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	13.184.812.496	100	13.316.661.080	100	12.243.951.000	100	12.243.951.000	100	12.243.951.000	100	SEKRETARIAT	Kecamatan Purworejo	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	2	7.282.800	3	7.428.456	3	6.685.610	3	6.685.610	3	6.685.610	3			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	5.954.000	22	5.573.080	22	5.015.772	22	5.015.772	23	5.015.772	111			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	22	1.328.800	22	1.355.376	22	1.219.838	22	1.219.838	22	1.219.838	110			
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Laporan	0	0	0	1	500.000	1	450.000	1	450.000	1	450.000	4			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	27	45	12.036.604.896	45	11.987.986.028	45	10.983.431.041	45	10.983.431.041	45	10.983.431.041	225			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gajidan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	115	115	12.035.071.896	115	11.986.424.388	115	10.982.023.747	115	10.982.023.747	115	10.982.023.747	115			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	26	44	1.533.000	44	1.563.660	44	1.407.294	44	1.407.294	44	1.407.294	220			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0		1	2.500.000	1	2.250.000	1	2.250.000	1	2.250.000	1			
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	11	2.500.000	11	2.250.000	11	2.250.000	11	2.250.000	44			
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlayaninya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1.034.000	1	1.054.680	1	948.212	1	948.212	1	948.212	1			
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	16	1.034.000	16	1.054.680	16	948.212	16	948.212	16	948.212	80			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	1	469.800	2	3.000.000	2	2.700.000	2	2.700.000	2	2.700.000	9			
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	17	469.800	17	2.000.000	17	1.800.000	17	1.800.000	17	1.800.000	68			
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	0	0	0	1	1.000.000	1	900.000	1	900.000	1	900.000	4			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	277.685.100	7	288.738.802	7	256.064.921	7	256.064.921	7	256.064.921	35			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	15	23.817.400	15	24.293.748	15	21.864.373	15	21.864.373	15	21.864.373	75			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	15	44.832.800	15	45.423.456	15	40.881.110	15	40.881.110	15	40.881.110	75			

7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	15	96.096.000	15	98.017.920	15	88.216.128	15	88.216.128	15	88.216.128	75			
7.01.01.2.08.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	15	13.622.400	15	13.894.848	15	12.505.363	15	12.505.363	15	12.505.363	75			
7.01.01.2.08.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	0	15	1.000.000	15	900.000	15	900.000	15	900.000	60			
7.01.01.2.08.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Laporan	12	15	80.646.500	15	82.259.430	15	74.033.487	15	74.033.487	15	74.033.487	75			
7.01.01.2.08.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dokumen	0	0	0	1	2.500.000	1	2.250.000	1	2.250.000	1	2.250.000	4			
7.01.01.2.08.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	1	1	18.520.000	1	18.890.400	1	17.001.360	1	17.001.360	1	17.001.360	5			
7.01.01.2.08.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	1	450.800	1	459.000	1	413.100	1	413.100	1	413.100	5			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	unit	6	0		35	145.000.000	35	130.500.000	35	130.500.000	35	130.500.000	156			
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	5	25.000.000	5	22.500.000	5	22.500.000	5	22.500.000	20			
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	0	5	25.000.000	5	22.500.000	5	22.500.000	5	22.500.000	20			
7.01.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	5	20.000.000	5	18.000.000	5	18.000.000	5	18.000.000	20			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	0	0	5	15.000.000	5	13.500.000	5	13.500.000	5	13.500.000	20			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	0	0	5	30.000.000	5	27.000.000	5	27.000.000	5	27.000.000	20			
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	5	15.000.000	5	13.500.000	5	13.500.000	5	13.500.000	20			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	5	15.000.000	5	13.500.000	5	13.500.000	5	13.500.000	20			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	2	604.241.700	2	616.326.534	2	619.408.166	2	619.408.166	2	619.408.166	2			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	121.599.300	12	124.031.286	12	124.651.442	12	124.651.442	12	124.651.442	48			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	482.642.400	12	492.295.248	12	494.756.724	12	494.756.724	12	494.756.724	48			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	4	257.475.000	8	266.624.500	8	239.962.050	8	239.962.050	8	239.962.050	36			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	1	35.568.000	1	36.271.200	1	32.644.080	1	32.644.080	1	32.644.080	4			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	23	79.686.000	23	81.273.600	23	73.146.240	23	73.146.240	23	73.146.240	92			
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	1	1.000.000	1	900.000	1	900.000	1	900.000	1			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	1	1.000.000	1	900.000	1	900.000	1	900.000	1			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	15	87.495.000	15	89.244.900	15	80.320.410	15	80.320.410	15	80.320.410	15			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	146	102	54.740.000	102	55.834.800	102	50.251.320	102	50.251.320	102	50.251.320	102			
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	1	1.000.000	1	900.000	1	900.000	1	900.000	4			
7.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	0	0	0	1	1.000.000	1	900.000	1	900.000	1	900.000	4			
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	85,26	86,25		87		87,75		88,5		89,25		89,25			
07.01	KECAMATAN						147.992.200		193.914.036		151.352.000		154.152.440		157.004.768				

07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	7.145.400	100	53.709.000	100	7.145.000	100	7.258.000	100	7.373.000	100	SEKSI PEMBANGUNAN	Kecamatan Purworejo	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	6.153.400	2	11.276.468	1	2.000.000	2	2.067.275	2	2.098.860	2			
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaaa Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	0	0	1	5.000.000	1	1.000.000	1	1.062.275	1	1.073.760	1			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	6.153.400	9	6.276.468	9	1.000.000	9	1.005.000	9	1.025.100	9			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen	0	1	992.600	3	40.432.532	3	3.145.000	3	3.180.725	3	3.223.940	3			
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	0	3	992.600	3	1.011.840	3	1.000.000	3	1.005.000	3	1.025.100	3			
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	0	1	38.420.692	1	1.145.000	1	1.150.725	1	1.173.740	1			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.005.000	1	1.025.100	1			
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen	0	0		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.005.000	1	1.025.100	1			
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instasi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.005.000	1	1.025.100	1			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan	0	0		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.005.000	1	1.025.100	1			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.005.000	1	1.025.100	1			
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	%	100	100	93.861.800	100	96.739.036	100	97.222.000	100	99.166.440	100	101.149.768	100	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Purworejo	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen	1	1	36.746.800	2	38.481.736	2	38.674.000	2	39.447.480	2	40.236.429	9			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawaah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Masyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemassyarakatan	0	0	0	1	1.000.000	1	1.005.000	1	1.025.100	1	1.045.601	1			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Nasyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	6	36.746.800	6	37.481.736	6	37.669.000	6	38.422.380	6	39.190.828	6			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dokumen	1	3	57.115.000	3	58.257.300	3	58.548.000	3	59.718.960	3	60.913.339	3			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawaah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Masyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	1	14	57.115.000	14	58.257.300	14	58.548.000	14	59.718.960	14	60.913.339	14			
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UNUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	2.100.000	100	2.871.000	100	2.100.000	100	2.133.000	100	2.167.000	100	SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Purworejo	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraaa Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2	2	2.100.000	2	2.110.500	2	1.600.000	2	1.632.000	2	1.664.640	2			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	6	1.050.000	6	1.055.250	6	800.000	6	816.000	6	832.320	6			

7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	2	1.050.000	2	1.055.250	2	800.000	2	816.000	2	832.320	2			
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0		1	760.500	1	500.000	1	501.000	1	502.360	1			
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	0	0	0	1	760.500	1	500.000	1	501.000	1	502.360	1			
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	17.508.000	100	17.785.000	100	17.508.000	100	17.785.000	100	18.066.000	100	SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Purworejo	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	2	2	17.508.000	2	17.785.000	2	17.508.000	2	17.785.000	2	18.066.000	2			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	200	130	7.308.000	130	7.381.080	130	7.417.985	130	7.381.080	130	7.528.702	130			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Dokumen	0	0	0	2	1.000.000	2	1.005.000	2	1.000.000	2	1.020.000	2			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	2	2	10.200.000	2	9.403.920	2	9.065.015	2	9.403.920	2	9.517.298	2			
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	27.377.000	100	27.810.000	100	27.377.000	100	27.810.000	100	28.249.000	100	SEKSI PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Purworejo	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Hasil Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	7	13	27.377.000	13	27.810.000	13	27.377.000	13	27.810.000	13	28.249.000	13			
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	0	0	1	1.889.994	1	1.927.794	1	1.889.994	1	1.889.994	1			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	0	1	534.900	1	544.680	1	555.574	1	544.680	1	544.680	1			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	3	3.764.600	3	3.802.248	3	3.878.291	3	3.802.248	3	3.802.248	3			
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	2	17.124.400	2	12.000.000	2	11.250.800	2	12.000.000	2	12.439.000	2			
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	0	0	1	500.000	1	510.000	1	500.000	1	500.000	1			
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	0	0	1	500.000	1	510.000	1	500.000	1	500.000	1			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	1	3.242.400	1	3.307.248	1	3.373.393	1	3.307.248	1	3.307.248	1			
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	0	0	0	1	500.000	1	510.000	1	500.000	1	500.000	1			
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	0	0	0	1	500.000	1	510.000	1	500.000	1	500.000	1			

7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	0	0	0	1	500.000	1	510.000	1	500.000	1	500.000	1			
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan diWilayah Kecametan	Laporan	0	0	0	1	500.000	1	510.000	1	500.000	1	500.000	1			
Jumlah							**13.332.804.698**		**13.515.575.036**		**12.396.303.000**		**12.398.103.440**		**12.400.955.768**				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN PURWOREJO
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						837.821.700		855.740.829		845.232.665		850.803.128		864.828.571				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			837.821.700		855.740.829		845.232.665		850.803.128		864.828.571		KELURAHAN PURWOREJO	KELURAHAN PURWOREJO	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			837.821.700		855.740.829		845.232.665		850.803.128		864.828.571		KELURAHAN PURWOREJO		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	3	501.221.000	3	502.032.000	3	489.754.000	3	489.983.000	3	496.793.000	3	KELURAHAN PURWOREJO		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	1	336.600.700	1	353.708.829	1	355.478.665	1	360.820.128	1	368.035.571	1	KELURAHAN PURWOREJO		
Jumlah							837.821.700		855.740.829		845.232.665		850.803.128		864.828.571				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN PANGENREJO
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2036)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						660.638.000		670.446.000		659.546.000		662.585.000		672.955.000				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			660.638.000		670.446.000		659.546.000		662.585.000		672.955.000		KELURAHAN PANGENREJO	KELURAHAN PANGENREJO	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			660.638.000		670.446.000		659.546.000		662.585.000		672.955.000		KELURAHAN PANGENREJO		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	3	483.045.000	3	483.827.000	3	471.994.000	3	472.215.000	3	478.778.000	3	KELURAHAN PANGENREJO		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	1	177.593.000	1	186.619.000	1	187.552.000	1	190.370.000	1	194.177.000	1	KELURAHAN PANGENREJO		
Jumlah							660.638.000		670.446.000		659.546.000		662.585.000		672.955.000				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN TAMBAKREJO
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						665.281.000		675.839.000		665.276.000		668.549.000		679.101.000				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			665.281.000		675.839.000		665.276.000		668.549.000		679.101.000		KELURAHAN TAMBAKREJO	KELURAHAN TAMBAKREJO	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			665.281.000		675.839.000		665.276.000		668.549.000		679.101.000		KELURAHAN TAMBAKREJO		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	3	472.593.000	3	473.358.000	3	461.782.000	3	461.998.000	3	468.419.000	3	KELURAHAN TAMBAKREJO		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	1	192.688.000	1	202.481.000	1	203.494.000	1	206.551.000	1	210.682.000	1	KELURAHAN TAMBAKREJO		
Jumlah							**665.281.000**		**675.839.000**		**665.276.000**		**668.549.000**		**679.101.000**				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN CANGKREP LOR
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						678.385.000		688.558.000		677.427.000		680.580.000		691.245.000				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			678.385.000		688.558.000		677.427.000		680.580.000		691.245.000		KELURAHAN CANGKREP LOR	KELURAHAN CANGKREP LOR	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			678.385.000		688.558.000		677.427.000		680.580.000		691.245.000		KELURAHAN CANGKREP LOR		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	3	493.951.000	3	494.750.000	3	482.650.000	3	482.876.000	3	489.587.000	3	KELURAHAN CANGKREP LOR		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	1	184.434.000	1	193.808.000	1	194.777.000	1	197.704.000	1	201.658.000	1	KELURAHAN CANGKREP LOR		
Jumlah							678.385.000		688.558.000		677.427.000		680.580.000		691.245.000				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN CANGKREP KIDUL
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						667.521.000		676.718.000		665.273.000		668.120.000		678.485.000				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			667.521.000		676.718.000		665.273.000		668.120.000		678.485.000		KELURAHAN CANGKREP KIDUL	KELURAHAN CANGKREP KIDUL	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			667.521.000		676.718.000		665.273.000		668.120.000		678.485.000		KELURAHAN CANGKREP KIDUL		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	3	502.584.000	3	503.398.000	3	491.086.000	3	491.316.000	3	498.145.000	3	KELURAHAN CANGKREP KIDUL		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	1	164.937.000	1	173.320.000	1	174.187.000	1	176.804.000	1	180.340.000	1	KELURAHAN CANGKREP KIDUL		
Jumlah							667.521.000		676.718.000		665.273.000		668.120.000		678.485.000				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN KEDUNGSARI
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						659.754.400		668.308.135		656.674.335		659.321.432		669.479.661				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			659.754.400		668.308.135		656.674.335		659.321.432		669.479.661		KELURAHAN KEDUNGSARI	KELURAHAN KEDUNGSARI	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			659.754.400		668.308.135		656.674.335		659.321.432		669.479.661		KELURAHAN KEDUNGSARI		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	3	507.584.400	3	508.404.135	3	495.970.335	3	496.203.432	3	503.098.661	3	KELURAHAN KEDUNGSARI		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	1	152.170.000	1	159.904.000	1	160.704.000	1	163.118.000	1	166.381.000	1	KELURAHAN KEDUNGSARI		
Jumlah							659.754.400		668.308.135		656.674.335		659.321.432		669.479.661				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN PANGEN JURUTENGAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07.01	KECAMATAN						698.564.000		710.614.000		700.102.000		703.840.000		715.074.000				
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			698.564.000		710.614.000		700.102.000		703.840.000		715.074.000		KELURAHAN PANGEN JURUTENGAH	KELURAHAN PANGEN JURUTENGAH	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			698.564.000		710.614.000		700.102.000		703.840.000		715.074.000		KELURAHAN PANGEN JURUTENGAH		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	3	476.683.000	3	477.455.000	3	465.778.000	3	465.995.000	3	472.472.000	3	KELURAHAN PANGEN JURUTENGAH		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	1	221.881.000	1	233.159.000	1	234.324.000	1	237.845.000	1	242.602.000	1	KELURAHAN PANGEN JURUTENGAH		
Jumlah							698.564.000		710.614.000		700.102.000		703.840.000		715.074.000				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN DOPLANG
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						620.163.000		629.367.000		619.134.000		621.985.000		631.720.000				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			620.163.000		629.367.000		619.134.000		621.985.000		631.720.000		KELURAHAN DOPLANG	KELURAHAN DOPLANG	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			620.163.000		629.367.000		619.134.000		621.985.000		631.720.000		KELURAHAN DOPLANG		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	3	453.508.000	3	454.242.000	3	443.133.000	3	443.340.000	3	449.502.000	3	KELURAHAN DOPLANG		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	1	166.655.000	1	175.125.000	1	176.001.000	1	178.645.000	1	182.218.000	1	KELURAHAN DOPLANG		
Jumlah							620.163.000		629.367.000		619.134.000		621.985.000		631.720.000				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN MRANTI
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						597.363.000		605.856.000		595.773.000		598.403.000		607.720.000				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			597.363.000		605.856.000		595.773.000		598.403.000		607.720.000		KELURAHAN MRANTI	KELURAHAN MRANTI	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			597.363.000		605.856.000		595.773.000		598.403.000		607.720.000		KELURAHAN MRANTI		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	3	444.420.000	3	445.139.000	3	434.253.000	3	434.456.000	3	440.494.000	3	KELURAHAN MRANTI		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	1	152.943.000	1	160.717.000	1	161.520.000	1	163.947.000	1	167.226.000	1	KELURAHAN MRANTI		
Jumlah							597.363.000		605.856.000		595.773.000		598.403.000		607.720.000				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN SINDURJAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						646.466.000		657.724.000		648.061.000		651.553.000		661.966.000				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			646.466.000		657.724.000		648.061.000		651.553.000		661.966.000		KELURAHAN SINDURJAN	KELURAHAN SINDURJAN	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			646.466.000		657.724.000		648.061.000		651.553.000		661.966.000		KELURAHAN SINDURJAN		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	3	438.967.000	3	439.678.000	3	428.925.000	3	429.125.000	3	435.089.000	3	KELURAHAN SINDURJAN		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	1	207.499.000	1	218.046.000	1	219.136.000	1	222.428.000	1	226.877.000	1	KELURAHAN SINDURJAN		
Jumlah							646.466.000		657.724.000		648.061.000		651.553.000		661.966.000				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN PADUROSO
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						531.184.000		537.633.000		527.999.000		529.992.000		538.101.000				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			531.184.000		537.633.000		527.999.000		529.992.000		538.101.000		KELURAHAN PADUROSO	KELURAHAN PADUROSO	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			531.184.000		537.633.000		527.999.000		529.992.000		538.101.000		KELURAHAN PADUROSO		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	3	417.610.000	3	418.286.000	3	408.056.000	3	408.247.000	3	413.921.000	3	KELURAHAN PADUROSO		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	1	113.574.000	1	119.347.000	1	119.943.000	1	121.745.000	1	124.180.000	1	KELURAHAN PADUROSO		
Jumlah							**531.184.000**		**537.633.000**		**527.999.000**		**529.992.000**		**538.101.000**				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN BALEDONO
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						753.099.000		768.457.000		758.557.000		763.329.000		775.817.000				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			753.099.000		768.457.000		758.557.000		763.329.000		775.817.000		KELURAHAN BALEDONO	KELURAHAN BALEDONO	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			753.099.000		768.457.000		758.557.000		763.329.000		775.817.000		KELURAHAN BALEDONO		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	3	465.777.000	3	466.531.000	3	455.121.000	3	455.334.000	3	461.663.000	3	KELURAHAN BALEDONO		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	1	287.322.000	1	301.926.000	1	303.436.000	1	307.995.000	1	314.154.000	1	KELURAHAN BALEDONO		
Jumlah							753.099.000		768.457.000		758.557.000		763.329.000		775.817.000				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN KESENENG
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN																		
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			608.825.000		616.596.000		605.783.000		608.186.000		617.541.000				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			608.825.000		616.596.000		605.783.000		608.186.000		617.541.000		KELURAHAN KESENENG	KELURAHAN KESENENG	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	3	470.952.000	3	471.715.000	3	460.178.000	3	460.393.000	3	466.792.000	3	KELURAHAN KESENENG		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	1	137.873.000	1	144.881.000	1	145.605.000	1	147.793.000	1	150.749.000	1	KELURAHAN KESENENG		
Jumlah							608.825.000		616.596.000		605.783.000		608.186.000		617.541.000				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN MUDAL
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07.01	KECAMATAN																		
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			550.029.000		556.809.000		546.896.000		548.992.000		557.406.000				
							550.029.000		556.809.000		546.896.000		548.992.000		557.406.000		KELURAHAN MUDAL	KELURAHAN MUDAL	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			550.029.000		556.809.000		546.896.000		548.992.000		557.406.000		KELURAHAN MUDAL		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	3	430.333.000	3	431.030.000	3	420.488.000	3	420.685.000	3	426.532.000	3	KELURAHAN MUDAL		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	1	119.696.000	1	125.779.000	1	126.408.000	1	128.307.000	1	130.874.000	1	KELURAHAN MUDAL		
Jumlah							550.029.000		556.809.000		546.896.000		548.992.000		557.406.000				

Tabel 4.4.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Monitoring Pembangunan	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas)	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi intensifikasi PBB	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			

			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	

			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil kelurahan, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi keagamaan	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda	

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka	
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Forkopimcam	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa	

			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP)	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades dan Sekdes	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pilkades	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi	
			Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Penyusunan Masterplan Desa, Penyusunan Website Desa	

4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, provinsi, dan kegiatan unggulan daerah, Kecamatan Purworejo mengimplementasikan program Pembentukan Kecamatan Berdaya. Program ini menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi bagi kelompok difabel, perempuan, pelaku ekonomi kreatif, serta pengembangan sport center.

Sejalan dengan agenda nasional, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata pada upaya penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, penguatan pendidikan, serta perlindungan kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan lansia. Dukungan ini diwujudkan melalui fasilitasi langsung, koordinasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.

Pada tataran Kabupaten, Kecamatan Purworejo berperan aktif dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pelestarian lingkungan. Melalui koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan, Kecamatan Purworejo berupaya mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing wilayah.

Dengan berbagai kegiatan tersebut, Kecamatan Purworejo berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan kolaboratif, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah.

Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Fasilitasi pemberdayaan perempuan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi perlindungan anak	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi penurunan stunting	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi pendidikan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi perlindungan lansia	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi pemberdayaan disabilitas	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi tenologi tepat guna	Kecamatan	Kecamatan
		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi dan pembinaan UMKM	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi pelestaian lingkungan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi desa wisata	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi dan pembinaan PKK	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi BUMDes	Kecamatan	Kecamatan

4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dilakukan melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini berfungsi sebagai tolok ukur kinerja yang terukur, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memudahkan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Secara lengkap, rincian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Purworejo untuk periode 2025–2030 dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Tujuan PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	86	86,25	87	87,75	88,5	89,25	Sasaran PD

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhanan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Purworejo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Purworejo Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Purworejo, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purworejo setiap tahunnya.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Rencana Strategis Kecamatan Purworejo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Purworejo setiap tahun.
b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c) Camat Purworejo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten

Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo perlu Menyusun dokumen perencanaan strategis yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, yang akan dicapai oleh Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo 5 (lima) tahun kedepan serta strategi, kebijakan serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo terpilih. Dokumen Rencana Strategis ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan serta penganggaran dapat lebih terpadu, terarah serta konsisten dalam mencapai tujuan pembangunan sehingga pelayanan wajib pelayanan administrasi terpadu dapat terpenuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun, merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran, mencapai tujuan dan misi sehingga visi Bupati terpilih yang telah ditetapkan dan terwujud pada tahun 2025-2029. Rentra ini juga sebagai evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dasar Renstra adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 272 ayat 1 bahwa Perangkat Daerah Menyusun Renstra dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya dengan adanya Peraturan Daerah kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo; dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Adapun hubungan keterkaitan antara tahapan penyusunan RPJMD dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dengan skema sebagaimana Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Dengan telah ditetapkanya RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 menjadi kewajiban semua Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan, penyusunan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/Langkah sebagai berikut :

a. Tahapan persiapan Penyusunan Ranwal Renstra, melakukan kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
b. Tahapan penyusunan dan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan Renstra dan tahap penyajian Ranwal Renstra Perangkat Daerah.
c. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Banyuurip selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bapperida Kabupaten Purworejo.

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan hierarkhi Renstra Perangkat Daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Karena itu Renstra Kecamatan Banyuurip Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Purworejo untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1.1. Landasan Hukum Penyusunan

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada, setiap Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (PD) wajib Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Adapun landasan hukum yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah memiliki Renstra PD adalah:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);

24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purworejo.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Renstra ini disusun sebagai penjabaran operasional visi, misi, dan program kepala daerah dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Banyuurip dalam periode Tahun 2025–2029.

2. Tujuan

   Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan:

   a. Mewujudkan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Untuk mengintegrasikan program-program pembangunan di daerah dalam rangka penyusunan program lima tahunan, serta menjamin konsistensi perencanaan dan komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo.
   b. Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat.
   c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian Kinerja Kecamatan Banyuurip.
   d. Meningkatkan pelayanan secara prima.
   e. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Banyuurip sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali;
   f. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) Bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV ROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 1.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- 1.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah
- 1.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang tata pemeritahan, ekonomi dan pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat dan Desa / Kelurahan.

2.1.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan pada periode Renstra 2025 – 2029 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo terbit yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

a. Tugas

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkuo Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta

yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan
3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
4. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
1. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di willayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
1. Melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan
4. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. Melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
3. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:

1. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
4. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan, meliputi:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
2. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan /atau kelurahan;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan / atau perangkat kelurahan;
5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa da/ atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Camat menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. pengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan;
8. pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Banyuurip mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo terdiri atas:

a. Camat

Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, bertugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat, membawakan:

a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat.

Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Pejabat Fungsional; dan
b) pelaksana

subbagian Perencanaan dan Keuangan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi:

a) merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja;
b) melaksanakan pengadministrasian keuangan; dan
c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian yang meliputi:

a) melaksanakan pengadministrasian barang milIK Daerah pada lingkungan Kecamatan;
b) melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan Kecamatan;
c) melaksanakan pengadaan barang milik Daerah;
d) melaksanakan penyediaan jasa penunjang;
e) melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;
f) menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
g) menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

c. Seksi Pemerintahan Desa

Seksi Pemerintahan Desa bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa, yang meliputi:

a) Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b) Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
d) Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e) Melaksanakan fasilitasi pelaksanakan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawarahan desa;
h) Melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i) Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa;
j) Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan;
k) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
l) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan;
m) Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n) Melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
o) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
p) Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
q) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
r) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan; dan
s) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

d. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi;

a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang meliputi:
    1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
    2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang Kesehatan, Pendidikan, social dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan; dan
    3. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.
b) Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
    1. Koordinasi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi vertical yang terkait dengan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
    2. Pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.

c) Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
   1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
   2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
   3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat.
d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

e. Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan ketertiban Umum yang meliputi:
a) Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi:
   1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan; dan
   2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.
b) Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang meliputi koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kecamatan;
c) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati, yang meliputu:
   1. Pelaksanaan tugas forum komunikasi pimpinan di Kecamatan;
   2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   3. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
   4. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   5. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional;
   6. Penanganan konflik social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
   8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical.
d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannnya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi pemberdayaan Masyarakat bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

a) Melaksanakan di tingkat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang meliputi:
   1. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi vertical terkait; dan
   2. Peningkatan Kecamatan.
b) Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi:
   1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
   2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan dan
   3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
c) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki kelurahan diwilayahnya; dan
d) Melaksanakan tuga slain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannnya.

g. Kelurahan

Kelurahan dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Camat:

a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b) Melaksanakan kegiatan evaluasi kelurahan;
c) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
d) Melaksanakan pelayanan masyarakat;
e) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
f) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitasi pelayanan umum;
g) Melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan\
i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudsukan, susunan organisasi, tubas dan fungsi serta tata kerja kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

h. Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada kecamatan.

Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilalrukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.

Penugasan secara individu dan/ atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah.

2.1.1.1. Tata Kerja

Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

a. Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta perunjuk petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
b. Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi perunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta meyampaikan laporan tepat waktu.
c. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Kecamatan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
d. Setiap laporan yang diterima oleh Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan pejabat Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
    1) Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan disekitarnya.
    2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan.
    3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Banyuurip

CAMAT

GALUH BAKTI PERTIWI, S. STP. MM
Pembina Tk.I /IV/b
NIP. 198110112000122001

SEKRETARIS

IFAN MOCHTAR LATIF, AKS, MAP
Pembina / IV/a
NIP. 197004231997021001

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KASI
TATA PEMERINTAHAN

DJUMALI, S.IP
Penata Tk I / III/d
NIP. 196910101992031015

KASI
PEMBERD. MASY. DAN DESA

ICHWANTO, S. IP
Penata / III/c
NIP. 197204032009061003

KASI
TRANTIBUM

JOKO TRIYONO, SE. MM
Pembina / IV/a
NIP. 197410071996031001

KASI
EKONOMI DAN PEMB

JOKO TRIYONO, SE. MM
Pembina / IV/a
NIP. 197410071996031001

KASUBAG
KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

TEDY MULYOHARTONO, S. Sos
Penata Muda Tk I / III/b
NIP. 197805042010011016

KASUBAG
PERENCANAAN,EVALAP DAN UMUM

SUKANAH, SE
Penata / III/c
NIP. 197510132014062001

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Banyuurip pada Tahun 2025 memiliki pegawai sebanyak orang 35, dengan rincian PNS sebanyak 26 orang, PPPK sebanyak 2 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 7 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan (ASN)

Table 2.1

Pegawai Kecamatan Banyuurip Berdasarkan Golongan

GOLONGAN/ RUANG	ESELON							
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	JUMLAH
Golongan IV/e								
Golongan IV/d								
Golongan IV/c								
Golongan IV/b			1					
Golongan IV/a			1	2			1	
JUMLAH GOLONGAN IV								
Golongan III/d				1				
Golongan III/c				8				
Golongan III/b				3			3	
Golongan III/a							2	
JUMLAH GOLONGAN II								
Golongan II/d							3	
Golongan II/c								
Golongan II/b								
Golongan II/a							1	
JUMLAH GOLONGAN I								
JUMLAH PPPK GOLONGAN 7						1		
PPPK GOLONGAN 5							1	
TOTAL	0	0	2	14	0	1	11	26

Sumber Data : Data Kepegawaian Kecamatan Banyuurip Tahun 2025 (Agustus)

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No	Pangkat	Gol / Ruang	Jumlah
	Kecamatan		
1.	Pembina Tk I	IV/b	1 orang
2.	Pembina	IV/a	3 orang
3.	Penata Tk. I	III/d	1 orang
4.	Penata	III/c	3 orang
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	2 orang
6.	Penata Muda	III/a	1 orang
7.	Pengatur Tk. I	II/d	3 orang
8.	Pengatur	II/c	- orang
No	Pangkat	Gol / Ruang	Jumlah
9	Pengatur Muda Tk. I	II/b	- orang
10	Pengatur Muda	II/a	1 orang
11	Juru Muda Tk. I	I/d	- orang
12	PPPK	VII	1 orang
13	PPPK	V	1 orang

14	Tenaga kontrak	-	3 orang
			20 orang
	Kelurahan Kledung Karangdalem		
1.	Penata Tk. I	III/d	- orang
2.	Penata	III/c	2 orang
3.	Penata Muda Tk. I	III/b	3 orang
4.	Penata Muda	III/a	- orang
5.	Pengatur Tk.I	II/d	- orang
6.	Pengatur	II/c	- orang
7	Tenaga kontrak	-	1 orang
			7 orang
	Kelurahan Kledungkradenan		
1	Pembina	IV/a	- orang
2	Penata	III/c	2 orang
3	Penata Muda Tk. I	III/b	3 orang
4	Penata Muda	III/a	- orang
5	Pengatur Tk.I	II/d	- orang
6	Tenaga kontrak	-	- orang
			1 orang
			7 orang
	Kelurahan Borokulon		
1	Pembina	IV/a	- orang
2	Penata Tk. I	III/d	- orang
3	Penata	III/c	2 orang
4	Penata Muda	III/a	- orang
5	Pengatur Tk.I	II/d	- orang
6	Tenaga kontrak	-	2 orang
			4 orang
	Jumlah		35 orang

Sumber Data : Data Kepegawaian Kecamatan Banyuurip Tahun 2025 (Agustus)

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

Table 2.3

Pegawai Kecamatan Banyuurip Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah	
		ASN	NON ASN
1	Laki-laki	16	7
2	Perempuan	12	
	Jumlah		

Sumber Data : Data Kepegawaian Kecamatan Banyuurip Tahun 2025 (Agustus)

d. Berdasarkan Usia

Table 2.4

Pegawai Kecamatan Banyuurip Berdasarkan Usia

No	Berdasarkan Usia	Jumlah	
		ASN	NON ASN
1	20-35 tahun	4	5
2	36-55 tahun	20	1
3	≥56 tahun	4	1

	Jumlah		

Sumber Data : Data Kepegawaian Kecamatan Banyuurip Tahun 2025 (Agustus)

e. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Table 2.5

Pegawai Kecamatan Banyuurip Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
	Kecamatan	
1.	Pasca Sarjana	4 orang
2.	Sarjana	5 orang
3.	Sarjana Muda / ahli madya	3 orang
4.	SLTA/sederajat	4 orang
5.	SLTP	1 orang
6.	Kontrak :	
	SD	- orang
	SLTP	- orang
	SLTA	3 orang
	Kelurahan Kledung Karangdalem	
1.	Pasca Sarjana	1 orang
2.	Sarjana	3 orang
3.	Sarjana Muda /ahli madya	- orang
4.	SLTA/sederajat	1 orang
5.	Kontrak :	
	SLTA	1 orang
	Kelurahan Kledungkradenan	
1.	Pasca Sarjana	1 orang
2.	Sarjana	1 orang
3.	SLTA / sederajat	2 orang
	Kelurahan Borokulon	
1.	Pasca Sarjana	- orang
2.	Sarjana	1 orang
3.	Sarjana Muda/Ahli Madya	- orang
4.	SLTA / Sederajat	1 orang
5.	SMP	- orang
	Kontrak :	
	SD	- orang
	SLTP	- orang
	SMA	2 orang
	Jumlah	35 orang

Sumber Data : Data Kepegawaian Kecamatan Banyuurip Tahun 2025 (Agustus)

f. Berdasarkan Diklat

Table 2.6

Pegawai Kecamatan Banyuurip Berdasarkan Diklat

No	Diklat Perjenjangan	Jumlah Pegawai
	Kecamatan	
1.	Pim III	1 orang
2.	Pim III / SPAMA	- orang
3.	Pim IV / ADUM/ADUMLA	1 orang
	Kelurahan Kledung Karangdalem	
	Pim IV/ADUM/ADUMLA	- orang
	Kelurahan Kledungkradenan	
	Pim IV/ADUM/ADUMLA	- orang
	Kelurahan Borokulon	

	Pim IV/ADUM/ADUMLA	- orang
	Jumlah	2 orang

Sumber Data : Data Kepegawaian Kecamatan Banyuurip Tahun 2025 (Agustus)

2.1.1.1. Sarana Prasarana

Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Banyuurip adalah sebagai berikut:

Table: 2.7

Inventaris Tanah Kecamatan Banyuurip

No	Jenis Barang/Nama Barang	Luas (m2)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.186 m2

Table 2.8

Inventaris Peralatan dan Mesin Kecamatan Banyuurip

No	Jenis Barang Inventaris	Jumlah	Kondisi
A.	Tanah	1Bidang (2186	Baik/Berfungsi
B.	Peralatan dan Mesin	m2)	
	Kendaraan Roda 4	22 unit	Baik/Berfungsi
	Kendaraan Roda 2	1 unit	Baik/Berfungsi
	PC Unit	16 unit	Baik/Berfungsi
	Laptop/Notebook	2 Unit	Baik/Berfungsi
	Printer	8 Unit	Baik/Berfungsi
	Lemari Kayu	14 Printer	Baik/Berfungsi
	Rak Besi/Arsip	1 buah	Baik/Berfungsi
	Rak Kayu	4 buah	Baik/Berfungs
	Filling Cabinet Besi	2 buah	Baik/Berfungsi
		2 buah	
	Brandkas		Baik/Berfungsi
	Mesin Absen	1 buah	Baik/Berfungsi
	Overhead Projektor	1 Unit	Baki/Berfungsi
	Display	3 unit	Baik/Berfungsi
	Meja Kerja Besi/Metal	1 unit	Baik/Berfungsi
	Kursi Besi/Metal	8 Buah	Baik/Berfungsi

No	Jenis Barang Inventaris	Jumlah	Kondisi
	Kursi Kayu	10 buah	Baik/Berfungsi
	Meja Resepsionis	3 buah	Baik/Berfungsi
	Meja Panjang	2 buah	Baik/Berfungsi
	Meja ½ Biro	1 buah	Baik/Berfungsi
	Meja Makan Besi	28 buah	Baik/Berfungsi
	Kursi Rapat	1 unit	Baik/Berfungs
	Kursi Tamu	140 buah	Baik/Berfungsi
	Kursi Putar	25 buah	Baik/Berfungsi
	Bangku Tunggu	2 buah	Baik/Berfungsi
	Kursi Lipat	3 buah	Baki/Berfungsi
	Meja Komputer	11 buah	Baik/Berfungsi
	Jam Elektronik	4 buah	Baik/Berfungsi
	Mesin Penghisap Debu	2 buah	Baik/Berfungsi
	Lemari Es	1 buah	Baik/Berfungsi
	AC Window	2 unit	Baik/Berfungsi
	AC Split	1 unit	Baik/Berfungsi
	Kipas Angin	11 unit	Baik/Berfungsi
	Kompor Gas	3 unit	Baik/Berfungsi

	Rice Warmer	4 unit	Baik/Berfungsi
	Televisi	1 unit	Baik/Berfungsi
	Amplifier	5 unit	Baik/Berfungsi
	Sound system	1 unit	Baik/Berfungsi
	Tangga Aluminium	3 unit	Baik/Berfungsi
	Dispencer	1 buah	Baki/Berfungsi
	Alat Rumah Tangga Lain2	2 buah	Baik/Berfungsi
	Kursi Kerja Pejabat Esl.2	7 buah	Baik/Berfungsi
	Kursi Kerja Pejabat Esl.IV	1 buah	Baik/Berfungsi
	Audio Amplifier	7 buah	Baik/Berfungsi
	Camera Elektronik	1 buah	Baik/Berfungsi
	Peralatan Antena UHF	1 buah	Baik/Berfungsi
	Meja Kerja	1 unit	Baki/Berfungsi
	Layar	1 buah	

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai hak-hak dasar setiap warga negara. Pelayanan publik ini merupakan tolak ukur apakah pemerintah melakukan kinerjanya dengan baik karena kualitas pelayanan publik ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan publik ini harus dilakukan secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Kecamatan Banyuurip mempunyai peranan dalam membantu Bupati Purworejo dalam memberikan pelayanan publik.

Pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya. Berikut dapat kami sajikan dalam Tabel 2.1 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banyuurip.

Table 2.1
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Banyuurip
Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaia		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				80,75	81	81,25	81,50	81,75	82	85,97	99,86	8
	Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				80,75	81	81,25	81,50	81,75	82	85,97	99,86	8
	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
	Persentase Penyeelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio target kinerja Renstra tahun 2021- 2026 dapat tercapai 100 % untuk masing masing sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Banyuurip. keberhasilan tersebut dapat tercapai berkat dukungan dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan di Kecamatan Banyuurip, segenap komponen masyarakat Purworejo, serta komitmen kerja keras segenap Pimpinan Staf dan Pegawai Kecamatan Banyuurip, dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncakan. Selanjutnya kami sajikan Tabel 2.2 sebagai berikut

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Banyuurip

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Angga	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
Kewilayahan								8.132.251.094
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.702.180.905	4.672.524.549	4.107.386.075	4.089.271.330	4.239.694.218	4.633.639.303	4.054.066.467	4.486.796.716
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	202.078.800	9.115.400	31.583.500	13.691.600	7.197.600	10.513.000	179.247.500	8.915.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.000.060.700	1.213.650.500	2.337.549.800	1.798.479.150	1.739.561.200	2.111.783.360	983.837.421	1.143.821.625
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	110.000.000	12.205.000	15.599.600	15.016.200	5.683.700	5.413.119	94.521.200	12.146.900
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1.464.000	44.025.200	41.077.600	22.516.200	10.848.000		1.464.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	304.206.300	267.740.800	227.199.900	141.135.600	53.807.200	37.085.900	286.519.100	264.692.500

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		80,75	81	81,25	81,50	
2	Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		80,75	81	81,25	81,50	
3	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	

Dilihat dari tabel 2.1 bahwa target dan realisasi tahun 2021-2024 hampir secara keseluruhan tercapai 100% untuk yang belum 100% dikarenakan Tahun 2025 masih berjalan sampai Bulan April, dan diperkirakan sampai akhir tahun akan terealisasi dan tercapai.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Banyuurip sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

1) Tuntutan dan harapan warga masyarakat terhadap perwujudan Good Governance dan Good Government merupakan peluang pada PD Kecamatan Banyuurip untuk selalu meningkatkan kinerja.
2) Kepedulian dan kebersamaan pihak swasta dalam mendukung program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan.
3) Adanya penundaan rekrutmen PNS berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur terhadap pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing dan adanya regulasi yang terus mengalami perubahan.
4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5) Para penyelenggara Pemerintah Desa belum secara optimal memahami regulasi tentang pemerintahan desa yang cenderung berubah.
6) Adanya tambahan penghasilan meningkatkan kinerja sumber daya pegawai.
7) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana maupun pengembangan potensi alam.

2.1.Tantangan

a. Memberikan kesempatan bagi Kecamatan untuk mengembangkan kemampuan penyusunan perencanaan secara

makro dan mikro sehingga memberikan motivasi bagi pengembangan SDM;

b. Memberikan prioritas pada rencana kerja adanya pengembangan Paten secara maksimal dan potensi inovasi;
c. Kemajuan Informasi dan Teknologi yang telah merambah ke semua desa/ kelurahan serta lapisan masyarakat;

d. Memberikan dukungan secara maksimal kepada desa desa yang mendapatkan prioritas pembangunan.
e. Semakin berkurangnya jumlah pegawai dengan pertambahan pengisiannya yang terpusat menambah beban mencapai tupoksi.

2.1.1.1. Peluang

a. Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
b. Memberikan kemungkinan peningkatan pendapatan, efek pembangunan.
c. Mendapatkan dukungan dana dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
d. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banyuurip meliputi internal Sekretariat Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan, Instansi vertikal TNI/Polri, KUA dan elemen masyarakat umum.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyuurip, maka permasalahan berdasarkan Tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Banyuurip dapat dilihat faktor faktor yang mempengaruhinya bersifat Internal SKPD sebagai berikut :

A. Analisis Internal

1) Adanya dukungan dana untuk penyelenggaraan tupoksi kecamatan;
2) Adanya personil kecamatan dengan latar belakang yang berbeda;
3) Adanya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap kecamatan oleh Bupati;
4) Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan dan kelurahan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
5) Kurangnya jumlah sarana dan prasarana di kecamatan dan kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
6) Lemahnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
7) Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
8) Lemahnya koordinasi dan pembinaan di internal kecamatan;
9) Lemahnya pengelolaan kearsipan;
10) Lemahnya motivasi dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan;

11) Memberikan dukungan secara maksimal kepada desa desa yang mendapatkan prioritas pembangunan.
12) Semakin berkurangnya jumlah pegawai dengan pertambahan pengisiannya yang terpusat menambah beban mencapai tupoksi.

2.2.1.1. Peluang

e. Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
f. Memberikan kemungkinan peningkatan pendapatan, efek pembangunan.
g. Mendapatkan dukungan dana dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
h. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banyuurip meliputi internal Sekretariat Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan, Instansi vertikal TNI/Polri, KUA dan elemen masyarakat umum.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyuurip, maka permasalahan berdasarkan Tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Banyuurip dapat dilihat faktor faktor yang mempengaruhinya bersifat Internal SKPD sebagai berikut :

B. Analisis Internal
1) Adanya dukungan dana untuk penyelenggaraan tupoksi kecamatan;
2) Adanya personil kecamatan dengan latar belakang yang berbeda;
3) Adanya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap kecamatan oleh Bupati;
4) Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan dan kelurahan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
5) Kurangnya jumlah sarana dan prasarana di kecamatan dan kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
6) Lemahnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
7) Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
8) Lemahnya koordinasi dan pembinaan di internal kecamatan;
9) Lemahnya pengelolaan kearsipan;
10) Lemahnya motivasi dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan;

C. Analisis Eksternal
1) Adanya kesempatan mengikuti bintek ketrampilan bagi aparatur yang berpotensi meningkatkan kemampuan;
2) Adanya kesempatan mendapatkan tambahan penghasilan pada pengelolaan potensi pendapatan di Kecamatan;
3) Adanya pembebanan terkait pencapaian indikator keberhasilan pembangunan di Kecamatan;

4) Adanya pembebanan penanggulangan kemiskinan, pengarusutamaan gender dan bencana alam;
5) Adanya undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6) Undang undang desa no 6 tahun 2014

Permasalahan – permasalahan kecamatan dan kelurahan
Dapat disampaikan sebagai berikut:

a) Belum Optimalnya pelayanan kepada masyarakat ;
b) Kurangnya sarana dan Prasarana ;
c) Kurangnya sumber daya manusia baik kualitas atau kwantitas dalam struktur yang ada ataupun pelayanan kepada masyarakat;
d) Belum tersedianya data base pembangunan yang memadai;
e) Belum terimplemantasinya sistem informasi desa;
f) Koordinasi yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan kurang maksimal;

2.2.2 Isu Strategis

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyuurip, maka permasalahan berdasarkan Tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Banyuurip dapat dilihat faktor faktor yang mempengaruhinya bersifat Internal SKPD sebagai berikut :

D. Analisis Internal
1) Adanya dukungan dana untuk penyelenggaraan tupoksi kecamatan;
2) Adanya personil kecamatan dengan latar belakang yang berbeda;
3) Adanya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap kecamatan oleh Bupati;
4) Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan dan kelurahan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
5) Kurangnya jumlah sarana dan prasarana di kecamatan dan kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
6) Lemahnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
7) Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
8) Lemahnya koordinasi dan pembinaan di internal kecamatan;
9) Lemahnya pengelolaan kearsipan;
10) Lemahnya motivasi dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan;

E. Analisis Eksternal
1) Adanya kesempatan mengikuti bintek ketrampilan bagi aparatur yang berpotensi meningkatkan kemampuan;
2) Adanya kesempatan mendapatkan tambahan penghasilan pada pengelolaan potensi pendapatan di Kecamatan;
3) Adanya pembebanan terkait pencapaian indikator keberhasilan pembangunan di Kecamatan;
4) Adanya pembebanan penanggulangan kemiskinan, pengarusutamaan gender dan bencana alam;
5) Adanya undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6) Undang undang desa no 6 tahun 2014

Permasalahan – permasalahan kecamatan dan kelurahan
Dapat disampaikan sebagai berikut:

a) Belum Optimalnya pelayanan kepada masyarakat ;
b) Kurangnya sarana dan Prasarana ;
c) Kurangnya sumber daya manusia baik kualitas atau kwantitas dalam struktur yang ada ataupun pelayanan kepada masyarakat;
d) Belum tersedianya data base pembangunan yang memadai;
e) Belum terimplemantasinya sistem informasi desa;
f) Koordinasi yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan kurang maksimal;

Tabel 2.4
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompetensi	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Mis informasi dan dis informasi	Tranformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel dan kolaboratif
	akuntabilitas keuangan belum disertai keandirian keuangan daerah			Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia		
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan		Cyber insecurity			
	Pelayanan publik prima belum merata		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaah terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diperlukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah ”Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”.

Guna mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi ke 5 yaitu: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dalam rangka menjalankan misi ke 5 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi, Kecamatan Banyuurip menetapkan Tujuan selama periode 2025 – 2029 yaitu “Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah”, dengan target sasaran adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Banyuurip tercantum dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Banyuurip
Kabupaten Purworejo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	87,80	87,85	87,90	87,95	88	88,05	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	87,80	87,85	87,90	87,95	88	88,05	

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi Renstra 2025-2029 Kecamatan Banyuurip meningkatkan koordinasi dan pelayanan di tingkat Kecamatan. Kebijakan Renstra 2025-2029 Kecamatan Banyuurip Meningkatkan koordinasi pelayanan di tingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas dan fungsi camat.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kebijakan ada dua macam yaitu kebijakan internal dan eksternal.

1. Kebijakan Internal adalah suatu kebijakan Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi organisasi. Kebijakan internal Perangkat Daerah Kecamatan Banyuurip sebagai berikut :
   a. Peningkatan kualitas SDM aparatur kecamatan

b. Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana perkantoran secara optimal.
c. Pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan yang mantap.
d. Peningkatan ketertiban administrasi dan pengelolaan keuangan.

2. Kebijakan Eksternal, yaitu suatu kebijakan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan eksternal Kecamatan Banyuurip diantaranya yaitu :
   a. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan.
   b. Penyelenggaraan dan peningkatan tertib administrasi kependudukan.
   c. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.
   d. Memfasilitasi dan mengupayakan pemenuhan sarana prasarana wilayah, peningkatan perekonomian rakyat sesuai dengan potensi masyarakat.
   e. Mengupayakan kerjasama dengan dinas instansi terkait dan lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan masyarakat.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat	Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat	Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat
Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Table 3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah kebijakan 2026 : Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi	

			dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah kebijakan 2027 : Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah kebijakan 2028 : Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah kebijakan 2029 : Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT	

			RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi	
		Arah kebijakan 2030: Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan sasarannya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Banyuurip. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai.

Adapun perlu mencantumkan indikator kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kaulitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *output*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu sebagai bagian dari instrumen arah kebijakan, yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai sasaran dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Perumusan program merupakan tindak lanjut dari rumusan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan dalam organisasi Perangkat Daerah. Program/kegiatan disusun melalui analisis perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta penganggarannya, mendapatkan prioritas, karena memiliki pengaruh yang luas dan urgent untuk diselenggarakannya.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Kecamatan Banyuurip menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik : Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan : Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum : Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang akan dilakukan Kecamatan Banyuurip tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
13. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
14. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
15. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
16. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Kecamatan Banyuurip

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawain dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi	Persentase Layanan Administrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				Keuangan Perangkat Daerah	Keuangan Perangkat Daerah		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	

					yang Dipelihara/Direhabilitasi	dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
			Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	

					Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

					Kepolisian Negara Republik Indonesia		
			Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	

					Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas	

					Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

TABEL 4.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	65,58	70,45		72,89		75,33		77,76		80,02		80,02			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	87,75	87,85		87,9		87,95		88		88,05		88,05			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	65,58	70,45		72,89		75,33		77,76		80,02		74			
07:01	KECAMATAN						4.687.889.903		4.734.769.000		3.976.326.000		3.976.326.000		3.976.326.000				
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	4.687.889.903	100	4.734.769.000	100	3.976.326.000	100	3.976.326.000	100	3.976.326.000	100	Sekretariat	Kecamatan Banyuurip	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	7	2	10.641.773	2	12.000.000	2	8.500.000	2	8.500.000	2	8.500.000	10			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	22	22	7.141.773	22	7.500.000	22	5.000.000	22	5.000.000	22	5.000.000	110			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	22	22	3.500.000	22	4.500.000	22	3.500.000	22	3.500.000	22	3.500.000	110			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerahh	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	laporan	26	2	4.286.181.130	2	4.272.983.944	2	3.637.077.800	2	3.637.077.800	2	3.637.077.800	10			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	48	40	4.281.181.130	40	4.267.483.944	40	3.632.077.800	40	3.632.077.800	40	3.632.077.800	40			
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	6	44	5.000.000	44	5.500.000	44	5.000.000	44	5.000.000	44	5.000.000	220			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	laporan	0	0		1	2.000.000	0		0		0		1			
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	0	0	0	11	2.000.000	0	0	0	0	0	0	11			
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	laporan	1	1	2.159.500	1	2.362.000	1	1.159.500	1	1.159.500	1	1.159.500	5			
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	1	16	2.159.500	16	2.362.000	16	1.159.500	16	1.159.500	16	1.159.500	80			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dokumen	0	1	1.760.000	3	12.000.000	0		0		0		4			
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0	0	0	30	7.500.000	0	0	0	0	0	0	30			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	0	0	0	17	2.500.000	0	0	0	0	0	0	17			
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	6	1.760.000	6	2.000.000	0	0	0	0	0	0	6			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen	100	8	90.617.421	8	91.102.320	7	73.289.421	7	73.289.421	7	73.289.421	37			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	4	3.940.000	4	4.334.000	4	3.940.000	4	3.940.000	4	3.940.000	20			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	4	7.955.000	4	8.450.000	4	7.955.000	4	7.955.000	4	7.955.000	20			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	4	25.543.600	4	25.654.000	4	25.543.600	4	25.543.600	4	25.543.600	20			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	4	10.359.200	4	12.095.120	4	8.359.200	4	8.359.200	4	8.359.200	20			

7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	4	5.328.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4					
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	1	4	25.439.621	4	26.000.000	4	15.439.621	4	15.439.621	4	15.439.621	20					
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	0	0	0	12	1.750.000	0	0	0	0	0	0	12					
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	10.580.000	12	11.000.000	12	10.580.000	12	10.580.000	12	10.580.000	60					
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	2	1.472.000	2	1.619.200	2	1.472.000	2	1.472.000	2	1.472.000	10					
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	unit	0	1	10.230.800	2	37.200.000	0		0		0		3					
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	4	10.230.800	5	17.200.000	0	0	0	0	0	0	9					
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	4	20.000.000	0	0	0	0	0	0	4					
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	2	2	183.812.700	2	186.812.700	2	143.812.700	2	143.812.700	2	143.812.700	10					
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	66.972.700	12	68.972.700	12	66.972.700	12	66.972.700	12	66.972.700	60					
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	96.840.000	12	97.840.000	12	76.840.000	12	76.840.000	12	76.840.000	60					
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	5	5	122.486.579	6	138.308.036	5	112.486.579	5	112.486.579	5	112.486.579	26					
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	34.880.000	1	36.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	5					
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	8	31.600.000	8	34.760.000	8	31.600.000	8	31.600.000	8	31.600.000	40					
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	0	0	0	25	4.500.000	0	0	0	0	0	0	25					
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	14	35	10.614.579	35	11.776.036	35	10.614.579	35	10.614.579	35	10.614.579	175					
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	4	40.392.000	4	42.392.000	4	30.392.000	4	30.392.000	4	30.392.000	20					
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	14	5.000.000	14	8.000.000	14	5.000.000	14	5.000.000	14	5.000.000	70					
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	87,75	87,85		87,9		87,95		88		88,05		88,05					
07.01	KECAMATAN						244.048.729		339.801.350		223.174.350		239.254.580		255.109.290						
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	10.513.000	100	14.194.000	100	10.513.000	100	10.679.000	100	10.848.000	100	Seksi Pembangunan	Kecamatan Banyuurip			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	dokumen	1	2	10.513.000	3	14.194.000	2	10.513.000	2	10.679.000	2	10.848.000	11					
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	dokumen	1	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1					

7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	laporan	0	5	8.665.000	5	10.660.000	5	8.665.000	5	8.665.000	5	8.834.000	25			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	1	2	1.848.000	1	2.034.000	1	1.848.000	1	2.014.000	1	2.014.000	6			
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100	100	180.188.710	100	126.792.350	100	159.314.350	100	174.385.590	100	189.214.290	100	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Banyuurip	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	dokumen	2	2	180.188.710	2	126.792.350	2	159.314.350	2	174.385.590	2	189.214.290	10			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	5	5	30.071.240	5	15.000.000	5	15.000.000	5	30.071.240	5	30.365.727	25			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	7	150.117.470	7	111.792.350	7	144.314.350	7	144.314.350	7	158.848.563	35			
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	5.413.119	100	15.776.000	100	5.413.000	100	5.499.000	100	5.586.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyuurip	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaratya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	laporan	1	2	5.413.119	2	13.276.000	2	5.413.000	2	5.499.000	2	5.586.000	10			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	4	3.354.219	4	10.311.210	4	3.354.100	4	3.440.100	4	3.527.100	20			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	1	2	2.058.900	2	2.964.790	2	2.058.900	2	2.058.900	2	2.058.900	10			
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaratya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	dokumen	1	0		1	2.500.000	0		0		0		1			
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	1	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0	1			
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemeristahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	10.848.000	100	38.963.000	100	10.848.000	100	11.019.000	100	11.194.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyuurip	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaraatya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	dokumen	1	2	10.848.000	3	38.963.000	2	10.848.000	2	11.019.000	2	11.194.000	11			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	0	100	2.848.000	100	12.500.000	100	2.848.000	100	2.848.000	100	2.848.000	500			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	0	0	0	20	9.450.000	0	0	0	0	0	0	20			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksanaanya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	8.000.000	1	15.013.000	1	8.000.000	1	8.171.000	1	8.346.000	5			
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	37.085.900	100	146.076.000	100	37.086.000	100	37.672.000	100	38.267.000	100	Seksi Pemerintahan Desa	Kecamatan Banyuurip	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaratya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	dokumen	5	7	37.085.900	8	146.076.000	7	37.086.000	7	37.672.000	7	38.267.000	36			

7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen	0	0	0	1	9.500.000	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	1	1	2.500.000	1	8.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	5			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	1	2	14.841.000	2	75.402.800	2	14.841.000	2	15.427.100	2	16.022.100	10			
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	1	1	4.500.000	1	10.773.200	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000	5			
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dokumen	0	1	8.394.900	1	25.000.000	1	8.395.000	1	8.394.900	1	8.394.900	5			
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	dokumen	1	1	2.800.000	1	6.800.000	1	2.800.000	1	2.800.000	1	2.800.000	5			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	dokumen	1	1	1.500.000	1	5.600.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	5			
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	dokumen	1	1	2.550.000	1	5.000.000	1	2.550.000	1	2.550.000	1	2.550.000	5			
Jumlah							**4.931.938.632**		**5.074.570.356**		**4.199.500.350**		**4.215.580.590**		**4.231.435.290**				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN BOROKULON
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						589.420.800		589.420.800		589.420.800		597.385.960		603.682.760				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			589.420.800		589.420.800		589.420.800		597.385.960		603.682.760		KELURAHAN BOROKULON	KELURAHAN BOROKULON	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			589.420.800		589.420.800		589.420.800		597.385.960		603.682.760		KELURAHAN BOROKULON		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	2	347.703.200	2	347.703.200	2	347.703.200	2	347.703.200	2	354.000.000	10	KELURAHAN BOROKULON		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	9	9	241.717.600	9	241.717.600	9	241.717.600	9	249.682.760	9	249.682.760	45	KELURAHAN BOROKULON		
Jumlah							589.420.800		589.420.800		589.420.800		597.385.960		603.682.760				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN KLEDUNG KARANGDALEM

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						640.423.600		640.423.600		640.423.600		650.423.200		655.945.000				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			640.423.600		640.423.600		640.423.600		650.423.200		655.945.000		KELURAHAN KLEDUNG KARANGDALEM	KELURAHAN KLEDUNG KARANGDALEM	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			640.423.600		640.423.600		640.423.600		650.423.200		655.945.000		KELURAHAN KLEDUNG KARANGDALEM		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	2	358.478.200	2	358.478.200	2	358.478.200	2	358.478.200	2	364.000.000	10	KELURAHAN KLEDUNG KARANGDALEM		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	9	9	281.945.400	9	281.945.400	9	281.945.400	9	291.945.000	9	291.945.000	45	KELURAHAN KLEDUNG KARANGDALEM		
Jumlah							**640.423.600**		**640.423.600**		**640.423.600**		**650.423.200**		**655.945.000**				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN KLEDUNGKRADENAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						701.750.250		701.750.250		701.750.250		701.750.250		708.661.950				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			701.750.250		701.750.250		701.750.250		701.750.250		708.661.950		KELURAHAN KLEDUNGKRADENAN	KELURAHAN KLEDUNGKRADENAN	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			701.750.250		701.750.250		701.750.250		701.750.250		708.661.950		KELURAHAN KLEDUNGKRADENAN		
			aaa	a	0	0		0		0		0		0		0			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	2	367.088.300	2	367.088.300	2	367.088.300	2	367.088.300	2	374.000.000	10	KELURAHAN KLEDUNGKRADENAN		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	9	9	334.661.950	9	334.661.950	9	334.661.950	9	334.661.950	9	334.661.950	45	KELURAHAN KLEDUNGKRADENAN		
Jumlah							701.750.250		701.750.250		701.750.250		701.750.250		708.661.950				

Table 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung	

				Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi keagamaan	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka	

			Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Forkopimcam	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP)	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades dan Sekdes	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pilkades	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi	

1.1 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif,

efisien. Melalui program ini, Kecamatan Banyuurip berkomitmen untuk mengoptimalkan koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan tugas pemerintahan agar dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan diantaranya:

a) Fasilitasi Kesehatan : Sinergitas Posyandu, Posbindu, monev ODF, Monev stunting/TPPS, PMI.
b) Fasilitasi Pendidikan : Koordinasi Anak Tidak Sekolah, Anak Putus Sekolah,, Makan Bergizi Gratis, Koordinasi Fasilitas Pendidikan Kecamatan Banyuurip
c) Fasilitasi Kegiatan Sosial : Meonev bantuan PKH, poskesos, permakanan
d) Fasilitasi Pekerjaan umum : Pamsimas, Monev pembangunan sarana prasarana layanan umum
e) Fasilitasi Pelayanan Publik di Kecamatan Banyuurip

Program Kecamatan ini mendukung asta cita nasional yakni Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan, sedangkan program provinsi yang didukung yakni Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa. Program ini juga mendukung program pitulungan Sehat Wargane, bertujuan meningkatkan fasilitasi dan pelayanan Kesehatan serta Pinter Bocahe: Program ini bertujuan untuk mencegah anak putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan di Purworejo

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan dampak inisiatif pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Banyuurip selain itu tujuan program ini adalah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, sehingga program sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal selain itu juga, memampukan masyarakat untuk mengelola sumber daya secara mandiri dan mengembangkan lembaga masyarakat yang terorganisir dan produktif, serta mendukung usaha ekonomi seperti UMKM untuk memperkuat perekonomian lokal Adapun aktivitas yang dilaksanakan diantaranya yakni:

   a) Fasilitasi Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan Secara umum, Musrenbang bertujuan untuk memastikan pembangunan berbasis bottom-up, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
   b) Fasilitasi PKK Kecamatan yang memiliki berbagai manfaat yang signifikan dalam mendukung pembangunan masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan keluarga sebagai unit terkecil.
   c) Fasilitasi Bantuan Gubernur, Fasilitasi Kecamatan Layak Anak (KLA) dan Karang Taruna.
   d) Fasilitasi KPMD, Posyantekdes
   e) Fasilitasi UMKM, OVOP (One Village One Product), TTG (Teknologi Tepat Guna), , BUMDes/BUMDesma, bertujuan untuk menciptakan ekonomi lokal yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. OVOP mengembangkan produk unggulan, UMKM memperkuat pelaku usaha mikro, dan BUMDesma mengelola potensi desa secara kolektif. Bersama-sama, ketiganya mendukung tujuan nasional seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

      Program Kecamatan ini mendukung asta cita nasional yakni Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan, sedangkan program provinsi yang didukung yakni Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear

Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat dan menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan mendukung kesejahteraan masyarakat serta Kamtibum memfasilitasi sinergi antara pemerintah kecamatan, polisi, TNI, dan organisasi masyarakat untuk menangani isu-isu ketentraman secara efektif dan Mendukung ketertiban, keamanan, dan kondusivitas wilayah melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat , Adapun Aktivitas yang dilaksanakan diantaranya :
    a. Monitoring Pilkada, pilpres, Koordinasi Linmas, babinkamtibmas
    b. Fasilitasi Bencana Alam Kecamatan
    c. Fasilitas FASI (Festival Anak Sholeh) , FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Penyelenggaraan Hari Besar dan Hari Raya
    d. Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda
    e. Pelaksanaan Forkopimcam (Forum Pimpinan Kecamatan)
    f. Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi dan Hari Nasional
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bertujuan Memastikan sinergi antara pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, dan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
    1. Pelaksanaan Forkopimcam (Forum Pimpinan Kecamatan)
    2. Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi dan Hari Nasional

    Forkopimcam memiliki peran vital dan pembinaan wawasan kebangsaan berkaitan erat dan mempunyai peran vital di kecamatan karena mampu mengoordinasikan instansi pemerintahan, memfasilitasi sosialisasi, mencegah konflik, dan memperkuat persatuan masyarakat. Melalui kegiatan yang terarah, Forkopimcam tidak hanya menjaga stabilitas lokal, tetapi juga berkontribusi pada penguatan identitas dan ketahanan nasional. Kegiatan ini menjadi langkah konkret untuk memastikan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan NKRI tertanam kuat di tengah masyarakat.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program ini dilaksanakan oleh camat, didukung inspektorat dan perangkat daerah seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dengan landasan hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 12 Tahun 2017. Program ini bertujuan memberikan bimbingan teknis dan konsultasi kepada kepala desa dan perangkat desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dan ntuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan, Adapun Aktivitas Kegiatan diantaranya
    1) Fasilitasi Perdes, Perkades
    2) Pembinaan dan Bimtek administrasi Desa
    3) Monitoring APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP
    4) Konferensi Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
    5) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
    6) Pembinaan BPD
    7) Fasilitasi Pengisian Kekosongan Perangkat Desa

1.2 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan

hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banyuurip sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banyuurip

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka		70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	87,80	87,85	87,90	87,95	88	88,05	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Banyuurip sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					NIHIL				IUP
									SPM
									Permendagri No. 18 Tahun 2020
									Mandatory lain

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhanan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Banyuurip yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Banyuurip Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Banyuurip, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Banyuurip setiap tahunnya.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Rencana Strategis Kecamatan Banyuurip sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Banyuurip setiap tahun.
b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c) Camat Banyuurip wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Banyuurip Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bayan Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan Kecamatan Bayan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan visi misi kepala daerah. Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai keterpaduan antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah, serta sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian program pembangunan daerah. Renstra juga digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bayan merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta ancaman dan peluang yang mempengaruhi Kecamatan Bayan. Renstra juga berperan untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bayan.

Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :

a. Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orietasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Rentstra Perangkat Daerah.
c. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh camat Bayan selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Kecamatan Bayan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Bayan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).

24. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
25. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Renstra ini disusun sebagai penjabaran operasional visi, misi, dan program kepala daerah dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bayan dalam periode Tahun 2025–2029.
2. Tujuan
   a. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dalam bentuk sasaran dan program kerja Kecamatan Bayan
   b. Menyusun dokumen perencanaan lima tahunan sebagai acuan pelaksanaan urusan program dan kegiatan Kecamatan Bayan
   c. Menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Kecamatan Bayan
   d. Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
   e. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
   f. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Bayan sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali.
   g. Sebagai instrument untuk memahami secara untuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh aparatur Kecamatan Bayan dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
   h. Menjadi instrumen pengendalian, evaluasi, dan pengawasan kinerja Kecamatan Bayan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kecamatan Bayan Tahun 2025-2029 terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan memuat
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu strategis Perangkat Daerah

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan memuat

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan memuat

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab V Penutup memuat

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Bayan menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan;
8. pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Bayan terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahkan:
   a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan Desa;
4. Seksi Pembangunan;
5. Seksi Pemerintahan Umum, Kententraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Jabatan Fungsional; dan
8. Kelurahan.

Tugas dan fungsi menurut struktur dan susunan organisasi Kecamatan Bayan adalah sebagai berikut:

1. Camat

   Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas kecamatan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

   Tugas Camat dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum yaitu membentuk forum koordinasi

pimpinan di Kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Susunan pimpinan dan anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan adalah sebagai berikut:

1) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud diketuai oleh Camat;
2) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
3) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa meliputi:
a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;
e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian asministrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Fungsi sekretariat adalah sebagai berikut:

a. pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawalian, dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi bagian Sekretariat Kecamatan Bayan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   Subbagian Perencanaan dan Keuangan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan yang meliputi:
   1. Merencanakan, menganggarkan dan mengevaluasi kinerja;
   2. Melaksanakan pengadministrasian keuangan; dan
   3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas danjabatannya.
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
   Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis,melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi;
   1. Melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
   2. Melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
   3. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
   4. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang;
   5. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
   6. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
   7. Menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
   8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

3. Seksi Pemerintahan Desa;
   Seksi Pemerintahan Desa bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa yang meliputi:
   a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
   b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
h. melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
j. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
m. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n. melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
o. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
p. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
q. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
r. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

4. Seksi Pembangunan;
Seksi Pembangunan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;
3. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
b. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;

2. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.

c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
   1. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
   2. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
   3. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;
   4. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

5. Seksi Pemerintahan Umum, Kententraman dan Ketertiban Umum;

   Seksi Pemerintahan Umum, Kententraman dan Ketertiban Umum bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi:

   a. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi;
      1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;
      2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
   b. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
   c. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:
      1. Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
      2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      3. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
      4. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
      5. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
   Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
   a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
      1. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
      2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   b. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi;
      1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
      2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
      3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
   c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;
   d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
7. Jabatan Fungsional;
   Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.
8. Kelurahan.
   Kelurahan bertugas membantu camat:
   a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
   b. Melaksanakan kegiatan evaluasi kelurahan;
   c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
   d. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
   e. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
   f. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
   g. Melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
   h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
   i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi Kecamatan Bayan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Bagan Organisasi Kecamatan

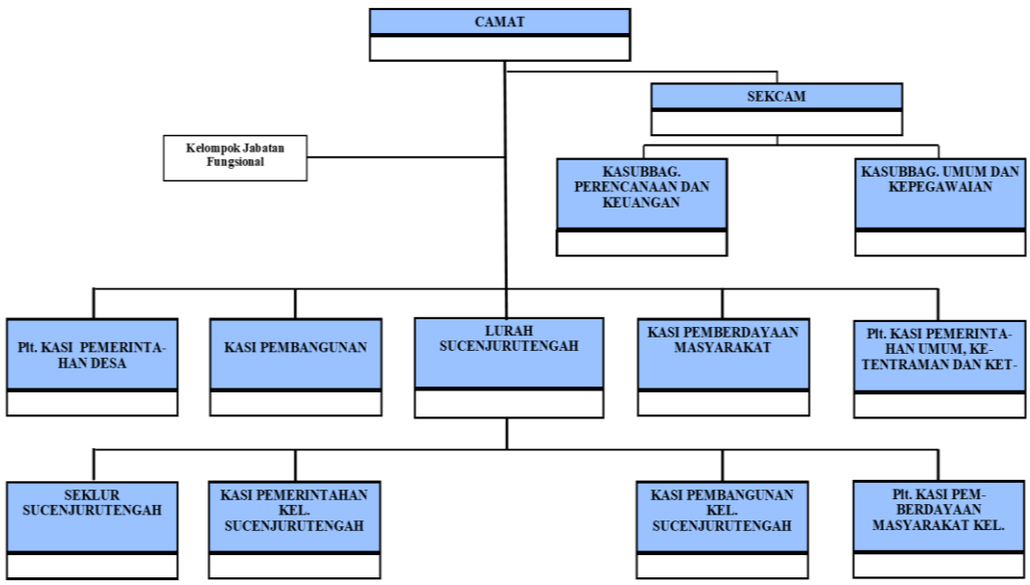

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Dalam melaksanana tugas dan fungsinya, tahun 2025 Kecamatan Bayan memiliki pegawai sebanyak 24 orang, dengan rincian PNS sebanyak 19 orang, PPPK sebanyak 3 orang, dan tenaga non ASN sebanyak 3 yang terdiri dari 14 laki-laki dan 10 perempuan dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Berdasarkan golongan

Golongan III 12 orang
- III/a : 1 orang
- III/b : 4 orang
- III/c : 1 orang
- III/d : 6 orang

Golongan II 6 orang
- II/a : 0 orang
- II/b : 0 orang
- II/c : 1 orang
- II/d : 5 orang

PPPK Golongan V 3 orang
Non ASN 3 orang
TOTAL 24 orang

b. ASN berdasarkan pendidikan
- SD : 0 orang
- SMP : 0 orang
- SMA : 11 orang
- D1 : 0 orang
- D2 : 0 orang

- D3 : 5 orang
- D4 : 0 orang
- S1 : 7 orang
- S2 : 1 orang

Selain didukung pegawai, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bayan juga didukung dengan sarana dan prasarana yang ada, Kecamatan Bayan menempati kantor dengan alamat Jalan Gajah Mada, terdiri dari gedung kantor, Rumah Dinas Camat, Pendopo, Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 1 buah, Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 7 buah, 1 Set LCD Projector, Komputer sebanyak 6 unit, Laptop sebanyak 11 unit, 40 (empat puluh) buah Meja Kerja, Kursi Kerja sejumlah 40 (empat puluh) buah, 100 (seratus) Kursi rapat, Meja rapat sebanyak 10 buah, 2 (dua) unit Pesawat telepon dan 1 (satu) set Sound System.

Dengan kondisi ini, diharapkan Kecamatan Bayan dapat menuntaskan program dan kegiatan dengan baik.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Guna mewujudkan visi-misi Bupati Purworejo tahun 2021-2025, diperlukan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi. Kecamatan Bayan memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah khususnya melalui pelaksanaan fungsi perangkat daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketenteraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat,

Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Purworejo sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ditetapkan tujuan sebagai pedoman gerak operasional pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Bayan, yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik”. Secara teknokrasi selanjutnya dirumuskan sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Bayan yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang digunakan untuk mengukur tujuan dan sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik, terjadi peningkatan yang konsisten. Target IKM tahun 2025 adalah sebesar 92,02, sementara realisasinya pada semester I berhasil mencapai 92,02, atau setara dengan 100% dari target. Hal serupa juga terlihat pada tingkat capaian tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terus membaik dan mendapat respon positif dari pengguna layanan.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bayan berdasarkan sasaran/target renstra PD 2021-2025. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan PD mengacu pada hasil kerja periode Renstra sebelumnya. Untuk menjelaskan kinerja pelayanan perangkat daerah, maka kami sajikan Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bayan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	11	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*23*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				90,88	90,96	91,05	91,54	92,02	92,46	90,97	91,03	90,96	91,04	92,02		100,10%	100,08%	99,90%	99,45%	100%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				90,88	90,96	91,05	91,54	92,02	92,46	90,97	91,03	90,96	91,04	92,02		100,10%	100,08%	99,90%	99,45%	100%	
3	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	61,09%		100%	100%	100%	100%	61,09%	
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	43,88%		100%	100%	100%	100%	43,88%	
5	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72,86%		100%	100%	100%	100%	72,86%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	11	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*23*
6	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69,25%		100%	100%	100%	100%	69,25%	
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	54,14%		100%	100%	100%	100%	54,14%	
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	52,53%		100%	100%	100%	100%	52,53%	

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" disebabkan:

1) Komitmen Camat Bayan dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dan *clean governance*
2) Fokus dalam meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana layanan serta kinerja aparatur yang meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan
3) Adanya hubungan yang baik dalam menjalin koordinasi antar Perangkat Daerah, Masyarakat, maupun Instansi Vertikal
4) Tersedianya kanal aduan masyarakat yang terintegrasi dengan kanal aduan Kecamatan Bayan

Keberhasilan capaian sasaran strategis bukan berarti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bayan tidak menemui tantangan dan hambatan sama sekali. Beberapa tantangan dan hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Bayan adalah sebagai berikut:

1) Kompetensi pegawai yang belum merata
2) Dinamika permasalahan di wilayah yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang terbatas
3) Standar pelayanan yang telah ditetapkan belum diketahui secara luas oleh pengguna layanan

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang didukung indikator sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, Kecamatan Bayan telah melakukan upaya untuk konsisten mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja dalam pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dengan berbagai aktivitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut adalah:

- Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah teknis dan stakeholder lainnya guna memastikan kebijakan yang disusun dapat terlaksana dengan optimal
- Melaksanakan pembinaan SDM Kecamatan Bayan untuk meningkatkan pelayanan
- Melaksanakan publikasi Standar Pelayanan yang telah ditetapkan baik melalui *online* maupun *offline*
- lebih responsif terhadap keluhan masyarakat atau pengguna layanan.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bayan dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dilakukan analisis terhadap capaian anggaran selama lima tahun terakhir, yaitu 2021 hingga 2026. Analisis capaian anggaran periode 2021–2026 bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi tren pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun. Untuk menjelaskan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bayan, maka kami sajikan Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bayan

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*	*19*
UNSUR KEWILAYAHAN																	
KECAMATAN	2.662.755.932	1.917.588.967	1.910.685.395	2.113.518.458	2.162.724.821	2.174.063.294	2.569.440.547	4.084.129.613	4.109.424.305	4.094.315.234	1.606.563.350		96,50%	212,98%	215,08%	193,72%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.186.771.932	1.649.001.167	1.718.079.795	1.896.978.058	1.945.432.721	1.957.331.094	2.109.894.621	2.849.253.189	3.060.810.917	2.915.605.176	1.436.951.526		96,48%	172,79%	178,15%	153,70%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.019.200	5.275.000	5.700.000	6.160.000	6.668.500	7.165.000	23.862.160	25.795.956	24.752.128	33.804.140	13.202.244		99,35%	489,02%	434,25%	548,77%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.019.200	3.500.000	3.850.000	4.235.000	4.658.500	5.125.000	23.862.160	18.920.956	19.034.628	26.364.140	11.812.244		99,35%	540,60%	494,41%	622,53%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		250.000	255.000	260.000	265.000	270.000		750.000	758.800	1.054.000			0,00%	300,00%	297,57%	405,38%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		150.000	155.000	160.000	165.000	170.000		850.000	468.900	740.000			0,00%	566,67%	302,52%	462,50%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		350.000	355.000	360.000	365.000	370.000		1.075.000	937.500	900.000	772.000		0,00%	307,14%	264,08%	250,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		275.000	280.000	285.000	290.000	295.000		850.000	827.900	998.000			0,00%	309,09%	295,68%	350,18%	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*	*19*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		500.000	550.000	600.000	660.000	665.000		2.000.000	1.624.600	2.000.000	370.000		0,00%	400,00%	295,38%	333,33%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		250.000	255.000	260.000	265.000	270.000		1.350.000	1.099.800	1.748.000	248.000		0,00%	540,00%	431,29%	672,31%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.971.869.532	1.545.376.167	1.508.304.795	1.700.668.058	1.750.489.221	1.729.181.594	1.905.782.325	2.558.090.057	2.554.374.464	2.577.356.267	1.350.354.118		96,65%	165,53%	169,35%	151,55%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.965.869.532	1.540.876.167	1.503.354.795	1.695.223.058	1.744.499.721	1.722.593.144	1.899.782.325	2.550.770.957	2.547.180.764	2.568.956.267	1.349.934.118		96,64%	165,54%	169,43%	151,54%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.500.000	2.750.000	3.025.000	3.327.500	3.660.250		2.000.000	2.169.500	2.480.000	420.000		0,00%	80,00%	78,89%	81,98%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.000.000	2.000.000	2.200.000	2.420.000	2.662.000	2.928.200	6.000.000	5.319.100	5.024.200	5.920.000			100,00%	265,96%	228,37%	244,63%	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000			1.375.000	1.875.000	250.000		0,00%	0,00%	91,67%	107,14%	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000			1.375.000	1.875.000	250.000		0,00%	0,00%	91,67%	107,14%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.500.000	6.500.000	7.500.000	7.500.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*	*19*
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			3.500.000	4.500.000	5.500.000	5.500.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.225.200	25.850.000	27.575.000	26.650.000	26.975.000	27.325.000	33.441.000	85.954.400	72.826.000	88.126.920	18.745.350		94,93%	332,51%	264,10%	330,68%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		850.000	875.000	900.000	925.000	950.000		3.344.000	3.005.800	2.450.800	758.500		0,00%	393,41%	343,52%	272,31%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			400.000	400.000	400.000	400.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1.500.000	1.525.000	1.550.000	1.575.000	1.600.000		7.093.000	7.225.200	6.001.000	2.045.400		0,00%	472,87%	473,78%	387,16%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7.500.000	7.600.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		27.644.400	25.466.400	26.670.000	4.554.450		0,00%	368,59%	335,08%	381,00%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		2.500.000	2.550.000	2.575.000	2.600.000	2.625.000		5.680.000	3.044.600	4.634.000	958.500		0,00%	227,20%	119,40%	179,96%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.000.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000	1.150.000		2.452.000	2.532.000	2.580.000	1.560.000		0,00%	245,20%	241,14%	240,00%	
Penyediaan Bahan/ Material		7.500.000	7.600.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		21.856.000	15.247.000	20.369.000	2.803.100		0,00%	291,41%	200,62%	290,99%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	250.000	250.000	300.000	350.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.225.200	5.000.000	5.125.000	5.250.000	5.375.000	5.500.000	33.441.000	17.885.000	16.305.000	22.994.520	3.000.000		94,93%	357,70%	318,15%	437,99%	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			600.000	650.000	700.000	750.000				2.427.600	3.065.400		0,00%	0,00%	0,00%	373,48%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80.000.000	55.000.000	45.000.000	65.000.000		8.680.000	258.851.000	13.047.800			0,00%	0,00%	323,56%	23,72%	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			20.000.000						250.290.000				0,00%	0,00%	1251,45%	0,00%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			40.000.000										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Pengadaan Mebel					45.000.000					8.327.800			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.000.000			35.000.000		8.680.000	8.561.000	4.720.000			0,00%	0,00%	42,81%	0,00%	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		30.000.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.495.000	40.000.000	47.000.000	51.900.000	57.240.000	63.064.000	70.683.044	74.202.776	76.594.075	66.752.200	34.237.314		88,92%	185,51%	162,97%	128,62%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.819.000		3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	20.773.000						99,78%	0,00%	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.941.000	25.000.000	27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.602.500	36.178.452	36.663.308	38.837.491	38.434.135	19.162.826		80,50%	146,65%	141,23%	127,05%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.735.000	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.500	13.731.592	37.539.468	37.756.584	28.318.065	15.074.488		99,98%	250,26%	228,83%	156,02%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.163.000	32.500.000	42.500.000	48.350.000	51.560.000	58.095.500	76.126.092	96.530.000	72.038.250	134.642.849	20.162.500		99,95%	297,02%	169,50%	278,48%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.351.000		8.000.000	9.000.000	10.000.000	12.000.000	38.314.092		17.575.750	29.782.749	5.329.500		99,90%	0,00%	219,70%	330,92%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		15.000.000	8.500.000	9.150.000	9.965.000	9.961.500		32.903.200	10.792.800	27.271.100	5.851.000		0,00%	219,35%	126,97%	298,04%	
Pemeliharaan Mebel		-	5.000.000	7.000.000	6.000.000	8.000.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000	7.320.500		21.521.000	18.420.000	25.110.000	1.975.000		0,00%	430,42%	334,91%	415,04%	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.597.000	8.000.000	8.500.000	9.350.000	10.285.000	11.313.500	12.597.000	32.419.800	15.854.700	39.576.000			100,00%	405,25%	186,53%	423,27%	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		4.500.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000	7.500.000		9.686.000	9.395.000	12.903.000	7.007.000		0,00%	215,24%	170,82%	213,27%	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.215.000	-	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	25.215.000						100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	207.006.600	96.727.400	57.160.700	62.810.600	64.490.300	64.337.600	198.959.326	84.179.906	46.710.028	48.229.140	11.525.444		96,11%	87,03%	81,72%	76,79%	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	185.746.600	75.274.500	30.660.700	33.810.600	33.990.300	32.337.600	177.746.600	63.940.450	27.825.600	23.590.000	1.067.600		95,69%	84,94%	90,75%	69,77%	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		-	3.500.000	4.500.000	5.250.000	5.000.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*	*19*
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	185.746.600	75.274.500	27.160.700	29.310.600	28.740.300	27.337.600	177.746.600	63.940.450	27.825.600	23.590.000	1.067.600		95,69%	84,94%	102,45%	80,48%	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	21.260.000	21.452.900	18.500.000	20.250.000	21.000.000	22.000.000	21.212.726	20.239.456	18.884.428	24.639.140	10.457.844		99,78%	94,34%	102,08%	121,67%	
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		-	3.500.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.260.000	21.452.900	15.000.000	15.750.000	16.000.000	16.500.000	21.212.726	20.239.456	18.884.428	24.639.140	10.457.844		99,78%	94,34%	125,90%	156,44%	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			4.500.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			4.500.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			3.500.000	3.750.000	4.000.000	4.500.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			3.500.000	3.750.000	4.000.000	4.500.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.133.146.600	816.831.200	897.255.800	921.478.000	919.323.000		987.042.168	806.758.660	949.248.518	132.756.280		0,00%	87,11%	98,77%	105,79%	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		71.202.800	65.000.000	68.000.000	69.500.000	71.500.000		62.908.600	85.346.200	199.760.600	84.314.100		0,00%	88,35%	131,30%	293,77%	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		-	17.500.000	18.000.000	18.500.000	19.000.000			13.041.900	19.015.000	14.793.000		0,00%	0,00%	74,53%	105,64%	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		71.202.800	47.500.000	50.000.000	51.000.000	52.500.000		62.908.600	72.304.300	180.745.600	69.521.100		0,00%	88,35%	152,22%	361,49%	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.061.943.800	751.831.200	829.255.800	851.978.000	847.823.000		924.133.568	721.412.460	749.487.918	48.442.180		0,00%	87,02%	95,95%	90,38%	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		-	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		910.000.000	649.831.200	724.255.800	744.978.000	738.823.000		794.475.500	603.639.400	601.987.850			0,00%	87,31%	92,89%	83,12%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		151.943.800	95.000.000	95.000.000	97.000.000	99.000.000		129.658.068	117.773.060	147.500.068	48.442.180		0,00%	85,33%	123,97%	155,26%	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.000.000	29.809.200	18.476.700	25.309.100	20.869.000	20.818.100	Rp 69.962.600	Rp 29.809.150	21.902.900	31.111.500	1.440.600		0,00%	100,00%	118,54%	122,93%	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	70.000.000	29.809.200	18.476.700	20.309.100	20.869.000	20.818.100	Rp 69.962.600	Rp 29.809.150	21.902.900	31.111.500	1.440.600		0,00%	100,00%	118,54%	153,19%	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000	29.809.200	16.476.700	18.309.100	18.869.000	18.818.100	49962600	29.809.150	21.902.900	31.111.500	1.440.600		0,00%	100,00%	132,93%	169,92%	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	20000000						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5.000.000									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*	*19*
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5.000.000									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		5.000.000	4.021.100	4.377.400	4.530.100	4.479.200	Rp -	4.039.800	39.057.700	27.037.000	7.879.500		0,00%	80,80%	971,32%	617,65%	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		5.000.000	4.021.100	4.377.400	4.530.100	4.479.200		4.039.800	39.057.700	27.037.000	7.879.500		0,00%	80,80%	971,32%	617,65%	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			3.021.100	3.177.400	3.130.100	2.979.200							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			750.000	850.000	950.000	1.000.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		5.000.000	250.000	350.000	450.000	500.000		4.039.800	39.057.700	27.037.000	7.879.500			80,80%	15623,08%	7724,86%	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	198.977.400	137.051.200	112.947.100	124.043.300	127.402.700	127.097.300	190.624.000	129.805.400	134.184.100	123.083.900	16.010.000		95,80%	94,71%	118,80%	99,23%	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*	*19*
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	198.977.400	137.051.200	112.947.100	124.043.300	127.402.700	127.097.300	190.624.000	129.805.400	134.184.100	123.083.900	16.010.000		95,80%	94,71%	118,80%	99,23%	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		-	2.000.000	3.000.000	2.500.000	3.500.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		7.510.200	5.750.000	8.250.000	5.750.000	7.250.000		7.510.200	4.706.000	7.050.000	2.066.000		0,00%	100,00%	81,84%	85,45%	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			4.500.000	5.500.000	4.500.000	6.250.000			6.418.400	32.921.500			0,00%	0,00%	142,63%	598,57%	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		124.202.000	66.786.400	71.293.300	58.652.700	60.947.300		116.956.200	110.201.100	73.052.900	13.944.000		0,00%	94,17%	165,01%	102,47%	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			5.000.000		25.000.000				6.891.600				0,00%	0,00%	137,83%	0,00%	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		2.839.000	3.500.000	5.500.000	5.500.000	7.750.000		2.839.000	2.847.000	2.359.500			0,00%	100,00%	81,34%	42,90%	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		2.500.000	4.500.000	5.000.000	3.500.000	6.500.000		2.500.000	3.120.000	7.700.000			0,00%	100,00%	69,33%	154,00%	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*	*19*
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	47.618.400		3.250.000	4.000.000	3.500.000	5.750.000	46.718.000						98,11%	0,00%	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.714.000		2.250.000	3.500.000	3.250.000	4.500.000	17.714.000						100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			2.500.000	3.250.000	3.000.000	4.300.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			4.410.700	4.750.000	4.250.000	6.700.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	133.645.000		3.500.000	4.000.000	3.500.000	5.450.000	126.192.000						94,42%	0,00%	0,00%	0,00%	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			2.750.000	3.250.000	2.500.000	3.700.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			2.250.000	2.750.000	2.000.000	4.500.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Tabel tersebut mengambarkan kinerja pengelolaan pendanaan periode Renstra 2021 – 2026, melebihi dengan target. Untuk pendapatan rata – rata melebihi target 100 %. Belanja Tidak Langsung sesuai dengan target karena merupakan kebutuhan rutin gaji pegawai Kecamatan Bayan. Belanja langsung, tercapai sesuai target. Ada beberapa tahun periode ada pengusulan penambahan pagu pada perubahan anggaran untuk rehab dan belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor. Capaian Realisasi Anggaran tersebut mengacu pada Tujuan dan sasaran Kecamatan Bayan.

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90,75	90,97	91,03	90,96	91,04	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90,75	90,97	91,03	90,96	91,04	
3	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengembangan pelayanan perangkat daerah di Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo pada lima tahun mendatang menghadapi sejumlah tantangan sekaligus membuka berbagai peluang strategis. Hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa

Tengah, RTRW Kabupaten Purworejo, serta KLHS menunjukkan bahwa dinamika pembangunan daerah menuntut pelayanan publik yang semakin adaptif, responsif, dan inovatif.

Dari sisi tantangan, Kecamatan Bayan masih menghadapi kesenjangan kualitas sumber daya manusia aparatur, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi dan kemampuan analisis pelayanan berbasis data. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk aksesibilitas di beberapa wilayah pedesaan, menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan layanan. Telaahan terhadap RTRW Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa perkembangan tata ruang dan pertumbuhan wilayah menuntut perangkat daerah lebih adaptif dalam mengantisipasi kebutuhan pelayanan, misalnya terkait peningkatan mobilitas masyarakat, perubahan fungsi lahan, serta perkembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari hasil analisis KLHS, isu lingkungan seperti kerentanan bencana alam (banjir), degradasi lingkungan, dan keterbatasan daya dukung lahan menjadi tantangan tambahan bagi pelayanan publik, terutama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

Meski demikian, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Bayan. Pertama, arah kebijakan nasional dan provinsi yang menekankan pada transformasi digital pelayanan publik menjadi momentum untuk memperkuat inovasi layanan berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat secara daring. Kedua, dukungan masyarakat serta meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas mendorong perangkat daerah untuk membangun layanan yang lebih partisipatif dan responsif. Selain itu, hasil analisis KLHS menunjukkan adanya peluang penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat diintegrasikan dalam inovasi pelayanan publik ramah lingkungan.

Dengan mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, Kecamatan Bayan diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo mencakup seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan yang berada dalam wilayah administrasi kecamatan. Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Bayan memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kelompok sasaran memperoleh pelayanan yang adil, mudah diakses, dan berkualitas.

Sasaran utama pelayanan adalah masyarakat umum, yaitu seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Bayan. Mereka menjadi penerima layanan administrasi pemerintahan, kependudukan, perizinan sederhana, serta berbagai fasilitasi program pembangunan. Selain itu, pemerintah desa beserta perangkatnya menjadi kelompok sasaran penting mengingat peran desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kecamatan hadir untuk memberikan pembinaan,

pendampingan, serta koordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Kelompok lain yang menjadi perhatian adalah masyarakat rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. Mereka memerlukan layanan publik yang inklusif, perlindungan sosial, serta akses yang lebih mudah terhadap program-program pemerintah. Di sisi lain, pelaku ekonomi lokal seperti petani, pedagang, dan pelaku UMKM juga menjadi sasaran layanan melalui fasilitasi perizinan, penguatan kapasitas usaha, dan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selain itu, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kelompok kepemudaan juga menjadi kelompok sasaran layanan yang penting. Mereka memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat kecamatan maupun desa. Sementara itu, dari sisi internal pemerintahan, aparatur sipil negara dan perangkat daerah lain juga menjadi kelompok sasaran dalam rangka koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan lintas sektor di tingkat kecamatan.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Bayan tidak hanya berfokus pada masyarakat secara umum, tetapi juga mencakup kelompok rentan, pelaku usaha, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga aparatur pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan kecamatan bersifat menyeluruh dan inklusif, guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Bayan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Kecamatan Bayan:

1. Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal
2. Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah
3. Pelayanan publik prima belum merata
4. Kurangnya SDM di Kecamatan dan Kelurahan
   Keterbatasan SDM di wilayah Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah menyebabkan kinerja yang ada menjadi kurang optimal.
5. Kompetensi pegawai yang belum merata
   Masih terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur di seksi-seksi yang ada di kecamatan
6. Sarana dan Prasarana yang belum memadai
7. Masih Terbatasnya Sistem dan Inovasi Layanan Berbasis Teknologi Informasi
   Penggunaan aplikasi dan sistem digital dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga pelayanan internal maupun eksternal masih cenderung manual, memerlukan waktu lama, dan kurang efisien.
8. Dinamika permasalahan di wilayah yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang terbatas
9. Standar pelayanan yang telah ditetapkan belum diketahui secara luas oleh pengguna layanan

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu utama yang perlu mendapat perhatian yaitu penguatan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif untuk menjawab tantangan rendahnya akuntabilitas kinerja; peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah guna memperkuat stabilitas dan daya saing; percepatan transformasi digital pelayanan publik sebagai respon atas tuntutan era digital dan ancaman keamanan siber; pemerataan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah; serta penguatan stabilitas, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat agar tercipta lingkungan yang kondusif dalam mendukung pembangunan. Isu Strategis berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, serta keterkaitannya dengan isu KLHS RPJMD 2025–2029 dan dinamika lingkungan global, nasional, maupun regional, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif
	Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah			Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia		
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan		Cyber insecurity			
	Pelayanan publik prima belum merata		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			
	Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Visi Pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2025-2030 yaitu : “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Visi ini merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021 – 2026.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi. Misi merupakan sebuah komitmen bersama yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan guna mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri) 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2030 diwujudkan dalam “Purworejo Berseri”.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Kecamatan Bayan mendukung Misi ke 5, yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif, serta berbasis teknologi informasi”, maka ditetapkan tujuan strategis perangkat daerah Kecamatan Bayan yaitu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih terukur, yaitu: “Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah”.

Dengan demikian, indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan ini adalah:

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bayan Tahun 2025-2029

Tujuan Utama dari Kecamatan Bayan dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029 adalah meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan ini merupakan wujud komitmen Kecamatan Bayan dalam meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi.

Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, Kecamatan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Pertama, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang mencerminkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik berbasis hasil. Target nilai SAKIP terus mengalami peningkatan setiap tahun, dari 68,02 di tahun 2025 menjadi 77,76 pada tahun 2029. Kedua, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) yang menunjukan kapasitas dan keberhasilan Kecamatan Bayan dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di bidang pelayanan publik. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) meningkat setiap tahunnya dari 92,02 pada tahun 2025 menjadi 92,20 pada tahun 2029.

Untuk mewujudkan tujuan strategis meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Kecamatan Bayan menetapkan 2 (dua) sasaran utama dalam indikator dan target periode 2025-2029:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
   Sasaran ini ditujukan untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja yang sistematis, terukur, dan berorientasi hasil di seluruh perangkat daerah. Ukurannya menggunakan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang menunjukkan tingkat penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target nilai SAKIP meningkat secara bertahap dari 68,02 pada tahun 2025 menjadi 77,76 di tahun 2029. Ini mencerminkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola kinerja melalui perencanaan, pelaporan, dan evaluasi yang lebih baik.
2. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat
   Sasaran ini berfokus pada penguatan kualitas layanan kepada masyarakat agar terciptanya pelayanan publik yang prima. Sasaran ini diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah). Target Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) meningkat setiap tahunnya dari 92,02 pada tahun 2025 menjadi 92,20 pada tahun 2029. Peningkatan IKM ini menunjukan komitmen untuk meningkatkan pelayanan yang optimal.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bayan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	92,02	92,05	92,10	92,15	92,20	92,25	
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	92,02	92,05	92,10	92,15	92,20	92,25	

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah, Kecamatan Bayan merumuskan sejumlah strategi utama yang diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Strategi-strategi ini merupakan bentuk operasionalisasi dari visi dan misi daerah, sekaligus menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tahapan Renstra Kecamatan Bayan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Bayan

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat	Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat	Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat
Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meneguhkankan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Arah Kebijakan Kecamatan Bayan Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Arah kebijakan ini fokus pada penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB,

Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa.

Dapat kita lihat pada tabel 3.3 strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bayan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan RPJMD 2026	Arah Kebijakan RENSTRA 2026	
		Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Arah Kebijakan RPJMD 2027	Arah Kebijakan RENSTRA 2027	
		Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2028	Arah Kebijakan RENSTRA 2028	
		Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Arah Kebijakan RPJMD 2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2029	
		Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2030	Arah Kebijakan RENSTRA 2030	
		Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN , DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      3. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
      1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
   e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
      2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      6. Penyediaan Bahan/Material
      7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
      8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3. Pengadaan Mebel
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Mebel
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.
2. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
      1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
      2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
      2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
      5. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
      6. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
      7. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
      8. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Dari uraian tersebut di atas secara rinci rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan hingga aktivitas sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 berikut ini :

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bayan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
			Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

Tabel 4.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layaan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja pemngkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	91,04	92,05		92,1		92,15		92,2		92,25		92,25			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
07.01	KECAMATAN						2.899.342.042		2.928.335.000		2.899.342.000		2.899.342.000		2.899.342.000				
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	2.899.342.042	100	2.928.335.000	100	2.899.342.000	100	2.899.342.000	100	2.899.342.000	100	SEKRETARIAT	Kecamatan Bayan	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	7	3	5.271.300	3	5.530.858	3	6.500.000	3	6.500.000	3	6.500.000	15			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	15	22	3.723.300	22	4.030.858	22	4.000.000	22	4.000.000	22	4.000.000	110			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	6	20	1.000.000	20	1.000.000	20	1.500.000	20	1.500.000	20	1.500.000	100			
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	dokumen	0	1	548.000	1	500.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	2.622.237.942	100	2.621.884.142	100	2.643.000.000	100	2.648.000.000	100	2.648.000.000	100			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjagan ASN	Orang/bls	27	25	2.618.884.142	25	2.618.884.142	25	2.640.000.000	25	2.645.000.000	25	2.645.000.000	25			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulaan/ Triwulaan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulaan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDdan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	6	44	3.353.800	44	3.000.000	44	3.000.000	44	3.000.000	44	3.000.000	220			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Pesangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	%	0	0		100	500.000	0	750.000	100	750.000	100	750.000	100			
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaaa Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	0	0	0	11	500.000	11	750.000	11	750.000	11	750.000	44			
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Pesangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	100	100	500.000	100	500.000	0	750.000	100	750.000	100	750.000	100			
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	1	1	500.000	16	500.000	16	750.000	16	750.000	16	750.000	65			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegiwaian Perangkat Daerah	%	0	0		100	2.500.000	100	2.500.000	100	1.000.000	100	2.500.000	100			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	17	2.500.000	17	1.000.000	0	0	34			
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	5	2.500.000	0	0	0	0	5	2.500.000	10			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	55.666.800	100	62.450.000	0	53.500.000	100	55.500.000	100	54.500.000	100			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	2	2.384.000	2	2.350.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	10			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2	2	4.379.500	2	4.500.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	10			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	2	24.024.800	2	25.800.000	2	20.000.000	2	19.000.000	2	20.000.000	10			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	1.728.000	2	2.750.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	10			

7.01.01.2.08.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	2	3.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
7.01.01.2.08.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	2	2	10.859.800	2	14.000.000	2	14.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	10			
7.01.01.2.08.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	0	0	0	0	0	0	0	12	2.000.000	0	0	12			
7.01.01.2.08.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	6.328.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60			
7.01.01.2.08.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan	2	2	2.633.500	2	3.850.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	10			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	unit	13	0		1	15.000.000	21	15.000.000	1	10.000.000	2	15.000.000	38			
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1			
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000	0	0	1			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	11	0	0	0	0	20	5.000.000	0	0	0	0	20			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	1			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	laporan	2	2	106.943.000	2	107.340.000	2	107.342.000	2	102.342.000	2	102.342.000	10			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	56.603.000	12	57.000.000	12	57.000.000	12	57.000.000	12	57.000.000	60			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	50.340.000	12	50.340.000	12	50.342.000	12	45.342.000	12	45.342.000	60			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	5	108.723.000	6	112.630.000	5	70.000.000	6	74.500.000	5	69.000.000	27			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	34.880.000	1	34.880.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	5	19.750.000	8	19.750.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	37			
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	0	0	0	25	4.900.000	0	0	25	5.000.000	0	0	50			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	35	28	20.120.000	27	15.000.000	27	15.000.000	27	14.500.000	27	14.000.000	136			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	20.370.000	2	24.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	14	10	13.603.000	10	14.500.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	50			
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	91,04	92,05		92,1		92,15		92,2		92,25		92,25			
07:01	KECAMATAN						181.637.000		288.552.000		211.884.000		223.606.000		235.514.000				
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	15.974.100	100	22.936.000	100	15.974.000	100	16.226.000	100	16.483.000	100	SEKSI PEMBANGUNAN	Kecamatan Bayan	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	1	1	13.724.100	1	2.900.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5			
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaaa Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	dokumen	0	0	0	1	2.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4			

7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	1	4	13.724.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	laporan	2	1	2.250.000	2	19.436.000	2	13.474.000	2	13.726.000	2	13.983.000	9			
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	laporan	0	0	0	2	2.000.000	2	1.000.000	2	1.950.000	2	1.250.000	8			
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	laporan	0	0	0	2	15.936.000	2	10.974.000	2	10.276.000	2	11.233.000	8			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	1	1	2.250.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	5			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	laporan	0	0		1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	4			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	0	0	0	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	4			
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	%	100	100	72.636.500	100	108.900.000	100	102.884.000	100	112.884.000	100	123.041.000	100	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Bayan	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen	2	2	72.636.500	2	108.900.000	2	102.884.000	2	112.884.000	2	123.041.000	10			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawaah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Mesyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	5	5	14.362.100	5	18.900.000	5	17.884.000	5	17.884.000	5	18.041.000	25			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Nasyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Elektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	58.274.400	1	90.000.000	1	85.000.000	1	95.000.000	1	105.000.000	5			
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	11.336.700	100	16.905.000	100	11.337.000	100	11.516.000	100	11.698.000	100	SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Bayan	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dokumen	1	1	11.336.700	2	16.905.000	2	11.337.000	2	11.516.000	2	11.698.000	9			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	11.336.700	4	14.000.000	4	10.337.000	4	9.516.000	4	10.698.000	20			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	dokumen	0	0	0	1	2.905.000	1	1.000.000	1	2.000.000	1	1.000.000	4			
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	24.686.300	100	28.328.000	100	24.686.000	100	25.076.000	100	25.473.000	100	SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Bayan	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	dokumen	1	2	24.686.300	2	28.328.000	2	24.686.000	2	25.076.000	2	25.473.000	10			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	0	70	9.222.300	70	12.500.000	70	10.000.000	70	10.390.000	70	10.790.000	350			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	15.464.000	1	15.828.000	1	14.686.000	1	14.686.000	1	14.683.000	5			

07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	57.003.400	100	111.483.000	100	57.003.000	100	57.904.000	100	58.819.000	100	SEKSI PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bayan	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	dokumen	5	6	57.003.400	8	111.483.000	7	57.003.000	7	57.904.000	7	58.819.000	35			
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu	dokumen	0	0	0	1	3.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Admiaistrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	1	1	2.503.400	1	6.983.000	1	4.253.000	1	4.532.500	1	4.532.500	5			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	1	1	13.000.000	1	20.500.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5			
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	1	1	28.886.000	1	37.000.000	1	30.000.000	1	30.621.500	1	31.536.500	5			
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dokumen	0	1	8.850.000	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	2			
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	dokumen	1	1	2.564.000	1	4.500.000	1	2.750.000	1	2.750.000	1	2.750.000	5			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	dokumen	1	1	1.200.000	1	5.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5			
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	dokumen	0	0	0	1	4.500.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4			
Jumlah							3.080.979.042		3.214.887.000		3.111.226.000		3.122.948.000		3.134.856.000				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN SUCEN JURUTENGAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						560.247.500		560.000.000		530.000.000		530.000.000		530.000.000				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			560.247.500		560.000.000		530.000.000		530.000.000		530.000.000		KELURAHAN SUCEN JURUTENGAH	KELURAHAN SUCEN JURUTENGAH	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dokumen	2	2	560.247.500	2	560.000.000	2	530.000.000	2	530.000.000	2	530.000.000	10	KELURAHAN SUCEN JURUTENGAH		
			Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen													KELURAHAN SUCEN JURUTENGAH		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	1	420.000.000	2	420.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	9	KELURAHAN SUCEN JURUTENGAH		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1	140.247.500	1	140.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	5	KELURAHAN SUCEN JURUTENGAH		
Jumlah							560.247.500		560.000.000		530.000.000		530.000.000		530.000.000				

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Monitoring Pembangunan	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas)	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi intensifikasi PBB	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
				Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil kelurahan, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi keagamaan	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Forkopimcam	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP)	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades dan Sekdes, Pembinaan Perangkat Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pilkades	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi	

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diarahkan pada Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa; Peningkatan Partisipasi masyarakat meliputi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bayan. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Dimana mereka ikut ambil bagian dalam kegiatan persebut. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan keluharan juga diarahkan pada Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan; Gerakan sayang ibu dan anak, Kecamatan layak Anak, Pembinaan PKK, Pembinaan Karang Taruna, Pembinaan BUMDes/BUMDesma, Pembinaan dan Fasilitasi UMKM serta Pendampingan Koperasi Merah Putih dimana Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAK Asasi Manusia (HAM), Membangun Desa dari Bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas serta Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga di Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum diarahkan pada Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan; Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. Sedangkan Program Delegasi Provinsi yang didukung yaitu Mendorong Penguatan Forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan. Serta Mendukung Program Pitulungan Bupati Purworejo Religius Masyarakate.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diarahkan pada Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Penyelenggaraan HUT RI serta Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan. Program ini mendukung Program Nasional Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAK Asasi Manusia (HAM) serta mendukung Program Delegasi Provinsi Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa diarahkan pada Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa; Penyelenggaraan fasilitasi Penyusunan APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP. Program ini mendukung Program Nasional Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan. Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial,

generasi Z dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga diarahkan pada Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Sekretaris Desa; Kegiatan Konferensi Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Dimana program ini mendukung Delegasi Provinsi Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa.

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah dan digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Tujuan dan Sasaran PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	92,02	92,05	92,10	92,15	92,20	92,25	Tujuan dan Sasaran PD

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bayan yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bayan Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Bayan serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bayan setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Rencana Strategis Kecamatan Bayan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bayan setiap tahun.
b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c. Camat Bayan wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Bayan dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
d. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya ditandai dengan pelaksanaan pembangunan, sewajarnya diawali dengan proses perencanaan yang matang. Salah satu kebutuhan perencanaan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaan PD Kecamatan Kutoarjo menyusun Renstra Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Purworejo.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Kutoarjo merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Kutoarjo serta ancaman dan peluang yang mempengaruhi Kecamatan Kutoarjo.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :

a. Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra PD.
c. Tahapan penetapan Renstra PD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Kutoarjo selaku Kepala PD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bapperida Kabupaten Purworejo.

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan hierarki Rencana Strategis PD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu Renstra Kecamatan Kutoarjo Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Purworejo untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, landasan hukum tersebut sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Kutoarjo Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah terhadap strategi dan kebijakan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka menengah (*sustainability development*) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap anggaran 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kutoarjo Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1 Sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2025-2029;
2 Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap strategi dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2025-2029;
3 Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030;
4 Sebagai instrumen untuk memudahkan Kecamatan Kutoarjo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5 Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronasi dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; serta
6 Sebagai tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kecamatan Kutoarjo sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merumuskan latar belakang penyusunan Renstra berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya renstra dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD , dasar hukum yang relevan dan signifikan, menguraikan maksud dan tujuan dan menjelaskan sistematika penulisan renstra perangkat daerah tahun 2025 – 2029.

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan data dan informasi terkait pelaksanan urusan yang manjadi tanggung jawab Perangkat Daerah , penyajina hasil evaluasi capaian 5 tahun terakhir, tugas fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya, kinerja penyelenggaran pelayanan, kelompok sasaran pelayanan, mitra perangkat daerah, dukungan BUMD dan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Bab III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjabarkan tentang tujuan dan sasaran renstra yang didasarkan pada NSPK (Norma, standar, prosedur dan kriteria) , strategi Renstra dan arah kebijakan.

Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjabarkan uraian program, kegiatan, subkegiatan Perangkat Daerah yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang mengacu pada permendagri beserta pemutakhirannya.

Bab V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, bahwa kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat.

Susunan Organisasi Kecamatan Kutoarjo, terdiri dari:

a. Camat;
b. Sekretariat, membawahkan:
   1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
   2) Subbagian Umum Dan Kepegawaian
c. Seksi Pemerintahan Desa;
d. Seksi Pembangunan;
e. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Kelurahan

CAMAT

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

SEKSI
PEMERINTAHAN DESA

SEKSI
PEMBANGUNAN

SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTBAN UMUM

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi PD

Camat mempunyai tugas pokok:

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan;
h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
i. pelakasanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain menjalankan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Camat juga menyelenggarakan fungsi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam menyelenggarakan fungsinya, Camat dibantu oleh perangkat kecamatan.

1.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Aparatur Sipil Negara Kecamatan Kutoarjo berdasarkan Golongan, Jabatan/Eselonering dan Pendidikan sebanyak 68 orang terdiri dari 57 orang ASN, dan 11 orang Non ASN. Adapun rincian sumber daya manusia di Kecamatan Kutoarjo sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan :

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Tk. 1 (IV.b)	1 orang
2	Pembina (IV.a)	2 orang
3	Penata Tk. I (III.d)	13 orang
4	Penata (III c)	5 orang
5	Penata Muda Tk. I (III b)	17 orang
6	Penata Muda (III.a)	10 orang
7	Pengatur Tk. I (II d)	8 orang
8	Pengatur (II c)	1 orang
	Jumlah	57 orang

- Non ASN : 11 orang (8 tenaga kebersihan, 2 tenaga jaga malam dan 1 tenaga sopir)

b. Berdasarkan Jabatan / Eselonering :

NO	ESELON	JUMLAH
1	Camat / Eselon III a	1 orang
2	Sekcam / Eselon III b	1 orang
3	Lurah dan Kepala Seksi Kecamatan / Eselon IV a	10 orang
4	Kepala Subagian dan Kepala Seksi Kelurahan/ Eselon IV b	22 orang
5	Non Eselon	23 orang
	Jumlah	57 orang

c. Berdasarkan Pendidikan :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S 2)	5 orang
2	Sarjana (S 1)	27 orang
3	Sarjana Muda (D 3)	9 orang
4	SLTA	16 orang
	Jumlah	57 orang

Kepemilikan Aset Tetap BMD tahun 2025 :

KIB A : Tanah

NO	UNIT KERJA	JENIS TANAH	JUMLAH
1	Kecamatan Kutoarjo	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 bidang
2	Kelurahan Bandung	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1 bidang
		Tanah Sawah Irigasi	1 bidang
		Tanah Tegalan	9 bidang
		Tanah Untuk Jalan Desa	26 bidang
		Tanah Untuk Monumen	1 bidang
		Tanah Untuk Makam Umum	2 bidang
3	Kelurahan Kutoarjo	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 bidang
		Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1 bidang
		Tanah Sawah Irigasi	18 bidang
		Tanah Tegalan	6 bidang
		Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1 bidang
		Tanah Untuk Jalan Desa	27 bidang
		Tanah untuk Jalan lainnya	1 bidang
		Tanah Bangunan Air lainnya	2 bidang
		Tanah Untuk Makam Umum	5 bidang
4	Kelurahan Semawung Daleman	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	2 bidang
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 bidang
		Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1 bidang
		Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1 bidang
		Tanah Sawah Irigasi	35 bidang
		Tanah Tegalan	4 bidang
		Tanah Untuk Jalan Desa	49 bidang
		Tanah Untuk Makam Umum	1 bidang
5	Kelurahan Semawung Kembaran	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 bidang
		Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1 bidang
		Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	2 bidang
		Tanah Sawah Irigasi	25 bidang
		Tanah Tegalan	11 bidang
		Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	20 bidang
		Tanah Untuk Jalan Desa	34 bidang
		Tanah Untuk Makam Umum	4 bidang
6	Kelurahan Bayem	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 bidang
		Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1 bidang
		Tanah Sawah Irigasi	51 bidang
		Tanah Tegalan	23 bidang
		Tanah Lapangan Sepak Bola	1 bidang
		Tanah Untuk Jalan Desa	45 bidang
		Tanah Untuk Makam Umum	8 bidang
7	Kelurahan Katerban	Tanah Bangunan Perdagangan lainnya (dst)	1 bidang
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 bidang

		Tanah Sawah Irigasi	22 bidang
		Tanah Tegalan	9 bidang
		Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5 bidang
		Tanah Lapangan Sepak Bola	2 bidang
		Tanah Untuk Jalan Desa	18 bidang
		Tanah Untuk Makam Umum	4 bidang

KIB B : Peralatan dan Mesin

Jumlah aset Peralatan Kantor :

No	Unit Kerja	Genset	Mobil	Sepeda Motor	P.C Unit	Laptop	Printer	Scanner
1	Kecamatan Kutoarjo	1 unit	1 unit	9 unit	2 unit	18 unit	12 unit	1 unit
2	Kelurahan Bandung			3 unit	4 unit	4 unit	6 unit	
3	Kelurahan Kutoarjo			2 unit	4 unit	5 unit	6 unit	1 unit
4	Kelurahan Semawung Daleman			2 unit	3 unit	3 unit	4 unit	1 unit
5	Kelurahan Semawung Kembaran			2 unit	2 unit	5 unit	4 unit	
6	Kelurahan Bayem			2 unit	1 unit	4 unit	4 unit	
7	Kelurahan Katerban			2 unit	1 unit	6 unit	5 unit	2 unit

KIB C : Gedung dan Bangunan

No	Unit Kerja	Gedung dan Bangunan
1	Kecamatan Kutoarjo	1 unit Gedung Kantor 1 unit Rumah Dinas 1 unit Pendopo 1 unit Gedung PKK 1 unit Gedung Darma Wanita 1 unit Gedung Pendamping Desa 1 unit Mushola
2	Kelurahan Bandung	1 unit Gedung Kantor (lama) 1 unit Gedung Kantor dan Aula (baru) 2 unit Gedung Pendidikan (TK)
3	Kelurahan Kutoarjo	1 unit Gedung Kantor dan Aula
4	Kelurahan Semawung Daleman	1 unit Gedung Kantor 1 unit Gedung Pertemuan 1 unit Gedung Pendidikan (TK)
5	Kelurahan Semawung Kembaran	1 unit Gedung Kantor 1 unit Gedung Pertemuan 1 unit Gedung Pendidikan (TK)
6	Kelurahan Bayem	1 unit Gedung Kantor (lama) 1 unit Gedung Kantor dan Aula (baru)
7	Kelurahan Katerban	1 unit Gedung Kantor 1 unit Gedung Pendidikan (PAUD)

KIB D : Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan desa dan saluran drainase tercatat di KIB D Kelurahan

1.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat keadaan yang menonjol atau trend yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang telah dijalani. Dengan melihat keadaan tersebut dapat diproyeksikan rencana apa yang akan dibuat untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kutoarjo berdasarkan sasaran/target renstra PD 2025-2029 atau Renstra sebelumnya. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan PD mengacu pada hasil kerja

periode Renstra sebelumnya. Pada umumnya capaian pelayanan mencapai target. Pada sasaran yang menjadi target, tercapai 100%. Tidak ada gap / kesenjangan pelayanan. Faktor pendukung antara lain, proses perencanaan yang bisa mengakomodasi kebutuhan seksi, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Potensi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kutoarjo dimanfaatkan dengan maksimal untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan. Dengan jumlah pegawai yang terbatas dihadapkan dengan jumlah kelurahan desa yang besar, Kecamatan Kutoarjo harus bisa mencukupi segala aktifitas yang menjadi tupoksi kecamatan. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kutoarjo, kami sajikan seperti Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan K

Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstr		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				79,25	80,25	81,25	82,25	83,25	87,7	79,25	80,25	81,25
2	Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				79,25	80,25	81,25	82,25	83,25	87,7	79,25	80,25	81,25
3	Program : Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100	100	100	100	100		100	100	100
4	Program : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100	100	100	100	100		100	100	100
5	Program : Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan				100	100	100	100	100		100	100	100
6	Program : Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100	100	100	100	100		100	100	100
7	Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100	100	100	100	100		100	100	100
8	Program : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100	100	100	100	100		100	100	100

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Dae

Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.222.369.146	5.634.087.320	5.870.105.966	6.451.445.866	6.626.395.130	6.661.068.738	7.044.048.106	7.442.573.735	7.0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	196.160.000	167.477.000	59.519.000	65.402.000	67.151.000	66.992.000	125.034.000	116.111.200	6
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.619.963.000	7.596.211.970	5.475.232.800	6.014.320.200	6.176.682.000	6.162.237.000	1.413.011.255	6.569.983.260	5.1
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	170.000.000	28.000.000	19.239.000	21.147.000	21.730.000	21.677.000	170.000.000	28.000.000	2
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	4.187.000	4.558.000	4.717.000	4.664.000	-	-	3
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	361.416.000	134.960.100	117.607.000	129.161.000	132.659.000	132.341.000	251.573.200	125.785.700	14

Tabel tersebut mengambarkan kinerja pengelolaan pendanaan periode Renstra 2021 – 2026, sesuai dengan target. Untuk pendapatan rata – rata mencapai target 100 % bahkan ada yang lebih.

Tabel 2.3

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*10*
1	Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		79,25	80,25	81,25	87,59	
2	Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		79,25	80,25	81,25	87,59	
3	Indikator Program : Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Indikator Program : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Indikator Program : Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	

	Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan						
6	Indikator Program : Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Indikator Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Indikator Program : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	

1.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strength*, *Weakness,Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strength)
   1. Sumber Daya Manusia (pegawai) yang mempunyai pendidikan memadai serta semangat untuk belajar terhadap tugas pokok dan fungsinya.
   2. Tersedianya sarana / prasarana dan dan dukungan dana / pembiayaan sangat membantu kelancaran dalam melayani dan memfasilitasi pemerintah Desa dan memperlancar kegiatan di Kecamatan.
   3. Sistem kekeluargaan yang telah terbangun, hubungan koordinasi dan konsultasi yang berjalan baik bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat baik bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

   Kurangnya jumlah pegawai di Sekretariat kecamatan yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
   1. Perkembangan teknologi informasi tidak diimbangi semangat untuk belajar dari sebagian besar pegawai yang ada.
   2. Belum ada pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan.
   3. Belum tersedia data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam merencanakan pembangunan yang komprehensif dan berkesinambungan.
   4. Belum adanya sumber daya perencana yang berkualitas dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
   5. Pelaksanaan musyawarah pembangunan (musrenbang) masih sekedar formalitas hasilnya belum sesuai yang diusulkan peserta.

Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)
   1. Kepemimpinan yang punya jangkauan kedepan (Visioner), berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yang berpartisipatif.
   2. Adanya program-program pemerintah di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kutoarjo
   3. Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purworejo yang sudah mulai tertata.
   4. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
   5. Hubungan yang harmonis dengan instansi yang lain dan juga dengan para pemangku kepentingan.
b. Faktor Ancaman (Threat)
   1. Perkembangan tehnologi, berlakunya kawasan Masyarakat Ekonomi Asean / MEA serta tuntutan yang semakin beraneka ragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangn dan hal tersebut harus ditampung, diperhatikan dan dilayani.
   2. Kondisi masyarakat yang tidak sama baik tingkat sosial ekonomi, pendidikan dan hal-hal yang lain berpengaruh terhadap cara pandang pola pikir.
   3. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan secara partisipatif.
   4. Kebijakan pemerintah yang kurang sosialisasi, akan berakibat bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat.

1.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat sehingga dalam hal ini kelompok sasaran layanan Kecamatan Kutoarjo mencakup antara lain : masyarakat, pemerintah desa, perangkat daerah lainnya di Kabupaten Purworejo, instansi vertikal di Kabupaten Purworejo, TNI, POLRI, lembaga/instansi pemerintah maupun swasta lainnya, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kepentingan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

1) **Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

   Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Kutoarjo harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sehingga dalam memberikan layanannya senantiasa membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan pihak lain sebagai mitra seperti dari TNI, POLRI, Pemerintah Desa, Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo dan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, swasta, masyarakat serta pihak terkait lainnya demi kelancaran dan

keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

2) **Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Kutoarjo juga tidak terlepas dari keberadaan dan dukungan yang diberikan oleh BUMD yang berkontribusi dalam penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Kecamatan Kutoarjo dalam kegiatan operasional pegawai dan perkantoran seperti sumberdaya air oleh PDAM Perwitasari dan jasa/produk/layanan perbankan oleh Bank Jateng dalam pengelolaan keuangan daerah

1.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi hasilnya adalah kondisi aktual yang menjadi fokus tahun 2026-2029 berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal.
2. Akuntabilitas keuangan belum disertai kompetensi Sumber Daya Manusia.
3. Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan.
4. Pelayanan publik prima belum merata.
5. Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif.

1.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, serta keterkaitannya dengan isu KLHS RPJMD 2025–2029 dan dinamika lingkungan global, nasional, maupun regional, maka dapat dirumuskan isu strategis perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 2.4
Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif
	Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah			Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia		
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan		Cyber insecurity			

	Pelayanan publik prima belum merata		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			
	Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2025-2029, yaitu **“Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Prworejo Berseri)”**. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan Misi ke 5 Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagai berikut : **“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.“**

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Kecamatan Kutoarjo mendukung misi ke 5, yaitu “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif, serta berbasis teknologi informasi”, maka ditetapkan tujuan strategis perangkat daerah Kecamatan Kutoarjo yaitu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan ini adalah:

a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja.
b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik

1.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kutoarjo beserta indikator dan targetnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kutoarjo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	87,6	87,7	87,80	87,90	88,00	88,10	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	87,6	87,7	87,80	87,90	88,00	88,10	

1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah diperlukan arah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan bagaimana penyelesaian isu strategis Perangkat Daerah.

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5

Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat	Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat	Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat
Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	**Arah Kebijakan RPJMD 2026**	**Arah Kebijakan RENSTRA 2026**	
		Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	**Penguatan** inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2027	**Arah Kebijakan RENSTRA 2027**	
		Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	**Peningkatan** inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana	

			kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2028	**Arah Kebijakan RENSTRA 2028**	
		Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	**Pemantapan** inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2029	**Arah Kebijakan RENSTRA 2029**	
		Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	**Perwujudan** inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2030	**Arah Kebijakan RENSTRA 2030**	
		Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	**Peneguhan** inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di	

			bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030, kami sajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
			Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	

			Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

Tabel 4.2.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	87,6	87,7		87,8		87,9		88		88,1		88,1			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
07:01	KECAMATAN						6.866.618.414		6.935.285.000		6.866.618.000		6.866.618.000		6.866.618.000				
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	6.866.618.414	100	6.935.285.000	100	6.866.618.000	100	6.866.618.000	100	6.866.618.000	100	Sekretariat	Kecamatan Kutoarjo	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	3	5.220.200	3	5.220.200	3	5.220.200	3	5.220.200	3	5.220.200	15			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	19	23	3.802.600	23	3.802.600	23	3.802.600	23	3.802.600	23	3.802.600	115			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	22	22	1.292.600	22	1.292.600	22	1.292.600	22	1.292.600	22	1.292.600	110			
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	5			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	33	45	6.359.348.714	45	6.020.703.300	45	6.182.036.300	45	6.182.036.300	45	6.182.036.300	225			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	60	60	6.347.109.214	60	6.017.463.800	60	6.178.796.800	60	6.178.796.800	60	6.178.796.800	60			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	32	44	3.239.500	44	3.239.500	44	3.239.500	44	3.239.500	44	3.239.500	220			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	11	250.000	11	250.000	11	250.000	11	250.000	11	250.000	55			
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	11	250.000	11	250.000	11	250.000	11	250.000	11	250.000	55			
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	1	500.000	16	500.000	16	500.000	16	500.000	16	500.000	65			
7.01.01.2.04.0007	PeLaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	1	500.000	16	500.000	16	500.000	16	500.000	16	500.000	65			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	17	125.000	17	125.000	17	125.000	17	125.000	17	125.000	85			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	17	125.000	17	125.000	17	125.000	17	125.000	17	125.000	85			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	160.782.800	8	160.782.800	8	160.782.800	8	160.782.800	8	160.782.800	40			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	7	17.611.100	7	17.611.100	7	17.611.100	7	17.611.100	7	17.611.100	35			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	7	18.120.200	7	18.120.200	7	18.120.200	7	18.120.200	7	18.120.200	35			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	55.381.200	7	55.381.200	7	55.381.200	7	55.381.200	7	55.381.200	35			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7	10.236.400	7	10.236.400	7	10.236.400	7	10.236.400	7	10.236.400	35			
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Paket	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	7	7	44.269.900	7	44.269.900	7	44.269.900	7	44.269.900	7	44.269.900	35			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	12	675.000	12	675.000	12	675.000	12	675.000	12	675.000	60			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	8.308.000	12	8.308.000	12	8.308.000	12	8.308.000	12	8.308.000	60			
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	1	6.181.000	1	6.181.000	1	6.181.000	1	6.181.000	1	6.181.000	5			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	156	0		23	385.000.000	21	155.000.000	21	155.000.000	21	155.000.000	86			
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	7	0	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	40			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	0	0	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	40			
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	24	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	110	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	181.391.700	24	181.391.700	24	181.391.700	24	181.391.700	24	181.391.700	120			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	49.487.700	12	49.487.700	12	49.487.700	12	49.487.700	12	49.487.700	60			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	131.904.000	12	131.904.000	12	131.904.000	12	131.904.000	12	131.904.000	60			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	5	168.000.000	5	181.312.000	5	181.312.000	5	181.312.000	5	181.312.000	25			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	5			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	12	43.450.000	23	47.795.000	23	47.795.000	23	47.795.000	23	47.795.000	104			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	34	26	13.870.000	40	15.257.000	40	15.257.000	40	15.257.000	40	15.257.000	186			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	8	72.750.000	8	80.025.000	8	80.025.000	8	80.025.000	8	80.025.000	40			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	5	3.050.000	11	3.355.000	11	3.355.000	11	3.355.000	11	3.355.000	49			
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	87,6	87,7		87,8		87,9		88		88,1		88,1			
07.01	KECAMATAN						113.643.400		164.392.000		113.643.000		115.114.000		118.935.000				
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	8.431.000	100	8.475.000	100	8.431.000	100	8.564.000	100	8.700.000	100	Seksi Pembangunan	Kecamatan Kutoarjo	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	7.892.000	1	7.933.000	1	7.892.000	1	8.016.000	1	8.144.000	5			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	7.892.000	1	7.933.000	1	7.892.000	1	8.016.000	1	8.144.000	5			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen	1	1	539.000	1	542.000	1	539.000	1	548.000	1	556.000	5			

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	539.000	1	542.000	1	539.000	1	548.000	1	556.000	5			
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100	100	33.867.000	100	34.043.000	100	33.867.000	100	34.078.000	100	34.617.000	100	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Kutoarjo	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen	2	2	33.867.000	2	34.043.000	2	33.867.000	2	34.078.000	2	34.617.000	10			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	5	5	4.381.000	5	4.404.000	5	4.381.000	5	4.408.000	5	4.478.000	25			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	7	29.486.000	8	29.639.000	8	29.486.000	8	29.670.000	8	30.139.000	39			
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	22.274.000	100	22.389.000	100	22.274.000	100	22.626.000	100	22.983.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kutoarjo	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	2	22.274.000	2	22.389.000	2	22.274.000	2	22.626.000	2	22.983.000	10			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	4	11.881.000	4	11.942.000	4	11.881.000	4	12.069.000	4	12.259.000	20			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	10.393.000	1	10.447.000	1	10.393.000	1	10.557.000	1	10.724.000	5			
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	16.540.000	100	16.626.000	100	16.540.000	100	16.801.000	100	17.067.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kutoarjo	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	1	1	16.540.000	1	16.626.000	1	16.540.000	1	16.801.000	1	17.067.000	5			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	16.540.000	1	16.626.000	1	16.540.000	1	16.801.000	1	17.067.000	5			
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	32.531.400	100	82.859.000	100	32.531.000	100	33.045.000	100	33.568.000	100	Seksi Pemerintahan Desa	Kecamatan Kutoarjo	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeristahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	5	2	32.531.400	7	82.859.000	7	32.531.000	7	33.045.000	6	33.568.000	29			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	0	0	1	8.159.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	0	0	1	10.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4			
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	1	28.581.400	1	28.730.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5			
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	15	3.950.000	15	15.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	0	0	32			
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	0	0	0	1	2.970.000	1	2.970.000	1	2.970.000	1	2.970.000	4			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	0	0	1	8.000.000	1	1.500.000	1	1.650.000	1	1.815.000	4			
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	0	0	2	10.000.000	2	4.061.000	2	4.425.000	2	5.783.000	8			
Jumlah							**6.980.261.814**		**7.099.677.000**		**6.980.261.000**		**6.981.732.000**		**6.983.553.000**				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN KUTOARJO
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	87,6	87,7		87,8		87,9		88		88,1		0			
07:01	KECAMATAN						798.079.391		802.212.000		798.079.300		803.056.000		815.744.000				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	0	100	798.079.391	100	802.212.000	100	798.079.300	100	803.056.000	100	815.744.000	100	KELURAHAN KUTOARJO	KELURAHAN KUTOARJO	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			798.079.391		802.212.000		798.079.300		803.056.000		815.744.000		KELURAHAN KUTOARJO		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dokumen	0	2		2		2		2		2		0	KELURAHAN KUTOARJO		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	4	401.868.091	4	403.949.000	4	401.868.000	4	404.374.000	4	410.763.000	20	KELURAHAN KUTOARJO		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	6	6	396.211.300	6	398.263.000	6	396.211.300	6	398.682.000	6	404.981.000	30	KELURAHAN KUTOARJO		
Jumlah							**798.079.391**		**802.212.000**		**798.079.300**		**803.056.000**		**815.744.000**				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN BANDUNG
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						659.513.650		662.928.000		659.513.650		663.626.000		674.112.000				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			659.513.650		662.928.000		659.513.650		663.626.000		674.112.000		KELURAHAN BANDUNG	KELURAHAN BANDUNG	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			659.513.650		662.928.000		659.513.650		663.626.000		674.112.000		KELURAHAN BANDUNG		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	4	487.558.650	4	490.083.000	4	487.558.650	4	490.599.000	4	498.351.000	20	KELURAHAN BANDUNG		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	6	6	171.955.000	6	172.845.000	6	171.955.000	6	173.027.000	6	175.761.000	30	KELURAHAN BANDUNG		
Jumlah							**659.513.650**		**662.928.000**		**659.513.650**		**663.626.000**		**674.112.000**				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						668.190.950		671.651.000		668.190.950		672.358.000		682.982.000				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			668.190.950		671.651.000		668.190.950		672.358.000		682.982.000		KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN	KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			668.190.950		671.651.000		668.190.950		672.358.000		682.982.000		KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	3	495.715.850	3	498.283.000	3	495.715.850	3	498.807.000	3	506.689.000	15	KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	6	5	172.475.100	5	173.368.000	5	172.475.100	5	173.551.000	5	176.293.000	25	KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN		
Jumlah							**668.190.950**		**671.651.000**		**668.190.950**		**672.358.000**		**682.982.000**				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						643.211.200		646.542.000		643.211.200		647.223.000		657.449.000				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			643.211.200		646.542.000		643.211.200		647.223.000		657.449.000		KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN	KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			643.211.200		646.542.000		643.211.200		647.223.000		657.449.000		KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	4	505.475.700	4	508.093.000	4	505.475.700	4	508.628.000	4	516.664.000	20	KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	6	6	137.735.500	6	138.449.000	6	137.735.500	6	138.595.000	6	140.785.000	30	KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN		
Jumlah							643.211.200		646.542.000		643.211.200		647.223.000		657.449.000				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN BAYEM
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07:01	KECAMATAN						661.481.500		664.906.000		661.481.500		665.608.000		676.124.000				
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			661.481.500		664.906.000		661.481.500		665.608.000		676.124.000		KELURAHAN BAYEM	KELURAHAN BAYEM	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			661.481.500		664.906.000		661.481.500		665.608.000		676.124.000		KELURAHAN BAYEM		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	5	528.543.000	5	531.280.000	5	528.543.000	5	531.839.000	5	540.242.000	25	KELURAHAN BAYEM		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	6	6	132.938.500	6	133.626.000	6	132.938.500	6	133.769.000	6	135.882.000	30	KELURAHAN BAYEM		
Jumlah							**661.481.500**		**664.906.000**		**661.481.500**		**665.608.000**		**676.124.000**				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN KATERBAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ NDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2029)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2025		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07.02	KECAMATAN						738.301.400		720.000.000		738.301.400		722.782.000		734.201.000				
07.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	%			738.301.400		720.000.000		738.301.400		722.782.000		734.201.000		KELURAHAN KATERBAN	KELURAHAN KATERBAN	
7.02.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen			738.301.400		720.000.000		738.301.400		722.782.000		734.201.000		KELURAHAN KATERBAN		
7.02.02.2.02.0003	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	3	563.050.000	3	540.000.000	3	563.050.000	3	566.582.000	3	577.573.000	15	KELURAHAN KATERBAN		
7.02.02.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Polmas dan Dimas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Polmas/ Dimas	6	6	155.251.400	6	150.000.000	6	155.251.400	6	156.200.000	6	156.628.000	30	KELURAHAN KATERBAN		
Jumlah							738.301.400		720.000.000		738.301.400		722.782.000		734.201.000				

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Monitoring Pembangunan	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan sarana dan	

				prasarana kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil kelurahan, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Forkopimcam	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi	

				Perkembangan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP)	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades dan Sekdes	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pilkades	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi	

1.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Tabel 4.4
Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Fasilitasi pemberdayaan perempuan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi perlindungan anak	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi penurunan stunting	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi pendidikan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi perlindungan lansia	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi pemberdayaan disabilitas	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi tenologi tepat guna	Kecamatan	Kecamatan
		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi dan pembinaan UMKM	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi pelestaian lingkungan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi desa wisata	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi dan pembinaan PKK	Kecamatan	Kecamatan

		Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi BUMDes	Kecamatan	Kecamatan

1.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwodadi sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Tujuan dan Sasaran PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	87,6	87,7	87,80	87,90	88,00	88,10	Tujuan dan Sasaran PD

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhanan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kutoarjo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kutoarjo Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Kutoarjo, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kutoarjo setiap tahunnya.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Rencana Strategis Kecamatan Kutoarjo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kutoarjo setiap tahun.
b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara

optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.

c) Camat Kutoarjo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Kutoarjo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra.

b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra-SKPD merupakan amanah dan tindaklanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memiliki beberapa fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya adalah :

1. sebagai operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. sebagai dasar penyusunan anggaran;
4. sebagai Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja;
5. sebagai kontrak kinerja kepala perangkat daerah dengan kepala daerah;
6. sebagai Landasan peningkatan pelayanan perangkat daerah;
7. untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di tingkat perangkat daerah;
8. untuk memastikan bahwa rencana pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
9. membantu perangkat daerah dalam mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan melalui tahapan : persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan yang masing-masing tahapan tersebut terdiri dari beberapa sub-sub tahapan/langkah yang lebih detail. Penyusunan Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan, merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Ilustrasi hubungan/keterkaitan dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen lainnya terkait perencanaan pembangunan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan
Dokumen lainnya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran

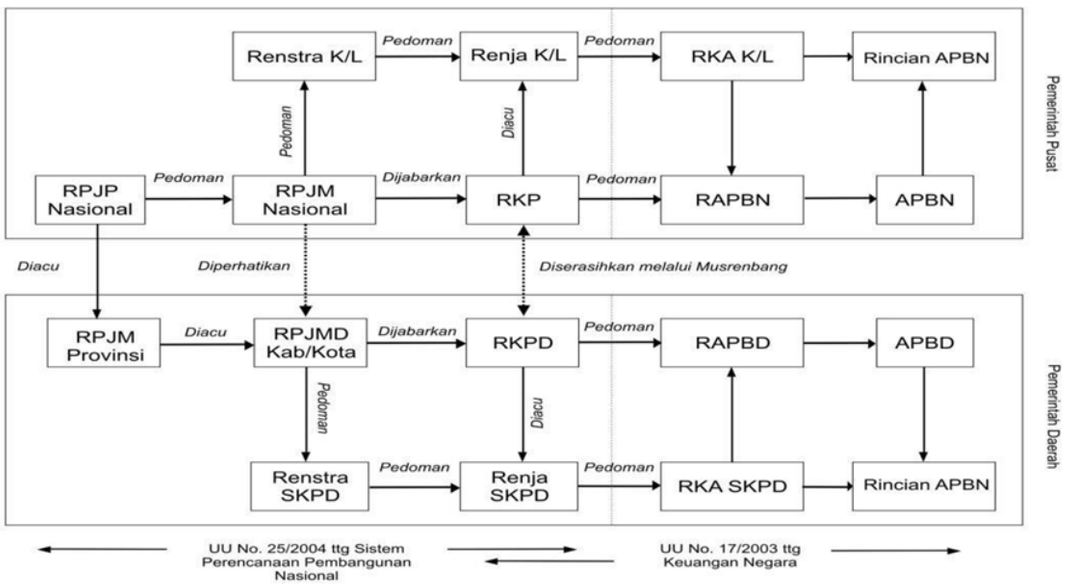

Penyusunan Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029 merupakan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam RPJMD. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029 dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
24. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 14);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan maksud sebagai berikut :

a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Butuh;
b. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Butuh dalam jangka menengah;
c. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Butuh yang mencerminkan

penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya dokumen perencanaan melalui penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Butuh.
b. Tersedianya instrumenperencanaan dalam menentukan strategi guna menghadapi kompleksitas perubahan lingkungan di Kecamatan Butuh;
c. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan konsistensi arah pembangunan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Butuh.
d. Sebagai tolok ukur keberhasilan strategi upaya pengembangan organisasi Kecamatan Butuh;
e. Menjamin penggunaan sumber daya organisasi Kecamatan Butuh dengan efektif dan efisien.
f. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja Kecamatan Butuh.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.5 Kelompok sasaran layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah
- 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Kecamatan Di wilayah Kabupaten Purworejo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Dalam Perda tersebut Kecamatan Butuh ditetapkan sebagai Kecamatan Tipe A sebagai Kecamatan dengan beban kerja yang besar berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/kelurahan. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo diatur dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati
4. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan
6. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan

Dalam melaksanakan tugasnya Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan;

h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
i. pelakasanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain menjalankan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Camat juga menyelenggarakan fungsi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam menyelenggarakan fungsinya, Camat dibantu oleh perangkat kecamatan.

Susunan Organisasi Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo terdiri dari :
1. Camat;
2. Sekretariat membawahkan :
   a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
   b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan Desa;
4. Seksi Pembangunan;
5. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
7. Jabatan Fungsional; dan
8. Kelurahan.

Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan. Camat membawahkan sekretariat, Seksi, Jabatan Fungsional, dan Kelurahan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretariat bertugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat membawahkan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subbagian dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi :
a. merencanakan, menganggarkan dan mengevaluasi kinerja;
b. melaksanakan pengadministrasian keuangan; dan

c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi :

a. melaksanakan pengadministrasian barang milik Daerah pada lingkungan kecamatan;
b. melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan Kecamatan;
c. melaksanakan pengadaan barang milik Daerah;
d. melaksanakan penyediaan jasa penunjang;
e. melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;
f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
g. menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai sesuai tugas dan jabatannya.

Seksi-seksi di Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris sebagai koordinator seksi.

Seksi Pemerintahan Desa bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta, pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa, yang meliputi :

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
h. melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
j. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
m. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n. melaksanakan fasilitasi keriasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
o. melaksanakan fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
p. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

q. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
r. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Seksi Pembangunan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Pembangunan yang meliputi :

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi :
   1 perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
   2 fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan; dan
   3 peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
b. melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi :
   1. koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
   2. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
c. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
   1. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
   2. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
   3. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat.
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi :

a. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi :
   1. Sinergitas dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan; dan
   2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.
b. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
c. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati, yang meliputi:
   1. pelaksanaan tugas forum komunikasi pimpinan di Kecamatan;
   2. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-

undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
4. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
5. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional;
6. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
8. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi :
   1. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait; dan
   2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
b. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi;
   1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
   2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan; dan
   3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan di wilayahnya; dan
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan bertugas membantu Camat :

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melaksanakan kegiatan evaluasi kelurahan;
c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
d. melaksanakan pelayanan masyarakat;
e. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
f. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
g. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Kecamatan Butuh tidak terdapat wilayah administratif yang berstatus sebagai kelurahan. Wilayah Kecamatan Butuh terdiri dari 41 wilayah administratif yang berstatus desa.

Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Kecamatan. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional. Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Kecamatan Butuh adalah sebagaimana terlihat dalam bagan sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Butuh

Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO

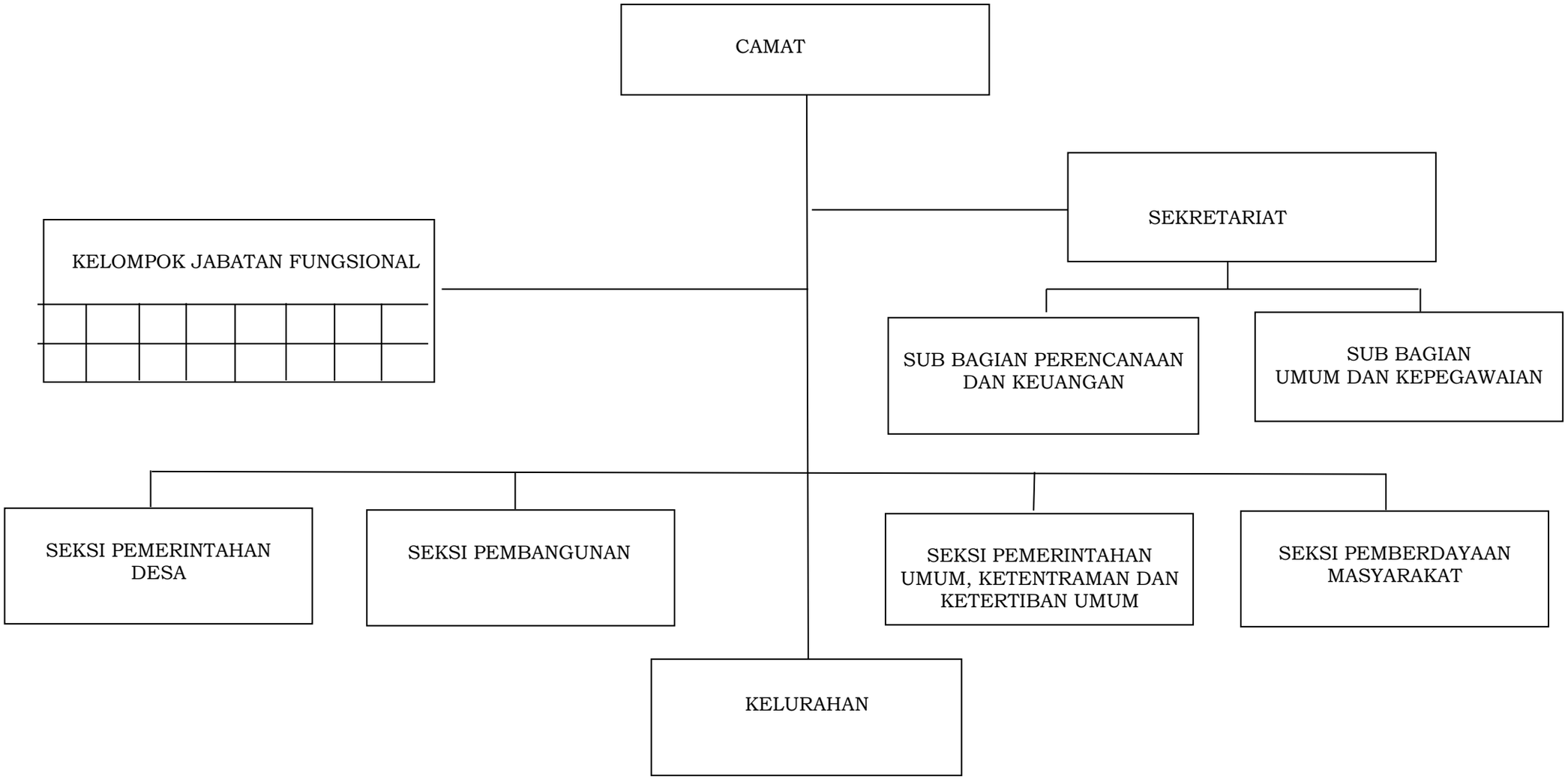

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Butuh didukung oleh tersedianya sumber daya yang dimiliki berupa Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana dan anggaran. SDM Kecamatan Butuh terdiri dari 21 (dua pulun satu) ASN dan 2 (dua) Non ASN. ASN terdiri dari 20 (dua puluh) orang PNS dan 1 (satu) orang PPPK. 2 (dua) orang Non ASN merupakan tenaga kontrak untuk menempati posisi sebagai Supir dan Tenaga Kebersihan yang melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian kerja. Komposisi ASN Kecamatan Butuh Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.2, 1.3, 1.4, dan 1.5 sebagai berikut :

Tabel 2.1
ASN Kecamatan Butuh Berdasarkan Golongan/Ruang/Jabatan

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL TERTENTU	TENAGA FUNGSIONAL UMUM	
Golongan IV/b	-	-	-	-		-	-	-
Golongan IV/a	-	-	1	-		-	-	1
JML GOLONGAN IV	-	-	**1**	-		-	-	**1**
Golongan III/d	-	-	1	5	-	-	-	6
Golongan III/c	-	-	-	-	-	-	1	1
Golongan III/b	-	-	-	-	-	1	2	3
Golongan III/a	-	-	-	-	-	1	-	1
JML GOLONGAN III	-	-	1	5	-	2	3	11
Golongan II/d	-	-	-	-	-	-	7	7
Golongan II/c	-	-	-	-	-	-	1	1
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	-	-
JML GOLONGAN II	-	-	-	-	-	-	8	8
Golongan I/d	-	-	-	-		-	-	-
Golongan I/c	-	-	-	-		-	-	-
Golongan I/b	-	-	-	-		-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-		-	-	-
JML GOLONGAN I	-	-	-	-		-	-	-
JML PPPK GOL. 7	-	-	-	-	-	1		**1**
TOTAL	**-**	**-**	**2**	**5**		**3**	**11**	**21**

Sumber : Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, 2025

Tabel 2.2
ASN Kecamatan Butuh Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Prosentase
S-2	1	5%
S-1/Sarjana	8	38%
Diploma III/Sarjana Muda	2	10%
SLTA dan sederajat	10	48%
Jumlah	**21**	**100%**

Sumber: Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, 2025.

Tabel 2.3
ASN Kecamatan Butuh Berdasarkan Jenis Kelamin

1	Laki-laki	16	Orang	76%
2	Wanita	5	Orang	24%
	JUMLAH	**21**	**Orang**	**100%**

Sumber: Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, 2025.

Selain sumberdaya aparatur, untuk mendukung operasional dan aktifitas organisasi, Kecamatan Butuh juga didukung dengan tersedianya

sarana dan prasarana pegawai maupun perkantoran yang merupakan aset tetap yang dimiliki Kecamatan Butuh. Aset tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Daftar Aset Tetap yang Dimiliki Kecamatan Butuh
per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis	T.A 2024	T.A. 2023
1	Tanah	39.509.600,00	39.509.600,00
2	Peralatan dan Mesin	844.678.865,00	833.498.865,00
3	Gedung dan Bangunan	1.492.471.627,75	1.492.471.627,75
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	62.279.980,00	62.279.980,00
5	Aset Tetap Lainnya	100.000,00	100.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-966.975.456,01	-966.975.456,01
Jumlah		**1.472.064.616,74**	**1.460.884.616,74**

Sumber: Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, 2025.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purworejo Kecamatan Butuh memiliki peran dan fungsi strategis sebagai pelaksana unsur kewilayahan. Pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur kewilayahan tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan kecamatan semata, melainkan juga sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan, oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisi dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk menilai keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja dan tercapainya hasil program, sebagai tolok ukur telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Purworejo dan Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2021-2026, IKU Kecamatan Butuh adalah "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah" yang merupakan indikator dari tujuan strategis "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" dan sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik".

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Butuh berdasarkan sasaran/target Renstra 2021-2026, tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Perangkat Daerah				83,00	83,50	84,00	84,50	85,00		82,75	94,31	88,44	86			99,70%	112,95%	105,29%	101,78%		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Perangkat Daerah				83,00	83,50	84,00	84,50	85,00		82,75	94,31	88,44	86			99,70%	112,95%	105,29%	101,78%		
3	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
4	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
5	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
6	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
8	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwa capaian IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat” (IKM) menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2021 hingga 2024. IKM berupa angka indek yang diperoleh dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Rata-rata rasio ketercapaian IKM dari Tahun 2021-2024 sebesar 105% (tercapai) dengan catatan pada tahun 2021 tidak tercapai sesuai target.

Capaian IKM pada Tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan kondisi yang tidak konsisten, namun demikian capaian IKM Kecamatan Butuh masih tergolong tinggi dan dalam kategori baik dan masih mendapat respon positif dari pengguna layanan. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat aspek pelayanan yang perlu diperhatikan, diperbaiki, dan ditingkatkan kinerjanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara konsisten, memenuhi harapan masyarakat dan memastikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan

Disamping Indikator Kinerja Utama, Kinerja Kecamatan Butuh juga ditentukan oleh hasil/output pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Pada periode Tahun 2021-2024 Kecamatan Butuh melaksanakan 6 program prioritas dalam Renstra tahun 2021-2026. Berdasarkan tabel tersebut di atas juga menunjukkan capaian kinerja program menunjukkan capaian yang konsisten dan relevan dengan rata-rata capaian 100% terhadap semua program, dengan demikian Kecamatan Butuh telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2024 dengan interprestasi tingkat capaian yang tinggi dan kategori penilaian kinerja yang baik.

Keberhasilan tercapainya indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Butuh antara lain disebabkan oleh:

1. Komitmen Camat Butuh dan segenap pegawai Kecamatan Butuh dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dan *clean governance;*
2. Ketersediaan SDM, sarana-prasarana aparatur dan pelayanan publik dan pendanaan program/kegiatan;
3. Fokus dalam meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana layanan serta kinerja aparatur yang meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. Adanya hubungan yang baik dalam menjalin koordinasi antar Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, maupun Instansi Vertikal;
5. Kondusifitas wilayah;
6. Dukungan dan kerjasama Masyarakat maupun stakeholder terkait.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis bukan berarti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Butuh tidak menemui tantangan, permasalahan dan hambatan sama sekali. Beberapa tantangan dan hambatan tersebut diantaranya Adalah :

1. Kompetensi pegawai yang belum merata;
2. Dinamika permasalahan di wilayah yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang terbatas;
3. Standar pelayanan yang telah ditetapkan belum diketahui secara luas oleh pengguna layanan.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, Kecamatan Butuh telah melakukan upaya untuk konsisten mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja dalam pencapaian target kinerja dengan berbagai aktivitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien. Beberapa langkah yang akan ditempuh antara lain :

- meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah teknis dan stakeholder lainnya guna memastikan kebijakan yang disusun dapat terlaksana dengan optimal;
- melaksanakan pembinaan SDM untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan;
- Melaksanakan publikasi standar pelayanan yang telah ditetapkan baik melalui *online* maupun *offline;*
- lebih responsif terhadap keluhan masyarakat atau pengguna layanan.

Terlaksananya program dan kegiatan prioritas Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2021-2026 yang mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Butuh, disamping didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusia maupun sarana prasarana, juga ditunjang oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025. Gambaran tentang pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah tersaji pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
KECAMATAN BUTUH	3.077.895.375	2.832.720.492	3.119.228.144	2.997.543.150	2.676.250.759	-	2.907.675.918	2.735.535.880	2.959.489.375	2.955.134.694	-	-	94%	97%	95%	99%	0%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.573.941.175	2.451.865.892	2.692.947.644	2.513.359.650	2.522.129.209	-	2.417.721.518	2.355.241.280	2.626.418.575	2.466.124.294	-	-	94%	96%	98%	98%	0%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.485.600	17.985.900	17.661.900	12.465.700	5.498.400	-	12.485.600	17.985.900	12.673.100	12.465.700	-	-	100%	100%	72%	100%	0%	
PenyusunanDokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.576.800	3.896.700	4.226.200	3.758.700	1.821.000	-	9.576.800	3.896.700	3.164.200	3.758.700	-	-	100%	100%	75%	100%	0%	
Koordinasidan PenyusunanRKA SKPD	-	1.200.000	1.274.800	1.390.500	250.000	-	-	1.200.000	774.800	1.390.500	-	-		100%	61%	100%	0%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	-	1.200.000	1.398.200	715.000	375.000	-	-	1.200.000	898.200	715.000	-	-		100%	64%	100%	0%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	-	1.552.900	1.688.200	1.680.900	1.177.400	-	-	1.552.900	848.800	1.680.900	-	-		100%	50%	100%	0%	
Koordinasidan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	-	1.552.900	1.705.400	1.060.800	250.000	-	-	1.552.900	1.330.400	1.060.800	-	-		100%	78%	100%	0%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	3.318.400	3.480.600	2.077.500	1.125.000	-	-	3.318.400	2.472.400	2.077.500	-	-		100%	71%	100%	0%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.908.800	5.265.000	3.888.500	1.782.300	500.000	-	2.908.800	5.265.000	3.184.300	1.782.300	-	-		100%	82%	100%	0%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.362.429.575	2.206.111.556	2.146.534.044	2.254.644.550	2.300.830.892	-	2.208.145.477	2.113.167.495	2.116.214.581	2.237.166.892	-	-	93%	96%	99%	99%	0%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.355.973.575	2.200.216.456	2.139.448.544	2.249.613.450	2.299.080.892	-	2.201.689.477	2.107.272.395	2.109.879.881	2.232.135.792	-	-	93%	96%	99%	99%	0%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1.406.200	1.630.700	946.100	750.000	-	-	1.406.200	1.630.700	946.100	-	-		100%	100%	100%	0%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.456.000	4.488.900	5.454.800	4.085.000	1.000.000	-	6.456.000	4.488.900	4.704.000	4.085.000	-	-	100%	100%	86%	100%	0%	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	1.375.000	-	-	-			69%			
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	1.375.000	-	-	-			69%			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.738.400	-	-	-	-	-	4.738.400	-	-	-			100%			
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	4.738.400	-	-	-	-	-	4.738.400	-	-	-			100%			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.577.200	89.708.900	93.056.500	88.505.000	59.499.150	-	45.577.200	88.394.300	83.137.800	82.979.600	-	-	100%	99%	89%	94%	0%	
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	1.960.000	2.165.100	2.029.500	2.029.400			1.960.000	2.165.000	2.029.500	-	-		100%	100%	100%	0%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	3.449.000	3.879.300	5.476.900	1.578.000	-	-	3.449.000	3.879.300	5.476.900	-	-		100%	100%	100%	0%	
Pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.199.550	-	-	23.885.400	23.658.600	21.802.200	-	-		95%	94%	87%	0%	
Penyediaan Barang Cetakan dan	-	7.724.600	9.047.500	5.966.000	5.124.400	-	-	7.724.600	7.759.500	5.966.000	-	-		100%	86%	100%	0%	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Penggandaan																		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	-	2.076.000	2.076.000	1.332.000	1.332.000	-	-	2.076.000	2.076.000	1.332.000	-	-		100%	100%	100%	0%	
Penyediaan Bahan/Material	-	16.384.300	15.963.600	16.282.400	9.425.000	-	-	16.384.300	14.019.400	16.282.400	-	-		100%	88%	100%	0%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.577.200	32.915.000	34.725.000	26.411.600	10.004.200	-	45.577.200	32.915.000	29.580.000	26.364.000	-	-	100%	100%	85%	100%	0%	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	5.806.600	4.806.600	-	-	-	-	3.726.600	-	-				64%	0%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	13.000.000	252.499.500	11.306.600	-	-	-	12.413.000	251.427.000	11.180.000	-	-		95%	100%	99%		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	252.499.500	-	-	-	-	-	251.427.000	-	-	-			100%			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	13.000.000	-	11.306.600	-	-	-	12.413.000	-	11.180.000	-	-		95%		99%		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.434.200	43.552.536	42.940.300	43.737.800	42.734.467	-	54.903.161	41.773.585	37.607.314	35.724.082	-	-	99%	96%	88%	82%	0%	
Penyediaan Jasa Surat menyurat	21.477.600	-	-	-	-	-	21.477.600	-	-	-	-	-	100%					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.992.000	19.560.000	17.560.000	18.197.000	16.706.467	-	19.461.969	17.803.157	12.227.482	10.197.802	-	-	97%	91%	70%	56%	0%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.964.600	23.992.536	25.380.300	25.540.800	26.028.000	-	13.963.592	23.970.428	25.379.832	25.526.280	-	-	100%	100%	100%	100%	0%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.014.600	81.507.000	133.517.000	102.700.000	113.566.300	-	96.610.080	81.507.000	119.245.380	86.608.020	-	-	99%	100%	89%	84%	0%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.785.600	31.249.000	26.389.000	34.880.000	34.880.000	-	38.381.080	31.249.000	17.630.000	29.182.000	-	-	96%	100%	67%	84%	0%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	9.384.000	11.850.000	15.810.000	-	-	-	7.745.000	9.836.600	-	-			83%	83%	0%	
Pemeliharaan Mebel	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	8.724.000	8.724.000	8.760.000	4.380.000	-	-	8.724.000	5.753.000	6.410.000	-	-		100%	66%	73%	0%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.700.000	40.224.000	37.710.000	38.800.000	25.317.000	-	50.700.000	40.224.000	37.710.000	38.799.420	-	-	100%	100%	100%	100%	0%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	1.310.000	1.310.000	8.410.000	1.220.000	-	-	1.310.000	837.000	2.380.000	-	-		100%	64%	28%	0%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.529.000	-	50.000.000	-	31.959.300	-	7.529.000	-	49.570.380	-	-	-	100%		99%		0%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	170.221.200	71.104.500	32.712.200	36.899.600	12.372.400	-	169.221.200	70.544.500	23.424.000	47.306.600	-	-	99%	99%	72%	128%	0%	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	167.039.000	60.843.500	25.807.400	10.645.000	4.240.400	-	166.039.000	60.283.500	18.973.400	21.214.000	-	-	99%	99%	74%	199%	0%	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	32.039.000	9.912.900	-	-	-	-	32.039.000	6.379.900	10.607.000	-	-		100%	64%			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	167.039.000	28.804.500	15.894.500	10.645.000	4.240.400	-	166.039.000	28.244.500	12.593.500	10.607.000	-	-	99%	98%	79%	100%	0%	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.182.200	10.261.000	6.904.800	13.259.300	5.853.000	-	3.182.200	10.261.000	4.450.600	13.107.300	-	-	100%	100%	64%	99%	0%	
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	-	5.893.600	-	8.910.400	3.203.000	-	-	5.893.600	-	8.758.400	-	-		100%		98%	0%	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.182.200	4.367.400	6.904.800	4.348.900	2.650.000	-	3.182.200	4.367.400	4.450.600	4.348.900	-	-	100%	100%	64%	100%	0%	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	-	-	-	4.955.700	2.279.000	-	-	-	-	4.945.700	-	-				100%	0%	
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		-	-	4.955.700	2.279.000	-	-	-	-	4.945.700	-	-				100%	0%	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	8.039.600	-	-	-	-	-	8.039.600	-	-				100%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	-	-	-	8.039.600	-	-	-	-	-	8.039.600	-	-				100%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.804.000	146.653.200	158.999.300	250.106.400	64.786.100	-	1.804.200	146.653.200	129.204.600	244.526.300	-	-	100%	100%	81%	98%	0%	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.804.000	146.653.200	158.999.300	250.106.400	64.786.100	-	1.804.200	146.653.200	129.204.600	244.526.300	-	-	100%	100%	81%	98%	0%	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	23.190.000	24.294.900	21.602.100	-	-	-	22.424.100	24.294.900	-	-			97%	100%	0%	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.804.000	146.653.200	135.809.300	225.811.500	43.184.000	-	1.804.200	146.653.200	106.780.500	220.231.400	-	-	100%	100%	79%	98%	0%	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000	15.591.900	18.167.900	22.321.200	13.438.000	-	50.000.000	15.591.900	12.950.100	22.321.200	-	-	100%	100%	71%	100%	0%	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000	9.191.000	10.211.500	17.004.600	10.017.600	-	50.000.000	9.191.000	9.399.300	17.004.600	-	-	100%	100%	92%	100%	0%	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000	9.191.000	10.211.500	9.832.600	4.742.600	-	50.000.000	9.191.000	9.399.300	9.832.600	-	-	100%	100%	92%	100%	0%	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	7.172.000	5.275.000	-	-	-	-	7.172.000	-	-				100%	0%	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	6.400.900	7.956.400	5.316.600	3.420.400	-	-	6.400.900	3.550.800	5.316.600	-	-		100%	45%	100%	0%	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Reuplik Indonesia		6.400.900	7.956.400	5.316.600	3.420.400	-	-	6.400.900	3.550.800	5.316.600	-	-		100%	45%	100%	0%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	8.786.100	42.327.200	42.958.300	25.205.000	-	-	8.786.100	39.568.600	42.958.300	-	-		100%	93%	100%	0%	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	8.786.100	42.327.200	42.958.300	25.205.000	-	-	8.786.100	39.568.600	42.958.300	-	-		100%	93%	100%	0%	
Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Indonesia				8.762.100	10.788.000	-	-	-	-	8.762.100	-	-				100%	0%	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Soaialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	8.786.100	42.327.200	34.196.200	14.417.000	-	-	8.786.100	39.568.600	34.196.200	-	-		100%	93%	100%	0%	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	281.929.000	138.718.900	174.073.900	131.898.000	38.320.050	-	268.929.000	138.718.900	127.923.500	131.898.000	-	-	95%	100%	73%	100%	0%	
Fasiltasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	281.929.000	138.718.900	174.073.900	131.898.000	38.320.050	-	268.929.000	138.718.900	127.923.500	131.898.000	-	-	95%	100%	73%	100%	0%	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	7.886.000	5.877.300	5.851.200	2.100.000	-	-	7.886.000	1.303.500	5.851.200	-	-		100%	22%	100%	0%	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	11.802.400	8.260.400	12.232.100	3.325.050	-	-	11.802.400	4.751.400	12.232.100	-	-		100%	58%	100%	0%	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	7.702.000	5.644.800	16.080.200	7.965.000	-	-	7.702.000	3.680.400	16.080.200	-	-		100%	65%	100%	0%	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	107.185.100	136.917.800	89.261.500	23.680.000	-	-	107.185.100	104.425.800	89.261.500	-	-		100%	76%	100%	0%	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	10.854.100	-	-	-	-	-	10.188.100	-	-	-			94%			
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	-	1.506.500	4.728.800	-	-	-	-	611.800	4.728.800	-	-			41%	100%		
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	4.143.400	4.191.000	3.744.200	1.250.000	-	-	4.143.400	2.786.200	3.744.200	-	-		100%	66%	100%	0%	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	48.099.000	-	-	-	-	-	48.099.000	-	-	-	-	-	100%					
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	16.270.800	-	-	-	-	-	16.270.800	-	-	-	-	-	100%					
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	-	822.000	-	-	-	-	-	176.300	-	-	-			21%			
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Fasilitasi Penyusunan Program dan	217.559.200	-	-	-			204.559.200	-	-	-	-	-	94%					

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat																		
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
JUMLAH	3.077.895.375	2.832.720.492	3.119.228.144	2.997.543.150	2.676.250.759	-	2.907.675.918	2.735.535.880	2.959.489.375	2.955.134.694	-	-	94%	97%	95%	99%	0%	

Berdasarkan data anggaran dan realisasi anggaran Renstra perangkat daerah dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.5 tersebut di atas secara umum rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang cukup tinggi dan konsisten di atas 91%, bahkan mencapai 99% pada 2024 dengan rata-rata realisasi 96% sehingga kinerja keuangan atau anggaran termasuk dalam kategori yang baik.

Dari sisi pertumbuhan anggaran dan realisasi pendanaan selama Tahun 2021 sampai dengan 2024 dijelaskan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan dari Tahun 2021-2024 anggaran mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,58% dan realisasi mengalami kenaikan rata-rata 0,71%;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengalami penurunan anggaran rata-rata sebesar 0,53% dan kenaikan realisasi rata-rata 0,94%;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mengalami penurunan anggaran rata-rata sebesar 60% dan penurunan realisasi rata-rata 40%;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mengalami kenaikan anggaran rata-rata sebesar 2698% dan kenaikan realisasi rata-rata 2702%;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mengalami penurunan anggaran rata-rata sebesar 1,33% dan kenaikan realisasi rata-rata 0,52%;
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mengalami kenaikan anggaran rata-rata sebesar 192% dan kenaikan realisasi rata-rata 179%;
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mengalami penurunan anggaran rata-rata sebesar 17% dan penurunan realisasi rata-rata 17%;

Selama rentang waktu tahun 2021-2025 banyak dinamika yang terjadi yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah secara langsung maupun tidak langsung diantaranya adalah :

1. Perubahan ketentuan/ regulasi/ prosedur/ mekanisme dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah;
2. Kemampuan dan kondisi keuangan daerah;
3. Perubahan strategi maupun kebijakan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah;
4. Kebijakan terkait penanganan pasca pandemi COVID-19;
5. Efisiensi/pembatasan penggunaan anggaran;
6. Pelaksanaan agenda penting pemerintah seperti Pemilihan Umum dan Pilkada; serta Pemilihan Kepala Desa serentak;
7. Jumlah dan kondisi personil;
8. Progres pelaksanaan program.

Data capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan Butuh selama periode tahun 2020-2024 yang melaksanakan urusan/unsur kewilayahan, bidang urusan Kecamatan berdasarkan indikator kinerja tujuan, sasaran, dan program Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2021-2025 tersaji dalam Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	52,76	65,26	58,95	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	82,75	82,75	94,31	88,44	86	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	82,75	82,75	94,31	88,44	86	
3	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						
4	IUP	-	-	-	-	-	
5	SPM	-	-	-	-	-	
6	IKK outcome Permendagri 18 2020	-	-	-	-	-	
7	Mandatory Lain	-	-	-	-	-	

Berdasarkan tabel tersebut di atas Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Butuh Tahun 2020-2024 diukur berdasarkan capaian indikator kinerja tujuan, sasaran, dan program Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029 yaitu : Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah); Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah; Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik; Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan; Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
2. Pada periode sebelumnya, yaitu Tahun 2020 dan 2021 terhadap Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang merupakan indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah karena tidak dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo maka tidak ada catatan tentang nilai capaiannya;
3. Pada Tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo, nilai SAKIP Kecamatan Butuh tercapai pada angka 52,76 dengan kategori CC (Cukup/Memadai) dengan saran atau rekomendasi perbaikan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi

akuntabilitas kinerja internal;
4. Pada Tahun 2023 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo, nilai SAKIP Kecamatan Butuh tercapai pada angka 65,26 dengan kategori B (Baik) dengan saran atau rekomendasi perbaikan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
5. Pada Tahun 2024 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo, nilai SAKIP Kecamatan Butuh tercapai pada angka 58,95 dengan kategori CC (Cukup Memadai) dengan saran atau rekomendasi perbaikan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
6. Capaian kinerja tujuan dan sasaran terhadap Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) selama Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, naik pada periode 2020-2022 dan turun pada 2023-2024, meskipun demikian nilai IKM yang diraih masih tergolong tinggi dan baik dengan catatan terdapat ketidak konsistenan dan menunjukkan terdapat permasalahan yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat ;
7. Pada periode 2020-2024 seluruh indikator kinerja program dapat tercapai 100% atau rata-rata 100% yang menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dengan baik.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian/ Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Purworejo, serta KLHS, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo pada lima tahun mendatang menghadapi sejumlah tantangan sekaligus membuka berbagai peluang strategis bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah, diantaranya adalah :
1. dinamika pembangunan daerah menuntut pelayanan publik yang semakin adaptif, responsif, dan inovatif;
2. kesenjangan kualitas sumber daya manusia aparatur, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi dan kemampuan analisis pelayanan berbasis data;
3. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk aksesibilitas di beberapa wilayah pedesaan, menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan layanan;
4. perkembangan tata ruang dan pertumbuhan wilayah menuntut perangkat daerah lebih adaptif dalam mengantisipasi kebutuhan pelayanan, misalnya terkait peningkatan mobilitas masyarakat, perubahan fungsi lahan, serta perkembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru;
5. isu lingkungan seperti kerentanan bencana alam (banjir), degradasi lingkungan, dan keterbatasan daya dukung lahan menjadi tantangan tambahan bagi pelayanan publik, terutama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;
6. Berdasarkan Tipologi wilayah, Kecamatan Butuh masuk dalam kategori berkembang yang perlu didorong untuk berkembang menjadi wilayah yang maju;

Dengan kondisi-kondisi dan tuntutan-tuntutan kedepan, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Butuh untuk mengembangkan pelayanannya seperti :

1. arah kebijakan nasional dan provinsi yang menekankan pada transformasi digital pelayanan publik menjadi momentum untuk memperkuat inovasi layanan berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat secara daring;
2. dukungan masyarakat serta meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas mendorong perangkat daerah untuk membangun layanan yang lebih partisipatif dan responsif;
3. adanya peluang penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat diintegrasikan dalam inovasi pelayanan publik ramah lingkungan.

Dengan mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, Kecamatan Butuh diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo mencakup seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan yang berada dalam wilayah administrasi kecamatan. Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Butuh memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kelompok sasaran memperoleh pelayanan yang adil, mudah diakses, dan berkualitas.

Sasaran utama pelayanan adalah masyarakat umum, yaitu seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Butuh. Mereka menjadi penerima layanan administrasi pemerintahan, kependudukan, perizinan sederhana, serta berbagai fasilitasi program pembangunan. Selain itu, pemerintah desa beserta perangkatnya menjadi kelompok sasaran penting mengingat peran desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kecamatan hadir untuk memberikan pembinaan, pendampingan, serta koordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Kelompok lain yang menjadi perhatian adalah masyarakat rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. Mereka memerlukan layanan publik yang inklusif, perlindungan sosial, serta akses yang lebih mudah terhadap program-program pemerintah. Di sisi lain, pelaku ekonomi lokal seperti petani, pedagang, dan pelaku UMKM juga menjadi sasaran layanan melalui fasilitasi perizinan, penguatan kapasitas usaha, dan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kelompok kepemudaan juga menjadi kelompok sasaran layanan yang penting. Mereka memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat kecamatan maupun desa. Sementara itu, dari sisi internal pemerintahan, aparatur sipil negara dan perangkat daerah lain juga menjadi kelompok sasaran dalam rangka koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan lintas sektor di tingkat kecamatan.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Butuh tidak hanya berfokus pada masyarakat secara umum, tetapi juga mencakup kelompok rentan, pelaku usaha, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga aparatur pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan kecamatan bersifat menyeluruh dan inklusif, guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Butuh

1) Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
   Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Butuh harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sehingga dalam memberikan layanannya senantiasa membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan pihak lain sebagai mitra seperti dari TNI, POLRI, Pemerintah Desa, Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo dan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, swasta, masyarakat/ kelompok masyarakat/ organisasi kemasyarakatan serta pihak terkait lainnya;

2) Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
   Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Butuh juga tidak terlepas dari keberadaan dan dukungan yang diberikan oleh BUMD yang berkontribusi dalam penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Kecamatan Butuh dalam kegiatan operasional pegawai dan perkantoran seperti sumberdaya air oleh PDAM Perwitasari dan jasa/produk/layanan perbankan oleh Bank Jateng dalam pengelolaan keuangan daerah.

3) Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
   Kecamatan Butuh sebagai perangkat daerah tidak mempunyai mengadakan/ikatan kerjasama tertentu dengan daerah lainnya yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Butuh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pelayanan perangkat daerah periode sebelumnya permasalahan yang dihadapi Kecamatan Butuh yang perlu diperhatikan dan diatasi guna meningkatkan kinerjanya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal;
2. akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah;
3. transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan;
4. pelayanan publik prima belum merata;
5. Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif;
6. belum seimbangnya antara beban kerja dan ketersediaan SDM di kecamatan;
7. kompetensi pegawai yang belum merata;
8. sarana dan prasarana yang belum memadai;
9. masih terbatasnya sistem dan inovasi layanan berbasis teknologi informasi;

10. dinamika permasalahan di wilayah yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang terbatas;
11. standar pelayanan yang telah ditetapkan belum diketahui secara luas oleh pengguna layanan;
12. belum optimalnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah;
13. belum memadainya kapasitas pelayanan publik kecamatan;
14. belum optimalnya kualitas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
15. belum optimalnya kualitas koordinasi dan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
16. belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum;
17. belum optimalnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
18. kecamatan butuh termasuk dalam wilayah yang berpotensi atau rawan terhadap bencana banjir mengingat topografinya yang rendah;

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan perangkat daerah, isu lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dan potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, isu strategis yang dapat mempengaruhi Kecamatan Butuh baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut :

1. penguatan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif untuk menjawab tantangan rendahnya akuntabilitas kinerja yang merupakan isu utama yang perlu mendapat perhatian;
2. peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah guna memperkuat stabilitas dan daya saing;
3. percepatan transformasi digital pelayanan publik sebagai respon atas tuntutan era digital dan ancaman keamanan siber;
4. pemerataan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah; serta
5. penguatan stabilitas, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat agar tercipta lingkungan yang kondusif dalam mendukung pembangunan.

Rumusan isu Strategis berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, serta keterkaitannya dengan isu KLHS RPJMD 2025–2029 dan dinamika lingkungan global, nasional, maupun regional, tersaji pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAH-AN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif
	Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah			Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia		
Peningkatan Pelayanan	Transformasi digital belum		Cyber insecurity			

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAH-AN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Publik dan Pemerintahan	sepenuhnya dilakukan					
	Pelayanan publik prima belum merata		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			
	Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka Panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Bupati dan Wakil Bupati Purworejo terpilih periode 2025-2029 mengusung Visi “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif” (“Purworejo Berseri”). Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat makna yang terkandung dalam setiap kata yang digunakan pada visi tersebut. Makna yang dimaksud pada masing-masing kata dalam kalimat Visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.:

1. “Berdaya Saing”: Masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan dimasa datang;
2. ”Sejahtera”: Terciptanya masyarakat adil dan makmur yang ditandai dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan Kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik;
3. “Religius”: Masyarakat yang memiliki ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,menjalani kehidupan sehari hari berlandaskan nilai, norma, dan etika ajaran agama, dan bersikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan keberagaman, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda;
4. “Inovatif”: Pemerintah dan masyarakat dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapi dengan mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki serta mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan (*meliputi elemen Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment*);
5. “Berseri”: Kata Berseri merupakan akronim dari kata Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif. “Berseri” memiliki arti “Tampak Cerah”

yang kemudian dimaknai sebagai pengharapan untuk menciptakan masa dengan yang cerah. “Purworejo Berseri” mempunyai makna sebagai upaya memperkuat fondasi pembangunan dengan tujuan menciptakan masa depan yang cerah menuju Indonesia Emas 2045. Melalui inovasi, kolaborasi, dan dedikasi, Purworejo membangunan landasan yang kokoh untuk generasi mendatang. Pemerintah bersama masyarakat memastikan kemakmuran yang berkelanjutan, harmonis dengan alam, serta kemajuan berkesinambungan diberbagai sektor kehidupan.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan. Untuk mewujudkan visi “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)” ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut.:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan Sejahtera;
2. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
4. Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal;
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo sesuai dengan tugas dan fungsinya diarahkan untuk mendukung terlaksananya misi ke-5 yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Inovatif Berbasis Teknologi Informasi”, tercapainya tujuan “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi” dengan Sasaran “Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dan “Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Inovatif”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh perangkat daerah.

Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang

realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Purworejo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Butuh adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Penentuan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Butuh tahun 2025-2029 didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya, sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini dan urusan pemerintahan yang dimiliki.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Kecamatan Butuh menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu "Meningkatkan Kualitas Layanan kepada Masyarakat serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" sebagai komitmen Kecamatan Butuh dalam meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi selaras dengan tujuan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.

Sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, Kecamatan Butuh menetapkan sasaran strategis beserta indikatornya yang merupakan hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
   Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja yang sistematis, terukur, dan berorientasi hasil dengan menggunakan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang menunjukkan tingkat penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai ukuran keberhasilan dengan target yang semakin meningkat setiap tahunnya secara bertahap yang mencerminkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola kinerja melalui perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang lebih baik.
2. Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Masyarakat
   Sasaran ini berfokus pada penguatan kualitas layanan kepada masyarakat agar terciptanya pelayanan publik yang prima. Sasaran ini diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) dengan target yang meningkat setiap tahunnya sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan pelayanan yang optimal.

Target kinerja tahun 2025-2030 ditetapkan dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline guna menjaga

rasionalitas. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029 beserta target kinerja setiap tahunnya adalah sebagaimana Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	87	88,75	88,76	88,77	88,78	88,79	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	87	88,75	88,76	88,77	88,78	88,79	

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran) merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta

tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purworejo secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Butuh sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Butuh diantaranya adalah untuk : meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan; mempermudah koordinasi antarperangkat daerah; mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah; menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Guna mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan strategi yang berisikan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, sebagai bagian dari strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis disusun tahapan yang akan dilaksanakan Kecamatan Butuh dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat	Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat	Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat
Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Butuh dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran serta penahapan Renstra, rangkaian kerja sebagai arah kebijakan Renstra Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo disusun sebagaimana Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan RPJMD 2026	Arah Kebijakan RENSTRA 2026	
		Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2027	Arah Kebijakan RENSTRA 2027	
		Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang	

		informasi dan layanan publik	kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2028	Arah Kebijakan RENSTRA 2028	
		Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2029	
		Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam,	

			Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2030	Arah Kebijakan RENSTRA 2030	
		Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sebagai perwujudan dari strategi dalam mencapai sasaran organisasi diperlukan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional atau serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Butuh merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Butuh juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja PD dalam Renstra Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 hal ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan beserta indikator kinerja Renstra Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo adalah sebagaimana Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Materia l yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraa	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
			Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Daerah yang Ada di Kecamatan		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau InstansiVertikal yangTerkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Penugasan Kepala Daerah	Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					n Aset Desa		
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya.

Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur.

Dalam merencanakan alokasi pendanaan pembangunan, penting untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memastikan bahwa alokasi tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip penganggaran harus didasarkan pada transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pendekatan yang digunakan berfokus pada money follow program dan money follow function, di mana anggaran difokuskan pada program atau kegiatan yang langsung terkait dengan prioritas pembangunan daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan sesuai dengan tugas dan fungsi utama perangkat daerah. Perumusan program pembangunan yang mencakup kerangka pendanaan dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah serta memenuhi layanan perangkat daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah.

Perumusan program pembangunan yang mencakup kerangka pendanaan dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah serta memenuhi layanan perangkat daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah. Program pembangunan yang sudah mencantumkan kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra PD, termasuk merincinya ke dalam kegiatan atau sub-kegiatan.

Program-program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029 beserta kerangka pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BUTUH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		0			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	86	88,75		88,76		88,77		88,78		88,79		88,79			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	68,02		70,45		72,89		75,33		77,76		80,2			
7.01.00	KECAMATAN						2.691.708.237		2.718.625.000		2.525.181.000		2.525.181.000		2.525.181.000				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	2.691.708.237	100	2.718.625.000	100	2.525.181.000	100	2.525.181.000	100	2.525.181.000	100	Sekretariat Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	4.288.600	3	4.331.300	3	4.375.400	3	4.375.400	3	4.375.400	15			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	2.838.600	22	2.867.000	22	2.895.700	22	2.895.700	22	2.895.700	110			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	22	1.325.000	22	1.338.300	22	1.351.700	22	1.351.700	22	1.351.700	110			
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	1	125.000	1	126.000	1	128.000	1	128.000	1	128.000	5			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	2	2	2.494.188.937	2	2.454.160.300	2	2.268.223.400	2	2.246.223.400	2	2.039.943.400	10			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	21	21	2.492.863.937	21	2.452.822.000	21	2.266.871.700	21	2.244.871.700	21	2.038.591.700	21			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	44	1.325.000	44	1.338.300	44	1.351.700	44	1.351.700	44	1.351.700	220			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	1	250.000	1	253.000	1	255.000	1	255.000	1	255.000	5			
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	11	250.000	11	253.000	11	255.000	11	255.000	11	255.000	55			
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	0	0		1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	4			
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	0	0	0	16	250.000	16	250.000	16	250.000	16	250.000	64			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	1	250.000	1	253.000	1	255.000	1	255.000	1	255.000	5			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	17	250.000	17	253.000	17	255.000	17	255.000	17	255.000	85			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	8	9	74.803.200	9	75.550.600	9	76.307.300	9	76.307.300	9	76.307.300	45			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	12	2.467.800	12	2.492.500	12	2.517.000	12	2.517.000	12	2.517.000	60			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	23	3.318.000	33	3.351.200	33	3.384.700	33	3.384.700	33	3.384.700	155			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	25.200.000	12	25.452.000	12	25.706.500	12	25.706.500	12	25.706.500	60			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	5	5.408.800	5	5.462.900	5	5.517.500	5	5.517.500	5	5.517.500	25			
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1.332.000	2	1.345.300	2	1.358.800	2	1.358.800	2	1.358.800	9			
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	56	20.868.600	28	21.077.300	28	21.288.100	28	21.288.100	28	21.288.100	168			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	12	700.000	12	707.000	12	715.000	12	715.000	12	715.000	60			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	213	12	12.835.000	12	12.963.400	12	13.093.000	12	13.093.000	12	13.093.000	60			
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	2	2.673.000	2	2.699.000	2	2.726.700	2	2.726.700	2	2.726.700	10			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	1	0		4	63.220.000	4	53.720.000	4	75.720.000	3	282.000.000	0			
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000	0			
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0	0			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	20	12.720.000	20	12.720.000	20	12.720.000	0	0	0			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	3	24.000.000	3	24.000.000	2	30.000.000	2	28.000.000	0			
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	2	25.000.000	1	15.000.000	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	1.500.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	0			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	2	41.134.500	2	41.545.900	2	41.961.400	2	41.961.400	2	41.961.400	10			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	14.998.500	12	15.148.500	12	15.300.000	12	15.300.000	12	15.300.000	60			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	26.136.000	12	26.397.400	12	26.661.400	12	26.661.400	12	26.661.400	60			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	5	76.793.000	7	79.060.900	7	79.833.500	7	79.833.500	7	79.833.500	33			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	34.880.000	1	35.228.800	1	35.581.000	1	35.581.000	1	35.581.000	5			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	15.800.000	9	15.958.000	9	16.117.600	9	16.117.600	9	16.117.600	45			
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	0			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	15	3.650.000	15	3.686.500	15	3.723.400	15	3.723.400	15	3.723.400	75			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	21.243.000	1	21.455.400	1	21.667.000	1	21.667.000	1	21.667.000	5			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2	1.220.000	2	1.232.200	2	1.244.500	2	1.244.500	2	1.244.500	10			
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	0			
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	86	88,75		88,76		88,77		88,78		88,79		88,79			
7.01.00	KECAMATAN						174.610.200		225.023.000		174.610.000		190.127.000		193.129.000				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	21.365.000	100	25.486.000	100	21.365.000	100	21.703.000	100	22.045.000	100	Seksi Pembangunan		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	0	0		2	3.821.000	2	2.700.000	2	3.200.000	2	3.200.000	8			
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	0	0	0	2	3.821.000	2	2.700.000	2	3.200.000	2	3.200.000	8			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen	2	3	18.085.000	3	17.665.000	3	15.665.000	3	15.503.000	3	15.845.000	15			
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	2	1	1.470.000	2	4.200.000	2	4.200.000	2	4.200.000	2	4.200.000	9			
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dokumen	0	4	14.880.000	2	8.865.000	2	7.965.000	2	7.803.000	2	8.145.000	12			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	8	1.735.000	8	4.600.000	8	3.500.000	8	3.500.000	8	3.500.000	40			
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen	1	1	1.740.000	0		0		0		0		1			
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	2	1.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen	1	1	1.540.000	1	4.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	5			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	1.540.000	1	4.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	5			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100	100	63.933.200	100	88.691.000	100	63.933.000	100	78.691.000	100	79.934.000	100	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Butuh	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen	2	2	63.933.200	2	88.691.000	2	63.933.000	2	78.691.000	2	79.934.000	10			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	5	5	13.149.800	5	21.000.000	5	18.000.000	5	18.000.000	5	19.000.000	25			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	10	4	50.783.400	4	67.691.000	4	45.933.000	4	60.691.000	4	60.934.000	20			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	6.565.000	100	17.361.000	100	6.565.000	100	6.669.000	100	6.774.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, ketentraman dan ketertiban Umum	Kecamatan Butuh	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	2	5.340.000	2	14.261.000	2	5.065.000	2	5.169.000	2	5.274.000	10			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	2.220.000	1	7.761.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	5			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	3.120.000	1	6.500.000	1	2.565.000	1	2.669.000	1	2.774.000	5			
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	1	1	1.225.000	1	3.100.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	5			
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	1	1.225.000	1	3.100.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	5			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	20.075.000	100	30.813.000	100	20.075.000	100	20.392.000	100	20.714.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, ketentraman dan ketertiban Umum	Kecamatan Butuh	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	2	2	20.075.000	3	30.813.000	3	20.075.000	3	20.392.000	3	20.714.000	14			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50	50	3.570.000	50	7.500.000	50	4.000.000	50	4.000.000	50	4.000.000	250			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	0	0	0	50	4.500.000	50	3.075.000	50	3.000.000	50	4.000.000	200			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	16.505.000	1	18.813.000	1	13.000.000	1	13.392.000	1	12.714.000	5			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	62.672.000	100	62.672.000	100	62.672.000	100	62.672.000	100	63.662.000	100	Seksi Pemerintahan Desa	Kecamatan Butuh	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	6	7	62.672.000	9	62.672.000	8	62.672.000	8	62.672.000	8	63.662.000	40			
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	1	2.213.000	1	2.213.000	1	2.213.000	1	2.213.000	1	2.213.000	5			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	2.503.000	1	2.503.000	1	2.503.000	1	2.503.000	1	2.503.000	5			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	1	5.418.000	1	5.418.000	1	5.418.000	1	5.418.000	1	6.408.000	5			
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	1	37.400.000	1	34.400.000	1	37.400.000	1	37.400.000	1	37.400.000	5			
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	1	11.615.000	1	11.615.000	0	0	0	0	0	0	2			
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	1	2.213.000	1	2.213.000	1	2.213.000	1	2.213.000	1	2.213.000	5			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	1	1.310.000	1	1.310.000	1	1.310.000	1	1.310.000	1	1.310.000	5			
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	0	0	0	1	2.000.000	1	6.202.000	1	6.202.000	1	6.202.000	4			
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	0	0	0	1	1.000.000	1	5.413.000	1	5.413.000	1	5.413.000	4			
Jumlah							2.866.318.437		2.943.648.000		2.699.791.000		2.716.308.000		2.718.310.000				

Sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Monitoring Pembangunan	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas)	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat	
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Monitoring Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi intensifikasi PBB	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	
				Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi keagamaan	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			"Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia"	Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, dll	
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Forkopimcam	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
			"Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP)	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades dan Sekdes	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pilkades	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi	
			Fasilitasi penyusunan program dan	Penyusunan Masterplan Desa,	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	
			pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Penyusunan Website Desa	

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, secara hierarki perencanaan pembangunan perangkat daerah Kecamatan Butuh disusun dengan mengacu pada perencanaan pembangunan pemerintah di Tingkat atasnya sehingga terdapat keterpaduan dan keselarasan dalam mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan dengan strategi dan arah kebijakan yang saling mendukung. Terhadap program Pembangunan Nasional, propinsi dan kegiatan unggulan daerah, dukungan Kecamatan Butuh dijelaskan sebagai berikut :

a. Penjabaran Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional);

Program-program prioritas dalam Renstra Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 juga diarahkan untuk mendukung Program Nasional yaitu :

1. Asta Cita 7: "Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan."
2. 17 Program Prioritas : 3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi; 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;

b. Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi);

Terhadap Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi), Program-program prioritas dalam Renstra Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung program prioritas provinsi :

1. Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) melalui aktifitas/kegiatan : Fasilitasi pemberdayaan perempuan; Fasilitasi perlindungan anak; Fasilitasi penurunan stunting; Fasilitasi penanggulangan kemiskinan; Fasilitasi pendidikan; Fasilitasi perlindungan lansia; Fasilitasi pemberdayaan disabilitas; Fasilitasi tenologi tepat guna; Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan; Fasilitasi dan pembinaan UMKM; Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat; Fasilitasi pelestaian lingkungan; Fasilitasi desa wisata; Fasilitasi dan pembinaan PKK; Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna; Fasilitasi BUMDes.

3. Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK & KPK;

27. Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa.

c. Penjabaran Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan)

Program dalam Renstra Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo juga mendukung terhadap Program Kabupaten (Pitulungan) ke – 4 yaitu "Sejahtera Wargane". "Sejahtera Wargane" merupakan program unggulan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup sandang, pangan, dan papan yang terjangkau serta layak bagi seluruh lapisan masyarakat yang juga berfokus pada penurunan tingkat kemiskinan melalui berbagai strategi pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap sumber daya, serta penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan sehingga dapat mendorong terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, makmur, dan sentosa dengan memastikan stabilitas sosial, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesempatan kerja dan usaha yang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan memiliki ketahanan ekonomi yang kuat pada program unggulan Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan bidang urusan sesuai dengan tugas dan fungsi. IKU merupakan ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah, digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

Dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, pendelegasian wewenang Bupati, tugas dan fungsi serta kewenangannya, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	87	88,75	88,76	88,77	88,78	88,79	

3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	87	88,75	88,76	88,77	88,78	88,79	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

Indikator “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)” merupakan indikator tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029. Indikator “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” merupakan penilaian tingkat akuntabilitas suatu unit kerja pemerintah berdasarkan komponen Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal; dan Capaian Kinerja sedangkan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)” merupakan Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik di kecamatan yang meliputi seluruh seksi terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif , 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu. Terhadap indikator kinerja tersebut maka ditentukan target capaian selama periode 2025-2030.

Terkait dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Kecamatan Butuh yang menjalankan urusan pemerintahan sebagai unsur kewilayahan tidak menjalankan urusan wajib maupun pilihan dan tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan nilai SPM tertentu sebagai dasar penentuan IKK sehingga Kecamatan Butuh tidak memiliki IKK berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah.

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									IUP
		NIHIL							SPM
									Permendagri No. 18 Tahun 2020
									Mandatory lain

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Butuh yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Butuh Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Butuh, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Butuh setiap tahunnya.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Rencana Strategis Kecamatan Butuh sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Butuh setiap tahun.
b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c) Camat Butuh wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Butuh dilakukan setiap tahun selama periode renstra.

b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pituruh Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 sejalan dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terbaru.

Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Selanjutnya, pasal 273 mengamanatkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Renstra PD dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pituruh dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Renstra, hingga penetapan Renstra. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD

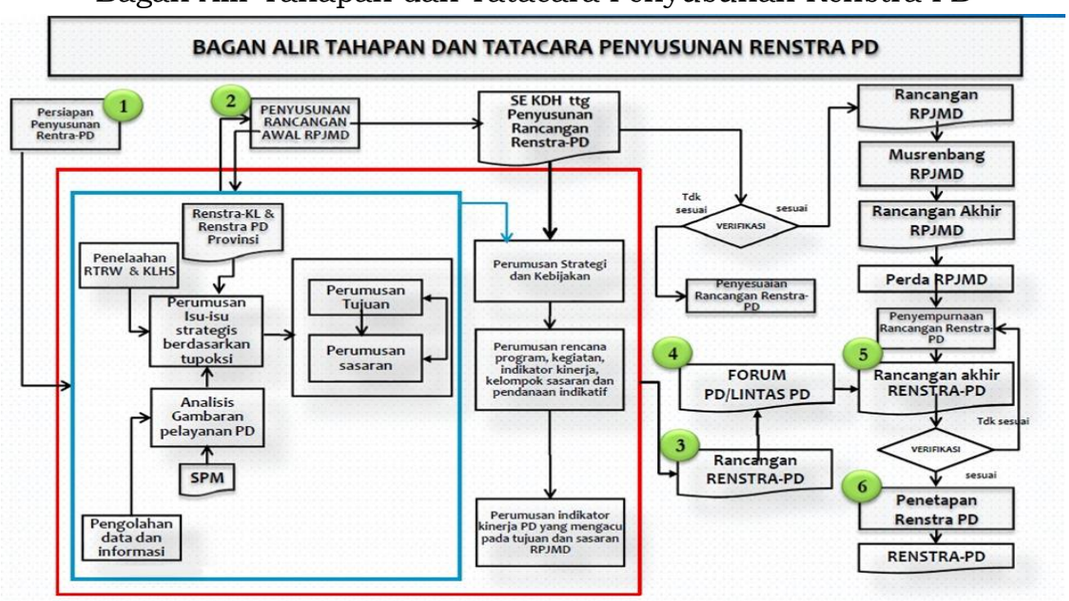

Dalam prosesnya, penyusunan Renstra Kecamatan Pituruh pada dasarnya melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Pituruh disusun untuk kurun waktu kerja 5 tahun (jangka menengah) sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan pagu indikatif. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD dan dokumen Renja Perangkat Daerah seperti dalam gambar 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD dan dokumen Renja Perangkat Daerah

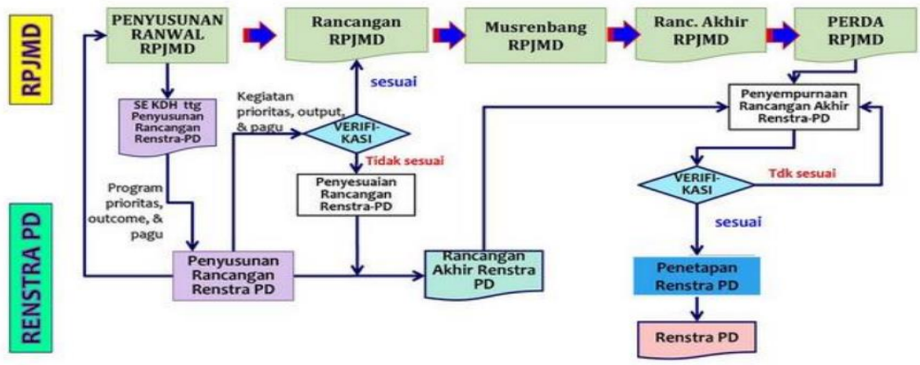

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pituruh Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 14 Seri D Nomor 7);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pituruh Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Maksud
   a. Melaksanakan Visi dan Misi Bupati Purworejo sesuai RPJMD 2025-2029.
   b. Mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan melaksanakan Program Pemerintah Kabupaten Purworejo
   c. Memberikan arah dan pedoman yang terukur selama 5 tahun bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan Pituruh dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan/sub kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan.
2. Tujuan
   a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan yang mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
   b. Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
   c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
   d. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Pituruh sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali.
   e. Sebagai pedoman untuk memudahkan seluruh Aparatur Kecamatan Pituruh dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
   f. Sebagai instrument untuk memahami secara untuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh aparat Kecamatan Pituruh dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pituruh Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah
- 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Kecamatan yang dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas:

a. Camat;
b. Sekretariat, membawahkan:
   1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Seksi Pemerintahan Desa;
d. Seksi Pembangunan;
e. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
g. Jabatan Fungsional; dan
h. Kelurahan.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan;
h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Camat menyelenggarakan fungsi yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Camat dalam menyelenggarakan fungsi dibantu oleh perangkat kecamatan. Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan disekitarnya, mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan. Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional. Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional. Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi

kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kecamatan Pituruh merupakan Perangkat Daerah yang memiliki/menjalankan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan dalam bidang Tugas-Tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, terdiri atas:

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo

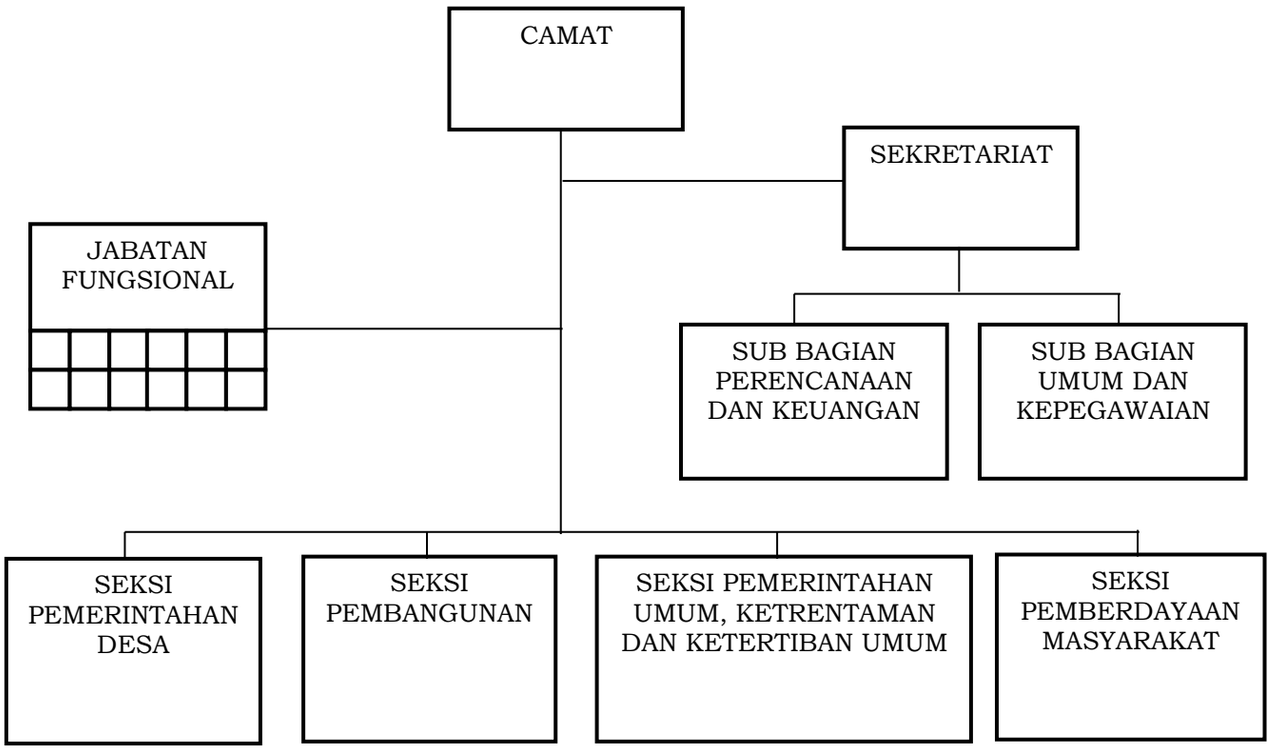

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pituruh didukung oleh tersedianya sumber daya manusia/pegawai dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN). Komposisi ASN yang dimiliki Kecamatan Pituruh dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	HASIL
1	Pembina Utama Muda (IV c)	1 orang
2	Pembina Tk. I (IV b)	- orang
3	Pembina (IV a)	2 orang
4	Penata Tk. I (III d)	3 orang
5	Penata (III c)	- orang
6	Penata Muda Tk. I (III b)	5 orang
7	Penata Muda (III a)	2 orang
8	Pengatur Tk. I (II d)	2 orang
9	Pengatur (II c)	- orang
10	Pengatur Muda Tk. I (II b)	- orang
11	Pengatur Muda (II a)	1 orang
12	PPPK (VII)	1 orang

Sumber: Kecamatan Pituruh Tahun 2024

Pegawai Berdasar Eselon

NO	ESELON	HASIL
1	Camat / Eselon III a	1 orang
2	Sekcam / Eselon III b	1 orang
3	Kepala Seksi / Eselon IV a	2 orang
4	Kepala Subagian / Eselon IV b	2 orang

Sumber : Kecamatan Pituruh Tahun 2024

Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	HASIL
1	Pasca Sarjana (S 2)	3 orang
2	Sarjana (S 1)	8 orang
3	Sarjana Muda (D 3)	2 orang
4	SLTA	4 orang
5	SLTP	- orang
6	SD	- orang

Sumber : Kecamatan Pituruh Tahun 2024

Selain sumber daya aparatur, untuk mendukung operasional dan aktifitas organisasi, Kecamatan Pituruh juga didukung dengan sarana dan prasarana aparatur maupun perkantoran yang ada. Sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain adalah sebagai berikut :

Daftar Asset yang Dimiliki Kecamatan Pituruh

No	Nama/Jenis Barang/Aset	Nilai (Rp.)
1.	Tanah	533.574.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	1.202.58.400,00
3.	Gedung dan Bangunan	2.096.432.086,25
4.	Instalasi dan Jaringan	28.307.950,00
5.	Aset Tetap Lainnya	00
6.	Aset Lainnya	00
	HASIL	2.654.718.478,25

Sumber : Neraca Asset Kecamatan Pituruh Tahun 2024

2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Kecamatan Pituruh dalam kurun waktu 2025-2029 dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Pituruh dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP yang dibuat berdasarkan SK Camat Pituruh.

Pengukuran indikator kinerja dalam Renstra Kecamatan Pituruh tahun 2025-2029 disusun berdasarkan evaluasi kinerja Renstra sebelumnya yaitu renstra tahun 2021-2026. Secara umum kinerja Kecamatan Pituruh periode sebelumnya dapat tercapai secara maksimal. Evaluasi hasil kinerja periode sebelumnya sebagai gambaran pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah kami sajikan Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Kecamatan PituruhKabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				84	84,25	84,5	85	85,5	86	84	84,31	84,35	86,86	85,30		84	84,25	84,5	85	85,5	
	Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Berkualitas				100%	100%	100%				100%	100%	100%				100%	100%	100%			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							85	85,5	86				85	85,5					85	85,5	
	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum gambaran potensi dan permasalahan pelayanan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya tahun 2021-2026, yaitu dari hasil pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi pendanaan dapat tercapai dengan baik.

Adapun tentang pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pituruh kami sajikan Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pituruh
Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Unsur Kewilayahan		2.603.481.858	2.539.371.744	3.151.372.994	2.866.272.401	2.877.839.368	-	3.331.133.865	3.420.441.213	2.757.777.577	1.653.615.042	-		127,95	134,7	87,51	57,69	0
Kecamatan		2.603.481.858	2.539.371.744	3.151.372.994	2.866.272.401	2.877.839.368	-	3.331.133.865	3.420.441.213	2.757.777.577	1.653.615.042	-		127,95	134,7	87,51	57,69	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.661.054.700	2.061.251.458	2.147.599.744	2.591.097.394	2.424.290.901	2.436.976.368	2.660.782.648	2.844.673.494	2.985.017.613	2.378.476.977	1.529.383.242		99,99	138,01	138,99	91,79	63,09	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.162.000	43.735.000	28.162.400	25.936.400	28.162.400	28.162.400	9.162.000	40.163.000	25.825.400	15.854.400	4.967.800		100	91,83	91,7	61,13	17,64	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.496.000	25.013.000	9.387.200	7.161.200	9.387.200	9.387.200	5.496.000	11.103.000	7.050.200	3.674.200	2.283.800		100	44,39	75,1	51,31	24,33	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.590.000	2.103.000	2.103.000	2.103.000	2.103.000		1.590.000	2.103.000	1.348.000				100	100	64,1	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.590.000	2.103.000	2.103.000	2.103.000	2.103.000		5.536.000	2.103.000	1.348.000				348,18	100	64,1	0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1.779.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000		1.779.000	2.282.000	1.532.000	809.000			100	100	67,13	35,45	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1.779.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000		5.725.000	2.282.000	2.282.000				321,81	100	100	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4.693.000	5.246.000	5.246.000	5.246.000	5.246.000		7.139.000	5.246.000	3.031.000	1.125.000			152,12	100	57,78	21,44	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.666.000	7.291.000	4.759.200	4.759.200	4.759.200	4.759.200	3.666.000	7.291.000	4.759.200	2.639.200	750.000		100	100	100	55,45	15,76	0
Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.391.663.100	1.533.569.258	1.481.318.944	1.754.826.773	1.863.228.601	1.936.555.194	2.391.663.100	2.292.873.094	2.159.638.114	1.996.892.209	1.314.738.167		100	149,51	145,79	113,79	70,56	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.386.647.100	1.522.367.258	1.468.612.144	2.155.712.094	1.850.521.801	1.923.848.394	2.386.647.100	2.277.975.094	2.149.693.114	1.991.127.609	1.312.314.967		100	149,63	146,38	92,37	70,92	0

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.630.000	2.631.200	2.631.200	2.631.200	2.631.200		4.076.000	2.547.600	1.465.000	1.298.200			250,06	96,82	55,68	49,34	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.016.000	9.572.000	10.075.600	7.849.600	10.075.600	10.075.600	5.016.000	10.822.000	7.397.400	4.299.600	1.125.000		100	113,06	73,42	54,77	11,17	0
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		-	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000			1.500.000	1.500.000	250.000				100	100	12,5	0
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000			1.500.000	1.500.000	250.000				100	100	12,5	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000										0	0	0
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2.000.000	2.000.000	2.000.000										0	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.000.000	2.000.000	2.000.000										0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.208.000	147.509.000	146.194.300	144.310.100	151.694.300	151.694.300	60.208.000	147.459.000	137.655.100	133.011.000	55.793.497		100	99,97	94,16	92,17	36,78	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.802.800	3.331.100	3.316.200	3.331.100	3.331.100		1.802.800	3.331.100	3.284.000	2.354.800			100	100	99,03	70,69	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.820.000	3.912.700	3.593.300	3.912.700	3.912.700		10.820.000	3.912.700					100	100	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		9.714.800	9.471.600	9.467.800	9.471.600	9.471.600		9.714.800	9.471.600	7.146.000	3.686.000			100	100	75,48	38,92	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		27.720.000	27.720.000	27.720.000	27.720.000	27.720.000		27.720.000	27.720.000	27.720.000	17.261.250			100	100	100	62,27	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		20.587.600	20.583.600	20.859.800	20.583.600	20.583.600		20.587.600	16.119.400	20.859.800	8.877.400			100	78,31	100	43,13	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000		1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.200.000			100	100	100	90,09	0
Penyediaan Bahan/Material		41.291.800	46.233.300	46.242.800	46.233.300	46.233.300		41.291.800	46.233.300	44.236.000	10.669.047			100	100	95,66	23,08	0

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.000.000	2.000.000	2.000.000										0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.208.000	34.240.000	33.610.000	31.778.200	35.110.000	35.110.000	60.208.000	34.190.000	29.535.000	28.433.200	11.745.000		100	99,85	87,88	89,47	33,45	0
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.000.000	2.000.000	2.000.000										0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		127.171.000	255.822.500	185.000.000	135.000.000	60.000.000		159.894.000	250.000.000	44.236.000				125,73	97,72	23,91	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			255.822.500						250.000.000						97,72			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						15.000.000												0
Pengadaan Mebel		63.808.000		20.000.000	20.000.000	15.000.000		53.183.000						83,35		0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		34.282.000		20.000.000	20.000.000	15.000.000		77.630.000		12.270.000				226,45		61,35	0	0
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000	75.000.000			29.081.000								0	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		29.081.000		20.000.000	20.000.000	15.000.000								0		0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000												0		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.384.600	68.971.200	94.005.600	101.232.000	94.005.600	94.005.600	133.112.548	63.988.400	87.497.649	89.244.141	58.284.007		99,8	92,78	93,08	88,16	62	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.765.600			1.000.000	1.000.000	1.000.000	42.765.600						100			0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.587.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000	30.314.948	27.327.879	29.747.309	31.585.103	22.344.007		99,11	84,35	91,81	97,48	68,96	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.032.000	36.571.200	61.605.600	68.832.000	60.605.600	60.605.600	60.032.000	36.660.521	57.750.340	57.659.038	35.940.000		100	100,24	93,74	83,77	59,3	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	66.637.000	140.296.000	140.596.000	151.926.000	146.200.000	160.558.874	66.637.000	140.296.000	322.901.350	129.705.227	95.349.771		100	100	229,67	85,37	65,22	0

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Pemerintahan Daerah																		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.000.000		20.241.000	34.880.000	22.000.000	22.000.000	32.000.000	32.941.000	22.337.350	21.261.227	22.208.706		100		110,36	60,96	100,95	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		30.000.000	13.000.000	11.850.000	10.000.000	20.000.000			5.012.250	10.418.100	6.650.500			0	38,56	87,92	66,51	0
Pemeliharaan Mebel		2.941.000		3.000.000	3.000.000	5.000.000								0		0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		21.118.000	21.118.000	23.610.000	28.000.000	28.000.000		21.118.000	13.308.750	23.069.900	11.280.000			100	63,02	97,71	40,29	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.520.000	83.800.000	83.800.000	79.443.000	78.000.000	80.358.874	26.520.000	83.800.000	83.800.000	72.813.000	54.287.565		100	100	100	91,65	69,6	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.437.000	2.437.000	2.143.000	3.200.000	3.200.000		2.437.000	198.443.000	2.143.000	923.000			100	8142,92	100	28,84	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.117.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.117.000						100			0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	220.534.000	168.569.400	93.770.500	79.501.600	105.794.500	105.544.000	220.534.000	150.560.371	93.138.200	60.100.000	13.673.000		100	89,32	99,33	75,6	12,92	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	214.144.000	57.324.600	47.000.000	40.145.000	48.370.000	48.370.000	214.144.000	53.986.600	71.562.200	27.395.000	6.173.000		100	94,18	152,26	68,24	12,76	0
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		28.252.000	23.500.000	25.850.000	26.685.000	26.685.000		33.638.000	27.964.000					119,06	119	0	0	0

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	214.144.000	29.072.600	23.500.000	40.145.000	21.685.000	21.685.000	214.144.000	20.348.600	43.598.200	27.395.000	6.173.000		100	69,99	185,52	68,24	28,47	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.390.000	111.244.800	46.770.500	13.981.600	47.424.500	47.174.000	6.390.000	96.573.771	21.576.000	13.955.000			100	86,81	46,13	99,81	0	0
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		71.906.000	23.270.500	8.124.000	25.739.500	25.489.000		60.928.000	18.684.000	8.124.000				84,73	80,29	100	0	0
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.390.000	39.338.800	23.500.000	5.857.600	21.685.000	21.685.000	6.390.000	35.645.771	2.892.000	5.831.000			100	90,61	12,31	99,55	0	0
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				25.375.000	5.000.000	5.000.000				18.750.000	7.500.000					73,89	150	0
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				25.375.000	5.000.000	5.000.000				18.750.000	7.500.000					73,89	150	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000										0	0	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.000.000	5.000.000	5.000.000										0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.812.000	103.858.000	75.808.000	272.045.000	85.520.000	85.320.000	19.812.000	78.448.000	84.358.900	182.321.000	63.621.600		100	75,53	111,28	67,02	74,39	0
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.812.000	103.858.000	75.808.000	272.045.000	85.520.000	85.320.000	19.812.000	78.448.000	84.358.900	182.321.000	63.621.600		100	75,53	111,28	67,02	74,39	0

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			30.000.000	33.957.600	30.000.000	30.000.000				24.670.800	19.172.600				0	72,65	63,91	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.812.000	103.858.000	45.808.000	238.087.400	55.520.000	55.320.000	19.812.000	78.448.000	84.358.900	157.650.200	44.449.000		100	75,53	184,16	66,22	80,06	0
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000	53.436.000	30.310.500	11.353.200	34.235.000	34.151.500	50.000.000	58.359.000	11.303.200	16.718.600	1.125.000		100	109,21	37,29	147,26	3,29	0
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000	53.436.000	30.310.500	11.353.200	34.235.000	34.151.500	50.000.000	58.359.000	11.303.200	16.718.600	1.125.000		100	109,21	37,29	147,26	3,29	0
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000	32.502.000	20.310.500	10.027.200	22.135.000	20.841.500	50.000.000	40.480.000	9.977.200	15.392.600	875.000		100	124,55	49,12	153,51	3,95	0
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		20.934.000	10.000.000	1.326.000	12.100.000	13.310.000		17.879.000	1.326.000	1.326.000	250.000			85,41	13,26	100	2,07	0
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		-	-	5.000.000	-	-										0		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5.000.000												0		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-	6.596.500	9.553.200	7.431.500	7.348.000			43.685.300	9.466.600	8.632.200				662,25	99,09	116,16	0

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			6.596.500	9.553.200	7.431.500	7.348.000			43.685.300	9.466.600	8.632.200				662,25	99,09	116,16	0
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		-		2.000.000	2.000.000	2.000.000										0	0	0
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		-		2.000.000	2.000.000	2.000.000										0	0	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	6.596.500	3.181.000	3.431.500	3.348.000			43.685.300	9.466.600	8.632.200				662,25	297,6	251,56	0
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	272.821.000	216.367.000	185.286.500	203.489.500	209.000.500	208.499.500	272.821.000	199.093.000	202.938.000	110.694.400	37.180.000		100	92,02	109,53	54,4	17,79	0
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	272.821.000	216.367.000	185.286.500	203.489.500	209.000.500	208.499.500	272.821.000	199.093.000	202.938.000	110.694.400	37.180.000		100	92,02	109,53	54,4	17,79	0
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3.000.000	3.500.000	4.000.000										0	0	0
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset																		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Desa																		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		20.854.000	25.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000		20.854.000	7.449.000	6.313.400	3.168.000			100	29,8	31,57	12,67	0
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		26.801.000	30.000.000	30.000.000	38.171.000	39.238.000		18.125.000	11.379.000	9.973.400	3.180.000			67,63	37,93	33,24	8,33	0
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		140.548.000	80.286.500	68.489.500	75.342.500	71.027.500		137.897.000	161.773.000	81.776.400	25.924.000			98,11	201,49	119,4	34,41	0
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			15.000.000	30.000.000					9.210.000						61,4	0		
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		17.104.000	20.000.000	19.000.000	25.266.000	25.042.000		11.157.000	6.642.000	6.633.400	3.251.200			65,23	33,21	34,91	12,87	0
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		11.060.000	15.000.000	12.000.000	17.221.000	16.192.000		11.060.000	6.485.000	5.997.800	1.656.800			100	43,23	49,98	9,62	0
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	48.644.000			3.000.000	3.500.000	4.000.000		48.644.000					100			0	0	0
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19.812.000			3.000.000	3.500.000	4.000.000		19.812.000					100			0	0	0
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				3.000.000	3.500.000	4.000.000										0	0	0
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				3.000.000	3.500.000	4.000.000										0	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	204.365.000			3.000.000	3.500.000	4.000.000		204.365.000					100			0	0	0

Adapun faktor penghambat capaian kinerja Renstra Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 adalah :

1. Keterbatasan Hasil SDM dikarenakan pegawai semakin berkurang dari tahun ke tahun dikarenakan banyak yang pensiun tetapi tidak disertai dengan adanya tambahan pegawai.
2. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.
3. SDM belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

Sedangkan faktor pendorong capaian kinerja Renstra Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 antara lain :

1. Adanya koordinasi yang baik dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah dan instansi lain baik dilingkungan Kecamatan serta di lingkup Kabupaten Purworejo.
2. Komitmen pimpinan untuk memberikan kepastian pelayanan.

Indikator kinerja perangkat daerah merupakan instrumen penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Data capaian kinerja tahun 2020–2024 yang ditampilkan dalam tabel 2.3 memberikan gambaran mengenai kualitas akuntabilitas kinerja, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, serta konsistensi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan. Informasi ini menjadi dasar evaluasi, sekaligus acuan dalam perencanaan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					65,1	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	84	84	84,3	84,5	85	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					65,1	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	84	84	84,3	84,5	85	
5	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja perangkat daerah tahun 2020–2024, dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 tercatat 65,11. Angka ini menunjukkan akuntabilitas kinerja yang masih berada pada kategori cukup sehingga perlu ditingkatkan dengan perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, serta evaluasi berbasis kinerja.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan tren positif dengan peningkatan bertahap dari 84 pada tahun 2020–2021, menjadi 84,25 pada tahun 2022, naik menjadi 84,5 pada tahun 2023, hingga mencapai 85 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Untuk indikator persentase pelaksanaan urusan pemerintahan, baik penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, urusan pemerintahan umum, maupun pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, seluruhnya konsisten mencapai 100% pada periode 2020–2024.

Konsistensi capaian 100% pada indikator urusan pemerintahan ini menunjukkan bahwa perangkat daerah telah melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Meski demikian, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja (SAKIP) perlu mendapat perhatian lebih serius agar dapat selaras dengan capaian kepuasan masyarakat dan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga ke depan pelayanan publik dapat lebih berkualitas, transparan, dan berdaya saing.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Pituruh selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pituruh 5 (lima) tahun ke depan diantaranya :

a. Banyak kegiatan di semua bidang di Desa yang seharusnya di monitor akan tetapi Hasil karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Pituruh, sehingga perlu adanya penambahan staf.
b. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan
c. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan
d. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan, untuk itu segala aspirasi tersebut dapat ditampung dan mendapat perhatian dari pemerintah daerah
e. Semakin kritis dan pro-aktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas
f. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat
g. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain dari penerima layanan
h. Inovasi pelayanan dengan sistem elektronik
i. Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan tehnologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa yang telah menggunakan IT

sebagai sarana peng- adminitrasian dan penatausahaan sehingga perlu di dukung kemampuan SDM dan sarana prasarana penunjang IT.

Untuk peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (tahun) ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Pituruh antara lain:

a. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
b. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan
c. Penerapan otonomi daerah dan tuntutan implementasi good governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Pituruh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan pelatihan bagi setiap pegawai
e. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan
f. Akses informasi yang lebih cepat sehingga mempermudah peningkatan profesional kinerja Kecamatan dan Desa.

2.1.5 Kelompok sasaran layanan

Kecamatan Pituruh sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam kurun waktu perencanaan lima tahun ke depan, kelompok sasaran pelayanan yang menjadi perhatian Kecamatan Pituruh dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Umum
   Seluruh warga masyarakat di wilayah Kecamatan Pituruh merupakan kelompok sasaran utama pelayanan, khususnya dalam hal administrasi kependudukan, perizinan tertentu, fasilitasi pembangunan, serta layanan pengaduan masyarakat.
2. Pemerintah Desa
   Sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, pemerintah desa di wilayah Kecamatan Pituruh menjadi kelompok sasaran penting dalam hal pembinaan, koordinasi, supervisi, serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparatur desa.
3. Kelompok Rentan dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus
   Termasuk di dalamnya lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, perempuan, dan kelompok masyarakat kurang mampu yang memerlukan perhatian lebih dalam akses pelayanan publik, fasilitasi program sosial, serta jaminan perlindungan terhadap hak-haknya.
4. Pelaku Ekonomi dan Dunia Usaha
   Pelaku UMKM, koperasi, maupun pelaku usaha lainnya yang berada di wilayah Kecamatan Pituruh, yang membutuhkan fasilitasi, kemudahan akses informasi, pendampingan, serta dukungan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

5. Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial
   Kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga adat, PKK, karang taruna, serta organisasi sosial lainnya yang menjadi mitra kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dengan mengidentifikasi kelompok sasaran pelayanan tersebut, Kecamatan Pituruh berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Hal ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Pituruh.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pituruh

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pituruh

Kecamatan Pituruh sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Purworejo memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya. Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Kecamatan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan publik.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Kecamatan Pituruh masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang menghambat optimalisasi pelayanan. Permasalahan tersebut muncul baik dari aspek tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, maupun dari aspek pelayanan langsung kepada masyarakat. Berbagai permasalahan ini menjadi perhatian penting agar dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat guna mendukung tercapainya visi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pituruh.

Permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal.
   Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan belum sepenuhnya terukur dan terdokumentasi dengan baik sesuai prinsip akuntabilitas kinerja. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya pencapaian target yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas keuangan belum disertai kompetensi sumber daya manusia.
   Pengelolaan keuangan daerah di tingkat kecamatan belum sepenuhnya didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi teknis memadai, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan maupun ketidaktepatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.
3. Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan.
   Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan pemerintahan dan publik masih terbatas. Proses administrasi masih banyak yang dilakukan secara manual sehingga kurang efisien dan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan era digital.
4. Pelayanan publik prima belum merata.
   Kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pituruh masih belum konsisten. Terdapat ketimpangan dalam penerapan standar pelayanan antar bidang, sehingga masyarakat belum memperoleh pelayanan prima secara merata.

5. Stabilitas ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat belum kondusif.
   Masih terdapat dinamika sosial yang dapat mempengaruhi stabilitas wilayah. Upaya pencegahan dan penanganan permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum belum berjalan secara maksimal, begitu pula dengan perlindungan masyarakat yang masih memerlukan peningkatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

2.2.2 Isu Strategis

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup seHasil langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pituruh dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo yang teridentifikasi pada table 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Isu Strategis PD

<table>
<tr><th rowspan="2">POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD</th><th rowspan="2">PERMASALAHAN PD</th><th rowspan="2">ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD</th><th colspan="3">ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD</th><th rowspan="2">ISU STRATEGIS PD</th></tr>
<tr><th>GLOBAL</th><th>NASIONAL</th><th>REGIONAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten</td><td>Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal</td><td rowspan="6">Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi</td><td>Misinformasi dan disinformasi</td><td>Transformasi tata kelola</td><td rowspan="6">Tata kelola pemerintahan yang dinamis</td><td rowspan="6">Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif di tingkat kecamatan</td></tr>
<tr><td></td><td>Akuntabilitas keuangan belum disertai kompetensi sumber daya manusia</td><td></td><td rowspan="2">Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia</td></tr>
<tr><td>Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan</td><td>Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan</td><td>Cyber insecurity</td></tr>
<tr><td></td><td>Pelayanan publik prima belum merata</td><td rowspan="2">Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif</td><td></td></tr>
</table>

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2025-2029, yaitu “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, Dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan Misi ke 5 Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagai berikut : “ Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. “

Kecamatan Pituruh mendukung Misi 5 Bupati Purworejo.Tupoksi Kecamatan Pituruh dilaksakan untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Kecamatan Pituruh sebagai fasilitasi desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029, Kecamatan Pituruh menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang selaras dengan NSPK serta sasaran RPJMD yang relevan. Fokus utama pembangunan pada periode ini adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, dan responsif berbasis teknologi informasi.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Pituruh adalah meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan ini diwujudkan melalui dua sasaran utama, yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
   Sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pertanggungjawaban kinerja. Target yang ditetapkan secara bertahap meningkat dari 68,02 pada tahun 2025 menjadi 80,20 pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam memperkuat budaya kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
2. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat.
   Sasaran ini diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Perangkat Daerah. Target yang ditetapkan juga meningkat secara gradual, yaitu dari 86,90 pada tahun 2025 menjadi 87,40 pada tahun 2030. Peningkatan ini diharapkan dapat mencerminkan semakin baiknya pelayanan publik, khususnya dari segi aksesibilitas, kecepatan, keadilan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.

Dengan demikian, pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Kecamatan Pituruh berkomitmen untuk terus melakukan inovasi pelayanan, penguatan kapasitas SDM, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelayanan publik yang prima. Rumusan tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025 - 2029 Kecamatan Pituruh dijelaskan pada table 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pituruh

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	86,90	86,95	87,00	87,20	87,30	87,40	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	86,90	86,95	87,00	87,20	87,30	87,40	

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan.

Strategi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pituruh Tahun 2025–2029 merupakan arah tindakan yang dirancang secara komprehensif untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Penyusunan strategi ini mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal, keterbatasan sumber daya, serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, adil, dan berbasis teknologi informasi.

Untuk menjamin keterlaksanaan yang efektif dan berkesinambungan, strategi Renstra disusun secara bertahap (phased strategy) mulai dari tahap penguatan, peningkatan, pemantapan, hingga mewujudkan dan meneguhkan capaian. Penahapan ini dimaksudkan agar setiap langkah pembangunan memiliki fokus yang jelas, target yang terukur, serta sinergi yang kuat antara program, kegiatan, dan sub kegiatan. Berikut penahapan Renstra Kecamatan Pituruh Tahun 2025–2029:

Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat	Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat	Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat
Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Dengan adanya tahapan strategi tersebut, Kecamatan Pituruh diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabel secara berkelanjutan.

Sedangkan arah kebijakan Renstra Kecamatan Pituruh Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja terstruktur yang berfungsi sebagai operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan. Arah kebijakan ini juga merupakan penjabaran dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Purworejo, serta selaras dengan strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Dengan demikian, arah kebijakan Renstra tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga memastikan konsistensi antara kebijakan daerah dan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan.

Secara umum, arah kebijakan Renstra Kecamatan Pituruh difokuskan pada upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, serta responsif berbasis teknologi informasi. Fokus tersebut dijabarkan secara bertahap sesuai dengan periode pelaksanaan pembangunan, yaitu:

1. Tahun 2026 – Penguatan

   Menitikberatkan pada penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik. Implementasinya melalui pelayanan PATEN, monitoring pembangunan, fasilitasi intensifikasi PBB, kegiatan bidang kesehatan, pendidikan, sosial, perlindungan masyarakat (Linmas), pemberdayaan desa dan kelurahan. Pada tahap ini juga dilakukan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa, pembinaan perangkat desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta fasilitasi Pilkades dan kelembagaan BPD.
2. Tahun 2027 – Peningkatan

   Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, dan keterbukaan layanan publik. Upaya ini diwujudkan dengan memperluas cakupan dan kualitas pelayanan publik, memperkuat monitoring dan evaluasi pembangunan, memperdalam pembinaan perangkat desa, serta meningkatkan konsistensi dalam fasilitasi kegiatan sosial, keagamaan, kebencanaan, dan demokrasi lokal.
3. Tahun 2028 – Pemantapan

   Kebijakan tahun ini menekankan pada pemantapan inovasi dan sistem digitalisasi layanan publik. Hal ini diwujudkan melalui optimalisasi pelayanan PATEN, peningkatan kualitas monitoring pembangunan, penguatan koordinasi Forkopimcam, serta konsolidasi kelembagaan desa. Pemantapan juga diarahkan pada penguatan keberlanjutan program, terutama dalam pengelolaan keuangan, aset desa, dan pembinaan perangkat desa.
4. Tahun 2029 – Perwujudan

   Pada tahap ini kebijakan diarahkan untuk mewujudkan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi yang efektif. Implementasi diarahkan pada pelayanan publik prima dengan basis teknologi informasi, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan, serta pencapaian indikator kinerja sesuai RPJMD. Selain itu, fasilitasi kegiatan sosial, keagamaan, kebencanaan, demokrasi, hingga ketahanan nasional tetap menjadi prioritas pendukung.
5. Tahun 2030 – Peneguhan

   Merupakan tahap akhir dengan penekanan pada peneguhan inovasi dan digitalisasi layanan publik. Fokus diarahkan pada konsolidasi seluruh capaian sebelumnya agar lebih berkelanjutan, termasuk penguatan kelembagaan pemerintahan desa, optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi pembangunan, serta peneguhan pelayanan publik berbasis digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan penahapan arah kebijakan ini, Kecamatan Pituruh diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan prima. Berikut tabel perumusan arah kebijakan renstra PD :

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan RPJMD 2026	Arah Kebijakan RENSTRA 2026	
		Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2027	Arah Kebijakan RENSTRA 2027	
		Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa, Monitoring kebencanaan, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
		Arah Kebijakan RPJMD 2028	Arah Kebijakan RENSTRA 2028	
		Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa, Monitoring kebencanaan, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2029	
		Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa, Monitoring kebencanaan, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2030	Arah Kebijakan RENSTRA 2030	
		Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
			intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa, Monitoring kebencanaan, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

Untuk rencana selama 5 tahun kedepan Kecamatan Pituruh merencanakan akan melaksanakan 6 program yang dijabarkan menjadi 16 kegiatan yang kemudian dijabarkan lagi menjadi 51 sub kegiatan. Dengan rinciannya pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
				Terlaksananya Fasilitasi Percepatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	di Wilayah Kecamatan	Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				yang Dilimpahkan kepada Camat	Dilimpahkan kepada Camat	Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
				Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PITURUH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	86,86	86,95		87		87,2		87,3		87,4		87,4			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
7.01.00	KECAMATAN						2.645.585.651		2.672.042.000		2.253.654.000		2.253.654.000		2.253.654.000				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	2.645.585.651	100	2.672.042.000	100	2.253.654.000	100	2.253.654.000	100	2.253.654.000	100	Sekretariat	Kecamatan Pituruh	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	21	45	5.992.600	45	5.992.600	45	5.992.600	45	5.992.600	45	5.992.600	229			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	23	5.228.400	23	4.353.400	23	4.353.400	23	4.353.400	23	4.353.400	115			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	22	764.200	22	764.200	22	764.200	22	764.200	22	764.200	110			
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	1	875.000	1	875.000	1	875.000	1	875.000	4			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	27	45	2.326.125.351	45	2.323.725.100	45	1.906.969.100	45	1.906.969.100	45	1.906.969.100	225			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	20	2.324.550.751	20	2.322.150.500	20	1.905.394.500	20	1.905.394.500	20	1.905.394.500	20			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	44	1.574.600	44	1.574.600	44	1.574.600	44	1.574.600	44	1.574.600	220			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0		11	2.500.000	11	2.500.000	11	2.500.000	11	2.500.000	44			
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	11	2.500.000	11	2.500.000	11	2.500.000	11	2.500.000	44			
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	12	1	250.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	49			
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	60			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	0		17	500.000	17	500.000	17	500.000	17	500.000	68			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	17	500.000	17	500.000	17	500.000	17	500.000	68			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	71.797.200	9	74.297.200	9	74.297.200	9	74.297.200	9	74.297.200	43			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	3.621.700	3	3.621.700	3	3.621.700	3	3.621.700	3	3.621.700	13			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	8.208.500	8	8.208.500	8	8.208.500	8	8.208.500	8	8.208.500	33			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	19.710.600	1	19.710.600	1	19.710.600	1	19.710.600	1	19.710.600	5			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	8.572.300	4	8.572.300	4	8.572.300	4	8.572.300	4	8.572.300	17			
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1.332.000	1	1.332.000	1	1.332.000	1	1.332.000	1	1.332.000	5			
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	22.352.100	16	22.352.100	16	22.352.100	16	22.352.100	16	22.352.100	65			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	48			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	60			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	8			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	1	2	1.632.000	8	24.988.600	7	23.356.600	7	23.356.600	7	23.356.600	31			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	5	13.356.600	5	13.356.600	5	13.356.600	5	13.356.600	20			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	2	6.632.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5			
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	2	1.632.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	98.308.500	24	98.308.500	24	98.308.500	24	98.308.500	24	98.308.500	120			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	38.428.500	12	38.428.500	12	38.428.500	12	38.428.500	12	38.428.500	60			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	59.880.000	12	59.880.000	12	59.880.000	12	59.880.000	12	59.880.000	60			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	5	141.480.000	7	141.480.000	7	141.480.000	7	141.480.000	7	141.480.000	33			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	5			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	15	15.800.000	15	15.800.000	15	15.800.000	15	15.800.000	15	15.800.000	75			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	33	29	17.040.000	29	17.040.000	29	17.040.000	29	17.040.000	29	17.040.000	145			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	70.616.000	4	70.616.000	4	70.616.000	4	70.616.000	4	70.616.000	20			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	3.144.000	5	3.144.000	5	3.144.000	5	3.144.000	5	3.144.000	25			
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	86,86	86,95		87		87,2		87,3		87,4		87,4			
7.01.00	KECAMATAN						162.101.500		352.297.000		162.101.000		164.663.000		157.255.000				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	17.877.600	100	52.033.000	100	17.678.000	100	18.160.000	100	18.447.000	100	Seksi Pembangunan	Kecamatan Pituruh	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	7.819.000	0		0		0		0		0			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	7.819.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen	2	2	7.058.600	7	23.283.000	7	9.878.000	7	10.033.000	7	10.188.200	30			
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	1	4.140.200	1	8.124.000	1	4.140.200	1	4.205.000	1	4.270.200	5			
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dokumen	0	0	0	5	9.301.400	5	2.819.400	5	2.864.000	5	2.900.000	20			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	2.918.400	1	5.857.600	1	2.918.400	1	2.964.000	1	3.018.000	5			
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	1	3.000.000	1	18.750.000	1	3.000.000	1	3.048.600	1	3.103.800	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	1	3.000.000	1	18.750.000	1	3.000.000	1	3.048.600	1	3.103.800	5			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen	0	0		1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.078.400	1	5.155.000	4			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	0	0	0	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.078.400	1	5.155.000	4			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100	100	65.976.300	100	181.923.000	100	65.976.000	100	67.019.000	100	68.078.000	100	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pituruh	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen	5	2	65.976.300	2	181.923.000	2	65.976.000	2	67.019.000	2	68.078.000	10			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	4	1	10.531.400	1	19.272.600	1	10.531.400	1	10.697.000	1	10.918.000	5			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	55.444.900	1	162.650.400	1	55.444.600	1	56.322.000	1	57.160.000	5			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	2.426.400	100	11.353.000	100	2.426.000	100	2.465.000	100	2.504.000	100	Seksi Pemerintahan Umum ,Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pituruh	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	2	2.426.400	2	11.353.000	2	2.426.000	2	2.465.000	2	2.504.000	10			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	2.138.400	1	10.027.000	1	2.138.000	1	2.172.000	1	2.205.000	5			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	288.000	1	1.326.000	1	288.000	1	293.000	1	299.000	5			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	15.817.000	100	25.665.000	100	15.817.000	100	16.067.000	100	16.321.000	100	Seksi Pemerintahan Umum ,Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pituruh	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	1	1	15.817.000	2	25.665.000	2	15.817.000	2	16.067.000	2	16.321.000	9			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	0	0	0	350	9.848.000	350	5.817.000	350	5.908.000	350	5.997.000	1.400			
7.01.05.2.01.0006	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	15.817.000	1	15.817.000	1	10.000.000	1	10.159.000	1	10.324.000	5			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	60.004.200	100	81.323.000	100	60.004.000	100	60.952.000	100	61.915.000	100	Seksi Pemerintahan Desa	Kecamatan Pituruh	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	5	6	60.004.200	9	81.323.000	8	60.004.000	8	60.952.000	8	61.915.000	39			
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	0	0	0	2	2.906.200	2	8.707.800	2	8.845.000	2	8.980.000	8			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	3.476.200	1	3.476.600	1	3.476.200	1	3.531.000	1	3.584.000	5			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	1	2.642.000	1	2.642.000	1	2.642.000	1	2.683.000	1	2.724.000	5			
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	1	24.272.800	1	24.272.800	1	24.272.800	1	24.654.000	1	25.074.000	5			
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	1	26.123.600	1	44.535.800	0	0	0	0	0	0	2			
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	1	2.207.800	1	2.207.800	1	2.207.800	1	2.248.000	1	2.276.000	5			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	1	1.281.800	1	1.281.800	1	1.281.800	1	1.302.000	1	1.321.000	5			
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	0	0	0	0	0	2	8.707.800	2	8.844.500	2	8.978.000	6			
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	0	0	0	0	0	1	8.707.800	1	8.844.500	1	8.978.000	3			
Jumlah							**2.807.887.151**		**3.024.339.000**		**2.415.755.000**		**2.418.317.000**		**2.420.919.000**				

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi perencanaan pembangunan desa, Fasilitasi program pemerintah kabupaten, Penguatan kapasitas aparatur desa bidang pembangunan	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi Pekerjaan umum	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat	
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		
			Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Monitoring Pembangunan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi intensifikasi PBB	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			
			Koordinasi Kegiatan		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Pemberdayaan Desa		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi musyawarah di desa dan kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi keagamaan (FKUB, Penyelenggaraan Hari Besar dan Hari Raya)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Fasilitasi Forkopimcam	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Kecamatan		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP)	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades dan Sekdes	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pilkades	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi	
			Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Penyusunan Masterplan Desa, Penyusunan Website Desa	

4.2 Dukungan terhadap Provinsi

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Pituruh akan mengarahkan aktivitas dan kegiatan pada periode tahun 2026–2030 untuk memperkuat pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah desa. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan, yang meliputi:

1. Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   Kecamatan Pituruh berperan aktif dalam mendorong peningkatan peran perempuan dalam pembangunan serta menjamin perlindungan hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan upaya Provinsi Jawa Tengah mewujudkan masyarakat yang inklusif, adil, dan ramah anak.
2. Fasilitasi Penurunan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan
   Melalui koordinasi lintas sektor bersama desa, puskesmas, dan perangkat daerah, Kecamatan Pituruh akan berperan dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting serta pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya, sesuai target provinsi.
3. Fasilitasi Pendidikan, Perlindungan Lansia, dan Pemberdayaan Disabilitas
   Kecamatan Pituruh berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar, memberikan perlindungan sosial bagi lansia, serta

memberdayakan penyandang disabilitas melalui program yang inklusif, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam pembangunan.

4. Fasilitasi Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
   Untuk meningkatkan daya saing masyarakat desa, Kecamatan Pituruh akan memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna, menguatkan koordinasi pembangunan desa, serta membina kelompok-kelompok masyarakat agar lebih mandiri dan produktif.
5. Fasilitasi dan Pembinaan UMKM, PKK, Karang Taruna, serta BUMDes
   Kecamatan Pituruh mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan memperkuat UMKM, PKK, Karang Taruna, dan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Dukungan ini diarahkan agar UMKM dan BUMDes dapat naik kelas, PKK lebih berdaya dalam pemberdayaan keluarga, serta Karang Taruna menjadi agen perubahan generasi muda.
6. Fasilitasi Pelestarian Lingkungan dan Desa Wisata
   Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, Kecamatan Pituruh akan menginisiasi program pelestarian lingkungan sekaligus mendorong pengembangan potensi desa wisata berbasis kearifan lokal. Hal ini selaras dengan program provinsi dalam memperkuat ketahanan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata.

Dengan rangkaian aktivitas tersebut, Kecamatan Pituruh menjadi perpanjangan tangan pemerintah provinsi dalam menjangkau masyarakat secara langsung. Periode 2026–2030 akan difokuskan pada penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan kesejahteraan, perlindungan sosial, serta pengembangan ekonomi lokal berkelanjutan, sehingga visi pembangunan Jawa Tengah dapat tercapai hingga ke tingkat desa.

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pituruh sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Tujuan dan Sasaran PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	86,90	86,95	87,00	87,20	87,30	87,40	Tujuan dan Sasaran PD

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pituruh yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pituruh Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Pituruh, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pituruh setiap tahunnya.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Rencana Strategis Kecamatan Pituruh sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pituruh setiap tahun.
b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c) Camat Pituruh wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Pituruh dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun

2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya ditandai dengan pelaksanaan pembangunan, sewajarnya diawali dengan proses perencanaan yang matang . Salah satu kebutuhan perencanaan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam pelaksanaan OPD Kecamatan Kemiri menyusun Renstra Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Purworejo.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Kemiri merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Kemiri serta ancaman dan peluang yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kemiri.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :

a. Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra PD.
c. Tahapan penetapan Renstra PD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Kemiri selaku Kepala PD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Purworejo.

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan hierarki Rencana Strategis PD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu Renstra Kecamatan Kemiri Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Purworejo untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan PD,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, landasan hukum tersebut sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) periode 2025-2029 sebagai berikut :

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kemiri Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan rencana Strategis Kecamatan Kemiri Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Resntra Kecamatan Kemiri Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah terhadap strategi dan kebijakan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka menengah (*sustainability development*) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap anggaran 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

2. Tujuan
   1. Sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2025-2029;
   2. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap strategi dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2025-2029;
   3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030;
   4. Sebagai instrumen untuk memudahkan Kecamatan Kemiri dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
   5. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronasi dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; serta
   6. Sebagai tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rrencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kecamatan sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merumuskan latar belakang penyusunan Renstra berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya renstra dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD , dasar hukum yang relevan dan signifikan, menguraikan maksud dan tujuan dan menjelaskan sistematika penulisan renstra perangkat daerah tahun 2025 – 2029.

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan data dan informasi terkait pelaksanan urusan yang manjadi tanggung jawab Perangkat Daerah , penyajina hasil evaluasi capaian 5 tahun terakhir , tugas fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya , kinerja penyelenggaran pelayanan , kelompok sasaran pelayanan , mitra perangkat daerah , dukungan BUMD dan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Bab III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini menjabarkan tentang tujuan dan sasaran renstra yang didasarkan pada NSPK (Norma, standar, prosedur dan kriteria) , strategi Renstra dan arah kebijakan.

Bab IV. PROGRAM. KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjabarkan program , kegiatan dan subkegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang mengacu pada permendagri beserta pemutakhirannya.

Bab V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanan, Kecamatan Kemiri memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dan sub bagian.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi PD

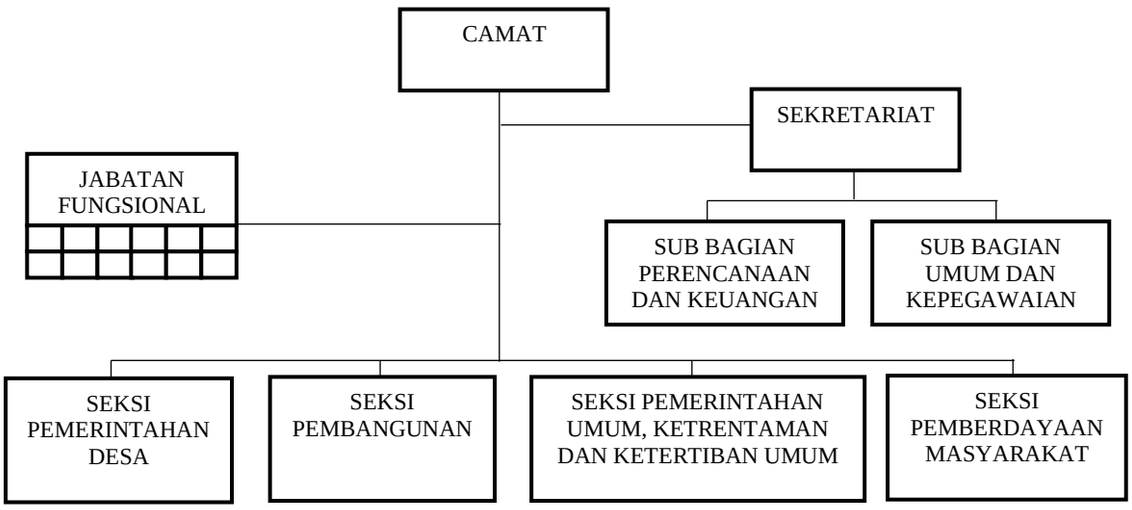

Berdasar Peraturan Bupati Purworejo Nomor: 14 Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, dengan uraian sebagai berikut :

Kedudukan : Kecamatan dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
Tugas : Camat bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemeritahan desa, pembangunan, ketentraman dan ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
a. Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan Kecamatan;

b. Melakukan pembinaan dan pengawas terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
a. Melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
c. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; dan
d. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
a. Melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan peneliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaran kegiatan pemerintahan

c. Melakukan evaluasi kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;dan
d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan, meliputi:

a. Melakukan administrasi dan pengawasan tertib desa dan/ atau kelurahaa;
b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi kelurahan;
c. Melakukan administrasi desa dan/atau pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;
d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau perangkat kelurahan;
e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Camat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
d. Pengordinasian penerapan dan penegakan dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pengordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan;
h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan .

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai Kecamatan dan Sekretaris Desa PNS berdasarkan Golongan, Jabatan / Eselonering dan Pendidikan sebanyak 17 pegawai Kecamatan PNS ditambah dengan 2 orang tenaga non ASN. Adapun rincian pegawai berdasarkan golongan kepangkatan yaitu :

a. Berdasarkan Golongan :
   - Golongan IV : 1 orang
   - Golongan III :11 orang
   - Golongan II : 3 orang
   - P3K Golongan VII : 2 orang
   - Tenaga Kontrak : 2 orang tenaga kebersihan

   Jumlah : 19 orang

b. Berdasarkan Jabatan / Eselonering :

- Eselon III/A : 1 orang
- Eselon III/B : 0 orang
- Eselon IV/A : 3 orang
- Eselon IV/B : 2 oran

c. Berdasarkan Pendidikan :

- Sarjana Strata 2 : 0 orang
- Sarjana Strata 1 : 6 orang
- Diploma : 2 orang
- SMU/Sederajat : 8 orang

Kepemilikan Aset BMD tahun 2025 :

KIB A : Tanah

Luas tanah , bangunan Kecamatan Kemiri : 35.588

KIB B : Peralatan dan Mesin

Jumlah aset :

Genset : 1 unit
Mobil dinas : 1 unit
Motor dinas : 8 unit
AC : 2 unit
PC unit : 6 unit
Laptop : 8 unit
Netbook : 2 unit
Printer : 8 unit
Televisi : 2 unit
Lemari besi : 2 unit
Rak Besi : 5 unit
Filling besi : 7 unit
Lemari Kaca : 1 unit
Lemari Kayu : 6 unit
Rak Kayu : 3 unit
Kursi kayu / kerja : 16 unit
Zice : 4 unit
Meja Rapat : 6 unit
Meja tulis : 30 unit

KIB C : Gedung dan Bangunan

Luas tanah kantor dan bangunan Kecamatan Kemiri adalah 426 m2, dan memiliki 1 rumah dinas.

KIB D : Jalan, irigasi dan Jaringan

Jaringan distribusi lain – lain (instalasi listrik) : 1 paket

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat keadaan yang menonjol atau trend yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima)tahun yang telah dijalani. Dengan melihat keadaan tersebut dapat diproyeksikan rencana apa yang akan dibuat untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja kecamatan Kemiri berdasarkan sasaran/target renstra PD 2025-2029 atau Renstra sebelumnya. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan PD mengacu pada hasil kerja periode Renstra sebelumnya . Untuk menjelaskan kinerja pelayanan perangkat daerah, maka kami sajikan Tabel 2.1 dibawah ini .

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kemiri

Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1	Tujuan : Nilai Sakip Perangkat Daerah				-	-	-	-	68,02	70,45	62,29	63,10	64,47	65,58			100	100	100	100		
2	Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				79	79	80	81	85	85,25	77,96	78,75	80,03	84,77			98,68	99,68	100	104,65		
3	Sasaran : Nilai Sakip Perangkat Daerah				-	-	-	-	68,02	70,45	62,29	63,10	64,47	65,58			100	100	100	100		
4	Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				79	79	80	81	85	85,25	77,96	78,75	80,03	84,77			98,68	99,68	100	104,65		
3	Program : Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah				100	100	100	100	100		100	100	100	100			100	100	100	100		
4	Program : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100	100	100	100	100		100	100	100	100			100	100	100	100		
5	Program : Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan				100	100	100	100	100		100	100	100	100			100	100	100	100		
6	Program : Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100	100	100	100	100		100	100	100	100			100	100	100	100		
7	Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100	100	100	100	100		100	100	100	100			100	100	100	100		
8	Program : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100	100	100	100	100		100	100	100	100			100	100	100	100		

Pada tabel 2.1 , pada umumnya capaian pelayanan mencapai target. Pada sasaran yang menjadi target, tercapai 100% . Tidak ada gap / kesenjangan pelayanan. Faktor pendukung antara lain, proses perencanaan yang bisa mengakomodasi kebutuhan seksi, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Potensi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kemiri dimanfaatkan dengan maksimal untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan. Dengan jumlah pegawai yang terbatas yang dihadapkan dengan jumlah desa yang besar , Kecamatan Kemiri harus bisa mencukupi segala aktifitas yang menjadi tupoksi kecamatan.

Tabel 2.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.377.061.500	2.234.720.820	2.180.627.366	2.390.628.530	2.238.573.774		2.191.146.963	2.079.942.730	2.005.146.943	2.305.547.804			92,18	93,07	91,95	96,44	
Belanja Pegawai	2.377.061.500	2.234.720.820	2.180.627.366	2.390.628.530	2.238.573.774		2.191.146.963	2.079.942.730	2.005.146.943	2.305.547.804			92,18	93,07	91,95	96,44	
BELANJA LANGSUNG	253.408.700	1.205.563.402	1.220.191.604	1.419.372.700	956.257.603		230.600.068	1.111.927.224	1.119.111.516	827.397.868			91	92,23	91,72	58,29	
Belanja Langsung	253.408.700	1.205.563.402	1.220.191.604	1.419.372.700	956.257.603		230.600.068	1.111.927.224	1.119.111.516	827.397.868			91	92,23	91,72	58,29	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.630.470.200	2.957.328.234	2.906.252.271	3.145.726.830	2.806.384.677		2.421.747.031	2.725.495.614	2.682.719.943	2.638.927.922			92,07	92,16	92,31	*83,89*	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	184.920.400	77.992.488	71.243.600	62.552.800	40.148.000		184.743.492	74.319.640	51.881.916	23.983.750			99,90433	95,29	72,82	*38,84*	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.110.000	158.941.500	176.057.700	310.312.000	180.935.300		4.074.000	156.168.000	153.954.000	266.957.800			99,12409	98,26	87,45	*86,03*	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.599.000	32.783.400	31.126.300	55.196.400	33.348.800		33.449.600	32.359.500	29.682.200	17.845.000			99,55534	98,71	95,36	*32,33*	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		7.989.800	21.016.900	45.982.600	28.184.400			7.948.900	20.830.000	28.400.000				99,4881	99,11	*61,76*	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	248.125.000	205.248.800	195.122.200	190.230.600	105.830.200		230.766.000	195.578.300	185.190.400	156.831.200			93,00393	95,29	94,91	*82,44*	

Pada tahun 2021 , 2022 , 2023 rata rata capaian anggaran atau nilai serapan cukup baik , yaitu di atas 90 persen . Tapi pada tahun 2024 terjadi penurunan rasio serapan anggaran .

Faktor pendorong rasio serapan yang baik adalah :

1. Kesesuaian serapan dengan anggaran kas
2. Personal bendahara pengeluaran yang mampu melalukan pengajuan GU sesuai dengan target anggaran kas .

Faktor penghambat sdehingga serapan menjadi kurang baik :

1. Ketidak sesuaikan serapan dengan anggaran kas
2. Aplikasi yang harus berjalan 2 , yaitu Simkeuda dan SIPD.

Tabel 2.3

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*10*
1	Indikator Tujuan : Nilai Sakip Perangkat Daerah	61,30	62,29	63,1	64,47	65,58	
2	Indikator Sasaran : Nilai Sakip Perangkat Daerah	61,30	62,29	63,1	64,47	65,58	
3	Indikator Program : Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	79,61	77,96	78,75	80,03	84,77	
5	Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	79,61	77,96	78,75	80,03	84,77	
6	Indikator Program : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Indikator Program : Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Indikator Program : Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Indikator Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Indikator Program : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strength*, *Weakness,Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strength)

1. Sumber Daya Manusia (pegawai) yang mempunyai pendidikan memadai serta semangat untuk belajar terhadap tugas pokok dan fungsinya.
2. Tersedianya sarana / prasarana dan dan dukungan dana / pembiayaan sangat membantu kelancaran dalam melayani dan memfasilitasi pemerintah Desa dan memperlancar kegiatan di Kecamatan.
3. Sistem kekeluargaan yang telah terbangun, hubungan koordinasi dan konsultasi yang berjalan baik bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat baik bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

Kurangnya jumlah pegawai di Sekretariat kecamatan yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. Perkembangan teknologi informasi tidak diimbangi semangat untuk belajar dari sebagian besar pegawai yang ada.
2. Belum ada pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan.
3. Belum tersedia data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam merencanakan pembangunan yang komprehensif dan berkesinambungan.
4. Belum adanya sumber daya perencana yang berkualitas
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
6. Pelaksanaan musyawarah pembangunan (musrenbang) masih sekedar formalitas hasilnya belum sesuai yang diusulkan peserta.

Analisis Lingkungan Eksternal

c. Faktor Peluang (Opportunity)

1. Kepemimpinan yang punya jangkauan kedepan (Visioner), berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yang berpartisipatif.
2. Adanya program-program pemerintah di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kemiri
3. Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purworejo yang sudah mulai tertata.
4. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berinovasi seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
5. Hubungan yang harmonis dengan instansi yang lain dan juga dengan para pemangku kepentingan.

d. Faktor Ancaman (Threat)

1. Kondisi masyarakat yang tidak sama baik tingkat sosial ekonomi, pendidikan dan hal-hal yang lain berpengaruh terhadap cara pandang pola pikir.

2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan secara partisipatif.
4. Kebijakan pemerintah yang kurang sosialisasi, akan berakibat bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Kemiri memiliki kelompok sasaran pemerintahan desa dan masyarakat desa secara umum di wilayah Kecamatan Kemiri.

Mitra perangkat daerah dalam melaksanakan tupoksinya adalah Polsek , Koramil, Pendamping Desa , Pendamping Lokal Desa , PKH , Tenaga Sosial dan dinas / UPT terkait yang ada di wilayah Kecamatan Kemiri .

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi hasilnya adalah kondisi aktual yang menjadi fokus tahun 2026-2029 berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal.
2. Akuntabilitas keuangan belum disertai kompetensi Sumber Daya Manusia.
3. Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan.
4. Pelayanan publik prima belum merata.
5. Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif.

2.2.2 Isu Strategis

Pada penjelasan isu strategis dapat dijelaskan dengan tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif di tingkat kecamatan
	Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah			Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia		
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan		Cyber insecurity			
	Pelayanan publik prima belum merata		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			
	Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif					

BAB III
TUJUAN , SASARAN , STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2025-2029, yaitu "PURWOREJO BERDAYA SAING, SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN INOVATIF (PURWOREJO BERSERI)". Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan Misi ke 5 Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagai berikut : " Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. "

OPD Kecamatan Kemiri menjadi OPD yang mendukung Misi 5 Bupati Purworejo.Tupoksi Kecamatan Kemiri dilaksakan untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Kecamatan Kemiri sebagai fasilitasi desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Tujuan dan sasaran Resntra Kecamatan Kemiri 2025 – 2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	85	85,25	85,5	85,75	86	86,25	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	85	85,25	85,5	85,75	86	86,25	

Pada tabel disajikan Tujuan Renstra : Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Sedangkan Sasaran Renstra : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat.

Pada indikator dari masing masing tujuan dan sasaran , yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah).

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti tabel di bawah.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat	Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat	Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat
Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan RPJMD 2026	Arah Kebijakan RENSTRA 2026	
		Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, , Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan , Pelaksanaan Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2027	Arah Kebijakan RENSTRA 2027	
		Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, , Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan , Pelaksanaan Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

		Arah Kebijakan RPJMD 2028	Arah Kebijakan RENSTRA 2028	
		Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2029	
		Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, , Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan , Pelaksanaan Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

		Arah Kebijakan RPJMD 2030	Arah Kebijakan RENSTRA 2030	
		Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, , Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan , Pelaksanaan Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

Adapun susunan program , kegiatan dan subkegiatan yang relevan terhadap RPJMD maka kami sajikan sebagaimana berikut ini

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
		masyarakat					
			Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	

Pada tabel ini menghubungkan antara , tujuan , sasaran , dan program kegiatan subkegiatan yang di ambil oleh perangkat daerah dalam menjalankan fungsinya . Pilihan subkegiatan pada setiap kegiatan juga menyesuaikan dengan kebutuhan masing masing perangkat daerah .

Untuk meyajikan Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan , maka disajikan tabel berikut :

Tabel 4.2.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KEMIRI
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	50,11	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	84,77	85,25		85,5		85,75		86		86,25		86,25			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	50,11	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
7.01.00	KECAMATAN						2.420.415.755		2.444.620.000		2.420.416.000		2.420.415.000		2.420.416.000				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	2.420.415.755	100	2.444.620.000	100	2.420.416.000	100	2.420.416.000	100	2.420.416.000	100	Sekretariat	Kecamatan Kemiri	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	21	42	20.021.800	43	30.568.296	43	30.000.000	43	30.000.000	43	30.000.000	214			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	11.880.200	22	18.568.296	22	18.000.000	22	18.000.000	22	18.000.000	110			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	20	8.141.600	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	100			
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	7	45	2.223.392.655	45	2.185.031.655	45	2.193.531.655	45	2.193.531.655	45	2.193.531.655	225			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	21	14	2.215.548.455	14	2.185.531.655	14	2.185.531.655	14	2.185.531.655	14	2.185.531.655	14			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	6	44	7.844.200	44	500.000	44	8.000.000	44	8.000.000	44	8.000.000	220			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0		11	500.000	11	500.000	11	500.000	11	500.000	44			
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	11	500.000	11	500.000	11	500.000	11	500.000	44			
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	16	375.000	16	500.000	16	500.000	16	500.000	16	500.000	80			
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	16	375.000	16	500.000	16	500.000	16	500.000	16	500.000	80			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	0		17	500.000	17	500.000	17	500.000	17	500.000	68			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	17	500.000	17	500.000	17	500.000	17	500.000	68			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	8	6	44.820.300	8	102.750.000	8	90.070.000	8	90.070.000	8	90.070.000	38			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	5	4.810.400	5	6.000.000	5	7.000.000	5	7.000.000	5	7.000.000	25			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	14	5.271.200	14	7.000.000	14	8.500.000	14	8.500.000	14	8.500.000	70			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	1	8.400.000	1	20.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	5			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	3	7.538.800	3	15.000.000	3	14.000.000	3	14.000.000	3	14.000.000	15			
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	17	7.746.900	17	13.000.000	17	10.070.000	17	10.070.000	17	10.070.000	85			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	0	12	9.750.000	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000	48			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	11.053.000	12	25.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	60			
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	0	0	2	7.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	8			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	56	0		2	10.000.000	0		0		2	3.000.000	4			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	52	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.000.000	2			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	4	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	47.976.000	12	21.780.049	12	23.780.049	12	23.780.049	12	23.780.049	72			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	27.960.000	12	21.780.049	12	23.780.049	12	23.780.049	12	23.780.049	60			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	20.016.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	5	83.830.000	6	91.990.000	6	81.534.296	6	81.534.296	6	78.534.296	29			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	39.950.000	1	29.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	8	15.800.000	8	18.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	40			
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	3	7.450.000	3	7.450.000	3	7.450.000	9			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9	10	7.100.000	10	17.800.000	10	7.000.000	10	7.000.000	10	7.000.000	50			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	20.370.000	4	20.000.000	4	19.894.296	4	19.894.296	4	16.894.296	20			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2	610.000	2	7.190.000	2	7.190.000	2	7.190.000	2	7.190.000	10			
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	84,77	85,25		85,5		85,75		86		86,25		86,25			
7.01.00	KECAMATAN						182.732.000		484.099.000		182.733.000		185.619.000		188.553.000				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	15.398.600	100	45.941.000	100	15.399.000	100	15.642.000	100	15.889.000	100	Seksi Pembangunan	Kecamatan Kemiri	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen	3	4	14.023.600	3	14.112.000	3	10.817.599	3	10.558.479	3	6.889.000	16			
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	1	2.545.800	1	8.924.790	1	7.371.029	1	4.839.580	1	3.889.000	5			
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	6.576.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	2	4.901.200	2	5.187.210	2	3.446.570	2	5.718.899	2	3.000.000	10			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen	1	1	1.375.000	1	31.829.000	1	4.581.401	1	5.083.521	1	9.000.000	5			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	1.375.000	1	31.829.000	1	4.581.401	1	5.083.521	1	9.000.000	5			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100	100	76.526.200	100	196.226.000	100	76.526.000	100	77.735.000	100	78.964.000	100	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Kemiri	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen	2	7	76.526.200	7	196.226.000	7	76.526.000	7	77.735.000	7	78.964.000	35			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	2	4	7.560.000	4	27.173.648	4	28.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	20			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	6	68.966.200	6	169.052.352	6	48.525.000	6	57.735.000	6	58.964.000	30			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	13.199.600	100	63.623.000	100	13.200.000	100	13.408.000	100	13.620.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kemiri	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	6	13.199.600	6	56.123.000	6	5.700.000	6	11.408.000	6	10.620.000	30			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	4	6.940.000	4	39.343.808	4	2.000.000	4	5.000.000	4	4.620.000	20			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	2	6.259.600	2	16.779.192	2	3.700.000	2	6.408.000	2	6.000.000	10			
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	1	0		1	7.500.000	1	7.500.000	1	2.000.000	1	3.000.000	4			
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	0	0	1	7.500.000	1	7.500.000	1	2.000.000	1	3.000.000	4			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	17.134.800	100	46.021.000	100	17.135.000	100	17.406.000	100	17.681.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kemiri	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	2	2	17.134.800	3	46.021.000	2	17.135.000	2	17.406.000	2	17.681.000	11			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	20	80	3.754.800	80	15.325.615	80	5.000.000	80	5.406.000	80	10.000.000	400			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	0	0	0	20	9.450.000	0	0	0	0	0	0	20			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	13.380.000	1	21.245.385	1	12.135.000	1	12.000.000	1	7.681.000	5			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	60.472.800	100	132.288.000	100	60.473.000	100	61.428.000	100	62.399.000	100	Seksi Pemerintahan Desa	Kecamatan Kemiri	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	8	8	60.472.800	10	132.288.000	10	60.473.000	10	61.428.000	10	62.399.000	48			
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	1	2.850.000	1	12.763.200	1	8.174.525	1	9.129.525	1	9.000.000	5			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	4.890.000	1	19.011.335	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	5			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	2	8.705.000	2	20.891.440	2	11.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000	10			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	1	25.466.400	1	20.582.400	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.899.000	5			
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	0	0	1	28.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	1	6.380.000	1	2.663.250	1	3.994.875	1	3.994.875	1	3.000.000	5			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	1	3.975.000	1	7.974.675	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	5			
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	0	0	0	0	0	1	4.550.000	1	4.550.000	1	4.500.000	3			
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	1	3.146.400	1	7.899.300	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5			
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	1	1	5.060.000	1	8.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	5			
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	0	0	0	1	4.502.400	1	6.753.600	1	6.753.600	1	6.000.000	4			
Jumlah							**2.603.147.755**		**2.928.719.000**		**2.603.149.000**		**2.608.035.000**		**2.608.989.000**				

Pada tabel diatas disajikan subkegiatan beserta pendanaan selama 5 tahun periode renstra . Ketersediaan dana disesuaikan dengan pagu RPJMD Kabupatan Purworejo dan disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah. Untuk menjelaskan subkegiatan dari masing program dan kegiatan yang mendukung program prioritas Pembangunan Daerah , kami sajikan tabel berikut :

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Monitoring Pembangunan	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas)	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi intensifikasi PBB Fasilitasi pengisian anggota BPD	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi keagamaan, FKUB	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka	
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Forkopimcam	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP)	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades dan Sekdes	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pilkades	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi	
			Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Penyusunan Masterplan Desa, Penyusunan Website Desa	

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Fasilitasi pemberdayaan perempuan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi perlindungan anak	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi penurunan stunting	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi pendidikan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi perlindungan lansia	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi pemberdayaan disabilitas	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi tenologi tepat guna	Kecamatan	Kecamatan
		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi dan pembinaan UMKM	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi pelestaian lingkungan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi desa wisata	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi dan pembinaan PKK	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi BUMDes	Kecamatan	Kecamatan

Pada Resntra Kecamatan Kemiri , hanya mendukung Program Delegasi Propinsi yaitu Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center). Pada program tersebut ada beberapa aktifitas yang sesuai dengan Kecamatan Kemiri antara lain : Fasilitasi pemberdayaan perempuan, Fasilitasi perlindungan anak, Fasilitasi penurunan stunting, Fasilitasi dan pembinaan UMKM, Fasilitasi dan pembinaan PKK, Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna dan Fasilitasi BUMDes

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Tujuan dan Sasaran PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	85	85,25	85,50	85,75	86	86,25	Tujuan dan Sasaran PD

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kemiri yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kemiri Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Kemiri, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kemiri setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Rencana Strategis Kecamatan Kemiri sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kemiri setiap tahun.
b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c) Camat Kemiri wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Kemiri dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo

Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025—2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025—2029. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029. Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bruno Tahun 2025—2029. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Bruno yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bruno yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Bruno sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Bruno, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Bruno juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Purworejo, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, serta RPJM Nasional. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra

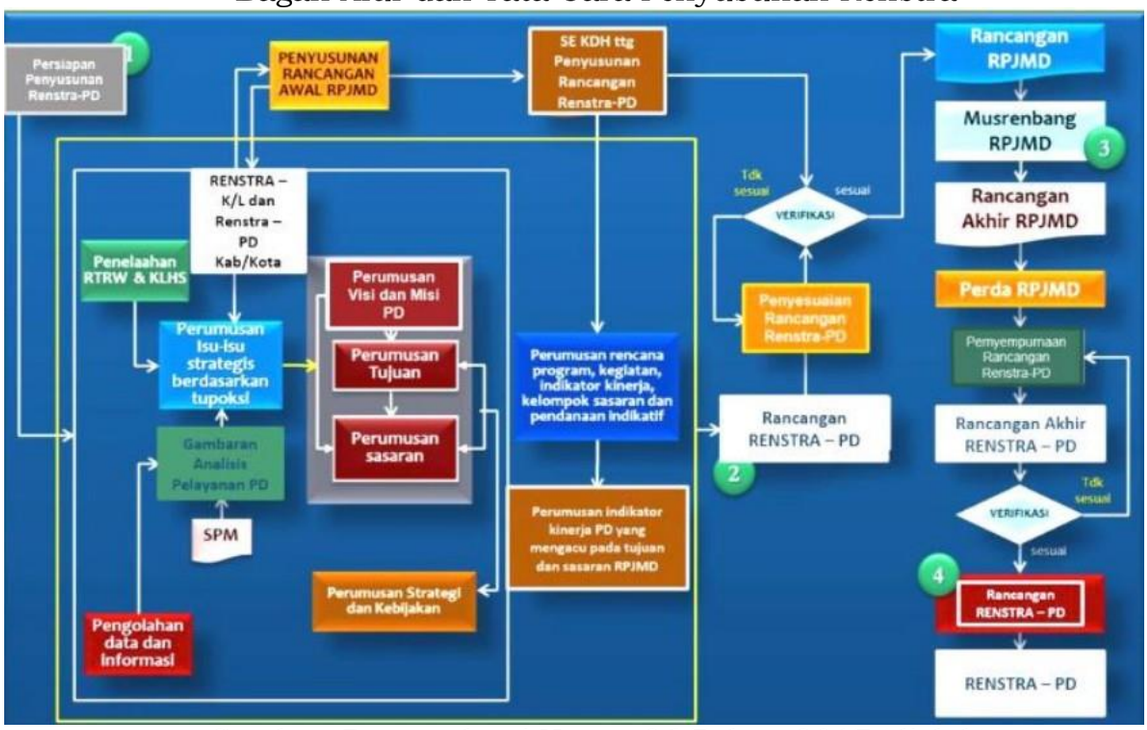

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Bruno yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purworejo dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bruno. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bruno dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purworejo;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Bruno Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Bruno Tahun 2025—2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025—2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja serta kegiatan indikatif SKPD;

3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Bruno ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bruno sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Purworejo.

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

BABIV ROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah
- 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo, Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo

Tugas Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan Kecamatan;

a. melakukan pembinaan dan pengawasanl terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
b. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
c. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
d. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemetharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang kegiatan;
c. melakukan evaluasi kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan, meliputi:
a. melakukan administrasi dan pengawasan tertib desa dan/ atau kelurahan;
b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi kelurahan;
c. melakukan administrasi desa dan/atau pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau perangkat kelurahan;
e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat Kecamatan;
f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. pengkordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengkoordinasin upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan;
h. pelaksanaan Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat selain fungsi menyelenggarakan fungsi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Camat dalam menyelenggarakan fungsi dan dalam melaksanakan tugas urusan umum :

a. membentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan keanggotaan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan meliputi: Camat sebagai Ketua; Kepala Kepolisian Negara Republik di Kecamatan sebagai anggota; dan pimpinan Indonesia, pimpinan Kecamatan sebagai Anggota.
b. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang di bahas.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat Daerah sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya yang meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan meliputi anggaran, tenaga, dan sarana prasarana.

a. Sumber Daya Manusia

Total Aparatur Spil Negara Kecamatan Bruno berjumlah 18 orang di Kecamatan Bruno keadaan Bulan Juli 2025 berjumlah : 18 orang, terdiri dari:

- Golongan IV : 2 orang
- Golongan III : 11 orang
- Golongan II : 2 orang
- PPPK : 3 orang

a. Menurut jenjang pendidikan terakhir, terdiri atas :

- Magister : 3 orang
- Sarjana : 8 orang
- Sarjana Muda : 3 orang
- SLTA : 4 orang

b. Sementara menurut jenis kelamin, meliputi :

- Laki – laki : 14 orang
- Perempuan : 4 orang

Melihat data diatas meskipun untuk Kecamatan Bruno sudah memiliki 18 ASN, namun masih kurang personil diantaranya Seksi Pemberdayaan Masyarakat tidak mempunyai staf ASN, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum hanya mempunyai 1 Staf ASN.

Berikut Bagan Struktur Organisasi pada Kantor Kecamatan Bruno:

Gambar 2
Bagan Struktur Organisasi PD

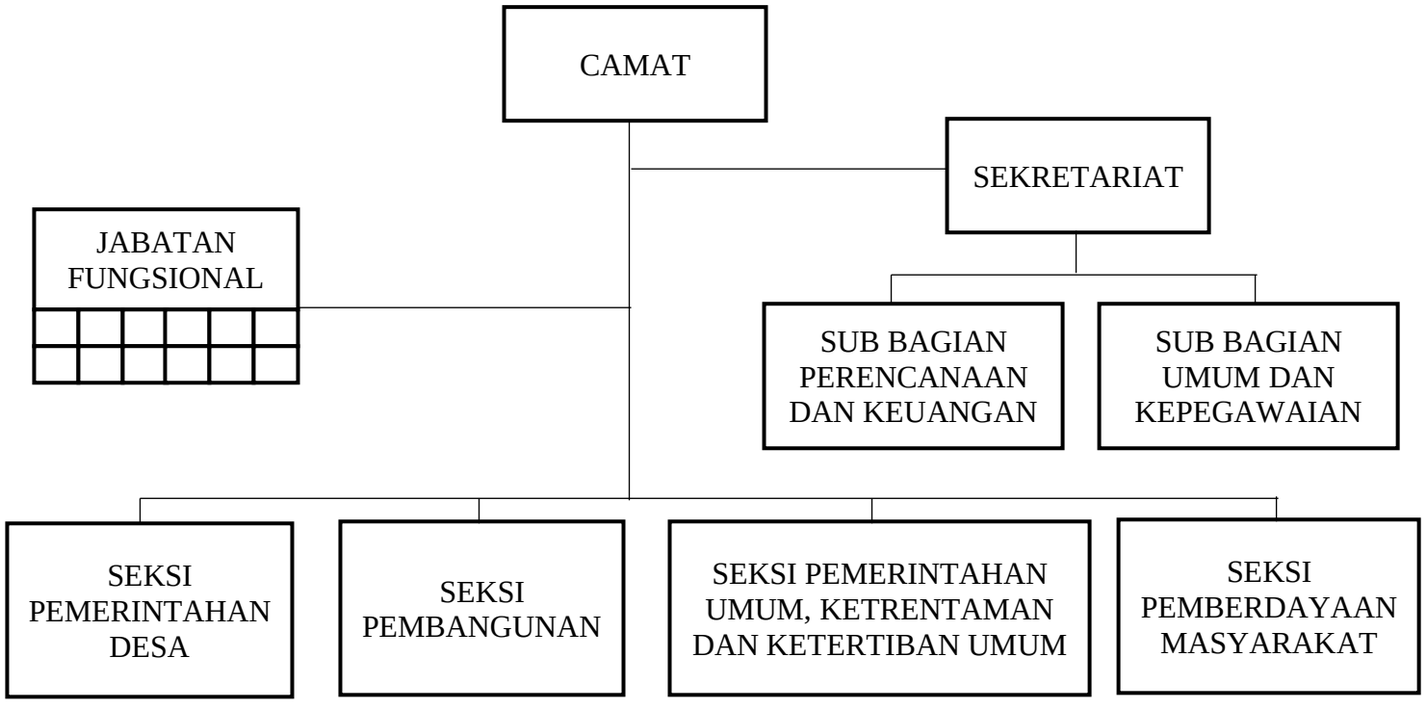

b. Sumber Daya Anggaran Kecamatan Bruno

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, telah di alokasikan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Purworejo sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.

2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat keadaan yang menonjol atau trend yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang telah dijalani. Dengan melihat keadaan tersebut dapat diproyeksikan rencana apa yang akan dibuat untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja kecamatan Bruno berdasarkan sasaran/target renstra PD 2021-2026 atau Renstra sebelumnya. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan PD mengacu pada hasil kerja periode Renstra sebelumnya . Untuk menjelaskan kinerja pelayanan perangkat daerah, maka kami sajikan Tabel 2.1 dibawah ini

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1	Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-	-	-	81,5	82	83	83,5	84	86	81,25	85,5	83,27	85,97	-	-	99,7	104,3	100,3	103,0	-	-
2	Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-	-	-	81,5	82	83	83,5	84	86	81,25	85,5	83,27	85,97	-	-	99,7	104,3	100,3	103,0	-	-
3	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
5	Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
6	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	-		100%	100%	100%	-	-
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-

Melihat tabel diatas Kecamatan Bruno menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang sangat baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai target penuh, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 100%, serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi Program seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencapai target 100%. Secara keseluruhan, Kecamatan Bruno telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

a) Faktor Pendorong :

Antisipasi dan dukungan terhadap penghambat terwujudnya pelayanan sebagaimana diatas:

1) Mengupayakan kerjasama dengan dinas instansi terkait dengan lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk meningkatkan kualitas kualitas pelayanan dan potensi;
2) Pengembangan Potensi di Wilayah Kecamatan Bruno;
3) Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan Kecamatan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan mulai dari Desa hingga Perangkat Daerah yakni dalam Musrenbang;
4) Memfasilitasi dan mengupayakan pemenuhan sarana prasarana wilayah, peningkatan perekonomian rakyat sesuai dengan potensi masyarakat.

b) Faktor Penghambat

Faktor – faktor penghambat dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Bruno sebagai berikut :

1) Kurang berkembangnya pemantapan wilayah di berbagai bidang seperti lingkungan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam usulan Musrenbang.
2) Kurang maksimalnya prasarana penunjang pelaksanaan tugas kegiatan pemerintahan sehingga berdampak tidak optimalnya dalam pelayanan.
3) Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah kecamatan sehingga memerlukan langkah-langkah efisiensi walaupun dananya terbatas dan dengan efektifitas penggunaan dananya diharapkan dapat bekerja lebih optimal.
4) Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga fungsional yang ada karena purna tugas/pindah tugas, sehingga beban pekerjaan tertumpu pada seseorang saja (selain tugas pokok juga.

Tabel 2.2

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamtan Bruno

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kecamatan	2.709.228.065	2.958.189.853	3.092.263.335	3.011.905.981	-	-	2.512.614.704	2.549.136.980	2.837.979.910	2.891.504.442								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.234.253.473	2.610.336.253	2.624.996.135	2.539.138.681	-	-	2.052.540.112	2.209.519.180	2.430.087.910	2.477.362.770			91,87	84,65	92,57	97,57		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.673.880	52.483.104	64.470.864	53.365.332	-	-	53.162.044	48.025.040	62.153.843	49.962.476			95,49	91,51	96,41	93,62		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.235.400						22.235.400						100,00	-	-	-		
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	16.719.240	16.793.500	15.600.000	16.026.132			15.463.322	12.364.042	13.282.979	12.918.247			92,49	73,62	85,15	80,61		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.719.240	35.689.604	48.870.864	37.339.200	-	-	15.463.322	35.660.998	48.870.864	37.044.229			92,49	99,92	100,00	99,21		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.209.800	101.282.900	115.294.500	137.010.100	-	-	41.209.800	101.256.900	108.550.300	112.481.000			100,00	99,97	94,15	82,10		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9.554.000	5.078.700	10.033.700				9.554.000	5.078.700	10.034.500				100,00	100,00	100,01		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		6.338.000	6.517.500	9.867.700				6.338.000	6.517.500	6.242.500				100,00	100,00	63,26		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		18.900.000	24.393.600	24.087.000				18.900.000	21.344.400	20.097.000				100,00	87,50	83,44		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		9.001.600	8.401.200	9.657.500				9.001.600	8.401.200	5.994.200				100,00	100,00	62,07		
Penyediaan Bahan/Material		21.136.300	13.401.000	19.070.500				21.136.300	13.401.000	16.642.300				100,00	100,00	87,27		
Fasilitasi Kunjungan Tamu		3.240.000	7.200.000	9.000.000				3.240.000	5.400.000	7.500.000				100,00	75,00	83,33		
Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.209.800	33.113.000	47.294.000	49.993.200			41.209.800	33.087.000	45.399.000	40.670.000			100,00	99,92	95,99	81,35		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			3.008.500	5.300.500					3.008.500	5.300.500					100,00	100,00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		13.000.000	286.642.500	251.771.200	-	-	-	12.364.042	284.638.200	246.040.000				95,11	99,30	97,72		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			255.822.500						254.320.000						99,41	-		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pengadaan Mebel				218.013.800						212.610.000						97,52		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			30.820.000	26.113.200					30.318.200	25.830.000					98,37	98,92		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		13.000.000		7.644.200				12.364.042		7.600.000				95,11	-	99,42		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	70.450.300	62.476.000	120.980.000	105.170.000	-	-	70.434.900	62.476.000	120.843.322	96.100.238			99,98	100,00	99,89	91,38		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	25.999.000	36.465.000	21.069.000	34.880.000			25.999.000	36.465.000	21.068.749	32.457.196			100,00	100,00	100,00	93,05		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			12.512.000	19.750.000					12.512.000	13.952.042					100,00	70,64		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		13.560.000	13.981.000	6.490.000				13.560.000	13.981.000	5.760.000				100,00	100,00	88,75		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.017.400	10.512.000	72.416.000	36.860.000			33.002.000	10.512.000	72.279.573	36.741.000			99,95	100,00	99,81	99,68		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.433.900	1.939.000	1.002.000	7.190.000			11.433.900	1.939.000	1.002.000	7.190.000			100,00	100,00	100,00	100,00		
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.125.000	83.955.543	62.871.732	41.586.800	-	-	5.125.000	83.824.130	57.885.532	32.143.157	-		100,00	99,84	92,07	77,29		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.375.000	57.574.143	47.648.932	27.765.800			2.375.000	57.444.030	46.898.932	23.893.157			100,00	99,77	98,43	86,05		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3.102.800	1.599.400	2.000.000				3.102.800	1.474.200	1.000.000				100,00	92,17	50,00		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3.102.800	1.599.400	1.375.000				3.102.800	1.599.400	1.250.000				100,00	100,00	90,91		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		3.102.800	1.333.000	1.625.000				3.102.800	1.083.000	625.000				100,00	81,25	38,46		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		3.102.800	1.333.000	1.625.000				3.102.800	472.000	375.000				100,00	35,41	23,08		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7.580.600	6.555.000	3.750.000				7.580.600	3.555.000	3.000.000				100,00	54,23	80,00		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.750.000	6.389.600	2.803.000	3.446.000			2.750.000	6.388.300	2.803.000	2.000.000			100,00	99,98	100,00	58,04		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.026.109.365	2.297.138.706	1.973.236.539	1.944.610.249	-	-	1.845.667.322	1.901.573.068	1.794.516.713	1.935.260.899			91,09	82,78	90,94	99,52		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.022.734.365	2.264.401.706	1.960.909.339	1.935.194.549			1.842.292.322	1.868.836.968	1.782.425.513	1.926.679.199			91,08	82,53	90,90	99,56		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.696.000	1.583.000	2.125.000				2.696.000	1.347.000	1.375.000				100,00	85,09	64,71		
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.375.000	30.041.000	10.744.200	7.290.700			3.375.000	30.040.100	10.744.200	7.206.700			100,00	100,00	100,00	98,85		
Administrasi Pendapatan Perangkat Daerah	-	-	1.500.000	2.125.000	-	-	-	-	1.500.000	1.875.000			-	-	100,00	88,24		
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			1.500.000	2.125.000					1.500.000	1.875.000			-	-	100,00	88,24		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.500.000	3.500.000	-	-	-	-	1.500.000	3.500.000			-	-	100,00	100,00		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1.500.000	3.500.000					1.500.000	3.500.000			-	-	100,00	100,00		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	163.347.392	72.118.600	121.714.700	39.936.600	-	-	157.747.392	72.118.600	111.035.400	37.402.500			96,57	100,00	91,23	93,65		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	142.900.800	39.253.700	69.903.200	25.590.000	-	-	137.300.800	39.253.700	65.293.700	23.361.000			96,08	100,00	93,41	91,29		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		11.836.000	4.136.000					11.836.000	4.136.000					100,00	100,00	-		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	142.900.800	27.417.700	65.767.200	25.590.000			137.300.800	27.417.700	61.157.700	23.361.000			96,08	100,00	92,99	91,29		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang di Kecamatan	20.446.592	32.864.900	51.811.500	14.346.600	-	-	20.446.592	32.864.900	45.741.700	14.041.500			100,00	100,00	88,28	97,87		
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		29.402.700	47.726.200	10.074.800				29.402.700	41.656.400	9.770.100				100,00	87,28	96,98		
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.446.592	3.462.200	4.085.300	4.271.800			20.446.592	3.462.200	4.085.300	4.271.400			100,00	100,00	100,00	99,99		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.815.000	90.404.100	97.377.600	217.662.900	-	-	9.815.000	90.368.300	88.610.900	200.420.651			100,00	99,96	91,00	92,08		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.815.000	90.404.100	97.377.600	217.662.900	-	-	9.815.000	90.368.300	88.610.900	200.420.651			100,00	99,96	91,00	92,08		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		9.221.000	6.303.000	11.807.300				9.221.000	5.750.000	7.657.300				100,00	91,23	64,85		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.815.000	81.183.100	91.074.600	205.855.600			9.815.000	81.147.300	82.860.900	192.763.351			100,00	99,96	90,98	93,64		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	32.399.000	27.906.400	54.916.600	66.532.100	-	-	32.399.000	27.906.400	48.061.100	58.010.821			100,00	100,00	87,52	87,19		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	32.399.000	25.573.900	50.381.600	63.102.100	-	-	32.399.000	25.573.900	43.526.100	54.830.821			100,00	100,00	86,39	86,89		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.399.000	17.712.900	34.597.600	51.037.100			32.399.000	17.712.900	27.742.100	43.390.821			100,00	100,00	80,19	85,02		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		7.861.000	15.784.000	12.065.000				7.861.000	15.784.000	11.440.000				100,00	100,00	94,82		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		2.332.500	4.535.000	3.430.000	-	-	-	2.332.500	4.535.000	3.180.000				100,00	100,00	92,71		
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		2.332.500	4.535.000	3.430.000				2.332.500	4.535.000	3.180.000				100,00	100,00	92,71		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1.110.000	25.869.500	30.343.700	-	-	-	1.110.000	25.869.500	25.683.700				100,00	100,00	84,64		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		1.110.000	25.869.500	30.343.700	-	-	-	1.110.000	25.869.500	25.683.700				100,00	100,00	84,64		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				8.280.000						Rp 8.280.000						100,00		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1.110.000	25.869.500	22.063.700				1.110.000	25.869.500	Rp 17.403.700				100,00	100,00	78,88		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	269.413.200	156.314.500	167.388.800	118.292.000	-	-	260.113.200	148.114.500	134.315.100	92.624.000			96,55	94,75	80,24	78,30		
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	269.413.200	156.314.500	167.388.800	118.292.000	-	-	260.113.200	148.114.500	134.315.100	92.624.000			96,55	94,75	80,24	78,30		
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				6.128.000						6.055.000						98,81		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		28.519.300	34.533.800	30.666.000				28.519.300	32.859.800	23.974.000				100,00	95,15	78,18		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		18.114.000	28.332.000	36.018.000				18.114.000	17.600.000	29.140.000				100,00	62,12	80,90		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		75.031.000	65.621.400	20.200.000				66.831.000	57.765.300	16.580.000				89,07	88,03	82,08		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		1.928.000	444.000	4.835.000				1.928.000	-	4.215.000				100,00	-	87,18		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			11.110.000						10.000.000					-	90,01	-		
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		8.663.200	3.843.600	7.000.000				8.663.200	3.000.000	3.300.000				100,00	78,05	47,14		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		6.520.000	12.500.000					6.520.000	5.255.000					100,00	42,04	-		
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		8.575.000	9.070.000	10.340.000				8.575.000	6.345.000	9.360.000				100,00	69,96	90,52		
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	39.261.000						39.261.000						100,00	-	-	-		
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.269.000						19.269.000						100,00	-	-	-		
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	210.883.200	6.964.000	1.934.000	3.105.000			201.583.200	6.964.000	1.490.000				95,59	100,00	77,04	-		
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		2.000.000						2.000.000						100,00	-	-		

Tabel 2.2 menampilkan data anggaran dan realisasi Kecamatan Bruno tahun 2021 hingga 2024. Secara umum anggaran antara Tahun 2021 – 2024 setiap tahun mengalami kenaikan, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang konsisten di atas 91%.

Namunterdapat program anggaran dan realisasi yang tidak sampai 90 % yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Tahun 2022 realisasi capaian sebesar 84,66% hal ini disebabkan penyediaan gaji dan tunjangan dimana anggarannya cukup besar dibandikan dengan kebutuhan.

Tahun 2023 Realisasi anggaran juga menunjukan penurunan tren realisasi anggaran terdapat 2 program yang realisasi anggarannya tidak mencapai 90% yakni Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sejumlah 87,52 % dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 80,24% hal ini dikarenakan pada Tahun 2023 terdapat pembatasan belanja dikarenakan tidak tercapaian pendapatan daerah untuk Bulan November dan Sesember Tahun 2023

Tahun 2024 Kecamatan Bruno terdapat 3 Program yang capaianya kurang dari 90% yakni :

1) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 87,19%
2) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan capaian 84,64%
3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 78,30%

Secara keseluruhan, Kecamatan Bruno menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	
1	Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,25	85,5	83,27	85,97	
2	Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,25	85,5	83,27	85,97	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	81,25	85,5	83,27	85,97	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	
5	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	

Dilihat dari tabel 2.1, bahwa target dan realisasi Tahun 2021 – 2024 hampir secara keseluruhan tercapai 100 %, untuk yang belum 100 % dikarenakan Tahun 2025 masih berjalan sampai Bulan April, dan diperkirakan sampai akhir tahun akan teralisasi dan tercapai.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bruno sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

1) Tuntutan dan harapan warga masyarakat terhadap perwujudan *Good Government* merupakan peluang pada Kecamatan Bruno untuk selalu meningkatkan kinerja.
2) Kepedulian dan kebersamaan pihak swasta dalam mendukung program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan.
3) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4) Para penyelenggara Pemerintah Desa belum secara optimal memahami regulasi tentang pemerintahan desa yang cenderung berubah.
5) Adanya tambahan penghasilan meningkatkan kinerja sumberdaya pegawai.
6) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana maupun pengembangan potensi alam

Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi serta identifikasinya dapat diuraikan menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isu – isu dan permasalahan berikut perlu penanganan secara komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bruno sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur Kecamatan;
2. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
3. Kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi antar instansi terkait.
4. Perlu adanya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pelayanan internal.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bruno.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

1) Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan: Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
2) Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
3) Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
4) Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
5) Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
6) Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang

dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkahlangkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bruno dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Isu strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif
	Akuntabilitas keuangan belum disertai kompetensi Sumber Daya Manusia			Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia		
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan		*Cyber insecurity*			
	Pelayanan publik prima belum merata		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			
	Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah gambaran tentang kondisi atau tujuan ideal yang ingin dicapai
di masa depan, yang berfungsi sebagai arah dan panduan dalam perencanaan serta pengambilan keputusan di pemerintahan.
visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah " Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, Dan Inovatif (Purworejo Berseri)".
Guna mencapai visi tersebut langkah-langkah strategis atau upaya yang dilakukan dalam 5 tahun kedepan yang dituangkan dalam misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
2. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
4. Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi

Untuk mewujudkan tujuan daerah "Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif' maka Kecamatan Bruno dirumuskan dengan visi Ke-5 yakni: "Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi" Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Bruno Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan Kecamatan Bruno menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah . Tujuan tersebut selaras dengan Misi 5 RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, yaitu: "Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi". Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bruno, dalam hal ini Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo diharapkan mampu menghasilkan

perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Purworejo dapat tercapai.

Secara rinci tujuan dan sasaran Kecamatan Bruno sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bruno

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	86,25	86,75	87	87,25	87,5	87,75	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	86,25	86,75	87	87,25	87,5	87,75	

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi. Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bruno. Penahapan Renstra Kecamatan Bruno dapat disajikan seperti tabel di bawah.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Kecamatan Bruno

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat	Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat	Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat
Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Purworejo, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Purworejo. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bruno secara efektif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tercantum pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bruno

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan RPJMD 2026	Arah Kebijakan RENSTRA 2026	
		Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2027	Arah Kebijakan RENSTRA 2027	
		Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
			kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2028	Arah Kebijakan RENSTRA 2028	
		Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2029	
		Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2030	Arah Kebijakan RENSTRA 2030	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
		Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Bruno ditentukanlah program, dan kegiatan dan subkegiatan yang dimiliki Kecamatan Bruno adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan internal berjalan dengan baik. Adapaun kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

   a. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

      1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat

      1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
   e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

      1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   f. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      5) Penyediaan Bahan/Material
      6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
      7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

      1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pengadaan Mebel
4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
2) Penyediaan Pelayanan Umum

i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3) Pemeliharaan Mebel
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD), berikut kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Bruno :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
   2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
   3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

   1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan dampak inisiatif pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Bruno

selain itu tujuan program ini adalah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, sehingga program sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal selain itu juga, memampukan masyarakat untuk mengelola sumber daya secara mandiri dan mengembangkan lembaga masyarakat yang terorganisir dan produktif, serta mendukung usaha ekonomi seperti UMKM untuk memperkuat perekonomian lokal Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan diantaranya yakni:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, di kecamatan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat dan menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan mendukung kesejahteraan masyarakat serta Kamtibum memfasilitasi sinergi antara pemerintah kecamatan, polisi, TNI, dan organisasi masyarakat untuk menangani isu-isu ketentraman secara efektif dan Mendukung ketertiban, keamanan, dan kondusivitas wilayah melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat , Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

    a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
        1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
        2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
    b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
        1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, bertujuan Memastikan sinergi antara pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, dan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

    a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
        1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
        2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
        3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif,

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa, Adapun kegaitan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan sebagai berikut:

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
    2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
    3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
    4) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
    5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    7) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
    8) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
    9) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
    10) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
    11) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
    12) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
    13) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bruno merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Bruno juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bruno serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bruno dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
Renstra Kecamatan Bruno

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
			Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	

Tabel 4.2.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BRUNO
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	85,97	86,75		87		87,25		87,5		87,75		87,75			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
7.01.00	KECAMATAN						2.778.436.423		2.715.605.000		2.289.682.000		2.289.682.000		2.289.682.000				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	2.778.436.423	100	2.715.605.000	100	2.289.682.000	100	2.289.682.000	100	2.289.682.000	100	Sekretariat	Kecamatan Bruno	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	21	44	4.897.000	45	5.897.000	45	5.897.000	45	5.897.000	45	5.897.000	224			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	2.629.000	22	2.629.000	22	2.629.000	22	2.629.000	22	2.629.000	110			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	22	2.268.000	22	2.268.000	22	2.268.000	22	2.268.000	22	2.268.000	110			
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	7	45	2.535.312.773	45	2.258.914.450	45	1.932.868.450	45	1.932.868.450	45	1.932.868.450	225			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	18	18	2.534.022.773	18	2.257.624.450	18	1.931.578.450	18	1.931.578.450	18	1.931.578.450	18			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	6	44	1.290.000	44	1.290.000	44	1.290.000	44	1.290.000	44	1.290.000	220			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0		11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000	44			
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000	44			
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	16	500.000	16	750.000	16	750.000	16	750.000	16	750.000	80			
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	16	500.000	16	750.000	16	750.000	16	750.000	16	750.000	80			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	17	875.000	17	875.000	17	875.000	17	875.000	17	875.000	85			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	17	875.000	17	875.000	17	875.000	17	875.000	17	875.000	85			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	69.815.200	8	71.815.200	8	71.815.200	8	71.815.200	8	71.815.200	40			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	5	10.333.000	5	10.333.000	5	10.333.000	5	10.333.000	5	10.333.000	25			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	7.473.900	15	7.473.900	15	7.473.900	15	7.473.900	15	7.473.900	63			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	11	20.084.400	1	22.084.400	1	22.084.400	1	22.084.400	1	22.084.400	15			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	3	3.382.000	3	3.382.000	3	3.382.000	3	3.382.000	3	3.382.000	15			
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	17	9.685.300	17	9.685.300	17	9.685.300	17	9.685.300	17	9.685.300	85			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	1.500.000	6	1.500.000	6	1.500.000	6	1.500.000	6	1.500.000	36			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	14.670.000	12	14.670.000	12	14.670.000	12	14.670.000	12	14.670.000	60			
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	5	2.686.600	2	2.686.600	2	2.686.600	2	2.686.600	2	2.686.600	13			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	57	0		3	197.615.900	1	99.739.900	2	99.739.900	3	99.739.900	9			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	44.250.100	1			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	52	0	0	0	0	0	0	0	0	6	44.739.900	6			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	4	0	0	4	54.739.900	0	0	4	54.739.900	0	0	8			
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	3	42.877.000	0	0	4	45.000.000	1	10.739.900	8			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	1	99.739.900	0	0	0	0	1			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	55.976.450	24	55.976.450	24	55.976.450	24	55.976.450	24	55.976.450	120			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	16.552.850	12	16.552.850	12	16.552.850	12	16.552.850	12	16.552.850	60			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	39.423.600	12	39.423.600	12	39.423.600	12	39.423.600	12	39.423.600	60			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	5	111.060.000	6	122.260.000	5	120.260.000	5	120.260.000	5	120.260.000	26			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	5			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	8	23.700.000	8	23.700.000	8	23.700.000	8	23.700.000	8	23.700.000	40			
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	2	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9	9	6.490.000	10	6.490.000	10	6.490.000	10	6.490.000	10	6.490.000	49			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	2	38.800.000	2	48.000.000	2	48.000.000	2	48.000.000	2	48.000.000	10			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	7.190.000	1	7.190.000	1	7.190.000	1	7.190.000	1	7.190.000	5			
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	85,97	86,75		87		87,25		87,5		87,75		87,75			
7.01.00	KECAMATAN						172.578.700		438.680.000		172.579.000		175.305.000		178.076.000				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	36.700.900	100	71.206.000	100	36.701.000	100	37.281.000	100	37.870.000	100	Seksi Pembangunan	Kecamatan Bruno	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	0		1	9.000.000	0		0		0		1			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	0	0	1	9.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen	2	7	36.700.900	6	62.206.000	7	36.701.000	7	37.281.000	7	37.870.000	34			
7.01.02.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	2	4.172.600	2	8.345.200	2	4.172.600	2	4.172.600	2	4.172.600	10			
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	1	2.895.600	1	3.595.400	1	2.895.700	1	2.895.700	1	3.484.700	5			
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	4	29.632.700	3	50.265.400	4	29.632.700	4	30.212.700	4	30.212.700	19			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100	100	62.334.400	100	175.840.000	100	62.334.000	100	63.319.000	100	64.320.000	100	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bruno	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen	2	7	62.334.400	7	175.840.000	7	62.334.000	7	63.319.000	7	64.320.000	35			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	2	4	7.586.400	4	21.092.000	4	7.586.000	4	8.571.000	4	8.572.000	4			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	6	54.748.000	6	154.748.000	6	54.748.000	6	54.748.000	6	55.748.000	30			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	17.183.000	100	62.344.000	100	17.183.000	100	17.454.000	100	17.730.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bruno	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	2	16.308.000	2	61.308.000	2	16.308.000	2	16.828.000	2	17.104.000	10			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	10.533.000	1	50.533.000	1	10.533.000	1	11.053.000	1	11.329.000	5			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	5.775.000	1	10.775.000	1	5.775.000	1	5.775.000	1	5.775.000	5			
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	1	1	875.000	1	1.036.000	1	875.000	1	626.000	1	626.000	5			
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	1	875.000	1	1.036.000	1	875.000	1	626.000	1	626.000	5			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	15.803.600	100	30.884.000	100	15.804.000	100	16.053.000	100	16.307.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bruno	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	2	2	15.803.600	2	30.884.000	2	15.804.000	2	16.053.000	2	16.307.000	10			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	20	90	2.990.000	80	15.000.000	60	2.990.000	60	3.239.000	60	3.493.000	350			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	12.813.600	1	15.884.000	1	12.814.000	1	12.814.000	1	12.814.000	5			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	40.556.800	100	98.406.000	100	40.557.000	100	41.198.000	100	41.849.000	100	Seksi Pemerintahan Desa	Kecamatan Bruno	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	9	8	40.556.800	9	98.406.000	8	40.557.000	8	41.198.000	8	41.849.000	41			
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	2	2.645.000	2	13.094.200	2	2.645.000	2	2.645.000	2	2.645.000	10			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	10.261.800	1	20.261.800	1	10.262.000	1	10.903.000	1	10.903.000	5			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	2	10.520.000	2	20.520.000	2	10.520.000	2	10.520.000	2	11.171.000	10			
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	1	7.520.000	1	15.200.000	1	7.520.000	1	7.520.000	1	7.520.000	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	1	2.850.000	1	5.000.000	1	2.850.000	1	2.850.000	1	2.850.000	5			
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	1	2.120.000	1	5.250.000	1	2.120.000	1	2.120.000	1	2.120.000	5			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	1	2.440.000	1	5.880.000	1	2.440.000	1	2.440.000	1	2.440.000	5			
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	1	2.200.000	1	8.200.000	1	2.200.000	1	2.200.000	1	2.200.000	5			
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	0	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
Jumlah							**2.951.015.123**		**3.154.285.000**		**2.462.261.000**		**2.464.987.000**		**2.467.758.000**				

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan public			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Monitoring Pembangunan	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas)	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi intensifikasi PBB	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi keagamaan	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka	
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Forkopimcam	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP)	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades dan Sekdes	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pilkades	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi	
			Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Penyusunan Masterplan Desa, Penyusunan Website Desa	

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, provinsi, dan kegiatan unggulan daerah, Kecamatan Bruno mengimplementasikan program Pembentukan Kecamatan Berdaya. Program ini menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi bagi kelompok difabel, perempuan, pelaku ekonomi kreatif, serta pengembangan sport center.

Sejalan dengan agenda nasional, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata pada upaya penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, penguatan pendidikan, serta perlindungan kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan lansia. Dukungan ini diwujudkan melalui fasilitasi langsung, koordinasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.

Pada tataran Kabupaten, Kecamatan Bruno berperan aktif dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pelestarian lingkungan. Melalui koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan, Kecamatan Bruno berupaya mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing wilayah. Dengan berbagai kegiatan tersebut, Kecamatan Bruno berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang

inklusif, partisipatif, dan kolaboratif, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah.

Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Dukungan Program Delegasi dan Aktivitas Kecamatan

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Fasilitasi pemberdayaan perempuan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi perlindungan anak	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi penurunan stunting	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi pendidikan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi perlindungan lansia	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi pemberdayaan disabilitas	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi tenologi tepat guna	Kecamatan	Kecamatan
		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi dan pembinaan UMKM	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi pelestaian lingkungan	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi desa wisata	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi dan pembinaan PKK	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna	Kecamatan	Kecamatan
		Fasilitasi BUMDes	Kecamatan	Kecamatan

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh,

bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bruno sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bruno

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka		70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	86,25	86,75	87	87,25	87,5	87,75	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Bruno sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									IUP
									SPM
			NIHIL						Permendagri No. 18 Tahun 2020
									Mandatory lain

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bruno yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bruno Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Bruno serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bruno setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Rencana Strategis Kecamatan Bruno sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bruno setiap tahun.
b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c) Camat Bruno wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Bruno dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo

Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XXXIX 2025
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan Kecamatan Gebang selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan visi misi kepala daerah. Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai keterpaduan antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah, serta sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian program pembangunan daerah. Renstra juga digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gebang merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta ancaman dan peluang yang mempengaruhi Kecamatan Gebang. Renstra juga berperan untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gebang.

Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :

a. Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orietasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Rentstra Perangkat Daerah.
c. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh camat Gebang selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Kecamatan Gebang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).

24. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
25. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Renstra ini disusun sebagai penjabaran operasional visi, misi, dan program kepala daerah dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gebang dalam periode Tahun 2025–2029.
2. Tujuan
   a. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dalam bentuk sasaran dan program kerja Kecamatan Gebang
   b. Menyusun dokumen perencanaan lima tahunan sebagai acuan pelaksanaan urusan program dan kegiatan Kecamatan Gebang
   c. Menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Kecamatan Gebang
   d. Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
   e. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
   f. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Gebang sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali.
   g. Sebagai instrument untuk memahami secara untuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh aparatur Kecamatan Gebang dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
   h. Menjadi instrumen pengendalian, evaluasi, dan pengawasan kinerja Kecamatan Gebang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029 terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I	Pendahuluan memuat		
	1.1	Latar Belakang	
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	
	1.3	Maksud Dan Tujuan	
	1.4	Sistematika Penulisan	
Bab II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat		
	2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
		2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

		2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
		2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
		2.1.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
		2.1.5	Kelompok Sasaran Layanan
	2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
		2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
		2.2.2	Isu strategis Perangkat Daerah
BAB III	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan memuat		
	3.1	Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	
	3.3	Strategi dan Arah Kebijakan	
Bab IV	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan memuat		
	4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
	4.2	Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah	
	4.3	Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
Bab V	Penutup memuat		
	Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.		

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Gebang menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan;
8. pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Gebang terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahkan:
   a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan Desa;
4. Seksi Pembangunan;
5. Seksi Pemerintahan Umum, Kententraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Jabatan Fungsional; dan
8. Kelurahan.

Tugas dan fungsi menurut struktur dan susunan organisasi Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:

1. Camat

   Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas kecamatan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

   Tugas Camat dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum yaitu membentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di

tingkat kecamatan. Susunan pimpinan dan anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan adalah sebagai berikut:

1) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud diketuai oleh Camat;
2) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
3) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; dan c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa meliputi:

a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;
e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian asministrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Fungsi sekretariat adalah sebagai berikut:

a. pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;

d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawalian, dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi bagian Sekretariat Kecamatan Gebang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
Subbagian Perencanaan dan Keuangan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan yang meliputi:
1. Merencanakan, menganggarkan dan mengevaluasi kinerja;
2. Melaksanakan pengadministrasian keuangan; dan
3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas danjabatannya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis,melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi;
1. Melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
2. Melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
3. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
4. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang;
5. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
6. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
7. Menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

3. Seksi Pemerintahan Desa;
Seksi Pemerintahan Desa bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa yang meliputi:
a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;

h. melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
j. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
m. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n. melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
o. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
p. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
q. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
r. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

4. Seksi Pembangunan;
Seksi Pembangunan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;
3. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
b. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
2. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
1. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
2. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
3. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;

4. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

5. Seksi Pemerintahan Umum, Kententraman dan Ketertiban Umum;

   Seksi Pemerintahan Umum, Kententraman dan Ketertiban Umum bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi:

   a. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi; 1) Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan; 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
   b. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
   c. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:
      1. Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
      2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      3. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
      4. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
      5. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
      6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
      8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
   d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

   Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
    1. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
    2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi;
    1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
    2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
    3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

7. Jabatan Fungsional;
   Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.
8. Kelurahan.
   Kelurahan bertugas membantu camat:
   a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
   b. Melaksanakan kegiatan evaluasi kelurahan;
   c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
   d. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
   e. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
   f. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
   g. Melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
   h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
   i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Bagan Organisasi Kecamatan

CAMAT
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKSI PEMERINTAHAN DESA
SEKSI PEMBANGUNAN
SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN
JABATAN FUNGSIONAL

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Dalam melaksanana tugas dan fungsinya, tahun 2025 Kecamatan Gebang memiliki pegawai sebanyak 28 orang, dengan rincian PNS sebanyak 19 orang, PPPK sebanyak 4 orang, dan tenaga non ASN sebanyak 5 orang dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Berdasarkan golongan
   - Golongan IV 2 orang
   - Golongan III 11 orang
   - Golongan II 6 orang
   - PPPK Golongan VII 2 orang
   - PPPK Golongan V 2 orang
   - Non ASN 5 orang

   TOTAL 28 orang

b. ASN berdasarkan pendidikan

- SD: 0 orang
- SMP : 0 orang
- SMA : 9 orang
- D1: 0 orang
- D2: 0 orang
- D3: 3 orang
- D4: 0 orang
- S1 : 8 orang
- S2 : 3 orang

Dengan kondisi ini, diharapkan Kecamatan Gebang dapat menuntaskan program dan kegiatan dengan baik.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Guna mewujudkan visi-misi Bupati Purworejo tahun 2021-2025, diperlukan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi. Kecamatan Gebang memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah khususnya melalui pelaksanaan fungsi perangkat daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketenteraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat,

Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Purworejo sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ditetapkan tujuan sebagai pedoman gerak operasional pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Gebang, yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik”. Secara teknokrasi selanjutnya dirumuskan sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Gebang yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang digunakan untuk mengukur tujuan dan sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik, terjadi peningkatan yang konsisten. Target IKM tahun 2025 adalah sebesar 83,65, sementara realisasinya pada semester I berhasil mencapai 82,97, atau setara dengan 99,19% dari target. Hal serupa juga terlihat pada tingkat capaian tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terus membaik dan mendapat respon positif dari pengguna layanan.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Gebang berdasarkan sasaran/target renstra PD 2021-2025. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan PD mengacu pada hasil kerja periode Renstra sebelumnya. Untuk menjelaskan kinerja pelayanan perangkat daerah, maka kami sajikan Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gebang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	11	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*23*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				80,66	80,66	81,25	82,25	83,65		81,57	80,66	82,86	83,63			101,13 %	100,00 %	101,98 %	101,68 %		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				80,66	80,66	81,25	82,25	83,65		81,57	80,66	82,86	83,63			101,13 %	100,00 %	101,98 %	101,68 %		
3	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
5	Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		

	Masyarakat Desa/ Kelurahan																				
6	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" disebabkan:

1) Komitmen Camat Gebang dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dan *clean governance*
2) Fokus dalam meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana layanan serta kinerja aparatur yang meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan
3) Adanya hubungan yang baik dalam menjalin koordinasi antar Perangkat Daerah, Masyarakat, maupun Instansi Vertikal
4) Tersedianya kanal aduan masyarakat yang terintegrasi dengan kanal aduan Kecamatan Gebang

Keberhasilan capaian sasaran strategis bukan berarti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gebang tidak menemui tantangan dan hambatan sama sekali. Beberapa tantangan dan hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:

1) Kompetensi pegawai yang belum merata
2) Dinamika permasalahan di wilayah yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang terbatas
3) Standar pelayanan yang telah ditetapkan belum diketahui secara luas oleh pengguna layanan

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang didukung indikator sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, Kecamatan Gebang telah melakukan upaya untuk konsisten mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja dalam pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dengan berbagai aktivitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut adalah:

- Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah teknis dan stakeholder lainnya guna memastikan kebijakan yang disusun dapat terlaksana dengan optimal
- Melaksanakan pembinaan SDM Kecamatan Gebang untuk meningkatkan pelayanan
- Melaksanakan publikasi Standar Pelayanan yang telah ditetapkan baik melalui *online* maupun *offline*
- lebih responsif terhadap keluhan masyarakat atau pengguna layanan.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gebang dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dilakukan analisis terhadap capaian anggaran selama lima tahun terakhir, yaitu 2021 hingga 2026. Analisis capaian anggaran periode 2021–2026 bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi tren pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun. Untuk menjelaskan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gebang, maka kami sajikan Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gebang

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.950.822.093	2.267.376.604	2.362.359.718	2.596.313.580	2.666.719.992	3.161.488.610	2.813.274.429	3.035.345.100	3.124.523.194	3.052.730.037	0	0	95	134	132	118		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.303.000	22.665.600	23.614.200	24.605.000	25.636.000	750.000	10.868.200	16.506.600	21.587.200	4.000.000			96	73	91	16		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.750.161.554	1.924.488.304	1.728.350.718	2.044.029.780	2.248.211.492	2.848.714.410	2.615.457.060	2.726.618.075	2.615.253.249	2.713.656.312			95	142	151	133		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	3.232.800	3.232.800	3.232.800	795.000	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0		
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0,00	0,00-	11.800.000	11.800.000	11.800.000	125.000	0,00	0,00	703.400	0,00			6	0	6	0		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.829.800	121.441.900	125.930.200	129.270.000	141.457.700	79.486.200	38.667.400	112.582.460	95.591.100	105.310.800			100	93	76	81		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	255.822.500	150.000.000	0,00	0,00	0,00	12.867.000	250.000.000	45.000.000			0	0	98	30		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.915.307	88.936.800	99.163.000	114.045.000	112.051.000	101.728.000	75.295.537	86.490.025	91.735.593	99.743.023			98	97	93	87		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.612.432	109.844.000	114.446.300	119.331.000	124.331.000	129.890.000	72.986.232	80.280.940	49.652.652	85.019.902			99	73	43	71		
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	139.837.792	46.603.600	68.615.300	75.397.400	77.413.700	370.000	132.852.992	30.540.252	32.214.072	25.612.140	0	0	95	66	47	34		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	127.523.200	33.787.600	42.031.700	48.281.400	49.743.700	370.000	120.538.400	17.617.000	19.196.000	8.805.000			95	52	46	18		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12.314.592	12.816.000	13.328.600	13.861.000	14.415.000	0,00	12.314.592	12.923.252	13.018.072	16.807.140			100	101	98	121		

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	242.129.700	135.222.000	96.655.200	106.171.800	109.038.000	643.506.300	240.850.066	1.126.860.250	717.391.250	701.850.550	0	0	99	833	742	661		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	47.190.000	27.190.000	27.190.000	27.190.000	84.711.300	0,00	116.631.000	78.126.000	170.404.000			0	247	287	627		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	242.129.700	88.032.000	69.465.200	78.981.800	81.848.000	558.795.000	240.850.066	1.010.229.250	717.391.250	531.446.550			99	1148	1033	673		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.903.000	38.878.000	22.179.300	24.378.900	25.051.000	3.180.000	49.763.000	18.894.000	27.530.000	10.420.000	0	0	100	49	124	43		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	49.903.000	29.737.000	17.608.800	19.808.400	19.980.500	3.180.000	49.763.000	14.443.000	18.139.000	7.430.000			100	49	103	38		
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	19.773.800	4.826.900	4.521.800	4.705.100	16.360.000	0,00	16.303.400	43.462.800	24.370.000	0	0	0	82	900	539		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	19.773.800	4.826.900	4.521.800	4.705.100	16.360.000	0,00	16.303.400	43.462.800	24.370.000			0	82	900	539		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	213.597.200	231.386.300	135.580.900	148.900.700	152.933.300	37.558.000	207.897.000	200.941.200	151.504.000	93.982.000	0	0	97	87	112	63		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	213.597.200	231.386.300	135.580.900	148.900.700	152.933.300	37.558.000	207.897.000	200.941.200	151.504.000	93.982.000			97	87	112	63	0	NA

Tabel tersebut mengambarkan kinerja pengelolaan pendanaan periode Renstra 2021 – 2026, melebihi dengan target. Untuk pendapatan rata – rata melebihi target 100 %. Belanja Tidak Langsung sesuai dengan target karena merupakan kebutuhan rutin gaji pegawai Kecamatan Gebang. Belanja langsung, tercapai sesuai target. Ada beberapa tahun periode ada pengusulan penambahan pagu pada perubahan anggaran untuk rehab dan belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor. Capaian Realisasi Anggaran tersebut mengacu pada Tujuan dan sasaran Kecamatan Gebang.

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		80,66	80,66	81,25	82,25	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		80,66	80,66	81,25	82,25	
3	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan		100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	100%	100%	100%	

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengembangan pelayanan perangkat daerah di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo pada lima tahun mendatang menghadapi sejumlah tantangan sekaligus membuka berbagai peluang strategis. Hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Purworejo, serta KLHS menunjukkan

bahwa dinamika pembangunan daerah menuntut pelayanan publik yang semakin adaptif, responsif, dan inovatif.

Dari sisi tantangan, Kecamatan Gebang masih menghadapi kesenjangan kualitas sumber daya manusia aparatur, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi dan kemampuan analisis pelayanan berbasis data. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk aksesibilitas di beberapa wilayah pedesaan, menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan layanan. Telaahan terhadap RTRW Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa perkembangan tata ruang dan pertumbuhan wilayah menuntut perangkat daerah lebih adaptif dalam mengantisipasi kebutuhan pelayanan, misalnya terkait peningkatan mobilitas masyarakat, perubahan fungsi lahan, serta perkembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari hasil analisis KLHS, isu lingkungan seperti kerentanan bencana alam (banjir), degradasi lingkungan, dan keterbatasan daya dukung lahan menjadi tantangan tambahan bagi pelayanan publik, terutama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

Meski demikian, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Gebang. Pertama, arah kebijakan nasional dan provinsi yang menekankan pada transformasi digital pelayanan publik menjadi momentum untuk memperkuat inovasi layanan berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat secara daring. Kedua, dukungan masyarakat serta meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas mendorong perangkat daerah untuk membangun layanan yang lebih partisipatif dan responsif. Selain itu, hasil analisis KLHS menunjukkan adanya peluang penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat diintegrasikan dalam inovasi pelayanan publik ramah lingkungan.

Dengan mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, Kecamatan Gebang diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo mencakup seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan yang berada dalam wilayah administrasi kecamatan. Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Gebang memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kelompok sasaran memperoleh pelayanan yang adil, mudah diakses, dan berkualitas.

Sasaran utama pelayanan adalah masyarakat umum, yaitu seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Gebang. Mereka menjadi penerima layanan administrasi pemerintahan, kependudukan, perizinan sederhana, serta berbagai fasilitasi program pembangunan. Selain itu, pemerintah desa beserta perangkatnya menjadi kelompok sasaran penting mengingat peran desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kecamatan hadir untuk memberikan pembinaan, pendampingan, serta koordinasi agar penyelenggaraan

pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Kelompok lain yang menjadi perhatian adalah masyarakat rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. Mereka memerlukan layanan publik yang inklusif, perlindungan sosial, serta akses yang lebih mudah terhadap program-program pemerintah. Di sisi lain, pelaku ekonomi lokal seperti petani, pedagang, dan pelaku UMKM juga menjadi sasaran layanan melalui fasilitasi perizinan, penguatan kapasitas usaha, dan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selain itu, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kelompok kepemudaan juga menjadi kelompok sasaran layanan yang penting. Mereka memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat kecamatan maupun desa. Sementara itu, dari sisi internal pemerintahan, aparatur sipil negara dan perangkat daerah lain juga menjadi kelompok sasaran dalam rangka koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan lintas sektor di tingkat kecamatan.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Gebang tidak hanya berfokus pada masyarakat secara umum, tetapi juga mencakup kelompok rentan, pelaku usaha, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga aparatur pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan kecamatan bersifat menyeluruh dan inklusif, guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Gebang

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Kecamatan Gebang:

1. Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal
2. Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah
3. Pelayanan publik prima belum merata
4. Kurangnya SDM di Kecamatan dan Kelurahan
   Keterbatasan SDM di wilayah Kecamatan Gebang dan Kelurahan Sucenjurutengah menyebabkan kinerja yang ada menjadi kurang optimal.
5. Kompetensi pegawai yang belum merata
   Masih terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur di seksi-seksi yang ada di kecamatan
6. Sarana dan Prasarana yang belum memadai
7. Masih Terbatasnya Sistem dan Inovasi Layanan Berbasis Teknologi Informasi
   Penggunaan aplikasi dan sistem digital dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga pelayanan internal maupun eksternal masih cenderung manual, memerlukan waktu lama, dan kurang efisien.
8. Dinamika permasalahan di wilayah yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang terbatas
9. Standar pelayanan yang telah ditetapkan belum diketahui secara luas oleh pengguna layanan

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu utama yang perlu mendapat perhatian yaitu penguatan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif untuk menjawab tantangan rendahnya akuntabilitas kinerja; peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah guna memperkuat stabilitas dan daya saing; percepatan transformasi digital pelayanan publik sebagai respon atas tuntutan era digital dan ancaman keamanan siber; pemerataan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah; serta penguatan stabilitas, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat agar tercipta lingkungan yang kondusif dalam mendukung pembangunan. Isu Strategis berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, serta keterkaitannya dengan isu KLHS RPJMD 2025–2029 dan dinamika lingkungan global, nasional, maupun regional, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif
	Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah			Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia		
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan		Cyber insecurity			
	Pelayanan publik prima belum merata		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			
	Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Visi Pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2025-2030 yaitu : “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Visi ini merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021 – 2026.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi. Misi merupakan sebuah komitmen bersama yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan guna mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri) 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2030 diwujudkan dalam “Purworejo Berseri”.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Kecamatan Gebang mendukung Misi ke 5, yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif, serta berbasis teknologi informasi”, maka ditetapkan tujuan strategis perangkat daerah Kecamatan Gebang yaitu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih terukur, yaitu: “Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah”.

Dengan demikian, indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan ini adalah:

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029

Tujuan Utama dari Kecamatan Gebang dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029 adalah meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan ini merupakan wujud komitmen Kecamatan Gebang dalam meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi.

Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, Kecamatan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Pertama, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang mencerminkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik berbasis hasil. Target nilai SAKIP terus mengalami peningkatan setiap tahun, dari 68,02 di tahun 2025 menjadi 77,76 pada tahun 2029. Kedua, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) yang menunjukan kapasitas dan keberhasilan Kecamatan Gebang dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di bidang pelayanan publik. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) meningkat setiap tahunnya dari 92,02 pada tahun 2025 menjadi 92,20 pada tahun 2029.

Untuk mewujudkan tujuan strategis meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Kecamatan Gebang menetapkan 2 (dua) sasaran utama dalam indikator dan target periode 2025-2029:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
   Sasaran ini ditujukan untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja yang sistematis, terukur, dan berorientasi hasil di seluruh perangkat daerah. Ukurannya menggunakan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang menunjukkan tingkat penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target nilai SAKIP meningkat secara bertahap dari 68,02 pada tahun 2025 menjadi 77,76 di tahun 2029. Ini mencerminkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola kinerja melalui perencanaan, pelaporan, dan evaluasi yang lebih baik.
2. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat
   Sasaran ini berfokus pada penguatan kualitas layanan kepada masyarakat agar terciptanya pelayanan publik yang prima. Sasaran ini diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah). Target Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) meningkat setiap tahunnya dari 92,02 pada tahun 2025 menjadi 92,20 pada tahun 2029. Peningkatan IKM ini menunjukan komitmen untuk meningkatkan pelayanan yang optimal.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gebang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	83,65	83,7	83,9	84	84,2	84,4	
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	83,65	83,7	83,9	84	84,2	84,4	

1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah, Kecamatan Gebang merumuskan sejumlah strategi utama yang diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Strategi-strategi ini merupakan bentuk operasionalisasi dari visi dan misi daerah, sekaligus menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Arah Kebijakan Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Arah kebijakan ini fokus pada penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan,

Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa.

Dapat kita lihat pada tabel 3.2 strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Gebang

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan RPJMD 2026	Arah Kebijakan RENSTRA 2026	
		Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2027	Arah Kebijakan RENSTRA 2027	
		Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan	

			HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2028	Arah Kebijakan RENSTRA 2028	
		Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2029	
		Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat	

			desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2030	Arah Kebijakan RENSTRA 2030	
		Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

1.4. Arah Kebijakan Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Arah kebijakan ini fokus pada penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/

kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN , DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      3. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   a. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   a. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
      1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
   a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
      2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
   a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      5. Penyediaan Bahan/Material
      6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
      7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1. Pengadaan Mebel
      2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
      4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   3. Pemeliharaan Mebel
   4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
      2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
      1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
      2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
      1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
      2. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
      3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
      2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
5. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
6. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
7. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Dari uraian tersebut di atas secara rinci rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan hingga aktivitas sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 berikut ini :

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD							
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**KET**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Mebel	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
			Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

					Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	

					Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

Tabel 4.2.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	83,63	83,7		83,9		84		84,2		84,4		84,4			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
07:01	KECAMATAN						3.161.488.610		3.187.049.000		2.991.050.000		2.991.050.000		2.991.050.000				
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	3.161.488.610	100	3.187.049.000	100	2.991.050.000	100	2.991.050.000	100	2.991.050.000	100	Sekretariat	Kecamatan Gebang	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	21	2	750.000	2	750.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	13			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	500.000	21	500.000	21	500.000	21	500.000	21	500.000	106			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	250.000	21	250.000	21	250.000	21	250.000	21	250.000	90			
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	1	250.000	1	250.000	1	250.000	3			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	27	45	2.848.714.410	45	2.848.023.906	45	2.781.855.296	45	2.781.855.296	45	2.781.855.296	225			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	29	29	2.848.339.410	29	2.847.773.906	29	2.781.605.296	29	2.781.605.296	29	2.781.605.296	202			
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	6	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	26	250.000	44	250.000	44	250.000	44	250.000	44	250.000	202			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0		6	125.000	6	125.000	6	125.000	6	125.000	24			
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	6	125.000	6	125.000	6	125.000	6	125.000	24			
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	12	125.000	12	125.000	12	125.000	12	125.000	12	125.000	60			
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	12	125.000	12	125.000	12	125.000	12	125.000	12	125.000	60			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	1	795.000	2	1.045.000	2	1.045.000	2	1.045.000	2	1.045.000	9			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	4			
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	1	795.000	1	795.000	1	795.000	1	795.000	1	795.000	5			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Admiaistrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	9	7	79.486.200	7	79.486.200	7	79.486.200	7	79.486.200	7	79.486.200	35			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	6.863.500	2	6.863.500	2	6.863.500	2	6.863.500	2	6.863.500	10			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	7.032.000	2	7.032.000	2	7.032.000	2	7.032.000	2	7.032.000	10			

7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	30.870.000	2	30.870.000	2	30.870.000	2	30.870.000	2	30.870.000	10			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	9.142.000	2	9.142.000	2	9.142.000	2	9.142.000	2	9.142.000	10			
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	2	16.229.700	2	16.229.700	2	16.229.700	2	16.229.700	2	16.229.700	10			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	8.554.000	12	8.554.000	12	8.554.000	12	8.554.000	12	8.554.000	60			
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	12	795.000	12	795.000	12	795.000	12	795.000	12	795.000	60			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	0	0		12	55.560.390	0		0		0		12			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	4	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	2	38.000.000	0	0	0	0	0	0	2			
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	2	5.560.390	0	0	0	0	0	0	2			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	4	8.000.000	0	0	0	0	0	0	4			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	101.728.000	24	107.603.504	12	33.083.504	12	33.083.504	12	33.083.504	84			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	27.208.000	12	33.083.504	12	33.083.504	12	33.083.504	12	33.083.504	60			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	74.520.000	12	74.520.000	0	0	0	0	0	0	24			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	38	5	129.890.000	5	94.330.000	5	94.330.000	5	94.330.000	5	94.330.000	25			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	5			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11	19.750.000	11	19.750.000	11	19.750.000	11	19.750.000	11	19.750.000	55			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	8	8.600.000	8	8.600.000	8	8.600.000	8	8.600.000	8	8.600.000	40			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	3	60.560.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	15			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	11	6.100.000	11	6.100.000	11	6.100.000	11	6.100.000	11	6.100.000	55			
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	83,63	83,7		83,9		84		84,2		84,4		84,4			
07:01	KECAMATAN						142.179.300		213.593.300		142.179.300		149.953.000		160.981.000				
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	370.000	100	11.742.000	100	370.000	100	376.000	100	382.000	100	Seksi Pembangunan	Kecamatan Gebang	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	1	370.000	1	11.742.000	1	370.000	1	376.000	1	382.000	5			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	370.000	1	11.742.000	1	370.000	1	376.000	1	382.000	5			
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100	100	84.711.300	100	84.711.300	100	84.711.300	100	94.839.000	100	105.207.000	100	Seksi Pemberdayaan	Kecamatan Gebang	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen	2	2	84.711.300	2	84.711.300	2	84.711.300	2	94.839.000	2	105.207.000	10			

7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	25	25	11.710.000	25	11.710.000	25	11.710.000	25	11.710.000	25	11.710.000	125			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	4	73.001.300	4	73.001.300	4	73.001.300	4	83.129.000	4	93.497.000	20			
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	3.180.000	100	5.755.000	100	3.180.000	100	3.230.000	100	3.281.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gebang	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	1	3.180.000	1	5.755.000	1	3.180.000	1	3.230.000	1	3.281.000	5			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	3.180.000	1	5.755.000	1	3.180.000	1	3.230.000	1	3.281.000	5			
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	16.360.000	100	35.694.000	100	16.360.000	100	13.357.000	100	13.357.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gebang	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	2	6	16.360.000	5	35.694.000	3	16.360.000	3	13.357.000	3	13.357.000	20			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	0	0	0	75	9.794.000	0	0	0	0	0	0	75			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	30	0	0	30	9.540.000	0	0	0	0	0	0	30			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	2	6	16.360.000	3	16.360.000	3	16.360.000	3	13.357.000	3	13.357.000	18			
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	37.558.000	100	75.691.000	100	37.558.000	100	38.151.000	100	38.754.000	100	Seksi Pemerintahan Desa	Kecamatan Gebang	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	8	4	37.558.000	7	75.691.000	6	37.558.000	6	38.151.000	6	38.754.000	29			
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	24	2	3.074.000	2	9.222.000	2	3.074.000	2	3.074.000	2	3.074.000	10			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	24	3	1.590.000	3	9.540.000	3	9.000.000	3	1.590.000	3	9.000.000	12			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	24	3	5.294.000	3	15.882.000	3	5.294.000	3	13.297.000	3	6.490.000	15			
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	2	17.490.000	2	17.490.000	2	17.490.000	2	17.490.000	2	17.490.000	10			
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	1	7.965.000	1	16.087.000	0	0	0	0	0	0	2			
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	1	1.590.000	1	6.360.000	1	1.590.000	1	1.590.000	1	1.590.000	5			

7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	1	555.000	1	1.110.000	1	1.110.000	1	1.110.000	1	1.110.000	5		
Jumlah							**3.303.667.916**		**3.400.642.300**		**3.133.229.300**		**3.141.003.000**		**3.152.031.000**			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN LUGOSOBO
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka															
07.01	KECAMATAN						558.795.000		585.305.700		558.794.700		558.835.000		558.795.000				
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%			558.795.000		585.305.700		558.794.700		558.835.000		558.795.000		Kelurahan Lugosobo	Kelurahan Lugosobo	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dokumen	1	1	558.795.000	1	585.305.700	1	558.794.700	1	558.835.000	1	558.795.000	5	Kelurahan Lugosobo		
			Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dokumen													Kelurahan Lugosobo		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	10	2	558.795.000	2	585.305.700	2	558.794.700	2	558.835.000	2	558.795.000	10	Kelurahan Lugosobo		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1		1		1		1		1		5	Kelurahan Lugosobo		
Jumlah							**558.795.000**		**585.305.700**		**558.794.700**		**558.835.000**		**558.795.000**				

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah					
NO	**PROGRAM PRIORITAS**	**OUTCOME**	**KEGIATAN/ SUBKEGIATAN**	**AKTIFITAS**	**KET.**
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan	

				Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Forkopimcam	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP)	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades dan Sekdes	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pilkades	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	

1.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diarahkan pada Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa; Peningkatan Partisipasi masyarakat meliputi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gebang. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Dimana mereka ikut ambil bagian dalam kegiatan persebut. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan keluharan juga diarahkan pada Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan; Gerakan sayang ibu dan anak, Kecamatan layak Anak, Pembinaan Karang Taruna, Pembinaan BUMDes/BUMDesma, Pembinaan dan Fasilitasi UMKM serta Pendampingan Koperasi Merah Putih dimana Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAK Asasi Manusia (HAM), Membangun Desa dari Bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas serta Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum diarahkan pada Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan; Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. Sedangkan Program Delegasi Provinsi yang didukung yaitu Mendorong Penguatan Forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan. Serta Mendukung Program Pitulungan Bupati Purworejo Religius Masyarakate.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diarahkan pada Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Penyelenggaraan HUT RI serta Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan. Program ini mendukung Program Nasional Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAK Asasi Manusia (HAM) serta mendukung Program Delegasi Provinsi Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa diarahkan pada Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa; Penyelenggaraan fasilitasi Penyusunan APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP. Program ini mendukung Program Nasional Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan. Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga diarahkan pada Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Sekretaris Desa; Kegiatan Konferensi Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Dimana program ini mendukung Delegasi Provinsi Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance

melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa.

1.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah dan digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gebang sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Tujuan dan Sasaran PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	83,65	83,7	83,9	84	84,2	84,4	Tujuan dan Sasaran PD

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Gebang yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Gebang Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Gebang, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gebang setiap tahunnya.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Rencana Strategis Kecamatan Gebang sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Gebang setiap tahun.
b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c) Camat Gebang wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan

mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

YULI HASTUTI

LAMPIRAN XL
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya ditandai dengan pelaksanaan pembangunan, diawali dengan proses perencanaan yang matang meliputi aspek mekanisme, sistem, maupun substansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka menghasilkan suatu rencana yang tepat mutu dan tepat sasaran, proses perencanaan memerlukan keterlibatan semua lapisan masyarakat serta menghilangkan sifat-sifat keberpihakan sehingga netralitas dan kualitas perencanaan pembangunan dapat terjaga.

Salah satu kebutuhan perencanaan daerah adalah Rencana strategis (Renstra). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses

perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Purworejo. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Loano dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni :

a. Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang;
b. Bagaimana cara mencapainya dan;
c. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan Rencana Strategis (Renstra), Kecamatan Loano melakukan berbagai langkah, seperti menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, dan mengimplementasikan strategi. Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapperida dan pemangku kepentingan. Dokumen Renstra Perangkat Daerah di susun dengan tahapan :

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

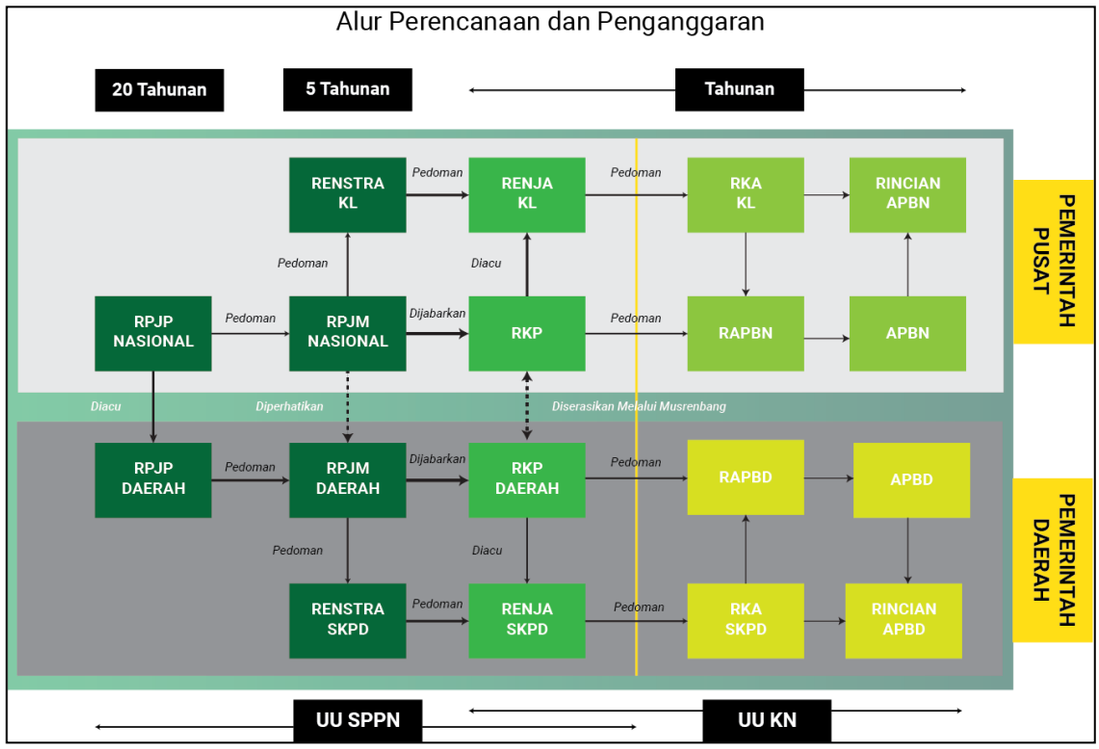

Sumber *UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003*

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Loano yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purworejo dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Loano . Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Loano dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

h. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).

m. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo adalah :

a. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan yang di sertai indikator kinerja, target dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Loano yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029;

b. Mempermudah pengendalian program, kegiatan, sub kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;

c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo adalah :

a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Purworejo untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.

b. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Loano selama kurun waktu 5 Tahun.

c. Sebagai instrumen untuk memudahkan Kecamatan Loano dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan cara menyusun program, kegiatan, sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

d. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh aparatur Kecamatan dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan;

e. Sebagai tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Loano selama kurun waktu 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV ROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah
- 4.3Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran Pelayanan Pemerintah Kecamatan Loano pada tahun 2025 memprioritaskan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai kewenangan Kecamatan, yaitu perbaikan sistem selalu dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dalam rangka kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah sesuai dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dalam rangka itu maka sistem perencanaan yang berbasis kinerja, atau perencanaan yang disusun berdasarkan prioritas kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diperlukan masyarakat, menjadi kebijakan umum perangkat daerah Kecamatan Loano.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran PD Tahun 2025-2029 Kecamatan Loano menyusun rencana strategi dengan mengadakan evaluasi pencapaian realisasi kinerja pada 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2020-2024. Realisasi pencapaian Renstra dari Tahun 2020-2024 tercapai sesuai target atau 100% bahkan di tahun terakhir untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dengan target 83,00 tercapai 84,04 atau 101%. Faktor keberhasilan realisasi pencapaian Renstra Tahun 2020-2024 antara lain:

1) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para ASN kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2) Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3) Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Loano dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;

5) Akses informasi yang lebih cepat, tepat dengan tehnologi informasi sehingga mempermudah peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelayanan di Kecamatan Loano.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo, bahwa Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Camat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
j. Menyelenggarakan fungsi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas:

a. Camat;
b. Sekretariat, membawahkan:
   1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian
c. Seksi Pemerintahan Desa;
d. Seksi Pembangunan;
e. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
g. Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Loano

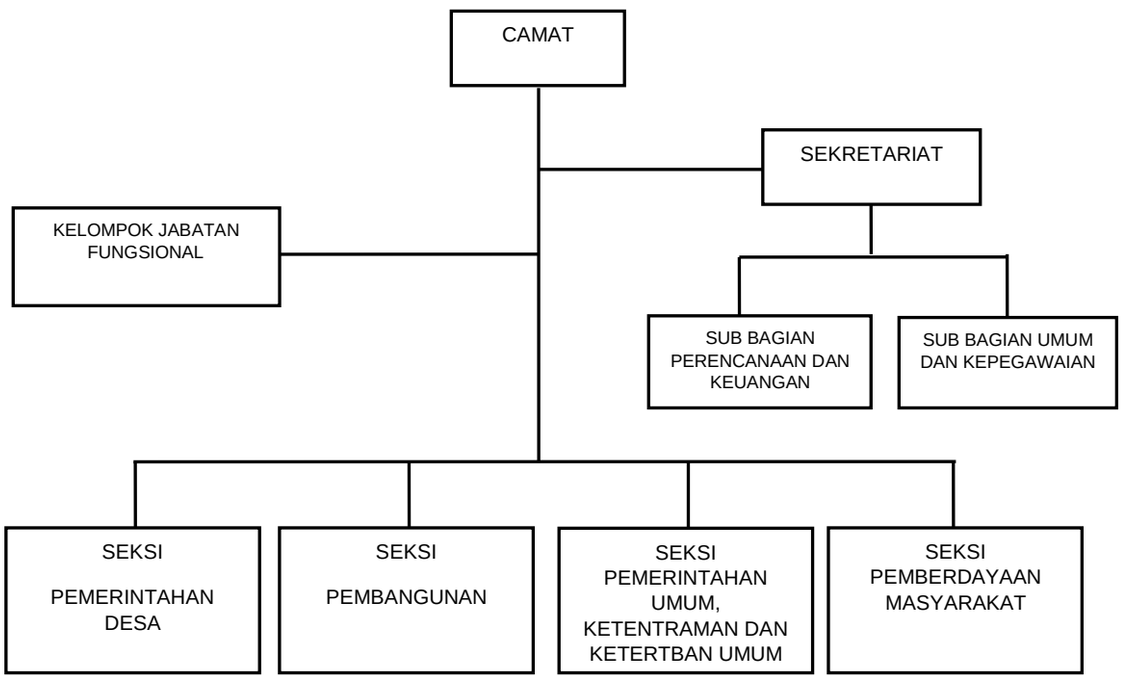

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Gambaran Umum Wilayah

Kecamatan Loano adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Loano memiliki luas wilayah 53,65 Km^2 dan terletak pada ketinggian ± 138 (m) *Altitude*, Kecamatan Loano berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bener
- Sebelah Timur : Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kaligesing
- Sebelah Barat : Kecamatan Gebang.

Secara administrasi Kecamatan Loano terbagi menjadi 21 (dua puluh satu) Desa yaitu :

1. Kalinongko
2. Trirejo
3. Karangrejo
4. Kalikalong
5. Rimun
6. Tepansari
7. Kaliglagah
8. Tridadi
9. Banyuasi Separe
10. Guyangan
11. Kalisemo
12. Loano
13. Jetis
14. Maron
15. Kedungpoh
16. Kebongunung
17. Mudalrejo
18. Kemejing
19. Banyuasin Kembaran
20. Sedayu
21. Ngargosari

2.1.2.2 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Kecamatan Loano per tanggal 31 Desember 2024 sejumlah 19 (sembilan belas) Orang. Terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 8 (delapan) Orang, Pengadministrasi 7 (tujuh) Orang dan Non ASN sebanyak 4 (empat) Orang.

Tabel 2.2

Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-3.	SMA	SMP	
1	IV/b	1					1
2	III/d		3				3
3	III/c		1				1
4	III/b		2				2
5	III/a			2			2
6	II/d				2		2
7	II/c				1	1	2
8	II/b				1		1
9	VII				1		1
10	Non ASN		1		3		4
Jumlah		1	7	2	8	1	19
Total Pegawai							

(Sumber : Daftar Nominatif Kecamatan Loano per tanggal 31 Desember 2024)

Tabel 2.3

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

No	Eselon	Banyaknya	Keterangan
1	III a	1	Camat
2	III b	1	Serkretaris Camat
3	IV a	4	Kepala Seksi
4	IV b	2	Kepala Sub Bagian
Jumlah		8	

(Sumber : Daftar Nominatif Kecamatan Loano per tanggal 31 Desember 2024)

2.1.2.3 Sarana dan Prasarana

Kondisi aset tetap Kecamatan Loano berdasarkan saldo neraca per : 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.671.687.574,76 (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat koma tujuh puluh enam sen rupiah) terdiri dari :

1. Tanah	3.323 m²	Rp.	1.600.000,00
2. Gedung dan Bangunan	5 unit	Rp.	1.881.633.584,75
3. Peralatan dan Mesin	63 jenis	Rp.	848.409.017,33
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	35 m	Rp.	32.622.600,00

Tabel 2.4

Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2024

No	Nama Barang	Jml satuan		Thn perolehan	Harga (dlm ribuan)	Asal usul	Kondisi
1	Tanah	3323	M2	1992	1.600	Pembelian	Baik
2	Gedung kantor permanen	1	Paket	2015	1.701.227,17	Pembelian	Baik
3	Gedung kantor permanen UPT PAK	1	Unit	2012	100.970.07	Pembelian	Baik
4	Gedung Kantor Lain-lain	1	Unit		1.150,00	Pembelian	Baik
5	Gedung Kantor Lain-lain	1	Unit	2017	13.955,50	Pembelian	Baik
6	Garasi/Pool semi permanen	9931	M2	2015	64.330,85	Pembelian	Baik
7	Rambu Bersuar Lalin Darat Lain-lain	1	Unit	2017	2.255,89	Pembelian	Baik
8	Stasion Wagon Toyota Avanza 1,5 G M/T	1	Unit	2023	253.021,00	Pembelian	Baik
9	Spm ”Honda Win”	1	Unit	1997	6.200	Pembelian	RB
10	Spm ”Honda Win”	1	Unit	2003	9.254	Pembelian	RB
11	Spm ”Yamaha”	1	Unit	2012	3.900	Pelimpahan	RB
12	Spm ”Honda Win”	1	Unit	2012	9.580	Pembelian	RR
13	Spm ”Ymh Vixion”	1	Unit	2015	24.533	Pembelian	Baik
14	Spm ”Honda Verza”	3	Unit	2015	54.975,75	Pembelian	Baik
15	Spm ”Honda Supra”	1	Unit	2015	16.597,25	Pembelian	Baik
16	Lemari Besi	2	Unit	1984	250	Pembelian	Baik
17	Rak Besi/Metal	8	Unit	1987/97/2015	8.569,50	Pembeian	Baik
18	Filling Besi/Metal	4	Unit	2000/2015	10.590	Pembelian	RR/RB
19	Ban kas	1	Unit	2011	493,45	Droping Pemda	Baik

No	Nama Barang	Jml satuan		Thn perolehan	Harga (dlm ribuan)	Asal usul	Kondisi
20	Lemari Kaca	1	Unit	2016	4.314	Pembelian	Baik
21	Lemari Kayu	4	Unit	1997/2012	3.400	Pembelian	RB/B
22	Papan Visual	9	Unit	2012/2014	4.333,33	Pembelian	RR
23	Mesin Absensi	1	Unit	2017	4.596,84	Pembelian	Baik
24	Display	2	Unit	2009	555,70	Pembelian	Baik
25	Alat Kantor Lainnya	8	Unit	2013/18/19	6.590	Pembelian	Baik
26	Rak Kayu	1	Unit	2017	3.841,91	Pembelian	Baik
27	Meja Kayu	1	Unit	2017	771,51	Pembelian	Baik
28	Kursi Kayu	21	Unit	2012/17	1.870,45	Pembelian	Baik
29	Zice	5	Unit	1993/2016/17/19	17.313,55	Pembelian	Baik
30	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	Set	2017	9.000,50	Pembelian	Baik
31	Meja Rapat	6	Unit	2019	1.800	Hibah	Baik
32	Meja tulis	29	Unit	1991/84/2013	3.023	Pembelian	RR/B
33	Meja Makan	1	Unit	2017	9.974,87	Pembelian	Baik
34	Meja Reseption	1	Unit	2017	2.284,09	Pembelian	Baik
35	Kursi rapat	30	Buah	2015	19.510,25	Pembelian	Baik
36	Kursi tamu	1	Set	2015	6.748,50	Pembelian	Baik
37	Kursi putar	7	Unit	2013	3.357,98	Pembelian	RR
38	Bangku tunggu	4	Unit	1984/2013	8.447	Pembelian	Baik
39	Kursi Lipat	2	Buah	2000	600	Pembelian	Baik
40	Lemari Pakaian	1	Buah	2017	9.703,70	Pemblian	Baik
41	Kursi Plastik	43	Buah	2000	860	Hibah	Baik
42	Mesin Cuci	1	Unit	2017	3.796,94	Pembelian	Baik
43	Lemari Es	1	Unit	2017	3.834,64	Pembelian	Baik
44	AC	6	Unit	2012/13/17/20	25.318,65	Pembelian	Baik
45	Kipas Angin	18	Unit	2015/19/20	9.817,50	Pembelian	Baik
46	Kompor Gas	1	Unit	2017	470,67	Pembelian	Baik
47	Alat Dapur (Rice Cooker)	1	Unit	2017	855,56	Pembelian	Baik
48	Tabung Gas	1	Unit	2017	726,99	Pembelian	Baik
No	Nama Barang	Jml		Thn	Harga	Asal usul	Kond

		satuan		perole han	(dlm ribuan)		isi
49	Televisi	2	Unit	2015/ 17	8.384,86	Pembelian	Baik
50	Load Speaker	6	Unit	1996/ 2019	5.370	Pembelian	RR/B
51	Micropone	2	Unit	2019	1.305,80	Pembelian	Baik
52	Micropone Floor Stand	1	Unit	2019	607,80	Pembelian	Baik
53	Dispenser	1	Buah	2013	150,20	Pembelian	Baik
54	Mimbar/Podium	1	Unit	2008	200	Pembelian	Baik
55	Alat Rumah Tangga Lain-lain/gorden	1	Set	2017	4.112,39	Pembelian	Baik
56	PC Unit	3	Unit	2000/13/19	22.661,60	Pembelian	Baik
57	Lap Top	13	Unit	2012/ 14/17 /18/ 19/20	118.435,91	Pembelian /Hibah	RR/B aik
58	Note Book	1	Unit	2009	6.667,90	Pembelian	RB
59	Printer	14	Unit	2013/ 14/16 /18/ 19/20	30.310,50	Pembelian	RR/B aik
60	Meja operator	1	Unit	2013	9.271	Pembelian	Baik
61	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	1	Unit	2013	4.064,10	Pembelian	Baik
62	Layar Film/Proyektor	1	Unit	2016	7.600	Pembelian	Baik
63	Power Amplifier	1	Unit	2019	7.539,40	Pembelian	Baik
64	Antena SHF Stationary	1	Unit	2017	3.461,07	Pembelian	Baik
65	Microphone/ Wireless MIC HT5	1	Unit	2020	3.420	Pembelian	Baik
66	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	unit	2020	15.106	Pembelian	Baik
67	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Unit	2017	1.305	Pembelian	Baik
68	Megaphone	1	Unit	2020	2.000	Pembelian	Baik
69	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	15	Unit	2014	25.747.5	Pembelian	Baik
70	Saluran Drainage	35	m	2015	25.000	Pembelian	Baik
71	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	1	unit	2020	4.360,00	Hibah	Baik
72	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	unit	2012	3.262,60	Pembelian	Baik

Sumber : KIB A, KIB B, KIB C, KIB D Kecamatan Loano per tanggal 31 Desember 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dibandingkan target pada Renstra periode 2025-2029 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Loano dari tahun 2025 – 2029 tertuang pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Loano
Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	84,25	84,50	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	0,00	104,6%	105,5%	103 %	101,3%	0%	0%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				80,00	81,00	82,00	83,00	84,25	84,50	84,73	85,47	85,47	85,08	0,00	0,00	104,6%	105,5%	103 %	101,3%	0%	0%
3	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0,00	0,00	100 %	100 %	100 %	100%	0%	0%
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0,00	0,00	100 %	100 %	100 %	100%	0%	0%
5	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	0,00	0,00	0%	100 %	100 %	100%	0%	0%
6	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0,00	0,00	100 %	100 %	100 %	100%	0%	0%
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	0,00	0,00	0%	0%	100 %	100%	0%	0%
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0,00	0,00	100 %	100 %	100 %	100%	0%	0%

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dibandingkan target pada Renstra periode 2021-2026 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai. Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

a. Adanya sumber dana yang cukup dari APBD
b. Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Loano untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
c. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Loano.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Loano
Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
UNSUR KEWILAYAHAN	2.090.593.293	2.500.576.565	2.947.104.665	1.900.236.151	1.948.570.831	1.967.280.857	2.232.727.942	2.447.728.401	2.483.674.571	2.452.765.560	0	0	107 %	98%	84%	129 %	0	0
KECAMATAN	2.090.593.293	2.500.576.565	2.947.104.665	1.900.236.151	1.948.570.831	1.967.280.857	2.232.727.942	2.447.728.401	2.483.674.571	2.452.765.560	0	0	107 %	98%	84%	129 %	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.522.052.293	2.158.462.765	2.442.986.665	1.646.199.551	1.687.503.631	1.706.883.457	1.773.272.942	2.110.537.601	2.044.226.771	1.977.521.860	0	0	117 %	98%	84%	120 %	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000	24.503.268	40.050.768	36.000.000	44.000.000	52.000.000	14.038.000	26.737.017	35.865.168	56.067.600	0	0	83%	109 %	90%	156 %	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.500.000	7.128.268	21.300.768	13.000.000	15.000.000	18.000.000	10.000.000	7.112.017,00	21.300.768	30.217.600	0	0	80%	100 %	100 %	232 %	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	-	2.000.000,00	2.250.000	1.840.000	0	0	0%	100 %	75%	61%	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	0,00	2.000.000,00	2.000.000	2.340.000	0	0	0%	100 %	67%	78%	0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	2.000.000	1.625.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	0,00	2.000.000,00	900.000	2.450.000	0	0	0%	100 %	55%	82%	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	2.000.000	1.625.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	-	2.000.000,00	1.625.000	1.880.000	0	0	0%	100 %	100 %	63%	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	2.000.000	3.250.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	-	2.000.000,00	2.489.400	6.360.000	0	0	0%	100 %	77%	212 %	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	7.375.000	6.250.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000	4.038.000	9.625.000,00	5.300.000	10.980.000	0	0	90%	131 %	85%	137 %	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.316.454.493	1.925.810.493	1.928.204.493	1.230.980.951	1.238.285.031	1.239.664.857	1.593.842.358	1.874.409.291	1.563.738.795	1.658.267.796	0	0	121 %	97%	81%	135 %	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.306.454.493	1.906.454.493	1.906.454.493	1.200.980.951	1.201.785.031	1.202.664.857	1.585.342.358	1.855.053.291	1.549.013.795	1.637.539.796	0	0	121 %	97%	81%	136 %	0	0
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	8.000.000	8.500.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0%	100 %	0%	0%	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	3.000.000	6.625.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000	0	3.000.000	4.300.000	5.400.000	0	0	0%	100 %	65%	108 %	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	10.000.000	8.356.000	6.625.000	10.000.000	13.000.000	13.000.000	8.500.000	8.356.000	10.425.000	9.860.000	0	0	85%	100 %	157 %	99%	0	0

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SKPD																		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0	7.000.000	7.500.000	8.000.000	0	0	0	5.468.000	0	0	0%	0%	0%	78%	0	0
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	7.000.000	7.500.000	8.000.000	0	0	0	5.468.000	0	0	0%	0%	0%	78%	0	0
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0	0	2.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	0	0	1.250.000	3.000.000	0	0	0%	0%	63%	60%	0	0
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	2.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	0	0	1.250.000	3.000.000	0	0	0%	0%	63%	60%	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	17.000.000	17.500.000	18.000.000	0	0	0	12.316.000	0	0	0%	0%	0%	72%	0	0
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	0	7.000.000	7.500.000	8.000.000	0	0	-	5.316.000	0	0	0%	0%	0%	76%	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	-	7.000.000	0	0	0%	0%	0%	70%	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.000.000	75.485.800	92.040.200	121.000.000	139.000.000	149.000.000	25.760.000	79.895.800	76.057.400	97.757.000	0	0	64%	106 %	83%	81%	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	5.000.000	5.999.200	8.000.000	10.000.000	10.000.000	0	5.000.000	5.999.200	6.505.000	0	0	0%	100 %	100 %	81%	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	0	6.000.000	5.000.000	8.200.000	0	0	0%	100 %	63%	82%	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	18.480.000	21.000.000	25.000.000	27.000.000	27.000.000	0	18.480.000	19.100.000	21.000.000	0	0	0%	100 %	91%	84%	0	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	10.964.000	11.897.000	15.000.000	17.000.000	17.000.000	0	10.964.000	9.537.300	12.000.000	0	0	0%	100 %	80%	80%	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	0	2.076.000	2.076.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000	0	2.076.000	1.903.000	1.332.000	0	0	0%	100 %	92%	27%	0	0
Penyediaan Bahan/Material	0	10.430.800	12.518.000	15.000.000	17.000.000	17.000.000	0	10.430.800	12.518.000	12.000.000	0	0	0%	100 %	100 %	80%	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	2.535.000	3.000.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000	0	2.535.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0%	100 %	100 %	60%	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	20.000.000	27.550.000	38.000.000	40.000.000	40.000.000	25.760.000	20.000.000	13.000.000	20.000.000	0	0	64%	100 %	47%	53%		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	4.410.000	5.999.900	8.000.000	10.000.000	10.000.000		4.410.000	5.999.900	13.720.000	0	0	0%	100 %	100 %	172 %		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	250.000.000	82.000.000	83.000.000	83.000.000	0	0	253.021.000	0	0	0	0%	0%	101 %	0%		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	250.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0	253.021.000	0	0	0	0%	0%	0%	0%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		
Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	7.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.504.200	45.026.136	57.327.204	56.000.000	60.000.000	60.000.000	71.538.984	41.874.676	54.889.408	51.965.464	0	0	89%	93%	96%	93%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.848.000	-		7.000.000	7.000.000	7.000.000	16.848.000	0	0	0	0	0	100 %	0%	0%	0%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.385.000	20.400.000	20.400.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	24.819.784	17.281.043	17.962.204	14.620.864	0	0	66%	85%	88%	64%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.271.200	24.626.136	36.927.204	26.000.000	30.000.000	30.000.000	29.871.200	24.593.633	36.927.204	37.344.600	0	0	114 %	100 %	100 %	144 %		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.093.600	87.637.068	75.364.000	120.218.600	123.218.600	123.218.600	68.093.600	87.620.817	59.405.000	92.680.000	0	0	100 %	100 %	79%	77%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	47.342.068	34.505.000	45.218.600	48.218.600	48.218.600	0	0	30.045.000	54.630.000	0	0	0%	0%	87%	121 %		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38285600	-	-	-	-	-	38.285.600	47.325.817	0	0	0	0	100 %	0%	0%	0%		
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		12.204.000	12.768.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	12.204.000	8.336.000	11.360.000	0	0	0%	100 %	65%	76%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.542.000	25.112.000	25.112.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	22.542.000	25.112.000	21.024.000	24.250.000	0	0	100 %	100 %	84%	61%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.979.000	2.979.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		2.979.000	0	2.440.000	0	0	0%	100 %	0%	49%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.266.000	-		15.000.000	15.000.000	15.000.000	7.266.000	-	-	-	0	0	100 %	0%	0%	0%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	174.625.000	57.813.300	111.739.000	57.751.200	59.295.600	59.155.200	133.779.600	57.813.300	64.604.000	53.100.000	0	0	77%	100 %	58%	92%		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	169.625.000	41.112.300	64.290.000	42.500.000	43.400.000	43.300.000	130.586.600	41.112.300	45.791.000	40.000.000	0	0	77%	100 %	71%	94%		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Investasi Vertikal Terkait		27.188.000	31.700.000	27.500.000	28.000.000	28.000.000	0	27.188.000	19.777.000	0	0	0	0%	100 %	62%	0%		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	169.625.000	13.924.300	32.590.000	15.000.000	15.400.000	15.300.000	130.586.600	13.924.300	26.014.000	40.000.000	0	0	77%	100 %	80%	267 %		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.000.000	16.701.000	47.449.000	15.251.200	15.895.600	15.855.200	3.193.000	16.701.000	18.813.000	13.100.000	0	0	64%	100 %	40%	86%		
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0	11.701.000	39.859.200	11.000.000	11.100.000	11.100.000	0	11.701.000	13.277.000	0	0	0	0%	100 %	33%	0%		
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000	5.000.000	7.589.800	4.251.200	4.795.600	4.755.200	3.193.000	5.000.000	5.536.000	6.000.000	0	0	64%	100 %	73%	141 %		
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.100.000	0	0	0%	0%	0%	0%		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	73.064.000	82.079.400	64.535.800	66.278.000	66.123.000	0	72.764.000	62.778.800	128.000.000	0	0	0%	100 %	76%	198 %		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	73.064.000	82.079.400	64.535.800	66.278.000	66.123.000	0	72.764.000	62.778.800	128.000.000	0	0	0%	100 %	76%	198 %		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Peencanaan Pembangunan di Desa		5.418.000	10.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		5.418.000	4.030.000	24.000.000	0	0	0%	100 %	40%	343 %		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		67.646.000	72.079.400	57.535.800	59.278.000	59.123.000		67.346.000	58.748.800	104.000.000	0	0	0%	100 %	82%	181 %		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000	17.235.000	35.453.400	13.673.200	14.188.000	14.141.200	50.000.000	22.235.000	41.863.400	89.550.000	0	0	100 %	129 %	118 %	655 %		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.000.000	17.235.000	35.453.400	13.673.200	14.188.000	14.141.200	50.000.000	22.235.000	41.863.400	50.750.000	0	0	100 %	129 %	118 %	371 %		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000	17.235.000	35.453.400	13.673.200	14.188.000	14.141.200	50.000.000	17.235.000	28.563.400	42.750.000	0	0	100 %	100 %	81%	313 %		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.800.000	0	0	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan Kepala daerah	-	5.000.000	13.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	13.300.000	8.000.000	0	0	0%	100 %	100 %	160 %		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	5.000.000	13.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000,00	13.300.000	8.000.000	0	0	0%	0%	0%	0%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	0	10.786.800	4.024.800	4.165.200	4.118.400	0	0	32.250.000	6.200.000	0	0	0%	0%	299 %	154 %		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	0	10.786.800	4.024.800	4.165.200	4.118.400	0	0	32.250.000	6.200.000	0	0	0%	0%	299 %	154 %		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0	10.786.800	4.024.800	4.165.200	4.118.400	0	0	32.250.000	6.200.000	0	0	0%	0%	299 %	154 %		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000.000	0	0	0%	0%	0%	0%		
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0	0	0%	0%	0%	0%		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	343.916.000	194.001.500	264.059.400	114.051.600	117.140.400	116.859.600	275.675.400	184.378.500	237.951.600	198.393.700	0	0	80%	95%	90%	174 %		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	343.916.000	194.001.500	264.059.400	114.051.600	117.140.400	116.859.600	275.675.400	184.378.500	237.951.600	198.393.700	0	0	80%	95%	90%	174 %		

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	14.827.000	22.050.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	0	14.827.000	37.180.000	35.500.000	0	0	0%	100 %	169 %	229 %		
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	0	5.200.000	12.000.000	3.500.000	3.500.000	3.800.000	0	5.200.000	0	0	0	0	0%	100 %	0%	0%		
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0%	0%	0%	0%		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	9.960.000	21.000.000	0	0	0%	0%	0%	0%		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	118.500.900	125.294.000	35.751.600	35.840.400	37.559.600	0	115.700.900	113.981.600	73.993.000	0	0	0%	98%	91%	207 %		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	-	20.000.000	15.300.000	18.300.000	10.000.000	0	-	13.576.000	4.900.700	0	0	0%	0%	68%	32%		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	5.000.000	7.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	0	5.000.000	3.535.000	11.000.000	0	0	0%	100 %	51%	367 %		
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	7.000.000	17.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	7.000.000	13.000.000	8.000.000	0	0	0%	100 %	76%	133 %		
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	81.000.000	5.614.000	11.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	70.899.800	5.614.000	4.461.000	0	0	0	88%	100 %	37%	0%		
Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22.500.000	0	0	0	0	0	18.880.000	0	0	0	0	0	84%	0%	0%	0%		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0	5.414.000	7.815.400	4.000.000	4.000.000	5.000.000	0	5.414.000	7.000.000	0	0	0	0%	100 %	90%	0%		
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0	21.445.600	26.000.000	16.000.000	16.000.000	20.000.000	0	14.622.600	14.783.000	21.000.000	0	0	0%	68%	57%	131 %		
Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	240.416.000	0	0	0	0	0	185.895.600	0	8.475.000	11.000.000	0	0	77%	0%	0%	0%		
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	11.000.000	15.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	11.000.000	0	0	0	0	0%	100 %	0%	0%		

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo antara tahun 2021 s/d 2026 diatas 90%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Loano sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal–hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

a. Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target;
b. Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penatausahaan Keuangan di Kecamatan Loano.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran andalah :

a. Adanya Jabatan yang kosong sehingga kegiatan belum optimal.
b. Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik, fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Loano
Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	84,56	84,73	85,47	85,47	85,08	
3	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran, dan indikator kinerja program di Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo pada periode 2020-2024 tercapai secara optimal (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan) dari target yang ditetapkan. Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

d. Adanya sumber dana yang cukup dari APBD
e. Terdapat komitmen dari aparatur Kecamatan Loano untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian sesuai dengan penjadwalan anggaran
f. Mengoptimalkan sumber daya manusia di Kecamatan Loano.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan analisis terhadap Kinerja Pelayan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo :

a. Tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Loano
    1) Jumlah ASN/pegawai Kecamatan banyak yang kurang dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua) baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;
    2) Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
    3) Keterbatasan sumber dana dari APBD;
    4) Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;
    5) Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan

pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;

6) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan dan dokumen administrasi lainnya;
7) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

b. Peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Loano

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Loano, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para ASN kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Loano dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
5. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Loano. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Loano.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Loano adalah kelompok publik atau pihak yang menjadi target utama layanan atau program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kelompok sasaran Kecamatan Loano yaitu

1. Masyarakat umum
2. Aparat Pemerintah dan Lembaga Desa
3. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
4. Petani atau Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)
5. Kelompok Keagamaan atau Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
6. Kelompok Penyandang Disabilitas dan Lansia
7. Forum Komunitas Anak dan Remaja (FORKARE)

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis Renstra Kecamatan Loano 2025-2029, diawali dari penelaahan permasalahan, pengkajian lingkungan strategis secara internal maupun eksternal pada semua urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kecamatan Loano. Perumusan kriteria strategis berdasarkan tujuan pembangunan daerah menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka dirumuskan isu strategis yang akan di laksanakan dengan program dan kegiatan di Tahun 2025-2029.

Permasalahan pelayanan di Kecamatan Loano, diperoleh dari penelaahan tugas pokok dan fungsi Camat, pada periode 2020-2024 serta hasil penelaahan evaluasi capaian kinerja pada tahun 2020-2024. Permasalahan ini dirumuskan menurut urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan masing-masing perangkat daerah.

Permasalahan menurut fungsi kecamatan sebagai penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam bidang perizinan dan non perizinan, pada penyelenggaraan tugas-tugas camat adalah :

a. Pelayanan administrasi masyarakat (Publik) belum merata dikarenakan sistem birokrasi dengan sistem aplikasi teknologi

informasi yang berkembang maju pesat sehingga Sumber Daya Manusia/ASN yang ada belum dapat mengikuti secara maksimal;

b. Keterbatasan jumlah SDM/ASN dan Kompetensi Aparatur sehingga akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan Kecamatan Loano, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi :
   a. Jumlah petugas / aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT;
   b. Fasilitas sarana prasarana gedung kantor masih kurang memadai;
   c. Beberapa pegawai kurang memahami peraturan kepegawaian yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.
2. Faktor-faktor Eksternal yang mempengaruhi :
   a. Kurangnya SDM Aparatur di Kecamatan Loano penempatan PNS belum sesuai antara disiplin ilmu dan tupoksi yang dikerjakan sehari-hari;
   b. Jarak tempuh antara Aparatur Kecamatan dengan Kantor Kecamatan lumayan jauh.
   c. Sering terjadi gangguan/ trouble jaringan internet yang mengakibatkan terhambatnya pelayanan public.

Tabel 2.3
Permasalahan dan Isu Trategis Perangkat Daerah Kecamatan Loano

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Pelayanan Publik Prima belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif di Tingkat Kecamatan Loano
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal		Cyber insecurity	Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia		
			Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Terpilih

Visi adalah gambaran tentang kondisi atau tujuan ideal yang ingin dicapai di masa depan, yang berfungsi sebagai arah dan panduan dalam perencanaan serta pengambilan keputusan di pemerintahan. Berdasarkan perkembangan dan kondisi pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Purworejo 5 (lima) tahun yang akan datang, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Visi yang ditetapkan mencerminkan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh kepala daerah selama masa kepemimpinannya. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada dalam menciptakan Kabupaten Purworejo sebagaimana yang dicita-citakan. Rumusan visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah

"Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (PURWOREJO BERSERI)"

Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Rumusan menjadi kerangka bagian tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh guna mencapai visi pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.

Untuk mewujudkan visi "Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)" di Kecamatam Loano menggunakan misi ke 5 (lima) yaitu :

"Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi"

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,

memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun di Kecamatan Loano, adalah :

“ Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah”

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Loano dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Loano dalam periode pembangunan 2025-2029, adalah :

- *Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat*
- *Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah*

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Loano beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Loano

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	85,10	85,15	85,20	85,25	85,30	85,35	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	85,10	85,15	85,20	85,25	85,30	85,35	

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

3.3.1 Strategi Perangkat daerah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan arah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan bagaimana penyelesaian isu strategis pembangunan daerah

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi rencana program indikatif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka menetapkan arah prioritas serta fokus pelaksanaan strategi dan kebijakan setiap tahun selama lima tahun kedepan, Kecamatan Loano menyusun tahapan kebijakan pembangunan daerah.

Penahapan Renstra PD adalah serangkaian langkah yang harus dilalui dalam proses penyusunan dokumen perencanaan jangka 5 (lima) tahunan yang mengacu pada strategi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Loano sesuai tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Loano

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat	Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat	Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat
Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.3.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

Kebijakan ada dua macam yaitu kebijakan internal dan eksternal. Kebijakan Internal adalah suatu kebijakan Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi organisasi.

1. Kebijakan internal Pemerintah Kecamatan Loano adalah sebagai berikut :
   a) Peningkatan kualitas SDM aparatur kecamatan;
   b) Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana perkantoran secara optimal;
   c) Pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan yang mantap;
   d) Peningkatan ketertiban administrasi dan pengelolaan keuangan.
2. Kebijakan Eksternal yaitu suatu kebijakan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan eksternal Kecamatan Loano diantaranya yaitu :
   a) Peningkatan koordinasi tingkat kecamatan;
   b) Peningkatan pembinaan desa / kelurahan;
   c) Peningkatan pelayanan masyarakat;
   d) Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan;
   e) Memfasilitasi dan mengupayakan pemenuhan sarana prasarana wilayah, peningkatan perekonomian rakyat sesuai dengan potensi masyarakat;

f) Mengupayakan kerjasama dengan dinas instansi terkait dan lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat.

Adapun Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pada 5 (lima) tahun mendatang sesuai Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan RPJMD 2026	Arah Kebijakan RENSTRA 2026	
		Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
2		Arah Kebijakan RPJMD 2027	Arah Kebijakan RENSTRA 2027	
		Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
3		Arah Kebijakan RPJMD 2028	Arah Kebijakan RENSTRA 2028	
		Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
4		Arah Kebijakan RPJMD 2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2029	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda,	
			Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
5		Arah Kebijakan RPJMD 2030	Arah Kebijakan RENSTRA 2030	
		Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Penyusunan rencana program diprioritaskan terhadap program utama terlebih dahulu kemudian program pendukung yang bersifat kegiatan rutin. Alasan utama pemilihan tersebut adalah disesuaikan dengan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dimana program utama lebih strategis dalam menunjang dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Adapun program yang akan dilaksanakan Kecamatan Loano adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk mendukung tercapainya program dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan di Kecamatan Loano menyusun kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
12. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
13. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
14. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
15. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
16. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
17. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk mendukung tercapainya program, kegiatan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan di Kecamatan Loano menyusun sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik sektoral Daerah
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
8. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13. Penyediaan Bahan/Material
14. Fasilitasi Kunjungan Tamu
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
17. Pengadaan Mebel
18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Gedung Bangunan Lainnya
20. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Gedung Bangunan Lainnya
21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
27. Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
28. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
29. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
30. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
31. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
32. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
33. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
34. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
35. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
36. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
37. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

38. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
39. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
40. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
41. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
42. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
43. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
44. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
45. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
46. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
47. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
48. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
49. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
50. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dari uraian tersebut di atas secara rinci rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan hingga aktivitas sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 berikut ini :

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Loano

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
			Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan		Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					dan Ketahanan Nasional	Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	

Tabel 4.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LOANO
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	85,08	85,15		85,2		85,25		85,3		85,35		85,35			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
7.01.00	KECAMATAN						2.044.702.953		1.791.393.000		1.961.886.000		1.961.886.000		1.961.886.000				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	2.044.702.953	100	1.791.393.000	100	1.961.886.000	100	1.961.886.000	100	1.961.886.000	100	Sekretariat	Kecamatan Loano	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	21	2	4.292.800	2	4.292.800	2	4.875.000	2	4.875.000	2	4.875.000	10			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	21	3.667.800	21	3.667.800	21	4.000.000	21	4.000.000	21	4.000.000	105			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	21	625.000	21	625.000	21	875.000	21	875.000	21	875.000	105			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	27	45	1.843.962.053	45	1.590.652.100	45	1.760.537.900	45	1.760.537.900	45	1.760.537.900	225			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	16	17	1.841.292.053	17	1.587.982.100	17	1.757.537.900	17	1.757.537.900	17	1.757.537.900	17			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	44	2.670.000	44	2.670.000	44	3.000.000	44	3.000.000	44	3.000.000	220			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6	350.000	6	350.000	6	500.000	6	500.000	6	500.000	30			
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6	350.000	6	350.000	6	500.000	6	500.000	6	500.000	30			
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	60			
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	60			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	0		0		1	250.000	1	250.000	1	250.000	3			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	1	250.000	1	250.000	1	250.000	3			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	9	7	45.689.100	7	44.204.100	7	44.204.100	7	44.204.100	7	44.204.100	35			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	3	5.836.000	3	5.836.000	3	5.836.000	3	5.836.000	3	5.836.000	15			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	8	4.790.000	8	4.790.000	8	4.790.000	8	4.790.000	8	4.790.000	40			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	11	11	10.080.000	11	10.080.000	11	9.480.000	11	9.480.000	11	10.080.000	55			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	9.678.100	12	9.678.100	12	9.678.100	12	9.678.100	12	9.678.100	60			
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	3	7.890.000	3	7.890.000	3	7.890.000	3	7.890.000	3	7.890.000	15			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	0	0	0	2	600.000	2	600.000	0	0	4			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	3.930.000	12	3.930.000	12	3.930.000	12	3.930.000	12	3.930.000	60			
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	12	3.485.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	60			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	0	0		1	1.485.000	2	1.110.000	1	1.110.000	1	1.110.000	5			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	1	1.110.000	0	0	1			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	2	1.110.000	0	0	0	0	2			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	1.485.000	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.110.000	1			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	75.674.000	24	75.674.000	24	75.674.000	24	75.674.000	24	75.674.000	120			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	13.442.000	12	13.442.000	12	13.442.000	12	13.442.000	12	13.442.000	60			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	62.232.000	12	62.232.000	12	62.232.000	12	62.232.000	12	62.232.000	60			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	10	4	74.485.000	4	74.485.000	4	74.485.000	4	74.485.000	4	74.485.000	20			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	4	46.730.000	4	46.730.000	4	46.730.000	4	46.730.000	4	46.730.000	20			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	8	5.680.000	8	5.680.000	8	5.680.000	8	5.680.000	8	5.680.000	40			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3	20.855.000	3	20.855.000	3	20.855.000	3	20.855.000	3	20.855.000	15			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	2	1.220.000	2	1.220.000	2	1.220.000	2	1.220.000	2	1.220.000	10			
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	85,08	85,15		85,2		85,25		85,3		85,35		85,35			
7.01.00	KECAMATAN						159.021.700		530.832.000		159.022.000		161.535.000		164.087.000				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	19.326.700	100	53.100.000	100	19.327.000	100	19.632.000	100	19.942.000	100	Seksi Pembangunan	Kecamatan Loano	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	3	14.700.400	4	41.100.000	3	14.700.000	3	14.700.000	3	14.700.000	15			
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	0	0	1	7.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	3	3	14.700.400	3	34.100.000	3	14.700.000	3	14.700.000	3	14.700.000	15			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen	1	1	978.100	1	9.000.000	1	978.800	1	1.282.000	1	1.592.000	5			
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	0	0	0	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dokumen	0	0	0	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	978.100	1	3.000.000	1	978.800	1	1.282.000	1	1.592.000	5			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen	0	1	3.648.200	1	3.000.000	1	3.648.200	1	3.650.000	1	3.650.000	5			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	0	1	3.648.200	1	3.000.000	1	3.648.200	1	3.650.000	1	3.650.000	5			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100	100	48.142.200	100	128.000.000	100	48.142.000	100	48.903.000	100	49.676.000	100	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Loano	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen	4	11	48.142.200	12	128.000.000	11	48.142.000	11	48.903.000	11	49.676.000	56			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	5	5	10.625.000	5	24.000.000	5	10.625.000	5	10.625.000	5	10.625.000	25			
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	0	0	0	1	4.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	6	37.517.200	6	100.000.000	6	37.517.000	6	38.278.000	6	39.051.000	30			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	20.647.500	100	70.934.000	100	20.648.000	100	20.974.000	100	21.305.000	100	Seksi Pemerintahan Umum dan Tramtibum	Kecamatan Loano	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	5	4	20.647.500	4	63.934.000	4	20.648.000	4	20.974.000	4	21.305.000	20			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	2	9.440.000	2	28.934.000	2	9.440.000	2	9.440.000	2	9.440.000	10			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	2	11.207.500	2	35.000.000	2	11.208.000	2	11.534.000	2	11.865.000	10			
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	0	0		1	7.000.000	0		0		0		1			
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	0	0	0	1	7.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	37.016.000	100	92.200.000	100	37.016.000	100	37.601.000	100	38.195.000	100	Seksi Pemerintahan Umum dan Tramtibum	Kecamatan Loano	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	5	5	37.016.000	5	92.200.000	5	37.016.000	5	37.601.000	5	38.195.000	25			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	21	21	17.531.000	21	6.200.000	21	17.531.000	21	17.700.000	21	17.531.000	105			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	21	21	3.125.000	21	51.000.000	21	3.125.000	21	3.541.000	21	4.304.000	105			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	3	3	16.360.000	3	35.000.000	3	16.360.000	3	16.360.000	3	16.360.000	15			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	33.889.200	100	186.598.000	100	33.889.000	100	34.425.000	100	34.969.000	100	Seksi Pemerintahan Desa	Kecamatan Loano	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	8	5	33.889.200	9	186.598.000	5	33.889.000	5	34.425.000	5	34.969.000	29			
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	21	0	0	21	10.000.000	0	0	0	0	0	0	21			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	21	0	0	21	21.000.000	21	5.390.000	21	5.390.000	21	4.669.600	84			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	21	21	10.370.000	21	35.500.000	21	10.370.000	21	10.370.000	21	10.370.000	105			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	1	6.599.800	1	44.000.000	1	6.600.000	1	7.000.000	1	6.900.000	5			
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	4	15	9.390.000	15	26.098.000	0	0	6	4.065.000	6	5.500.000	42			
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	1	4.435.000	1	11.000.000	1	4.435.000	1	4.500.000	1	4.435.000	5			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	0	0	6	8.000.000	5	4.000.000	0	0	0	0	11			
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	21	21	3.094.400	21	21.000.000	21	3.094.000	21	3.100.000	21	3.094.400	105			
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	0	0	0	21	10.000.000	0	0	0	0	0	0	21			
Jumlah							**2.203.724.653**		**2.322.225.000**		**2.120.908.000**		**2.123.421.000**		**2.125.973.000**				

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Monitoring Pembangunan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi bidang Kesehatan Fasilitasi bidang Pendidikan Fasilitasi bidang Sosial Fasilitasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas)	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi intensifikasi PBB	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi keagamaan	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Forkopimcam	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP)	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades dan Sekdes	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pilkades	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi	
			Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Penyusunan Masterplan Desa, Penyusunan Website Desa	

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Loano yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029. Adapun indikator kinerja yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Loano dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tujuan RPJMD Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin di Kecamatan Loano dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Loano

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Tujuan dan sasaran PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	85,10	85,15	85,20	85,25	85,30	85,35	Tujuan dan sasaran PD

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Loano yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Loano Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Loano, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Loano setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Rencana Strategis Kecamatan Loano sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Loano setiap tahun.
b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c) Camat Loano wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Loano dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN XLI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya ditandai dengan pelaksanaan pembangunan, sewajarnya diawali dengan proses perencanaan yang matang. Salah satu kebutuhan perencanaan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan OPD Kecamatan Bener menyusun Renstra Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Purworejo.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Bener merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Bener serta ancaman dan peluang yang mempengaruhi Kecamatan Bener.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan

penetapan Renstra PD. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :

a. Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra PD.
c. Tahapan penetapan Renstra PD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Bener selaku Kepala PD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Purworejo.

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan hierarki Rencana Strategis PD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu Renstra Kecamatan Bener Tahun 2025-2030 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Purworejo untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, landasan hukum tersebut sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) periode 2025-2030 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan rencana Strategis Kecamatan Bener Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Maksud
   a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program /kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemsyarakatan.
   b. Memberikan gambaran rencana program untuk lima tahun ke depan (2025-2029) yang terukur dan terarah dalam melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik sekaligus menjadi acuan bagi Kecamatan

Bener untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Purworejo.

c. Menjabarkan visi misi RPJMD

2. Tujuan

a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan sekala prioritas pada kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

b. Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat.

c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

d. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Bener sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kecamatan Bener sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah serta Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Tujuan dan Sasaran Renstra

Perangkat Daerah tahun 2025-2029 serta Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dukungan terhadap nasional provinsi dan kegiatan unggulan daerah serta indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Susunan Organisasi Kecamatan Bener terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretariat, membawahi
   a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan Desa
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi PD

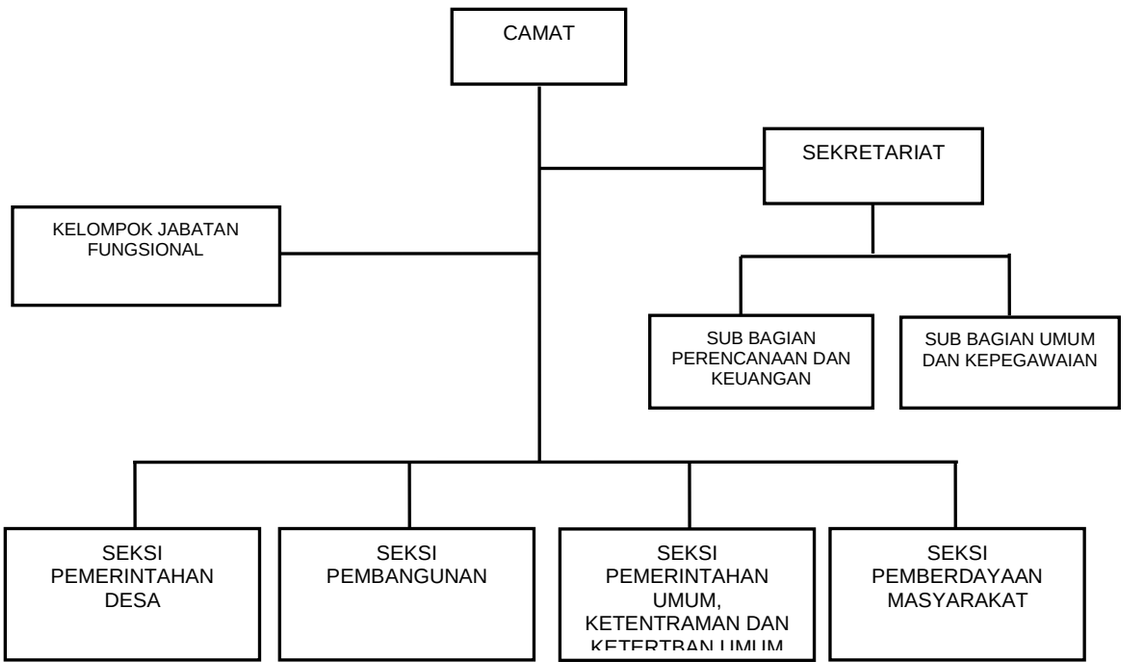

Dalam pelaksanaan pelayanan, Kecamatan Bener memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dan sub bagian.

1. Camat mempunyai tugas pokok:

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Selain melaksanakan tugas, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan.

Tugas Camat dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum yaitu membentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Susunan pimpinan dan anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan adalah sebagai berikut:

(1) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud diketuai oleh Camat;
(2) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
(3) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa meliputi:

a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;
e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Camat

Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan

Sekretariat

(1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat tugas dan sesuai dengan fungsi.

Sekretariat Kecamatan, membawahkan:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi:

a. merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja;
b. melaksanakan pengadministrasian keuangan;
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

a. melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
b. melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
c. melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
d. melaksanakan penyediaaan jasa penunjang;
e. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
f. melaksanakan pengadministrasian kepegawaian pada lingkungan kecamatan; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai sesuai tugas dan jabatannya.

Seksi Pemerintahan Desa

Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa , yang meliputi:

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
h. melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;

j. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
m. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n. melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
o. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
p. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
q. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
r. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
    1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
    2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;
    3. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
b. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:

1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
2. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.

c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
   1. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
   2. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
   3. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;
   4. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang meliputi:

a. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi;
   1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;
   2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
b. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
c. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
4. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
   1. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
   2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi;

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai Kecamatan dan Sekretaris Desa PNS berdasarkan Golongan, Jabatan / Eselonering dan Pendidikan sebanyak 14 pegawai Kecamatan ASN ditambah dengan 4 orang tenaga kontrak. Adapun rincian pegawai berdasarkan golongan kepangkatan yaitu :

a. Berdasarkan Golongan :

- Golongan IV : 2 orang
- Golongan III : 10 orang
- Golongan II : 1 orang
- PPPK Golongan VII : 1 orang

Jumlah : 14 orang

b. Berdasarkan Jabatan / Eselonering :

- Eselon III/A : 1 orang
- Eselon III/B : 1 orang
- Eselon IV/A : 3 orang
- Eselon IV/B : 2 orang

c. Berdasarkan Pendidikan :

- Sarjana Strata 2 : 3 orang
- Sarjana Strata 1 : 3 orang

- Diploma : 2 orang
- SMU/Sederajat : 6 orang

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.
2. Capaian indikator kinerja Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dibandingkan target pada Renstra periode 2025-2029 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Loano dari tahun 2025 – 2029 tertuang pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bener
Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	84,25	84,50	N/A	N/A	N/A	70,71	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	100%	0%	0%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				87,95	87,04	87,62	87,89	88,40	88,45	87,95	93,57	85,99	88,38	0,00	0,00	100%	107,5%	98%	100,55%	0%	0%
3	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	0%	0%
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	0%	0%
5	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	0,00	0,00	0%	100%	100%	100%	0%	0%
6	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	0%	0%
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	0,00	0,00	0%	0%	100%	100%	0%	0%
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	0%	0%

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bener
Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,135,829,052	1,649,001,167	1,718,079,795	1,893,727,992	1,939,432,721	1,949,581,095	1,990,975,528	2,133,946,729	2,334,139,112	2,141,268,976	0	0	93	129	136	113	0	NA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,358,000	6,275,000	6,902,500	7,592,750	8,352,025	9,187,228	5,358,000	6,275,000	6,901,600	10,291,700			100	100	100	136	0	NA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,919,250,202	1,401,266,567	1,445,571,735	1,588,969,126	1,609,697,968	1,586,872,866	1,779,420,636	1,891,973,970	1,767,374,174	1,753,756,642			93	135	122	110	0	NA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,000,000	6,551,000	7,206,100	7,926,710	8,719,381	9,591,319	4,000,000	6,131,000	22,991,000	10,201,100			100	94	319	129	0	NA
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							0	0	2,651,100	2,100,000			NA	NA	100	100	0	NA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	36,497,000	72,798,800	80,078,680	93,086,548	96,895,203	106,584,723	36,496,000	81,287,100	93,789,700	124,177,800			100	112	117	133	0	NA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0							0	252,329,000	0			NA	NA	100	NA	NA	NA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102,146,250	85,384,800	93,923,280	103,315,608	113,647,169	125,011,886	97,193,146	86,985,659	87,643,638	90,749,378			95	102	93	88	0	NA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68,577,600	76,725,000	84,397,500	92,837,250	102,120,975	112,333,074	68,507,746	61,294,000	100,458,900	149,992,356			100	80	119	162	0	NA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	164,681,900	120,734,100	84,674,200	93,043,600	95,531,800	95,305,600	164,678,750	66,588,200	93,671,600	38,907,100	0	0	100	55	111	42	0	NA

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	160,935,900	44,811,800	38,000,000	40,943,600	42,911,800	42,500,000	160,932,750	27,931,300	30,386,600	35,647,700			100	62	80	87	0	NA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3,746,000	75,922,300	46,674,200	52,100,000	52,620,000	52,805,600	3,746,000	38,656,900	63,285,000	3,259,400			100	51	136	6	0	NA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5,574,000	60,953,000	47,380,000	47,881,400	49,174,000	49,059,000	5,572,700	51,260,500	115,522,400	171,541,700	0	0		84	244	358	0	NA
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5,574,000	60,953,000	47,380,000	47,881,400	49,174,000	49,059,000	5,572,700	51,260,500	115,522,400	171,541,700				84	244	358	0	NA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49,897,500	29,992,800	27,370,200	30,084,600	30,914,000	30,838,600	49,885,150	29,992,800	48,670,200	100,512,300	0	0	100	100	178	334	0	NA
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	49,897,500	29,992,800	27,370,200	30,084,600	30,914,000	30,838,600	49,885,150	29,992,800	48,670,200	100,512,300			100	100	178	334	0	NA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	9,440,700	5,956,600	6,484,400	6,710,600	6,635,200	0	9,395,800	42,616,400	76,036,100	0	0	100	100	715	1,173	0	NA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	9,440,700	5,956,600	6,484,400	6,710,600	6,635,200	0	9,395,800	42,616,400	76,036,100			100	100	715	1,173	0	NA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	249,285,400	144,819,829	167,312,600	183,749,800	188,726,200	188,273,800	249,093,500	157,097,600	200,800,300	103,541,500	0	0	100	108	120	56	0	NA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	249,285,400	144,819,829	167,312,600	183,749,800	188,726,200	188,273,800	249,093,500	157,097,600	200,800,300	103,541,500			100	108	120	56	0	NA

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		87.95	93.97	85.99	88.38	
	SAKIP		-	-	-	70.71	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		87.95	93.97	85.99	88.38	
	SAKIP		-	-	-	70.71	
3	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		100	100	100	100	
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100	100	100	100	
5	Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan		100	100	100	100	
6	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	100	
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100	100	
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	100	100	100	

2.1.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengembangan pelayanan perangkat daerah di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo pada lima tahun mendatang menghadapi sejumlah tantangan sekaligus membuka berbagai peluang strategis. Hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Purworejo, serta KLHS menunjukkan bahwa dinamika pembangunan daerah menuntut pelayanan publik yang semakin adaptif, responsif, dan inovatif.

Dari sisi tantangan, Kecamatan Bener masih menghadapi kesenjangan kualitas sumber daya manusia aparatur, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi dan kemampuan analisis pelayanan berbasis data. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk aksesibilitas di beberapa wilayah pedesaan, menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan layanan. Telaahan terhadap RTRW Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa perkembangan tata ruang dan pertumbuhan wilayah menuntut perangkat daerah lebih adaptif dalam mengantisipasi kebutuhan pelayanan, misalnya terkait peningkatan mobilitas masyarakat, perubahan

fungsi lahan, serta perkembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari hasil analisis KLHS, isu lingkungan seperti kerentanan bencana alam (banjir, tanah longsor), degradasi lingkungan, dan keterbatasan daya dukung lahan menjadi tantangan tambahan bagi pelayanan publik, terutama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

Meski demikian, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Bener. Pertama, arah kebijakan nasional dan provinsi yang menekankan pada transformasi digital pelayanan publik menjadi momentum untuk memperkuat inovasi layanan berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat secara daring. Kedua, potensi pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Purworejo, termasuk adanya proyek infrastruktur regional dan konektivitas dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, membuka kesempatan bagi Kecamatan Bener untuk mengembangkan pelayanan yang mendukung aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Ketiga, dukungan masyarakat serta meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas mendorong perangkat daerah untuk membangun layanan yang lebih partisipatif dan responsif. Selain itu, hasil analisis KLHS menunjukkan adanya peluang penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat diintegrasikan dalam inovasi pelayanan publik ramah lingkungan.

Dengan mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, Kecamatan Bener diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan

2.1.2 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo mencakup seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan yang berada dalam wilayah administrasi

kecamatan. Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Bener memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kelompok sasaran memperoleh pelayanan yang adil, mudah diakses, dan berkualitas.

Sasaran utama pelayanan adalah masyarakat umum, yaitu seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Bener. Mereka menjadi penerima layanan administrasi pemerintahan, kependudukan, perizinan sederhana, serta berbagai fasilitasi program pembangunan. Selain itu, pemerintah desa beserta perangkatnya menjadi kelompok sasaran penting mengingat peran desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kecamatan hadir untuk memberikan pembinaan, pendampingan, serta koordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Kelompok lain yang menjadi perhatian adalah masyarakat rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. Mereka memerlukan layanan publik yang inklusif, perlindungan sosial, serta akses yang lebih mudah terhadap program-program pemerintah. Di sisi lain, pelaku ekonomi lokal seperti petani, pedagang, dan pelaku UMKM juga menjadi sasaran layanan melalui fasilitasi perizinan, penguatan kapasitas usaha, dan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selain itu, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kelompok kepemudaan juga menjadi kelompok sasaran layanan yang penting. Mereka memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat kecamatan maupun desa. Sementara itu, dari sisi internal pemerintahan, aparatur sipil negara dan perangkat daerah lain juga menjadi kelompok sasaran dalam rangka koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan lintas sektor di tingkat kecamatan.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Bener tidak hanya berfokus pada masyarakat secara umum, tetapi juga mencakup kelompok rentan, pelaku usaha, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga aparatur pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan kecamatan bersifat menyeluruh dan inklusif, guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Bener

2.2 Permasalahan dan Isu Stategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi dari Bab II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029, Laporan KLHS RPJMD 2025–2029, serta penjaringan aspirasi masyarakat melalui perangkat daerah, dapat dirumuskan beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Bener. Permasalahan tersebut muncul sebagai refleksi adanya kesenjangan antara kondisi ideal pelayanan publik yang diharapkan dengan realitas capaian pembangunan yang ada saat ini.

Permasalahan dominan yang dihadapi antara lain:

1. Kualitas dan pemerataan pelayanan publik yang belum optimal, terutama dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, maupun keterjangkauan layanan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya mendukung terwujudnya layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan.
3. Kapasitas sumber daya manusia aparatur yang belum merata, baik dari segi kompetensi teknis maupun manajerial, sehingga berdampak pada kualitas layanan yang diselenggarakan perangkat daerah.
4. Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu yang membutuhkan integrasi lintas sektor.

5. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan yang menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat dalam mengakses layanan, serta belum mendukung pelayanan prima.
6. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pelayanan masih rendah, sehingga aspirasi yang muncul belum sepenuhnya terakomodasi secara sistematis.

Dengan memperhatikan permasalahan dominan tersebut, terlihat adanya kebutuhan untuk memperkuat kualitas, pemerataan, dan inovasi pelayanan perangkat daerah agar dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah lima tahun ke depan.

2.2.2

Berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, serta keterkaitannya dengan isu KLHS RPJMD 2025–2029 dan dinamika lingkungan global, nasional, maupun regional, maka dapat dirumuskan isu strategis perangkat daerah sebagai berikut

Tabel 2.4 Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif di tingkat kecamatan
	Akuntabilitas keuangan belum disertai kompetensi sumber daya manusia			Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia		
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan		Cyber insecurity			
	Pelayanan publik prima belum merata		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			
	Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif					

Isu utama yang perlu mendapat perhatian meliputi: penguatan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif untuk menjawab tantangan rendahnya akuntabilitas kinerja; peningkatan akuntabilitas dan

kemandirian keuangan daerah guna memperkuat stabilitas dan daya saing; percepatan transformasi digital pelayanan publik sebagai respon atas tuntutan era digital dan ancaman keamanan siber; pemerataan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah; serta penguatan stabilitas, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat agar tercipta lingkungan yang kondusif dalam mendukung pembangunan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2025-2029 yaitu :

"Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)"

Visi ini merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021 – 2026.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi. Misi merupakan sebuah komitmen bersama yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan guna mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri) 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2030 diwujudkan dalam "Purworejo Berseri".

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Kecamatan Bener mendukung Misi ke 5, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif, serta berbasis teknologi informasi, maka ditetapkan tujuan strategis perangkat daerah Kecamatan Bener yaitu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih terukur, yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang ditunjukkan melalui peningkatan Nilai SAKIP perangkat daerah.

2. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perangkat daerah.

Dengan demikian, indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan ini adalah:

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan tersebut didukung oleh 4 (empat) faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi dan sarana serta prasarana kerja, faktor-faktor ini sangatlah berpengaruh terhadap tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perangkat daerah dimana apabila salah satu faktor tersebut tidak ada maka dapat berpengaruh signifikan terhadap tercapainya tujuan perangkat daerah.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perangkat Daerah Kecamatan Bener sebagai langkah pemfokusan dalam Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi adalah “Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah”.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Bener, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bener adalah “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat ”.

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bener beserta indikator dan targetnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68.02	70,45	72.89	75.33	77.76	80.20	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	88.40	88.45	88.50	88.55	88.60	88.65	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68.02	70,45	72.89	75.33	77.76	80.20	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	88.40	88.45	88.50	88.55	88.60	88.65	

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan arah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan bagaimana penyelesaian isu strategis pembangunan daerah.

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kecamatan Bener pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	**2028**	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat	Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat	Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat
Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
      1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
   e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan Bahan/Material
6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
        1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
        1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
        1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
        2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
    a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
        1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
        2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
        1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

      1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

      2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

      3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

      4) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

      5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

      6) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

      7) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Dari uraian tersebut di atas secara rinci rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan hingga aktivitas sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 berikut ini :

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
			Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah DokumenKoordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

TABEL 4.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BENER
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70,71	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	88,1	88,45		88,5		88,55		88,6		88,65		88,65			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70,71	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
7.01.00	KECAMATAN						2.074.914.951		2.095.664.000		2.074.915.000		2.074.915.000		2.074.915.000				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	2.074.914.951	100	2.095.664.000	100	2.074.915.000	100	2.074.915.000	100	2.074.915.000	100	SEKRETARIAT	Kecamatan Bener	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	41	46	6.226.000	46	6.226.000	46	6.226.000	46	6.226.000	46	12.500.000	230			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	19	23	3.344.000	23	3.344.000	23	3.344.000	23	3.344.000	23	5.000.000	115			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	22	22	2.432.000	22	2.432.000	22	2.432.000	22	2.432.000	22	4.500.000	110			
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	1	450.000	1	450.000	1	450.000	1	450.000	1	3.000.000	5			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	27	45	1.796.137.751	45	1.796.137.800	45	1.796.137.800	45	1.796.137.800	45	1.797.123.800	225			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	16	18	1.790.665.751	18	1.790.665.800	18	1.790.665.800	18	1.790.665.800	18	1.790.665.800	18			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	26	44	5.472.000	44	5.472.000	44	5.472.000	44	5.472.000	44	6.458.000	220			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	11	760.000	11	760.000	11	760.000	11	760.000	11	3.500.000	55			
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	11	760.000	11	760.000	11	760.000	11	760.000	11	3.500.000	55			
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	16	600.000	16	600.000	16	600.000	16	600.000	16	600.000	80			
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	16	600.000	16	600.000	16	600.000	16	600.000	16	600.000	80			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	20	37	7.163.200	37	7.912.200	37	7.163.200	37	7.163.200	37	7.163.200	185			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	17	1.330.700	17	2.079.700	17	1.330.700	17	1.330.700	17	1.330.700	85			
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dokumen	20	20	5.832.500	20	5.832.500	20	5.832.500	20	5.832.500	20	5.832.500	100			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	8	9	72.171.600	9	72.171.600	9	72.171.600	9	72.171.600	9	72.171.600	45			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	4	1.219.300	4	1.219.300	4	1.219.300	4	1.219.300	4	1.219.300	20			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	6	1.176.400	6	1.176.400	6	1.176.400	6	1.176.400	6	1.176.400	30			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	11	11	16.632.000	11	16.632.000	11	16.632.000	11	16.632.000	11	16.632.000	55			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	4	6.258.400	4	6.258.400	4	6.258.400	4	6.258.400	4	6.258.400	20			
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	2.796.000	1	2.796.000	1	2.796.000	1	2.796.000	1	2.796.000	5			
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	14	6.555.000	14	6.555.000	14	6.555.000	14	6.555.000	14	6.555.000	70			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	12	1.650.000	12	1.650.000	12	1.650.000	12	1.650.000	12	1.650.000	60			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.01.2.05.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	34.626.000	12	34.626.000	12	34.626.000	12	34.626.000	12	34.626.000	60			
7.01.01.2.05.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	2	1.258.500	2	1.258.500	2	1.258.500	2	1.258.500	2	1.258.500	10			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	0	0		4	43.250.000	1	10.000.000	1	10.000.000	0		6			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	3	30.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	0	0	5			
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	13.250.000	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	86.476.400	24	86.476.400	24	86.476.400	24	86.476.400	24	86.476.400	120			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	34.876.400	12	34.876.400	12	34.876.400	12	34.876.400	12	34.876.400	60			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	51.600.000	12	51.600.000	12	51.600.000	12	51.600.000	12	51.600.000	60			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	51	5	105.380.000	5	82.130.000	5	95.380.000	5	95.380.000	5	95.380.000	25			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	10	15.800.000	10	15.800.000	10	15.800.000	10	15.800.000	10	15.800.000	10			
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	24	6.570.000	24	6.570.000	24	6.570.000	24	6.570.000	24	6.570.000	24			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	43.250.000	1	20.000.000	1	33.250.000	1	33.250.000	1	33.250.000	1			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	14	18	4.880.000	18	4.880.000	18	4.880.000	18	4.880.000	18	4.880.000	18			
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	88,1	88,45		88,5		88,55		88,6		88,65		88,65			
7.01.00	KECAMATAN						213.820.200		351.258.000		213.820.000		217.199.000		220.629.000				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	15.740.000	100	17.907.000	100	15.740.000	100	15.989.000	100	16.241.000	100	SEKSI PEMBANGUNAN	Kecamatan Bener	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	14.980.000	2	17.147.000	2	14.980.000	2	15.229.000	2	15.481.000	10			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	14.980.000	2	17.147.000	2	14.980.000	2	15.229.000	2	15.481.000	10			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen	1	1	760.000	1	760.000	1	760.000	1	760.000	1	760.000	5			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	760.000	1	760.000	1	760.000	1	760.000	1	760.000	5			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100	100	58.043.200	100	73.406.000	100	58.043.000	100	58.960.000	100	59.892.000	100	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Bener	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen	10	10	58.043.200	10	73.406.000	10	58.043.000	10	58.960.000	10	59.892.000	50			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	5	5	17.411.200	5	17.411.200	5	17.411.000	5	17.411.200	5	17.411.200	5			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	9	9	40.632.000	9	55.994.800	9	40.632.000	9	41.548.800	9	42.480.800	45			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030				
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	49.742.000	100	61.355.000	100	49.742.000	100	50.528.000	100	51.326.000	100	SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Bener	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	5	5	49.742.000	5	61.355.000	5	49.742.000	5	50.528.000	5	51.326.000	25			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	3	12.640.000	3	24.253.000	3	12.640.000	3	13.426.000	3	14.224.000	15			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	2	37.102.000	2	37.102.000	2	37.102.000	2	37.102.000	2	37.102.000	10			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	28.650.000	100	32.736.000	100	28.650.000	100	29.103.000	100	29.562.000	100	SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Bener	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	2	2	28.650.000	2	32.736.000	2	28.650.000	2	29.103.000	2	29.562.000	10			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	204	204	6.550.000	204	10.536.000	204	6.550.000	204	6.550.000	204	6.550.000	1.020			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	22.100.000	1	22.200.000	1	22.100.000	1	22.553.000	1	23.012.000	5			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	61.645.000	100	165.854.000	100	61.645.000	100	62.619.000	100	63.608.000	100	SEKSI PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bener	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	9	6	61.645.000	10	165.854.000	6	61.645.000	6	62.619.000	6	63.608.000	34			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	0	0	1	10.800.000	0	0	1	5.194.000	1	6.183.000	3			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	3	3	7.310.000	3	35.500.000	3	7.310.000	3	20.375.000	3	20.375.000	15			
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	2	2	37.050.000	2	50.000.000	2	37.050.000	2	37.050.000	2	37.050.000	10			
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	1	17.285.000	1	37.554.000	1	17.285.000	0	0	0	0	3			
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	0	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	0	0	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
7.01.06.2.01.0019	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah DokumenKoordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Dokumen	2	0	0	1	24.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
Jumlah							2.288.735.151		2.446.922.000		2.288.735.000		2.292.114.000		2.295.544.000				

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas)	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi intensifikasi PBB	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		

			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi keagamaan	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		

			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Forkopimcam	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP)	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades dan Sekdes	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pilkades	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diarahkan pada Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa; Peningkatan Partisipasi masyarakat meliputi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bener. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Dimana mereka ikut ambil bagian dalam kegiatan persebut. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan keluharan juga diarahkan pada Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan; Gerakan sayang ibu dan anak, Kecamatan layak Anak, Pembinaan Karang Taruna, Pembinaan BUMDes/BUMDesma, Pembinaan dan Fasilitasi UMKM serta Pendampingan Koperasi Merah Putih dimana Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAK Asasi Manusia (HAM), Membangun Desa dari Bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas serta Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum diarahkan pada Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan; Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. Sedangkan Program Delegasi Provinsi yang didukung yaitu Mendorong Penguatan Forum kerukunan antar umat beragama

dan forum pembauran Kebangsaan. Serta Mendukung Program Pitulungan Bupati Purworejo Religius Masyarakate.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diarahkan pada Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Penyelenggaraan HUT RI serta Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan. Program ini mendukung Program Nasional Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAK Asasi Manusia (HAM) serta mendukung Program Delegasi Provinsi Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa diarahkan pada Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa; Penyelenggaraan fasilitasi Penyusunan APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP. Program ini mendukung Program Nasional Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan. Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga diarahkan pada Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Sekretaris Desa; Kegiatan Konferensi Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Dimana program ini mendukung Delegasi Provinsi Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa.

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan

pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bener sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Bener

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Tujuan dan sasaran PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	88,40	88,45	88,50	88,55	88,60	88,65	Tujuan dan sasaran PD

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bener yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bener Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Bener, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bener setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Rencana Strategis Kecamatan Bener sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bener setiap tahun.
b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c) Camat Bener wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Bener dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005